



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2019





GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 1¹² TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019;
- b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan Povinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
10. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat RAPBN adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana tahunan keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
14. Plafon anggaran adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah setelah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang disamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
17. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari satuan kerja perangkat daerah terhadap

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta realisasi rencana kerja selama 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VIII PENUTUP

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai :

- a. pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2019;
- b. pedoman penyusunan RKA APBD dan RKA Kementerian/Lembaga APBD bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; dan
- c. acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2019.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD dan RAPBN Tahun 2019 :

- a. pemerintah daerah menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara di DPRD;
- b. perangkat daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan RKPD Tahun 2019 sebagai bahan pembahasan RKA dengan Kementerian/Lembaga dan DPRD.

Pasal 5

Pemerintah Provinsi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menelaah kesesuaian RKA Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan RKPD Tahun 2019.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Program Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 29 Juni 2018

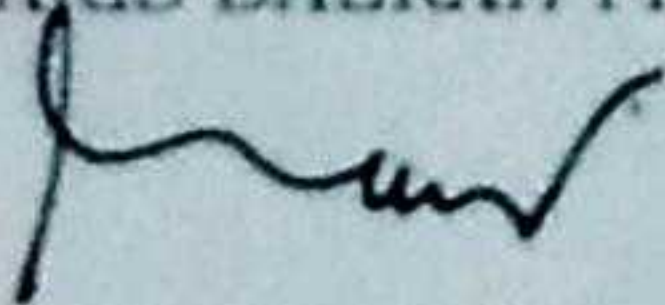
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal, 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,



H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 12

SAMBUTAN GUBERNUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

SAMBUTAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT	i
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018	iii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-4
1.4. Maksud dan Tujuan	I-10
1.5. Sistematika Penyusunan RKPD	I-11
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD 2017 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	II-1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-8
3. Aspek Pelayanan Umum	II-16
2.2 Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2017.....	II-306
2.3 Review terhadap Capaian Indikator RPJMD 2013-2018.....	II-462
2.4 Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II-463
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global	III-1
3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional	III-2
3.1.3 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah	III-2
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III-10
3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	III-10

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah.....	III-12
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah	III-13
3.2.4. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III-14
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-1
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019	IV-23
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA.....	V-1
5.1 Percepatan penurunan angka kemiskinan berbasis desa	V-1
5.2 Peningkatan Pelayanan Dasar	V-17
5.3 Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produksi.....	V-18
5.4 Pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata	V-19
5.5 Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.....	V-24
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prioritas Nasional Dan Program Prioritas Nasional Tahun 2019	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.1 Wilayah serta Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.2 Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.3 Keadaan Cuaca Rata-Rata di Provinsi NTB Tahun 2014-2015	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2013-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.5 Distribusi Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2013-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.8 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.9 Nilai PDRB Provinsi NTB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 menurut 17 Sektor tahun 2013-2017 (Milyar Rp)	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.10 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.11 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 dengan dan Tanpa Pertambahan Bijih logam menurut sektor pada tahun 2014 -2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.12 Pendapatan Perkapita NTB ADHB Tahun 2014-2017 (Rp. 000.000)	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.13 Target Penurunan Kemiskinan Kabupaten/Kota Se-NTB	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.14 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.15 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Buta Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah (DO), Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.18 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SM (SMA,MA,SMK) Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2011/2012 s.d 2015/2016	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.19 Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012/2013 s.d 2015/2016	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.20 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.21 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.22 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SM (SMA, MA, SMK) Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.23 Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.24 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2011-2017 di Provinsi NTB	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.25 Angka Melanjutkan dari Lulusan SD/MI ke SMP/MTs Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.26 Angka Melanjutkan dari Lulusan SMP/MTs ke SM (SMA, SMK, MA) Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.27 Angka Putus Sekolah (DO) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.28 Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMA dan SMK yang Bersumber dari APBN Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.

Tabel 2.29 Pemberian Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.30 Persentase Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 tahun KeatasII-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.31 Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk 15+ (BPS, Publikasi IPM) Provinsi NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.32 Jumlah paket A, B, C , KD dan KM Tahun 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.33 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Yang Telah Menerapkan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal di Provinsi NTB Tahun 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.34 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2016 – 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.35 Capaian Indikator Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Dalam RPJMD NTB Tahun 2017.....	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.36 Kematian Bayi Tahun 2015 - 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.37 Jumlah Kematian Ibu Dibandingkan Dengan Jumlah Kelahiran Hidup Per Kabupaten/Kota Tahun 2015- 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.38 Cakupan Persalinan oleh Tenaga kesehatan Menurut Kabupaten/Kota s.d. Desember 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.39 Gambaran Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Provinsi NTB Tahun 2017.....	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.40 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi NTB Tahun 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.41 Dana <i>Sharing</i> Jamkesmas Provinsi Tahun 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.42 Jumlah <i>Buffer Stok</i> MP-ASI yang tersedia per Kabupaten/Kota Tahun 2015 - 2017.....	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.43 Cakupan Jamban Keluarga Per Kabupaten/Kota Se Provinsi NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.44 Indikator Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.45 Jumlah Pelayanan Laboratorium Berdasarkan Jumlah Parameter yang diperiksa Masing-masing Bidang Pemeriksaan pada BLKM Pulau Lombok Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.46 Capaian Kinerja Indikator Program BLKM Pulau Lombok Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.47 Jumlah Siswa Reguler dan Non Regular Akademi Perawat Provinsi NTB Tahun Ajaran 2016/2017 – 2017/2018.....	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.48 Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan dan Non Pelatihan di Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Mataram Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.49 Cakupan Rawat Jalan dan Rawat Inap Berdasarkan Cara Pembayaran di RSUD Provinsi NTB Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.50 10 Penyakit Terbanyak Kunjungan Pasien Rawat Jalan di RSUD Provinsi NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.51 10 Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Inap di RSUD Provinsi NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.52 Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Instalasi Rawat Darurat RSUD Provinsi NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.53 Kerjasama RSUP di Bidang Pendidikan Tahun 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.54 Kerjasama RSUP di Bidang Pelayanan PenunjangII-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.55 Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Provinsi NTB tahun 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.56 Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSJ Mutiara Sukma Provinsi berdasarkan Cara Bayar Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.57 Cakupan Pelayanan Pasien Napza Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.58 Jumlah Pasien Pasung Hasil Penjangkauan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2016 - 2017	II-Error! Bookmark not defined.

Tabel 2.59 Sepuluh Besar Penyakit yang ditangani di RSJ Mutiara Sukma NTB	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.60 Cakupan Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2016 – 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.61 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.62 Kondisi Jalan di Provinsi NTB (kondisi 31 Desember 2017)	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.63 Data Panjang Jalan Provinsi di Kabupaten/Kota se-NTB	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.64 Cakupan Layanan Air Bersih dan Sanitasi Tahun 2016 – 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.65 Capaian Indikator Kinerja Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.66 Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB Tahun 2016 – 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.67 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.68 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.69 Penanganan Pelanggaran Perda Provinsi NTB dan Kebijakan Daerah Lainnya Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.70 Perkembangan Data Capaian Kinerja berdasarkan RPJMD NTB 2013-2018	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.71 Data PMKS Yang Diberikan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.72 Data Penanganan Korban <i>Trafficking</i> Melalui Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Tahun 2012-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.73 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.74 Rekapitulasi Perkembangan Jumlah TKI Provinsi NTB Tahun 2015-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.75 Rekapitulasi Data <i>Remittance</i> TKI Provinsi NTB Tahun 2015-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.76 Perkembangan Penanganan TKI Bermasalah di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.77 Perkembangan Jumlah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Provinsi NTB Menurut Kabupaten Kota Tahun 2015-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.78 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Provinsi NTB Menurut Kewarganegaraan Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.79 Data besaran UMP/UMK dan prosentase kenaikan di Provinsi NTB Tahun 2018	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.80 Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.81 Pencapaian Indikator SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.82 Capaian Indikator Pola Pangan Harapan (PPH)	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.83 Pola Pangan Harapan Konsumsi Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.84 Kelompok Wanita Tani Penerima Manfaat Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.85 Penerima Bantuan Hibah Pemanfaatan Pekarangan dari dana APBDP Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.86 Nama Sekolah pelaksana Integrasi Materi Pembelajaran Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.87 Cadangan Pangan Provinsi NTB 2012-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.88 Nama Kelompok Penerima Bantuan Pengisian Lumbung Pangan Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.

Tabel 2.89 Nama Kelompok Penerima Bantuan Pembangunan Lumbung Pangan Tahun 2017.....	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.90 Data Arus Keluar Masuk Komoditas Pangan Strategis Tahun 2014-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.91 Hasil Pengujian Residu Pestisida Tahun 2017 ..	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.92 Hasil Uji Residu di Pasar Modern.....	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.93 Lokasi Penilaian Sertifikasi Prima 3 Tahun 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.94 Rekapitulasi Tanah Terindikasi Terlantar Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) s.d Tahun 2016	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.95 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2014-2017.....	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.96 Indeks Kualitas Air Provinsi NTB Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.97 Hasil Parameter E Coli dan Total Coli pada Periode Pemantauan III-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.98 Hasil Parameter E Coli dan Total Coli pada Periode Pemantauan IIII-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.99 Hasil Pemantauan Kualitas Udara di 10 kabupaten/kota se-NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.100 Jumlah Titik Mata Air Terlindungi yang Teridentifikasi Melalui Kegiatan Perlindungan Mata Air Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.101 Daftar Peserta Lomba PERMATA Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.102 Jumlah Titik Mata Air yang Teridentifikasi Melalui Kegiatan Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.103 Perlindungan Mata Air Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.104 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat s/d Desember 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 105 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB Tahun 2013 – 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.106 Tingkat Perkembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Lumbung Bersaing Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.107 Capaian Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.108 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut Tahun 2017.....	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.109 Data Bongkar Muat Barang di Provinsi NTB Tahun 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.110 Rute Angkutan Darat Perintis.....	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.111 Trayek/Rute Angkutan Laut Perintis yang melayani Pelabuhan di Provinsi NTB	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.112 <i>Load Factor</i> AKDP di Provinsi NTB.....	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.113 Jumlah Kunjungan yang Mengakses Layanan NTB Online Tahun 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.114 Trafik Akses Sistem Informasi secara Online PPID Provinsi NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.115 Penerima Penghargaan Jambore Kampung Media Tahun 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.116 Perkembangan Koperasi Berkualitas Provinsi NTB Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.117 Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syari'ah Provinsi NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.118 Realisasi Penumbuhan Wirausaha Baru s/d Tahun 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.119 Laju Investasi di Provinsi NTB Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.120 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.121 Jenis Perizinan dan Waktu Penyelesaian Perizinan Tahun 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2. 122 Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.123 Pelaksanaan Sub Urusan Bidang Penanaman Modal Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.124 Perolehan Medali Event Olahraga Tahun 2017II-Error! Bookmark not defined.	

Tabel 2.125 PA/KPA yang telah memiliki admin SiRUP PA/KPA (telah/belum melakukan peng-RUP)	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.126 Pranata Adat Yang Terbentuk dari Tahun 2014-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.127 Pranata Adat yang terbentuk di Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.128 Kalender kegiatan UPT Taman Budaya Tahun 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.129 Pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2013-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.130 Kalender Kegiatan Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.131 Upaya Pengelolaan Arsip Tahun 2016 - 2017. II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.132 Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi NTBII-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.133 Produksi Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.134 Perkembangan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Provinsi NTB Tahun 2016–2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.135 Realisasi Produksi Rumput Laut Provinsi NTB Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.136 Target dan Realisasi Indeks Nilai Tukar Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.137 Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI) Provinsi NTB Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.138 Capaian Indeks Nilai Tukar Nelayan Provinsi NTB Tahun TA. 2016 - 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.139 Tingkat Konsumsi Ikan Provinsi NTB Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.140 Capaian Produksi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.141 Perkembangan Capaian Produksi Garam Provinsi NTB Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.142 Realisasi Penerimaan PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.143 Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.144 Event dan Promosi Pariwisata Tahun 2017 II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.145 Capaian Kinerja Pengembangan Agribisnis Jagung (PAJ) Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.146 Produksi Komoditas Strategis Tanaman Pangan di Provinsi NTB Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.147 Produksi Komoditas Strategis Tanaman Hortikultura di Provinsi NTB Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.148 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.149 Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi NTB Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.150 Hasil Sertifikasi Luas Lulus Lapangan Tanaman Pangan Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2016-2017.....	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.151 Luas Serangan OPT Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.152 Perbanyakan Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.153 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan di Provinsi NTB Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.154 Luas Areal, Produksi dan Jumlah Petani Pada Komoditi Tembakau Tahun 2016 - 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.155 Populasi Ternak di Provinsi NTB Tahun 2016 - 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.156 Capaian Kinerja Subsektor Peternakan (ternak sapi) Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.157 Pemotongan Ternak Betina Produktif Tahun 2015 s.d 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.158 Produksi Daging di Provinsi NTB Tahun 2016-2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.159 Ternak Bibit dan Ternak Potong ke Luar dari Provinsi NTB Tahun 2016 - 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.160 Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) di NTB Tahun 2016 – 2017II-Error! Bookmark not defined.	
Tabel 2.161 Capaian Program Strategis Bidang Kehutanan Tahun 2017II-Error! Bookmark not defined.	

Tabel 2.162 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2016 s/d 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.163 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2017...	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.164 Rencana Pembangunan Pembangkit di Provinsi NTB	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.165 Daftar PLT Hidro yang Sudah COD (<i>Comercial Operation Date</i>)	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.166 Daftar PLT Hidro yang Belum COD (<i>Comercial Operation Date</i>)	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.167 Daftar PLTS Eksisting	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.168 Daftar pengembang PLTS skema <i>Bussines to Bussines</i>	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.169 Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai 31 Desember 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.170 Target Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.171 Perbandingan Penyaluran Paket Sembako Tahun 2016 dengan Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.172 Total Nilai Kontrak Komoditi Pasar Lelang (<i>Agro Forward</i>)	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.173 Nama Pelaku Usaha NTB dan Komoditi yang ditawarkan Pada Kegiatan Misi Dagang di Provinsi Jawa Tengah	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.174 Jumlah Komoditi dan Nilai Transaksi Pelaku Usaha dari Provinsi NTB Pada Kegiatan Misi Dagang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.175 Nama Pelaku Usaha NTB dan Komoditi yang ditawarkan Pada Kegiatan Misi Dagang di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.176 Jumlah Komoditi dan Nilai Transaksi Pelaku Usaha dari Provinsi NTB Pada Kegiatan Misi Dagang di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.177 Jumlah Kasus dan Metode Penyelesaian oleh BPSK Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.178 Penanganan Pengaduan Konsumen/Masyarakat Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.179 Komoditas dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 180 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.181 Pelabuhan Muat dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.182 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.183 Pendaftaran HaKI Kategori Desain Industri Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.184 Pendaftaran HKI Kategori Hak Cipta Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.185 Perkembangan Industri Formal s.d Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.186 Perkembangan Industri Non Formal Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 187 Perkembangan Industri Berdasarkan Jenis Kelompok Industri Sampai dengan Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 188 Jumlah Transmigran Keluar Provinsi dan Tujuan Daerah Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.189 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.190 Rekapitulasi Aduan Pelayanan Publik yang ditujukan ke OPD Tujuan Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 191 Hasil penilaian LKJIP Pemerintah Provinsi Tahun 2015-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.192 Target dan Realisasi Legislasi Daerah Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 193 Jumlah Perda/Perbup/Perwal Yang difasilitasi dan dievaluasi Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.194 Penyelesaian Sengketa Hukum (Perkara) Provinsi NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.195 Pelaksanaan Paten di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan akhir tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.196 Fasilitasi Pengganti Antar Waktu Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.197 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.

Tabel 2.198 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi NTB dan Nasional Tahun 2014 - 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.199 PDRB dan Laju Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 dan 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.200 Perusahaan Daerah dan BUMD di Provinsi NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.201 Deviden Dari Perusahaan Daerah dan BUMD Provinsi NTB Tahun 2015-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.202 Realisasi Kegiatan Lelang ULP Provinsi NTB Tahun 2016 dan 2017 Sumber dana APBD Provinsi NTB	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.203 Realisasi Kegiatan Lelang ULP Provinsi NTB Tahun 2016 dan 2017 Sumber Dana APBN Provinsi NTB.....	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.204 <i>Event</i> Nasional dan Internasional di NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.205 Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Dalam APBD BPKAD Provinsi NTB selaku SKPKD Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.206 Perkembangan Belanja Daerah Dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.207 Penetapan APBD Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.208 Penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2016 - 2018	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.209 Opini BK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 - 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.210 Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten/Kota TA. 2013-2016	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.211 Rekapitulasi Penyerahan Aset P3D Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.212 Data Usulan dan Penghapusan yang Telah Dilaksanakan oleh BPKAD Pada Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.213 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 dengan Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RPJMD Tahun 2013 - 2018	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.214 Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.215 Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.216 Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.217 Penerimaan PKB dan BBNKB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.218 Target dan Realisasi ASN yang Mengikuti Uji Kompetensi	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.219 Jenis Diklat dan Jumlah Widyaiswara yang Mengikutinya Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.220 Capaian Penyelenggaraan Diklat Dasar/Manajerial Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.221 Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.222: Evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.223: Permasalahan dan rekomendasi Pelaksanaan RKPD	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 2.224 Capaian Indikator RPJMD 2013-2018 untuk tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional	III-Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.2 PDRB Tahun 2015-2017 (Milyar Rupiah)	III-Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010) dan Distribusi PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2015-2017 (Persen)	III-Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)	III-Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran	III-Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD Provinsi NTB 2013-2017	III-Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.7 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2019	III-Error! Bookmark not defined.
Tabel 3.8 Proyeksi Belanja Tidak Langsung Daerah Tahun 2019	III-Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.1 Indikator Pembangunan Tahun 2019	IV-Error! Bookmark not defined.
Tabel 4.2 Arah Pembangunan Provinsi Ntb Tahun 2018-2023	IV-Error! Bookmark not defined.

Tabel 4.3 Target Pembangunan Daerah Tahun 2019 IV-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 4.4 Prioritas Pembangunan Daerah IV-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 5.1 Sebaran Desa Miskin Yang Akan Diintervensi Di 10 Kabupaten/Kota Provinsi
Ntb V-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 5.2 Sebaran Desa Miskin Yang Akan Diintervensi Oleh Provinsi NTB-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 5.3 Target Tingkat Kemiskinan (%).....V-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 5.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....V-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 5.5 Target Tahun 2019.....V-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 5.6 Target Tingkat Kemantapan Jalan (%) V-**Error! Bookmark not defined.**
Tabel 5.7 Sebaran Lahan Kritis pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB-**Error! Bookmark not defined.**
No table of figures entries found.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan	I-Error! Bookmark not defined.
Gambar 1.2 Aplikasi e-Planning (entebePlan)	I-Error! Bookmark not defined.
Gambar 1.3 Bagan Alir entebePlan	I-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.1 Inflasi Tahun 2015-2017 (Persen)	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.2 Pertumbuhan y to y PDRB Dengan dan Tanpa Pertambangan Bijih logam	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.3 Pertumbuhan q to q PDRB Dengan Dan Tanpa Pertambangan Bijih logam	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.4 Paritas Daya Beli Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2011-2013	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.5 Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin 2012-2017.	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.6 Indeks daya saing kabupaten/Kota se-NTB....	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Provinsi NTB	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.8 Perkembangan Penurunan Kasus Kematian Bayi Tahun 2015-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.9 Penanganan Kesehatan Ibu Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.10 Penanganan Kesehatan Anak Tahun 2017 ...	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.11 Capaian Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Menurut Strata Provinsi NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.12 Kecenderungan Prevalensi Kurang Gizi di Provinsi NTB	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.13 Prevalensi Berat Kurang (Underweight) Menurut Indeks Berat Badan menurut Umur Tahun 2016-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.14 Persentase Cakupan Jamban Keluarga Provinsi NTB Tahun 2013-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.15 Persentase KK yang Memiliki Rumah Sehat Tahun 2015 – 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.16 Konsumsi Beras dan Umbi-umbian 2014-2017	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.17 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Periode Januari-Desember 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.18 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Menurut Sektor Januari-Desember 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.19 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Provinsi NTB	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.20 Komposisi Realisasi Produksi Ragam Olahan Hasil Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.21 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.22 Kontribusi Komponen PAD Terhadap Realisasi PAD Tahun 2017	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 2.23 Perkembangan Penyampaian Laporan LHKPN	II-Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Global	III-Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat	III-Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.3 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat	III-Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.4 Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2017	III-Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.5 Angka Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008-2017	III-Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.6 Nilai Indeks Wiliamson (Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016....	III-Error! Bookmark not defined.
Gambar 3.7 Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2017	III-Error! Bookmark not defined.
Gambar 4.1 Strategi Pembangunan Nasional.....	IV-Error! Bookmark not defined.
Gambar 5.1 Peta sebaran desa miskin yang akan diintervensi pada tahun 2019 di 10 Kabupaten/kota Provinsi NTB	V-Error! Bookmark not defined.
Gambar 5.2 Kerangka Percepatan Penurunan Kemiskinan di NTB	V-Error! Bookmark not defined.
Gambar 5.3 Tingkat Kemantapan Jalan Pulau Lombok.....	V-Error! Bookmark not defined.
Gambar 5.4 Pengembangan Bendungan	V-Error! Bookmark not defined.
Gambar 5.5 Peta Sebaran Daerah Rawan Bencana Pada 10 Kabupaten/Kota Di Provinsi Ntb.....	V-Error! Bookmark not defined.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan pembangunan sebagaimana tercantum pada Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal inilah yang dijadikan acuan dalam merencanakan pembangunan di Indonesia, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup daerah. Oleh karena itu, tujuan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam lingkup kerangka NKRI berpedoman pada Pembukaan UUD 1945 tersebut.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 3 ayat (2) mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD tersebut. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 diharapkan dapat menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat Nusa Tenggara Barat baik dalam skala nasional maupun regional.

Pasca penyelesaian pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 merupakan perencanaan tahun pertama periode pembangunan tahun 2018-2023. Pasal 147 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan RKPD bagi Daerah yang belum memiliki RPJMD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

Adapun visi pembangunan jangka panjang Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 adalah :

“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Maju dan Sejahtera”

Selanjutnya periode jangka panjang 2005-2025 tersebut dibagi dalam tahapan jangka menengah dengan periode 5 (lima) tahunan. Dalam masa 2018-2023 adalah periode pembangunan jangka menengah tahap ke-4, merupakan periode yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kemajuan di bidang ekonomi yang ditopang oleh ketahanan pangan dan berkembangnya agroindustri terutama pada beberapa komoditi unggulan sejalan kemajuan di dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga kualitas dan fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.

Seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 diarahkan untuk mewujudkan visi misi pembangunan serta mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah tahap ke-4 tersebut. Selain itu, pelaksanaan agenda pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam RKP Tahun 2019, juga menjadi acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019.

Dalam menyusun RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat memilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD. Perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, dimana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkembangkan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengacu pada Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa RKPD disusun dengan tahapan yaitu: persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan Rancangan RKP 2019, penyusunan RKPD Tahun 2019 juga dilakukan melalui peningkatan kualitas kebijakan *Money Follow Priority Programs* melalui pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Penguatan implementasi *Money Follow Priority Programs* dilakukan dengan memperhatikan pada (1) pengendalian perencanaan, (2) perkuatan perencanaan dan penganggaran, (3) perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan (4) penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, diharapkan dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi

- Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26);
 17. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Program Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 2).
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
 19. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi ranperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
 20. Permendagri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2019.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

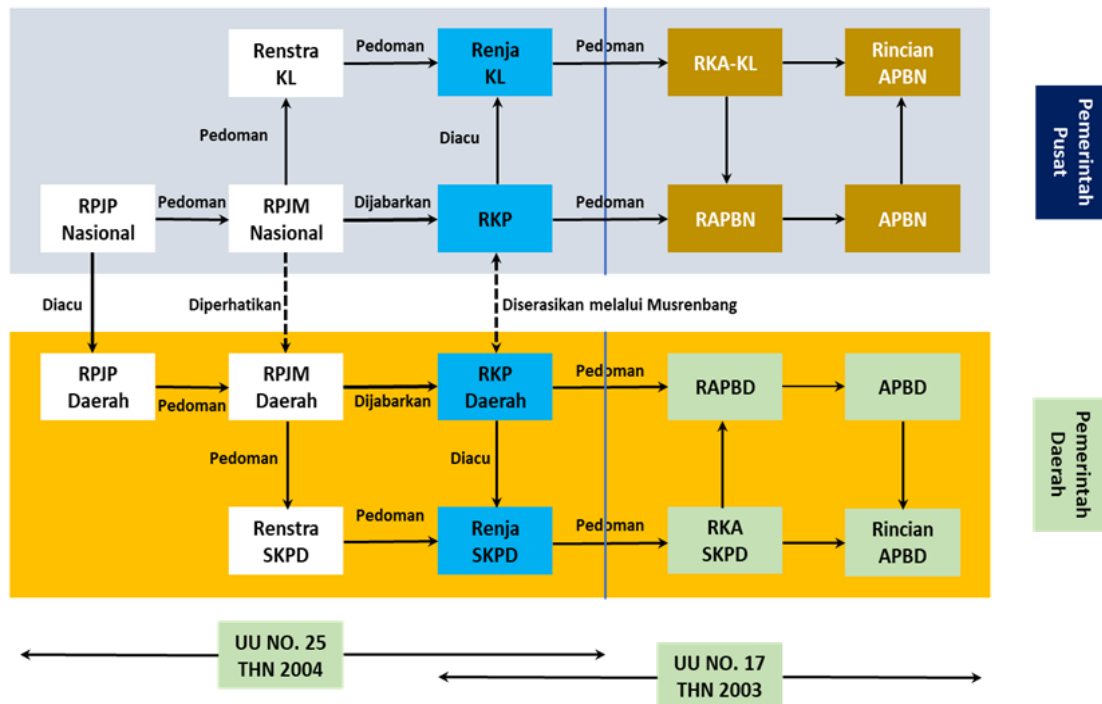
Secara umum, keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dan sistem keuangan negara telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Posisi dokumen RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan merupakan penjabaran RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. RKPD tersebut menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja perangkat daerah, dimana Rencana Kerja perangkat daerah akan menjadi bahan masuk dalam finalisasi RKPD. Dalam hubungannya dengan RKP, RKPD diserasikan dengan RKP melalui forum Musrenbang Nasional.

Dalam menyusun RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015-2019 serta Renstra masing-masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Selain itu dalam konteks Daerah, dokumen RKPD Tahun 2019 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan jangka panjang daerah sesuai RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 dan dijabarkan melalui penetapan program prioritas. Hal ini penting untuk dilakukan, mengingat RPJMD 2013-2018 telah berakhir dan membutuhkan transisi sebelum RPJMD berikutnya yang menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dalam hal tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Program Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 untuk menjembatani antara masa RPJMD 2013-2018 dan RPJMD 2018-2023, sehingga kesinambungan pembangunan tetap terjaga.

Selanjutnya dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS, yang merupakan dasar untuk penyusunan RKA-SKPD Tahun 2019 dan selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBD Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. Dengan demikian, dokumen RKPD Provinsi Nusa

Tenggara Barat Tahun 2019 menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya dan menjadi bagian dalam proses penyusunan APBD Tahun 2019.

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004
: UU Nomor 17 Tahun 2003

1.3.1 RKPD Tahun 2019 dan RKP Tahun 2019

Keterkaitan RKPD Tahun 2019 dan RKP Tahun 2019 menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional Nawa Cita yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019, terutama dalam perwujudan :

- Cita 1: Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Cita 4: Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8: Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selanjutnya dalam RKP Tahun 2019, 9 (sembilan) agenda tersebut pada Rancangan RKP Tahun 2019 diterjemahkan ke dalam 5 (lima) prioritas nasional dan 24 (dua puluh empat) program prioritas sebagai berikut:

Tabel 1.1 Prioritas Nasional Dan Program Prioritas Nasional Tahun 2019

No	Prioritas Nasional	No	Program Prioritas		
1	Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar	1	Percepatan pengurangan kemiskinan		
		2	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat		
		3	Pemerataan layanan pendidikan berkualitas		
		4	Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak		
		5	Peningkatan tata kelola layanan dasar		
2	Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman	6	Peningkatan konektivitas dan Teknologi Informasi dan Komunikasi		
		7	Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat		
		8	Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa		
		9	Penanggulangan bencana		
		10	Peningkatan sistem logistik		
3	Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa	11	Peningkatan ekspor dan nilai tambah produk pertanian		

No	Prioritas Nasional	No	Program Prioritas		
	produktif				
		12	Percepatan peningkatan ekspor dan nilai tambah industri pengolahan		
		13	Peningkatan nilai tambah/efisiensi jasa produktif		
		14	Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja		
		15	Pengembangan Iptek dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas		
4	Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air	16	Peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi		
		17	Peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan		
		18	Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air		
		19	Peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan		
5	Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu	20	Kamtibmas dan keamanan siber		
		21	Kesuksesan pemilu		
		22	Pertahanan wilayah nasional		
		23	Kepastian hukum dan reformasi birokrasi		
		24	Efektivitas diplomasi		

Sumber : Bappenas RI, 2018

Selain itu, arah kebijakan Kementerian/Lembaga yang tercantum dalam Rencana strategis sebagai penjabaran RPJMN Tahun 2015-2019 juga menjadi salah satu acuan dalam penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. Dengan demikian, dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 merupakan dokumen yang integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Adapun Pembangunan Nasional Tahun 2019 dirancang dalam upaya mendorong keberhasilan pembangunan nasional yang merupakan perwujudan keberhasilan kolektif pemerintah dan partisipasi masyarakat. Tahun 2019 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019 dan sekaligus tahun penutup Kabinet Kerja dalam mengupayakan pencapaian visi pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN. Untuk itu tema RKP Tahun 2019 adalah :

“Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas”

1.3.2RKPD Tahun 2019 dan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahun pertama dari periode keempat (Periode 2018-2023) dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 untuk mewujudkan visi :

“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Maju dan Sejahtera”

Visi tersebut di atas selanjutnya diimplementasikan melalui 5 (lima) misi, yaitu :

- Misi 1: Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran;
- Misi 2: Mewujudkan masyarakat sejahtera;
- Misi 3: Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- Misi 4: Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah;
- Misi 5: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Tujuan pembangunan pada periode ini adalah untuk memantapkan prestasi hasil pembangunan yang telah diperoleh pada RPJMD periode 2013-2018 dengan fokus diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kemajuan di bidang ekonomi yang ditopang oleh ketahanan pangan dan berkembangnya agroindustri terutama pada beberapa komoditi unggulan sejalan kemajuan di dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga kualitas dan fungsi lingkungan hidup tetap terjaga.

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 in serta dengan memperhatikan dan penetapan tema RKP Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengintegrasikan tema RKPD Tahun 2019 menjadi :

“Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Untuk Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan”

1.3.3RKPD, Renja Perangkat Daerah dan KUA-PPAS Tahun 2019

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 memuat Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang menggambarkan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan Tahun 2019, hasil penelaahan hasil reses DPRD, hasil Forum Perangkat Daerah, Sarasehan dan Musrenbang, serta penelaahan usulan langsung dari masyarakat yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Disamping itu, mengingat masa RPJMD 2013-2018 telah berakhir dan sementara RPJMD berikutnya belum ditetapkan dan guna menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun program indikatif perangkat daerah yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Program Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. Peraturan Gubernur dimaksud mensinkronisasikan antara Nawa Cita dan Prioritas Nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025, Jenis

Urusan Pemerintahan, Program Prioritas Perangkat Daerah dan Indikator Program (*Outcome*) yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 menjadi acuan dalam proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun 2019 untuk dibahas dan disepakati antara Gubernur dengan Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran seluruh kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Gambar 1.2 Program Prioritas Organisasi Perangkat Daerah

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG PROGRAM INDIKATIF PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PROGRAM PRIORITAS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH										
No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	Indikator Kinerja (Impact)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Program Prioritas OPD	Indikator Program (Outcome)	Satuan Outcome	OPD Penanggungjawab
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara	1. Meningkatkan Kualitas Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di luar negeri; 2. Meminimalisasi Dampak Globalisasi; dan 3. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan.	1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang dinamis, berkeadilan, aman, tertib, dan harmonis	Angka kriminalitas	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat		Satuan Polisi Pamong Praja
							Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)		Satuan Polisi Pamong Praja
							Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penegakan PERDA	Persen	Satuan Polisi Pamong Praja
					Angka kriminalitas	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Peningkatan Penganggulan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Persentase siswa yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS, PMS dan Narkoba		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Program Penguatan Kelembagaan PUG dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Angka kriminalitas	Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Program peningkatan pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Sumber : Lampiran Pergub No. 2 Tahun 2018

1.3.4 Penggunaan Sistem Informasi

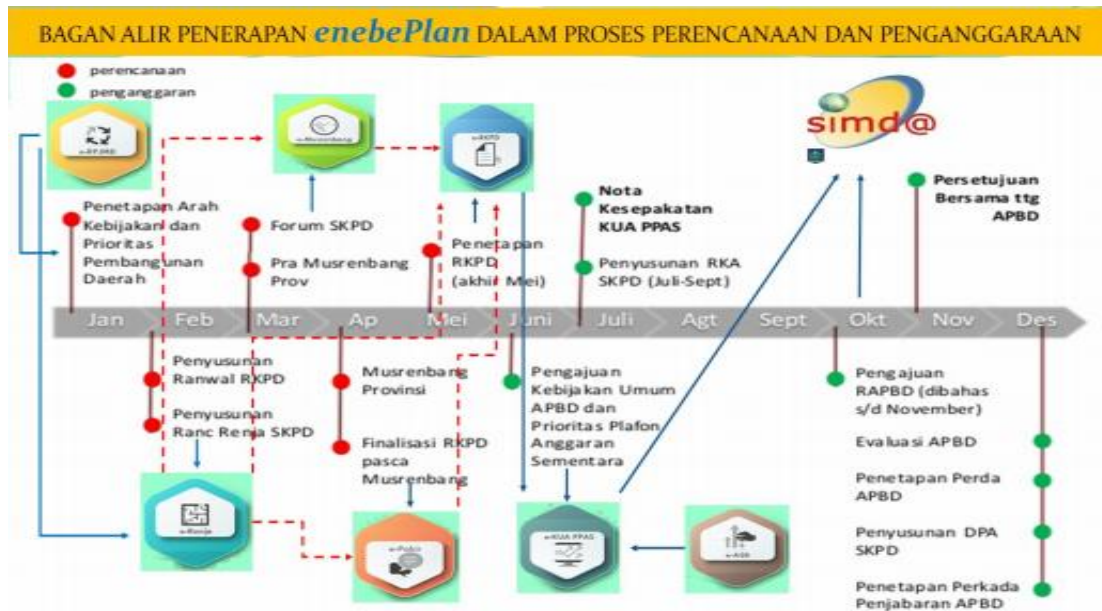
Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengaplikasikan sistem informasi *e-planning (entebePlan)*.

Gambar 1.2 Aplikasi e-Planning (ENTEBEPLAN)



Sumber : <http://e-planning.ntbprov.go.id/>

Gambar 1.3 Bagan Alir ENTEBEPLAN



Sumber : Bappeda Provinsi NTB

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memuat arah kebijakan, sasaran, prioritas dan program pembangunan serta kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- (1). Menyediakan satu acuan bagi DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, seluruh Kepala Perangkat Daerah, di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2019;
- (2). Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA, rancangan PPAS Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019;
- (3). Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Perjanjian Kinerja;
- (4). Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, dan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat;
- (5). Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan;
- (6). Menyediakan tolak ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat; serta menyusun LKPJ, LPPD dan LKPD;
- (7). Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
- (8). Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- (9). Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pelaku usaha swasta dan masyarakat; dan antar Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah daerah lainnya;
- (10). Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2019, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, hasil evaluasi RKPD tahun lalu dan tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2019 berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi hasil RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi masalah ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VIII PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 diperlukan sinergitas yang mantap di jajaran pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019, memerlukan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2017, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan sampai tahun terakhir yang diselaraskan dengan kegiatan pada tahun berjalan. Hal ini sebagai dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan yang diikuti dengan program, kegiatan serta penganggaran.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Aspek Geografi dan Demografi

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 20.153,15 km² (40,87%). Sedangkan luas perairan laut mencapai 29.159,04 km² (59,13%), dengan panjang garis pantai sekitar 2.333 Km. Adapun batas wilayah administrasi provinsi NTB sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Laut Flores
- Sebelah Timur : Selat Sape dan Provinsi NTT
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Selat Lombok dan Provinsi Bali

Wilayah administrasi Provinsi NTB terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota, 116 wilayah kecamatan dan 1.141 Desa/Kelurahan. Kabupaten Sumbawa dengan wilayah terluas 6.643,98 Km² memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yaitu 24 Kecamatan, sedangkan Kota Bima dan Kabupaten Lombok Utara merupakan Kabupaten dengan jumlah kecamatan terkecil (5 Kecamatan). Jumlah Desa/Kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Lombok Timur yaitu 254 Desa/Kelurahan, sementara kabupaten dengan jumlah Desa/Kelurahan terkecil adalah Kabupaten Lombok Utara yang memiliki 33 Desa/Kelurahan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1 Wilayah serta Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	LUAS WILAYAH (KM2)	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	PERSENTASE (%)
1	Lombok Barat	1.053,87	10	122	5,23
2	Lombok Tengah	1.208,40	12	139	6,00
3	Lombok Timur	1.605,55	20	254	7,97
4	Lombok Utara	809,53	5	33	4,02
9	Kota Mataram	61,30	6	50	0,30
	Pulau Lombok	4.738,65	53	598	23,52
8	Sumbawa Barat	1.849,02	8	64	9,17
5	Sumbawa	6,643,98	24	165	32,97
6	Dompu	2.324,60	8	81	11,53
7	Bima	4.389,40	18	191	21,78
10	Kota Bima	207,50	5	38	1,03
	Pulau Sumbawa	15.414,50	63	543	76,48
	Jumlah	20.153,15	116	1.137	100,00

Sumber : DPMPD Dukcapil Provinsi NTB, 2017

b. Letak dan Kondisi Geografis

Nusa Tenggara Barat secara geografis terletak pada posisi 08° 10' - 09° 05' Lintang Selatan dan 115° 46' - 119° 05' Bujur Timur. Dilihat dari letak geografis, Provinsi NTB memiliki kedudukan yang sangat strategis karena terletak pada lintas perhubungan Banda Aceh - Kupang, Selat Lombok di sebelah barat dan Selat Makasar di sebelah utara merupakan jalur perhubungan laut strategis yang semakin ramai, dari arah Timur Tengah merupakan lalu lintas bahan bakar minyak dan dari Australia berupa mineral logam ke Asia Pasifik. Selain itu juga wilayah NTB adalah lintas perdagangan ke Kawasan Timur Indonesia (Surabaya - Makasar) dan terletak pada daerah lintas wisata dunia yang terkenal, Bali-Komodo-Tanah Toraja sehingga dari sisi ekonomi sangat menguntungkan.

Kondisi geografi Provinsi NTB terbagi kedalam beberapa gugus pulau, terdiri dari dua pulau besar yaitu Pulau Lombok dengan luas mencapai 4.738,65 km² (23,52%) dan Pulau Sumbawa dengan luas mencapai 15.414,50 km² (76,48%), serta di kelilingi oleh 278 pulau-pulau kecil. Beberapa pulau kecil tersebut merupakan merupakan daerah obyek wisata yaitu: Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air, Gili Gede, Gili Lontar, Pulau Bungin, Pulau Moyo dan beberapa gugusan pulau lainnya.

Topografi

Topografi wilayah NTB sangat bervariasi, di Pulau Lombok bagian utara terdiri atas pegunungan dengan ketinggian antara 0 - 3.726 mdpl, di bagian tengah merupakan dataran rendah yang subur berupa daerah persawahan dengan ketersediaan air yang cukup sepanjang tahun, serta dibagian selatan merupakan bagian yang berbukit-bukit dan kering yang sebagian berupa sawah tadah hujan, sedangkan Pulau Sumbawa pada umumnya merupakan daerah perbukitan dan pegunungan kecuali sebagian kecil merupakan dataran yang memanjang sepanjang pesisir selatan. Ketinggian di Pulau Sumbawa berkisar dari 0 - 2.755 mdpl. Selong merupakan kota yang mempunyai ketinggian paling tinggi, yaitu 166 mdpl sementara Taliwang terendah dengan ketinggian 11 mdpl. Kota Mataram sebagai tempat Ibukota Provinsi NTB memiliki ketinggian 27 mdpl.

Berdasarkan ketinggian wilayah, fisiografi Provinsi NTB dapat diklasifikasikan datar, landai, bergelombang dan bergunung-gunung. Di Provinsi NTB terdapat enam belas gunung. Dari tujuh jajaran gunung yang terdapat di Pulau Lombok, Rinjani merupakan gunung tertinggi di Pulau Lombok dan di Provinsi NTB dengan ketinggian 3.726 mdpl, enam gunung lainnya adalah Mareje, Timanuk, Nangi, Perigi, Plawangan dan Baru. Sedangkan di Pulau Sumbawa terhampar deretan Gunung Batu Lanteh, Tukan, Jaran Pusang, Soromandi/Donggo, Tambora, Dadu, Pajo dan Gunung Sambi dimana Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi di Sumbawa dengan ketinggian 2.851 mdpl. Secara keseluruhan rata-rata ketinggian wilayah Nusa Tenggara Barat adalah 475,533 mdpl. Ketinggian ini dapat dibagi empat, antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Pulau Lombok dengan ketinggian wilayah dari permukaan laut dari 0-100 meter seluas 188.412 Ha, sedangkan 100-500 mdpl seluas 180.200 Ha, 500-1000 mdpl seluas 57.701 Ha, dan ketinggian lebih dari 1000 mdpl ke atas seluas 47.552 Ha. Ketinggian wilayah di Pulau Sumbawa dengan kisaran 0-100 meter seluas 290.499 Ha, 100-500 mdpl seluas 573.412 Ha, 500-1.000 mdpl seluas 249.558 Ha dan lebih dari 1000 mdpl ke atas seluas 427.981 Ha.

Sementara itu klasifikasi kemiringan tanah (lereng) yang ada di wilayah Provinsi NTB tersebut menunjukkan bahwa wilayah daratan Provinsi NTB paling luas termasuk klasifikasi kemiringan tanah 15 - 40 persen sebesar 704.619 Ha (34,96%), sedangkan paling sempit termasuk klasifikasi kemiringan tanah 0-2 persen sebesar 338.552 Ha (16,80%). Pulau Lombok memiliki klasifikasi kemiringan yang paling luas berkisar antara 2-15 persen seluas 198.616 Ha atau sebesar 9,85 persen dari luas

wilayah daratan. Sedangkan paling sempit dengan klasifikasi kemiringan tanah >40 persen seluas 20.175 Ha atau sebesar 1,01 persen dari luas wilayah Provinsi NTB. Sedangkan Pulau Sumbawa mempunyai klasifikasi tanah yang paling luas antara 15-40 persen seluas 573.903 Ha atau sebesar 28,48 persen dari luas Provinsi NTB, sedangkan paling sempit termasuk dalam klasifikasi kemiringan tanah 0-2 persen seluas 214.194 Ha atau sebesar 10,63 persen. Dari tujuh gunung yang ada di Pulau Lombok, Gunung Rinjani merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 3.726 mdpl, sedangkan di Pulau Sumbawa dari sembilan gunung yang ada Gunung Tambora merupakan gunung tertinggi dengan ketinggian 2.851 mdpl.

Geologi

Keadaan geologi wilayah NTB didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium (resen). Batuan tertua berumur tersier sedangkan yang termuda berumur kuartar. Batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batu pasir kuarsa, batu lempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batu gamping, batu gamping, dan dasit. Batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batu pasir tufan, batu lempung, dasit, tonalit, tufa dasitan, batu gamping berlapis, batu gamping tufan, dan lempung tufan. Batuan kuartar di Pulau Lombok terdiri dari perselingan breksi gampingan dan lava, breksi, lava, tufa, batu apung, dan breksi lahar. Batuan kuartar di Pulau Sumbawa terdiri dari terumbu koral terangkat, epiklastik (konglomerat), hasil gunung api tanah merah, gunung api tua, gunung api Sangiang, gunungapi Tambora, gunung api muda dan batu gamping koral. Aluvium dan endapan pantai cukup luas terdapat di Pulau Sumbawa dan Lombok.

Hidrologi

Mengacu pada Keputusan Gubernur NTB Nomor 147 Tahun 1999 tentang Pembagian Sub Satuan Wilayah Sungai/Daerah Aliran Sungai di Satuan Wilayah Sungai Lombok dan Satuan Wilayah Sungai Sumbawa, wilayah NTB dibagi menjadi 18 Sub Satuan Wilayah Sungai/Daerah Aliran Sungai (SSWS/DAS). Satuan Wilayah Sungai (SWS) Lombok terdiri dari 4 (empat) SSWS meliputi, Dodokan, Menanga, Putih dan Jelateng. Sedangkan SWS Sumbawa terdiri dari 14 (empat belas) SSWS meliputi Jereweh, Rea, Rhee, Moyo Hulu, P. Moyo, Empang, Hoddo, Banggo, Parado, Sari, Rimba, Baka, Bako, dan Beh. Luas SWS dan SWSS di Provinsi NTB. Inventarisasi cekungan air tanah di Provinsi NTB dapat sebagaimana dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.2 Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB

No	Cekungan Air Tanah (CAT)	Luas (km ²)	Air Tanah Bebas (juta m ³ /tahun)	Air Tanah Tertekan (juta m ³ /tahun)
1.	Mataram - Selong	2.366	662	8
2.	Tanjung - Sambelia	1.124	224	22
3.	Sumbawa Besar	1.404	183	25
4.	Empang	345	35	3
5.	Pekat	977	220	10
6.	Sanggar - Kilo	1.419	320	14
7.	Dompu	375	63	6
8.	Bima	1.102	165	16
9.	Tawali - Sape	363	36	3

Sumber : Perda RTRW Provinsi NTB, 2009-2029

Klimatologi

Kondisi iklim akhir-akhir ini sering mengalami perubahan. Perubahan secara faktual sudah terjadi di tingkat lokal, regional maupun global tak terkecuali di Provinsi NTB. Secara umum perubahan iklim global akan membawa perubahan kepada parameter-parameter cuaca secara spesifik yaitu temperatur, curah hujan, tekanan, kelembaban udara, laju serta arah angin, kondisi awan, dan radiasi matahari. Perubahan pada curah hujan dan suhu yang terus meningkat serta peningkatan emisi dan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) mengakibatkan terjadinya pemanasan global, diikuti dengan naiknya tinggi permukaan air laut akibat pemuaian dan pencairan es di wilayah kutub sehingga mendorong terjadinya perubahan iklim, antara lain El Nino dan La Nina. Fenomena El Nino dan La Nina sangat berpengaruh terhadap kondisi cuaca dan iklim utamanya di wilayah yang secara geografis berbentuk kepulauan. Fenomena El Nino menyebabkan kekeringan yang luar biasa, sementara fenomena La Nina kebalikan dari El Nino yang menyebabkan curah hujan tinggi disertai dengan angin topan dan berdampak pada terjadinya bencana banjir dan longsor besar akan berdampak pada sektor-sektor yang terkait dengan air, yaitu sumber daya air, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, infrastruktur (termasuk pemukiman, transportasi, irigasi air tanah dalam dan air permukaan dan penataan ruang), rawa, lahan kering, serta pantai.

Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kediri NTB pada tahun 2015 suhu udara rata-rata terendah di wilayah NTB terjadi pada bulan Agustus yaitu 20,6°C dan tertinggi 35,4 °C pada Bulan November. Sementara itu rata-rata curah hujan pada musim penghujan paling tinggi hanya 263,14 mm3 (Bulan November - Mei). Curah hujan diluar bulan Januari relatif rendah. Kondisi cuaca rata-rata di Provinsi NTB selama dua tahun terakhir, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3 Keadaan Cuaca Rata-Rata di Provinsi NTB Tahun 2014-2015

TAHUN	TEMPERATUR (°C)		KELEMBABAN UDARA (%)	TEKANAN UDARA (mB)	KECEPATAN ANGIN RATA-RATA (KNOT)	CURAH HUJAN (mm)	PENYINARAN MATAHARI (%)
	Min	Max					
2014	20,3	35,8	80,0	1010,5	9,4	113	78
2015	20,5	35,3	78,67	1010,6	4,3	116,67	80,33

Sumber : BMKG NTB, 2015

Iklim di wilayah Provinsi NTB secara umum dipengaruhi oleh aktifitas monsun baratan (musim angin baratan) dan monsun timuran (musim angin timuran). Pada saat monsun timuran, di wilayah Provinsi NTB umumnya berlangsung musim kemarau/kering yakni bulan April hingga Oktober. Puncak musim kemarau/kering umumnya berlangsung antara bulan Juli hingga Agustus. Sebaliknya pada saat monsun baratan, wilayah Provinsi NTB umumnya berlangsung musim hujan yakni pada bulan November hingga Maret.

Selain itu, pertumbuhan tekanan rendah dan pusat siklon sangat aktif di Belahan Bumi Utara (BBU). Kondisi ini memicu bertiupnya angin timuran kuat yang mengurangi potensi tumbuhnya awan-awan hujan di wilayah Provinsi NTB. hal ini berpengaruh terhadap rata-rata Kecepatan angin. Sepanjang tahun 2015, rata-rata kecepatan angin menurun jika dibandingkan dua tahun sebelumnya yaitu dari 9,4 knot menjadi 4,3 knot atau turun 5,1 knot. Berdasarkan data BMKG NTB kecepatan angin maksimum tertinggi mencapai 8 knots terjadi pada bulan September, keadaan ini lebih rendah dari tahun 2014 mencapai 13 knots. Sedangkan lama penyinaran

matahari berkisar antara 63-100 persen, penyinaran matahari terbesar terjadi pada bulan Oktober dan terendah terjadi pada bulan Januari dengan rata-rata penyinaran pertahun sebesar 84,33 persen. Tekanan udara berkisar 1009.7-1014.1 mb, tekanan udara rata-rata pada tahun 2015 meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya, yaitu 1012.025 mB.

Demografi

Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk di Provinsi NTB terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil perhitungan dan proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) 2010 – 2020 jumlah penduduk Provinsi NTB tahun 2016 berjumlah 4.896.162 jiwa, bila dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 1,01% atau sebanyak 60.585 jiwa. Peningkatan ini disebabkan oleh kelahiran alamiah dan migrasi penduduk. Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya, ini menggunakan asumsi demografi seperti angka kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (migrasi). Data jumlah penduduk dari tahun 2013 – 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2013-2017

TAHUN	PENDUDUK (JIWA)		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2013	2.284.049 48,49%	2.426.786 51,51%	4.710.835 100%
2014	2.315.234 48,50%	2.458.561 51,50%	4.773.795 100%
2015	2.345.811 48,51%	2.489.766 51,49%	4.835.577 100%
2016	2.375.750 48,52%	2.520.412 51,48%	4.896.162 100%
2017	2.405.080 48,53%	2.550.498 51,47%	4.955.578 100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2017

Apabila dilihat dari sebaran penduduk, penduduk di Provinsi NTB tergolong timpang karena lebih dari 70 persen penduduk berada di Pulau Lombok, sementara sisanya berada di Pulau Sumbawa. kondisi ini bertolak belakang dengan daya tampung lahan, karena Pulau Sumbawa jauh lebih luas dibandingkan pulau Lombok, bahkan luas pulau Lombok hanya sepertiga dari luas pulau Sumbawa. Demikian pula persebaran penduduk perkabupaten kondisinya tidak jauh berbeda dimana dari 10 kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB, kabupaten Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar yaitu 1.183.204 jiwa pada tahun 2017 dan disusul kemudian oleh kabupaten Lombok Tengah dimana jumlah penduduk kedua kabupaten ini mencapai 930.797 jiwa dari seluruh penduduk Provinsi NTB. Sementara kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terkecil di Provinsi NTB yaitu 140.890 jiwa pada tahun 2017. Adapun distribusi penduduk berdasarkan kabupaten/kota, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5 Distribusi Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/ Kota	Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Lombok Barat	620.412	644.586	654.892	665.132	675.222
2	Lombok Tengah	881.686	903.432	912.879	922.088	930.797
3	Lombok Timur	1.130.365	1.153.773	1.164.018	1.173.781	1.183.204
4	Lombok Utara	205.064	210.133	212.265	214.393	216.515
5	Kota Mataram	419.641	441.064	450.226	459.314	468.509
Pulau Lombok		3.257.168	3.352.988	3.394.280	3.434.708	3.474.274
6	Sumbawa Barat	121.167	129.724	133.391	137.072	140.890
7	Sumbawa	426.128	436.599	441.102	445.503	449.680
8	Dompu	226.218	234.665	238.386	241.888	245.387
9	Bima	450.976	463.419	468.682	473.890	478.967
10	Kota Bima	148.645	156.400	159.736	163.101	166.407
Pulau Sumbawa		1.373.134	1.420.807	1.441.297	1.461.454	1.481.331
Nusa Tenggara Barat		4.630.302	4.773.795	4.835.577	4.896.162	4.955.578

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2017

Dengan adanya distribusi penduduk yang tidak merata akan memberikan tekanan beban yang berat bagi wilayah bersangkutan, termasuk masalah lingkungan (*environmental stress*), seperti kerusakan hutan, kerusakan terumbu karang, masalah air bersih (*water management*), sampah, pendangkalan sungai sampai pada persoalan polusi udara yang parah. Sebenarnya jumlah penduduk yang besar, bila diikuti dengan kualitas yang baik, produktif, maju dan mandiri, akan dapat menjadi modal pembangunan. Jika melihat kondisi saat ini pulau Lombok memiliki tingkat kepadatan yang jauh lebih tinggi jika dibandingkan pulau Sumbawa yaitu 724,83 jiwa/km². Sementara itu pada tahun 2016 kabupaten/kota yang memiliki tingkat kepadatan paling tinggi adalah Kota Mataram yakni 7.492,89 jiwa/km² atau meningkat 1,97 persen dari tahun 2015. Kabupaten Sumbawa merupakan kabupaten dengan tingkat kepadatan terendah yaitu 67,05 jiwa/km². Kepadatan penduduk seluruh kabupaten/kota di NTB, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota (Jiwa/km ²)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Lombok Barat	589	612	621	631	641
2	Lombok Tengah	730	748	755	763	770
3	Lombok Timur	704	719	725	731	737
4	Lombok Utara	253	260	262	265	267
5	Kota Mataram	6846	7195	7345	7493	7643
Pulau Lombok		687	708	716	725	733
6	Sumbawa Barat	66	70	72	84	76
7	Sumbawa	64	66	66	67	68
8	Dompu	97	101	103	104	106
9	Bima	103	106	107	108	109
10	Kota Bima	716	754	770	786	802
Pulau Sumbawa		89	92	94	95	96
Nusa Tenggara Barat		230	237	240	243	246

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2017

Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi dua faktor yaitu faktor alami dan non alami. Faktor alami terdiri dari kelahiran (natalitas) dan kematian (mortalitas)

sedangkan faktor non alami adalah perpindahan penduduk (migrasi). Pertumbuhan penduduk provinsi NTB dapat ditekan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013, pertumbuhan penduduk mencapai 1,38 persen dan menurun menjadi 1,20 persen pada tahun 2017. Sementara berdasarkan jenis kelamin penduduk, pertumbuhan penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk perempuan. Adapun perkembangan pertumbuhan penduduk provinsi NTB sebagaimana dalam tabel 2.9 berikut:

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2013-2017

TAHUN	PENDUDUK (JIWA)			PERTUMBUHAN (%)			SEX RATIO
	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
2013	2.284.049 48,49%	2.426.786 51,51%	4.710.835 100%	1,41	1,35	1,38	94,12
2014	2.315.234 48,50%	2.458.561 51,50%	4.773.795 100%	1,35	1,29	1,32	94,17
2015	2.345.811 48,51%	2.489.766 51,49%	4.835.577 100	1,30	1,25	1,27	94,22
2016	2.375.750 48,52%	2.520.412 51,48%	4.896.162 100%	1,26	1,22	1,24	94,26
2017	2.405.080 48,53%	2.550.498 51,47%	4.955.578 100%	1,22	1,18	1,20	94,30

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2017

Struktur dan Komposisi Penduduk

Persoalan kependudukan di Provinsi NTB tidak jauh berbeda dengan persoalan kependudukan secara nasional dimana selain jumlah penduduknya yang relatif besar dan persebarannya yang tidak merata, juga struktur penduduknya didominasi oleh kelompok umur usia muda (produktif) dan anak-anak.

Banyaknya penduduk pada kelompok umur anak-anak dan usia muda membawa dampak terhadap ratio beban ketergantungan penduduk. Berdasarkan data BPS 2017 rasio beban ketergantungan penduduk Provinsi NTB adalah 53,04 hal ini berarti setiap 100 orang penduduk produktif di Provinsi NTB menanggung sebanyak 53 orang penduduk yang tidak produktif. Terjadi penurunan dependency ratio dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,34 poin yang membawa dampak positif berkurangnya beban ekonomi bagi penduduk umur produktif (usia kerja) yang menanggung penduduk pada umur tidak produktif. Dampak positif dari sisi ekonomi mengindikasikan semakin banyaknya sumberdaya manusia yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Jika berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk perempuan lebih banyak pada kelompok umur produktif (15-64 tahun) maupun pada kelompok usia 65+ yaitu masing-masing sebanyak 1.697.088 jiwa dan 134.460 jiwa. Namun pada kelompok anak-anak jumlah penduduk laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan penduduk perempuan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.8 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2017

NO.	KELOMPOK UMUR/TH	JUMLAH PENDUDUK 2016			JUMLAH PENDUDUK 2017		
		LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1.	0-14	746.262	715.539	1.461.801	749.138	718.950	1.468.088
2.	15-64	1.517.829	1.674.396	3.192.225	1.540.900	1.697.088	3.237.988
3.	65+	111.659	130.477	242.136	115.042	134.460	249.502
Dependency Ratio		56,52	50,53	53,38	56,08	50,29	53,04

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2017

2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perhitungan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami perubahan dengan menggunakan 17 Sektor dan atas dasar harga konstan tahun 2010. Nilai PDRB provinsi NTB terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 nilai PDRB Provinsi NTB mencapai 69,77 triliun (termasuk tambang bijih logam) meningkat menjadi 94,65 triliun pada tahun 2017 atau ada peningkatan sebesar 24,88 triliun dalam lima tahun terakhir. Sedangkan PDRB provinsi NTB tanpa tambang bijih logam mencapai 58,51 triliun pada tahun 2013 meningkat menjadi 77,89 triliun pada tahun 2017 atau mengalami penambahan sebesar 19,38 triliun dalam lima tahun terakhir. Meskipun kontribusi sektor pertambangan sangat besar terhadap PDRB Provinsi NTB yaitu mencapai 11,26 triliun pada tahun 2013 dan 16,76 triliun pada tahun 2017, namun PDRB tanpa sektor pertambangan lebih signifikan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena sektor primer pertanian masih mendominasi perekonomian Provinsi NTB. Adapun PDRB Provinsi NTB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 menurut 17 sektor tahun 2013-2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.9 Nilai PDRB Provinsi NTB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 menurut 17 Sektor tahun 2013-2017 (Milyar Rp)

Sektor	2013	2014	2015	2016*	2017**
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16,947	17.702	18.965	19.587	20.880
2. Pertambangan dan Penggalian	11,255	11.239	23.175	24.507	19.635
3. Industri Pengolahan	3,540	3.659	3.773	3.971	4.207
4. Pengadaan Listrik dan Gas	48	67	67	75	78
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	59	64	66	69	72
6. Konstruksi	6,697	7.219	7.744	8.414	9.055
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,053	9.747	10.337	11.148	12.112
8. Transportasi dan Pergudangan	4,964	5.335	5.680	5.919	6.345
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,243	1.329	1.404	1.545	1.663
10. Informasi dan Komunikasi	1,555	1.685	1.825	1.986	2.158
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,106	2.269	2.480	2.796	3.075
12. Real Estate	2,086	2.206	2.356	2.502	2.678
13. Jasa Perusahaan	123	132	139	149	158
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,007	4.207	4.362	4.492	4.641
15. Jasa Pendidikan	3,141	3.352	3.595	3.813	4.062
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,413	1.511	1.613	1.705	1.826
17. Jasa lainnya	1,532	1.652	1.754	1.865	2.002

Sektor	2013	2014	2015	2016*	2017**
PDRB dengan Tambang Biji Logam	69,767	73.373	89.338	94.538	94.645
PDRB tanpa Tambang Biji Logam	58,512	64.449	68.633	72.729	77.889

Sumber : PDRB Provinsi NTB, 2017

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

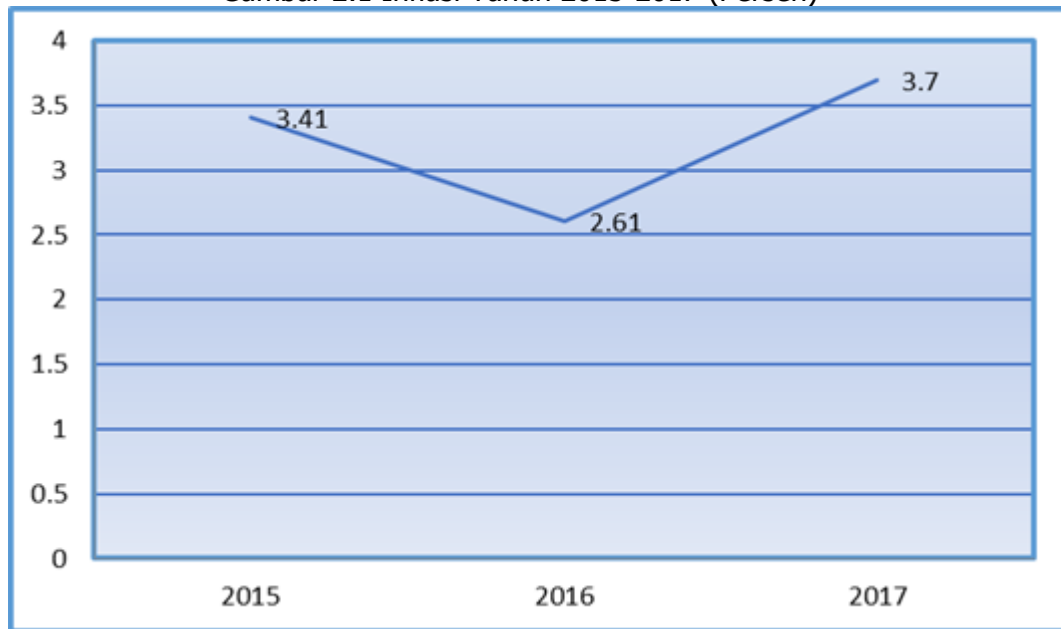
Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang harus dikendalikan oleh pemerintah dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dan dapat mengambil kebijakan yang tepat, sehingga stabilitas harga dapat terjaga. Inflasi berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat karena dapat menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya ketimpangan. Inflasi di Provinsi NTB selama periode 2015-2017 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 inflasi mencapai 3,41 persen mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 2,61 persen dan naik lagi pada tahun 2017 menjadi 3,70 persen.

Salah satu penyumbang inflasi 2017 adalah meningkatnya biaya komoditas yang diatur oleh pemerintah (*administrated price*). Seperti halnya peningkatan tarif perpanjangan STNK, tarif listrik serta harga rokok. Jika dilihat dari inflasi *volatile food* atau komoditas harga yang bergejolak, tekanan harga yang tinggi berasal dari meningkatnya harga komoditas pangan seperti halnya cabai rawit dan tomat sayur. Sedangkan dari komoditas perikanan ialah kenaikan harga ikan bandeng dan ikan selar. Inflasi tersebut tidak terlepas dari pengaruh kondisi cuaca yang buruk, dengan intensitas hujan dan angin yang meningkat setiap harinya. Hal tersebut menyebabkan produksi tanaman hortikultura menjadi terganggu akibat gagal panen maupun produk yang rusak dan membusuk. Demikian pula dengan terganggunya aktivitas pelayaran yang menyebabkan melambungnya harga komoditas perikanan.

Pemerintah Daerah selalu berusaha untuk dapat mengendalikan laju inflasi melalui berbagai kebijakan seperti: pengamanan pasokan bahan makanan, koordinasi kebijakan antara Tim Pengendali Inflasi Provinsi NTB yang terdiri dari pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk menjaga ekspektasi masyarakat terhadap harga barang, melakukan operasi pasar bahan-bahan kebutuhan pokok yang mempunyai bobot cukup tinggi dalam inflasi, serta memastikan kelancaran distribusi barang dan jasa, penyampaian informasi ketersediaan stok dan harga melalui media massa dan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi secara wajar. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk menurunkan laju inflasi menjadi 3,41 persen pada tahun 2015, perkembangan inflasi di Provinsi NTB sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.1 Inflasi Tahun 2015-2017 (Persen)



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Perkembangan Investasi

Berdasarkan data dua tahun terakhir (2016-2017), terlihat minat investasi dari luar negeri mengalami peningkatan mencapai 2.103,61 persen, sedangkan investasi dari perusahaan dalam negeri mengalami penurunan hingga 76,76 persen. Secara keseluruhan nilai investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri meningkat sebesar 13,95 persen. Nilai investasi dan laju pertumbuhan investasi di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.10 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2016-2017

URAIAN	NILAI INVESTASI		PERKEMBANGAN (%)
	2016	2017	
PMDN (Rp)	411.835.602.836	9.075.242.457.981	2.103,61
PMA (Rp)	9.487.292.016.600	2.205.084.068.287	-76,76
Total PMDN+PMA (Rp)	9.899.127.619.436	11.280.326.526.268	13,95

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2017

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup signifikan bila diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku maupun berdasarkan pada harga konstan. Pada tahun 2017 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai 123.927 Milyar dan tanpa sub sektor pertambangan bijih logam sebesar Rp. 103.345 triliun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp.94.645 Milyar dan tanpa sub sektor pertambangan bijih logam sebesar Rp. 77.889 Milyar (BPS NTB, 2017)

Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB tahun 2017 dengan kategori pertambangan bijih logam sebesar 0,11 persen, bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 5,82 persen atau terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,71 persen. Sedangkan tanpa sub kategori pertambangan bijih logam, pertumbuhan ekonomi sebesar 7,10 persen dan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 5,97 persen.

Tabel 2.11 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 dengan dan Tanpa Pertambahan Bijih logam menurut sektor pada tahun 2014 -2017

Sektor	2014	2015	2016	2017
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,46	7,13	3,28	6,60
2. Pertambangan dan Penggalian	-0,14	106,20	5,72	-19,86
3. Industri Pengolahan	3,37	3,21	5,26	5,93
4. Pengadaan Listrik dan Gas	39,65	0,89	11,25	4,29
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,16	3,79	4,89	4,61
6. Konstruksi	7,80	7,27	8,64	7,62
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,67	6,05	7,85	8,64
8. Transportasi dan Pergudangan	7,48	6,47	4,20	7,19
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,92	5,56	10,09	7,69
10. Informasi dan Komunikasi	8,37	8,34	8,79	8,66
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	7,72	9,32	12,73	9,98
12. Real Estate	5,74	6,83	6,18	7,05
13. Jasa Perusahaan	7,26	5,76	6,99	5,87
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,98	3,69	2,98	3,30
15. Jasa Pendidikan	6,72	7,27	6,04	6,54
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,92	6,77	5,70	7,07
17. Jasa lainnya	7,83	6,21	6,29	7,35
PDRB dengan Tambang Bijih Logam	5,17	21,76	5,82	0,11
PDRB tanpa Tambang Bijih Logam	6,28	6,49	5,97	7,10

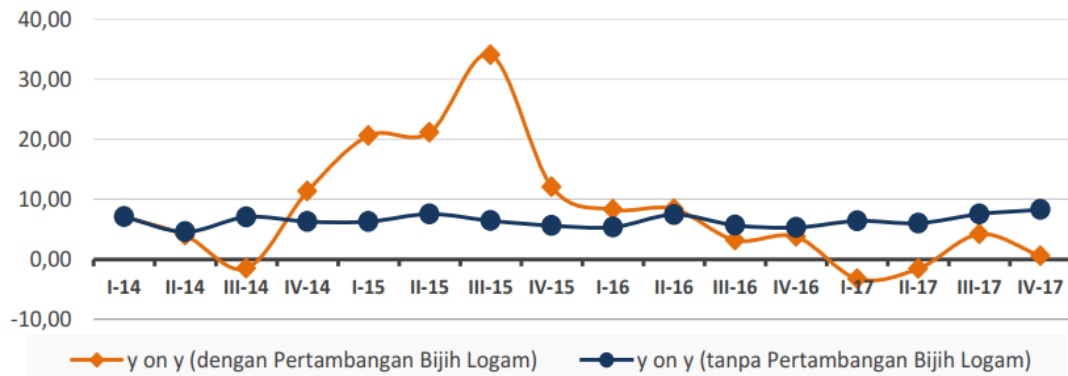
Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Memperhatikan sumber utama pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB triwulan IV-2017 (y-on-y) berasal dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,70 poin dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,02 poin. Sedangkan Jika mengeliminir nilai tambah pertambangan bijih logam maka pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan IV-2017 secara y-on-y tumbuh sebesar 8,30 persen.

Struktur perekonomian Provinsi NTB menurut lapangan usaha tahun 2014 didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (23,54 %); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,86 %) dan Pertambangan dan Penggalian (11,78%), kondisi ini tidak jauh berbeda bila dibandingkan dengan tahun 2012 maupun 2013

Struktur perekonomian Provinsi NTB pada triwulan IV-2017 masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan (20,18 persen); pertambangan dan penggalian (19,02 persen); dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (12,84 persen). Pertumbuhan y to y PDRB dengan dan tanpa pertambangan bijih logam, sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.2 Pertumbuhan y to y PDRB Dengan dan Tanpa Pertambangan Bijih logam

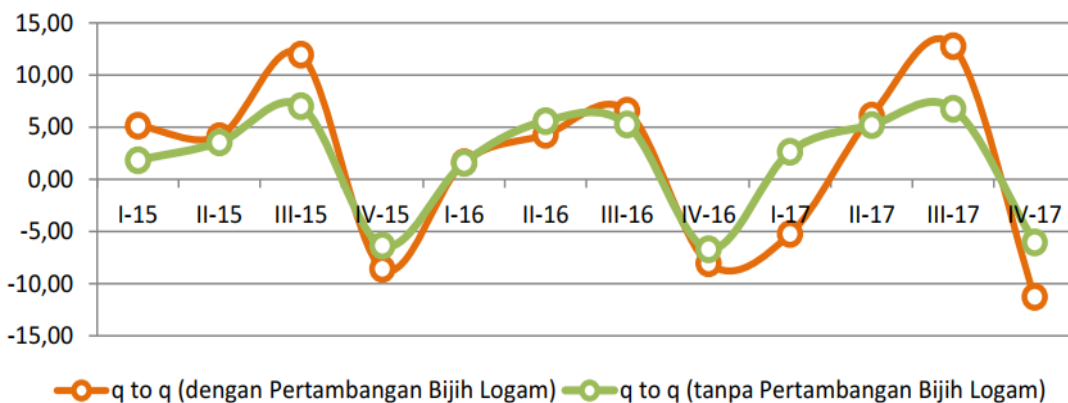


Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Besaran ekonomi Provinsi NTB per triwulan cukup fluktuatif, masih sangat dipengaruhi oleh faktor musim, seperti panen raya padi, jagung, tembakau pada triwulan IV-2017 ini tidak ada sehingga bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar -11,28 persen. Triwulan IV merupakan masa berakhirnya panen raya daun tembakau yang merupakan komoditas unggulan perkebunan semusim sekaligus sebagai bahan dasar kegiatan industri pengolahan tembakau. Hal ini berdampak pada penurunan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan maupun lapangan usaha industri pengolahan, masing masing mengalami kontraksi sebesar 17,67 persen dan 23,28 persen.

Dominasi lapangan usaha pertambangan dan penggalian dan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan pada PDRB Provinsi NTB dengan kontraksi yang cukup tinggi mengakibatkan kedua lapangan usaha ini menjadi sumber kontraksi utama yaitu masing-masing -6,35 poin dan -3,85 poin. Beberapa lapangan usaha menunjukkan peningkatan kegiatan ekonomi antara lain pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dipicu oleh peningkatan realisasi belanja pemerintah pada triwulan IV-2017 dibandingkan dengan triwulan III-2017. Selain itu, lapangan usaha yang menunjukkan laju pertumbuhan cukup tinggi adalah lapangan usaha jasa perantara keuangan yang tumbuh sebesar 12,86 persen, dampak dari penyaluran kredit yang meningkat pada triwulan IV 2017 ini. Pertumbuhan q to q PDRB dengan dan tanpa pertambangan bijih logam sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.3 Pertumbuhan q to q PDRB Dengan Dan Tanpa Pertambangan Bijih logam

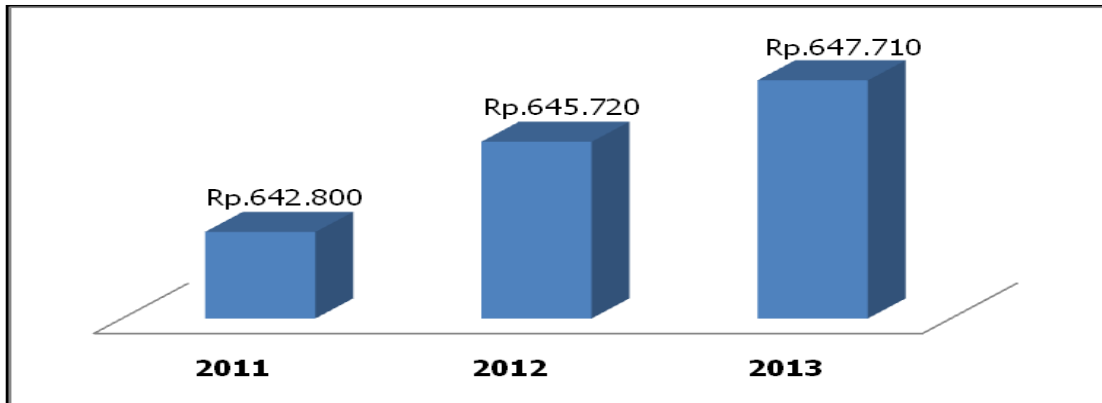


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTB, 2015

Paritas Daya Beli

Paritas daya beli yang terjaga menjamin penduduk mampu untuk memenuhi kebutuhannya meskipun standar minimum dan dimungkinkan untuk meningkat bila nilai tambah dari berbagai usaha yang dilakukan masyarakat juga meningkat. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh BPS Provinsi NTB pada tahun 2013 paritas daya beli masyarakat NTB mencapai Rp.647.710,-. Paritas daya beli masyarakat Provinsi NTB Tahun 2011-2013 meningkat rata-rata 0,38 persen pertahun. Dengan perkembangan sebagaimana gambar berikut.

Gambar 2.4 Paritas Daya Beli Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2011-2013



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2014

Pendapatan Perkapita

PDRB perkapita di Provinsi NTB sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk selama empat tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup baik, rata-rata mencapai Rp.2,64 Juta pertahun dengan tambang dan Rp. 1,72 Juta pertahun tanpa tambang. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku di Provinsi NTB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.12 Pendapatan Perkapita NTB ADHB Tahun 2014-2017 (Rp. 000.000)

URAIAN	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA PENINGKATAN PERTAHUN
Dengan tambang	17,10	21,85	23,80	25,01	2,64
Tanpa tambang	15,69	17,50	19,08	20,85	1,72

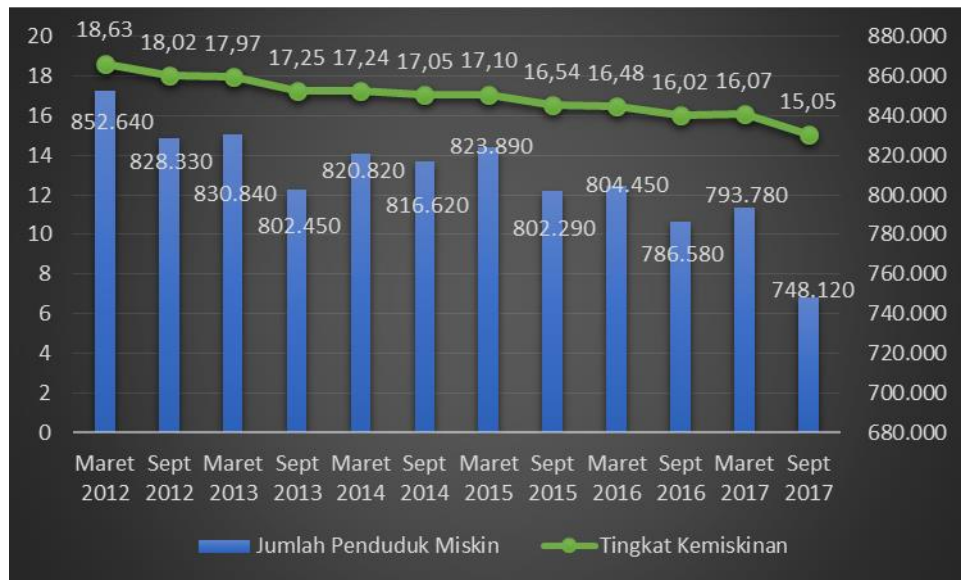
Sumber : PDRB Provinsi NTB, 2017 (data diolah)

Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan Merupakan agenda penting dalam pembangunan Nasional ataupun Daerah. Untuk itu langkah strategis percepatan penanggulangan kemiskinan perlu direncanakan dan ditindak lanjuti secara besama-sama. Persentase penduduk miskin menunjukkan *trend* yang semakin menurun, dari tahun 2010 penurunan ini mengalami perlambatan yang disebabkan kemiskinan yang tersisa merupakan kategori sangat miskin dan bersifat multidimensi, oleh karenanya upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi penduduk miskin melalui berbagai program- program penanggulangan kemiskinan yang bersifat keberpihakan (*affirmative*) kepada masyarakat miskin.

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Maret 2017 mencapai 793.780 jiwa (16,07 persen) berkurang 45.660 jiwa (1,02 persen) dibanding September 2017 sebesar 748.120 jiwa (15,05 persen).

Gambar 2.5 Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin 2012-2017.



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Berdasarkan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 penurunan angka kemiskinan ditargetkan sebesar 1 persen setiap tahunnya dan direncanakan akan direview menjadi 2 persen setiap tahunnya. Sehingga untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu kajian/analisa kemiskinan guna merumuskan suatu kebijakan dengan menggunakan analisa kemiskinan makro.

Salah satu langkah untuk mewujudkan percepatan penurunan kemiskinan sebesar 2 persen pertahun telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota se-NTB. Nota kesepahaman ini berisikan target-target penurunan kemiskinan kabupaten/kota se NTB yang dirincikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.13 Target Penurunan Kemiskinan Kabupaten/Kota Se-NTB

No	Kabupaten/kota	Target pertahun (%)
1	Lombok Barat	2
2	Lombok Tengah	2
3	Lombok Timur	3
4	Sumbawa	2
5	Dompu	1,5
6	Bima	1,75
7	Sumbawa Barat	2
8	Lombok Utara	4
9	Mataram	1
10	Kota Bima	0,75
11	Nusa Tenggara Barat	2

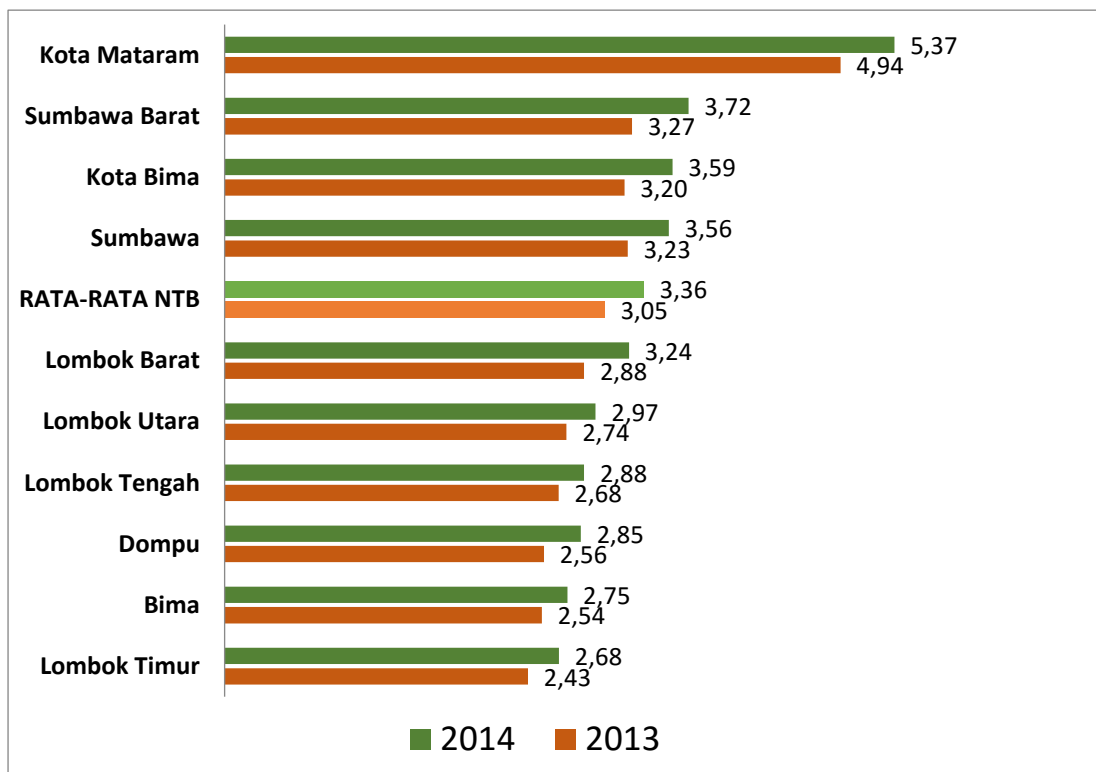
Dari target penurunan kemiskinan di sepuluh kabupaten/kota setiap tahunnya tersebut menjadi akumulasi untuk penurunan di Provinsi NTB sebesar 2 persen. Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat merupakan pihak-pihak yang memiliki tanggungjawab sama terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program dalam upaya pemenuhan

kebutuhan dasar warga negara secara layak, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dalam upaya mencapai masyarakat NTB yang lebih sejahtera.

Namun keseluruhan upaya tersebut belum maksimal tanpa dukungan dari para pemangku kepentingan lainnya. Untuk menunjang penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan dirumuskan empat strategi utama. Strategi-strategi penanggulangan kemiskinan tersebut diantaranya:

- 1) Memperbaiki program perlindungan sosial;
- 2) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar;
- 3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin; serta
- 4) Menciptakan pembangunan yang inklusif.

Gambar 2.6 Indeks daya saing kabupaten/Kota se-NTB



Kota Mataram merupakan wilayah dengan tingkat daya saing tertinggi, sedangkan kabupaten Lombok Timur merupakan wilayah yang memiliki daya saing terendah dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Indeks daya saing tentunya menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB, karena didalam indikator daya saing ini terdapat indikator ekonomi yang menjadi faktor dalam penentuan garis kemiskinan.

Angka Pengangguran

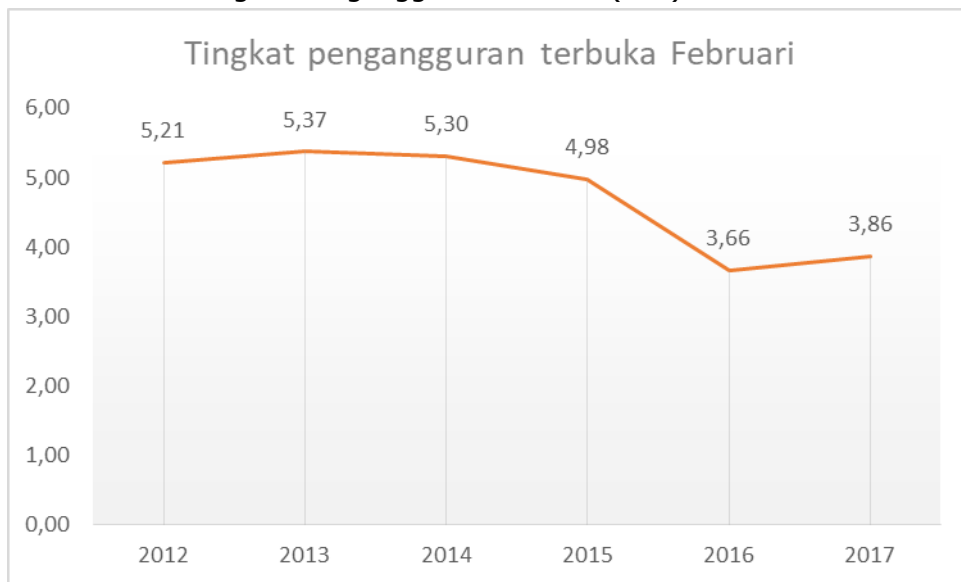
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi NTB secara persentase pada tahun 2016 mencapai 3,66 persen meningkat 0,20 persen dibandingkan tahun 2017 mencapai 3,86. Untuk menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, maka pemerintah perlu menetapkan beberapa kebijakan, yaitu:

- 1) Memperbesar lapangan usaha baru melalui peningkatan peluang investasi (KEK Mandalika, Geopark Rinjani dan Kawasan Taman Nasional Gunung Tambora).

- 2) Memperbanyak pelatihan manajemen usaha dan keterampilan guna peningkatan SDM bagi kelompok-kelompok masyarakat (Kelompok Tani, Nelayan, UMKM, kelompok masyarakat lingkaran hutan, kelompok peternak dan sejenisnya).
- 3) Pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan oleh setiap SKPD diharapkan dilanjutkan dengan dukungan berupa pengemasan serta pendampingan untuk akses pemasaran produk-produk yang telah dihasilkan kelompok masyarakat maupun UKM lainnya. Sehingga keberlanjutan usaha yang berkelanjutan guna mengurangi pengangguran dapat terserap.

Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat adalah sektor pertanian yaitu sekitar 39,01 persen diikuti oleh sektor perdagangan sekitar 21,58 persen, sektor jasa sosial kemasyarakatan dan jasa perorangan sekitar 16,47 persen serta sektor industri sekitar 9,38 persen

Gambar 2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Provinsi NTB



Sumber: BPS Provinsi NTB 2017

3. Aspek Pelayanan Umum

URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Daerah diwajibkan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan penyelenggaraan urusan tersebut berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah pusat dalam bentuk peraturan pemerintah. Standar pelayanan minimal sendiri adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ini, mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketertiban umum dan masalah sosial.

1. PENDIDIKAN

Tahun 2017 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, menangani 3 indikator kinerja RPJMD. Capaian indikator kinerja RPJMD NTB tahun 2017 disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.14 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Tahun 2016-2017

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	
				TARGET	REALISASI
1.	Rata-rata lama sekolah usia 25 tahun keatas	Tahun	6,79	6,87	6,89*
2.	Buta huruf penduduk usia 15 tahun keatas	%	12,94	10,85	12,86
3.	Penerapan pendidikan berkarakter dan nilai budaya lokal pada sekolah dan madrasah	%	100	65	100

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

* Angka Proyeksi

Hasil penyelenggaraan Urusan Pendidikan dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator makro. Secara kuantitatif dapat dilihat dari pencapaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Buta Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah (DO), Angka Kelulusan, dan Angka Melanjutkan Sekolah.

Tabel 2.15 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Buta Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah (DO), Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah

No	Indikator Kinerja	Kondisi awal 2012/ 2013	Target dan Realisasi	2013/ 2014	2014/ 2015	2015/ 2016	2016/ 2017	2017/ 2018
1	Angka Rata-rata Lama Sekolah	6,54 Tahun	target	6,67	6,71	6,79	6,87	6,95
			realisasi	6,67	6,73	6,77	6,97	6,89*
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
	-TK/RA	64,08%	target	65,66	67,25	68,83	70,42	72,42
			realisasi	65,65	62,97	63,46	74,89	
	-SD/MI/Paket A	114,79%	target	114,63	114,47	114,31	114,15	113,99
			realisasi	113,95	112,39	109,29	107,83	
	-SMP/MTs/Paket B	104,81%	target	104,65	104,49	104,33	104,17	104,01
			realisasi	106,76	108,67	110,14	109,99	
	-SMA/MA/SMK	80,54%	target	83,83	87,12	90,42	93,71	97,00
			realisasi	84,4	85,13	87,53	92,22	
	3	Angka Partisipasi Murni (APM)						
-SD/MI/Paket A		99,19%	target	99,35	99,51	99,67	99,83	99,99
			realisasi	99,96	99,90	99,91	99,67	
-SMP/MTs/Paket B		94,83%	target	95,56	96,3	97,03	97,77	98,50
			realisasi	96,81	97,23	97,79	98,22	
-SMA/MA/SMK		68,59%	target	71,87	75,15	78,44	81,72	85,00
			realisasi	74,73	76,02	78,80	83,35	

No	Indikator Kinerja	Kondisi awal 2012/2013	Target dan Realisasi	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
4	Angka Putus Sekolah (DO)							
	-SD/MI/Paket A	0,33%	target	0,31	0,29	0,27	0,25	0,23
			realisasi	0,19	0,18	0,17	0,15	
	-SMP/MTs/Paket B	0,65%	target	0,60	0,55	0,50	0,45	0,40
			realisasi	0,47	0,45	0,33	0,25	
	-SMA/MA/SMK	1,77%	target	1,47	1,17	0,94	0,84	0,54
			realisasi	1,50	1,22	1,09	0,93	
5	Angka Buta Huruf	15,04%	Target	13,86	12,77	11,77	10,85	10,00
			Realisasi	13,86	13,04	13,03	12,94	12,86
6	Angka Melanjutkan Sekolah							
	-SD/MI ke SMP/MTs	100,52%	Target	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Realisasi	102,48	101,09	100,88	100,04	
	-SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK	80,57%	Target	96,64	97,36	98,07	98,79	99,50
			Realisasi	98,97	98,99	99,03	99,07	

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2017, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

* Angka Proyeksi

Pembangunan pendidikan merupakan kegiatan investasi pada sumber daya manusia. Pendidikan masih menjadi prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia di Provinsi NTB. Berbagai program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka investasi sumber daya manusia. Data rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas pada tahun 2017 masih menunggu *release* oleh BPS Provinsi NTB sekitar bulan April 2018, namun berdasarkan trend kenaikan rata-rata lama sekolah dalam 6 (enam) tahun terakhir yang mencapai sebesar 0,18 point, maka diproyeksikan tahun 2017 rata-rata lama sekolah di NTB meningkat menjadi 6,89 tahun. Adanya kenaikan ini cukup beralasan mengingat beberapa komponen pembentuk rata-rata lama sekolah mengalami peningkatan pada tahun 2017 antara lain menurunnya angka *Drop Out* (DO) pada semua jenjang pendidikan yaitu angka DO jenjang SD/MI/Paket A menurun dari 0,17 persen pada tahun ajaran 2015/2016 menjadi 0,15 persen pada tahun ajaran 2016/2017. Sementara itu, angka DO jenjang SMP/MTs/Paket C menurun dari 0,33 persen pada tahun ajaran 2015/2016 menjadi 0,25 persen pada tahun ajaran 2016/2017, sedangkan angka DO jenjang SMA/SMK/MA/Paket C menurun dari 1,09 persen pada tahun ajaran 2015/2016 menjadi 0,93 persen pada tahun ajaran 2016/2017. Pada indikator angka melanjutkan sekolah juga mengalami peningkatan terutama pada jenjang SMA/SMK/MA/Paket C dari 99,07 persen pada tahun ajaran 2015/2016 menjadi 99,03 persen pada tahun ajaran 2016/2017.

Beberapa program dan kegiatan pembangunan pendidikan telah dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah antara lain: peningkatan akses melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan asrama sekolah, pembangunan rumah singgah untuk sekolah di daerah terpencil, penambahan ruang kelas, pembangunan laboratorium dan ruang praktikum, pembangunan perpustakaan, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, pengadaan perlengkapan sekolah dan pengadaan jaringan WLAN bagi SMA/SMK dan Sekolah Luar Biasa. Ada juga kegiatan peningkatan mutu pendidikan melalui kegiatan penerbitan surat edaran terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan zonasi

untuk SMA sehingga bagi siswa yang kurang mampu dapat terserap atau melanjutkan sekolahnya di sekolah yang berada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya dengan demikian akan menghemat biaya transportasi bagi siswa kurang mampu tersebut. Selain itu, surat edaran terkait PPDB juga memberikan kebebasan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu sehingga dapat melanjutkan pendidikannya khususnya pada jenjang SMK/SMK sesuai kewenangan provinsi.

Pada tahun 2013 rata-rata lama sekolah penduduk >25 tahun mencapai 6,54 tahun, sedangkan tahun 2016 mencapai 6,79 tahun. Ada peningkatan 0,25 tahun dari 2013-2016. Jika dihitung, rata-rata lama sekolah tahun 2016 yaitu 6,79 tahun menunjukkan sebagian besar masyarakat NTB mengenyam pendidikan hanya sampai kelas 1 SMP/MTs selama 0,79 tahun (9,48 bulan). Peningkatan rata-rata lama sekolah sebagaimana ditunjukkan tabel diatas sebagai akibat dari meningkatnya capaian angka partisipasi sekolah dan angka melanjutkan sekolah serta menurunnya angka buta huruf dan *drop out*.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017

No	Tahun	Penduduk Usia 7-12 Tahun	Siswa Seluruhnya				APK			
			SD	MI	SDLB	Paket A Setara	Tidak Termasuk Paket A Setara		Termasuk Paket A Setara	
							Jumlah	%	Jumlah	%
1	2012/2013	554,255	540,381	86,885	1,620	860	628,886	113.47	629,746	113.62
2	2013/2014	557,174	540,246	91,672	1,649	1,305	633,567	113.71	634,872	113.95
3	2014/2015	559,704	531,753	93,450	2,577	1,255	627,780	112.16	629,035	112.39
4	2015/2016	566,512	520,567	95,321	1,946	1,325	617,834	109.06	619,159	109.3
5	2016/2017	574,512	517,639	98,388	1,875	1,590	617,902	107.55	619,492	107.83

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Berdasarkan tabel diatas, APK SD/ sederajat diketahui mengalami penurunan dari tahun 2012/2013 sampai 2016/2017, ini berarti penduduk yang bersekolah diluar usia 7-12 tahun pada jenjang SD/ sederajat juga mengalami penurunan. Dari tabel diatas juga tampak bahwa jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat termasuk paket A setara lebih banyak daripada jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Hal ini dapat diasumsikan bahwa masih ada penduduk diluar usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat. Target APK jenjang SD/ sederajat tahun 2016/2017 adalah 114.15 persen, dengan realisasi 107.83 persen. Realisasi yang lebih rendah daripada target ini menunjukkan kondisi yang semakin membaik karena nilai APK diharapkan dibawah 100 persen yang menunjukkan semakin kecilnya penduduk diluar usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat.

Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017

No.	Tahun	Penduduk Usia 13-15 Tahun	Siswa Seluruhnya					APK			
			SMP	MTs	SMP Terbuka	SMPLB	Paket B Setara	Tidak Termasuk Paket B Setara		Termasuk Paket B Setara	
								Jumlah	%	Jumlah	%
1	2012/2013	271,780	174,972	98,321	5,362	384	5,916	279,039	102.67	284,955	104.85
2	2013/2014	275,667	176,978	104,635	6,002	381	6,308	287,996	104.47	294,304	106.76
3	2014/2015	270,049	178,653	105,336	5,041	394	4,050	289,424	107.17	293,474	108.67
4	2015/2016	271,023	181,592	107,217	5,041	654	4,014	294,504	108.66	298,518	110.14
5	2016/2017	271,934	182,273	106,915	4,153	734	5,026	294,075	108.14	299,101	109.99

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2012/2013 – 2016/2017 mengalami trend meningkat. Disandingkan antara jumlah penduduk usia 13-15 tahun dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMP/ sederajat termasuk paket B setara, terlihat bahwa lebih tinggi jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SMP/ sederajat termasuk paket B setara pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada penduduk diluar usia 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP/ sederajat. Hal ini semakin menjelaskan mengapa nilai APK SMP/ sederajat dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Adapun target APK SMP/ sederajat tahun 2016/2017 adalah 104.17 persen dengan realisasi 109,99 persen. Diharapkan pada tahun-tahun kedepan APK SMP/ sederajat dapat terus menurun agar semakin sedikit penduduk diluar usia 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP/ sederajat.

Tabel 2.18 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SM (SMA,MA,SMK) Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2011/2012 s.d 2015/2016

No.	Tahun	Penduduk Usia 16-18 Tahun	Peserta Didik Seluruhnya						APK					Total APK (SM)
			SMA	MA	SMK	SMALB	Paket C	Jumlah	SMA	MA	SMK	SMALB	Paket C	
1	2012/2013	259,702	97,911	56,849	53,750	117	6,126	214,753	37.70	21.89	20.70	0.05	2.36	82.69
2	2013/2014	264,659	97,238	56,609	58,001	127	11,391	223,366	36.74	21.39	21.92	0.05	4.30	84.40
3	2014/2015	265,971	100,537	57,768	62,201	189	5,722	226,417	37.80	21.72	23.39	0.07	2.15	85.13
4	2015/2016	267,108	103,076	60,584	63,106	223	6,811	233,800	38.59	22.68	23.63	0.08	2.55	87.53
5	2016/2017	267,146	105,777	66,194	67,226	290	6,880	246,367	39.60	24.78	25.16	0.11	2.58	92.22

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah penduduk usia 16-18 tahun semakin meningkat dari tahun 2012/2013 -2016/2017. Namun apabila melihat penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA/ sederajat pada tahun 2012/2013 sampai 2016/2017 jumlahnya lebih sedikit dibandingkan jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua penduduk usia 16-18 dapat melanjutkan sekolah pada jenjang SMA/ sederajat. Selain itu besaran APK jenjang SMA/ sederajat menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yang berarti masih banyak penduduk diluar usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang SMA/ sederajat. Adapun target APK SMA/ sedrajat tahun 2016/2017 adalah 93.71 persen sementara realisasinya adalah 92,22 persen.

Tabel 2.19 Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2012/2013 s.d 2015/2016

No	Tahun	APK SD/MI (%)	APK SMP/MTs (%)	APK SMA/MA/SMK (%)
1	2012/2013	113.62	104.85	82.69
2	2013/2014	113.95	106.76	84.40
3	2014/2015	112.29	108.67	85.13
4	2015/2016	109.29	110.14	87.53
5	2016/2017	107,83	109,99	92,22

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Dari APK ketiga jenjang pendidikan diatas, APK SD/ sederajat cenderung mengalami penurunan, sedangkan untuk APK SMP/ sederajat dan APK SMA/ sederajat cenderung mengalami peningkatan. Pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, penduduk yang bersekolah pada jenjang tersebut diluar usia 7-12 tahun mulai menurun. Masyarakat semakin peduli dengan pentingnya pendidikan dasar sehingga saat anak berusia 7-12, anak tersebut diberi pendidikan sesuai jenjangnya. Sementara untuk jenjang SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat APK cenderung meningkat. Masih ada masyarakat yang menyekolahkan anaknya diluar usia yang seharusnya atau masih ada lulusan jenjang SD/ sederajat atau SMP/ sederajat yang tidak/ belum dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang berikutnya. Namun demikian peningkatan APK SMP/ sederajat dan APK SMA/ sederajat tersebut tidaklah signifikan artinya bahwa jumlah penduduk yang bersekolah diluar usianya tidak banyak.

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, maka Angka Partisipasi Murni (APM) mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu.

Tabel 2.20 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017

No	Tahun	Penduduk Usia 7-12 Tahun	Siswa Usia 7-12 tahun			APM			
			SD	MI	Paket A Setara	Tidak Termasuk Paket A Setara		Termasuk Paket A Setara	
						Jumlah	%	Jumlah	%
1	2012/2013	554,255	490,436	63,236	267	553,672	99.89	553,954	99.95
2	2013/2014	557,174	487,863	68,816	282	556,679	99.91	556,961	99.96
3	2014/2015	559,704	485,418	143,474	270	558,848	99.85	559,130	99.90
4	2015/2016	566,512	490,171	75,534	302	565,705	99.86	566,007	99.91
5	2016/2017	574,512	495,036	77,274	282	572,310	99.62	572,592	99.67

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Melihat besaran APM SD/ sederajat termasuk paket A setara yang hampir mencapai 100 persen tahun 2012/2013 – 2016/2017, hal ini menggambarkan bahwa jumlah penduduk yang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat diluar usia 7-12 tahun semakin sedikit atau besaran penduduk yang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat sesuai dengan usianya, semakin besar. Bila melihat selisih jumlah penduduk usia 7-12 tahun dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat tahun 2012/2013 – 2016/2017, selisihnya sangat kecil. Berarti hampir semua penduduk usia 7-12 tahun bersekolah pada jenjang SD/ sederajat. Adapun target APM SD/ sederajat tahun 2016/2017 adalah 99.83% dengan realisasi 99.67 persen. Realisasi yang semakin mendekati target ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun yang dilakukan Pemprov NTB telah menunjukkan hasil yang menggembirakan.

Tabel 2.21 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017

No.	Tahun	Penduduk Usia 13-15 Tahun	Siswa Usia 13-15 tahun				APM			
			SMP	MTs	SMP Terbuka	Paket B Setara	Tidak Termasuk Paket B Setara		Termasuk Paket B Setara	
							Jumlah	%	Jumlah	%
1	2012/2013	271,780	160,857	90,091	4,265	2,986	255,213	93.90	258,199	95.00
2	2013/2014	275,667	162,823	95,973	4,990	3,097	263,786	95.69	266,883	96.81
3	2014/2015	270,049	162,388	93,240	3,896	3,032	259,524	96.10	262,556	97.23
4	2015/2016	271,023	166,854	91,900	3,896	2,386	262,650	96.91	265,036	97.79
5	2016/2017	271,934	167,522	93,040	3,120	3,398	263,682	96.97	267,080	98.22

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Dari tabel diatas diketahui bahwa APM jenjang SMP/ sederajat hampir mencapai nilai 100%. Hal ini dapat dilihat dari kecilnya selisih antara jumlah penduduk usia 13-15 tahun dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang bersekolah pada jenjang SMP/ sederajat. Adapun target APM SMP/ sederajat tahun 2016/2017 adalah 97.77 persen dengan realisasi 98.22 persen.

Tabel 2.22 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SM (SMA, MA, SMK) Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017

No.	Tahun	Penduduk Usia 16-18 Tahun	Siswa Usia 16-18 tahun						APM				Total APM (SM)
			SMA	MA	SMK	Paket C	SMALB	Jumlah	SMA	MA	SMK	Paket C	
1	2012/2013	259,702	85,462	50,383	46,599	5,944	70	188,458	32.91	19.40	17.94	2.29	72.57
2	2013/2014	264,659	88,879	53,322	51,435	4,078	76	197,790	33.58	20.15	19.43	1.54	74.73
3	2014/2015	265,971	88,945	52,520	56,636	3,979	113	202,194	33.44	19.75	21.29	1.50	76.02
4	2015/2016	267,108	93,846	54,987	58,120	3,381	134	210,468	35.13	20.59	21.76	1.27	78.80
5	2016/2017	267,146	96,647	60,212	62,240	3,381	174	222,654	36.18	22.54	23.30	1.27	83.35

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Trend APM jenjang SMA/ sederajat tahun 2012/2013 – 2016/2017 semakin meningkat. Hal ini nampak pada jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah pada jenjang SMA/ sederajat pada tiap tahunnya semakin meningkat. Capaian APM SMA/ sederajat tahun 2016/2017 adalah 83.35 persen dari target 81.72 persen.

Tabel 2.23 Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017

No	Tahun	APM SD/MI (%)	APM SMP/ MTs (%)	APM SMA/MA/ SMK (%)
1	2012/2013	99.95	95.00	72.57
2	2013/2014	99.96	96.81	74.73
3	2014/2015	99.90	97.23	76.02
4.	2015/2016	99.91	97.79	78.80
5.	2016/2017	99,67	98,22	83,35

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Tahun 2017

Dari ketiga jenjang pendidikan diatas, nilai APM cenderung mengalami kenaikan. APM SD/ sederajat meskipun fluktuatif (menurun) namun angkanya tetap mendekati 100 persen. APM yang mendekati 100 persen menunjukkan bahwa hampir 100 persen penduduk bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya.

Definisi Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai (termasuk didalamnya pendidikan non formal dan paket A, B, dan C) turut

diperhitungkan. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Tabel 2.24 Angka Partispasi Sekolah (APS) 2011-2017 di Provinsi NTB

Tahun	7-12 th	13-15 th	16-18 th	19-24 th
2011	97.85	91.40	60.09	16.99
2012	98.18	91.25	61.07	17.82
2013	98.20	92.23	66.40	22.64
2014	99.11	97.27	75.68	26.73
2015	99.48	97.44	75.86	26.84
2016	99.42	97.60	76.24	27.79
2017	99.43	97.69	76.61	28.52

Sumber BPS-RI Susenas 2003-2017

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, APS semakin rendah. APS jenjang pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat tahun 2011-2017 menunjukkan angka mendekati 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa APS untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) tinggi karena dampak dari program wajib belajar 9 tahun dan didorong pula oleh program pemberian bantuan dana BOS yang dicanangkan dan dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi NTB. Selain itu upaya pemerintah provinsi untuk memperluas akses pendidikan dasar sampai ke daerah terpencil untuk menjangkau masyarakat terpencil sudah menampakkan hasilnya. APS jenjang SD dan SMP yang mendekati 100 persen menunjukkan terbukanya peluang lebih besar bagi masyarakat dalam mengakses jenjang pendidikan dasar tersebut. Sementara untuk APS usia 16-18 (jenjang SMA) dan usia 19-24 (jenjang perguruan tinggi) masih tergolong rendah disebabkan oleh masih terbatasnya akses pendidikan menengah dan tinggi di daerah (kabupaten / kecamatan dan daerah terpencil), belum semua penduduk usia 16-18 tahun dapat ditampung di sekolah yang ada dan juga disebabkan oleh keterbatasan dana untuk dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Angka melanjutkan sekolah dan angka *drop out* adalah salah satu *tools* untuk mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan yang berimplikasi pada pencapaian rata-rata lama sekolah.

Tabel 2.25 Angka Melanjutkan dari Lulusan SD/MI ke SMP/MTs Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017

No.	Tahun	Lulusan 2015/2016			Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs Tahun 2016/2017					
		SD	MI	Jumlah	SMP	%	MTs	%	Jumlah	%
1	2012/2013	85,115	10,529	95,644	60,347	63.10	36,014	37.65	96,361	100.75
2	2013/2014	83,953	10,567	94,520	60,243	63.74	36,623	38.75	96,866	102.48
3	2014/2015	85,180	10,469	95,649	59,892	62.62	36,804	38.48	96,696	101.09
4	2015/2016	87,163	13,621	100,784	62,287	61.80	39,381	39.07	101,668	100.88
5	2016/2017	87,278	14,051	101,329	60,683	59.89	40,691	40.16	101,374	100.04

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Berdasarkan tabel diatas, dari tahun 2012/2013 – 2016/2017 diketahui bahwa angka melanjutkan sekolah dari jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTs diatas 100%. Dari jumlah yang melanjutkan sekolah dari SD ke SMP terlihat bahwa semua lulusan SD telah melanjutkan sekolah ke jenjang SMP, sehingga angka melanjutkan sekolah diatas 100 persen. Target angka melanjutkan sekolah jenjang SD/MI ke jenjang SMP/MTs tahun 2016/2017 adalah 100 persen dengan realisasi mencapai 100,04 persen.

Tabel 2.26 Angka Melanjutkan dari Lulusan SMP/MTs ke SM (SMA, SMK, MA) Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017

No.	Tahun	Lulusan 2015/2016			Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SM th. 2016/2017							
		SMP	MTs	Jumlah	SMA	%	SMK	%	MA	%	Jmlah	%
1	2012/2013	53,719	24,738	78,457	34,305	43.72	20,920	26.66	21,001	26.77	76,226	97.16
2	2013/2014	50,420	26,202	76,622	33,590	43.84	22,032	28.75	20,213	26.38	75,835	98.97
3	2014/2015	51,057	28,309	79,366	36,017	45.38	22,335	28.14	20,213	25.47	78,565	98.99
4	2015/2016	57,028	30,988	88,016	36,887	41.91	24,024	27.30	26,254	29.83	87,165	99.03
5	2016/2017	58,021	31,028	89,049	36,246	40.70	25,721	28.88	26,254	29.48	88,221	99.07

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka melanjutkan sekolah jenjang SMP/MTs ke jenjang SMA/SMK/MA dari tahun 2012/2013 – 2016/2017 hampir mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena masih ada beberapa lulusan SMP/MTs yang tidak/belum melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/MA/SMK. Capaian angka melanjutkan sekolah jenjang SMP/MTs ke SMA/MA/SMK tahun 2016/2017 adalah 99.07 persen dari target 98.78 persen.

Angka putus sekolah adalah salah satu ukuran kinerja atau tools pembangunan pendidikan yang sangat mempengaruhi rata-rata lama sekolah. Definisi angka putus sekolah adalah proporsi anak menurut kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Adapun kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-18 tahun.

Tabel 2.27 Angka Putus Sekolah (DO) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017

No.	Tahun	Angka Putus Sekolah (DO) SD, SMP, SMA dan SMK							
		SD	%	SMP	%	SMA	%	SMK	%
1	2012/2013	1,116	0.20	843	0.48	1,259	1.32	915	1.84
2	2013/2014	1,047	0.19	822	0.47	1,128	1.15	857	1.66
3	2014/2015	969	0.18	801	0.45	990	1.02	907	1.56
4	2015/2016	894	0.17	582	0.33	828	0.82	955	1.53
5	2016/2017	782	0.15	463	0.25	688	0.67	864	1.37

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Tahun 2012/2013 sampai 2016/2017, angka *drop out* atau angka putus sekolah terus mengalami penurunan pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK. Capaian angka putus sekolah jenjang SD dan SMP tahun 2016/2017 masing masing 0,15 persen dari target 0,25 persen dan 0,25 persen dari target 0,45 persen. Penurunan angka putus

sekolah ini merupakan dampak dari intervensi program pembangunan bidang pendidikan seperti pemberian bantuan beasiswa miskin bagi siswa kurang mampu dan pemberian dana BOS. Sementara pencapaian angka *drop out* jenjang SMA/SMK 0,93 persen dari target 0,84 persen. Penurunan angka *drop out* mempengaruhi angka rata-rata lama sekolah.

Melalui penancangan program unggulan penurunan Angka *Drop Out* menuju Nol (ADONO) yang ditindak lanjuti dengan pemberian beasiswa bagi siswa miskin pada semua jenjang pendidikan dan dengan telah dipenuhinya dana BOS untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs yang bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu, menunjukkan hasil yang menngembirakan yaitu menurunnya angka putus sekolah dan meningkatkan angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Dari grafik diatas diketahui bahwa penurunan persentase jumlah siswa putus sekolah terjadi pada semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2012/2013, persentasenya mencapai angka 0,33 persen pada tingkat SD/MI, 0,65 persen untuk SMP/MTs, dan 1,77 persen untuk SMA/MA/SMK. Sementara pada tahun 2016/2017 persentase angka putus sekolah berada pada angka 0,15 persen pada tingkat SD/MI, 0,25 persen untuk SMP/MTs, dan 0,93 persen untuk SMA/MA/SMK dengan rata-rata penurunan pertahun 0,05 persen untuk SD/MI, 0,10 persen untuk SMP/MTs dan 0,21 persen untuk SMA/MA/SMK. Target penurunan angka putus sekolah tahun 2017/2018 pada semua jenjang pendidikan optimis dapat dicapai dengan tetap meluncurkan program pemberian beasiswa miskin dan melakukan penanganan dini terhadap siswa yang potensial putus sekolah.

Beberapa strategi intervensi /inovasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka penurunan angka *drop out* antara lain:

- a. Bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan peran serta keluarga terutama orang tua dalam pendidikan anak mereka.
- b. Melaksanakan program Paket A, B dan C, serta membangun sekolah SD-SMP satu atap untuk wilayah terpencil dan terisolir.
- c. Layanan khusus bagi anak-anak yang terpaksa bekerja karena alasan ekonomi melalui program beasiswa dan pendidikan inklusi.
- d. Meningkatkan jumlah SMA terbuka secara bertahap pada semua kabupaten / kota yang pada saat ini baru ada di Kabupaten Lombok Barat dengan sekolah induk SMA Negeri 1 Narmada;
- e. Meningkatkan APK dan APM SMA/MA/SMK/Paket C dengan terus memfasilitasi berbagai bantuan misalnya dengan menambah fasilitas pendidikan baik itu berupa Pembangunan Unit Sekolah Baru, Ruang Kelas Baru, Rehabilitasi gedung dan ruang kelas, membangun dan melengkapi Laboratorium, dan Perpustakaan sekolah untuk memenuhi target setiap Kecamatan di Provinsi NTB memiliki minimal 1 SMA dan 1 SMK, tersedianya Biaya Operasional Sekolah (BOS), memberikan Beasiswa Miskin

(BSM) dan meningkatkan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan khususnya pendidikan menengah.

- f. Mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 4 Tahun 2015 yang memberikan implikasi hukum dan komitmen penganggaran penyelenggaraan pendidikan di provinsi NTB.

Adapun jumlah siswa yang mendapat Program Indonesia Pintar (PIP) dari APBN sebanyak 57.372 siswa pada tahun 2017 dengan total dana Rp 56.454.500.000,- yang diberikan kepada siswa SMA dan SMK (sesuai kewenangan Provinsi). Sementara dana BOS yang bersumber dari APBD sebesar Rp.203.076.077.000,- dari dana yang tersedia tahun 2017 dan sudah terealisasi sebesar Rp. 190.418.960.000,- (93,77%).

Tabel 2.28 Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMA dan SMK yang Bersumber dari APBN Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SISWA PENERIMA PROGRAM			
		SMA	Rp. (000)	SMK	Rp. (000)
1	Kota Mataram	2.363	1.924.500	1.476	2.938.000
2	Lombok Barat	5.003	4.112.500	2.391	3.357.500
3	Lombok Tengah	7.784	6.505.500	1.787	2.962.500
4	Lombok Timur	8.265	6.618.000	3.264	4.553.500
5	Lombok Utara	2.458	1.997.000	752	1.000.000
6	Sumbawa Barat	1.068	882.500	322	472.000
7	Sumbawa	3.049	2.569.000	1.275	1.515.500
8	Dompu	3.193	2.691.500	1.029	1.257.000
9	Bima	8.730	7.201.000	1.013	1.505.500
10	Kota Bima	1.372	1.141.500	778	1.250.000
	JUMLAH	43.285	35.643.000	14.087	20.811.500

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Rincian jumlah siswa penerima Program Indonesia Pintar (PIP) yang bersumber dari APBN dan dana BOS yang bersumber dari APBD tahun 2017 se-NTB menurut tingkat pendidikan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.29 Pemberian Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB Tahun 2017

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	JUMLAH
A.	Pemberian Program Indonesia Pintar (PIP)		57.372
	a. PIP SMA	Siswa	43.285
	b. PIP SMK	Siswa	14.087
B.	Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		868.410
	a. BOS SD/SDLB	Siswa	511.713
	b. BOS SMP	Siswa	181.231
	c. BOS SMA	Siswa	102.040
	d. BOS SMK	Siswa	70.303
	e. BOS SLB (SD/SMP/SMA)	Siswa	3.123

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Buta huruf bagi penduduk usia 15 tahun keatas adalah merupakan salah satu indikator kinerja RPJMD 2013-2018 untuk mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan di Provinsi NTB. Target buta huruf tahun 2017 adalah 10,85 persen sedangkan capaian tahun 2017 baru 12,86 persen. Masih tertinggal 2.01 point untuk mengejar target yang ditetapkan RPJMD NTB 2013-2018.

Tabel 2.30 Persentase Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 tahun Keatas

NO	KABUPATEN/KOTA	Angka Buta Huruf 15 + (%)			
		2014	2015	2016	2017
1	Lombok Barat	17.98	15.55	18.62	15.04
2	Lombok Tengah	21.51	21.26	19.06	18.26
3	Lombok Timur	10.71	14.38	12.53	14.34
4	Sumbawa	8.38	5.92	7.46	6.95
5	Dompu	10.73	8.48	8.26	8.42
6	Bima	9.75	7.62	9.52	10.59
7	Sumbawa Barat	5.55	6.4	5.46	5.37
8	Lombok Utara	19.53	18.62	18.96	16.54
9	Kota Mataram	6.41	6.74	7.26	8.29
10	Kota Bima	3.58	4.28	4.21	6.78
Provinsi		13.04	13.03	12.94	12,86

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka buta huruf dari tahun 2014-2017 mengalami penurunan sebanyak 0,18 persen. Penurunan angka buta huruf ini sebagai implikasi dari meningkatnya APS, APK dan APM. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memerangi buta huruf bagi penduduk usia 15 tahun keatas adalah memperluas jangkauan program keaksaraan fungsional dasar, keaksaraan fungsional mandiri, menambah tutor keaksaraan yang terlatih dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk masyarakat untuk memerangi buta aksara sebagai sebuah gerakan moral masyarakat. Angka melek huruf dan Buta Huruf tahun 2016 per Kabupaten /Kota, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.31 Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk 15+ (BPS, Publikasi IPM) Provinsi NTB Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf 15+ (%)	Angka Buta Huruf 15+ (%)
1	Lombok Barat	84.03	15.04
2	Lombok Tengah	81.52	18.26
3	Lombok Timur	85.48	14.34
4	Sumbawa	92.66	6.95
5	Dompu	90.34	8.42
6	Bima	89.11	10.59
7	Sumbawa Barat	93.70	5.37
8	Lombok Utara	82.40	16.54
9	Kota Mataram	91.45	8.29
10	Kota Bima	92.76	6.78
Jumlah		86,64	12.86

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2017

Tahun 2017 melalui Dana Dekonsentrasi APBN Tahun 2017 Kemendikbud RI membiayai program Keaksaraan Dasar sebanyak 10.500 warga Belajar dan 8.100 KUM. Selain itu ada juga Program Pendidikan non formal dimana jumlah siswa yang dibelajarkan paket A, B, C dan Keaksaraan Dasar (KD) di kabupaten kota berjumlah 13.496 orang dan program lintas sektor lainnya terkait program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi NTB.

Tabel 2.32 Jumlah paket A, B, C , KD dan KM Tahun 2017

NO	KEGIATAN	JUMLAH
1.	Paket A	1.590
2.	Paket B	5.026
3.	Paket C	6.880
4.	Keaksaraan Dasar	10.500
5.	Keaksaran Mandiri	8.100
	Jumlah	32.096

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Permasalahan yang dihadapi dalam proses penuntasan Buta Huruf di Provinsi NTB antara lain sebagai berikut:

1. Program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) kepada Warga Buta huruf masih terbatas jangkauannya. Program ini diperuntukkan bagi warga belajar yang telah mendapatkan program pembelajaran agar tidak kembali buta huruf.
2. Data base terkait warga masyarakat yang tidak dapat membaca menulis dan berhitung *by name by address* belum tersedia.
3. Tutor tidak menguasai SKL (standar kompetensi lulusan) dan KD (kompetensi dasar) sehingga lulusannya tidak memiliki standar yang jelas.
4. Belum semua pemda menjadikan buta huruf sebagai permasalahan pembangunan didaerahnya.

Upaya yang dilakukan dalam menurunkan angka buta huruf, antara lain :

1. Pemberantasan buta huruf menjadi sebuah "gerakan" yang berbasis desa/kelurahan dengan model intervensi *by name by address*;
2. Meningkatkan koordinasi mulai Tingkat Pusat sampai dengan Desa, Perguruan Tinggi dan berbagai elemen masyarakat bersama dalam penuntasan buta huruf;
3. Berkomitmen menyediakan anggaran yang cukup untuk melaksanakan program kegiatan baik berupa Keaksaraan dasar dan program lanjutan Keaksaraan Usaha Mandiri;
4. Memperbanyak jumlah Tutor dan merubah bentuk fasilitasi dari suasana "kelas" yang cenderung formal menjadi hubungan personal yang bersifat informal dan interaktif;
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pendidikan Non Formal Program Paket A, Paket B dan Paket C.

▪ **Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah**

Dalam rangka perwujudan misi pertama RPJMD 2013-2018 yaitu “Mempercepat perwujudan masyarakat yang berkarakter Melalui Pemantapan Ketaatan Beragama, Peningkatan Budi Pekerti dan Pengembangan Toleransi” telah ditetapkan indikator kinerja yaitu “penerapan pendidikan karakter dan nilai budaya lokal pada sekolah dan madrasah” untuk mengukur performa pelaksanaan program prioritas terkait penerapan pendidikan karakter. Salah satu terobosan yang dilakukan untuk mencapai target penerapan pendidikan karakter adalah dengan menyusun kurikulum pendidikan muatan lokal berbasis akhlak mulia dan budaya di sekolah. Pada tahun 2017 penerapan pendidikan karakter dan nilai budaya lokal telah dilaksanakan pada semua sekolah dan madrasah.

Pendidikan karakter yang dimaksud dalam RPJMD 2013-2018 bersumber dari nilai-nilai agama, Pancasila, budaya bangsa, nilai-nilai universal, nilai budaya lokal dan tujuan pendidikan nasional yang terdiri dari 18 nilai karakter, yaitu: Religius, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa Ingin Tahu, Semangat Kebangsaan, Cinta Tanah Air, Menghargai Prestasi, Bersahabat/ Komunikatif, Cinta Damai, Gemar Membaca, Peduli Lingkungan, Peduli Sosial, dan Tanggung Jawab. Pendidikan berkarakter dibentuk sejak anak masih belum sekolah yaitu dibentuk dari dalam rumah oleh orang tua, saudara atau keluarga terdekat dari anak tersebut. Sejak kecil anak diajarkan tentang nilai-nilai yang mengandung unsur agama, Pancasila dan budaya. Oleh sebab itu pendidikan pra sekolah menjadi tujuan utama dalam membentuk karakter anak seperti pendidikan karakter di lembaga PAUD/TK/RA. Pemerintah harus terus melakukan pembinaan kepada guru/pendamping dan secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana lembaga PAUD yang ada. Tahun 2017 target penerapan pendidikan karakter dan nilai budaya lokal pada sekolah dan madrasah sebesar 65% sedangkan realisasi adalah sebesar 100% artinya capaian tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Sekolah dapat dikategorikan telah menerapkan pendidikan karakter dan nilai budaya lokal apabila telah menerapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembiasaan perilaku/budaya baik melalui :
 - Kegiatan Imtaq (Peningkatan Iman dan Taqwa)
 - Ekstra Kurikuler
 - Pembiasaan perilaku baik sebelum pembelajaran dimulai.
 - Pembacaan kitab suci Al Quran dan Literasi (bacaan latin) yang bermuatan pembentukan karakter selama 15 menit setiap hari sebelum Proses Belajar Mengajar PBM).
2. Intervensi dalam bentuk pengintegrasian nilai karakter ke dalam mata pelajaran melalui mata pelajaran antara lain :
 - Pendidikan Agama
 - Pendidikan Kewarga Negara (PKN)
 - Sosiologi/IPS Terpadu
 - Muatan Lokal

Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 (K13) secara langsung telah menerapkan pola Intervensi dalam bentuk pengintegrasian nilai karakter ke dalam mata pelajaran. Silabus kurikulum muatan lokal dengan tujuan untuk menyeragamkan pembelajaran muatan lokal di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah disusun sehingga kandungan kearifan lokal dapat terakomodir secara keseluruhan baik dari etnis Sasak, Samawa dan Mbojo. Sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah sekolah yang telah menerapkan pendidikan karakter dan nilai budaya lokal di provinsi NTB telah mencapai 100%, yaitu 3.161 SD, 866 SMP, 311 SMA dan 295 SMK, sebagaimana dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.33 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Yang Telah Menerapkan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal di Provinsi NTB Tahun 2017

No	Kabupaten/ Kota	SD			SMP			SMA			SMK		
		N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml	N	S	Jml
1	Lombok Barat	340	17	357	64	27	91	14	14	28	14	26	40
2	Lombok Tengah	576	19	595	89	65	154	18	36	54	10	47	57
3	Lombok Timur	660	62	722	103	107	210	23	36	59	10	70	80
4	Sumbawa	361	7	368	93	9	102	19	7	26	10	9	19
5	Dompu	212	3	215	48	9	57	17	9	26	9	12	21
6	Bima	410	4	414	110	16	126	34	20	54	10	14	24
7	Sumbawa Barat	88	9	97	29	3	32	7	3	10	5	3	8
8	Lombok Utara	143	6	149	33	2	35	7	6	13	5	7	12
9	Kota Mataram	146	19	165	24	15	39	8	16	24	10	12	22
10	Kota Bima	72	7	79	15	5	20	5	12	17	5	7	12
	Jumlah	3008	153	3161	608	258	866	152	159	311	88	207	295

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB untuk mendukung pencapaian indikator Penerapan pendidikan karakter dan nilai budaya lokal pada sekolah dan madrasah, yaitu : melaksanakan Program kegiatan yang mendukung langsung upaya peningkatan capaian pendidikan karakter dan nilai budaya lokal pada sekolah dan madrasah seperti : menyelesaikan proses lahirnya Kurikulum muatan lokal yang didalamnya termuat akhlaq mulia dan budaya lokal disekolah dan madrasah dalam bentuk Peraturan Gubernur NTB dan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam program peningkatan kompetensi Guru dan kepala sekolah dalam hal pendidikan karakter dan penerapan nilai budaya lokal di sekolah.

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator Penerapan pendidikan karakter dan nilai budaya lokal pada sekolah dan madrasah pada tahun 2017 antara lain:

1. Telah terintegrasinya pendidikan karakter dalam semua kurikulum sekolah melalui penerapan kurikulum 2013;

2. Telah dilakukan penyusunan kurikulum muatan lokal sebagai salah satu upaya peningkatan karakter terkait kearifan lokal, dan untuk tahun 2017 telah disusun draft Kurikulum muatan lokal untuk tiga jenjang yaitu SMA, SMK dan SLB.
3. Selain itu dilaksanakannya program kegiatan pembinaan karakter bagi peserta didik dalam bentuk lomba-lomba seperti kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Debat Bahasa Inggris, Jepang dan Bahasa Indonesia, dimana keseluruhan Lomba dalam kegiatan ini dimaksudkan dapat merangsang tumbuhnya jiwa sportivitas, daya saing yang tinggi, serta kedisiplinan dan mematuhi aturan.

Dalam penyelenggaraan urusan pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggungjawab urusan pendidikan menemui beberapa permasalahan, dan permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan beberapa solusi, sebagaimana tabel berikut:

2. KESEHATAN

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan merupakan unsur wajib yang harus dilaksanakan dan menjadi hak masyarakat untuk mendapat hak-hak dasar terkait dengan pelayanan kesehatan. Sesuai dengan capaian pelaksanaan kinerja urusan bidang kesehatan diukur melalui indikator kinerja daerah :

Tabel 2.34 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2016 – 2017

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
			2016		2017	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	65,90	65,48	66,60	NA
2	Prevelensi Kurang Gizi	%	16,00	20,20	15,50	22,6
3	Cakupan Jamban Keluarga	%	76,00	79,38	78,00	82,67

Sumber : BPS Provinsi NTB dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan diselenggarakan oleh 4 Perangkat Daerah, yakni Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Provinsi, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi, dan Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut :

a. Dinas Kesehatan

Capaian indikator kinerja RPJMD NTB tahun 2017 pada urusan bidang Kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dapat dilihat pada tabel berikut.

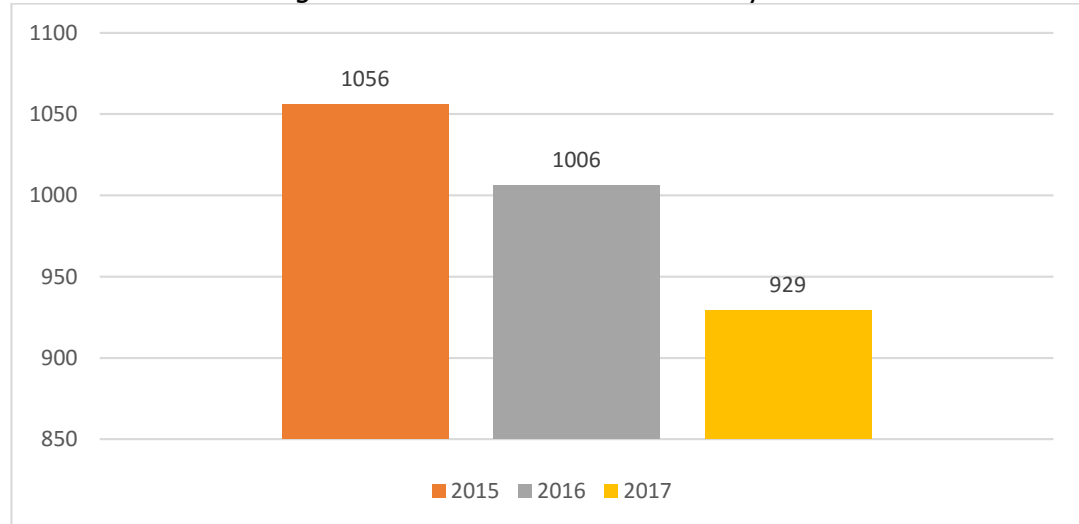
Tabel 2.35 Capaian Indikator Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Dalam RPJMD NTB Tahun 2017

NO	INDIKATOR	SATUAN	2015	2016	2017	
					TARGET	REALISASI
1.	Usia Harapan Hidup/UHH	Tahun	65,38	65,48 (Target 65,90)	66,60	NA
2.	Prevalensi Kurang Gizi (WHO)	%	17,01	20,2 (target 16,00)	15,5	22,6
3.	Cakupan Jamban Keluarga	%	75,06	79,38 (target 76%)	78	82,67

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Tahun 2015 Usia Harapan Hidup (UHH) mencapai 65.38 tahun, meningkat menjadi 65.48 tahun pada tahun 2016, sedangkan capaian UHH tahun 2017 masih menunggu *release* dari BPS. Memperhatikan trend kasus kematian bayi selama kurun waktu 3 tahun terakhir yang menunjukkan trend penurunan diharapkan UHH tahun 2017 akan meningkat. Gambaran penurunan kasus kematian bayi dalam 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.8 Perkembangan Penurunan Kasus Kematian Bayi Tahun 2015-2017



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Jumlah kematian bayi, tahun 2017 sebanyak 929 kasus dengan proporsi 9.0 per 1.000 kelahiran hidup, menurun dibandingkan tahun 2016 sebanyak 1.006 kasus dengan proporsi 9.86 per 1.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian bayi dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun 2015-2017, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.36 Kematian Bayi Tahun 2015 - 2017

NO	KABUPATEN/ KOTA	2015		2016		2017	
		Kasus Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Kasus Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup	Kasus Kematian Bayi	Jumlah Kelahiran Hidup
1	Mataram	34	8.422	25	8.422	44	8.231
2	Lombok Barat	42	13.739	38	13.739	31	13.772
3	Lombok Utara	82	4.391	59	4.391	86	4.567
4	Lombok Tengah	192	18.425	192	18.425	242	19.641
5	Lombok Timur	460	26.457	467	26.457	346	26.145
6	Sumbawa Barat	28	2.813	24	2.813	17	2.857
7	Sumbawa	75	8.838	66	8.838	30	8.853
8	Dompu	35	5.387	30	5.387	40	5.700
9	Bima	91	10.013	80	10.013	74	10.207
10	Kota Bima	17	3.450	25	3.450	19	3.177
	NTB	1056	101.935	1006	101.935	929	103.170
	Proporsi (per 1.000 KH)	10,35		9.86		9.00	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Demikian pula dengan jumlah kematian ibu yang terus mengalami penurunan yakni tahun 2015 sebanyak 95 kasus dengan proporsi 93,19 per 100.000 kelahiran

hidup, menurun menjadi 92 kasus dengan proporsi 90,25 per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2016. Pada tahun 2017 menurun lagi menjadi 85 kasus dengan proporsi sebesar 82,38 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah kematian ibu dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun 2015-2017, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.37 Jumlah Kematian Ibu Dibandingkan Dengan Jumlah Kelahiran Hidup Per Kabupaten/Kota Tahun 2015- 2017

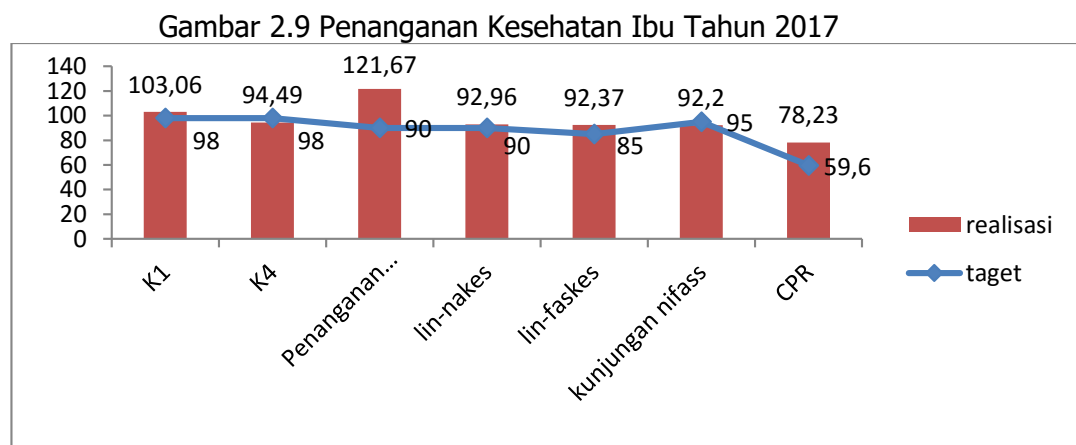
NO	KABUPATEN/ KOTA	2015		2016		2017	
		KASUS KEMATIAN IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	KASUS KEMATIAN IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP	KASUS KEMATIAN IBU	JUMLAH KELAHIRAN HIDUP
1	Mataram	10	8422	11	8.422	4	8.251
2	Lombok Barat	5	13739	5	13.739	3	13.772
3	Lombok Utara	2	4391	2	4.391	24	4.567
4	Lombok Tengah	16	18425	26	18.425	22	19.641
5	Lombok Timur	28	26457	20	26.457	4	26.145
6	Sumbawa Barat	1	2813	1	2.813	4	2.837
7	Sumbawa	10	8838	7	8.838	4	8.853
8	Dompu	12	5387	6	5.387	8	5.700
9	Bima	8	10013	9	10.013	6	10.207
10	Kota Bima	3	3450	5	3.450	6	3.177
NTB		95	101.935	92	101.935	85	103.170
Proporsi (per 100.000 KH)		93,19		90.25		82.38	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Program kegiatan yang mendukung penurunan kematian bayi dan ibu dapat diukur dengan indikator antara lain: Pelayanan Antenatal (ANC) K1 s/d K4, Pertolongan Persalinan, Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas, Pelayanan Kesehatan Neonatus, Deteksi Dini Faktor Risiko dan Komplikasi, Penanganan Komplikasi Kebidanan, Pelayanan Neonatus dengan Komplikasi, Pelayanan Kesehatan Bayi, Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan kualitas KB.

Capaian indikator-indikator yang berpengaruh terhadap kematian ibu dan bayi sampai dengan Bulan Desember 2017 adalah sebagai berikut :

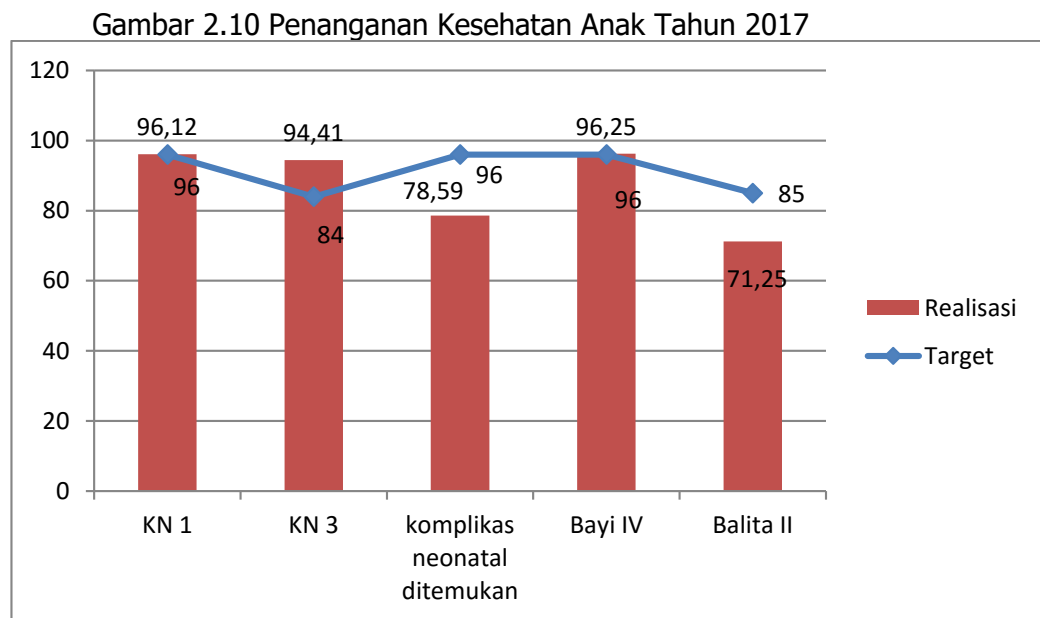
a. Capaian indikator kinerja program kesehatan ibu



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Dari grafik capaian indikator kesehatan ibu diatas sebagian besar indikator sudah mencapai target yang ditentukan, kecuali kunjungan keempat ibu hamil (K4) dan kunjungan nifas. Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah ketidaktahuan dan/atau ketidakdisiplinan ibu dalam melakukan pemeriksaan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu, sedangkan indikator ini merupakan lanjutan dari pemeriksaan ibu sebelumnya. Selain itu disebabkan juga karena kurangnya monitoring terhadap ibu hamil oleh petugas kesehatan /Bidan.

b. Capaian Indikator Kinerja Program Kesehatan Anak



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Dari grafik capaian kinerja program kesehatan anak di atas terdapat dua indikator yang tidak mencapai target yaitu Penanganan Komplikasi Neonatal, dan Kunjungan Balita II, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya melakukan pemeriksaan secara rutin Balita mereka.

Beberapa indikator kinerja yang mendukung penurunan kematian ibu dan bayi yaitu cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang menurunkan resiko kematian bagi ibu dan bayinya, berarti berpengaruh tidak langsung terhadap pencapaian indikator Usia Harapan Hidup (UHH).

Indikator ini menggambarkan perkiraan proporsi persalinan yang ditangani oleh tenaga kesehatan dan menggambarkan kemampuan manajemen program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam pertolongan persalinan sesuai standar. Sampai bulan Desember 2017 capaian persalinan oleh tenaga kesehatan sebesar 92,96 persen hal ini sudah menunjukkan bahwa persalinan yang di tangani oleh tenaga kesehatan sudah melebihi target yaitu 90 persen. Data cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan per Kabupaten/Kota sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.38 Cakupan Persalinan oleh Tenaga kesehatan Menurut Kabupaten/Kota s.d. Desember 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN 2017 (%)
1	Kota Mataram	89.06
2	Lombok Barat	92.29
3	Lombok Utara	78.41
4	Lombok Tengah	95.64
5	Lombok Timur	97.21
6	Sumbawa Barat	80.20
7	Sumbawa	86.69
8	Dompu	95.27
9	Bima	94.78
10	Kota Bima	91.42
	NTB	92.96

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang merupakan kontribusi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan seperti menggiatkan program Generasi Emas NTB (GEN) dan Aksi Seribu Hari (ASHAR), peningkatan kualitas atau kompetensi bidan melalui pelatihan-pelatihan antara lain Pelatihan Penanganan Gawat Darurat Obsetri dan Neonatal (PPGDON), dan Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini dan Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang). Selain itu peningkatan evaluasi pelayanan KIA oleh bidan koordinator dan bidan desa, pemberian penghargaan kepada bidan yang berprestasi, meningkatkan jumlah kelas ibu hamil, meningkatkan Audit Maternal Perinatal (AMP) serta penambahan jumlah bidan desa.

Program Generasi Emas NTB atau GEN adalah program unggulan pemerintah Provinsi NTB yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB 2013-2018, yaitu pada misi ke-4: "meningkatkan sumber daya manusia yang berdayasaing". Untuk mewujudkan misi tersebut, intervensi program GEN menitikberatkan pada pemberdayaan keluarga, melalui pembentukan Pasangan Ramah Anak (PARANA) dan penguatan institusi pelayanan dasar melalui PAUD HI.

Program unggulan ini mulai dilaksanakan sejak 2014 dengan melakukan study formatif untuk menyusun disain program. Kemudian 2015 mulai dilaksanakan intervensi awal di 10 Desa, yang terbagi atas 6 desa di Kabupaten Lombok Timur yaitu: Desa Sembalun, Desa Lendang Nangka Utara, Desa Wanasaba, Desa Pringgabaya, Desa Lendang Belo dan Desa Jero Gunung; serta 4 desa di Kabupaten Lombok Tengah yaitu: Desa Tanaq Beaq, Desa Pengerjek, Desa Sengerang dan Kelurahan Gerantung.

Pada tahun 2017 desa yang diintervensi sebanyak 100 desa yang tersebar di 10 Kab/Kota dengan jumlah sasaran 9.708 ibu hamil yang diintervensi pola asuh oleh Pendamping Desa, Kader GEN bekerjasama dengan Bidan Desa dan PLKB. Selain ibu hamil, sasaran lain yaitu 351 PAUD yang ada di 100 desa/kelurahan, dengan jumlah siswa yang diintervensi sebanyak 12.113 orang.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan yaitu Kelas Ibu Parana, Pelatihan SDIDTK bagi Bidan dan Tutor PAUD, dan Pemberian *Multiple Micro*

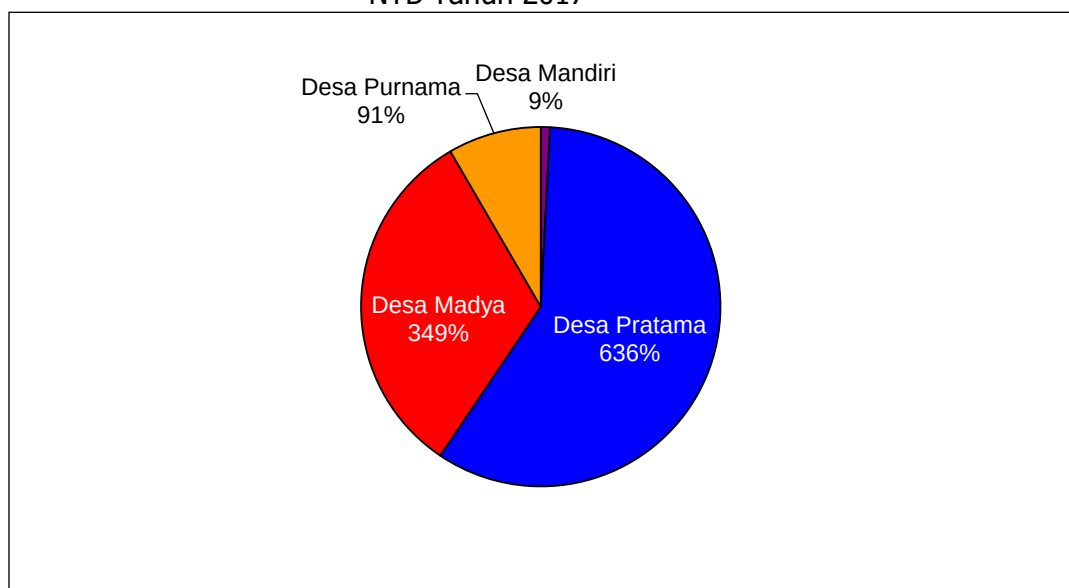
Nutrien bagi Ibu Hamil. Hasil yang dicapai selama tahun 2017 yaitu terdapat sebanyak 4.427 ibu yang mengikuti kelas PARANA (Pasangan Ramah Anak), sebanyak 11.960 Orang Tutor PAUD dan Bidan Desa yang mengikuti Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini dan Intervensi Deteksi Tumbuh Kembang), sebanyak 5.411 Ibu hamil yang diberikan paket MMN (*Multiple Micro Nutrien*), dan sebanyak 2.942 orang mendapatkan pendampingan dirumah.

Dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, kesiapsiagaan desa siaga yang ada di desa/kelurahan memiliki kontribusi yang positif terhadap capaian target Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi NTB. Pengembangan desa dan kelurahan Siaga Aktif merupakan program pengembangan desa siaga yang sudah dimulai sejak tahun 2006. Pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses belajar masyarakat desa dan kelurahan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatan.

Pelaksanaan pengembangan desa dan kelurahan siaga di Provinsi NTB sampai dengan tahun 2017 tercatat dari 1.137 desa/kelurahan. Dari jumlah tersebut sebanyak 1.085 desa (95,43%) telah mengembangkan desa siaga aktif. Hal ini menandakan bahwa desa dan kelurahan di Provinsi NTB telah memulai upaya mewujudkan desa dan kelurahan siaga.

Atas dasar kriteria desa dan kelurahan siaga aktif sesuai Kepmenkes RI Nomor. 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif. Capaian perkembangan desa siaga di Provinsi NTB menurut stratanya sebagai berikut.

Gambar 2.11 Capaian Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Menurut Strata Provinsi NTB Tahun 2017



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan bayi, Pemerintah Daerah berkomitmen menyediakan pembiayaan bagi ibu hamil dan bayi resiko tinggi dalam

program Jaminan Kesehatan Nasional Nusa Tenggara Barat dan juga mengcover masyarakat dan ibu hamil yang belum memiliki jaminan kesehatan di Provinsi NTB, yang kemudian dinamakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) NTB bersama dengan Bupati/Walikota se-Provinsi NTB. Kuota peserta JKN NTB yang terdaftar dalam kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 40.811 jiwa.

Tabel 2.39 Gambaran Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Provinsi NTB Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	PBI APBN	PBI NTB	PBI Kab/Kota	Total
1	Kota Mataram	145.049	3,783	14.734	163,566
2	Kabupaten Lombok Barat	366.477	5,552	7.701	379,730
3	Kabupaten Lombok Utara	137.531	1.828	46.589	185,948
4	Kabupaten Lombok Tengah	463.884	7.419	8.798	480,101
5	Kabupaten Lombok Timur	685.229	10.081	5.997	701,307
6	Kota Bima	53.405	1,334	6.344	61,083
7	Kabupaten Bima	233.533	3,896	15.999	253,428
8	Kabupaten Dompu	109.650	2,024	1.632	113,306
9	Kabupaten Sumbawa	172.018	3,803	47.465	223,286
10	Kabupaten Sumbawa Barat	47.663	1,091	49.080	97,834
11	Tambahan Provinsi		224		224
	Provinsi NTB	2,414.439	40.811	204.339	2,659,589

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Rincian peserta Jaminan Kesehatan Nasional secara keseluruhan di Provinsi NTB baik PBI, Non PBI maupun Non JKN sampai 31 Desember 2017 sebagai berikut.

Tabel 2.40 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi NTB Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	NON PBI	PBI
1	Kota Mataram	468.509	181.016	163,566
2	Kabupaten Lombok Barat	675.522	55.042	379,730
3	Kabupaten Lombok Utara	216.515	51.508	186,585
4	Kabupaten Lombok Tengah	930.797	96.687	480,101
5	Kabupaten Lombok Timur	1.183.204	136.516	163,566
6	Kota Bima	166.407	52.050	61.083
7	Kabupaten Bima	478.967	71.058	253.428
8	Kabupaten Dompu	245.387	42.420	113.306
9	Kabupaten Sumbawa	449.680	80.080	223.286
10	Kabupaten Sumbawa Barat	140.890	38.458	97.834
	PROVINSI NTB	4.955.878	804.835	2.660.226

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Dari tabel diatas, terlihat jumlah penduduk NTB yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 69,91 persen atau 3.465.061 jiwa (Non PBI + PBI). Besar dana yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi sebesar Rp.20.000.000.000 untuk masyarakat miskin diluar JKN Pusat.

Total realisasi dana sharing provinsi dan kab/kota adalah Rp. 28.023.324.000 dari Rp. 28.518.400.000 yang ditargetkan. Kabupaten Sumbawa Barat sampai dengan laporan ini disusun belum mengirimkan dana sharing tahun 2017, sedangkan Kabupaten Bima dan Kota Mataram realisasi hanya sebesar 80 persen. Total iuran peserta PBI NTB

yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan sampai 31 Desember 2017 adalah Rp. 28.023.324.000 dengan jumlah kepesertaan 40.811, sebagaimana tabel berikut.

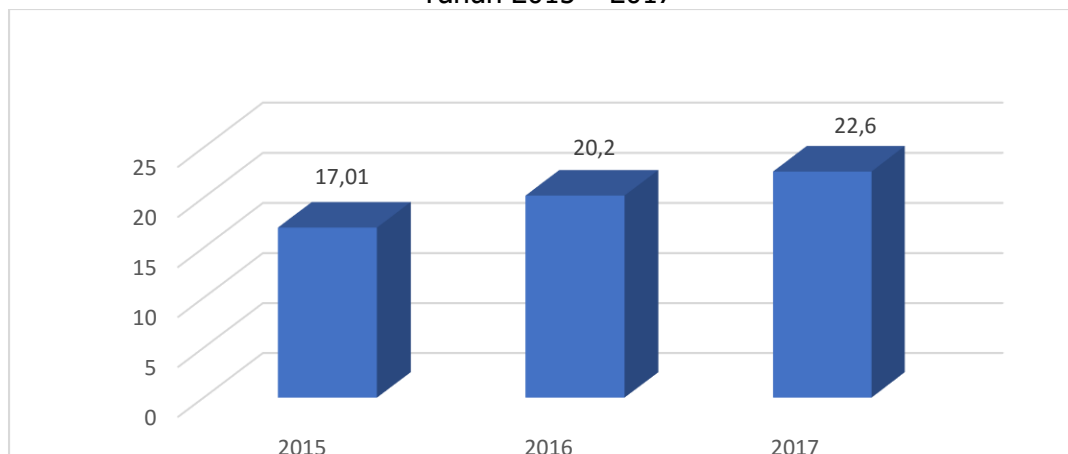
Tabel 2.41 Dana *Sharing* Jamkesmas Provinsi Tahun 2017

NO	KABUPATEN / KOTA	TARGET DANA SHARING	REALISASI DANA SHARING YG SUDAH DITRANSFER KE BKSPJK	%	KET
1	Provinsi	20.000.000.000	20.000.000.000	100	
2	Kota Mataram	610.500.000	486.410.000	80	
3	Lombok Barat	893.000.000	893.000.000	100	
4	Lombok Tengah	1.523.150.000	1.523.150.000	100	
5	Lombok Timur	1.657.500.000	1.657.500.000	100	
6	Lombok Utara	272.100.000	500.000.000	-	Sharing 2016 Tidak Ada Kerjasama
7	Sumbawa Barat	370.500.000	-	-	
8	Sumbawa	861.750.000	861.750.000	100	
9	Dompu	714.050.000	714.000.000	100	
10	Bima	1.318.200.000	1.089.864.000	83	
11	Kota Bima	297.650.000	297.650.000	100	
JUMLAH		28.518.400.000	28.023.324.000	97	

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Indikator RPJMD lain yang merupakan tanggung jawab urusan kesehatan adalah prevalensi kurang gizi. Data prevalensi kurang gizi diperoleh melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) yang dilakukan setiap tahun. Kurang gizi merupakan salah satu indikator pertumbuhan balita untuk menggambarkan berat badan relatif dibandingkan dengan umur anak (BB/U) yang berada di bawah -2 Standar Deviasi (*z score*). Indikator ini digunakan untuk menilai apakah seorang anak beratnya kurang atau sangat kurang, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengklasifikasikan apakah seorang anak mengalami kelebihan berat badan atau sangat gemuk. Kecenderungan Prevalensi Kurang Gizi hasil PSG dalam 3 tahun terakhir ditampilkan sebagaimana grafik berikut.

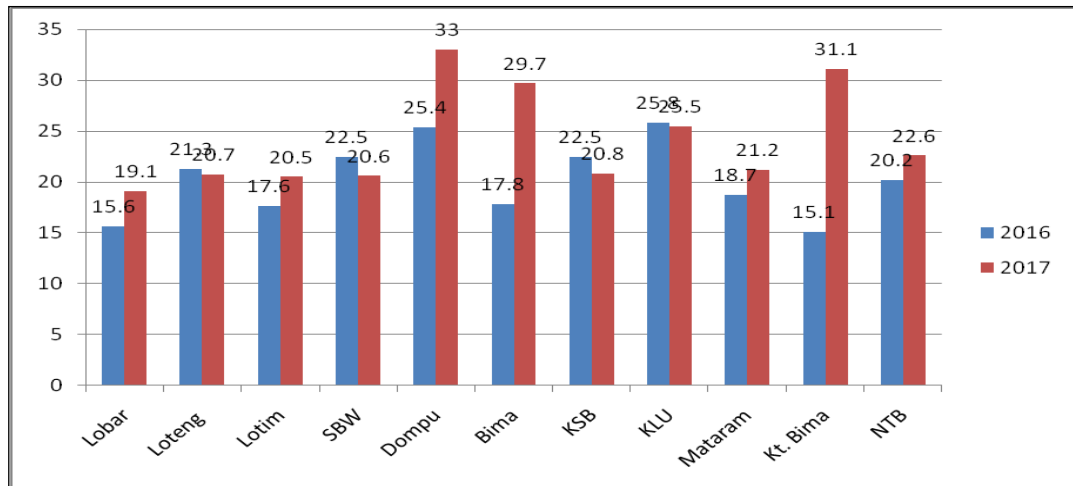
Gambar 2.12 Kecenderungan Prevalensi Kurang Gizi di Provinsi NTB Tahun 2015 – 2017



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Prevalensi Kurang Gizi di Provinsi NTB menunjukkan kecenderungan yang meningkat selama dua tahun terakhir yakni dari 17,01 persen tahun 2015 menjadi 20,2 persen di tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi 22,6 persen di tahun 2017.

Gambar 2.13 Prevalensi Berat Kurang (*Underweight*) Menurut Indeks Berat Badan menurut Umur Tahun 2016-2017



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Berdasarkan data diatas, kemungkinan meningkatnya kurang gizi (Gizi Buruk dan Gizi Kurang) disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Pemenuhan gizi yang kurang pada masyarakat dengan kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya gizi kurang, karena pola makan seseorang berkorelasi positif dengan kondisi kesejahteraan orang tersebut.
- Pola asuh dalam keluarga. Seringkali ditemukan balita yang diasuh oleh bukan orang tuanya dengan alasan orang tua yang bersangkutan pergi bekerja sebagai TKI/TKW, bercerai, meninggal dunia, bekerja diluar daerah dll.
- Masih ditemukan penyakit infeksi seperti TB, Diare, ISPA termasuk Pnemonia dan penyakit lainnya, yang sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan balita.
- Hygiene sanitasi lingkungan dan perorangan serta akses air bersih masih belum sesuai standar.
- Pemberian Makan pada Bayi dan Anak (PMBA) yang belum optimal. seperti Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Pemberian ASI Eksklusif, Makanan Pendamping ASI, menyusui sampai anak berusia 2 tahun dan juga pemberian makanan pada ibu hamil dan menyusui serta pemantauan pertumbuhan
- Pemanfaatan Posyandu sebagai deteksi dini masalah gizi masih dikelola oleh kesehatan saja.

Masalah gizi akan cepat ditangani jika ditemukan sedini mungkin, baik di posyandu ataupun pelayanan kesehatan lainnya. Kasus gizi kurang dan gizi buruk dipengaruhi oleh keaktifan orang tua menimbang anaknya dan melakukan pemeriksaan kesehatan anaknya di posyandu. Gambaran dari partisipasi

masyarakat/orang tua untuk ke posyandu dapat dilihat dari persentase partisipasi masyarakat terhadap kegiatan posyandu (D/S) yaitu jumlah balita yang datang ke posyandu dibandingkan dengan jumlah balita yang ada.

Selama pencapaian cakupan D/S belum mencapai 100 persen, maka kasus gizi buruk maupun Kejadian Luar Biasa (KLB) Gizi Buruk masih mungkin terjadi karena masih ada balita yang tidak terpantau pertumbuhannya secara dini oleh kader maupun Petugas Kesehatan di lapangan.

Status gizi seorang anak berkaitan erat dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Program Generasi Emas NTB (GEN) dan program Aksi Seribu Hari (ASHAR), yang merupakan program terpadu berbagai sektor dengan fokus tumbuh kembang pada anak merupakan program unggulan yang sangat strategis dalam upaya mengatasi gizi kurang dan gizi buruk. Upaya yang telah dilakukan Dinas Kesehatan untuk mendukung program GEN dan menurunkan prevalensi kurang gizi antara lain:

a. Pembinaan Keluarga Sehat

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hidup sehat bagi keluarga binaan. Sasarannya adalah kelompok rentan terhadap masalah kurang gizi seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita; dengan melibatkan peran serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan keluarga dalam penanggulangan masalah gizi.

b. Pendampingan ibu hamil, ibu menyusui dan ibu yang mempunyai baduta di 100 Desa GEN di kabupaten/kota se NTB oleh Mahasiswa dalam rangka ASHAR (Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan)

c. Peningkatan Kapasitas/Pelatihan Petugas Kesehatan dan Kader Posyandu terkait Pemberian Makan Bayi dan Anak. Kegiatan ini dilakukan di seluruh kabupaten/kota dengan melibatkan petugas gizi dan bidan di Puskesmas, bidan desa dan kader posyandu. Untuk kegiatan yang lebih teknis terkait menyusui dan Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) serta Pemantauan Pertumbuhan dengan peserta pelatihan pada tenaga kesehatan (Gizi, Bidan, dokter dan lain-lain)

d. Bekerjasama dengan lintas sektor terkait seperti TP PPK, DP3AP2KB, DPMPD, Perguruan Tinggi Kesehatan se-NTB, Organisasi Profesi (PERSAGI, IDI, IBI dan lain-lain), TOMA, TOGA, Forum Peduli ASI (FPA), Bappeda, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Hukum, dan lainnya dalam pembinaan keluarga sasaran, dan pendampingan pada sasaran prioritas seperti pengasuh balita yang mempunyai masalah gizi, ibu hamil anemia/KEK dan ibu menyusui. Untuk ibu menyusui lebih ditekankan pada pemberian makan pada bayi dan anak seperti Inisiasi Menyusui Dini (IMD), ASI Eksklusif, Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) dan menyusui sampai anak berusia 2 tahun atau lebih.

e. Distribusi Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil KEK dan Balita kurus di semua kabupaten/kota dengan prinsip dasar pemberian makanan tambahan anak balita adalah untuk memenuhi kecukupan gizi agar mencapai berat badan sesuai umur, sedangkan pada ibu hamil KEK untuk memenuhi kecukupan gizi ibu hamil.

Hasil kegiatan pembinaan gizi sebagai berikut:

1. Tersedianya Kelompok Pendukung Air Susu Ibu (KP ASI), Kelompok Pendukung Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA), motivator dan konselor ASI diseluruh Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.
2. Tersedianya kader-kader terlatih PMBA dan petugas kesehatan terlatih PMBA, konseling menyusui, konseling PMBA, (Tenaga Pelaksana Gizi, Dokter, Bidan)
3. Tersosialisasinya program ASHAR dalam mendukung 1000 Hari Pertama Kehidupan
4. Terlaksananya salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi (pengabdian Masyarakat) dalam rangka mendukung program ASHAR
5. Melibatkan potensi yang ada di masyarakat, upaya ini dilakukan melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM GSC), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Alokasi Dana Desa (ADD).
6. Meningkatkan surveilans gizi
Surveilans gizi adalah kegiatan pengamatan yang teratur dan terus menerus terhadap masalah gizi masyarakat dan faktor-faktor yang terkait melalui kegiatan pengumpulan data/informasi, pengolahan dan analisis data serta diseminasi informasi yang dihasilkan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mendeteksi dini berbagai masalah gangguan pertumbuhan yang dilakukan mulai dari tingkat posyandu oleh petugas kesehatan dan kader melalui peningkatan kunjungan dan pemantauan balita di Posyandu.
7. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Para Pengelola Program Gizi mulai dari Tingkat Kabupaten hingga Puskesmas melalui berbagai Pertemuan dan Pelatihan yang difasilitasi Dinas Kesehatan Provinsi yang dilaksanakan setiap tahun bagi petugas kesehatan se-NTB. Dari pertemuan dan pelatihan tersebut diharapkan tersedia tenaga terlatih sebagai : konselor Menyusui, konselor PMBA, Tim Asuhan Gizi untuk penanganan gizi buruk, konselor MP-ASI, konselor Pemantauan Pertumbuhan
8. Konseling/penyuluhan gizi bagi keluarga khususnya pada kelompok rawan gizi (ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita). Untuk Meningkatkan KAP (Pengetahuan, Sikap dan Perilaku) gizi yang benar dalam rangka meningkatkan status gizi ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, konseling dilakukan oleh Petugas Kesehatan yang sudah terlatih. Setiap konseling yang dilakukan akan dicatat dan dipantau perkembangannya. Hasil konseling diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita dalam mengatasi masalah gizi.
9. Pemberian suplemen gizi dan PMT bumil KEK dan balita kurus.
Pemberian suplemen dan PMT tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan dan mempertahankan status gizi Ibu Hamil KEK (Kurang Energi Kronis), Bayi dan Balita. Pemberian suplemen gizi seperti Kapsul Vitamin A yang didistribusi pada bayi usia 6 – 11 bulan dan 12 – 59 bulan setiap bulan Februari dan Agustus

serta pada setiap ibu nifas. Tabelt Tambah Darah didistribusi pada semua ibu hamil dan pada remaja putri di sekolah (SMP sederajat dan SMA sederajat)

Tabel 2.42 Jumlah *Buffer Stok* MP-ASI yang tersedia per Kabupaten/Kota Tahun 2015 - 2017

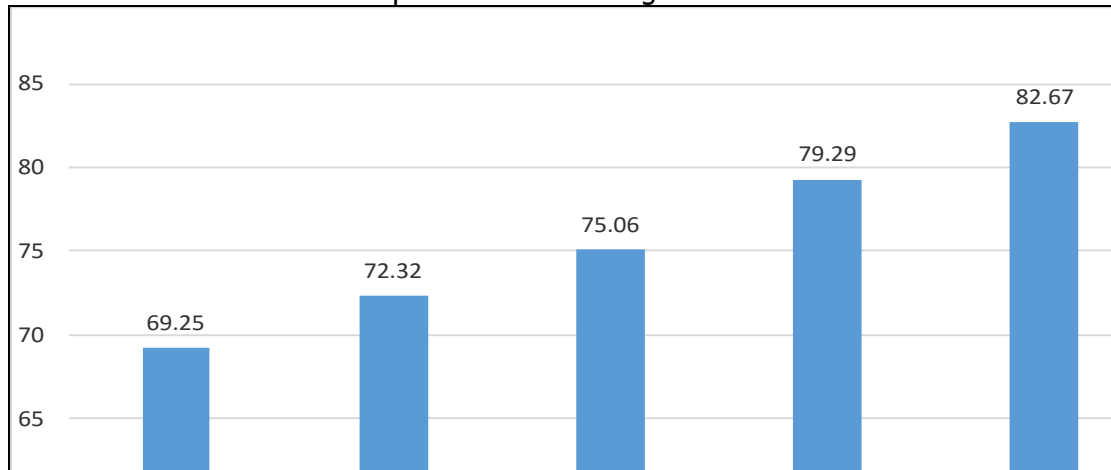
No	Kabupaten/ Kota	Makanan Tambahan			
		2015 (APBN) MP-ASI (kg) Tersedia = 13.750 kg	2016 (APBD) MP-ASI (kg) Tersedia = 11.950 kg	2017 (APBN) MP-ASI (kg) Tersedia = kg	(APBN) Bumil KEK (kg) Tersedia = kg
1.	Kota Mataram	812	1.000	7.833	6.723
2.	Lombok Barat	785	-	8.965	8.847
3.	Lombok Tengah	1.299	-	13.780	22.287
4.	Lombok Timur	2.001	2.150	18.197	24.204
5.	Lombok Utara	774	1.400	3.819	6.771
6.	Sumbawa Barat	895	1.000	2.543	1.965
7.	Sumbawa	2.868	1.240	9.923	5.319
8.	Dompu	553	1.000	6.760	5.304
9.	Bima	3.089	2.575	14.990	9.816
10.	Kota Bima	674	1.350	3.262	3.804
	NTB	13.750	11.950	90.072	95.040

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Pemberian makanan tambahan khususnya bagi kelompok rawan merupakan salah satu strategi Suplementasi dalam mengatasi masalah gizi. Pemberian makanan tambahan yang berfokus baik pada zat gizi makro maupun zat bagi balita dan ibu hamil sangat diperlukan dalam rangka pencegahan Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) dan balita pendek (stunting).

Indikator RPJMD ketiga yang menjadi urusan kesehatan adalah cakupan jamban keluarga. Tahun 2017 cakupan jamban keluarga mencapai 82,67 persen dari target 78 persen. Dibandingkan tahun 2016 dengan capaian 79,29 persen, cakupan jamban keluarga tahun 2017 naik 3,38 point. Capaian cakupan jamban keluarga dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.14 Persentase Cakupan Jamban Keluarga Provinsi NTB Tahun 2013-2017



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Tabel 2.43 Cakupan Jamban Keluarga Per Kabupaten/Kota Se Provinsi NTB Tahun 2017

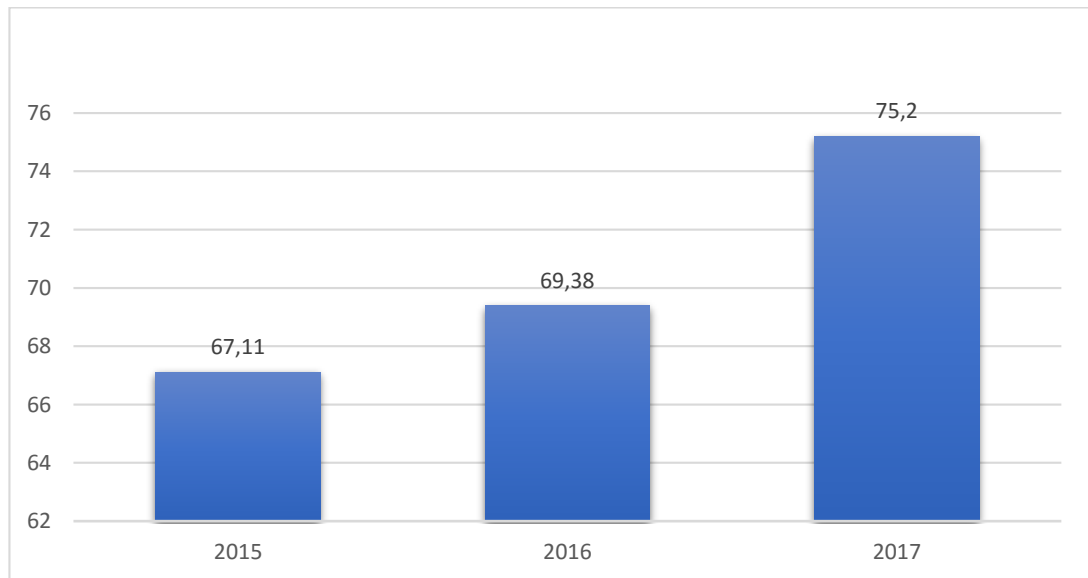
NO	KABUPATEN / KOTA	CAKUPAN JAMBAN (%)
1	Lombok Barat	88,69
2	Lombok Tengah	78,67
3	Lombok Timur	75,41
4	Sumbawa	77,72
5	Dompu	80,11
6	Kab. Bima	84,86
7	Sumbawa Barat	100
8	Lombok Utara	83,92
9	Mataram	99,49
10	Kota Bima	89,71
	TOTAL	82,67

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Pemicuan Program BASNO pada tahun 2017 telah dilaksanakan di 200 desa yang tersebar di 10 kabupaten/kota dan desa yang telah mencapai BASNO sebanyak 18 desa di tahun 2017 sehingga total desa BASNO sampai dengan tahun 2017 sebanyak 495 desa.

Indikator kinerja program yang mempengaruhi cakupan jamban keluarga antara lain kondisi rumah sehat (rumah sehat dinilai dari jamban, tempat sampah, SPAL, lantai, dan sarana air bersih). Pada tahun 2017, KK yang memiliki rumah sehat sebesar 75,2 persen meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 69,38 persen. Peningkatan ini berkorelasi terhadap peningkatan cakupan jamban keluarga. Dalam 3 tahun terakhir jumlah KK yang memiliki kondisi rumah sehat, dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.15 Persentase KK yang Memiliki Rumah Sehat Tahun 2015 – 2017



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Beberapa faktor yang mempengaruhi cakupan jamban keluarga antara lain:

1. Tersedianya akses air bersih yang terjangkau artinya semakin mudah mengakses air bersih kesadaran masyarakat membangun jamban cukup tinggi.
2. Lingkungan pemukiman yang padat artinya semakin padat lingkungan pemukiman akan semakin kecil lahan untuk membangun jamban sehingga diperlukan pembangunan MCK Komunal/septic tank komunal.
3. Kemampuan ekonomi artinya pembangunan jamban keluarga termasuk pembangunan padat modal.
4. Potensi lingkungan yang mendukung Buang Air Besar Sembarangan seperti: adanya aliran sungai, pesisir pantai, kebun dan lain-lain.

Upaya-Upaya yang dilaksanakan untuk mempercepat peningkatan cakupan jamban keluarga, yaitu :

1. Melaksanakan pendekatan sanitasi total berbasis masyarakat sesuai Permenkes Nomor 3 tahun 2015.
2. Melakukan pemicuan oleh petugas sanitarian Puskesmas yang didukung oleh Dinas kesehatan kabupaten/kota dan Provinsi dengan mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, Da'i kesehatan, masyarakat yang tidak memiliki jamban yang tujuannya adalah merubah perilaku masyarakat menuju Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
3. Memberikan penghargaan kepada Desa/Kelurahan, Kecamatan yang telah mencapai BASNO (Buang Air Besar Sembarangan NOL) sesuai Pergub No. 9 tahun 2013 tentang GERAKAN BASNO.
4. Melakukan koordinasi lintas sektoral khususnya dengan DPMPD, PU, BAPPEDA, dan Baznas khususnya dalam program rehabilitasi rumah, pemukiman kumuh dan pembangunan MCK Komunal.
5. Melibatkan DA' I Kesehatan untuk meningkatkan penyuluhan.
6. Penyusunan awig awig atau peraturan desa bagi desa yang telah mendeklarasikan Desa BASNO sehingga PHBS tetap terjaga.

7. Pemberdayaan Masyarakat melalui pemicuan pada lokasi program PAMSIMAS, dan MCAI.
8. Penilaian Lomba Bersih dan Sehat (LBS) tingkat Desa bekerja sama dengan TP PKK.
9. Pembinaan Wira Usaha Sanitasi untuk mendukung sarana sanitasi/jamban yang lebih murah.
10. Workshop Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan dukungan dari UNICEF.

Capaian pelayanan yang dilaksanakan pada unit-unit pelaksana teknis di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain:

1) Balai Kesehatan Mata Mataram (BKMM)

Capaian Indikator Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat tahun 2017, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.44 Indikator Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat Tahun 2017

NO.	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	Capaian per tahun		
			2015	2016	2017
1.	Sterilisasi kultur peralatan medis dan ruangan	Kali	3	1	2
2.	Cakupan <i>screaning</i> penyakit mata	Orang	1.650	2.150	2.000
3.	Cakupan operasi katarak	Orang	2.075	1.166	2.500
4.	Cakupan kunjungan	Orang	23.047	39.311	40.000
5.	Cakupan Operasi pterygium dan operasi lainnya	Orang	200	281	400

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Tahun 2017 diadakan Baksos oleh Balai Kesehatan Mata Masyarakat dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ke 59 sebanyak 11 pasien yang terdiri dari 10 pasien dengan kasus katarak dan 1 pasien dengan kasus *pterygium*.

2) Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BLKM) Pulau Lombok

Jumlah kunjungan pasien ke BLKM tahun 2017 sebanyak 3.757 orang, lebih rendah dibanding tahun 2016 sebanyak 5.060 orang. Menurunnya jumlah kunjungan disebabkan karena selama tiga bulan di awal tahun 2017 BLKM tidak melakukan pelayanan akibat relokasi/perpindahan dari gedung lama Jalan Ismail Marzuki ke gedung yang baru di Jalan Swara Mahardika. Selama proses perpindahan, peralatan harus di instal dan dikalibrasi ulang sebelum digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium kepada masyarakat. Selain untuk pemeriksaan Laboratorium, BLKM juga dikembangkan fungsinya untuk Kalibrasi Alat Kesehatan sebagaimana di atur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 tahun 2017, tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada dinas – dinas daerah dan unit pelaksana teknis badan pada badan-badan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan berlakunya Peraturan Gubernur tersebut nama Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat berganti menjadi Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi, namun fungsi ini akan berjalan secara penuh pada tahun 2018.

Tabel 2.45 Jumlah Pelayanan Laboratorium Berdasarkan Jumlah Parameter yang diperiksa Masing-masing Bidang Pemeriksaan pada BLKM Pulau Lombok Tahun 2016-2017

No	Bidang Pemeriksaan	Satuan	Capaian per tahun		
			2016	2017	
			Realisasi	Target	Realisasi
1.	Hematologi	orang	4.632	4.632	2.431
2.	Kimia Klinik	orang	15.193	15.193	10.821
3.	Mikrobiologi	orang	3.883	3.883	6.465
4.	Imunoserologi	orang	5.077	5.077	5.354
5.	Toksikologi	orang	2.421	2.392	481
6.	Kimia Kesehatan	orang	12.629	12.667	10,313
7.	Pemeriksaan Laboratorium Pengabdian Masyarakat	orang	358	737	670
8.	Pemeriksaan Mobil Keliling	orang	-	-	
	JUMLAH		46.515	44,514	36,535

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

Capaian indikator kinerja program pada BLKM Pulau Lombok Tahun 2017, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.46 Capaian Kinerja Indikator Program BLKM Pulau Lombok Tahun 2016-2017

No	Indikator Program	Satuan	Capaian Per Tahun		
			2016	2017	
			Realisasi	Target	Realisasi
1.	Kunjungan pasien	orang	5.060	5,060	3,757
2.	Parameter pelayanan laboratorium	orang	-	-	-
3.	Pelayanan medis terbatas	orang	2.322	2.322	1,838
4.	Pelayanan radiologi	orang	358	358	90

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2017

3) Akademi Perawat Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pada tahun ajaran 2017/2018, Akademi Perawat Kesehatan Provinsi NTB setingkat Diploma III merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang memiliki siswa sebanyak 240 orang (regular dan non regular). Semester Gasal pada Tingkat I sebanyak 60 orang, Tingkat II sebanyak 79 orang dan Tingkat III sebanyak 101 orang.

Tabel 2.47 Jumlah Siswa Regular dan Non Regular Akademi Perawat Provinsi NTB Tahun Ajaran 2016/2017 – 2017/2018

NO	TAHUN AKADEMIK	SEMESTER	TINGKAT	JENIS KELAMIN		JUMLAH
				L	P	
1.	2016/2017	Gasal	I	24	55	79 orang
			II	37	64	101 orang
			III	38	87	125 orang
			III Progsus	0	0	0 orang
2.	2016/2017	Genap	I	24	55	79 orang
			II	37	64	101 orang
			III	38	87	125 orang
			III Progsus	0	0	0 orang
3.	2017/2018	Gasal	I	20	40	60 orang
			II	24	55	79 orang
			III	37	64	101 orang
Jumlah siswa tahun akademik 2017/2018				81	159	240 orang

Sumber : Akademi Perawat Provinsi NTB, 2017

Kerja sama yang terkait dengan kegiatan pendidikan dalam rangka kegiatan praktek lapangan di masing-masing RSU, puskesmas sepulau Lombok, universitas dan rumah sakit luar daerah antara lain:

1. Kabupaten Lombok Timur
 - a. Dinas Kesehatan lombok timur (semua puskesmas se lombok timur)
 - b. Rumah sakit Dr.Raden soedjono Selong Lotim
 - c. Universitas HAMZANWADI
2. Kabupaten Lombok Tengah
 - a. RSU Praya.
3. Kabupaten Lombok Barat
 - a. RSU TRIPAT
4. Kodya Mataram
 - a. RSU Kota Mataram
5. Pemerintah Provinsi NTB
 - a. RSJ Mutiara Sukma Mataram
 - b. BSLU Mandalika Mataram
 - c. Universitas Mataram
6. Malang (Jawa Timur)
 - a. RS Saiful Anwar Malang.

4) Balai Pelatihan Tenaga Kesehatan (BPTK)

Pelatihan yang dilaksanakan oleh BPTK bekerjasama dengan Badan Pusat Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPSDMK), Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta, BBPK Ciloto, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-NTB dengan menyiapkan Fasilitator, Narasumber dan *Master of Trainer*. Sedangkan OPD/lembaga donor/LSM yang menggunakan tempat/ruang pertemuan di BPTK antara lain RSUD Kabupaten Lombok Tengah

dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa Barat. Jumlah kegiatan pelatihan dan non pelatihan di BPTK, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.48 Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan dan Non Pelatihan di Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Mataram Tahun 2016-2017

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			
		PEMERINTAH		NON PEMERINTAH	
		2016	2017	2016	2017
1.	Pelatihan	20	38	-	1
2.	Pertemuan (Non Pelatihan)	1	2	-	0
JUMLAH		21	40	-	1

Sumber : Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Mataram Provinsi NTB, 2017

Selama tahun 2017 kegiatan pelatihan dilakukan di lingkungan BPTK Mataram, namun untuk praktek lapangan BPTK Mataram bekerjasama dengan pihak external yaitu Puskesmas-Puskesmas yang berada di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram serta Rumah Sakit Umum Pemerintah di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Kota Mataram.

b. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

Pembangunan RSUD Provinsi NTB di Dasan Cermen dimulai sejak tahun 2007. Pembangunan di tahun 2017 sebanyak 32 kamar *guest house* yang merupakan lanjutan dari pembangunan gedung C (*guest house*). Realisasi fisik 100 persen sedangkan realisasi keuangan sebesar 95,99 persen. Pembangunan Rumah Sakit Umum Provinsi NTB yang dimulai sejak 2007 sampai dengan 2017 telah mencapai 100 persen dari target RPJMD 100 persen di tahun 2018.

RSUD Provinsi NTB secara resmi telah direlokasi pada tanggal 17 Desember 2015 dengan luas lahan dan bangunan yang lebih representative, sehingga menunjang upaya-upaya pengembangan program pelayanan yang dilakukan. Adapun pelayanan yang diberikan oleh RSUD Provinsi NTB mencakup pelayanan administrasi manajemen, rawat inap, rawat jalan, rekam medis, farmasi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), keperawatan, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), Perinatal Resiko Tinggi, IGD, Instalasi Bedah Sentral (IBS), Radiologi, gizi, pelayanan intensif dan pelayanan darah. Saat ini RSUD Provinsi NTB telah melaksanakan akreditasi RS versi 2012 dan memperoleh hasil PARIPURNA. Pada bulan Maret 2018 akan dilaksanakan revisitasi akreditasi oleh tim Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS).

Pelayanan media yang dilakukan oleh RSUD Provinsi NTB Tahun 2017, mencakup rawat jalan, rawat inap dan rawat darurat. Cakupan rawat jalan dan rawat inap berdasarkan cara pembayarannya yang telah dilayani oleh RSUD Provinsi NTB tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.49 Cakupan Rawat Jalan dan Rawat Inap Berdasarkan Cara Pembayaran di RSUD Provinsi NTB Tahun 2016-2017

NO.	CARA PEMBAYARAN	2016				2017			
		Rawat Jalan	Rawat Inap	IRD	Jumlah	Rawat Jalan	Rawat Inap	IRD	Jumlah
1.	Askes (Non PBI)	53.949	5.547	6.226	65.722	35.038	8.065	6.989	50.092
2.	Umum	18.270	2.340	7.776	28.386	14.550	1.829	6.339	22.718
3.	Jamkesmas (PBI)	28.443	4.343	5.114	37.900	75.407	5.997	5.084	86.488
4.	Asuransi Lain	94	616	272	982	317	812	330	1.459
Jumlah		100.756	12.846	19.388	132.990	125.312	16.703	18.742	160.757

Sumber : RSUD Provinsi NTB, 2017

Selama kurun waktu tahun 2017, jumlah kunjungan pasien baik rawat jalan, rawat inap dan IRD sebanyak 160.757 orang, lebih tinggi dibanding dengan tahun 2016 sebanyak 132.990 orang atau meningkat sebesar 17,27 persen. Pengembangan pelayanan dan upaya peningkatan pelayanan secara optimal di RSUD Provinsi NTB terus berusaha ditingkatkan. Berbagai upaya yang dilakukan oleh RSUD Provinsi NTB dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengembangan layanan kepada masyarakat tahun 2017 antara lain:

- Pengembangan ruang kemoterapi
- Pengembangan poli TB-MDR dan TB DOT
- Pengembangan ruang intermediate
- Pengembangan OK cyto
- Pengembangan pelayanan bedah onkologi dan genekologi onkologi dengan kemoterapi
- Pengembangan ruang bedah sentral
- Pengembangan ruang burn unit
- Pengembangan ruang ODC (*One Day Care*) dengan OK VIP

Selain melakukan pengembangan layanan, RSUD Provinsi NTB juga menetapkan beberapa pelayanan yang ada menjadi pelayanan unggulan antara lain:

- Pusat Pelayanan Jantung dan Pembuluh darah terpadu (*cathlab*)
- Pusat Pelayanan Intervensi Paru
- Pelayanan Hemodialisa
- Pelayanan Riset Biomedik
- Pelayanan Onkologi
- Pelayanan Radioterapi (akan beroperasi pada tahun 2018)

Berdasarkan tabel dibawah ini dapat dilihat ada 3 (tiga) jenis penyakit yang paling banyak dirawat di Instalasi rawat jalan yaitu *atherosclerotic heart disease*, *chronic renal failure*, dan *Unspecified diabetes melitus*. Pada tahun 2017 dan 2016 *Atherosclerotic heart disease* merupakan kasus terbanyak rawat jalan, namun di tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah kasus baru sebanyak 530 kasus (33,17%). Kasus *Atherosclerotic heart disease* pada tahun 2017 sebanyak 1.598 kasus baru

sedangkan di tahun 2016 sebanyak 1.068 kasus baru. Kasus kedua terbanyak Rawat Jalan tahun 2017 adalah *Chronic Renal Failure, Unspecified* dengan jumlah kasus baru 1552 kasus, sedangkan ditahun 2016 penyakit ini tidak masuk dalam 10 penyakit terbanyak. Kasus terbanyak ketiga ditahun 2017 adalah *Unspecified diabetes mellitus without complications*. Pada tahun 2017 dan 2016 penyakit ini merupakan kasus ketiga terbanyak di rawat jalan. Pada tahun 2017 sebanyak 949 kasus baru dan terjadi peningkatan sebanyak 219 kasus baru (23,08%) bila dibandingkan tahun 2016. Adapun 10 jenis penyakit terbanyak yang dirawat di inslasai rawat jalan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.50 10 Penyakit Terbanyak Kunjungan Pasien Rawat Jalan di RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

NO	ICD	Nama ICD	KASUS BARU		JML KASUS BARU	JUMLAH KUNJUNGAN
			L	P		
1	I25.1	Atherosclerotic Heart Disease	1094	504	1598	6040
2	N18.9	Chronic Renal Failure, Unspecified	780	772	1552	11093
3	E14.9	Unspecified Diabetes Mellitus Without Complications	472	477	949	3888
4	I10	Essential (Primary) Hypertension	393	487	880	3103
5	I50.0	Congestive Heart Failure	444	344	788	2913
6	I11.9	Hypertensive Heart Disease Without (Congestive) Heart Failure	407	353	760	2735
7	N40	Hyperplasia Of Prostate	673	0	673	2327
8	G40.9	Epilepsy, Unspecified	359	284	643	2464
9	M54.5	Low Back Pain	292	247	539	1900
10	J45.9	Asthma, Unspecified	151	294	445	1692

Sumber : RSUD Provinsi NTB, 2017

Untuk pelayanan di instalasi rawat inap, ada 3 penyakit yang paling banyak yaitu *anaemia, malignant neoplasm of breast, dan hypotermia of newborn*. Pada tahun 2017 dan 2016 Anemia merupakan kasus terbanyak, namun di tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah kasus baru sebanyak 44 kasus (3,75%). Kasus *anemia disease* pada tahun 2017 sebanyak 1.172 kasus baru sedangkan di tahun 2016 sebanyak 1.128 kasus baru. Kasus kedua terbanyak Rawat Inap tahun 2017 adalah *Malignant Neoplasm of Breast, Unspecified*, dengan jumlah kasus baru 802 kasus, sedangkan di tahun 2016 penyakit ini tidak masuk dalam 10 penyakit terbanyak. Kasus terbanyak ketiga di tahun 2017 adalah *Hypothermia Of Newborn, Unspecified*. Pada tahun 2017 sebanyak 731 kasus baru dan terjadi penurunan sebanyak 355 kasus baru (48,56%) bila dibandingkan tahun 2016. Adapun 10 jenis penyakit terbanyak yang dirawat di instalasi rawat inap adalah sebagaimana table berikut:

Tabel 2.51 10 Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Inap di RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

NO	DIAGNOSA		PASIEH KELUAR HIDUP		PASIEH KELUAR MATI		TOTAL
	KODE	NAMA PENYAKIT	L	P	L	P	
1	D64.9	Anaemia, Unspecified	492	510	96	74	1172
2	C50.9	Malignant Neoplasm of Breast, Unspecified	17	765	0	20	802
3	P80.9	Hypothermia Of Newborn, Unspecified	337	358	18	18	731
4	A41.9	Septicaemia, Unspecified	169	126	230	149	674
5	I50.0	Congestive Heart Failure	333	218	44	48	643
6	I25.1	Atherosclerotic Heart Disease	325	178	10	10	523
7	J18.9	Pneumonia, Unspecified	197	143	85	65	490
8	P59.9	Neonatal Jaundice, Unspecified	241	204	16	8	469
9	I63.9	Cerebral Infarction, Unspecified	192	154	50	45	441
10	I10	Essential (Primary) Hypertension	178	151	37	32	398

Sumber : RSUD Provinsi NTB, 2017

Berdasarkan tabel dibawah ini dapat dilihat bahwa 3 penyakit yang terbanyak di Instalasi Gawat Darurat yaitu *fever, asthma, other and unspecified pain*. Pada tahun 2017 dan 2016 penyakit *fever* penyakit terbanyak pada instalasi gawat darurat dengan 406 kasus. Namun ditahun 2017 terjadi penurunan 50,37 persen dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 806 kasus. Penyakit kedua terbanyak pada tahun 2017 dan 2016 adalah penyakit asthma. Pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 58,14 persen bila dibandingkan dengan tahun 2016. Jumlah kasus di tahun 2017 sebesar 350 kasus, sedangkan pada tahun 2016 jumlah kasus asthma sebesar 602 kasus. Penyakit yang ketiga terbanyak pada tahun 2017 adalah *other and unspecified pain*, pada tahun 2016 penyakit ini berada pada urutan ke 10 pada 10 penyakit terbanyak di RSUD Prov. NTB. Jumlah kasus penyakit ini pada tahun 2017 adalah 350 kasus, terjadi peningkatan sebesar 73,71 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Adapun 10 jenis penyakit terbanyak yang dirawat di instalasi rawat darurat adalah sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 2.52 Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Instalasi Rawat Darurat RSUD Provinsi NTB Tahun 2017

NO	ICD	NAMA ICD	KASUS BARU		JMLH KASUS BARU	JMLH KUNJUNGAN
			L	P		
1	R50.9	Fever, unspecified	218	188	406	481
2	J45.9	Asthma, unspecified	182	168	350	488
3	R10.4	Other and unspecified abdominal pain	170	180	350	463
4	T14.1	Open wound of unspecified body region	198	91	289	320
5	K52.9	Noninfective gastroenteritis and colitis, unspecified	146	122	268	331
6	R11	Nausea and vomiting	76	94	170	222

NO	ICD	NAMA ICD	KASUS BARU		JMLH KASUS BARU	JMLH KUNJUNGAN
			L	P		
7	J06.9	Acute upper respiratory infection, unspecified	89	74	163	204
8	K30	Dyspepsia	63	97	160	190
9	I10	Essential (primary) hypertension	74	72	146	205
10	R42	Dizziness and giddiness	57	82	139	181

Sumber : RSUD Provinsi NTB, 2017

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, melalui dana DAK, DBCHT dan DAU pada tahun 2017 RSUD Provinsi NTB melengkapi alat-alat kesehatan/kedokteran yang dimiliki. Melalui dana DAK RSUD Provinsi NTB membeli alat CT Scan, meja operasi, mesin ventilator, USG 3 dimensi, defibrillator, endoscopy, mesin anestesi, nebulizer, mobil ambulance dan lain-lain. Sedangkan ditahun 2017 RSUD Provinsi NTB melalui dana DBCHT dan DAU membeli alat untuk radioterapi dan asesoris pelengkap radioterapi sehingga total pengadaan alat di tahun 2017 dengan menggunakan anggaran DAK, DBCHT dan DAU sebanyak 161 unit.

Disamping itu, kegiatan pendidikan dan pelatihan formal telah dilaksanakan setiap tahun. Pada tahun 2017 sebanyak 3 orang mengikuti pendidikan pelatihan formal untuk jenis Spesialis dan Sub Spesialis. Untuk mengakomodir SDM RS yang akan melaksanakan kegiatan pendidikan, pagu anggaran tidak hanya menggunakan dana dari subsidi tetapi juga menggunakan dana dukungan dari kemitraan seperti Kementerian Kesehatan dan *sponsorship*. Selama tahun 2017 SDM RSUD Provinsi NTB yang lulus dengan menggunakan dana Kementerian Kesehatan sebanyak 5 orang, *sponsorship* 2 orang. Sementara untuk kegiatan pelatihan RSUD Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan pelatihan baik berupa pelatihan lebih dari 20 jam pelatihan maupun pelatihan yang kurang dari 20 jam (berupa workshop, simposium). Adapun SDM yang mengikuti kegiatan pelatihan yang lebih dari 20 jam pelatihan sebanyak 476 orang dan kurang dari 20 jam pelatihan sebanyak 840 orang.

RSUD Provinsi NTB selalu berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional. Untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, RSUD Provinsi NTB selalu melengkapi kekurangan SDM, salah satunya adalah dokter spesialis dan sub spesialis. Saat ini dalam memenuhi SDM dokter spesialis dan subspesialis yang kurang, RSUD Provinsi NTB bekerjasama dengan dokter paruh waktu Universitas Mataram sebanyak 24 orang yaitu: dokter spesialis anak 1 orang, spesialis bedah syaraf 2 orang, spesialis forensic 1 orang, spesialis jantung 2 orang, spesialis kulit kelamin 1 orang, spesialis mata 4 orang, spesialis mikrobiologi klinik 1 orang, spesialis obgyn 1 orang, spesialis paru 1 orang, spesialis penyakit dalam 4 orang, spesialis radiologi 1 orang, spesialis syaraf 1 orang, spesialis THT 2 orang, dan spesialis urologi 2 orang.

Dalam rangka meringankan beban masyarakat yang berobat keluar daerah karena penyakit jantung dan pembuluh darah, RSUD Provinsi NTB telah mengembangkan program pelayanan inovatif dengan mengembangkan Pusat

Pelayanan Jantung dan Pembuluh darah Terpadu (*cathlab*). *Cathlab* merupakan alat kedokteran canggih yang digunakan untuk penanganan penyempitan pembuluh darah koroner jantung, pemasangan *stent/ring* pada pembuluh darah koroner yang mengalami penyempitan, tindakan darurat pemasangan alat pacu sementara dan permanen, tindakan penutupan dinding/sekat jantung yang mengalami kebocoran, dan tindakan *repair* katup jantung yang mengalami penurunan fungsional. Untuk menunjang kegiatan tersebut RSUD Provinsi NTB juga mendatangkan ahli jantung dari Rumah Sakit dr. Soetomo–Surabaya dalam melaksanakan operasi pemasangan *pacemaker* (alat pemacu detak jantung) yang selama ini pemasangan *pacemaker* dilakukan di Rumah Sakit Tipe A. Sampai dengan kurun waktu 2017, RSUD Provinsi NTB telah melakukan pelayanan unggulan antara lain: bedah syaraf sebanyak 2.551 orang, kemoterapi 2.344 tindakan, Pusat Pelayanan pembuluh darah terpadu (*Cathlab*) 551 orang, bedah plastic 1.097 orang, dan *endoscopy* 192 orang.

Sebagai rumah sakit tipe B Pendidikan, RSUD Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan kepaniteraan klinik pada *co-assisten* melalui kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mataram sampai bulan Desember 2017 sebanyak 129 orang dan pelayanan kegiatan praktik siswa/mahasiswa non kedokteran sebanyak 650 orang dari berbagai institusi pendidikan kesehatan (Keperawatan, Kebidanan, Gizi dan Ners) di wilayah Provinsi NTB dan luar Provinsi NTB. Di bidang pendidikan dan pelatihan sampai dengan tahun 2017 RSUD Provinsi NTB telah melaksanakan 14 KSO, antara lain: Stikes Komarul Huda Bagu 139 orang, Stikes Yarsi Mataram 67 orang, Akademi Keperawatan Samawa 88 orang, dan Fakultas Kedokteran UNRAM 129 orang. Untuk lebih meningkatkan kemampuan SDM yang memberikan pelayanan kesehatan, RSUD Provinsi NTB telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo sebagai *sister Hospital* (RS Kemitraan) di bidang Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian. Tabel dibawah ini merupakan tabel kerjasama RSUD Provinsi NTB di bidang pendidikan :

Tabel 2.53 Kerjasama RSUP di Bidang Pendidikan Tahun 2017

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2016	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	JANGKA WAKTU	
					LAMA	DARI TANGGAL
A	B		D	H	F	G
1	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mataram	No. 065/1016/RSUD PROV. NTB; No.53/Mou/83/Stikes/IV/2015	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Kesehatan (Stikes) Mataram Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pendidikan	2 (dua) tahun	14 Maret 2015 s/d 13 Maret 2017
2	Universitas Muhammadiyah	No.065/213/RSUP; No. 33/11.3.AU /0/I/2014	Pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat	Bidang Pendidikan	3 (tiga) tahun	1 Februari 2014 s/d 31 Januari'17

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2016	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	JANGKA WAKTU	
					LAMA	DARI TANGGAL
A	B		D	H	F	G
3	Akademi Kebidanan Bhakti Kencana	NO. 065/229/RSUDP/2017; No. 008/AKBID-BK/V/2017	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Bagi Mahasiswa Akademi Kebidanan Bhakti Kencana Mataram Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pendidikan	2 (dua) tahun	2 Mei 2017 s/d 30 April 2019
4	Universitas Mataram	No. 065/3319/RSUDP No. 3650/UNI8.8 /KS/2017	Pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat	Bidang Pendidikan	5 (lima) tahun	2 Agustus 2017 s/d 1 Agustus 2022
5	STIKES Qomarul Huda Bagu	No. 065/2540/RSUD PROV.NTB; No. 056/STIKES/YP2QH/IX/2016	Pendidikan, pelatihan dan pengabdian masyarakat	Bidang Pendidikan	2 (dua) tahun	7 Agustus 2016 s/d 6 Agustus 2018
6	RSUD Patut Patuh Pacu Kab. Lobar	No. 611/UN18.8/KS/2012; No. 065/775/RSUP No. 800/201/RSUD/III/2012	Pelayanan Kesehatan Jejaring Rumah Sakit Pendidikan	Bidang Pendidikan	5 (lima) tahun	6 Maret 2012 s/d selesai
7	RSUD Kota Mataram	No. 612/UN18.8/KS/2012; No. 065/776/RSUP; No. 1034/445/RSUD/III/2012	Pelayanan Kesehatan Jejaring Rumah Sakit Pendidikan	Bidang Pendidikan	5 (lima) tahun	6 Maret 2012 s/d selesai
8	RSUD Praya	No. 610/UN18.8/KS/2012; No. 065/774/RSUP; No. 445/201/RSUD	Pelayanan Kesehatan Jejaring Rumah Sakit Pendidikan	Bidang Pendidikan	5 (lima) tahun	6 Maret 2012 s/d selesai
9	RSUD dr. R. Soejono Selong	No. 609/UN18.8/KS/2012; No. 065/773/RSUP; No. 445/39.1/RSUD/2012	Pelayanan Kesehatan Jejaring Rumah Sakit Pendidikan	Bidang Pendidikan	5 (lima) tahun	6 Maret 2012 s/d selesai
10	Akademi Keperawatan Samawa	No. 065/3353/RSUD PROV.NTB; No: 113/AKS/B/K/XII/2015	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat	Bidang Pendidikan	1 (satu) tahun	31 Mei 2017 s/d 30 Mei 2019
11	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi Mataram	No. 065/738/RSUD PROV.NTB/2016; No. 023/STIKES/Y.III/I-A/III/2016	Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat SEkolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi Mataram Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pendidikan	2 (dua) tahun	1 April 2016 s/d 31 Maret 2018
12	Universitas Nahdlatul Wathan	No. 065/25115/RSUD PROV.NTB/2016; No: 028/UNW.87/A.11 /IX/2016	Pendidikan, Pelatihan Dan Pengabdian Pada Masyarakat	Bidang Pendidikan	2 (dua) tahun	23 Sept 2016 s/d 22 Sept' 2018

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2016	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	JANGKA WAKTU	
					LAMA	DARI TANGGAL
A	B		D	H	F	G
13	Universitas Nahdlatul Wathan	No. 065/25115/RSUD PROV.NTB/2016; No: 028/UNW.87/A.11/IX/2016	Pendidikan, Pelatihan Dan Pengabdian Pada Masyarakat	Bidang Pendidikan	2 (dua) tahun	23 Sept 2016 s/d 22 Sept' 2018
14	Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo	No. 065/3869/RSUDPROV/2017; No: HK.05,01/XI.3/34973/2017	Sister Hospital (Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian)	Bidang Pendidikan	1 (satu) tahun	1 Januari 2018 s/d 31 Desember 2018

Sumber : RSUD Provinsi NTB, 2017

Selain bekerjasama dengan dokter paruh waktu Universitas Mataram, RSUD Provinsi NTB juga bekerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan peralatan canggih yang dibutuhkan seperti pelayanan untuk pemeriksaan laboratorium, dan penyediaan gasmedik. Tabel dibawah ini merupakan kerjasama dengan pihak ketiga di bidang pelayanan penunjang.

Tabel 2.54 Kerjasama RSUP di Bidang Pelayanan Penunjang

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2016	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	Jangka Waktu	
					Lama	Dari tanggal
A	B	C	D	H	F	G
1	PT Karunia Abadi	No. 065/441/RSUDP/2017; No. KAI/06/I/NTB-20172	Penyediaan Alat Medis Habis Pakai Tertentu Dan Instrumen Pemasangan Alat Pada Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Atau Ketenagakerjaan	Bidang Pelayanan Bedah Tulang dan Bedah Saraf	1 (satu) tahun	1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017
2	PT. Rizki Educalab	No. 065/307/RSUDP/2017; No.024/II/PT.RE/2017	Penyediaan Alat Kesehatan Habis Pakai	Bidang Pelayanan Radiologi (Film)	1 (satu) tahun	1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2018
3	PT. Ridho Medical Indonesia	No. 065/441/RSUDP/2017; No. S-014/RMI/I/2017	Penyediaan Alat Medis Habis Pakai Tertentu Dan Instrumen Pemasangan Alat (Bedah Syaraf, Bedah Urologi, Mata dan Gigi, Bedah, THT, NICU) Pada Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Atau Ketenagakerjaan	Bidang Pelayanan Bedah Saraf, Urologi Gigi, Mata, THT, NICU	1 (satu) tahun	1 Januari 2017s/d 31 Desember 2017
			Addendum Kesatu Penyediaan Alat Medis Habis Pakai Tertentu Dan Instrumen Pemasangan Alat (Bedah Syaraf, Bedah Urologi, Mata dan Gigi, Bedah, THT, NICU) Pada Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Atau Ketenagakerjaan			1 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2016	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	Jangka Waktu	
					Lama	Dari tanggal
A	B	C	D	H	F	G
		No. 065/2079/RSUDP/2017; No. S-014/RMI/I/2017	Addendum Kesatu Penyediaan Alat Medis Habis Pakai Tertentu Dan Instrument Pemasangan Alat (Bedah Syaraf, Bedah Urologi, Mata dan Gigi, Bedah, THT, NICU) Pada Pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Atau Ketenagakerjaan	Bidang Pelayanan Bedah Saraf, Urologi Gigi, Mata, THT, NICU		1 Juli 2017 s/d 31 Desember 2017
4	PT. Alexa Medika	No. 065/140/RSUD PROV.NTB/2016; No. 001/AM-MTR/I/2016	Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai Di Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Farmasi	1 (satu) tahun	1 Februari 2016 s/d 31 Januari 2017
5	PT. Rajawali Nusindo	No. 065/1704/RSUD PROV. NTB/2016; No. 152/NUS.05.52/VI/2016	Pengadaan Alat Kesehatan Habis Pakai	Bidang Pelayanan (Linen)	1 (satu) tahun	1 Mei 2016 s/d 30 April 2017
6	PT. Saba Indomedika	No. 065/145/RSUD PROV.NTB/2016; NO. 005/ADD/XT-2000i/BD-JAN/I/2016	Penempatan 1 (satu) Alat Hematology Analyzer Type Sysmex XT2000i Dan Penyediaan Reagensia Di Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Laboratorium	2 (dua) tahun	1 Januari 2016 s/d 31 Des 2017
7	PT. Saba Indomedika	No. 065/80/RSUDP PROV.NTB/2017; NO. 010/ADD/XS-800i/BD-JAN/I/2017	Penempatan Alat Hematology Analyzer Sysmex Type XS-800i Di Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Laboratorium	3 (tiga) tahun	4 Januari 2017 s/d 3 Januari 2020
8	PT. Pelita Santoso Jaya	No. 065/2206/RSUD PROV.NTB/2016; No. 026/KSO/NTB.RS/VIII/2016	Penempatan 1 Unit Alat Autoanalyzer Kimia Klinik Chemistry System Selectra Pro XL di Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Laboratorium	2 (dua) tahun	1 Agustus 2016 s/d 31 Juli 2018
		No. 065/1597/RSUDP/23017; No. 038/PSJ/KSO/III/17	Addendum Kesatu Penempatan 1 Unit Alat Autoanalyzer Kimia Klinik Chemistry System Selectra Pro XL di Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Laboratorium		1 April 2017 s/d 31 Juli 2018
9	PT. Pelita Santoso Jaya	No. 065/127/RSUDP/2017; No. 010/PSJ/KSO/I/2017	Penempatan 1 (satu) Unit Alat Blood Culture System BD Bactec 9000 Alyzer di Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Laboratorium	2 (dua) tahun	23 Januari 2017 s/d 22 Januari 2019
10	PT. Enseval Medika Prima	No. 1053/065/RSUP; No. 050/P-SPI/V-11	Penempatan alat Immunology Analyzer di Instalasi Laboratorium	Bidang Pelayanan Laboratorium	3 (tiga) tahun	25 April 2014 s/d 24 April 2017

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2016	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	Jangka Waktu	
					Lama	Dari tanggal
A	B	C	D	H	F	G
		No. 065/3399/RSUDP/2017; No. 040/EMP-HOSLAB/III-17	Addendum Kesatu Penempatan Alat Immunology Analyzer Mini Vidas Di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Prov NTB	Bidang Pelayanan Laboratorium		25 April 2014 s/d 31 Desember 2017
11	PT. Nusa Tri Utama	No. 065/744/RSUD PROV.NTB/2016; No. S-361/NTU/IV/2016	Penempatan 1 (satu) Alat Kimia Autoanalyzer Erba Type XL200 Di Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemeriksaan Kimia Klinik	2 (dua) tahun	1 Mei 2016 s/d 30 April 2018
12	PT. Mitra Fajar Selaras	No. 065/1740/RSUD PROV.NTB/2016; No. 361/TRF/VI/2016	Penyediaan Produk/Alat Medis Habis Pakai (AMHP) Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Bedah Syaraf	1 (satu) tahun	1 Juni 2016 s/d 31 Mei 2017
		No. 065/1742/RSUD PROV.NTB/2016; No. 002/361-VI/ADDM.01-TRF/I/2017	Addendum I Penyediaan Produk/Alat Medis Habis Pakai (AMHP) Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Bedah Syaraf		1 Juli 2016 s/d 31 Mei 2017
13	PT. Sinar Roda Utama	No. 065/2782/RSUD PROV NTB; No: 309/SRU/KSO/XI/2015	Pelayanan Pasien Haemodialisa (HD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prov NTB	Bidang Pelayanan	3 (tiga) tahun	2 Nopember 2015 s/d 1 Nov 2018
14	PT. Gas Generator Indonesia Jakarta	No. 065/1091/RSUD PROV.NTB/2016; No. AD 16010/GGI/III/2016	Addendum Penempatan Mesin Gastec Oxygen Generator Untuk Pemenuhan Kebutuhan Oxygen Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Gas Oksigen	13 bulan	1 Januari 2016 s/d 9 Maret 2017
15	CV. Banyu Bangun Sakti	No.065/190/RSUD P/2017; No. 090/BBS/01/2017	Peminjaman Tangki Liquid/Tabung, Penyaluran Dan Pelayanan Gas Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Gas Oksigen	2 (dua) tahun	1 Januari 2017 s/d 31 Des 2018
		No.065/3104/RSUD PROV.NTB/2016; No. 079/BBS/08/2016	Addendum Kesatu Peminjaman Tangki Liquid/Tabung, Penyaluran Dan Pelayanan Gas Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Gas Oksigen		15 Agustus 2016 s/d 31 Des 2016
		No. 065/1948/RSUDP/2017; 112/BBS/06/2017	Addendum Kedua Peminjaman Tangki Liquid/Tabung, Penyaluran Dan Pelayanan Gas Medis Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Gas Oksigen		1 Juni 2017 s/d 31 Desember 2018
16	PT. PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Barat	No. PJBTL-441100521611155828 ; No. 671.11/3121/RSUDP/2016	Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik	Bidang Pelayanan Prasarana		

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2016	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	Jangka Waktu	
					Lama	Dari tanggal
A	B	C	D	H	F	G
17	Klinik Radiologi dan Laboratorium Catur Warga	No. 065/2293/RSUD PROV.NTB/2016; No.578/CW/VIII/2016	Pelayanan CT Scan Bagi Pasien BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan Dan Pasien Jaminan Lainnya RSUD Prov. NTB Di Klinik Catur Warga Mataram	Pemeriksaan CT Scan	1 (satu) tahun	1 Juli 2016 s/d 30 Juni 2017
18	PT. Insan Mandiri Sukses	No. 065/2376/RSUP; No.134/CW/VIII/2012	Kerjasama Operasional Pelayanan CT-Scan di RSU Prov. NTB.	Operasional CT-Scan	6 (enam) tahun	1 Desember 2012 s/d 30 Nov 2018
19	PT. SKILL Indotimur Agung	No. 065/2403/RSUD PROV.NTB; No. 3203-C/YH-SKITA/IX.15	Pengelolaan Dan Penggunaan Infrastruktur Jaringan Komputer (LAN), CCTV Dan Telepon PABX Pada RSUD Prov. NTB	Operasional TI	2 (dua) tahun	11 September 2015 s/d 10 September 2017
	PT. SKILL Indotimur Agung	No. 065/57/RSUD PROV.NTB/2015 ; No. 3216-C/YH-SKITA/XII.15	Addendum I Pengelolaan Dan Penggunaan Infrastruktur Jaringan Komputer (LAN), CCTV Dan Telepon PABX Pada RSUD Prov. Nusa Tenggara Barat	Operasional TI		8 Desember 2015 s/d 10 September 2017
	PT. SKILL Indotimur Agung	No. 065/57/RSUD PROV.NTB/2015 ; No. 3216-C/YH-SKITA/XII.15	Addendum II Pengelolaan Dan Penggunaan Infrastruktur Jaringan Komputer (LAN), CCTV Dan Telepon PABX Pada RSUD Prov. Nusa Tenggara Barat	Operasional TI		1 Agustus 2016 s/d 10 Sept 2017
20	PT. Parit Padang	No. 065/1538/RSUD PROV.NTB/2016; No. 01/PKS/MTR/VI/2016	Penyediaan Barang-Barang Habis Pakai Sterilisasi Dan Penyediaan Mesin Sealing Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Sterilisasi	18 (delapan belas) bulan	1 April 2016 s/d 30 September 2017
21	Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian Dan Kalibrasi	No. 065/3135/RSUDP/2017; No. 074/02/VIII/2017	Pemantauan Kualitas Lingkungan Pada RSUD Prov NTB	Bidang IKL	1 (satu) tahun	1 Oktober 2017 s/d 30 Sept 2018
22	CV. Fatahillah 354	No. 065/1642/RSUDP/2017; No. 15/04/FAT/2017	Pembuatan Slide Dari Seluruh Sediaan Hasil Operasi Di Rumah Sakit Umum Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Laboratorium	1 (satu) tahun	1 April 2017 s/d 30 September 2018
	CV. Fatahillah 354	No. 065/3103/RSUD PROV.NTB/2016; No. 015/FAT/2016	Addendum Kesatu Pembuatan Slide Dari Seluruh Sediaan Hasil Operasi Di Rumah Sakit Umum Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Laboratorium	3 (tiga) bulan	1 September 2016 s/d 30 Nov 2016
	CV. Fatahillah 354	No. 065/3103/RSUD PROV.NTB/2016; No. 015/FAT/2016	Addendum Kedua Pembuatan Slide Dari Seluruh Sediaan Hasil Operasi Di Rumah Sakit Umum Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Laboratorium	3 (tiga) bulan	1 Des 2016 s/d 31 Maret 2017
23	PT. Dharma Astiti	No. 065/443/RSUDP/2017; No. 05/DA/II/2017	Addendum Kesatu Penyediaan Alat/Bahan Medis Habis Pakai Untuk Layanan Operasional Cathlab Pada RSUD Prov. NTB	Bidang Pelayanan Jantung		16 Januari 2017 s/d 26 Sep 2017

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2016	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	Jangka Waktu	
					Lama	Dari tanggal
A	B	C	D	H	F	G
		No. 065/3377/RSUDP/2017; No. 25/DA/IX/2017	Penyediaan Alat/Bahan Medis Habis Pakai Untuk Layanan Operasional Cathlab Pada RSUD Prov. NTB	Bidang Pelayanan Jantung		27 September 2017 s/d 26 Sept 2018
24	PT. Rekamileniumindo Selaras	No. 065/2715/RSUD PROV.NTB/2016; No. 0205/RS/IX/2016	Penyediaan Alat/Bahan Medis Habis Pakai Untuk Layanan Cathlab Pada RSUD Prov. NTB	Bidang Pelayanan Jantung	1 (satu) tahun	1 September 2016 s/d 31 Agust 2017
	PT. Rekamileniumindo Selaras	No. 065/3411/RSUDP/2017; No. 0311/RS/V/2017	Addendum Kesatu Penyediaan Alat/Bahan Medis Habis Pakai Untuk Layanan Cathlab Pada RSUD Prov. NTB	Bidang Pelayanan Jantung		2 Mei 2017 s/d 31 Agustus 2017
25	UD Edola Jaya	No. 065/308/RSUDP/2017; No. 02901/EJ/2017	Pengadaan Bahan Chemical Laundry Liquid Habis Pakai Di Instalasi Sentral Sterilisasi Dan Binatu Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelaynan Linen	1 (satu) tahun	1 Feb 2017 s/d 31 Jan 2018
26	PT. Intermedika Raya	No. 065/2005/RSUDP/2017; No. 009/IMR MOU/VIII/2017	Penyediaan Alat/Bahan Medis Habis Pakai Pada Rumah Sakit Uum Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan (Mata dan Syaraf)		1 Agustus 2017 s/d 30 September 2018
27	PT. Dexa Arfindo Pratama	No. 065/405/RSUDP/2017; No. 004/DAP-KSO/2017	Penempatan Alat Nyco Card Reader II Di Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang pelayanan Lab	2 (dua) tahun	1 Feb 2017 s/d 31 Jan 2019
28	Koperasi Jasa keselamatan Radiasi Dan Lingkungan Pusat Teknologi Keselamatan Dan Metrologi Radiasi Badan Nuklir Nasional	No. S-004/JKRL I/I/2017 ; No. 065/115/RSUDP/2017	Evaluasi TLD Beta Gamma	Bidang Pelayanan Radiologi	1 (satu) tahun	Januari 2017 s/d Desember 2017
29	PT. Firsha Rana Azzam Medika	No. 065/1581/RSUDP/2017; No. 006/03/PT/FRAME/2017	Penyediaan Alat Medis Habis Pakai Implant Dan Instrument Orthopaedics Di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang pelayanan Tulang	2 (dua) tahun	1 Feb 2017 s/d 31 Jan 2019
30	PT. Pelita Santoso Jaya	No. 065/1600?RSUDP/2017; No. 043/PSJ/KSO/III/2017	Penempatan 1 (satu) unit Alat Blood Gas Analyzer Opti CCA TS Medical USA di Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Laboratoriu m	1 (satu) tahun	1 Maret 2017 s/d 30 September 2018
31	PT. Pelita Santoso Jaya	No. 065/1601/RSUDP/2017; No. 043/PSJ/KSO/III/2017	Penempatan 1 (satu) unit Alat Urin Chemistry Analyzer Urometer 720 SD Allere di Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Laboratoriu m		21 Maret 2017 s/d 30 September 2018

NO	MITRA KERJASAMA	NOMOR PKS 2016	BIDANG PERJANJIAN KERJASAMA	BIDANG	Jangka Waktu	
					Lama	Dari tanggal
A	B	C	D	H	F	G
32	PT. Pelita Santoso Jaya	No. 065/1598/RSUDP? 2017; No. 041/PSJ/KSO/III/2017	Penempatan 1 (satu) unit Alat Coagulation Start 4 Merk Stago di Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Laboratorium		21 Maret 2017 s/d 30 September 2018
33	PT. Pelita Santoso Jaya	No. 065/1599/RSUDP/2017; No.040/PSJ/KSO/II/2017	Penempatan 1 (satu) unit Alat Electrolyte Analyzer Roche 9180 di Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan Laboratorium		21 Maret 2017 s/d 30 September 2018
34	PT. Pelita Santoso Jaya	No. 065/2450/RSUDP/2017; No. PSJ.03.018/KSO/LAB/III/17	Penempatan 1 (satu) unit alat Autoanalyzer Kimia Klinik Chemistry System Selectra Pro S Mrk Diagnostic Di Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Prov. NTB	Bidang Pelayanan Laboratorium		21 Maret 2017 s/d 30 September 2018
35	PT Sarana Media Sukses	No. 065/3160/RSUDP/2017; No. 093/PK-SMS/09/2017	Penyediaan Alat/Bahan Medis Habis Pakai Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	Bidang Pelayanan	1 (satu) tahun	2 Oktober 2017 s/d 1 Oktober 2018
36	PT. Cipta Husada Mandiri	No. 065/1348/RSUDP/2017; No. 010/PK/CHM-NTB/IV/2017	Penyediaan Alat/Bahan Medis Habis Pakai Untuk Layanan Operasional Cathlab (Intervensi Kardiologi) Pada Rumah Sakit Umum Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan (Intervensi Kardiologi-Cathlab)	1 (satu) tahun	1 April 2017 s/d 31 Maret 2018
37	PT. Nauval Medicatama Sukses	No. 065/3159/RSUDP/2017; No. 086/NMS/IX/2017	Penyediaan Alat/Bahan Medis Habis Pakai Pada Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	Bidang Pelayanan	1 (satu) tahun	2 Oktober 2017 s/d 1 Oktober 2018
38	PT. Dian Jaya Baru	No. 065/3159/RSUDP/2017; No. 086/NMS/IX/2017	Laboratory Information System (LIS) Softmedik Di Instalasi Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Prov NTB	Bidang Pelayanan (LIS) di Instalasi Lab	3 (tiga) tahun	1 Juli 2017 s/d 30 Juni 2020
39	Klinik Spesialis Anugerah Ibu	No. 075/09/AIM/X/17; No. 065/3497/RSUDP/2017	Pemeriksaan Laboratorium Klinik Khususnya Pemeriksaan Mikrobiologi Klinik Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia Di RSUDP NTB	Bidang Pelayanan (Pemeriksaan TKI-Laboratorium)	2 (dua) tahun	1 Agustus 2017 s/d 31 Juli 2019
40	Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat	No. 821,2/30/DIKES/VI/2017; No. 065/2383/RSUDP/2017	Penyelenggaraan Program Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan Di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Bidang Pelayanan (IKL)	1 (satu) tahun	1 Juni 2017 s/d 31 Mei 2018
41	PT. Mulya Husada Jaya	No. 065/2817/RSUDP/2017; No. 022/MHJ/SS/VI/2017	Kontrak Service Silver Alat Cathlab Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prov NTB	Bidang Pelayanan (kontrak service silver Cathlab)	1 (satu) tahun	1 September 2017 s/d 31 Des 2018

Sumber : RSUD Provinsi NTB, 2017

Selain itu untuk mendukung penyelenggaraan urusan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB menetapkan indikator Kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.55 Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Provinsi NTB tahun 2017

No	Aspek/Indikator Kinerja RSUD Provinsi NTB	Sat	Target	Capaian	% capaian
			2017	2017	
1	Kepuasan Pelanggan (Indeks)	%	84	74,39	92,98
2	Rasio Likuiditas				
	Current Ratio	%	10.069	11.988	109
	Cash Ratio	%	7.466	5.486	94
	Quick Ratio	%	8.719	10.557	109
3	Rasio Solvabilitas				
	Rasio Perputaran Piutang	%	82,17	32.13	31
	Rasio rata-rata pengumpulan piutang	Hari	0,03	56.08	
	Piutang Turn Over	Kali	88,53	6.51	5.51
4	Rasio Rentabilitas				
	Profit Mmargin Ratio	%	49,83	42.95	9.7
	Return on Asset	%	37,22	13.80	45
5	BOR (Tingkat pemanfaatan tempat tidur RS)	%	71	66,2	93,2
6	ALS (Tingkat efisiensi dan mutu pelayanan RS)	Hari	6,1	5,9	96,7
7	BTO (Frekuensi penggunaan TT)	Orang	42	42,4	100
8	TOI (Interval TT tdk terisi sampai terisi kembali RS)	Hari	2,4	3,6	150
9	NDR (Angka kematian > 48 jam)	%	43	52	120
10	GDR (Angka kematian umum)	%	80	85	106
11	Angka Kematian Ibu di RS				
	a. Akibat Pendarahan	%	0,17	0	100
	b. Preklamsia	%	0,25	1,03	412
	c. Sepsis	%	0,03	33,3	111
12	Angka Infeksi Nosokomial	%	1,00	0,14	100
13	Tingkat Penggunaan Obat Generik	%	60	68,21	113
14	Waktu tunggu (Kecepatan penanganan penderita gawat darurat)	Menit	4	4	100
15	Jumlah pasien yang dilayani :				
	a. Rawat Inap	Orang	17.355	16.703	96,24
	b. Rawat Jalan	Orang	103.999	125.312	120,49
	c. Gawat Darurat	Orang	40.674	18.742	46,07
16	Kelengkapan pengisian Rekam Medik	%	70	52	74,3
17	Prosentase Baku Mutu limbah cair				
	a. BOD	mg/lt	50	10,2	100

No	Aspek/Indikator Kinerja RSUD Provinsi NTB	Sat	Target	Capaian	% capaian
			2017	2017	
	b. COD	mg/lt	80	22,3	100
	c. TSS	mg/lt	30	3,50	100
	d. PH	%	7	7	100
18	Pendapatan BLUD	Milyar	100	105,24	105,24
19	Jumlah sarana yang terbangun	Paket	3	3	100
20	Jumlah gedung yang terpelihara	Unit	6	6	100
21	Jumlah Alat Kedokteran yang tersedia	Unit/Set	161	161	100
22	Jumlah Dokter Spesialis ke Sub Spesialis	Orang	2	1	50
23	Jumlah Dokter Umum ke Spesialis	Orang	2	2	100
24	Jumlah pelatihan dan pengembangan SDM RS	%	880	476	54
25	Prosentase Pelatihan di Unit Khusus	%	60	80	120
26	Jumlah SPM/SPO/CP yang tersusun	Jenis	323	323	100
27	Jumlah Dokumen Perencanaan RS yang tersusun	Jenis	6	6	100
28	Jumlah Naskah Kerjasama	Jenis	60	76	134
29	Jumlah laporan capaian kinerja	Jenis	3	3	100

Sumber : RSUD Provinsi NTB, 2017

Untuk mengetahui kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit, pada tahun 2017 telah dilakukan survei dengan indeks kepuasan masyarakat sebesar 81,60 persen, artinya mutu pelayanan dalam kategori Baik (62,51- 81,25%), namun bila dilihat dari angka kematian, baik kematian secara umum (GDR), NDR (kematian > 48 jam), maupun kematian ibu di RS yang disebabkan karena sepsis, preeklamsi dan eklamsi masih tinggi, RSUD Provinsi NTB telah berusaha maksimal memberikan pelayanan kepada pasien namun karena RSUD Provinsi NTB merupakan RS Rujukan tersier maka pasien yang datang sudah dalam kondisi kritis.

c. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi

Pada tahun 2017 jumlah pasien rawat jalan dan rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi sebanyak 50.929 orang, meningkat 11,70 persen dibandingkan tahun 2016. Berdasarkan cara bayar dari tahun 2016-2017 pasien terbanyak menggunakan layanan BPJS Kesehatan sebesar 87,22 persen dan yang menggunakan layanan umum sebesar 12,78 persen, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.56 Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSJ Mutiara Sukma Provinsi berdasarkan Cara Bayar Tahun 2016-2017

NO	CARA PEMBAYARAN	2016			2017		
		Rawat Jalan	Rawat Inap	Jumlah	Rawat Jalan	Rawat Inap	Jumlah
1	Umum	5.726	272	5.998	6.073	268	6.341
2	BPJS/ Jamkesda	38.683	912	39.595	43.754	834	44.588
Jumlah		44.409	1.184	45.593	49.827	1.102	50.929

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2017

RSJ Mutiara Sukma Provinsi selain melayani pasien gangguan jiwa juga menangani pasien penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (Napza), karena memiliki unit khusus terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan Napza di Provinsi NTB yang dinamakan dengan "*One Stop Centre*" (OSC) Wisma Anggrek dan satu-satunya institusi pelayanan yang ditunjuk sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) bagi Orang Dengan Penyalahgunaan Napza (ODPGN).

Jumlah pasien penyalahgunaan Napza yang ditangani di RSJ Mutiara Sukma Provinsi tahun 2016 sebanyak 287 pasien, turun di tahun 2017 menjadi 253 pasien. Pelayanan kepada pasien Napza dari tahun 2016-2017, dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.57 Cakupan Pelayanan Pasien Napza Tahun 2016-2017

TAHUN	TARGET (%)	REALISASI (%)	JUMLAH YANG DIRAWAT DI RSJ
2016	100	100	287
2017	100	100	253

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2017

RSJ Mutiara Sukma Provinsi dalam memberikan pelayanan OSC bekerjasama dengan BNN Provinsi dan BNN Kota Mataram dalam bentuk TAT (*Tim Assesment Terpadu*), Rehabilitasi Ketergantungan Napza, Rumah Damping Pasca Rehabilitasi, Pemetaan Wilayah, serta Pendampingan dan Penjangkauan bagi Penyalahguna Napza.

Dalam penanganan pasien pasung, RSJ Mutiara Sukma Provinsi telah melakukan penjangkauan pasien pasung sejak tahun 2011. Pada tahun 2017 RSJ Mutiara Sukma Provinsi telah menjangkau 62 pasien pasung dan tertangani seluruhnya (100%) menurun dibandingkan tahun 2016 sebanyak 86 pasien yang seluruhnya juga tertangani. Penurunan ini disebabkan oleh Pemahaman masyarakat terhadap pemasungan kurang dan belum tersedianya peta angka gangguan jiwa per kabupaten/kota. Jumlah pasien pasung hasil penjangkauan tahun 2016 – 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.58 Jumlah Pasien Pasung Hasil Penjangkauan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2016 - 2017

No	Wilayah PUSKESMAS	2016	2017
1.	Mataram	8	7
2.	Lombok Barat	10	14
3.	Lombok Tengah	24	10
4.	Lombok Utara	6	3
5.	Lombok Timur	17	13
6.	Sumbawa	15	7
7.	Sumbawa Barat	0	0
8.	Dompu	2	1
9.	Bima	4	1
10.	Kota Bima	0	6
JUMLAH		86	62

Sumber : RSJ Mutiara Sukma Provinsi NTB, 2017

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Target "NTB Bebas Pasung 2018" melalui penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 22 tahun 2013 tentang penanggulangan pemasungan provinsi NTB melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. Pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan sosialisasi perubahan perilaku dengan cara komunikasi, informasi dan edukasi sehingga dapat mendorong dan meningkatkan layanan kesehatan jiwa. Estimasi pasien yang dipasung dan pernah dipasung di NTB berdasarkan Risesdas tahun 2013 sebesar 1.409 orang.

Inovasi yang dilakukan untuk mencapai target "NTB Bebas Pasung 2018" adalah melalui Aplikasi "Masyarakat Aktif Klik Pasung Online" (MAKPASOL) sebagai sistem komunikasi yang efektif demi mewujudkan NTB Bebas Pasung 2018. Aplikasi MAKPASOL akan secara langsung menghubungkan masyarakat, Puskesmas, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota/Kab, RSJ Mutiara Sukma, dan Pemerintah Provinsi melalui media internet secara online dalam upaya pembebasan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mengalami tindakan pemasungan di wilayah NTB. Ikhtiar lain yang dilakukan untuk mencapai target "NTB Bebas Pasung 2018" adalah melalui Pelatihan Community Mental Health Nursing (CMHN) di semua Kabupaten/Kota dengan melibatkan semua sektor terkait guna percepatan penemuan kasus pasung di masyarakat.

RSJ Mutiara Sukma juga aktif mengupayakan pemberdayaan pasien pasung setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama antar sektor terkait seperti tokoh masyarakat, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, perangkat desa, dan kader sehingga tujuan agar pasien setelah kembali ke keluarga mampu bekerja secara mandiri dan tidak menjadi beban bagi keluarga atau masyarakat dapat tercapai.

RSJ Mutiara Sukma membuka poli khusus untuk penyakit dalam untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan setiap hari Kamis, dengan jumlah kunjungan 362 orang, poli syaraf setiap hari Rabu dengan jumlah kunjungan 2.005 orang serta poli jiwa anak dan remaja dilaksanakan setiap hari dengan jumlah kunjungan 4.825 orang selama tahun 2017.

Autisme Centre juga akan segera dibuka, untuk itu RSJ Mutiara Sukma mengembangkan sistem pelayanan jiwa anak dan remaja secara terpadu dan komprehensif. Pelayanan ini berbentuk CLP (Consultant Lison Psychiatre)/Kerja Tim antara Dokter Spesialis Jiwa Anak dan Remaja, Dokter Anak, Dokter Neurologi beserta Tim Tumbuh Kembang RSJMS.

Adapun 10 penyakit terbanyak dari pasien yang berkunjung ke RSJ Mutiara Sukma dapat dilihat dari diagnosanya yaitu;

Tabel 2.59 Sepuluh Besar Penyakit yang ditangani di RSJ Mutiara Sukma NTB

NO	GOLONGAN DIAGNOSA
1	Skizofrenia, Gg. Skizotifal, Psikotik Akut dan sementara
2	Gg. Ansietas Fobik dan Gg. Ansietas linnya
3	Epilepsi
4	Gg. Skizoafektif
5	Episode depresif, Gg.depresif berulang,Gg.suasana perasaan (mood afektif) menetap,lainnya atau YTT
6	Retardasi mental
7	Episode manik dan Gg.afektik bipolar
8	Hipertensi esensial (primer)
9	Gg. Hipernetik, prilaku,emosional,funsi khas,gg."tic"dan gg.mental dan emosi lainnya
10	Gangguan mental dan prilaku akibat penggunaan alkohol

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSJ Mutiara Sukma dilakukan setiap tahun melalui survey kepuasan masyarakat. Survey kepuasan masyarakat tahun 2016 menyatakan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan RSJ Mutiara Sukma mencapai 80,44 persen lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu 78,5%. Hal ini menunjukkan kinerja pelayanan di RSJ Mutiara Sukma sudah tergolong baik.

Upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit juga dilakukan melalui akreditasi rumah sakit. Tahun 2016 RSJ Mutiara Sukma telah melaksanakan proses akreditasi dan dinyatakan Lulus Paripurna berdasarkan penilaian dari KARS. Tahun 2017 dilaksanakan penilaian ulang dan dinyatakan lulus paripurna.

Salah satu program/sasaran strategis RSJ Mutiara Sukma yang mendukung capaian indikator RPJMD demi terwujudnya generasi emas adalah Program Upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator:

- Pasien gangguan jiwa tertangani 52.400 kunjungan (100%)
- Pasung tertangani 642 orang (100%)
- NAPZA tertangani 253 kasus (100%)
- HIV/AIDS tertangani 1.528 klien yang mengikuti tes dan 9 orang yang positif HIV (100%)

d. Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir

Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir memberikan fasilitas penyediaan prasarana kesehatan bagi masyarakat Provinsi NTB di Pulau Sumbawa. Cakupan rawat jalan dan IGD berdasarkan cara bayar ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.60 Cakupan Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2016 – 2017

NO	CARA PEMBAYARAN	2016				2017			
		Rawat Jalan	Rawat Inap	Instalasi Gawat Darurat	Jumlah	Rawat Jalan	Rawat Inap	Instalasi Gawat Darurat	Jumlah
1.	Umum	4.564	1.689	2.723	8.976	4.668	8.856	2.471	15.995
2.	BPJS	8949	4.494	3.102	16.545	11.283	3.039	4.022	18.344
3.	JAMKESMAS/ MOU	107	72	78	257	65	22	78	165
4.	Lainnya/intern	449	22	59	530	433	22	42	497
Jumlah		14.069	6.277	5.962	26.308	16.449	11.939	6.613	35.001

Sumber : Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir, 2017

Selama Tahun 2017, cakupan layanan di Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir mencapai 35.001 orang pasien atau meningkat sebesar 33,04% jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 26.308 orang pasien. Peningkatan pasien yang signifikan terutama pada pasien rawat inap dari 6.277 orang pasien pada tahun 2016, meningkat menjadi 11.939 orang pasien pada tahun 2017. Peningkatan pasien rawan inap mengindikasikan semakin baiknya pelayanan di Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir.

Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir yang telah resmi berstatus Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada tahun 2016 berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 440- 470 Tahun 2016 Tanggal 10 Mei 2016, tentang Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir. Program unggulan yang diselenggarakan yaitu pemenuhan kebutuhan obat-obatan dan bahan penunjang pelayanan lainnya. Hal ini sangat bermanfaat untuk menunjang Proses Akreditasi R.S. Manambai Abdulkadir menuju Rumah Sakit Tipe B.

Pada tahun 2017, R.S. Manambai Abdulkadir menjadi rumah sakit yang dipercaya oleh TNI Angkatan Laut untuk mengadakan kegiatan bakti sosial operasi katarak untuk 300 orang pasien di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Hal ini merupakan suatu bentuk kepercayaan terhadap kualitas pelayanan R.S. Manambai Abdulkadir.

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan yang diselenggarakan selama tahun 2017 dalam pelaksanaannya masih menghadapi beberapa permasalahan dengan solusi sebagaimana tabel berikut.

3. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah bidang Pekerjaan Umum yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018 adalah Jaringan Jalan Provinsi dalam Kondisi

Mantap dan cakupan air bersih di perkotaan dan perdesaan, dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.61 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN AWAL RPJMD 2013	2016	2017		KONDISI KINERJA AKHIR 2018
				TARGET	REALISASI	
Jaringan jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	67,56	72.10	75,39	77,16	83,65
Cakupan Air Bersih						
- Perkotaan	%	80,23	89.95	86,22	90,65	87,56
- Perdesaan	%	72,15	78.47	80,18	80,45	81,87

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2017

▪ Prasarana Jalan

Keseimbangan aksesibilitas antar wilayah dan antar sektor harus dijaga sehingga mewujudkan pemerataan tingkat kemantapan infrastruktur jalan antar wilayah dan antar sektor.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 melaksanakan pembangunan jalan sebanyak :

- PRIM-INDII 5 (lima) paket yaitu: Paket 19 Pringgabaya - Sb. Bumbung, Lb. Lombok - Sambelia, Sambelia - Ds. Biluk, Paket 20 Sumbawa Besar - Semongkat - Bt. Dulang, Sumbawa-Moyo-Lua Air, Paket 21 : Tawali - Sape, Paket 22 : Wilamaci - Karumbu - Sape, Lb. Lombok-Sambalia-Ds.Bilok, Paket 23 : Bengkel-Kediri, Kediri-Praya, Praya-Kruak, Jln. Basuki Rahmat (Praya), Mantang-Praya, Tanjung Geres-Pohgading-Pr. Baya.
- DAK 12 (dua belas) paket, yaitu: Peningkatan Jalan Datuk Dibanta - Bts. Kota (Bima), Peningkatan jalan Jln. Gatot Subroto (Bima), Peningkatan jalan Kuta – Keruak, Peningkatan Jalan Udayana (Mataram), Peningkatan Jalan Ketejer – Jontlak, Peningkatan Jalan Ropang-Sekokat, Peningkatan Jalan Sp. Kore – Kiwu, Peningkatan Jalan R. Suprpto (Mataram), Peningkatan Jalan Kuripan - Giri Menang, Peningkatan Jalan Panji Tilar Negara (Mataram), Peningkatan Jalan Terminal Mandalika, Peningkatan Jalan Sp. Kore - Kiwu II.
- Percepatan (APBD) 13 (tiga belas) paket, yaitu: Paket 1 Rembiga (Bts. Kota)-Pemenang, Paket 2 Lembar - Sekotong – Pelangan, Paket 3 Pelangan - Sp. Pengantap 3, Paket 4 Pelangan - Sp. Pengantap 4, Paket 5 Pengantap - Mt. Ajan – Kuta, Paket 6 Keruak-Pancor, Paket 7 Keruak - Lb. Haji, Paket 8 Tetar – Lunyuk, Paket 9 Lenangguar – Lunyuk, Paket 10 Plampang – Sekokat, Paket 11 Sampungu – Bajo, Paket 12 Sp. Kore – Piong, Paket 13 Lb. Kenanga - Kawinda To'i.
- Reguler 1 (satu) paket yaitu: Pembangunan Jalan Akses TWA Gunung Tunak (6,00 Km), di Kabupaten Lombok Tengah.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 melaksanakan pemeliharaan jalan melalui PRIM INDII sebanyak 15 (lima belas) ruas jalan di P.

Lombok yaitu: Ruas Jalan Tumpang Sari (1,20 Km), Ruas Jalan TGH Bangkol (1,30 Km), Ruas Jalan I Gst. Kt. Jelantik Gosa (1,70 Km), Ruas Jalan Sultan Kaharudin (1,85 Km), Ruas Jalan Sultan Salahudin (1,10 Km), Ruas Jalan Selaparang (2,25 Km), Ruas Jalan Kediri - Kuripan (5,30 Km), Ruas Jalan Praya - Keruak (16,40 Km), Ruas Jalan Mt. Ajan - Penujak (23,00 Km), Ruas Jalan Aikmel - Swela (8,40 Km), Ruas Jalan Masbagik - Pancor (6,30 Km), Ruas Jalan Selong - Lb. Haji (5,45 Km), Ruas Jalan Tanjung Geres - Pohgading (15,23 Km), Ruas Jalan Pancor - Rempung (4,32 Km), Ruas Jalan Praya - Keruak (4,35 Km). P. Sumbawa 17 (tujuh belas) ruas jalan, yaitu: Ruas jalan SULTAN KAHARUDDIN (R. 109.11K), Ruas jalan Sumbawa - Sebewe - Lua Air (R.110), Ruas jalan SUDIRMAN (R. 110.11K), Ruas jalan SIMPANG NEGARA - MOYO -LUA AIR (R. 111), Ruas jalan PAL. IV - LENANGGUAR (R. 112.1), Ruas jalan SEKOKAT - MBAWI (R. 114), Ruas jalan Sbw - Sebewe - Lua Air, Ruas jalan SIMPANG TANO - SIMPANG SETELUK (R.106), Ruas jalan BENETE - SEJORONG (R. 107.1), Ruas jalan Sejongong-Tatar-Bts. KSB (R. 107.2), Ruas jalan Bima-Tawali, Ruas Jalan Talabiu – Simpasai, Ruas Jalan Simpasai – Parado, Ruas Jalan Datuk Dibanta, Ruas Jalan Hasanudin, Ruas Jalan Gajah Mada, Ruas Jalan Hu'u – Parado.

Panjang Jalan di Provinsi NTB adalah 8.040,79 Km yang dibedakan berdasarkan status Jalan Nasional 934,55 km, jalan Provinsi 1.484,43 km dan Jalan Kabupaten/Kota 5,621.81 km, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.62 Kondisi Jalan di Provinsi NTB (kondisi 31 Desember 2017)

Status Jalan	Panjang Jalan(Km)	Satuan	Kemantapan Jalan 2016		Kemantapan Jalan 2017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jalan Nasional	934,55	Km	921,47	921,47	934,55	906,17
		%	98,60	98,60	100,00	96,964
Jalan Provinsi	1.484,43	Km	1.082,15	1.070,27	1.119,12	1.096,18
		%	72.90	72.10	75.39	77.16
Jalan Kab. / Kota	5.621,81	Km	0	0	0	0
		%	0	0	0	0
Total	8.040,79					

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2017

Tabel 2.63 Data Panjang Jalan Provinsi di Kabupaten/Kota se-NTB

KABUPATEN / KOTA MADYA	PANJANG EFEKTIF (KM)	PERANAN JALAN		JENIS PERMUKAAN / KONDISI		JENIS PERMUKAAN / KONDISI		
		K2 (KM)	K3 (KM)	HOTMIX (KM)	LAPEN (KM)	KERIKIL	TANAH (KM)	BL. TBS (KM)
MATARAM	61.89	2.40	59.49	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
LOMBOK BARAT	124.58	31.72	92.86	113.68	0.00	0.00	10.90	0.00
LOMBOK UTARA	9.78	9.78	0.00	9.78	0.00	0.00	0.00	0.00
LOMBOK TENGAH	142.99	30.16	112.83	142.99	0.00	0.00	4.20	0.00
LOMBOK TIMUR	188.92	105.00	83.92	188.92	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMBAWA BAG. BARAT	76.39	76.39	0.00	67.39	0.00	9.00	0.00	0.00
SUMBAWA BAG. TIMUR	367.18	170.53	196.65	215.82	0.00	36.50	30.96	83.90
D O M P U	103.24	45.05	58.19	58.29	0.00	4.95	0.00	40.00

KABUPATEN / KOTA MADYA	PANJANG EFEKTIF (KM)	PERANAN JALAN		JENIS PERMUKAAN / KONDISI		JENIS PERMUKAAN / KONDISI		
		K2 (KM)	K3 (KM)	HOTMIX (KM)	LAPEN (KM)	KERIKIL	TANAH (KM)	BL. TBS (KM)
B I M A	389.27	356.47	32.80	300.92	18.69	55.06	8.50	6.10
KOTA BIMA	20.19	17.69	2.50	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
J U M L A H	1.484,43	845.19	639.24	1.179,87	18.69	105.51	50.36	130.00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, 2017

Kemantapan Jalan provinsi tahun 2017 mencapai 77,16 persen dari rencana 75,39 persen target RPJMD, sementara kemantapan jalan nasional tahun 2017 telah mencapai target 99,44 persen. Jalan provinsi dengan total panjang 1.484,43 Km, panjang jalan yang sudah Hotmix sebesar 1.145,36 Km (lihat tabel 4.59) dari rencana 75,39 persen dari target yang tertuang dalam RPJMD 2017, capaian kinerja terlampaui dengan ratio tingkat capaian kinerja 102,35 persen (%) namun upaya perbaikan kondisi kemantapan jalan tetap dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

Selain penanganan jalan Provinsi, dilaksanakan pula penanganan ruas-ruas jalan strategis nasional khususnya pada ruas jalan Pemenang-Bayan-Sembalun (lingkar utara Pulau Lombok) yang pendanaannya berasal dari APBN untuk konstruksi dan pengadaan tanah dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Lombok Utara.

▪ Prasarana Keciptakarya dan Sumberdaya Air

Pelaksanaan kegiatan keciptakarya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB meliputi penanganan air bersih, penanganan drainase dan pembangunan Islamic Center NTB.

1) Penanganan Air Bersih

Cakupan pelayanan air bersih di Provinsi NTB pada tahun 2017 sudah mencapai 85,55 persen terdiri atas perkotaan 90,65 persen dari target 86,22 persen, sedangkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan telah mencapai 80,45 persen dari target 80,18 persen. Tahun 2017, pembangunan prasarana air bersih untuk masyarakat miskin di perdesaan dan ibu kota kecamatan sebanyak 7 paket melalui dana APBD di 6 Kabupaten dan 1 Kota. Pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (SPAM) Desa sebanyak 37 paket.

Tabel 2.64 Cakupan Layanan Air Bersih dan Sanitasi Tahun 2016 – 2017

No.	Program Unggulan	Kegiatan Prioritas	Capaian Kinerja					
			Indikator	Satuan	2016	2017		Target 2018
					Realisasi	Target	Realisasi	
1	Pengembangan Sistem Penyediaan	Pembangunan Jaringan	Cakupan air bersih di	Kota (%)	89,95	86,22	90,65	87,56

No.	Program Unggulan	Kegiatan Prioritas	Capaian Kinerja					
			Indikator	Satuan	2016	2017		Target 2018
					Realisasi	Target	Realisasi	
	Prasarana dan Sarana Air Bersih	Penyediaan Air Bersih	perkotaan dan perdesaan	Desa (%)	78,47	80,18	80,45	81,87

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017

2) Prasarana SDA

Dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian dan mendukung pemenuhan kebutuhan air baku, dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu pembangunan jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi pada seluruh Daerah Irigasi (DI). Kegiatan strategis lainnya dalam rangka pengamanan daerah permukiman terhadap bencana banjir dilakukan melalui perkuatan tebing sungai. Pada tahun 2017 dilaksanakan pembangunan Jaringan Irigasi Lahan Kering (JILK) pada lahan kering menjadi lahan agrowisata di Kecamatan Sembalun (JILK Pangsor, Bale Ijuk) dan Pringgabaya (JILK Gunung Malang), pemeliharaan Jaringan Irigasi di Pulau Lombok pada 16 DI untuk luas areal irigasi 36,968 Ha dan di Pulau Sumbawa pada 21 DI untuk luas areal irigasi 31.370 Ha. Perkuatan tebing sungai di Pulau Lombok 28 Lokasi/daerah aliran sungai, pengamanan wilayah permukiman + 1.750 KK. Di Pulau Sumbawa sepanjang 5.000 meter sebanyak 119 paket dalam rangka pengamanan wilayah permukiman + 3.640 KK.

Prasarana sumber daya air di Provinsi NTB mampu mendukung produksi padi sebesar 2,5 juta ton/tahun melampaui target produksi 2,4 juta ton. Salah satu bendungan yang menopang penyediaan air irigasi adalah Bendungan Pandan Dure yang berlokasi di Kabupaten Lombok Timur. Bendungan ini mampu mengairi areal pertanian seluas 5.168 Ha. Selain pembangunan waduk Pandan Dure, saat ini sedang dilaksanakan pembangunan waduk Tanju-Mila di Kabupaten Dompu dan waduk Bintang Bano di Kabupaten Sumbawa Barat yang sumber pendanaannya dari APBN serta pengadaan lahan dari APBD Provinsi NTB dan APBD Kabupaten. Dari dana APBD Provinsi telah dibangun Embung Prode di Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa yang akan mengairi areal tanah kritis seluas 500 Ha.

Pada tahun 2015-2017 tercatat sebanyak 34 indikasi pelanggaran Tata Ruang. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya indikasi pelanggaran yang lebih luas, BKPRD secara intensif melakukan koordinasi kepada kabupaten/kota. Dari 34 indikasi pelanggaran tata ruang yang sudah teridentifikasi oleh PPNS Penataan Ruang Provinsi NTB, terdapat 5 kasus yang sedang dalam proses penanganan.

Sampai tahun 2015 telah disusun rencana detailnya sebanyak 5 KSP yaitu KSP Mataram Metro, KSP Alas Utan, KSP Senggigi Tiga Gili, KSP Kuta dan KSP Teluk Bima. Dari 5 KSP tersebut yang telah mendapatkan persetujuan substansi teknis dari Gubernur berdasarkan rekomendasi BKPRD Provinsi NTB adalah KSP Alas Utan Selain itu dilakukan pula fasilitasi penyusunan rencana detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan pada seluruh

Kabupaten/Kota se-NTB. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2016 telah disusun RTR sebanyak 2 (dua) KSP yaitu KSP Rasimas (Sakra, Sikur, Masbagik) dan Teluk Saleh. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sudah mencapai 100 persen dari target yang ditetapkan. Pendampingan penyusunan Raperda RTRW Kabupaten/Kota sudah melampaui dari target yaitu 100 persen, yaitu mempercepat penyelesaian Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi. pada Tahun Anggaran 2017 telah disusun RTR sebanyak 1 (satu) KSP yaitu KSP Poto Tano. Selain itu dilakukan pula fasilitasi penyusunan Rencana detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan pada seluruh Kabupaten/Kota se-NTB dan penyusunan KLHS yaitu RTR KSP Senggigi Tiga Gili dan KLHS RTR Kuta dan sekitarnya.

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Capaian kinerja pembangunan daerah Urusan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam RPJMD 2013-2018 Provinsi NTB Tahun 2017 diukur dengan indikator kinerja Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.65 Capaian Indikator Kinerja Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2016		2017	
		Target	Real	Target	Real
Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	1.000	1.008	1.073	1.081

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2017.

Mewujudkan peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan menjadi tanggungjawab urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Pada tahun 2017 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman NTB, diprioritaskan bagi masyarakat yang sangat miskin dengan kriteria dan persyaratan yang sudah ditentukan seperti kelengkapan administrasi, kondisi rumah rusak berat, dan sudah terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT). Terdapat 6 (enam) paket pekerjaan di 10 (sepuluh) kabupaten/kota. Capaian penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 1.081 unit rumah pada tahun 2017, per kabupaten/kota, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.66 Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB Tahun 2016 – 2017

No.	Kabupaten/Kota	Satuan	2016		2017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kota Mataram	Unit	26	26	32	32
2	Lombok Barat	Unit	150	158	160	160
3	Lombok Tengah	Unit	195	195	76	76
4	Lombok Utara	Unit	70	70	202	208

No.	Kabupaten/Kota	Satuan	2016		2017	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
5	Lombok Timur	Unit	309	309	215	217
6	Sumbawa Barat	Unit	18	18	96	96
7	Sumbawa	Unit	76	76	52	52
8	Dompu	Unit	38	38	72	72
9	Bima	Unit	92	92	121	121
10	Kota Bima	Unit	26	26	47	47
Jumlah		Unit	1.000	1.008	1.073	1.081

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB, 2017.

Beberapa permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai terget RPJMD untuk penanganan Rumah Tidak Layak Huni selama tahun 2017, sebagaimana tabel berikut.

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur wajib yang harus dilaksanakan dan yang menjadi hak masyarakat untuk mendapat kehidupan yang lebih tertib dan lebih tentram sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat untuk hidup sejahtera.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh 3 Perangkat Daerah, yakni Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Indikator kinerja daerah yang terkait dengan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013 – 2018 adalah penurunan jumlah konflik sosial, dan partisipasi masyarakat dalam politik sebagaimana yang tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.67 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN			
		2016		2017	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Penurunan Jumlah Konflik Sosial	Kasus	37	23	32	21
Partisipasi masyarakat dalam Politik	%	72,00	73,43	72,50	73,43

Sumber: Bakesbangpoldagri Prov. NTB, 2017

▪ **Penurunan Jumlah Konflik Sosial**

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan fungsi mencegah terjadinya dan meluasnya konflik sosial, Bakesbangpoldagri Provinsi NTB secara terus menerus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi yang dibentuk untuk keperluan tersebut, seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem) dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Sekecil apapun isu yang berpotensi menimbulkan konflik yang berdasarkan hasil deteksi dini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan atau aksi dalam pencegahan dini. Namun demikian, jika konflik terjadi maka diupayakan agar cepat diselesaikan secara optimal hingga tidak berdampak luas. Dengan demikian, maka tindakan deteksi dini dan pencegahan dini sangat penting artinya dalam mengurangi konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Dampak positif dari tindakan tersebut diperoleh hasil bahwa target penurunan konflik sosial semakin meningkat setiap tahunnya.

Untuk mengoptimalkan pencapaian target indikator penurunan jumlah konflik telah dilakukan sejumlah kerjasama dengan mitra Bakesbangpoldagri khususnya FKDM, dan Jejaring Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) NTB. Efek yang dapat dilihat dari intensnya membangun kemitraan ini yaitu berkurangnya konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Keberhasilan dalam mengatasi terjadinya konflik sosial tidak hanya dari kuantitasnya, akan tetapi dari segi kualitasnya juga dapat diturunkan. Artinya bahwa konflik sosial yang terjadi tidak memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial masyarakat baik yang berada di wilayah berkonflik ataupun wilayah sekitarnya.

Seiring dengan upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut, pada tahun 2017 kondisi konflik sosial juga secara signifikan ikut berkurang. Beberapa konflik sosial (bentrok antar kampung) terjadi di Kota Mataram 3 kasus, Kabupaten Lombok Tengah 1 kasus, Kabupaten Sumbawa 3 kasus, Kabupaten Dompu 1 kasus, Kabupaten Bima 11 kasus, dan Kota Bima 2 kasus dapat diredam sehingga tidak berdampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Berdasarkan data bahwa sepanjang tahun 2017 jumlah konflik sosial yang terjadi di NTB adalah sebanyak 21 kasus dari target 32 kasus (152,38%) atau menurun (9,52%) dibandingkan 2016.

▪ **Partisipasi masyarakat dalam Politik**

Penjelasan terkait dengan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam politik hanya dapat diukur setelah penyelenggaraan pemilihan umum. Pada tahun 2017 di Provinsi NTB sama dengan tahun 2016 tidak ada penyelenggaraan pemilu baik itu Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), namun tingkat partisipasi masyarakat NTB pada tahun 2015 mencapai 73,43 persen. Berdasarkan trend yang terjadi di setiap penyelenggaraan pemilu baik itu pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), rata-rata partisipasi masyarakat NTB cenderung

mengalami peningkatan. Sehingga pencapaian target 73,00 persen partisipasi masyarakat dalam politik pada pemilu pada tahun 2018 dan Pemilihan Presiden serta Pemilihan Legislatif tahun 2019 akan tercapai.

b. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB sebagai unit kerja yang menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat, sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2013 – 2018 memiliki satu indikator kinerja daerah yaitu penanganan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Adapun capaian dari indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.68 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2017

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017		TARGET 2018
			TARGET	REALISASI	
Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	%	100	100	100	100

Sumber: Satpol PP Provinsi NTB, 2017

Pada tahun 2017 pelanggaran terhadap Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Gubernur yang dilakukan oleh masyarakat berjumlah 14 Perda/pergub dengan jumlah kasus sebanyak 33 kasus.

Pelanggaran yang terjadi seluruhnya telah ditangani sesuai ketentuan dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Capaian program penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan pencegahan tindak kriminal dengan indikator penanganan pelanggaran peraturan daerah telah dapat ditangani dengan baik dan mencapai 100 persen dari target 100 persen pada RPJMD. Adapun gambaran Penanganan pelanggaran Perda dan ketertiban umum di Provinsi NTB serta pengawalan terhadap kebijakan daerah yang dilakukan Satpol PP Provinsi NTB tahun 2017, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.69 Penanganan Pelanggaran Perda Provinsi NTB dan Kebijakan Daerah Lainnya Tahun 2017

NO	DASAR HUKUM	JUMLAH KASUS	JENIS PELANGGARAN / SASARAN OPERASI	HASIL	TINDAK LANJUT/ PENANGANAN
1.	Perda No. 3 Tahun 2006 tentang Peredaran Garam di NTB	2 Kasus	1 Memperjual belikan Garam tidak mengandung yodium 2 Memperjual belikan Garam tanpa merk	Ditemukan 30 bungkus garam tidak beryodium dan 1 karung garam tanpa merk	Melakukan BAP dan penyitaan terhadap barang bukti tersebut dan diamankan dikantor satpol.pp
2.	Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Jalan	2 Kasus	1 Penggunaan Trotoar dan Bahu Jalan sebagai Lokasi menggelar Barang dagangan PKL 2 Menggelar Dagangan di Depan Kantor SKPD	Terjaring 12 orang pedagang	Dilakukan Pelarangan dan Pembongkaran serta Penyitaan Alat Penjualan.

NO	DASAR HUKUM	JUMLAH KASUS	JENIS PELANGGARAN / SASARAN OPERASI	HASIL	TINDAK LANJUT/ PENANGANAN
3.	Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Kasus	Membangun di atas lahan milik pemda tanpa izin	Ditemukannya rumah, Warung/Kios yang berdiri diatas tanah milik Pemda Prov NTB	Dilakukan Pembongkaran terhadap rumah, Warung/Kios dan Pencabutan 1 buah Plank yang berdiri diatas tanah milik Pemda Prov NTB
		2 Kasus	1 Melakukan Penanaman dan membangun diatas lahan milik Pemda Prov NTB Mencabut Plank 2 Kepemilikan Aset Pemprov NTB oleh Para Penggerekah	Ditemukan 3 buah berugak dan Baliho/Spanduk yang berada diatas tanah Aset Pemprov NTB	Dilakukan Pembongkaran 3 buah berugak dan pencabutan Baliho/Spanduk yang berada diatas tanah Aset Pemprov NTB serta melakukan Pengamanan Lokasi kemungkinan terjadinya penyerobotan kembali oleh para penggerekah.
		1 Kasus	Menguasai Asset Pemda oleh pihak III/ Masyarakat	Ditemukan oknum yang menguasai tanah milik pemda	• Mencatat/mendata luas tanah yang digerekah oleh oknum • Melakukan penertiban terhadap asset yang ditempat oleh oknum tidak sesuai dengan ketentuan. • Sosialisasi dan Pendekatan secara Persuasif
4.	Perda No. 4 Tahun 2016 tentang Pramuwisata	5 Kasus	1 Tidak Memiliki KTPP 2 Tidak Memiliki Kartu Anggota Pramuwisata 3 Tidak Memiliki Surat Izin Pramuwisata 4 Tidak Memiliki Lisensi Pramuwisata 5 Pramuwisata (Guide) dari luar Provinsi NTB	Ditemukan 34 orang Pramuwisata yang tidak memiliki KTPP, kartu anggota Pramuwisata, surat ijin pramuwisata, lisensi Pramuwisata.	Dilakukan Sosialisasi dan Peringatan serta memerintahkan untuk melakukan Pembuatan KTPP dan Mengikuti Ujian Pramuwisata untuk mendapatkan Lisensi Pramuwisata
5.	Perda No. 11 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	5 Kasus	1 Menyalah fungsikan tempat pengianpan/losmen dan sejenisnya sebagai tempat prostitusi terselubung 2 Lokasi berada ditengah perkampungan penduduk 3 Pelaku bukan merupakan pasangan suami-istri 4 Terindikasi pelanggaran norma agama dan sosial 5 Meresahkan masyarakat	• Terjaring 25 pasang berada dalam satu kamar tanpa surat nikah dan diantaranya ada 2 orang ASN dan 5 orang tanpa identitas.	• Pelaku dibawa ke Kantor Satpol PP Prov NTB untuk didata dan diberi peringatan serta pembinaan • Untuk ASN tindak lanjut penanganan dilakukan oleh BKD.
6.	Pergub No. 25 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS Prov NTB	1 Kasus	ASN Berada ditempat Hiburan Malam	• Terjaring 11 orang ASN sedang berada dalam cafe.	Dilakukan BAP dan Wajib Laporkan ke Satpol PP prov NTB
7.	Pemantauan dan pengawasan terhadap penyalahgunaan narkoba	1 Kasus	Pemakai Narkoba	Terjaring 76 orang positif narkoba	Dilakukan tes Urin, BAP di Kantor BNNP, Penyitaan KTP,

NO	DASAR HUKUM	JUMLAH KASUS	JENIS PELANGGARAN / SASARAN OPERASI	HASIL	TINDAK LANJUT/ PENANGANAN
	bersama BNN Prov. NTB				Penyitaan Barang Bukti Sabu (0,88)
8.	Pengawasan dan Pemberantasan terhadap cukai rokok/tembakau ilegal	3 Kasus	1 Memiliki Tembakau Ilegal 2 Menjual/Mengedarkan Tembakau Ilegal 3 Rokok/Tembakau iris tidak dilekati pita cukai	Ditemukan 321 bungkus tembakau iris yang tidak dilengkapi cukai	Dilakukan Pendataan, BAP dan barang sitaan diamankan di Kantor Bea dan Cukai KPPBC tipe Madya Pabean C Mataram
9.	Perda No. 4 Tahun 19 tentang Larangan, Pengawasan, Pengendalian, Penertila Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	1 Kasus	Peredaran Miras Tradisional	Terjaring 7 orang sedang melakukan acara minum minuman tradisional jenis tuak	Dilakukan penyitaan terhadap terhadap barang bukti berupa 120 botol miras jenis tuak.
10.	Surat Edaran Gubernur NTB No. 800/92/POL.PP/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Aparatur	2 Kasus	1 Tidak Apel Pagi 2 Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan	Terjaring 240 ASN yang Tidak Apel Pagi (TAP) dan Tanpa Keterangan	Dilakukan pemanggilan dan penyuluhan oleh pimpinan (WAGUB/SEKDA) bagi yang terjaring TAP sebanyak 3 kali sejumlah 23 orang dan tanpa keterangan sebanyak 1 kali sejumlah 14 orang dengan total 37.
11.	Edaran Gubernur No. 510/111/ Tahun 2017 tentang Larangan Minyak Goreng Bekas Provinsi NTB	1 Kasus	1 Memperjual belikan minyak goreng bekas	Terjaring 2 orang pedagang minyak goreng bekas	Dilakukan Penyetopan Penjualan dengan dibuatkan BAP dan Surat Pernyataan
12.	Pelanggaran (K3) Ketertiban. Ketentraman dan Keindahan (Razia/Operasi Pondokan/ Kost)	2 Kasus	1 Berada dalam satu kamar belum suami istri 2 Tanpa identitas	- Terjaring 25 pasang berlainan jenis berada dalam satu kamar 2 orang tanpa identitas	Pelaku dibawa ke Kantor Satpol PP untuk dilakukan BAP dan wajib lapor serta menghubungi keluarga untuk penjemputan
13.	Pelanggaran (K3) Ketertiban. Ketentraman dan Keindahan (Razia/Operasi Pekat : Gepeng, Anjal, Pengamen, Premanisme/ Parkir Liar)	3 kasus	1 Mengganggu Tibumtranmas 2 Meresahkan Pengguna Jalan 3 Permintaan sumbangan tidak resmi (pengemis alas an sumbangan)	- Terjaring 26 orang premanisme/parkir liar - Terjaring 19 orang gepeng, anjal, pengamen	Didata dan diserahkan ke Dinas Sosial Kota Mataram
14.	Pelanggaran (K3) Ketertiban. Ketentraman dan Keindahan (Razia Operasi Pemantauan dan Pengawasan Siswa-siswi yang berada diluar sekolah pada jam pelajaran berlangsung)	1 kasus	Pelajar berada diluar sekolah pada jam pelajaran	Terjaring 80 orang pelajar	Didata dan diserahkan kembali ke sekolah masing-masing

Sumber : SATPOL PP Provinsi NTB, 2017

Selain menindaklanjuti terhadap berbagai gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB juga melakukan upaya pencegahan konflik melalui kegiatan pembekalan masyarakat dalam

kemampuan pendeteksian dini dan pencegahan konflik di masyarakat baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa dengan masing-masing peserta sebanyak 75 orang. Pada tahun 2017 Polisi Pamong Praja Provinsi NTB memfasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat (POKMAS) Patuh Perda Perka melalui pendekatan kearifan lokal sebanyak 2 kelompok yang ada di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa Barat. Dengan adanya kelompok tersebut, diharapkan akan terwujudnya masyarakat yang mampu mandiri dan berkesadaran hukum yang lebih baik.

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berdasarkan kategori dalam Index Risiko Bencana Indonesia (IRBI), provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan index bencana tinggi di Indonesia. Bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat sebagian besar disebabkan oleh faktor hidrologi, meteorologi dan perubahan iklim. Tiga jenis bencana yang sering terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat dan menjadi perhatian khusus adalah bencana tanah longsor, banjir dan kekeringan. Pemerintah provinsi berkomitmen dengan pemerintah kabupaten/kota serta semua pihak untuk bersinergi dalam penanganan penanggulangan bencana baik skala lokal maupun regional. Sinergitas yang kuat, terarah, terpadu dan koordinasi yang baik diharapkan mampu meminimalisir dampak terjadinya bencana. Faktor lain yang juga harus menjadi perhatian bersama adalah Masih kurangnya sistim peringatan dini (*early warning system*) dan informasi yang memadai dan dapat bekerja dengan lebih baik, menyebabkan kurangnya kesiapsiagaan masyarakat dan aparat dalam menghadapi bencana yang terjadi.

Sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, salah satu pasalnya menyatakan bahwa penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karena itu diharapkan keterlibatan semua pihak termasuk dunia usaha, masyarakat atau relawan dalam penanggulangan bencana. Dari pihak pemerintah diharapkan agar seluruh aparat penanggulangan bencana di daerah Provinsi NTB dan kabupaten/kota untuk melaksanakan program kegiatan pengurangan risiko bencana baik melalui seminar atau sosialisasi. Kegiatan serupa yang dilaksanakan oleh BNPB ataupun BPBD Provinsi tidaklah cukup dalam penanganan penanggulangan. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian seluruh stakeholders dalam penanggulangan bencana antara lain:

1. Memberi manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat
 - Memastikan negara hadir di tengah rakyat dalam penanggulangan bencana.
 - Rakyat menjadi titik fokus dalam perencanaan kegiatan penanggulangan bencana.
 - Selalu berupaya memberikan yang terbaik untuk rakyat.
2. Kerja tuntas dan fokus pada hasil akhir
 - Jangan terpaku di proses namun lalai dari hasil akhir.
 - Fokus pada kegiatan prioritas yang dapat memberi dampak besar dan dikerjakan secara totalias dan tuntas.

- BNPB dan BPBD adalah penanggung jawab utama penanggulangan bencana dan tugas kita adalah memastikan pekerjaan tersebut tuntas.
3. *Emergency mindset* dan pantang *business as usual*
 - BNPB dan BPBD adaah organisasi yang dinamis dan harus siap setiap saat, siap dari sisi organisasi dan siap dari sisi individu.
 - Semua harus memiliki emergency mindset yatu cepat dalam berfikir, mengambil keputusan dan bertindak serta selalu siap kapanpun ketika dibutuhkan oleh organisasi.
 - Jangan terpaku pada rutinitas, jadilah organisasi yang sibuk memperbaiki diri dan sibuk membuat terobosan serta cepat puas atas apa yang sudah dicapai.
 4. Organisasi yang berbasis sistem dan teknologi
 - Organisasi yang baik adalah organisasi yang berbasis sistim di mana semuanya jelas, tertata dan terintegrasi.
 - Perlu lompatan teknologi dan inovasi untuk mengubah cara kita bekerja dan menjadikannya sebagai kekuatan kita dalam penanggulangan bencana.
 - Sistem yang kita bangun serta teknologi yang kita pakai haruslah mampu menembus ego sektoral dan mendorong kinerja organisasi.
 5. Sumber daya manusia yang terpilih, terdidik dan terlatih
 - Penguatan SDM merupakan pilar utaaam BNPB/BPBD dan harus menjadi prioritas.
 - Harus ada master plan penguatan SDM drhingga pelatihan dan penguatan SDM dapat dilakuakn secara sistimatis, bertahap, berjenjang dan terukur sesuai dengan bidang dan jabatannya untuk semua level.
 - Politeknik Penanggulangan Bencana adalah solusi startegis dan jangka panjang untuk membangun SDM yang tangguh dan professional.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyelenggarakan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Upaya yang telah dilakukan BPBD selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen rencana kontinjensi untuk wilayah Kabupaten Lombok Timur dengan melakukan workshop penyusunan rencana kontinjensi yang diikuti oleh 50 orang peserta.
2. Sekolah/Madrasah aman bencana yang terbentuk sebanyak 10 (sepuluh) sekolah/madrasah.
3. BPBD Provinsi NTB selama tahun 2017 sudah membentuk 133 Desa/Kelurahan tangguh bencana. Jumlah ini telah melebihi target RPJMD hingga 2018 yang hanya menargetkan 20 Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
4. Penanggulangan bencana kekeringan melalui pendataan wilayah daerah dan penduduk terdampak kekeringan yang dilaksanakan di :
 - Kabupaten Lombok Barat di 6 Kecamatan, 25 Desa
 - Kabupaten Lombok Utara di 4 Kecamatan, 18 Desa
 - Kabupaten Lombok Tengah di 9 Kecamatan, 82 Desa

- Kabupaten Lombok Timur di 9 Kecamatan, 48 Desa
- Kabupaten Sumbawa Barat di 4 Kecamatan, 10 Desa
- Kabupaten Sumbawa di 18 Kec, 60 Desa
- Kabupaten Dompu di 7 Kecamatan, 25 Desa
- Kabupaten Bima di 9 Kecamatan, 42 Desa
- Kota Bima di 5 Kecamatan, 8 Kelurahan

Melakukan koordinasi dengan Satuan Reaksi Cepat (SRC) Provinsi NTB, pengadaan dan pendistribusian tandon air untuk menampung air bersih dan pembangunan sumur bor.

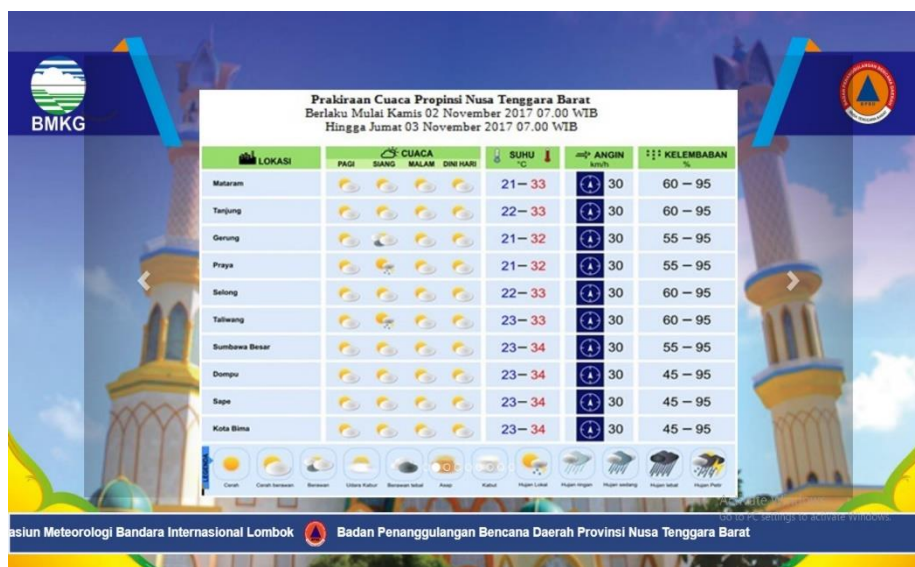
5. Dampak erupsi Gunung Agung Karang Asem Bali pada bulan September 2017 dirasakan masyarakat di wilayah NTB meskipun masih dalam status awas namun para pengungsi berdatangan dengan menggunakan perahu ke pantai Melase Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Tim BPBD Provinsi NTB telah melakukan beberapa upaya diantaranya :
 - a. Mendata pengungsi baik yang ada di Melase Kecamatan Batu Layar maupun yang ada di Lembar.
 - b. Membangun posko pengungsi di Melase, Lembar dan Sekretariat Kantor BPBD Provinsi NTB dengan menurunkan Team Reaksi Cepat (TRC).
 - c. Mengirim tenda untuk pengungsi ke Bali sebanyak 20 peti = 10 tenda, mobil dapur umum sebanyak 2 unit (1 unit milik BPBD Provinsi NTB dan 1 Unit milik BPBD Kabupaten Lombok Timur).
 - d. Menyalurkan bantuan seperti : lauk pauk, makanan siap saji, makanan tambahan gizi , perlengkapan makan, perlengkapan sekolah, sandang, kids ware, family kit dan selimut
 - e. Jumlah pengungsi yang telah mengungsi dari Bali ke Lombok sebanyak 104 KK (376 jiwa) yang berasal dari Lingkungan Dangin Sema I dan Ujung Pesisir Tumbu Karang Asem Bali.
 - f. Mengadakan Rapat Koordinasi dengan Instansi terkait, untuk menginventarisir kontribusi yang akan diberikan oleh masing-masing Instansi terkait dalam menangani pengungsi erupsi Gunung Agung Bali.
6. Bencana angin puting beliung terjadi pada tanggal 26 Nopember 2017 yang melanda beberapa tempat antara lain :
 - Dusun Mungkik Desa Mujur Kecamatan Praya Timur sebanyak 5 (lima) unit rumah warga rusak dan 9 ruang kelas SMA 1 Praya Timur rusak ringan.
 - Dusun Budiwaton Desa Mujur Kecamatan Praya Timur sebanyak 40 rumah warga rusak, 1 unit Musholla rusak, tembok lapangan umum Praya Timur roboh sekitar 5 Meter.
 - Beberapa pohon tumbang dan langsung ditangani oleh Dinas Kebersihan Kabupaten Lombok Tengah.Upaya yang telah dilakukan dengan memberikan bantuan berupa : Kids Ware, Selimut, Sandang, Karung, Family Kit dan Asbes
7. Bencana banjir sepanjang tahun 2017 juga menjadi musibah besar yang melanda NTB, terjadi di 7 Kabupaten yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur,

Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten/Kota dan melakukan pertolongan dan mengevakuasi warga yang terdampak. Pada tanggal 18 Nopember 2017 banjir bandang kembali melanda daerah di Kecamatan Sakra Barat, Keruak dan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur yang disebabkan hujan intensitas tinggi, meluapnya air DAM Pandan Dure dan Waduk Berenge Kabupaten Lombok Tengah. Jumlah warga terdampak banjir bandang di Lombok Timur sebanyak 1.344 KK (3.897 Jiwa) yang tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Keruak sebanyak 783 KK (2.476 Jiwa), Kecamatan Jerowaru sebanyak 556 KK (1.401 Jiwa) dan Kecamatan Sakra Barat sebanyak 5 KK (20 Jiwa). Upaya yang telah dilakukan oleh BPBD Provinsi NTB adalah memberikan bantuan berupa : Makanan siap saji, Makanan Lauk Pauk, Makanan Tambahan Gizi, Perlengkapan sekolah, Paket perlengkapan makan, Peralatan Dapur, Family Kids, Kesehatan Keluarga, Tikar, Kids Ware, Selimut, Sandang dan Karung.

8. Untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan BPBD Provinsi NTB mempublikasi berbagai kegiatannya melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Tercatat sepanjang tahun 2017 sebanyak 33 kali publikasi di media cetak dan 7 kali publikasi di media elektronik (TV dan Website).

Nusa Tenggara Barat sangat potensial di sektor pariwisata karena didukung oleh sumberdaya alam yang sangat mendukung dari puncak gunung hingga dasar lautan. Sektor pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat NTB, namun hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keamanan wisatawan melalui ketersediaan informasi, akses peringatan dini dan jalur evakuasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) akan melakukan inovasi dan rekayasa dengan mengembangkan *display* sistem peringatan dini meteorologi, klimatologi, yaitu suatu sistem basis data modern yang dapat memberikan dukungan proses penganalisaan cuaca, iklim, kualitas udara dan geofisika serta unsur pendukung lainnya secara cepat, sehingga dapat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan:

Gambar 4.1
Display Sistem Peringatan Dini





Sumber: BPBD Provinsi NTB, 2017

Selain bekerjasama dengan BMKG, BPBD Provinsi NTB juga bekerjasama dengan industry pariwisata melakukan pembentukan Prosedur Tetap (Protap/ SOP) kebencanaan dan pembentukan tim siaga bencana di semua hotel terutama di kawasan Senggigi. Mengawali langkah-langkah tersebut, BPBD Provinsi NTB telah mengadakan workshop penanggulangan bencana bagi hotel-hotel di wilayah pesisir dan Gili di pulau Lombok pada bulan September dan November 2016. Kegiatan ini bertujuan agar industri pariwisata dapat memahami manajemen potensi ancaman, kerentanan dan kapasitas dalam upaya penjaminan keamanan para wisatawan di hotel mereka. Workshop tersebut menghasilkan komitmen dari hotel dan mall untuk meningkatkan kesiapsiagaan melalui penyusunan prosedur standar (SOP) kedaruratan:

1. Penyusunan Rencana Kontinjensi gempa dan tsunami khusus untuk kawasan Senggigi yang dilanjutkan pemasangan rambu evakuasi.
2. Proses simulasi yang belum terjadwal.
3. Diharapkan industri pariwisata dapat memahami peran mereka dan terlibat secara aktif baik pra-bencana, saat kejadian bencana, maupun pasca-bencana.

BPBD Provinsi NTB juga melakukan kerjasama (MoU) dengan Fakultas Kedokteran di Universitas Mataram, Unizar, Universitas Yarsi, Poltekes yang dijadwalkan pada bulan Januari dan Pebruari 2018 untuk mengadakan simulasi pengulangan bencana.

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

6. SOSIAL

Indikator kinerja daerah yang digunakan untuk mengukur kinerja Dinas Sosial Provinsi NTB beserta UPTD nya sesuai dengan RPJMD 2013-2018 adalah Cakupan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Tahun 2013 cakupan penanganan PMKS baru 1,58 persen, sedangkan tahun 2017 cakupan penanganan PMKS telah mencapai 5,07 persen atau meningkat 0,08 persen dibandingkan tahun 2016. Berbagai program dan kegiatan dalam rangka penanganan PMKS telah dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTB baik di dinas induk maupun UPTD Dinas Sosial yang secara langsung melaksanakan pelayanan bagi PMKS. Cakupan penanganan bagi PMKS tahun 2016 telah mencapai 4,99 persen atau 34.566 orang PMKS. Sedangkan cakupan penanganan PMKS tahun 2017 mencapai 5,07 persen atau 33.412 orang PMKS yang diberikan pelayanan.

Tabel 2.70 Perkembangan Data Capaian Kinerja berdasarkan RPJMD NTB 2013-2018

INDIKATOR	SATUAN	2013	2016	2017		TARGET 2018
				TARGET	REALISASI	
Cakupan penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	1,58	4,99	2,20	5,07	2,42

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2017

Penanganan PMKS dilakukan sebagian besar di dalam 8 (delapan) balai yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi NTB. Adapun yang termasuk dalam PMKS dan menjadi tugas Dinas Sosial beserta balai social untuk menanganinya antara lain: keluarga fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil, penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, korban *trafficking* dan lain-lain. Jenis dan jumlah PMKS yang telah mendapat penanganan selama tahun 2017 adalah sebagaimana table dibawah ini.

Tabel 2.71 Data PMKS Yang Diberikan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

NO	JENIS PMKS	JUMLAH		YANG SDH DIBERIKAN PELAYANAN		%	SISA PENANGANAN PMKS		%
1	Anak Balita Terlantar	2,308	Jiwa		Jiwa	0.00	2,308	Jiwa	100.00
2	Anak Terlantar	99,800	Jiwa	2,600	Jiwa	2.61	97,200	Jiwa	97.39
3	Anak Nakal/Anak Berhadapan dengan Hukum	859	Jiwa	217	Jiwa	25.26	642	Jiwa	74.74
4	Anak Jalanan	3,286	Jiwa		Jiwa	0.00	3,286	Jiwa	100.00
5	Anak Dengan Kedisabilitas	4,830	Jiwa		Jiwa	0.00	4,830	Jiwa	100.00
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	471	Jiwa		Jiwa	0.00	471	Jiwa	100.00
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	49	Jiwa		Jiwa	0.00	49	Jiwa	100.00
8	Lanjut Usia Terlantar	50,496	Jiwa	206	Jiwa	0.41	50,290	Jiwa	99.59
9	Penyandang Disabilitas	12,776	Jiwa	434	Jiwa	3.40	12,342	Jiwa	96.60
10	Tuna Susila	43	Jiwa	115	Jiwa			Jiwa	0.00
11	Gelandangan	245	Jiwa	75	Jiwa	30.61	170	Jiwa	69.39

NO	JENIS PMKS	JUMLAH		YANG SDH DIBERIKAN PELAYANAN		%	SISA PENANGANAN PMKS		%
12	Pengemis	67	Jiwa	75	Jiwa			Jiwa	0.00
13	Pemulung	310	Jiwa		Jiwa	0.00	310	Jiwa	100.00
14	Kelompok Minoritas	55	Jiwa		Jiwa		55	Jiwa	100.00
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)	6,495	Jiwa	65	Jiwa	1.00	6,430	Jiwa	99.00
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	212	Jiwa		Jiwa	0.00	212	Jiwa	100.00
17	Korban Penyalahgunaan Napza	571	Jiwa	20	Jiwa	3.50	551	Jiwa	96.50
18	Korban Trafficking		Jiwa	343	Jiwa	-		Jiwa	
19	Korban Tindak Kekerasan	4,177	Jiwa	593	Jiwa	14.20	3,584	Jiwa	85.80
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	5,848	Jiwa	50	Jiwa	0.85	5,798	Jiwa	99.15
21	Korban Bencana Alam	1,901	KK	23,410	KK			KK	
22	Korban Bencana Sosial	6,334	KK	16	KK	0.25	6,318	KK	99.75
23	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	105,140	Jiwa		Jiwa		105,140	Jiwa	100.00
24	Keluarga Fakir Miskin	348,722	KK	3,187	KK	0.91	345,535	KK	99.09
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	793	KK		KK		793	KK	100.00
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	2,610	KK		KK	0.00	2,610	KK	100.00
	JUMLAH	658,398		33,412		5.07	624,986		94.93

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2017

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi utama Dinas Sosial Provinsi NTB beserta balai sosialnya yaitu penanganan PMKS, tahun 2017 Dinas Sosial beserta UPTD tidak saja didukung oleh APBD namun juga oleh APBN sebesar Rp 15.270.598.000. Jumlah PMKS yang ditangani melalui APBD sejumlah 23.721 orang, sementara melalui APBN sejumlah 9.341 orang. Telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja cakupan penanganan PMKS. Dinas Sosial Provinsi NTB beserta UPTD nya tidak bekerja sendiri namun menjalin koordinasi lintas pemerintah kabupaten/kota dan dengan pemerintah pusat antara lain untuk kegiatan Komunitas Adat Terpencil, penanganan PMKS di LKS kabupaten/kota dan penanganan bencana alam di kabupaten/kota.

Dalam kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) telah dilakukan penjajakan dan study kelayakan calon daerah KAT. Ada 4 (empat) daerah yang menjadi sasaran penjajakan dan study kelayakan yaitu 2 (dua) lokasi di kabupaten Bima (Dusun Baku Desa Sumi Kecamatan Lambu dan Dusun Tangani Desa Sarae Ruma Kecamatan Langgudu) dan 2 (dua) lokasi di Kabupaten Sumbawa (Dusun Sampar Kuangrea Desa Batu Rotok Kecamatan Batu Lanteh dan Dusun Gili Tapan Labuan Sangoro Kecamatan Maronge). Dari hasil study kelayakan dan penjajakan lokasi KAT, lokasi KAT untuk tahun 2017 yaitu Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa. Adapun permasalahan yang ditemui dalam penanganan PMKS KAT adalah jarak tempuh dan medan yang dilalui menuju lokasi KAT sangat sulit dan tidak tersedia alat transportasi darat seperti kendaraan umum, ojek, sepeda motor ataupun kendaraan lainnya. Selama ini untuk menuju lokasi KAT hanya dapat ditempuh dengan jalan kaki atau naik kuda, atau dapat

juga melalui sungai/laut dengan menggunakan perahu/boat. Di lokasi KAT belum tersedia sarana pendidikan dan kesehatan seperti sekolah dan pos pelayanan kesehatan lainnya seperti pustu, polindes dan puskesmas.

Adapun bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat di lokasi KAT seperti:

- a. Pemberian bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR)
- b. Bantuan Stimulan Rumah Bagi Warga KAT
- c. Bantuan Jaminan Hidup (Jadup)
- d. Bantuan Peralatan Kerja, Peralatan Rumah Tangga dan Bibit Tanaman
- e. Infrastruktur berupa Sarana Lingkungan Warga KAT seperti Balai Sosial/Balai Pertemuan, dan MCK.

Dalam upaya penanganan korban bencana alam telah dilakukan kerjasama dengan 5 (lima) kabupaten/kota yaitu Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur dan Lombok Utara. Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk penanganan darurat saat Pra Bencana, Saat Bencana dan Pasca bencana antara lain: pelatihan santri siaga bencana dan penyerahan bantuan tandon air untuk bencana. Adapun kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penanganan masalah tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa adalah:

- a. Masih sulitnya koordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Sosial Kabupaten/Kota, BPBD dan instansi terkait lainnya dalam penanganan bencana.
- b. Kurangnya inisiatif dari Kabupaten/Kota terkait penanganan bencana alam lebih awal dan selalu menunggu inisiatif dari Dinas Sosial Provinsi (Kabupaten/Kota kurang cepat tanggap bila terjadi bencana)
- c. Kendaraan operasional penanggulangan bencana yang tidak stand by/tidak berada di tempat bila terjadi bencana.
- d. Stock/persediaan barang logistik bencana tidak tersedia di Kabupaten/Kota sehingga bila bencana terjadi harus menunggu barang logistik dari Dinas Sosial Provinsi.
- e. Belum optimalnya perekrutan / pelatihan santri siaga bencana di kab/kota.

Kegiatan Kementerian Sosial yang mendukung penanganan PMKS di NTB antara lain:

- a. Program Pemberdayaan Sosial, melalui kegiatan antara lain:
Pendampingan social kepada warga KAT di 4 (empat) lokasi KAT yaitu Kabupaten Bima (Dusun Baku Desa Sumi Kec. Lambu dan Dusun Tanggani Desa Sarae Ruma Kec. Langgudu) dan 2 (dua) lokasi di Kabupaten Sumbawa (Dusun Sampar Kuangrea Desa Batu Rotok Kec. Batu Lanteh dan Dusun Gili Tapan Labuan Sangoro Kec. Maronge); bimbingan teknis bagi pekerja social masyarakat; bimbingan teknis bagi LK3; bimbingan teknis bagi karang taruna; bimbingan teknis bagi wahana kesejahteraan social berbasis masyarakat; dan bimbingan teknis bagi lembaga konsultasi peduli keluarga, keseluruhan sebanyak 453 orang.
- b. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial, melalui kegiatan antara lain :
 - 1) Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza melalui penjangkauan korban napza pada 20 orang PMKS, dan penyaluran bantuan stimulant usaha ekonomis produktif bagi 20 orang PMKS.

- 2) Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas melalui penyaluran bantuan alat bantu fisik/aksesibilitas bagi 33 penyandang disabilitas dan pendampingan asistensi sosial penyandang disabilitas berat bagi 44 orang PMKS.
 - 3) Rehabilitasi sosial bagi tuna sosial dan korban perdagangan orang melalui bimbingan dan rehabilitasi sosial, bantuan stimulant UEP, pemulangan korban dan bantuan bagi pemulangan korban dengan jumlah PMKS yang ditangani 70 orang.
 - 4) Rehabilitasi sosial anak meliputi bantuan penguatan kapasitas anak, bantuan paket kebutuhan dasar dan nutrisi anak, perlindungan sosial bagi anak di RPSA, dan kegiatan *one day for children* dengan jumlah PMKS yang ditangani 2.650 orang.
 - 5) Rehabilitasi sosial lanjut usia melalui pendampingan asistensi sosial lanjut usia terlantar, dan pemberian bantuan operasional bagi petugas pendamping dengan jumlah PMKS yang ditangani 142 orang.
- c. Program Penanganan Fakir Miskin, melalui kegiatan antara lain :
- 1) Penanganan fakir miskin perdesaan, melalui penyaluran bantuan kelompok usaha bersama (KUBE) dengan jumlah PMKS yang ditangani 800 KK yang terdiri dari 25 KUBE / 250 orang di Kabupaten Lombok Tengah, 25 KUBE / 250 orang di Kabupaten Sumbawa, dan 30 KUBE / 300 orang di Kabupaten Bima.
 - 2) Penanganan fakir miskin perkotaan, melalui penyaluran bantuan UEP KUBE dengan jumlah PMKS yang ditangani 500 KK terdiri dari 30 KUBE / 300 orang di Kota Mataram, dan 20 KUBE / 200 orang di Kota Bima.
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, melalui kegiatan antara lain:
- 1) Perlindungan sosial korban bencana alam, melalui pembentukan kampung siaga bencana, pemantapan petugas pendamping, pemantapan petugas manajemen pengungsi, pemantapan tagana muda, bantuan operasional petugas posko dan logistik, opname fisik gudang logistik, bantuan insentif bagi petugas tagana.

NO	JENIS BENCANA ALAM	JUMLAH KEJADIAN	LOKASI BENCANA	JUMLAH KORBAN YANG DITANGANI
1	Banjir	94 kejadian	10 Kab/kota	4.004 Jiwa
2	Anin Puting Beliung	40 kejadian		
3	Kebakaran	34 kejadian		
4	Banjir Bandang	5 kejadian		
5	Tanah Longsor	11 kejadian		
6	Angin Kencang	9 kejadian		
7	Lain-Lain	18 kejadian		

- 2) Perlindungan sosial korban bencana sosial
Perlindungan sosial korban bencana sosial, melalui Kegiatan Sarasehan Penguatan Akses Kearifan Lokal yang melibatkan 40 orang peserta, 1 orang narasumber pusat dan 4 orang narasumber daerah dan dilaksanakan di Mataram. Kegiatan Sosialisasi Program Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial yang melibatkan 50 orang peserta, 1 orang narasumber pusat, 5 orang narasumber daerah dan dilaksanakan di Mataram. Kegiatan Konsultasi

Program Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial yang melibatkan 2 orang petugas dan dilaksanakan di Jakarta.

- e. Program penanganan Anak Nakal/berhadapan dengan Hukum di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Paramita Mataram, melalui kegiatan, antara lain:

- 1) Penanganan Anak Nakal/Berhadapan dengan Hukum, dimana pada tahun 2017 anak nakal yang telah ditangani berjumlah 217 orang dengan beberapa kasus yang terjadi di antaranya:

NO	KASUS	JUMLAH
1	Penganiayaan	2 kasus
2	Pembuangan Bayi	1 kasus
3	Pekelahan	13 kasus
4	Pencurian	144 kasus
5	Penadahan	5 kasus
6	Penjambretan	5 kasus
7	Miras	8 kasus
8	Pencemaran Nama Baik	2 kasus
9	Asusila	25 kasus
10	Narkotika	11 kasus
11	Perjudian	1 kasus
J U M L A H		217 kasus

Dari beberapa kasus yang dilakukan oleh anak nakal yang ditangani PSMP Paramita Mataram berasal dari/rujukan beberapa sumber, diantaranya :

NO	KASUS	JUMLAH
1	ABH Rujukan	41 anak
2	Hasil Putusan Diversi	19 anak
3	Hasil Putusan Sidang	25 anak
4	Titipan Kepolisian	105 anak
5	Titipan Kejaksaan	13 anak
6	Rujukan LPKA	14 anak
JUMLAH		217 anak

▪ **Program Rehabilitasi Sosial (APBN)**

1. Rehabilitasi Sosial Anak melalui LKSA

Penanganan PMKS tidak hanya dilaksanakan di balai-balai sosial milik pemerintah Provinsi NTB namun juga dilakukan di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang tersebar di kabupaten/kota:

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Mataram	100 orang
2	Lombok Barat	165 orang
3	Lombok Tengah	155 orang
4	Lombok Timur	460 orang
5	Lombok Utara	35 orang
6	Sumbawa Barat	30 orang
7	Sumbawa	15 orang
8	Dompu	90 orang
9	Bima	75 orang
10	Kota Bima	75 orang
J U M L A H		1.200 orang

Dalam penanganan PMKS anak terlantar yang ditangani LKSA kabupaten/kota masih banyak menemui kendala seperti adanya perubahan proses pencairan bantuan langsung berupa tabungan anak yang di berikan melalui BANK baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sehingga pencairannya menjadi lamban; laporan pertanggungjawaban bantuan yang diserahkan sering kali terlambat diserahkan oleh penerima bantuan LKSA; banyaknya penerima bantuan LKSA yang belum memahami tata cara pembuatan proposal untuk pengajuan bantuan LKSA yang sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan.

2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Mataram	26 orang
2	Lombok Barat	185 orang
3	Lombok Tengah	38 orang
4	Lombok Timur	316 orang
5	Lombok Utara	83 orang
6	Sumbawa Barat	12 orang
7	Sumbawa	45 orang
8	Dompu	37 orang
9	Bima	34 orang
10	Kota Bima	198 orang
J U M L A H		974 orang

3. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia melalui ASLUT

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Mataram	85 orang
2	Lombok Barat	115 orang
3	Lombok Tengah	115 orang
4	Lombok Timur	145 orang
5	Lombok Utara	50 orang
6	Sumbawa Barat	30 orang
7	Sumbawa	40 orang
8	Dompu	40 orang
9	Bima	40 orang
10	Kota Bima	40 orang
J U M L A H		700 orang

4. Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia melalui Family Support

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Lombok Tengah	120 orang
2	Lombok Timur	80 orang
J U M L A H		200 orang

Program kegiatan serta bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017 antara lain:

▪ **Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (APBD)**

- Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Pedagangan Perempuan dan Anak (semester I dan II)

NO	LOKASI	JUMLAH
1	Kota Mataram	89 kasus
2	Kabupaten Lombok Barat	48 kasus
3	Kabupaten Lombok Tengah	45 kasus
4	Kabupaten Lombok Timur	53 kasus
5	Kabupaten Lombok Utara	31 kasus
6	Kabupaten Sumbawa	56 kasus
7	Kabupaten Sumbawa Barat	9 kasus
8	Kabupaten Dompu	40 kasus
9	Kabupaten Bima	88 kasus
10	Kota Bima	91 kasus
J U M L A H		550 kasus

b. Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin

NO	LOKASI	JUMLAH
1	Kota Mataram	20 Orang
2	Kabupaten Lombok Barat	10 Orang
3	Kabupaten Lombok Tengah	10 Orang
4	Kabupaten Lombok Timur	20 Orang
5	Kabupaten Lombok Utara	10 Orang
6	Kabupaten Sumbawa	10 Orang
7	Kabupaten Dompu	10 Orang
8	Kabupaten Bima	10 Orang
9	Kota Bima	20 Orang
J U M L A H		120 Orang

c. Pemberdayaan Fakir Miskin

NO	LOKASI	JUMLAH
1	Kota Mataram	34 kelompok / 340 orang
2	Kabupaten Lombok Barat	16 kelompok / 160 orang
3	Kabupaten Lombok Tengah	21 kelompok / 210 orang
4	Kabupaten Lombok Timur	57 kelompok / 570 orang
5	Kabupaten Lombok Utara	1 kelompok / 10 orang
6	Kabupaten Sumbawa	2 kelompok / 20 orang
7	Kabupaten Dompu	3 kelompok / 30 orang
8	Kabupaten Bima	3 kelompok / 30 orang
J U M L A H		138 Kelompok/ 1.370 orang

d. Penanganan Masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat (Bencana Alam Kekeringan) (semester I & II)

NO	LOKASI	JUMLAH
1	Kabupaten Lombok Timur	8.572 jiwa
2	Kabupaten Lombok Utara	4.607 jiwa
3	Kabupaten Lombok Barat	1.044 jiwa
4	Kabupaten Lombok Tengah	5.183 jiwa
J U M L A H		19.406 jiwa

- e. Perlindungan dan Rehabilitasi dalam Shalter Home (BSPPA "Sasambo Matupa" Narmada)

NO	LOKASI	JUMLAH
1	Kabupaten Lombok Barat	3 orang
2	Kabupaten Lombok Timur	1 orang
J U M L A H		4 orang

▪ **Program Pembinaan Para Penyandang Cacat (APBD)**

- a. Perlindungan dan rehabilitasi dalam *shelter home* (Semester I)

NO	ASAL KELAYAN	JUMLAH KELAYAN
1	Provinsi NTB	81 orang
2	Provinsi NTT	18 orang
3	Provinsi Jawa Barat	23 orang
4	Provinsi Jawa Tengah	17 orang
5	Provinsi Jawa Timur	10 orang
6	Provinsi Sumatra Selatan	4 orang
7	Provinsi Kalimantan Timur	3 orang
8	Provinsi Lampung	1 orang
9	Provinsi DKI Jakarta	1 orang
10	Provinsi Aceh	1 orang
J U M L A H		159 orang

- b. Perlindungan dan rehabilitasi dalam *shelter home* (Semester II)

NO	ASAL KELAYAN	JUMLAH KELAYAN
1	Provinsi NTB	40 orang
2	Provinsi NTT	59 orang
3	Provinsi Jawa Barat	56 orang
4	Provinsi Jawa Tengah	6 orang
5	Provinsi Jawa Timur	14 orang
6	Provinsi Sumatra Selatan	3 orang
7	Provinsi Kalimantan Timur	2 orang
8	Provinsi DKI Jakarta	3 orang
9	Provinsi Sulawesi Utara	1 orang
J U M L A H		184 orang

▪ **Program Pembinaan Anak Terlantar (APBD)**

- a. Pembinaan Anak Terlantar di BSAA "GENERASI HARAPAN" Mataram

NO	ASAL KELAYAN	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	4 orang
2	Lombok Barat	8 orang
3	Lombok Tengah	21 orang
4	Lombok Timur	8 orang
5	Lombok Utara	7 orang
6	Sumbawa	21 orang
7	Dompu	2 orang
8	Bima	6 orang
9	Kota Bima	3 orang
J U M L A H		80 orang

b. Pembinaan Anak Terlantar di BSBR "KARYA MANDIRI" Mataram

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	10 orang
2	Lombok Barat	10 orang
3	Lombok Tengah	11 orang
4	Lombok Timur	13 orang
5	Lombok Utara	5 orang
6	Sumbawa Barat	2 orang
7	Sumbawa	6 orang
8	Dompu	3 orang
9	Bima	7 orang
10	Kota Bima	3 orang
J U M L A H		70 orang

c. Pembinaan Anak Terlantar di BSPPSA "SASAMBO MATUPA" Selat

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	90 orang
2	Lombok Barat	45 orang
3	Lombok Tengah	45 orang
4	Lombok Timur	90 orang
5	Sumbawa	45 orang
6	Kota Bima	45 orang
7	Lombok Utara	45 orang
8	Dompu	45 orang
9	Kabupaten Bima	45 orang
J U M L A H		540 orang

▪ **Program Pembinaan Panti Jompo (APBD)**

a. Pembinaan bagi Lanjut Usia di BSLU "Mandalika" Mataram

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	30 orang
2	Lombok Barat	20 orang
3	Lombok Tengah	18 orang
4	Lombok Timur	11 orang
5	Lombok Utara	1 orang
J U M L A H		80 orang

b. Pembinaan bagi Lanjut Usia di BSLU "Meci Angi" Bima

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Bima	30 orang
2	Kabupaten Bima	20 orang
J U M L A H		50 orang

▪ **Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (APBD)**

a. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di BSKW "MIRAH ADI" Mataram

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Mataram	6 orang
2	Lombok Barat	8 orang
3	Lombok Tengah	35 orang
4	Lombok Timur	25 orang
5	Lombok Utara	7 orang
6	Sumbawa Barat	6 orang
7	Sumbawa	6 orang
8	Dompu	9 orang
9	Kabupaten Bima	16 orang
10	Sulawesi Selatan	1 orang
J U M L A H		119 orang

b. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di BSBL "MUTHMAINAH" Selebung Loteng

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Kota Mataram	16 orang
2	Lombok Barat	6 orang
3	Lombok Tengah	37 orang
4	Lombok Timur	19 orang
5	Lombok Utara	2 orang
6	Sumbawa Barat	1 orang
7	Sumbawa	3 orang
8	Bima	4 orang
9	Kota Bima	2 orang
10	Provinsi NTT	1 orang
11	Lain – Lain	10 orang
J U M L A H		100 Orang

c. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial di BSBK "MADANI" Aikmal Lotim

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KELAYAN
1	Lombok Barat	12 orang
2	Lombok Tengah	43 orang
3	Lombok Timur	55 orang
4	Lombok Utara	14 orang
5	Sumbawa	8 orang
6	Sumbawa Barat	10 orang
7	Dompu	5 orang
8	Kabupaten Bima	3 orang
J U M L A H		150 orang

Terkait dengan *trafficking*, penanganan pertama yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTB melalui Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.72 Data Penanganan Korban *Trafficking* Melalui Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Tahun 2012-2017

NO	TH.	SASARAN	KASUS (org)					JML	ASAL DAERAH	RUJUKAN
			KDRT	Traffickin g	KTK	Perkosaan	PMB			
1.	2012	Anak	-	-	5	2		7	NTB, Bali, dan Jakarta	Polda, LSM, Instansi Terkait, Keluarga, dan Masy.
		Perempuan Dewasa	7	12	11	-		30	NTB, Banten, Jateng, NTT, Jatim, Jabar, Jakarta	Sda
		Lanjut Usia	-	-	1	-		1	NTB	-
		Laki-laki Dewasa	-	27	-	-		27	Jawa Timur, NTT, Makassar, dan Jabar	Sda
JUMLAH			7	39	17	2		65		
2.	2013	Anak	4	1	11	1		17	NTB, Jakarta Bekasi, Jabar, Jateng, Jatim, Sulawesi,Riau, Kalimantan	Polda, LSM, Instansi Terkait, Keluarga, dan Mas
		Perempuan Dewasa	1	7	7	2		17	Sda	Sda

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

NO	TH.	SASARAN	KASUS (org)					JML	ASAL DAERAH	RUJUKAN	
			KDRT	Traffickin g	KTK	Perkosaan	PMB				
		Lanjut Usia	-	-	1	-		1	Sda	Sda	
		Laki-laki Dewasa	-	1	-	-		1	Sda	Sda	
JUMLAH			5	9	19	3		36	JUMLAH	5	
3.	2014	Anak	8	7	14	2		31	Mataram, Loteng, Lotim, Dompu, Bima, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Kaltim, Makasar dan Lampung	RPTC Pusat, Kepolisian, Dinsos Kab/Kota, PSKW Budi Rini, LSM, Masyarakat dll.	
		Perempuan Dewasa	4	37	9	11		61			
		Lanjut Usia	-	-	-	-		-			
		Laki-laki Dewasa	-	-	-	-		-			
JUMLAH			12	44	23	13		92			
4.	2015	Anak	2	1	8	5	11	27	Kota Mataram, KLU, Lobar, Loteng, Lotim, Sumbawa, Dompu, Bima, Bali, NTT, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung Selatan.	RPTC Pusat, Kepolisian, Dinsos Kab/Kota, PSKW Budi Rini, LSM, Masyarakat dll.	
		Perempuan Dewasa	3	21	8	9	23	64			
		Lanjut Usia	-	-	2	-	4	6			
		Laki-laki Dewasa	-	11	-	-	5	16			
JUMLAH			3	32	10	11	31	113			
5.	2016	Anak	5		1		58	64	ota Mataram, KLU, Lobar, Loteng, Lotim, Sumbawa, Dompu, Bima, Bali NTT, Jawa Barat, awa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Jakarta, Banten, DIY, Riau, Kalteng, Sumater, Makasar dan Papua Barat	RPTC Pusat, Kepolisian, Dinsos Kab/Kota, PSKW Budi Rini, LK3, PKBI, BP3TKI, LSM dan Masyarakat	
		Perempuan Dewasa	3	14	8	6	140	171			
		Lanjut Usia					7	7			
		Laki-laki Dewasa			2		147	149			
JUMLAH			8	14	11	6	294	391			
NO	TAHUN	SASARAN	KASUS (Orang)						JML	ASAL DAERAH	RUJUKAN
			KDRT	TRAFIKIN G	KTK	PERKOSAAN	PMB	KBA			
6	2017	Anak	4	1	8		21		34	Asal Kelayan : Kota Mataram, KLU,Lobar, Loteng, Lotim	
		Perempuan Dewasa	3	1	14		77		95		
		Lanjut Usia	-	-	-	-	6		6		
		Laki - Laki Dewasa	-	1	-	-	196	2	199		
		TOTAL	7	3	22	0	300	2	334		

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2017

Pembinaan dan koordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat tersebut sebanyak 235 Yayasan/Organisasi Sosial yang menangani Yatim, Piatu, Lansia, Anak Terlantar, Anak Jalanan dan Orang Dengan Kecacatan. Selain itu juga pelayanan dan perlindungan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dilakukan oleh Lembaga/Yayasan Asuhan Keluarga yang timbul dan berkembang ditengah-tengah masyarakat yang kegiatannya memberikan santunan kepada yatim piatu, Lanjut Usia dan Anak Terlantar yang tinggal di rumah-rumah penduduk. Adapun rincian per pelayanan panti sosial milik masyarakat, antara lain:

- jumlah panti sosial (Lansia) : 49 panti / 72.629 klien
- jumlah panti sosial (anak) : 292 Panti / 18.633 klien
- jumlah panti sosial (ODK dan ADK) : 60 Panti / 17.178 klien

Pembinaan dan koordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial milik masyarakat yang bernaung di bawah Yayasan/Organisasi Sosial yang mendapat bantuan hibah /bansos melalui: Program/kegiatan bantuan yang diberikan oleh Dinas Sosial Provinsi NTB Tahun 2017 antara lain:

▪ **Program pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya**

1. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin

NO.	LOKASI	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	Kota Mataram	Prosesing Makanan	5 paket
2	Kota Mataram	Perbengkelan	5 paket
3	Lombok Barat	Prosesing Makanan	10 paket
4	Lombok Utara	Prosesing Kakao	5 paket
5	Lombok Utara	Perbengkelan	1 paket
6	Lombok Utara	Batako	1 paket
7	Lombok Utara	Prosesing Makanan	2 paket
8	Lombok Utara	Menjahit	1 paket
9	Lombok Tengah	Prosesing Makanan	10 paket
10	Lombok Timur	Menjahit	2 paket
11	Lombok Timur	Prosesing Makanan	2 paket
12	Lombok Timur	Menjahit	1 paket
13	Lombok Timur	Prosesing Makanan	1 paket
14	Lombok Timur	Perbengkelan	1 paket
15	Lombok Timur	Prosesing Makanan	6 paket
16	Lombok Timur	Pembuatan Genteng	1 paket
17	Lombok Timur	Pembuatan Genteng	3 paket
18	Lombok Timur	Perbengkelan	1 paket
19	Lombok Timur	Prosesing Makanan	1 paket
20	Lombok Timur	Menjahit	10 paket
21	Sumbawa	Perbengkelan	1 paket
22	Kab. Bima	Pertukangan / Meubeler	3 paket
23	Kab. Bima	Perbengkelan	4 paket
24	Kab. Bima	Menjahit	3 paket
25	Kota Bima	Prosesing Makanan	5 paket
26	Kota Bima	Perbengkelan	5 paket
27	Dompu	Perbengkelan	10 paket
JUMLAH			100 paket

2. Peningkatan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

a) Orang Dengan Kecacatan

NO	LOKASI	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	Kota Mataram	Tata Rias	18 paket
2	Kabupaten Lombok Barat	Peralatan Kerajinan Tangan	18 paket
3	Kabupaten Lombok Timur	Peralatan Sablon	18 paket
4	Kabupaten Dompu	Peralatan Menjahit	18 paket
5	Kota Bima	Peralatan Tenun	18 paket
J U M L A H			90 paket

b) Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

NO	LOKASI	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	Kabupaten Lombok Barat	Paket peralatan Perbengkelan	10 paket
2	Kabupaten Lombok Tengah	Paket peralatan Perbengkelan	10 paket
3	Kabupaten Lombok Utara	Paket peralatan Perbengkelan	10 paket
4	Kabupaten Lombok Timur	Paket peralatan Perbengkelan	10 paket
J U M L A H			40 paket

c) Wanita Rawan Sosial Ekonomi

NO	LOKASI	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	Kabupaten Lombok Barat	Paket peralatan Perbengkelan	10 paket
2	Kabupaten Lombok Tengah	Peralatan Tata Rias/Kecantikan	20 paket
3	Kabupaten Lombok Utara	Paket peralatan Perbengkelan	20 paket
4	Kabupaten Lombok Timur	Paket peralatan Tata Boga	10 paket
J U M L A H			40 paket

d) WNI Migran Korban Perdagangan Orang (KPO)

NO	LOKASI	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	Kabupaten Lombok Barat	Paket peralatan Tata Boga	10 paket
2	Kabupaten Lombok Tengah	Paket Peralatan Menjahit	10 paket
3	Kabupaten Lombok Utara	Paket Peralatan Menjahit	10 paket
4	Kabupaten Lombok Timur	Paket Peralatan Tata Boga	10 paket
J U M L A H			40 orang

e) Gelandangan Pengemis dan Eks PSK

NO	LOKASI	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	Kabupaten Lombok Barat	Paket peralatan Tata Boga	10 paket
2	Kabupaten Lombok Timur	Paket Peralatan Menjahit	10 paket
J U M L A H			20 orang

f) Jumlah barang yang dihibahkan kepada masyarakat / pihak ketiga

NO	LOKASI	JENIS BANTUAN	JUMLAH	KET
1	Kota Bima	Peralatan Tenun	1 paket	ODK
2	Kabupaten Lombok Timur	Peralatan Sablon	1 paket	ODK
3	Kabupaten Lombok Barat	Peralatan Kerajinan Tangan / Anyaman Ketak	1 paket	ODK
4	Kabupaten Dompu	Peralatan Menjahit	1 paket	ODK
5	Kabupaten Lombok Timur	Paket Peralatan Menjahit	1 paket	WNI MKPO
6	Kabupaten Lombok Tengah	Paket Peralatan Menjahit	1 paket	WNI MKPO
7	Kab. Lombok Utara	Paket Peralatan Menjahit	1 paket	GEPENG
8	Kota Mataram	Tata Rias	1 paket	ODK
9	Kabupaten Lombok Tengah	Peralatan Tata Rias/Kecantikan	1 paket	WRSE
10	Kabupaten Lombok Timur	Paket peralatan Tata Boga / Prosesing Makanan	1 paket	WRSE
11	Kabupaten Lombok Barat	Paket peralatan Tata Boga / Prosesing Makanan	1 paket	WNI MKPO
12	Kabupaten Lombok Timur	Paket peralatan Tata Boga / Prosesing Makanan	1 paket	GEPENG
J U M L A H			12 paket	

3. Pemberdayaan Fakir Miskin

NO.	LOKASI	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	Kabupaten Lombok Timur	Kendaraan Roda Tiga	1 paket
2	Kabupaten Lombok Tengah	Kendaraan Roda Tiga	4 paket
3	Kota Mataram	Mobil Tanki Air	1 paket
4	Kabupaten Lombok Tengah	Terop	15 paket
5	Kota Mataram	Terop	1 paket
6	Kabupaten Lombok Barat	Terop	10 paket
7	Kabupaten Lombok Utara	Terop	2 paket
8	Kabupaten Lombok Timur	Terop	6 paket
8	Kabupaten Sumbawa	Terop	3 paket
9	Kota Mataram	Terop	37 paket
10	Kabupaten Dompu	Terop	1 paket
11	Kabupaten Bima	Terop	1 paket
12	Kota Mataram	Sound System	2 paket
13	Kabupaten Lombok Utara	Sound System	1 paket
14	Kabupaten Bima	Wireless	1 paket
15	Kabupaten Lombok Timur	Sound System	2 paket
16	Kabupaten Lombok Tengah	Sound System	1 paket
17	Kabupaten Lombok Barat	Sound System	5 paket
18	Kabupaten Lombok Tengah	Wearless	5 paket
19	Kota Mataram	Sound System	4 paket
20	Kabupaten Lombok Timur	Sound System & Wireless	2 paket
21	Kabupaten Lombok Tengah	Sound System & Wireless	3 paket
22	Kabupaten Lombok Timur	Wireless	1 paket
23	Kabupaten Lombok Tengah	Wireless & Wireless Portabel	1 paket
24	Kabupaten Lombok Tengah	Sound System	3 paket
25	Kota Mataram	Pengadaan Wireless	11 paket
26	Kabupaten Lombok Tengah	Pengadaan Wireless	3 paket
27	Kabupaten Lombok Barat	Pengadaan Wireless	1 paket
28	Kabupaten Sumbawa	Electon	2 paket
29	Kota Mataram	Sarung	1 paket
30	Kabupaten Bima	Sarung	1 paket
31	Kabupaten Lombok Timur	Sarung	3 paket
32	Kabupaten Lombok Barat	Sarung	3 paket
33	Kabupaten Lombok Tengah	Sarung	4 paket
34	Kabupaten Sumbawa Barat	Kain Sarung	1 paket
35	Kota Mataram	Kursi Plastik	17 paket
36	Kabupaten Lombok Timur	Kursi Plastik	1 paket
37	Kabupaten Sumbawa	Kursi Plastik	1 paket
38	Kabupaten Lombok Tengah	Kursi Plastik	1 paket
39	Kabupaten Bima	Karpet Masjid	1 paket
40	Kabupaten Lombok Timur	Karpet Masjid	1 paket
41	Kabupaten Bima	Sajadah	1 paket
42	Kabupaten Lombok Timur	Perlengkapan Ibadah	1 paket
43	Kabupaten Bima	Perlengkapan Ibadah	1 paket
44	Kabupaten Dompu	Peralatan Salon	1 paket
45	Kabupaten Dompu	Peralatan laundry	1 paket
46	Kabupaten Lombok Timur	Alat-Alat Perbengkelan	2 paket
47	Kota Mataram	Peralatan Pemandian Jenazah dan Pemakaman	1 paket
48	Kota Mataram	Alat Pemandian Jenazah	3 paket
49	Kabupaten Lombok Tengah	Genset / Generator Listrik	3 paket
50	Kota Mataram	Genzet	1 paket
51	Kabupaten Sumbawa	Tandon Air dan Pipa	2 paket
52	Kota Mataram	Mesin Potong Kayu	1 paket
53	Kabupaten Lombok Timur	Paket Sembako	5 paket
54	Kota Mataram	Paket Sembako	1 paket
55	Kota Bima	Paket Sembako	1 paket
56	Kabupaten Lombok Timur	Mobil Operasional	3 paket

NO.	LOKASI	JENIS BANTUAN	JUMLAH
57	Kabupaten Lombok Tengah	Mobil Operasional	1 paket
58	Kabupaten Lombok Tengah	Alat Perlengkapan Banjar (Dandang Besar/Kecil, Kompor Gas, Kuwali dll)	3 paket
59	Kabupaten Lombok Barat	Alat Perlengkapan Banjar (Dandang Besar/Kecil, Kompor Gas, Kuwali dll)	1 paket
60	Kota Mataram	Pengadaan Ranjang Susun Santri Wati	1 paket
61	Kota Mataram	Alat Pertukangan	1 paket
62	Kota Mataram	Mesin Jahit	4 paket
63	Kota Mataram	Pengadaan Gerobak Usaha	6 paket
64	Kabupaten Lombok Tengah	Pralatan Komputer	1 paket
65	Kabupaten Lombok Timur	Pralatan Sablon	4 paket
66	Kota Mataram	Pralatan Sablon	1 paket
67	Kota Bima	Pralatan Sablon	1 paket
68	Kabupaten Lombok Tengah	Alat Potong Rambut	1 paket
69	Kabupaten Lombok Timur	Alat Potong Rambut	9 paket

▪ **Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

Barang yang dihibahkan bagi penyandang cacat :

NO	LOKASI	JENIS BANTUAN	JUMLAH
1	Kota Mataram, Lotim, Loteng, KLU dan Sumbawa	Kaki Palsu	15 Buah
2	Kota Mataram, Lotim, Loteng, KLU, Lobar, Kota Bima, Kab. Bima, Kab. Dompu	Kursi Roda	45 Buah
3	Lotim, Loteng, KLU dan Sumbawa	Tangan Palsu	10 Buah
4	Kota Mataram, Lotim, Loteng, KLU, Lobar	Tongkat Ketiak	25 Buah
5	KLU dan PERTUNI NTB	Tongkat Tuna Netra	16 Buah
J U M L A H			111 Orang

▪ **Pelaksanaan SLRT Tahun 2017 Di Provinsi NTB**

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya Fakir Miskin yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi NTB sudah berorientasi pada paradigma pelayanan sektoral yang terarah kepada sasaran pemberdayaan sosial ekonomi Rumah Tangga Miskin dan Sangat Miskin yang berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT 2015).

Untuk mendukung hal tersebut di atas, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui dukungan dan partisipasi pemerintah daerah, mengembangkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan guna mendukung peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang komprehensif dan terintegratif. SLRT memiliki empat fungsi utama yaitu : integrasi layanan dan informasi; identifikasi keluhan, rujukan dan penanganan keluhan; pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program; dan pemutakhiran data secara dinamis dan berkala di daerah. Selanjutnya Penyelenggara SLRT pada Dinas Sosial Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat diharapkan mampu memperkuat hubungan jejaring kerja antara pusat dan daerah melalui Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) atau unit-unit pelayanan sosial yang ada sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

a) Sumber Pendanaan Pelaksanaan SLRT Di Provinsi NTB

Sumber anggaran penerapan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Penanganan Kemiskinan dalam rangka Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi masyarakat/rumah tangga miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2016-2017, pendanaannya berasal dari :

1. Dana APBN Tahun Anggaran 2016 untuk penerapan SLRT di Kabupaten Lombok Tengah.
2. Dana APBDP 2016 sebagai bentuk bantuan hibah keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota se-NTB kecuali Kabupaten Lombok Utara.
3. Dana APBN Tahun Anggaran 2017 untuk Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram.

b) Pelaksanaan SLRT Tahun 2017 di Provinsi NTB

1. Data Base Lapangan

Basis Data Terpadu (BDT) Kota/Kabupaten Provinsi NTB
hasil *Cleaning* BDT oleh Setnas SLRT Pusat

ART PBDT Kota/Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kab/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kabupaten Lombok Barat	172,060	177,305	349,365
2	Kabupaten Lombok Tengah	259,628	282,998	542,626
3	Kabupaten Lombok Timur	338,664	368,871	707,535
4	Kabupaten Sumbawa Besar	80,391	78,190	158,581
5	Kabupaten Dompu	57,670	56,374	114,044
6	Kabupaten Bima	115,039	113,197	228,236
7	Kabupaten Sumbawa Barat	28,019	27,926	55,945
8	Kabupaten Lombok Utara	62,165	61,792	123,957
9	Kota Mataram	70,044	68,620	138,664
10	Kota Bima	30,091	29,546	59,637
TOTAL		1,213,771	1,264,819	2,478,590

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2017

RT PBDT Kota dan Kabupaten Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Kab/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Kabupaten Lombok Barat	80819	22473	103292
2	Kabupaten Lombok Tengah	126172	49868	176040
3	Kabupaten Lombok Timur	154609	65692	220301
4	Kabupaten Sumbawa Besar	37487	5322	42809
5	Kabupaten Dompu	25727	4983	30710
6	Kabupaten Bima	50918	11002	61920
7	Kabupaten Sumbawa Barat	12574	2007	14581
8	Kabupaten Lombok Utara	30205	6185	36390
9	Kota Mataram	28596	7125	35721
10	Kota Bima	13173	2466	15639
TOTAL		560,280	177,123	737,403

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2017

Data di atas menjadi Data Base (hasil rekapitulasi untuk NTB) untuk diverifikasi (*name by address*-nya penerima manfaat) oleh penyelenggara SLRT daerah, dan yang ditanam dalam aplikasi SLRT yang ada dalam Tabelt para fasilitator.

2. Sasaran

Kabupaten/Kota di Provinsi NTB yang menerapkan SLRT sampai akhir tahun 2017 yaitu ada 9 (sembilan) Kabupaten/kota yaitu: Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, dan Kota Bima.

3. Capaian Kinerja

- a. Jumlah Operator SLRT di tingkat Provinsi sebanyak 2 orang, dan total jumlah operator ditingkat kabupaten/kota sebanyak 18 orang.
- b. Jumlah fasilitator SLRT di tingkat desa/kelurahan sebanyak 540 orang dan supervisor 54 orang.
- c. Jumlah desa/kelurahan yang diakses untuk penerapan SLRT sebanyak 931 desa dan 372 kelurahan.

4. Hambatan / Kendala

- a. Sebagai suatu pendekatan baru dalam program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan, penerapan SLRT di semua kabupaten/kota masih dipertanyakan terkait dengan sistem pendataan sebelumnya seperti Sistem Informasi Desa (SID), dan kekhawatiran tumpang tindih dengan pendekatan/inovasi daerah lainnya terkait penanganan kemiskinan.
- b. Beberapa pemerintah kabupaten/kota dengan alasan keterbatasan anggaran dalam APBD masing-masing, masih meragukan keberlanjutan pelaksanaan SLRT khususnya honor untuk para penyelenggara SLRT (fasilitator dan supervisor).

5. Solusi

- a. Terkait keraguan kabupaten/kota terhadap tumpang tindihnya program penanganan kemiskinan di daerahnya dengan pendekatan SLRT, Dinas Sosial pada saat sosialisasi mendatangkan secara langsung Tim/Setnas SLRT Pusat untuk menjelaskan dan meyakinkan pemerintah daerah bahwa kekhawatiran tersebut tidak perlu ada bahkan bisa diintegrasikan dengan inovasi daerah masing-masing.
- b. Untuk keberlanjutan honor penyelenggara SLRT khususnya fasilitator dan supervisor, pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Bima telah mengalokasi anggaran untuk hal tersebut melalui APBD Murni 2017.

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Bidang Sosial tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

Urusan wajib bukan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua pemerintah daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

mencakup bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan catatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan KB, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi dan umkm, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan

1. TENAGA KERJA

Salah satu indikator yang tertuang dalam 31 indikator kinerja pembangunan daerah pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 yang terkait dengan penyelenggaraan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Tenaga Kerja adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dimana target dan capaian dari indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2017

INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL 2013	2016	2017	
				TARGET	CAPAIAN
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,38	3,94	4,82	3,32

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2017

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB telah menetapkan Rencana Kinerja Tahunan beserta sasarnya. Secara khusus, terkait dengan sasaran kinerja strategis ketenagakerjaan, yaitu Menurunnya Angka Pengangguran, disesuaikan dengan RPJMD Provinsi NTB 2013 – 2018.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatannya dapat dilakukan dengan penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan aktivitas sektor-sektor ekonomi yang dikelola masyarakat sehingga diharapkan terjadi penurunan tingkat pengangguran. Sedangkan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menekan persentase pengangguran terbuka adalah dari 5,38 persen pada tahun 2013 menjadi 4,55 persen pada tahun 2018.

Pada tahun 2017, target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat adalah 4,82 persen, dan TPT tersebut berhasil diturunkan menjadi 3,32 persen. Terjadi penurunan sebesar 1,5 poin. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Nusa Tenggara Barat tahun 2017 menjadi 3,32 persen setara dengan 79.449 orang, kondisi ini lebih rendah 0,62 poin jika dibandingkan dengan TPT tahun 2016 yaitu 3,94 persen yang setara dengan 97.021 orang. Angka TPT tersebut, jauh lebih rendah dari TPT Nasional yang berkisar pada angka 5,5 persen. Jumlah angkatan kerja di Nusa Tenggara Barat tahun 2017 mencapai 2.396.169 orang, sedangkan tahun 2016 sebanyak 2.464.331 orang. Angka tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan angkatan kerja sejumlah 68.162 orang.

Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi NTB tahun 2017, sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat adalah sektor pertanian yaitu sejumlah 829.637 orang atau 35,81 persen, diikuti oleh sektor perdagangan sejumlah 514.871 orang atau 22,22 persen, kemudian sektor jasa sosial kemasyarakatan dan jasa perorangan sejumlah 363.364 orang atau 15,68 persen, serta sektor industri dan lain-lain sekitar 8,87 persen.

Penduduk bekerja masih didominasi oleh pekerja yang berpendidikan SMP ke bawah yaitu sekitar 1.559.978 orang atau 67,34 persen; disusul oleh pekerja yang berpendidikan SMA dan sederajat yaitu 513.943 orang atau 22,18 persen, kemudian pekerja berpendidikan tinggi sekitar 242.799 orang atau 10,48 persen. Dilihat dari TPT dan sektor yang menyerap tenaga kerja terdapat korelasi positif bahwa menurunnya persentase TPT pada penduduk yang berpendidikan SMP ke bawah karena diserap oleh sektor pertanian yang tidak membutuhkan keterampilan khusus.

Untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan rendahnya kualitas tenaga kerja telah dilakukan berbagai upaya dari pihak pemerintah, swasta dan berbagai elemen masyarakat. Peran pemerintah dan swasta dalam penciptaan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran serta meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja dilakukan melalui program dan berbagai kegiatan pelatihan berbasis kompetensi baik yang dilaksanakan oleh BLK, LLK maupun LPK Swasta.

- **Program Peningkatan kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja**

Beberapa tahun terakhir revitalisasi UPTD BLK NTB dalam rangka mencetak Sumber Daya Manusia yang Berkompeten, Beriman dan berdayasaing menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi NTB. Mulai dari pengadaan sarana pelatihan, rehab beberapa workshop kejuruan. Dalam rangka meningkatkan kualitas mental dan spiritual siswa, BLK NTB membangun sebuah masjid yang bernama "Baitul Itqon". Nama "Baitul Itqon" yang dinamai oleh Bapak Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, artinya rumah cerdas untuk melahirkan generasi yang cerdas.

Penguatan mental dan spiritual menjadi satu bagian penting dalam mencetak SDM yang berkualitas. Selain kegiatan peningkatan kompetensi keterampilan, dengan adanya masjid ini memperkuat hubungan antara manusia dengan Allah. SWT sehingga ilmu keterampilan yang diajarkan seimbang dengan ilmu kerohanian.

Selama tahun 2017 sebanyak 608 orang calon tenaga kerja yang dilatih dengan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) dan berbagai sub kejuruan, dari monitoring dan evaluasi terdapat 454 orang yang terserap di dunia industri, 74 orang pada instansi pemerintah dan usaha mandiri 53 orang; Peningkatan/ pengadaan sarana dan prasarana pelatihan sebanyak 39 paket dan terbentuknya Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk 8 (delapan) kejuruan dan 6 (enam) diantaranya sudah diselenggarakan yaitu kejuruan otomotif Roda 4, Roda 2, *basic office*, menjahit, listrik dan Las diharapkan siswa lulusan BLK NTB mempunyai Standar Kompetensi sesuai dengan standar yang ditetapkan Nasional.

Pada Tahun 2017 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB melaksanakan kegiatan pemagangan dalam negeri yang dihadiri oleh para pimpinan perusahaan baik dari hotel maupun dari perusahaan lainnya serta hadir juga dari

pengurus forum komunikasi jejaring pemagangan dalam negeri. Tujuan pemagangan dalam negeri adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta magang agar sesuai kebutuhan industri/perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di perusahaan sebanyak 200 orang dan lokasi pemagangan tersebar ke seluruh Hotel di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat lebih tepatnya daerah destinasi wisata Senggigi serta perusahaan listrik PT. Barata yang berlokasi di Jeranjang Kabupaten Lombok Barat.

- **Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja**

Bidang Penempatan Tenaga Kerja telah melaksanakan kegiatan berupa pembentukan 6 Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) di Provinsi NTB dalam rangka mendekatkan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang berlokasi di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima dan yang telah beroperasi 3 LTSP.

Kegiatan *Job Fair* (Informasi Pasar Kerja) yang sudah menjadi kegiatan rutin minimal setahun sekali dimana Pemerintah Provinsi sebagai fasilitator dalam rangka mempertemukan antara Perusahaan dan Pencari Kerja. Pada tahun 2017 sebanyak 25.787 orang yang ditempatkan ke luar negeri (AKAN), 2.134 orang melalui *Job Fair* (AKL) dengan tingkat pendidikan yang ditempatkan, SMA sederajat sebanyak 1,755 orang, Diploma sebanyak 214 orang dan Sarjana sebanyak 165 orang dan 800 orang yang ditempatkan Luar Provinsi (AKAD) pada sektor perkebunan dengan daerah tujuan Provinsi Kalimantan Barat.

Selain program penempatan tenaga kerja sektor formal, penempatan tenaga kerja sektor informal juga menjadi perhatian mulai dari Padat Karya Produktif dan Infrastruktur; pelatihan pemberdayaan tenaga kerja mandiri/eks TKI- Migran serta penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Padat Karya adalah Program konkrit berupa perluasan kesempatan kerja untuk masyarakat penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin yang berbentuk penciptaan lapangan kerja melalui kegiatan pembangunan padat pekerja. Pada tahun 2017 terdapat 2 kegiatan padat karya yaitu Padat Karya Produktif dan padat karya Infrastruktur yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota di NTB dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 880 orang. Adanya kegiatan ini sebagai titik awal dalam rangka mengembangkan potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Pelatihan bagi Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM)/Eks-TKI Migran dan penerapan TTG menitikberatkan pelatihan bagi masyarakat yang memiliki embrio usaha sehingga dapat lebih mengembangkan usaha dan mendapatkan bantuan peralatan usaha. Pada tahun 2017 sebanyak 600 orang yang sudah diberikan pelatihan.

Tabel 2.74 Rekapitulasi Perkembangan Jumlah TKI Provinsi NTB Tahun 2015-2017

NO.	NEGARA TUJUAN	TAHUN 2015		JUMLAH L	TAHUN 2016		JUMLAH	TAHUN 2017		JUMLAH
		L	P		L	P		L	P	
1.	Malaysia	28.322	1.305	29.627	22.478	720	23.198	20.465	978	21.443
2.	Uni Emirat Arab (UEA)	0	1.088	1.088	0	488	488	1	27	28
3.	Taiwan	26	863	889	22	1.253	1.275	21	880	901

NO.	NEGARA TUJUAN	TAHUN 2015		JUMLAH L	TAHUN 2016		JUMLAH	TAHUN 2017		JUMLAH
		L	P		L	P		L	P	
5.	Singapura	0	756	756	0	835	835	0	872	872
6.	Hongkong	0	911	911	0	844	844	0	1.449	1.449
7.	Bahrain	0	194	194	0	0	0	5	0	5
8.	Oman	0	676	676	0	0	0	0	1	1
9.	Qatar	0	70	70	0	0	0	0	0	0
10.	Brunei Darussalam	104	456	560	74	972	1.046	61	1.015	1.076
11.	Saudi Arabia	104	437	541	2	2	4	0	0	0
12.	Denmark	0	0	0	3	0	3	0	0	0
13.	Amerika	0	0	0	2	0	2	6	1	7
14.	Kuwait	0	0	0	0	0	0	1	0	1
15.	Italia	0	0	0	0	0	0	2	0	2
16.	Inggris	0	0	0	0	0	0	1	0	1
17.	Spanyol							1	0	1
JUMLAH		28.556	6.756	35.312	22.581	5.114	27.695	20.564	5.223	25.787

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2017

Penempatan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) di LTSP-P2TKI sebanyak 25.787 orang pada tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah TKI yang ditempatkan menurun sebanyak 1.908 orang dari tahun 2016, hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan peluang bekerja di dalam daerah. Penerimaan *Remittance* tahun 2017 yang diterima Provinsi NTB berdasarkan data dari Bank Indonesia dan Kantor Pos tahun 2015-2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.75 Rekapitulasi Data *Remittance* TKI Provinsi NTB Tahun 2015-2017

NO.	NEGARA TUJUAN	REMINTANCE		
		2015	2016	2017
1.	Saudi Arabia	190.077.305.115,84	202.255.506.933,95	162.564.489.112,44
2.	Uni Emirat Arab	17.145.803.198,76	22.603.344.181,72	15.147.508.917,72
3.	Kuwait	7.327.744.905,14	2.689.621.885,50	3.668.137.314,00
4.	Qatar	3.578.942.017,29	2.282.366.471,95	3.876.703.245,53
5.	Jordan	16.439.550,00	21.823.300,00	0
6.	Korea	852.656.933,33	1.845.003.194,10	143.556.838,43
7.	Malaysia	20.256.652.295,64	15.019.091.304,01	15.718.422.386,38
8.	Brunei Darussalam	105.352.851,30	74.243.890,00	23.326.290,00
9.	Philipina	2.452.500,00	0	6.451.070,00
10.	Hongkong	3.816.930.965,12	1.071.180.218,24	747.358.751,75
11.	Jepang/Tokyo	2.600.669.883,82	8.204.992.533,26	3.814.397.565,25
12.	Singapura	245.344.582,17	534.480.141,71	856.817.845,77
13.	Negara Lain	150.337.561.301,82	121.483.326.558,02	132.986.012.240,94
14.	Western union (kantor pos dan pegadaian)	1.309.763.093.789,00	1.401.974.923.635,00	1.216.589.361.955,00
Jumlah		1.706.126.895.898,23	1.780.059.904.247,46	1.556.142.543.533,21

Sumber : Bank Indonesia, 2017

Tabel 2.76 Perkembangan Penanganan TKI Bermasalah di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH TKI BERMASALAH								
		2015			2016			2017		
		Laki	Prmpn	Jlh	Laki	Prmpn	Jlh	Laki	Prmpn	Jlh
1	Kota Mataram	25	15	40	18	16	34	19	9	28
2	Lombok Barat	146	49	195	135	36	171	174	34	208
3	LombokTengah	535	144	679	729	92	821	640	106	746
4	Lombok Timur	717	142	859	1.217	141	1.358	1032	146	1.178
5	Lombok Utara	41	18	59	64	15	79	47	4	51
6	Sumbawa	127	50	236	62	4	66	69	16	85
7	Sumbawa Barat	76	26	102	53	8	61	13	2	15
8	Dompu	91	18	109	43	6	49	32	7	39
9	Bima	99	51	150	60	9	69	49	17	66
10	Kota Bima	29	9	38	11	2	13	0	0	0
Jumlah		1.886	522	2.408	2.392	329	2.721	2.075	341	2.416

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2017

Adanya LTSP di masing-masing kabupaten/kota, masyarakat tidak perlu lagi harus jauh-jauh datang ke Mataram, cukup di kabupaten/kota masing-masing, termasuk pembuatan paspor. Dengan keberadaan LTSP di kabupaten/kota, harapannya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat berangkat ke luar negeri melalui jalur legal dan menekan keberangkatan CTKI melalui jalur non prosedural. Selain itu upaya yang telah dilakukan untuk penanganan TKI Bermasalah antara lain:

- Pembentukan satgas penanganan TKI bermasalah terdiri dari Kepolisian, KP3 Lembar, BP3TKI, Imigrasi, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial.
- Posko TKI di BIL Praya
- Biaya pemulangan tanggungan Disnakertrans Provinsi NTB dari pelabuhan lembar ke LTSP dan dari LTSP sampai Kabupaten/Kota (10 Kabupaten/Kota) termasuk pemulangan TKI meninggal.

Tabel 2.77 Perkembangan Jumlah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Provinsi NTB Menurut Kabupaten Kota Tahun 2015-2017

NO.	KAB/KOTA	PUSAT			CABANG		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
1.	Kota Mataram	10	9	10	37	47	29
2.	Lombok Barat	1	2	2	13	7	8
3.	Lombok Utara	0	0	0	2	1	1
4.	Lombok Tengah	0	1	1	12	22	17
5.	Lombok Timur	0	0	0	19	13	10
6.	Sumbawa	0	0	0	25	52	28
7.	Sumbawa Barat	0	0	0	6	10	3
8.	Dompu	0	0	0	1	6	2
9.	Bima	0	0	0	3	6	4
10.	Kota Bima	0	0	0	4	10	6
JUMLAH		11	12	13	122	174	121

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2017

Jumlah Tenaga Kerja Asing di Provinsi NTB tahun 2017 Menurut Kewarganegaraan dapat dilihat pada table berikut.

Tabel 2.78 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Provinsi NTB Menurut Kewarganegaraan Tahun 2017

No	KEWARGANEGARAAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1.	Australia	15	3	18
2.	Amerika	3	3	6
3.	Jepang	1	1	2
4.	Jerman	2	4	6
5.	Italia	5	1	6
6.	Inggris	6	4	10
7.	Kanada	2	0	2
8.	Prancis	10	4	14
9.	Selandia Baru	2	1	3
10.	Belanda	4	1	5
11.	Austria	0	1	1
12.	Netherland Ataliatis	1	0	1
13.	Finlandia	0	0	0
14.	Rusia	0	0	0
15.	Rusian Fedration	2	0	2
16.	Ukraina	1	0	1

No	KEWARGANEGARAAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
17.	Swiss	1	0	1
18.	Norwegia	2	0	2
19.	Belgia	4	0	4
20.	Korea Selatan	2	0	2
21.	Korea Utara	1	0	1
22.	Malaysia	1	0	1
23.	Spanyol	2	2	4
24.	Afrika Selatan	1	0	1
25.	Hungaria	2	0	2
26.	Swedia	3	2	5
27.	Singapura	1	1	2
	Jumlah	74	28	102

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2017

- **Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**

Penyusunan kebijakan hubungan industrial, pembinaan hubungan kerja, syarat-syarat kerja, perjanjian kerja, pengupahan, jaminan sosial, penyelesaian perselisihan serta pengembangan sarana hubungan industrial (kelembagaan dan kerja sama hubungan industrial). Penciptaan kondisi ketenagakerjaan yang satabil merupakan salah satu aspek dalam pembangunan ketenagakerjaan di Provinsi NTB sebagai indikator meningkatnya UMP menjadi Rp.1.825.000.000 rupiah pada tahun 2018 dibanding tahun 2017 sesuai kesepakatan antara APINDO, Serikat Pekerja dan Pemerintah.

Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2018 (berlaku 01 Januari 2018 s.d 31 Desember 2018) ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur NTB, nomor : 561-815 TH. 2017, Tgl. 31/10-2017. Sebelum ditetapkan, telah berlangsung sidang untuk merumuskan dan membahas usulan Kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB yang melibatkan unsur Dewan Pengupahan Provinsi NTB, yaitu : unsur APINDO, Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serta unsur Pemerintah.

Tahun 2017 jumlah kasus Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang masuk sebanyak 45 kasus terdiri dari persetujuan bersama di tingkat Bipartit sebanyak 16 kasus, Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator sebanyak 1 kasus, dan masih dalam proses sebanyak 28 kasus.

Tabel 2.79 Data besaran UMP/UMK dan prosentase kenaikan di Provinsi NTB Tahun 2018

NO.	PROV./KAB/ KOTA	BESARAN UMP / UMK 2017 (RP.)		BESARAN UMP/UMK 2018		NO DAN TANGGAL SK GUBERNUR NTB
		UMP	UMK	UMP/ UMK 2018 (RP.)	PROSENTASE KENAIKAN 2017 - 2018 (%)	
1	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.631.245	-	1.825.000	11,88%	No. 561-815 TH. 2017, Tgl. 31/10-2017
2	Kota Mataram	-	1.714.216	1.863.524	8,71%	No. 561-896 TH. 2017, Tgl. 28/11-2017
3	Kabupaten Lombok Barat	-	1.650.000	1.827.000	10,73%	No. 561-938 TH. 2017, Tgl. 04/12-2017
4	Kabupaten Lombok Tengah	-	1.639.985	1.832.500	11,74%	No. 561-934 TH. 2017, Tgl. 04/12-2017

NO.	PROV./KAB/ KOTA	BESARAN UMP / UMK 2017 (RP.)		BESARAN UMP/UMK 2018		NO DAN TANGGAL SK GUBERNUR NTB
		UMP	UMK	UMP/ UMK 2018 (RP.)	PROSENTASE KENAIKAN 2017 - 2018 (%)	
5	Kabupaten Lombok Timur	-	1.637.377	1.831.000	11,83%	No. 561-935 TH. 2017, Tgl. 04/12-2017
6	Kabupaten Lombok Utara	-	1.732.000	1.883.000	8,72%	No. 561-897 TH. 2017, Tgl. 28/11-2017
7	Kabupaten Sumbawa Barat	-	1.786.300	2.000.000	11,96%	No. 561-933 TH. 2017, Tgl. 04/12-2017
8	Kabupaten Sumbawa	-	1.693.030	1.850.000	9,27%	No. 561-936 TH. 2017, Tgl. 18/11-2017
10	Kabupaten Bima	-	1.786.125	1.941.696	8,71%	No. 561-939 TH. 2017, Tgl. 04/12-2017
9	Kabupaten Dompu	-	1.672.000	1.850.000	10,65%	No. 561-898 TH. 2017, Tgl. 28/11-2017
11	Kota Bima	-	1.700.000	1.850.000	8,82%	No. 561-937 TH. 2017, Tgl. 04/12-2017

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB Tahun 2017

• Program Pengawasan Ketenagakerjaan

Melakukan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan, norma keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemberdayaan pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan bertugas sebagai koordinator dan pembinaan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian pelaksanaan norma ketenagakerjaan dibantu oleh 2 (dua) UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sebagai pelaksana teknis di bantu UPTD Balai Hyperkes.

Sesuai dengan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa terdapat beberapa kewenangan Kabupaten/Kota yang sebelumnya akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi. Salah satunya di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan Undang-Undang tersebut pada tahun 2017 telah dibentuk 2 (dua) UPTD baru yaitu UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok dan UPTD Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa, yang pada awalnya pengawasan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi. Personil Pengawas ketenagakerjaan di Provinsi NTB sebanyak 19 orang, 12 orang di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok dan 7 orang UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa. Sepanjang tahun 2017, sebanyak 316 perusahaan yang telah dikunjungi diantaranya 294 perusahaan kunjungan pertama dan 20 perusahaan kunjungan berkala. Sementara selama tahun 2017 sebanyak 202 penerbitan izin K3.

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak. Pemerintah meluncurkan program

pembentukan kota/kabupaten layak dengan maksud agar anak bebas dari pekerja dan kekerasan terhadap anak dan sebagai upaya melindungi hak-hak mereka.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 tahun 2011, Kota Layak Anak (KLA) terbagi menjadi lima kluster yaitu kluster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dan kluster perlindungan khusus. Dalam rangka membangun komitmen tersebut dan dalam upaya memenuhi hak-hak anak, sampai dengan tahun 2017 telah difasilitasi dan telah dilakukan sosialisasi pada 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota Layak Anak. Selama tahun 2016 sosialisasi dilakukan di 8 (delapan) Kab/kota yaitu: Kabupaten Dompu, Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Tengah, Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat. Pada tahun 2017 sosialisasi dilakukan di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur, sehingga target pada tahun 2018 menjadikan seluruh daerah di Provinsi NTB sudah disosialisasi dan di fasilitasi menjadi Kabupaten/Kota Menuju Layak Anak dan Provinsi Layak Anak dapat terwujud. Namun sampai dengan tahun 2017 kondisinya masih dalam tatanan deklarasi, belum pada penerapan aksi (*action plan*).

Tabel 2.80 Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2017

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	
				TARGET	REALISASI
1.	<i>Launching</i> Kota Layak Anak	Kab/Kota	8	2	2
2.	Kekerasan Terhadap Perempuan/anak (KTP/KTA)	Kasus	1.338	725	1.054
3.	Perencanaan Penganggaran Responsiv Gender (PPRG)	SKPD	38	39	39

Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2017

Kekerasan merupakan manifestasi perilaku emosional manusia, daripada perilaku rasionalnya. Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang syarat dengan arti dan makna "derita", baik dikaji dari perspektif psikologik maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/ kelompok). Kondisi saat ini sering terjadi berbagai kasus tindak kekerasan dan korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Dilihat dari segi etika, moral maupun hukum, bahwa tindak kekerasan merupakan suatu perilaku manusia yang tidak pantas dilakukan. Tindak kekerasan tidak hanya merupakan masalah individual atau masalah nasional saja, tetapi sudah merupakan masalah global, bahkan transnasional.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan rintangan terhadap keberhasilan pembangunan. Bagaimanapun juga tindak kekerasan akan berdampak pada kurangnya rasa percaya diri, menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Demikian juga dengan anak, kepercayaan pada diri sendiri dalam

pertumbuhan jiwanya akan terganggu dan dapat menghambat proses perkembangan jiwa dan masa depannya.

Hasil pemantauan lapangan di seluruh kabupaten/kota di NTB, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kemiskinan, rapuhnya ketahanan keluarga, teknologi dan informasi yang tidak terkendali, pendidikan dan kepedulian masyarakat yang kurang dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hampir seluruh korban kekerasan terhadap perempuan dan anak pelakunya adalah berasal dari keluarga atau kerabat dekat korban, hal ini membuktikan bahwa dalam keluarga masih rentan terjadi kekerasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan agar semua pihak termasuk negara memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak anak tanpa perlakuan diskriminatif.

Pada tahun 2017 DP3AP2KB Provinsi NTB didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan Pelatihan Tematik Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang berlokasi di dua kabupaten yang merupakan lokasi PATBM pada tahun 2016 yaitu:

1. Kabupaten Lombok Barat
 - a. Desa Sukamakmur Kecamatan Gerung
 - b. Desa Kekait Kecamatan Gunungsari.
2. Kabupaten Dompu
 - a. Desa Kareke Kecamatan Dompu
 - b. Desa Tembalae Kecamatan Pajo.

Adapun jenis pelatihan Tematik yang diberikan antara lain tentang :

- a. Desa Bebas Pornografi
- b. Desa Ramah terhadap Disabilitas
- c. Desa Wisata bebas Eksploitasi Seks Anak
- d. Desa Anti Eksploitasi Seks Komersial Anak

Sementara itu Pemerintah NTB telah berupaya keras menekan tingginya tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan (KTP/KTA) dengan berbagai cara antara lain:

- 1) Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten/kota lebih memperhatikan masalah pengiriman tenaga kerja wanita ke luar negeri karena banyak TKW yang meninggalkan anak-anak mereka, sehingga rentan menghadapi kekerasan dan seksual di sekitar lingkungannya.
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat, termasuk juga menggelar seminar dan diskusi seperti :
 - a. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang penghapusan tindak pidana perdagangan orang.
 - c. Fasilitasi kegiatan temu anak dan forum anak
 - d. Fasilitasi dan sosialisasi Kabupaten/kota Menuju Layak Anak (KLA).

- e. Mengembangkan percontohan pengembangan model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 6 Kabupaten masing-masing 1 (satu) desa yakni
 - Kabupaten Lombok Utara di desa Sokong Kecamatan Tanjung
 - Kabupaten Lombok Tengan di desa Jango Kecamatan Janapria
 - Kabupaten Lombok Timur di desa Pandanwangi Kecamatan Jerowaru
 - Kabupaten Dompu di Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu
 - Kabupaten Bima di desa Rabakodo Kecamatan Woha
 - Kota Bima di kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota
- f. Pelatihan Sistem Perlindungan Anak peserta kab/kota dan provinsi

Berdasarkan data tahun 2017, penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan sebanyak 1.054 kasus yang terdiri dari 635 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 419 kasus kekerasan terhadap anak. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 data kekerasan terhadap perempuan dan anak sebanyak 1.338 kasus yang terdiri dari 244 kasus kekerasan terhadap anak dan 1.094 kasus kekerasan terhadap perempuan. Terjadi penurunan kasus sebesar sebesar 21,23 persen (284 kasus). Sedangkan untuk cakupan penangan korban kekerasan baik terhadap perempuan dan anak sudah mencapai 99,50 persen, hal ini menunjukkan bahwa setiap korban kekerasan yang melapor selalu mendapatkan pelayanan dan penanganan. Keadaan ini karena dukungan dan telah berfungsinya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang sudah terbentuk di seluruh kabupaten/kota. Perkembangan penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.81 Pencapaian Indikator SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2016-2017

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	
			TARGET	REALISASI
Penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan	%	90,37	93,35	99,33

Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2017

Penanganan pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan dilakukan melalui beberapa upaya antara lain:

- a. Melatih tenaga pendamping perempuan dan anak korban kekerasan.
- b. Peningkatan fungsi mobil operasional "MOLIN" (Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan) dalam penjangkauan kasus kekerasan
- c. Surveillance ISO 9001-2015 bagi pengelola P2TP2A yang anggarannya bersumber dari dana DEKON)

3. PANGAN

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, menjelaskan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

▪ Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi terhadap total energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk secara kualitas, kuantitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa.

PPH menggambarkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk hidup sehat dan dikatakan ideal bila mendekati skor 100 berdasarkan kesepakatan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998 yang menggunakan bobot (rating) FAO RAPA (1989) yang terus disempurnakan menjadi Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2020. Capaian skor Pola Pangan Harapan Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.82 Capaian Indikator Pola Pangan Harapan (PPH)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	2016		2017		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Skor PPH	Point	78,70	80,90	81,70	81,70	82,0	82,50

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Zat gizi utama yang diperlukan tubuh manusia adalah protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral. PPH dihitung dengan mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok pangan, berdasarkan data susenas yang dipersentase kemudian dikalikan dengan kecukupan konsumsi energi pangan sebesar 2.000 Kkal/kapita/hari dan kecukupan konsumsi protein 52 gram/kapita/hari. Konsumsi energy dan protein berdasarkan kelompok pangan Tahun 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.83 Pola Pangan Harapan Konsumsi Tahun 2017

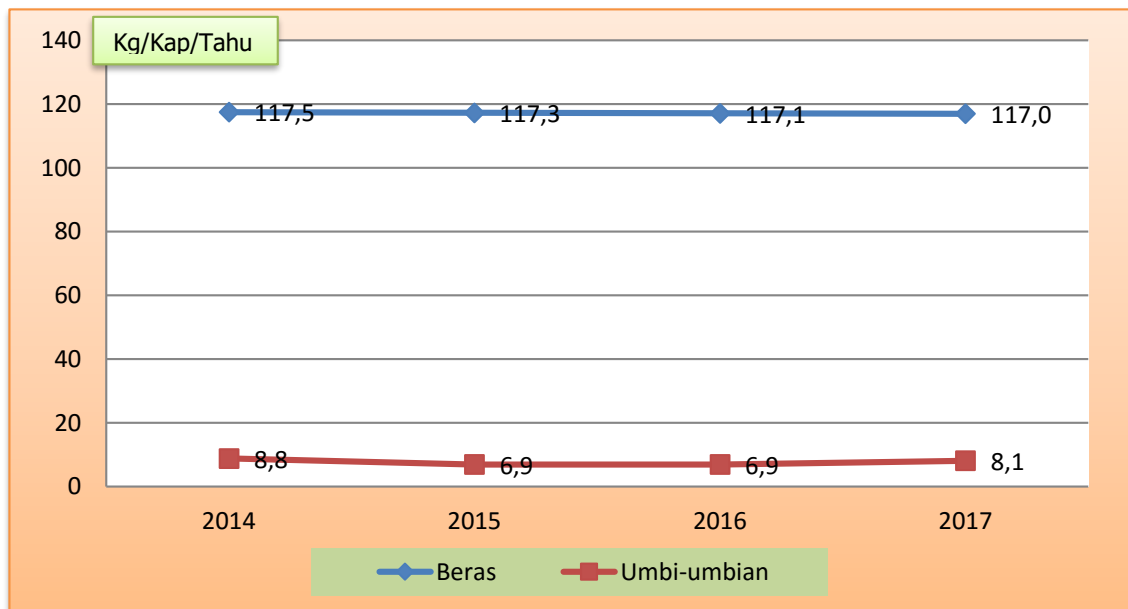
No	Kelompok Pangan	PPH Konsumsi						
		Konsumsi (gram)	Energi (Kkal)	% AKE	Protein (Gram)	% AKP	Skor Riil	Skor Ideal
1.	Padi-padian	363,2	1.643,5	82,2	37,5	72,0	25	25.0
2.	Umbi-umbian	22,1	29,7	1,5	0,3	0,6	0,7	2.5
3.	Pangan Hewani	87,9	156,3	7,8	15,8	30,4	15,6	24.0
4.	Minyak dan Lemak	21,0	207,2	10,4	0,0	0,0	5,0	5.0
5.	Buah/biji berminyak	3,4	26,2	1,3	0,3	0,6	0,7	1.0
6.	Kacang-kacangan	21,6	67,2	3,4	6,5	12,5	6,7	10.0
7.	Gula	16,7	80,9	4,0	0,0	0,0	2,0	2.5
8.	Sayuran dan buah	197,2	104,7	5,2	4,1	7,9	26,2	30.0
9.	Lain-lain	85,3	57,9	2,9	2,2	4,2	0,0	0.0
Jumlah			2.373,6	118,7	66,7	128,3	82,0	100
Standar Konsumsi			2.000		52			

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa konsumsi energi tahun 2017 sebesar 2.373,6 kkal atau 118,70 persen dari target ideal 2.000 Kkal. Tetapi konsumsi energi terbesar masih pada kelompok pangan padi-padian (beras). Konsumsi energi ideal beras 50 persen, tetapi konsumsi energi beras telah mencapai 82,2 persen. Sedangkan konsumsi protein tahun 2017 sebesar 66,7 gram/kapita/tahun atau 128,3 persen dari konsumsi ideal sebesar 52 gram/kapita/tahun. Tingginya konsumsi protein disebabkan sumbangan kelompok pangan padi-padian (beras) mencapai 72,0 persen, padahal protein beras memiliki kandungan 98 persen indeks glikemik. Indeks Glikemik adalah zat yang mempercepat merubah karbohidrat menjadi gula, sehingga menyebabkan masyarakat banyak menderita penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, kolesterol tinggi, darah tinggi, obesitas (kegemukan).

Pola Konsumsi penduduk NTB belum seragam dilihat dari skor PPH dimana konsumsi padi-padian terutama beras tertinggi dari ideal 100,3 kg/kap/thn, konsumsi padi-padian 130,05 kg/kap/thn dimana konsumsi beras mencapai 117,1 kg/kapita/thn.

Gambar 2.16 Konsumsi Beras dan Umbi-umbian 2014-2017



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

▪ Pemanfaatan Pekarangan

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat bekerjasama dengan TP PKK melaksanakan program Tanam Cabe terintegrasi Unggas (inovasi TanCabGas) di Kawasan Rumah pangan Lestari yang bertujuan memanfaatkan pekarangan untuk menanam sayuran buah dan memelihara unggas dalam rangka penguatan rumah tangga dan mempermudah akses pangan serta mengurangi pengeluaran rumah tangga. Lokasi penerima manfaat disampaikan sebagai berikut.

Tabel 2.84 Kelompok Wanita Tani Penerima Manfaat Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Tahun 2017

No.	Kabupaten/ Kota	Nama Kelompok/ KWT	Ketua Kelompok	Alamat Kelompok
1	Kabupaten Lombok Utara	Bina Bahagia	Mutini	Dusun Empang Mayong RW 02 RT 04 Desa Kayangan Kecamatan Kayangan
		Maju Sejahtera	Muliani, S.Pd	Dusun Pendu Lauk Desa Pendua Kecamatan Kayangan
		Mayang Sari	Sumiati	Dusun Penjalin Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung
		Karya Ibu	H. Marinai	Dusun Jeruk Manis Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang
		Montong Sejahtera	Saba'yah	Dusun Bentek Desa Pemenang Kecamatan Pemenang
2	Kabupaten Sumbawa Barat	Panser	Fatmawati	Dusun Maras Desa Sermong Kecamatan Taliwang
		Lala Jinis	Arianti	Desa Seran Kecamatan Seteluk
3	Kabupaten Bima	Oi Sie		Desa Roka Kecamatan Belo
		Meci Angi	Dra. Ubaidah	Desa Tangga Kecamatan Monta
		Bunga Harapan	Sarafiah H Sarajudin	Dusun Pak Jengge Desa Pandai Kecamatan Woha

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Selain bantuan tersebut diatas, lima KRPL di kabupaten Lombok Utara menerima bantuan unggas ayam petelur dari Balai Penelitian Sembawa masing-masing 250 ekor.

Melalui dana APBDP diberikan bantuan hibah pemanfaatan pekarangan berupa bibit tanaman dan ayam siap telur kepada 20 KRPL di 6 (enam) Kabupaten dengan rincian lokasi sebagai berikut.

Tabel 2.85 Penerima Bantuan Hibah Pemanfaatan Pekarangan dari dana APBDP Tahun 2017

No	Kabupaten	Nama Kelompok	Alamat
1	Lombok Barat	KWT Mawar Merah	Desa Kekerri Kec. Gunung Sari
		KWT Berkah	Desa Sesela Kec. Gunung Sari
		KWT Tiga Serangkai	Desa Sigerongan Kec. Lingsar
2	Lombok Tengah	KWT Tunas Mandiri	Dsn Kandong Desa Lajut Kec. Praya Tengah
		KWT Sadar Wisata	Desa Setanggor Kec. Praya Barat
		KWT Melati	Desa Aik Bual Kec. Kopang
3	Lombok Timur	KWT Tetu-Tetu	Desa Lendang Nangka Kec. Masbagik
		KWT Berlian	Desa Lenek Ramban Biak Kec. Aikmel
		KWT Mawar	Desa Kalianyar Kec. Terara
		KWT Pulesari	Desa Kilang Kec. Montong Gading
4	Lombok Tengah	KWT Subur	Desa Gondang Kec. Gangga
		KWT Karmonda	Desa Pemenang Timur Kec. Pemenang
		KWT Nuryakin	Desa Pendua Kec. Kayangan
		KWT Suka Damai	Desa Jenggala Kec. Tanjung

No	Kabupaten	Nama Kelompok	Alamat
		KWT Tiu Teja	Desa Santong Kec. Kayangan
5	Sumbawa	KWT Buin Sura	Desa Jorok Kec. Untir Iwes
		KWT Delima	Desa Pernek Kec. Moyo Hulu
		KWT Harapan maju	Desa Teluk Santong Kec. Palmpang
		KWT Bina Bersama	Desa Nusa Jaya Kec. Manggalewa
6	Dompu	KWT Wanita mandiri	Desa Cempi Jaya Kec. Hu'u

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

▪ **Pengintegrasian materi pembelajaran menjadi Mulok di sekolah mulai dari tingkat PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MAN/SMK**

Pengintegrasian materi pembelajaran dilaksanakan dalam rangka memberikan pelajaran mengenai penganekaragaman konsumsi pangan, mulai dari pengenalan pangan lokal, pengolahan makanan beragam bergizi seimbang dan aman serta pada metode budidaya penanaman sayuran dipekarangan. Adapun sekolah sebagai berikut:

Tabel 2.86 Nama Sekolah pelaksana Integrasi Materi Pembelajaran Tahun 2017

No	Nama Sekolah	Alamat
1	TK Mutiara Hati	Jl. Seruling No. 9 Karang Sukun Baru Mataram
2	TK Negeri Pembina Mataram	Jl. Pemuda No. 61 Mataram
3	TK Negeri Pembina Ampenan	Jl. Danau Tambilingin BTN Pagutan Permai Ampenan
4	TK Negeri Pembina	Jl. Pemuda No. 61 Mataram
5	SDN 9 Mataram	Jl. Dr. Sutomo No. 33 Mataram
6	SDN 15 Mataram	Jl. Sultan Salahudin Batu Dawe Ampenan
7	SDN 16 Mataram	Jl. Pemuda No. 6 Mataram
8	SDN 43 Mataram	Jl. Pertanian No. 1 Tegal Selagalas Cakranegara
9	MTsN 1 Mataram	Jl. Pembangunan B III Mataram
10	MTsN 2 Mataram	Jl. Jenderal No. 17 Mataram
11	SMPN 3 Mataram	Jl. Niaga I/39 Ampenan
12	SMPN 7 Mataram	Jl. Bung Karno Pagutan Mataram
13	SMAN 6 Mataram	Jl. Peternakan I Selagalas Cakranegara
14	SMAN 8 Mataram	Jl. Dr. Soejono Dsn Cermen Mataram
15	SMKN 7 Mataram	Jl. Teguh Lopan Dsn Cermen
16	SMKN 9 Mataram	Jl. Dr. R. Soedjono Lingkar Selatan Ampenan

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

▪ **Pengembangan Cadangan Pangan Daerah**

Cadangan pangan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kuatnya ketahanan pangan suatu wilayah atau daerah. Tahun 2016 dilaksanakan pembelian cadangan pangan pemerintah sebesar 10 ton beras yang ditempatkan pada Gudang Bulog. Pada tahun 2017 sedianya akan dilakukan pembelian cadangan pangan sebesar Rp. 80.000.000,- namun direvisi karena Bulog belum bersedia menampung cadangan pangan tersebut. Perkembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat di Provinsi NTB tahun 2012 s.d 2017 sebagai berikut.

Tabel 2.87 Cadangan Pangan Provinsi NTB 2012-2017

No	Uraian	Cadangan Pangan (Ton Beras)					
		Tahun					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017*
1.	Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi NTB	29,26	167,04	156,55	156,21	164,77	137,18
2.	Cadangan Pemerintah Kabupaten	98,65	87,54	84,19	70,93	592,33	145,73
3.	Cadangan Pangan Masyarakat	601,93	980,99	608,51	755,41	112,32	163,00
Jumlah		729,84	1.235,57	849,25	982,55	869,42	445,91

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

▪ Pengembangan Lumbung Pangan

Peningkatan ketahanan pangan masyarakat dilakukan dengan mengembangkan cadangan pangan masyarakat melalui pengembangan lumbung pangan desa dengan menumbuhkembangkan prakarsa masyarakat setempat melalui pendekatan kelembagaan dan budaya lokal. Kelembagaan lumbung pangan masyarakat mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, melalui pemenuhan cadangan pangan dan kebutuhan sosial masyarakat. Bantuan pengadaan beras diberikan kepada 4 lumbung pangan dan pembangunan gudang di 4 lokasi sebagai berikut.

Tabel 2.88 Nama Kelompok Penerima Bantuan Pengisian Lumbung Pangan Tahun 2017

No	Nama Kelompok	Alamat	Jumlah Bantuan (kg)
1	Damsipi II	Kelurahan Dodu Kota Bima	2.200
2	Mekar Kembali	Desa Sokong Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara	2.270
3	Barokah	Desa Kebon Ayu Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat	2.270
4	Bina Sejahtera	Desa Embung Kandung Kec. Rarang Kab. Lombok Timur	2.270
Jumlah			9.010

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

Pembangunan Lumbung Pangan dilaksanakan di 4 lokasi yang berada di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara dengan dimensi 5m x 7m x 3,5m yang memiliki kapasitas mencapai 4 ton. Lokasi kelompok penerima bantuan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.89 Nama Kelompok Penerima Bantuan Pembangunan Lumbung Pangan Tahun 2017

No	Nama Kelompok	Alamat
1	Nangka Rempek	Dusun Nangka Rempek Kec. Bayan Kab. Lombok Utara
2	Sadar Maju	Ds Sesait Kec. Kayangan Kab Lombok Utara
3	Sinar Baru Bau Daya	Ds Jurit Garu Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur
4	Korong Bedil	Ds. Kerongkong Kec. Suralaga Kab. Lombok Timur

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

▪ Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi merupakan deteksi dini untuk mengatasi kerawanan pangan dan gizi di suatu daerah. Dalam rangka intervensi data SKPG terhadap balita yang tidak naik berat badannya selama ± 3 bulan diberikan bantuan makanan tambahan. Bantuan makanan tambahan diberikan kepada 200 anak dengan rincian 100 anak di Kabupaten Lombok Timur, 50 anak di Kabupaten Lombok Utara dan 50 anak di Kabupaten Bima. Bantuan yang diberikan berupa Susu SGM 400 gr @ 1 kotak, Biskuit Milna untuk usia 1 s.d 6 bulan @3 bungkus dan Telur ras @30 butir. Selain itu diberikan bantuan kepada 175 anak balita dengan rincian 100 anak di Kabupaten Lombok Utara dan 75 anak di kabupaten Lombok Tengah. Bantuan yang diberikan berupa Abon Daging @2 bungkus, Bubur tepung kacang ijo @1 kotak, Telur Ras @15 butir dan Beras @10 kg.

▪ Pemantauan Arus Distribusi Komoditas Pangan

Pemantauan arus keluar masuk komoditas bahan pangan dari dan menuju Provinsi NTB dilakukan secara rutin setiap bulan menggunakan tenaga Enumerator yang ditempatkan di tujuh pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Haji, Pelabuhan Badas, Pelabuhan Sape, Benete, Kempo dan Pelabuhan Bima. Pemantauan dilakukan untuk melihat distribusi komoditas bahan pangan yang masuk dan keluar dari Provinsi NTB sehingga dapat diantisipasi tingkat ketersediaannya didalam daerah. Pemantauan dilakukan terhadap 18 komoditas, yaitu gabah, beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabe, kacang tanah, kacang hijau, tepung terigu, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, sapi potong, kerbau potong, tembakau, jambu mente dan rumput laut. Data Arus Keluar masuk 9 (Sembilan) komoditas pangan strategis tahun 2014-2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.90 Data Arus Keluar Masuk Komoditas Pangan Strategis Tahun 2014-2017

No	Komoditas/ Tahun	Masuk (Ton atau ekor)	Keluar (Ton atau ekor)	Keterangan
1	Beras			
	2016	-	25	Masuk : Bali Keluar : Bali, Makasar, NTT, Sumba, Surabaya, Jakarta, Banjarmasin
	2017*)	13	18.756	
2	Jagung			
	2016	54	13.001	Masuk : NTT, Bali Keluar : Surabaya, Bali, Bajo, Ende, Gresik, Jakarta, Probolinggo, Kupang, Makasar, Jawa Barat, Banjarmasin, Padang, Madiun, Banyuwangi, Kediri, Cirebon, Semarang
	2017*)	88	498.642	
3	Kedelai			
	2016	2925,71	230,5	Masuk : Surabaya dan Banyuwangi Keluar : Surabaya, Lab. Bajo, Banjarmasin, Makasar, Marpokot, Bali, Surabaya
	2017*)	2.242,00	1243	
4	Bawang Merah			
	2016	96,24	508,99	Masuk : Brebes, Surabaya, Probolinggo, banyuwangi, Malang, Mojosari, Makasar, Kudus, Bali Keluar : Surabaya, Bali, Banjarmasin, Bau-bau, Gorontalo, Kupang, Makasar, Marpokot, Maumere, Merauke, Reo, Labuan Bajo, Waikabuba, Ende, Bejawa, Jakarta, Sorong, Probolinggo
	2017*)	178,1	35.305,87	
5	Bawang Putih			
	2016	221,61	0	Masuk :

No	Komoditas/ Tahun	Masuk (Ton atau ekor)	Keluar (Ton atau ekor)	Keterangan
	2017*)	113,88	56,12	Bali, Banyuwangi, Malang, Surabaya, Jakarta, Demak Keluar : Bajawa, NTT
6	Cabai Rawit			
	2016	48,62	1.051,26	Masuk : Sulteng, Jatim, Maluku, Jabar, NTT, Sulsel, Jateng, Sulut, Sultra, Kaltim, Gorontalo, Riau, Bali
	2017*)	49,98	5916,57	Keluar : Surabaya, Bali, DKI Jakarta, Sumatera Barat, Kep. Riau, Kalteng, Sumatera Selatan, Jambi, DI Yogyakarta, Kep. Bangka Belitung, Jatim, Kalbar, Kalsel, Sulut, Jambi, Kaltim, Jateng
7	Daging Ayam			
	2016	204,22	0	Masuk : Bali, Jatim
	2017*)	435,72	17	
8	Telur Ayam			
	2016	3349,03	0	Masuk : Bli, Jatim
	2017*)	3.797,41	0	
9	Sapi Potong			
	2016	0	538	Masuk : Manggarai Barat
	2017*)	2	402	Keluar : Bekasi, Banjarmasin, Balikpapan, Pulau Pinang, Palangkaraya

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, 2017

▪ Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Bahaya keamanan pangan dapat terjadi pada setiap tahapan rantai pangan, maka pengawasan pada seluruh rantai pangan menjadi sangat penting. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Mutu, Gizi, dan Keamanan Pangan telah memuat pembagian tugas dalam menjamin keamanan pangan yang akan dikonsumsi. Untuk pengawasan keamanan pangan segar, merupakan tugas dan fungsi dari Kementerian Pertanian, sedangkan pengawasan keamanan pangan olahan menjadi tugas dan fungsi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Pengawasan keamanan pangan segar yang menjadi tanggung jawab Badan Ketahanan Pangan adalah Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan untuk Pangan Segar Asal Hewani (PSAH) menjadi tanggung jawab Ditjen Peternakan.

Berdasarkan hasil pengawasan keamanan pangan segar, disampaikan beberapa hal terkait dengan tatacara penanganan aspek keamanan pangan oleh pedagang yang dijadikan objek pengawasan adalah sebagai berikut :

- Cara pedagang memperdagangkan produknya buah dan sayur segar di pasar tradisional masih jauh dari kesan hygiene yaitu mencampur prodak buah dan sayur dengan prodak yang lain dan mencampur antara produk yang segar dan yang sudah busuk/layu yang dapat mengakibatkan kontaminasi silang.
- Beberapa pedagang menjual produknya dengan menggunakan meja dan beralaskan karung bekas yang tidak bersih sehingga akan menjadi bahaya baik kimia, fisik maupun mikrobiologi.
- Produk yang dijual tidak dilakukan sortasi/pemisahan antara ukuran besar dan kecil, serta yang sudah lama dan masih baru
- Buah yang sudah ada tanda kerusakan fisik masih dipajang

- Buah yang sudah busuk tidak langsung dibuang ditempat sampah tetapi masih ditaruh disekitar tempat penjualan, sehingga dapat menyebabkan terkontaminasi terhadap buah/sayur yang kondisi fisik masih baik.
- Timbangan sudah berkarat dan tidak bersih
- Produk buah pisang disemprot menggunakan air karbit untuk mempercepat pematangan buah.
- Masih kurangnya Pemahaman para pedagang tentang sanitasi yang dilakukan pada pangan segar asal tumbuhan.

Selain pengawasan keamanan pangan segar juga dilakukan pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan. Sampel pangan segar yang diuji menggunakan *Rapid Test Kit* terhadap residu pestisida jenis *Organophosphate/Carbamate*, menunjukkan hasil negatif, berarti sayur dan buah yang beredar di pasaran aman dikonsumsi masyarakat.

Tabel 2.91 Hasil Pengujian Residu Pestisida Tahun 2017

NO	JENIS KOMODITI	ASAL KOMODITI	HASIL PENGUJIAN RESIDU PESTISIDA		LOKASI
			POSITIF	NEGATIF	
1	Wortel	Jawa		(-)	Pasar Mandalika
2	Kentang	Jawa		(-)	Pasar Mandalika
3	Tomat	Bali		(-)	Pasar Mandalika
4	Kangkung	Geguntur		(-)	Pasar Pagesangan
5	Sawi	Muncuk		(-)	Pasar Pagesangan
6	Bayam	Muncuk		(-)	Pasar Pagesangan
7	Cabe Rawit	Mandalika Bertais		(-)	Pasar Pagesangan
8	Tomat	Mandalika Bertais		(-)	Pasar Pagesangan
9	Sawi	Selagalas		(-)	Pasar Pagesangan
10	Kangkung	Gebang Barat		(-)	Pasar Cakranegara
11	Kacang Panjang	Pasar Sindu		(-)	Pasar Cakranegara
12	Melon	Mandalika Bertais		(-)	Pasar Cakranegara
13	Kol/Kubis	Sembalun		(-)	Pasar Cakranegara
14	Bawang Merah	Bima		(-)	Pasar Cakranegara
15	Bayam	Jempong		(-)	Pasar ACC
16	Komak	Gerung		(-)	Pasar ACC
17	Salak	Bali		(-)	Pasar ACC
18	Cabe Rawit	Guntur Macan		(-)	Pasar Gunungsari
19	Sawi	Lembar		(-)	Pasar Kediri
20	Semangka	Kediri		(-)	Pasar Kediri
21	Timun Suri	Pemotong-Lotim		(-)	Pasar Narmada
22	Timun	Pemotong-Lotim		(-)	Pasar Narmada
23	Pare	Pemotong-Lotim		(-)	Pasar Narmada
24	Tomat	Pemotong-Lotim		(-)	Pasar Narmada
25	Apel	Malang		(-)	Pasar Narmada
26	Kacang Panjang	Aik Bukak		(-)	Pasar Renteng
27	Tomat	Sembalun		(-)	Pasar Renteng
28	Kol	Sembalun		(-)	Pasar Mantang
29	Cabe Rawit	Sembalun		(-)	Pasar Mantang
30	Kcg. Panjang	Aikmel		(-)	Pasar Jelojok
31	Kembang Ko	Bujak, Loteng		(-)	Pasar Jelojok
32	Bawang Merah	Sembalun		(-)	Pasar Aikmel
33	Cabe Merah Besar	Penujak Lotim		(-)	Pasar Aikmel
34	Bawang Merah	Sembalun		(-)	Pasar Rarang
35	Timun	Aikmel		(-)	Pasar Rarang

NO	JENIS KOMODITI	ASAL KOMODITI	HASIL PENGUJIAN RESIDU PESTISIDA		LOKASI
			POSITIF	NEGATIF	
36	Kangkung	Mastim		(-)	Pasar Paok Motong
37	Cabe Merah	Aikmel		(-)	Pasar Paok Motong
38	Kol/Kubis	Masbagik		(-)	Pasar Tanjung
39	Terong Hijau Panjang	Labuapi		(-)	Pasar Tanjung
40	Terong Hijau	Bertais		(-)	Pasar Pemenang
41	Cabe Rawit	Pemenang		(-)	Pasar Pemenang
42	Bayam	Pejeruk		(-)	Pasar Pemenang
43	Kacang Panjang	Taliwang		(-)	Pasar Taliwang
44	Bayam	Merarang		(-)	Pasar Taliwang
45	Tomat	Pringgabaya			Pasar Taliwang
46	Cabe kriting	Bertais		(-)	Pasar Taliwang
47	Buncis	Bertais		(-)	Pasar Taliwang
48	Tomat	Bertais		(-)	Pasar Taliwang
49	Terong ungu	Bertais		(-)	Pasar Taliwang
50	Bawang Pre	Sembalun		(-)	Pasar Taliwang
51	Kembang Kol	Sembalun		(-)	Pasar Seketeng
52	Melon	Aikmel		(-)	Pasar Seketeng
53	Cabe Rawit	Labangka		(-)	Pasar Seketeng
54	Kangkung cabut	Lape		(-)	Pasar Seketeng
55	Jambu kristal	Sumbawa		(-)	Pasar Seketeng
56	Kacang Panjang	Desa Kalampa		(-)	Pasar Dompur
57	Kangkung	Desa Kalampa		(-)	Pasar Dompur
58	Kol Kubis	Desa Mbawi		(-)	Pasar Dompur
59	Terong Ungu	Bertais		(-)	Pasar Dompur
60	Bawang Merah	Samili		(-)	Pasar Tente
61	Terong Ungu Panjang	Samili		(-)	Pasar Tente
62	Tomat	Desa Kalampa		(-)	Pasar Sila
63	Cabe Rawit	Desa Kalampa		(-)	Pasar Sila
64	Sawi	Desa Kalampa		(-)	Pasar Sila
65	Cabe Rawit	Sape		(-)	Pasar Amahami
66	Cabe Keriting	Lombok		(-)	Pasar Amahami
67	Kacang Panjang	Ronto O'i, Fo'o		(-)	Pasar Amahami
68	Bawang Merah	Renda		(-)	Pasar Amahami
69	Bawang Merah	Desa Kalampa		(-)	Pasar Raya Kobi
70	Terong Ungu	Desa Kalampa		(-)	Pasar Raya Kobi
71	Sawi Putih	Bertais			Pasar Amahami
72	Kentang	Bertais		(-)	Pasar Amahami

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2017

Tabel 2.92 Hasil Uji Residu di Pasar Modern

LOKASI PENGAWASAN PSAT	NAMA PEDAGANG	JENIS KOMODITI	ASAL KOMODITI	HASIL PENGUJIAN RESIDU PESTISIDA	
				POSITIF	NEGATIF
Hero	Made Caryase	- Daun Bawang	Bertais		(-)
		- Apel Wasington	Amerika		(-)
		- Anggur Hijau	Cina		(-)
		- Pir Pakam	Argentina		(-)
		- Apel Fuji Bles	Cina		(-)
		- Pir Xianggli	Cina		(-)
		- Brokoli	Bertais		(-)
		- Kembang Kol	Bertais		(-)

LOKASI PENGAWASAN PSAT	NAMA PEDAGANG	JENIS KOMODITI	ASAL KOMODITI	HASIL PENGUJIAN RESIDU PESTISIDA	
				POSITIF	NEGATIF
Hypermart	Basus Darmawi Jaya	- Tomat Bif	Jawa		(-)
		- Strobery	Sembalun		(-)
		- Timun Jepang	Bertais/Kebunroek		(-)
		- Brokoli	Sembalun		(-)

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2017

Sertifikasi Prima dimaksudkan untuk meningkatkan penanganan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang memberikan jaminan mutu dan aman dikonsumsi. Kegiatan Sertifikasi Prima dilaksanakan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi NTB yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 321 Tahun 2009 tanggal 23 Juni 2009. Tahun 2017 sertifikasi Prima 3 diterbitkan untuk 41 komoditas buah dan sayur segar dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.93 Lokasi Penilaian Sertifikasi Prima 3 Tahun 2017

No	Pelaku	Alamat	Komoditas	Mulai Berlaku
1	Poktan Bijak Sari	Tohpati kec. Cakra Kota Mataram	Cabe Merah Besar	11 Agst 2017
2	Poktan Bijak Sari	Tohpati kec. Cakra Kota Mataram	Cabe Keriting	11 Agst 2017
3	Poktan Bijak Sari	Tohpati kec. Cakra Kota Mataram	Sawi Mangkok	11 Agst 2017
4	Poktan Bijak Sari	Tohpati kec. Cakra Kota Mataram	Tomat	11 Agst 2017
5	Poktan Rumpu Tani	Rembiga Kota Mataram	Cabe Keriting	11 Agst 2017
6	Japri	Kel. Pejarakan Kec. Ampenan	Basil	11 Agst 2017
7	Japri	Kel. Pejarakan Kec. Ampenan	Rikola	11 Agst 2017
8	Japri	Kel. Pejarakan Kec. Ampenan	Mint	11 Agst 2017
9	Koptan Karya Bersama	Desa Jago Kec. Praya Kab. Loteng	Cabe Merah Besar	11 Agst 2017
10	Koptan Karya Bersama	Desa Jago Kec. Praya Kab. Loteng	Tomat	11 Agst 2017
11	Pak Mangku	Desa Sukadana Kec. Bayan KLU	Buah Naga	11 Agst 2017
12	Rustam	Desa Tambak Sari Kec. Pototano KSB	Cabe Merah Besar	11 Agst 2017
13	Rustam	Desa Tambak Sari Kec. Pototano KSB	Cabe Keriting	11 Agst 2017
14	Rustam	Desa Tambak Sari Kec. Pototano KSB	Cabe Rawit	11 Agst 2017
15	Poktan Aireo	Desa Lamesung Kec. Seteluk KSB	Cabe Rawit	11 Agst 2017
16	H.M.Amin	BTN Bukit Permai Sumbawa	Buah Naga	11 Agst 2017
17	Marzuki	Desa Labuhan Kec. Alas Sumbawa	Jeruk Manis	11 Agst 2017
18	Poktan Pamali I	Desa Rato Kec. Lambu Kab. Bima	Bawang Merah	11 Agst 2017
19	Poktan Dadi Bajo	Desa Rasabou Kec. Sape Kab. Bima	Bawang Merah	11 Agst 2017

No	Pelaku	Alamat	Komoditas	Mulai Berlaku
20	Poktan Lapeto	Desa Naru Kec. Sape Kab. Bima	Bawang Merah	11 Agst 2017
21	Poktan Mandala	Desa Nunggi Kec. Wera Kab. Bima	Bawang Merah	11 Agst 2017
22	Poktan Mangge Ampe	Desa Monta Baru Kec. Sape Kab. Bima	Bawang Merah	11 Agst 2017
23	Mataram Hidroponik	Jl. Gili Trawangan No. 3 Mtr	Italian Basil	29 Nov 2017
24	Mataram Hidroponik	Jl. Gili Trawangan No. 3 Mtr	Selada Hijau	29 Nov 2017
25	Mataram Hidroponik	Jl. Gili Trawangan No. 3 Mtr	Selada Merah	29 Nov 2017
26	Nifah	Pengenjek, Lombok Tengah	Sawi	29 Nov 2017
27	L. Alun	Barabali, Lombok Tengah	Cabe Rawit	29 Nov 2017
28	Abdurrahman	Setiling, Lombok Tengah	Jeruk Lumajang	29 Nov 2017
29	Nifah	Pengenjek, Lombok Tengah	Kubis	29 Nov 2017
30	Abdurrahman	Wajageseng, Lombok Tengah	Jambu Kristal	29 Nov 2017
31	Hendri Alfian	Ungga, Lombok Tengah	Cabe keriting	29 Nov 2017
32	Bq. Juwita	Setiling, Lombok Tengah	Pepaya California	29 Nov 2017
33	Samirin	Sembalun, Lombok Timur	Bawang Putih	29 Nov 2017
34	H. Gifari	Sembalun, Lombok Timur	Cabe Merah	29 Nov 2017
35	Gapoktan Horsepen Kartini	Pendua, Lombok Utara	Sawi	29 Nov 2017
36	Gapoktan Horsepen	Pendua, Lombok Utara	Terong Ungu	29 Nov 2017
37	Gapoktan Horsepen	Pendua, Lombok Utara	Kacang Panjang	29 Nov 2017
38	Gapoktan Horsepen	Pendua, Lombok Utara	Cabe Rawit	29 Nov 2017
39	Gapoktan Horsepen	Pendua, Lombok Utara	Cabe keriting	29 Nov 2017
40	Supriadi	Air Suning, KSB	Melon	29 Nov 2017
41	Mariyun	Sekongkang, KSB	Semangka	29 Nov 2017

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2017

4. PERTANAHAN

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 yang menjelaskan tentang urusan pemerintahan Konkruen yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pertanahan adalah Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki Sembilan Sub Bidang Urusan Pertanahan yang menjadi kewenangan meliputi: izin lokasi; pengadaan tanah untuk kepentingan umum; sengketa tanah garapan; ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absente; penetapan tanah ulayat; pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; izin membuka tanah; perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.

Kesembilan sub bidang urusan pertanahan yang secara *de jure* menjadi kewenangan pemerintah daerah, secara *de facto* penanganannya dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB. Namun demikian,

penyelenggaraan kesembilan sub bidang urusan pertanahan dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Provinsi NTB melalui Biro Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTB dan Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB.

▪ Tanah Terlantar

Data tanah yang terindikasi terlantar sesuai jenis Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten/Kota Se Nusa Tenggara Barat seluas 166.027.457 Ha, semuanya telah masuk dalam kegiatan penertiban dan sudah diberi peringatan dan ada sebagian yang diusulkan menjadi tanah bermasalah, yang berlokasi di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat seluas seluas 1.607.377 Ha, dan semuanya telah masuk dalam kegiatan penertiban dan sudah diberi peringatan, ada sebagian menjadi tanah bermasalah, termasuk ada juga badan usaha yang diberi kesempatan dan ada yang sudah keluar dari database dapat dipergunakan oleh negara, secara rinci sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.94 Rekapitulasi Tanah Terindikasi Terlantar Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU)
s.d Tahun 2016

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUNTUKAN	PENGGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Lombok Tengah	PT. Trisno Kenangan	a. Konversi Hak erfacth No.333/ 1966 b. 14 Des 1966 c. HGU	a. Batukliang b. Lantan dan Karang Sidemen	355,1000	Perkebunan	Bangunan, Kolam Renang, Kebun Kopi, Tanaman Berkayu Keras	355,100	Kegiatan Penertiban 2013
2.	Lombok Timur	PT.Kosambi factory Lac Liendarto Wirawan Jl.Kerta Jaya No.79A Surabaya	a. 31/HGU/BPN/ 1990 b. 20 Desember 1990 c. HGU	a.Sembalun b.Sajang	99,4160	Perkebunan Kosambi, dan Penularan Kutu Lac	Hutan, Rumput, campur, Tambak udang	99,4160	Kegiatan Penertiban 2010, diusulkan sebagai TANAH TERLANTAR
		3.PT.Tanjung Kenanga Yahya Surya Buana,SE Jl.Panca Usaha No.1 Mataram	a. 80/HGU/DA/1 988 b. 01 Januari 1988	a. Sambelia b. Belanting	38,5000	Perkebunan	Kebun, Pemukima, Tambak	38,5000	Kegiatan Penertiban 2013, pemberian PERINGATAN
		4.PT.Bumi Padak Goar	a. 540.3/01/1/H GU/62/2005 b. 13 Juli 2005 c. HGB	a.Sambelia b.Labu Pandan	85,1890	Tambak	Tambak Udang, Ladang	45,1890	Masuk dalam Kegiatan Penertiban Tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
3.	Sumbawa Barat	1.PT.Hutan Mente Indonesia Surabaya	a.Pemecahan HGU 1 Senayan	a.Seteluk b.Senayan	1,9845	Perkebunan Jambu Merah	Ditanami Palawija oleh masyarakat sekitar	1,9845	
		2.PT Hutan Mente Indonesia Surabaya	a.HGU	a.Seteluk b.Senayan	93,4110	Perkebunan Jambu Merah	Ditanami Palawija oleh masyarakat sekita	93,4110	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUNTUKAN	PENGGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
		3.PT Hutan Mente Indonesia Surabaya	a. 72/HGU/BNP/1994 b. 27 oktober 2000 c. HGU	a.Seteluk b.Senayan	156,0600	Perkebunan Jambu Merah	Ditanami Palawija oleh masyarakat sekitar	156,0600	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		4.Pt.Sekar Abadi Jaya Surabaya	a. 540.3/01/1/01/HGU/62/2000 b. 16 oktober 2000 c. HGU	a.Seteluk b.Senayan	170,332	Tambak	Semak Belukar	170,332	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN I
		5.Pt.Sekar Abadi Jaya Surabaya	a.540.3/01/1/01/HGU/62/2000 b.5 Juli 2001 c.HGU	a.Seteluk b.Senayan	70,1410	Tambak	Semak Belukar	70,1410	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
4.	Sumbawa	1.Pt.Alam Hijau Heny Firmansyah Desa Empang Bawah Kec.Empang Kab.Sumbawa	a.13/HGU/1987 b.15 oktober 1987 c.HGU	a.Empang b.Boal	650,0000	Tambak Udang	Bekas tambak, Tegalan, sawah, padak, usaha perikanan/ tambak udang	650,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		2.Pt.Multimin Mertasari kusnadi said Desa Rhee,Kec.Rhee, Kab.Sumbawa	a.07/HGU/02-BKPM/1989 b.24 oktober 1989 c.HGU	a.Rhee b.Rhee	79,0739	Tambak Udang	Bekas Tambak, semak belukar	79,0739	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		3.PT.Peterta	a.30.a/HGU/DA/80 b.28 februari 1980 c.HGU	a.Lape-Lapok b.Lab.Kuris	1.885,0000	peternakan	Semak belukar, padang rumput	1.885,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		4.PT.MINA AQUA CULTURA Yala Agra Pratama Inc	a.01/HGU/02-BKPM/87 b.10 agustus 1987 c.HGU	a.Alas b.Gontar	98,0000	Tambak	Bekas Tambak	98,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		5.PT.Dinaco Widjaja Kusuma	a.01/HGU/02-BKPM/90 b.20-06-1990 c.HGU	a.Moyo Hilir b.Penyaring	32,8178		Tambak	32,8178	
		6.PT.Dani Tama Land	a.25/HGU/BNP/2004 b.04 juli 2004 c.HGU	a. Moyo Hilir b.Penyaring	276,9101	Perkebunan jeruk dan agrowisata	Perkebunan jeruk	100,9101	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUNTUKAN	PENGGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
									diberi PERINGATAN
5.	Kab.Dompu	1.PT.BALI ANACARDIA Toriullie Jl.Sebandaran Timur 383 Blok E Semarang telp.024-3547156;024-3547367	a.52/HGU/BPN/1997 b.27 juni 1997 c.HGU	a.pekat b.Doropeti	1650,9000	Perkebunan jambu merah	Perkebunan jambu mente, perkampungan, masjid, SD dan Semak/rumput	1650,9000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2010,dengan keputusan dialihkan haknya kepada PT.sukses Mantap Sejahtera sesuai surat kepala BPN RI tgl 27-12-2012 No.4684/14.3/XII/2012
		2.Pt.Bali Anacardia Toriullie Jl.Sebandaran Timur 383 Blok E Semarang telp.024-3547156;024-3547367	a.52/HGU/BPN/1997 b.27 juni 1997 c.HGU	a.pekat b.Doropeti	3.889,5900	Perkebunan jambu merah	Perkebunan jambu mente, perkampungan, basecamp	3.889,5900	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dgn keputusan dialihkan haknya kepada PT.sukses Mantap Sejahtera sesuai surat kepala BPN RI tgl 27-12-2012 No.4684/14.3/XII/2012
		3.Pt.Tugu Vanila Jaya Edi Toet Hendratno,SH Jl.Pejaten Mas V-B 16 Jakarta	a.19/HGU/BPN/1999 b.01 Maret 1999 c.HGU	a.pekat b.Doropeti	1.043,2400	Peternakan	Basecamp, pemagaran kandang, pemagaran hijau, makanan ternak, semak rumput dan sapi 150 ekor	388,5000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		4.PT.Lawata Permai H.idrus Usman,BSC Jl.Belimbing-Bima	a.06/HGU/BPN/1987 b.19/05/1987 c.HGU	a.pekat b.Doropeti	200,0000	Peternakan	Semak rumput	200,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2010
		5.PT.Asia Tunggal Inti M.Budiman Hasta Centre Blok 16 Lt.I Kav.9 Jl.S.Parman,Jakarta	a.05/HGU/1993 b.05 maret 1993 c.HGU a.540.3/03/1/03/52/62/1994 b.29 desember 1994 c.HGU	a.pekat b.pekat a.pekat b.Tolokalo	999,6 143,18	Penggembalaan ternak sapi Penggembalaan ternak sapi	Kandang dan barak, bak air minum hewan dekat mata air, sapi 100 ekor dan semak/rumput	999,6 143,18	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH (Ha)	PERUNTUKAN	PENGGUNAAN TANAH SAAT INI	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
									keputusan diberi PERINGATAN
		6.Pt.Putra Purna Yudha Jl.Al Inabah No.22 Pancoran Jakarta Selatan	a.11/HGU/BPN/1989 b.17 oktober 1989 c.HGU	a.Pekat b.Doropeti	200,0000	peternakan	Semak/ rumput	200,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2010
6.	Kab.Bima	1.Pt.Sondi Bima Sakti Dr.Sanusi H.Ibrahim Jl.Angrek No.2 Kelapa Dua Kebun Jeruk Jakarta Barat	a.540.3/02/1/62/1994 b.07 Juli 1994 c.HGU	a.Tawah b.Wera	112,0000	Peternakan sapi potong	Semak dan padang rumput	112,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		2.Pt.Sanggar Agro Karya Persada I Drs.H.Anas Moezakir,MB A Jl.Rajawali No. 11/5 kawasan Industri Pulogadung, Jakarta	a.60/HGU/BPN/1996 b.14 desember 1996 c.HGU	a.Sanggar b.Piong	598,8000	Peternakan sapi	Peternakan, rumah jaga dan satu kandang paksa		Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		3.PT.SANGGAR AGRO KARYA PERSADA I Drs.H.Anas Moezakir,MB A Jl.Rajawali No. 11/5 kawasan Industri Pulogadung, Jakarta	a.22/hgu/bpn/1999 b.11 maret 1999 c.HGU	a.Sanggar b.Piong	3962,0000	perkebunan	Sudah tidak digunakan oleh pemegang hak, seluas 477 Ha telah dimanfaatkan oleh masyarakat 159 kk, sebagai lahan perkebunan mente, tegalan, serta pemukiman, fasilitas umum dll.	3962,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
		4.PT.TERNAK LESTARI H.Jakariah H.Majid Jl.Tongkol, Pasar raya kota Bima	a.540.3/01/1/01/62/1994 b.19/04/1994 c.HGU	a.Wera b.Nunggi	100,0000	peternakan	Semak dan rumput	100,0000	Masuk dalam kegiatan penertiban tahun 2011,dengan keputusan diberi PERINGATAN
	Jumlah				169.912.457			166.027.457	

Sumber : Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi NTB, 2017

Adapun Langkah – langkah dan upaya yang sudah dilakukan :

- Biro Pemerintahan melalui Bagian Bina Pertanahan hanya melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap tanah yang terindikasi terlantar.

- b. Sementara untuk pemberian sanksi berupa peringatan terhadap Badan Usaha dan penetapan tanah terindikasi terlantar dilakukan oleh Badan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia atas usulan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

5. LINGKUNGAN HIDUP

Capaian indikator kinerja pembangunan daerah bidang Lingkungan Hidup yang terdapat dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018 salah satunya adalah kualitas lingkungan hidup dan jumlah mata air terlindungi dengan realisasi, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.95 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2014-2017

INDIKATOR	SATUAN	2016	2017		KONDISI KINERJA AKHIR 2018
			TARGET	REALISASI	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		56,53	67,89	NA	67,95
Mata Air Terlindungi	Titik	414	417	485	438

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB berperan sebagai Perangkat Daerah Utama dalam 2 indikator kinerja di dalam RPJMD Provinsi NTB periode 2013-2018 dari 31 indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Mata Air Terlindungi.

▪ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkungan dan periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (IKTL) dengan komposisi 30 persen IKA, 30 persen IKU dan 40 persen IKTL. Adapun data IKLH dirilis secara resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup sehingga pada tahun 2017 belum tersedia datanya karena menunggu rilis data tersebut.

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air adalah suatu ukuran kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relative terhadap kebutuhan biota air dan manusia. Kualitas ini juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Metode yang digunakan untuk data IKA adalah dengan pemantauan dan pengambilan sample 10 sungai yang menjadi prioritas Provinsi dan 3 sungai yang menjadi prioritas Nasional, serta melakukan pengujian terhadap sample air yang diambil. Pemantauan dilaksanakan 2 kali dalam setahun dan parameter yang dijadikan dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS, e Coli dan Total Coli.

Tabel 2.96 Indeks Kualitas Air Provinsi NTB Tahun 2016-2017

NILAI INDIKATOR	2016	2017
Indeks Kualitas Air	27,19	30,54*)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Tabel 2.97 Hasil Parameter E Coli dan Total Coli pada Periode Pemantauan I

No	Parameter	Titik Sampling	Lokasi Sungai									
			Ancar	Dodokan	Babak	Tojang	Brangbiji	Brang Rea	Sidutan	Rabalaju	Sori Padolo	Sari
1	E Coli	Hulu 1	17.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	22.000	54.000	≥ 240.000	22.000
2		Hulu 2	54.000	92.000	54.000	92.000	92.000	54.000	160.000	54.000	35.000	35.000
3		Tengah 1	35.000	92.000	160.000	160.000	160.000	92.000	28.000	92.000	54.000	35.000
4		Tengah 2	92.000	160.000	54.000	≥ 240.000	≥ 240.000	35.000	92.000	≥ 240.000	160.000	54.000
5		Hilir 1	54.000	160.000	92.000	160.000	160.000	92.000	54.000	160.000	160.000	54.000
6		Hilir 2	160.000	92.000	≥ 240.000	≥ 240.000	160.000	54.000	22.000	22.000	54.000	92.000
STANDAR BAKU MUTU AIR KELAS II = 1,000												
1	Total Coli	Hulu 1	22.000	57.000	160.000	160.000	160.000	160.000	22.000	160.000	≥ 240.000	35.000
2		Hulu 2	160.000	≥ 240.000	160.000	≥ 240.000	160.000	160.000	≥ 240.000	160.000	92.000	54.000
3		Tengah 1	160.000	160.000	≥ 240.000	≥ 240.000	≥ 240.000	160.000	35.000	92.000	92.000	35.000
4		Tengah 2	160.000	160.000	92.000	≥ 240.000	≥ 240.000	92.000	≥ 240.000	≥ 240.000	≥ 240.000	54.000
5		Hilir 1	160.000	≥ 240.000	160.000	≥ 240.000	≥ 240.000	100.000	160.000	≥ 240.000	≥ 240.000	160.000
6		Hilir 2	≥ 240.000	160.000	≥ 240.000	≥ 240.000	≥ 240.000	92.000	22.000	28.000	92.000	160.000
STANDAR BAKU MUTU AIR KELAS II = 5,000												

Tabel 2.98 Hasil Parameter E Coli dan Total Coli pada Periode Pemantauan II

No	Parameter	Titik Sampling	Lokasi Sungai									
			Ancar	Dodokan	Babak	Tojang	Brangbiji	Brang Rea	Sidutan	Rabalaju	Sori Padolo	Sari
1	E Coli	Hulu 1	13.000	11.000	92.000	17.000	4.900	3.300	35.000	35.000	35.000	35.000
2		Hulu 2	54.000	92.000	≥ 240.000	160.000	11.000	4.600	54.000	160.000	92.000	160.000
3		Tengah 1	92.000	54.000	≥ 240.000	35.000	160.000	11.000	92.000	92.000	160.000	54.000
4		Tengah 2	54.000	160.000	35.000	54.000	≥ 240.000	22.000	54.000	160.000	54.000	92.000
5		Hilir 1	92.000	92.000	≥ 240.000	92.000	160.000	28.000	≥ 240.000	160.000	≥ 240.000	92.000
6		Hilir 2	160.000	160.000	92.000	54.000	92.000	17.000	160.000	54.000	≥ 240.000	92.000
STANDAR BAKU MUTU AIR KELAS II = 1,000												
1	Total Coli	Hulu 1	22.000	18.000	≥ 240.000	28.000	11.000	4.600	54.000	92.000	92.000	54.000
2		Hulu 2	160.000	≥ 240.000	≥ 240.000	≥ 240.000	22.000	9.400	160.000	≥ 240.000	160.000	≥ 240.000
3		Tengah 1	160.000	160.000	≥ 240.000	≥ 92.000	≥ 240.000	17.000	160.000	≥ 240.000	≥ 240.000	92.000
4		Tengah 2	92.000	≥ 240.000	92.000	160.000	≥ 240.000	28.000	92.000	≥ 240.000	92.000	≥ 240.000
5		Hilir 1	160.000	160.000	≥ 240.000	160.000	≥ 240.000	35.000	≥ 240.000	≥ 240.000	≥ 240.000	160.000
6		Hilir 2	≥ 240.000	≥ 240.000	160.000	92.000	160.000	28.000	≥ 240.000	160.000	≥ 240.000	92.000
STANDAR BAKU MUTU AIR KELAS II = 5,000												

Berdasarkan hasil sampling pada 2 periode pemantauan tersebut, parameter E-Coli dan Total Coli jauh melampaui baku mutu. Tingginya nilai E Coli dan Total Coli disebabkan oleh pembuangan limbah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik. Pada umumnya air limbah ini terdiri dari ekskreta (tinja dan air seni), air bekas cucian dapur dan kamar mandi, dan umumnya terdiri dari bahan-bahan organik dan anorganik. Faktor eksternal lainnya ialah musim kemarau yang berkepanjangan di tahun 2017. Sehingga pada saat sampling dilakukan, hampir sebagian besar dilaksanakan di musim kemarau. Saat musim kemarau, suhu di perairan tentu akan meningkat dan memicu pertumbuhan bakteri E Coli dan Total Coliform.

Pada tahun 2017, Dinas LHK NTB melakukan beberapa upaya perbaikan antara lain mengintensifkan sosialisasi terkait pengelolaan persampahan kepada masyarakat, memperkuat monitoring dan evaluasi dokumen AMDAL dan UKL-UPL kepada para pelaku usaha, melakukan sosialisasi regulasi AMDAL, dan melakukan sosialisasi dan penilaian kepada beberapa perusahaan terkait kepatuhannya dalam pengelolaan lingkungan. Dinas LHK NTB menambah jumlah sungai yang disampling menjadi 10 sungai agar jumlah sampel meningkat dan dapat menggambarkan kondisi kualitas air sungai NTB dengan lebih jelas. Sampai pada bulan Oktober 2017 sudah dilaksanakan pemantauan kualitas air sungai di 5 sungai di Pulau Lombok dan 5 sungai di Pulau Sumbawa. Di wilayah Pulau Lombok pemantauan dilaksanakan di Sungai Sidutan, Sungai Babak, Sungai Tojang, Sungai Dodok, dan Sungai Ancar. Dan untuk wilayah Pulau Sumbawa dilaksanakan di Sungai Sari, Sungai Padolo, Sungai Rabalaju, Sungai Brang Rea, dan Sungai Brang Biji. Pemantauan sudah dilaksanakan sebanyak 2 periode di 6 titik sampling masing-masing sungai.

Hasil uji sampling kualitas air sungai selanjutnya akan dijadikan acuan oleh bidang teknis lingkungan hidup Dinas LHK NTB untuk melakukan identifikasi, sosialisasi, kerjasama antar instansi dan berbagai bentuk kegiatan lainnya untuk mendukung pengendalian pencemaran air di titik-titik yang tercemar sesuai dengan data.

2) Indeks Kualitas Udara

Kualitas udara adalah angka yang menyatakan kondisi kualitas udara di suatu tempat. Indeks kualitas udara dibuat untuk memberikan kemudahan mengetahui kondisi kualitas udara ambien kepada masyarakat dengan informasi yang sederhana, tanpa harus menggunakan satuan-satuan yang mudah dimengerti masyarakat.

Pemantauan kualitas udara dilakukan di 4 (empat) lokasi yang mewakili kondisi udara ambien di kabupaten/kota di NTB, yaitu area transportasi, industri dan 2 (dua) titik di area komersial, yaitu perumahan dan perkantoran/perdagangan. Pemantauan kualitas udara ini menggunakan passive sampler yang terpasang di setiap kab/kota, dan dipapar selama 14 hari. Hasil paparan selama 14 hari tersebut dikirim ke PUSARPEDAL untuk diuji dan hasilnya dikirimkan kembali kepada Dinas LHK NTB sebagaimana berikut.

Tabel 2.99 Hasil Pemantauan Kualitas Udara di 10 kabupaten/kota se-NTB Tahun 2017

No	Provinsi	Kota	Peruntukan	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2
				Kadar NO2	Kadar NO2	Kadar SO2	Kadar SO2
				µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3
1	NTB (5200)	LOMBOK BARAT (5201)	Transportasi	7.60	5.60	8.54	8.94
			Industri/Agro Industri	5.90	3.70	9.86	12.75
			Pemukiman	6.40	6.00	6.42	7.71
			Perkantoran/ Komersial	4.40	3.60	10.20	11.49
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
2	NTB (5200)	LOMBOK TENGAH (5202)	Transportasi	7.90	9.00	3.98	<2.57
			Industri/Agro Industri	9.00	8.20	6.85	5.14
			Pemukiman	8.70	5.70	2.60	<2.57
			Perkantoran/ Komersial	Hilang	7.50	Hilang	<2.57
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
3	NTB (5200)	LOMBOK TIMUR (5203)	Transportasi	18.00	19.80	6.09	5.14
			Industri/Agro Industri	11.60	8.40	4.13	4.68
			Pemukiman	10.60	9.10	<2.57	<2.57
			Perkantoran/ Komersial	13.20	13.40	5.60	3.18
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
4	NTB (5200)	SUMBAWA (5204)	Transportasi	20.60	23.10	11.34	7.17
			Industri/Agro Industri	28.50	30.20	14.55	12.24
			Pemukiman	6.50	8.50	3.51	4.68
			Perkantoran/ Komersial	11.40	11.10	10.61	8.18
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
5	NTB (5200)	DOMPU (5205)	Transportasi	20.20	15.00	4.25	<2.57
			Industri/Agro Industri	11.20	10.30	3.25	<2.57
			Pemukiman	11.00	11.00	<2.57	<2.57
			Perkantoran/ Komersial	9.40	8.00	3.31	<2.57
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
6	NTB (5200)	KAB. BIMA (5206)	Transportasi	20.30	16.80	15.47	12.85
			Industri/Agro Industri	11.80	10.90	7.53	7.71
			Pemukiman	9.70	7.50	6.23	5.14
			Perkantoran/ Komersial	14.50	15.40	3.55	<2.57
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
7	NTB (5200)	KAB. SUMBAWA BARAT (5207)	Transportasi	9.20	9.60	15.02	12.85
			Industri/Agro Industri	10.90	11.20	13.88	12.08
			Pemukiman	12.20	13.20	20.20	17.99
			Perkantoran/ Komersial	7.20	8.10	3.37	4.13
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
			Transportasi	6.40	5.90	10.33	10.28
			Industri/Agro Industri	7.30	7.20	7.04	8.31

No	Provinsi	Kota	Peruntukan	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 1	TAHAP 2
				Kadar NO2	Kadar NO2	Kadar SO2	Kadar SO2
				µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3
8	NTB (5200)	LOMBOK UTARA (5208)	Pemukiman	5.00	3.50	3.30	3.57
			Perkantoran/ Komersial	4.10	3.30	4.10	4.61
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
9	NTB (5200)	MATARAM (5271)	Transportasi	18.80	10.40	7.41	6.02
			Industri/Agro Industri	16.30	13.20	9.95	6.48
			Pemukiman	11.80	12.60	3.09	3.46
			Perkantoran/ Komersial	22.80	14.30	12.42	10.28
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
10	NTB (5200)	KOTA BIMA (5272)	Transportasi	16.80	16.80	7.71	5.14
			Industri/Agro Industri	18.20	20.80	5.14	<2.57
			Pemukiman	15.50	14.80	<2.57	<2.57
			Perkantoran/ Komersial	14.90	10.90	9.45	6.98
			Blank	<0.41	<0.41	<2.57	<2.57
STANDAR BAKU MUTU				40		20	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Pada tahun 2017, Dinas LHK NTB telah menambah jumlah sampel yang semula 5 menjadi 10 sampel di seluruh kab/kota se-NTB. Hal ini dilakukan untuk memperluas gambaran kondisi kualitas udara di Provinsi NTB. Selain itu telah dilakukan upaya sosialisasi kepada para pelaku usaha untuk tetap mentaati tata cara pengelolaan lingkungan, termasuk pengendalian pencemaran udara yang dihasilkan.

Berdasarkan hasil pemantauan, parameter SO2 dan NO2 di seluruh titik pemantauan berada di bawah baku mutu, kecuali titik pemukiman di Kabupaten Sumbawa Barat pada periode pemantauan tahap I. Pada titik perkantoran Kabupaten Lombok Tengah periode pemantauan tahap I, alat *passive sampler* yang sudah dipasang hilang, sehingga tidak ada data dan pada tahap II lokasi pemantauan udara dipindah. Sebagai catatan, alat *passive sampler* yang dipasang di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Tengah hilang, sehingga tidak ada data yang dikirim ke pusat, pada tahap II lokasi pemasangannya dipindah. Berdasarkan hasil perhitungan untuk nilai indeks kualitas udara NTB tahun 2017, diperoleh nilai 88,02 atau meningkat dari tahun 2016 sebesar 81,20.

3) Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan adalah rekapitulasi luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi. Perhitungan indeks merupakan perbandingan luas hutan dibandingkan luas wilayah administrasinya. Luasan kelas penutupan yang dihitung yaitu: Hutan Lahan kering primer, Hutan Lahan kering sekunder, Hutan rawa Primer, Hutan rawa Sekunder, Hutan Mangrove Primer, Hutan Mangrove sekunder dan Hutan Tanaman.

Upaya lainnya yaitu merehabilitasi daerah tangkapan yang dilakukan dengan membangun 2 unit bangunan sipil teknis berupa DAM Penahan yang berfungsi mempertahankan tanah dan air dari kehilangan dan kerusakannya melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir, sehingga lahan dan air dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pada tahun 2016 Indeks Tutupan Lahan NTB mencapai 60,03 sedangkan tahun 2017 belum dapat ditentukan nilai indeksnya karena dihitung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, namun berbagai upaya peningkatan tutupan lahan didorong melalui beberapa kegiatan, antara lain kegiatan rehabilitasi lahan kritis seluas 1.700 Ha dari target 3.800 Ha, Penyediaan bibit sebanyak 700.000 batang yang ekuivalen dengan lahan seluas 1.400 Ha (dengan asumsi jarak tanam 4 x 5 m dan jumlah bibit per hektarnya 500 batang) dan rehabilitasi daerah tangkapan air seluas 700 Ha. Selain itu, Dinas LHK telah melaksanakan pembangunan 13 unit Dam Penahan dan 7 unit Dam Pengendali untuk mengurangi daya rusak air pada lahan kritis.

Untuk mendukung pengembangan jenis tanaman endemik yang berkualitas baik, juga dilaksanakan pengembangan perbenihan tanaman hutan dengan target 5 jenis. Untuk mendorong efektifitas pelaksanaan program, telah dilaksanakan pertemuan dengan masyarakat, pengukuran calon lokasi RHL serta penyusunan Rancangan Teknisnya bersama KPH dan Pemerintah Desa.

Terdapat beberapa perusahaan pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan yang telah melakukan RHL di wilayah kerjanya antara lain PT. Sumbawa Juta Raya memiliki rencana penanaman dan pemeliharaan DAS pada kawasan Hutan Lindung seluas 1.103 ha dalam wilayah DAS Moyo, Kec. Lopok Kab. Sumbawa. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.5640/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/10/2017 tentang Penetapan Lokasi Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT. Sumbawa Juta Raya tanggal 26 Oktober 2017. Kegiatan penanaman dan pemeliharaan dilakukan secara bertahap sampai pada tahun 2026.

Program RHL juga didukung oleh beberapa LSM, diantaranya oleh GAIA, beberapa kegiatan yang didukung oleh GAIA antara lain :

1. Pendataan potensi di areal seluas 500 Ha sebagai baseline data
2. Batang bibit sebanyak 112.500 batang didominasi oleh jenis buah-buahan dan ditanami pada lahan seluas 500 Ha
3. Pelatihan pembibitan dan pembangunan kebun rakyat

Sedangkan untuk PT XL Axiata, telah melaksanakan rehabilitasi seluas 6 ha di Desa Mama, Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.

Selain itu, Dinas LHK NTB melakukan penguatan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi NTB Tahun 2017 yang terdiri dari Gubernur, Kapolda NTB, Danrem NTB, Kajati NTB. Satgas ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB dengan anggota yang terdiri dari para pihak yang berasal dari unsur-unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pol PP, Polhut sampai ke tingkat lapangan. Selain Satgas tersebut di atas, Dinas LHK NTB juga membentuk Satgas Pengendali Operasi Perusakan Hutan Provinsi NTB Tahun

2017 yang terdiri dari para Dandim, Kajari dan Kapolres pada beberapa kabupaten.

Dengan anggaran yang tersedia, diharapkan setiap KPH mampu melaksanakan patrol secara rutin di wilayahnya dengan menentukan wilayah-wilayah yang menjadi prioritas penanganan. Jika setiap KPH melaksanakan patrol minimal 120 hari dalam setiap tahun dengan daya jelajah patroli di atas 10 Ha setiap harinya, maka dengan adanya 11 Unit KPH yang bergerak secara simultan, maka akan ada lebih dari 11.000 Ha wilayah kawasan hutan yang terlindungi setiap tahunnya. Dengan target 6.850 Ha, Dinas LHK yakin bahwa target tersebut akan tercapai pada akhir Semester II. Dengan asumsi yang sama, maka sampai Desember 2017 ini sudah tercover wilayah seluas ± 43.438 ha atau jauh di atas target yang ditetapkan. Progress perlindungan ini juga terlihat dari realisasi anggaran dari tingkat lapangan yang didominasi oleh kegiatan patroli. Untuk penyediaan papan informasi dan papan peringatan, saat ini sudah selesai dikumpulkan materi dan desain dari masing-masing KPH untuk kemudian diproses pengadaan barang dan jasanya oleh Pejabat Pengada di Dinas LHK NTB.

Beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target RPJMD berupa IKLH ini antara lain adalah pada kualitas air. Data menunjukkan bahwa IKA NTB terus menurun secara drastis pada beberapa tahun terakhir. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kondisi sungai di sekitar wilayah mereka menjadi salah satu penyebab utamanya. Pemberian bantuan peralatan dari Kementerian terkait untuk membangun IPAL, belum termanfaatkan dengan baik karena masyarakat masih terbiasa membuang limbah dan sampahnya langsung ke sungai. Untuk tutupan lahan, pembatasan kewenangan bagi pemerintah provinsi yang hanya boleh melakukan RHL di luar kawasan hutan, turut menghambat upaya Dinas LHK untuk mendorong penutupan lahan melalui kegiatan RHL. Permasalahan lainnya adalah perhitungan dan publikasi nilai IKLH yang dilakukan oleh Kementerian LHK menyulitkan pemerintah daerah untuk secara *up to date* mengetahui kondisi air, udara dan tutupan lahannya.

- **Perlindungan Mata Air (PERMATA)**

Indikator mata air terlindungi adalah indikator yang masuk ke dalam IKU BLHP Provinsi NTB dan menjadi indikator kinerja daerah ke-31 dalam dokumen RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018 dengan kegiatan Perlindungan Mata Air (PERMATA). Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta para pihak dalam melestarikan lingkungan mata air termasuk kelangsungan hidup dan kelestarian mata airnya guna memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama masyarakat desa dalam bentuk air baku. keberadaan mata air yang terjamin secara berkelanjutan juga dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai kualitas sistem sumber air dan indikator bagi kelestarian daya dukung lingkungan.

Kegiatan perlindungan mata air dilakukan dalam bentuk Lomba Desa PERMATA, peningkatan kapasitas kelompok pengelola mata air di Kabupaten/Kota Se-Provinsi NTB, pelibatan Penyuluh Lingkungan Swadaya (PLS).

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pengelolaan mata air sebagai sumber kehidupan. Upaya pembinaan terhadap pengelolaan mata air yang dilakukan oleh masyarakat diharapkan mendukung penyediaan sumber air secara lestari. Penilaian yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan dapat menambah semangat masyarakat dan menjadi apresiasi pemerintah daerah kepada masyarakat akan peran serta dalam pengelolaan lingkungan terutama pemenuhan kebutuhan air.

Sebelum dilakukan penilaian lomba permata terlebih dahulu dilakukan kegiatan evaluasi pemenang lomba permata yang dihadiri oleh 34 peserta dari dinas Lingkungan Hidup se Provinsi NTB untuk menyeleksi mata air yang ada di daerah masing-masing. Penambahan titik mata air terlindungi sebanyak 36 titik tersebar di 10 kab/kota seluruh NTB, antara lain:

Tabel 2.100 Jumlah Titik Mata Air Terlindungi yang Teridentifikasi Melalui Kegiatan Perlindungan Mata Air Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Titik Mata Air
1	Kota Mataram	2
2	Kabupaten Lombok Barat	5
3	Kabupaten Lombok Tengah	4
4	Kabupaten Lombok Timur	3
5	Kabupaten Lombok Utara	5
6	Kabupaten Sumbawa Barat	3
7	Kabupaten Sumbawa	4
8	Kabupaten Dompu	4
9	Kota Bima	3
10	Kabupaten Bima	3
TOTAL		36

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB juga telah melakukan identifikasi terhadap keberadaan mata air di beberapa kawasan strategis di NTB, antara lain KEK Mandalika, SAMOTA, dan Pelabuhan Bandar Kayangan. Terdapat 8 titik mata air di sekitar KEK Mandalika yang tersebar di Kec. Pujut (3 titik), Kec. Janapria (3 titik), dan Kec. Praya Barat Daya (3 titik). Sedangkan untuk kawasan SAMOTA terdapat 13 titik mata air yang tersebar di 4 kecamatan, antara lain Kec. Plampang (1 titik), Kec. Moyo Hilir (8 titik), Kec. Moyo Hulu (1 titik), dan Kec. Empang (1 titik). Untuk wilayah Pelabuhan Bandar Kayangan, terdapat 19 titik mata air yang tersebar di Kec. Gangga (8 titik), Kec. Kayangan (5 titik), dan Kec. Bayan (6 titik).

Lomba PERMATA ditujukan untuk seluruh kabupaten/kota di NTB. Ada beberapa aspek yang dinilai dalam lomba tersebut yaitu :

1. Memiliki debit minimal 10 L/detik untuk wilayah Pulau Lombok dan 5 L/detik untuk wilayah Pulau Sumbawa
2. Dikelola oleh kelompok pengelola mata air dan telah diterima manfaatnya oleh masyarakat sekitar

3. Kelompok pengelola mata air sudah memiliki pola manajemen mata air yang bagus dan struktur kelembagaan yang kuat.

Tabel 2.101 Daftar Peserta Lomba PERMATA Tahun 2017

No	Nama Mata Air	Lokasi	Debit (ltr/dt)	Kelompok Pengelola
1.	Palowe	Desa Jurumapin Kec. Buer Kab.Sumbawa	2	Mata Ai Palowe
2.	Telaga Sina	Desa Doha, Kec.Hu'u Kab. Dompu	10	Telaga Sina
3.	Mada Oi Sari Sumba	Desa Oi Bura Kec. Tambora Kab. Bima	20	Oi Sumba
4.	Nocu	Kelurahan Nungga Kec. Rasanae Tiur Kota Bima	5	Kabanta
5.	Petandakan	Desa Suela Kec. Suela Kab.Lombok Timur	-	P3A Petandakan
6.	Sumur Loko Petung	Dusun Tuban Desa Tegal Maja Kec. Tanjung	20	Karya Darma Sejati
7.	Aik Bual	Desa bual Kec. Kopang	182,84	Batu Ngompal

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2017.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai pada tahun 2017 ditetapkan 3 kelompok mata air sebagai pemenang :

1. Juara I, Kelompok Mata air Palowe, Desa Juru Mapin Kec. Buer Kab Sumbawa
2. Juara II, Kelompok Mata air Oi Nocu, Kelurahan Nungga, Kec. RasaNae timur, Kota Bima
3. Juara III, Kelompok Mata air Petandakan, Desa Suela Kec. Suela Kab. Lombok Timur

Kegiatan lainnya yang mendukung antara lain rehabilitasi daerah tangkapan air dan patroli pengamanan rutin. Kegiatan Rehabilitasi dilakukan melalui penanaman dengan sasaran pada lahan kritis di dalam/luar kawasan hutan dan pembangunan sipil teknis untuk mengurangi daya rusak air. Kegiatan Pengamanan Hutan dilakukan dengan mengintensifkan patroli rutin untuk melindungi daerah tangkapan air yang kondisinya relatif masih baik.

Melalui kegiatan rehabilitasi daerah tangkapan air, telah dilaksanakan identifikasi titik-titik mata air di setiap wilayah KPH. Hasil identifikasi selama tahun 2017, ditemukan 35 titik baru yang artinya setelah dioverlay dengan titik mata air pada data BISDA Dinas Pekerjaan Umum, maka posisi titik mata air tersebut di luar titik-titik yang sudah terpetakan tersebut. Oleh masyarakat, sumber mata air tersebut juga digunakan sebagai sumber air, terutama untuk minum ternak. Lokasi tersebut menjadi sasaran perlindungan dan rehabilitasi pada Tahun 2017 dan 2018. Kegiatan identifikasi tersebut yang memperbarui jumlah titik mata air dianggap sebagai bagian dari upaya perlindungan mata air sehingga dalam data Perlindungan Mata Air sampai Tahun 2017 telah ditambahkan realisasi Indikator Kinerja Daerah sebanyak 35 titik.

Tabel 2.102 Jumlah Titik Mata Air yang Teridentifikasi Melalui Kegiatan Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air

No	Kab/Kota	Jumlah Titik Mata Air
1	Kota Mataram	-
2	Kabupaten Lombok Barat	5
3	Kabupaten Lombok Tengah	5
4	Kabupaten Lombok Timur	3
5	Kabupaten Lombok Utara	1
6	Kabupaten Sumbawa Barat	3
7	Kabupaten Sumbawa	8
8	Kabupaten Dompu	6
9	Kota Bima	3
10	Kabupaten Bima	1
TOTAL		35

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2017.

Identifikasi jumlah sumber mata air terlindungi sampai dengan tahun 2017, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.103 Perlindungan Mata Air Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017

NO	Kabupaten/Kota	Jumlah Mata Air Terlindungi	
		2016	2017
1.	Lombok Utara	36	42
2.	Lombok Barat	54	64
3.	Lombok Tengah	66	75
4.	Lombok Timur	70	76
5.	Sumbawa Barat	41	47
6.	Sumbawa	92	104
7.	Dompu	18	28
8.	Bima	19	23
9.	Kota Bima	16	22
10.	Kota Mataram	2	4
JUMLAH		414	485

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2017.

Kinerja lain yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB khususnya di bidang pengawasan lingkungan adalah dengan melakukan evaluasi AMDAL dan UKL-UPL dunia usaha. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat kesesuaian deskripsi kegiatan yang ada dalam dokumen dengan kondisi real di lapangan serta mengidentifikasi terhadap perubahan rencana

pengelolaan lingkungan/pemantauan lingkungan dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Pada tahun 2017, terdapat 6 perusahaan yang dipantau. Hasil evaluasi pemantauan terhadap AMDAL dan UKL-UPL antara lain:

1. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan M. Kaharuddin (Kab. Sumbawa)

Telah dilaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan komitmen Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin dalam mengimplementasikan kegiatan RKL dan RPL berdasarkan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) Kegiatan Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin. Rekomendasi dari hasil pemantauan tersebut ialah agar melaksanakan semua komitmen yang tertuang dalam RKL-RPL sesuai dengan tahapan kegiatan berupa pengambilan sampel udara ambien, pengukuran kebisingan, pengambilan sampel air dll. Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin selaku penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan diminta agar membuat laporan pelaksanaan kegiatan RKL-RPL yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 serta menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTB dan instansi terkait.

2. PT. INTAM (Kab. Sumbawa)

Dinas LHK NTB melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RKL – RPL kegiatan operasi produksi pertambangan emas dan mineral pengikutnya di Kecamatan Lantung, Ropang dan Lenangguar, Kabupaten Sumbawa. PT. INTAM selaku penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan agar membuat laporan pelaksanaan kegiatan RKL-RPL yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 serta menyampaikan laporan tersebut kepada, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTB dan ditembuskan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa serta instansi teknik terkait. Selain itu, dalam melaksanakan kewajiban taat lingkungan diharapkan PT. INTAM dapat mengacu pada UU 32 Tahun 2009.

3. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan M. Salahuddin (Kab Bima)

Hasil pemantauan pelaksanaan RKL-RPL Kegiatan Bandar Udara Sultan M. Salahuddin (Kab Bima) menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang belum dilaksanakan dan wajib diperbaiki, antara lain dalam hal pemantauan lingkungan hidup tahap operasi dan pelaporan. Sehingga Dinas LHK NTB memberikan rekomendasi agar Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Sultan M. Salahuddin mengacu pada keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 01 Tahun 1995 tentang tata cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan pengumpulan Limbah B3 serta berkoordinasi dengan instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bima terkait dengan perizinan Limbah B3. Peraturan lainnya yang harus diacu antara lain Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 terkait pemenuhan kewajiban dalam pelaporan. Dinas LHK NTB juga meminta agar melaksanakan semua komitmen yang tertuang dalam RKL-RPL sesuai dengan tahapan kegiatan.

4. PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusra – Pembangunan GI dan SUTT Empang – Dompu (Kab. Dompu)
Telah dilakukan peninjauan lapangan ke lokasi Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi 150 kV dan Gardu Induk pada Jalur Empang Dompu oleh DinasLHK NTB dalam rangka pembinaan terhadap pelaksanaan komitmen PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara dalam mengimplementasikan kegiatan RKL dan RPL berdasarkan dokumen RKL-RPL Kegiatan Pembangunan Jaringan Transmisi 150 kV dan Gardu Induk pada Jalur Empang Dompu. Dalm hal pengelolaan limbah B3, diwajibkan untuk melakukan identifikasi terhadap seluruh Limbah B3 yang dihasilkan, melakukan pencatatan volume Limbah B3 dan melaporkan pengelolaan Limbah B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu dan Dinas LHK NTB. Perusahaan wajib tetap melaksanakan pemenuhan terhadap kewajiban dalam dokumen lingkungan dan/atau perizinan.
5. PT. Bumi Harapan Jaya (Kab. Sumbawa Barat)
Berdasarkan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan RKL – RPL Kegiatan Budidaya Perikanan (Tambak Udang) PT. Bumi Harapan Jaya, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, antara lain :
 - Melakukan uji emisi genset;
 - Melaporkan hasil pengukuran cerobong aktif setiap 6 bulan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumbawa Barat tembusan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - Tempat penyimpanan bahan B3 (solar) dibuatkan atap untuk terlindung dari masuknya air hujan secara langsung maupun tidak langsung, disekitar tangki harus dibuat tanggul dengan dilengkapi saluran pembuangan yang menuju bak penampung dimana bak penampung harus kedap air dan mampu menampung cairan air minimal 110% dan kapasitas maksimum volume tangki;
 - Melakukan pengelolaan Limbah B3 mengacu pada PP 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan Limbah B3;
 - Mengajukan izin pembuangan limbah ke laut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dari Kehutanan Republik Indonesia;
 - Tetap membuat laporan pelaksanaan kegiatan RKL-RPL yang dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.
6. PT. Bumi Mas Kawinda Jaya (Kab. Dompu)
PT. Bumi Mas Kawinda Jaya selaku penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan agar membuat laporan pelaksanaan kegiatan RKL-RPL yang mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 serta menyampaikan laporan tersebut kepada, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTB dan ditembuskan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dompu serta instansi teknik terkait. Selain itu, dalam melaksanakan kewajiban taat lingkungan diharapkan PT. Bumi Mas Kawinda Jaya dapat mengacu pada UU 32 Tahun 2009.

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pelaksanaan KTP elektronik (e-KTP) di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang wajib KTP 3,757,949 orang, dan yang telah melakukan perekaman sebanyak 3,345,513 orang atau 89,02 persen, kemudian yang telah dilakukan pencetakan e-KTP sebanyak 3,140,376 orang atau 83,57 persen. Dengan demikian masih terdapat 412.436 orang yang belum melakukan perekaman e-KTP, dan jumlah e-KTP yang belum dicetak sebanyak 205.137 orang. Penyebab utama tingginya angka wajib KTP yang belum melakukan perekaman data adalah karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya e-KTP serta lokasi masyarakat di daerah terpencil sehingga kesulitan mengakses perekaman KTP Elektronik.

Tabel 2.104 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat s/d Desember 2017

NO	KABUPATEN /KOTA	WAJIB KTP	REKAM	%	CETAK	%
1	Kota Mataram	298,997	298,562	99.85	294,412	98.47
2	Lombok Barat	518.826	436,125	84.06	447,020	86.16
3	Lombok Utara	164,099	163,278	99.50	178,993	109.08
4	Lombok Tengah	752,644	639,703	84.99	574,193	76.29
5	Lombok Timur	925,143	800,001	86.47	667,437	72.14
6	Sumbawa Barat	93,416	91,796	98.27	87,920	94.12
7	Sumbawa	372,037	313,036	84.14	292,240	78.55
8	Dompu	150,840	146,840	97.35	139,376	92.40
9	Bima	380,168	357,469	94.03	362,350	95.31
10	Kota Bima	101,779	98,703	96.98	96,435	94.75
	TOTAL	3,757,949	3,345,513	89.02	3,140,376	83.57

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2017

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap indikator Angka Kemiskinan (P0) yang merupakan salah satu indikator dalam RPJMD 2013-2018. Penurunan angka kemiskinan Provinsi NTB dari tahun ke tahun cukup signifikan hal ini terbukti dengan menurunnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2013 Penduduk Miskin NTB sebesar 815,20 ribu jiwa (17,25) sedangkan pada Tahun 2017 (data per September 2017), jumlah penduduk miskin NTB sebesar 748,12 ribu jiwa (15,05 %), atau berkurang sebanyak 45,66 ribu orang atau 1,02 persen, dengan rincian di daerah perkotaan berkurang 18,49 ribu orang, kemudian di daerah perdesaan berkurang sebanyak 27,16 ribu orang.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Selama

periode Maret 2017 sampai dengan September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan mengalami penurunan, perkotaan menurun dari 3,590 menjadi 3,001, di perdesaan menurun dari 2,758 menjadi 2,316. Ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekati Garis Kemiskinan.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi kesenjangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Selama periode Maret 2017 sampai dengan September 2017 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di daerah perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan, perkotaan menurun dari 1,060 menjadi 0,762, dan di perdesaan, menurun dari 0,679 menjadi 0,522. Penurunan ini menunjukkan bahwa kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin berkurang.

Tabel 2. 105 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB Tahun 2013 –2017

TAHUN	Σ Penduduk Miskin (ribu jiwa)	% Penduduk Miskin	Perubahan
September 2013	815,50	17,25	
September 2014	816,62	17,05	- 0,20 point
September 2015	802,29	16,54	- 0,49 point
September 2016	786,58	16,02	- 0,52 point
September 2017	748,12	15,05	- 0,97 point

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2017

Percepatan penanggulangan kemiskinan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil telah dilakukan melalui penguatan lembaga partisipasi dan lembaga pemberdayaan ekonomi desa dengan melanjutkan Program Pemberdayaan Masyarakat Lumbung Bersaing yang pelaksanaannya dimulai sejak tahun 2011. Dalam pelaksanaannya program ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Catatan Sipil bekerjasama dengan Yayasan Andalusia Islamic Centre Bogor dan Yayasan Gerakan Armada Muda Ekonomi Masyarakat (GARUDA EMAS) Mataram.

Program pemberdayaan masyarakat Lumbung Bersaing melaksanakan upaya peningkatan ekonomi masyarakat miskin dengan memberikan pinjaman yang berbasis syariah. Kegiatan pemberdayaan masyarakat lumbung bersaing tidak hanya meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi juga berupaya membentuk karakter kepribadian anggota kelompok (majelis) yang lebih mengarah kepada kepribadian yang mengandung nilai-nilai disiplin dan religius.

Dana yang dialokasikan untuk program pemberdayaan masyarakat Lumbung Bersaing adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) pada tahun 2011, Rp.3.800.000.000,- (Tiga Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) pada Tahun 2012 dan pada tahun 2015 sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) semua dana bersumber dari dana hibah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tahun 2017 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali mengalokasikan bantuan hibah untuk pengembangan Lumbung Bersaing di Kabupaten Lombok Utara sebesar Rp.2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah), dan dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Yayasan Masyarakat Peduli. Tingkat perkembangan program pemberdayaan masyarakat Lumbung Bersaing terdapat pada tabel di bawah.

Perkembangan program pemberdayaan masyarakat lumbung bersaing sampai dengan saat ini cukup signifikan baik dari jumlah anggota maupun jumlah pembiayaan pinjaman yang telah digulirkan yaitu sebesar Rp.52,022,950,000.- (lima puluh dua milyar dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan total pembiayaan usaha sebesar Rp.17,299,868,300.- (tujuh belas milyar dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah). Hal yang cukup menggembirakan bahwa selain pembiayaan pinjaman dan pembiayaan usaha, masyarakat miskin yang ada pada program pemberdayaan lumbung bersaing juga melakukan kegiatan menabung (Tabungan Sukarela, tabungan kelompok dan tabungan berencana) dengan total tabungan sebesar Rp.1.808.788.055,- (satu milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah) seperti tertuang pada tabel berikut ini.

Tabel 2.106 Tingkat Perkembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Lumbung Bersaing Tahun 2017

	U R A I A N	JUMLAH
	Area, Kumpulan dan Anggota	
	Area/Desa	45
	Majelis	339
	Kelompok	1,405
	Total Anggota (Member)	5,758
	Total Anggota Mitra Usaha	2,186
	SDM Manajemen dan Pendamping	46
	Pembiayaan	
	Pinjaman	
	Pinjaman Yang Diberikan	52,022,950,000
	Pengembalian Pinjaman	48,143,261,000
	Baki Debet Pinjaman	3,790,864,375
	Pembiayaan Usaha	
	Pembiayaan Usaha Yang Diberikan	17,299,868,300
	Pengembalian Pembiayaan Usaha	14,373,153,153
	Baki Deebet Pembiayaan Usaha	3,879,689,000
	Tabungan-tabungan	
	Tabungan Sukarela	788,352,230
	Tabungan Kelompok	493.953.175
	Tabungan Berencana	526.482.650
	Tabungan Hari Raya	205.331.500
	Tabungan Anak Sekolah	55.721.000
	Tabungan Mitra Usaha	265.430.150

	U R A I A N	JUMLAH
	TOTAL TABUNGAN	1.808.788.055
	DANA KEBAJIKAN/ZIS	
	Infaq Anggota	330,183,489
	Dana Takaful Anggota	168.270.617
	Dana ZISHWA di terima	-
	TOTAL DANA KEBAJIKAN/ZIS	531.730.816
	PERMODALAN	
	Modal Anggota	
	Simpanan Pokok	0
	Simpanan Wajib	2.516.917.075
	Modal Hibah	
	Hibah Bina Ekonomi Warga/DPPL	5.699.000.000

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2017

Selain kegiatan lumbung bersaing Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kependudukan Dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dengan maksud bahwa pendirian BUMDesa sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerjasama antar Desa.

Sampai dengan akhir Desember 2017, dari 995 desa yang ada di Nusa Tenggara Barat telah terbentuk 577 desa atau 57,99 persen. Intervensi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

- Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola BUMDesa sebanyak 2 kali dengan peserta masing-masing sebanyak 44 orang;
- Penguatan modal BUMDesa dengan memberikan bantuan keuangan bagi 30 BUMDesa masing-masing sebesar 100 juta rupiah. Adapun lokasi penerima bantuan tersebut adalah :
 - Kabupaten Lombok Barat : 3 desa
 - Kabupaten Lombok Tengah : 3 desa
 - Kabupaten Lombok Timur : 5 desa
 - Kabupaten Lombok Utara : 5 desa
 - Kabupaten Sumbawa Barat : 3 desa
 - Kabupaten Sumbawa : 4 desa
 - Kabupaten Dompu : 4 desa
 - Kabupaten Bima : 3 desa
- Pengembangan usaha BUMDesa dengan memberikan bantuan keuangan untuk pendirian bangunan BUMDesa Mart pada 2 lokasi yaitu di Desa Anamina Kabupaten Dompu dan Desa Gili Indah Kabupaten Lombok Utara sebesar 250 juta pada masing-masing lokasi.

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan di dalam RPJMD NTB 2013-2018 dijadikan sebagai Indikator Kinerja yang terkait dengan penyelenggaraan bidang

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang didukung dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur NTB Nomor SE/150/1138/KUM tahun 2014 tentang PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan), yang menghimbau untuk melakukan perkawinan pada usia ideal yaitu pada usia 21 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

Tahun 2017 rata-rata usia kawin pertama perempuan berdasarkan rilis BPS sebesar 20,27 tahun lebih rendah dari target RPJMD sebesar 20,75 tahun. Realisasi tahun 2017 meningkat sebesar 0,12 tahun jika dibandingkan realisasi pada tahun 2016 yaitu 20,15 tahun. Data rata-rata usia kawin pertama perempuan tahun 2016-2017, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.107 Capaian Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan Tahun 2016-2017

Indikator Kinerja	Kondisi awal RPJMD 2013	2016	2017	
			Target	Realisasi
Rata-rata usia kawin pertama perempuan (tahun)	19,88	20,15	20,75	20,27

Sumber: DP3AP2KB Provinsi NTB, 2017.

Berdasarkan data tersebut, rendahnya rata-rata usia kawin pertama perempuan disebabkan masih tingginya persentase perempuan yang melakukan perkawinan pertama pada usia 10-19 tahun yang mencapai 51,19 persen. Namun demikian rata-rata usia kawin pertama perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,12 tahun pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di kalangan masyarakat antara lain:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang usia pernikahan ideal dan aspek kerumahtanggaan.
2. Kultur sosial dan budaya seperti budaya "merarik"/kawin lari khususnya di Pulau Lombok, stereotype perawan tua, pergaulan remaja, pelecehan seksual, dan sosial media.
3. Kondisi sosial ekonomi keluarga, kebanyakan dari keluarga berpendidikan kurang, berpenghasilan rendah, rapuhnya peran orangtua sebagai pilar utama ketahanan keluarga, serta niat mengurangi beban ekonomi keluarga.
4. Masih sering terjadi nikah siri/dibawah tangan dan tidak mendaftar secara resmi di Kantor Urusan Agama, serta terjadinya *mark up* umur pasangan oleh oknum desa/petugas KUA.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi NTB melakukan beberapa upaya untuk mendewasakan usia kawin, antara lain:

- a. Membangun komitmen antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya percepatan pendewasaan usia perkawinan.
- b. Publikasi melalui media cetak dan elektronik dalam upaya percepatan pendewasaan usia perkawinan.
- c. Sosialisasi PUP ke tingkat desa dengan melibatkan majelis taklim
- d. Pembekalan bagi penyuluh di tingkat desa
- e. Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) pada anak sekolah melalui Program Informasi Komunikasi Reproduksi (PIK-R) di sekolah.

- f. Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak balita, penyuluhan KB pada pasangan usia subur.
- g. Menggali kearifan lokal melalui pengembangan kelompok dialog warga dalam rangka kesehatan reproduksi dan pendewasaan usia perkawinan.

9. PERHUBUNGAN

Capaian kinerja Pembangunan Daerah Urusan Bidang Perhubungan diukur dengan indikator kinerja daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018 yaitu Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Angkutan Laut, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.108 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut Tahun 2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN AWAL RPJMD 2013	2016	2017		KONDISI KINERJA AKHIR 2018
				TARGET	REALISASI	
Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut						
- Angkutan Udara	Orang	2.145.290	3.778.787	3.476.000	4.080.124	3.626.000
- Angkutan Laut	Orang	125.794	1.071.173	197.828	1.327.229	227.502

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2017

▪ Angkutan Udara

Jumlah penumpang udara yang melalui 3 bandara, Lombok Internasional Airport (LIA) di Lombok Tengah, Bandara Sultan M. Salahuddin di Kabupaten Bima, dan Bandara Sultan M. Kaharuddin di Sumbawa selama tahun 2017 sebanyak 4.080.124 orang atau sudah mencapai 117,38 persen dari target yang ditetapkan di RPJMD, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk periode yang sama tercatat hanya ada 3.787.778 orang. Ini berarti secara tahunan terdapat kenaikan sebesar 7.72 persen. Kenaikan penumpang angkutan udara ini disumbang oleh arus penumpang terutama melalui LIA. Penumpang pesawat terbang yang melalui LIA sebanyak 90 persen dari keseluruhan penumpang pesawat yang datang dan berangkat dari dan ke Pulau Lombok, sedangkan penumpang yang melalui Bandara Sultan M. Salahuddin dan Bandara Sultan M. Kaharuddin masing-masing hanya 7 persen dan 3 persen saja.

Tingginya minat kunjungan menuju Pulau Lombok dibuktikan dengan dibukanya satu rute baru penerbangan domestik pada akhir semester I tahun 2017 yaitu rute Lombok – Bandung yang dilayani oleh PT. Lion Air. Disamping itu meningkatnya popularitas Pulau Lombok sebagai destinasi liburan unggulan menyebabkan adanya penerbangan charter langsung sebanyak 7 trip dari Incheon, Korea Selatan ke LIA-Lombok. Kesiapan infrastruktur bandara di LIA juga sudah ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan mampunya LIA didarati oleh pesawat berbadan lebar. Pada awal agustus 2017 untuk pertama kalinya dimusim haji 2017, LIA bisa melayani pesawat berbadan lebar Boeing 747-400. Dengan berhasilnya pendaratan pesawat berbadan lebar ini, bandara LIA sudah siap secara infrastruktur dan personil untuk melayani kedatangan dan keberangkatan pesawat berbadan

lebar yang biasanya dipergunakan untuk melayani penerbangan jarak jauh menuju Timur-Tengah dan Eropa.

Dinas Perhubungan Provinsi NTB juga melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan angkutan udara se-NTB untuk meningkatkan koordinasi terkait fasilitas-fasilitas existing yang ada di bandara se-NTB dan melakukan pemantauan arus penumpang dan barang yang ada di bandara se-NTB. Hasil koordinasi ini bermanfaat untuk rencana pengembangan bandara baik dari sisi darat maupun sisi udara. Pelaksanaan kegiatan di Bidang Angkutan Udara berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Angkutan udara merupakan bagian dari kewenangan pemerintah pusat. Dalam pelaksanaannya, pengusulan kegiatan pengembangan angkutan udara ke Kementerian Perhubungan RI harus dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Provinsi NTB.

▪ **Angkutan Laut**

Capaian arus penumpang pada angkutan laut dihitung dari 5 pelabuhan laut di NTB yaitu Pelabuhan Laut Lembar, Pelabuhan Laut Badas, Pelabuhan Laut Bima, Pelabuhan Laut Senggigi dan Pelabuhan Laut Bangsal/Pemenang. Pada tahun 2017, jumlah penumpang angkutan laut tercatat sebesar 1.327.229 orang atau 670.90 persen dari target yang ditetapkan sebanyak 197.828 orang. Tahun 2016 tercatat sebanyak 1.071.173 orang yang melalui 5 pelabuhan laut di NTB. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah penumpang laut sebesar 23.90 persen dari tahun sebelumnya. Capaian tahun 2017 ini telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun 2018, karena perhitungan target tahun 2018 disusun berdasar pada arus penumpang laut dari 3 (tiga) pelabuhan laut (Pelabuhan Laut Lembar, Pelabuhan Laut Badas, Pelabuhan Laut Bima). Seiring dengan berkembangnya pariwisata di NTB, penumpang angkutan laut didominasi dengan menggunakan kapal cepat dari Pulau Bali menuju Pulau Lombok melalui 2 (dua) pelabuhan laut yaitu Pelabuhan Laut Senggigi dan Pelabuhan Laut Bangsal/Pemenang.

Dalam rangka mendukung capaian jumlah angkutan penumpang pada angkutan laut maka Dinas Perhubungan melakukan beberapa kegiatan, antara lain:

1. Kegiatan pemantauan operasional kapal cepat dalam rangka mengantisipasi meningkatnya pengguna kapal cepat. Dinas Perhubungan Provinsi NTB bersama dengan stakeholder terkait (Polairud, TNI AL, Pemda KLU, dan lainnya) membentuk Tim Pengawasan untuk menjamin keamanan dan keselamatan penumpang kapal cepat. Tim ini memastikan kapal cepat yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan yang sudah ditetapkan dan melakukan pendaratan pada fasilitas pelabuhan yang ada. Diharapkan agar kapal cepat ini tidak langsung menuju pantai di perairan 3 Gili untuk menjamin kelestarian lingkungan di daerah Gili Matra.
2. Kegiatan pengembangan angkutan laut. Kegiatan ini meliputi pembinaan kepada 180 orang pengusaha dan pekerja yang ada di pelabuhan seperti perusahaan bongkar-muat, perusahaan jasa pengurusan transportasi, perusahaan pelayaran, dan lainnya agar melakukan pengurusan legalitas operasional dan

bekerja sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan kelancaran arus barang dan orang di pelabuhan laut.

3. Update database kepelabuhanan di Provinsi NTB. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi pelabuhan-pelabuhan yang ada di NTB, termasuk seluruh fasilitas yang dimiliki seperti lapangan peti kemas, gudang, dermaga, fasilitas bongkar muat, dan lainnya. Data-data ini disajikan dalam bentuk elektronik/website sehingga memudahkan akses informasi bagi para pihak berkepentingan. Update data ini sangat penting dilakukan sebagai dasar bagi pengembangan pelabuhan yang ada di Provinsi NTB.

Selain jasa angkutan penumpang, Dinas Perhubungan Provinsi NTB juga mencatat arus barang yang masuk dan keluar pada 3 pelabuhan yang diusahakan yang dikelola oleh PT. Pelindo III. Pelabuhan Lembar, jumlah muat barang tidak ada karena pengusaha angkutan barang lebih memilih menggunakan pelabuhan ASDP dengan menggunakan truk. Untuk jumlah sapi, Pelabuhan Bima mengirim sapi terbesar yaitu 11.918 ekor sapi, bila dibandingkan dengan Pelabuhan lainnya.

Tabel 2.109 Data Bongkar Muat Barang di Provinsi NTB Tahun 2017

NO.	PELABUHAN	2017	
		BONGKAR	MUAT
1.	Lembar	1.114.543 ton -	- 661 ekor sapi
2.	Bima	63.046 ton -	36.342 ton 11.918 ekor sapi
3.	Badas	220.961 ton -	208.440 ton 1.110 ekor sapi
JUMLAH		1.398.550 ton -	244.782 ton 13.689 ekor sapi

Sumber: Pelindo III, 2017

Untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi di Provinsi NTB, Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan RI membuka layanan angkutan perintis untuk angkutan darat dan angkutan laut. Angkutan perintis merupakan angkutan yang melayani daerah-daerah terpencil dan terisolir ataupun daerah yang belum dilayani transportasi secara memadai dengan tarif yang terjangkau. Beroperasinya angkutan perintis ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian warga di daerah-daerah tersebut sehingga terwujud masyarakat NTB yang sejahtera.

Untuk angkutan darat terdapat 9 (Sembilan) rute/trayek perintis yang dilayani oleh bus Damri. Untuk angkutan laut perintis dilayani dengan 3 (tiga) trayek. Dua kapal laut perintis berpangkalan di Bima untuk membuka konektivitas wilayah Indonesia tengah. Sementara, satu kapal perintis berpangkalan di Surabaya yang menghubungkan daerah-daerah terpencil di rute Surabaya-Bima.

Tabel 2.110 Rute Angkutan Darat Perintis

No	Trayek
1	Mataram – Tolanang via Praya
2	Mataram- Mata
3	Mataram – Ropang
4	Mataram – Sekotong – Bangkombangko

5	Mataram- Tanjung – Santong
6	Mataram – Moyo
7	Mataram – OrongTelu
8	Mataram – Pesugulan
9	Mataram – BatuLante

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2017

Tabel 2.111 Trayek/Rute Angkutan Laut Perintis yang melayani Pelabuhan di Provinsi NTB

No	Rute	Trayek
1	R21	Bima (NTB) - Reo - Jampea – Makassar - Jampea - Reo– Bima (NTB) - Waikelo- Ende – Pulau Raijua - Sabu/Seba- Pulau Raijua - Ende - Waikelo – Bima (NTB)
2	R22	Bima (NTB) - Carik (NTB) – Celukan Bawang - Sapeken - Kangean – Kalianget - Surabaya - Kalianget - Kangean- Sapeken - Celukan Bawang – Carik (NTB) – Badas (NTB) – Bima (NTB)
3	R18	Surabaya – Kalianget - Sapudi – Kangean – Sepeken – Carik (NTB) – Badas (NTB) – Bima (NTB) – Labuhan Bajo - Waikelo - Waingapu – Waikelo – LabuhanBajo – Bima (NTB) – Badas (NTB) – Carik (NTB) - Sapeken – Kangean – Sapudi – Kalianget - Surabaya

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2017

Untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas transportasi di Provinsi NTB, Dinas Perhubungan telah menetapkan trayek untuk Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Pada tahun 2017 terdapat 6 trayek AKDP di pulau Lombok, 11 (sebelas) trayek di pulau Sumbawa, dan 6 trayek lintas Lombok-Sumbawa yang terlayani secara reguler. Untuk tingkat keterisian penumpang digambarkan seperti table dibawah:

Tabel 2.112 *Load Factor* AKDP di Provinsi NTB

No	Trayek	Load Factor
1	Mataram-Lembar	0.342
2	Mataram-Pancor	0.566
3	Mataram-Praya	0.546
4	Mataram-Kayangan	0.899
5	Mataram-Bayan	0.691
6	Mataram-Tanjung	0.872
7	Bima-Dompu	0.885
8	Sumbawa-Taliwang	0.445
9	Dompu-Kilo	0.604
10	Dompu-Kore	0.387
11	Dompu-Kadindi	0.849
12	Bima-Sape	0.439
13	Bima-Sumbawa	0.881
14	Dompu-Sumbawa	0.831
15	Sumbawa-Empang	1.103
16	Taliwang-Alas	0.173
17	Alas-Empang	0.683
18	Mataram-Bima	0.904
19	Mataram-Sumbawa	0.913
20	Mataram-Dompu	1.044

21	Mataram-Empang	0.833
22	Mataram-Taliwang	0.927
23	Mataram-Maluk	0.835

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2017

Load factor ideal yang bisa memberikan keuntungan pada pengusaha angkutan adalah 0.7. Load faktor AKDP untuk trayek di pulau Lombok dan pulau Sumbawa secara rata-rata di bawah load faktor ideal. Sementara untuk AKDP lintas pulau Lombok-Sumbawa, load faktornya sudah di atas load faktor ideal. Hal ini disebabkan karena untuk rute dengan pelayanan kurang dari 100 km terdapat jumlah armada yang melebihi dari yang diperlukan, sementara untuk rute dengan layanan lebih dari 100 km beberapa trayek memerlukan tambahan jumlah armada. Selain menggunakan AKDP, Dinas Perhubungan juga menggunakan pola Angkutan Perintis untuk memenuhi kebutuhan layanan transportasi bagi masyarakat.

▪ **Angkutan Darat**

Dinas Perhubungan Provinsi NTB memberikan perhatian serius untuk mengatasi isu dan permasalahan keselamatan transportasi darat. Pada tahun 2017 terjadi kecelakaan lalu lintas sebanyak 1.458 kejadian dengan korban jiwa sebesar 469 orang. Dinas Perhubungan telah melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas, yang meliputi pemasangan, pengadaan, pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan berupa rambu-rambu, marka jalan, warning light, traffic light, dan guardrail. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur, merencanakan, dan mengelola arus lalu lintas guna mengurangi tingkat kecelakaan. Disamping pekerjaan fisik pengadaan fasilitas keselamatan, Dinas Perhubungan berupaya untuk membina pengusaha, pengemudi angkutan umum, dan para pelajar dengan melakukan sosialisasi dan edukasi keselamatan lalu-lintas. Hal ini ditujukan untuk merubah perilaku berkendara di jalan.

Untuk manajemen lalu lintas, sesuai amanat Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan mengkoordinasikan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ). Keanggotaan FLLAJ meliputi stakeholder penyelenggara transportasi angkutan jalan seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB, Kepolisian RI, akademisi, pengamat transportasi, dan perwakilan masyarakat. Forum bertugas untuk menyelesaikan masalah transportasi yang timbul dengan memotong rantai birokrasi yang ada sehingga permasalahan yang timbul dapat diselesaikan dengan cepat.

Pada tahun 2017, Dinas Perhubungan Provinsi NTB memiliki dua program terobosan, yaitu peluncuran aplikasi PELOR MAS dan program pemberdayaan masyarakat. Program terobosan pertama yaitu peluncuran aplikasi PELOR MAS atau Pelaporan Online Transportasi Berbasis Masyarakat. PELOR MAS merupakan sebuah aplikasi di smartphone berbasis Android yang dapat diunduh langsung melalui Google Playstore. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat bisa langsung menyampaikan keluhan/pengaduannya dan sekaligus mengetahui tindak lanjut dari keluhannya. Program PELOR MAS telah mendapatkan penghargaan masuk dalam Top 10 inovasi pelayanan publik (NTB Novik) 2017 tingkat provinsi NTB.

Program terobosan kedua yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan vokasi bekerjasama dengan Politeknik Pelayaran (Poltekpel) Surabaya. Hal ini bertujuan untuk menyiapkan putra dan putri masyarakat NTB yang tidak mampu untuk dididik sebagai tenaga terampil di bidang pelayaran dengan biaya gratis. Dinas Perhubungan telah mengirim sebanyak 359 orang dari 448 orang yang mendaftar. Keseluruhan peserta yang mengikuti pelatihan di Poltekpel Surabaya berhasil mendapatkan 3 buah sertifikat keahlian dan buku pelaut yang merupakan syarat dasar untuk bekerja di industri pelayaran seluruh dunia karena sertifikat yang diperoleh diakui International Maritime Organization (IMO).

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Capaian indikator penyelenggaraan misi ketiga melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan dan memantapkan stabilitas keamanan melalui langkah terobosan NTB Melayani, Tahun 2017, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.113 Jumlah Kunjungan yang Mengakses Layanan NTB Online Tahun 2017

No	Indikator	Satuan	Tahun Awal RPJMD 2013	2016	2017		Kondisi Kinerja Akhir 2018
				Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Jumlah kunjungan yang mengakses layanan NTB Online	Orang	4.653	81.404	80.000	881.774	160.000

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2017.

Pemanfaatan teknologi informasi di era globalisasi menjadi suatu keharusan, hal ini dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian kebijakan reformasi birokrasi yang efisien, efektif, cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Program NTB Online merupakan satu model implementasi sistem *e-government* (e-gov), dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas layanan publik, transparansi dan pencegahan korupsi maupun mendukung manajemen pengambilan keputusan oleh pimpinan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas layanan publik, dengan sasaran tersedianya data dan layanan informasi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pemanfaatan Informasi Teknologi (IT), memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses layanan informasi, dan sebaliknya masyarakat juga dapat secara langsung menyampaikan masukan kepada pemerintah. Untuk mendukung hal tersebut, penyediaan fasilitas IT di seluruh perangkat daerah perlu segera diwujudkan. Dalam rangka mewujudkan program NTB online, ditempuh melalui tiga tahapan, yakni konsolidasi di tahun 2015, disusul tahapan otomasi online tahun 2016-2017 dan tahapan integrasi tahun 2018. Pada tahapan konsolidasi, kegiatan difokuskan pada pembangunan infrastruktur jaringan yang terkoneksi atau saling terhubung antar perangkat daerah dan pusat data yang ada di sekretariat daerah. Salah satu indikasi aktifitas perangkat daerah dalam

memberikan informasi kepada masyarakat adalah website setiap perangkat daerah selalu terupdate yang berisikan publikasi program, kebijakan dan kegiatan pemda dan mengoptimalkan pemanfaatan e-mail resmi perangkat daerah untuk komunikasi dan layanan data/informasi. Realisasi masyarakat yang mengakses layanan NTB online sampai dengan tahun 2017 sebanyak 881.774 orang atau meningkat 1.083 persen dari tahun 2016 yaitu sebanyak 80.000 orang.

Sementara itu kunjungan pengguna pada Sistem Informasi secara Online PPID Provinsi NTB selama tahun 2017 sebanyak 88.439, kunjungan tertinggi terjadi pada bulan Mei 2017 yaitu sebanyak 24.687 kali kunjungan. Jumlah yang mengunduh Daftar Informasi Publik (DIP) tertinggi adalah pada bulan Juli 2017 dengan 10.656 kali unduhan. Sedangkan untuk Permohonan Informasi yang masuk selama tahun 2017 adalah sejumlah 4 orang pemohon.

Tabel 2.114 Trafik Akses Sistem Informasi secara Online PPID Provinsi NTB
Tahun 2017

BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN (Kali)	DOWNLOAD DIP (Kali)	PERMOHONAN INFORMASI (Orang)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Januari	6.317	2.256	-
Februari	3.372	915	1
Maret	3.568	2.501	-
April	9.887	366	-
Mei	24.687	5.387	1
Juni	17.263	10.032	1
Juli	8.629	10.656	-
Agustus	2.788	2.180	-
September	5.240	2.685	-
Oktober	2.549	3.206	-
November	4.139	1.725	1
Desember	-	-	-
TOTAL	88.439	41.909	4

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2017.

Minat masyarakat cukup tinggi untuk mengakses informasi publik secara online. Hal ini dapat terlihat dari jumlah kunjungan Sistem Informasi Online PPID Provinsi NTB setiap bulannya menyentuh diatas ribuan kunjungan. Begitu pula dengan banyaknya Daftar Informasi Publik (DIP) yang diunduh oleh pengakses, menggambarkan bahwa informasi publik yang disediakan pada sistem informasi online PPID Provinsi NTB sangat diperlukan oleh masyarakat. Sedangkan kecilnya angka permohonan informasi pada tahun 2017 menandakan bahwa informasi yang telah disediakan cukup lengkap, sehingga tidak banyak permohonan informasi diluar informasi publik yang telah disediakan dalam sistem informasi PPID Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah terbantu dengan adanya sistem informasi ini sehingga tidak banyak lagi masyarakat yang harus kesulitan dalam memperoleh informasi publik badan publik, artinya Pemerintah Provinsi NTB telah berupaya maksimal dalam melanjutkan ikhtiar reformasi birokrasi yang bersih dan melayani, penegakan hukum yang berkeadilan dan memantapkan.

Kampung Media adalah salah satu program unggulan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang juga merupakan salah satu program unggulan Provinsi NTB. Seiring berjalannya waktu, sejak dibentuknya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, memiliki tugas pokok menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Pemerintahan Bidang Statistik serta urusan Bidang Persandian. Sementara Kampung Media tetap merupakan program unggulan daerah dan program unggulan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kampung Media menyajikan informasi yang berisi dua hal yaitu mengajak berbuat baik & menghentikan perbuatan buruk dan informasi melahirkan dua hal yaitu memperbaiki peradaban bangsa & mencerdaskan bangsa. Kampung Media bertujuan meningkatkan budaya tutur menjadi budaya menulis dan mendorong ekonomi kreatif. Sampai dengan akhir tahun 2017 terdapat 200 komunitas, dengan 2.750 anggota, menerbitkan buku "Kisah Inspirasi dari Kampung" dan telah memperoleh berbagai penghargaan diantaranya USO Award dari Kemenkominfo (5/12/2011) dan 9 Top Inovasi Nasional (30/04/2014) serta penghargaan Replika Nasional (31/08/2016) dari KemenPANRB, Kampung Media juga menjadi pusat pembelajaran bagi peserta *benchmarking* dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Salah satu kegiatan untuk menunjang program prioritas ini adalah penguatan komunitas kampung media yang menyelenggarakan pembinaan dan jambore Kampung Media, kegiatan ini diselenggarakan pada akhir tahun 2017 di Lombok Astoria Hotel Mataram, disamping sebagai ajang pertemuan antar komunitas Kampung Media, acara ini juga diisi dengan penganugerahan 10 kategori juara kepada komunitas Kampung Media berprestasi sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada Komunitas Kampung Media. Penerima Penghargaan Jambore Kampung Media Tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 002.6-995 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 2.115 Penerima Penghargaan Jambore Kampung Media Tahun 2017

NO	NOMINASI	PEMENANG	KABUPATEN/ KOTA
1.	Kategori Penulisan Inspirasi Kampung Bidang Pendidikan	Marzuki Wardi	Kabupaten Lombok Tengah
2.	Kategori Penulisan Inspirasi Kampung Bidang Ekonomi	Rohani Inta Dewi	Kabupaten Lombok Barat
3.	Kategori Penulisan Info Kampung Bidang Pelayanan Publik	Pangkat Ali	Kabupaten Lombok Barat
4.	Kategori Penulisan Info Kampung Bidang Budaya	Faysal	Kabupaten Bima
5.	Kategori Penulisan Info Kampung Bidang Infrastruktur	Asri	Kabupaten Lombok Timur
6.	Kategori Penulisan Info Kampung Bidang Kesehatan	KM.Pohgading	Kabupaten Lombok Timur

NO	NOMINASI	PEMENANG	KABUPATEN/ KOTA
7.	Kategori Penulisan Info Kampung Bidang Pariwisata	Fahru Rizky	Kota Bima
8.	Kategori Penulisan Info Kampung Bidang Sosial Keagamaan	KM.Sajang Bawak Nao	Kabupaten Lombok Timur
9.	Kategori Sosok Inspiratif Kampung	Saliman	Kota Mataram
10.	Kategori Sosok Inspiratif Kampung	Idris Sahidu	Kabupaten Sumbawa Barat

Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB, 2017

Pusat Pelayanan Informasi Daerah (PPID) Provinsi NTB dibentuk sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010, dikomandoi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi NTB selaku Ketua PPID Provinsi NTB. Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SIP-PPID) dibangun baik yang bersifat online maupun offline pada SKPD lingkup Provinsi maupun Kabupaten/Kota se NTB. Setelah pada tahun-tahun sebelumnya PPID fokus untuk membangun sistem untuk mendukung keterbukaan informasi publik maka pada tahun 2017 difokuskan pada Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan menyusun Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi NTB.

Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) juga merupakan salah satu kegiatan untuk mendukung program unggulan ini, dengan menyelenggarakan kegiatan sambung rasa dengan anggota KIM/Tokoh Budaya dalam rangka informasi pembangunan di 10 kabupaten/kota di NTB.

Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media menyelenggarakan penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui berbagai media seperti media tradisional dengan menyelenggarakan pertunjukan rakyat sebanyak 3 kali pada lokasi yang berbeda, Inspiratif Expo pada kegiatan *car free day* di Jalan Udayana Mataram dilaksanakan setiap hari minggu sebanyak 14 kali, media luar ruangan berupa baliho, spanduk, media cetak dan media elektronik.

Program Fasilitasi Komisi Informasi, sasaran dari program ini adalah mewujudkan pengembangan keterbukaan informasi publik dengan kegiatan penguatan kelembagaan Komisi Informasi dimana kegiatan selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Penganugerahan Pemeringkatan Badan Publik Provinsi NTB Tahun 2017
 - a. Dasar Pelaksanaan :

Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB Nomor : 11/KEP/KI-NTB/XII/2017 Tentang Penganugerahan Peringkat Keterbukaan Informasi Badan Publik Di Wilayah Provinsi NTB Tahun 2017, tanggal 18 Desember 2017.
 - b. Yang Melaksanakan : Komisi Informasi Provinsi NTB.
 - c. Tempat dan Waktu pelaksanaan :

Kegiatan Penganugerahan Pemeringkatan Badan Publik Provinsi NTB Tahun 2017 diselenggarakan di Hotel Lombok Raya Mataram, pada tanggal 27 Desember 2017.
 - d. Maksud dan Tujuan :

Penganugerahan Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik ditujukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh Badan Publik berdasarkan capaian yang diperoleh pada masing-masing indikator Keterbukaan Informasi Publik.

Pemingkatan Badan Publik Tahun 2017 :

- a. Kategori Badan Publik Kabupaten / Kota :
 - Peringkat Pertama : Kabupaten Lombok Barat
 - Peringkat Kedua : Kabupaten Sumbawa Barat
 - Peringkat Ketiga : Kota Mataram
 - b. Kategori Badan Publik Instansi Vertikal
 - Peringkat Pertama : KPU Provinsi NTB
 - Peringkat Kedua : BPK RI Perwakilan Provinsi NTB
 - Peringkat Ketiga : Perwakilan BPKP Provinsi NTB
 - c. Kategori Badan Publik OPD Provinsi NTB
 - Peringkat Pertama : Bappeda Provinsi NTB
 - Peringkat Kedua : RSJ Mutiara Sukma Mataram
 - Peringkat Ketiga : Dinas Perdagangan Provinsi NTB
 - Peringkat Keempat : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Provinsi NTB
 - Peringkat Kelima : Dinas Energi & Sumber Daya Mineral Provinsi NTB
2. Festival Desa Benderang Informasi Publik (DBIP) Nasional Tahun 2017 :
- a. Seminar Nasional
 - 1) Tujuan :

Tujuan dari penyelenggaraan seminar nasional ini adalah :

 - Peserta khususnya Kepala Desa memahami kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan terbuka.
 - Menjadi media bagi pemangku Amanah Provinsi NTB Untuk menyebarluaskan Informasi tentang daerah NTB (Pembangunan dan capaiannya, Potensi daerah dll).
 - Kepala desa memperoleh/memiliki *role model*/acuan pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informai Publik
 - Pengetahuan tentang Keterbukaan Informasi Publik (hak untuk tahu) semakin meluas.
 - Meneguhkan komitmen kepala desa untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik/Pemerintahan terbuka didesanya.
 - 2) Tempat dan waktu pelaksanaan :

Kegiatan Seminar Nasional dilaksanakan pada hari Rabu, 29 November 2017, pukul 09.00 – 12.00 WITA, bertempat di Ballroom Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center NTB.
 - 3) Narasumber :

Narasumber pada kegiatan Seminar Nasional, yaitu Ir. Ridwansyah, M.TP (Kepala Bappeda Provinsi NTB), Fud Syaifuddin, ST (Wakil Bupati Sumbawa Barat), dan Abdulhamid Dipopramono (Komisi Informasi Pusat RI).
 - b. Cerdas Tangkas Keterbukaan Informasi Publik
 - 1) Maksud dan tujuan :

Cerdas Tangkas KIP merupakan event yang mengkompetisikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan antar PPID Desa terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik. Pokok Materi yang dikompetisikan terkait dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah (PP) terkait KIP, Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik (PerKI SLIP), Peraturan Komisi Informasi (PerKI) No. 1 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI SLIP) dan peraturan perundang-undangan terkait.

2) Tempat dan waktu pelaksanaan :

Cerdas Tangkas dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 28-30 November 2017, bertempat di Hotel Lombok Raya Mataram.

3) Pemenang :

- Juara I, Desa Barabali Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah.
- Juara II, Desa Labuhan Lalar Kecamatan Taliwang, Sumbawa Barat.
- Juara III, Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes, Sumbawa.
- Juara IV, Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea, Sumbawa Barat.

3. Gelar Budaya

a. Maksud dan tujuan :

Festival Desa Benderang Informasi Publik Tingkat Nasional merupakan kegiatan inovasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya menggerakkan PPID Desa, mengoptimalkan layanan informasi publik di Desa sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan Gelar Budaya berupa penampilan kesenian daerah yang dijadikan sebagai sarana/ saluran penyampaian informasi pentingnya Keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.

b. Tempat dan waktu pelaksanaan :

Kegiatan Gelar Budaya dilaksanakan pada tanggal 28 – 30 November 2017, bertempat di Hotel Lombok Raya Mataram.

c. Pemenang :

- Juara I, Desa Uma Beringin Kecamatan Unter Iwes, Sumbawa.
- Juara II, Desa Rarang Selatan Kecamatan Terara, Lombok Timur.
- Juara III, Desa Leu Kecamatan Bolo, Bima.
- Juara IV, Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea, Sumbawa Barat.

Program Fasilitasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) merupakan salah satu program pada urusan Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi NTB tahun 2017, telah melakukan Pengawasan dan Rekomendasi perijinan kelayakan bagi lembaga penyiaran radio dan TV, yaitu:

1. Rekomendasi Kelayakan Tahun 2017

- a. PT. Radio Putri Mandalika Bahana Suara (Mandalika Lombok)
- b. PT. Radio Mataram Jaya Media Swara (Mataram FM)
- c. PT. Radio Oisvira Media Pratama Anugerah (Oisvira FM)
- d. PT. Radio Rinjani Permai (Riper The Lovely Radio)
- e. PT. Radio Citra Nuansa Lombok (CNL Radio Action)
- f. Rakom Talenta Anak Lombok (Ralenta FM)

- g. Radio Suara Giri Menang FM 99.1 MHZ (SGM FM)
- h. PT. Radio Swara Maya Pesona Indah (Mayapesona Indah)
- 2. Perusahaan yang mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip/Tetap Tahun 2017
 - a. PT. Radio Rock (Rock FM)/Tetap
 - b. Perkumpulan Radio Komunitas Bragi FM (Bragi FM) / Tetap
 - c. Radio Komunitas Jamaluddin Al-Mannar (Radio Gema Islam FM) /Prinsip
 - d. PT. Radio Pelangi Citra Nuansa Bima (Pelangi Radio)/ Tetap
 - e. SGSN (SGSN The First Safety Radio FM) / Tetap
 - f. PT. Nuansa Televisi Bersahaja (TV Satu)/ Prinsip
 - g. PT. Radio Gradasi Lombok Satu (Gradasi FM)/ Tetap
 - h. PT. Radio Mitra Tara Persada FM (Tara FM) / Tetap
 - i. PT. Radio Ekspresi Bahana Tastura (XBT FM) / Tetap
 - j. PT. Radio Vini Vidi Vici Lombok (V-Radio) / Tetap
 - k. PT. Radio Gita Seraya Persada (GSP Radio Show) / Tetap
 - l. PT. Radio Suara Kancanta (Kancanta 100.3 FM) / Tetap
 - m. Perkumpulan Radio Simfoni Komunitas Mahasiswa Fakultas Dakwah IAIN Mataram (Radio Simfoni, Voice of Kampus) / Tetap
 - n. PT. CiiTRANUANSa Bima Televisi (Bima TV) / Tetap
 - o. PT. Radio Citra Nuansa Lombok (CNL Radio Action) / Tetap
 - p. PT. Mataram Media Televisi (Nus TV) / Tetap
- 3. Perusahaan yang mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran Prinsip/Tetap Tahun 2017
 - a. PT. Radio Putri Mandalika Bahana Suara (Mandalika Lombok)
 - b. PT. Radio Mataram Jaya Media Swara (Mataram FM)
 - c. PT. Radio Oisvira Media Pratama Anugerah (Oisvira FM)
 - d. PT. Radio Rinjani Permai (Riper The Lovely Radio)
 - e. PT. Radio Citra Nuansa Lombok (CNL Radio Action)
 - f. Rakom Talenta Anak Lombok (Ralenta FM)
 - g. Radio Suara Giri Menang FM 99.1 MHZ (SGM FM)
 - h. PT. Radio Swara Maya Pesona Indah (Mayapesona Indah)
- 4. Teguran bagi Lembaga Penyiaran (Radio & TV karena program siaran/tayangannya bersifat subyektif, meresahkan dan tidak mendidik bagi masyarakat tahun 2017 yaitu :
 - a. LOMBOK TV sebanyak 169 kali teguran, ditindaklanjuti dengan surat teguran serta satu kali sanksi administrasi penghentian sementara;
 - b. I NEWS MATARAM sebanyak 103 kali teguran ditindaklanjuti dengan surat teguran;
 - c. SASAMBO TV sebanyak 397 kali teguran ditindaklanjuti dengan surat teguran serta 4 kali sanksi administrasi penghentian sementara;
 - d. TVRI NTB sebanyak 33 kali teguran ditindaklanjuti dengan surat teguran;
 - e. TV 9 sebanyak 246 kali teguran ditindaklanjuti dengan surat teguran serta 2 kali sanksi administrasi penghentian sementara;
 - f. NAA TV sebanyak 17 kali teguran ditindaklanjuti dengan surat teguran;

- g. LOMBOK POST TV sebanyak 79 kali teguran ditindaklanjuti dengan surat teguran.

11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Capaian kinerja bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, dijelaskan sebagai berikut:

▪ Koperasi Berkualitas

Koperasi berkualitas di Provinsi NTB pada tahun 2017 terakumulasi 2.702 unit, bertambah 87 unit, namun tidak memenuhi target tahun 2017 sebanyak 200 unit. Peningkatan koperasi berkualitas melalui upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengelola koperasi, pola manajemen yang tersistematis, kelembagaan yang terorganisir serta pembinaan dan pengawasan.

Perkembangan koperasi berkualitas Provinsi NTB tahun 2016-2017, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.116 Perkembangan Koperasi Berkualitas Provinsi NTB Tahun 2016-2017

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KOPERASI BERKUALITAS (Unit)				
		CAPAIAN s/d 2016	2017			
			TARGET	CAPAIAN	CAPAIAN s/d 2017	PERSENTASE TERHADAP TARGET TAHUN 2017 (%)
1	Mataram	318	16	9	327	56.25
2	Lombok Barat	257	23	7	264	30.44
3	Lombok Utara	88	7	4	92	57.15
4	Lombok Tengah	423	31	13	436	41.94
5	Lombok Timur	356	31	17	373	54.84
6	Sumbawa Barat	237	21	9	246	42.86
7	Sumbawa	190	17	2	192	11.77
8	Dompu	240	17	8	248	4.06
9	Bima	250	15	5	255	33.34
10	Kota Bima	123	11	7	130	63.64
11	Provinsi NTB	133	11	6	139	54.55
	Jumlah	2.615	200	87	2.702	43.50

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2017

▪ Koperasi Pola Syari'ah

Mayoritas penduduk di Nusa Tenggara Barat yang beragama Islam, menginspirasi Pemerintah Provinsi untuk mengembangkan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dengan pola syari'ah. Sampai dengan tahun 2017 KSP Pola syari'ah yang dibentuk tahun 2017 sebanyak 91 Simpan Pinjam (SP) Syari'ah (104.60%) dari

target 87 KSP Syari'ah. Tercapainya target pembentukan KSP Syari'ah karena (1) Pemahaman masyarakat tentang KSP/USP Syari'ah, (2) aturan pelimpahan kepada notaris setempat yang sudah dilaksanakan di Provinsi, serta (3) sudah memadainya jumlah Dewan Pengawas syari'ah di Provinsi NTB. Sementara itu jumlah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) pada tahun 2017 sebanyak 4.187 KSP/USP, bertambah 1.715 KSP/USP dibandingkan tahun 2016, karena adanya kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terkait pembubaran koperasi tidak aktif. Capaian pengembangan koperasi simpan pinjam pola syari'ah tahun 2017, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.117 Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syari'ah Provinsi NTB Tahun 2017

No	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	ALOKASI PENGEMBANGAN KJKS 2013-2018	JUMLAH KSP/USP			KSP POLA SYARI'AH 2017		
			KSP	USP	JML	TARGET	CAPAIAN	
							JML	(%)
1	Mataram	40	69	534	603	8	13	162.50
2	Lombok Barat	85	30	472	502	15	-	-
3	Lombok Utara	35	13	139	152	6	-	-
4	Lombok Tengah	85	20	554	574	15	36	240
5	Lombok Timur	100	28	493	521	15	8	53.34
6	Sumbawa Barat	20	10	476	486	4	-	-
7	Sumbawa	30	12	380	392	4	-	-
8	Dompu	30	9	288	297	5	9	180
9	Bima	35	22	257	279	7	6	85.72
10	Kota Bima	25	19	154	173	4	8	200
11	Provinsi NTB	15	24	184	208	3	11	366.67
	Jumlah	500	256	3.931	4.187	87	91	104.60

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2017

▪ Wirausaha Baru

Ikhtiar Pemerintah Provinsi untuk menciptakan lapangan kerja dan menurunkan jumlah penduduk miskin adalah melalui Program Pencetakan 5.000 Wirausaha Baru (WUB) selama lima tahun. Program ini diharapkan memberikan kontribusi besar terhadap target penurunan angka kemiskinan sebesar 10 persen hingga tahun 2018, perekonomian masyarakat NTB dapat tumbuh dan berkembang lebih cepat.

Pencetakan Wirausaha Baru ini dilakukan dengan memberikan stimulan bagi WUB untuk mengembangkan usahanya hingga berkembang dan mampu merekrut tenaga kerja selaras dengan program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Selain itu dengan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada wirausaha baru

untuk dapat mengembangkan usahanya sehingga niat mencetak wirausaha baru untuk ditingkatkan kualifikasinya menjadi usaha mikro, kecil dan menengah dapat terwujud. Perkembangan wirausaha baru yang ditumbuhkan pada tahun 2017 sebanyak 1.240 unit/orang (124%) dari target 1.000 unit/orang. Realisasi penumbuhan Wirausaha Baru di Provinsi NTB tahun 2017, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.118 Realisasi Penumbuhan Wirausaha Baru s/d Tahun 2017

No	Provinsi/ Kabupaten/kota	Target 2017 (unit/orang)	Jumlah wirausaha baru (unit/orang)			
			2014 s/d 2016	2017		
				Capaian tahun 2017	Capaian 2014 s/d 2017	Persentase capaian 2017 terhadap target tahun 2017 (%)
1.	Mataram	113	11.387	82	11.469	72,57
2.	Lombok Barat	120	11.546	112	11.658	93,33
3.	Lombok Utara	72	6.254	112	6.366	155,56
4.	Lombok Tengah	121	12.997	82	13.079	67,77
5.	Lombok Timur	165	17.930	202	18.132	122,42
6.	Sumbawa Barat	84	5.329	112	5.441	133,33
7.	Sumbawa	85	8.518	112	8.630	131,77
8.	Dompu	63	4.536	142	4.678	225,39
9.	Bima	104	12.299	142	12.441	136,54
10.	Kota Bima	73	6.063	142	6.205	194,52
11.	Provinsi NTB	0	5.522	-	5.522	143,45
	Jumlah	1.000	102.381	1.240	103.621	124

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi NTB, 2017

Penciptaan Wirausaha Baru di NTB secara kumulatif sejak tahun 2014 sampai tahun 2017 telah mencapai 103.621 yang meliputi beberapa sektor usaha antara lain: sektor industri dan sektor perdagangan, sedangkan berdasarkan klasifikasi usaha, wirausaha baru dikelompokkan ke dalam usaha mikro. Selain WUB sasaran pembinaan oleh Dinas Koperasi dan UMKM juga dilakukan kepada kelompok ekonomi produktif antara lain melalui fasilitasi bimbingan teknis Pembinaan Industri Rumah Tangga (P-IRT) untuk mendapatkan sertifikat P-IRT. Pada tahun 2017 sebanyak 200 UKM telah mendapat bimtek PIRT dan 200 UKM telah difasilitasi pengurusan sertifikat label halal.

▪ Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) - KUMKM

Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT KUMKM) didirikan sejak 2014 dan mulai beroperasi pada tahun 2014 dimaksudkan memberikan fungsi layanan antara lain: konsultan pelatihan bisnis, pendampingan bisnis, fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran dan promosi, *networking* dan layanan perpustakaan usaha, yang dibantu oleh 7 orang konsultan pendamping untuk mendampingi KUMKM. Jumlah KUMKM yang sudah difasilitasi sejak Januari sampai Desember 2017 sebanyak 624 UMKM dan 31 Koperasi serta 9 kampung UMKM digital, sedangkan jumlah KUMKM yang berkunjung langsung ke Kantor PLUT KUMKM sebanyak 147 orang.

Keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan urusan bidang Koperasi dan UMKM tersebut masih dihadapkan pada beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

▪ BLUD Pengelolaan Dana Bergulir - KUMKM

Pada Tahun 2017 telah diinisiasi pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. BLUD KUMKM didirikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan permodalan KUMKM. Adapun tujuan dibentuknya BLUD KUMKM, yaitu:

- a. Membantu Pengelolaan Dana Bergulir usaha guna pengembangan koperasi, usaha kecil menengah dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan pengembangan ekonomi nasional.
- b. Mengembangkan dan menyediakan akses pembiayaan bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah melalui pola dana bergulir dalam bentuk pinjaman lunak APBD Provinsi NTB.
- c. Memberikan layanan pembiayaan mandiri bagi Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
- d. BLUD/UPTD Pengelolaan Dana Bergulir mengadakan mitra kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM RI sehingga mempermudah Koperasi dan UKM untuk mengakses permodalan dari LPDB KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM RI.

12. PENANAMAN MODAL

Capaian kinerja pembangunan daerah bidang penanaman modal diukur melalui indikator Laju Investasi yang dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$I = \frac{R_n - R_{(n-1)}}{R_{(n-1)}} \times 100\%$$

I = Laju Investasi (%)
 R_n = Realisasi Investasi tahun berjalan
 R_(n-1) = Realisasi Investasi tahun sebelumnya

Laju investasi di Provinsi NTB tahun 2017 sebesar 13,95 persen melampaui target 11,50 persen, meningkat dibandingkan tahun 2016 dengan laju investasi yang tumbuh terkontraksi -1,0 persen. Perkembangan laju investasi di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.119 Laju Investasi di Provinsi NTB Tahun 2016-2017

INDIKATOR	2016	2017	
		TARGET	REALISASI
Laju Investasi (%)	-1,00	11,50	13,95

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2017.

Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2017 sebesar Rp.9.075.242.457.981,- dibandingkan tahun 2016 Rp.411.835.602.836,- tumbuh positif sebesar 2.104 persen, sedangkan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2017 sebesar Rp.2.205.084.068.287,- dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp.9.487.292.016.600,- tumbuh melambat sebesar 77 persen. Secara keseluruhan pertumbuhan investasi PMDN dan PMA tahun 2017 sebesar 13,95 persen. Perubahan status PT. Newmont menjadi PT. Aman Mineral membawa perubahan besar terhadap perkembangan investasi di Provinsi NTB. Perkembangan nilai investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB yang tercatat tahun 2016-2017, sebagaimana tabel berikut.

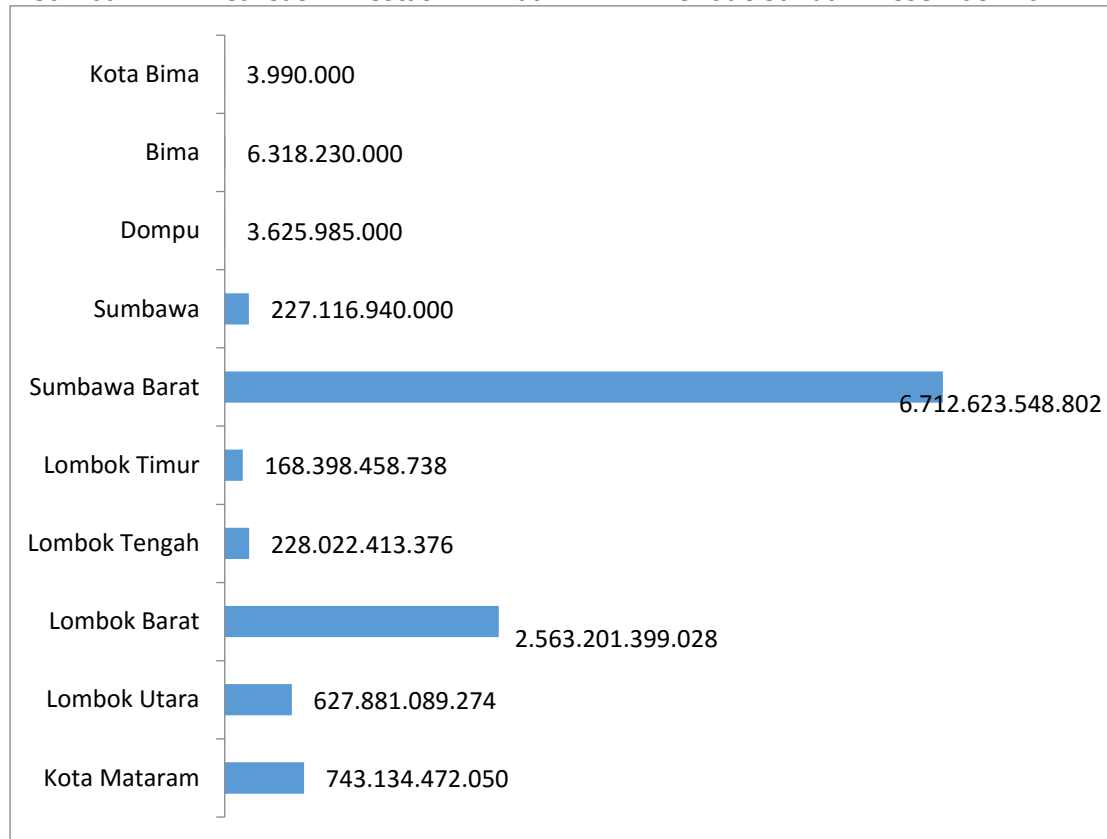
Tabel 2.120 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2016-2017

URAIAN		Nilai Investasi (Rp).	
		2016	2017
PMDN			
1	Triwulan I	63.089.266.364	2.199.984.300.000
2	Triwulan II	121.517.912.544	2.094.322.020.890
3	Triwulan III	140.054.349.480	1.685.611.063.547
4	Triwulan IV	87.174.074.448	3.095.325.073.544
Jumlah		411.835.602.836	9.075.242.457.981
PMA			
1	Triwulan I	1.346.076.000.000	406.429.380.000
2	Triwulan II	2.765.235.503.400	155.694.621.110
3	Triwulan III	2.861.587.342.700	531.573.070.000
4	Triwulan IV	2.514.393.170.500	1.111.386.997.177
Jumlah		9.487.292.016.600	2.205.084.068.287
Total PMDN +PMA		9.899.127.619.436	11.280.326.526.268

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2017.

Pada periode Januari-Desember 2017, Kabupaten Sumbawa Barat mencapai realisasi tertinggi sebesar Rp.6,713 Trilyun atau 59,51 persen. Posisi tertinggi kedua Kabupaten Lombok Barat Rp.2,563 Trilyun atau 22,72 persen disusul Kota Mataram Rp.743,134 Milyar atau 6,59 persen. Dibandingkan periode Januari-Desember Tahun 2016, realisasi investasi tertinggi tercatat di Kabupaten Sumbawa Barat mencapai Rp.6,692 Trilyun atau 67,61 persen, posisi tertinggi kedua Kabupaten Lombok Utara Rp.814,406 Milyar atau 8,23 persen disusul Kabupaten Lombok Tengah Rp.708,328 Milyar atau 7,16 persen. Realisasi terendah pada periode Januari-September 2017 Kota Bima Rp.3,900 Juta kemudian Kabupaten Dompu Rp.3,626 Milyar atau 0,03 persen dan Kabupaten Bima Rp.6,318 Milyar atau 0,06 persen. Realisasi investasi periode Januari-Desember Tahun 2017 berdasarkan Kabupaten/Kota disajikan pada grafik berikut.

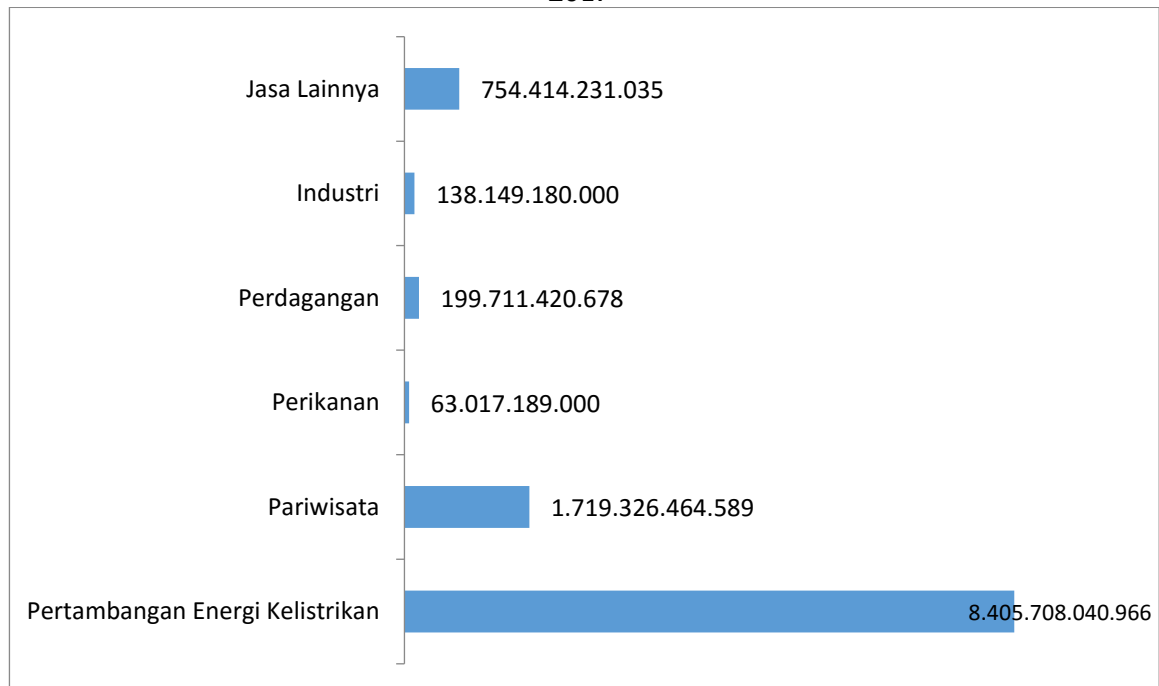
Gambar 2.17 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Periode Januari-Desember 2017



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2017

Kontribusi Sektor Pertambangan dan Sektor Pariwisata mendominasi realisasi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Catatan sampai akhir Tahun 2017, sektor pertambangan/energi/listrik mencatat realisasi tertinggi Rp.8,406 Trilyun atau 74,52 persen. Posisi kedua sektor Pariwisata Rp.1,719 Trilyun atau 15,24 persen disusul Jasa Lainnya Rp.754,414 Milyar atau 6,69 persen. Dibandingkan periode yang sama Januari-Desember Tahun 2016, realisasi investasi tertinggi tercatat pada sektor pertambangan/energi/listrik sebesar Rp.6,632 Trilyun atau 67 persen. Posisi kedua sektor pariwisata Rp.2,109 Trilyun atau 21,31 persen disusul jasa lainnya Rp.607,958 Milyar atau 6,14 persen. Realisasi terendah pada Januari-Desember 2017 pada sektor Perikanan Rp.63,017 Milyar kemudian sektor industri Rp.138,1149 Milyar. Realisasi investasi menurut sektor periode Januari-Desember Tahun 2017 disajikan pada grafik berikut.

Gambar 2.18 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Menurut Sektor Januari-Desember 2017



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2017

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mampu memberikan kepastian waktu proses penyelesaian setiap jenis perizinan yang dilakukan sesuai dengan standar perizinan. Jenis perizinan dan waktu penyelesaiannya Tahun 2017, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.121 Jenis Perizinan dan Waktu Penyelesaian Perizinan Tahun 2017

NO	JENIS PERIZINAN	WAKTU (HARI)
1	Izin Prinsip Penanaman Modal	3
2	Izin Usaha Penanaman Modal	3
3	Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal	3
4	Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal	3
5	Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal	3
6	Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal	3
7	Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	3
8	Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal	3

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2017.

Jumlah izin dan non izin yang diterbitkan tahun 2017, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 122 Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan Tahun 2016-2017

NO.	BIDANG PERIZINAN	2016	2017
1	Penanaman Modal	6	10
2	Perikanan Dan Kelautan	208	400

NO.	BIDANG PERIZINAN	2016	2017
3	Pertanian	3.449	2.836
4	Koperasi dan UMKM	7	2
5	Pekerjaan Umum	2	1
6	Kehutanan	64	19
7	Lingkungan Hidup dan Penelitian	13	25
8	Perindustrian	1	0
9	Perdagangan	1	2
10	Perkebunan	5	2
11	Hubkominfo	11	26
12	Pertambangan	209	313
13	Perencanaan Pembangunan Daerah	8	12
14	Kesehatan	7	14
15	Pariwisata	-	2
16	Pertanahan	-	-
Total		3.991	3.664

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2017.

Guna meningkatkan investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi para Investor antara lain melalui : Perijinan yang tidak dipungut biaya, mempermudah prosedur dan waktu pengurusan izin investasi, sinkroisasi dan harmonisasi mekanisme serta mempermudah prosedur yang sama dalam pemberian izin pelaksanaan investasi dimasing-masing kabupaten/kota melalui Forum PTSP, dan memfasilitasi perusahaan yang bermasalah di lokasi kegiatan melalui Satgas Penanaman Modal.

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang penanaman modal, merujuk pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dilaksanakan 7 pelayanan dengan indikator capaian tahun 2016 dan tahun 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.123 Pelaksanaan Sub Urusan Bidang Penanaman Modal Tahun 2016-2017

NO	PELAYANAN	INDIKATOR	2016	2017	
				TARGET	CAPAIAN
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/ Bidang Usaha Unggulan	8 sektor	8 sektor	8 sektor
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional /asing	1 kali	1 kali	1 kali
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang usaha penanaman modal provinsi	6 kali	5 kali	6 kali
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Prosentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui PTSP	100%	100%	100%

NO	PELAYANAN	INDIKATOR	2016	2017	
				TARGET	CAPAIAN
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali dalam setahun	1 kali	1 kali	1 kali
6.	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	100%	100%
7.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 kali	1 kali	1 kali

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2017.

Realisasi pencapaian pelayanan bidang Penanaman Modal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB periode Januari sampai dengan Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Kebijakan Penanaman Modal

Indikator pelayanan dasar kebijakan penanaman modal adalah tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan. Tahun 2017 tersedia informasi peluang usaha sebanyak 8 sektor yaitu sektor pariwisata, peternakan, pertambangan dan energi, perikanan dan kelautan, perkebunan, pertanian dan industri. Selain itu disediakan informasi peluang investasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (SAMOTA) dan Kawasan Bandar Kayangan Lombok "Global Hub". Informasi peluang usaha tersebut disajikan dalam bentuk buku, brosur, leaflet dan DVD.

2. Kerjasama Penanaman Modal

Target pelayanan dasar kerjasama penanaman modal adalah terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah provinsi dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat Kabupaten dengan Pengusaha tingkat Provinsi/Nasional sebanyak 1 (satu) kali per tahun. Tahun 2017 telah dilaksanakan fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan Pengusaha dalam negeri dalam bentuk pendataan keminatan dan penyusunan direktori data UMKM Potensial dan usaha besar terseleksi.

3. Promosi Penanaman Modal

Promosi penanaman modal dilakukan melalui promosi peluang penanaman modal provinsi. Realisasi tahun 2017 sebanyak 6 kali yaitu NTB Expo di Mataram, GPID di Padang, Jatim Trade di Surabaya, MIATTEX Expo di Mataram, Bali TITTEX Expo di Bali, Invesda Expo di Yogyakarta.

4. Pelayanan Penanaman Modal

Indikator pelayanan penanaman modal adalah terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang terlaksana 100 persen di tahun 2017.

5. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pelayanan dasar pengendalian penanaman modal dilakukan dalam bentuk bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia. Tahun 2017 terealisasi 100 persen yang dilaksanakan berupa bimbingan teknis tata cara penyampaian laporan kegiatan penanaman modal kepada 50 peserta terdiri dari PDKPM se-NTB dan perwakilan perusahaan baik PMDN maupun PMA.

6. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Indikator ini diukur dengan terimplementasikannya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang telah terealisasi 100 persen di tahun 2017. Jenis pelayanan SPIPISE yang telah diimplementasikan yaitu izin prinsip penanaman modal, izin usaha penanaman modal dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Realisasi tahun 2017, telah menerbitkan sebanyak 10 izin prinsip PMDN. Selain itu, penyampaian LKPM dapat dilakukan secara online, tercatat sebanyak 1.088 perusahaan yang melaporkan kegiatan penanaman modalnya melalui SPIPISE.

7. Penyebarluasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal

Realisasi tahun 2017, telah dilaksanakan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2015 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Gubernur Nomor 35 tahun 2016 tentang kewajiban kepesertaan program jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat dalam Pemberian Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan penanaman modal yang diselenggarakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada tahun 2017 termasuk dalam kategori baik. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2017 sebesar 80,93 termasuk dalam kriteria Baik yang berada pada kisaran 62,51- 81,25.

13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kegiatan penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan bagi pemuda menggunakan dana APBD diikuti oleh 40 orang pemuda (8 kelompok) yang tergabung dalam wirausaha pemula. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, wawasan dan keterampilan sehingga dapat merangsang/mendorong munculnya kelompok wirausaha baru.

Tingginya penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan kaum muda dan besarnya dampak penggunaan narkoba tersebut bagi kualitas sumberdaya manusia (pemuda) maka Dinas Pemuda dan Olahraga merasa penting untuk dilakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba dengan sasaran kegiatan adalah pemuda, mahasiswa dan pelajar. Melalui kegiatan ini diharapkan pemahaman dan kesadaran pemuda untuk bersama-sama berupaya mencegah dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba; membentuk kader inti anti narkoba di sekolah-sekolah dan komunitas pemuda; membentuk group/kelompok diskusi melalui media sosial dikalangan pemuda paska kegiatan.

Tahun 2017, Dinas Pemuda Olahraga melaksanakan ToT pendewasaan usia perkawinan yang diikuti oleh 30 orang pemuda lintas komunitas dikemas dalam bentuk pembekalan sehari dan dilanjutkan dengan praktik lapangan dalam bentuk sosialisasi ke sekolah-sekolah sasaran yang berlokasi di Tete Batu Kabupaten

Lombok Timur sebanyak 3 sekolah sasaran. Kegiatan ini diharapkan dapat membuka wawasan para pemuda akan bahaya dan dampak social yang akan diterima apabila mereka menempu perkawinan dini. Kegiatan ini juga membentuk kader inti pendewasaan Usia Perkawinan yang terdiri dari 30 orang pemuda lintas komunitas. Kader inti inilah yang nantinya akan menjadi speaker bagi kelompok pemuda lainnya terutama kelompok pemuda yang rentan menikah dini agar menghindari menikah dini dan lebih memilih untuk melanjutkan sekolah atau melakukan kegiatan produktif lainnya.

Seleksi Paskibraka adalah salah satu kegiatan kepemudaan yang dimulai dari seleksi tingkat sekolah, tingkat kota, tingkat provinsi sampai tingkat nasional yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman seleksi yang dikeluarkan oleh PPI pusat. Kegiatan ini bertujuan untuk memilih 28 orang calon Paskibra yang akan bertugas ditingkat Provinsi NTB dan memilih 2 orang terbaik (1 putra dan 1 putri) untuk menjadi calon anggota paskibraka tingkat nasional. Siswa yang diseleksi sebanyak 400 orang dengan ketentuan masing-masing kabupaten kota sebanyak 40 orang akan diseleksi menjadi 34 orang pada seleksi tahap pertama dan 30 orang pada seleksi tahap kedua. Dari hasil seleksi anggota paskibraka 30 orang ini akan dipilih 2 orang terbaik untuk bertugas pengibaran bendera di Istana Merdeka Jakarta. Pemantapan bagi anggota paskibraka yang terpilih sebanyak 28 orang dengan melibatkan para pelatih dari Purna Paskibraka NTB dan TNI/POLRI. Mereka ditempa untuk mempersiapkan pasukan pengibaran bendera pusaka dalam rangka upacara peringatan hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2017. Pengiriman anggota PASKIBRAKA ke Tingkat Nasional Tahun 2017 atas nama:

1. Agus Putra Pratama Yudha asal Kabupaten Bima, terpilih sebagai pengibar bendera saat upacara Pengibaran Bendera Pusaka tanggal 17 Agustus 2017 di Istana Negara.
2. Fina Widianingrum asal Kabupaten Lombok Timur.

Organisasi kepemudaan yang bernaung dibawah KNPI di NTB telah memberikan dampak positif bagi pemuda. Organisasi tersebut menjadi wadah berkumpul dan berkegiatan para pemuda sekaligus menyalurkan aspirasi dan kreatifitas positif. Hal ini dapat merangsang pemuda yang lain untuk melakukan hal yang positif juga. Tahun 2017 telah dilaksanakan workshop kepemudaan yang bekerjasama dengan KNPI NTB. *Output* dari workshop ini adalah menertibkan organisasi dan kepengurusan organisasi kepemudaan yang bernaung dibawah KNPI, dan menyusun rencana aksi kepemudaan di NTB.

Kepemimpinan dalam sebuah organisasi kepemudaan memegang peranan yang sangat penting, karena didalamnya tidak hanya dibutuhkan *knowledge* tetapi juga *skill* atau seni dalam memimpin, apalagi yang dipimpin adalah kaum muda yang masih memiliki idealisme dan semangat yang tinggi untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Kegiatan pelatihan kaderisasi kepemimpinan pemuda tingkat dasar yang dilaksanakan di bumi perkemahan Lembah Madani Lombok Barat dengan peserta adalah para tokoh pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai organisasi kepemudaan berjumlah 100 orang sepulau Lombok dikemas dalam bentuk perkemahan. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa dan semangat

kepemimpinan, wawasan kebangsaan dan nasionalisme dikalangan generasi muda, meningkatkan pemahaman generasi muda dalam melihat permasalahan masa kini dan mempelajari manajemen konflik. Adapun unsur yang terlibat adalah Penggiat Sekolah Perjumpaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, Kesbangpoldagri NTB, Dispora dan unsure penggiat wirausaha.

Kegiatan Pendidikan Dasar Militer Resimen Mahasiswa Rinjani NTB yang diikuti oleh Calon Resimen Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta se NTB sebanyak 144 orang dengan dibekali materi ruangan dan materi lapangan dari berbagai instansi dan satuan yang berkompeten seperti Korem 162/WB, Polda NTB, Dispora NTB, Lanud Rembiga, Polairut, IARMI NTB, BNN, BPBD, BASARNAS dan DAMKAR. Kegiatan pendidikan dasar militer resimen mahasiswa bertujuan untuk membangun kapasitas dan kaderisasi Menwa sebagai pasukan cadangan nasional Indonesia, dan membina kader pembangunan bangsa sesuai dengan Panca Dharma Satya Menwa Indonesia.

Workshop Satuan Karya Pramuka Nusa Tenggara Barat diikuti oleh 80 orang anggota pramuka yang terdiri dari pimpinan saka, instruktur saka, dewan saka, Kwartir Daerah, Kwartir Cabang, Dewan Kerja Daerah dan Dewan Kerja Cabang se Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka membangun komitmen bersama elemen Gerakan Pramuka untuk merevitalisasi gerakan pramuka sebagai sebuah potensi sumberdaya manusia dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan iman dan taqwa bagi para generasi muda telah dilaksanakan pelatihan dan pengembangan pemuda dengan melibatkan Pengurus Remaja Masjid, Pengurus OSIS, Mahasiswa, Organisasi Kepemudaan, Purna Program Kepemudaan, Pramuka, dan BEM. Pelatihan ini menitikberatkan kepada peningkatan kompetensi spiritual pemuda. Melalui pelatihan ini diharapkan akan memperkaya khasanah keimanan dan ketaqwaan pemuda, disamping ada proses kaderisasi yang dialami melalui kreatifitas dan keaktifannya di organisasi kepemudaan atau organisasi masyarakat pada umumnya.

Rapat kerja dan pembinaan karang taruna dirangkaikan dengan penyuluhan narkoba bagi pemuda bertujuan untuk membentengi generasi muda dari penyalahgunaan narkoba dan menyiapkan rencana aksi karang taruna untuk pembinaan generasi muda tahun 2018. Program kerja/rencana aksi bidang kepemudaan oleh organisasi karang taruna yang meliputi pencegahan timbulnya masalah-masalah social khususnya di kalangan generasi muda, upaya peningkatan usaha ekonomi produktif, menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan pengembangan SDM generasi muda.

Melihat kondisi yang dihadapi oleh bangsa ini, kepeloporan pemuda dituntut untuk dapat melakukan terobosan-terobosan yang dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi upaya mengatasi masalah dan tantangan yang dihadapi daerah. Dari kondisi riil yang ada, kepeloporan tahun 2017 ini difokuskan pada 5 bidang kepeloporan pemuda yaitu:

- a) Pendidikan
- b) Sosial budaya dan pariwisata

- c) Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan
- d) Pangan
- e) Inovasi teknologi

Tahun 2017 telah dilakukan seleksi calon pemuda pelopor yang memiliki karya nyata yang berkualitas di bidang kepeloporan didasarkan pada kecerdasan, kreativitas, kepribadian, jiwa gotong royong dan kemandirian pada bidang-bidang yang telah ditetapkan. Peserta yang mengikuti kegiatan sesuai bidang kepeloporannya sebagai berikut :

I. Bidang Pendidikan

No	Nama	Alamat	Kabupaten/Kota
1	Salahudin	Dusun Rato, Desa Sangia Kecamatan Sape	Kabupaten Bima
2	Jono Pratama	Dusun Lape Atas	Kabupaten Sumbawa
3	Rokhani, ST, S.Gi	Desa Seminar Salit Kecamatan Brang Rea	Kabupaten Sumbawa Barat
4	Arta Sasmita	Galang Bulan Jelantik Kecamatan Jonggat	Kabupaten Lombok Tengah
5	M. Juni Hendrajid	Babakan Kecamatan Mataram	Kota Mataram

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2017

II. Bidang Sosial Budaya dan Pariwisata

No	Nama	Alamat	Kabupaten/Kota
1	Margono Dwi Ariwibawa	Desa lunyuk, Kecamatan Lunyuk	Kabupaten Sumbawa
2	Khairuddin, S.Pd	Lingkungan Bosok, Kecamatan Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
3	Lukman Hadi Irawan	Dusun Mandar, desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaaya	Kabupaten Lombok Timur
4	Farhan Syadli	Desa Kerato, Kecamatan Unter Iwes	Kabupaten Sumbawa
5	Johari	Desa Monggo Kecamatan Madapangga	Kabupaten Bima

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2017

III. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

No	Nama	Alamat	Kabupaten/Kota
1	Irwansyah	Dusun Marente Beru, Desa Marente Kecamatan Alas	Kabupaten Sumbawa
2	Farid Fadli	Dusun Wodi, Desa Bakajaya, Kecamatan Woja	Kabupaten Dompu
3	Arya Dirawan	Desa Lanatan Batu Kliang Utara	Kabupaten Lombok Tengah

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2017

IV. Bidang Pangan

No	Nama	Alamat	Kabupaten/Kota
1	Zulkifli	Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang	Kabupaten Sumbawa Barat
2	Mursidy	Dusun Pesanggrahan Kecamatan Montong Gading	Kabupaten Lombok Timur
3	Nehrun, Lc, MA	Jalan Lintas Sumbawa Tolonggeru Kecamatan Madapangga	Kabupaten Bima

4	Ahmad Ritaudin	Dusun Batu Kuta Paroa, Kecamatan Narmada	Kabupaten Lombok Barat

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2017

V. Bidang Inovasi Teknologi

No	Nama	Alamat	Kabupaten/Kota
1	Badri, S.Pd	Dusun Sukamulia, Desa Kecamatan Pringgabaya	Kabupaten Lombok Timur
2	Irvan Maulana	Dusun Kanar Kecamatan Labuan Badas	Kabupaten Sumbawa
3	Novi Irwansyah	Desa Tepas Kecamatan Brang Rea	Kabupaten Sumbawa Barat
4	Eko	Babakan, Kecamatan Cakranegara	Kota Mataram

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2017

Prestasi dan kegiatan pemuda NTB dalam event nasional tahun 2017 sebagai berikut:

1. Pemilihan Pemuda Pelopor Tingkat Nasional, Nusa Tenggara Barat berhasil meraih prestasi sebagai berikut:
 - a. Irwansyah, SP asal Kabupaten Sumbawa sebagai Juara III Nasional Bidang Pengelolaan SDA dan Lingkungan;
 - b. Badri S.Pd asal Kabupaten Lombok Timur menjadi Juara III Nasional Bidang Inovasi dan Teknologi.
2. Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN)
 - a. Dewi Wulandari Program SYEAP, (Kapal Pesiar Jepang dan Negara ASEAN)
 - b. Mila Rizkiana Program AISEP, (Asean-Indian Student Exchange Program dengan tujuan Negara India)
3. Kapal Pemuda Nusantara (KPN) Tahun 2017, (sail Sabang) perjalanan mulai tanggal 15 s.d 9 November 2017 (Teluk Jakarta – Batam – Pelabuhan Belawan – Medan – Banda Aceh). Puncak kegiatan adalah bersama Wakil Presiden RI. H.M. Jusuf Kalla dengan melakukan peresmian Jembatan Segitiga di Sabang. Pemuda NTB yang berpartisipasi dalam kegiatan diatas adalah:
 - a. Sukarhianto
 - b. Feriyadin
 - c. Devky Mayzara

Upaya meningkatkan prestasi atlet dalam kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional terus digalakkan, melalui program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga. Berbagai kompetisi olahraga diadakan guna meningkatkan intensitas masyarakat dalam olahraga prestasi. Kegiatan POPNAS tahun 2017 dilaksanakan di Semarang Jawa Tengah dan PEPARPENAS di Solo, Jawa Tengah. Pada kegiatan penyelenggaraan kompetisi olahraga terdapat beberapa event Olahraga Pelajar Tingkat Nasional dan Internasional yang diikuti antara lain:

1. Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XIV di Semarang Jawa Tengah pada tanggal 10 – 21 September 2017. Kontingen POPNAS Provinsi Nusa Tenggara Barat berjumlah 151 orang yang terdiri dari : 101 atlet, 19 pelatih, dan 31 ofisial. Provinsi NTB mengikuti 6 dari 10 Cabang Olahraga yang dipertandingkan yaitu: Atletik, Pencak Silat, Taekwondo, Karate, Senam, Renang, Tinju, Tarung

Derajat, Volly Indoor dan Volly Pasir. Pada POPNAS XIV di Semarang Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat memperoleh prestasi 4 medali emas, 5 medali perak, dan 6 medali perunggu dan menempati peringkat 13 dari 34 Provinsi peserta.

2. Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARPENAS) VII Tahun 2017 di Solo Jawa Tengah pada tanggal 8 – 14 November 2017. Kontingen NTB berjumlah 36 Orang terdiri dari, 26 orang Atlet dan 10 orang Pelatih/Pendamping yang berlomba di 6 (enam) Cabang olahraga yaitu : Atletik, Bulu Tangkis, Boccia, Catur, Renang, dan Tenis Meja. Pada PEPARPENAS VII Tahun 2017 NTB memperoleh prestasi : 2 medali emas, 5 medali perak, dan 2 medali perunggu, menempati peringkat 14 dari 30 provinsi peserta.

Prestasi yang diraih pada tingkat nasional dan internasional dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.124 Perolehan Medali Event Olahraga Tahun 2017

NO	KEGIATAN	CABOR	PEROLEHAN MEDALI		
			EMAS	PERAK	PERUNGGU
1	POPNAS XIV SEMARANG	Atletik	2	3	1
		Pencak Silat	1	1	0
		Taekwondo	0	0	2
		Senam	0	0	0
		Tarung Derajat	1	0	3
		Karate	0	1	0
	JUMLAH		4	5	6
2	PEPARPENAS VII SOLO	Atletik	2	3	0
		Catur	0	1	0
		Bocciaa	0	1	1
		Bulu Tangkis	0	0	1
	JUMLAH		2	5	2
3	Kejurnas PPLP di Papua	Atletik	2	1	1
4	ASEAN SCHOOL di Singapura	Atletik	0	3	0
5	Kejurnas PPLP di NTB	Pencak Silat	3	1	2
6	Kejurnas PPLP di Manado	Taekwondo	0	0	2
7	Kejurnas PPLP di Makasar	Volly Pasir	0	0	1
	JUMLAH		5	5	6

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi NTB, 2017

14. STATISTIK

Pelaksanaan penyelenggaraan bidang statistik yang merupakan salah satu bidang yang ada di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB didasarkan pada regulasi :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebutuhan Informasi Publik;
6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi NTB 2013-2018;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB;

Sejak tahun 2017 Bidang Statistik sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yaitu:

1. Pada Januari 2017, Bidang Statistik melakukan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB dalam hal penguatan data statistik sektoral di tiga seksi, yaitu seksi Ekonomi, Sosial, dan Sumber Alam (SDA). Kerjasama tersebut dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis yang dilaksanakan selama tiga hari di Kantor Balai ITE yang diikuti oleh Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan 45 Perangkat Daerah. Dalam kegiatan tersebut, BPS menjadi narasumber;
2. Melaksanakan Forum Data dengan 45 Perangkat Daerah dalam penguatan data sektoral NTB Dalam Angka;
3. Melakukan *Momemrandum of Understanding* (MoU) dengan Bappeda Provinsi NTB dan BPS Provinsi NTB untuk penguatan data sektoral NTB Satu Data;
4. Terlibat secara rutin pada acara *Press Release* data yang dilaksanakan oleh BPS Provinsi NTB;
5. Penyusunan sembilan buku yang terbagi menjadi tiga jenis, yaitu tiga buku Statistik Ekonomi, tiga buku Statistik Sosial, dan tiga buku Statistik SDA dan Infrastruktur. Adapun buku-buku yang dibuat adalah "Data Statistik Potensi Sektor Pertanian di Provinsi NTB", "Data Statistik Potensi Sektor Desa di Provinsi NTB", dan "Data Statistik Potensi Sektor Perindustrian dan Perdagangan di Provinsi NTB". Sementara buku terkait Statistik Sosial berjudul "Data Statistik Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Provinsi NTB", "Data Statistik Perkembangan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan", dan "Data Statistik Lembaga Pendidikan PAUD NI-HI di Provinsi NTB". Buku terkait SDA dan Infrastruktur berjudul "Data Statistik Potensi Sumber Daya Alam di Provinsi NTB", "Data Statistik Areal Hutan Terlindungi dan Dikonservasi di Provinsi NTB", dan "Data Statistik Infrastruktur Wilayah di Provinsi NTB".

15. PERSANDIAN

Pada era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, istilah persandian merupakan semua bentuk kegiatan pengamanan informasi rahasia yang dilaksanakan berdasarkan konsep, teori dari teknik-teknik penyandian (enkripsi), serta ilmu pendukung lain secara metodologis, konsisten dan sistematis. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bidang persandian memiliki tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola persandian, pengamanan persandian dan informasi, dan sistem komunikasi intra pemerintah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan bidang Persandian menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang wewenang penyelenggaraannya diturunkan ke daerah. Sehubungan dengan penyelenggaraan bidang Persandian di daerah, telah ditetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian. Berdasarkan undang-undang tersebut, urusan Persandian di daerah mengalami perubahan struktur organisasi serta tugas dan fungsi karena terdapat penambahan uraian tugas berupa persandian untuk pengamanan informasi.

Guna mengoptimalkan penyelenggaraan persandian, meningkatkan kualitas pelayanan persandian, membentuk jejaring/networking, mengembangkan kompetensi SDM Sandi di daerah melalui skill coaching dan counseling, transfer knowledge dan aksi terkait penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di daerah, maka dalam rangka mengoptimalkan persandian, Lembaga Sandi Negara menugaskan 2 orang Pegawai Lembaga Sandi Negara pada Dinas maupun Unit Teknis Persandian ke 34 Provinsi selama 3 bulan. Terkait penugasan tersebut setiap tim optimalisasi wajib membuat laporan akhir kegiatan optimalisasi penyelenggaraan persandian di daerahnya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Penyelenggaraan bidang persandian dilaksanakan oleh Pusat Data dan Elektronik (PDE) Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi NTB, namun dengan ditindaklanjutinya Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan sejak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang didukung dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 maka penyelenggaraan bidang persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Adapun Dasar pelaksanaan tugas kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Persandian di Provinsi NTB Tahun 2017, antara lain:

1. Program Kerja Deputy Bidang Pembinaan dan Pengendalian Persandian Lembaga Sandi Negara Tahun Anggaran 2017;

2. Surat Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1160/LSN/D1/PB.03.06/06/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Rencana Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Persandian Daerah melalui Penugasan Lulusan STSN pada Pemerintah Provinsi;
3. Surat Perintah Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1161/D1/07/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Penugasan Kegiatan Optimalisasi Penyelenggaraan Persandian di Provinsi NTB.

Untuk kegiatan kirim terima berita sandi dilaksanakan di ruangan Kasa, sementara kegiatan operasional dukungan persandian dilaksanakan ketika ada rapat terbatas dan kegiatan yang memerlukan dukungan jamming. Selain itu kegiatan kontra penginderaan untuk sterilisasi dilaksanakan ke ruangan pimpinan daerah yaitu Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah serta beberapa ruangan pejabat yang meminta disterilisasi. Pelaksanaan kegiatan sandi pada tahun 2017 yang dilaksanakan adalah kirim terima berita melalui email sanapati. Untuk kegiatan operasional dukungan persandian belum pernah dilakukan dikarenakan tidak adanya permintaan untuk melakukan jamming. Kontra penginderaan tidak dapat dilakukan karena adanya penarikan peralatan oleh Lembaga Sandi Negara, sehingga jika terdapat permintaan sterilisasi tidak dapat dilakukan langsung oleh personil sandi Provinsi.

Namun peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di jajaran Pemerintah Provinsi NTB belum ada. Dalam rangka menerapkan persandian untuk keamanan informasi, Pemerintah Provinsi NTB sedang mengajukan rancangan Peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan mengacu pada Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kebijakan tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pernah dibuat dan dilaksanakan oleh Biro Umum, namun sampai dengan saat ini SOP pada Bidang Persandian dan LPSE Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik untuk pelayanan persandian belum ada. Sementara itu sebagai wujud komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah, maka telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Layanan Pengadaan Secara Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) merupakan salah satu indikator utama (IKU) RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, digunakan untuk mengukur kinerja Program Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, khususnya dibidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Esensi dari keberadaan LPSE sesungguhnya adalah untuk mewujudkan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang transparan, efektif, efisien, adil dan akuntabel serta bebas dari praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme dan persaingan usaha tidak sehat lainnya. Dalam rangka pelayanan, penyelenggara Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) telah disusun Standar Pelayanan (SP), Standard Operating Procedure (SOP) dan Penyusunan Program Kerja/Rencana Kegiatan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2017, kegiatan sistem administrasi elektronik, pada hakekatnya meliputi kegiatan penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan/sistem elektronik (LPSE), pengaturan bandwidth dan pelayanan pendaftaran/ pembuatan/ pembaharuan admin agency, dengan hasil-hasil sebagai berikut:

- Pengelolaan dan pemeliharaan server LPSE serta sarana pendukungnya.
- Pembuatan data *agency* Perangkat Daerah maupun instansi lain kesistem SPSE. Perangkat Daerah yang telah membuat *admin agency* sebanyak 229.
- Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
- Pengarsipan surat LPSE yang terkait dengan penggunaan/pembuatan akun baik akun *Admin Agency* dan Admin SiRUP.

Hingga akhir tahun 2017 sudah terdaftar 122 admin SiRUP Perangkat Daerah/UPTD yang ada di Pemerintahan Provinsi NTB dari 115 admin Perangkat Daerah/KPA yang ada pada aplikasi SiRUP LPSE Provinsi NTB. Sementara itu hingga akhir tahun 2017 baru 51 Perangkat Daerah /UPTD (41,35 persen) yang sudah meng-*input* data di aplikasi SiRUP LPSE, sedangkan sisanya sebanyak 64 SKPD/UPTD (58,65 persen) belum meng-*input* data SiRUP untuk pengadaan baik melalui penyedia ataupun swakelola sesuai jumlah admin PA/KPA di masing-masing Satker PA/KPA yang telah terdaftar di aplikasi SiRUP LPSE Provinsi NTB. Sementara itu masih terdapat 10 Perangkat Daerah /KPA Perangkat Daerah /UPTD yang belum melakukan pendaftaran admin SiRUP Perangkat Daerah /KPA di masing-masing Satker yang ada atau sekitar 8,1 persen..

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap admin SiRUP yang terdaftar di aplikasi ditemukan adanya admin SiRUP tidak aktif yang cukup tinggi hal ini disebabkan karena pengisian SiRUP di masing-masing Perangkat Daerah dilakukan secara terpusat, sementara beberapa UPTD di beberapa Perangkat Daerah sudah terlanjur melakukan registrasi admin SiRUP untuk masing-masing Satker yang ada di Perangkat Daerah /UPTD.

Untuk melakukan penertiban admin SiRUP yang ada di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB, maka LPSE Provinsi NTB untuk tahun 2018 akan melakukan penertiban admin SiRUP PA/KPA dengan menetapkan 1 orang admin SiRUP di masing-masing Perangkat Daerah melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh masing-masing kepala Perangkat Daerah.

Tabel 2.125 PA/KPA yang telah memiliki admin SiRUP PA/KPA (telah/belum melakukan peng-RUP)

No	Id	Nama Satker	Penyedia	Pagu Penyedia (juta)	Swakelola	Pagu Swakelola (juta)	Total Paket	Total Pagu
1	77814	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB	36	4152	320	25355	356	29507
2	77557	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB	514	19700	0	0	514	19700
3	109531	Uptd Layanan Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus - Pendidikan	2	100	0	0	2	100

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Id	Nama Satker	Penyedia	Pagu Penyedia (juta)	Swakelola	Pagu Swakelola (juta)	Total Paket	Total Pagu
		Layanan Khusus Sumbawa Barat						
4	110141	UPTD Layanan Dikmen dan PKPLK Sumbawa	4	100	73	1150	77	1250
5	100986	Dinas Perumahan Dan Permukiman Provinsi NTB	520	110375	2	21	522	110396
6	87395	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi NTB	58	2647	127	1082	185	3730
7	81002	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	116	8011	69	2951	185	10962
8	74977	Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB	1	565	0	0	1	565
9	69586	Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi	14	6248	1	4	15	6252
10	107507	Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok	89	19816	24	8001	113	27818
11	70892	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	57	12886	32	3032	89	15918
12	70550	Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi NTB	197	270499	27	507	224	271007
13	79549	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	32	25426	1	7972	33	33398
14	71229	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB	16	1885	32	5577	48	7463
15	100697	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	43	124935	42	60179	85	185115
16	70751	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	46	27172	159	4007	205	31180
17	98408	Sekretariat Daerah Provinsi NTB	59	3426	30	1148	89	4575
18	72320	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	42	2959	0	0	42	2959
19	79323	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	25	6479	136	4927	161	11406
20	76761	Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi NTB	57	4446	0	0	57	4446
21	71018	Inspektorat Provinsi NTB	11	128	1	150	12	278
22	74340	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi NTB	209	610134	1	2000	210	612134
23	109500	UPTD Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus - Pendidikan Layanan Khusus Lombok Timur	4	100	67	1278	71	1378
24	77861	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB	23	1567	39	4244	62	5812

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Id	Nama Satker	Penyedia	Pagu Penyedia (juta)	Swakelola	Pagu Swakelola (juta)	Total Paket	Total Pagu
25	101968	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB	3	526	0	0	3	526
26	107652	Balai Informasi Infrastruktur Wilayah	1	109	0	0	1	109
28	70223	Dinas Peternakan & Kesehatan Hewan	198	30177	0	0	198	30177
29	98283	Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Provinsi NTB	54	2106	102	2288	156	4395
30	110021	Balai Sosial Perlindungan Dan Petirahan Anak "Sasambo Matupa"	1	300	0	0	1	300
31	76049	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Provinsi NTB	28	2277	21	975	49	3252
32	100666	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	129	114905	99	1848	228	116753
34	69585	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	45	172419	10	6657	55	179076
35	74346	Balai Pengujian Material Konstruksi	13	368	1	65	14	433
36	72425	Dinas Perindustrian Provinsi NTB	55	5126	0	0	55	5126
37	71556	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	145	13788	23	3726	168	17515
38	99750	Dinas Perdagangan Provinsi NTB	58	11418	211	7125	269	18544
39	85857	Sekretariat Korpri Provinsi NTB	0	0	0	0	0	0
40	70554	Dinas Sosial Provinsi NTB	27	9756	0	0	27	9756
41	92594	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	107	10580	0	0	107	10580
42	77876	Dinas Pariwisata Provinsi NTB	119	16535	248	14819	367	31354
43	82684	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	7	125	41	5434	48	5560
44	100835	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB	3	892	37	4501	40	5394
45	77723	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB	65	5952	0	0	65	5952
46	106576	Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir	111	30776	12	17475	123	48252
47	86408	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri	8	1201	37	1724	45	2925
48	77569	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	54	3289	0	0	54	3289
49	110205	Museum Negeri NTB	9	975	79	1590	88	2565
50	79697	Dinas Koperasi Dan Umkm Provinsi NTB	2	5365	181	18506	183	23872
51	109950	Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Provinsi NTB	13	521	43	1045	56	1567

No	Id	Nama Satker	Penyedia	Pagu Penyedia (juta)	Swakelola	Pagu Swakelola (juta)	Total Paket	Total Pagu
52	74344	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok	1	10	2	9669	3	9679

Sumber: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, 2017.

Kegiatan pelayanan pendaftaran/registrasi dan verifikasi penyedia, pada dasarnya meliputi pelaksanaan pelayanan kepada penyedia yang terkait dengan :

- Pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
- Penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
- Verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
- Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE;
- Persetujuan atau penolakan pendaftaran pengguna SPSE;
- Pemberian penonaktifan *user id* dan *password* pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan/ULP berkaitan dengan daftar hitam perusahaan (*blacklist*).

Kegiatan layanan dan dukungan pengoperasian SPSE, Pada dasarnya meliputi kegiatan-Kegiatan pelayanan konsultasi dan pemberian pelatihan/ Bimbingan teknis kepada semua Stakeholder/Pengguna SPSE, baik panitia/ULP, Penyedia dan konsultan perorangan maupun Auditor/APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan masyarakat, serta pelayanan tindak lanjut atas keluhan dan pertanyaan dari stakeholder. Hasil pelaksanaan kegiatan yang dicapai:

- Penanganan Keluhan tentang Pelayanan Penanganan keluhan dan pertanyaan dari stakeholder SPSE.
- Pelayanan pelatihan serta konsultasi tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik, selain dilakukan dengan tatap muka langsung juga dilakukan secara online melalui fasilitas tanya jawab yang disediakan oleh website LPSE, email helpdesk LPSE (helpdesk-lpse@NTBProvinsigo.id) dan Aplikasi (*Trouble ticketing system*) TTS Helpdesk LPSE NTB sebagai tool untuk mencatat permasalahan-permasalahan atau gangguan yang timbul.

Proses Pelelangan yang dilakukan melalui SPSE dengan Lelang *E-Procurement* selama tahun 2017 adalah sebanyak 326 (tiga ratus dua puluh enam) paket lelang dengan sumber dana dari APBN maupun APBD. Paket lelang yang bersumber dari dana APBN sebanyak 21 (dua puluh satu) paket, sedangkan paket lelang dari sumber dana APBD sebanyak 305 (tiga ratus lima) paket lelang.

16. KEBUDAYAAN

Sejak tahun 2017, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, urusan bidang kebudayaan menjadi tanggungjawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Urusan bidang kebudayaan ini diselenggarakan oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan 2 UPTD-nya yaitu Taman Budaya dan Museum. Capaian kinerja Pembangunan daerah urusan bidang kebudayaan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018 diukur dengan indikator Pranata Adat yang Terbentuk, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.126 Pranata Adat Yang Terbentuk dari Tahun 2014-2017

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD 2013	2014	2015	2016	2017	
					TARGET	REALISASI
Pranata Adat Yang Terbentuk (lembaga)	10	54	53	93	50	50

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Indikator pranata adat adalah merupakan indikator yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan dan Pariwisata namun sejak tahun 2017 urusan bidang kebudayaan menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam RPJMD 2013-2018 telah ditetapkan target indikator di bidang kebudayaan yaitu terbentuknya 250 pranata adat dimana target per tahun yaitu 50 pranata adat selama 5 tahun periode RPJMD 2013-2018. Capaian untuk tahun 2016 adalah sebanyak 93 pranata adat sedangkan capaian untuk tahun 2017 adalah sebanyak 50 pranata adat. Capaian indikator untuk tahun 2017 sesuai target RPJMD yaitu 50 pranata adat.

Kinerja berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB bersama dengan Museum NTB dan Taman Budaya Provinsi NTB telah menampakkan hasil yang cukup memuaskan dengan tercapainya target jumlah pranata adat yang terbentuk. Sejatinnya pranata adat adalah nilai-nilai luhur nenek moyang yang telah ada, terpatri dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat NTB sehingga menjadi sebuah karakter budaya. Pranata adat yang terbentuk sampai akhir tahun 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.127 Pranata Adat yang terbentuk di Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017

No	Kabupaten/Kota	Pranata Adat (Lembaga)		
		2015	2016	2017
1.	Mataram	5	10	5
2.	Lombok Tengah	5	10	5
3.	Lombok Timur	5	10	5
4.	Lombok Barat	5	10	5
5.	Lombok Utara	5	10	5
6.	Sumbawa	5	10	5
7.	Sumbawa Barat	10	10	5
8.	Dompu	4	3	5
9.	Bima	4	10	5
10.	Kota Bima	5	10	5
	Jumlah	53	93	50

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendataan pranata adat adalah sulitnya mengumpulkan tokoh-tokoh adat. Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mengembangkan nilai-nilai budaya, nilai adat istiadat dan menjaga pranata adat yang ada di masyarakat adalah :

1. Memberikan bantuan alat kesenian kepada beberapa sanggar seni dan alat banjar kepada masyarakat banjar dengan demikian eksistensi adat istiadat diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal yang mana dapat mendorong terbentuknya lembaga pranata adat.
2. Melakukan inventarisasi cagar budaya yang tersebar di 10 kabupaten/kota untuk kemudian dapat dilakukan pelestarian terhadap cagar budaya tersebut;
3. Melibatkan secara aktif lembaga adat dalam berbagai event daerah serta memperbanyak wadah diskusi guna melestarikan dan mempertahankan adat budaya daerah.

1) UPTD Taman Budaya

Pada tahun 2017, UPTD Taman Budaya Provinsi NTB menyelenggarakan beberapa event bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Nilai-nilai seni budaya diperkenalkan kepada masyarakat melalui pagelaran dan pameran tetap, apresiasi film nasional, gelar seni pelajar, pagelaran musik kreatif dan beberapa event-event lain yang telah diselenggarakan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.128 Kalender kegiatan UPT Taman Budaya Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
1.	Festival Musik Tk. Provinsi	Taman Budaya Prov. NTB	16 – 18 Mei 2017
2.	Festival Tari Tk. Provinsi	Taman Budaya Prov. NTB	22 – 24 Mei 2017
3.	Pergelaran Tetap Pentas Seni Ramadhan	Islamic Center – Mataram	7 Juni 2017
4.	Festival Seni Tari ke Luar Daerah	Berau – Kalimantan Timur	12 – 14 Juli 2017
5.	Pergelaran Tetap Pentas Teater Modern	Taman Budaya Prov. NTB	20 Juli 2017
6.	Festival Musik ke Luar Daerah	Cilegon - Banten	2 – 6 Agustus 2017
7.	Olah Seni Semester I - 2017	Taman Budaya Prov. NTB	12 Agustus 2017
8.	Gebyar Seni Pelajar	Taman Budaya Prov. NTB	22 – 24 Agustus 2017
9.	Pameran Seni Rupa	Taman Budaya Prov. NTB	22 – 24 Agustus 2017
10.	Pergelaran Tetap Musik Kreatif	Taman Budaya Prov – NTB	23 Agustus 2017
11.	Pergelaran Tetap Sendra Tari	Taman Budaya Prov. NTB	14 Oktober 2017
12.	Festival Teater	Taman Budaya Prov. NTB	30 – 31 Oktober 2017
13.	Pergelaran Tetap Symphoni Tari dan Musik	Taman Budaya Prov. NTB	9 November 2017
14.	Festival Seni Lintas Etnik	Taman Budaya Prov. NTB	24 November 2017
15.	Olah Seni Semester II - 2017	Taman Budaya Prov. NTB	24 November 2017
16.	Pergelaran Musik Blues	Taman Budaya Prov. NTB	9 Desember 2017
17.	Pergelaran Tetap Konser Musik 59	Taman Budaya Prov. NTB	19 Desember 2017

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

2) UPTD Museum Negeri Provinsi NTB

Berbagai upaya melalui kegiatan pameran keliling museum, pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah melalui 7 event kesenian budaya daerah, pameran temporer museum, dan pengembangan kemitraan pengelolaan

kekayaan antar budaya telah mendorong minat masyarakat dan wisatawan mengenal kesenian dan kebudayaan NTB yang berimplikasi pada meningkatnya kunjungan ke Museum Negeri NTB. Jumlah pengunjung Museum Negeri NTB tahun 2017 mencapai 88.055 orang, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.129 Pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2013-2017

NO	JENIS PENGUNJUNG	TAHUN		
		2015	2016	2017
1	TK	5.251	4.400	11.438
2	SD	20.162	19.178	22.772
3	SLTP	7.583	8.746	16.398
4	SLTA	6.219	5.389	10.041
5	Mahasiswa	1.100	1.276	3.666
6	Peneliti	8	21	6
7	WTA (Wisatawan Asing)	3.229	3.162	1.667
8	RTD (Rombongan Tamu Daerah)	79	208	92
9	RTN (Rombongan Tamu Negara)	0	2.269	15
10	Pengunjung Umum	36.045	48.785	21.960
JUMLAH		79.676	93.434	88.055

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

Kalender kegiatan Museum Negeri NTB sepanjang tahun 2017 dalam rangka menarik perhatian pengunjung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.130 Kalender Kegiatan Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TEMPAT	WAKTU
1.	Lomba Cerdas Cermat Se-Pulau Sumbawa	Kabupaten Bima	7 April – 16 Mei 2017
2.	Lomba Busana Kartini, Lomba Menulis Surat Kartini, dan Menulis Artikel Tentang Museum	Museum Negeri NTB	15 Mei – 22 Mei 2017
3.	Lomba Sasambo, Pidato Bahasa Sasambo, Museum Bercerita, Lomba Seni Kriya, dan Lomba Koleksi Museum	Museum Negeri NTB	09 Juni – 20 Juli 2017
4.	Lomba Cerdas Cermat Se-Pulau Lombok	Museum Negeri NTB	14 Juli – 09 Agustus 2017
5.	Lomba Mewarnai Koleksi Museum Tingkat PAUD/TK	Islamic Centre NTB	06 – 18 September 2017
6.	Prosesi Adat Perkawinan Suku Sasak	Museum Negeri NTB	11 Oktober – 20 November 2017
7.	Lomba Replika Koleksi, Lomba Mewarnai, dan Festival Pepaosan	Museum Negeri NTB	07 – 13 November 2017
8.	Lomba Membaca Lontar, Hikayat, dan Mendalang	Museum Negeri NTB	30 November – 06 Desember 2017

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2017

17. PERPUSTAKAAN

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pemerintah provinsi di bidang perpustakaan dan arsip. Berbagai kegiatan dilakukan dalam rangka menarik minat dan budaya baca masyarakat, hal ini terlihat dari angka kunjungan ke Perpustakaan yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2017 mencapai 1.064.000 orang, melampaui target sebesar 990.000 orang, lebih banyak dibandingkan jumlah pengunjung tahun 2016 sebanyak 980.112 orang. Upaya menarik minat masyarakat untuk mengunjungi Perpustakaan ini dilakukan antara

lain melalui penyediaan koleksi buku pada tahun 2017 sebanyak 98.983 judul dengan jumlah mencapai 322.020 eksemplar meningkat dibandingkan tahun 2016 sebanyak 96.142 judul dengan jumlah 311.321 eksemplar, pencanangan gerakan cinta membaca dan sadar arsip, pelayanan sistem pencarian informasi cepat berbasis internet. Selain secara manual pelayanan perpustakaan juga dilakukan dengan berbasis internet, pengguna digital pustaka yang mengakses melalui jaringan internet tahun 2017 sebanyak 57.152 akses meningkat dibandingkan tahun 2016 sebanyak 54.783 akses.

18. KEARSIPAN

Arsip sebagai identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa dan bernegara harus dikelola dan diselamatkan oleh negara. Upaya penyelamatan arsip mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, perawatan, pemindahan, pemusnahan, sampai penyerahan arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia, setelah melihat nilai guna arsip dengan berpedoman pada Jadwal Retenisi Arsip (JRA) yang disusun oleh panitia yang memahami kearsipan, fungsi dan kegiatan instansinya masing-masing untuk mengetahui apakah arsip tersebut masih memiliki nilai guna atau tidak untuk disimpan.

Penyelamatan arsip Pemerintah Provinsi NTB yang tercipta di seluruh Perangkat Daerah dilakukan melalui proses akuisisi. Akuisisi arsip adalah pengumpulan arsip yang dilaksanakan melalui kegiatan penilaian, penataan dan pembuatan daftar arsip statis yang bertujuan untuk penyelamatan dan pelestarian serta pencari jejak informasi bersejarah dalam bentuk memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi mendatang. Upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan arsip di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.131 Upaya Pengelolaan Arsip Tahun 2016 - 2017

No	Uraian	Tahun 2016		Tahun 2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Peningkatan Khasanah arsip statis (berkas)	24.900	24.200	25.400	14.400
2.	Jumlah Arsip Perangkat Daerah/Lembaga (berkas)	6.420	6.420	7.470	6.250
3.	Pengembangan Arsip Desa / Kelurahan (Desa)	740	43	870	22
4.	<i>Record centre</i> (Perangkat Daerah)	5	5	5	5

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2017

URUSAN PILIHAN

Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Urusan pemerintahan pilihan

terdiri dari kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, dan perindustrian.

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh setiap bidang urusan pilihan dapat diuraikan sebagai berikut.

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki keunikan tersendiri baik secara fisik maupun geografis dengan potensi sumberdaya alamnya yang sangat berlimpah serta memiliki nilai strategis dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya. Potensi sumberdaya alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini diharapkan mampu sebagai penopang utama pengembangan ekonomi wilayah baik saat ini maupun di masa yang akan datang.

Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam dan berbagai aktifitas pembangunan berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti ancaman degradasi sumberdaya pesisir, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini terlihat dari semakin maraknya perubahan fungsi lahan dan penurunan kualitas lingkungan pesisir. Oleh karena itu, agar pemanfaatan sumberdaya pesisir dapat terselenggara secara optimal, diperlukan upaya penataan ruang sebagai salah satu bentuk intervensi kebijakan dan penanganan khusus dari pemerintah dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya.

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari dua pulau besar yaitu Lombok dan Sumbawa disertai 278 pulau-pulau kecil dengan luas perairan laut 29.159,04 km² dan panjang garis pantai mencapai 2.332,80 km, merupakan obyek yang sangat potensial untuk pengembangan banyak sektor seperti perikanan, pariwisata, konservasi, transportasi laut, industri maritim dan kegiatan lainnya. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa potensi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi NTB juga tidak berbeda jauh dengan wilayah lain yang rentan terhadap kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan.

Upaya mengatasi konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir, berupa konflik kewenangan, konflik kepentingan, konflik pembangunan antar sektor dan ketidakserasian antar peraturan perundang-undangan, perlu penerapan konsep pengelolaan pesisir terpadu, yang mengatur upaya-upaya pencegahan melalui penegakan hukum dan aturan perundang-undangan. Salah satu wujud dari upaya tersebut adalah dengan penyediaan produk hukum wilayah pesisir dalam bentuk peraturan daerah khususnya Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RZWP3K). Hal ini sejalan dengan perintah Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 jo UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan, salah satunya adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) yang berfungsi sebagai arahan pemanfaatan bagi berbagai kegiatan berbasis sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB telah diinisiasi sejak tahun 2015 yaitu berupa penyusunan dokumen awal, kemudian di tahun 2016 dilanjutkan dengan proses penyusunan dokumen antara dan dokumen final, maka di tahun 2017 telah dituntaskan proses

legislasinya sehingga ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi NTB Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi NTB Tahun 2017 – 2037.

Selama proses penyusunan dokumen antara hingga ditetapkan beserta Draf Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membangun kemitraan dengan berbagai lembaga NGO lainnya seperti FAO, WWF, BCC dan WCS terkait dengan penguatan muatan regulasi yang mendorong optimasi pemanfaatan potensi sumberdaya wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil dengan memperhatikan fungsi keberlanjutan. Adapun bentuk keterlibatan NGO dimaksud yaitu ikut berpartisipasi aktif dalam penyusunan dan pembahasan agar peraturan daerah tersebut telah mempertimbangkan relevansinya dengan berbagai aturan perundangan terkait, telah mengakomodasi usulan dan arahan berbagai stakeholder yang terlibat dan potensi kena dampak oleh peraturan yang hendak dibuat, dan yang lebih penting perda ini harus dapat diimplementasikan. Disamping itu, beberapa dukungan strategis dari NGO adalah memfasilitasi dukungan pendanaan dan tenaga ahli dalam penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), clearing house, konsultasi teknis dan evaluasi ranperda di kementerian dalam negeri.

Salah satu substansi yang diatur pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) adalah penetapan beberapa kawasan konservasi perairan di Provinsi NTB. Kawasan Konservasi dimaksudkan sebagai kawasan yang dipergunakan untuk mempertahankan kelangsungan suatu kondisi alam, sosial, budaya, ataupun kearifan lokal di kawasan perairan laut atau pulau.

Tabel 2.132 Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi NTB

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Target (Ha)	229.555	272,055
2	Realisasi (Ha)	229.555,36	214.411,32*)
3	Pencapaian (%)	100,00	84,38

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

*) Data Sementara

Nusa Tenggara Barat merencanakan pencadangan kawasan konservasi perairan seluas 291.594 Ha (10%) sampai tahun 2020. Sejak Tahun 2014 NTB telah mencadangkan kawasan konservasi seluas 151.089 Ha, tahun 2015-2016 seluas 229.555,36 Ha dan hingga tahun 2016 Provinsi NTB telah berhasil mencadangkan 7,87 persen dari luas perairan teritorialnya. Pada tahun 2017 realisasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) mengalami penurunan 6,597 persen dibanding tahun 2016. Hal ini karena adanya penyesuaian alokasi ruang laut di Provinsi NTB dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang RZWP3K Provinsi NTB Tahun 2017 – 2037.

Jumlah lahan yang telah dicadangkan tersebut terdiri dari 12 kawasan konservasi yang telah mempunyai legalitas melalui Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan sebanyak 3 kawasan dan 9 kawasan lainnya melalui Surat

Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat. Penetapan lahan berdasarkan Keputusan Menteri yaitu (1) TWP Pulau Gili Anyer, Meno dan Trawangan di Lombok Utara; (2) TWAL Pulau moyo di Kabupaten Sumbawa; dan (3) TWA Pulau Satonda di Kabupaten Dompu, sedangkan pencadangan lahan berdasarkan Keputusan Gubernur adalah (1) TWP Gili Tangkong, Nanggu dan Sudak di Kabupaten Lombok Barat; (2) TWP Gili Sulat dan Gili lawang Kabupaten Lombok Timur; (3) TWP Teluk Bumbang di Kabupaten Lombok Tengah; (4) TPK Gili Balu di Kabupaten Sumbawa Barat; (5) TPK Pulau Kramat, Bedil dan Temudong di Kabupaten Sumbawa; (6) TWP Pulau Liang dan Ngali di Kabupaten Sumbawa; (7) TWP Gili Banta di Kabupaten Bima; (8) SAP teluk Cempi di Kabupaten Dompu; dan (9) TP Penyu Tatar Sepang – Lunyuk di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai target dalam meningkatkan luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Provinsi NTB adalah dengan menyusun dokumen rencana pengelolaan dan zonasi masing-masing kawasan konservasi yaitu untuk 1) Kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Liang dan Ngali; 2) Kawasan Suaka Alam Perairan (SAP) Teluk Cempi; dan 3) Kawasan Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Banta. Namun, terbatasnya anggaran untuk kegiatan penyusunan dokumen, identifikasi calon KKPD baru menjadi kendala dalam meningkatkan pencadangan kawasan konservasi perairan daerah ini. Oleh karena itu upaya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut adalah:

1. Penambahan anggaran untuk melakukan kegiatan identifikasi Calon KKPD sesuai dengan kebutuhan luasan.
2. Bekerjasama dengan *Wildlife Conservation Society* (WCS) untuk melakukan kegiatan penyusunan dokumen identifikasi Calon KKPD dan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ).

Antisipasi wilayah kerja pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat yang tergabung dalam kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) perikanan agar secara swadaya ikut menjaga dan mengkampanyekan kesertaan masyarakat dalam menjaga laut. Jumlah Pokmaswas Perikanan di Provinsi NTB adalah sebanyak 145 kelompok. Kegiatan yang dilakukan Pokmaswas adalah usaha penangkapan ikan, budidaya dan pengawasan kawasan pesisir khususnya kawasan konservasi yang ada disekitar wilayah operasi pokmaswas. Dalam rangka mempertahankan keberadaan sumberdaya pesisir, pokmaswas menyadari bahwa kelestarian sumberdaya harus tetap ditingkatkan melalui jaga laut dan untuk kemandirian pokmaswas dilakukan melalui diversifikasi usaha dengan meningkatkan kemampuan untuk mengakses potensi ekonomi yang terkandung disekitar kawasan konservasi.

Usaha-usaha yang terus didorong untuk kemandirian pokmaswas adalah bersama NGO melakukan pendampingan, bimtek, memberikan bantuan sarana (perahu, mesin, sarana budidaya, sarana pengawasan) untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti kuliner rumah apung yang juga dapat difungsikan sebagai pos pengawas, pemandu wisata bahari, mina wisata, pemandu mancing, antar jemput tamu wisata. Dalam rangka efektivitas pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan termasuk kegiatan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB bersama *Wildlife Conservation Society* (WCS)

telah merancang aplikasi SMART PATROL (*spatial, monitoring and reported tool*). Aplikasi ini dirancang sebagai media komunikasi antar pihak (masyarakat/pokmaswas dengan pokja pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB). Dengan aplikasi ini setiap pihak bisa memberi laporan terkait pengelolaan dan pelanggaran/*distruktif fishing* melalui telepon genggam Android, Laporan tersebut langsung terhubung dengan server yang dikelola pokja pengawasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB untuk selanjutnya dianalisa dan disimpan secara otomatis dalam basis data sehingga memudahkan untuk ditindak lanjuti.

Peningkatan produksi dan kualitas produksi kelautan dan perikanan dilakukan melalui peningkatan sarana usaha perikanan dilakukan melalui penyaluran paket bantuan penangkapan ikan maupun budidaya perikanan. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam rangka meningkatkan skala usaha, efektifitas, efisiensi dan kemandirian masyarakat nelayan, pembudidaya dan pengolah/pemasar hasil perikanan. Target produksi perikanan provinsi NTB tahun 2017 adalah 1,321.074 ton dengan realisasi mencapai 1.410.654,36 ton (106,78 %) yang dihasilkan oleh 202.497 orang nelayan dan pembudidaya ikan, dari jumlah produksi tersebut sebesar 1.227.021,06 ton dari hasil budidaya perikanan dan sebesar 183.633,30 ton dari hasil penangkapan. Beberapa catatan penting yang menjadi keberhasilan program peningkatan produksi perikanan tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.133 Produksi Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2016-2017

TAHUN	PRODUKSI PERIKANAN (TON)		
	TANGKAP	BUDIDAYA	JUMLAH
2016	173.657,2	1.183.076,31	1.356.733,51
2017	183.633,3	1.227.021,06	1.410.054,36

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2017

Sementara itu realisasi produksi perikanan budidaya sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 1.227.021,06 ton atau 111,13 persen dari target tahun 2017 sebesar 1.104.092,00 ton. Angka ini meningkat 3,71 persen dari realisasi tahun 2016.

Tabel 2.134 Perkembangan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Provinsi NTB Tahun 2016–2017

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Target (ton)	1.082.767,00	1.104.092,00
2	Realisasi (Ton)	1.183.076,31	1.227.021,06 ^{*)}
3	Pencapaian (%)	109,26	111,13 ^{*)}

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB , 2017

^{*)} Data Sementara

Peningkatan produksi perikanan budidaya dipengaruhi oleh peningkatan produksi rumput laut, peningkatan produksi udang tambak, dan peningkatan budidaya ikan air tawar. Peningkatan produksi perikanan budidaya juga didukung

dengan adanya bantuan sarana budidaya perikanan sebanyak 2.303 paket, mesin pembuatan pakan ikan sebanyak 1 unit, bantuan excavator sebanyak 5 unit, bioplok lele 7 unit dan revitalisasi KJA budidaya laut sebanyak 34 paket.

1. Budidaya Rumput Laut

Budidaya rumput laut telah berkembang di perairan Pengantap Lombok Barat, Serewe Lombok Timur, Kertasari Sumbawa Barat, Tanjung Bele, Pulau Medang Sumbawa dan Teluk Waworada Bima. Produksi budidaya rumput laut tahun 2017 mencapai 1.037.756,87 ton (basah), atau tercapai 109,23 persen dari target sebesar 950.000 ton. Jumlah pembudidaya rumput laut adalah 34.928 orang. Pendapatan pembudidaya rumput laut berkisar antara Rp. 30-60 juta per tahun dengan rata-rata 40 juta.

Tabel 2.135 Realisasi Produksi Rumput Laut Provinsi NTB Tahun 2016-2017

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Target (ton)	900.000	950.000
2	Realisasi (ton)	1.001.761,22	1.037.756,87*)
3	Pencapaian (%)	111,31	109.24*)

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB

*) Data Sementara

Dukungan terhadap peningkatan produksi budidaya rumput laut di Provinsi NTB adalah telah dilakukan pembibitan rumput laut dengan kultur jaringan yang menghasilkan bibit unggul serta pembinaan dan pendampingan teknis budidaya selama proses produksi yang diharapkan dapat memacu peningkatan kualitas dan produktifitas dimasa-masa mendatang.

2. Budidaya Udang Tambak

Peningkatan produksi udang tambak sebagian besar dilakukan melalui bimbingan dan pendampingan dan untuk memotivasi pembudidaya udang tambak agar memanfaatkan tambaknya sebagai mata pencaharian utama dalam meningkatkan pendapatannya. Bantuan yang diberikan untuk revitalisasi tambak rakyat adalah memberikan bantuan pembangunan saluran tambak dan pemberian alat berat berupa excavator kepada kelompok untuk memperbaiki konstruksi dan saluran tambak yang memadai. Luas lahan tambak yang telah direvitalisasi sampai tahun 2017 mencapai 1000 Ha.

Target produksi budidaya tambak tahun 2017 sebesar 62.544 ton dengan realisasi 158.839,33 ton (253,96%) yang merupakan hasil usaha 24.256 orang pembudidaya dengan luas rata-rata tambak garapan 70 are. Produksi ini didominasi 74,17 persen jenis udang vanamei yakni mencapai 117.813,10 ton, Prestasi ini mendongkrak posisi Provinsi NTB pada urutan ke-3 nasional sebagai penghasil udang Vaname utama setelah Provinsi Lampung dan Jawa Timur. Pendapatan usaha udang vanamei dari tambak rakyat berkisar antara Rp. 20 - 70 juta per tahun, dengan rata-rata Rp. 50 juta.

3. Budidaya Ikan Air Tawar

Produksi budidaya ikan air tawar tahun 2017 mencapai 51.862,68 ton jika dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 21.055 ton yang berarti telah mencapai 146,32 persen. Sumbangan terbesar produksi ikan air tawar adalah dari budidaya ikan Nila, dimana pada Tahun 2017 produksinya sebesar 44.017,31 Ton. Jenis ikan air tawar lainnya yang memiliki potensi dan prospek untuk ditingkatkan produksinya adalah ikan lele, terutama dengan telah diintroduksinya paket teknologi budidaya Lele dengan sistem Bioplok, yaitu teknologi budidaya ikan dengan kepadatan tinggi, hemat penggunaan pakan dan air serta dapat dikembangkan pada lahan budidaya yang terbatas dan minim pasokan air. Produksi ikan Lele tahun 2017 sebesar 4.045,96 ton meningkat 55,46 persen dari tahun 2016 yang mencapai produksi sebesar 2.602,48 ton.

Upaya-upaya dalam meningkatkan produktifitas, efektivitas dan efisiensi usaha terus dilakukan melalui pemurnian induk penghasil benih unggul, penerapan cara pembenihan dan budidaya ikan yang baik (CPIB dan CBIB) serta memberikan bantuan sarana pembuatan pakan kepada beberapa kelompok pembudidaya ikan sebagai pilot proyek.

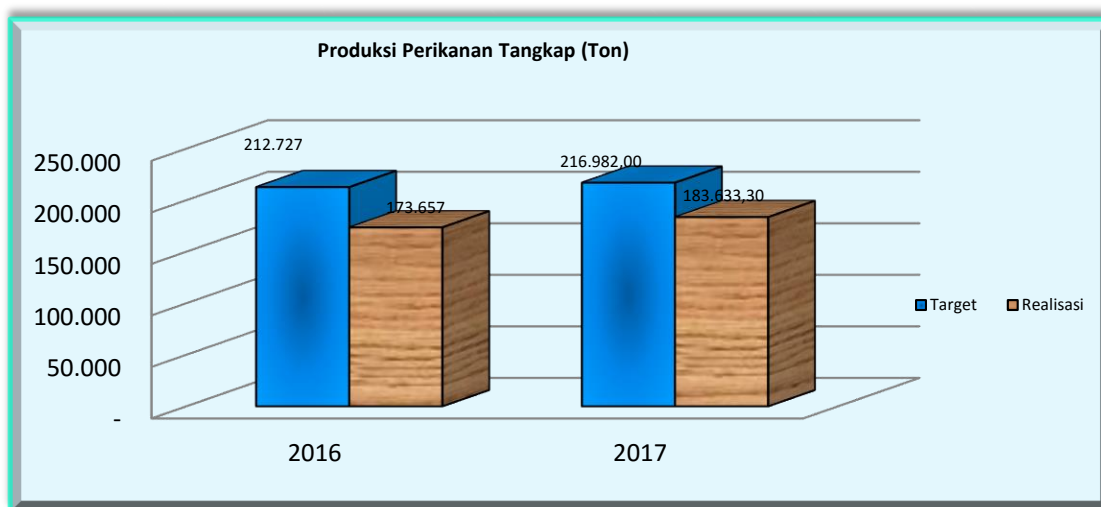
Sedangkan Produksi perikanan tangkap tahun 2017 mencapai 183.633,3 ton meningkat 5,74 persen jika dibandingkan produksi tahun 2016 sebesar 173.657,2 ton. Pengembangan perikanan tangkap dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi usaha dengan memberikan bantuan kapal penangkap ikan dan fasilitasi proses pengurusan izin kapal penangkap ikan kepada nelayan sehingga dapat menjangkau perairan laut yang lebih jauh dan potensial, disisi lain intensifikasi usaha dilakukan melalui pemberian bantuan sarana penangkapan ikan (kapal penangkap ikan 33 unit, perahu/sampan 9 unit, mesin perahu 287 unit, mesin genset 48 unit, alat tangkap 2 paket), alat bantu untuk mengumpulkan ikan seperti lampu inventer dan rumah ikan/rumpon. Rumah ikan/rumpon pada prinsipnya adalah suatu rekayasa *fishing ground* yang mampu menarik/mengumpulkan dan memudahkan ikan untuk ditangkap. Melalui rekayasa *fishing ground* ini nelayan tidak lagi berkeliling mencari ikan sehingga akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas usaha.

Penanganan sektor hilir usaha penangkapan ikan juga tetap menjadi perhatian dengan melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap proses produksi dengan sistem rantai dingin sehingga kualitas produksi tetap dapat dipertahankan, dalam rangka rantai dingin ini telah dibangun pabrik es dan *cold storage* di basis-basis pendaratan ikan se-Provinsi NTB. Bentuk dukungan terhadap pengelolaan hasil tangkapan ikan di NTB adalah akan beroperasi perusahaan PT. Bali Seafood International (BSI) pada tahun 2018 di Teluk Santong Sumbawa yang akan menampung dan mengolah hasil produksi nelayan untuk di ekspor.

Sedangkan penurunan produksi perikanan tangkap pada tahun 2016 disebabkan menurunnya produksi sargasum dan ubur-ubur. Ubur-ubur sebagai komoditas penting hasil produksi perikanan tangkap merupakan spesies yang stock sumberdayanya *unpredictable* (tidak dapat diprediksi) dan bersifat musiman serta terjadi migrasi profesi pada nelayan rumput laut jenis sargasum, dimana nelayan yang semula menangkap sargasum beralih profesi menjadi nelayan penangkap komoditas perikanan lainnya.

Solusi atas kondisi tersebut dengan melakukan pemulihan sumberdaya ikan pada perairan yang mengalami degradasi sumberdaya ikan, peningkatan kapasitas usaha nelayan melalui restrukturisasi armada penangkapan ikan (perahu/sampan/kapal, alat tangkap, mesin dan alat bantu) dan menciptakan spot penangkapan ikan yang dapat dilakukan sepanjang tahun misalnya dengan pembangunan rumah ikandi Perairan Teluk Bima Kelurahan Tanjung Kota Bima dengan tujuan merevitalisasi habitat dan ekosistem yang telah rusak, meningkatkan produktifitas perairan yang tidak subur atau produktifitasnya rendah dan meningkatkan daya dukung dan produktifitas perairan. Selain itu pengkayaan stok sumberdaya ikan/penebaran benih ikan di perairan umum daratan dilakukan untuk memperbaiki kuantitas dan kualitas stok atau sediaan sumberdaya ikan.

Gambar 2.19 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Provinsi NTB Tahun 2016-2017



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2017

Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dalam pengembangan perikanan budidaya tidak hanya ditujukan untuk produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap, akan tetapi diarahkan juga untuk meningkatkan Nilai Tukar Perikanan (NTP) yang terdiri dari Nilai Tukar Pembudidaya ikan (NTPi) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang dijadikan indikator terhadap kesejahteraan pembudidaya ikan dan nelayan.

Tabel 2.136 Target dan Realisasi Indeks Nilai Tukar Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016-2017

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Target (Index)	101,00	102,00
2	Realisasi (Index)	101,98	104,06
3	Pencapaian (%)	100,97	102,02

Sumber data : Badan Pusat Statistik, 2017

Nilai tukar perikanan tahun 2017 mencapai 102,02% dari indeks yang ditargetkan yaitu 102,00. Capaian ini meningkat 2,04% dari capaian indeks NTB tahun 2016 dan telah memberikan gambaran yang positif sekitar 1,03 persen terhadap target NTP tahun 2018 mendatang. Meningkatnya perkembangan nilai tukar perikanan disebabkan oleh peningkatan harga hasil penangkapan dan budidaya. Pada sub kelompok penangkapan dipicu oleh meningkatnya harga hasil tangkapan seperti kerapu, tembang, selar, teri, bawal, baronang, tenggiri dan kuniran. Sedangkan pada sub kelompok budidaya disebabkan oleh meningkatnya harga hasil budidaya rumput laut, kerapu, lele dan ikan mas.

Sedangkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh pembudidaya ikan terhadap indeks harga yang dibayar oleh pembudidaya ikan. NTPi dijadikan indikator tingkat kemampuan/daya beli pembudidaya ikan, sehingga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan secara relatif dan merupakan ukuran kemampuan/daya keluarga pembudidaya ikan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. NTPi akhir Bulan Desember 2017 tercapai 102,03 persen dari target tahun 2017 yaitu pada indeks 90,81 meningkat 1,23 persen dibanding realisasi tahun 2016.

Tabel 2.137 Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Provinsi NTB Tahun 2016-2017

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Target (Index)	88,00	89,00
2	Realisasi (Index)	89,71	90,81
3	Pencapaian (%)	101,94	102,03

Sumber data : BPS Provinsi NTB, 2017

Capaian indeks nilai tukar nelayan untuk tahun 2017 adalah 105,9 persen, meningkat 3,87 persen dari indeks tahun 2016. Tingginya Nilai Tukar Nelayan (112,25) masih menjadi pendorong utama kontraksi positif nilai tukar perikanan.

Tabel 2.138 Capaian Indeks Nilai Tukar Nelayan Provinsi NTB Tahun TA. 2016 - 2017

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Target (Index)	105,00	106,00
2	Realisasi (Index)	108,07	112,25
3	Pencapaian (%)	102,92	105,90

Sumber data : BPS Provinsi NTB, 2017.

Kenaikan capaian index NTN Provinsi NTB menunjukkan index harga yang diterima (penerimaan) nelayan lebih tinggi bila dibandingkan index beli (pengeluaran nelayan),artinyanelayan mengalami surplus sehingga dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan nelayan pada provinsi NTB Tahun 2017 tersebut cenderung meningkat. Program/kegiatan pemerintah berupa bantuan untuk nelayan yang dilaksanakan selama ini sangat membantu menekan biaya pengeluaran nelayan sehingga semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli nelayan.Peningkatan kesejahteraan nelayan dengan melihat kenaikan realisasi NTN tahun ini juga dapat dipengaruhi oleh 1)adanya nelayan yang memiliki akses permodalan melalui kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan untuk meningkatkan kapasitas usahanya dan 2) perlindungan Nelayan melalui Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) sehingga nelayan mendapatkan santunan atas kecelakaan diri baik akibat aktivitas usaha maupun resiko kecelakaan lainnya. Kedua faktor tersebut diharapkan menjadi strategi dalam membantu meningkatkan indeks NTN ke depan.

Namun, masih rendahnya SDM Nelayan menjadi salah satu kendala dalam mendorong kesejahteraan nelayan. Oleh karena itu nelayan membutuhkan pendampingan untukmembantu dalam mengakses permodalan ke perbankan dan pemahaman yang kurang terkait mekanisme pemanfaatan BPAN untuk klaim asuransi. Untuk mengatasi persoalan tersebut dengan menunjuk petugas di Kabupaten/Kota dalam rangka memfasilitasi nelayan yang mendapatkan Bantuan Premi Asuransi Nelayan dan penunjukkan petugas Konsultan Kerja Mitra Bank (KKMB) untuk memfasilitasi nelayan mengakses permodalan dengan instrumen sertifikat tanah yang dimiliki.

Konsumsi ikan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 mencapai 33,97 kg/kapita/tahun,mengalami peningkatan 5 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016 (32,35). Jika dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 32 kg/kapita/tahun maka tingkat capaian target mencapai 106,16 persen.

Tabel 2.139 Tingkat Konsumsi Ikan Provinsi NTB Tahun 2016-2017

Uraian	SATUAN	2016	2017	
			TARGET	REALISASI
Tingkat Konsumsi Ikan	(Kg/Kapita/Tahun)	32,35	32	33.97*

Sumber: BPS, 2017 *) Angka sementara

Angka konsumsi ikan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017masuk tingkat konsumsi ikan kategori tinggi (standar > 31,4 kilogram per kapita per tahun).Akan tetapi semakin tinggi tingkat konsumsi ikan akan berpengaruh semakin baik terhadap kesehatan maka pemerintah daerah terus berupaya untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan yang disingkat menjadi GEMARIKAN.

Gemarikan terus disosialisasikan khususnya ke anak-anak sekolah melalui program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah yang disingkat menjadi PMTAS.Program PMTAS pada tahun 2017 dilakukan kepada 1.100 anak sekolah yang

ada di Nusa Tenggara Barat dengan kriteria penerima yang sudah ditentukan. Selain itu pemerintah provinsi NTB juga melakukan kerja sama dengan pengurus Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam mendorong ikut serta mengkampanyekan Gemarikan melalui lomba masak ikan yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai dengan nasional, Pembentukan Forum Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (FORIKAN) mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa.

Pada tahun 2017 produksi olahan hasil kelautan dan perikanan sebanyak 199.895,3 ton, terdiri dari 166.274,1 ton yang berbahan dasar ikan dan 33.521,2 ton produk olahan rumput laut. Capaian tahun 2017 meningkat 4,04 persen dibanding tahun 2016.

Tabel 2.140 Capaian Produksi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2016-2017

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Target (Ton)	192.000,00	201.600,00
2	Realisasi (Ton)	192.136,00	199.895,3 ^{*)}
3	Pencapaian (%)	100,07	99,15

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, 2017 ^{*)} catatan: Data Sementara

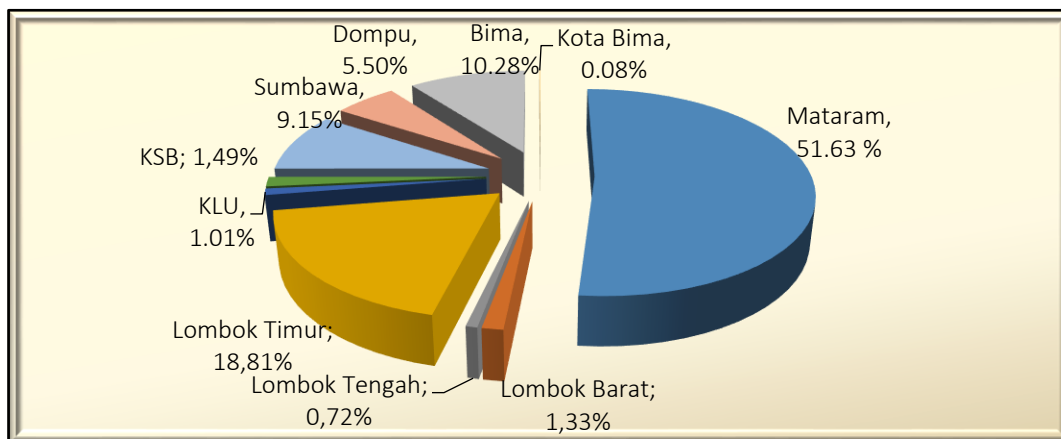
Peningkatkan produksi olahan hasil kelautan dan perikanan melalui strategi yang telah ditempuh untuk mencapai target produksi sekaligus sebagai langkah meningkatkan mutu olahan hasil perikanan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan program bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Bedah Unit Pengolahan Ikan (UPI) ini bertujuan: ¹⁾ Memperbaiki ruang-ruang pengolahan hasil perikanan sesuai prinsip-prinsip kelayakan pengolahan; dan ²⁾ Sebagai persyaratan mendapatkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP). SKP atau Sertifikat Kelayakan Pengolahan adalah sertifikat yang diberikan kepada Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang telah memenuhi persyaratan kelayakan dasar pengolahan, GMP (*Good Manufacturing Practices*) dan SSOP (*Standard Sanitation Operating Procedure*). Pada tahun 2017, jumlah UPI yang terbit bersertifikat adalah sebanyak 37 sertifikat, meningkat dua kali lipat lebih dari tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 18 SKP.

2. Melaksanakan Bimtek dan Sosialisasi pengembangan dan peningkatan daya saing UMKM.
3. Pembangunan ice flake machine kapasitas 1,5 ton.
4. Bantuan sarana pemasaran ikan berupa freezer dan coolbox.

Gambar 2.20 Komposisi Realisasi Produksi Ragam Olahan Hasil Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

NTB Sebagai daerah kepulauan, memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan komoditi garam. Luas lahan yang terhampar di sepanjang pesisir pantai NTB menjadi peluang produksi garam. Hanya saja, NTB belum mampu mengelola potensi usaha garam tersebut. Luas lahan yang bisa dimanfaatkan untuk produksi garam di Provinsi NTB lebih dari 9.000 hektar, namun dari luas lahan potensi tersebut baru 25,55 persen yang dimanfaatkan untuk produksi garam atau seluas 2.300 hektar.

Produksi garam NTB pada tahun 2017 meningkat cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 325,78 persen. namun jika dilihat dari target produksi capaiannya hanya 65,11 persen atau sebanyak 160.000 ton. Jumlah produksi garam ini merupakan kompilasi data produksi garam di sentra produksi garam pada 10 (sepuluh) Kabupaten/kota Provinsi NTB. Capaian produksi garam tahun 2016-2017 sebagai berikut.

Tabel 2.141 Perkembangan Capaian Produksi Garam Provinsi NTB Tahun 2016-2017

No	Uraian	Tahun	
		2016	2017
1	Target (ton)	150.000,00	160.000,00
2	Realisasi (Ton)	24.467,22	104.177,17 ^{*)}
3	Pencapaian (%)	14,51	65,11

Sumber data : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB ^{*)} catatan: Data Sementara

Kota Bima dan Kabupaten Bima merupakan Kabupaten/kota penyumbang angka produksi garam tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat namun pada tahun 2016 kedua kabupaten/kota tersebut mengalami bencana alam banjir. Faktor bencana tersebut memberikan dampak signifikan terhadap tidak tercapainya angka produksi garam sesuai target yang ditetapkan. Selain itu, ada beberapa faktor penyebab tidak terpenuhinya target produksi garam tahun 2017 yaitu:

1. Perubahan cuaca sepanjang tahun 2017, tingginya curah hujan juga menjadi faktor keberhasilan program PUGAR disamping faktor ketersediaan lahan juga sangat menentukan.
2. Banyaknya lahan potensial yang belum berproduksi secara maksimal dan berkurangnya luas lahan produksi. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 ada 2 (dua) kabupaten yang berkurangnya luas lahan produksi yaitu Kabupaten Lombok Barat semula luas lahan produksi 142,10 hektar berkurang menjadi 135,60 hektar dan Kabupaten Lombok Timur dari 263,82 hektar (berkurang 20 hektar) menjadi 243.82, karena alih fungsi lahan menjadi tambak udang.
3. Berkurangnya kelompok yang aktif dalam produksi garam. Kabupaten Lombok Tengah dari 20 kelompok yg terdata tahun 2016, ada 3 kelompok yang tidak aktif pada tahun 2017 dan Kabupaten Lombok Timur dari 117 kelompok yg terdata tahun 2016 ada 24 kelompok yang tidak aktif thn 2017 dikarenakan alih fungsi dan alih profesi.
4. Tahun 2016 Kota Bima tidak ada realisasi produksi karena lahan tambak mengalami kerusakan pasca bencana banjir. Namun, karena belum adanya alokasi anggaran menyebabkan lahan tersebut belum digarap kembali.

Mengatasi berbagai persoalan terkait menurunnya produksi garam maka strategi yang telah dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana usaha dengan perbaikan infrastruktur dan bantuan plastik geoisolator (plastik yang dipasang pada tambak garam berfungsi untuk mempercepat proses pembuatan garam, meningkatkan hasil produksi baik kualitas maupun kuantitasnya).
3. Fasilitasi kemitraan dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) garam.
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dengan membentuk koperasi dan BUMdes (Badan Usaha Milik Desa) garam.
5. Meningkatkan akses permodalan dengan pihak perbankan.

Sementara itu program PUGAR yang merupakan media dalam pengembangan dan peningkatan produksi garam baik secara kualitas maupun kuantitasnya juga mengalami kendala di lapangan yang cukup berpengaruh terhadap produksi garam di Nusa Tenggara Barat adalah:

1. Terbatasnya kemitraan usaha garam dan hanya mengandalkan pasar lokal, kondisi ini disebabkan adanya ketentuan impor garam industri tidak dikenakan bea masuk (Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 125 Tahun 2015 tentang Ketentuan Impor Garam).
2. Sebagian besar lahan produksi masih menggunakan teknologi tradisional walaupun ada beberapa yang menerapkan cara semi intensif.
3. Minimnya SDM petambak garam yang menyebabkan kurangnya kualitas kreatifitas dalam upaya diversifikasi produk olahan garam.
4. Belum adanya standar harga sehingga pada musim panen raya harga garam menjadi rendah.

1) UPTD Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Menjamin keamanan pangan hasil perikanan untuk produk-produk konsumsi lokal maupun yang akan diekspor, serta membina pelaku usaha hasil perikanan dan memajukan pendidikan melalui magang mahasiswa menjadi tupoksi Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BLPMHP).

Pada tahun 2017 beberapa parameter yang diuji antara lain: parameter fisik (uji organoleptik), parameter kimia (uji kadar air dan formalin) dan parameter mikrobiologi (uji ALT, *E. Coli* dan *Salmonella*). Sampel yang diuji berjumlah 272 sampel. Fasilitas Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu hasil Perikanan dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan seperti perusahaan produk konsumsi UD. Baura, UPT P2HP Pusat, UD. Sinar kasih, UD. Ares, UD. Sasaq Maiq, UD setiabudi, UD. Putri Rinjani, UD. Lembayung, UD Merpati, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lombok Utara dan Lombok Tengah dan perusahaan produk mutiara PT. Autore dan PT. Budaya Mutiara.

Hasil Uji/Sertifikasi sebanyak 109 buah laporan untuk produk perikanan konsumsi dan non konsumsi, sedangkan hingga tahun 2017 jumlah Sertifikat Kelayakan Pengolah (SKP) yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan secara kumulatif sebanyak 37 sertifikat kepada pengolah dan pemasar ikan.

2) UPTD Pelabuhan Perikanan Teluk Santong

Tahun 2017 Pelabuhan Perikanan Teluk Santong memberikan Pelayanan berupa penyaluran BBM 12.000 liter bagi nelayan, penyediaan air tawar 2.200 ton. Kunjungan kapal selama tahun 2017 sebanyak 4.455 trip sementara itu jumlah ikan yang didaratkan di UPTD Pelabuhan Perikanan Teluk Santong sebanyak 222,074 ton dengan nilai produksi Rp.1.491.893.132,- meningkat dibanding tahun 2016 yang mencapai 111,987 ton. Pelabuhan Perikanan Teluk santong juga mendata selama tahun 2017 produksi ubur-ubur sebanyak 5.775,280 ton.

3) UPTD Balai Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tanjung Luar

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tanjung Luar berupa pelatihan dalam rangka perekayasaan teknologi penangkapan ikan dan dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia. Kegiatan lain adalah pelatihan pemanfaatan gas pengganti BBM. Disamping itu Balai Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan Tanjung Luar juga melayani jasa perbaikan mesin kapal dan perahu nelayan dengan menghasilkan PAD sebesar Rp.15.300.000,-.

4) UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok

Fungsi pelabuhan perikanan, pendataan ikan, fasilitasi sarana dan prasarana tambat labuh dan fasilitas kepelabuhan lainnya, serta membina dan menunjang kegiatan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Luar beserta fasilitas pemindangan ikan Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok (PPLL) dilaksanakan oleh UPTD Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok. Tahun 2017 jumlah kunjungan kapal sebanyak 4.078 kapal meningkat dibanding tahun 2016 sebanyak 3.015 kapal, sedangkan jumlah ikan yang didaratkan sebanyak 4.538,927 ton dengan nilai produksi sebesar Rp.48.000.000.000,- meningkat dibanding tahun 2016 sebanyak 3,554.477 kg, pelayanan BBM solar 2400 ton, Es Balok 210.680 kg. Hal ini menunjukkan produksi es mengalami penurunan sebesar 42,531 kg atau 16,80 persen. Penurunan produksi es disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kurangnya tenaga ahli mesin dan tidak sesuainya kemampuan mesin pabrik es dengan kapasitas kolam yang tersedia sehingga mengalami kerusakan mesin. Pada tahun 2017 permintaan kebutuhan air yang dihasilkan Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok sebesar 14.595 ton mengalami peningkatan sebesar 2.018 ton atau 13,83 persen dibanding tahun 2016 hanya 12,577 ton. Peningkatan penyaluran air ini diakibatkan oleh banyaknya kunjungan kapal baik penangkap maupun pengangkut yang mendaratkan hasil tangkapannya di Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok.

Dengan makin lengkapnya fasilitas Balai Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok memberikan pengaruh terhadap berkembangnya pengusaha ikan yang memiliki coldstorage di sekitar wilayah Labuhan Lombok. Jumlah cold storage yang ada sampai dengan saat ini terdapat 5 buah sehingga perkembangan ekonomi masyarakat di sekitar Labuhan Lombok meningkat cukup signifikan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa pada tahun 2017 telah dilakukan perbaikan jalan dipelabuhan perikanan Labuhan Lombok, pembanguna pasar los ikan, rehab dermaga pelabuhan perikanan, rehab dermaga PPI Tanjung Luar, rehabilitasi jaringan air bersih PPI Tanjung Luar, dan perbaikan jalan komplek pelabuhan.

5) UPTD Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya

Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya (BKILPB) bertugas membina pelaku usaha budidaya ikan dalam rangka menjamin kesehatan ikan produksi, serta mengendalikan hama dan penyakit ikan. Pada tahun anggaran 2017, BKILPB telah melakukan kegiatan pemantauan hama dan penyakit ikan di lapangan. Pemantauan hama dan penyakit ikan bertujuan untuk mengetahui dan menginventarisir jenis hama dan penyakit ikan, inang serta daerah penyebarannya, sehingga nantinya akan diperoleh data penyebaran hama penyakit ikan dalam bentuk peta daerah sebar hama dan penyakit ikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.

BKILPB setiap tahun selalu melakukan kegiatan pemantauan dan pengendalian hama dan penyakit ikan, salah satunya adalah melakukan pengambilan sampel untuk komoditas Udang, Kerapu dan Lobster untuk dilakukan uji laboratorium jenis virus dan bakteri. Jumlah parameter uji untuk bakteri adalah sebanyak 50 sampel, yaitu dengan rincian untuk komoditas Lobster sebanyak 25 sampel dan komoditas Kerapu sebanyak 25 sampel. Sedangkan untuk uji virus, total pengujian yang dilakukan adalah 75 sampel, dengan rincian untuk komoditas Lobster sebanyak 25 sampel, komoditas Kerapu sebanyak 25 sampel dan komoditas Udang sebanyak 25 sampel. Adapun jenis virus penting yang diuji ada sebanyak 3 jenis, yaitu: TSV, WSSV dan IMNV.

Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah membuat peta sebaran hama penyakit ikan untuk pelaku usaha budidaya, pembudidaya ikan dan stakeholder Kabupaten/Kota se-NTB dengan tujuan sebagai langkah antisipasi penyebaran hama dan penyakit ikan pada tahun berikutnya agar produksi sesuai yang diharapkan.

6) UPTD Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Aikmel

Peran besar Balai Pengembangan Budiday Ikan Air Twar (BPBIAT) Aikmel dan instalasinya (BBI Lingsar, BBI Batukumbung, BBI Taliwang, BBI Matua dan BBI Rade) terutama dalam produksi benih ikan unggul untuk memenuhi kebutuhan petani pembudidaya, *Restocking* di perairan umum dan bantuan benih ikan (program bantuan 100 juta ekor benih) untuk kelompok pembudidaya ikan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Pada Tahun 2017 BPBIAT dan Instalasi mampu memproduksi benih ikan sebanyak 26.277.970 ekor atau mencapai 109,49 persen dari target sebesar 24.000.000 ekor. Hasil penjualan benih ikan memberikan kontribusi PAD sebesar Rp 491.112.000,- atau mencapai 101,26 persen dari target yaitu sebesar Rp 485.000.000.

Fungsi lain BPBIAT Aikmel adalah sebagai penghasil induk/calon induk ikan unggul terutama jenis ikan nila dari strain Nila Anjani dan benih ikan hibrida dari strain Lele Mandalika. Induk ikan nila dan benih lele tersebut menjadi andalan para petani di Nusa Tenggara Barat bahkan pada tahun ini benih calon induk nila Anjani telah dikirim ke luar daerah yaitu BBI Sicincin Padang Sumatera Barat sebanyak 30.000 ekor.

Disamping menjalankan fungsi teknis produksi BPBIAT Aikmel juga melakukan fungsi bimbingan teknis atau sebagai wadah pendidikan (edukasi) bagi siswa-siswi SMK jurusan perikanan budidaya dan agribisnis yang melakukan program Prakerin (Praktek Kerja Industri) yang berasal dari SMKN 1 Keruak, SMKN 1 Alas, SMKN 1 Brang Rea, SMKN 1 Seteluk, SMK Darul Wustha – Jero waru, dan SMK Cendekia - Aikmel. Kerjasama dengan Universitas dan perguruan tinggi perikanan telah berjalan dengan baik terutama dengan Fakultas Perikanan Universitas Gunung Rinjani Lombok Timur. Beberapa Mahasiswa melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapang, magang dan penelitian.

7) UPTD Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai (BPBPP) Sekotong adalah kegiatan operasional dibidang budidaya laut dan payau. Strategi Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui kegiatan 1) Pembenihan tiram mutiara 2). Pendederan tiram mutiara 3) Pendederan benih kerapu bebek 4) Budidaya udang vannamei 5) Budidaya udang windu 6) Budidaya bawal bintang 7) Diseminasi tiram mutiara untuk masyarakat 8) Budidaya rumput laut 9) Budidaya ikan payau.

Permasalahan yang dihadapi dalam produksi perikanan budidaya provinsi Nusa Tenggara Barat adalah gangguan hama dan penyakit ikan serta adanya perubahan iklim/bencana alam. Kedua faktor tersebut dapat menyebabkan menurunnya hasil produksi atau bahkan pembudidaya ikan gagal mendapatkan hasil panennya.

8) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Lombok

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, yang mengalihkan kewenangan pengawasan Sumberdaya Kelautan dari Kewenangan Kabupaten menjadi Kewenangan Provinsi, sehingga Pemerintah Provinsi Membentuk kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan untuk menangani urusan Konservasi dan Pengawasan Berdasarkan kawasan konservasinya, adalah 1) UPTD Balai Konservasi Dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Lombok 2) UPTD Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Sumbawa 3) UPTD Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Bima-Dompu.

Balai konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melaksanakan teknis kegiatan :1).perlindungan sumberdaya hayati kelautan dan perikanan 2). pelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan 3) Menerapkan manajemen pemanfaatan sumberdaya hayati secara bijaksana dan berkelanjutan 4) pengawasan/patroli secara rutin terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan dikawasan konservasi 5) Melakukan operasi gabungan terhadap tindakan illegal fishing di kawasan konservasi 6) pencegahan terhadap pencemaran perairan kelautan dan perikanan 7) pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) kelautan dan perikanan 8) pembinaan terhadap peningkatan kapiasitas SDM dan Kelembagaan Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) 9) sosialisasi kepada masyarakat kelautan dan perikanan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan konservasi dan pengawasan 10) pelatihan kepada kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) tentang manajemen pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan11) Memberikanpercontohan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

9) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Sumbawa

Untuk mencapai tujuan dalam mewujudkan peningkatan Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya kelautan dan Perikanan Kawasan Sumbawa dan Sumbawa Barat, diprioritaskan beberapa kegiatan di Balai Konservasi dan Pengawasan Kawasan Sumbawa dan Sumbawa Barat yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dan integritas penyelenggaraan kegiatan Pengawasan dengan Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten, Danpolair, Danpos TNI AL serta dengan POKMASWAS kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat.
2. Meningkatkan Pengawasan melalui patroli laut di kawasan Sumbawa dan Sumbawa Barat.
3. Meningkatkan Sosialisasi serta pemahaman tentang dampak penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.
4. Meningkatkan intensitas pembinaan POKMASWAS melalui sosialisasi dan kunjungan ke Kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS).

Luas Wilayah Konservasi yang menjadi tanggung jawab BKPSDKP Kawasan Sumbawa sangat luas kurang lebih 105.000 Ha, dengan luas laut yang harus diawasi di dua kabupaten tersebut seluas 10.502 Km² atau 1.050.199,44 Ha.

10) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Bima - Dompu

Balai konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan melaksanakan teknis kegiatan: 1) Melakukan perlindungan sumberdaya hayati kelautan dan perikanan 2) Melaksanakan pelestarian sumberdaya hayati kelautan dan perikanan 3) Menerapkan manajemen pemanfaatan sumberdaya hayati secara bijaksana dan berkelanjutan 4) Melakukan pengawasan/patroli secara rutin terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan dikawasan konservasi 5) Melakukan operasi gabungan terhadap tindakan illegal fishing di kawasan konservasi 6) Melakukan upaya pencegahan terhadap pencemaran perairan kelautan dan perikanan 7) Memberikan pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) kelautan dan perikanan 8) Melakukan pembinaan terhadap peningkatan kapsitas SDM dan Kelembagaan Kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) 9) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat kelautan dan perikanan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan konservasi dan pengawasan 10) Melakukan pelatihan kepada kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) tentang manajemen pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan 11) Memberikan percontohan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

Target Pendapatan Asli daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi NTB pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.263.680.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.213.980.000 (96.07 persen) yang diperoleh dari pemanfaatan jasa dan penjualan komoditas perikanan (benih ikan) yang dihasilkan oleh UPTD dan instalasinya serta dari penerimaan lainnya sebagaimana berikut :

Tabel 2.142 Realisasi Penerimaan PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

No.	Uraian	Target 2017	Realisasi	%
1.	Pemakaian Kekayaan Daerah	443.680.000	272.757.500	61,48
	PPI Tanjung Luar	40.250.000	20.850.000	51,80
	PPI Sape	5.000.000	8.625.000	172,50
	P3TS Sumbawa	30.0000.000	31.500.000	105,00
	KPP Labuhan Lombok	328.430.000	171.874.500	52,33
	BPPI Tanjung Luar	15.000.000	15.300.000	102,00
	BLPMHP Mataram	25.000.000	24.608.000	98,43
	Lain-lain			
2.	Penjualan Produksi Usaha Daerah	820.000.000	853.017.000	104,03
	BPBPP Sekotong	335.000.000	361.905.000	108,03
	BPBIAT Aikmel	190.000.000	192.600.000	101,37
	BBI Batu Kumbung	160.000.000	161.509.000	100,94
	BBI Lingsar	90.000.000	91.800.000	102,00
	BBI Taliwang Sumbawa	30.000.000	30.189.000	100,63
	BBI Rade Bima	15.000.000	15.014.000	100,09
3	Lain-lain Penerimaan (NHP)		1.273.000	
	Denda Keterlambatan		12.802.500	
	Lain-Lain Penerimaan		74.130.000	
	Jumlah	1.263.680.000	1.213.980.000	96,07

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

2. PARIWISATA

Pariwisata sebagai sektor prioritas di NTB didasari pada besarnya potensi sektor pariwisata yang ada di NTB. NTB memiliki destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia, mulai dari KEK Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota), Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, pesona gili-gili dan juga kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial. Namun, potensi yang besar tersebut perlu ditunjang SDM yang kreatif dan inovatif dan pelaku pariwisata yang profesional dan kreatif.

Dinas Pariwisata Provinsi NTB bertanggung jawab terhadap capaian indikator kinerja daerah, yaitu kunjungan wisatawan, baik mancanegara dan nusantara yaitu sebanyak 3,5 juta pengunjung. Untuk target tahun 2018 yaitu 4 juta wisatawan dan didukung oleh seluruh perangkat daerah. Oleh sebab itu, pembangunan pariwisata memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

1. Prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
2. Orientasi pada upaya-upaya pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan serta pelestarian lingkungan;

3. Dilaksanakan dengan terpadu secara lintas sektor, lintas daerah dan lintas pelaku;
4. Dilaksanakan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

NTB mengalami kemajuan yang pesat di sektor pariwisata, ditandai terus meningkatnya jumlah arus kunjungan wisatawan yang telah mencapai angka 3 juta wisatawan. Selain itu, infrastruktur penunjang pariwisata juga semakin memadai. Kendati demikian, kemajuan tersebut belum optimal jika melihat besarnya potensi yang ada. Jika dikelola lebih optimal, diyakini akan memberikan manfaat dan kontribusi yang semakin besar, utamanya dampak domino di bidang ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat NTB.

Meningkatnya kunjungan wisatawan tidak terlepas dari program unggulan yang mengiringi capaian angka kunjungan tersebut. Program Visit Lombok Sumbawa (VLS) yang mengantarkan NTB pada jumlah kunjungan satu juta wisatawan, dilanjutkan dengan program Pesona Lombok Sumbawa yang telah mengantarkan pada angka kunjungan sebesar dua juta wisatawan dan diperkuat lagi dengan branding ***Friendly Lombok dan Passionate Sumbawa*** telah mengantarkan pada jumlah kunjungan mencapai 3,5 (tiga koma lima) juta wisatawan pada akhir tahun 2017.

Tabel 2.143 Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2016-2017

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL RPJMD 2013	2016	2017	
			Target	Realisasi
Kunjungan wisatawan	1.357.602	3.094.437	3.500.000	3.508.903
Mancanegara	565.944	1.404.328	1.750.000	1.430.249
Nusantara	791.658	1.690.109	1.750.000	2.078.654

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2017

Keberhasilan Kinerja pembangunan pariwisata ini ditunjukkan dengan Peningkatan Kunjungan Wisatawan. Sampai dengan Tahun 2017, kunjungan wisatawan telah melampaui target yang ditetapkan di dalam RPJMD 2013-2018 yaitu sebanyak 3.508.903 orang wisatawan atau 100,25 persen dari target yang ditetapkan atau meningkat 13,39 persen dibandingkan tahun 2016. Dalam perhitungan jumlah kunjungan wisatawan, Dinas Pariwisata Provinsi NTB melakukan kerjasama dengan BPS NTB. Perolehan data kunjungan wisatawan tidak hanya dilakukan dengan menghitung Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di hotel-hotel berbintang tetapi juga diperoleh melalui pintu-pintu keluar masuk wisatawan yaitu di Lombok Internasional Airport (LIA), Pelabuhan Lembar (Pelindo), jalur langsung *fast boat* Bali - Gili, pintu masuk Pelabuhan Sape bagi wisatawan overland dari Pulau Komodo, Bandara Salahudin Bima serta lokasi-lokasi lain seperti Sekotong dan Bangko-bangko yang banyak dikunjungi wisatawan dari Bali (*one day tour*).

Keberhasilan lain yang diperoleh NTB di tingkat internasional adalah sejak 7 Oktober 2013 Gunung Rinjani sudah menyandang predikat Geopark Nasional dan menuju Unesco Global Geopark yang rencananya akan dikukuhkan pada bulan April 2018. Hal ini sangat penting mengingat Gunung Rinjani merupakan destinasi wisata pendakian yang sudah terkenal di mancanegara. Sejak tanggal 20 November 2017 menyusul Gunung Tambora menjadi Geopark Nasional. Pada tanggal 23 September

2017 di London, Gubernur NTB mempresentasikan kondisi, kekayaan geologi, bentang alam yang ada di Geopark Rinjani sebagai salah satu langkah menguatkan Rinjani menjadi Unesco Global Geopark. Dalam perjalanannya menjadi destinasi wisata yang menarik, Gunung Rinjani telah memperoleh 3 penghargaan internasional yaitu:

1. *World Legacy Award untuk kategori Destination Stewardship* yang dikeluarkan oleh *Conservation International and National Geographic Traveller* pada tahun 2004.
2. *Tourism For Tomorrow Award* pada tahun 2005.
3. *Tourism For Tomorrow Award* pada Tahun 2008.

Akhirnya setelah melalui penilaian dari beberapa asesor yang mewakili UNESCO, maka pada tanggal 15 Januari 2018 telah terbit surat yang menjelaskan bahwa Gunung Rinjani layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Unesco Global Geopark Network.

Penguatan Branding Pariwisata Halal merupakan strategi yang dilakukan dalam meningkatkan kunjungan wisatawan terutama wisatawan muslim sebagai pasar potensial. Ruang lingkup pengembangan Pariwisata Halal mengacu pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2016 tentang Wisata Halal yaitu dengan:

- a. Mengupayakan ketersediaan fasilitas umum dan tempat beribadah serta mendorong pengelola destinasi *Pariwisata Halal* harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan wisatawan. Tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan muslim dan fasilitas bersuci yang memenuhi standar *syari'ah*, *mendorong terbentuknya desa wisata dengan potensi religious*;
- b. Meningkatkan pemasaran dan promosi Pariwisata Halal dengan melibatkan BPPD, DSN-MUI, ASITA, PHRI dan HPI dengan melakukan pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran Wisata Halal ke pasar potensial, pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai Destinasi Halal yang aman, nyaman dan berdaya saing dengan melibatkan peran media yang efektif dan efisien;
- c. Mendorong industri Pariwisata Halal dengan prinsip syariah yang disertifikasi DSN-MUI;
- d. Meningkatkan peran kelembagaan baik itu dari pemerintah maupun non-pemerintah dan penyediaan SDM Pariwisata untuk memfasilitasi pembangunan pariwisata yang terpadu dan berkelanjutan, mendorong partisipasi masyarakat sekitar obyek wisata dalam perekonomian pariwisata, mengembangkan keterampilan keterampilan tenaga kerja yang relevan untuk pekerjaan disektor pariwisata, menangkap peluang dalam pemanfaatan digitalisasi, serta meningkatkan kompetensi pariwisata, sertifikasi peserta pelatihan dan professional SDM pariwisata

Untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, dengan melakukan berbagai upaya untuk mencapai target kunjungan wisatawan tahun 2017 yaitu melakukan standarisasi fasilitas umum pada destinasi secara bertahap, meningkatnya fasilitas pariwisata pada kawasan-kawasan strategis, baik kuantitas maupun kualitas, peningkatan kualitas infrastruktur menuju destinasi serta mengupayakan konektivitas dari pasar potensial serta didukung dengan peningkatan

mutu SDM Pariwisata. Melakukan promosi pariwisata yang terpadu, efektif, efisien dan berkualitas dan memperbanyak event promosi yang mengangkat potensi NTB dan citra kawasan pariwisata daerah baik di dalam maupun di luar daerah.

Event dan promosi yang dilaksanakan dan diikuti tahun 2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.144 Event dan Promosi Pariwisata Tahun 2017

NO	KEGIATAN	TEMPAT	PELAKSANAAN
A.	Promosi Dalam Negeri		
1	Lombok Sumbawa Great Sale	Lombok-Sumbawa	28 Januari-28 Februari 2017
2	Festival Bau Nyale	Pantai Seger Lombok Tengah	9-12 Februari 2017
3	Direct Promotion	Jakarta	23 Maret 2017
4	Lombok Travel Mart	Gili Air – Lombok Utara	27 Maret 2017
5	Pesona Lawata	Kota Bima	8 April 2017
6	Festival Kalaki	Bima	9 April 2017
7	Pesona Tambora	Dompu	10-11 April 2017
8	Tour De Lombok	Mataram-Senaru-Kuta-Semalun	13-17 April 2017
9	Rinjani 100	Senaru-Semalun	8 Mei 2017
10	Pelatihan Digital Preneur	Mataram	10 Mei 2017
11	Lombok Sumbawa Festival	Jakarta	20 Mei 2017
12	Seminar Pengembangan Destinasi Wisata	Jakarta	20 Mei 2017
13	Festival Khazanah Ramadhan	Islamic Center NTB	25 Mei-24 Juni 2017
14	Bedah Buku Wisata Halal	Islamic Center NTB	26 Mei 2017
15	Lombok Sumbawa Inframe	Kuta-Mandalika	13 Juni 2017
16	Nuzulul Qur'an	Islamic Center NTB	14 Juni 2017
17	Lombok Sumbawa Photo Contest	Mataram	19 Juni 2017
18	Bulan Pesona Lombok Sumbawa	Mataram	18 Agustus 2017
19	Lombok Sumbawa Karnival	Mataram	18 Agustus 2017
20	Lombok Sumbawa Village Culture	Mataram	18-22 Agustus 2017
21	Lombok Sumbawa Night Festival	Islamic Center, Mataram	19 Agustus 2017
22	Festival Tunaq	Tunak. Lombok Tengah	20 Agustus 2017
23	Festival Kota Tua	Ampenan	25 Agustus 2017
24	Reli Wisata Lombok Mandalika	Mandalika – Lombok Tengah	26-27 Agustus 2017
25	Mandalika Blogger Camp	Mandalika – Lombok Tengah	26-27 Agustus 2017
26	Mandalika Colour Run	Mandalika – Lombok Tengah	27 Agustus 2018
27	Media Farm Trip Lombok Sumbawa	Mataram	29 Agustus 2017
28	Idul Adha Religi Night Festival	Islamic Center NTB	31 Agustus 2017
29	Grand Fondo New York Indonesia	Senggigi-Bayan	3 September 2017
30	Sosialisasi Standarisasi Usaha Pariwisata Halal	Mataram	4 September 2017
31	Kaliantan Kite Festival	Lombok Timur	10 September 2017
32	Festival Moyo	Sumbawa	10 September-18 Oktober 2017
33	International Halal Travel Fair	Islamic Center – Mataram	14 September 2017
34	Festival Photo Film	Taman Budaya Mataram	14 September 2017
35	Lombok International Edu Tourism Conference	Islamic Center – Mataram	14-15 September 2017
36	Festival Kuliner Lombok Sumbawa	Islamic Center NTB	15 September 2017
37	Fashion Street Lombok Sumbawa	Mataram	16 September 2017
38	Semalun Holti	Semalun, Lombok Timur	16 September 2017
39	Festival Senggigi	Senggigi, Lombok Timur	16-18 September 2017
40	Seminar Moyo	Sumbawa	11 Oktober 2017

NO	KEGIATAN	TEMPAT	PELAKSANAAN
41	Gili Tramen Festival	Gili Tramen	11-12 November 2017
42	Pesona Taliwang	Taliwang	13 November 2017
43	Golf Tournament	Golong, Lombok Barat	9 Desember 2017
44	Lombok Hijab Fun Walk and Run	Kota Tua Ampenan	10 Desember 2017
45	Event di Lombok International Airport	LIA-Lombok Tengah	2 kali dalam seminggu (Sabtu dan Minggu)
46	Event Wisata pada Obyek-obyek Wisata	Se-NTB	10 kali pentas
B. Promosi Luar Negeri			
1	ITB-Berlin	Berlin	8-12 Maret 2017
2	Sales Mission Hongkong	Hongkong	12-14 Desember 2017
3	Arabian Travel Mart, Sales Mission Dubai	Dubai	24-27 April 2017
4	Jamuan Kenegaraan HUT RI, Sales Mission Korea	Kedubes RI, Korea Selatan	8-11 Juni 2017
5	Malaysia Travel Mart (<i>Matta</i>)	Malaysia	8-10 September 2017
C. Promosi Melalui Media Cetak dan Elektronik			
1	Promosi melalui media Suara NTB, Lombok Post, Radar Lombok dan Radar Mandalika	Mataram	Selama Tahun 2017
2	Promosi melalui media cetak melalui Republika	Mataram	Selama Tahun 2017
3	Promosi melalui media Lombok TV, TV9	Mataram	Selama Tahun 2017
4	Promosi melalui media Trans 7, TV one	Mataram	Selama Tahun 2017
5	Promosi melalui media Republika, Lombok Insiders, Genpi, Lombok One, Lombok News, Utara Kita.com	Mataram	Selama Tahun 2017
6	Peliputan Wartawan Lombok Post, Radar Mandalika	Mataram	Selama Tahun 2017
7	Publikasi melalui <i>API Magazine</i> Media Jepang (6 x terbit)	Mataram	Selama Tahun 2017
8	Publikasi melalui <i>API Magazine</i> Berbahasa Inggris (5x terbit)	Mataram	Selama Tahun 2017
9	Publikasi melalui <i>Arabic Magazine</i> (2 x terbit)	Mataram	Selama Tahun 2017
10	Baliho, Spanduk, Umbul-umbul	Mataram	Triwulan I, 2017
11	PIN Pesona Lombok Sumbawa	Mataram	Triwulan I, 2017
12	Banner	Mataram	Triwulan I, 2017
13	Dokumentasi	Mataram	Triwulan I, 2017
14	Bag Kit	Mataram	Triwulan I, 2017
15	Brosur/Leaflet Bahasa Inggris, Indonesia, arab	Mataram	Triwulan I, 2017
16	Dekorasi Stand Pameran	Mataram	Triwulan II, 2017
17	Stopmap Pesona Lombok Sumbawa	Mataram	Triwulan II, 2017
18	Guide Book Bahasa Inggris	Mataram	Triwulan II, 2017
19	Goodiebags Pesona Lombok Sumbawa	Mataram	Triwulan II, 2017
20	Dekorasi Tourist Information Center (LIA)	Mataram	Triwulan III, 2017
21	Calender Event 2018	Mataram	Triwulan IV, 2017

Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi NTB, 2017

Selain upaya melalui media promosi dan event-event kepariwisataan, upaya lain yang dilakukan adalah dengan Pengembangan Destinasi Pariwisata. Upaya pengembangan destinasi pariwisata dilakukan dengan meningkatkan kualitas infrastruktur menuju destinasi, secara bertahap menyiapkan fasilitas umum,

penguatan Branding Wisata Syariah sebagaimana amanat Perda 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, pembangunan TIC di destinasi unggulan, pengembangan destinasi berbasis *ecotourism* baik di Lombok maupun di Pulau Sumbawa melalui pengembangan desa wisata. Pembenahan infrastruktur destinasi pariwisata untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas pariwisata pada kawasan-kawasan strategis. Destinasi potensial yang ditata sebagai berikut :

- a. **Kota Mataram** : destinasi wisata Kota Tua Ampenan, Makam Keramat Bintaro, Kawasan Kali Jangkok, Taman Eks Pelabuhan Ampenan dan Pengecatan Kawasan Kota Tua Ampenan.

**PEMBANGUNAN GARDU PANDANG DAN PENATAAN TAMAN
EKS PELABUHAN AMPENAN**



**PENATAAN AREAL PARKIR DAN PEMBUATAN SHELTER
DI KAWASAN MAKAM BINTARO**



- b. Kabupaten Lombok Barat** : destinasi wisata Sesaot, Taman Wisata Alam Suranadi, Senggigi, Lingsar, Makam TGH. Ibrahim Kholid, pembangunan TIC Tawun dan pembuatan toilet portabel di Pusuk Pass.

**PENATAAN LAPAK PEDAGANG DAN PEMBANGUNAN SHELTER
DI KAWASAN TAMAN WISATA SESAOT**



PENATAAN PANTAI SENGIGI



PENATAAN AREAL PARKIR PURA LINGSAR



**PENATAAN DESTINASI MAKAM TGH. IBRAHIM
KHOLID KEDIRI**





- c. **Kabupaten Lombok Tengah** : Toilet dan areal parkir Dusun Sade, Taman Pesona Lombok Sumbawa, Kawasan Pariwisata Desa Bual dan Peralatan Selancar Selong Belanak.
- d. **Kabupaten Lombok Timur** : Tete Batu, Wisata Alam Suralaga, Sembalun, Penakak Masbagik, Pelabuhan Pariwisata Tanjung Luar, Pengadaan Kendaraan Roda Tiga.
- e. **Kabupaten Lombok Utara** : Pantai Nipah, Papan Informasi Obyek Wisata KLU, penyambungan dan instalasi listrik dan air di Gili Trawangan, pembenahan pintu masuk dan areal parkir wisata Senaru.
- f. **Kabupaten Sumbawa Barat** : Penataan dan pembangunan homestay Desa Wisata Mantar.
- g. **Kabupaten Sumbawa** : Penataan taman wisata dan TIC Seliper Ate.
- h. **Kabupaten Dompu** : Jalur trekking Gunung Tambora.
- i. **Kabupaten Bima** : Pengadaan motor roda tiga, Pantai Kalaki, Pantai Lariti berupa toilet, ruang ganti dan pembenahan lahan parkir, Pantai Papa berupa toilet dan ruang ganti serta musholla, pemnagunan toilet 4 bilik di Pantai Papa
- j. **Kota Bima** : Pantai Lawata.

Pembangunan gedung tempat ibadah permanen berupa musholla di Senggigi Kabupaten Lombok Barat, Gili Sudak Kabupaten Lombok Barat dan Pantai Pink Kabupaten Lombok Timur.

PEMBANGUNAN MUSHOLLA GILI SUDAK – KAB. LOMBOK BARAT



PEMBANGUNAN MUSHOLLA PANTAI PINK – KAB. LOMBOK TIMUR



Dinas Pariwisata juga melaksanakan penataan TIC Gili Trawangan Kabupaten Lombok Utara, pembangunan TIC Tete Batu, pembangunan TIC Sembalun Kabupaten Lombok Timur, pembuatan toilet Pringgasea Kabupaten Lombok Timur, pembuatan toilet Pantai Nipah Kabupaten Lombok Tengah, pembangunan TIC Kembang Kuning Kabupaten Lombok Tengah.

Upaya penguatan Pariwisata Halal Nusa Tenggara Barat dilakukan dengan memberikan dukungan sertifikasi halal pada 40 usaha restoran pada tahun 2017. Sertifikat Halal merupakan suatu bentuk jaminan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, khususnya muslim traveler yang berkunjung ke NTB. Selanjutnya penyediaan paket-paket wisata syariah yang variatif dan berkualitas sebagai fokus pengembangan wisata NTB dan potensi kepariwisataan dalam pengembangan Desa Wisata menambah penyediaan paket wisata bagi wisatawan ditunjang oleh SDM Pariwisata yang berkualitas dan dukungan para stakeholder pariwisata dan meningkatkan peran kelompok masyarakat sadar wisata (pokdarwis).

Promosi dan pemasaran pariwisata NTB juga harus ditunjang oleh SDM Pariwisata yang berkualitas dan dukungan para stakeholder pariwisata serta dengan meningkatkan peran kelompok masyarakat sadar wisata (pokdarwis). Hal ini dilakukan melalui program pengembangan kemitraan sebagai upaya untuk penguatan

kelembagaan pariwisata untuk meningkatkan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata. Kegiatan yang dilakukan berupa Bimtek pramuwisata dan sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Pramuwisata dengan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan pariwisata serta meningkatkan peran kelompok masyarakat sadar wisata (pokdarwis) dan penguatan kelembagaan desa wisata.

Pembenahan SDM dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bidang pariwisata di tengah-tengah pertumbuhan pariwisata NTB yang sangat pesat. Kementerian Pariwisata telah mendirikan Politeknik Pariwisata Negeri Lombok pada tahun 2016 dengan membuka 3 program studi yaitu: Pengaturan Perjalanan (D IV), Studi Divisi Kamar (D III), Studi Seni Kuliner (D III), dan Studi Tata Hidang (D III).

Pemerintah Provinsi NTB berupaya memperkuat icon Wisata Halal dengan memperbanyak event-event baik Nasional maupun Internasional, meningkatkan konektivitas melalui pembukaan rute-rute penerbangan baru, dan menjalin kerjasama perusahaan penerbangan seperti *Korean Air* dan *Jet Star* untuk mencapai target kunjungan wisatawan sebanyak 4.000.000 di tahun 2018.

Keberhasilan sektor pariwisata NTB tidak terlepas dari dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata. Kebijakan pemerintah dengan ditetapkannya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai prioritas pengembangan destinasi strategis nasional, dari 3 destinasi yang diprioritaskan secara nasional. Pada Kawasan KEK Mandalika direncanakan pembangunan resort wisata dan 6 hotel bertaraf internasional, yang mendorong terciptanya peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pariwisata diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di NTB.

3. PERTANIAN

Urusan Pilihan Bidang Pertanian sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah yang diarahkan untuk peningkatan produksi pertanian dan rumpunnya dan berkontribusi dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, peningkatan nilai tukar petani, serta penyerap tenaga kerja dan lainnya.

Urusan Pilihan Bidang Pertanian diselenggarakan oleh 2 Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan uraian sebagai berikut.

a. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Produksi komoditi strategis tanaman pangan Dinas Pertanian Dan Perkebunan Di Provinsi NTB yaitu padi, jagung dan kedelai. Pada tahun 2017 produksi padi mencapai 2.344.692 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau 96,32 persen, jagung pipilan kering sebesar 2.020.244 ton dan produksi kedelai sebesar 51.365 ton biji kering atau 40,90 persen hal ini disebabkan adanya peralihan komoditas ke Jagung.

▪ Produksi padi

Capaian produksi padi pada tahun 2017 sebesar 2.344.692 ton Gabah Kering Giling/GKG (aram II BPS 2017), jika dibandingkan dengan tahun 2016 naik sebesar 15,42 persen (2.095.117), akan tetapi jika dibandingkan dengan target RPJMD hanya tercapai 96,32 persen yaitu sebesar 2.434.299 ton GKG. Tidak tercapainya target sesuai RPJMD disebabkan adanya beberapa petani beralih komoditas ke tanaman jagung karena harga jagung sudah ada penetapan harga oleh pemerintah dengan produksi persatuan luas (hektar) lebih tinggi. Disamping itu produksi per satuan luas yang dicapai sebesar 49,19 Kwintal per hektar (kurang dari 51 kw/ha), hal ini disebabkan karena pemberian bantuan ke petani masih dalam bentuk Benih saja, sedangkan sarana produksi lainnya (pupuk dan pestisida) tidak ada.

▪ **Produksi Jagung**

Komoditas jagung sebagai salah satu komoditas tanaman pangan strategis telah terbukti memberikan andil yang besar terhadap ketahanan pangan dan perekonomian daerah. Program agribisnis jagung dapat menjadi penggerak perekonomian rakyat, dan dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan di Provinsi NTB.

Capaian produksi jagung tahun 2017 sebesar 2.020.244 ton pipilan kering (aram II BPS 2017), naik sebesar 58,05 persen dari capaian tahun 2016 sebesar 1.278.271 ton pipilan kering. Jika dibandingkan dengan target RPJMD meningkat sebesar 59,71 persen dari target sebesar 1.264.948 ton pipilan kering, hal ini disebabkan adanya kepastian harga melalui penetapan harga oleh pemerintah sehingga para petani sebagian besar beralih dari tanaman kedelai, kacang hijau dan tanaman lainnya untuk menanam jagung. Kinerja pengembangan agribisnis jagung sebagaimana table berikut.

Tabel 2.145 Capaian Kinerja Pengembangan Agribisnis Jagung (PAJ) Tahun 2016-2017

NO	INDIKATOR	SATUAN	2016	2017	
				TARGET	REALISASI*)
1.	Luas Tanam	Ha	209.834	215.553	314.794
2.	Luas Panen	Ha	206.887	210.616	306.444
3.	Produksi	Ton	1.278.271	1.445.261	2.020.244
4.	Produktivitas	Kw/Ha	61,79	68,62	65,93
5.	Nilai Produksi	Rp.	7.030.490.500.000	5.781.044.000.000	9.751.717.788.000
6.	Nilai Investasi	Rp.	2.758.267.930.000	2.155.530.000.000	3.462.734.000.000
7.	Serapan Tenaga Kerja	Orang	1.049.170	862.212	1.259.176
8.	Pendapatan Rata-rata 1 x panen	Rp/Ha	33.984.500	27.448.000	31.824.411

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

*) Angka Proyeksi II 2017

▪ **Produksi Kedelai**

Sebagai komoditas ketiga terbesar yang menjadi strategis pengembangan produksi pertanian ditingkat provinsi dan nasional kedelai menjadi salah satu komoditas yang mendapat perhatian, karena beberapa

bahan baku olahan masih banyak membutuhkan kedelai dan sampai dengan saat ini kedelai masih menjadi komoditas import yang dilakukan oleh pemerintah.

Capaian produksi kedelai sebesar 51.365 ton biji kering (aram II BPS 2017) turun dari target RPJMD sebesar 40,90 persen dari target RPJMD 125.601 ton. Hal ini disebabkan karena harga kedelai belum dapat ditetapkan seperti jagung, sehingga minat petani untuk menanam kedelai masih kurang. Disamping itu banyak petani yang beralih komoditas ke tanaman jagung yang mempunyai harga pasti yang lebih tinggi.

Tabel 2.146 Produksi Komoditas Strategis Tanaman Pangan di Provinsi NTB Tahun 2016-2017

NO	JENIS TANAMAN	PRODUKSI (Ton)		
		2016	2017	
			TARGET	REALISASI *)
1.	Padi (GKG)	2.095.118	2.434.299	2.344.692
2.	Jagung (Pipilan Kering)	1.278.271	1.264.948	2.020.244
3.	Kedelai (Biji Kering)	109.480	125.601	51.365

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

*) Angka Sementara 2017

▪ **Produksi Tanaman Hortikultura**

Komoditas unggulan hortikultura di Provinsi NTB adalah Cabai dan Bawang merah. Bentuk produksi untuk tanaman Cabai adalah buah segar dan bawang dalam bentuk umbi kering.

Produksi cabai buah segar pada tahun 2017 sebesar 207.531 ton (509,64 persen) dari target RPJMD yaitu 40.721 ton dan produksi bawang merah umbi kering mencapai 208.156 ton (186,69 persen) dari target RPJMD 111.499 ton. Perkembangan produksi komoditas hortikultura strategis sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.147 Produksi Komoditas Strategis Tanaman Hortikultura di Provinsi NTB Tahun 2016-2017

NO	JENIS TANAMAN	2016	PRODUKSI (Ton)	
			2017	
			TARGET	REALISASI **)
1.	Cabai (buah segar)	109.037	40.721	207.531
2.	Bawang merah (umbi kering)	222.805	111.499	208.156

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

**) RKSPH bulan Desember 2017

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka mempertahankan produksi Tanaman Pertanian di Provinsi NTB, yaitu:

- a. Perluasan areal tanam, dilakukan melalui optimalisasi lahan, cetak sawah baru dan pembangunan embung serta pengembangan jaringan irigasi.
- b. Peningkatan produktivitas, dilakukan melalui penyediaan alat dan mesin pertanian, penggunaan benih bermutu dan varietas unggul, penanaman padi pola sistem jajar legowo (jarwo) pada tanaman padi dan pemupukan berimbang serta penggunaan pupuk organik.
- c. Pengamanan produksi, dilakukan melalui pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan pengembanganantisipasi dampak perubahan iklim
- d. Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pembiayaan.

Dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas pertanian/perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB memberikan alat dan mesin pertanian bagi petani. Adapun bantuan alat dan mesin pertanian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.148 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2016-2017

NO	BANTUAN	JUMLAH (Unit)	
		2016	2017
1	Hand Traktor Roda Dua	14.261	10.618
2	Hand Traktor Roda Empat	350	46
3	Transplanter	155	140
4	Seeder	1.133	1.961
5	Hand Sprayer dan Power Sprayer	75.169	48.297
6	Swing Fog	1.209	124
7	Emposan Tikus	977	829
8	Pembersih Gulma	4.281	2.883
9	Pompa Air	7.605	1.349
	a. <4 inci	14.437	881
	b. 4 inci	4.396	2.719
	c. >4 inci	1.205	10.618
10	Sabit Bergerigi	1.002.571	662.949
11	Reaper	37.316	14
12	Paddy Mower	879	87
13	Stripper	1.855	266
14	Combine Harvester	137	40
15	Combine Harvester Kecil	96	92
16	Combine Harvester Menengah	98	114
17	Combine Harvester Besar	68	75
18	Corn Combine Harvester	15	9
19	Pengungkit Ubi Kayu/Ubi Jalar	1	1
20	Paddy Thresher	16.251	13.146
21	Corn Sheller	1.021	656
22	Perontok Kedelai/Thresher	500	11
23	Power Thresher Multiguna	851	449
24	Winower	103	40
25	Flat Bed Dryer	83	24
26	Continuous Dryer	24	14
27	Small Rice Mill	1.200	689
28	Medium Rice Mill	641	436
29	Large Rice Mill	310	199
30	Silo	33	9
31	Alat Pembuat Pupuk Organik	166	116
32	Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)	1.561	856

NO	BANTUAN	JUMLAH (Unit)	
		2016	2017
33	Kelompok Tani (POKTAN)	14.632	6.629
34	Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	1.111	450
35	Koperasi Unit Desa (KUD)	159	44
36	Kios Sarana Produksi Pertanian (SAPROTAN)	1.400	569
37	Kelompok Penangkar Benih	214	98
38	Regu Pengendali Hama	324	40

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Penyediaan pupuk bersubsidi yang tersedia tepat waktu, tepat jumlah dan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) memberi andil besar dalam menyukseskan program swasembada pangan di NTB. Pasalnya, ketersediaan pupuk yang memadai sangat menunjang dan menentukan keberhasilan produksi pertanian para petani. Tahun 2017 alokasi dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.149 Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi NTB Tahun 2016-2017

NO	JENIS PUPUK	TAHUN	ALOKASI (Ton)	REALISASI	
				(Ton)	(%)
1	UREA	2016	139.495,00	139.495,00	100,00
		2017	165.330,00	164.246,45	99,34
2	SP-36	2016	19.100,00	17.842,00	93,41
		2017	17.069,00	17.069,00	100,00
3	ZA	2016	16.000,00	14.330,00	89,56
		2017	18.047,00	18.046,50	100,00
4	NPK	2016	46.601,00	47.836,00	102,65
		2017	59.160,00	54.122,00	91,48
5	ORGANIK	2016		6.436,00	87,95
		2017	7.927,00	7.765,00	97,96

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2017

Dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan, ketersediaan benih unggul bersertifikat yang tepat jumlah dan waktunya merupakan faktor utama untuk mendapatkan hasil produksi dan produktivitas pertanian yang tinggi. Hasil sertifikasi luas lulus lapangan tanaman pangan padi, jagung dan kedelai yang dilakukan oleh UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pertanian (BPSB-P) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.150 Hasil Sertifikasi Luas Lulus Lapangan Tanaman Pangan Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2016-2017

NO	KOMODITI	LUAS LULUS LAPANGAN (Ha)	
		2016	2017
1.	Padi	4.089,26	4.350,84
2.	Jagung	14,50	12,30
3.	Kedelai	3.820,09	2.575,07

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2017

Dalam rangka pengamanan produksi tanaman pangan terhadap gangguan OPT diperlukan upaya pengendalian didalam sistem budidayanya.

Sebagai unit perlindungan tanaman terhadap gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Unit Pelaksana Tugas daerah (UPTD) Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPT-P) Provinsi NTB terus berupaya melakukan pengendalian dan pencegahan berbagai serangan OPT dan mengantisipasi Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada komoditi tanaman pangan. Luas serangan OPT pada tanaman pangan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.151 Luas Serangan OPT Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2016-2017

NO	KOMODITI	LUAS SERANGAN OPT (Ha)		
		2016	2017	PENURUNAN /PENINGKATAN (Ha)
1.	Padi	6011,55	5.387,54	(624,01*)
2.	Jagung	498,15	687,65	189,50**
3.	Kedelai	484,50	283,05	(201,45*)

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2017

(*) Menurun ** Meningkat

Dalam kegiatan budidaya tanaman, benih menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penentu keberhasilan. UPTD Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P) Provinsi NTB, merupakan unit penyediaan benih yang bersertifikat kepada penangkar dan petani. Hasil perbanyakan benih padi, jagung dan kedelai UPT BBI-P, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.152 Perbanyakan Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2016-2017

NO	KOMODITI	2016	JUMLAH PRODUKSI (KG)	
			2017	
			PRODUKSI	KETERANGAN
1.	Padi	73.290	2.650	Target perbanyakan produksi padi tahun 2017 sebesar 94.900 kg dengan luas 32 ha, realisasi 1 ha dengan produksi 2.650 kg. Dipertanaman masih 31 ha pada MH 2017/2018. Sehingga prediksi total produksi pada saat panen bulan Maret –April 2018 sebesar : 2.960 x 31 Ha=91,760 kg
2.	Jagung	5.110	-	Tidak diprogramkan
3.	Kedelai	1.630	-	Tidak diprogramkan karena 3 tahun terakhir tidak mencapai target

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2017

▪ Produksi Tanaman Perkebunan

Selain komoditi pertanian Provinsi NTB juga memiliki komoditi unggulan di bidang perkebunan. Komoditi andalan pada sektor perkebunan tersebut adalah jambu mete, kopi, tembakau, kakao, dan kelapa. Produksi komoditi perkebunan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.153 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan di Provinsi NTB Tahun 2016-2017

NO	KOMODITI	PRODUKSI (TON)	PRODUKSI (Ton)	
			2017	
		2016	Target	Realisasi **)
1	Kopi	4.641,41	4.954,78	4.865,15
2	Kelapa	45.998,17	50.801,02	48.346,30
3	Kakao	2.110,66	2.044,77	2.083,37
4	Jambu Mete	12.765,32	11.947,36	12.734,03
5	Tembakau	39.589,90	35.840,23	50.680,13

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2017

**) ASEM (angka sementara) tahun 2017

Dilihat dari capaian produksi komoditi perkebunan tahun 2017 komoditas kopi dan kelapa tidak mencapai target RPJMD 2013-2018 yang telah ditentukan, produksi komoditas kopi sebesar 4.865,15 ton dengan target RPJMD sebesar 4.954,78 ton, begitu juga halnya komoditi kelapa hanya mencapai 48.346,30 ton dari target RPJMD 50.801,02 ton. Sedangkan komoditas tembakau meningkat 141,41 persen disusul komoditas jambu mete 106,58 persen. Penurunan produksi kopi, kelapa dan kakao disebabkan oleh alih fungsi lahan, penebangan tanaman perkebunan dan tanaman yang ada sudah tua/rusak.

Langkah-langkah untuk meningkatkan produksi komoditas unggulan perkebunan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi/peremajaan, mengingat tanaman kelapa dan jambu metedi NTB sudah tua ± berumur 15 tahun keatas
2. Perluasan areal Penanaman karena adanya alih fungsi lahan perkebunan.
3. Melakukan teknologi sambung pucuk untuk tanaman kopi,
4. Intensifikasi pada tanaman perkebunan dengan pemberian sarana produksi (pupuk dan obat-obatan) dan pengendalian hama/penyakit.
5. Pengendalian serangan OPT, sehingga penyebaran hama/penyakit tidak meluas pada tanaman yang masih produktif.
6. Melaksanakan pemeliharaan demplot kaji terap sambung pucuk kopi seluas 10 Ha dengan 3 varietas berlokasi di kelompok tani tumpangsari desa Seelos kecamatan Gangga Lombok Utara.

▪ Komoditas Tembakau

Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu produsen terbesar tembakau jenis virginia untuk kebutuhan produksi rokok dalam negeri. Saat ini potensi lahan di NTB untuk produksi tembakau sebanyak 52 ribu ha lebih, sementara yang sudah dimanfaatkan sebanyak 32 ribu ha. Fluktuasi harga tembakau di tingkat petani setiap tahunnya masih terus terjadi, Untuk mengantisipasi masalah fluktuasi harga tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengarahkan dan berupaya mensosialisasikan agar areal tanam tembakau virginia Lombok tidak melebihi target pembelian perusahaan mitra. Perusahaan tembakau yang ada

di NTB diwajibkan menetapkan target pembelian sebelum musim tanam, dan petani diarahkan menyesuaikan dengan target pembelian tersebut. Luas dan produksi tanaman tembakau di Provinsi NTB tahun 2016-2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.154 Luas Areal, Produksi dan Jumlah Petani Pada Komoditi Tembakau Tahun 2016 - 2017

Komoditi	2016			2017**		
	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Jumlah Petani (KK)
Tembakau Virginia	19.916,09	33.463,52	25.714	25.983,81	43.054,48	31.293
Tembakau Rakyat	7.262,10	6.126,38	10.374	7.816,41	7.625,65	9.080

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2017 ** angka sementara

Produksi tembakau virginia pada tahun 2016 sebesar 33.463,52 ton mengalami peningkatan menjadi 43.054,48 ton pada tahun 2017, begitu juga halnya tembakau rakyat mengalami peningkatan dari 6.126,38 ton di tahun 2016 menjadi 7.625,65 ton tahun 2017. Dengan meningkatnya luas tanam dan produksi tembakau sudah tentu jumlah penyerapan tenaga pekerja pada komoditas tembakau meningkat, penyerapan tenaga kerja pada komoditas tembakau mencapai 40.373 orang.

b. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

• Populasi Ternak

Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi pengembangan sub sektor peternakan yang sangat besar karena didukung ketersediaan sumber daya alam, sumberdaya manusia dan kelembagaan peternakan. Upaya peningkatan populasi dan produksi peternakan dilakukan melalui program intensifikasi pengembangan komoditas terutama pada komoditas strategis yang mendukung peningkatan sektor ekonomi, menurunkan angka kemiskinan dan mendukung Ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komoditas strategis peternakan yang dikembangkan di Nusa Tenggara Barat digambarkan dalam populasi ternak sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.155 Populasi Ternak di Provinsi NTB Tahun 2016 - 2017

No	Ternak	Populasi Ternak (ekor)	
		2016	2017
1	Sapi	1.092.719	1.149.540
2	Kerbau	125.122	116.847
3	Kuda	60.532	48.367
4	Kambing	639.678	656.585
5	Domba	25.912	18.660
6	Babi	55.670	53.784
7	Ayam Ras Petelur	488.863	740.211
8	Ayam Ras Pedaging	7.536.124	8.705.364
9	Ayam Buras	8.130.691	8.104.488
10	Itik	1.118.908	957.073

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Tahun 2017

Pelestarian sumberdaya ternak sapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat harus dipertahankan bahkan ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya, sehingga dibutuhkan program dan kegiatan yang bersifat intensif-massiv dan inovatif dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan NTB BSS. Capaian kinerja subsektor peternakan (ternak sapi) sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.156 Capaian Kinerja Subsektor Peternakan (ternak sapi) Tahun 2016-2017

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2016	2017	
				TARGET	CAPAIAN
1	Populasi	Ekor	1.092.719	1.147.355	1.149.540
2	Induk Produktif	Ekor	491.724	516.310	517.293
		%	45	45	45
3	Kelahiran Pedet	Ekor	393.379	413.048	413.834
		%	80	80	
4	Kematian Pedet	Ekor	39.338	41.305	41.383
		%	10	10	10
5	Pemotongan Betina Produktif	Ekor	133	Meminimalisir pemotongan betina produktif mendekati 0 % mengacu Perda 1/ 2015	51
		%	0.40		0,62
6	Pengeluaran Bibit	Ekor	3.668	10.000	3.402
	Pengeluaran Ternak Potong	Ekor	11.342	45.500	43.378
7	Serapan Tenaga Kerja	Orang	3.433	286.839	287.385
8	Kesejahteraan Masyarakat (NTP)		117,98	100	120,60

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2017

Pertumbuhan populasi ternak sapi pada tahun 2017 sebesar 5,20 persen dari 1.092.719 ekor di tahun 2016 meningkat menjadi 1.149.540 ekor pada tahun 2017. Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan populasi ternak sapi tahun 2017 adalah peningkatan produksi pakan hijauan berkualitas, integrasi pengembangan peternakan lintas sektoral, pengendalian pemotongan betina produktif, pemeriksaan laboratorium pada beberapa kasus penyakit strategis, peningkatan mutu genetik, penanganan gangguan reproduksi pada sapi potong, pelayanan kesehatan hewan dan pemberdayaan masyarakat lokal melalui penguatan kelembagaan kelompok.

Melalui peraturan daerah Provisi Nusa Tenggara Barat nomor 1 tahun 2015 Tentang pengendalian pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif telah dilakukan upaya – upaya dalam rangka menurunkan tingkat pemotongan induk betina produkti baik di Rumah Potong Hewan (RPH) maupun pada Tempat Pemotongan Hewan (TPH). Untuk itu perlu dilaksanakan pengawasan dan pengendalian pemotongan betina produktif di RPH dan TPU seluruh kabupaten/kota. jumlah pemotongan ternak betina produktif tahun 2016 dan 2017 sebagai berikut :

Tabel 2.157 Pemotongan Ternak Betina Produktif Tahun 2015 s.d 2017

Tahun	Jumlah Pemotongan						Jumlah Sapi dan Kerbau (ekor)	Betina Produktif Dipotong (ekor)			% Betina Produktif Terhadap	
	Sapi (ekor)			Kerbau (ekor)				Sapi	Krb	Jml	Yang Dipotong	Betina yang Dipotong
	Jtn	Btn	Jml	Jtn	Btn	Jml						
2016	51.405	5.991	57.396	4.308	2.982	7.290	64.686	200	93	293	0,45	3,27
2017	55.704	5.706	61.410	3.487	2.558	6.046	67.456	47	4	51	0,08	0,62

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Tahun 2017

Jumlah pemotongan ternak ruminansia betina produktif dari tahun 2015 hingga tahun 2017 terus terjadi penurunan, jika dilihat dari tabel diatas pemotongan ternak betina produktif pada tahun 2016 sebanyak 293 ekor atau 3,27 persen dari pemotongan ternak ruminansia betina. Adapun pada tahun 2017 pemotongan ternak ruminansia betina produktif sebanyak 51 ekor atau 0,62 persen dari pemotongan ternak ruminansia betina.

Sebagai kawasan sentra produksi ternak bibit maupun ternak potong Provinsi NTB berperan dalam mensuplai kebutuhan regional dan Nasional. Kebutuhan konsumsi daging juga dipenuhi melalui pengembangan sentra produksi ternak kambing/domba serta pembentukan kawasan unggas pedesaan. Perkembangan produksi daging di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.158 Produksi Daging di Provinsi NTB Tahun 2016-2017

NO	TERNAK	PRODUKSI DAGING (Ton)	
		2016	2017
1	Kuda	246,12	196,66
2	Sapi	16.390,8	17.016,3
3	Kerbau	2.042,86	1.907,76
4	Kambing	5.404,42	5.547,26
5	Domba	156,22	112,50
6	Babi	2.887,85	2.790,01
7	Ayam Ras	7.005,81	28.582,03
8	Ayam Buras	8.755,11	8.736,64
9	Itik	1.087,58	930,27

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2017

Nusa Tenggara Barat telah mengirim beberapa komoditas ternak berdasarkan permintaan dari beberapa Provinsi di Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan antara lain DKI, Banten, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan daerah lainnya.

Tabel 2.159 Ternak Bibit dan Ternak Potong ke Luar dari Provinsi NTB Tahun 2016 - 2017

NO	JENIS TERNAK	TERNAK BIBIT KELUAR (ekor)		TERNAK POTONG KELUAR (ekor)		JUMLAH (ekor)	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Sapi	3.668	3.402	11.342	10.342	15.010	13.744
2	Kerbau	-	-	2.911	2.434	2.911	2.434
3	Kuda	-	-	1.269	1.200	1.269	1.200
4	Kambing	-	-	940	-	940	-
5	Babi	-	-	3.759	-	3.759	-

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, 2017

Pengiriman ternak bibit dan ternak potong ke provinsi lain tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016. Penurunan ini diakibatkan oleh menurunnya permintaan dari konsumen luar NTB dan imbas rendahnya harga daging import dibandingkan daging lokal.

Pengembangan peternakan di sektor hilir dilakukan melalui peningkatan nilai tambah produk dan pengaturan regulasi dan transaksi perdagangan ternak antar pulau. Meningkatnya transaksi perdagangan komoditas peternakan akan mempengaruhi secara langsung terhadap Indeks Nilai Tukar Petani sub sektor peternakan.

Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) dimaknai sebagai penerimaan petani peternak dari sektor usaha produksi yang dilakukan untuk membiayai seluruh kebutuhan berusaha pada sub sektor peternakan dan konsumsi rumah tangga peternak. NTPT dalam tahun 2016-2017 menurut analisis BPS dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.160 Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) di NTB Tahun 2016 – 2017

No	NTPT	2016	2017
1.	Januari	116,44	118,43
2.	Februari	116,14	117,67
3.	Maret	115,53	119,03
4.	April	115,89	118,80
5.	Mei	115,80	119,13
6.	Juni	116,59	120,55
7.	Juli	117,79	119,10
8.	Agustus	119,97	120,46
9.	September	122,20	119,97
10.	Oktober	121,05	131,92
11.	November	119,99	120,52
12.	Desember	118,43	121,65
Rataan NTP Peternakan		118,18	120,60

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat terukur melalui perubahan Indeks Nilai Tukar Peternak. Trend peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani di NTB adalah 117,98 ponit pada tahun 2016 meningkat menjadi 120,60 point pada tahun 2017. Perubahan Indeks Nilai Tukar Petani tersebut dimaknai sebagai peningkatan pendapatan yang diterima masyarakat peternak lebih besar dari pengeluaran dalam membiayai usaha produksi peternakan.

1) UPTD Balai Inseminasi Buatan (BIB)

Target ketersediaan straw/semén beku pada UPTD Balai Inseminasi Buatan tahun 2017 sebesar 45.000 straw namun dengan adanya program nasional “Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting” (UPSUS SIWAB) pada tahun 2017 mendorong realisasi produksi semén beku, mencapai 127.105 straw (282%). Sementara target akseptor yang ditetapkan tahun 2017

adalah 139.995 akseptor dengan realisasi 109.000 akseptor dengan capaian kelahiran 77,85 persen.

2) UPTD Balai Perbibitan Ternak Hijauan Makanan Ternak

UPTD Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak-Serading merupakan satu-satunya UPTD penyedia berbagai jenis bibit/benih hijauan makanan ternak untuk ketersediaan pakan hijauan di Nusa Tenggara Barat. Penyediaan pakan yang bermutu baik sangat berpengaruh pada kualitas sapi maupun pedet yang dihasilkan. Tahun 2017 Balai Perbibitan Ternak Hijauan Makanan Ternak Serading telah mampu memproduksi bibit/Benih HMT sebanyak 645,4 Kg.

3) UPTD Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner

Dalam rangka peningkatan pelayanan UPTD Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner telah mendapat Sertifikat Akreditasi dalam persyaratan umum untuk kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional tanggal 27 Januari 2017. Selama tahun 2017 Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) sebanyak 1.313 kasus, dan Pelayanan Kesehatan Hewan Non Penyakit Hewan Menular Strategis (non-PHMS) sebanyak 3.060 kasus.

4. KEHUTANAN

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB fokus dalam pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi hutan dan lahan kritis, dan perlindungan dan konservasi sumber daya hutan.

▪ Program Pengembangan Potensi Sumber Daya Hutan

Saat ini Dinas LHK NTB sedang mengembangkan 7 jenis HHBK, antara lain bambu, rotan, kemiri, nilam, kayu putih, madu, dan jahe merah. Pengembangan ini meliputi pengembangan dari wilayah hulu sampai ke hilirnya. Hal ini penting karena dapat mendukung kemandirian pengelolaan hutan oleh setiap KPH. Berbagai upaya yang dilakukan ialah memperluas areal penanaman untuk jenis HHBK Kemiri, pemberian kemudahan dalam proses perijinan, mendorong skema Kemitraan bersama KPH, pemberian bantuan peningkatan produksi, menyediakan biaya untuk uji laboratorium kualitas HHBK, dan pembangunan pabrik produksinya.

Sosialisasi terkait kemitraan terkait pemanfaatan kawasan hutan dan hasilnya antara masyarakat dan pihak KPH semakin ditingkatkan. Dalam APBD 2017, kegiatan ini menjadi salah satu prioritas yang dilaksanakan. Beberapa KPH sudah mulai menginisiasi proses kemitraan tersebut sehingga perlu didukung dengan proses distribusi informasi yang tepat baik metode maupun substansinya, sehingga skema kemitraan nantinya tidak seolah-olah kegiatan bagi-bagi lahan

kepada masyarakat di sekitar kawasan. Sosialisasi ini juga untuk menegaskan bahwa masyarakat yang menjadi sasaran utama Kemitraan adalah masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan. Dalam rapat rutin juga disampaikan bahwa biaya perjalanan dinas difokuskan untuk mendorong kemitraan.

Pada kegiatan pengembangan hasil hutan bukan kayu, Dinas LHK NTB telah melaksanakan sosialisasi di 8 lokasi pada 7 KPH dengan 320 orang peserta yang berasal dari kelompok tani hutan. Fasilitas peningkatan produksi HHBK juga selesai dilaksanakan pada 50 kelompok sesuai dengan sasaran pemberian bantuan HHBK. Dinas LHK telah menyediakan bantuan peralatan HHBK untuk 50 kelompok, yang terdiri dari jenis peralatan peningkatan produksi madu 32 kelompok, Pengolahan dan pengemasan kopi 3 kelompok, Pengolahan Kemiri 13 kelompok, Pengolahan Srikaya 1 kelompok dan Pengolahan Jahe 1 kelompok.

Dinas LHK selama tahun 2017 sudah melakukan Monev IPHHK di 4 kabupaten yaitu di Lombok Tengah, Dompu, Sumbawa Barat dan Sumbawa yaitu pada 16 unit IPHHK Dompu (12 unit) yang berada di wilayah KPH Tambora, Sumbawa (1 unit), KSB (2 unit) dan Lombok Tengah (1 unit). Data potensi hasil hutan kayu pada hutan hak berhasil dihimpun dari Desa Tambora Kec. Pekat Kab Dompu dan Desa Pelat Kec. Unter Iwes Kab Sumbawa. Karena kedua desa tersebut berbatasan dengan kawasan hutan dan diperkirakan rawan illegal logging, maka berdasarkan informasi dari KPH setempat pemilihan lokasi dilakukan di kedua desa tersebut.

Jasa lingkungan wisata alam terus dikembangkan dengan menyusun dokumen desain tapak pariwisata alam sebanyak 6 (enam) dokumen dimana 5 (lima) dibiayai APBD dan 1 dengan kerjasama pihak ketiga pada tahun 2017. Adapun dokumen desain tapak tersebut antara lain : Gunung Janggut (KPH Rinjani Barat Pentas), Gawah Gong (Rinjani Timur), Gili Balu (Sejorong Mataiyang Brang Rea), Panca dan Ria (Ampang Riwo Soromandi), Pulau Kelapa (Maria Donggomasa). Desain tapak Gili Balu disusun atas kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk mendukung sarana dan prasarana wisata alam, sudah dibangun Papan interpretasi Geopark di Geosite Tahura Nuraksa dan Geosite Tiu Teja Santong, serta membangun 4 unit MCK dan 4 unit Kamar Ganti dengan standar Geopark di Geosite Tiu Teja Santong. Sebagai bahan penyebarluasan informasi Geopark, Dinas LHK sudah mencetak booklet, leaflet, dan spanduk yang sudah didistribusikan ke KPH, Dinas Pariwisata, Masyarakat dan SKPD terkait yang ada dalam cakupan Geopark Rinjani dan Tambora.

▪ **Program rehabilitasi hutan dan lahan kritis**

Untuk Tahun 2017, target 3.800 Hektar direncanakan berasal dari kegiatan rehabilitasi lahan kritis seluas 1.700 Ha, Penyediaan bibit sebanyak 700.000 batang yang ekuivalen dengan lahan seluas 1.400 Ha (dengan asumsi jarak tanam 4 x 5 m dan jumlah bibit per hektarnya 500 batang) dan rehabilitasi daerah tangkapan air seluas 700 Ha. Selain itu, Dinas LHK juga akan melaksanakan pembangunan Dam Penahan dan Dam Pengendali untuk mengurangi daya rusak air pada lahan kritis. Untuk mendukung pengembangan jenis tanaman endemik yang berkualitas baik, juga dilaksanakan pengembangan

perbenihan tanaman hutan dengan target 5 jenis. Untuk mendorong efektifitas pelaksanaan program, telah dilaksanakan pertemuan dengan masyarakat, pengukuran calon lokasi RHL serta penyusunan Rancangan Teknisnya bersama KPH dan Pemerintah Desa.

Sampai bulan Desember 2017, terdapat beberapa perusahaan pemegang ijin pinjam pakai kawasan hutan yang telah melakukan RHL di wilayah kerjanya. PT. Sumbawa Juta Raya memiliki rencana penanaman dan pemeliharaan DAS pada kawasan Hutan Lindung seluas 1.103 ha dalam wilayah DAS Moyo, Kec. Lopok Kab. Sumbawa. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.5640/Menlhk-PDASHL/KTA/DAS.1/10/2017 tentang Penetapan Lokasi Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Atas Nama PT. Sumbawa Juta Raya tanggal 26 Oktober 2017. Kegiatan penanaman dan pemeliharaan dilakukan secara bertahap sampai pada tahun 2026.

Program RHL juga didukung oleh beberapa LSM, diantaranya oleh GAIA, beberapa kegiatan yang didukung oleh GAIA antara lain :

1. Pendataan potensi di areal seluas 500 Ha sebagai baseline data
2. Batang bibit sebanyak 112.500 batang didominasi oleh jenis buah-buahan dan ditanami pada lahan seluas 500 Ha
3. Pelatihan pembibitan dan pembangunan kebun rakyat

Sedangkan untuk PT. XL Axiata, telah melaksanakan rehabilitasi seluas 6 ha di Desa Mama, Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa.

▪ **Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan**

Pada Tahun 2017, program ini melaksanakan 3 jenis kegiatan yaitu Operasi Pengamanan Hutan dengan indikator Perlindungan seluas 3.350 Ha. Fokus dalam rangka mendukung kegiatan perlindungan hutan, Dinas LHK NTB mengalokasikan biaya bagi kegiatan patroli rutin di setiap KPH. Biaya ini untuk mendukung salah satu inovasi Dinas LHK yaitu pengamanan hutan berlapis dimana petugas lapangan melaksanakan penjagaan selama 24 jam dan 7 hari seminggu. Selain itu juga dilakukan koordinasi intensif antar KPH sehingga setiap informasi dari salah satu KPH langsung ditindaklanjuti oleh KPH di sekitarnya atau yang menjadi jalur lintasan peredaran hasil hutan ilegalnya. Upaya perlindungan juga dilakukan melalui penyampaian informasi dengan menyediakan papan informasi dan papan larangan pada wilayah KPH dengan harapan masyarakat atau publik mengetahui batas-batas kawasan hutan di tingkat lapangan.

Selain itu, Dinas LHK NTB melakukan penguatan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi NTB Tahun 2017 yang terdiri dari Gubernur, Kapolda NTB, Danrem NTB, Kajati NTB. Satgas ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB dengan anggota yang terdiri dari para pihak yang berasal dari unsur-unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pol PP, Polhut sampai ke tingkat lapangan. Selain Satgas tersebut di atas, Dinas LHK NTB juga membentuk Satgas Pengendali Operasi Perusakan Hutan Provinsi NTB Tahun 2017 yang terdiri dari para Dandim, Kajari dan Kapolres pada beberapa kabupaten.

Dalam kegiatan ini juga dialokasikan anggaran untuk pengurusan barang bukti, biaya pemberkasan tindak pidana kehutanan dan belanja jasa tenaga pengamanan hutan swadaya masyarakat. Tenaga pengamanan swadaya ini berasal dari masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan dengan salah satu nilai pokok dalam rekrutmennya adalah nilai ketokohnya. Bagi 4 KPH yang sudah terbentuk terlebih dahulu, jumlah tenaga pengamanan berkisar antara 40 sampai dengan 100 orang, namun bagi 7 KPH yang baru terbentuk, jumlah tenaga pengamanan hutan swadaya dialokasikan sebanyak 5 orang/KPH. Jumlah ini akan disesuaikan selanjutnya dengan kebutuhan riil KPH di tingkat lapangan. Dalam kegiatan ini juga dialokasikan pengurusan Buku PAS dan SIM Senjata api, termasuk biaya untuk pelatihan menembak bagi POLHUT.

Dengan anggaran yang tersedia, diharapkan setiap KPH mampu melaksanakan patrol secara rutin di wilayahnya dengan menentukan wilayah-wilayah yang menjadi prioritas penanganan. Data/informasi kegiatan pengamanan hutan masih terkendala input dari masing-masing KPH. Seharusnya data ini berisi tentang data gangguan keamanan hutan, data kebakaran hutan, termasuk hal-hal apa yang sudah dilakukan untuk menanganinya. Jika dalam 1 kali patroli dapat menjangkau areal seluas 10 ha setiap harinya, maka sampai Desember 2017 ini sudah tercover wilayah seluas ± 43.438 ha atau jauh di atas target yang ditetapkan. Laporan ini akan diverifikasi melalui laporan yang akan disampaikan setiap akhir tahun oleh masing-masing KPH.

Progress perlindungan ini juga terlihat dari realisasi anggaran dari tingkat lapangan yang didominasi oleh kegiatan patroli. Untuk penyediaan papan informasi dan papan peringatan, saat ini sudah selesai dikumpulkan materi dan desain dari masing-masing KPH untuk kemudian diproses pengadaan barang dan jasanya oleh Pejabat Pengadaan di Dinas LHK NTB. Sebagai informasi pembandingan, berikut adalah capaian program strategis bidang kehutanan pada tahun 2016 dan tahun 2017.

Tabel 2.161 Capaian Program Strategis Bidang Kehutanan Tahun 2017

NO	PROGRAM/INDIKATOR	2016		2017	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan					
11	Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan	5 jenis	5 jenis	5 jenis	5 jenis
12	Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	2491 Ha	2491 Ha	2400 Ha	3800 ha
13	Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan	310 Ha	310 Ha	350 Ha	20.665 Ha
14	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	6 dokumen
KPHL Rinjani Barat					
1	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	1 jenis	1 jenis	2 jenis	3 jenis
2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	300 Ha	300 Ha	100 Ha	300 Ha
3	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	500 Ha	500 Ha	1500 Ha	9.763 Ha
KPHP Tambora					

1	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	1 Jenis	1 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	140 Ha	140 Ha	100 Ha	100 Ha
3	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	500 Ha	500 Ha	500 Ha	4.462 Ha
KPHP Maria Donggomassa					
1	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	1 Jenis	1 Jenis	2 Jenis	3 Jenis
2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	140 Ha	140 Ha	100 Ha	100 Ha
3	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	500 Ha	500 Ha	500 Ha	3.727 Ha
KPHL Ampang Riwo Soromandi					
1	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	1 Jenis	1 Jenis	2 Jenis	4 Jenis
2	Program rehabilitasi hutan dan lahan	50 Ha	50 Ha	120 Ha	120 Ha
3	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	500 Ha	500 Ha	500 Ha	4.822 Ha

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, 2017

5. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan urusan pemerintahan bidang ESDM hanya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Urusan pemerintahan bidang ESDM di Kabupaten/Kota berpindah menjadi kewenangan Provinsi. Sementara itu terkait sub urusan minyak dan gas serta pengawasan pertambangan mineral dan batubara yang sebelumnya menjadi kewenangan provinsi beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan perubahan kewenangan terkait Urusan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka untuk tahun 2017 urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB.

Isu strategis di sektor ESDM saling terkait dengan aspek infrastruktur dasar, ekonomi dan lingkungan hidup. Isu strategis yang memerlukan penanganan langsung diantaranya adalah angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar sektor. Dari isu tersebut, sektor ESDM mencoba merumuskannya kembali sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pengemban amanah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTB.

Fokus kebijakan ESDM selama periode 2013-2018 diikhtiarkan untuk menjawab isu strategis sebagai berikut :

1. Belum mencukupinya daya dukung dan kapasitas energi listrik dan air bersih.

2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya geologi.
3. NTB berada pada rangkaian sabuk gunung api yang memiliki potensi bencana alam geologi.
4. Menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Guna menjawab isu strategis tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengikhtikarkan langkah-langkah yang dapat mempercepat penyelesaian masalah tersebut melalui program dan kegiatan terobosan sebagai berikut :

▪ **Menjangkau Harapan Masyarakat Melalui Listrik**

Upaya meningkatkan rasio elektrifikasi dilakukan dengan menyediakan kebutuhan listrik bagi masyarakat yang belum menikmati layanan listrik baik melalui jaringan PLN maupun Non PLN. Beberapa terobosan yang telah dan sedang dilaksanakan diantaranya melalui:

1. Program 'Listrik Murah dan Hemat' yaitu memberikan sambungan listrik gratis pada masyarakat yang sudah dilalui oleh jaringan listrik PLN namun belum dapat menikmati listrik. Harapannya dengan sambungan listrik tersebut dapat masyarakat meningkatkan produktifitasnya dalam mencapai kesejahteraan.
2. Pembangunan Penerangan Jalan Umum *Lighting Emitting Diode* (PJU-LED) jaringan listrik PLN yang dipasang di sepanjang jalan Negara mulai dari gerbang barat Pulau Lombok di Pelabuhan Lembar hingga di ujung timur di Pelabuhan Kayangan. Selanjutnya pembangunan penerangan jalan umum juga dilaksanakan mulai dari pelabuhan Poto Tano di ujung barat hingga pelabuhan Sape di ujung timur P. Sumbawa yang akan menjadi pelita di sepanjang ruas jalan negara.

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi yaitu dengan membangun fasilitas kebutuhan energi masyarakat secara mandiri bagi wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN. Program ini menitikberatkan pada pemanfaatan sumber energi terbarukan sesuai dengan potensi energi alam setempat seperti: pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baik secara tersebar maupun terpusat (komunal) dan hybrid PLT Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

▪ **Rasio Elektrifikasi**

Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral terkait dengan RPJMD 2013-2018 adalah peningkatan cakupan listrik/rasio elektrifikasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.162 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2016 s/d 2017

No	Indikator Kinerja		Satuan	2016	2017
1	Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi)	Target	persen	70,34	72,67
		Realisasi		77,89	85,10
		Capaian		110,73	117,10

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2017

Cakupan Listrik (Rasio Elektrifikasi) merupakan persentase penduduk (KK) NTB yang dapat menikmati listrik, angkanya diperoleh dari perbandingan jumlah KK

yang berlistrik dibanding dengan jumlah seluruh KK, dikali 100 persen. Angka capaian kinerjanya adalah jumlah kumulatif yang bisa dicapai sampai dengan Tahun 2017. Angka rasio elektrifikasi yang dimaksud adalah terdiri dari rasio elektrifikasi PLN dan rasio elektrifikasi non PLN.

Tabel 2.163 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2017

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga (RT)	RT Berlistrik Non PLN	RE non PLN (persen)	RT Berlistrik PLN	RE PLN (persen)	RE Total (persen)
1	Kota Mataram	125.620	-	-	141.117	112,34	112,34
2	Kab. Lombok Utara	59.562	2.210	3,71	50.127	84,16	87,87
3	Kab. Lombok Barat	186.777	2.632	1,41	136.658	73,17	74,58
4	Kab. Lombok Tengah	275.267	3.511	1,28	214.886	78,06	79,34
5	Kab. Lombok Timur	344.358	3.627	1,05	274.955	79,85	80,90
6	Kab. Sumbawa Barat	34.983	1.179	3,37	30.738	87,87	91,24
7	Kab. Sumbawa	116.015	3.788	3,27	105.936	91,31	94,58
8	Kab. Dompu	58.758	1.793	3,05	53.892	91,72	94,77
9	Kab. Bima	118.606	2.937	2,48	94.403	79,59	82,07
10	Kota Bima	40.681	76	0,19	33.402	82,11	82,11
Total		1.360.627	21.753	1,60	1.136.114	83,50	85,10

Sumber : (1) Badan Pusat Statistik, Tahun 2016 (diolah)

(2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tahun 2017

(3) PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, 31 Desember 2017

Dari tabel diatas diketahui sampai akhir tahun 2017 jumlah penduduk yang telah menikmati listrik sebanyak 1.157.867 KK atau 85,10 persen dari Penduduk 1.360.627 KK. Dengan kata lain masih ada sekitar 14,90 persen 202.760 KK penduduk NTB belum menikmati layanan listrik.

Target peningkatan RE tahun 2017 dalam RPJMD Tahun 2013-2018 sebesar 72,67 persen atau meningkat 2,33 persen dari tahun 2016 sebesar 70,34 persen. Namun demikian realisasi RE sampai dengan akhir tahun 2017 sebesar 85,10 persen, atau telah melampaui 12,43 persen dari target RE tahun 2017 dengan capaian 117,10 persen. Jika dibandingkan dengan capaian RE Tahun 2016 capaian RE Tahun 2017 jauh lebih baik, dimana pada tahun 2016 target RE sebesar 70,34 persen dengan realisasi RE sebesar 77,88 persen atau melebihi 7,54 persen dengan capaian 110,72 persen. Dengan demikian capaian RE tahun 2017 mengalami peningkatan 6,38 persen dari tahun 2016. Namun demikian, jika dibandingkan dengan RE Nasional tahun 2017 angka tersebut masih jauh lebih rendah, dimana RE nasional sebesar 94,91 persen.

Capaian target RE dicapai melalui layanan listrik konvensional PLN dan layanan Energi Baru Terbarukan untuk wilayah yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN. Target peningkatan RE direalisasikan melalui pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang bersumber dari dana APBD, APBN, dukungan PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, serta swasta yang memiliki usaha di bidang ketenagalistrikan.

Kebutuhan energi listrik di Provinsi NTB sebagian besar disediakan oleh PLN sebagai perusahaan milik negara yang bertugas untuk mengusahakan penyediaan tenaga listrik. Dari capaian RE sebesar 85,10 persen, sebesar 83,10 persen diantaranya merupakan cakupan RE yang berasal dari PLN dengan menggunakan pembangkit

konvensional (PLTU dan PLTD). Sedangkan sisanya sebanyak 1,60 persen berasal dari energi baru terbarukan yang pembangunannya dilakukan oleh pemerintah (PLTS, PLTMH dan PLT Bayu).

Untuk meningkatkan cakupan listrik dibutuhkan ketersediaan daya yang memadai dan jaringan yang luas. Usaha penyediaan listrik termasuk kedalam kriteria usaha yang padat teknologi dan padat modal, karenanya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagalistrikan cukup tinggi. PLN sebagai perusahaan penyedia energi listrik jaringannya belum menjangkau semua wilayah Provinsi NTB karena minimnya akses menuju wilayah tersebut. Karenanya untuk melayani kebutuhan energi listrik pada daerah kepulauan dan daerah perbatasan yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN Pemerintah telah mengembangkan pemanfaatan energi baru terbarukan yang bersumber dari tenaga matahari, tenaga air dan tenaga angin dengan pembiayaan yang berasal dari APBN, Anggaran PLN, APBD, dan swasta melalui Independent Power Producer (IPP).

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian rasio elektrifikasi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, dilaksanakan melalui Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan, dengan kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan, yang terdiri dari :
 - a) Pemasangan Listrik Murah dan Hemat (penyambungan listrik gratis) terhadap 1.710 Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang termasuk dalam keluarga miskin berdasarkan basis data terpadu TNP2K dengan alokasi di Kota Mataram 80 RTS, Kabupaten Lombok Barat 215 RTS, Kabupaten Lombok Utara 125 RTS, Kabupaten Lombok Tengah 275 RTS, Kabupaten Lombok Timur 425 RTS, Kabupaten Sumbawa Barat 50 RTS, Kabupaten Sumbawa 175 RTS, Kabupaten Dompu 125 RTS, Kabupaten Bima 150 RTS dan Kota Bima 90 RTS. Sampai akhir tahun 2017 telah terealisasi 1.710 RTS (100 persen);
 - b) Pembangunan Fasilitas Penerangan Jalan Umum Light Emitting Diode (PJU-LED) yang bersumber dari listrik PLN sebanyak 200 titik (2 Paket) yang terdiri dari :
 - 1 Paket Lanjutan PJU pada Ruas Jalan Nasional Pulau Sumbawa 100 Titik, sampai akhir tahun 2017 terealisasi sebanyak 100 titik (100 persen);
 - 1 Paket Pembangunan PJU Mataram-KLU-Labuhan Lombok 100 Titik, sampai akhir tahun 2017 terealisasi sebanyak 100 titik (100 persen);
 - c) Pembangunan Penerangan Fasilitas Umum Tenaga Surya (PJUTS) sebanyak 13 unit, dengan lokasi Kota Mataram 3 unit; Kabupaten Lombok Timur 2 unit; Kabupaten Lombok Barat 4 unit dan Kabupaten Sumbawa 4 unit. Sampai akhir tahun 2017 telah terealisasi sebanyak 13 unit (100 persen);

- 2) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi, dilaksanakan melalui kegiatan: Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, yang terdiri dari:
 - a) Pembangunan dan Pemasangan 150 unit PLTS Tersebar kapasitas @100Wp, yang dilaksanakan di 3 Kabupaten terdiri dari :
 - Pemasangan 36 unit PLTS Tersebar di Dusun Pengadungan, Desa Sambik Elen, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
 - Pemasangan 58 unit PLTS Tersebar di Desa Sajang dan Desa Sembalun Timba Gading Kec. Sembalun, Kab. Lombok Timur; dan
 - Pemasangan 56 unit PLTS Tersebar di Desa Pekat dan Desa Doropeti, Kec. Pekat, Kab. Dompu;Sampai dengan akhir tahun 2017 terealisasi 150 unit (100 persen);
- 3) Pembangunan Digester Biogas 4 m³ sebanyak 160 unit pada 4 kabupaten terdiri dari: Kabupaten Lombok Barat 25 unit, Kabupaten Lombok Tengah 30 unit, Kabupaten Lombok Timur 75 unit dan Kabupaten Sumbawa 30 unit. Sampai akhir tahun 2017 terealisasi sebanyak 160 Unit (100 persen).

▪ **Dukungan Pemerintah Pusat dan Swasta (IPP)**

Investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan urusan bidang ESDM cukup tinggi, seperti halnya untuk pengembangan ketenagalistrikan merupakan usaha padat modal dan padat teknologi, sehingga dibutuhkan biaya tinggi. Penyediaan tenaga listrik di NTB dikembangkan melalui dua cara yaitu melalui listrik konvensional PT. PLN (*on grid*) dan layanan Energi Baru Terbarukan (*off grid*) yang dikembangkan untuk wilayah yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN, karena minimnya akses menuju wilayah tersebut.

Target peningkatan rasio elektrifikasi sampai dengan akhir Tahun 2017 direalisasikan melalui pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan selain bersumber dari dana APBD, juga terdapat kontribusi Pemerintah Pusat melalui APBN, dukungan PT. PLN (Persero) Wilayah NTB, serta swasta melalui Independent Power Producer (IPP).

Program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian rasio elektrifikasi adalah sebagai berikut:

- 1). Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan di Provinsi NTB dengan Pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2017.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM mempunyai Program Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE). Program ini akan dilaksanakan pada tahun 2017-2019 untuk menerangi 2.519 desa yang masih gelap gulita atau 293.532 rumah (data BPS) di daerah kepulauan dan perbatasan serta daerah yang belum mendapatkan akses listrik di seluruh Indonesia. Pada tahun 2017 Provinsi NTB mendapatkan alokasi 863 unit LTSHE dengan kapasitas @30Wp yang tersebar :

 - Desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.
 - Desa Sekaroh, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.
 - Desa Puncak Jeringo, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur.

- Desa Mokong, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.
 - Desa Pekat, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu.
 - Desa Soritatanga, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu.
 - Desa Labuan Kananga, Kecamatan Tambora, Kabupaten Bima.
- 2). Pengembangan ketenagalistrikan saat ini memberikan kesempatan bagi badan usaha swasta untuk memproduksi listrik melalui Independent Power Producer (IPP). Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT. PLN dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2013 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait. Sebagai bagian dari target pembangunan ketenagalistrikan 35.000 MW, di Provinsi NTB telah direncanakan mendapat tambahan daya sebesar 500 MW hingga tahun 2021 mendatang yang berasal dari:

Tabel 2.164 Rencana Pembangunan Pembangkit di Provinsi NTB

No	Pembangkit	Lokasi	Kapasitas (MW)	Target COD	Keterangan
1	PLTGU Lombok Peaker	Tanjung karang, Mataram	150	2018/2019	Pengadaan
2	Mobile Power Plant	Jeranjang, Lobar	50	2016	Sudah Operasi
3	PLTMG Sumbawa	Badas, Sumbawa	50	2018	Pengadaan
4	PLTMG Bima	Bonto, Bima	50	2018	Pengadaan
5	PLTU Lombok (FTP2)	Sambelia, Lotim	2 x 50	2019/2020	Pengadaan
6	Lombok 2	Sambelia, Lotim	2 x 50	2020/2021	Perencanaan
Total			500		

Sumber : PLN Wilayah NTB Tahun 2017

Sedangkan pengembangan ketenagalistrikan yang berasal dari tenaga air yang dikembangkan oleh PLN baik yang menggunakan skema penganggaran pemerintah maupun bersumber dari IPP terdiri dari :

Tabel 2.165 Daftar PLT Hidro yang Sudah COD (Comercial Operation Date)

No	PLTMH	Kapasita (MW)	Pemilik	Grid
1.	Pengga	0,4	PLN	Lombok
2.	Narmada	0,1	PLN	Lombok
3.	Santong	1	PLN	Lombok
4.	Mamak	0,4	PLN	Sumbawa
5.	Kukusan	0,2	IPP	Lombok
6.	Kokok Putih	3,8	IPP	Lombok
7.	Cakra	0,6	IPP	Lombok
8.	Sesaot	1	IPP	Lombok
9.	Segara	7	IPP	Lombok

No	PLTMH	Kapasita (MW)	Pemilik	Grid
	Jumlah	14,5		

Sumber : PLN Wilayah NTB Tahun 2017

Tabel 2.166 Daftar PLT Hidro yang Belum COD (*Comercial Operation Date*)

No	PLTMH	Kapasita (MW)	Pemilik	Grid
1	Kokok Kumbi Sedau	1,3	IPP	Lombok
2	Karang Bayan	1,3	IPP	Lombok
3	Batu Bedil	0,55	IPP	Lombok
4	Bintang Bano	8,8	IPP	Sumbawa
5	Brang Rea	6,2	IPP	Sumbawa
6	Kokok Babak	3,8	IPP	Lombok
7	Pringgarata	0,29	IPP	Lombok
8	Nirbaya	0,63	IPP	Lombok
9	Lingsar	3,2	PLN	Lombok
10	Brang Beh	20	PLN	Sumbawa
	Jumlah	46,1		

Sumber : PLN Wilayah NTB Tahun 2017

Sedangkan untuk pengembangan ketenagalistrikan oleh PLN yang berasal dari tenaga surya terdiri dari :

Tabel 2.167 Daftar PLTS Eksisting

No	PLTS	Kapasitas (kWp)	Grid
1	Gili Trawangan	600	Lombok
2	Gili Meno	60	Lombok
3	Gili Air	160	Lombok
	Jumlah	820	

Sumber : PLN Wilayah NTB Tahun 2017

Tabel 2.168 Daftar pengembang PLTS skema *Bussines to Bussines*

No	Pengembang	PLTS	Kapasitas (MWp)	Grid
1	PT. Infrastruktur Terbarukan Adhiguna	Pringgabaya Lombok Timur	5	Lombok
2	PT. Infrastruktur Terbarukan Buana	Selong Lombok Timur	5	Lombok
3	PT. Infrastruktur Terbarukan Cemerlang	Sengkol Lombok Tengah	5	Lombok
4	PT. Delapan Menit Energi	Kuta Lombok Tengah	5	Lombok
		Jumlah	20	Lombok

Sumber : PLN Wilayah NTB Tahun 2017

Dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2017, capaian Rasio Elektrifikasi (RE) pada tahun 2017 sebesar 85,10 persen , telah melampaui target Rasio Elektrifikasi sebesar 11,79 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar 72,67 persen, sehingga capaiannya sebesar 117,1 persen.

▪ Cakupan Air Bersih

Cakupan air bersih merupakan indikator kinerja pendukung, pada indikator ini Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pendukung strategis, bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPBD dan Dinas Sosial, sementara sebagai Perangkat Daerah utama pengelolanya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Cakupan air bersih merupakan prosentase jumlah penduduk NTB yang dapat menikmati air bersih, angkanya diperoleh dari perbandingan antara jumlah penduduk yang dapat menikmati air bersih dibanding dengan jumlah seluruh penduduk NTB dikalikan 100 persen.

Cakupan air bersih terdiri dari dua macam yaitu cakupan air bersih perkotaan dan cakupan air bersih perdesaan. Dinas ESDM Provinsi NTB mendukung cakupan air bersih perdesaan dimana untuk tahun 2017 ditargetkan sebesar 80,18 persen dengan realisasi sebesar 79,79 persen.

Melalui Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan kontribusi cakupan air bersih perdesaan dengan membangun sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah berupa pembangunan sumur bor produksi. Pembangunan sumur bor pada 9 (sembilan) lokasi di 3 (tiga) Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kabupaten Lombok Barat sebanyak 2 unit sumur bor masing-masing di Desa Golong, Kecamatan Narmada dan Desa Taman Baru, Kecamatan Sekotong.
- b. Kabupaten Lombok Timur sebanyak 5 unit sumur bor masing-masing di Desa Gerisak Semanggaleng, Kecamatan Sakra Barat, Desa Tanak Kaken, Kecamatan Sakra Barat, Desa Keruak, Kecamatan Keruak, Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik dan Desa Sembalun Timba Gading, Kecamatan Sembalun.
- c. Kabupaten Sumbawa sebanyak 2 unit sumur bor masing-masing di Desa Brang Rea, Kecamatan Moyo Hulu dan Desa Pemangong, Kecamatan Lenangguar.

Berdasarkan debit air pada masing-masing sumur bor, dapat diketahui kemampuan menyuplai air tanah dengan asumsi 85 KK/sumur bor. Sumur bor yang bisa langsung dimanfaatkan pada tahun 2017 ini berjumlah 9 unit sumur bor yang dibangun dengan pembiayaan APBD Provinsi NTB, yang seluruhnya berjenis sumur bor produksi. Dari sini dapat diasumsikan bahwa seluruh sumur bor yang telah selesai dibangun sampai dengan akhir TA.2017 sebanyak 9 unit dapat menyuplai air kepada 765 KK. Dengan demikian, target tahun 2017 yang ditetapkan dalam Revisi Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 2013-2018 berjumlah 600 KK dapat terlampaui dengan capaian 127,5persen. Capaian ini selanjutnya akan dikonsolidasikan untuk mendukung prosentase cakupan air bersih perdesaan sebagai Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB 2013-2018, sebesar 80,18 persen, dan dapat direalisasikan sebesar 79,79 persen untuk tahun 2017, dengan capaian 99,51 persen. Dengan demikian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai Pendukung kinerja peningkatan cakupan air bersih perdesaan sampai dengan akhir tahun 2017 ini mampu berkontribusi sebesar 0,06 persen dalam upaya meningkatkan cakupan air bersih wilayah perdesaan. Angka 0,06 persen dihitung dari jumlah KK terlayani air bersih sebanyak 765 KK dibagi jumlah KK di Provinsi NTB 1.343.979 KK.

Sementara sumur bor pembiayaan APBN, dilaksanakan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM, melalui Program Penelitian, Mitigasi dan pelayanan Geologi, Sub Program Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah, Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Melalui Pengeboran Air Tanah. Adapun sumur bor yang dibangun berjenis sumur bor produksi sebanyak 9 titik yang dibangun beberapa lokasi sebagai berikut:

- a. Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
- b. Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah
- c. Dusun Aik Dalem Desa Angaraksa, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur
- d. Universitas Teknologi Sumbawa Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa
- e. Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.
- f. Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa.
- g. Desa Kampasi Meci, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu.
- h. Desa Lanci Jaya, Kecamatan Manggalewa, Kabupaten Dompu.
- i. Desa Senayan Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

▪ **Mendukung pengembangan Geopark sebagai salah satu tujuan wisata**

Sejak tahun 2009 Dinas ESDM turut berperan aktif dalam pengembangan Geopark (taman bumi), yang diawali dengan Geopark Rinjani hingga diakui menjadi Geopark Nasional pada tahun 2013. Saat ini Geopark Rinjani sedang dalam proses menjadi Geopark Internasional sebagai bagian dari Global Geopark Network (GGN) yang diperkirakan akan dicapai pada tahun 2018. Selain Rinjani, dikembangkan juga Geopark Tambora yang wilayahnya meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima dimana terdapat Gunung Tambora. Pada tahun 2017 Geopark Tambora berhasil masuk dalam Geopark Nasional.

Peran Dinas ESDM Provinsi NTB dalam pengembangan Geopark diantaranya terlibat langsung dalam penyusunan Dozier, melakukan pengkajian keanekaragaman geologi, penentuan geosite, sosialisasi terhadap masyarakat, pemasangan signboard, papan informasi geosite, papan penunjuk arah geosite, mengikuti seminar dan acara-acara Geopark baik skala regional, nasional maupun internasional. Keseriusan dalam pengembangan Geopark di Provinsi NTB ditunjukkan dengan semakin meningkatnya anggaran dalam rangka mendukung pengembangan Geopark.

▪ **Mendukung pertumbuhan ekonomi dan laju investasi melalui usaha pertambangan mineral dan batubara**

Investasi sektor pertambangan energi dan kelistrikan masih menjadi tumpuan Provinsi NTB. Sebagai gambaran, berdasarkan data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi tahun 2017 dari investasi yang masuk sebesar Rp.11,28 triliun, sektor pertambangan energi dan kelistrikan berkontribusi sebesar Rp. 8,4 triliun (74,52 persen). Begitu juga nilai ekspor Provinsi NTB masih didominasi oleh barang tambang/galian non migas,

berdasarkan data BPS tahun 2017 nilai ekspor NTB sebesar USD.997,34 juta dimana USD.996,19 juta atau 99,89 persen merupakan eksport barang tambang/galian non mogas berupa komoditi konsentrat mineral logam (tembaga, emas dan perak). Berdasarkan data BPS tahun 2017 kontribusi sektor pertambangan dan penggalian (termasuk subsektor pertambangan bijih logam) terhadap total PDRB sebesar 20,75 persen turun 1,43 persen dibandingkan dengan akhir tahun 2016 sebesar 22,18 persen. Penurunan ini disebabkan adanya kontraksi pertambangan bijih logam sebesar -5,15 point. Adapun kontribusi sektor pertambangan dan penggalian (tidak termasuk subsektor pertambangan bijih logam) terhadap total PDRB mengalami peningkatan sebesar 0,27 point dari 3,92 persen pada tahun 2016 menjadi 4,19 persen tahun 2017. Jenis lapangan usaha pertambangan dan penggalian masih menjadi penyumbang terbesar PDRB Provinsi NTB. Hal ini menunjukkan bahwa peran sektor pertambangan minerba masih mempunyai peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian di Provinsi.

Namun demikian masih terdapat permasalahan yang dihadapi oleh sektor pertambangan mineral dan batubara. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pesatnya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, bendungan dan perumahan berakibat pada tingginya permintaan bahan galian terutama batuan. Eksploitasi terhadap komoditi pertambangan batuan yang memiliki nilai ekonomi serta menjadi bahan baku utama pembangunan menyebabkan munculnya kegiatan penambangan baik perorangan maupun kelompok di seluruh Kabupaten/Kota.

Pemerintah Provinsi telah mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba). Peraturan Daerah ini didasarkan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka UU Minerba harus direvisi menyesuaikan dengan kewenangan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Peranan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah dalam hal pemberian perizinan usaha pertambangan. Penetapan WIUP dan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan penetapan wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang dan pengawasan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Ruang lingkup pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara adalah perusahaan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, dan batubara yang meliputi, perencanaan Wilayah Pertambangan, WIUP, IUP, Hak dan Kewajiban Pemegang IUP, Usaha Jasa Pertambangan, Divestasi, Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Usaha Pertambangan, Keadaan Memaksa dan Penyelesaian Sengketa, Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Perlindungan, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Reklamasi dan

Pasca Tambang, Penyidikan, penerapan Pidana dan Sanksi. Ruang lingkup tersebut perlu disesuaikan lagi sejalan dengan perubahan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi.

Kegiatan usaha pertambangan di Provinsi NTB terdiri dari komoditas mineral logam, mineral bukan logam dan batuan. Perkembangan kondisi pengusahaan mineral logam hingga tahun 2017 dengan terbitnya IUP Khusus Operasi Produksi PT. Amman Mineral Nusa Tenggara sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 414K/30/MEM/2017 tanggal 10 Februari 2017 dengan luas lahan IUP OP sebesar 25.000 Ha di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai penyesuaian Kontrak Karya yang sebelumnya dimiliki oleh PT. Newmont Nusa Tenggara dan satu Kontrak Karya milik PT. Sumbawa Timur Mining yang belum disesuaikan menjadi IUP.

Untuk Izin Usaha pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota hingga akhir tahun 2017 sebanyak 228 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terdiri dari : 20 IUP Mineral Logam, 199 IUP Batuan dan 9 IUP Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Penjualan. Untuk IUP Mineral Logam terdiri dari komoditi emas (Au), tembaga (Cu), perak (Ag), Mangan (Mn), Pasir dan bijih besi (Fe), serta timah hitam (Pb). Dimana terdapat 17 IUP yang sudah memasuki masa Operasi Produksi dan 3 IUP yang masih dalam tahap eksplorasi.

Tabel 2.169 Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai 31 Desember 2017

Provinsi dan Kabupaten/Kota Sampel 31 Desember 2017

NO	ID KAB	PROVINSI	IUP									IUP- OPK	JUML IUP
			MINERAL LOGAM			MINERAL BUKAN LOGAM			BATUAN				
			EKSP	OP	JUMLAH	EKSP	OP	JUMLAH	EKSP	OP	JUML		
1	5200	Provinsi NTB											
2	5201	Kab. Lombok Barat	1	2	3	0	0	0	1	34	35	1	39
3	5202	Kab. Lombok Tengah	0	0	0	0	0	0	3	2	5	1	6
4	5203	Kab. Lombok Timur	0	1	1	0	0	0	6	74	80	2	83
5	5204	Kab. Sumbawa	1	5	6	0	0	0	12	15	27	0	33
6	5205	Kab. Dompu	0	2	2	0	0	0	0	13	13	2	17
7	5206	Kab. Bima	0	6	6	0	0	0	1	9	10	1	17
8	5207	Kab. Sumbawa Barat	1	1	2	0	0	0	2	18	20	1	23
9	5208	Kab. Lombok Utara	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1	4
10	5271	Kota Mataram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	5272	Kota Bima	0	0	0	0	0	0	6	0	6	0	6
TOTAL			3	17	20	0	0	0	32	167	199	9	228

Sumber ; Dinas ESDM Provinsi NTB Tahun 2017.

▪ Menjalin Simbiosis Bumi Sejuta Sapi (BSS) dan Biogas Rumah (Biru)

Sejak masa pemerintahan TGB jilid satu, pemerintah telah membangun kejasama dengan HIVOS dalam mengimplementasikan program BIRU melalui pembangunan Biogas Rumah. Program tersebut bersinergi dengan program Bumi Sejuta Sapi (BSS) dengan memanfaatkan kotoran sapi sebagai sumber energi bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar dan penerangannya. Sampai tahun 2017 ini telah terbangun sebanyak 5.720 unit biogas melalui berbagai sumber pembiayaan.

▪ Masyarakat Tanggap Bencana Alam

Posisi Provinsi NTB yang berada pada daerah cincin api menjadikannya sebagai daerah yang memiliki potensi bencana alam geologi seperti gempa dan

gunung meletus. Kondisi ini mengharuskan masyarakat memiliki pengetahuan dan tanggap terhadap resiko bencana yang mungkin dihadapi. Masyarakat perlu mulai menyadari dan akrab serta bersahabat dengan bencana, hidup berdampingan dengan bencana (*living together with disaster*). Oleh karena itu, pemerintah dalam membuat kebijakan pembangunan perlu didasari resiko penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga perlu keterlibatan masyarakat.

Penanggulangan bencana menuntut peran aktif Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, dan Pusat. Pemerintah Provinsi NTB telah bekerjasama dengan Badan Geologi Kementerian ESDM melalui Georisk Project (Indonesian-Germany Technical Cooperation: "*Mitigation of Georisk*") melalui MoU yang disepakati pada tahun 2013 yang lalu. Dalam kerjasama tersebut telah dilaksanakan inventarisasi data bencana alam geologi, *transfer knowledge* mengenai resiko bencana geologi, serta sosialisasi bencana alam geologi guna meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya aparatur dan kelembagaan yang menangani pengurangan resiko bencana geologi. Provinsi NTB merupakan salah satu dari 3 (tiga) Provinsi yang dipilih sebagai lokasi pelaksanaan Georisk Project.

- **Membumikan Kaidah *Good Mining Practices***

Eksplorasi sumber daya mineral dan batubara identik dengan degradasi fungsi lingkungan hidup. Pada kenyataannya manusia tidak dapat hidup lebih baik tanpa materi yang berasal dari bahan tambang. Industri pertambangan juga secara nyata telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDRB Provinsi NTB, namun di sisi lain banyak terjadi aktivitas penambangan skala kecil yang tidak hanya menumbuhkan ekonomi masyarakat tetapi juga berdampak pada rusaknya lingkungan dan sumber daya lainnya. Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2009-2029 yang membatasi usaha pertambangan serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai panduan untuk mengelola, membina dan mengawasi usaha pertambangan agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat serta perlindungan lingkungan.

Program Kelola Tambang Mandiri hingga tahun 2017 mampu menjadi ujung tombak ikhtiar Pemerintah Provinsi NTB dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat penambang khususnya dalam meningkatkan kemampuan teknis agar kegiatan usaha yang dilakukan dapat berjalan sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practices*).

6. PERDAGANGAN

- **Pengeluaran Perkapita**

Dinas Perdagangan adalah penanggungjawab utama indikator Pengeluaran perkapita yang merupakan salah satu indikator dalam RPJMD 2013-2018. Komoditas yang dijadikan acuan penentuan Pengeluaran Perkapita merupakan hasil Survei

Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD-1995) antara lain: beras lokal, tepung terigu, ketela pohon, ikan tongkol/tuna/cakalang, ikan teri, daging sapi, daging ayam kampung, telur ayam, susu kental manis, bayam, kacang panjang, kacang tanah, tempe, jeruk, papaya, kelapa, gula pasir, kopi bubuk, garam, merica/lada, mi instant, rokok kretek/filter, listrik, air minum, bensin, minyak tanah dan sewa rumah, yang bertujuan mengetahui komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan kalori per kapita sebanyak 2.100 kalori/hari.

Pengeluaran Perkapita Nusa Tenggara Barat dihitung oleh Badan Pusat Statistik Provinsi NTB terakhir tahun 2016 dengan nilai sebesar Rp.9,575 juta/tahun. Data ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp. 9,241 juta/tahun, dan telah melebihi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 9,352 juta/tahun.

Dimensi yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012). Pada tahun 2017, pengeluaran per kapita masyarakat NTB diproyeksikan mencapai Rp.9,838 juta per tahun. Dibandingkan dengan tahun 2016, pengeluaran per kapita masyarakat NTB meningkat sebesar Rp.262.830 per tahun. Walaupun membantu meningkatkan level IPM secara umum, namun sesungguhnya tingginya pengeluaran per kapita juga memberikan gambaran mengenai perkembangan tingkat harga di wilayah yang bersangkutan. Berdasarkan data BPS, Pengeluaran perkapita masyarakat Nusa Tenggara Barat tahun 2016-2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.170 Target Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2016-2017

Tahun	Pengeluaran Perkapita (Rp. 000)	
2016	Target	9.352
	Realisasi	9.575
2017	Target	9.464
	Realisasi	9.838*

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017 * Angka Proyeksi

▪ Operasi Pasar

Ikhtiar untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan sehari-hari dan untuk menjaga stabilitas harga di pasar sekaligus juga menjamin ketersediaan stok kebutuhan sembako untuk masyarakat, Dinas Perdagangan melaksanakan kegiatan "Operasi Pasar Rakyat". Melalui kegiatan ini selama Tahun 2017, Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan telah menyalurkan 8.152 Paket Sembako yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota dengan nilai anggaran sebesar Rp. 945.000.000,-. Pada tahun sebelumnya yakni tahun 2016 bantuan paket sembako yang tersalur sejumlah 11.697 paket dengan anggaran sebesar Rp. 1.169.700.000. Jika dibandingkan dengan penyaluran tahun 2016 maka akan terlihat Penurunan sebesar 3.545 Paket atau sekitar 33,30%, terjadinya penurunan penyaluran paket sembako tersebut dipengaruhi oleh alokasi dana pada tahun 2017 menurun dibandingkan alokasi dana tahun 2016, terlihat penurunan sebesar Rp. 224.700.000,- atau sekitar 19,21% . Adapun Jenis bantuan sembako yang diberikan kepada masyarakat miskin antara lain beras C4 super (kemasan);

gula kristal (kemasan); minyak goreng (kemasan); indomie (kuah); dan tepung terigu. Perbandingan Kelompok penerima paket sembako tahun 2017 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.171 Perbandingan Penyaluran Paket Sembako Tahun 2016 dengan Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	PENERIMA (Kelompok) Tahun 2016	BANTUAN SEMBAKO (Paket) Tahun 2016	PENERIMA (Kelompok) Tahun 2017	BANTUAN SEMBAKO (Paket) Tahun 2017
1	Kota Mataram	11	1.506	15	1.107
2	Lombok Barat	36	2.906	3	339
3	Lombok Tengah	26	2.489	14	2.731
4	Lombok Utara	13	789	4	295
5	Lombok Timur	29	2.957	9	1.930
6	Sumbawa	1	160	2	350
7	Sumbawa Barat	1	100	1	250
8	Dompu	1	160	1	250
9	Bima	1	100	2	650
10	Kota Bima	36	530	1	250
	Jumlah	155	11.697	52	8.152

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2017

Dinas Perdagangan Provinsi NTB dalam upaya penurunan angka kemiskinan, stabilitas harga, serta mengejar pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB telah berupaya dengan kemampuan dukungan sumberdaya yang kemudian diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator RPJMD 2013-2018 melalui urusan pilihan bidang perdagangan dengan indikator kinerja utama pengeluaran perkapita. Berdasarkan indikator kinerja utama yang dilaksanakan maka Dinas Perdagangan mewujudkannya dalam bentuk kegiatan Operasi Pasar yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dengan harapan dapat menurunkan angka kemiskinan sekaligus dapat menciptakan stabilitas harga di NTB.

▪ Pasar Lelang

Salah satu pilar sub sistem perdagangan nasional untuk penguatan daya saing komoditas adalah "Pasar Lelang" yakni pasar fisik terorganisir sebagai tempat pembentukan harga (*price discovery*), komoditas agro yang digunakan sebagai acuan harga (*price reference*), transaksi kontrak berjangka (*futures trading*) dan penetapan jaminan komoditas dalam Resi Gudang. Pasar lelang forward merupakan interaksi antara pembeli dan penjual (produsen), untuk menyelenggarakan transaksi komoditi agro secara langsung melalui sistem lelang, dengan penyerahan kemudian (*forward*) secara teratur, wajar, efisien, dan transparan serta berkeadilan.

Pada kegiatan Pasar Lelang Forward Komoditi Agro yang Tahun 2017 komoditi yang ditawarkan antara lain, Beras dan Beras Merah, Kopi Robusta, Kopi Luwak Robusta, Coklat, Biji Coklat, Gabah, Jahe, Kapuk Randu, Kunyit, Bawang Merah, Jagung, Kacang Hijau, Kacang Tanah, Kemiri, Madu, Rumpun Laut, Kedelai, Cabe Rawit. Pasar Lelang Forward Komoditi Agro ke I dilaksanakan di Grand Madani Hotel Mataram tanggal 18 Mei 2017 yang dihadiri oleh sebanyak 80 orang terdiri dari 49 orang

penjual, pembeli dan 24 orang dari dinas/instansi, transaksi dengan nilai kontrak Rp.1.309.500.00 dengan jenis komoditi yang dilelang antara lain gula aren semut, gula aren cetak, jagung pipilan, kemiri dan madu alam. Rincian hasil pelaksanaan pasar lelang pertama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.172 Total Nilai Kontrak Komoditi Pasar Lelang (*Agro Forward*)

No	Komoditas	Vol.	Sat.	Harga (Rp)	Sat.	Nilai Transaksi (Rp.)
1	GULA AREN SEMUT	500	Kg	55.000	Kg	27.500.000
2	GULA AREN CETAK	1.00	Ton	28.000	Kg	28.000.000
3	JAGUNG Pipilan	200.00	Ton	3.850	Kg	770.000.000
4	JAGUNG Pipilan	40.00	Ton	3.850	Kg	154.000.000
5	KEMIRI	50.00	Ton	6.500	Kg	325.000.000
6	MADU ALAM	50.00	Ton	100.00	Btl	5.000.000
Total						1.309.500.000

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2017

▪ Misi Dagang

Misi Dagang/Forum Dagang sebagai salah satu pilar perdagangan nasional untuk penguatan daya saing komoditas tempat pembentukan harga (*price discovery*) komoditas agro yang digunakan sebagai acuan harga (*price reference*) transaksi kontrak berjangka (*futures trading*) dan penetapan jaminan komoditas dalam resi gudang. Misi Dagang/Forum Dagang adalah interaksi antara pembeli (*Buyer*) dan penjual (Produsen) untuk menyelenggarakan transaksi komoditi agro secara langsung melalui sistem lelang, dengan penyerahan kemudian (*Forward*) secara teratur, wajar efisien dan transparan serta berkeadilan.

Penyediaan sistem perdagangan/transaksi komoditas agro yang lebih efisien transparan dan berkeadilan merupakan upaya struktural sektor perdagangan untuk memperkuat pasar domestik dan dampak pasar bebas yang cenderung mengintervensi pasar komoditas lokal melalui intervensi teknologi dan modal asing yang mengikat petani tanpa negosiasi harga. Maksud dan tujuan diadakan Misi Dagang/Forum Dagang yaitu:

- Sarana Promosi Produk Unggulan Daerah;
- Media untuk menjalin hubungan dan jejaring perdagangan antar pelaku usaha;
- Pelaku usaha bisa saling berinteraksi dan saling berbagi informasi untuk peningkatan kualitas produknya;
- Untuk membangun merek dagang dalam negeri ke pasar internasional;
- Memfasilitasi UMKM dalam hal akses pasar melalui forum dagang;
- Meningkatkan daya saing UMKM melalui peningkatan kualitas produk UMKM Indonesia di pasar global maupun regional;
- Mengembangkan dan meningkatkan potensi daerah secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah serta menumbuhkan kewirausahaan dan menciptakan lapangan pekerjaan;
- Memperkenalkan produk-produk yang dikerjakan oleh pelaku usaha dalam daerah yang tidak kalah dengan produk luar daerah lainnya;
- Meningkatkan transaksi dari tahun sebelumnya;

- j. Menumbuhkan percaya diri para pelaku usaha untuk bisa bersaing dengan pasar yang luas;
- k. Adapun sasaran dari kegiatan/pelaksanaan Misi Dagang/Forum Dagang Tahun 2017 yaitu:
 - 1) Produk unggulan daerah
 - 2) Pelaku usaha produk lokal dan pengusaha besar
 - 3) Melakukan pembinaan IKM agar dalam mengelola usaha lebih efisien dan efektif sehingga produk yang dihasilkan mempunyai daya saing yang tinggi
 - 4) Melakukan studi banding antara produk daerah lain dengan produk yang dihasilkan
 - 5) Menumbuh kembangkan usaha ekonomi produktif dengan memanfaatkan sumber bahan baku yang ada dan memberikan nilai tambah terhadap pendapatan masyarakat NTB.

Pelaksanaan Forum Misi Dagang tahun 2017 pertama dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah dari sebanyak 6 kali kegiatan, kegiatan misi dagang yang pertama ini dihadiri oleh para pelaku usaha komoditi agro dari 18 Provinsi dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dan 8 *buyer* yang mengambil tempat di hotel Lor Inn Solo pada tanggal 4 agustus 2017. Pada kegiatan misi dagang/forum dagang di Provinsi Jawa Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirim 5 pelaku usaha dengan masing-masing komoditi antara lain jagung, kopi, rumput laut, sapi, mete, kakao, kayu manis/ gula aren, gula semut bawang putih dan bawang merah.

Adapun nama pelaku usaha dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komoditi yang ditawarkan pada kegiatan misi dagang/forum dagang di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.173 Nama Pelaku Usaha NTB dan Komoditi yang ditawarkan Pada Kegiatan Misi Dagang di Provinsi Jawa Tengah

No	Nama Pelaku Usaha	Komoditi Yang di tampilkan
1	H. Jamaludin PB	Sapi, Jagung
2	L. Maswan	Rumput laut dan bawang merah
3	Suryadi HMR	Kayu Manis dan Bawang Putih
4	H. Moh Ilham	Kopi, Kacang Mente, dan Kakao
5	H. Habibul Mustaan	Gula Aren, Gula Batok dan Gula Semut

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2017

Dari kegiatan misi dagang/forum dagang di Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh para pelaku usaha dari Provinsi Nusa Tenggara Barat terjadi transaksi antara pelaku usaha dari NTB dengan Buyer/Pembeli dari daerah lain dengan nilai transaksi sebagai berikut:

Tabel 2.174 Jumlah Komoditi dan Nilai Transaksi Pelaku Usaha dari Provinsi NTB Pada Kegiatan Misi Dagang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

No	Komoditi	Jumlah Komoditi yang Terjual	Harga Satuan Perkomoditi	Nilai Transaksi (Rp)
1	Gula Batok (Gula Aren)	1,5 Ton	22.000/Kg	33.000.000
2	Mente	50 Ton	25.000/Kg	1.250.000.000
3	Kayu Manis	2 Kwintal	17.000/Kg	3.400.000

4	Jagung	200 Ton	4.250/Kg	850.000.000
5	Gula Semut	25 Ton	45.000/Kg	1.125.000.000
Jumlah				3.261.400.000

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2017

Forum misi dagang merupakan upaya pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Perdagangan Provinsi NTB untuk mendorong pengembangan perdagangan antar daerah dan pemasaran produk dalam negeri sehingga diharapkan terjalin hubungan lintas dagang antar provinsi dengan tujuan mempertemukan penyedia (*Supplier*) dan Pembeli (*Buyer*).

Forum misi dagang tahun 2017 ini dilaksanakan di Kabupaten Temanggung merupakan pelaksanaan yang ke 3 kalinya dari sebanyak 6 kali kegiatan, kegiatan misi dagang yang pertama dilaksanakan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Tengah dan Pelaksanaan misi dagang yang ke 2 diselenggarakan di Boyolali Jawa Tengah. Kegiatan misi dagang dihadiri oleh peserta dari Kabupaten se Jawa Tengah antara lain peserta dari provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Banjar Negara, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Magelang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Demak, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Seragen dan Pekalongan Jawa Tengah.

Dapat disampaikan nama pelaku usaha dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Komoditi yang ditawarkan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.175 Nama Pelaku Usaha NTB dan Komoditi yang ditawarkan Pada Kegiatan Misi Dagang di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah

No	Nama Pelaku Usaha	Komoditi Yang di tampilkan
1	H. Jamaludin PB	Sapi, Jagung dan Madu
2	H. Darmatif	Bawang Merah, Bawang Putih dan Kopi
3	Zaenal Abidin	Kacang Mente
4	Sunarti	Kopi, Kacang Mente, Jagung, Beras Analog dan Susu Kuda Liar

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2017

Dari kegiatan misi dagang/forum dagang di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh para pelaku usaha dari Provinsi NTB terjadi transaksi antara pelaku usaha dari NTB dengan *Buyer*/Pembeli dari daerah lain dengan nilai transaksi sebagai berikut:

Tabel 2.176 Jumlah Komoditi dan Nilai Transaksi Pelaku Usaha dari Provinsi NTB Pada Kegiatan Misi Dagang di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Tahun 2017

No	Komoditi	Jumlah Komoditi yang Terjual	Harga Satuan Perkomoditi	Nilai Transaksi (Rp)
1	Jagung Hibrida	500 Ton	3.500/Kg	1.750.000.000
2	Jagung Pipil Kartini	24 Ton	3.300/Kg	79.200.000
3	Madu Alam	100 Karton	1.800.000/Karton	180.000.000
Jumlah				2.009.200.000

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2017

Dengan adanya misi dagang/forum dagang ini diharapkan dapat membuka dan memperluas akses pasar bagi pelaku usaha daerah di Provinsi NTB pada khususnya dan pelaku usaha dari daerah lain pada umumnya. Disamping itu juga

dengan adanya kegiatan misi dagang dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi daerah secara maksimal sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah serta menumbuhkan kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja.

Adapun saran-saran dalam upaya meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktifitas para pelaku usaha dalam menghasilkan produk-produk yang akan ditawarkan/ditampilkan pada pelaksanaan misi dagang/forum dagang antara lain:

- Perlu pembinaan yang berkelanjutan kepada UMKM oleh Dinas Perdagangan Provinsi NTB khususnya untuk produk-produk komoditi unggulan daerah sehingga penanganannya lebih terarah.
- Perlu adanya pelatihan teknis yang dapat memperbaiki mutu sehingga produk perdagangan yang dihasilkan oleh UMKM NTB dapat lebih tingkatan lagi kualitasnya seperti dari segi pengemasan, SNI, sertifikat halal, ISO 9000 dengan harapan Produk Daerah Nusa Tenggara Barat kedepannya mampu bersaing menembus pasar internasional.

▪ **Perlindungan Konsumen**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditujukan untuk menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen, sehingga tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya. Salah satu bentuk nyata dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan konsumen adalah dengan membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen diluar pengadilan yang merupakan badan publik yang menjalankan kekuasaan kehakiman secara eksklusif dibidang perlindungan konsumen dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai dasar proses penyelesaiannya. BPSK diharapkan dapat mempermudah, mepercepat dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar/diluar koridor hukum yang berlaku.

Permasalahan yang ditangani Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dari sisi konsumen, dalam praktek-praktek perdagangan barang dan/atau jasa baik ketika proses perdagangan maupun setelah proses perdagangan terjadi banyak ditemui pelanggaran terhadap hak-hak konsumen atau pelanggaran pelaku usaha ketika menawarkan dan menjual produk kepada konsumen.
- 2) Banyaknya kasus terkait adanya perjanjian yang dalam kontrak/perjanjian dicantumkan klausul baku sepihak yang harus disepakati kedua belah pihak
- 3) Seringkali pelaku usaha tidak melakukan penandatanganan kontrak dihadapan notaris, sehingga ketika konsumen (debitur) wanprestasi, terjadi penyelesaian sepihak yang merugikan konsumen.
- 4) Sebagian besar kasus yang masuk dan membutuhkan penyelesaian di BPSK adalah sengketa antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan (Finance)

Selama tahun 2016 sampai akhir 2017, jumlah kasus yang dapat diselesaikan oleh BPSK sebanyak 68 kasus dengan rincian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.177 Jumlah Kasus dan Metode Penyelesaian oleh BPSK Tahun 2016-2017

No	Periode Terjadinya (Tahun)	Jumlah Kasus yang diselesaikan (Kasus)	Metode Penyelesaian Kasus
7	2016	32	Secara Mediasi
8	2017	36	Secara Mediasi

Sumber: BPSK Kota Mataram Tahun 2017

Ikhtiar dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan konsumen telah dilakukan melalui sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang standarisasi, sosialisasi kewajiban pencantuman label pada barang, sosialisasi undang-undang perlindungan konsumen dan Sosialisasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Sampai dengan bulan September tahun 2017 terjadi pengaduan konsumen sebanyak 36 kasus yang masuk melalui BPSK Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa. Adapun pengaduan konsumen yang masuk melalui BPSK Kota Mataram sebanyak 33 kasus, BPSK Kabupaten Lombok Utara Sebanyak 2 kasus dan BPSK Kabupaten Sumbawa hanya 1 kasus. Kasus pengaduan konsumen tersebut diatas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.178 Penanganan Pengaduan Konsumen/Masyarakat Tahun 2017

No	Asal pengaduan	Sarana Pengaduan				Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Ket
		SMS	Kotak Pengaduan	Pengaduan Langsung	Surat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BPSK KOTA MATARAM			Surat No. 01/BPSK/1/2017		Suami Ibu Siti Aisyah adalah nasabah PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. dengan fasilitas terakhir senilai Rp. 1 miliar pada tanggal 8 April 2016. Kemudian Suami Ibu Siti Aisyah meninggal pada tanggal 30 April 2016. Dari sejumlah hutang tersebut, Pihak PT. BTPN Tbk. Hanya dapat tercaver Asuransi senilai Rp. 200.000.000,- Oleh karena itu, Ibu Siti Aisyah meminta data tertulis dari Asuransi.	16 - 01 - 2017	PT. BTPN Tbk. Memberikan seluruh data yang diminta oleh Ibu Siti Aisyah.	

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Asal pengaduan	Sarana Pengaduan				Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Ket
		SMS	Kotak Pengaduan	Pengaduan Langsung	Surat				
2					Surat 01/BPSK/1/2017	Bpk. Timbang Nuarta menunggak pembayaran selama 2 Bulan, sehingga pihak PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk. Menarik Unit pada tanggal 16 Januari 2017	17 - 01 - 2017	Dalam proses tidak tercapai kesepakatan	
3				03/BPSK/I/2017		Bpk H. Haerudin sudah melunasi seluruh angsuran pada tanggal 28 September 2016 akan tetapi sampai dengan Januari 2017, pihak Amanah Finance belum memberikan BPKB Mobil.	30 - 01 - 2017	Proses Pihak Amanah Finance sedang mengajukan ke Management Pusat agar BPKB Bpk H. Haerudin di keluarkan Mediasi	
4				04/BPSK/I/2017		Bpk. Munawir Haris menunggak pembayaran selama 2 bulan, sehingga pada tanggal 24 Desember 2016 unit di cabut di Jln. Bung Karno Monjok oleh Pihak PT. BCA Finance.	30 - 01 - 2017	Proses Pihak BCA Finance sedang mengajukan permohonan Bpk Munawir Haris ke Management Pusat di Jakarta.	
5				06/BPSK/II/2017		Bpk Hidayatussadikin menunggak pembayaran selama 2 bulan, sehingga kendaraan di cabut oleh pihak PT. Adira Finance. Ketika akan melakukan pembayaran tunggakan yang 2 bulan, Bpk Hidayatussadikin diminta untuk melunasi seluruh sisa angsuran.	22 - 02 - 2017	Proses	
6				07/BPSK/III/2017		Bpk. Irwan Sumadi sudah melunasi seluruh sisa angsuran pada bulan Desember 2016 akan tetapi sampai dengan bulan Maret 2017 Pihak Amanah belum memberikan BPKB kendaraan.	13 - 03 - 2017	Proses	

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Asal pengaduan	Sarana Pengaduan				Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Ket
		SMS	Kotak Pengaduan	Pengaduan Langsung	Surat				
7				08/BPSK/III/2017		Ibu Mariani sudah melakukan pelunasan terhadap seluruh angsuran pada Bulan Juli 2016, akan tetapi sampai dengan bulan Maret 2017 Pihak Amanah Finance belum memberikan BPKB kendaraan.	13 - 03 - 2017	Proses	
8				09/BPSK/III/2017		Ibu Rosdiana Kurnia Fitri sudah melunasi seluruh angsuran pada bulan Desember 2016 kepada Bpk Ahyar Rosidi (Didik) selaku Kolektor NSC Finance (bukti kwitansi bermaterai). Akan tetapi, pihak NSC Finance tidak mengakui bukti pembayaran terakhir karena bukan merupakan kwitansi resmi NSC Finance.	14 - 03 - 2017	Proses	
9				10/BPSK/III/2017		Bpk Sumarto sudah melunasi seluruh angsuran pada tanggal 2 Agustus 2016, akan tetapi sampai dengan bulan Maret 2017 Pihak Amanah Finance belum memberikan BPKB kendaraan.	17 - 03 - 2017	Proses	
10				11/BPSK/III/2017		Bpk Mahdun sudah melunasi seluruh angsuran pada tanggal 22 September 2016, akan tetapi sampai dengan bulan Maret 2017 Pihak Amanah Finance belum memberikan BPKB kendaraan.	17 - 03 - 2017	Proses	
11				12/BPSK/III/2017		Bpk Mahdi sudah melunasi seluruh angsuran pada tanggal 5 Agustus 2016, akan tetapi	17 - 03 - 2017	Proses	

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Asal pengaduan	Sarana Pengaduan				Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Ket
		SMS	Kotak Pengaduan	Pengaduan Langsung	Surat				
						sampai dengan bulan Maret 2017 Pihak Amanah Finance belum memberikan BPKB kendaraan.			
12				13/BPSK/III/2017		Bpk Suhardi melanjutkan kredit sebuah mobil atas nama Sahli Pandi sudah melunasi seluruh angsuran pada tanggal 4 September 2016, akan tetapi sampai dengan bulan Maret 2017 Pihak Amanah Finance belum memberikan BPKB kendaraan.	22 - 03 - 2017	Mediasi. Amanah Finance memberikan BPKB Bpk Suhardi pada tanggal 5 April 2017 di BPSK kota Mataram.	
13				14/BPSK/IV/2017		Bpk Agus Salim membeli satu unit mobil secara kredit melalui lembaga pembiayaan ACC Finance. Pada tanggal 18 Juni 2016 pihak ACC Finance menarik mobil tersebut karena alasan terlambat membayar angsuran dua bulan. Saya sudah menunjukkan itikad baik yaitu pelunasan mobil namun ternyata mobil tersebut sudah dilelang oleh pihak ACC tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.	3/4/2017	Mediasi. Tidak tercapai kesepakatan. Diduga terjadi Tindak Pidana sehingga di Rekomendasikan ke POLDA.	
14				15/BPSK/IV/2017		Bpk Suharmin mengirim sebuah paket Laptop melalui jasa TIKINDO dengan tujuan Samarinda. Beberapa hari kemudian saya ditelpon oleh penerima di Samarinda bahwa Laptop kondisi LCD nya sudah pecah. Setelah itu saya komplein ke TIKINDO	4/4/2017	Penarikan Pengaduan oleh Bpk Suharmin	

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Asal pengaduan	Sarana Pengaduan				Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Ket
		SMS	Kotak Pengaduan	Pengaduan Langsung	Surat				
						mereka tidak bertanggung jawab karena barang tersebut tidak diasuransikan.			
15				16/BPSK/IV/2017		Bpk Salmi sudah melunasi 1 unit Mitsubishi L300 PICKUP pada tanggal 22 Januari 2017, akan tetapi pihak Amanah Finance belum memberikan BPKB unit sampai dengan tanggal 5 April 2017.	5/4/2017	Rekomendasi ke POLDA	
16				17/BPSK/IV/2017		Terjadi kenaikan suku bunga kredit dari 7,49% per tahun menjadi 13,50% per tahun	11/4/2017	PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Mataram	
						sejak tanggal 1 Juli 2015, sehingga angsuran yang sebelumnya Rp. 2.801.000,- menjadi Rp. 4.324.000,- Ibu Irfiani Kusumadewi tidak menyetujui kenaikan tersebut.		tidak mau menyelesaikan perkara di BPSK Kota Mataram karena mengacu pada surat 0961/Srt/Mtr.II/V/2017 Perihal kesepakatan pilihan Lembaga penyelesaian perselisihan (Choice of forum) dan ketentuan UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 (Undang-undang) Perbankan. Bahwa apabila terjadi sengketa antara pihak pertama dan pihak kedua	

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Asal pengaduan	Sarana Pengaduan				Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Ket
		SMS	Kotak Pengaduan	Pengaduan Langsung	Surat				
								maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.	
17				18/BPSK/IV/2017		Bpk Saleh menunggak pembayaran selama 4 bulan, dan pihak PT.NSC (Nusa Surya Ciptadana) sudah melelang unit.	17/4/2017	Mediasi. Tidak tercapai kesepakatan. Diduga terjadi Tindak Pidana pada Proses pelelangan sehingga di Rekomendasikan ke POLDA.	
18				19/BPSK/IV/2017		Bpk Zulkipri sudah melunasi seluruh angsuran pada bulan Februari 2017, akan	27/4/2017	Rekomendasi ke POLDA	
						tetapi pihak Amanah Finance belum juga memberikan BPKB kendaraan sampai dengan tanggal 27 April 2017.			
19				20/BPSK/IV/2017		Bpk Muhadi sudah melunasi 1 unit Suzuki ST 150-PICKUP pada tanggal 31 Oktober 2016, akan tetapi pihak Amanah Finance belum memberikan BPKB kepada Bpk Muhadi sampai dengan tanggal 28 April 2017	26/4/2017	Rekomendasi ke POLDA	
20				21/BPSK/V/2017		Anak kandung Ibu Catharina Retni Budiwati mengirimkan satu unit handphone dari Jakarta dengan keterangan barang bahwa yang dikirimkan adalah Charger Laptop. Setelah sampai diterima oleh Ibu Catharina, ternyata isinya hanya perlengkapan	3/5/2017	Proses	

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Asal pengaduan	Sarana Pengaduan				Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Ket
		SMS	Kotak Pengaduan	Pengaduan Langsung	Surat				
						handphone (tidak terdapat handphone di dalam paketan).			
21				22BPSK/V/2017		Bpk Ahmad Sakif BSA sudah melunasi seluruh angsuran di Amanah Finance pada bulan Februari 2017, akan tetapi pihak Amanah Finance belum juga memberikan BPKB kendaraan sampai dengan tanggal 2 Mei 2017.	8/5/2017	Rekomendasi ke POLDA	
22				24/BPSK/V/2017		Ibu Yuni Maryuzim Halba, SE menunggak pembayaran selama 3 bulan, sehingga pihak PT. Mandiri Tunas Finance menarik unit dan membebaskan Ibu Yuni Maryuzim Halba SE untuk melunasi seluruh sisa angsuran ditambah dengan biaya-biaya lain yang timbul akibat penarikan dan keterlambatan (denda).	17/5/2017	Proses	
23				25/BPSK/V/2017		Ibu Indriana menunggak pembayaran selama 2 bulan, sehingga pihak PT. Sinar Mas Multi Finance menarik unit dan meminta agar Ibu Indriana melunasi seluruh sisa angsuran ditambah dengan biaya-biaya lain yang timbul akibat penarikan dan keterlambatan (denda).	19/5/2017	Proses	
24				26/BPSK/VI/2017		Bpk Sofyan menunggak pembayaran selama 2 bulan, sehingga pihak PT. Summit	12/6/2017	Proses	

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Asal pengaduan	Sarana Pengaduan				Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Ket
		SMS	Kotak Pengaduan	Pengaduan Langsung	Surat				
						Oto Finance Cabang Mataram menarik unit dan meminta agar Bpk Sofyan membayar seluruh tunggakan senilai Rp. 1000.000,- akan tetapi Bpk Sofyan tidak mau membayar biaya penarikan tersebut.			
25				27/BPSK/VI/2017		Bapak Suhaemin menandatangani kontrak dengan PT. MPM Finance. Kontrak pertama terkait angsuran Motor dan yang kedua angsuran 1 unit TV LCD 32" Merk LG. Bapak Suhaemin sudah melunasi angsuran motor, akan tetapi PT. MPM Finance belum memberikan BPKB Motor Karena Bapak Suhaemin belum melunasi angsuran TV LCD 32" Merk LG.	15/06/2017	Mediasi. Bpk. Suhaemin diwakili oleh putrinya Maria Ulfa sepakat dengan PT. MPM Finance untuk melunasi sisa pokok pinjaman TV LED senilai Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang akan dibayarkan di kantor PT. MPM Finance.	
26				28/BPSK/VI/2017		Bapak Kukuh Januardi sudah melunasi seluruh angsuran pada Bulan April 2017, akan tetapi pihak PT. Astra Credit Companies tidak memberikan BPKB Mobil karena bukan a.n bapak Kukuh Januardi . Bapak Kukuh Januardi sudah menunjukan bukti pembayaran oper kredit Objek Sengketa, akan tetapi PT. Astra Credit Companies tetap tidak memberikan BPKB.	19/06/2017	Mediasi. Pihak kedua menyatakan bahwa BPKB dapat diberikan apabila sudah ada Putusan Pengadilan atau berdasarkan Putusan Putusan BPSK Kota Mataram apabila disetujui oleh Pimpinan Pusat pihak Kedua. Atas dasar itu, Pihak pertama memilih untuk menyelesaikannya di	

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Asal pengaduan	Sarana Pengaduan				Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Ket
		SMS	Kotak Pengaduan	Pengaduan Langsung	Surat				
								pengadilan Negeri Mataram.	
27				29/BPSK/VI I/2017		Bapak Muhsin menunggak pembayaran angsuran selama 4 Bulan, karena istri dalam keadaan sakit, sehingga alokasi pembayaran angsuran dialihkan untuk pengobatan istri.	4/7/2017	Mediasi. Tercapai kesepakatan dimana pihak pertama menyerahkan uang Rp. 2.000.000 Kepada pihak kedua, sedangkan sisa utang Rp. 4.122.000 akan dioper ke Finance yang lain yang difasilitasi oleh pihak kedua.	
28				30/BPSK/VI I/2017		Ibu Rohaini Sudah membayar angsuran sebanyak 19 kali. Akan tetapi yang masuk rekap kantar hanya 17 kali angsuran. sehingga kendaraan Ibu Rohaini ditarik oleh Pihak Maybank Finance.	12/7/2017	Tidak tercapai Kesepakatan. Konsumen memilih diselesaikan dengan cara Mediasi, sedangkan perusahaan dengan mengacu pada Perjanjian yaitu Pengadilan Negeri Mataram. Perusahaan juga menyampaikan bahwa apabila konsumen beritikad baik untuk melanjutkan kredit, maka dapat diselesaikan dengan cara musyawarah-mufakat di kantor perusahaan.	
29				31/BPSK/VI I/2017		Ibu Rismayanti, meminjam uang di Bank BNI	26/07/2017	Proses.	

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Asal pengaduan	Sarana Pengaduan				Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Ket
		SMS	Kotak Pengaduan	Pengaduan Langsung	Surat				
						dengan jaminan sertifikat rumah, akan tetapi terjadi penunggakan pembayaran angsuran yang pada akhirnya rumah yang menjadi jaminan tersebut dipasang spanduk lelang oleh Bank BNI.		Permohonan konsumen sedang diajukan.	
30				32/BPSK/VI II/2017		Bapak Ulul Azmi sudah melunasi sejak tanggal 26 September 2016, akan tetapi pihak Amanah belum memberikan BPKB kepada Bapak Ulul Azmi.	25/08/2017	Amanah Finance memberikan BPKB Bapak Ulul Azmi pada tanggal 4 September 2017.	
31				33/BPSK/IX /2017		Bapak Parhan menunggak pembayaran selama 2 bulan, kemudian pihak PT. Sinar Mas Multi Finance menarik unit pada tanggal 28 Agustus 2017.	5/9/2017	Proses.	
32				34/BPSK/IX /2017		Istri Almarhum Bpk W. Ronny Unu (Batasari) menunggak pembayaran selama 9 Bulan, dan pihak ACC menarik unit pada tanggal 14 Agustus 2017.	7/9/2017	Proses.	
33				35/BPSK/IX /2017		Bagasi dr. Ami Aristasya Shintia A. Rusak pada saat perjalanan dari Jakarta ke Lombok kemudian oleh pihak Lion Air menjanjikan akan memberikan kompensasi berupa perbaikan bagasi.	11/9/2017	Proses.	
34	BPSK KAB. LOMBOK UTARA			08/BPSK/XI /2017		Konsumen masuk rumah sakit, karena sakit dan menginap (Opname) selama 1 (satu)	6/1/2017	Tidak ditindak lanjuti melalui BPSK karena belum	

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Asal pengaduan	Sarana Pengaduan				Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Ket
		SMS	Kotak Pengaduan	Pengaduan Langsung	Surat				
						bulan dengan menggunakan kartu BPJS dan yang bersangkutan meninggal, biaya rumah sakit seharusnya ditanggung BPJS, namun setelah diajukan BPJS menolak biaya pembayaran dengan alasan bukan menjadi tanggung jawab BPJS karena yang bersangkutan telah meninggal dunia dan yang bertanggung jawab adalah ahli waris almarhum.		melengkapi persyaratan	
35				09/BPSK/II/2017		Konsumen belum membayar angsuran ke 2	7/2/2017	Selesai	
						(dua) kendaraan dicabut Depkolektor			
36	BPSK KAB. SUMBAWA			01/BPSK/IX/2017		Sdr. Erwin membeli mobil Suzuki Spalsh melalui PT. AL Ijarah Indonesia Cabang Mataram dengan sistem kredit, semula kredit berjalan lancar, kemudian mobil tsb dipinjam pakai oleh kakak iparnya a.n Nur'aini selanjutnya pembayaran kredit mobil tsb dilakukan oleh sdri. Nur'aini, angsuran kredit sempat berjalan lancar namun kemudian mulai macet bahkan sampai 9 bulan, kemudian mobil ditarik untuk diamankan oleh PT. AL Ijarah, mobil tersebut akhirnya dijual/ dilelang oleh PT. AL Ijarah tanpa sepengetahuan sdr Erwin atau sdri Nur'aini, sdr Erwin dan	20/9/2017	Tidak Selesai, karena tidak ada kesepakatan dari para pihak.	

No	Asal pengaduan	Sarana Pengaduan				Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Ket
		SMS	Kotak Pengaduan	Pengaduan Langsung	Surat				
						sdri Nur'aini keberatan dan menuntut PT. AL Ijarah mengembalikan mobil atau uang sejumlah yang telah dibayarkan, namun PT. AL Ijarah menawarkan alternatif baru berupa kredit mobil yang baru dengan bunga yang lebih ringan, akhirnya tidak ada kata sepakat/deadlock.			

Sumber Data : BPSK Kota Mataram, Kab. Sumbawa dan Kab. Lombok Utara Tahun 2017

▪ Realisasi Ekspor

Realisasi Ekspor Daerah NTB bulan Desember 2017 tercatat volume sebesar 70.979,433 ton terjadi peningkatan volume sebesar 148,84 persen dari bulan November 2017 tercatat volume sebesar 28.524,348 ton. Demikian pula dengan nilai bulan Desember 2017 tercatat sebesar US.\$137.566.033,013 terjadi penurunan nilai sebesar 154,58 persen dari ekspor bulan Nopember 2017 tercatat sebesar US.\$54.036.697,530.

Ekspor tambang bulan Desember 2017 tercatat volume sebesar 70.959,691 ton terjadi peningkatan volume sebesar 148,79 persen dari bulan November 2017 tercatat volume sebesar 28.521,526 ton. Demikian juga dengan nilai bulan Desember 2017 tercatat sebesar US.\$137.373.400,120 terjadi peningkatan nilai sebesar 154,42 persen dari bulan November 2017 tercatat sebesar US.\$ 53.994.714,260 sedangkan Realisasi ekspor non tambang bulan Desember 2017 tercatat volume sebesar 19,742 ton terjadi peningkatan volume sebesar 599,58 persen dari bulan November 2017 tercatat volume sebesar 2,822. Demikian juga dengan nilai ekspor non tambang bulan Desember 2017 tercatat nilai sebesar US.\$192.632,893 terjadi penurunan nilai sebesar 48,46 persen dari ekspor November 2017 tercatat nilai sebesar US.\$41.983,270.

Ekspor Daerah Nusa Tenggara Barat secara kumulatif bulan Januari s/d Desember 2017 tercatat volume sebesar 533.951,570 ton terjadi penurunan volume sebesar 32,04 persen dari bulan Januari s/d Desember 2016 yang tercatat volume sebesar 785.694,634 ton. Sebaliknya dengan nilai bulan Januari s/d Desember 2017 tercatat sebesar US.\$997.338.671,712 terjadi penurunan nilai sebesar 36,95 persen dari bulan Januari s/d Desember 2016 yang tercatat sebesar US.\$1.581.791.827,978.

Ekspor sektor tambang secara kumulatif bulan Januari s/d Desember 2017 tercatat volume sebesar 533.809,098 ton terjadi penurunan volume sebesar 32,05 persen dari bulan Januari s/d Desember 2016 tercatat volume sebesar 785.586,366 ton. Demikian juga dengan nilai bulan Januari s/d Desember 2017 sebesar

US\$.996.194.047,290 terjadi penurunan nilai sebesar 36,95 persen dari bulan Januari s/d Desember 2016 tercatat nilai sebesar 1.580.767.759,960 *sedangkan ekspor non tambang* bulan Januari s/d Desember 2017 tercatat volume sebesar 142,472 ton terjadi peningkatan volume sebesar 31,59 persen dari bulan Januari s/d Desember 2016 tercatat volume sebesar 108,268 ton. Demikian juga dengan nilai bulan Januari s/d Desember 2017 sebesar US\$.1.144.624,422 terjadi peningkatan nilai sebesar 11,77 persen dari bulan Januari s/d Desember 2016 tercatat volume sebesar 1.024.068,018.

Secara keseluruhan ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari 14 (empat belas) komoditi dan dikirim ke 17 (tujuh belas) negara tujuan ekspor oleh 21 (dua puluh satu) eksportir melalui 7 (tujuh) pelabuhan muat.

Realisasi ekspor berdasarkan komoditi bulan Januari s/d Desember 2017 sebanyak 14 (empat belas) jenis dengan perolehan devisa Daerah Nusa Tenggara Barat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.179 Komoditas dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

KOMODITAS	NILAI EKSPORT (US \$)	BOBOT (%)
Konsentrat Tembaga	996.194.047,290	99,89
Udang Vannamei	516.431,20	0,05
Gerabah	44.185,490	0,004
Kerajinan Buah Kering	226.102,050	0,02
Mutiara	302.417,629	0,03
9 (Sembilan) komoditi lainnya	55.488,053	0,01
Total Ekspor	997.338.671,712	100,00

Sumber : Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2017

Negara Tujuan ekspor Daerah NTB tahun 2017 tercatat sebanyak 17 (tujuh belas) negara dengan nilai ekspor disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 180 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

NEGARA TUJUAN	NILAI EKSPORT (US \$)	BOBOT (%)
Jepang	331.324.673,790	33,22
Philipina	452.107.732,060	45,33
Korea Selatan	147.004.756,750	14,74
India	65.955.728,690	6,61
13 (tigabelas) negara lainnya	945.780,422	0,09
Total Ekspor	997.338.671,712	100,00

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2017

Terdapat tujuh pelabuhan muat yang digunakan untuk mengekspor produk NTB tahun 2017, sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.181 Pelabuhan Muat dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017

PELABUHAN MUAT	NILAI EKSPORT (US \$)	BOBOT (%)
Benete Sumbawa	996.194.047,290	99,89
Lombok Internasional Airport	389.677,800	0,04
Tanjung Perak- Surabaya	232.007,233	0,02
Ngurah Rai Denpasar	379.376,480	0,04
3 (tiga) Pelabuhan Muat lainnya	143.562,909	0,01
Total Ekspor	997.338.671,712	100,00

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Tahun 2017

▪ Realisasi Impor

Nilai impor pada bulan November 2017 bernilai US\$ 6.476.384, nilai ini mengalami penurunan sebesar 40,92 persen dibandingkan dengan ekspor bulan Oktober 2017 yang sebesar US\$ 10.961.295. Sebagian besar Impor berasal dari negara Australia (33,39%), Jepang (22,21%) dan Singapura (17,05%). Jenis barang impor dengan nilai terbesar adalah bahan bakar mineral (25,09%), karet dan barang dari karet (22,89) dan benda-benda dari besi dan baja (20,24%).

▪ Fasilitas Ekspor dan Impor

PT. Amman Mineral Nusa Tenggara secara khusus melakukan Ekspor konsentrat tembaga melalui Pelabuhan Benete Sumbawa Barat. Beberapa produk mulai diekspor secara langsung ke mancanegara melalui Pelabuhan Badas di Sumbawa, pelabuhan laut lainnya dan pelabuhan udara di NTB masih kurang dimanfaatkan untuk kegiatan ekspor secara langsung, karena sebagian besar eksportir NTB hanya merupakan perantara bagi eksportir yang ada di luar daerah. Pembiayaan Perdagangan (*Trade Financing*) kegiatan perdagangan luar negeri di NTB didukung oleh beberapa Bank Devisa antara lain Bank BNI 46, BRI, BCA dan Bank Mandiri. Para pelaku ekspor di NTB juga telah membentuk wadah perkumpulan yakni Asosiasi Profesi Ekspor (APEX) NTB.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka meningkatkan kinerja ekspor adalah :

- Membentuk Asosiasi Profesi Ekspor (APEX) NTB sebagai sarana komunikasi pelaku ekspor di Provinsi NTB guna memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan sinergitas antara semua stake holder terkait ekspor.
- Mengadakan koordinasi dengan dinas terkait serta dunia usaha dalam melakukan pembinaan disektor produksi dan pemasaran terutama untuk pengembangan komoditi yang mempunyai peluang di pasar dunia seperti kopi, coklat dan lobster.
- Memberikan informasi kepada kalangan dunia usaha dan instansi terkait tentang perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor.
- Menggali komoditi potensial dan meningkatkan serta mengembangkan potensi komoditi unggulan dari Daerah NTB seperti mutiara, komoditi hasil perikanan dan kelautan, komoditi hasil kerajinan dan lain-lain.

Komoditas ekspor non migas, terutama hasil pertanian dalam arti luas, hasil industri/kerajinan dan hasil pertambangan sangat potensial untuk dikembangkan Provinsi NTB. Para pelaku ekspor NTB diharapkan dapat memanfaatkan potensi yang tersebut secara optimal demi meningkatnya ekspor non migas daerah Nusa Tenggara Barat dan sekaligus membuka lapangan kerja/usaha baru. Pemerintah Provinsi NTB telah memberikan kesempatan dan kemudahan serta dukungan seluas-luasnya kepada kalangan dunia usaha yang berminat mengembangkan kegiatan usahanya di daerah Nusa Tenggara Barat.

Berbagai keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan bidang perdagangan tersebut masih menghadapi beberapa permasalahan/kendala dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut.

7. PERINDUSTRIAN

Capaian kinerja pembangunan daerah bidang industri yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018 diukur melalui indikator kinerja jumlah pendaftaran HaKi Karya Seni Budaya Daerah, dengan capaian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.182 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Tahun 2016-2017

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN AWAL RPJMD 2013	2016	2017		KONDISI KINERJA AKHIR 2018
			REALISASI	TARGET	REALISASI	
Pendaftaran HaKi Karya Seni Budaya Daerah						
- Desain Industri	Produk	37	5	15	61	112
- Merek		42	135	20	45	142
- Hak Cipta		18	29	15	30	93

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Tahun 2017

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah hak yang timbul bagi hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia yang merupakan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Bentuk-bentuk HaKI sebagai berikut:

- Desain industri, merupakan suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, garis dan warna atau gabungan beberapa bentuk yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.
- Merek, merupakan suatu tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.
- Hak Cipta, merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dinas Perindustrian Provinsi NTB terus berkoordinasi dengan instansi terkait, untuk bersama-sama meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran HaKI melalui sosialisasi, pendampingan, inventarisasi dan fasilitasi kepada masyarakat untuk mendaftarkan produk maupun desain industri yang dihasilkan, termasuk hasil karya seni dan budaya ke Dirjen HaKI Kementerian Hukum dan HAM melalui Dinas Perindustrian Provinsi NTB untuk memperoleh pengakuan, perlindungan serta memperoleh manfaat secara ekonomi. Jenis produk yang telah didaftarkan HaKI tahun 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.183 Pendaftaran HaKI Kategori Desain Industri Tahun 2017

No	Nama Pemohon	Alamat	Nama Desain Industri
1	Muharrar	Pesinggahan RT 003/RW 070 Pagesangan Barat Kota Mataram, NTB	Arcu Gold Bros Kombinasi Pendant
2	M. Zaenuri Hamka	Jl. Gajah Mada Juring RT 001 Leneng Praya Lombok Tengah, NTB	Lampu Hias
3	Awidi	RT. 001 Kel Karang Bayan Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat, NTB	Tas Ketak Bundar
4	Ika Asni Susanti	Jl. Transmigrasi Kelurahan Pejanggalik No. 10 Mataram NTB	Lampu Hias Batok Kelapa
5	Muharrar	Pesinggahan RT 003/RW 070 Pagesangan Barat Kota Mataram, NTB	Arcu Gold Bros Kombinasi Pendant
6	M. Zaenuri Hamka	Jl. Gajah Mada Juring RT 001 Leneng Praya Lombok Tengah, NTB	Lampu Hias
7	M. Zaenuri Hamka	Jl. Gajah Mada Juring RT 001 Leneng Praya Lombok Tengah, NTB	Lampu Hias
8	Wayan Suartana Putra Yasa	Jl. RA. Kartini No. 57 A Gubuk Batu Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram	"N" Lombok Island
9	Wayan Suartana Putra Yasa	Jl. RA. Kartini No. 57 A Gubuk Batu Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram	"N" Coconut Fish
10	Wayan Suartana Putra Yasa	Jl. RA. Kartini No. 57 A Gubuk Batu Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram	"N" Coconut Soap Place
11	Wayan Suartana Putra Yasa	Jl. RA. Kartini No. 57 A Gubuk Batu Kel. Monjok Timur Kec. Selaparang Kota Mataram	"N" Coconut Ant Lamp
12	Awidi	RT. 001 Kel Karang Bayan Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat, NTB	Tas Gandek (Ketak)
13	Awidi	RT. 001 Kel Karang Bayan Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat, NTB	Dulang Set 3 (ketak)
14	Awidi	RT. 001 Kel Karang Bayan Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat, NTB	Ceret (Ketak)
15	Irawan Aprianto	Jl. Aji Napiah No. 2 Kel Babakan Kec. Sandubaya Kota Mataram NTB	Tungku Pengovenan Tembakau Bahan Bakar
16	Irawan Aprianto	Jl. Aji Napiah No. 2 Kel Babakan Kec. Sandubaya Kota Mataram NTB	Pisau Potong Rotani
17	Amran	Desa Penujak Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, NTB	Tempat Tissue Kura-kura
18	Amran	Desa Penujak Kec. Praya Barat Kab. Lombok Tengah, NTB	Tempat lampu/lilin kubah SET III (gerabah)
19	Rynaldi Ansori	Lingkungan Juring RT001/001 Desa Leneng Kec. Paya Kab. Lombok Tengah NTB	Lampu Hais Telur
20	Ika Asni Susanti	Jl. Transmigrasi Kelurahan Pejanggalik No. 10 Mataram NTB	Tas Tenun Batok Kelapa
21	Misnah	Batu NyembahKetangga Desa Nyerot Kec. Jonggat Kab Lombok Tengah NTB	Pedose Pemotong Praktis
22	Sarinda Farid Rizki	Dusun Tunak Malang Desa Ungga Kec. Praya Barat DayaKab. Lombok TengahNTB	Bros Lumbung

No	Nama Pemohon	Alamat	Nama Desain Industri
23	Juaini	Tojong Onon Bat Kel Selebung Kec. Batu Kiang Kab. Lombok Tengah NTB	Teko Burung Merak
24	Alhilal	BTN Bogak Permai Kel Tiwugalih Kab. Lombok Tengah NTB	Gunting Mata Siku
25	Lalu Akhmad Akhsan	RT 001 Desa Banyumulek Kec. Kediri Kab. Lombok barat, NTB	Hiasan Dinding
26	Mursidi	Dusun Kebun Tengah Desa Gemel Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah, NTB	Clok Bambu Antik
27	Heryanto	RT. 003/RW/04 Kel Kuang Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat, NTB	Lampu Gantung
28.	Lalu Burhanudin	Dusun Beleka II, Desa Beleka Kec. Praya Timur Lombok Tengah, NTB	Copok Motif
29.	Marnim	Dasan Gelumpang, Dusun asan Jenggala Kec. Tanjung Lombok Utara, NTB	Tempat Assecoris
30	Salamun Hadi	Dusun Gubuk Baru RT.004 Desa Banyumulek Kec. Kediri Kab. Lombok Barat	Pot Posil Bunag
31.	Yeni Irmaya	Puri Bunga Amanah Blok B/10 Rk. Jangkuk RT/RW.007/132 Sayang sayang Cakranegaa Mataram	Tas Tenun Fasion
32.	Faturrahman	Dusun Lingsar Timur Desa Lingsar Kec. Linsar Kab. Lombok Barat NTB	Mangkok Batok Kelapa
33.	Nur Ida Wahyuni	RT.021/009 Desa Teros Kec. Lab. Haji Kab. Lombok Timur, NTB	Tempat Tissue dari pelepah pisang
34.	Majerun	Oonik Jaya Desa Lendang Nangka Kec. Masbagik Kab. Lombok Timur	Tempat minum gelas dari Lidi Kombinasi Rotan
35.	H. Achmad	Desa Loyok Kec. Sikur, Kab Lotim	Tempat buah dari batok kelapa
36.	H. Athar Akbar	RT.003 Desa Rarang Batas Kec. Terara Lotim, NTB	Tempat HP dari Ketak
37.	H. Ahmad	Desa Loyok Kec. Sikur Kab. Lotim NTB	Toples Kombinasi Batok dan Ketak
38.	Nurul Hikmah	Desa Gelora Kec. Sikur Kab. Lotim NTB	Hiasan dari Limbah sampah plastik
39	Nurul Ida Wahyuti	RT 02/009 Desa Teros Kec. Labuhan Haji Kab. Lotim, NTB	Tempat Tissue dari sisik ikan
40.	H. Athar Akbar	RT.003 Desa Rarang Batas Kec. Terara Lotim, NTB	Kap Lampu Hias dari ketak
41.	Nurul Hikmah	Desa Gelora Kec. Sikur Kab. Lotim NTB	Pohon Cemara Bonsai
42.	Juaini	Tojong Ojong Desa Selebung Kec. Batukliang Kab. Lombok Tengah, NTB	Lampu Hias dari pohon Kelapa
43.	Rupawan	Dusun Karang Langko Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, NTB	Kap Lampu dari pelepah kelapa dan pelepah pisang
44.	Rupawan	Dusun Karang Langko Desa Babussalam Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, NTB	Kerajinan Limbah Kayu
45.	Syahid Mursal	Bile Kedit Barat Dusun Bile Kedit Barat Desa Babussalam, Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat, NTB	Lampu dari limbah koran
46.	Ir. Mohamad Ari Aditya MM	Jl. Kebon Begaq Krang Rundun RT.001/312 Kel Bertais Kota mataram, NTB	Candle Holder
47.	Ir. Mohamad Ari Aditya MM	Jl. Kebon Begaq Krang Rundun RT.001/312 Kel Bertais Kota mataram, NTB	Rattan Mahony Fruit
48.	PT Lombok Putri Cenderamata	Jl. Sriwijaya III-A Kel Sapta Marga Kec. Cakranegara Kota Mataram, NTB	Stoples jl. H. Sayap Total Tutup H Kodok
49.	PT Lombok Putri Cenderamata	Jl. Sriwijaya III-A Kel Sapta Marga Kec. Cakranegara Kota Mataram, NTB	Pepelasan Hias Ukir Kipas Badan
50.	PT Lombok Putri Cenderamata	Jl. Sriwijaya III-A Kel Sapta Marga Kec. Cakranegara Kota Mataram, NTB	Jambangan + Tutup HG Garis
51.	PT Lombok Putri Cenderamata	Jl. Sriwijaya III-A Kel Sapta Marga Kec. Cakranegara Kota Mataram, NTB	Vas Gendut OA Hias Ukir Batu

No	Nama Pemohon	Alamat	Nama Desain Industri
52.	PT Lombok Putri Cenderamata	Jl. Sriwijaya III-A Kel Sapta Marga Kec. Cakranegara Kota Mataram, NTB	Krotok Gepeng Hias Ukir Paku Sulus
53.	Ika Asni Susanti	Jl. Transmigrasi No. 10 Lingk Majeluk Kelurahan Majeluk Kec. Mataram, Kota mataram, NTB	Tas Segi empat Kombinasi Batok Kelapa dan Ketak
54.	Ika Asni Susanti	Jl. Transmigrasi No. 10 Lingk Majeluk Kelurahan Majeluk Kec. Mataram, Kota mataram, NTB	Tas Keranjang Kombinasi batok Kelapa dan Ketak
55.	Ika Asni Susanti	Jl. Transmigrasi No. 10 Lingk Majeluk Kelurahan Majeluk Kec. Mataram, Kota mataram, NTB	Tas Segi Enam Kombinasi Batok Kelapa dan Ketak
56.	Jaelani	Ampan lalat Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Kab. Lombok Tengah , Prov NTB	Kalung Choker Air laut
57.	Nikmah	Desa bakan Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah Prov. NTB	Tempat Air Minum
58.	M. Zaenuru Hamka	RT/RW 01 Desa Leneng Kec. Praya Barat kab. Lombok Tengah Prov. NTB	Tempat koran dari Ketak
59.	M. Zaenuru Hamka	RT/RW 01 Desa Leneng Kec. Praya Barat kab. Lombok Tengah Prov. NTB	Lampu Hias dari kulit kerang dan klopeng kelapa
60.	Kadri	Desa Darmaji Kec. Kopang kab. Lombok Tengah Prov. NTB	Tas Cantik Ketak
61.	Kadri	Desa Darmaji Kec. Kopang kab. Lombok Tengah Prov. NTB	Tas Gendang

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2017

Tabel 4.238 Pendaftaran HaKI Kategori Merek Tahun 2017

NO	NAMA PENDAFTAR	ALAMAT	JENIS PRODUK	NAMA MEREK
1	Ida Tirtasari Nasution	Perum Taman Mutiara Kav. 18 Pagutan Barat Mataram, Provinsi NTB	Aneka Kue	Ayibba
2	Nini Suhaini	Jl. Serayu Blok C 61 RT 01, Kel Karang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram Provinsi NTB	Kacang Asin	Sinar Serayu
3	Sani Karmila	Lingkungan Karang Pule Rt. 004 RW 172, kel KArang Pule Kec. Sekarbela Kota Mataram Prov. NTB	Aneka Kue	Kumpul Sekeq
4	Yeni Irmaya	Puri Bunga Amanah Blok B/10 Rk. Jangkuk RT/RW.007/132 Sayang sanyang Cakranegaa Mataram	Tas	Irmaya Bag
5	Minarti Sastrina	Jl. Lestari Gang Umar No. 06 Moncok Telaga Mas Pejarkan Karya Ampenan Kota Mataram	Kue	Bombok
6	Nani Qomariyah	Jl. Jend Sudirman Gg. Jawa No. 8 Rembiga, Kota Mataram NTB	Tas Rajutan	Nikq
7	Fajrin Ridyansyah Halil, S.St. Pi	Jl. Sandubaya RT. 004 RW 002 Kelurahan Bertais Kec. Sandubaya Kota Mataram NTB	Olahan Ikan	Minafood
8	Annisa Raidatul Jannah	Jl. Bambu Runcing I No. 10 RT 003 RW 017 Pejeruk Kec. Ampenan Kota Mataram NTB	Sepatu	Selo
9	Baiq Finafti	Dusun Gubuq Alang RT 002, Kopan Rembiga, Lombok Tengah NTB	Kue Kering	Finarti
10	Lalu Unggul Umbai	Dusun Camplung, Desa Jelantik Kec. Jonggat Kab. Lombok Tengah	Sambal	Banteng Ngagak
11	Ferdian Elmansyah	Jl. KH. Agus Salim No. 1 Praya Kab. Lombok Tengah	Sambal Kering Siap Saji	Sambal Cengeh
12	Baiq DeaNovita Ratmadina	Dusun Camplung Desa JelantikKec jonggat Kab. Lombok Tengah NTB	Minuman	Gili
13	Mursidi	Dusun Kebun Tengah, RT 002 Desa Gemel Lombok Tengah NTB	Kue Kering	Bunut Pansek Lombok

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

NO	NAMA PENDAFTAR	ALAMAT	JENIS PRODUK	NAMA MEREK
14	Sri Sofiati Solehaton	Pedaleman Dusun Kopang II, Desa kopang Rembiga, Kec. Kopang Kabupaten Lombok Tengah NTB	Kue Kering	Rudat Lombok
15	Happy Puspitasari	Jl. Kartini No. 3 RT 005 Dusun Griya Asri Desa Jatisela Kec. Gunungsari Kabupaten Lomok Barat NTB	Kopi	Prime 79
16	Marudin	Logserang Barat Utara, Desa Langko Kec. Lingsar Kab, Lombok Barat NTB	Gula Aren	Enauqu
17	Sylvia sri Oetari	Jl. Ruby P. Perumahan Bumi Selaparang Asri, Midang, Gunung sari Kabupaten Lombok Barat Prov. NTB	Perhiasan	Sylvia Jewelry
18	CV. Embun	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 54 Narmada Kab. Lombok Barat	AMDK	Aijerning
19	Ramli	Dusun Gelogor Selatan, Kediri Kab. Lombok Barat Prov. NTB	Keripik Jagung	Pade Mauq
20	Syfa Hasyiem	Jl. Raya Gunung Sari – Tanjung Km.2 No. 1 Kekait Gunung Sari Kab. Lombok Barat Prov. NTB	Madu	Boan
21	H. Sarafuddin	Dusun Barat Kokok Desa Guntur Macan Kec. Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Prov. NTB	Aneka Keripik	Kecial Kuning
22	Choirul Yakin	Dusun Ketirek Desa Jembatan Gantung RT. 005 Kec. Lembar Kabupaten Lombok Barat Prov. NTB	Aneka Keripik	Faeziela
23	Hasyiem, B.Sc	Jl. Raya Gunungsari – Tanjung Km.2 No. 1 Kekait – Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Prov. NTB	Parfum	Al Buruj
24	Abdul Rahim	Gubuk Baru, Mt. Kandik Desa Terara Kabupaten Lombok Timur Prov. NTB	Telur Asin Panggang	Maiq Manget Meres
25	Kharis Cahyadi	Jl. Diponegoro No. 22B Selong Lombok Timur Prov. NTB	Kue Kering Coklat	Kribrow
26	Murnihati	Jor desa Jerowaru Kec. Jerowaru Lombok Timur NTB	Kerupuk	Gujorat
27	NurJanah	Dusun Menggala Lauk Pemenang Barat Kabupaten Lombok Utara Prov. NTB	Aneka Keripik	Glistanta
28	Husnaini	Dusun Lendang Berora, RT 002 Kel Sigar Penjalin, Kec. Tanjung, Kabupaten Lombok Barat NTB	Aneka Keripik	Cahaya Riski
29	Septi	Dusun KarangBaru RT 001 Kel Pemenang Timur Kec. Pemenang Kabupaten Lombok Utara Prov. NTB	Tas	Cheftihandycraft
30	Muniah	Santong Suka Damai Kabupaten Lombok Utara Prov. NTB	Kerupuk Ikan	Elvin Santong Bersinar
31	Wiwi Ariany, S.Pd	Link. Selayar Rt. 001 RW 004 Desa Dalam Kec. Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Prov. NTB	Olahan Jagung	Wai
32	Syahrudin	Jl. Kartini Gg. Puyuh RT/RW 002/003 Kel. Barang Bara Kec. Sumbawa NTB	Kaos	Samawa Inspiration
33	Arina	Dusun TaropoRT 001 Desa Taropo Kec. Kilo Kab. Dompus NTB	Olahan Jagung	Afaj
34	Ludyah	Jl. Kepiting RT 006 RW 003 Kel Melayu Kec. Asakota Kota Bima NTB	Aneka Kue	La Melo Food
35	Khairunnas	Rada, RT/RW 006/002, DesaRada Kec. Bolo Kab. Bima NTB	Kopi	Lamonda
36	Putra M Sahban	Jl. Energi Gang Layur Kav. 2 karang Bunyuk RT/RW 005/002 Ampenan Selatan Kota Mataram, NTB	Olahan Rumput Laut	Norie
37	Ahmad Kusnadi	Selat Timur RT 001 Desa Selat Kec. Narmada Kab. Lombok Barat	Oyaku	Aneka Dodol
38	Saefudin	Dasaan Tapen Rt. Kec. Gerung Kabupaten Lombok Barat, NTB	Kopi	Inaq Amy
39	Abdul Hafiz	Rumak Timur Utara RT. 001 Kelurahan Rumak Kec. Kediri Kabupaten Lombok Barat, NTB	Kue Kering	Al Majid

NO	NAMA PENDAFTAR	ALAMAT	JENIS PRODUK	NAMA MEREK
40	Rubai Anwar	Dusun Cupek Desa Segar Penjalin RT.001 Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara	Madu	Lebah Sari SP
41	Purna	Dusun Todo Desa Bentek Kec. Gangga Kab. Lombok Utara	Madu	Madu Murma
42	Hikmah	Dusun Anjer RT. 004 Dasan Baru Kec. Kopang Kab. Lombok Tengah, NTB	Kue Kering	Adkop
43	Badri	Dusun Sukamulia RT/RW 016/004 Desa Pohgading Kec. Pringgabaya Kab. Lombok Timur, NTB	Pupuk Cair	Asa Green
44	Nurjanah	Jl. Nuri Gg. Walet No. 33 RT/RW 001/003 Kel Brang Bara Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, NTB	Marning Jangung	Raskita
45	Jaidah	Dusun Samri RT/RW 003/005 Kel Poto Kec. Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa , NTB	Tenun	Gili Liyuk

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2017

Tabel 2.184 Pendaftaran HKI Kategori Hak Cipta Tahun 2017

No	Nama Pemohon	Alamat	Nama Hak Cipta
1	Hj. Rabiah	Kembang Kerang Daya RT. 001 Kel. Kembang Kerang Kec. Aikmel Kab. Lotim	Motif Tenun Kali Bintang
2.	Hj. Rabiah	Kembang Kerang Daya RT. 001 Kel. Kembang Kerang Kec. Aikmel Kab. Lotim	Motif Tenun Bunga Rumput
3.	Naswadi	Kampung Pratoth Desa Masbagik Selatan Kec. MASbagik Kab. Lombok Timur	Karya Rekaman Senter Batari
4.	Lalu Suryadi	Jl. Swasembada No. 53 Kekalik Kec. Ampenan Kota Mataram	Karya Rekaman Ajatukrama
5.	Lalu Suryadi	Jl. Swasembada No. 53 Kekalik Kec. Ampenan Kota Mataram	Karya Rekaman Tari Perempuan Rusuk Dua
6	Lalu Suryadi	Jl. Swasembada No. 53 Kekalik Kec. Ampenan Kota Mataram	Karya Rekaman Tari Tapel Cupak
7.	Sella Ayu Aprilina	BTN Bukit Hijau Kekait B 10 Mataram	Karya Rekaman Tari Waris Gumi
8	Herman Zikri	Dusun Tima Timuk Desa Teros Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur	Seni Motif Batik Kerake
9.	Ismayadi	Lendang Batah Lauq Desa Mekar Damai Kec. Praya Kabupaten Lombok Tengah	Buku : Terjemahan Inti Sari Nibros Membahas Tentang Hukum-hukum Haid Nifas dan Istihadah
10	Sella Ayu Aprilina	BTN Bukit Hijau Kekait B 10 Mataram	Karya Rekaman Tari Kijang
11	M. Asyul Riady	Lingkungan Kendai Dua Barat RT.001 RW 001 Kelurahan Kendai Dua Barat Kecamatan Woja Kab. Dompu	Alat Peraga Boneka Cerdas One Mbolo dan Siwe Mbolo
12	Suhaimi Idris	Desa Sembung Kec. Narmada Kab. Lombok Barat	Karya Rekaman Album VCD Karaoke Besapaan
13	M. Najmul Ihsan	Desa KabarKecamatanSakra Kabupaten Lombok Timur	Karya Rekaman Album VCDKaraoke D.U.A Band Indie Parpumde
14.	Kusmanjayadi	Kedondong Desa Prenggasea Selatan Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur	Seni Motif Batik Putri Nyale
15.	Siti Raodah	Jl. Aneka 1/8 Bawak Bagek Utara Dasan Agung Kota Mataram	Lagu Judul Begawean
16	Sosiawan Putra	Aikdewa Selatan Desa Aikdewa Kec. Pringgasela Kab. Lombok Timur	Karya Rekaman Album Perdana Lupak Dirik

No	Nama Pemohon	Alamat	Nama Hak Cipta
17	Siti Raodah	Jl. Aneka 1/8 Bawak Bagek Utara Dasan Agung Kota Mataram	Karya Rekaman Lagu Begawean
18.	Asri	Sukamulia Desa Pohgading Timur Kec. Pringgebaya Kab. Lombok Timur	Lagu Judul Presiden dan Dewan
19.	Asri	Sukamulia Desa Pohgading Timur Kec. Pringgebaya Kab. Lombok Timur	Lagu Judul Malaikat Cinta
20	Asri	Sukamulia Desa Pohgading Timur Kec. Pringgebaya Kab. Lombok Timur	Lagu Judul Sahabat
21.	Asri	Sukamulia Desa Pohgading Timur Kec. Pringgebaya Kab. Lombok Timur	Lagu Judul Belahan Jiwa
22	Asri	Sukamulia Desa Pohgading Timur Kec. Pringgebaya Kab. Lombok Timur	Lagu Judul Maafkan
23.	Hj. Maya D Sukmantara	Jl. Angklung V/3 Karang Bedil Kota Mataram	Motif Batik Motif Cacing Nyale
24	Hj. Maya D Sukmantara	Jl. Angklung V/3 Karang Bedil Kota Mataram	Motif Batik Kangkung
25.	Salehudin	Pagutan Karang Genteng Kota Mataram	Lukisan NatureOf Mount
26	Lalu Moh Ali	DesaPengkelak Mas Sakra Barat Kab. Lombok Barat	Karya Rekaman Album VCD Selae Lime Likur
27	Lalu Suryadi	Jl. Swasembada No. 53 Kekalik Kec. Ampenan Kota Mataram	Karya Rekaman Tari Zapin Malenggo
28	Lalu Suryadi	Jl. Swasembada No. 53 Kekalik Kec. Ampenan Kota Mataram	Karya Rekaman Tari Dulang Persaji
29	Lalu Suryadi	Jl. Swasembada No. 53 Kekalik Kec. Ampenan Kota Mataram	Karya Rekaman Tari Tola'al
30	Budianto	Jl. Pantai Nipah No. 60 BTN Griya Indah Mataram NTB	Alat Peraga : Meja Lipat Peta Indonesia

Sumber: Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2017

Jumlah unit usaha industri formal pada tahun 2017 mengalami peningkatan sekitar 3,62 persen atau sekitar 305 unit dibandingkan dengan tahun 2016, tenaga kerja juga mengalami peningkatan sekitar 3,09 persen atau sekitar 1.547 orang begitu juga halnya dengan investasi meningkat sekitar 2.59 persen atau sebesar 51.835,27 (juta). Peningkatan unit usaha, tenaga kerja dan investasi, juga diikuti dengan meningkatnya nilai produksi yaitu sekitar 2,52 persen atau sebesar 85.496,96 (juta) tahun 2017.

Unit usaha industri non formal turun 3,71 persen atau 2.781 unit usaha pada industri non formal tahun 2017 begitu juga dengan tenaga kerja turun 3,68 persen atau sekitar 6.398 orang, nilai investasi juga menurun sebesar 1,48 persen atau sekitar 2.886 (juta) dan nilai produksi menurun sebesar 3,8 persen atau sekitar 65.034,74 (juta) dibanding tahun 2016. Penurunan Industri Non Formal dikarenakan beberapa perusahaan sudah tidak beroperasi lagi, dan beberapa diantaranya beralih ke sektor lainnya. Perkembangan industri formal dan industri non formal sampai dengan semester II tahun 2017 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.185 Perkembangan Industri Formal s.d Tahun 2017

Kabupaten / Kota	Perusahaan	Tenaga Kerja	Investasi	Nilai Produksi

	(unit)	(jiwa)	(Rp.000)	(Rp.000)
1. Lombok Barat	531	5,543	1,487,415,572	1,360,366,453
2. Lombok Tengah	488	3,299	27,169,799	102,234,170
3. Lombok Timur	1,074	6,137	63,697,375	266,486,693
4. Sumbawa	527	3,050	46,700,013	216,709,537
5. Dompu	241	1,916	89,823,125	45,266,134
6. Bima	1,532	7,608	39,235,935	156,092,451
7. Sumbawa Barat	553	3,274	83,191,559	82,982,182
8. Lombok Utara	488	3,299	27,169,799	102,234,170
9. Mataram	1,733	8,371	103,646,740	789,123,131
10. Bima	1,002	3,616	52,062,932	309,530,378
NTB	8,730	51,541	2,056,454,883	3,476,961,215

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2017

Tabel 2.186 Perkembangan Industri Non Formal Tahun 2017

Kabupaten / Kota	Perusahaan	Tenaga Kerja	Investasi (Rp. 000)	Produksi (Rp.000)
1. Lombok Barat	6,874	19,781	23,016,385	165,484,674
2. Lombok Tengah	35,577	57,056	50,457,220	333,575,230
3. Lombok Timur	17,111	52,354	49,676,036	163,772,234
4. Sumbawa	1,833	4,246	4,024,183	41,562,266
5. Dompu	1,242	2,732	1,763,685	3,682,504
6. Bima	3,465	9,076	5,384,790	66,749,332
7. Sumbawa Barat	397	1,179	3,976,864	74,838,295
8. Kota Mataram	2,688	11,246	28,417,594	693,832,401
9. Kota Bima	972	4,138	20,610,353	63,736,926
10. Lombok Utara	1,954	5,771	4,930,652	41,310,803
NTB	72,113	167,579	192,257,762	1,648,544,665

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2017

Tabel 2. 187 Perkembangan Industri Berdasarkan Jenis Kelompok Industri Sampai dengan Tahun 2017

Kelompok Industri	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai (Rp.000)	
			Investasi	Produksi
1. Industri Formal	8,730	51,541	2,056,454,883	3,476,961,215
2. Industri Non Formal	72,113	167,579	192,257,762	1,648,544,665
Jumlah	80,843	219,120	2,248,712,646	5,125,505,880
2016	83,319	223,968	2,199,763,421	5,105,043,716

Sumber : Dinas Perindustrian Provinsi NTB, 2017

Menurunnya perkembangan industri non formal lebih disebabkan karena beralih fungsinya pelaku usaha sektor yang lain seperti menjadi TKI, degradasi luas areal pertanian akibat pesatnya pertumbuhan kebutuhan permukiman/perumahan sehingga berdampak pada pasokan kebutuhan bahan baku, dan kesulitan akses akseibilitas bahan baku/penolong yang dibutuhkan untuk proses produksi, sehingga pelaku usaha mengalihkan usahanya ke sektor perdagangan dan jasa.

8. TRANSMIGRASI

Daerah tujuan transmigrasi keluar Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2017 telah dilaksanakan pengiriman transmigran ke Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 5 KK (18 jiwa) dan ke Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 5 KK (19 jiwa), sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 188 Jumlah Transmigran Keluar Provinsi dan Tujuan Daerah Tahun 2016-2017

NO	PROV/KAB/ LOK/UPT	2016			2017		
		TARGET KAB. DAERAH ASAL (Tentatif)		REALISASI KAB. DAERAH ASAL	TARGET KAB. DAERAH ASAL (Tentatif)		REALISASI KAB. DAERAH ASAL
		KAB /KOTA	KK	JUMLAH KK	KAB/ KOTA	KK	JUMLAH KK
A	KALIMANTAN BARAT				SULAWESI BARAT		
1.	Kabupaten Kayong Utara				Kab. Mamasa		
	UPT Simpang Tiga				UPT. Kim Rano		
		Loteng	20	19 KK = 75 jiwa	Kab. Loteng	5	5 KK = 18 jiwa
B	GORONTALO				SULAWESI TENGGARA		
1.	Kab. Pahu Watu				Kab. Kolaka Timur		
	UPT Sandalan				- UPT Kim Tongauna		
		- Kab. Lotim	10	10 KK = 35 jiwa	Kab. Lobar	2	2 KK = 8 Jiwa
					Kab. Lotim	3	3 KK = 11 jiwa
C	SULAWESI TENGAH						
1.	Kab. Morowali						
	- UPT Kalbera						
		Kab. Lobar	10	10 KK = 35 jiwa			
		Kab. Lotim	5	5 KK = 20 jiwa			
2.	Kab. Kepulauan Banggai						
	- UPT Takola Atas						
		Kota Mataram	10	10 KK = 40 jiwa			
D	SULAWESI TENGGARA						
1.	Kab. Konawe Utara						
	- UPT Puuhialu						
		KLU	17	17 KK = 57 jiwa			
JUMLAH TPA			72 KK	71 KK=262 JIWA		10 KK	10 KK = 37 Jiwa

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2017

URUSAN PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG

Urusan pemerintah fungsi penunjang merupakan urusan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara lain administrasi pemerintahan, pengawasan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan pelatihan. Pada tahun 2017, urusan pemerintah fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB diuraikan sebagai berikut :

1. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Urusan pemerintah fungsi penunjang bidang administrasi pemerintahan merupakan unsur pendukung yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Administrasi Pemerintahan diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah meliputi Biro Umum, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan dan LPBJP, Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, Biro Humas dan Protokol, Sekretariat DPRD, dan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi NTB di Jakarta.

a. Biro Umum

Pada tahun 2017 dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan, dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi NTB, maka indikator Masyarakat yang Mengakses Layanan NTB Online (RKPD online, NTB satu Data, SIP-PPID), menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

Informasi terkait prestasi Biro Umum atas nama pemerintah daerah baik tingkat nasional/internasional selama dua tahun berturut-turut telah berhasil mempersembahkan prestasi tingkat Nasional melalui inovasi/terobosan layanan yang dilakukannya, yaitu:

- Top 99 Inovasi Pelayanan Publik, dengan tema Temukan Arsip dalam 3 Menit dan ditetapkan sebagai Duta NTB dalam Lomba Pelayanan Publik Nasional.
- National Procurement Award* atas keberhasilan Pelaksanaan Peran LPSE Provinsi NTB dalam mengawal proses pengadaan barang jasa secara efektif dan efisien.
- Terbaik Pertama Nasional Pengaman Informasi berdasarkan Hasil Evaluasi Bidang Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Sandi Negara.
- Perwakilan Indonesia dalam Audisi kompetensi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat UNPSA (United National Public Service Awards)

Tata kelola kearsipan yang diselenggarakan Biro Umum dalam mengelola arsip inaktif sebanyak 39.282 berkas dan 30.475 berkas yang terdiri dari : 13.243 surat masuk, 7.641 surat keluar, 9.315 distribusi undangan dan 276 dokumen konfirmasi surat. Dalam peningkatan pelaksanaan tata kelola kearsipan Biro Umum menjalin kemitraan dengan Pemerintah Kota Mataram, Inspektorat, Biro Organisasi Setda Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa, dalam mengadopsi sistem pengelolaan arsip berbasis TIK (e-arsip NTB) dan pengelolaan arsip inaktif. Sedangkan untuk pelatihan/magang tata kelola kearsipan bermitra dengan Badan Perpustakaan Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Utara.

b. Biro Organisasi

Biro Organisasi sebagai perangkat daerah pengelola utama salah satu indikator dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018, dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.189 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik Tahun 2017

INDIKATOR	Satuan	2016	2017		TARGET 2018
		REALISASI	TARGET	REALISASI	
Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2017.

Jumlah aduan pelayanan publik yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 sebanyak 348 aduan, relatif mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 352 aduan yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.190 Rekapitulasi Aduan Pelayanan Publik yang ditujukan ke OPD Tujuan Tahun 2016-2017

No	Uraian	TAHUN		Jumlah	Ditindaklanjuti (%)
		2016	2017		
1	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	5	4	4	100,0
2	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	72	140	212	100,0
3	Dinas Kominfo dan Statistik	-	65	65	100,0
4	Rumah Sakit Umum Daerah NTB	40	111	151	100,0
5	Rumah Sakit H.L Manambai	-	5	5	100,0
6	Satpol PP	17	20	37	100,0
7	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma	-	3	3	100,0
8	Biro Umum	95	-	95	100,0
9	KPID	3	-	3	100,0
10	Biro Adm.Pembangunan,LBJP	2	-	2	100,0
11	Biro Hukum	1	-	1	100,0
12	BLHP	7	-	7	100,0
13	Dinas Naker	94	-	94	100,0
14	Dinas Budpar	16	-	16	100,0
Jumlah		352	348	700	100,0

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2017

Data pada tabel di atas menunjukkan seluruh aduan telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait, namun demikian ditahun 2017 beberapa perangkat daerah yang mengalami penambahan aduan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Aparatur Sipil Negara terus menjadi perhatian, karena kualitas kinerja pelayanan publik yang baik akan menghasilkan pelayanan yang baik juga kepada masyarakat, dan akan meningkatkan mutu aparatur pemerintah. Pelayanan publik di era reformasi menjadi isu penting dan strategis karena masyarakat semakin cerdas dan semakin tahu hak-haknya. Pemerintah Provinsi NTB berkomitmen kuat dalam menyelenggarakan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik ditujukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan dapat diwujudkan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui pembenahan berbagai aspek, antara lain kelembagaan, kepegawaian, tatalaksana, akuntabilitas dan pengawasan guna menghasilkan pelayanan prima yaitu pelayanan yang cepat, murah, aman, berkeadilan dan akuntabel.

Langkah strategis yang terus diupayakan untuk mendorong perbaikan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi NTB adalah dengan memberikan stimulan, semangat perubahan dan inovasi pelayanan serta melakukan penilaian untuk mengetahui model kinerja yang obyektif dari unit pelayanan yang ada di daerah, serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan publik yang dirasakan tidak sesuai harapan. Pengaduan adalah ungkapan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

Pedoman penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB tertuang di dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Penanganan pengaduan yang ada pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah disebut Pos Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik, yang memiliki tugas menyampaikan laporan penanganan pengaduan masyarakat dalam bentuk surat yang minimal memuat informasi tentang nomor dan tanggal pengaduan, isi ringkas pengaduan, posisi penanganan dan hasil penanganan dan disampaikan kepada Sekretariat Desk Pengaduan Masyarakat di Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTB.

Hasil penyelesaian aduan pelayanan publik pada Tahun 2017 telah memenuhi target RPJMD yaitu 100 persen, karena Pos diseluruh Unit Organisasi Perangkat Daerah lingkup Provinsi NTB telah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberikan pemenuhan hak-hak masyarakat secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Biro Organisasi telah melakukan upaya dalam peningkatan kualitas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 pada kategori predikat penilaian B dengan nilai skor 60,64, dibandingkan tahun 2015 masih memiliki nilai CC dengan nilai skor 58,65, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 191 Hasil penilaian LKjIP Pemerintah Provinsi Tahun 2015-2017

No	Komponen Yang Dinilai	2015		2016		2017	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja			30	20,49	30	21,47
b	Pengkuran Kinerja			25	15,21	25	15,14
c	Pelaporan Kinerja			15	8,50	15	9,05
d	Evaluasi Internal			10	6,30	10	5,30
e	Capaian Kinerja			20	10,14	20	10,05
	Nilai Hasil Evaluasi		58,65	100	60,64	100	61,01
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		B		B

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2017.

Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintahan Provinsi NTB, yang berorientasi pada hasil serta budaya kerja menunjukkan kinerja yang baik, namun masih perlu upaya meraih predikat yang lebih baik lagi dimasa depan. Pada tahun 2017 hasil penilaian LKjIP masih menunggu hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB.

c. Biro Hukum

Perkembangan produk hukum dari Tahun 2016 -2017, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.192 Target dan Realisasi Legislasi Daerah Tahun 2016-2017

NO.	PRODUK HUKUM	SATUAN	2016	2017	
				TARGET	REALISASI
1.	Peraturan Daerah	Buah	12	10	13
2.	Peraturan Gubernur	Buah	56	30	69
3.	Keputusan Gubernur	Buah	1.136	700	1046
	Jumlah		1.204	740	1125

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi NTB, 2017

Tabel 2. 193 Jumlah Perda/Perbup/Perwal Yang difasilitasi dan dievaluasi Tahun 2017

NO	KABUPATEN/ KOTA	DIFASILITASI			DIEVALUASI		
		RAPERDA / PERDA	RAPERBUP/ PERBUP	RAPERWAL /PERWAL	RAPERDA/ PERDA	RAPERBUP /PERBUP	RAPERWAL /PERWAL
1.	Kota Mataram	8	-	-	5	-	-
2.	Lobar	8	-	-	4	-	-
3.	Loteng	5	-	-	4	-	-
4.	Lotim	1	11	-	4	1	-
5.	Lombok Utara	5	1	-	3	-	-
6.	Sumbawa Barat	15	-	-	6	-	-
7.	Sumbawa	5	-	-	5	-	-
8.	Dompu	6	2	-	5	-	-
9.	Kota Bima	12	-	-	4	-	-
10.	Bima	3	1	-	4	-	-
	Jumlah	85	15	-	46	1	-

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi NTB, 2017

Tabel 2.194 Penyelesaian Sengketa Hukum (Perkara) Provinsi NTB Tahun 2017

NO	Uraian	Penggugat / Pembanding	Tergugat/ Terbanding	Obyek Sengketa	Putusan Pengadilan			Lokasi	Tahapan Kasus
					PN/PTUNMTR	PT MTR/ PTUN SBY	MA		
1	Perkara Perdata No. 37/PDT.G/2016/PN.Pya	SURYO	Pemprov NTB	Tanah Milik Pemprov. NTB seluas 76.150 M2	PN. Selong No. 37/PDT.G/2016/PN.Pya			Desa Leneng dan Desa Puyung Kec. Pyara Kab. Loteng	Kasasi
2	Perkara Perdata No. 44/PDT.G/2016/PN.Pya	SALIM Dkk.	Pemprov NTB	Tanah Milik Pemprov. NTB	PN Peraya No. 44/PDT.G/2016/PN.Pya			Dusun Batu Beduk Desa Batujai Desa Puyung Kec. Pyara Kab. Loteng	Seledai
3	Perkara TUN No. 56/G/2016/P TUN.MTR.	IRWANSYA H, S.Pd.	Pemprov NTB	Keputusan Gubernur No. 171-923 Tahun 2016 ttg Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat Masa Jabatan 2014-2019	PTUN Mataram No. 56/G/2016 /PTUN.MTR.			Kab. Sumbawa Barat	Selesai
4	Perkara Perdata No. 274/PDT.G/2017/PN.MTR	LUTFI HEYDER	Pemprov NTB	Tanah Milik Pemprov. NTB seluas 3,2 Ha.				Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara	Selesai karena Gugatannya dicabut

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

NO	Uraian	Penggugat / Pembanding	Tergugat/ Terbanding	Obyek Sengketa	Putusan Pengadilan			Lokasi	Tahapan Kasus
					PN/PTUNMTR	PT MTR/ PTUN SBY	MA		
5	Perkara TUN No. 05/G/2017/P.TUN.MTR.	LUTFI HEYDER	Pemprov NTB	Surat Dinas yang ditandatangani Sekda No. : 900/1540/BPKA D/2016 TGL 2 Desember 2016 ttg Penataan Bangunan di Tanah Milik Pemprov. NTB dan Surat Kepala BPKAD Nomor : 900/1502/BPKA D/2017 tgl 24 November 2016 ttg Penataan Bangunan di Tanah Milik Pemprov. NTB				Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara	Selesai karena Gugatannya dicabut
6	Perkara Perdata No. 05/PDT.G/2017/PN.SEL	L. ABBAS Dkk	Pemprov NTB	Tanah Milik Pemprov. NTB seluas 4.620 M2	PN. Selong No. 05/PDT.G/2017/PN.SEL			Dusun Gerami Desa Loyok Kec. Sikur Kab. Lombok Timur	Selesai
7	Perkara Perdata No. 11/PDT.G/2017/PN.MTR	WAK IBRAHIM	Pemprov NTB	Tanah Milik Pemprov. NTB seluas 15.000 M2	PN Mataram No 11/PDT.G/2017/PN.MTR			Dusun Gili Air Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara	Selesai
8	Perkara TUN No. 148/G/2017/PTUN.MTR.	MASDIN	Pemprov NTB	Keputusan Gubernur No. 171.2-397 Tahun 2017 ttg Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Bima Masa Jabatan 2014-2019 tanggal 2 Mei 2016	PTUN Mataram No. 148/G/2017/PTUN.MTR.			Kab. Bima	Kasasi
9	Perkara Perdata No. 91/PDT.G/2017/PN.SEL	Gugatan Kelompok (Class Action)	Pemprov NTB	Tanah Milik Pemprov. NTB	PN Selong No. 91/PDT.G/2017/PN.SEL			Desa Sekaroh Kec. Jerowaru Kab. Lotim	Bandung
10	Perkara Perdata No.20/PDT.G/2017/PN.Rbi	SITI NUR Dkk	Pemprov NTB	Tanah Milik Pemprov. NTB yaitu Kantor UPTD TPI Dinas Kelautan dan Perikanan				Sape Kabupaten Bima	Selesai
11	Perkara Perdata No. 01/PDT.G/2017/PN.Rbi	SAMSUL M. NUR	Pemprov NTB	Tergugat Mengajukan Permohonan Penggantian Antar Waktu (PAW) Terhadap Penggugat				Kabupaten Bima	Selesai

Sumber : Biro Hukum Setda Provinsi NTB, 2017

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa penanganan penyelesaian sengketa hukum dalam Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan dengan baik sehingga beberapa perkara hukum dapat diselesaikan sebanyak 8 kasus,

banding 1 kasus dan 2 kasus kasasi. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum pada tahun 2017 antara lain :

- **Kegiatan Sosialisasi HAM untuk Guru**

Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti setiap warga negara harus menghargai, menghormati dan menganggap penting semua proses dan upaya pemahaman HAM. Pengenalan nilai-nilai HAM dapat di internalisasikan dan sosialisasikan melalui pelatihan HAM.

Guru memiliki peranan yang sangat penting dan sangat strategis dalam upaya meningkatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan di HAM. Dalam tugas-tugasnya guru juga sangat berpotensi melakukan pelanggaran HAM terhadap para siswa/siswinya. Oleh karena itu, pelatihan HAM bagi guru penting untuk dilakukan agar mampu memberikan penguatan HAM bagi guru khususnya di Prov. NTB guna mengimplementasikan HAM ke dalam proses belajar mengajar disatuan Pendidikan masing-masing.

- **Kegiatan Sosialisasi HAM untuk Siswa**

Perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dari sejak janin kandungan sampai anak berumur 18 Tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak, berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan kelangsungan hidup, serta penghargaan terhadap pendapat anak oleh karena itu sosialisasi HAM bagi siswa SMA/SMK penting untuk dilakukan agar siswa mampu memberikan perlindungan diri terhadap pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan Sekolah.

- **Kegiatan Rakor HAM.**

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan PP Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional HAM Tahun 2015-2019 serta merealisasikan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia melalui Nawacita dalam mengintegrasikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kelompok rentan kedalam satu rencana aksi nasional yang inklusif, maka semua Kab./Kota melalui OPD terkait wajib melaksanakan dan melaporkan Aksi HAM Tahun 2017 yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kab./Kota. Dan sebagai bagian dari kegiatan Aksi HAM ini adalah penilaian Kab./Kota peduli HAM yang wajib diikuti oleh 10 Kab./Kota se NTB oleh karena itu Biro Hukum Setda Provinsi NTB berupaya memfasilitasi kebutuhan ini melalui kegiatan Rapat Koordinasi Pelaporan Aksi HAM dan penilaian Kab./Kota Peduli HAM yang diikuti 40 peserta dari Kab./Kota se NTB dan OPD terkait Lingkup Pemerintah Provinsi.

- **Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia**

Kegiatan sosialisasi kebijakan ini dilaksanakan di 5 kabupaten/kota se-NTB dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang per kabupaten/kota (100 orang) dan sosialisasi di Mataram tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal dengan jumlah peserta 50 orang.

▪ **Kegiatan Prolegda**

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut penataan Peraturan Perundang-undangan dan pembangunan di bidang hukum yang berkesinambungan sehingga penyusunan/pembentukan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan dengan tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan di Daerah secara terarah, terkoordinir dan terpadu setiap tahun.

▪ **Kegiatan Rapat koordinasi Hukum,**

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar terwujudnya supremasi hukum yang berkualitas, terjalin koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, menyamakan persepsi terhadap dasar hukum dalam memproses penyusunan produk hukum daerah, dan pemahaman isu-isu aktual di bidang hukum.

d. Biro Pemerintahan

▪ **Penyusunan LPPD**

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) termasuk dalam Dokumen Pertanggungjawaban Gubernur. LPPD dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahun. Peringkat LPPD diumumkan setiap dua tahun sekali, LPPD yang dievaluasi dan dinilai tahun 2015 diumumkan pada saat hari Otonomi Daerah pada bulan April tahun 2017, dimana Provinsi NTB menduduki peringkat 6 untuk tingkat nasional, penghargaan yang diperoleh dari hasil penilaian LPPD sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-10421 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016. Provinsi NTB mampu mempertahankan Penghargaan tersebut dan setiap tahun selalu meningkat, sejak tahun 2012 berada pada peringkat 16, tahun 2013 mencapai peringkat 9 dan tahun 2014 mampu mempertahankan peringkat 8.

▪ **Batas Daerah**

Kebijakan pembinaan batas wilayah Tahun 2017, diarahkan untuk mewujudkan batas wilayah daerah secara pasti di lapangan baik dari aspek yuridis maupun aspek fisik. Terkait dengan penyelesaian batas wilayah, pada tahun 2017 batas wilayah daerah telah diterbitkan 6 peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Bima dan Kota Bima;
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu;

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Tengah,
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Batas Wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu,
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penetapan batas wilayah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat.

Kabupaten Lombok Tengah masih mempermasalahkan akan melakukan gugatan melalui Mahkamah Agung, untuk wilayah Nambung dengan pertimbangan, melanggar Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tanggal 14 Agustus 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah teritorial tingkat 1 Bali, NTB, NTT termasuk tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2010 tentang RTRW Provinsi dan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten, namun dari pihak Provinsi masih menunggu hasil putusan.

Kendala Batas daerah yang belum tercapai kata sepakat dalam penentuan titik batas dan penarikan garis batas daerah disebabkan oleh perbedaan persepsi dalam penarikan garis batas dan penggunaan peta dasar sebagai acuan dalam penentuan titik koordinat batas dan tarikan garis batas, untuk segmen batas daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat sengketa batas sebagai berikut:

- 1) Kabupaten Lombok Barat menghendaki penempatan titik Koordinat batas dan tarikan garis batas dari TK. 1 menuju TK. 2 dan selanjut mengarah ke TK.3 yang mengikuti alur punggung gunung dan sesuai pemempatan titik koordinat pada tahun 2006. (alternatif A.)
- 2) Kabupaten Lombok Tengah menghendaki penempatan titik koordinat batas daerah dari titik A menuju titik B dan selanjutnya ke titik C, yang mengikuti As median Jalan.
- 3) Areal yang jadi sengketa adalah Dusun pengantap Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Tengah. (Alternatif B.)
- 4) Sementara di wilayah yang disengketakan secara administrasi sudah dilayani oleh Pemerintah Lombok Barat melalui Desa Buwun Mas, layanan yang diberikan antara lain pembuatan KTP, SPPT, pembangunan gedung SD, Pembangunan PUSTU, dan daftar pemilih pada waktu Pilkada maupun Pilpres.

▪ **Penataan Daerah Otonomi Baru**

Perkembangan pembentukan Daerah Otonomi Baru di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sampai dengan tahun anggaran 2017 masih terdapat 4 usulan Daerah Otonomi Baru yang belum dapat diproses. Keempat usulan Daerah Otonomi Baru tersebut adalah :

1. Provinsi Pulau Sumbawa, merupakan pemekaran dari Provinsi NTB dengan cakupan wilayah semua kabupaten/kota di Pulau Sumbawa dan pulau-pulau kecil di sekitarnya;
2. Kabupaten Lombok Selatan, usul pemekaran dari Kabupaten Lombok Timur di wilayah bagian selatan;

3. Kota Samawa Rea. Usul pemekaran dari Kabupaten Sumbawa yang rencananya sekaligus untuk memenuhi persyaratan sebagai ibukota Provinsi Pulau Sumbawa; dan
4. Kabupaten Bima Timur, usul pemekaran dari Kabupaten Bima di wilayah bagian timur.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait dengan pemekaran daerah otonomi baru. Sehubungan dengan itu, perkembangan usulan Daerah Otonom Baru di Provinsi NTB dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kebijakan pemerintah dalam hal ini Dewan Pertimbangan Daerah terhadap pemekaran daerah otonom sampai saat ini masih moratorium karena kondisi keuangan Negara sedang mengalami defisit.
2. Saat ini pemerintah sedang fokus terhadap daerah otonom baru yang telah terbentuk sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2014 sebanyak 283 daerah. Karena terbentuknya daerah ini menyisakan masalah besar terkait dengan aset, batas daerah, dokumen, peralatan, personil (P3D).
3. Sampai saat ini terdapat 242 usulan daerah otonom baru yang diterima, terdiri dari 88 daerah ditambah dengan yang terbaru sebanyak 154 daerah.
4. Pemerintah dalam tiga tahun kedepan akan focus pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 pemilihan presiden.
5. Terkait dengan RPP Daerah Otonom Baru, saat ini sedang digodok dan sudah harmonisasi tahap pertama, namun masih menunggu hasil kesepekatan lintas kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Mensesneg. Masih ada tarik ulur karena masih ada masukan dari Kementerian Lembaga seperti BIG, Kementerian Keuangan terhadap substansi di RPP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, seluruh kecamatan ditetapkan sebagai penyelenggara Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) selambat-lambatnya 5 tahun sejak ditetapkan. Sampai akhir tahun 2017 masih terdapat 16 kecamatan yang belum melaksanakan Paten. Secara rinci pelaksanaan Paten di Provinsi NTB sampai dengan akhir tahun 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.195 Pelaksanaan Paten di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan akhir tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KEC.	TARGET PELAKS PATEN	REALISASI	KETERANGAN
1	Lombok Barat	10	10	10	Terlaksana dengan baik di semua kecamatan
2	Lombok Tengah	12	12	12	2 kecamatan sudah baik, lainnya belum maksimal
3	Lombok Timur	20	20	20	Semua kecamatan telah melaksanakan Paten
4	Lombok Utara	5	0	5	Pelaks Paten secara serentak mulai 2017

5	Sumbawa	24	24	24	Semua kecamatan telah melaksanakan Paten
6	Sumbawa Barat	8	8	8	Semua kecamatan telah melaksanakan Paten
7	Dompu	8	0	0	Belum mulai melaksanakan Paten
8	Bima	18	5	18	Pelaks sebagian belum berjalan optimal
9	Kota Mataram	6	0	3	Baru 3 kec melaksanakan Paten
10	Kota Bima	5	0	0	Th.2017 mempersiapkan sarana, 2018 mulai
	JUMLAH	116	79	100	

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, 2017

- **Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD**

Untuk fasilitasi proses Pengganti Antar Waktu (PAW) sampai dengan akhir tahun 2017 telah diterbitkan SK Gubernur tentang rekomendasi PAW, administrasi Kepala Daerah dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota se NTB. Fasilitasi pengganti antar waktu sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.196 Fasilitas Pengganti Antar Waktu Tahun 2017

No	Kegiatan	Uraian	Keterangan
1	Memfasilitasi Rekomendasi PAW	- Keputusan Gubernur No.171-343 tanggal 4 April 2017 - Keputusan Gubernur No.171-3-398 tanggal 2 Mei 2017 - Keputusan Gubernur No.171-3-440 tanggal 8 Mei 2017 - Keputusan Gubernur No.171/615/2017 - Keputusan Gubernur No.171/670/2017	5 SK Telah diproses: - 1 Provinsi - 4 Kab/Kota Masih Dalam Proses : - 3 Provinsi
2	Penyelesaian Adm. Kepala Daerah dan DPRD Provinsi NTB dan Kab/Kota se NTB	1. Izin Cuti Umrah - Tanggal 5/6/2017 No. 090/156/Pem/2017 - Tanggal 6/6/2017 No. 090/157/Pem/2017 - Tanggal 8/3/2017 No. 100/52/Pem/2017 - Tanggal 8/3/2017 No. 100/53/Pem/2017 - Tanggal 28/2/2017 No. 100/26/Pem/2017 - Tanggal 17/2/2017 No. 100/019/Pem/2017 - Tanggal 24/5/2017 No. 090/155/Pem/2017 2. Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri - Tanggal 8/11/2017 No. 099/278/Pem/2017 - Tanggal 17/10/2017 No. 099/255/Pem/2017 - Tanggal 31/8/2017 No. 099/207/Pem/2017 - Tanggal 12/6/2017 No. 190/150/Pem/2017 3. Izin Berobat ke Luar Negeri - Tanggal 22/2/2017 No. SK No : 100/20/Pem/ 2017	11 SK 1 SK

Sumber : Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB, 2017

e. Biro Perekonomian

Capaian kinerja Biro Perekonomian mengacu pada upaya untuk meningkatkan fungsi fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi dimana hal tersebut merupakan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian sebagai fasilitator dan koordinator pelaksana program pembangunan daerah dalam meningkatkan perekonomian Provinsi NTB. Program yang telah dilaksanakan antara lain pengendalian inflasi daerah, Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah, dan Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan Pertumbuhan Ekonomi Non Tambang, dimana pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi salah satu dari indikator RPJMD, dengan capaian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.197 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2017

INDIKATOR	2016	2017		TARGET 2018
		TARGET	REALISASI	
Pertumbuhan Ekonomi non Tambang (%)	5,97	6,00 – 6,25	7,10	6,25 - 6,50

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 kinerja perekonomian Provinsi NTB meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2016, pertumbuhan ekonomi non tambang tahun 2016 mencapai 5,97 persen, dan tahun 2017 sebesar 7,10 persen, target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 6,00 – 6,25 sudah terlampaui. Pertumbuhan ekonomi NTB dan Nasional (non tambang) tahun 2014 - 2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.198 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi NTB dan Nasional Tahun 2014 - 2017

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi NTB (Non Tambang)	Pertumbuhan Ekonomi Nasional
2014	6,15	5,01
2015	5,62	4,73
2016	5,71	5,02
2017	7,10	5,19

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2014 - 2017 selalu lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi makro di Provinsi NTB, yang menunjukkan setiap sektor lapangan usaha pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.199 PDRB dan Laju Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 dan 2017

No	Lapangan Usaha	PDRB (Milyar)		Laju Pertumbuhan
		2016	2017	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.587	20.880	6,60
2	Pertambangan dan Penggalian (bijih logam)	24.501	19.635	(19,86)
	Pertambangan dan Penggalian (tanpa bijih logam)	2.692	2.879	6,95
3	Industri Pengolahan	3.971	4.207	5,93
4	Pengadaan Listrik, Gas	75	78	4,29
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	69	72	4,61
6	Konstruksi	8.414	9.055	7,62
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.148	12.112	8,64
8	Transportasi dan Pergudangan	5.919	6.345	7,19
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.545	1.663	7,61
10	Informasi dan Komunikasi	1.986	2.158	8,66
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.796	3.075	9,98
12	Real Estate	2.502	2.678	7,05
13	Jasa Perusahaan	149	158	5,87
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.492	4.641	3,30
15	Jasa Pendidikan	3.813	4.062	6,54
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.705	1.826	7,07
17	Jasa Lainnya	1.865	2.002	7,35
PDRB		94.538	94.645	0,11
PDRB (tanpa bijih logam)		72.729	77.889	7,10

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2017

Hampir seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi tumbuh paling tinggi sebesar 9,98 persen diikuti secara berurutan oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi 8,66 persen, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mencapai laju pertumbuhan 8,64 persen.

Pembangunan Resort Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, beroperasinya pabrik gula di Dompu, pembangunan bendungan, pembangunan pelabuhan Gili Mas dan rencana beroperasinya pembangkit tenaga listrik, akan mendorong pertumbuhan ekonomi NTB di masa yang akan datang, dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Biro Perekonomian sudah melaksanakan program kegiatan penataan kebijakan perusahaan daerah dan BUMD, monitoring dan evaluasi Perusahaan Daerah (PD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi NTB berjumlah 12 perusahaan terdiri dari 8 PD. Bank Perkreditan Rakyat NTB dan 4 BUMD. Dari 8 PD. Bank Perkreditan Rakyat yang ada dilihat dari indikator CAMEL (*capital, aset, management, equity, liquiditas*), terdapat 7 PD. Bank Perkreditan Rakyat dikategorikan sehat dan 1 PD. Bank Perkreditan Rakyat dikategorikan kurang sehat (PD. BPR NTB Lombok Timur) disebabkan besarnya kredit macet. Keempat BUMD semuanya telah menyetorkan deviden, sebagai kontribusi PAD kepada Pemerintah Provinsi NTB. Daftar Perusahaan Daerah dan BUMD di Provinsi NTB disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.200 Perusahaan Daerah dan BUMD di Provinsi NTB Tahun 2017

NO	PERUSAHAAN DAERAH DAN BUMD	KATEGORI
1	PT. Bank NTB	Sehat
2	PT. GNE	Sehat
3	PT. DMB	Sehat
4	PT. Jamkrida NTB Bersaing	Sehat
5	PD. BPR NTB Kota Mataram	Sehat
6	PD. BPR NTB Lombok Barat	Sehat
7	PD. BPR NTB Lombok Tengah	Sehat
8	PD. BPR NTB Lombok Timur	Kurang Sehat
9	PD. BPR NTB Sumbawa Barat	Sehat
10	PD. BPR NTB Sumbawa	Sehat
11	PD. BPR NTB Dompu	Sehat
12	PD. BPR NTB Bima	Cukup Sehat

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, 2017

Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi NTB yang bersumber dari kontribusi deviden Perusahaan Daerah dan BUMD selama tiga tahun mengalami peningkatan yang signifikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.201 Deviden Dari Perusahaan Daerah dan BUMD Provinsi NTB Tahun 2015-2017

NO	PERUSAHAAN DAERAH DAN BUMD	DEVIDEN		
		2015	2016	2017
1	PT. Bank NTB	48.904.261.963	59.958.510.102	62.065.732.074
2	PD. BPR NTB	8.121.158.642	11.631.764.969	11.305.220.112
3	PT. Gerbang NTB Emas	750.000.000	1.000.000.000	745.473.000
4	PT. Asuransi Bangun Askrida	88.761.211	100.634.661	100.634.661
5	PT. Jamkrida NTB Bersaing	-	136.702.012	437.998.804
6.	PT. DMB	-	-	89.188.168.000
	Jumlah	57.864.181.816	72.827.611.744	163.843.226.651

Sumber: Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB, 2017

Memperhatikan kontribusi PAD yang bersumber dari deviden Perusahaan Daerah dan BUMD tahun 2015 sebesar Rp.57.864.181.816,- tahun 2016 sebesar Rp.72.827.611.744,- dan tahun 2017 meningkat menjadi Rp.163.843.226.651 atau meningkat sebesar Rp.91.015.614.907 atau 124,97 persen. Dari 6 Perusahaan Daerah dan BUMD yang memiliki peningkatan tertinggi selama tiga tahun adalah PT. Bank NTB.

f. Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pada tahun 2017 Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB telah melaksanakan program kegiatan, koordinasi, fasilitasi dan pembinaan kabupaten/kota se-NTB serta organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi. Unit Layanan Pengadaan Provinsi NTB yang berada di Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB telah melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup Provinsi NTB, baik yang bersumber dari dana APBD maupun dari dana APBN sejumlah 414 paket (15%) lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam program prioritas RPJMD, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.202 Realisasi Kegiatan Lelang ULP Provinsi NTB Tahun 2016 dan 2017
Sumber dana APBD Provinsi NTB

NO	KEGIATAN	2016		2017	
		JUMLH PAKET KEGIATAN	BESAR ANGGARAN (Rp)	JUMLH PAKET KEGIATAN	BESAR ANGGARAN (Rp)
1.	Jumlah Paket yang dilelang	294	723.926.308.778	353	865.179.550.716
	Terdiri dari :				
	a. Jasa Konsultansi	87	25.468.821.000	82	31.807.637.997
	b. Jasa Konstruksi	129	549.687.290.877	182	756.485.987.072
	c. Pengadaan Barang	64	66.701.213.265	85	74840.925.647
	d. Jasa Lainnya	14	19.141.337.700	4	2.045.000.000
2.	Jumlah Kontrak dari 353 paket lelang adalah sebesar	660.998.662.842		806.218.128.205	
3.	Efisiensi dari 353 paket kegiatan yang di lelang	62.927.645.936		58.961.422.511	
4.	Persentase Efisiensi terhadap total dana yang dilelang	8,69 %		6,81 %	

Sumber : Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan LPBJP Setda Provinsi NTB, 2017

Selain yang bersumber dari dana APBD, ULP Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP Setda Provinsi NTB juga melaksanakan pelelangan pengadaan barang/jasa yang bersumber dari dana APBN dengan realisasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.203 Realisasi Kegiatan Lelang ULP Provinsi NTB Tahun 2016 dan 2017
Sumber Dana APBN Provinsi NTB

NO	KEGIATAN	2016		2017	
		JUMLH PAKET KEGIATAN	BESAR ANGGARAN (Rp)	JUMLH PAKET KEGIATAN	BESAR ANGGARAN (Rp)
1.	Jumlah Paket yang dilelang Tahun	55	72.887.990.000	61	191.564.938.260
	Terdiri dari :				
	a. Jasa Konsultansi	7	3.645.498.000	0	0
	b. Jasa Konstruksi	17	24.895.175.000	1	3.451.364.000
	c. Pengadaan Barang	26	33.135.522.000	47	179.809.399.301
	d. Jasa Lainnya	5	2.705.789.000	13	8.304.174.959
2.	Jumlah Kontrak dari 61 paket lelang adalah sebesar	64.381.984.000		184.365.442.290	

NO	KEGIATAN	2016		2017	
		JUMLH PAKET KEGIATAN	BESAR ANGGARAN (Rp)	JUMLH PAKET KEGIATAN	BESAR ANGGARAN (Rp)
3.	Efisiensi dari 61 paket kegiatan yang di lelang		8.505.667.100		7.199.495.970
4.	Persentase Efisiensi terhadap total dana yang dilelang		11,67 %		3.76 %

Sumber : Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan LPBJP Setda Provinsi NTB, 2017

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang dan jasa perlu didukung sumberdaya manusia yang memadai, sehingga pada tahun 2017 Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) dan MCAI telah memfasilitasi aparatur yang berada di Unit Layanan Pengadaan untuk mengikuti bimbingan teknis sebanyak 18 orang, pendidikan dan pelatihan 10 orang dan sosialisasi aturan-aturan yang ada sebanyak 24 orang.

Kualifikasi tenaga pelaksana pada Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang memiliki sertifikat sebanyak 18 orang, dan telah menjadi fungsional pengelola barang dan jasa sebanyak 11 orang. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi NTB masuk dalam salah satu ULP percontohan di Indonesia.

g. Biro Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Peringatan hari besar Islam Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Tarawih, Idul fitri, idul adha, tahun baru hijriah, qurban.
2. Penyelenggaraan Pemberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) dan Pemulangan Jamaah Haji (JH) Jumlah Calon Jamaah Haji yang diberangkatkan dari Kabupaten/Kota se Provinsi NTB Tahun 2017 sebanyak 4.504 jamaah.
3. Peserta STQ provinsi sebanyak 32 orang telah melalui seleksi dan tersaring sebanyak 16 orang untuk selanjutnya dikirim ke tingkat nasional di Tarakan, Kalimantan Utara. Provinsi NTB mendapat peringkat 10 besar dari 34 provinsi.
4. Pemilihan sekolah sehat tingkat provinsi, terdiri dari TK/RA, SD/MI, SMP dan SMA. Dari 40 sekolah yang dinilai, terseleksi 12 sekolah yang dinilai paling sehat dan bersih.

h. Biro Humas dan Protokol

Biro Humas dan Protokol pada tahun 2017 telah melakukan 794 kali kerjasama publikasi melalui berbagai media massa cetak dan elektronik baik media lokal maupun media nasional untuk mempublikasikan hasil pembangunan dan kegiatan pimpinan. Dalam rangka memperkuat publikasi informasi, secara rutin mengirim rilis berita dan mengadakan jumpa pers, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui *website* Biro Humas dan protokol, *youtube* serta media sosial seperti *facebook*, *twitter*, dan *instagram*.

Pelibatan *Event* Biro Humas dan Protokol dalam *event* berskala nasional dan internasional khususnya dari pengaturan protokoler, poses pemberitaan, dan pendokumentasian diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.204 *Event* Nasional dan Internasional di NTB Tahun 2017

NO	EVENT	SKALA	WAKTU
1	Seminar Internasional Al-Daurah Al-Ilmiah Al-Dauliah	Internasional	Februari
2	Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-43 Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) yang dirangkaikan dengan Peringatan Hari Bhakti Rimbawan Tahun 2017	Nasional	Maret
3	Tour de Mandalika	Internasional	April
4	Musyawarah Nasional (Munas) I Himpunan Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri (HIMPUNI)	Nasional	April
5	Seminar nasional dari Nadhatul wathan untuk Indonesia	Nasional	April
6	Rinjani 100 (event Lomba lari)	Internasional	April
7	Djarum Sirkuit Nasional Li Ning NTB Open 2017	Nasional	Oktober
8	Konferensi Internasional Multaqa IV alumni Al Azhar Indonesia	Internasional	Oktober
9	Penyerahan Sertifikat Kawasan Ekonomi Khusus	Nasional	Oktober
10	Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU	Nasional	November
11	Seminar Internasional Pengembangan Ilmu Pakan dan Nutrisi Ternak/ <i>International Seminar of Animal Nutrition and Feed Sciences</i> (ISAINI) ke-5 tahun 2017	Internasional	November
12	Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia Ke 10 dengan tema "Peran Perpustakaan Digital Dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals 2030</i> "	Nasional	November
13	Bike Solo-Komodo (SIKOMO)	Internasional	November
14	Symposium Internasional AKECOP	Internasional	Desember
15	Lomba Desain Poster Maulana Syekh Meriahkan HUT NTB (pserta dari dalam dan luar negeri)	Internasional	Desember
16	Pengajian Milad Muhammadiyah ke-108 Masehi	Nasional	Desember

Sumber: Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB, 2017

i. Sekretariat DPRD

Capaian Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada tahun 2017, sebanyak 22 RAPERDA yang diusulkan diantaranya :

A. Raperda usul Prakarsa DPRD antara lain:

1. Raperda tentang mutu pelayanan kesehatan.
2. Raperda tentang Pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
3. Raperda tentang penyelenggaraan keolahragaan.
4. Raperda tentang Tuntutan ganti rugi (TGR).
5. Raperda tentang Ketahanan keluarga.

6. Raperda tentang pemberdayaan dan perlindungan petani.
 7. Raperda tentang tata cara penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
 8. Raperda tentang bantuan hukum.
 9. Raperda tentang sistem tata niaga ternak.
 10. Raperda tentang pemanfaatan jalan untuk kegiatan kemasyarakatan.
- B. Raperda usul Prakarsa Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat antara lain:
1. Raperda tentang pengelolaan DAS.
 2. Raperda tentang pengelolaan taman hutan raya (nuraksa).
 3. Raperda tentang kawasan strategis provinsi (KSP) Alas Utan.
 4. Raperda tentang retribusi perizinan tertentu.
 5. Raperda tentang kawasan strategis provinsi (KSP) senggigi tiga gili.
 6. Raperda tentang pengelolaan data dan informasi pembangunan.
 7. Raperda tentang pengelolaan barang milik daerah.
 8. Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 9. Raperda tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
 10. Raperda tentang perubahan atas perda nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 11. Raperda tentang perubahan atas perda nomor 4 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan.
 12. Raperda tentang penyertaan modal pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat pada PT. Bank Perkreditan Rakyat dan PT. Gerbang NTB Emas.

Hasil pembahasan antara Legislatif dan Eksekutif, 13 Raperda telah ditetapkan menjadi Perda dan 11 Raperda yang memerlukan pembahasan lanjutan di tahun 2018. 13 Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda, antara lain :

1. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2018.
2. Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan, Pengembangan Dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Kecil.
3. Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
4. Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Mutu Pelayanan Kesehatan.
5. Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
6. Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
7. Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB.
8. Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2016 Tentang APBD Tahun Anggaran 2017.
9. Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

10. Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perda No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
11. Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Perda Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi NTB Tahun 2017-2037.
13. Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang APBD Provinsi NTB TA. 2018.

Aspirasi masyarakat yang secara umum disampaikan dalam reses dari delapan daerah pemilihan, disimpulkan sebagai berikut :

a. Daerah pemilihan I (Dapil I) Kota Mataram

- 1) Pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan lingkungan, jalan usaha tani, jalan irigasi, drainase, saluran air bersih, talud, pembangunan gorong-gorong dan pembangunan ruang kelas baru untuk madrasah, sarana olah raga dan MCK.
- 2) Bantuan peralatan bagi ibu-ibu PKK berupa alat catering, alat pembuat jajan dan alat penggilingan daging, alat qosidah, bantuan kepada masyarakat berupa sound system, wireless, terop dan kursi dan bantuan berupa pakaian muslim untuk majelis taklim yang ada di Kota Mataram.
- 3) Bantuan dana untuk perbaikan masjid, perbaikan musholla, bantuan modal bagi pedagang bakulan, pedagang kaki lima, kelompok usaha bersama dan kelompok usaha produktif.
- 4) Bantuan bibit sapi, bibit kambing, bibit ayam dan bibit ikan.
- 5) Masalah sampah menjadi problem bagi masyarakat yaitu dengan kurangnya lahan pembuangan sampah sementara (TPS).
- 6) Bantuan kendaraan roda tiga untuk pembuangan sampah dan gerobak sampah.

b. Daerah pemilihan II (Dapil II) Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara) membutuhkan :

- 1) Pembangunan infrastruktur berupa jalan lingkungan, jalan usaha tani, saluran irigasi, drainase, pengaspalan jalan, talud, rabat jalan, pemasangan batu bronjong, pompa air, sumur dangkal, penimbunan dan pengerasan jalan.
- 2) Bantuan di bidang pendidikan berupa gedung sekolah untuk PAUD.
- 3) Bantuan dan renovasi tempat ibadah (masjid, musholla dan TPQ).
- 4) Bantuan bibit peternakan berupa bibit sapi, bibit ayam dan bibit kambing.
- 5) Bantuan dalam bidang pertanian berupa alat pertanian (*handtractor*) dan pengadaan sumur bor untuk pertanian.
- 6) Bantuan modal usaha bagi pedagang bakulan, pedagang kaki lima, pengrajin meubelair, pandai besi, pengrajin ketak, pengrajin bambu, pengrajin penjalin, kelompok usaha bersama, kelompok jahit, tata rias, tata boga dan kelompok usaha produktif.
- 7) Bantuan alat kesenian berupa rabana, gong, alat drumband, sound system, pakaian adat dan bantuan alat komunikasi orari (HT).
- 8) Bantuan gerobak, kendaraan roda tiga untuk angkut sampah, terop, kursi, kostum sepakbola, alat catering ibu-ibu pkk dan mesin jahit.
- 9) Bantuan peralatan perbengkelan.

- 10) Perhatian dan bantuan sosial bagi pesantren di NTB.
 - 11) Pelatihan pemuda untuk mengurangi pengangguran.
 - 12) Penyuluhan bagi perkawinan anak dan remaja putri.
 - 13) Bantuan paket sembako untuk anak yatim, lansia dan masyarakat kurang mampu.
 - 14) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian unggulan desa, sarana dan prasarana transportasi dan ekonomi unggulan, sarana dan prasarana pembinaan generasi muda kelompok sepakbola, volly dan lain-lain, sarana dan prasarana keagamaan
 - 15) Belum meratanya akses BPJS khususnya bagi kelompok miskin dan rentan seperti kelompok di pelosok, anak dan keluarga buruh migran dan disabilitas.
 - 16) Bantuan Al-Quran untuk majelis taklim.
 - 17) Perhatian pemerintah Provinsi NTB kepada rakyat yang membutuhkan sambungan listrik gratis dan listrik murah yang dibiayai dengan dukungan APBD Provinsi.
 - 18) Perhatian pemerintah terhadap pemberdayaan potensi SDM bagi para pemuda pemudi yang memiliki kemampuan atau keahlian.
 - 19) Bantuan Rumah Layak Huni.
- c. Daerah pemilahan III (Dapil III) Kabupaten Lombok Timur Bagian Utara membutuhkan :
- 1) Pembangunan infrastruktur berupa penataan jalan lingkungan, jalan usaha tani, perpipaan, jembatan, irigasi, beronjong, pengaspalan jalan, bak penampungan dan rabat jalan.
 - 2) Bantuan dana untuk perbaikan masjid, musholla, TPQ, TPA, pondok pesantren, tahfiz qur'an serta sarana dan prasarana seperti *sound system* dan lain-lain.
 - 3) Peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat dengan melakukan pelatihan-pelatihan sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memberdayakan desanya.
 - 4) Bantuan bidang pendidikan dengan menggratiskan SPP SMA sederajat dan beasiswa serta peningkatan kesejahteraan untuk guru honorer di sekolah negeri maupun swasta.
 - 5) Bantuan bidang kesehatan berupa Kartu BPJS bagi masyarakat kurang mampu.
 - 6) Bantuan *handtractor*, mesin panen, alat elektronik, alat mesin pertanian, perlengkapan alat olahraga, lapangan sepak bola, futsal dan alat-alat pendakian gunung.
 - 7) Bantuan pertanian, peternakan, perikanan dan nelayan kepada kelompok usaha kecil.
 - 8) Bantuan terop, kursi, tikar untuk kegiatan sosial masyarakat.
 - 9) Bantuan dana untuk rehab rumah tidak layak huni.
 - 10) Bantuan modal usaha untuk kelompok masyarakat/pemuda serta kelompok usaha ekonomi yang produktif.

IV. Daerah pemilahan IV (Dapil IV) Kabupaten Lombok Timur Bagian Selatan membutuhkan :

1. Pembangunan infrastruktur berupa penataan jalan lingkungan, pemasangan *paving block*/perabatan jalan lingkungan, saluran irigasi melalui pemasangan pipa untuk pengadaan air bersih, pembuatan sumur bor dan pembangunan embung baru.
2. Bantuan dana untuk perbaikan masjid dan musholla serta sarana dan prasarana TPQ dan lain-lain.
3. Peningkatan fungsi pengairan bidang pertanian untuk memanfaatkan sumber air yang berasal dari Bendungan Pandan Duri.
4. Bantuan bidang perikanan berupa pengadaan mesin ketinting dan jaring.
5. Bantuan bidang pendidikan bagi mahasiswa/mahasiswi yang kurang mampu serta peningkatan kualitas SDM.
6. Bantuan dana untuk usaha pedagang kaki lima, pedagang bakulan, masyarakat kurang mampu, anak yatim dan orang tua jompo.
7. Pembangunan fasilitas umum seperti tempat pemakaman umum.
8. Peningkatan fasilitas di bidang kesehatan.
9. Bantuan di bidang pertanian berupa pengadaan mesin perontok padi dan di bidang peternakan berupa bibit sapi, bibit kambing dan bibit ayam.
10. Pemerataan bantuan baik bantuan modal, bantuan peralatan, dan pembinaan terhadap kelompok tani, kelompok ternak, kelompok usaha bersama, pengusaha mikro kecil menengah dan koperasi.
11. Bantuan bidang pertanian berupa bantuan peralatan pertanian dan di bidang peternakan berupa bibit sapi, bibit kambing dan bibit ayam.

V. Daerah pemilahan V (Dapil V) Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat membutuhkan :

1. Pembangunan infrastruktur khususnya daerah kena banjir berupa peninggian drainase, talud, penataan bantahan kali untuk mengganti rumah warga yang hanyut dan penguatan tebing sungai.
2. Pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan lingkungan, jalan usaha tani, pengaspalan jalan, drainase pinggir jalan negara, pemasangan *paving block*, pembangunan tempat pembuangan akhir sampah, pembukaan jalan usaha tani, pembuatan jalan dan jembatan pada wilayah objek wisata dan pembangunan cek dam/embung/irigasi untuk kesulitan air bersih.
3. Pembangunan dan rehab masjid serta pengembangan sarana penunjang TPQ.
4. Bantuan dana untuk pedagang bakulan, pedagang kaki lima, pengrajin kelompok tenun, kelompok usaha bersama dan bantuan dana untuk posyandu.
5. Bantuan alat produksi pertanian, peternakan, perbengkelan dan pertukangan.
6. Bantuan pengadaan alat katering, alat pembuatan kue, bantuan sembako, pengadaan kostum olahraga, alat peraga untuk PAUD, alat

- qasidah rabana, alat pembuat kripik, bantuan terop, kursi dan pengadaan *sound system portabel*.
7. Bantuan mesin pompa air, *handtractor*, alat semprot hama, mesin ketinting, mesin penggilingan padi, mesin pengering gabah, alat penyemprotan tanaman, mesin bor, mesin genset dan mesin pompa air.
 8. Bantuan di bidang perikanan berupa kontainer dan pembuatan dermaga untuk para nelayan.
 9. Bantuan untuk bidang pendidikan berupa pengadaan tanah untuk TK PGRI, pembangunan dan rehab sekolah-sekolah. Peningkatan kesejahteraan guru tidak tetap, peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan perlengkapan sekolah.
 10. Pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan kerja bagi pemuda dan remaja untuk mengurangi pengangguran.
- VI. Daerah pemilihan VI (Dapil VI) Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu membutuhkan :
1. Pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan Provinsi, perbaikan jalan lingkungan, jalan usaha tani, rabat gang, saluran air bersih, pengerasan jalan, pengaspalan jalan, perbaikan jembatan, drainase, pembangunan TK, pembangunan PAUD, pemagaran pemakaman umum, pemasangan bronjong, bantuan pembuatan sumur bor.
 2. Bantuan di bidang perikanan dalam hal pengadaan genset untuk nelayan, *freezer*, pukot, *cool box*, mesin ketinting.
 3. Perlunya bantuan alat kesenian berupa *wireless*, *sound system*, rabana qasidah dan alat musik marawis.
 4. Bantuan alat kesehatan berupa kendaraan ambulance dan tenaga medis.
 5. Bantuan sarana dan prasarana olah raga berupa pembuatan lapangan olahraga, pengadaan fasilitas olahraga.
 6. Bantuan bibit peternakan berupa bibit sapi, bibit kambing dan bibit ayam.
 7. Bantuan di bidang pertanian berupa pengadaan sumur bor untuk pertanian, pengadaan hand traktor, mesin pertanian, *hand sprayer*, pompa air, mesin perontok padi, bantuan alat pemipil jagung, pengadaan bibit pertanian yaitu bibit bawang, bibit jagung dan bibit padi serta mengatasi kelangkaan pupuk
 8. Bantuan di bidang perindustrian, perdagangan dan perbengkelan berupa pengadaan mesin jahit, usaha perbengkelan, roda tiga dan alat-alat pertukangan.
 9. Bantuan dana untuk kelompok usaha bersama, usaha produktif, pedagang kaki lima, pedagang bakulan, lansia dan kelompok usaha mandiri.
 10. Bantuan kursus untuk pemuda dan masyarakat untuk mengurangi pengangguran.
 11. Bantuan fasilitas umum untuk masyarakat berupa pengadaan terop, toilet untuk masyarakat tidak mampu, penembokan pagar tempat pemakaman umum.
 12. Pembangunan dan rehab masjid serta TPQ.

VII. Daerah pemilahan VII (Dapil VII) Kabupaten Lombok Tengah Bagian Utara membutuhkan :

1. Pembangunan infrastruktur berupa perbaikan jalan lingkungan, saluran irigasi, jalan usaha tani, pembuatan dam, rehabilitasi dan embung rakyat, penataan jalan lingkungan, untuk menadah air guna mengairi lahan pertanian, rabat jalan dan pembersihan lingkungan berupa saluran pembuangan air limbah (SPAL)
2. Pengembangan usaha kecil menengah ke bawah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat secara merata.
3. Pelatihan dan bantuan peralatan bagi remaja seperti mesin percetakan, mesin press batako, mesin jahit, terop dan lain-lain.
4. Perlunya bantuan alat teknologi pertanian yang memadai untuk meningkatkan hasil pertanian berupa *hand tractor*, *hand sprayer*, mesin pompa air, mesin tanam padi, dan mesin panen padi.
5. Peningkatan sarana dan prasarana bagi yayasan pendidikan sebagai penunjang proses kegiatan belajar mengajar berupa pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan peralatan komputer, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan efektif, efisien, dan berbasis komputer sesuai yang diharapkan.
6. Pembinaan mental spritual serta kewirausahaan bagi pemuda di beberapa desa dan kelurahan untuk menghindari pemuda dari pergaulan negatif, miras dan narkoba.
7. Bantuan modal usaha untuk pedagang kaki lima, pedagang bakulan, UMKM, kelompok usaha produktif, kelompok usaha bersama dan kelompok usaha tani.
8. Pembangunan dan rehab masjid serta TPQ serta sarana dan prasarana penunjang TPQ (*mukena*, *sound system* dan lain-lain).
9. Bantuan dalam bidang perkebunan berupa bibit buah-buahan seperti jeruk, manggis dan kelengkeng.
10. promosi potensi pariwisata baik dalam maupun luar negeri.
11. Pembangunan instalasi air bersih (PDAM) dan sumur bor atau air bawah tanah untuk mengatasi persoalan kekurangan air bersih.
12. Bantuan dalam bidang kesehatan berupa peningkatan pelayanan kesehatan.

VIII. Daerah pemilahan VIII (Dapil VIII) Kabupaten Lombok Tengah Bagian Selatan membutuhkan :

1. Pembangunan infrastruktur berupa penataan jalan lingkungan, jalan usaha tani, pembuatan jembatan, perbaikan saluran irigasi, pembangunan bendungan, pengecekan dam, pembuatan sumur bor, pembuatan saluran air bersih, pengerasan jalan, pipanisasi, pembuatan talud, bantuan rehab rumah tidak layak huni di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat.
2. Bantuan dibidang peternakan berupa kerbau
3. Bantuan pengembangan tenun ikat.
4. Bantuan sumur bor untuk mencukupi kebutuhan air bersih

5. Bantuan ekonomi, modal dan alat kelompok tani
6. Bantuan modal dan pemasaran kepada kelompok pengembangan jagung, palawija dan kacang-kacangan.
7. Bantuan dana untuk pengelolaan masjid dan mushalla serta fasilitas penunjang lainnya
8. Pembangunan dan penataan lingkungan tempat pemakaman umum.

j. Badan Penghubung Daerah

Tahun 2017 Pemerintah Provinsi NTB melakukan dialog atau audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan sebanyak 3 kali yaitu dengan paguyuban masyarakat Sasak, paguyuban masyarakat Dompu dan paguyuban masyarakat Bima yang ada di Jakarta dan sekitarnya.

Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB selain melaksanakan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, juga melaksanakan koordinasi pemasaran pariwisata. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain, promosi budaya dan promosi potensi daerah NTB yang rutin diselenggarakan di provinsi lain dan di dalam Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Tahun 2017 telah dilaksanakan promosi pariwisata berskala internasional yang biasa disebut "paket khusus" dengan mengundang seluruh duta besar negara sahabat yang dihadiri lebih dari 300 undangan.

Kegiatan promosi skala nasional yang dilaksanakan tahun 2017 sebanyak 22 event melebihi target yang telah ditentukan. Adapun promosi yang terselenggara selama tahun 2017 adalah :

1. Pentas Seni Budaya NTB, dalam rangka menyambut tahun baru menampilkan pawai gendang beleq, pada tanggal 8 Januari 2017 di TMII.
2. Gelar Seni Budaya Lombok Sumbawa menampilkan atraksi tari dan musik gendang beleq, tari oncer, tari siyer male, tari nguri, tari wura bongi monca dan tari gandrung, pada tanggal 22 Januari 2017 di TMII.
3. Pentas Seni Budaya NTB, dalam rangka acara reuni/silaturahmi menampilkan atraksi tari dan musik gendang beleq, tanggal 18 Februari 2017 di Bogor.
4. Pentas Seni Budaya NTB, dalam rangka KONFERCAB ke II HIMMAH NW Jakarta, tanggal 24-26 Februari 2017 di TMII.
5. Gelar Seni Budaya dan Pertunjukan Permainan Tradisional Presean suku Sasak Lombok tanggal 12 Maret 2017 di TMII.
6. Pentas Seni Budaya NTB, dalam rangka Hari Film Nasional, menampilkan atraksi tari dan musik gendang beleq, tanggal 30 Maret 2017 di Gedung Film Jakarta.
7. Dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Pandeglang, pentas menampilkan pawai pakaian pengantin adat Lombok dan atraksi tari dan musik gendang beleq, tanggal 1 April 2017 di Pandeglang, Banten.
8. Dalam rangka HUT Taman Mini Indonesia Indah Ke-42 tahun, pentas pawai budaya nusantara Anjungan Nusa Tenggara Barat menampilkan pawai budaya nyongkolan dan atraksi musik tradisional gendang beleq, tanggal 16 April 2017 di TMII.

9. Gelar Citra Budaya Tradisi dalam rangka HUT TMII Ke-42 dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Mataran Menampilkan 7 tarian dari daerah Lombok-Sumbawa NTB. Tari atraksi musik tradisional gendang beleq, tari oncer, tari gandrung dan tari nguri, tanggal 19 April 2017 di TMII.
10. Dalam rangka HUT TMII Ke-42 Anjungan NTB mengikuti pameran produk unggulan expo dari daerah Kabupaten Sumbawa Barat, menerima Piagam Penghargaan "Kesan Pengunjung Terbaik" dari Direktur Utama TMII tanggal 23 April 2017 di TMII.
11. Dalam rangka HUT TMII Ke-42 mengikuti pameran produk unggulan. pameran kuliner masakan khas daerah Lombok Nusa Tenggara Barat. ayam taliwang, plecing kangkung, sayur ares, sate pusut, bebalung, dll. menerima piagam penghargaan "Penyaji Unggulan Cita Rasa Boga Pesona Indonesia Timur" dari Direktur Utama TMII tanggal 23 April 2017 di TMII.
12. Gelar Seni Budaya Sasambo, diklat kesenian sanggar bumi gora Anjungan NTB Bersama Kesatuan Mahasiswa Bima Jakarta. Menampilkan tari-tarian dan drama tari "Lao Ngupa Ilmu" tanggal 29 April 2017 di TMII.
13. Haflah Tasyakur Milad ke-IV Pondok Pesantren Moderen Nurul Haramain Nahdlatul Wathan, diklat kesenian sanggar bumi gora Anjungan Nusa Tenggara Barat menampilkan pawai atraksi dan tari tradisional gendang beleq tanggal 7 Mei 2017 di Cigombang, Jawa Barat.
14. Gelar Seni Budaya Borobudur Internasional Festival 2017 menampilkan tari gendang beleq mira wibawa, tari rasate tanjung menangis, dan tari gandrung, tanggal 28 Juli 2017 di Borobudur, Jawa Tengah.
15. Pentas Seni Budaya memeriahkan HUT RI ke-72 mementaskan tari dan musik gendang beleq, serta permainan rakyat lombok presean dan pawai karnaval, tanggal 19 Agustus 2017 di Balai Komando Kopasus Cijantung.
16. Parade ASEAN 50 menampilkan pakaian pengantin adat suku sasak, samawa, mbojo (SASAMBO) diiringi atraksi tari dan musik gendang beleq, tanggal 27 Agustus 2017 di *Car Free Day* Jakarta.
17. Menyambut Tahun Baru 1 Suro 1951/1 Muharam 1439 H Tahun Baru Islam, manajemen Taman Mini "Indonesi Indah" menyelenggarakan kenduri agung dan kirab agung. Anjungan Nusa Tenggara Barat mengirimkan tumpeng serta tim kesenian menampilkan pakaian adat dan musik tradisional dari daerah Bima, tanggal 20 September 2017 di TMII.
18. Pawai budaya memperingati Hari Kesaktian Pancasila, hari minggu 01 Oktober 2017. Tim kesenian Anjungan Nusa Tenggara Barat melaksanakan pawai budaya atraksi tari dan musik tradisional gendang beleq, tanggal 1 Agustus 2017 di TMII.
19. Pawai Budaya Karnaval Gendang Melayu, tim kesenian Anjungan Nusa Tenggara Barat menampilkan atraksi tari gendang beleq dan pentas tari rasate tanjung menangis, tanggal 20 Oktober 2017 di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.
20. Mozaik Budaya Nusantara, tim kesenian Anjungan Nusa Tenggara Barat menampilkan tari wira wibawa, tari persembahan dari Sumbawa dan drama

tari Putri Mandalika atau Legenda Bau Nyale, tanggal 18 November 2017 di TMII.

21. HUT Provinsi Nusa Tenggara Barat ke-59, Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB menyelenggarakan paket acara khusus sendra tari drama cerita Putri Mandalika atau Legenda Bau Nyale, tanggal 9 Desember 2017 di TMII.
22. HUT NW, tim kesenian Anjungan Nusa Tenggara Barat menampilkan pawai atraksi music tradisional gendang beleq untuk menyambut para tamu, tanggal 10 Desember 2017 di Cakung, Jakarta Timur:

2. PENGAWASAN

Hasil audit terhadap penyelenggaraan keuangan negara/daerah yang telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 dapat dilihat dari laporan hasil pemeriksaan, dimana total kerugian negara/daerah sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.147.332.788.020,26 dan yang sudah dikembalikan ke kas negara/daerah sebesar Rp.109.977.877.681,78 termasuk didalamnya yang ditindaklanjuti pada tahun 2017 sebesar Rp.6.531.595.525,17. Adapun sisa total kerugian negara/daerah yang belum dikembalikan dan perlu ditindaklanjuti sebesar Rp.37.334.910.338,48.

Total sisa kerugian negara/daerah yang belum ditindaklanjuti terlebih dahulu akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat melalui kegiatan operasi tindak lanjut dan apabila tidak dapat ditindaklanjuti maka akan dilimpahkan ke Majelis Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Provinsi NTB. Hasil sidang majelis akan menerbitkan surat kuasa khusus (SKK) bagi entitas yang sudah ditetapkan oleh Majelis TP-TGR untuk diserahkan ke Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Untuk meminimalkan timbulnya kerugian negara/daerah, Pemerintah Provinsi NTB membentuk Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) bekerjasama dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk mengawal program/kegiatan (proyek) perangkat daerah yang bersumber dari dana pusat maupun dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Disamping itu, Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2017 telah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sistem tata kelola (*Governance*), manajemen resiko dan pengendalian internal pada perangkat daerah sehingga maturitas sistem pengendalian Pemerintah Daerah peringkatnya naik dari yang sebelumnya Level II menjadi level III, yang artinya praktik pengendalian dilingkungan APIP dan Pemerintah Daerah telah terdokumentasi dengan baik dengan sistem evaluasi yang perlu didokumentasikan secara memadai. Kondisi inilah yang berkontribusi dalam pencapaian Opini WTP 6 kali berturut-turut.

Pada sisi lain untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Provinsi NTB telah melakukan penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melalui *Internal Auditor Capability Model/IACM-APIP* sehingga kapabilitas APIP Inspektorat yang sebelumnya Level II menjadi Level III, yang artinya Inspektorat dipandang telah mampu menilai efektivitas, efisiensi dan ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan

konsultasi pada sistem tata kelola (*Governance*), Manajemen Resiko dan Pengendalian Internal pada entitas.

3. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Perencanaan, Bappeda telah melakukan revisi RPJMD 2013 – 2018 sesuai dengan regulasi pemerintah pusat dan hasil evaluasi selama 3 tahun. Revisi RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2018 dilakukan atas pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 3) Penyesuaian arah kebijakan dan strategi serta program prioritas pembangunan untuk mendorong percepatan pencapaian Indikator RPJMD;
- 4) Penyesuaian Nomenklatur dan target indikator kinerja program prioritas dan Indikator Kinerja Daerah;
- 5) Penyesuaian sasaran pembangunan mengacu pada hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
- 6) Penyesuaian sasaran pembangunan mengacu pada hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
- 7) penyesuaian/pemutakhiran data dan informasi, penyesuaian kerangka pendanaan, penyelarasan dengan Prioritas Pembangunan Nasional, meliputi: Menambahkan isu strategis nasional terkait Isu SGD's dan Isu Nawacita.

Sebagai perangkat daerah dengan fungsi koordinasi bidang perencanaan, Bappeda bertanggungjawab atas indikator kinerja keselarasan program RKPD terhadap RPJMD. Capaian tahun 2017 adalah 99,03 persen, artinya bahwa telah melampaui dari target 95 persen. Penerapan sistem informasi perencanaan (*e-planning/entebePLAN*) yang dibangun merupakan upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka konsolidasi perencanaan serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan. Aplikasi tersebut terdiri dari 7 aplikasi yaitu : e-RPJMD, e-Renja, e-RKPD, e-Musrenbang, e-KUA PPAS, e-Pokir, dan e-ASB.

Tahun 2017, Bappeda Provinsi NTB telah terpilih sebagai SKPD terbaik I berdasarkan penilaian Tim Komisi Informasi Provinsi NTB. Perhargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi NTB atas keterbukaan informasi. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan data dan informasi, khususnya pemanfaatan data spasial dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah yang terukur dan berkelanjutan, Bappeda telah mengembangkan inovasi NTB SATU PETA berbasis informasi geospasial tematik dan dapat diakses melalui website <http://geospasial.bappeda.ntbprov.go.id>. Inovasi tersebut menghantarkan Provinsi NTB sebagai provinsi yang dinilai mampu melaksanakan perencanaan tata guna lahan partisipatif.

Untuk meningkatkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah telah dilakukan kegiatan : (1) Forum SKPD yang bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan SKPD lingkup Provinsi NTB, (2) Sarasehan Pembangunan yang melibatkan seluruh stakeholder yaitu unsur SKPD lingkup Pemerintah Provinsi NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, mitra pembangunan Provinsi NTB (LSM), pihak swasta dan lainnya. (3) Musrenbang RKPD Provinsi NTB Tahun 2017 adalah momen yang dipergunakan untuk menselaraskan program/kegiatan provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka pencapaian target prioritas daerah dan indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2013-2018.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam hal akuntabilitas kinerja, serta mendukung pencapaian indikator kinerja RPJMD (dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban yang berprestasi), Bappeda berupaya untuk menyamakan pemahaman dengan Biro Organisasi dan Inspektorat terkait SAKIP untuk menyelenggarakan bimbingan teknis penyelenggaraan SAKIP di Provinsi NTB, melibatkan SKPD lingkup Pemerintah Provinsi, dengan narasumber dari Kota Bandung yang telah mampu mencapai nilai SAKIP A berdasarkan penilaian dari Kementerian PAN RB. Dalam kegiatan ini sekaligus di-*launching* aplikasi e-SAKIP.

Beberapa permasalahan yang dihadapi, terkait Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah, sebagaimana tabel berikut.

4. KEUANGAN

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Keuangan diselenggarakan oleh 2 Perangkat Daerah, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA). Adapun capaian dari penyelenggaraan urusan dari kedua Perangkat Daerah tersebut, dapat dirincikan sebagai berikut :

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB bertujuan untuk mewujudkan tatakelola keuangan dan barang milik daerah dengan baik, benar dan lebih tertib. Secara menyeluruh perkembangan anggaran Belanja Daerah dalam APBD selaku SKPD dan SKPKD tahun 2016 dan tahun 2017, menunjukkan penurunan sebesar 5,53 persen sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.205 Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Dalam APBD BPKAD Provinsi NTB selaku SKPKD Tahun 2016-2017

URAIAN	2016	2017	PERSENTASE BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Tidak Langsung	1.461.006.946.742,70	1.380.184.673.734,04	(5,53)

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2017

Tabel 2.206 Perkembangan Belanja Daerah Dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2016-2017

URAIAN	2016	2017	PERSENTASE BERTAMBAH / (BERKURANG)
Belanja Tidak Langsung	2.126.854.299.608,21	2.757.512.955.077,84	29,65
Belanja Langsung	1.826.479.692.583,53	2.788.893.149.537,92	52,69
Jumlah	3.953.333.992.191,75	5.546.406.104.615,76	40,30

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2017

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) meningkat dari tahun 2016 ke tahun 2017 mencapai 40,30 persen. Dalam rangka mendukung kegiatan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, APBD tahun 2017 yang terakomodir dalam belanja langsung sebesar Rp.2.788.893.149.532,92 meningkat 52,69 persen dari tahun 2016. Penetapan APBD Provinsi NTB 5 tahun terakhir, disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.207 Penetapan APBD Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018

Tahun Anggaran	Kesepakatan KUA	Persetujuan Bersama Gubernur dengan DPRD	Evaluasi Mendagri	P e n e t a p a n		Ket
				Peraturan Daerah dan Lembaran Daerah	Peraturan Gubernur dan Berita Daerah	
MURNI						
2016	04-11-2015	30-11-2015	No. 903-6194 Tahun 2015 18-12-2015	Nomor 11 Tahun 2015 28-12-2015	Nomor 50 Tahun 2015 29-12-2015	Tepat waktu
2017	11-11-2016	30-11-2016	No.903-10295 Tahun 2016 16-12-2016	Nomor 12 Tahun 2016 21-12-2016	Nomor 47 Tahun 2016 22-12-2016	Tepat waktu
2018	21-11-2017	30-11-2017	No. 903-9031 Tahun 2017 22-12-2017	Nomor 13 Tahun 2017 29-12-2017	Nomor 67 Tahun 2017 29-12-2017	Tepat waktu
PERUBAHAN						
2016	09-09-2016	30-09-2016	No. 903-9936 Tahun 2016 18-10-2016	Nomor 7 Tahun 2016 19-10-2016	Nomor 32 Tahun 2016 20-10-2016	Terlambat
2017	20-07-2017	11-08-2017	No. 903-7656 Tahun 2017 31-08-2017	Nomor 8 Tahun 2017 07-09-2017	Nomor 29 Tahun 2017 07-09-2017	Tepat waktu

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2017

Sedangkan untuk APBD Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.208 Penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2016 - 2018

NO	KABUPATEN/KOTA	JADWAL PENETAPAN APBD		
		2016	2017	2018
1	KOTA MATARAM	29-Dec-2015	30-Dec-2016	28-Dec-2017
2	LOMBOK BARAT	17-Dec-2015	28-Dec-2016	27-Dec-2017
3	LOMBOK TENGAH	31-Dec-2015	29-Dec-2016	20-Dec-2107

4	LOMBOK TIMUR	30-Dec-2015	28-Dec-2016	18-Dec-2017
5	LOMBOK UTARA	30-Dec-2015	29-Dec-2016	27-Dec-2017
6	SUMBAWA BARAT	29-Dec-2015	15-Dec-2016	18-Dec-2017
7	SUMBAWA	28-Dec-2015	30-Dec-2016	7-Dec-2017
8	DOMPU	31-Dec-2015	17-Jan-2016	29-Dec-2017
9	BIMA	28-Dec-2015	30-Dec-2016	28-Dec-2017
10	KOTA BIMA	8-Dec-2015	16-Dec-2016	20-Dec-2017

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2017

Terkait Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk tahun pelaporan 2017 dengan LKPD Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Provinsi NTB telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berikut Opini BPK RI tahun 2016 - 2017.

Tabel 2.209 Opini BK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 - 2017

TAHUN PELAPORAN	OPINI
2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2017

Sedangkan untuk Kab./Kota pada tahun pelaporan 2017 seluruh Kab./Kota se NTB telah mencapai opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kondisi ini menunjukkan peningkatan pada tahun sebelumnya dimana ada 1 Kab./Kota yang masih berada di bawah opini WTP.

Tabel 2.210 Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten/Kota TA. 2013-2016

NO	KAB./KOTA	OPINI LKPD			
		2013	2014	2015	2016
1.	Kota Mataram	WDP	WTP	WTP	WTP
2.	Kab. Lombok Barat	WDP	WTP	WTP	WTP
3.	Kab. Lombok Tengah	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	Kab. Lombok Timur	WDP	WDP	WDP	WTP
5.	Kab. Lombok Utara	WDP	WTP	WTP	WTP
6.	Kab. Sumbawa Barat	WDP	WTP	WTP	WTP
7.	Kab. Sumbawa	WTP	WTP	WTP	WTP
8.	Kab. Dompu	WDP	WTP	WTP	WTP
9.	Kab. Bima	WDP	WDP	WTP	WTP
10.	Kota Bima	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2017

▪ Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah perencanaan kebutuhan barang milik daerah meliputi:

- 1) Perencanaan pengadaan barang milik daerah;
- 2) Perencanaan pemeliharaan barang milik daerah;
- 3) Perencanaan pemanfaatan barang milik daerah;

- 4) Perencanaan pemindahtanganan barang milik daerah; dan
- 5) Perencanaan penghapusan barang milik daerah.

Untuk itu dokumen RKBMD merupakan indikator pengelolaan BMD yang tertib dari sisi perencanaan. BPKAD Provinsi NTB telah menyusun RKBMD Pengadaan dan RKBMD Pemeliharaan yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi NTB Nomor 900/37.a/SK/BPKAD/2017 tentang Penetapan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah Pada Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 5 April 2017.

Terkait dengan proses pengalihan Personel, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumen (P3D) kabupaten/kota secara urusan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seluruh kabupaten/kota telah menyerahkan aset yang melekat pada kewenangan yang dialihkan tersebut. Adapun data rekapitulasi penyerahan P3D dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.211 Rekapitulasi Penyerahan Aset P3D Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat

No	Kabupaten/Kota	Nomor BAST	Urusan/Bidang	Nilai Aset Yang Diserahkan
1	Lombok Barat	900/2329.a/BPKAD/2017	Pendidikan	139.342.377.068,38
			Kehutanan	592.276.700,00
			Pertambangan	1.492.153.000,00
		Jumlah		141.426.806.768,38
2	Lombok Tengah	029/1062/BPKAD/2017	Pendidikan	67.492.660.271,01
		Jumlah		67.492.660.271,01
3	Lombok Timur	030/782/PAKAD/2017	Pendidikan	111.985.135.790,02
		Jumlah		111.985.135.790,02
4	Lombok Utara	900/1299.a/BPKAD/2017	Pendidikan	64.889.272.993,22
			Kehutanan	579.451.167,00
			Terminal	2.814.304.984,00
		Jumlah		68.283.029.144,22
5	Sumbawa Barat	965/85/Aset/2017	Pendidikan	34.058.159.685,74
			Kehutanan	1.488.799.500,00
			Terminal	14.483.706.693,00
		Jumlah		50.030.665.878,74
6	Sumbawa	031/256/Aset/2016	Pendidikan	106.353.022.272,97
			Kehutanan	11.572.436.011,00
		Jumlah		117.925.458.283,97
7	Dompu	900/BAST/559.b/BPKAD.Aset/2017	Pendidikan	51.071.193.180,00
			Kehutanan	3.357.481.250,00
			Terminal	401.062.565,00
		Jumlah		54.829.736.995,00
8	Kota Bima	031/223.a/BAST/V/2017	Pendidikan	69.900.951.278,93
		Jumlah		69.900.951.278,93
9	Kab. Bima	029/088/07.3/BPKAD/2017	Pendidikan	119.237.922.300,72
		Jumlah		119.237.922.300,72
		Jumlah Keseluruhan		801.112.366.710,99

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2017

Penyerahan aset Kota Mataram tidak dicantumkan pada tabel di atas karena telah melakukan serah terima dan validasi aset pada tahun 2016. Aset tersebut dalam kategori urusan pendidikan dengan nilai Rp.162.994.882.484,- sehingga total nilai penyerahan aset dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp.964.107.249.194,99,-.

Terkait aset Pemerintah Provinsi NTB yang berada di areal Lombok International Airport (LIA), Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan penilaian

dengan melibatkan Kantor Jasa Penilaian Publik untuk kepentingan perhitungan besaran kontribusi tetap atas aset Pemerintah Provinsi NTB yang berada di areal Lombok International Airport (LIA) tersebut. Hasil penilaian tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 032-1106 Tahun 2016 tentang Hasil Penilaian Bangunan Sisi Fisik Bandar Udara Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Berada di Areal Lombok Internasional Airport tanggal 27 Desember 2016. Dalam keputusan tersebut ditetapkan nilai sewa tahun 2012 s/d 2015 sebesar Rp.35.396.100.000,- dan tahun 2016 sebesar Rp.6.117.000.000,- sehingga total nilai sewa menjadi Rp.41.513.100.000,-. Sisi lain PT. Angkasa Pura I sedang melakukan penilaian untuk tujuan yang sama dan setelah proses itu selesai, pihak Pemerintah Provinsi NTB dan PT. Angkasa Pura I akan melakukan koordinasi secara kontinyu untuk penyelesaian pembayaran kontribusi tersebut. Dalam keputusan tersebut juga ditetapkan nilai wajar untuk penjualan sebesar Rp.106.673.035.000,-. Pendapatan atas nilai penjualan (divestasi) tersebut terealisasi pada tanggal 15 Desember 2017 sebesar Rp.106.673.035.000,-.

Terkait pemindahtanganan BMD, BPKAD Provinsi NTB selaku PPBMD telah melakukan penilaian dengan membentuk tim penilai dari Kanwil DJKN, dengan hasil penilaian tersebut menjadi dasar dalam proses lelang BMD tahun 2017. Penilaian terkait pemindahtanganan BMD yang telah dilakukan terdiri dari:

- 1) Penilaian BMD Pemerintah Provinsi NTB tahap I sejumlah 181 unit kendaraan bermotor yang terdiri dari 177 unit kendaraan roda dua dan 4 unit kendaraan roda empat yang dilakukan oleh tim penilai dari Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara;
- 2) Penilaian BMD Pemerintah Provinsi NTB tahap II sejumlah 66 objek penilaian yang terdiri dari 63 unit kendaraan roda dua, 2 unit kendaraan roda empat dan 1 paket besi tua yang dilakukan oleh tim penilai dari Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara.

Terkait penghapusan BMD, Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan 14 SK penghapusan. Data usulan dan penghapusan yang telah dilaksanakan oleh BPKAD pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.212 Data Usulan dan Penghapusan yang Telah Dilaksanakan oleh BPKAD
Pada Tahun 2017

NO	OPD	Uraian	Volume		Nilai	
			Usulan	Realisasi	Usulan	Realisasi
1	Dinas Perdagangan	Randis Roda 4	4	3	73.600.000,00	34.600.000,00
		Randis Roda 2	5	4	20.620.900,00	16.810.900,00
2	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	Randis Roda 2	7	7	48.717.600,00	48.717.600,00
3	Biro Umum	Randis Roda 4	3	3	267.065.000,00	267.065.000,00
4	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	Randis Roda 4	2	2	75.750.000,00	151.500.000,00
		Randis Roda 2	1	1	14.475.000,00	14.475.000,00
5	Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil	Randis Roda 2	5	-	20.600.000,00	-
		Randis Roda 4	10	2	713.000.000,00	167.000.000,00

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

NO	OPD	Uraian	Volume		Nilai	
			Usulan	Realisasi	Usulan	Realisasi
6	Dinas Pertambangan dan Energi	Randis Roda 2	1	1	3.000.000,00	3.000.000,00
		Randis Roda 4	3	2	88.002.600,00	63.896.200,00
7	Panti Sosial Bina Remaja "Karya Putra" Mataram	Mini Bus	1	1	45.000.000,00	45.000.000,00
8	Dinas Pariwisata	Randis Roda 4	2	2	56.950.000,00	56.950.000,00
		Randis Roda 2	2	2	10.350.000,00	10.350.000,00
9	Dinas Kehutanan	Randis Roda 4	5	3	200.557.000,00	120.067.000,00
		Randis Roda 2	10	5	31.829.000,00	19.075.000,00
10	Biro Pemerintahan	Randis Roda 4	3	2	101.330.000,00	87.330.000,00
		Randis Roda 2	3	3	31.300.000,00	31.300.000,00
11	BAPPEDA	Randis Roda 4	2	2	85.250.000,00	53.520.000,00
		Randis Roda 2	3	3	27.183.000,00	27.183.000,00
12	Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian	Randis Roda 4	3	2	53.119.666,00	33.119.666,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Randis Roda 4	1	1	23.170.412,00	23.170.412,00
		Randis Roda 2	10	1	42.953.300,00	5.000.000,00
				4		16.190.000,00
				4		18.917.000,00
14	Balai Latihan Kerja Mataram	Randis Roda 2	4	4	24.928.500,00	24.928.500,00
15	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Randis Roda 4	4	4	135.950.000,00	-
		Randis Roda 2	17	15	68.174.000,00	40.013.000,00
16	Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan	Peralatan Dan Mesin	152	152	194.828.950,00	194.828.950,00
17	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	Peralatan Dan Mesin	250	250	2.529.153.932,00	2.529.153.932,00
18	BPKAD	Peralatan Dan Mesin	96	96	915.840.528,00	915.840.528,00
19	PU dan Tata Ruang	Peralatan Dan Mesin	208	208	884.815.701,86	884.815.701,86
20	Balai Pemeliharaan Jalan Pulau Sumbawa	Peralatan Dan Mesin	3	3	5.776.470,60	5.776.470,60
21	Balai Hidrologi dan SDA Pulau Sumbawa	Peralatan Dan Mesin	12	12	67.995.621,90	67.995.621,90
22	Dinas Kehutanan	Penghapusan Tanah Seketeng Kab. Sumbawa			2.000.000,00	2.000.000,00
23	BPKAD	Penghapusan Tanah Jln. Majapahit 15 Mataram			7.192.150.000,00	7.192.150.000,00
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	Penghapusan Tanah Dan Bangunan Lb. Lalar Ksb			350.000.000,00	350.000.000,00
25	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Penghapusan Tanah Bangunan Puyung Loteng			7.559.225.596,24	7.559.225.596,24
26	BPKAD	Penghapusan Tanah Bangunan Kr. Kelok Mataram			1.063.680.161,78	1.063.680.161,78

NO	OPD	Uraian	Volume		Nilai	
			Usulan	Realisasi	Usulan	Realisasi
27	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Penghapusan Tanah Bangunan Kampus Ipdn			15.516.234.245,96	15.516.234.245,96
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penghapusan Hewan Ternak (Sapi)	34	34	140.000.000,00	140.000.000,00
Jumlah			866	838	8.684.577.186,34	37.800.879.486,34
Persentase Realisasi			96,77		97,72	

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2017

b. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA)

Dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2013-2018, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB mempunyai peran dalam mensukseskan indikator kinerja daerah yang dikelolanya yaitu pertumbuhan PAD. Dalam bab IX RPJMD, target pertumbuhan PAD tahun 2017 adalah sebesar 5,19 persen dan telah terealisasi 24,27 persen dari target pertumbuhan PAD tahun 2017. Berikut adalah perbandingan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2017 dengan proyeksi pendapatan daerah dalam RPJMD provinsi NTB tahun 2013-2018 :

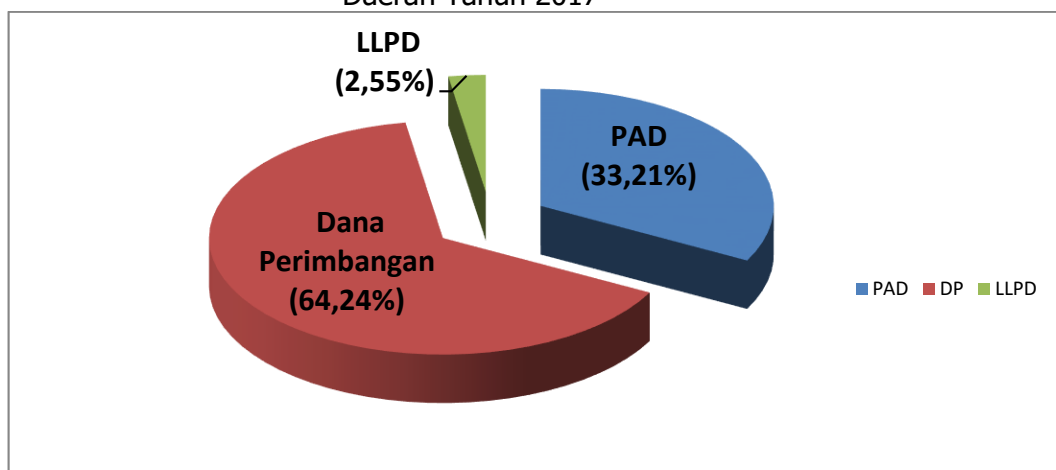
Tabel 2.213 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 dengan Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RPJMD Tahun 2013 - 2018

No.	Uraian	Realisasi 2017*	Proyeksi RPJMD tahun 2017	%	Proyeksi RPJMD Tahun 2018	Selisih Realisasi 2017 - Target RPJMD 2018
1	2	3	4	$5 = \frac{3}{4} \times 100$	6	7 = 3-6
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.689.823.934.520,00	1.501.611.335.359,00	112,53	1.590.322.845.658,00	99.501.088.862,00
II.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	3.268.927.294.306,00	3.222.521.202.310,00	101,44	3.718.354.340.828,00	(449.427.046.522,00)
III.	LAIN-LAIN PEND. DAERAH	129.760.006.000,00	67.264.821.900,00	192,91	19.284.510.900,00	110.475.495.100,00)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		5.088.511.234.826,00	4.791.397.359.569,00	106,20	5.327.961.697.386,00	(239.450.462.560,00)

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2017*data sementara (unaudit)

Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2017 telah terealisasi sebesar Rp.5.088.511.234.826,00 atau 99,36 persen dari target pendapatan daerah dalam APBD tahun 2017 yang sebesar Rp.5.121.402.497.258,00. Realisasi Pendapatan daerah tersebut bersumber dari PAD sebesar Rp.1.689.823.934.520,00; Dana perimbangan sebesar Rp.3.268.927.294.306,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah sebesar Rp.129.760.006.000,00 kontribusi masing-masing komponen Pendapatan Daerah tersebut dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut :

Gambar 2.21 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017



Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2017

Kontribusi Dana Perimbangan terhadap penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB tahun 2017 sebesar 64,24 persen masih lebih besar dibandingkan kontribusi PAD sebesar 33,21 persen, begitupula pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 dimana kontribusi Dana Perimbangan sebesar 65,39 persen, PAD 34,43 persen dan Lain-Lain Pendapatan Daerah 0,18 persen. Adapun realisasi komponen Pendapatan Daerah tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.214 Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2017

No.	Uraian	2016	Target	2017			Selisih Realisasi 2017-2016
		Realisasi		Realisasi*	%	% Ptb	
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.359.844.019.437,97	1.641.688.654.497,00	1.689.823.934.520,00	102,93	24,27	329.979.915.082,03
II.	BAGIAN DANA PERIMBANGAN	2.583.032.589.905,00	3.342.730.440.661,00	3.268.927.294.306,00	97,79	26,55	685.894.704.401,00
III.	LAIN-LAIN PEND. DAERAH	7.120.189.000,00	136.983.402.100,00	129.760.006.000,00	94,73	1.722,42	122.639.817.000,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.949.996.798.342,97	5.121.402.497.258,00	5.088.511.234.826,00	99,36	28,82	1.138.514.436.483,03

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2017 *data unaudit/LRA

Realisasi Dana Perimbangan tahun 2017 telah mencapai 97,79 persen dari target Dana Perimbangan tahun 2017 dan meningkat sebesar Rp.685.894.704.401,00 dari realisasi tahun 2016 atau 26,55 persen. Begitu pula dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah (LLPD) tahun 2017 telah melampaui target LLPD tahun 2017 dan meningkat dari realisasi tahun 2016 sebesar Rp.122.639.817.000,00. Peningkatan penerimaan LLPD sebagian besar bersumber dari hibah bencana alam dari pemerintah pusat.

Realisasi penerimaan PAD tahun 2017 sebesar Rp.1.689.823.934.520,00 meningkat Rp.329.979.915.082,03 atau 24,27 persen dari realisasi PAD tahun 2016 sebesar Rp.1.359.844.019.437,97. Peningkatan penerimaan PAD tersebut sebagian besar bersumber dari bagian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yaitu bagian laba penyertaan modal dari PT. DMB sebesar Rp.89.188.168.000,00 dan peningkatan pajak daerah sebesar Rp.177.541.269.979,00 dari tahun sebelumnya (tahun 2016). Adapun rincian peningkatan PAD tahun 2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.215 Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2017

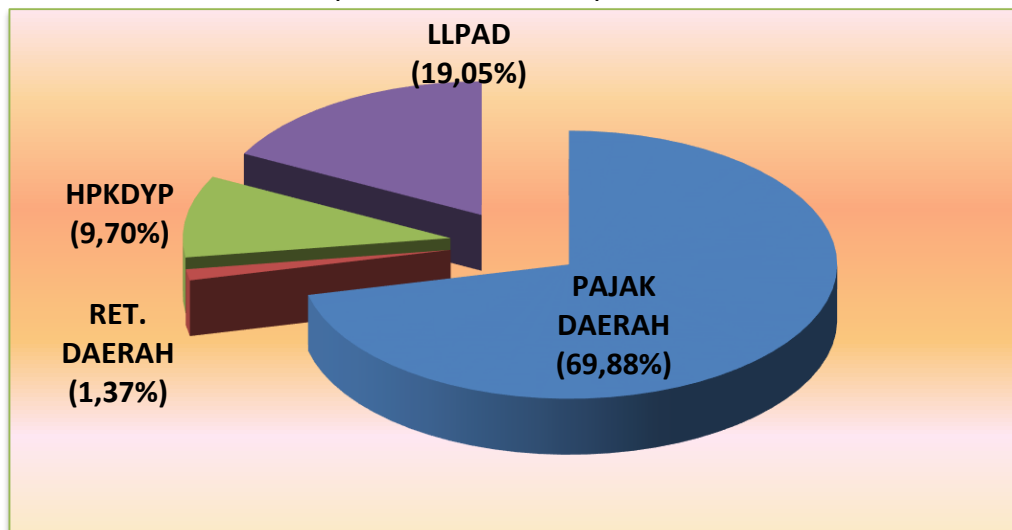
No.	Uraian	2016	2017				Selisih Realisasi 2017-2016
		Realisasi	Target	Realisasi*	%	% Ptb	
I	PAJAK DAERAH	1.003.260.953.668,00	1.144.453.452.935,00	1.180.802.223.647,00	103,18	17,70	177.541.269.979,00
II.	RETRIBUSI DAERAH	29.792.038.549,00	24.685.464.000,00	23.208.505.714,00	94,02	-22,10	-6.583.532.835,00
III.	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	72.827.611.744,00	166.202.468.137,00	163.852.468.137,34	98,59	124,99	91.024.856.393,34
IV.	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	253.963.415.476,97	306.347.269.425,00	321.960.737.021,66	105,10	26,77	67.997.321.544,69
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.359.844.019.437,97	1.641.688.654.497,00	1.689.823.934.520,00	102,93	24,27	329.979.915.082,03

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2017 *data unaudit/LRA 1 Februari 2018

Dari tabel diatas terlihat komponen PAD yang paling besar peningkatannya dibanding tahun 2016 adalah Pajak Daerah dengan peningkatan sebesar Rp.177.541.269.979,00. Peningkatan Pajak Daerah disebabkan meningkatnya penerimaan dari semua komponen Pajak Daerah tahun 2017. Sedangkan komponen PAD tahun 2017 yang penerimaannya menurun dari tahun 2016 adalah Retribusi Daerah, hal tersebut disebabkan beralihnya Retribusi Tera Ulang menjadi kewenangan pemerintah Kab/Kota serta berkurangnya penerimaan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan akibat beberapa obyek retribusi tersebut yang beralih menjadi obyek BLUD pada komponen Lain-Lain PAD yang Sah.

Perbandingan kontribusi masing-masing komponen PAD dapat dilihat dalam diagram berikut.

Gambar 2.22 Kontribusi Komponen PAD Terhadap Realisasi PAD Tahun 2017



Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2017 * data unaudit/LRA 1 Februari 2018

Pajak Daerah merupakan bagian PAD yang paling besar peranannya/kontribusinya terhadap PAD. Dengan kondisi tahun 2013 sebesar Rp.697.834.322.423,00, Pajak Daerah telah meningkat hingga 69,21 persen pada tahun 2017 dengan realisasi Rp.1.180.802.223.647,00 dan diproyeksi meningkat 82,32 persen pada tahun 2018 jika dihitung dari kondisi tahun 2013.

Pada tahun anggaran 2017, penerimaan seluruh komponen Pajak Daerah telah melampaui target dengan capaian Pajak Daerah tahun 2017 sebesar 103,18 persen. Rincian penerimaan Pajak Daerah Tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.216 Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2017

No.	Uraian	2016	2017				Selisih Realisasi 2017-2016
		Realisasi	Target	Realisasi*	%	% Ptb	
I	PKB	269.187.973.631,00	311.893.723.935,00	324.423.069.854,00	104,02	20,52	55.235.096.223,00
II.	BBNKB	322.208.887.701,00	299.817.600.000,00	313.246.961.803,00	104,48	-2,78	-8.961.925.898,00
III.	PBBKB	188.945.861.622,00	192.900.000.000,00	198.672.284.249,00	102,99	5,15	9.726.422.627,00
IV.	PAP	361.290.857,00	1.000.000.000,00	1.002.734.493,00	100,27	177,54	641.443.636,00
V.	PAJAK ROKOK	222.556.939.857,00	338.842.129.000,00	343.457.173.248,00	101,36	54,32	120.900.233.391,00
JUMLAH PAJAK DAERAH		1.003.260.953.668,00	1.144.453.452.935,00	1.180.802.223.647,00	103,18	17,70	177.541.269.979,00

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2017 * data unaudit/LRA 1 Februari 2018

Pertumbuhan Pajak Daerah tahun 2017 meningkat tajam sebesar 17,70 persen dibandingkan pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2016 yang sebesar -0,73 persen. Peningkatan dengan realisasi terbesar berada pada bagian Pajak Rokok dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Rokok meningkat dibandingkan tahun 2016 disebabkan adanya dana pajak rokok triwulan IV tahun 2016 yang diterima pada triwulan I tahun 2017. Sedangkan PKB tahun 2017 meningkat akibat berbagai upaya yang dilakukan Bappenda Provinsi NTB dalam intensifikasi penerimaan PKB, salah satunya melalui insentif pajak daerah dan berbagai program inovasi Bappenda. Peningkatan penerimaan juga terjadi pada PAP dan PBBKB. Pajak Air Permukaan (PAP) meningkat tajam hingga 177,54 persen disebabkan bertambahnya wajib pajak PAP pada tahun 2017 sebanyak 16 WP dari kondisi tahun 2016 sebanyak 9 WP. Begitu pula dengan penerimaan PBBKB yang tumbuh sebesar 5,15 persen akibat meningkatnya pembelian BBM jenis Pertamina dan Paltalite.

Adapun bagian Pajak daerah yakni PKB dan BBNKB yang dipungut langsung oleh Bappenda Provinsi NTB melalui 10 UPTB (Unit Pelayanan Teknis Badan), dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.217 Penerimaan PKB dan BBNKB Tahun 2017

NO	UPTB UPPB	BBNKB			PKB		
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1	MATARAM	85.162.180.000	88.190.775.906	103,56	106.309.635.000	105.055.171.612	98,82
2	GERUNG	39.483.470.000	57.153.298.800	144,75	35.472.005.000	36.869.433.361	103,94
3	TANJUNG	14.093.815.000	-	-	9.308.521.935	10.489.548.700	112,69
4	PRAYA	44.989.580.000	46.780.264.750	103,98	42.885.085.000	46.086.802.218	107,47
5	SELONG	53.645.300.000	54.684.069.868	101,94	47.415.775.000	49.773.990.527	104,97
6	SUMBAWA	23.120.025.000	25.152.509.855	108,79	24.239.027.000	25.166.636.434	103,83
7	TALIWANG	11.089.940.000	10.770.369.300	97,12	13.666.300.000	16.249.623.277	118,90
8	DOMPU	8.296.805.000	9.269.619.135	111,73	9.441.480.000	9.683.573.212	102,56
9	PANDA	8.671.345.000	9.766.418.889	112,63	8.808.340.000	9.976.310.531	113,26
10	RABA BIMA	11.265.140.000	11.479.635.300	101,90	14.347.555.000	15.071.980.382	105,05
JUMLAH		299.817.600.000	313.246.961.803	104,48	311.893.723.935	324.423.069.854	104,02

Sumber : Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB, 2017 * data unaudit/LRA 1 Februari 2018

Adapun perkembangan inovasi dan program unggulan Bappenda Provinsi NTB untuk mengoptimalkan peningkatan penerimaan PAD adalah sebagai berikut:

- Setelah *launching* e-Samsat tanggal 17 Agustus 2017 oleh Bapak Gubernur NTB, aplikasi e-samsat semakin gencar disosialisasikan kepada masyarakat dan penerapan e-samsat mulai diwajibkan pada pegawai Bappenda Provinsi NTB agar selanjutnya dapat menyentuh wajib pajak seluruh NTB.
- Aplikasi pelaporan pendataan kendaraan luar daerah secara online sudah implementasikan sejak triwulan I tahun 2017.
- Penerapan manajemen mutu ISO (uji coba pada Samsat Mataram) sudah dimulai dengan melakukan pelatihan kepada pegawai Samsat Mataram dan UPTB Mataram telah mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015.
- Menambah pelayanan kesamsatan (Samsat Nonstop Service 24/7) yang melayani Wajib Pajak setiap hari di 10 kabupaten/kota yang ada di NTB. Hal tersebut didukung dengan penambahan Samsat Corner 88 di kantor Bank NTB Pancor, pembentukan Samsat Desa yang telah beroperasi di Desa Sakra Lombok Timur, Desa Pringgarata Lombok Tengah, Desa Tapir Sumbawa Barat, Desa Soriutu Dompu, Desa Maria Bima dan akan disusul pada desa-desa di kabupaten/kota lainnya. Selain itu, Samsat Keliling disemua Kab/Kota se-NTB juga menambah jam pelayanan pada hari libur di daerah/lokasi yang ramai oleh Wajib Pajak maupun daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi pajak daerah.
- Melakukan pemutakhiran data potensi pajak melalui Aplikasi Agent Samsat. Dalam perkembangannya, agent samsat juga diberikan target untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran PKBnya.
- Aplikasi Retribusi *Online* (e-STS Retribusi *Online*) sedang dalam proses penyusunan modul aplikasi.
- Melakukan upaya integrasi data antara system/database kendaraan di Kepolisian dengan sistem/database kendaraan di Bappenda Provinsi NTB

Selanjutnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Bappenda Provinsi NTB melalui program dan kegiatan tidak terlepas dari hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Adapun yang menjadi permasalahan dan solusi pemecahan masalah yang dilakukan adalah sebagai berikut.

5. KEPEGAWAIAN

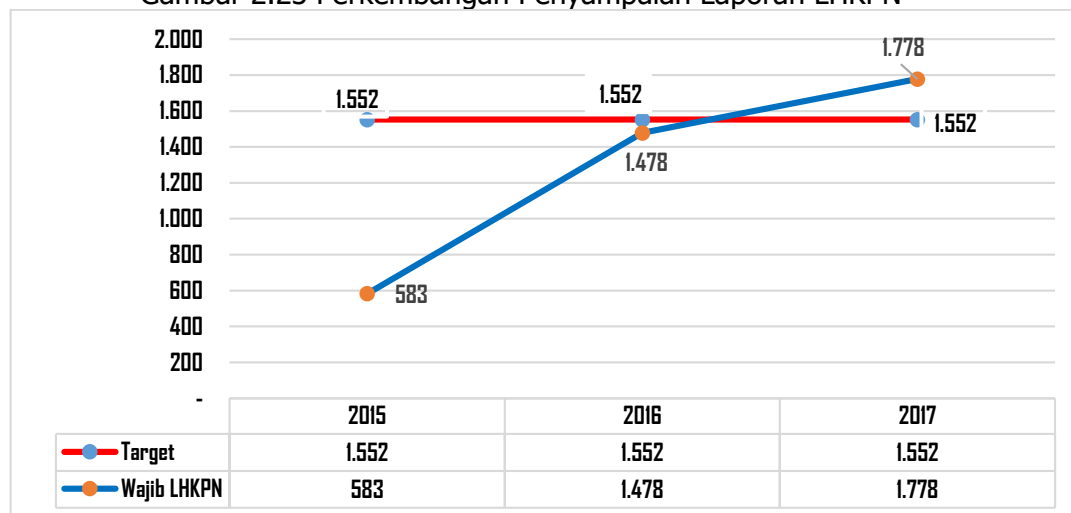
Pada tahun 2016, bidang kepegawaian dan pendidikan pelatihan aparatur masih tergabung dalam BKD dan DIKLAT, setelah terbitnya Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB, maka urusan bidang kepegawaian dilaksanakan oleh BKD, sedangkan untuk urusan bidang pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh BPSDM.

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kepegawaian, pada tahun 2017 BKD telah melaksanakan kegiatan utama diantaranya adalah (1) Peningkatan Tranparansi Data Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) melalui Kegiatan Kelompok Kerja LHKPN; (2) Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS; (3) Penempatan PNS; (4) Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS; (5) Pembangunan dan Pengembangan SIMPEG; (6) Pemetaan Kompetensi ASN; (7) Proses Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin; (8) Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar.

Salah satu kewajiban penyelenggaran negara adalah menyampaikan laporan kekayaan negara sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tatacara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Sampai saat ini jumlah Wajib LHKPN yang melaporkan mengalami peningkatan, hal ini akibat adanya kesadaran Wajib LHKPN untuk melaporkan sebagaimana pada grafik berikut.

Gambar 2.23 Perkembangan Penyampaian Laporan LHKPN



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, 2017

Dilihat dari grafik diatas, diketahui bahwa tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN bagi penyelenggara negara/daerah di Pemerintah Provinsi NTB sangat tinggi melebihi target yang ditentukan. Tingginya pencapaian Wajib LHKPN disebabkan oleh ada penambahan Wajib LHKPN yang dipersyaratkan untuk melaporkan kekayaan yang dimilikinya. Hal ini diapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam KPK Award melalui kegiatan "Lembaga Dengan Tingkat Kepatuhan LHKPN Terbaik Tahun 2017" pada tanggal 12 Desember 2017.

Selain pencapaian keberhasilan tersebut, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB melalui Kegiatan Pemetaan Kompetensi ASN terus berupaya untuk melakukan uji kompetensi kepada ASN yang berpotensi untuk menduduki jabatan struktural di berbagai level. Pada Tahun 2017, jumlah ASN yang telah mengikuti uji kompetensi sebanyak 473 orang dari target sebanyak 250 orang. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tiap tahun yang dilaksanakan dengan tujuan sebagai bahan pertimbangan dalam penempatan ASN dalam jabatan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Jumlah ASN yang telah mengikuti uji kompetensi dari tahun ke tahun dapat diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 2.218 Target dan Realisasi ASN yang Mengikuti Uji Kompetensi

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1	2015	200 orang	283 orang
2	2016	200 orang	506 orang
3	2017	250 orang	473 orang

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, 2017

Konsistensi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB dalam melakukan pemetaan kompetensi dan pemetaan komposisi ASN berdasarkan kualifikasi jabatan yang diembannya mendapat apresiasi dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia. Hal ini ditandai dengan diperolehnya penghargaan sebagai “Terbaik V Implementasi Assesment Center Pemerintah Provinsi Tahun 2016”. Dengan adanya penghargaan ini, maka BKD semakin terdorong untuk terus meningkatkan / pengembangan manajemen kepegawaian yang lebih baik dan profesional.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi membawa dampak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik baik kepada masyarakat maupun ASN. Sistem informasi manajemen kepegawaian merupakan implementasi E-Government dalam pelayanan di bidang kepegawaian secara transparan dan objektif. Sistem ini menyajikan informasi yang terkait dengan kepegawaian, khusus untuk meningkatkan pelayanan di bidang mutasi kepegawaian.

Pengembangan sistem informasi kepegawaian sebagai inovasi penyimpanan / pemeliharaan berkas / dokumen kepegawaian PNS secara fisik maupun secara elektronik. Dokumen fisik tersebut tersimpan dengan rapi sesuai dengan klasifikasi dalam lemari khusus Roll O’Pack sehingga mudah untuk dicari secara cepat dan tepat oleh petugas Arsiparis. Selanjutnya, untuk mencari data dan informasi kepegawaian secara online, telah dikembangkan aplikasi SIMPEG dengan alamat wensite <http://bkd.ntbprov.go.id> yang dapat diakses oleh siapa pun, kapan pun, dimana pun dan selalu dilakukan *update* data apabila terdapat perubahan data pada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi.

Pengembangan aplikasi kepegawaian yang berbasis teknologi informasi lain yang baru-baru ini dibangun BKD adalah aplikasi **SIMADU** (Sistem Management ASN Terpadu), dimana sistem ini merupakan sistem aplikasi yang memudahkan *user*, operator bahkan ASN itu sendiri dalam memanfaatkan, mengolah, dan mengelola data kepegawaian sehingga mampu terdokumentasi dengan baik dalam rangka pembinaan, penempatan dan pengembangan karier ASN. Lebih lanjut secara bersamaan juga dikembangkan sistem aplikasi **SIMATA** (Sistem Manajemen Penataan ASN) yang merupakan sistem aplikasi yang memudahkan *user* dalam rangka melihat/mengamati secara lebih detail data, talenta dan rekam jejak seorang ASN untuk pengembangan karier sesuai dengan kompetensinya masing-masing.

Atas berbagai pelayanan bidang kepegawaian yang telah dilakukan oleh BKD Provinsi NTB, pada tahun yang sama kembali memperoleh penghargaan sebagai “Pengelola Kepegawaian Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2017” dalam kegiatan BKN

Award dengan kriteria variabel yang dinilai meliputi perencanaan formasi, pelayanan pengadaan, pelayanan kenaikan pangkat, pelayanan pensiun, implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), pemanfaatan CAT BKN, penilaian kompetensi, implementasi penilaian kinerja, dan Komitmen Pengawasan dan Pengendalian.

Keberhasilan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah fungsi penunjang bidang kepegawaian yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi NTB tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Adapun dalam penyelenggaraan bidang kepegawaian oleh BKD Provinsi NTB masih menghadapi beberapa permasalahan dalam penyelenggaraannya, sebagaimana tabel berikut :

6. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan pemerintah fungsi penunjang bidang pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pada tahun 2017, BPSDM Provinsi NTB telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka peningkatan kompetensi baik yang bersifat manajerial/dasar maupun teknis/fungsional, peningkatan kapasitas kompetensi widyaiswara/tenaga pengajar serta fasilitasi sertifikasi kompetensi keahlian. Salah satu unsur optimalnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan adalah ketersediaan tenaga pengajar/widyaiswara yang profesional. Hingga akhir Desember 2017, jumlah tenaga pengajar/widyaiswara yang ada pada BPSDMD Provinsi NTB sebanyak 13 orang. Guna meningkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan dalam proses pembelajaran, maka Widyaiswara diberikan pendidikan dan pelatihan muatan substantif melalui sistem pengiriman ke instansi penyelenggara diklat seperti Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), dan BPSDM Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut ini disajikan kegiatan diklat dan jumlah Widyaiswara yang dikirim untuk mengikuti diklat dimaksud :

Tabel 2.219 Jenis Diklat dan Jumlah Widyaiswara yang Mengikutinya Tahun 2017

NO	Jenis Diklat	Jumlah Widyaiswara yang Mengikuti Diklat	Keterangan
1	TOR Pelatihan Dasar CPNS	5 orang	Jawa Barat
2	Diklat Penyusunan Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri (P2PDN) angk. II	1 orang	Jakarta
3	Diklat Widyaiswara Tk. Tinggi Angkatan I Tahun 2017	1 orang	Jakarta
4	Pelatihan Widyaiswara Substansi Diklatpim Tk.III dan IV Tahun 2017 di PKP2A I LAN	1 orang	Bandung
5	Pelatihan TOF Pelatihan Dasar CPNS	6 orang	LAN Bandung

Sumber : BPSDMD Provinsi NTB, 2017

Peningkatan kompetensi yang bersifat dasar/manajerial dilaksanakan melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah dan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah. Untuk kegiatan diklat prajabatan / dasar, pada tahun 2017, tidak dilaksanakan karena masih menunggu regulasi baru terkait pola pelaksanaan Diklat Prajabatan Pola Baru, hal ini ditindaklanjuti dengan terus melakukan komunikasi, koordinasi dan konsultasi dengan pihak LAN RI sebagai instansi pembina diklat. Sedangkan untuk kegiatan diklat kepemimpinan/struktural, pada tahun-tahun sebelumnya kegiatan ini terbatas hanya untuk diklat kepemimpinan tingkat III dan IV, namun pada tahun 2017 dilaksanakan diklat kepemimpinan untuk tingkat II bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Pendidikan Pelatihan Aparatur I (PKP2A I) LAN RI Bandung. Selain itu juga, BPSDMD Provinsi NTB menerima peserta diklat kepemimpinan tingkat III dan IV dari kabupaten / kota / instansi lain dengan pola kontribusi.

Berikut ini disampaikan capaian penyelenggaraan kegiatan diklat dasar / manajerial yang dilaksanakan pada tahun 2017 :

Tabel 2.220 Capaian Penyelenggaraan Diklat Dasar/Manajerial Tahun 2017

NO	JENIS DIKLAT	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Diklat PIM II	10 orang	9 orang	
2	Diklat PIM III Provinsi	35 orang	35 orang	
3	Diklat PIM IV Provinsi	80 orang	77 orang	
4	Diklat PIM III Kabupaten/Kota	110 orang	100 orang	
5	Diklat PIM IV Kabupaten/Kota	160 orang	141 orang	
6	Diklat Prajabatan	- orang	- orang	
	JUMLAH	395 orang	362 orang	

Sumber : BPSDMD Provinsi NTB, 2017

Selain upaya mendorong ASN memiliki kemampuan dasar/manajerial, BPSDMD Provinsi NTB juga terus meningkatkan kompetensi teknis tugas dan fungsional kepada ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB melalui kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsional bagi PNS Daerah. Salah satu terobosan yang dilakukan yaitu pelaksanaan diklat berbasis wisata / kuliner, artinya selain pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan di dalam kelas (*in class*), juga dilaksanakan diluar kelas (*out class*) yang diarahkan ke lokasi wisata (alam, buatan, desa adat, tempat kuliner dan sebagainya). Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi rasa jenuh bagi peserta diklat, juga sebagai pengenalan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar lokasi pembelajaran (*out class*). Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan jumlah diklat teknis / fungsional yang dilaksanakan oleh BPSDMD Provinsi NTB Tahun 2017:

Tabel 2.221 Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2017

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH PESERTA		KETERANGAN
		TARGET (orang)	REALISASI (orang)	
A	Diklat Teknis	525	515	
1	Diklat Revolusi Mental	35	30	<i>In Class</i>
2	Diklat Pelayanan Prima	35	35	<i>In Class</i>
3	Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah	35	35	<i>In Class</i>
4	Diklat <i>Legal Drafting</i>	35	30	<i>In Class</i>
5	Diklat Pengadaan Barang / Jasa	70	70	<i>In Class</i>
6	Diklat Penyusunan LAKIP	35	35	<i>In Class</i>
7	Diklat Pendapatan Daerah	35	35	<i>In Class</i>
8	Diklat Dasar-Dasar AMDAL	35	35	<i>In Class</i>
9	Diklat Perencanaan dan Pengelolaan DAS RHL	35	35	<i>In Class dan Out Class</i>
10	Diklat Sistem Informasi Geografi Pertambangan	35	35	<i>In Class</i>
11	Diklat Manajemen Perizinan Pertambangan	35	35	<i>In Class</i>
12	Diklat Penyusunan Bahan Ajar Berbasis TIK	35	35	<i>In Class</i>
13	Diklat Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	35	35	<i>In Class</i>
14	Diklat Teknis Kearsipan bagi Sekolah	35	35	<i>In Class</i>
A	Diklat Fungsional	90	51	
15	Diklat Calon Widyaiswara	30	21	<i>In Class</i>
16	Diklat Dasar Pol PP 300 Jam	30	30	<i>In Class dan Out Class</i>
17	Diklat Polisi Kehutanan	30	-	-
	JUMLAH	615	566	

Sumber : BPSDM Provinsi NTB, 2017

Terselenggaranya kegiatan kediklatan di BPSDMD Provinsi NTB tidak terlepas dari ketersediaan dari sarana prasarana yang mendukung diantaranya : 2 gedung asrama (Wisma Tambora dan Wisma Praja), 6 lokal kelas, dan 3 Aula, sedangkan untuk kelengkapan peralatan pendukung sudah cukup memadai.

2.2. Evaluasi Kinerja RKPD Tahun 2017

Evaluasi pelaksanaan RKPD dilaksanakan setiap triwulan berdasarkan realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah. Hasil evaluasi selanjutnya akan menjadi bahan perbaikan program yang sedang berjalan dan dasar penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah tahun berikutnya. Dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik, setiap instansi pemerintah diamanatkan untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan baik secara keuangan maupun kinerja sebagai wujud pemerintahan yang akuntabel.

Perangkat Daerah yang dievaluasi adalah sebanyak 45 Perangkat Daerah dan yang telah melaporkan sebanyak 28 Perangkat Daerah, sedangkan sisanya sebanyak 17 Perangkat Daerah disajikan laporan Triwulan III 2017.

Adapun rincian kinerja pelaksanaan RKPD Provinsi NTB Tahun 2017 sebagaimana disajikan pada tabel berikut in:

Tabel 2.222: Evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi NTB Tahun 2017

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1	2	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x 100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR															
	1	BIDANG PENDIDIKAN															
	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	2.242.421.236	-	-	-	7.869.682.680	41	5.505.814.232		69,96	41	5.505.814.232		245,53
2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	9.013.000.000	-	-	-	21.740.588.000	36	25.040.836.107		115,18	36	25.040.836.107	-	277,83
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	84.542.719	-	-	-	846.430.000	4	709.082.500		83,77	4	709.082.500		838,73
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	282.500.000	-	-	-	360.835.000	12	183.258.700		50,79	12	183.258.700		64,87
5	07	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah		-	19.399.480	-	-	-	361.500.000	18	147.467.925	-	40,79	18	147.467.925	-	760,16

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
6	15	Program pengembangan nilai budaya		-	315.000.000	-	-	-	2.337.250.000	48	2.594.225.636	-	110,99	48	2.594.225.636		823,56
7	16	Program pembinaan sekolah menengah atas		-	78.099.525.000	-	-	-	86.452.036.000	39	116.089.766.579	-	134,28	39	116.089.766.579	-	148,64
8	16	Program pengelolaan kekayaan budaya		-	880.320.000	-	-	-	1.473.565.570	15	1.374.807.638	-	93,30	15	1.374.807.638		156,17
9	17	Program pembinaan sekolah menengah kejuruan		-	103.018.650.000	-	-	-	100.572.700.000	44	136.473.572.697	-	135,70	44	136.473.572.697	-	132,47
10	17	Program pengelolaan keragaman budaya		-	10.008.805.800	-	-	-	10.063.754.550	39	13.616.733.414	-	135,30	39	13.616.733.414		136,05
11	18	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya		-	52.500.000	-	-	-	150.000.000	51	77.122.700	-	51,42	51	77.122.700	-	147
12	19	Program pembinaan pendidikan khusus pendidikan layanan khusus		-	8.079.750.000	-	-	-	7.695.000.000	21	8.075.885.990	-	104,95	21	8.075.885.990	#DIV/0!	100

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1 3	20	Program pembinaan ketenagaan		-	11.411.316.000	-	-	-	9.253.610.000	3	7.695.109.550	-	83,16	3	7.695.109.550	-	67,43
1 4	22	Program manajemen pelayanan pendidikan		-	177.513.000	-	-	-	36.077.974.000	15	36.697.319.369		101,72	15	36.697.319.369		##### #
1 5	23	Program peningkatan balai teknologi dan komunikasi pendidikan		-	2.756.250.000	-	-	-	2.030.516.000	50	2.723.289.138	-	134,12	50	2.723.289.138	-	98,80
1 6	24	Program sinkronisasi dan koordinasi pembangunan pendidikan nasional		-	886.589.043	-	-	-	747.162.000	3	393.196.192	-	52,63	3	393.196.192	-	44,35
1 7	25	Program peningkatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan		-	998.315.000	-	-	-	6.430.835.000	31	2.838.511.668	-	44,14	31	2.838.511.668	-	284,33
1 8	30	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)		-	-	-	-	-	203.076.077.000	1	340.717.400.000		167,78	1	340.717.400.000		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											##### ####						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												82,15	84,79				

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)								TINGG /	TINGG /	

	1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR															
	2	BIDANG KESEHATAN															
	1	DINAS KESEHATAN															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Dokumen laporan	5	9.626.368.000	3	4.086.892.237	1	5.628.234.940	1	3.501.574.579	85,00	62,21	4	7.588.466.816	77,00	78,83
2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	6.384.996.620	100	4.419.633.296	100	3.456.325.893	75	2.493.041.587	75,00	72,13	175	6.912.674.883	175,00	108,26
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kinerja Aparatur	98	709.557.300	95	235.652.985	95	261.085.400	19	62.152.844	20,52	23,81	114	297.805.829	116,83	41,97

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiata n (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
4	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		-	-	-	-	-	145.914.400	26	62.309.000	42,70	26	62.309.000			
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		-	-	-	-	-	79.094.000	21	29.592.000	-	37,41	21	29.592.000		
6	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Ketersediaan obat dan vaksin (%)	95	4.515.058.000	84	2.068.234.48 4	93	1.316.256.700	35	813.579.789	37,94	61,81	120	2.881.814.27 3	126,03	63,83
7	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		-	20.377.039.000	13	10.239.892.8 73	-	12.564.127.55 0	34	6.849.712.504	54,52	47	17.089.605.3 77		83,87	

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
8	19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga (%)	92	56.157.397.640	96	21.194.983.750	91	5.074.045.462	30	4.984.222.100	32,97	98,23	126	26.179.205.850	137	47
9	20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Balita gizi buruk mendapat perawatan	100	10.524.541.155	100	3.820.755.910	100	4.746.930.405	51	3.895.066.092	51,14	82,05	151	7.715.822.002	151,14	73,31
10	21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Jamban Keluarga	80	6.535.663.000	79	2.586.477.600	78	3.935.180.000	20	2.340.566.720	25,64	59,48	99	4.927.044.320	124,11	75,39
11	22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan imunisasi dasar lengkap	95	6.419.534.008	95	2.285.780.477	94	867.769.500	90	626.558.087	95,74	72,20	185	2.912.338.564	194,75	45,37
12	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		-	-	-	-	-	410.891.600	35	142.776.800		34,75	35	142.776.800		
13	24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin		-	-	-	-	-	618.400.000	32	198.675.000		32,13	32	198.675.000		
14	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-		-	-	-	-	-	1.119.650.000	46	515.975.000		46	46	515.975.000		

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
		Paru/Rumah Sakit Mata															
15	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		-	-	-	-	27.000.000	-	52	13.996.000	51,84	-	52	13.996.000		
16	28	Program Kemitraan Peningkatan Yankes		-	1.463.879.050	-	960.056.071	-	340.406.050	80	305.514.900	89,75	-	80	1.265.570.971		86,45
17	30	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		-	877.859.000	-	405.497.000	-	186.000.000	100	181.732.000	-	97,71	100	587.229.000	-	66,89
18	32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (%)	90	5.633.509.396	92	1.728.177.500	90	550.620.000	47	416.714.800	52,22	75,68	139	2.144.892.300	154,86	38,07

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
19	33	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Dokumen Perencanaan Kesehatan	18	3.009.661.900	6	1.240.998.686	2	730.797.000	1	680.969.168	74,31	93,18	7	1.921.967.854	41,59	63,86
20	34	Program sumber daya kesehatan	Persentase Pelatihan yang terakreditasi	100	3.526.907.860	100	1.286.943.065	95	627.025.000	40	613.752.401	42,54	97,88	140	1.900.695.466	140,41	53,89
21	35	Program Pendidikan Tenaga Kesehatan		-	-	-	-	-	2.481.214.018	25	632.548.993	-	25,49	25	632.548.993		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											29.361.030.364,00						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												59,72	72,07				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												REND AH	SEDA NG				

2	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI																
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		362	18.131.477.088	87	3.823.353.062	97	5.418.422.000	57	4.344.400.272	58,81	80,18	144	8.167.753.334	39,79	45,05

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	-	-	-	3	798.000.000	3	768.900.000	100,00	96,35	3	768.900.000		
3	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		5	8.500.000.000	1	808.104.334	1	2.060.475.000	1	1.158.171.452	60,00	56,21	2	1.966.275.786	32,00	23,13
4	16	Upaya kesehatan masyarakat		85	31.112.678.000	1	1.818.339.345	1	4.494.200.000	0,70	4.414.675.320	70,00	98,23	2	-	2,00	-
5	22	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		2.775	304.532.000	230	66.775.000	230	179.320.000	73	131.128.707	31,79	73,13	303	197.903.707	10,92	64,99
6	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		-	8.500.000.000	323	1.473.777.333	323	2.124.457.908	214	1.459.089.025	66,15	68,68	537	2.932.866.358		34,50

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
7	24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin		-	-	-	-	280	760.000.000	810	581.154.500	289,29	76,47	810	581.154.500	-	-
8	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		52	466.196.013.000	16	53.532.198.224	17	96.987.333.523	7	94.360.710.043	42,65	97,29	23	147.892.908.267	44,71	31,72

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
9	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata		5	10.407.510.000	1	4.751.415.815	1	6.000.000.000	1	5.443.824.050	100,00	90,73	2	10.195.239.865	40,00	97,96
10	39	Program Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan BLUD		5	425.952.275.000	2	124.952.575.000	1	100.000.000.000	1	160.545.288.108	100,00	160,55	3	285.497.863.108	60,00	67,03
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											##### ####						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												87,46	91,95				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												TINGG !	SANG AT TINGG !				

3	RUMAH SAKIT JIWA MUTIARA SUKMA PROVINSI

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	988.404.000	-	263.420.833	-	393.624.000	42	166.357.026	-	42,26	42	429.777.859	-	43,482
2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	954.268.000	-	380.905.000	2	572.918.000	2	507.127.900	100,00	88,52	2	888.032.900	-	93,06
4	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		-	62.830.000	-	14.750.000	1	21.400.000	1	18.250.000	100,00	85,28	1	33.000.000	-	52,52
5	16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		-	5.224.527.000	-	2.272.272.089	-	1.347.751.235	4	1.099.496.686	-	81,58	4	3.371.768.775	-	##### #
6	23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		-	1.127.976.000	-	542.175.468	-	120.000.000	97	116.746.586	-	97	97	658.922.054	-	58,42

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
7	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		-	11.202.945.000	-	7.625.759.121	-	2.148.891.750	-	1.133.478.000	-	52,75	-	8.759.237.121	-	78,19
8	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		3	13.115.814.000	3	5.885.533.000	1	2.376.500.000	1	1.915.406.770	100,00	80,60	4	7.800.939.770	133,33	59,48

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
9	39	Program Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan BLUD	Pelayanan BLUD	5	69.000.000.000	2	35.729.187.131	1	15.188.032.703	-	14.842.634.714	-	97,73	2	50.571.821.845	-	73,29
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											19.799.497.682						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												96,88	89,32				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>TINGG</u> <u>!</u>	<u>TINGG</u> <u>!</u>				

4		RUMAH SAKIT H.L. MANAMBAI ABDUL KADIR															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	#####		9.307.274.819		11.932.072.709	-	11.932.072.709	50	10.661.229.247	-	89,35	50	22.593.301.956	-	243
2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur		239.000.000		2.248.704.341		1.317.766.613	17	1.510.763.786	-	114,65	17	3.759.468.127	-	1.573

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pendidikan (dokter spesialis) dan pelatihan formal SDM RS		505.252.490		455.683.965		510.250.000	45	494.483.062	-	96,91	45	950.167.027	-	188
4	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen rencana kerja dan laporan keuangan		45.000.000		26.760.000		62.400.000	-	33.960.000	-	54,42	-	60.720.000	-	135

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pencatatan dan pengamanan aset daerah		31.100.000		29.025.000		70.030.000	42	56.477.000	-	80,65	42	85.502.000	-	275
6	15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	tersedianya obat-obatan dan perbekalan kesehatan RS		2.500.000.000		3.283.231.445		1.200.000.000	15	1.403.972.075	-	117,00	15	4.687.203.520	#DIV/0!	187

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
7	24	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan pada masyarakat miskin		250.000.000		3.841.124.615		517.806.637	61	2.022.590.648	-	390,61	61	5.863.715.263	-	2.345
8	26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Rumah Sakit Mata	Tersedianya fasilitas & dan peralatan kesehatan serta alat alat nonmedis yang layak dan sesuai standar		31.395.970.889		12.991.349.672		11.850.684.667	39	11.564.188.163	-	97,58	39	24.555.537.835	-	78

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
9	27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Pemeliharaan rutin/berkala RS		1.315.000.000		209.965.250		101.000.000	57	140.318.909	-	138,9	57	350.284.159	-	27
10	39	Program Peningkatan Mutu Pelayanan kesehatan BLUD	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD		25.000.000.000		-		19.000.000.000	94	17.769.291.902	-	93,52	94	17.769.291.902		71
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											45.657.274.792						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												0,00	82,02				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>REND</u> <u>AH</u>	<u>TINGG</u> <u>!</u>				

3	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiata n (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran (%)	100	34.001.090.932	100	5.666.723.32 2	100	4.403.598.162	75	6.318.829.118	75,00	143,49	175	11.985.552.4 40	175,00	35,25
2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur (%)	100	27.443.750.610	100	7.302.698.34 2	100	5.391.407.488	75	8.572.949.884	75,00	159,01	175	15.875.648.2 26	175,00	57,85
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur (%)	100	796.447.450	100	83.057.100	100	85.620.000	75	70.937.200	75,00	82,85	175	153.994.300	175,00	19,34
4	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program (Dokumen)	60	3.799.051.435	14	696.266.850	11	680.979.950	6	862.036.855	50,82	126,59	20	1.558.303.70 5	32,65	41,02

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
5	07	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Manajemen Aset (dokumen)	37	2.609.868.720	10	537.944.300	7	254.160.700	3	343.699.950	36,43	135,23	13	881.644.250	33,92	33,78
6	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)	84	1.015.616.815.819	72	221.327.371.751	75	199.698.739.500	73	279.522.461.428	97,03	139,97	145	500.849.833.179	173,64	49,31

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
7	18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jaringan jalan dan jembatan provinsi dalam kondisi mantap (%)	84	1.277.503.021.5 27	72	196.253.324. 910	75	397.451.285.6 40	73,15	557.760.787.570	97,03	140,33	145	754.014.112. 480	173,64	59,02
8	22	Program pembangunan sistem informasi / database jalan dan jembatan	Rencana program (Dokumen)	10	1.336.750.000	2	191.733.480	2	300.000.000	1	194.357.350	31,00	64,79	3	386.090.830	26,20	28,88
9	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Umur teknis alat berat (%)	60	2.006.531.210	40	318.751.544	50	386.119.000	37	633.957.533	73,24	164,19	77	952.709.077	127,70	47,48

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
10	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Cakupan areal irigasi (Ha)	#### ##	245.124.431.970	#### #	38.696.661.617	7.072	41.315.726.469	3.967	59.481.489.847	56,10	143,97	#### #	98.178.151.464	28,79	40,05
11	26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Cakupan areal irigasi (Ha)	5.591	72.124.066.880	#### #	16.721.468.045	966	33.853.008.445	742	45.607.154.860	76,76	134,72	#### #	62.328.622.905	40,13	86,42
12	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan Air Bersih Perkotaan (%)	88	70.167.617.680	90	17.650.740.000	86	28.693.312.500	90	58.124.394.100	104,40	202,57	180	75.775.134.100	205,53	107,99

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1 3	28	Program pengendalian banjir	Luas genangan areal banjir (%)	15	38.192.811.140	23	13.898.705.3 50	12	34.123.623.28 6	10	47.310.384.953	90,07	138,64	33	61.209.090.3 03	222,62	160,26
1 4	31	Program pengembangan pelayanan jasa pengujian	Sertifikasi hasil uji (jenis)	110	4.159.825.670	90	701.787.250	110	465.600.000	40	271.139.000	36,19	58,23	130	972.926.250	118,01	23,39
1 5	32	Program Pengaturan Jasa Konstruksi	Daya serap (%)	35	339.436.900	5	46.190.000	30	69.026.000	23	135.564.300	75,67	196,40	28	181.754.300	79,14	53,55
1 6	34	Program Pengawasan Jasa Konstruksi	Daya serap (%)	75	3.554.005.290	48	926.091.194	65	1.072.974.000	10	785.372.300	14,87	73,20	58	1.711.463.49 4	76,88	48,16
1 7	35	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Daya tampung (%)	93	214.817.305.00 0	59	16.765.309.7 50	87	10.500.000.00 0	65	14.541.471.300	74,65	138,49	123	31.306.781.0 50	133,13	14,57

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
18	36	Program Perencanaan Tata Ruang	Rencana teknis KSP (Dok.)	8	5.514.658.540	2	1.020.118.600	2	820.830.271	1	145.363.550	47,50	17,71	3	1.165.482.150	36,88	21,13
19	37	Program Pemanfaatan Ruang	Rumusan kebijakan tata ruang (Dokumen)	5	1.505.424.240	1	311.578.507	1	422.625.000	1	140.469.400	69,00	33,24	2	452.047.907	33,80	30,03
20	38	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Penurunan Penyimpangan tata ruang (%)	55	895.392.340	11	120.532.500	12	226.126.000	6	59.426.500	50,58	26,28	17	179.959.000	30,78	20,10

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
21	39	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Kawasan (%)	15	1.050.000.000	-	-	10	389.195.400	7	376.119.550	73,00	96,64	7	376.119.550	48,67	35,82
22	40	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Sektor (%)	15	840.000.000	-	-	10	390.279.009	4	297.683.350	44,00	76,27	4	297.683.350	29,33	35,44
23	40	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Data/Informasi Pengembangan Infrastruktur Wilayah (dokumen)	6	1.672.000.000	-	-	3	770.681.870	2,34	1.211.809.118	78,00	157,24	2	1.211.809.118	39,00	72,48

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
24	41	Program pengembangan keterpaduan infrastruktur wilayah	Tingkat keterpaduan infrastruktur antar Wilayah (%)	10	420.000.000	-	-	5	224.505.232	2	193.609.050	34,00	86,24	1,7	193.609.050	17	46
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											##### ####						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												63,97	114,01				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												RENDAH	SANGAT TINGGI				

4	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN																
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara	100	1.609.852.510	-	-	100	963.695.260	42	500.967.767	42,02	51,98	42	500.967.767	42,02	31,12

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100	868.500.000	-	-	100	500.620.000	76	379.002.162	75,71	75,71	76	379.002.162	75,71	43,64
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100	113.095.000	-	-	100	48.064.900	37	33.080.502	37,20	68,82	37	33.080.502	37,20	29,25
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100	200.672.890	-	-	100	220.715.660	39	85.210.000	38,61	38,61	39	85.210.000	38,61	42,46
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		-	50.000.000	-	-	-	27.444.000	-	2.476.800	-	9,02	-	2.476.800	-	4,95

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
6	15	Program Pengembangan Perumahan		-	36.008.000.000	-	-	-	29.665.427.400	45	13.361.291.350	-	45,04	45	13.361.291.350	-	37,11
9	21	Program Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman		-	620.000.000	-	-	-	277.571.600	43	119.509.148	-	43,06	43	119.509.148	-	19,28
10	22	Program Pengembangan Permukiman		-	13.500.000.000	-	-	-	160.885.715.429	44	70.876.501.716	-	44,05	44	70.876.501.716	-	525,01
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											85.358.039.445,00						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												36,87	36,80				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH				

5	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran (%)	60	5.502.291.000	12	1.284.210.70 0	12	1.187.818.660	9	764.076.432	75,00	64,33	21	2.048.287.13 2	35,00	37,23
2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas Aparatur (bulan)	12	8.408.657.000	-	2.976.489.60 0	-	896.346.800	90	808.494.210	-	90,20	90	3.784.983.81 0	-	45,01
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pegawai terampil dan seht (orang)	283	92.292.000	58	6.750.000	58	15.600.000	45	8.050.000	77,59	51,60	103	14.800.000	36,40	16,04

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
4	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian laporan kinerja keuangan (dok)	56	509.849.000	11	92.850.000	11	140.486.440	9	97.512.200	81,82	69,41	20	190.362.200	35,71	37,34
5	07	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Tersedianya laporan aset (laporan)	4	65.450.000	2	22.750.000	2	19.950.000	3	7.650.000	150,00	38,35	5	30.400.000	125,00	46,45
6	15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Penurunan jumlah konflik (kasus)	27	21.041.605.000	23	3.988.130.000	31	5.060.263.800	8	3.739.936.607	25,81	73,91	31	7.728.066.607	114,81	36,73

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
7	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan (orang)	#### ##	5.548.899.000	#### #	1.376.109.000	5.00 0	1.165.915.000	340	891.488.234	7	76	#### #	2.267.597.234	21,36	40,87
8	18	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan		-	-	-	-	-	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
9	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan pekat dan tindak kriminal penyelundupan	#### ##	267.960.000	25	61.760.500	25	53.100.000	13	20.919.900	52,00	39,40	38	82.680.400	0,15	30,86
10	21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu (%)	73	4.939.019.000	-	1.195.764.700	72	1.091.045.100	18	879.644.380	25	80,62	#### #	2.075.409.080	24,66	42,02

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							7.217.771.963,0 0			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)								61,34	57,81	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)								<u>REND</u> <u>AH</u>	<u>REND</u> <u>AH</u>	

2	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		60	10.590.417.700	12	1.177.487.44 5	12	1.024.139.954	9	648.414.275	75,00	63,31	21	1.825.901.72 0	35,00	17,24
2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		75	3.979.780.000	6	654.283.350	55	468.566.646	57	266.207.180	103,30	56,81	63	920.490.530	83,75	23,13
3	03	Program peningkatan disiplin aparat		1	1.229.432.140	1	224.123.100	1	263.142.000	1	244.581.400	100,00	92,95	2	468.704.500	200,00	38,12

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
4	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		2	756.150.000	2	93.081.750	2	93.350.000	2	58.350.000	100,00	62,51	4	151.431.750	200,00	20,03
5	07	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah		1	86.304.600	1	24.100.000	1	25.200.000	1	11.750.000	100,00	46,63	2	35.850.000	200,00	41,54
6	15	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		2	1.740.658.476	2	261.522.000	2	223.177.605	2	175.368.802	100,00	78,58	4	436.890.802	200,00	25,10

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
7	16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Penanganan pelanggaran perundang-undangan daerah	10	10.752.437.500	9	2.664.527.025	4	2.426.186.395	4	1.437.785.400	100,00	59,26	13	4.102.312.425	130,00	38,15
8	17	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Rasio personil yang dibina	-	1.449.887.400	-	387.843.550	-	500.067.500	43	215.233.916		43	43	603.077.466		42
9	19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Masyarakat yang diberdayakan	750	320.560.000	-	-	360	207.330.800	100	154.005.800	27,78	74,28	100	154.005.800	13,33	48,04

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
10	20	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Persentase penanganan penyakit masyarakat (PEKAT)	3	1.138.377.000	-	144.011.700	100	156.990.000	9	60.160.000	8,80	38,32	9	204.171.700	293,43	17,94
11	27	Program Reformasi Birokrasi	'Persentase pengawasan disiplin aparatur	100	237.003.200	-	30.306.700	100	29.230.000	100	250.000	100,00	0,86	100	30.556.700	100,00	12,89
12	31	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Rencana kerja penegakan perda	100	377.159.600	-	26.469.000	100	48.340.000	100	40.003.800	100,00	82,76	100	66.472.800	100,00	17,62
13	48	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rencana kerja penegakan perda	-	348.069.800	-	55.256.800	-	70.564.900	-	30.564.900	-	43,31	-	85.821.700	-	24,66
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											3.342.675.473						

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)								70,64	53,38	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)								<u>SEDA</u> <u>NG</u>	<u>REND</u> <u>AH</u>	

	3	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI NTB															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg)	3.487	5.873.000.000	-	1.314.775.43 ₄	-	1.779.490.042	74	1.308.268.122		73,52	74	2.623.043.55 ₆	2,11	44,66
2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur (keg)	41	8.290.000.000	-	2.772.251.85 ₀	-	3.104.164.640	70	2.166.536.646		69,79	70	4.938.788.49 ₆	170,23	59,58
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	350.000.000	-	6.000.000	-	43.531.000	-	31.519.200	-	72,41	-	37.519.200	-	10,72

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		35	160.000.000	-	31.485.000	-	61.520.000	-	29.250.000	-	47,55	-	60.735.000	-	37,96
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		45	225.000.000	-	53.143.700	-	24.850.000	-	13.550.000	-	54,53	-	66.693.700	-	29,64
6	08	Program Siaga Darurat Bencana		515	6.577.444.000	-	1.594.178.116	-	23.576.329.888	21	4.998.322.327	21,20	21	21	6.592.500.443	4,12	100,23
7	09	Program Tanggap Darurat Bencana		55	225.000.000	1	80.888.416	1	63.457.500	-	29.194.687	-	46,01	1	110.083.103	1,82	48,93

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
8	22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam		261	7.244.216.000	-	301.889.300	-	620.467.000	-	173.683.000		27,99	-	475.572.300	-	6,56
9	24	Program Siaga Darurat Bencana		5	800.000.000	-	-	-	381.711.330	-	251.174.000	-	65,80	-	251.174.000	-	31,40
10	25	Program Rehabilitas dan Rekonstruksi Penanganan Penanggulangan Bencana		-	325.000.000	-	397.395.900	-	621.275.000	73	456.322.517	-	73,45	73	853.718.417	-	262,68
11	31	Peningkatan Partisipasi dan Kapasitas Masyarakat dalam PRB		40	2.412.849.000	-	487.799.000	-	459.141.500	-	357.354.600	-	77,83	-	845.153.600	-	35,03

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1 2	55	Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana		-	200.000.000	-	45.000.000	-	302.940.000	-	-	-	-	-	45.000.000	-	22,50
1 3	62	Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa kebencanaan		45	225.000.000	-	53.143.700	-	24.850.000	-	22.000.000	88,53	-	-	75.143.700	-	33,40
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											9.837.175.099,00						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												65,86	46,33				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>REND</u> <u>AH</u>	<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>REND</u> <u>AH</u>				

6	BIDANG SOSIAL
1	DINAS SOSIAL

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan (bulan)	17	14.397.317.000	16	2.839.242.74 0	16	3.304.658.100	12	3.185.134.751	75,00	96,38	28	6.024.377.49 1	164,71	41,84
2	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan (%)	11	31.320.035.565	7	4.171.549.04 5	8	4.556.090.300	4	4.373.095.346	50,00	95,98	11	8.544.644.39 1	100,00	27,28

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Aparatur mendapatkan BinteK Manajemen Kasus	3	147.320.000	3	12.750.000	2	16.700.000	2	8.550.000	100,00	51,20	5	21.300.000	166,67	14,46
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Dokumen Renstra, Renja, LAKIP, Lap. Tahunan/Keuangan dan DPA/DPPA-SKPD	10	704.513.277	5	177.115.000	5	227.370.000	2	75.900.000	43,08	33,38	7	253.015.000	71,54	35,91

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
5	07	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kapasitas pengelolaan manajemen aset (%)	3	785.202.000	12	222.310.000	12	132.245.500	9	115.111.500	75,00	87,04	21	337.421.500	700,00	42,97
6	15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin; Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Fakir Miskin; KAT dan PMKS yang dapat penanganan dan pemberdayaan (Keg)	7	19.491.944.600	5	7.081.228.000	7	12.559.283.000	3	11.811.415.886	43,59	94,05	8	18.892.643.886	115,01	96,93

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
7	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Jumlah PMKS dan PSKS yang mendapatkan pelayanan dan penanganan kesos (Keg)	60	12.775.718.100	25	2.638.970.03 4	12	3.304.045.700	9	3.219.920.320	75,00	97,45	34	5.858.890.35 4	56,67	45,86
8	17	Program pembinaan anak terlantar	Meningkatnya pembinaan anak terlantar dalam panti (%)	3,06	18.376.000.000	1,16	3.008.590.48 7	1,76	4.005.522.300	1	4.009.667.300	75,00	100,10	2	7.018.257.78 7	81,05	38,19

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
9	18	Program pembinaan para penyanggah cacat dan trauma	Pembinaan terhadap penyanggah cacat dan trauma	300	750.000.000	#### #	122.555.500	121	354.255.500	27	330.186.069	22,56	93,21	37	452.741.569	12,43	60,37
10	19	Program pembinaan panti asuhan /panti jomblo	Mengkatnya pelayanan dan pembinaan terhadap Lansia Terlantar dalam Balai	130	9.210.200.000	130	1.474.496.647	130	1.848.668.845	80	1.677.089.300	61,54	90,72	210	3.151.585.947	161,54	34,22

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
11	20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana; PSK; narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Eks narapidana; PSK; Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya yang mendapatkan pelayanan Kesos	1250	13.298.437.500	1250	2.776.056.200	250	2.705.957.000	150	2.641.860.900	60,00	97,63	#### #	5.417.917.100	112,00	40,74
12	21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Lembaga Kesejahteraan sosial yang mendapatkan pemberdayaan	5	1.747.340.531	5	444.873.000	4	580.075.600	7	541.119.400	169,87	93,28	12	985.992.400	235,89	56,43

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
13	22	Program Jaminan Sosial	Meningkatnya pelayanan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial	-	528.255.000	-	-	2	302.725.000	2	295.963.800	100,00	97,77	2	295.963.800		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											32.285.014.572,00						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												98,62	93,41				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>TINGG</u> <u>!</u>	<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>TINGG</u> <u>!</u>				

2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR															
1	BIDANG TENAGA KERJA															
1	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI															

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya sistem administrasi perkantoran yang tertib dan lancar	15	15.477.183.000	13	1.195.655.358	15	1.278.374.800	11	1.367.658.364	73,33	106,98	24	2.563.313.722	160	17

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang representatif dalam rangka pelaksanaan tugas yang profesional	7	10.914.212.000	7	1.451.680.275	8	601.189.000	5	3.489.489.554	62,50	580,43	12	4.941.169.829	171,43	45,27
3	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	169.230.000	-	37.670.000	-	35.150.000	43	30.750.000	-	87,48	43	68.420.000	-	40,43

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
4	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-	801.405.000	-	77.502.800	-	81.427.400	45	71.821.400	-	88,20	45	149.324.200		
5	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat	6	2.752.733.000	6	479.136.330	5	454.455.800	3	430.121.284	60,00	94,65	9	909.257.614	150	33

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
6	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		-	788.299.500	-	78.560.400	-	103.369.500	35	102.794.400		99,44	35	181.354.800	-	23,01
7	08	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan		-	9.252.559.972	-	369.911.600	-	569.694.700	48	553.062.000	-	97	48	922.973.600	-	9,98
8	15	Program penempatan dan pengembangan wilayah transmigrasi	Terlaksananya pengembangan wilayah transmigrasi	5225	2.773.166.000	735	511.568.100	150	273.144.300	60	793.091.070	40,00	290,36	795	1.304.659.170	15,22	47,05
9	15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		-	4.076.427.015	-	936.304.200	-	2.647.158.650	61	1.937.890.044	-	73,21	61	2.874.194.244	-	70,51

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
10	16	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Meningkatnya perluasan dan pengembangan kesempatan kerja	#### ##	21.578.965.000	#### #	1.471.055.555	46.157	3.449.267.500	#### ##	3.459.550.076	38,19	100,30	#### #	4.930.605.631	17,21	22,85
11	17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		-	965.740.000	-	375.372.600	-	624.414.450	43	454.141.523	-	72,73	43	829.514.123	#DIV/0!	85,89
12	18	Program Pengawasan Ketenagakerjaan		-	-	-	372.335.100	-	892.852.800	43	861.148.240	-	96,45	43	1.233.483.340	#DIV/0!	#DIV/0!
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											13.551.517.955						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												44,43	142,88				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>REND</u> <u>AH</u>	<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>TINGG</u> <u>!</u>				

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)						
	2	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK														
	1	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	803.015.500	51	412.454.170	#DIV/0!	51	51	412.454.170	#DIV/0!	#DIV/0!
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	-	-	-	819.772.400	48	397.151.984	#DIV/0!	48	48	397.151.984	#DIV/0!	#DIV/0!
3	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-	-	-	-	14.500.000	40	5.750.000	#DIV/0!	40	40	5.750.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	168.678.000	27	45.900.000	#DIV/0!	27	27	45.900.000	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		-	-	-	-	-	18.750.000	42	7.950.000	#DIV/0!	42	42	7.950.000	#DIV/0!	#DIV/0!
6	15	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	-	343.970.000	15	52.500.000	#DIV/0!	15	15	52.500.000	#DIV/0!	#DIV/0!
7	15	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan		-	-	-	-	-	300.235.000	95	284.820.300	#DIV/0!	95	95	284.820.300	#DIV/0!	#DIV/0!
8	16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja		-	-	-	-	-	2.017.023.000	14	280.020.820	#DIV/0!	14	14	280.020.820	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
9	16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		-	-	-	-	-	2.961.290.000	47	1.392.567.850	#DIV/0!	47	47	1.392.567.850	#DIV/0!	#DIV/0!
10	17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		-	-	-	-	-	1.179.667.500	30	351.389.300	#DIV/0!	30	30	351.389.300	#DIV/0!	#DIV/0!
11	18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan		-	-	-	-	-	1.218.825.000	41	502.924.000	#DIV/0!	41	41	502.924.000	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1 2	19	Program Promosi Keshtn Ibu,Bayi & Anak Melalui Kel. Keg. Dimasyarakat		-	-	-	-	-	467.005.000	9	43.110.000	#DIV/0!	9	9	43.110.000	#DIV/0!	#DIV/0!
1 3	20	Program Kebijakan dan Manajemen Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB		-	-	-	-	-	142.240.400	97	137.485.000	#DIV/0!	97	97	137.485.000	#DIV/0!	#DIV/0!
1 4	20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR		-	-	-	-	-	952.698.700	57	538.875.100	#DIV/0!	57	57	538.875.100	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
15	21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba ; PMS termasuk HIV/AIDS		-	-	-	-	-	330.259.650	40	132.345.000	#DIV/0!	40	40	132.345.000	#DIV/0!	#DIV/0!
16	24	Program Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu - PADU		-	-	-	-	-	131.855.000	99	131.155.000	#DIV/0!	99	99	131.155.000	#DIV/0!	#DIV/0!
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											4.716.398.524,00						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												#DIV/0!	41,52				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												#DIV/0!	<u>SANG AT REND AH</u>				
	3	BIDANG PANGAN															
	1	DINAS KETAHANAN PANGAN															

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran	#### ##	6.116.643.000	222	2.517.722.987	111	889.386.000	102	753.716.056	91,89	84,75	324	3.271.439.043	2	53
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		124	7.612.400.000	96	3.620.950.733	80	746.595.000	53	373.666.498	66	50,05	#### #	3.994.617.231	120,16	52,48
3	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Terwujudnya aparatur yang beriman dan bertaqwa	5	72.000.000	2	18.918.000	1	9.998.000	1	4.588.000	100,00	45,89	3	23.506.000	60,00	32,65

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		129	1.785.357.500	4	921.973.378	4	228.562.000	69	157.943.600	##### #	69,10	73	1.079.916.978	56,67	60,49
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		5	259.114.000	3	145.178.511	1	42.900.000	1	29.070.000	100,00	67,76	4,00	174.248.511	80,00	67,25
6	16	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Skor Pola Pangan Harapan	82,50	25.929.579.950	#### #	7.411.936.415	82	4.779.461.600	82	2.214.027.429	100,00	46,32	163	9.625.963.844	198	37
7	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan		72	2.058.778.500	51	818.453.700	10	303.875.000	6	109.464.600	60	36,02	#### #	927.918.300	79,11	45,07
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											3.642.476.183						

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												78,99	57,52				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>TINGG</u> <u>L</u>	<u>REND</u> <u>AH</u>				
	5	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP															
	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	19.058.479.000	100	3.989.057.784	100	4.221.875.193	100	3.916.808.245	100	93	200	7.905.866.029	200	41
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100	35.245.022.000	-	7.667.982.100	100	6.622.370.842	99	5.668.804.657	99,00	85,60	99	13.336.786.757	99	38
3	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-	-	-	203.491.000	100	529.870.300	100	441.276.733	100,00	83	100	644.767.733	#DIV/0!	#DIV/0!
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	899.426.600	100	1.424.403.655	100	1.282.285.294	100	90	100	2.181.711.894	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		33	1.738.829.000	18	26.549.000	6	238.403.200	6	221.004.400	100	92,70	#### #	247.553.400	73	14
6	15	Program pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan		-	31.292.593.000	5	1.960.965.00 0	5	8.849.017.980	28	5.540.506.251	569	63	33	7.501.471.25 1	#DIV/0!	24
7	15	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan		5	10.570.735.000	3	147.961.000	1	381.568.500	1	344.811.704	100	90	4	492.772.704	80	5
8	16	Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		54	4.233.728.000	-	2.425.502.36 3	-	1.326.579.500	53	1.216.115.262	#DIV/0!	92	53	3.641.617.62 5	99	86
9	16	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan		-	58.910.252.000	-	3.021.621.20 0	-	20.045.314.01 5	9	7.144.753.554	#DIV/0!	36	9	10.166.374.7 54	#DIV/0!	17

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
10	17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan		-	30.191.962.000	-	1.696.116.980	-	11.831.191.775	54	10.752.392.052	#DIV/0!	91	54	12.448.509.032	#DIV/0!	41
11	17	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam		438	1.645.797.000	414	1.112.658.830	417	755.522.000	485	713.108.620	116	94	899	1.825.767.450	205	111
12	19	Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDA dan LH		-	408.253.000	100	274.040.000	100	582.234.000	100	499.857.598	100	86	200	773.897.598	#DIV/0!	190
13	20	Program peningkatan pengendalian polusi		86,20	1.173.867.000	10	130.130.300	10	707.675.000	10	612.055.404	100	86	20	742.185.704	23	63
14	20	Program perencanaan dan pengembangan hutan		-	-	-	-	-	375.527.400	2	7.877.400	#DIV/0!	2	2	7.877.400	#DIV/0!	#DIV/0!
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											38.361.657.174						

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiata n (<i>output</i>)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)							
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)								#DIV/0!	75,09								
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)								#DIV/0!	<u>SEDA</u> <u>NG</u>								
	7	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA															
	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				-	945.879.000	-	909.884.882	-	96,19	-	909.884.882				
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	670.449.872	-	116.968.800	-	578.718.800	54	432.234.750	-	74,69	54	549.203.550	-	81,92
3	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-	73.261.200	-	16.800.000	-	25.800.000	-	3.200.000	-	-	-	20.000.000	-	-
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	589.074.000	-	90.000.000	-	63.000.000	-	45.000.000		71,43	-	135.000.000	-	23

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		-	111.112.820	-	18.200.000	-	30.680.000	-	17.700.000	-	57,69	-	35.900.000	-	32,31
6	15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		-	3.565.681.471	-	364.052.250	-	901.489.800	36	1.215.510.353		134,83	36	1.579.562.603		44,30
7	16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		-	3.798.064.678	-	440.576.140	-	549.577.000	267	1.296.254.600		235,86	267	1.736.830.740		45,73
8	17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa		-	2.852.015.093	-	372.306.000	-	2.848.440.050	8	708.258.375		24,86	8	1.080.564.375	-	37,89

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
9	18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		-	9.532.779.815	-	1.262.596.410	-	1.766.421.718	42	2.070.430.517		117,21	42	3.333.026.927	-	34,96
10	19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan		-	6.167.806.370	-	1.156.050.000	-	2.622.973.000	28	2.421.092.997		92,30	28	3.577.142.997		58,00
11	20	Program Penataan Administrasi Kependudukan		-	4.310.081.796	-	-	-	2.342.131.232	41	2.059.193.050	-	87,92	41	2.059.193.050		47,78
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											11.178.759.524						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												110,30	99,52				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>TINGG</u> <u>!</u>	<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>TINGG</u> <u>!</u>				
	9	BIDANG PERHUBUNGAN															
	1	DINAS PERHUBUNGAN															

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	-	2.181.549.380	51	1.105.114.881	#DIV/0!	51	51	1.105.114.881	#DIV/0!	#DIV/0!
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	-	-	-	-	459.900.000	70	320.407.585	#DIV/0!	70	70	320.407.585	#DIV/0!	#DIV/0!
3	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-	-	-	-	-	258.313.000	7	16.950.000	#DIV/0!	7	7	16.950.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	-	98.608.800	79	77.897.050	#DIV/0!	79	79	77.897.050	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		-	-	-	-	-	35.370.300	64	22.480.000	#DIV/0!	64	64	22.480.000	#DIV/0!	#DIV/0!
6	15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		-	-	-	-	-	651.197.367	37	242.056.143	#DIV/0!	37	37	242.056.143	#DIV/0!	#DIV/0!
7	17	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		-	-	-	-	-	2.195.730.900	25	556.337.762	#DIV/0!	25	25	556.337.762	#DIV/0!	#DIV/0!
8	18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		-	-	-	-	-	3.603.968.000	17	621.839.800	#DIV/0!	17	17	621.839.800	#DIV/0!	#DIV/0!
9	19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		-	-	-	-	-	2.851.398.900	44	1.262.373.208	#DIV/0!	44	44	1.262.373.208	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
10	21	Program pengembangan transportasi udara		-	-	-	-	-	49.507.353	32	15.820.900	#DIV/0!	32	32	15.820.900	#DIV/0!	#DIV/0!
11	22	Program Pengembangan Transportasi Laut		-	-	-	-	-	667.311.200	13	88.152.386	#DIV/0!	13	13	88.152.386	#DIV/0!	#DIV/0!
12	26	Program Peningkatan Pengendalian Polusi		-	-	-	-	-	60.900.000	16	9.684.000	#DIV/0!	16	16	9.684.000	#DIV/0!	#DIV/0!
13	27	Program Peningkatan SDM Perhubungan Darat		-	-	-	-	-	61.400.000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
14	28	Program Peningkatan Manajemen Transportasi Darat		-	-	-	-	-	84.342.000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											4.339.113.714,80						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												#DIV/0!	30,42				

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program <i>(outcome)</i> /Kegiata n <i>(output)</i>	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)						
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)								#DIV/0!	SANG AT REND AH							
	10	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA														
	1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK														
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	2.063.759.915	42	874.417.905	-	42,37	42	874.417.905	-	-
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	-	-	-	1.204.056.240	15	180.048.949	-	14,95	15	180.048.949	-	-
3	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-	-	-	-	79.349.900	84	66.362.000	-	83,63	84	66.362.000	-	-

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	-	117.180.200	16	18.950.000	-	16,17	16	18.950.000	-	-
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		-	-	-	-	-	30.358.200	-	6.600.000	-	21,74	-	6.600.000	-	-
6	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		-	2.700.000.000	-	-	-	1.395.066.340	-	428.246.360	-	30,70	-	428.246.360	-	15,86
7	16	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika		-	-	-	-	-	169.630.400	-	35.859.800	-	21,14	-	35.859.800	-	-

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
8	17	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media		-	-	-	-	-	755.900.000	-	17.250.000	-	2,28	-	17.250.000	-	-
9	18	Program pengembangan data/ informasi/ statistik daerah		-	-	-	-	-	484.113.900	-	185.453.976	-	38,31	-	185.453.976	-	-
10	20	Program Fasilitasi Komisi Informasi		-	-	-	-	-	499.069.700	-	329.600.000	-	66,04	-	329.600.000	-	-
11	21	Program optimalisasi layanan e-procurement		-	-	-	-	-	931.939.520	23	442.082.244	-	47,44	23	442.082.244	-	-
12	22	Program Optimalisasi Keamanan Informasi		-	-	-	-	-	228.666.699	-	61.720.950	-	27	-	61.720.950	-	-

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
13	23	Program Fasilitas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)		-	-	-	-	-	833.383.900	-	572.397.200	-	68,68	-	572.397.200	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											3.218.989.384						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												46,23	37,58				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>REND</u> <u>AH</u>	<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>REND</u> <u>AH</u>				
	11	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH															
	1	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		#### ##	11.679.964.299	#### #	2.605.295.06 0	2.79 2	1.482.183.178	2.778	1.427.064.404	99,50	96,28	#### #	4.032.359.46 4	80,20	34,52
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	345	1.338.120.000	208	721.251.000	96	5.769.967.500	71	5.809.471.121	73,96	100,68	279	6.530.722.12 1	80,87	488,05

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
3	03	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	120	307.000.000	72	60.150.000	24	35.242.400	21	28.992.400	87,50	82,27	93	89.142.400	77,50	29,04
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatkan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan SKPD	1.030	4.065.859.266	747	1.399.562.500	222	749.348.600	158	725.090.600	71,17	96,76	905	2.124.653.100	87,86	52,26

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Manajemen & pelaporan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	100	159.780.000	60	47.065.000	20	17.005.000	20	14.505.000	100,00	85,30	80	61.570.000	80,00	38,53
6	15	Program Penciptaan Iklim Usaha UKM yang Kondusif	Meningkatnya ketersediaan program pembinaan dan pengembangan KUKM	20	1.833.600.000	12	930.699.100	6	562.142.000	6	560.465.400	100,00	99,70	18	1.491.164.500	90,00	81,32

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
7	16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM	1.600	39.003.390.462	968	13.547.593.042	318	7.608.297.700	232	7.239.759.577	72,96	95,16	#### #	20.787.352.619	75,00	53,30
8	17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Sistem Pendukung Usaha UMKM	3.465	11.430.707.772	#### #	9.693.598.450	5.565	4.247.164.500	5.565	4.105.749.900	100,00	96,67	#### #	13.799.348.350	207,13	120,72
9	18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	2.650	12.466.221.590	#### #	3.741.991.700	1.936	3.347.367.322	1.936	3.341.387.031	100,00	99,82	#### #	7.083.378.731	141,40	56,82

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											23.252.485.433						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												98,94	95,59				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SANG AT TINGG !</u>	<u>SANG AT TINGG !</u>				
	12	BIDANG PENANAMAN MODAL															
	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran administrasi perkantoran (%)	100	5.051.451.200	100	2.875.803.606	100	886.904.700	61	533.855.081	61,01	60,19	161	3.409.658.687	161,01	67,50
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kelancaran tugas aparatur (%)	100	1.789.981.500	100	1.949.272.965	100	363.731.500	79	287.397.047	79,28	79,01	179	2.236.670.012	179,28	124,95
3	03	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kompetensi aparatur (%)	100	324.852.000	100	86.336.500	100	31.650.000	79	24.384.000	79,01	77,04	179	110.720.500	179,01	34,08

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kelancaran pelaporan capaian kinerja dan keuangan (%)	100	561.781.100	100	288.958.275	100	127.513.500	80	115.867.900	79,67	90,87	180	404.826.175	179,67	72,06
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen asset (Dok)	12	129.738.600	9	77.202.700	2	20.250.000	1	8.250.000	50,00	40,74	10	85.452.700	83,33	65,87
6	15	Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Kebijakan investasi (Dok)	5	9.677.246.400	3	4.182.770.858	1	2.017.365.600	1	894.369.786	100,00	44,33	4	5.077.140.644	80,00	52,46
7	16	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Laju investasi (%)	13,5	5.891.595.200	-1	1.628.458.304	11,5	1.567.876.400	-	1.011.201.436	-	64,49	(1)	2.639.659.740	-	44,80

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
8	17	Program penyiapan potensi sumber daya; sarana dan prasarana daerah	Kebijakan potensi penanaman modal (Dok)	7	571.285.000	3	385.175.000	1	50.142.500	1	50.000.000	100,00	99,72	4	435.175.000	57,14	76,17
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											2.925.325.250						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												83,61	65,77				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>TINGG</u> <u>I</u>	<u>REND</u> <u>AH</u>				
	13	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA															
	1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Kegiatan Administrasi	10	758.319.650	10	1.208.472.58 7	10	1.623.651.923	40	2.112.104.785	400,00	130,08	50	3.320.577.37 2	500,00	437,89

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana yang Memadai	4	356.225.000	4	1.552.373.075	4	486.450.000	3	606.763.905	75,00	124,73	7	2.159.136.980	175,00	606,12
3	03	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya Apratur yang Profesional	2	125.762.500	1	29.070.000	1	40.200.000	1	147.315.500	100,00	366,46	2	176.385.500	100,00	140,25
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Tersusunnya Laporan yang Akuntabel dan Transparan	1	48.000.000	1	216.290.000	1	42.800.000	1	370.359.700	100,00	865,33	2	586.649.700	200,00	##### #

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertatanya Asset/Barang Milik Daerah pada Dispora NTB	1	30.000.000	1	17.349.000	1	27.230.000	1	23.844.500	100,00	87,57	2	41.193.500	200,00	137,31
6	15	Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda	Terselenggaranya Pembinaan Kepemudaan	7	2.217.435.000	7	854.280.500	7	1.978.476.000	5	3.322.062.700	71,43	167,91	12	4.176.343.200	171,43	188,34
7	17	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Terciptanya Pemuda yang Mandiri dan Sejahtera	1	330.000.000	-	-	1	300.000.000	0	132.190.000	29,33	44,06	0	132.190.000	29,33	40,06

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
8	18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Tercegahnya Penyalahgunaan Narkoba	1	347.000.000	1	47.090.000	1	308.800.000	1	504.760.000	100,00	163,46	2	551.850.000	200	159
9	19	Program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga	Terlaksananya pembinaan Organisasi Kepemudaan	2	304.000.000	2	119.032.000	2	274.110.000	1	472.657.492	50,00	172,43	3	591.689.492	150	195
10	20	Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga	Terlaksananya Kegiatan dan Kompetisi Olahraga	3	3.625.000.000	3	10.065.834.660	3	2.713.273.000	2	3.738.940.032	66,67	137,80	5	13.804.774.692	166,67	380,82

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
11	21	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Tersedianya Sarana dan Prasarana Olahraga yang Memadai	2	2.420.000.000	2	1.065.459.000	2	1.643.753.137	2	3.574.002.300	100,00	217,43	4	4.639.461.300	200,00	191,71
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											15.005.000.914						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												110,12	226,78				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>TINGG</u> <u>I</u>	<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>TINGG</u> <u>I</u>				
	3	URUSAN PILIHAN															
	1	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN															
	1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN															

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran (%)	#### ##	15.818.915.000	90,0 0	6.366.467.26 0	12,0 0	4.033.736.050	9	3.654.580.113	75,00	90,60	99	10.021.047.3 73	99,00	63,35
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur (%)	100	23.050.797.000	100	8.880.067.97 3	100	2.965.236.450	75	2.647.866.126	75,00	89,30	175	11.527.934.0 99	175,00	50,01
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur (%)	#### ##	348.905.000	#### #	101.714.500	262, 00	152.956.000	69	152.067.496	26,19	99,42	330	253.781.996	329,63	72,74
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana program (Dokumen)	5,00	1.045.160.000	7,00	326.217.300	7,00	106.095.000	7	106.094.300	100,00	100,00	14	432.311.600	280,00	41,36

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset (dokumen)	1	671.997.000	10	353.028.400	12	139.505.000	9	131.029.000	75,00	93,92	19	484.057.400	##### #	72,03
6	15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		13	1.501.420.000	13	283.783.900	13	323.300.000	13	320.625.000	100,00	99,17	26	604.408.900	200,00	40,26
7	16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Terlaksananya pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan	25,00	6.478.064.000	35,00	1.734.444.250	25,00	1.958.187.000	10	1.835.815.900	40,00	93,75	45	3.570.260.150	180,00	55,11

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
8	18	Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut	Meningkatnya pengelolaan pesisir yang berbasis mitigasi bencana	13,00	6.685.821.000	13,00	2.627.009.805	13,00	1.053.759.800	8	1.016.199.300	61,54	96,44	21	3.643.209.105	161,5	54,5
9	20	Program pengembangan budidaya perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	#### ##	44.538.302.200	-	17.747.200.576	-	3.398.883.000	-	3.286.870.271	-	96,70	-	21.034.070.847	-	47,23
10	21	Program pengembangan perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	#### ##	35.811.273.000	50	15.015.068.430	50	4.607.946.600	49	4.565.928.750	97,44	99,09	99	19.580.997.180	0,04	54,68

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1 1	23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	170	12.534.977.000	170	8.704.692.98 3	170	1.009.229.000	35	821.212.003	20,42	81,37	205	9.525.904.98 6	120,42	75,99
1 2	23	Program pengembangan kapasitas BLPMHP Mataram	Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai tambah produk olahan hasil perikanan	170	1.048.669.000	170	376.788.500	170	186.700.000	340	176.362.250	200,00	94,46	510	553.150.750	300,00	52,75
1 3	25	Program pengembangan aplikasi teknologi data dan informasi	Tersedianya data dan informasi kelautan dan perikanan	20	462.580.000	12	158.710.990	4	225.770.000	3	214.660.000	74,91	95,08	15	373.370.990	74,98	80,71

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
14	26	Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Tersedianya data dan informasi kelautan dan perikanan	20,00	787.834.000	12,00	54.935.000	4,00	86.740.000	3	86.218.000	75,00	99,40	15	141.153.000	75,00	17,92
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											19.015.528.509,00						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												98,21	96,57				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>TINGG</u> <u>!</u>	<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>TINGG</u> <u>!</u>				
	2	BIDANG PARIWISATA															
	1	DINAS PARIWISATA															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	-	2.528.925.220	45	1.128.220.937	#DIV/0!	45	45	1.128.220.937	#DIV/0!	#DIV/0!
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	-	-	-	-	655.860.000	36	233.132.554	#DIV/0!	36	36	233.132.554	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	-	-	-	-	55.500.000	30	16.500.000	#DIV/0!	30	30	16.500.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	-	629.145.000	65	408.892.238	#DIV/0!	65	65	408.892.238	#DIV/0!	#DIV/0!
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		-	-	-	-	-	30.700.000	52	16.075.000	#DIV/0!	52	52	16.075.000	#DIV/0!	#DIV/0!
6	15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		-	-	-	-	-	16.191.456.725	54	8.819.040.984	#DIV/0!	54	54	8.819.040.984	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
7	16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		-	-	-	-	-	13.943.419.055	18	2.462.900.897	#DIV/0!	18	18	2.462.900.897	#DIV/0!	#DIV/0!
8	17	Program Pengembangan Kemitraan		-	-	-	-	-	2.414.398.000	14	342.886.500	#DIV/0!	14	14	342.886.500	#DIV/0!	#DIV/0!
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											13.427.649.110,00						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												#DIV/0!	40,56				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												#DIV/0!	<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>REND</u> <u>AH</u>				
	3	BIDANG PERTANIAN															
	1	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran (%)	100	4.487.395.876	100	3.569.234.700	100	4.492.189.887	95	2.874.619.435	95,00	63,99	195	6.443.854.135	195,00	143,60
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur(%)	100	11.008.189.312	100	6.818.661.339	100	9.978.621.463	81	5.085.541.952	81,00	50,96	181	11.904.203.291	181,00	108,14

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur(%)	100	469.684.600	100	163.304.733	100	1.806.766.000	60	1.267.044.650	60,00	70,13	160	1.430.349.383	160,00	304,53
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana Program(Dok)	8	334.945.500	8	238.160.000	10	296.002.000	5	128.600.500	50,00	43,45	13	366.760.500	162,50	109,50
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset(Dok)	1	240.430.810	1	292.719.254	1	215.106.600	-	110.212.288	-	51,24	1	402.931.542	100,00	167,59
6	15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Pertumbuhan petani pelaku usaha(%)	15	4.864.927.540	17	4.988.244.433	19	4.576.636.400	13	2.777.322.946	69,79	60,68	31	7.765.567.379	203,61	159,62

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
7	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)	Produk Olahan Pertanian(Jenis)	2	17.253.493.030	1	9.023.259.837	2	15.566.621.200	1	7.836.612.061	50,00	50,34	2	16.859.871.898	100,00	97,72
8	17	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Informasi produk pertanian dan olahannya yang dipromosikan(Dok)	6	319.971.750	6	519.550.313	6	304.735.000	5	226.829.559	83,33	74,44	11	746.379.872	183,33	233,26

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
9	18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Petani dan Petugas yang memahami teknologi sarana dan perkebunan (Orang)	33	4.518.854.560	-	573.250.250	35	3.545.715.600	31	2.848.906.100	88,59	80,35	31	3.422.156.350	93,96	75,73
10	19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produksi Pertanian Tanaman Pangan(Ton)		269.382.000		227.598.200		72.120.308.600	-	28.167.682.200	-	39,06	-	28.395.280.400		10.541

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
11	20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Pertumbuhan Penyuluh Terlatih(Orang)	165	329.205.690	120	1.483.538.079	200	355.302.900	40	52.281.200	20,00	14,71	160	1.535.819.279	96,97	466,52
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											51.375.652.891						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												54,34	54,49				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>REND</u> <u>AH</u>	<u>REND</u> <u>AH</u>				
	3	BIDANG PERTANIAN															
	2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	4.935.815	-	632.172	-	106.729.197	21	22.761.690		21,33	21	23.393.862		473,96
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	32.386.142	-	3.162.152	-	4.706.790	21	3.867.329		82,16	21	7.029.481		22

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	646.020	-	121.638	-	106.800	55	144.085		134,91	55	265.723		41,13
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	7.658.601	-	1.939.596	-	1.893.279	50	2.425.714		128,12	50	4.365.310		57,00
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		-	925.488	-	68.340	-	255.040	50	207.823		81,49	50	276.163		29,84
6	16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian / Perkebunan)		-	3.353.603	-	510.644	-	458.758	73	675.941	-	147,34	73	1.186.585	-	35

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
7	21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		-	4.147.674	-	687.376	-	644.275	90	1.181.605		183,40	90	1.868.982		45,06
8	22	Program peningkatan produksi hasil peternakan		-	62.671.217	-	7.347.697	-	14.062.671	68	22.884.125		162,73	68	30.231.822		48,24
9	23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan		-	5.487.990	-	931.406	-	702.535	30	756.135		107,63	30	1.687.541		30,75
10	24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		-	2.309.174	-	325.746	-	312.600	91	595.059	-	190	91	920.805	-	40
11	25	Program Peningkatan Kapasitas UPTD		-	5.076.655	-	1.043.009	-	807.235	86	1.497.480		185,51	86	2.540.488		50,04
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											56.996.985						

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiata n (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												83,00	146,34				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>TINGG !</u>	<u>SANG AT TINGG !</u>				
	5	BIDANG ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL															
	2	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelaksanaan operasional rumah tangga kantor	13	1.159.175.000	13	2.770.843.046	11	1.060.302.750	4	871.144.917	36,36	82,16	17	3.641.987.963	130,77	314,19
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur	75	3.253.957.000	-	2.138.301.969	-	1.125.121.000	-	1.028.986.807	#DIV/0!	91,46	-	3.167.288.776	-	97,34

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas dan profesionalis-me aparat	550	785.889.000	120	298.579.700	102	101.634.700	60	62.754.660	58,82	61,75	180	361.334.360	32,73	45,98
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan	56	655.566.000	52	345.273.900	12	126.697.500	9	121.018.500	75,00	95,52	61	466.292.400	108,93	71,13
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya penata usahaan keuangan dan manajemen aset	5	385.842.000	3	123.428.000	1	20.850.000	1	19.266.100	100,00	92,40	4	142.694.100	80,00	36,98

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
6	15	Program Pembinaan dan Pengawasan bidang pertambangan	Terwujudnya pengelolaan usaha pertambangan yang baik dan benar	1	3.208.523.000	3	1.867.320.608	1	871.520.400	1	847.503.247	100,00	97,24	4	2.714.823.855	400,00	84,61
7	17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Terpenuhinya kebutuhan energi dan listrik yang memadai	75,00	30.085.929.000	78	31.534.601.071	72,67	5.939.301.800	70	5.519.293.555	96,33	92,93	148	37.053.894.626	197,19	123,16
8	18	Program pengembangan dan pengelolaan sumber air tanah	Kebutuhan air baku	3.000	19.711.440.660	#### #	13.732.693.418	600	2.635.420.200	30	2.461.544.765	5,00	93,40	#### #	16.194.238.183	115,30	82,16

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
9	19	Program pengembangan dan pengelolaan energi dan sumber daya mineral	Teraktualisasinya pengelolaan ESDM pada tataran teknis maupun aspek administratif	10	968.024.000	3	873.866.152	2	436.140.400	2	364.058.534	100,00	83,47	5	1.237.924.686	50,00	127,88

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
10	22	Program pencegahan kerusakan lingkungan	Sistem pengelolaan lingkungan berbasis mitigasi bencana dan perlindungan kawasan konservasi	-	2.507.347.000	-	1.352.308.587	-	1.416.983.400	-	1.296.116.450	-	91,47	-	2.648.425.037	-	105,63
11	24	Program pengembangan dan pemanfaatan energi	infrastruktur listrik berbasis EBT tersedia	1	28.367.364.000	2	30.424.503.469	3	4.267.508.850	2	3.919.656.970	66,67	91,85	4	34.344.160.439	400,00	121,07
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											16.511.344.505						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												101,08	86,91				

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiata n (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SANG AT TINGG !</u>	<u>TINGG !</u>				
	6	BIDANG PERDAGANGAN															
	1	DINAS PERDAGANGAN															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara	13	1.133.266.000	13	1.225.995.12 3	13	873.584.643	9	1.176.307.561	69,23	134,65	22	2.402.302.68 4	169,23	211,98
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		7	557.000.000	10	719.294.542	10	300.897.000	84	650.725.344	843,19	216,26	94	1.370.019.88 6	##### #	245,96
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		2	182.000.000	2	74.487.900	2	101.900.000	1	98.904.000	50,00	97,06	3	173.391.900	150,00	95,27

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		5	658.500.000	5	446.680.000	5	381.210.600	4	408.694.000	80,00	107,21	9	855.374.000	180,00	129,90
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	-	1	79.000.000	1	15.600.000	1	39.900.000	1	24.120.000	100,00	60,45	2	39.720.000	200,00	50,28
6	15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		5	797.158.745	5	321.584.750	5	932.100.000	4	1.078.194.500	80,00	115,67	9	1.399.779.250	180,00	175,60
7	16	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional		3	325.000.000	3	146.992.000	83	275.000.000	82	267.235.000	98,82	97,18	85	414.227.000	##### #	127,45

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
8	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Perkembangan nilai ekspor	14	1.770.578.000	14	205.788.000	14	1.212.784.000	47	1.102.540.000	339,14	90,91	61	1.308.328.000	439,14	73,89
9	18	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Perdagangan DN/ Lelang meningkat	10	2.675.000.000	10	1.734.419.955	10	1.725.810.000	6	1.528.697.797	60,34	88,58	16	3.263.117.752	160,34	121,99
10	19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan		2	4.081.000.000	2	3.176.544.250	2	7.331.600.000	2	9.996.458.405	100,00	136,35	4	13.173.002.655	200,00	322,79
11	20	Program pembinaan dan pengembangan usaha daerah		6	2.015.000.000	6	792.375.451	6	1.565.432.156	3	1.280.772.161	50,00	81,82	9	2.073.147.612	150,00	102,89
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											17.612.648.768						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												100,96	122,66				

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program <i>(outcome)</i> //Kegiata n <i>(output)</i>	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SANG AT TINGG !</u>	<u>SANG AT TINGG !</u>				
	7	BIDANG PERINDUSTRIAN															
	1	DINAS PERINDUSTRIAN															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	786.843.000	-	-	-	786.843.000	74	582.482.286	-	74,03	74	582.482.286	-	74,03
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	434.940.000	-	-	-	573.040.000	77	441.553.994	-	77,05	77	441.553.994	-	101,52
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	37.950.000	-	-	-	56.135.000	-	41.605.000	-	74,12	-	41.605.000	-	109,63

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	389.639.000	-	-	-	389.639.000	-	166.650.000	-	42,77	-	166.650.000	-	42,77
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		-	19.200.000	-	-	-	19.200.000	-	13.550.000	-	70,57	-	13.550.000	-	70,57
6	15	Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi		-	232.120.000	-	-	-	232.120.000	-	207.152.124	-	89,24	-	207.152.124	-	89,24
7	16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		-	1.812.690.000	-	-	-	1.812.690.000	-	607.154.700	-	33,49	-	607.154.700	-	33,49

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
8	17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri		-	6.353.510.000	-	-	-	6.353.510.000	-	2.548.871.950	-	40,12	-	2.548.871.950	-	40,12
9	19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial		-	93.390.000	-	-	-	93.390.000	-	85.999.700	-	92,09	-	85.999.700	-	92,09
10	20	Program pembinaan dan pengembangan usaha daerah		-	481.999.152	-	-	-	481.999.152	-	91.693.000	-	19,02	-	91.693.000	-	19,02
11	21	Program Pengembangan dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP		-	113.250.000	-	-	-	113.250.000	-	93.440.000	-	82,51	-	93.440.000	-	82,51

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1 2	22	Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemas		-	281.189.248	-	-	-	281.189.248	-	144.670.500	-	51,45	-	144.670.500	-	51,45
1 3	23	Program pembinaan dan pengembangan usaha daerah		-	521.790.000	-	-	-	521.790.000	24	284.090.700	-	54,45	24	284.090.700	-	54,45
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											5.308.913.954						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												67,81	59,06				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SEDA</u> <u>NG</u>	<u>REND</u> <u>AH</u>				
	4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG															
	1	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN															
	3	SEKRETARIAT DAERAH															
	1	BIRO UMUM															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	66.396.144.271	-	47.834.695.958	-	14.090.555.050	21	13.118.100.607		93,10	21	60.952.796.565		91,80

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	110.718.102.590	-	28.825.606.773	-	9.155.000.150	26	8.337.431.377		91,07	26	37.163.038.150		33,57
3	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-	2.041.380.000	-	2.638.215.612	-	95.800.000	-	13.795.000		14,40	-	2.652.010.612		129,91
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan		-	1.134.519.400	-	830.363.300	-	233.758.000	-	229.736.300		98,28	-	1.060.099.600		93,44
5	16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah		-	18.346.580.070	-	9.880.893.794	-	3.043.135.300	-	2.639.179.053		86,73	-	12.520.072.847		68,24

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
6	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		-	3.805.000.000	-	3.617.111.228	-	258.000.000	2	263.369.513		102,08	2	3.880.480.741		101,98
7	38	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		-	1.842.836.000	-	1.190.050.000	-	375.760.000	1	375.760.000		100,00	1	1.565.810.000		84,97
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											24.977.371.850						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												104,87	87,22				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>TINGG</u> <u>!</u>	<u>TINGG</u> <u>!</u>				
	2	BIRO ORGANISASI															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	-	642.246.500	59	380.080.866	#DIV/0!	59	59	380.080.866	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	-	-	-	-	586.077.150	32	185.935.945	#DIV/0!	32	32	185.935.945	#DIV/0!	#DIV/0!
3	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-	-	-	-	-	40.000.000	-	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	-	89.100.000	76	67.934.200	#DIV/0!	76	76	67.934.200	#DIV/0!	#DIV/0!
5	07	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah		-	-	-	-	-	33.150.000	57	19.052.900	#DIV/0!	57	57	19.052.900	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
6	27	Program Penataan Daerah otonomi Baru		-	-	-	-	-	688.265.650	45	308.924.000	#DIV/0!	45	45	308.924.000	#DIV/0!	#DIV/0!
7	37	Program pengembangan sistem analisis jabatan dan pendayagunaan aparatur		-	-	-	-	-	934.685.900	39	368.046.403	#DIV/0!	39	39	368.046.403	#DIV/0!	#DIV/0!
8	76	Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		-	-	-	-	-	461.152.900	68	313.737.500	#DIV/0!	68	68	313.737.500	#DIV/0!	#DIV/0!
9	87	Program peningkatan pelayanan publik		-	-	-	-	-	413.522.000	52	215.703.000	#DIV/0!	52	52	215.703.000	#DIV/0!	#DIV/0!
10	88	Program Evaluasi Kinerja SKPD		-	-	-	-	-	130.945.000	9	11.275.000	#DIV/0!	9	9	11.275.000	#DIV/0!	#DIV/0!
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											1.870.689.814,00						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												#DIV/0!	43,89				

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata n	Indikator Kinerja Program (<i>outcome</i>)/Kegiata n (<i>output</i>)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												#DIV/0!	SANG AT REND AH				
	3	BIRO HUKUM															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		132	8.587.221.000	132	353.943.812	132	694.123.650	90	572.514.187	68,18	82,48	222	926.457.999	168,18	10,79
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	1.693.200.000	24	99.341.155	24	269.663.000	91	244.101.632	377,17	90,52	115	343.442.787		20,28
3	05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		-	-	-	-	42	3.150.000	-	2.600.000	-	82,54	-	2.600.000		
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan		-	225.000.000	2	45.000.000	3	75.000.000	3	74.550.000	100,00	99,40	5	119.550.000	#DIV/0!	53,13

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
5	07	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah		-	18.600.000	12	5.400.000	12	17.400.000	11	8.100.000	91,67	46,55	23	13.500.000		72,58
6	26	Program Penataan Peraturan Per UU an		4.380	11.250.000.000	#### #	4.157.334.96 6	925	2.804.695.350	903	2.500.789.561	97,62	89,16	#### #	6.658.124.52 7	52,81	59,18
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											3.402.655.380						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												113,83	83,37				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												SANG AT TINGG I	TINGG I				
	4	BIRO PEMERINTAHAN															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran (bulan)		1.020.000.000		704.116.044		607.363.400	-	397.478.878		65,44	-	1.101.594.92 2		108,00

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang dimanfaatkan (%)		200.000.000		107.392.950		124.390.000	-	103.730.000		83,39	-	211.122.950		105,56
3	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun (%)		67.500.000		107.654.000		119.200.000	-	79.950.000	#DIV/0!	67,07	-	187.604.000		277,93

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
4	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah				2	267.265.600	2	240.451.500	94	227.046.534	##### #	94,43	96	494.312.134		
5	27	Program Penataan Daerah otonomi Baru			600.000.000		305.193.420		494.496.200	39	193.253.262	-	39,08	39	498.446.682	-	83,07
6	29	Program Peningkatan Tertib Administrasi			1.303.638.500		1.413.499.099		1.641.617.700	-	1.048.459.684		63,87	-	2.461.958.783		188,85
7	30	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan		1	450.000.000	1	438.398.400	1	444.640.000	1	354.843.100	100,00	79,80	2	793.241.500	200,00	176,28
8	41	Program Perbaikan Sistem dan Kearsipan	Tersedianya dataArsip kantor yang baik	12	25.000.000	12	12.989.000	12	13.849.200	9	5.940.000	75,00	42,89	21	18.929.000	175,00	75,72

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
9	53	Program pengelolaan dan Pengembangan Kapasda	Terlaksananya Koordinasi, Konsultasi Seminar dll pengembangan Kapasda	12	250.000.000		356.850.400	12	116.552.000	6	16.450.200	50,00	14,11	6	373.300.600	50,00	149,32
10	85	Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Asset	Tersedianya data asset BMD yang tertata denga baik	3	20.400.000	3	18.600.000	3	20.400.000	2	7.300.000	66,67	35,78	5	25.900.000	166,67	126,96
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											2.434.451.658						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												73,56	57,69				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SEDA</u> <u>NG</u>	<u>REND</u> <u>AH</u>				
	5	BIRO PEREKONOMIAN															

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	-	314.759.600	66	206.867.536	#DIV/0!	66	66	206.867.536	#DIV/0!	#DIV/0!
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	-	-	-	-	466.118.300	79	368.615.900	#DIV/0!	79	79	368.615.900	#DIV/0!	#DIV/0!
3	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	-	79.454.000	39	31.139.700	#DIV/0!	39	39	31.139.700	#DIV/0!	#DIV/0!
4	07	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah		-	-	-	-	-	10.504.200	56	5.847.000	#DIV/0!	56	56	5.847.000	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
5	78	Program peningkatan dan pengembangan produksi daerah		-	-	-	-	-	1.095.000.500	54	586.394.700	#DIV/0!	54	54	586.394.700	#DIV/0!	#DIV/0!
6	79	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan, sistem dan prosedur dan pengawasan		-	-	-	-	-	611.946.800	40	242.632.378	#DIV/0!	40	40	242.632.378	#DIV/0!	#DIV/0!
7	80	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		-	-	-	-	-	915.119.600	52	472.219.650	#DIV/0!	52	52	472.219.650	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
8	81	Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		-	-	-	-	-	180.000.000	71	127.536.700	#DIV/0!	71	71	127.536.700	#DIV/0!	#DIV/0!
9	83	Program pengembangan data dan informasi perekonomian		-	-	-	-	-	810.967.000	58	469.349.100	#DIV/0!	58	58	469.349.100	#DIV/0!	#DIV/0!
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											2.510.602.664						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												#DIV/0!	54,18				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												#DIV/0!	<u>REND</u> <u>AH</u>				
6	BIRO BINA ADMINISTRASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN LPBJP																
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	4.794.250.719	-	2.542.773.176	-	816.670.000	-	753.055.574		92,21	-	3.295.828.750		68,75
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	738.555.318	-	252.980.761	-	187.807.600	-	220.419.697		117,36	-	473.400.458		64,10

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		-	39.487.000	-	14.500.000	-	15.000.000	-	-	-	-	-	14.500.000		36,72
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	238.754.024	-	151.865.000	-	62.120.000	-	57.605.000		92,73	-	209.470.000		87,73
5	17	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		-	308.009.905	-	182.903.000	-	105.700.000	-	102.795.000		97,25	-	285.698.000		92,76

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
6	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		-	11.042.716.420	-	5.790.382.205	-	2.726.936.000	-	2.687.479.945		98,55	-	8.477.862.150		76,77
7	25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		-	1.564.198.448	-	637.602.545	-	153.210.000	6	141.946.100		92,65	6	779.548.645		49,84
8	86	Program Percepatan Pembangunan		-	39.487.000	-	-	-	675.263.400	1	688.386.667		101,94	1	688.386.667		##### #
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											4.651.687.983						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												82,12	76,80				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>TINGG</u> ↓	<u>TINGG</u> ↓				
	7	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT															

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	-	783.089.150	53	418.230.600	#DIV/0!	53	53	418.230.600	#DIV/0!	#DIV/0!
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	-	-	-	-	96.750.000	65	62.423.700	#DIV/0!	65	65	62.423.700	#DIV/0!	#DIV/0!
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		-	-	-	-	-	48.500.000	35	17.092.000	#DIV/0!	35	35	17.092.000	#DIV/0!	#DIV/0!
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	-	99.000.100	51	50.164.400	#DIV/0!	51	51	50.164.400	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
5	07	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah		-	-	-	-	-	72.500.000	85	61.730.000	#DIV/0!	85	85	61.730.000	#DIV/0!	#DIV/0!
6	31	Program peningkatan pelayanan keagamaan		-	-	-	-	-	7.795.179.750	37	2.893.468.175	#DIV/0!	37	37	2.893.468.175	#DIV/0!	#DIV/0!
7	33	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		-	-	-	-	-	192.710.000	40	77.371.000	#DIV/0!	40	40	77.371.000	#DIV/0!	#DIV/0!
8	34	Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan		-	-	-	-	-	263.000.000	21	56.358.800	#DIV/0!	21	21	56.358.800	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
9	35	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan		-	-	-	-	-	103.665.000	10	10.360.000	#DIV/0!	10	10	10.360.000	#DIV/0!	#DIV/0!
10	38	Program peningkatan peran serta kepemudaan		-	-	-	-	-	265.000.000	10	27.232.000	#DIV/0!	10	10	27.232.000	#DIV/0!	#DIV/0!
11	69	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan		-	-	-	-	-	79.000.000	39	30.938.900	#DIV/0!	39	39	30.938.900	#DIV/0!	#DIV/0!
12	76	Program peningkatan iman dan taqwa (IMTAQ)		-	-	-	-	-	484.000.000	42	202.300.000	#DIV/0!	42	42	202.300.000	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
13	82	Program peningkatan penanggulangan narkoba, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS		-	-	-	-	-	516.020.000	48	245.971.000	#DIV/0!	48	48	245.971.000	#DIV/0!	#DIV/0!
14	87	Program peningkatan partisipasi masyarakat		-	-	-	-	-	30.000.000	52	15.732.000	#DIV/0!	52	52	15.732.000	#DIV/0!	#DIV/0!
15	88	Program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial		-	-	-	-	-	39.163.000	46	18.135.000	#DIV/0!	46	46	18.135.000	#DIV/0!	#DIV/0!
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											4.187.507.575						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												#DIV/0!	44,89				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												#DIV/0!	<u>SANG AT REND AH</u>				
	8	BIRO HUMAS DAN PROTOKOL															

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		6,09	809.437.230	#### #	8.581.526.35 5	446, 27	2.016.948.670	380	1.154.722.112	85,15	57,25	#### #	9.736.248.46 7	##### #	1.203
2	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		1,00	51.074.733	#### #	4.671.085.54 6	6,25	581.350.000	6	474.902.086	96,00	81,69	111	5.145.987.63 2	11.133	10.075
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		0,00	-	#### #	1.072.404.65 6	75,0 0	41.000.000	60	40.000.000	80,00	97,56	#### #	1.112.404.65 6	-	-
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		3,00	57.450.000	4,28	216.787.600	3,00	103.465.800	3	74.999.500	100,00	72,49	7	291.787.100	243	508

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
5	07	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah		0,00	-	#### #	1.289.929.86 2	1,00	17.800.000	1	9.399.000	100,00	52,80	101	1.299.328.86 2	-	-
6	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH		92,75	3.588.730.096	#### #	2.931.879.97 9	103,00	18.791.381.49 3	20	3.366.508.547	19,61	17,92	294	6.298.388.52 6	317	176
7	43	Program pengembangan komunikasi informasi dan mass media		4,00	570.512.300	17,90	863.986.000	18,50	1.621.615.233	15	644.486.000	81,08	39,74	33	1.508.472.00 0	822,50	264,41
8	45	Program Kerjasama Informasi dengan Media Masa		6,00	1.589.057.710	#### #	2.080.106.70 0	6,00	4.451.856.804	6	2.373.250.000	91,67	53,31	#### #	4.453.356.70 0	##### #	280
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											8.138.267.245						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												66,84	64,29				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SEDA</u> <u>NG</u>	<u>REND</u> <u>AH</u>				

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)							
	1	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN															
	4	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	115.988.254.368	-	68.715.122.667	-	37.791.030.270	59	36.573.167.498		97	59	105.288.290.165		90,77
2	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	39.116.233.827	-	10.328.866.448	-	4.828.489.500	38	3.435.647.451	#DIV/0!	71	38	13.764.513.899	#DIV/0!	35
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		-	1.831.502.100	-	326.186.950	-	201.293.000	25	140.704.920	#DIV/0!	70	25	466.891.870	#DIV/0!	25
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	270.227.500	-	205.830.000	-	124.390.000	48	121.367.000		98	48	327.197.000	#DIV/0!	121

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
5	07	Program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah		-	136.622.000	-	39.855.000	-	23.980.000	30	10.700.000		44,62	30	50.555.000	#DIV/0!	37
6	15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		-	182.588.674.061	-	69.705.424.361	-	31.242.422.580	56	29.589.949.168	#DIV/0!	94,71	56	99.295.373.529	#DIV/0!	54
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											69.871.536.037						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												98,11	76,05				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>TINGG</u> <u>!</u>	<u>TINGG</u> <u>!</u>				
	1	BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN															
	5	BADAN PENGHUBUNG DAERAH															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	14.514.933.040	-	7.156.422.435	-	3.279.890.400	64	3.103.909.145	-	94,63	64	10.260.331.580	-	70,69

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
2	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	8.185.000.500	-	3.649.394.850	-	2.196.714.000	-	2.070.420.100	-	94,25	-	5.719.814.950	-	69,88
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		-	818.300.000	-	292.501.195	-	120.850.000	40	115.711.517	-	95,75	40	408.212.712	-	49,89
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	299.634.000	-	132.135.900	-	74.984.000	-	74.879.000	-	99,86	-	207.014.900		69,09
5	16	Program peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH		10	773.064.000	-	835.005.750	4	128.714.000	3	60.814.000	75,00	47,25	3	895.819.750	30,00	115,88

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
6	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		1	148.444.200	-	64.032.722	1	60.094.200	1	59.726.115	100,00	99,39	1	123.758.837	100,00	83,37
7	46	Program Koordinasi Pemasaran Pariwisata		75	3.547.356.700	84	1.721.205.250	13	627.052.800	9	619.540.009	69,23	98,80	93	2.340.745.259	124,00	65,99
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											6.104.999.886						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												91,28	83,51				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SANG AT TINGG !</u>	<u>TINGG !</u>				
	2	BIDANG PENGAWASAN															
	1	INSPEKTORAT															

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara (Keg.)	100	19.046.756.600	688	14.541.163.991	100	4.018.088.600	100	4.121.772.540	100,00	102,58	788	18.662.936.531	788,00	97,98
2	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Kendaraan Dinas Oprasional	100	1.407.488.000	177	1.794.621.900	100	331.310.000	100	603.658.500	99,64	182,20	277	2.398.280.400	276,64	170,39
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terlaksananya Kegiatan Imtak	100	416.583.080	690	239.775.400	100	113.938.800	100	137.878.300	100,00	121,01	790	377.653.700	790,00	90,66

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	3	757.383.200	66	501.436.850	3	118.592.000	3	124.442.000	100,00	104,93	69	625.878.850	##### #	82,64
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pelaksanaan Manajemen Asset/Bagian Milik Daerah	1	109.428.800	1	53.655.000	1	36.928.000	1	33.918.500	100,00	91,85	2	87.573.500	200	80
6	20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	100	30.442.912.850	#### #	20.843.157.043	100	6.026.335.100	100	6.562.556.248	99,90	108,90	#### #	27.405.713.291	1.112	90

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
7	21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Tersedianya Pengawasan yg Handal	38	1.494.032.000	226	935.613.221	28	350.151.000	54	257.461.400	191,52	73,53	280	1.193.074.621	731	80
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											11.841.687.488						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												93,81	115,88				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>TINGG</u> <u>!</u>	<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>TINGG</u> <u>!</u>				
	3	BIDANG PERENCANAAN															
	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi perkantoran yang terselenggara	100	6.147.325.000	100	5.029.218.338	100	5.588.477.000	155	5.672.103.551	154,68	101,50	255	10.701.321.889	254,68	174,08

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
2	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pemeliharaan sarana prasarana aparatur	100	1.362.488.160	100	857.941.153	100	1.513.950.000	144	2.152.051.308	144,05	142,15	244	3.009.992.461	244,05	220,92
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kapasitas sumber daya aparatur yang ditingkatkan	100	288.118.000	100	202.234.000	100	261.925.000	160	258.677.972	160,00	98,76	260	460.911.972	260,00	159,97
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana kerja dan laporan keuangan tersusun	10	56.145.000	2	43.270.000	1	51.041.100	2	51.040.750	200,00	100,00	4	94.310.750	40,00	167,98

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Dikumen peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang tersusun	1	63.250.000	1	53.667.250	1	57.500.000	2	52.534.800	200,00	91,36	3	106.202.050	300,00	167,91
6	15	Program pengembangan data/informasi	Data informasi yang disusun	23	1.083.280.000	6	184.325.400	6	433.042.500	9	407.305.300	150,00	94,06	15	591.630.700	65,22	54,61
7	21	Program perencanaan pembangunan daerah	Perencanaan pembangunan yang berkualitas	100	4.502.704.000	19	3.426.380.597	16	3.833.649.000	22	4.011.547.699	137,50	104,64	41	7.437.928.296	41,00	165,19
8	22	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Dokumen perencanaan	52	3.367.812.000	10	814.336.040	7	1.683.906.000	12	2.026.163.852	171,43	120,33	22	2.840.499.892	42,31	84,34

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
9	23	Program perencanaan sosial dan budaya	Dokumen perencanaan Sosbud	22	2.805.889.000	5	884.599.000	5	1.147.843.000	8	1.556.301.380	160,00	135,58	13	2.440.900.380	59	87
10	24	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Dokumen perencanaan praswil dan SDA	39	2.900.000.000	10	1.763.963.639	8	2.201.015.000	10	3.247.987.271	125,00	147,57	20	5.011.950.910	51,28	172,83
11	26	Program Perencanaan Tata Ruang	Dokumen perencanaan tata ruang yang tersusun	8	3.347.822.000	-	-	2	1.673.911.000	3	1.625.988.442	150,00	97,14	3	1.625.988.442	37,50	48,57

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
1 2	27	Program Penelitian dan Pengembangan	Kajian penelitian penelitian dan pengembangan yang tersusun	20	2.730.724.000	0,00	-	6	1.365.362.000	10	1.574.810.929	166,67	115,34	10	1.574.810.929	50,00	57,67
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											22.636.513.254						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												174,77	112,63				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>TINGG</u> <u>!</u>	<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>TINGG</u> <u>!</u>				
	4	BIDANG KEUANGAN															
	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrtasi Perkantoran	250	20.215.628.670	#### #	3.351.835.96 0	10.1 90	5.665.919.130	360	5.156.962.378	3,53	91,02	#### #	8.508.798.33 8	##### #	42,09

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
2	2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur	297	36.298.624.250	815	6.585.536.932	296	14.361.598.500	249	12.298.438.250	84,12	85,63	#### #	18.883.975.182	358,25	52,02
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	19	925.038.000	166	263.439.600	17	306.898.000	52	144.890.100	305,88	47,21	218	408.329.700	##### #	44,14
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana Program	9	2.662.078.950	6	507.620.850	9	516.104.900	9	466.318.450	100,00	90,35	15	973.939.300	166,67	36,59
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset	2	5.530.955.659	2	555.462.112	2	1.307.638.950	2	1.169.275.475	100,00	89,42	4	1.724.737.587	200,00	31,18

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
6	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan waktu Penetapan APBD Prov. NTB	#### ##	119.115.444.66 8	#### #	21.820.179.7 80	10.5 77	32.210.440.50 8	#### ##	29.331.773.137	121,92	91,06	#### #	51.151.952.9 17	27,40	42,94
7	18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Ketepatan Waktu Penetapan Perda APBD Kab/Kota	50	7.054.611.390	40	1.457.875.93 4	50	1.687.287.950	50	1.625.210.125	100,00	96,32	90	3.083.086.05 9	180,00	43,70
8	20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Opini Laporan Keuangan Provinsi	100	2.325.119.000	25	324.676.000	25	398.530.700	20	369.150.498	80,00	92,63	45	693.826.498	45	30

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
	20.09	Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR)	Jumlah kasus yang terselesaikan.	100	2.325.119.000	25	324.676.000,00	25	398.530.700	20	369.150.498	80,00	92,63	45	693.826.498	45	30
Rata-rata capaian kinerja (%)												80,00	92,63			45	30
Predikat kinerja												TINGGI	SANG AT TINGGI			SANG AT REND AH	SANG AT REND AH
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											50.562.018.413						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												121,84	83,98				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>SANG AT TINGGI</u>	<u>TINGGI</u>				
	4	BIDANG KEUANGAN															
	2	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	-	-	-	-	14.497.966.079	51	7.363.049.832	#DIV/0!	51	51	7.363.049.832	#DIV/0!	#DIV/0!
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	-	-	-	-	15.791.592.830	33	5.256.567.468	#DIV/0!	33	33	5.256.567.468	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		-	-	-	-	-	431.566.500	32	137.771.528	#DIV/0!	32	32	137.771.528	#DIV/0!	#DIV/0!
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	-	-	-	-	779.525.000	46	358.015.200	#DIV/0!	46	46	358.015.200	#DIV/0!	#DIV/0!
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		-	-	-	-	-	264.440.000	68	180.567.000	#DIV/0!	68	68	180.567.000	#DIV/0!	#DIV/0!
6	17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		-	-	-	-	-	14.802.784.09 1	45	6.649.434.401	#DIV/0!	45	45	6.649.434.40 1	#DIV/0!	#DIV/0!

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
7	82	Program Reformasi Birokrasi		-	-	-	-	-	367.955.500	53	194.809.800	#DIV/0!	53	53	194.809.800	#DIV/0!	#DIV/0!
8	85	Penertiban Pengelolaan Keuangan dan Asset		-	-	-	-	-	127.320.000	20	24.980.000	#DIV/0!	20	20	24.980.000	#DIV/0!	#DIV/0!
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											20.165.195.229						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												#DIV/0!	44,32				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												#DIV/0!	<u>SANG</u> <u>AT</u> <u>REND</u> <u>AH</u>				
	5	BIDANG KEPEGAWAIAN															
	1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		-	28.212.397.850	-	15.821.756.544	-	4.150.000.600	-	3.861.626.147		93,05	-	19.683.382.691		69,77
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		-	43.450.400.000	-	46.523.280.702	-	576.620.000	-	508.254.638		88,14	-	47.031.535.340	-	108,24

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur		-	13.300.000	-	19.900.000	-	370.885.700	-	320.580.650	-	86,44	-	340.480.650	-	##### #
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		-	867.692.000	-	410.583.450	-	132.502.500	-	101.997.500	-	76,98	-	512.580.950	-	59,07
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah		-	129.000.000	-	89.900.000	-	26.200.000	-	26.500.000	-	101,15	-	116.400.000	-	90,23
6	30	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan		-	860.500.700	-	526.775.025	-	204.800.000	-	209.994.100	-	102,54	-	736.769.125	-	85,62

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
7	40	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		-	8.269.941.950	-	5.320.906.342	-	3.209.934.100	37	1.986.086.453		61,87	37	7.306.992.795	-	88,36
8	49	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											7.015.039.488						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												86,81	76,27				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												<u>TINGGI</u>	<u>TINGGI</u>				
	6	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
	1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH															
1	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	100	18.507.016.703	100	15.827.556.544	100	5.187.794.529	68	4.279.144.842	68,27	82,48	168	20.106.701.386	168,27	108,64

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
2	02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur	70	75.784.102.000	70	47.103.569.702	70	2.660.000.000	53	2.167.113.273	75,80	81,47	123	49.270.682.975	175,80	65,01
3	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur	2	21.090.000	2	19.900.000	2	6.600.000	2	3.100.000	100,00	46,97	4	23.000.000	200,00	109,06
4	06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rencana Program	6	858.039.500	6	422.873.450	6	294.350.000	6	235.091.250	100,00	79,87	12	657.964.700	200,00	76,68
5	07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset	7	145.305.000	-	89.900.000	7	32.700.000	7	22.800.000	100,00	69,72	7	112.700.000	100,00	77,56

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2018 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD s/d Renja PD Tahun Lalu (2016)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2017)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2017 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2017)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2017 (%)	
6	15	Program Pendidikan Kedinasan	Kompetensi widyaiswara	-	588.442.500	-	155.970.214	-	26.950.000	-	-	-	-	-	155.970.214	-	26,51
7	16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi aparatur	200	41.288.759.274	200	23.120.029.972	120	15.513.238.871	150	12.005.785.498	125,34	77,39	350	35.125.815.470	175,20	85,07
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM											18.713.034.863		57,47				
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM....)												79,12	55,85				
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)												TINGG I	REND AH				

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Provinsi NTB , sesuai dengan tabel berikut :

Tabel 2.223: Permasalahan dan rekomendasi Pelaksanaan RKPD

No.	Nama SKPD	Faktor Penghambat	Rekomendasi Bagi Arah Kebijakan Tahun berikutnya
1	2	3	4
A	WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB	Tidak Mengisi	Menyampaikan laporan dan melakukan percepatan penyelesaian dokumen keuangan dan meningkatkan koordinasi dengan dinas / instansi terkait terhadap kegiatan yang berjalan
2	Dinas Kesehatan Provinsi NTB	Kegiatan yang bersifat kontraktual, dalam proses pengadaan, beberapa kegiatan mengalami perubahan kode rekening sehingga dilakukan penjadwalan ulang	Merancang waktu pelaksanaan kegiatan dengan mempertimbangkan dari unsur arus kas, sumber daya manusia pelaksana kegiatan, dan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	Proses penyelesaian administrasi keuangan masih dalam proses pembayaran	Melakukan percepatan penyelesaian dokumen keuangan dan meningkatkan koordinasi dengan dinas / instansi terkait terhadap kegiatan yang berjalan
4	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB	Kegiatan yang bersifat kontraktual dalam proses berjalan, dan perubahan (mundurnya) pelaksanaan kegiatan sehingga dilakukan penjadwalan ulang	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penyerapan anggarannya, serta belanja yang melalui proses lelang dilakukan lebih awal dan pembenahan koordinasi internal organisasi
5	Rumah Sakit H.L Abdul Kadir Manambai Provinsi NTB	Tidak Mengisi	Menyampaikan laporan dan melakukan percepatan penyelesaian dokumen keuangan dan meningkatkan koordinasi dengan dinas / instansi terkait terhadap kegiatan yang berjalan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB	Proses lelang / tender di ULP	Melakukan percepatan penyelesaian dokumen perencanaan baik keuangan maupun proyek dan melakukan verifikasi secara cermat

No.	Nama SKPD	Faktor Penghambat	Rekomendasi Bagi Arah Kebijakan Tahun berikutnya
1	2	3	4
7	Dinas Perumahan dan Pemukiman Provinsi NTB	Tidak Mengisi	Merancang kembali pelaksanaan kegiatan secara cermat dengan memperhatikan arus kas keuangan, SDM pelaksana kegiatan serta menyusun waktu pelaksanaan kegiatan
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Provinsi NTB	Tidak Mengisi	Mempercepat pelaksanaan kegiatan, memantau, mengendalikan dan evaluasi secara berkala terhadap setiap pelaksanaan kegiatan
9	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTB	Tidak Mengisi	Mempercepat pelaksanaan kegiatan, memantau, mengendalikan dan evaluasi secara berkala terhadap setiap pelaksanaan kegiatan
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB	Tidak Mengisi	Melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan melakukan pengendalian, pemantauan serta evaluasi setiap kegiatan
11	Dinas Sosial Provinsi NTB	Keterlambatan pengesahan APBD, SK Pengadaan dan kurangnya SDM yang memadai dalam pengelolaan keuangan	Mempersiapkan pelaksanaan dan penyerapan anggaran setiap bulan/triwulan serta terus meningkatkan koordinasi, konsultasi dan sinergitas serta mempercepat penyerapan anggaran
B	WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR		

No.	Nama SKPD	Faktor Penghambat	Rekomendasi Bagi Arah Kebijakan Tahun berikutnya
1	2	3	4
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB	Masih ada beberapa kegiatan yang harus direvisi karena tidak sesuai dengan anggaran kas, masih kurangnya dana dalam penanganan TKI bermasalah, belum optimalnya kinerja UPTD pengawasan pulau lombok dan pulau sumbawa karena dana operasionalnya masih bergabung dengan bidang pengawasan, masih kurangnya kompetensi instruktur untuk menambah wawasan/belajar, belum semua kejuruan melaksanakan uji kompetensi karena belum tersedia asesor dan TUK, masih kurangnya anggaran operasional	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya untuk kedepannya akan dilaksanakan rapat koordinasi teknis dengan bidang agar tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunan anggaran kas sehingga penyerapan anggaran dapat optimal, akan diusulkan APBD P Tahun 2017 sesuai anggaran yang tersedia, pada tahun 2018 diharapkan UPTD Pengawasan P. Lombok dan P. Sumbawa mempunyai DPA masing-masing, perlu telaahan dan pengusulan ke BKD, perlu ada pembinaan dan peningkatan kompetensi bagi instruktur, mempercepat rekrutmen untuk menjaring tenaga kerja dalam mengikuti pelatihan, sementara baru ada 2 kejuruan yang sudah memiliki TUK yaitu TUK TIK, dan TUK OTO R2, peningkatan kompetensi untuk menyamakan kurikulum silabus pada dunia industri dan dunia usaha untuk memenuhi kebutuhan kerja dan mengusulkan anggaran pada tahun 2018 sehingga mempunyai DPA sendiri
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTB	Tidak Melaporkan	Menyampaikan laporan dan melakukan percepatan penyelesaian dokumen keuangan dan meningkatkan koordinasi dengan dinas / instansi terkait terhadap kegiatan yang berjalan
3	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB	DPA Perubahan selesai di Triwulan IV dan pencairan bantuan hibah terkendala harus berbadan hukum atau ada Surat Keterangan Terdaftar serta terbatasnya tenaga aparatur yang memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa	Percepatan pelaksanaan kegiatan, melakukan verifikasi dokumen penerima bantuan hibah sesuai dengan persyaratan serta mengusulkan tenaga aparatur untuk mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah

No.	Nama SKPD	Faktor Penghambat	Rekomendasi Bagi Arah Kebijakan Tahun berikutnya
1	2	3	4
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB	Terdapat komponen beberapa perubahan penjadwalan aliran kas dan revisi anggaran	Memastikan perencanaan anggaran tepat waktu sesuai dengan ROK dan menyusun rencana waktu pelaksanaan dengan memperhatikan arus kas, sumber daya pelaksana kegiatan dan alokasi waktu yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB	Terbatasnya kuantitas dan kualitas SDM, dukungan anggaran untuk program dan kegiatan prioritas masih sangat terbatas dan sarana dan prasarana pendukung kinerja masih terbatas	Penyelesaian dokumen/SPJ dari tiap-tiap bidang tepat waktu, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan internal maupun eksternal berjalan baik, pengawasan internal berjalan dengan baik
6	Dinas Perhubungan Provinsi NTB	Tidak Melaporkan	Menyampaikan laporan dan melakukan percepatan penyelesaian dokumen keuangan dan meningkatkan koordinasi dengan dinas / instansi terkait terhadap kegiatan yang berjalan
7	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB	Tidak Mengisi	Pemantauan, pengendalian dan evaluasi dari setiap kegiatan serta mempercepat pencapaian target sesuai yang ditentukan
8	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB	Pelaksanaan kegiatan menunggu perubahan pada dokumen perencanaan (DPA Perubahan)	Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan tetap melakukan pengendalian, pemantauan serta evaluasi secara berkala
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB	Perubahan jadwal/event kegiatan dari Pemerintah Pusat sehingga perlu dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan	Koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Pusat, dinas/instansi terkait dan stake holder dan menganggarkan sistem informasi/aplikasi untuk optimalisasi pelayanan 166 jenis perizinan dan non perizinan, penyusunan potensi investasi pada kawasan strategis, peningkatan sarana prasarana dan kualitas SDM PTSP

No.	Nama SKPD	Faktor Penghambat	Rekomendasi Bagi Arah Kebijakan Tahun berikutnya
1	2	3	4
10	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB	Belum terjalin koordinasi yang baik antara sektor dan pihak terkait baik di tingkat Provinsi maupun antar provinsi dengan Kab/Kota, jumlah SDM yang belum memadai, dan prasarana sarana dan dana yang masih kurang	Menyusun rencana kerja berdasarkan kebutuhan untuk pencapaian indikator kinerja dan memastikan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB	Pelaksanaan kegiatan menunggu DPA perubahan	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya Pelaksanaan penyalarsan dengan kab/kota dan pelaksanaan koordinasi dengan kab/kota. Tindak lanjut yang diperlukan dalam renja SKPD tahun berikutnya sinkronisasi anggaran dengan target RPJMD 2013-2018, penentuan target satuan dan sasaran dan penentuan kegiatan berdasarkan skala prioritas
C	PILIHAN		
1	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB	Tidak Mengisi	Pemantauan, pengendalian dan evaluasi dari setiap kegiatan serta mempercepat pencapaian target sesuai yang ditentukan
2	Dinas Pariwisata Provinsi NTB	Tidak Melaporkan	Menyampaikan laporan dan melakukan percepatan penyelesaian dokumen keuangan dan meningkatkan koordinasi dengan dinas / instansi terkait terhadap kegiatan yang berjalan
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB	Adanya kekurangan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi sebagai pendukung dalam administrasi	Merencanakan secara tepat dan akurat dan semaksimal mungkin berkoordinasi secara intern dengan bidang-bidang terkait sehingga tidak terjadi revisi

No.	Nama SKPD	Faktor Penghambat	Rekomendasi Bagi Arah Kebijakan Tahun berikutnya
1	2	3	4
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB	Regulasi yang belum tersedia sesuai peruntukannya, keterbatasan SDM dan ketersediaan agroinput yang kurang memadai	Melakukan koordinasi secara intensif kepada stakeholder terkait, memberikan pelatihan-pelatihan seperti diklat, bimtek, kursus singkat bagi peternak dan pelaku usaha peternakan dan untuk mengantisipasi kurang memadainya agroinput dibidang peternakan diusahakan dukungan anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta melakukan evaluasi secara komprehensif agar dapat diketahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan dan pencapaian target kinerja
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB	Tidak Mengisi	Mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat sebagai alat pengendalian pelaksanaan perencanaan
6	Dinas Perdagangan Provinsi NTB	Regulasi yang selalu berubah pada proses pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan	Merencanakan dengan tepat sasaran program kegiatan yang akan dilaksanakan
7	Dinas Perindustrian Provinsi NTB	Terjadi perubahan pagu dari segi penganggaran program kegiatan dan Regulasi yang selalu berubah pada proses pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan	Memaksimalkan penyerapan anggaran untuk menutupi rendahnya realisasi pada triwulan sebelumnya dan tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun sebelumnya menyesuaikan nomenklatur program/kegiatan yang berubah agar terjadi keserasian antara RKPD, Renja, RKA dan DPA dan meningkatkan penyerapan pencapaian kinerja, merencanakan dengan tepat sasaran program kegiatan yang akan dilaksanakan
D	PEMERINTAH FUNGSI PENUNJANG		
1	Biro Umum Setda Provinsi NTB	Tidak Mengisi	Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan tetap melakukan pengendalian, pemantauan serta evaluasi secara berkala

No.	Nama SKPD	Faktor Penghambat	Rekomendasi Bagi Arah Kebijakan Tahun berikutnya
1	2	3	4
2	Biro Organisasi Setda Provinsi NTB	Tidak Melaporkan	Menyampaikan laporan dan melakukan percepatan penyelesaian dokumen keuangan dan meningkatkan koordinasi dengan dinas / instansi terkait terhadap kegiatan yang berjalan
3	Biro Hukum Setda Provinsi NTB	Tidak tertibnya administrasi dan perencanaan keuangan	Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya perlunya ketelitian dan rencana kerja yang matang
4	Biro Administrasi Pemerintahan Setda Provinsi NTB	Realisasi terhadap RPJMD dan Realisasi SKPD 0 (nol) disebabkan karena hingga saat ini sedang diproses di badan legislatif (DPR RI) dan belum ada keputusan terkait usulan DOB Provinsi NTB	Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan tetap melakukan pengendalian, pemantauan serta evaluasi secara berkala
5	Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB	Tidak Melaporkan	Menyampaikan laporan dan melakukan percepatan penyelesaian dokumen keuangan dan meningkatkan koordinasi dengan dinas / instansi terkait terhadap kegiatan yang berjalan
6	Biro Administrasi Pembangunan dan LPBJP Provinsi NTB	Masih ada program/kegiatan SKPD yang berubah/revisi di anggaran perubahan sehingga proses pengadaannya belum bisa dilaksanakan	Melakukan pendampingan terhadap PPK yang realisasi kegiatannya masih rendah dan meningkatkan pelaksanaan rakor terkait upaya percepatan pelaksanaan kegiatan
7	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB	Tidak Melaporkan	Menyampaikan laporan dan melakukan percepatan penyelesaian dokumen keuangan dan meningkatkan koordinasi dengan dinas / instansi terkait terhadap kegiatan yang berjalan
8	Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB	Tidak Mengisi	Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya secara cermat baik arus kas keuangan, kesiapan SDM pelaksana, dan jadwal kegiatan

No.	Nama SKPD	Faktor Penghambat	Rekomendasi Bagi Arah Kebijakan Tahun berikutnya
1	2	3	4
9	Sekretariat DPRD Provinsi NTB	sering terjadi perubahan jadwal kegiatan DPRD dan kurang cermatnya pelaksanaan kegiatan dalam mengikuti jadwal penarikan kas	Menyusun perencanaan yang efisien dan efektif untuk mendukung fungsi pelayanan terhadap anggota DPRD
10	Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Anggaran Kas yang telah ditetapkan	Melakukan pengontrolan dan pengendalian secara berkala kepada pelaksana kegiatan serta mengevaluasi guna percepatan pencapaian target baik keuangan dan fisik
11	Inspektorat Daerah Provinsi NTB	Keterbatasan anggaran dan kurangnya SDM pada jabatan fungsional auditor dan P2UPD	Percepatan pelaksanaan dan pemantauan kegiatan, mendorong penguatan kapasitas SDM khususnya Auditor dan P2UP, serta peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan
12	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB	Kurang tepat dalam menentukan waktu pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan penyelarasan dengan kab/kota dan pelaksanaan koordinasi dengan kab/kota dan sinkronisasi anggaran dengan target RPJMD 2013-2018, penentuan target satuan dan sasaran serta penentuan kegiatan berdasarkan skala prioritas
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB	Adanya revisi anggaran	Menginventarisasikan perubahan rencana pelaksanaan kegiatan dan mengakomodirnya dalam penyesuaian / revisi anggaran kas serta mempersiapkan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan lebih baik dan monitoring pelaksanaannya tiap akhir bulan berikutnya
14	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi NTB	Tidak Melaporkan	Menyampaikan laporan dan melakukan percepatan penyelesaian dokumen keuangan dan meningkatkan koordinasi dengan dinas / instansi terkait terhadap kegiatan yang berjalan

No.	Nama SKPD	Faktor Penghambat	Rekomendasi Bagi Arah Kebijakan Tahun berikutnya
1	2	3	4
15	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB	Perubahan OPD menyebabkan perubahan struktur yang menyebabkan revisi RENSTRA, beberapa kegiatan belum mendapat dukungan anggaran, serta adanya perubahan kegiatan dan target akibat kebijakan nasional sehingga	Melakukan penyesuaian terhadap target kinerja dalam dokumen perencanaan serta mempercepat pelaksanaan setiap kegiatan
16	Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah Provinsi NTB	Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kinerja, keterlambatan penyusunan dokumen pendukung.	Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala serta mempercepat proses penyelesaian dokumen secara tepat waktu

2.3. Review terhadap Capaian Indikator RPJMD 2013-2018

Tabel 2.224 Capaian Indikator RPJMD 2013-2018 untuk tahun 2017

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	Realisasi 2016	2017	
					Target	Realisasi
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat					
1	Penurunan Jumlah Konflik Sosial	Kasus	54	23	32	21
2	Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	%	45	100	100	100
3	Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Politik	%	70,47	73.43	72,50	73.43
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5.38	3.94	4.82	3.32
5	Pertumbuhan Ekonomi (non tambang)	%	5,61	5.97	6,00 – 6,25	7.1
6	Pola Pangan Harapan	point	78,70	81.7	81.7	82
7	Pengeluaran Per Kapita	Rp. 000	8,950	9,575	9,464	9.838*)
8.	Angka kemiskinan	%	17,25		13.25	15.05
9	Laju Investasi	%	8,28		11.5	13.95
10	Pertumbuhan PAD	%	13.66		5.19	24.27
11	Kunjungan Wisatawan	Org	1,357,602	3,094,437	3,500,000	3,508,903
	- Mancanegara	Org	565,944	1,404,328	1,750,000	1,430,249
	- Nusantara	Org	791,658	1,690,109	1,750,000	2,078,654
12	Cakupan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	1,58	4.99	2.2	5.07
B	Aspek Pelayanan Umum					
13	Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100

No	Aspek/Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal 2013	Realisasi 2016	2017	
					Target	Realisasi
14	Jumlah kunjungan yang mengakses layanan NTB Online	Kali	4,653	81,404	80,000	881,774
15	Jaringan Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	%	67.56		75.39	77.16
16	Ratio Elektrifikasi	%	64,43	77.89	72.67	85.1
17	Cakupan Air Bersih					
	- Perkotaan	%	80,23	89.95	86.22	90.65
	- Perdesaan	%	72,15		80.18	80.45
18	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	Unit	21,471	1,008	1,073	1,081
19	Cakupan Jamban Keluarga	%	72,15	79.38	78	82.67
C	Aspek Daya Saing					
20	Rata-Rata Lama Sekolah Usia 25 Tahun keatas	Tahun	6.54	6.79	6.87	6,89*)
21	Buta Huruf Penduduk Usia 15 tahun keatas	%	15,04		10,85	12.86
22	Usia Harapan Hidup	Tahun	62,73		66,60	NA
23	Prevalensi Kurang Gizi	%	18,27		15,5	22.6
24	Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan	Tahun	20.52		20.75	20.27
25	Penerapan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal pada Sekolah dan Madrasah	%	10	100	65	100
26	Pranata Adat yang Terbentuk	Lembaga	10	93	50	50
27	Pendaftaran HaKI Karya Seni Budaya Daerah					
	- Desain Industri	Produk	37		15	61
	- Merek	Produk	42	135	20	45
	- Hak Cipta	Produk	18	29	15	30
28	Tingkat keselarasan RKPd terhadap RPJMD	%	78.58	94.72	95	99.03
29	Jumlah penumpang angkutan udara dan laut					
	- Angkutan udara	org	2,145,290	3,778,787	3,476,000	4,080,124
	- Angkutan laut	org	125,794	1,071,173	197,828	1,327,229
30	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		67,77		67,89	NA
31	Mata Air Terlindungi	Titik	334	414	417	485

2.4. Rumusan Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan urusan capaian kinerja daerah sebagaimana telah dijabarkan pada poin A, B, dan C, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pembangunan daerah sebagai tantangan pembangunan pada tahun 2019 sebagai berikut:

1. Tingkat kemiskinan di NTB telah berhasil diturunkan, namun masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang telah mencapai 10,12 persen.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB telah berhasil ditingkatkan bahkan menaikkan rangking NTB dari urutan 30 ke urutan 29, namun beberapa komponennya masih perlu mendapat perhatian dan kerja keras antara lain masih rendahnya Usia Harapan Hidup (UHH), masih tingginya prevalensi Gizi, masih tingginya angka Buta Huruf, dan masih rendahkan Usia Kawin Pertama Perempuan
3. Pertumbuhan ekonomi NTB relatif lebih tinggi bahkan diatas pertumbuhan ekonomi nasional, namun pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di NTB, hal ini terlihat dari melambannya penurunan angka kemiskinan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang tinggi ke depan dengan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif
4. Ada kecenderungan meningkatnya kesenjangan antar kelompok pendapatan dari 0,360 pada tahun 2015 menjadi 0,378 pada tahun 2017 dan kesenjangan wilayah dari 0,278 pada tahun 2015 menjadi 0,281 pada tahun 2016, untuk itu perlu ditingkatkan kemandirian infrastruktur strategis secara berimbang baik dipulau Sumbawa maupun di pulau Lombok terutama yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan, mampu mendorong investasi, dapat mewujudkan ketahanan pangan serta mampu mendorong kontribusi sektor-sektor yang terkait dengan kepariwisataan secara signifikan
5. Semakin tergradasinya kondisi lingkungan hidup yang ditandai dengan semakin menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 67,77 pada tahun 2013 menjadi 56,53 pada tahun 2016, serta frekuensi bencana di wilayah NTB dari tahun ke tahun semakin meningkat

Tabel 2.1 Wilayah serta Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017	1
Tabel 2.2 Inventarisasi Cekungan Air Tanah di Provinsi NTB	3
Tabel 2.3 Keadaan Cuaca Rata-Rata di Provinsi NTB Tahun 2014-2015	4
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2013-2017	5
Tabel 2.5 Distribusi Penduduk Provinsi NTB Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2013-2017	6
Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2017	6
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Provinsi NTB Tahun 2013-2017	7
Tabel 2.8 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2017	7
Tabel 2.9 Nilai PDRB Provinsi NTB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 menurut 17 Sektor tahun 2013-2017 (Milyar Rp)	8
Tabel 2.10 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2016-2017.....	10
Tabel 2.11 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 dengan dan Tanpa Pertambahan Bijih logam menurut sektor pada tahun 2014 -2017.....	11
Tabel 2.12 Pendapatan Perkapita NTB ADHB Tahun 2014-2017 (Rp. 000.000)	13
Tabel 2.13 Target Penurunan Kemiskinan Kabupaten/Kota Se-NTB.....	14
Tabel 2.14 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Pendidikan Tahun 2016-2017.....	17
Tabel 2.15 Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Buta Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Putus Sekolah (DO), Angka Kelulusan, Angka Melanjutkan Sekolah ..	17
Tabel 2.16 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017	19
Tabel 2.17 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017	20
Tabel 2.18 Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat SM (SMA,MA,SMK) Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2011/2012 s.d 2015/2016.....	20
Tabel 2.19 Capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012/2013 s.d 2015/2016.....	21
Tabel 2.20 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SD Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017	22
Tabel 2.21 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SMP Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017	22
Tabel 2.22 Angka Partisipasi Murni (APM) Tingkat SM (SMA, MA, SMK) Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017	23
Tabel 2.23 Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017	23
Tabel 2.24 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2011-2017 di Provinsi NTB	24
Tabel 2.25 Angka Melanjutkan dari Lulusan SD/MI ke SMP/MTs Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017.....	24
Tabel 2.26 Angka Melanjutkan dari Lulusan SMP/MTs ke SM (SMA, SMK, MA) Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017	25
Tabel 2.27 Angka Putus Sekolah (DO) Berdasarkan Jenjang Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Tahun 2012/2013 s.d 2016/2017	25
Tabel 2.28 Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Tingkat SMA dan SMK yang Bersumber dari APBN Tahun 2017	27
Tabel 2.29 Pemberian Program Indonesia Pintar (PIP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB Tahun 2017 ..	27
Tabel 2.30 Persentase Angka Buta Huruf Penduduk Usia 15 tahun Keatas	28
Tabel 2.31 Angka Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk 15+ (BPS, Publikasi IPM) Provinsi NTB Tahun 2017	28
Tabel 2.32 Jumlah paket A, B, C , KD dan KM Tahun 2017.....	29
Tabel 2.33 Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta Yang Telah Menerapkan Pendidikan Karakter dan Nilai Budaya Lokal di Provinsi NTB Tahun 2017	31
Tabel 2.34 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kesehatan Tahun 2016 – 2017	32
Tabel 2.35 Capaian Indikator Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Dalam RPJMD NTB Tahun 2017	32
Tabel 2.36 Kematian Bayi Tahun 2015 - 2017	33
Tabel 2.37 Jumlah Kematian Ibu Dibandingkan Dengan Jumlah Kelahiran Hidup Per Kabupaten/Kota Tahun 2015- 2017	34

Tabel 2.38 Cakupan Persalinan oleh Tenaga kesehatan Menurut Kabupaten/Kota s.d. Desember 2017	36
Tabel 2.39 Gambaran Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN Provinsi NTB Tahun 2017	38
Tabel 2.40 Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi NTB Tahun 2017	38
Tabel 2.41 Dana <i>Sharing</i> Jamkesmas Provinsi Tahun 2017.....	39
Tabel 2.42 Jumlah <i>Buffer Stok</i> MP-ASI yang tersedia per Kabupaten/Kota Tahun 2015 - 2017	43
Tabel 2.43 Cakupan Jamban Keluarga Per Kabupaten/Kota Se Provinsi NTB Tahun 2017	44
Tabel 2.44 Indikator Kinerja Urusan Bidang Kesehatan Pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat Tahun 2017	46
Tabel 2.45 Jumlah Pelayanan Laboratorium Berdasarkan Jumlah Parameter yang diperiksa Masing-masing Bidang Pemeriksaan pada BLKM Pulau Lombok Tahun 2016-2017	47
Tabel 2.46 Capaian Kinerja Indikator Program BLKM Pulau Lombok Tahun 2016-2017.....	47
Tabel 2.47 Jumlah Siswa Reguler dan Non Regular Akademi Perawat Provinsi NTB Tahun Ajaran 2016/2017 – 2017/2018.....	47
Tabel 2.48 Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan dan Non Pelatihan di Balai Pengembangan Tenaga Kesehatan Mataram Tahun 2016-2017.....	49
Tabel 2.49 Cakupan Rawat Jalan dan Rawat Inap Berdasarkan Cara Pembayaran di RSUD Provinsi NTB Tahun 2016-2017.....	49
Tabel 2.50 10 Penyakit Terbanyak Kunjungan Pasien Rawat Jalan di RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 ..	51
Tabel 2.51 10 Penyakit Terbanyak Pasien Rawat Inap di RSUD Provinsi NTB Tahun 2017	51
Tabel 2.52 Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Instalasi Rawat Darurat RSUD Provinsi NTB Tahun 2017 ..	52
Tabel 2.53 Kerjasama RSUP di Bidang Pendidikan Tahun 2017	54
Tabel 2.54 Kerjasama RSUP di Bidang Pelayanan Penunjang	56
Tabel 2.55 Indikator Kinerja Pelayanan RSUD Provinsi NTB tahun 2017	62
Tabel 2.56 Jumlah Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSJ Mutiara Sukma Provinsi berdasarkan Cara Bayar Tahun 2016-2017	64
Tabel 2.57 Cakupan Pelayanan Pasien Napza Tahun 2016-2017.....	64
Tabel 2.58 Jumlah Pasien Pasung Hasil Penjangkauan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2016 - 2017	65
Tabel 2.59 Sepuluh Besar Penyakit yang ditangani di RSJ Mutiara Sukma NTB.....	66
Tabel 2.60 Cakupan Rawat Jalan, Rawat Inap dan IGD Berdasarkan Cara Bayar Tahun 2016 – 2017	67
Tabel 2.61 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2017	68
Tabel 2.62 Kondisi Jalan di Provinsi NTB (kondisi 31 Desember 2017).....	69
Tabel 2.63 Data Panjang Jalan Provinsi di Kabupaten/Kota se-NTB	69
Tabel 2.64 Cakupan Layanan Air Bersih dan Sanitasi Tahun 2016 – 2017	70
Tabel 2.65 Capaian Indikator Kinerja Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2017	72
Tabel 2.66 Data Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi NTB Tahun 2016 – 2017.....	72
Tabel 2.67 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2017	73
Tabel 2.68 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016-2017	75
Tabel 2.69 Penanganan Pelanggaran Perda Provinsi NTB dan Kebijakan Daerah Lainnya Tahun 2017 ..	75
Tabel 2.70 Perkembangan Data Capaian Kinerja berdasarkan RPJMD NTB 2013-2018	84
Tabel 2.71 Data PMKS Yang Diberikan Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	84
Tabel 2.72 Data Penanganan Korban <i>Trafficking</i> Melalui Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Tahun 2012-2017.....	93
Tabel 2.73 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2017	101
Tabel 2.74 Rekapitulasi Perkembangan Jumlah TKI Provinsi NTB Tahun 2015-2017	103
Tabel 2.75 Rekapitulasi Data <i>Remittance</i> TKI Provinsi NTB Tahun 2015-2017.....	104
Tabel 2.76 Perkembangan Penanganan TKI Bermasalah di Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017.....	104
Tabel 2.77 Perkembangan Jumlah Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Provinsi NTB Menurut Kabupaten Kota Tahun 2015-2017	105
Tabel 2.78 Jumlah Tenaga Kerja Asing di Provinsi NTB Menurut Kewarganegaraan Tahun 2017	105
Tabel 2.79 Data besaran UMP/UMK dan prosentase kenaikan di Provinsi NTB Tahun 2018	106

Tabel 2.80 Pencapaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016-2017	108
Tabel 2.81 Pencapaian Indikator SPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Tahun 2016-2017	110
Tabel 2.82 Capaian Indikator Pola Pangan Harapan (PPH)	111
Tabel 2.83 Pola Pangan Harapan Konsumsi Tahun 2017	111
Tabel 2.84 Kelompok Wanita Tani Penerima Manfaat Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Tahun 2017	113
Tabel 2.85 Penerima Bantuan Hibah Pemanfaatan Pekarangan dari dana APBDP Tahun 2017	113
Tabel 2.86 Nama Sekolah pelaksana Integrasi Materi Pembelajaran Tahun 2017	114
Tabel 2.87 Cadangan Pangan Provinsi NTB 2012-2017	115
Tabel 2.88 Nama Kelompok Penerima Bantuan Pengisian Lumbung Pangan Tahun 2017	115
Tabel 2.89 Nama Kelompok Penerima Bantuan Pembangunan Lumbung Pangan Tahun 2017	115
Tabel 2.90 Data Arus Keluar Masuk Komoditas Pangan Strategis Tahun 2014-2017	116
Tabel 2.91 Hasil Pengujian Residu Pestisida Tahun 2017	118
Tabel 2.92 Hasil Uji Residu di Pasar Modern	119
Tabel 2.93 Lokasi Penilaian Sertifikasi Prima 3 Tahun 2017	120
Tabel 2.94 Rekapitulasi Tanah Terindikasi Terlarang Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) s.d Tahun 2016	122
Tabel 2.95 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2014-2017	126
Tabel 2.96 Indeks Kualitas Air Provinsi NTB Tahun 2016-2017	126
Tabel 2.97 Hasil Parameter E Coli dan Total Coli pada Periode Pemantauan I	127
Tabel 2.98 Hasil Parameter E Coli dan Total Coli pada Periode Pemantauan II	128
Tabel 2.99 Hasil Pemantauan Kualitas Udara di 10 kabupaten/kota se-NTB Tahun 2017	130
Tabel 2.100 Jumlah Titik Mata Air Teridentifikasi yang Teridentifikasi Melalui Kegiatan Perlindungan Mata Air Tahun 2017	134
Tabel 2.101 Daftar Peserta Lomba PERMATA Tahun 2017	135
Tabel 2.102 Jumlah Titik Mata Air yang Teridentifikasi Melalui Kegiatan Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air	136
Tabel 2.103 Perlindungan Mata Air Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017	136
Tabel 2.104 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-Nusa Tenggara Barat s/d Desember 2017	139
Tabel 2. 105 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi NTB Tahun 2013 –2017	140
Tabel 2.106 Tingkat Perkembangan Program Pemberdayaan Masyarakat Lumbung Bersaing Tahun 2017	141
Tabel 2.107 Capaian Rata-rata Usia Kawin Pertama Perempuan Tahun 2016-2017	143
Tabel 2.108 Capaian Indikator Kinerja Jumlah Penumpang Angkutan Udara dan Laut Tahun 2017	144
Tabel 2.109 Data Bongkar Muat Barang di Provinsi NTB Tahun 2017	146
Tabel 2.110 Rute Angkutan Darat Perintis	146
Tabel 2.111 Trayek/Rute Angkutan Laut Perintis yang melayani Pelabuhan di Provinsi NTB	147
Tabel 2.112 Load Factor AKDP di Provinsi NTB	147
Tabel 2.113 Jumlah Kunjungan yang Mengakses Layanan NTB Online Tahun 2017	149
Tabel 2.114 Trafik Akses Sistem Informasi secara Online PPID Provinsi NTB Tahun 2017	150
Tabel 2.115 Penerima Penghargaan Jambore Kampung Media Tahun 2017	151
Tabel 2.116 Perkembangan Koperasi Berkualitas Provinsi NTB Tahun 2016-2017	156
Tabel 2.117 Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pola Syari'ah Provinsi NTB Tahun 2017	157
Tabel 2.118 Realisasi Penumbuhan Wirausaha Baru s/d Tahun 2017	159
Tabel 2.119 Laju Investasi di Provinsi NTB Tahun 2016-2017	160
Tabel 2.120 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2016-2017	161
Tabel 2.121 Jenis Perizinan dan Waktu Penyelesaian Perizinan Tahun 2017	163
Tabel 2. 122 Jumlah Izin dan Non Izin yang Diterbitkan Tahun 2016-2017	163
Tabel 2.123 Pelaksanaan Sub Urusan Bidang Penanaman Modal Tahun 2016-2017	164
Tabel 2.124 Perolehan Medali Event Olahraga Tahun 2017	171
Tabel 2.125 PA/KPA yang telah memiliki admin SiRUP PA/KPA (telah/belum melakukan peng-RUP)	175
Tabel 2.126 Pranata Adat Yang Terbentuk dari Tahun 2014-2017	179
Tabel 2.127 Pranata Adat yang terbentuk di Kabupaten/Kota Tahun 2015-2017	179
Tabel 2.128 Kalender kegiatan UPT Taman Budaya Tahun 2017	180

Tabel 2.129 Pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2013-2017	181
Tabel 2.130 Kalender Kegiatan Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2017	181
Tabel 2.131 Upaya Pengelolaan Arsip Tahun 2016 - 2017	182
Tabel 2.132 Capaian Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah Provinsi NTB	184
Tabel 2.133 Produksi Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2016-2017	186
Tabel 2.134 Perkembangan Target dan Realisasi Produksi Perikanan Budidaya Provinsi NTB Tahun 2016-2017	186
Tabel 2.135 Realisasi Produksi Rumput Laut Provinsi NTB Tahun 2016-2017.....	187
Tabel 2.136 Target dan Realisasi Indeks Nilai Tukar Perikanan Provinsi NTB Tahun 2016-2017	189
Tabel 2.137 Capaian Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) Provinsi NTB Tahun 2016-2017	190
Tabel 2.138 Capaian Indeks Nilai Tukar Nelayan Provinsi NTB Tahun TA. 2016 - 2017	190
Tabel 2.139 Tingkat Konsumsi Ikan Provinsi NTB Tahun 2016-2017	191
Tabel 2.140 Capaian Produksi Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan di Provinsi NTB Tahun 2016-2017	192
Tabel 2.141 Perkembangan Capaian Produksi Garam Provinsi NTB Tahun 2016-2017	193
Tabel 2.142 Realisasi Penerimaan PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	200
Tabel 2.143 Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2016-2017	201
Tabel 2.144 Event dan Promosi Pariwisata Tahun 2017	203
Tabel 2.145 Capaian Kinerja Pengembangan Agribisnis Jagung (PAJ) Tahun 2016-2017.....	210
Tabel 2.146 Produksi Komoditas Strategis Tanaman Pangan di Provinsi NTB Tahun 2016-2017.....	211
Tabel 2.147 Produksi Komoditas Strategis Tanaman Hortikultura di Provinsi NTB Tahun 2016-2017	211
Tabel 2.148 Bantuan Alat dan Mesin Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2016-2017	212
Tabel 2.149 Alokasi dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Provinsi NTB Tahun 2016-2017....	213
Tabel 2.150 Hasil Sertifikasi Luas Lulus Lapangan Tanaman Pangan Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2016-2017	213
Tabel 2.151 Luas Serangan OPT Tanaman Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2016-2017	214
Tabel 2.152 Perbanyakan Benih Sumber Padi, Jagung dan Kedelai Tahun 2016-2017.....	214
Tabel 2.153 Produksi Komoditas Unggulan Perkebunan di Provinsi NTB Tahun 2016-2017	215
Tabel 2.154 Luas Areal, Produksi dan Jumlah Petani Pada Komoditi Tembakau Tahun 2016 - 2017....	216
Tabel 2.155 Populasi Ternak di Provinsi NTB Tahun 2016 - 2017.....	216
Tabel 2.156 Capaian Kinerja Subsektor Peternakan (ternak sapi) Tahun 2016-2017	217
Tabel 2.157 Pemotongan Ternak Betina Produktif Tahun 2015 s.d 2017	217
Tabel 2.158 Produksi Daging di Provinsi NTB Tahun 2016-2017	218
Tabel 2.159 Ternak Bibit dan Ternak Potong ke Luar dari Provinsi NTB Tahun 2016 - 2017.....	218
Tabel 2.160 Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPPT) di NTB Tahun 2016 - 2017	219
Tabel 2.161 Capaian Program Strategis Bidang Kehutanan Tahun 2017	223
Tabel 2.162 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB Tahun 2016 s/d 2017	225
Tabel 2.163 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2017	226
Tabel 2.164 Rencana Pembangunan Pembangkit di Provinsi NTB	229
Tabel 2.165 Daftar PLT Hidro yang Sudah COD (<i>Comercial Operation Date</i>)	229
Tabel 2.166 Daftar PLT Hidro yang Belum COD (<i>Comercial Operation Date</i>).....	230
Tabel 2.167 Daftar PLTS Eksisting.....	230
Tabel 2.168 Daftar pengembang PLTS skema <i>Bussines to Bussines</i>	230
Tabel 2.169 Jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai 31 Desember 2017	234
Tabel 2.170 Target Indikator Kinerja Pengeluaran Perkapita Tahun 2016-2017	236
Tabel 2.171 Perbandingan Penyaluran Paket Sembako Tahun 2016 dengan Tahun 2017	237
Tabel 2.172 Total Nilai Kontrak Komoditi Pasar Lelang (<i>Agro Forward</i>)	238
Tabel 2.173 Nama Pelaku Usaha NTB dan Komoditi yang ditawarkan Pada Kegiatan Misi Dagang di Provinsi Jawa Tengah	239
Tabel 2.174 Jumlah Komoditi dan Nilai Transaksi Pelaku Usaha dari Provinsi NTB Pada Kegiatan Misi Dagang di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017	239
Tabel 2.175 Nama Pelaku Usaha NTB dan Komoditi yang ditawarkan Pada Kegiatan Misi Dagang di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah	240
Tabel 2.176 Jumlah Komoditi dan Nilai Transaksi Pelaku Usaha dari Provinsi NTB Pada Kegiatan Misi Dagang di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah Tahun 2017.....	240

Tabel 2.177 Jumlah Kasus dan Metode Penyelesaian oleh BPSK Tahun 2016-2017	242
Tabel 2.178 Penanganan Pengaduan Konsumen/Masyarakat Tahun 2017	242
Tabel 2.179 Komoditas dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	254
Tabel 2. 180 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	254
Tabel 2.181 Pelabuhan Muat dan Nilai Ekspor Nusa Tenggara Barat Tahun 2017	254
Tabel 2.182 Pencapaian Indikator Kinerja Daerah RPJMD dalam Penyelenggaraan Bidang Perindustrian Tahun 2016-2017.....	256
Tabel 2.183 Pendaftaran HaKI Kategori Desain Industri Tahun 2017	257
Tabel 2.184 Pendaftaran HKI Kategori Hak Cipta Tahun 2017	261
Tabel 2.185 Perkembangan Industri Formal s.d Tahun 2017	262
Tabel 2.186 Perkembangan Industri Non Formal Tahun 2017	263
Tabel 2. 187 Perkembangan Industri Berdasarkan Jenis Kelompok Industri Sampai dengan Tahun 2017	263
Tabel 2. 188 Jumlah Transmigran Keluar Provinsi dan Tujuan Daerah Tahun 2016-2017	263
Tabel 2.189 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Tingkat Penyelesaian Aduan Pelayanan Publik Tahun 2017	265
Tabel 2.190 Rekapitulasi Aduan Pelayanan Publik yang ditujukan ke OPD Tujuan Tahun 2016-2017	265
Tabel 2. 191 Hasil penilaian LKjP Pemerintah Provinsi Tahun 2015-2017	267
Tabel 2.192 Target dan Realisasi Legislasi Daerah Tahun 2016-2017	268
Tabel 2. 193 Jumlah Perda/Perbup/Perwal Yang difalitasi dan dievaluasi Tahun 2017	268
Tabel 2.194 Penyelesaian Sengketa Hukum (Perkara) Provinsi NTB Tahun 2017	268
Tabel 2.195 Pelaksanaan Paten di Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan akhir tahun 2017 ...	273
Tabel 2.196 Fasilitasi Pengganti Antar Waktu Tahun 2017	274
Tabel 2.197 Capaian Indikator Kinerja RPJMD Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Tahun 2017	275
Tabel 2.198 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi NTB dan Nasional Tahun 2014 - 2017.....	275
Tabel 2.199 PDRB dan Laju Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 dan 2017	276
Tabel 2.200 Perusahaan Daerah dan BUMD di Provinsi NTB Tahun 2017	277
Tabel 2.201 Deviden Dari Perusahaan Daerah dan BUMD Provinsi NTB Tahun 2015-2017	277
Tabel 2.202 Realisasi Kegiatan Lelang ULP Provinsi NTB Tahun 2016 dan 2017 Sumber dana APBD Provinsi NTB.....	278
Tabel 2.203 Realisasi Kegiatan Lelang ULP Provinsi NTB Tahun 2016 dan 2017 Sumber Dana APBN Provinsi NTB.....	278
Tabel 2.204 Event Nasional dan Internasional di NTB Tahun 2017	280
Tabel 2.205 Perkembangan Anggaran Belanja Daerah Dalam APBD BPKAD Provinsi NTB selaku SKPKD Tahun 2016-2017.....	291
Tabel 2.206 Perkembangan Belanja Daerah Dalam APBD Provinsi NTB Tahun 2016-2017	292
Tabel 2.207 Penetapan APBD Provinsi NTB Tahun 2016 - 2018	292
Tabel 2.208 Penetapan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2016 - 2018	292
Tabel 2.209 Opini BK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2016 - 2017	293
Tabel 2.210 Opini BPK-RI atas LKPD Kabupaten/Kota TA. 2013-2016.....	293
Tabel 2.211 Rekapitulasi Penyerahan Aset P3D Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat	294
Tabel 2.212 Data Usulan dan Penghapusan yang Telah Dilaksanakan oleh BPKAD Pada Tahun 2017.....	295
Tabel 2.213 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017 dengan Proyeksi Pendapatan Daerah dalam RPJMD Tahun 2013 - 2018	297
Tabel 2.214 Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2017	298
Tabel 2.215 Perkembangan Realisasi PAD Tahun 2017	299
Tabel 2.216 Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2017	300
Tabel 2.217 Penerimaan PKB dan BBNKB Tahun 2017	300
Tabel 2.218 Target dan Realisasi ASN yang Mengikuti Uji Kompetensi.....	303
Tabel 2.219 Jenis Diklat dan Jumlah Widyaiswara yang Mengikutinya Tahun 2017	304
Tabel 2.220 Capaian Penyelenggaraan Diklat Dasar/Manajerial Tahun 2017	305
Tabel 2.221 Capaian Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional Tahun 2017	306
Tabel 2.222: Evaluasi pelaksanaan RKPD Provinsi NTB Tahun 2017	307
Tabel 2.223: Permasalahan dan rekomendasi Pelaksanaan RKPD	454
Tabel 2.224 Capaian Indikator RPJMD 2013-2018 untuk tahun 2017	462

Gambar 2.1 Inflasi Tahun 2015-2017 (Persen)	10
Gambar 2.2 Pertumbuhan y to y PDRB Dengan dan Tanpa Pertambangan Bijih logam.....	12
Gambar 2.3 Pertumbuhan q to q PDRB Dengan Dan Tanpa Pertambangan Bijih logam.....	12
Gambar 2.4 Paritas Daya Beli Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2011-2013	13
Gambar 2.5 Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin 2012-2017.	14
Gambar 2.6 Indeks daya saing kabupaten/Kota se-NTB.....	15
Gambar 2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Di Provinsi NTB	16
Gambar 2.8 Perkembangan Penurunan Kasus Kematian Bayi Tahun 2015-2017	33
Gambar 2.9 Penanganan Kesehatan Ibu Tahun 2017.....	34
Gambar 2.10 Penanganan Kesehatan Anak Tahun 2017	35
Gambar 2.11 Capaian Pengembangan Desa/Kelurahan Siaga Aktif Menurut Strata Provinsi NTB Tahun 2017	37
Gambar 2.12 Kecenderungan Prevalensi Kurang Gizi di Provinsi NTB	39
Gambar 2.13 Prevalensi Berat Kurang (<i>Underweight</i>) Menurut Indeks Berat Badan menurut Umur Tahun 2016-2017.....	40
Gambar 2.14 Persentase Cakupan Jamban Keluarga Provinsi NTB Tahun 2013-2017.....	44
Gambar 2.15 Persentase KK yang Memiliki Rumah Sehat Tahun 2015 – 2017	44
Gambar 2.16 Konsumsi Beras dan Umbi-umbian 2014-2017.....	112
Gambar 2.17 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Periode Januari-Desember 2017	162
Gambar 2.18 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Menurut Sektor Januari-Desember 2017	163
Gambar 2.19 Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Provinsi NTB.....	189
Gambar 2.20 Komposisi Realisasi Produksi Ragam Olahan Hasil Perikanan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2017	193
Gambar 2.21 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017	298
Gambar 2.22 Kontribusi Komponen PAD Terhadap Realisasi PAD Tahun 2017	299
Gambar 2.23 Perkembangan Penyampaian Laporan LHKPN	302

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

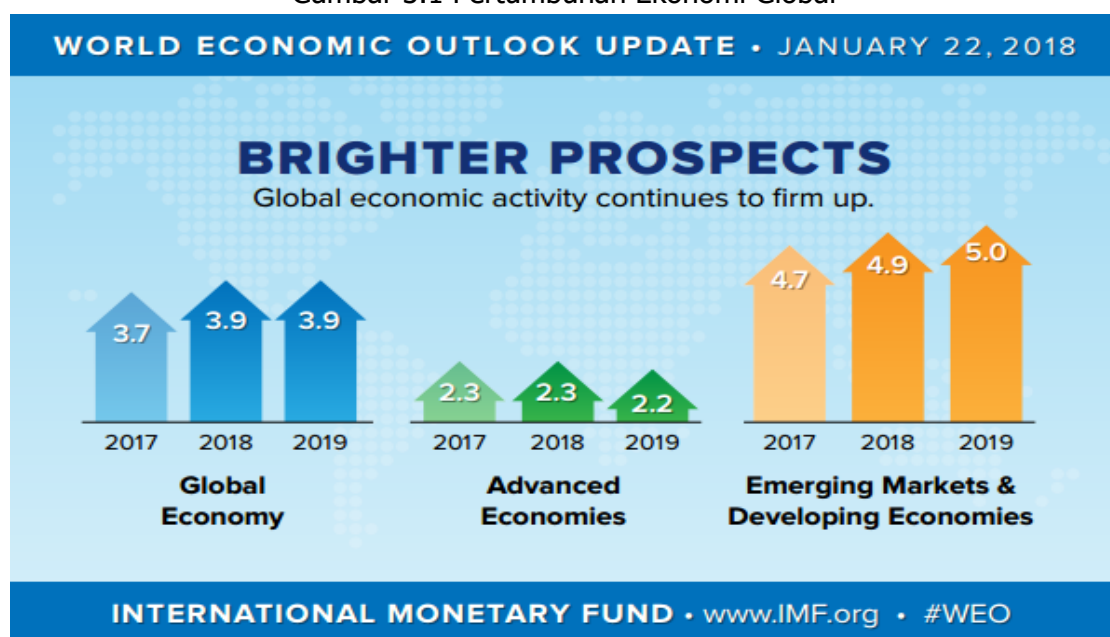
Arah kebijakan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang memiliki tema pemerataan pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Selain itu, kebijakan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat juga diarahkan untuk memantapkan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam rangka percepatan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Kebijakan perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat bersifat terbuka dan sangat dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional dan global. Oleh sebab itu, penyusunan asumsi perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 memperhitungkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian global

3.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Global

Berdasarkan data World Economy Outlook (WEO) – International Monetary Fund (IMF) pada Januari 2018, pertumbuhan global untuk 2017 diperkirakan 3,7 persen, sebesar 0,1 persen lebih tinggi dari proyeksi pada musim gugur. Kejatuhan pertumbuhan yang terbalik terutama terjadi di Eropa dan Asia namun berbasis luas, dengan kemunculan untuk pasar maju dan *emerging market* dan kelompok ekonomi berkembang yang melampaui perkiraan musim gugur sebesar 0,1 persen. Momentum kuat yang dialami pada tahun 2017 diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2018 dan tahun 2019, dengan pertumbuhan global yang terkoreksi hingga 3,9 persen pada kedua tahun tersebut atau sebesar 0,2 persen lebih tinggi dibandingkan dengan perkiraan musim gugur.

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Global



Sumber : World Economic Outlook – International Monetary Fund, 2018

Untuk perkiraan dua tahun, revisi terhadap prospek global terutama dari negara-negara maju, dimana pertumbuhan sekarang diperkirakan akan melampaui 2 persen pada tahun 2018 dan tahun 2019. Perkiraan ini mencerminkan harapan bahwa kondisi keuangan global yang menguntungkan dan sentimen yang kuat akan membantu mempertahankan percepatan permintaan baru-baru ini, terutama dalam investasi dengan dampak nyata pada pertumbuhan ekonomi dengan ekspor besar. Selain itu, reformasi pajak Amerika Serikat dan stimulus fiskal terkait diharapkan untuk sementara meningkatkan pertumbuhan Amerika Serikat, dengan permintaan yang menguntungkan untuk mitra dagang Amerika Serikat, khususnya Kanada dan Meksiko selama periode ini. Dampak makro ekonomi global yang diharapkan mencapai sekitar satu setengah dari revisi kumulatif terhadap perkiraan pertumbuhan global untuk tahun 2018 dan tahun 2019, dengan kisaran ketidakpastian seputar proyeksi awal ini.

3.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

Berdasarkan asumsi ekonomi makro yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam acara Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Kortekrenbang) Regional II Tahun 2018 di Mataram, 6 Maret 2018, bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan didukung oleh momentum pemulihan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas yang terus berlanjut di tahun 2018 dan tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi domestik yang diperkirakan akan terus meningkat dengan tingkat laju inflasi diperkirakan berada pada kisaran 2,5 – 4,5 persen. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan bergerak pada kisaran Rp.13.500 – Rp.13.700 per dolar Amerika Serikat.

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional

INDIKATOR	2017*	2018**	2019***
Pertumbuhan Ekonomi (% <i>, y-o-y</i>)	5,07	5,4	5,4 – 5,8
Inflasi (% <i>, y-o-y</i>)	3,61	3,5	2,5 – 4,5
Nilai Tukar (Rp/US\$)	13.382	13.500	13.500 – 13.700

Sumber :

**Nota Keuangan dan APBN Tahun 2017, Kementerian Keuangan*

***Nota Keuangan dan APBN Tahun 2018, Kementerian Keuangan*

****Paparan Sinkronisasi Perencanaan Pusat dan Daerah Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional Dalam RKP Tahun 2019, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas*

3.1.3 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Daerah

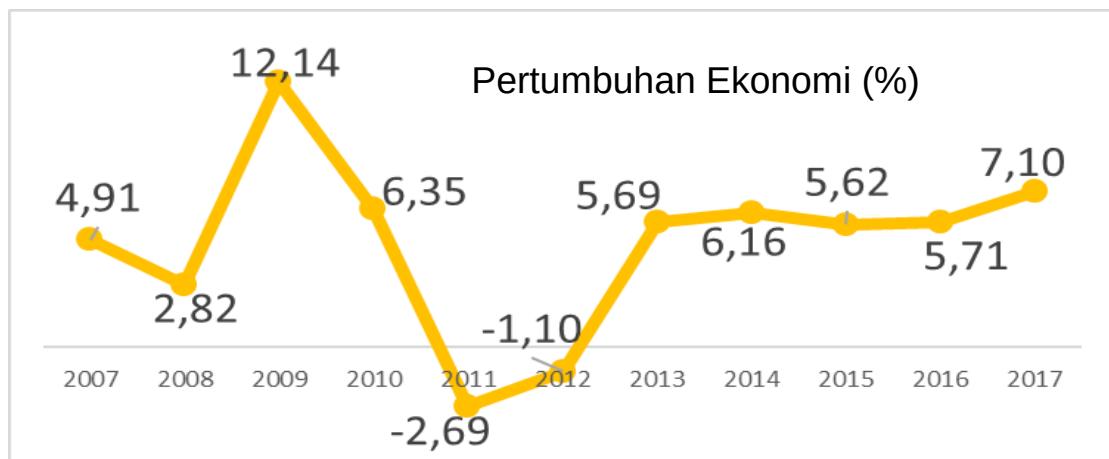
Salah satu indikator utama dalam mengukur perekonomian daerah adalah penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Tujuan pembangunan daerah harus mampu memicu peningkatan PDRB dari tahun ke tahun agar bisa membuka lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Analisis ekonomi daerah harus mampu menggambarkan dengan jelas kinerja PDRB tersebut dari berbagai aspek, termasuk perhitungannya ke sektor-sektor usaha. Indikator-indikator lain yang tak kalah penting antara lain inflasi, kemiskinan, investasi, nilai tukar dan lain-lain. Analisis ekonomi daerah dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan

permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai indikator-indikator ekonomi daerah yaitu sebagai berikut :

3.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 adalah sebesar 7,10 persen mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yakni 5,71 persen. Sektor pertanian masih menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi NTB, terutama saat sektor pertambangan dengan komoditas konsentrat yang di ekspor ke luar negeri menunjukkan kinerja yang menurun. Lapangan usaha pertanian, perdagangan, konstruksi, transportasi dan jasa keuangan mampu tumbuh membaik. Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama kurun waktu tahun 2007-2017 seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2007-2017



Sumber : BPS NTB, 2018 (diolah)

3.1.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PRDB) merupakan nilai keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi pada suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu dari sisi produksi, pengeluaran dan pendapatan.

Selama tahun 2017, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diukur dari PDRB mencapai Rp.123,9 triliun atas dasar harga berlaku, sementara atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.94,6 triliun dibandingkan dengan tahun 2016 PDRB atas harga berlaku dan konstan masing-masing Rp.116,5 triliun dan Rp.94,5 triliun. Berdasarkan PDRb atas dasar harga konstan 2010 tahun 2017 terhadap 2016, maka pertumbuhan ekonomi NTB hanya tumbuh sebesar 0,11 persen. Rendahnya pertumbuhan tersebut lebih dikarenakan adanya penurunan kinerja pada kegiatan pertambangan bijih logam dibanding 2016, sehingga berdampak pada penurunan nilai tambah bruto yang cukup berarti pada lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan pertumbuhan sebesar -19,86 persen.

Tabel 3.2 PDRB Tahun 2015-2017 (Milyar Rupiah)

Kode	Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
		2015	2016*	2017**	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.480	24.691	27.230	18.965	19.587	20.880
B	Pertambangan dan Penggalan	23.823	26.232	24.109	23.175	24.501	19.635
C	Industri Pengolahan	4.064	4.505	4.910	3.773	3.971	4.207
D	Pengadaan Listrik, Gas	60	74	91	67	75	78
E	Pengadaan Air	90	98	106	66	69	72
F	Konstruksi	8.849	9.983	10.988	7.744	8.414	9.055
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12.965	14.534	16.381	10.337	11.148	12.112
H	Transportasi dan Pergudangan	7.645	8.202	8.918	5.680	5.919	6.345
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.207	2.517	2.827	1.404	1.545	1.663
J	Informasi dan Komunikasi	1.861	2.045	2.303	1.825	1.986	2.158
K	Jasa Keuangan	3.181	3.709	4.257	2.480	2.796	3.075
L	Real Estate	3.198	3.506	3.834	2.356	2.502	2.678
M,N	Jasa Perusahaan	173	193	211	139	149	158
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.623	6.992	7.438	4.362	4.492	4.641
P	Jasa Pendidikan	4.609	5.152	5.681	3.595	3.813	4.062
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.836	1.997	2.184	1.613	1.705	1.826
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.001	2.188	2.460	1.754	1.865	2.002
PDRB Dengan Tambang		105.665	116.528	123.927	89.338	94.538	94.645
PDRB Tanpa Tambang		84.632	93.419	103.345	68.633	72.729	77.889

Sumber : BPS NTB, 2018

Ekonomi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2017 masih didominasi oleh sektor-sektor primer, *share* tertinggi terhadap PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat berturut-turut adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 21,97 persen, kemudian diikuti oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalan sebesar 19,45 persen dan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,22 persen. Mengingat pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami fluktuatif akibat fluktuasinya pertambangan bijih logam, maka pertumbuhan perekonomian Nusa Tenggara Barat tanpa pertambangan bijih logam mengalami pertumbuhan yang signifikan mencapai 7,10 persen.

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010) dan Distribusi PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku) Tahun 2015-2017 (Persen)

Kode	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010			Distribusi PDRB ADHK 2010		
		2015	2016*	2017**	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,13	3,28	6,60	21,23	20,72	22,06
B	Pertambangan dan Penggalian	106,20	5,72	(19,86)	25,94	25,92	20,75
C	Industri Pengolahan	3,12	5,26	5,93	4,22	4,20	4,45
D	Pengadaan Listrik, Gas	0,89	11,25	4,29	0,07	0,08	0,08
E	Pengadaan Air	3,79	4,89	4,61	0,07	0,07	0,08
F	Konstruksi	7,27	8,64	7,62	8,67	8,90	9,57
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,05	7,85	8,64	11,57	11,79	12,80
H	Transportasi dan Pergudangan	6,47	4,20	7,19	6,36	6,26	6,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,65	10,09	7,61	1,57	1,63	1,76
J	Informasi dan Komunikasi	8,34	8,79	8,66	2,04	2,10	2,28
K	Jasa Keuangan	9,32	12,73	9,98	2,78	2,96	3,25
L	Real Estate	6,83	6,18	7,05	2,64	2,65	2,83
M,N	Jasa Perusahaan	5,76	6,99	5,87	0,16	0,16	0,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,69	2,98	3,30	4,88	4,75	4,90
P	Jasa Pendidikan	7,27	6,04	6,54	4,02	4,03	4,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,77	5,70	7,07	1,81	1,80	1,93
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,21	6,29	7,35	1,96	1,97	2,12
PDRB Dengan Tambang		21,76	5,82	0,11	100	100	100
PDRB Tanpa Tambang		6,49	5,97	7,10			

Sumber: BPS NTB, 2018

Dari sisi PDRB pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat tahun 2017 masih mampu tumbuh positif sebesar 0,11 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016. Melambatnya kinerja perekonomian Nusa Tenggara Barat pada tahun 2017 tidak dapat dipisahkan dari turunnya ekspor luar negeri, dimana konsentrat tembaga sebagai penyumbang terbesar ekspor luar Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tercatat hanya komponen Ekspor Luar Negeri mengalami kontraksi hingga -28,49 persen. Sementara komponen dengan laju tertinggi adalah komponen Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPR) yang mampu tumbuh 6,14 persen dengan *share* terhadap total PDRB sebesar 1,46 persen. Kinerja positif ini diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan masing-masing tercatat tumbuh 5,75 persen dan 3,11 persen. Komponen Konsumsi Rumah Tangga yang merupakan komponen dominan dengan *share* 60,78 persen terhadap total PDRB Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya mampu tumbuh 1,80 persen.

Tabel 3.4 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2017 (Juta Rupiah)

No	Komponen	PDRB Harga Berlaku			PDRB Harga Konstan 2010		
		2015	2016*	2017**	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Konsumsi Rumah Tangga	66.021.500	71.042.525	75.319.385	53.385.826	54.328.121	55.304.387
2	Konsumsi LNPRT	1.512.375	1.643.778	1.810.762	1.182.649	1.243.292	1.319.662
3	Konsumsi Pemerintah	16.862.329	17.994.934	19.727.377	11.321.417	11.519.347	12.181.161
4	PMTB	36.122.921	41.151.608	44.028.474	25.615.716	27.709.645	28.572.547
5	Perubahan Inventori	632.955	962.901	993.754	222.190	376.693	384.014
6	Ekspor Luar Negeri	21.137.872	23.087.588	17.526.279	15.930.942	18.514.145	13.239.097
7	Impor Luar Negeri	3.933.929	3.744.358	3.903.926	2.834.461	2.537.080	2.573.732
8	Net Ekspor Antar Daerah	(32.691.281)	(35.610.508)	(31.575.207)	(15.486.293)	(16.616.415)	(13.782.144)
PDRB		105.664.742	116.528.468	123.926.898	89.337.986	94.537.749	94.644.993

Sumber : BPS NTB, 2018

Tabel 3.5 Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2015-2017 (Persen) dengan Tambang Logam

No	Komponen	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010			Distribusi PDRB ADHK 2010		
		2015	2016*	2017**	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Konsumsi Rumah Tangga	3,04	1,77	1,80	59,76	57,47	58,43
2	Konsumsi LNPRT	4,79	5,13	6,14	1,32	1,32	1,39
3	Konsumsi Pemerintah	1,88	1,75	5,75	12,67	12,18	12,87
4	PMTB	11,61	8,17	3,11	28,67	29,31	30,19
5	Perubahan Inventori	(43,79)	69,54	1,94	0,25	0,40	0,41
6	Ekspor Luar Negeri	293,48	16,22	(28,49)	17,83	19,58	13,99
7	Impor Luar Negeri	27,01	(10,49)	1,44	3,17	2,68	2,72
8	Net Ekspor Antar Daerah	(2,23)	7,30	(17,06)	-17,33	-17,58	-14,56
PDRB		21,76	5,82	0,11	100,00	100,00	100,00

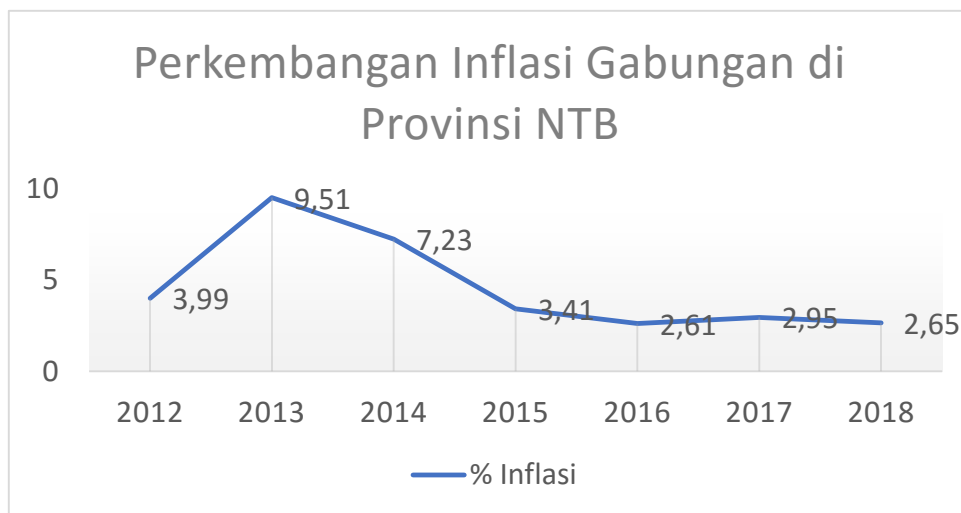
Sumber : BPS NTB, 2018

3.1.3.3 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan dan juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Mengingat pentingnya peran inflasi terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah, menjadikan indikator ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Tingkat inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai indikator. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa.

Gambar 3.3 Perkembangan Inflasi Gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2012-2018



Sumber : BPS NTB, 2018 (diolah)

Perkembangan inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2012-2018 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2012, inflasi cukup rendah yaitu sebesar 3,99 persen. Pada tahun 2013 inflasi di Provinsi NTB cukup tinggi mencapai sebesar 9,51 persen. Namun dalam kurun waktu tahun 2013-2018 inflasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat terus ditekan hingga pada tahun 2018, inflasi hanya 2,65 persen.

Penyebab tingginya inflasi pada tahun 2013 karena terjadinya fluktuasi hasil produksi berbagai komoditi pertanian yang menjadi andalan Provinsi Nusa Tenggara Barat diantaranya tembakau mengalami gagal panen yang berdampak pada melonjaknya harga barang tersebut serta diikuti dengan naiknya harga-harga komoditi pertanian lainnya. Disamping itu, tingginya kenaikan inflasi tahun 2013 disebabkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Berdasarkan hasil pemantauan, perkembangan harga berbagai komoditas secara umum menunjukkan kenaikan. Pada bulan Januari 2018 Nusa Tenggara Barat mengalami inflasi sebesar 0,47 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 129,88 pada bulan Desember 2017 menjadi 130,49 pada bulan Januari 2018. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Bahan Makanan sebesar 1,08 persen; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 0,83 persen; Kelompok Sandang sebesar 0,24 persen; Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,2 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,16 persen dan Kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 0,14 persen. Sedangkan

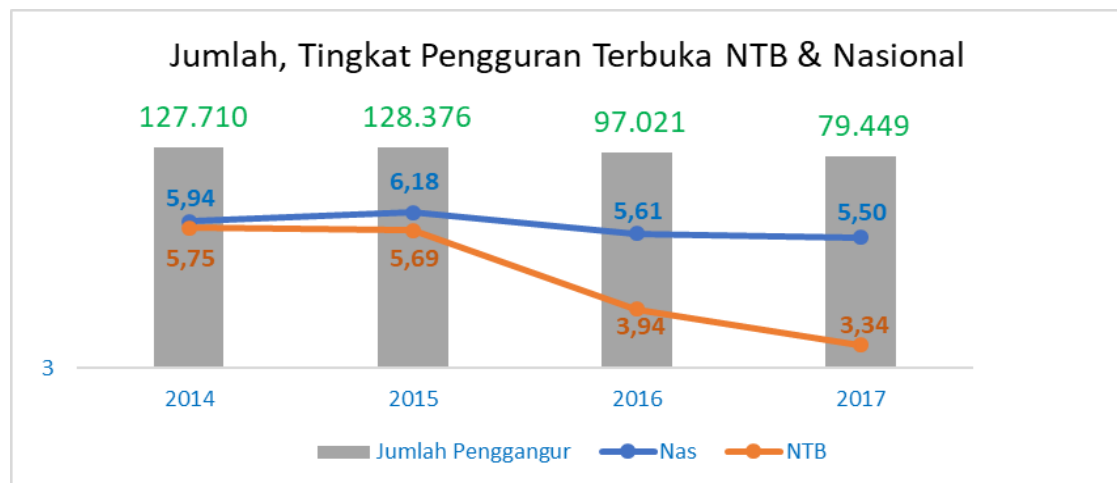
penurunan indeks terjadi pada Kelompok Transport, Komunikasi dan Jasa Keuangan sebesar 0,37 persen.

Dengan demikian naik maupun turunnya inflasi di daerah dipengaruhi oleh adanya perubahan kebijakan pemerintah pada sektor ekonomi. Laju inflasi tahun ke tahun Januari 2018 sebesar 2,65 persen lebih rendah dibandingkan dengan laju inflasi tahun ke tahun di bulan Januari 2017 sebesar 2,95 persen.

3.1.3.4 Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2014-2017 cenderung mengalami fluktuasi. Angka TPT Agustus 2013 tercatat 5,30 persen, angka tersebut naik menjadi 5,75 persen pada Agustus 2014, kemudian menurun lagi menjadi 5,69 persen pada Agustus 2015. Jika dilihat selama tahun 2016-2017, TPT Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah berada di bawah 4 persen yaitu 3,94 persen pada Agustus 2016 dan menurun lagi menjadi 3,34 persen pada Agustus 2017.

Gambar 3.4 Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2017



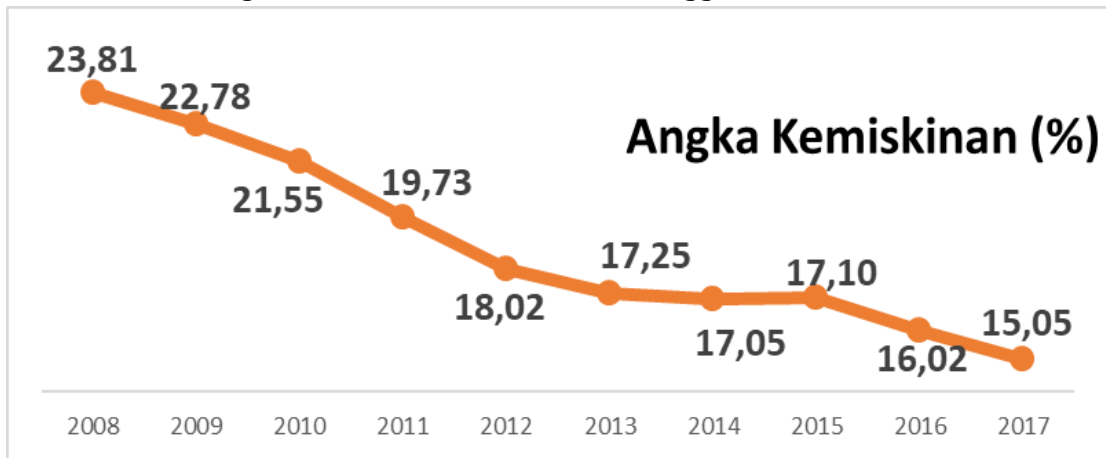
Sumber : BPS NTB, 2018

3.1.3.5 Kemiskinan

Penurunan persentase kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari 16,07 persen pada Maret 2017 menjadi 15,05 persen pada September 2017, diklaim sebagai keberhasilan penurunan angka kemiskinan Provinsi yang terbaik kedua secara nasional dengan angka penurunan 1,02 persen setelah Papua Barat 1,98 persen.

Pada tahun 2008 angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat tercatat 23,81 persen dan terus menurun hingga tahun 2014 sebesar 17,05 persen. Pada tahun 2015 angka kemiskinan naik menjadi 17,10 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 sebesar 15,05 persen sebagaimana terlihat pada gambar dibawah.

Gambar 3.5 Angka Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2008-2017



Sumber: BPS NTB, 2018 (diolah)

3.1.3.6 Ketimpangan Regional

Tingkat ketimpangan antara daerah yang diukur menggunakan Indeks Wiliamson dimana semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi.

Ketimpangan regional di Provinsi Nusa Tenggara Barat diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang fluktuatif menggambarkan kenaikan dan penurunan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Sepanjang tahun 2011-2016 angka ketimpangan regional berkisar pada angka 0,28 sebagaimana digambarkan dibawah ini.

Gambar 3.6 Nilai Indeks Wiliamson (Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016



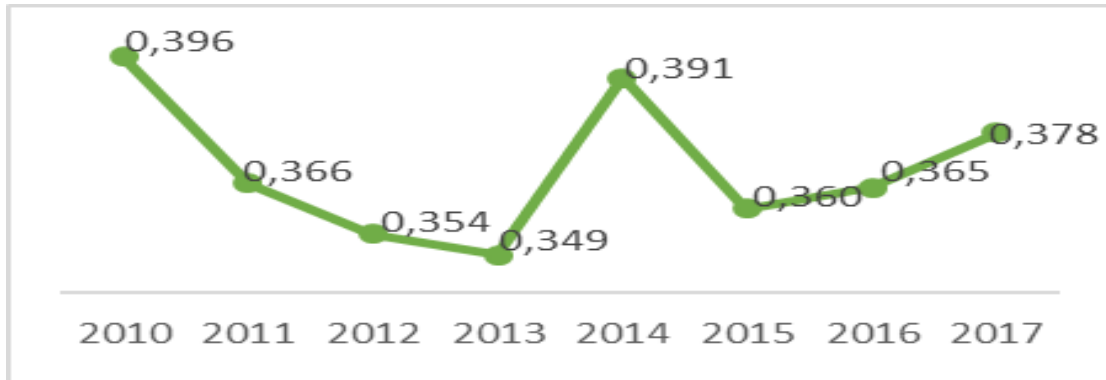
Sumber: BPS NTB, 2018 (diolah)

3.1.3.7 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Bila nilai Indeks Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila nilai Indeks Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara

0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Gambar 3.7 Indeks Gini Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2017



Sumber: BPS NTB, 2018 (diolah)

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Pasal 6 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 22 ayat (1), ada 4 (empat sumber Pendapatan Asli Daerah yang memegang peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu : (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan; dan (iv) Lain-lain PAD yang sah.

Kebijakan pengelolaan penerimaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketergantungan pada pemerintah pusat dapat diminimalisir. Sedangkan kebijakan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan sosial dasar, pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis produk unggulan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup serta pembangunan infrastruktur wilayah mendukung pembangunan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Adapun kebijakan pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, atau sebaliknya untuk memanfaatkan adanya surplus anggaran. Jika APBD diperkirakan dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, pembentukan dana cadangan maupun penyertaan modal, namun bila APBD diperkirakan defisit maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu untuk menutupi defisit tersebut.

3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah bertujuan untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal daerah dengan cara menerapkan pelayanan prima pada unit perangkat daerah pengelola sumber pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah serta berupaya untuk menggali dan mengembangkan potensi sumber penerimaan daerah.

Pengelolaan pendapatan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan, serta penerapan pelayanan prima pada unit pengelola melalui upaya penggalan dan pengembangan sumber penerimaan daerah. Adapun kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

Untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, maka Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai upaya intensifikasi pendapatan daerah sebagai berikut :

- a. Melakukan pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah secara kontinyu;
- b. Meningkatkan kerjasama dengan mitra Samsat yaitu kepolisian dan jasa raharja;
- c. Melaksanakan operasi gabungan (OPGAB) untuk menjangkit kendaraan luar daerah dan kendaraan yang menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB) bekerjasama dengan Pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan;
- d. Melakukan sosialisasi dan penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak/Masyarakat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota;
- e. Mengusulkan kepada pemerintah pusat tentang kebijakan NJKB didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- f. Melakukan inovasi berupa penerapan aplikasi *e-samsat*, pendataan kendaraan luar daerah secara online, penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, samsat nonstop service 24/7 dengan menambah sentra layanan dan jam layanan wajib pajak, pemutakhiran data melalui agen samsat, pembuatan aplikasi retribusi online dan inovasi dalam integrasi data sistem/database kendaraan dengan Kepolisian;
- g. Menyediakan sarana informasi dan pengaduan pelayanan pajak daerah melalui *call center* 1500-186;
- h. Menambah sentra layanan samsat keliling guna lebih mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah;
- i. Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- j. Memberikan insentif atau rasionalisasi pajak/retribusi daerah;
- k. Melakukan inventarisasi terhadap aset-aset daerah yang potensial untuk dijadikan sumber PAD;
- l. Optimalisasi pelaksanaan perda yang berkaitan dengan retribusi yang penerimaannya dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- m. Melaksanakan rapat koordinasi/evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Perangkat Daerah pengelola pendapatan daerah setiap triwulan;
- n. Meningkatkan ketersediaan sarana/fasilitas pendukung pajak dan retribusi daerah;
- o. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi penerimaan yang bersumber dari Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, dengan terus memperhatikan penegasan komponen yang berpengaruh terhadap perhitungan jumlah DAU dan DAK;
- p. Meningkatkan penggalan sumber pendapatan yang potensial seperti Cukai Tembakau;

- q. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka pemenuhan pertanggungjawaban sebagai persyaratan pengajuan/pencairan DAU/DAK;
- r. Menganalisis beberapa kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi yang dinilai tidak efektif dan selanjutnya dialihkan kepada DAK sehingga meningkatkan target pendapatan Dana Perimbangan;
- s. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna untuk memperoleh pendapatan hibah dari pemerintah pusat; dan
- t. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah khususnya guna menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD tepat waktu serta mempertahankan opini WTP atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK yang merupakan kriteria dalam memperoleh Dana Insentif Daerah (DID).

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu kebijakan umum belanja daerah tahun 2019 diarahkan untuk :

- a. Belanja pegawai yang terdiri atas belanja tidak langsung yaitu untuk kebutuhan pembayaran gaji pokok dan tunjangan PNSD dengan memperhitungkan kenaikan gaji dan kebutuhan pengangkatan CPNSD sesuai formasi pegawai tahun 2019 serta biaya kegiatan aparatur dibidang pelayanan yang diarahkan secara lebih efektif dan efisien;
- b. Mengalokasikan belanja hibah dan bantuan sosial sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam menutupi kesenjangan fiskal anggaran dan aspek keadilan serta pemerataan;
- c. Berupaya mengalokasikan belanja sesuai dimensi pembangunan Nawa Cita sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
- d. Pengalokasian anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari belanja daerah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD;
- e. Berupaya mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- f. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan upaya pengentasan kemiskinan;
- g. Melanjutkan program percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan program unggulan lainnya;
- h. Memberdayakan masyarakat di daerah penghasil tembakau, pemberdayaan menyangkut penyediaan sarana prasarana pendukung bagi pengembangan ekonomi lokal, peningkatan keterampilan, dukungan usaha ekonomi produktif maupun penyediaan infrastruktur strategis

Selain itu, kebijakan belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas dalam kerangka kesinambungan implementasi *money follow program*.

3.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam penyertaan penganggaran daerah, pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran proyeksi. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, atau sebaliknya untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Apabila APBD diperkirakan dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk giro/deposito, pembentukan dana cadangan maupun penyertaan modal, namun bila APBD diperkirakan dalam keadaan defisit maka kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu untuk menutupi defisit tersebut.

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD Provinsi NTB 2013-2017

Tahun	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (Berkurang)	Capaian (%)
1	2	3	4 = 3 - 2	5
Pendapatan				
2013	2.594.808.258.800,00	2.379.555.590.300,46	(215.252.668.499,54)	91,70
2014	2.923.616.362.119,00	2.789.427.241.814,45	(134.189.120.304,55)	95,41
2015	3.555.737.341.478,00	3.448.585.631.903,26	(107.151.709.574,74)	96,99
2016	3.802.933.445.799,00	4.949.996.798.342,97	147.063.352.543,97	103,87
2017	5.063.036.807.258,00			
Belanja				
2013	2.586.039.126.500,00	2.374.904.157.964,81	(211.134.968.535,19)	91,84
2014	2.897.422.574.129,80	2.614.100.101.360,52	(283.322.472.769,28)	90,22
2015	3.620.067.736.772,33	3.364.903.671.428,20	(255.164.065.344,13)	92,95
2016	3.953.333.992.191,75	3.764.301.951.074,96	(189.032.041.116,79)	95,22
2017	5.488.040.414.615,76			
Penerimaan Pembiayaan				
2013	27.998.612.700,00	28.134.779.675,15	136.166.975,15	100,49
2014	13.806.212.010,80	13.828.457.840,80	22.245.830,00	100,16
2015	150.005.598.294,33	198.747.834.968,69	48.742.236.674,36	132,49
2016	197.404.592.443,75	198.662.806.056,75	1.258.213.613,00	100,64
2017	445.003.607.357,76			
Pengeluaran Pembiayaan				
2013	36.767.745.000,00	19.630.000.000,00	(17.137.745.000,00)	53,39
2014	40.000.000.000,00	39.800.000.000,00	(200.000.000,00)	99,50
2015	85.675.203.000,00	85.675.203.000,00	0,00	100,00
2016	47.004.046.051,00	46.004.045.967,00	(1.000.000.084,00)	97,87
2017	20.000.000.000,00			

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB Tahun 2013-2017

3.2.4 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

A. Proyeksi pendapatan daerah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2019

	URAIAN	TAHUN	
		APBD 2018	Proyeksi 2019
	PENDAPATAN DAERAH	5.230.285.800.854,00	5.223.315.340.125
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.719.188.366.054	1.739.809.980.622
Ia	Pendapatan Pajak Daerah	1.272.294.593.103	1.338.509.210.000
	a. Pajak Kendaraan Bermotor	382.500.000.000	419.449.500.000
	b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	334.307.464.103	366.601.565.000
	c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	211.545.000.000	232.001.401.000
	d. Pajak Air Permukaan	1.100.000.000	1.210.000.000
	e. Pajak Rokok	342.842.129.000	319.246.744.000
Ib	Pendapatan Retribusi Daerah	33.294.000.000	15.437.167.305
	Retribusi Jasa Umum	8.250.000.000	2.000.000.000
	Retribusi Jasa Usaha	23.119.000.000	11.532.272.542
	Retribusi Perijinan Tertentu	1.925.000.000	1.904.894.762
Ic	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	123.743.347.951	123.743.347.951
Id	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	289.856.425.000	262.120.255.366
II	DANA PERIMBANGAN	3.281.371.416.400	3.390.592.859.503
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	289.331.903.400	350.680.714.295
	Dana Alokasi Umum	1.537.777.886.000	1.562.382.332.176
	Dana Alokasi Khusus	1.454.261.627.000	1.477.529.813.032
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH	229.726.018.400	92.912.500.000
	Pendapatan Hibah	202.476.018.400	65.000.000.000
	Dana Penyesuaian	27.250.000.000	27.912.500.000

B. Proyeksi Belanja Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Proyeksi Belanja Tidak Langsung Daerah Tahun 2019

NO	URAIAN	2018	Proyeksi 2019	
		Rp	Rp	(%)
1	Belanja Pegawai	1.384.087.389.520,00	1.487.866.749.241,15	7,50
2	Belanja Subsidi	-	5.000.000.000,00	
3	Belanja Hibah	991.575.260.125,00	891.575.260.125,00	(10,08)
4	Belanja Bantuan Sosial	8.777.140.000,00	16.301.205.000,00	85,72
5	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/kabupaten/Kota dan pemerintah Desa	557.742.017.709,00	622.294.021.000,00	11,57
6	Belanja bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik	6.700.000.000,00	50.000.000.000,00	646,27
7	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	15.000.000.000,00	200,00
Total		2.953.881.807.354,00	3.088.037.235.366,15	4,54

C. Proyeksi Belanja Langsung Daerah Tahun 2019

Berdasarkan matrik RKPD sebagaimana tertuang dalam aplikasi e-RKPD, total belanja langsung RKPD Tahun 2019 sebesar **Rp. 3.668.178.139.440**

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada RKPD Tahun 2019 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target janji dan Visi Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2005-2025. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Hal ini berdasarkan Pasal 147 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah provinsi, penyusunan RKPD bagi Daerah yang belum memiliki RPJMD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD provinsi berkenaan serta arah kebijakan dan isu strategis RKP, serta mengacu pada RPJMN untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dengan pembangunan nasional.

Penyusunan BAB ini dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja daerah serta proyeksi kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah sebagaimana telah dijabarkan dalam BAB sebelumnya. Substansi dokumen RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 mendasarkan dan memperhatikan :

1. Arah kebijakan Pemerintah Pusat yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
2. Sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2018-2023 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025.
3. Konsistensi antara kebijakan pusat dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai upaya penyelesaian target-target nasional maupun provinsi.
4. Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Nusa Tenggara Barat yang sifatnya mendesak dan memerlukan penanganan segera pada tahun 2019.

Penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019 juga diarahkan untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025. Selanjutnya, penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Barat juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP.

Prioritas pembangunan daerah yang telah disusun ini akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjabarkan program dan kegiatan tahun 2019.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Tujuan pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan

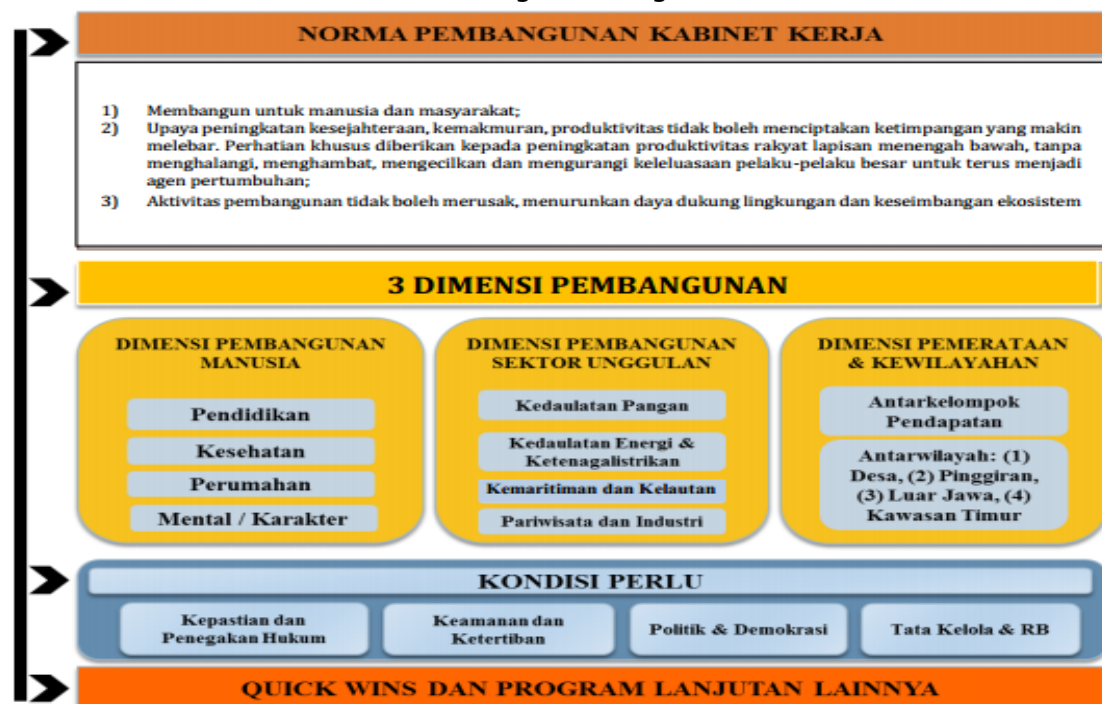
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan landasan dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah.

Strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi 9 (sembilan) agenda Prioritas (Nawa Cita) dengan visi **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**, yaitu :

- Cita 1* : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2* : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- Cita 3* : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Cita 4* : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5* : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6* : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7* : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8* : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9* : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Nawa Cita dapat dijelaskan oleh Gambar berikut :

Gambar 4.1 Strategi Pembangunan Nasional



Sumber : RPJMN 2015-2019

Selanjutnya sembilan cita-cita (Nawa Cita) dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 yang terdiri dari 4 (empat)

bagian utama yakni : (1) norma pembangunan; (2) tiga dimensi pembangunan; (3) kondisi perlu agar pembangunan dapat berlangsung; serta (4) program-program *quick wins*. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor-sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2015-2019 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Tahun 2019 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir penjabaran dan pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Sebagai tahun terakhir pelaksanaan RPJMN, RKP 2019 lebih difokuskan pada pembangunan manusia Indonesia dengan tema **"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas"**. Penyusunan RKP 2019 difokuskan pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Dalam penyusunan RKP 2019, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif, dan spasial, yaitu:

1. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Untuk RKP tema utama adalah "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas" yang dilaksanakan dalam 5 (lima) Prioritas Nasional (PN) yaitu ; (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; dan (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu;
2. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
3. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran kementerian/lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
4. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan yang lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Penyusunan RKP 2019 juga telah memperhatikan:

1. Perkuatan perencanaan dan penganggaran RKP 2019 dengan pendekatan pada penggunaan sistem *e-planning*;
2. Pengendalian perencanaan;
3. Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan;
4. Perkuatan integrasi sumber pendanaan yang meliputi belanja kementerian/lembaga, belanja transfer ke daerah, pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN), dan belanja non-kementerian/lembaga yang berasal dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), dan swasta.

Sesuai dengan visi pembangunan "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong", RKP 2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan.

Tabel 4.1 Indikator Pembangunan Tahun 2019

No	Indikator Pembangunan	Skenario 2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,4 – 5,8
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,2
3.	Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,5
4.	Rasio Gini (Indeks)	0,38 – 0,39
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,98

Sumber: Rancangan Awal RKP 2019

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJPD 2005-2025

Visi pembangunan jangka panjang Nusa Tenggara Barat dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 adalah *"Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Barat Yang Beriman, Maju Dan Sejahtera"*. Visi tersebut diwujudkan dengan 5 (lima) misi, yaitu : *Misi 1 Mewujudkan masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran; Misi 2 Mewujudkan masyarakat sejahtera; Misi 3 Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; Misi 4 Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah; Misi 5 Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.*

Untuk dapat memberikan arahan yang jelas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang daerah, ditentukan sasaran pokok pada setiap misi beserta arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1 : Terwujudnya masyarakat beriman, bermoral, berbudaya, dan berkesadaran hukum, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya peranan lembaga pemerintahan sebagai regulator yang diikuti dengan semakin menurunnya peranan sebagai pelaku kegiatan di masyarakat.
2. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Terwujudnya perikehidupan masyarakat yang dinamis, berkeadilan, aman, tertib, dan harmonis.
5. Makin mantapnya peranan budaya dalam pembangunan daerah.

Sedangkan arah kebijakannya sebagai berikut :

- a. Mewujudkan masyarakat yang tangguh, kompetitif dan bermoral tinggi berdasarkan nilai-nilai Agama dan nilai budaya. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi
 - Pemantapan fungsi dan peranan agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai kemajuan dan pembangunan.
 - Peningkatan fungsi dan peran tokoh-tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok agama dan kelompok masyarakat.

- Penguatan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga budaya dalam peningkatan pembinaan kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis.
 - Penguatan fungsi dan peran tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan kehidupan sosial kemasyarakatan.
- Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah perkotaan, pedesaan, dan kawasan rentan konflik.
- b Mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi :
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
 - Peningkatan, pemantapan, dan penguatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hukum dan HAM.
 - Pemantapan dan penguatan peran lembaga sosial masyarakat dalam turut bertanggung jawab dan berperan aktif menciptakan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan polisi.
 - Peningkatan kualitas kelembagaan dan profesionalisme pamswakarsa.
- c Memantapkan peranan budaya dalam pembangunan daerah. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi :
- Penataan pembangunan budaya daerah dan sistem sosial yang berakar dan unik, seperti religius, kebersamaan, dan persatuan.
 - Revitalisasi dan reaktualisasi tata nilai budaya daerah yang unggul.
 - Pengembangan bentuk-bentuk pengungkapankreativitas melalui kesenian dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia.
 - Pengembangan budaya iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dan budaya produktif.
- d Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut meliputi :
- Peningkatan fasilitasi akses masyarakat terhadap segala informasi yang dibutuhkan dan pelibatan masyarakat dalam berbagai proses pengambilan keputusan pembangunan daerah.
 - Peningkatan kesadaran dan penghayatan masyarakat terhadap hak-haknya sebagai warga negara serta bentuk-bentuk perilaku merasa memiliki "daerahnya" dan taat hukum.
 - Peningkatan pelayanan dan bantuan hukum kepada masyarakat dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah perkotaan dan pedesaan.

Indikator keberhasilan dari misi ini adalah menurunnya konflik antar kelompok masyarakat dan antar umat beragama, menurunnya angka indeks kriminalitas, meningkatnya indeks kesetaraan gender, menurunnya angka korban kekerasan dalam rumah tangga dan *trafficking*, meningkatnya aktivitas berkesenian dan apresiasi budaya masyarakat, meningkatnya minat baca masyarakat, dan meningkatnya rasio jumlah perpustakaan dengan penduduk.

Misi 2 : Terwujudnya masyarakat sejahtera, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita riil penduduk terus meningkat, tingkat pengangguran tidak lebih dari 5 persen dan angka kemiskinan dibawah 10 persen.
2. Terpenuhinya kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat.
3. Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk, yang dicirikan dengan terbebasnya penduduk Nusa Tenggara Barat dari buta huruf, keterampilan lulusan yang sesuai dengan permintaan pasar kerja, dan rata-rata lama sekolah penduduk menjadi 12 tahun.
4. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, yang dicirikan dengan terbebasnya penduduk Nusa Tenggara Barat dari penyakit dasar, menurunnya angka kematian bayi, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita. Seluruh indikator kesehatan sama/mendekati rata-rata nasional.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjangnya adalah sebagai berikut :

- a. Menjamin ketersediaan pangan dan gizi masyarakat. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
 - Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik jumlah maupun gizinya, aman, dan terjangkau.
 - Mengembangkan sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
 - Pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi di daerah serta pemenuhan konsumsi seimbang.
 - Optimalisasi peran kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi.
- b. Menyediakan kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
 - Penelitian dan pengembangan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari masyarakat dan lembaga keuangan formal dan non-formal.
 - Peningkatan dan optimalisasi kualitas pemukiman rakyat.
 - Fasilitasi pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.
 - Pemanfaatan dan pengembangan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari lembaga keuangan formal dan non-formal.
 - Optimalisasi pemanfaatan potensi pembiayaan perumahan yang berasal dari masyarakat.
- c. Menyediakan lapangan kerja. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
 - Penelitian dan pengembangan potensi angkatan kerja dan peluang lapangan kerja formal.
 - Peningkatan produktivitas dan penempatan tenaga kerja agar dapat bersaing dan menghasilkan nilai tambah yang tinggi.
 - Peningkatan pelayanan kesejahteraan pekerja di sektor informal.
 - Peningkatan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak.

Adapun prioritas lokasi meliputi daerah perkotaan, kawasan strategis industri dan kawasan agropolitan.

- d Meningkatkan kualitas penduduk. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
- Penelitian dan pengembangan database jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.
 - Penataan sistem administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
 - Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk menuju terbentuknya keluarga kecil berkualitas.
 - Penataan persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- e Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
- Penelitian dan pengembangan database pelayanan pendidikan di semua jenjang
 - Peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat dan semua jenjang pendidikan.
 - Fasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif.
 - Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.
 - Keberlanjutan peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan kualitas hidup dan produktivitas penduduk, serta menumbuhkan kebanggaan kebangsaan dan akhlak mulia.
- f Meningkatkan pelayanan masyarakat. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
- Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau pada setiap strata pelayanan pada berbagai tingkat wilayah.
 - Peningkatan promosi, pengobatan, rehabilitasi dan prevensi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - Penambahan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat.
 - Peningkatan dan penguatan sistem pelayanan kesehatan.
 - Peningkatan jumlah tenaga kesehatan dan pemberdayaan profesi kesehatan.
- g Meningkatkan kesejahteraan sosial. Agenda terhadap arah kebijakan tersebut adalah :
- Penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang memadai.
 - Peningkatan kualitas kesejahteraan dan produktivitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
 - Peningkatan sistem pembiayaan sosial ekonomi masyarakat miskin/terlantar dan jaminan sosial daerah (Jamsosda) bagi PMKS.
 - Peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas termasuk pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - Pengembangan dan penataan sistem perlindungan dan jaminan sosial untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan sosial dasar.
 - Penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat pasca bencana alam.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah perkotaan dan pedesaan.

Indikator keberhasilan dari misi ini adalah menurunnya angka gizi buruk dan gizi kurang; menurunnya angka kemiskinan hingga sama dengan rata-rata nasional; meningkatnya angka persentase kepemilikan rumah; menurunnya angka pengangguran hingga mencapai angka dibawah 5 persen; menurunnya angka pertumbuhan penduduk mendekati 0 persen; meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah, meningkatnya lama sekolah menjadi 12 tahun, dan angka melek huruf diatas 95 persen; meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi, dan menurunnya prevalensi kurang gizi; menurunnya jumlah PMKS; dan meningkatnya fasilitas dan mutu pelayanan sosial masyarakat.

Misi 3 : Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah dan semua lapisan masyarakat. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah di Nusa Tenggara Barat.
2. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.
3. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025 adalah sebagai berikut :

- a Meningkatkan pemerataan pembangunan. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
 - Pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya.
 - Pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil melalui pemberdayaan masyarakat secara langsung, dan jaminan akses terhadap pelayanan publik.
 - Pemanfaatan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan spasial bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan.
 - Fasilitasi pembangunan perdesaan melalui pengembangan agropolitan, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang, peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi, dan pengembangan *social capital* dan *human capital*.
 - Percepatan pembangunan kota-kota kecil dan menengah untuk dapat menjalankan peran sebagai motor penggerak pembangunan wilayah-wilayah sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kota.
 - Peningkatan konektivitas dan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.
 - Pengelolaan pertanahan secara efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah strategis, desa tertinggal dan terpencil, kawasan agropolitan, perkotaan dan industri.

- b Mengurangi kemiskinan dalam masyarakat. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Penelitian dan pengembangan database dan strategi *mainstreaming* penanggulangan kemiskinan daerah.
- Perlindungan, pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan khususnya pada layanan akses dan mutu pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
- Peningkatan pemahaman tentang pentingnya perwujudan hak-hak dasar masyarakat miskin.

Adapun prioritas lokasi meliputi wilayah pedesaan tertinggal dan terpencil, daerah perkotaan dan perbatasan.

- c Mewujudkan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri, serta terciptanya kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukumnya.
- Penataan produk hukum sesuai hirarki perundang-undangan dan kearifan lokal.
- Penguatan kelembagaan dan profesionalisme aparat hukum.
- Penegakan supremasi hukum dan HAM, pembangunan budaya hukum, harmonisasi produk hukum pada masyarakat, dan perluasan akses masyarakat terhadap keadilan.
- Meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum.
- Penghargaan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan.

Adapun prioritas lokasi meliputi daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi.

- d Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tata kelola yang baik (*good governance*). Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat, dan membentuk kelas menengah yang kuat di bidang ekonomi dan pendidikan.
- Penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pengembangan diklat aparatur.
- Penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal.
- Peningkatan kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
- Penataan fungsi-fungsi positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, lembaga hukum dan lembaga politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola berbagai potensi konflik sosial yang merusak.
- Fasilitasi penguatan pemerintah desa/kelurahan.

- Peningkatan kualitas kebijakan publik dan perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-gov; e-procurement; e-bisnis*).
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengawasan aparatur pemerintah.

Adapun prioritas lokasi meliputi lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

- e Mengembangkan kapasitas pemerintah daerah. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Peningkatan kapasitas kelembagaan, kapasitas keuangan termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah.
- Penguatan kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
- Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, peningkatan akses pada modal usaha dan SDA; pemberian kesempatan yang luas untuk menyampaikan aspirasinya, dan peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola ekonomi produktif.
- Peningkatan kapasitas daerah dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
- Peningkatan kapasitas kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan pemerintah dan anggota DPRD.

Adapun prioritas lokasi meliputi DPRD provinsi, kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

- f Meningkatkan kerjasama antar daerah. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah daerah.
- Menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik.
- Pengkajian potensi dan peluang kerjasama antar daerah.
- Pemanfaatan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah.
- Pengembangan kerjasama antar daerah berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif.

Adapun prioritas lokasi meliputi kabupaten/kota yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.

- g Mewujudkan aparatur pemerintah yang baik dan profesional. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Fasilitasi penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah daerah dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
- Peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur pemerintahan melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat.
- Pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta kompetensi para penyelenggara pemerintahan dalam menerapkan prinsip-prinsip

keperintahan yang baik dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan publik.

Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

h Meningkatkan peranan komunikasi dan informasi. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Mewujudkan pemerataan akses informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen.
- Pengembangan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas.
- Fasilitasi pengembangan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan secara cerdas dan demokratis.

Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota.

i Mengembangkan proses dan budaya politik. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Membangun kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi melalui berbagai wacana dan media.
- Peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan pejabat publik.
- Fasilitasi dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan dan kesatuan.
- Pengembangan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa, keleluasaan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat setiap warga negara berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
- Mengembangkan wacana dialog dengan semua stakeholder dalam proses perumusan kebijakan.

Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah, pihak swasta, dan kalangan lembaga swadaya masyarakat.

Indikator keberhasilan dari misi ini adalah tercapainya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang berkualitas, meningkatnya konektivitas antar wilayah, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya PDRB per kapita dan indeks nilai tukar petani/nelayan (NTP/NTN), terselenggaranya tata pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), meningkatnya partisipasi politik masyarakat, menurunnya indeks kriminalitas, dan meningkatnya pendapatan asli daerah.

Misi 4 : Terwujudnya kemandirian dan daya saing daerah, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang makin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Nusa Tenggara Barat ditandai dengan meningkatnya IPM serta tidak ada pertumbuhan penduduk karena kelahiran. Angka IPM Nusa Tenggara Barat harus sama/mendekati rata-rata nasional.

2. Terbangunnya struktur perekonomian yang variatif dan kokoh berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif. Sektor pertanian dalam arti luas, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa menjadi basis aktivitas ekonomi yang menghasilkan komoditi berkualitas dan berdaya saing.
3. Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi yang dicirikan oleh terbukanya hubungan antar desa satu sama lain di dalam dan ke luar wilayah Nusa Tenggara Barat serta sentra-sentra produksi dengan pasar.
4. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat yang mampu mendukung dinamika ekonomi dan kehidupan masyarakat. Rasio elektrifikasi mencapai angka minimal 95 persen.
5. Meningkatnya penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025 adalah sebagai berikut :

a Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal.
- Peningkatan mutu, kuantitas, dan relevansi pendidikan kejuruan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agribisnis, pariwisata, dan keunggulan lokal.
- Peningkatan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan link dan match.
- Peningkatan kualitas pendidikan tinggi.
- Pengembangan budaya baca.
- Peningkatan kualitas dan peran pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.
- Peningkatan budaya olah raga dan prestasi olah raga di kalangan masyarakat.
- Penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender.
- Pencapaian penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi netto (NRR) sama dengan 1, atau angka fertilitas total (TFR) sama dengan 2,1.
- Memperbaiki indeks pembanguna manusia (IPM).

Adapun prioritas lokasi meliputi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa, pihak swasta, dan kalangan lembaga swadaya masyarakat.

b Meningkatkan perekonomian daerah. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Penguatan basis keunggulan komparatif daerah menjadi keunggulan kompetitif yang berdaya saing tinggi untuk mendukung iklim usaha yang kondusif.
- Peningkatan kesempatan berusaha dan penciptaan wirausaha baru dan pembinaan usaha sektor primer, sekunder dan tersier.
- Pengembangan keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antar pusat-pusat pengembangan ekonomi.
- Pengembangan prinsip demokrasi ekonomi yang menjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan.

- Pengembangan kelembagaan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- Peningkatan kualitas pertumbuhan sektor pertanian.
- Pelayanan investasi dan pengembangan investasi di daerah, baik PMDN dan PMA untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas.
- Pengembangan iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen.
- Pengembangan usaha kecil menengah (UKM) untuk memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.
- Penguatan struktur perekonomian daerah agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan basis agroindustri dan pariwisata.
- Penjaminan ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya di daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan perluasan kesempatan kerja.
- Peningkatan pengelolaan keuangan negara melalui pengelolaan APBD yang bertumpu pada sistem penganggaran yang transparan, akuntabel dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan.
- Peningkatan efektivitas penerimaan asli daerah.
- Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, dan peternakan), kelautan dan perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dan dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketahanan pangan.
- Pembinaan industri yang berdaya saing dengan basis keunggulan komparatif.
- Percepatan berkembangnya industri jasa, termasuk jasa infrastruktur dan keuangan.
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditi ekspor daerah.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan strategis, industri, kawasan ekonomi khusus, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta.

- c Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Mendukung ketahanan pangan, ketersediaan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pengembangan sumber daya.
- Pengembangan kapasitas SDM iptek.
- Peningkatan sumber daya anggaran riset, dan sarana dan prasarana iptek.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan strategis perkotaan, kawasan agribisnis pedesaan, kawasan ekonomi khusus.

- d Membangun jaringan infrastruktur wilayah yang handal dan terintegrasi. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pembangunan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pengembangan perekonomian daerah dan konektivitas antar wilayah.

- Fasilitasi kegiatan transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, barang dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui *political trading* yang saling menguntungkan.
- Fasilitasi pengembangan jaringan pelayanan secara inter dan antarmoda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi.
- Fasilitasi stakeholder untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya.
- Meningkatkan keberpihakan terhadap pelayanan kepada masyarakat.
- Pengembangan infrastruktur perhubungan untuk kegiatan transaksi perdagangan, dan pengembangan jaringan pelayanan inter dan antarmoda angkutan sehingga tidak ada lagi bentuk monopoli transportasi.

Adapun prioritas lokal meliputi kawasan strategis, industri, kawasan ekonomi khusus, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta.

- e Memenuhi pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di daerah dan kehandalannya untuk memulihkan kemampuan pasokan sistem ketenagalistrikan yang memadai melalui rehabilitasi dan repowering pembangkit yang ada serta pembangunan pembangkit baru (geothermal).
- Fasilitasi pelunag yang lebih luas bagi investasi swasta secara lebih terbuka, kompetitif, profesional, dan terarah, bagi badan usaha milik negara, dan pemerintah daerah.
- Fasilitasi pemenuhan kebutuhan bagi BUMN, pemerintah daerah dan swasta secara transparan, profesional.

Adapun prioritas lokasi meliputi provinsi, kabupaten, dan kota.

Indikator keberhasilan misi ini adalah meningkatnya kualitas SDM dilihat dari beberapa indikator pendidikan dan kesehatan, meningkatnya prestasi atlet olahraga di berbagai pertandingan dan perlombaan olahraga di tingkat nasional dan internasional, meningkatnya jumlah koperasi bermutu, meningkatnya jumlah wirausaha baru, meningkatnya kontribusi sektor sekunder dan tersier dalam pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB), peningkatan pertumbuhan dan nilai tambah sektor pertanian, tercapainya kedaulatan pangan di daerah, meningkatnya proporsi anggaran terhadap APBD untuk mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatnya kemandirian jalan, meningkatnya rasio elektrifikasi, meningkatnya jumlah desa yang terlayani listrik, dan berkurangnya ketimpangan antar daerah dan wilayah.

Misi 5 : Terwujudnya pembangunan berkelanjutan, sasaran pokok dalam misi ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi daya dukung dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang dan lestari.
2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam hayati untuk mewujudkan nilai tambah dan daya saing daerah.
3. Terkendalikannya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

4. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
5. Pengembangan wilayah dalam kerangka membangun geopark, Lombok as Eco Island (LECI) dan Sumbawa as Ecozone (SuEZ).

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok pada misi diatas maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025 meliputi :

- a Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam (SDA) yang terbarukan, seperti hutan, pertanian, perikanan dan perairan.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pengelolaan secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab terutama SDA terbarukan yang masih dalam kondisi baik.
- Pemulihan daya dukung terhadap SDA terbarukan yang sudah dalam kondisi kritis untuk pencadangan bagi kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang.
- Penguatan kapasitas unit atau balai konservasi yang bertanggung jawab pada konservasi SDA.
- Pemanfaatan SDA terbarukan secara berkelanjutan dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim.
- Pemantapan kapasitas personal dan kelembagaan konservasi SDA daerah.
- Sosialisasi terkait dengan pengelolaan SDA yang terbarukan dan terbarukan diikuti dengan penegakan hukum dan sengketa lahan.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, kehutanan, dan perairan.

- b Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan SDA yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi fosil.

Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pengkajian dan pengembangan kebutuhan reklamasi, dan konservasi pada areal pertambangan.
- Memperkuat pendanaan dan pencarian sumber-sumber energi alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan, seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, panas bumi (geothermal), arus laut, dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan.
- Penguatan kapasitas unit atau balai konservasi yang bertanggung jawab pada konservasi SDA.
- Pemanfaatan SDA terbarukan secara berkelanjutan dengan mengantisipasi dampak perubahan iklim.
- Pemantapan kapasitas personal dan kelembagaan konservasi sumber daya alam daerah.
- Sosialisasi terkait dengan pengelolaan SDA yang terbarukan dan terbarukan diikuti dengan penegakan hukum dan sengketa lahan.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, kehutanan, dan kelautan.

- c Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pendayagunaan SDA yang tidak terbarukan, seperti bahan tambang, mineral, dan sumber daya energi. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pengkajian dan pengembangan kebutuhan reklamasi, dan konservasi pada areal pertambangan rakyat.
- Memperkuat pendanaan dan pencarian sumber-sumber energi alternatif atau bahan substitusi yang terbarukan, seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, panas bumi (geothermal), arus laut dan tenaga angin yang lebih ramah lingkungan.
- Pengembangan dan pemanfaatan nilai tambah SDA yang optimal, dan outputnya diarahkan untuk dijadikan sebagai kapital kumulatif. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok SDA ini diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan kepada sektor-sektor lain yang produktif.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan pertambangan di kabupaten, termasuk pertambangan liar.

d Mengembangkan potensi sumber daya kelautan. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pengkajian potensi sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil beserta pemanfaatannya.
- Pengembangan pemanfaatan sumber daya kelautan melalui pendekatan multisektor, integratif, dan komprehensif agar dapat meminimalisasi konflik dan tetap menjaga kelestariannya.
- Peningkatan pengelolaan SDA kelautan secara terpadu antara sektor lautan dan daratan.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan pertambangan di kabupaten, termasuk pertambangan liar.

e Mewujudkan konservasi sumber daya air. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Pengkajian potensi dan kebutuhan sumber daya air, dan kelembagaan sosial yang mengelolanya.
- Pelembagaan keberlanjutan daya dukung sumber daya air dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah.
- Pengembangan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dari pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air.
- Optimalisasi pemanfaatan sumber daya air dengan menerapkan konsep konservasi yang menjamin keberlanjutan daya dukung sumber daya air yang ada.
- Penguatan kelembagaan pengelola sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.
- Perlindungan mata air dan air tanah.

Adapun prioritas lokasi meliputi kawasan konservasi hutan.

f Memperhatikan dan mengelola keragaman jenis dan kekhasan SDA hayati. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
- Memberdayakan institusi sosial dan ekonomi terkait dengan pengelolaan SDA di tingkat lokal.

- Melakukan kajian potensi keanekaragaman hayati.
 - Pengembangan model hutan keanekaragaman hayati dengan mengembangkan dan memberdayakan institusi di tingkat lokal.
- g Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
- Memanfaatkan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan.
 - Memulihkan dan merehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan.
 - Studi sumber-sumber pencemaran untuk mengidentifikasi dan dampak kerusakannya.
 - Memulihkan dan merehabilitasi kondisi lingkungan hidup di kawasan yang berpotensi mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan.
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- h Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
- Meningkatkan dukungan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup dan perluasan penerapan etika lingkungan.
 - Menegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas.
 - Meningkatkan dukungan sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik.
- i Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup. Agenda terhadap arah pembangunan tersebut adalah :
- Meningkatkan kesadaran generasi muda yang peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - Mempersiapkan penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.
 - Meningkatkan kesadaran generasi muda untuk mencintai lingkungan.
 - Pengembangan dan penerapan kurikulum sekolah yang ramah (pro) terhadap lingkungan hidup.

Indikator keberhasilan dari misi mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah terpeliharanya kualitas lingkungan hidup; terwujudnya pelestarian fungsi tangkapan air, pengelolaan danau/situ/embung; meningkatnya sumber daya alam hayati termamfaatkan dan diolah untuk agribisnis; meningkatnya jumlah desa yang teraliri listrik dengan sumber energi konvensional dan terbarukan, menurunnya lahan kritis akibat eksploitasi sumber daya alam, menurunnya insiden bencana alam, menurunnya tingkat pencemaran air dan udara dari berbagai sumber pencemaran seperti limbah dan gas buangan, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan dengan munculnya inisiasi pengelolaan sampah di tiap RT dan dusun.

Tahun 2019 merupakan tahun pertama dari periode keempat pembangunan tahun 2018-2023 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025. Tahap ke-4 (Periode 2018-2023), adalah periode yang diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di pelbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Kemajuan di bidang ekonomi yang ditopang oleh ketahanan pangan dan berkembangnya agroindustri terutama pada beberapa komoditi unggulan sejalan

kemajuan di dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga kualitas dan fungsi lingkungan hidup tetap terjaga. Pembangunan pada periode ini diarahkan pada :

Tabel 4.2 Arah Pembangunan Provinsi Ntb Tahun 2018-2023

Misi	Arah Kebijakan	Agenda	Prioritas Lokasi
Misi 1 Mewujudkan masyarakat Beriman, Bermoral, Berbudaya, dan Berkesadaran Hukum	Mewujudkan Masyarakat yang Tangguh, Kompetitif dan Bermoral Tinggi Berdasarkan Nilai-Nilai Agama	Keberlanjutan peningkatan fungsi dan peran tokoh agama dalam meningkatkan kerukunan hidup umat beragama	Kawasan perkotaan dan pedesaan, kawasan rentan konflik
	Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Keberlanjutan fasilitasi dan optimalisasi peran lembaga sosial masyarakat dalam turut bertanggungjawab dalam penciptaan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kerjasama dan kemitraan dengan polisi	Kawasan perkotaan dan pedesaan, kawasan rentan konflik
	Memantapkan Peranan Budaya dalam Pembangunan Daerah	Keberlanjutan peningkatan pembangunan budaya daerah dan sistem sosial, dan pengembangan budaya iptek dalam rangka pengembangan tradisi iptek dan budaya produktif	Kawasan perkotaan dan pedesaan
	Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat	Keberlanjutan peningkatan fasilitasi akses terhadap informasi, pelayanan bantuan hukum dan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya	Kawasan perkotaan dan pedesaan
Misi 2 Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	Menjamin Ketersediaan Pangan dan Gizi Masyarakat	Keberlanjutan optimalisasi peran kelembagaan ketahanan pangan di daerah yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan Keberlanjutan pemantapan ketahanan dan kemandirian pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi di daerah	
	Menyediakan Kebutuhan Hunian dan Lingkungan Permukiman yang Layak	Keberlanjutan pengembangan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas	Kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan
	Menyediakan Lapangan Kerja	Keberlanjutan peningkatan produktivitas dan pelayanan kesejahteraan pekerja di sektor informal	Daerah perkotaan, kawasan strategis industri, dan kawasan

Misi	Arah Kebijakan	Agenda	Prioritas Lokasi
		Pemantapan hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta penyelesaian perselisihan yang memuaskan semua pihak	agropolitan
	Meningkatkan Kualitas Penduduk	Keberlanjutan pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta pemantapan sistem administrasi kependudukan	Daerah perkotaan dan pedesaan
	Meningkatkan Pelayanan Dasar Pendidikan	Keberlanjutan peningkatan mutu pelayanan pendidikan untuk meningkatkan harkat dan kualitas hidup dan produktivitas penduduk, serta menumbuhkan kebanggaan kebangsaan dan akhlak mulia	Di daerah perkotaan dan pedesaan
	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan	Pengembangan dan penguatan sistem kesehatan Pemberdayaan profesi kesehatan (institusi) Peningkatan jumlah, jenis, mutu tenaga kesehatan Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Di daerah perkotaan dan pedesaan
	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Keberlanjutan pemanfaatan fasilitas dan sarana pelayanan sosial untuk meningkatkan sistem perlindungan dan jaminan sosial Peningkatan kualitas kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial Pemantapan sistem pembiayaan jaminan sosial daerah (Jamsosda) bagi PMKS	Di daerah perkotaan dan pedesaan
Misi 3 Mewujudkan Pemerataan Pembangunan yang Berkeadilan	Meningkatkan Pemerataan Pembangunan	Keberlanjutan peningkatan konektivitas kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan Keberlanjutan peningkatan dan pengembangan agropolitan, kapasitas SDM, jaringan infrastruktur penunjang, akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi, serta <i>social dan human capital</i>	Wilayah strategis, desa tertinggal dan terpencil, kawasan agropolitan, perkotaan dan industri
	Mengurangi Kemiskinan	Keberlanjutan pemantapan	Wilayah

Misi	Arah Kebijakan	Agenda	Prioritas Lokasi
	dalam Masyarakat	peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin khususnya pada akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi	pedesaan tertinggal dan terpencil. Daerah perkotaan dan perbatasan
	Mewujudkan Supremasi Hukum dan Penegakan Hak Asasi Manusia	Penegakan supremasi hukum dan HAM Penghormatan bagi masyarakat sipil untuk berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan	Daerah dengan tingkat kemiskinan dan kriminalitas tinggi
	Penyelenggaraan Pemerintahan diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah yang mampu mensejahterakan rakyat dan pemantapan tata kelola yang baik (<i>good governance</i>)	Pengawasan aparatur, peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Keberlanjutan peningkatan kualitas kebijakan publik dan perencanaan pembangunan yang partisipatif, dan pelayanan dasar	Di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota
	Mengembangkan Kapasitas Pemerintah Daerah	Keberlanjutan peningkatan kapasitas kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, manajemen keuangan pemerintah dan anggota DPRD	DPRD provinsi, kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kabupaten/kota
	Meningkatkan Kerjasama Antardaerah	Keberlanjutan penguatan pengembangan kerjasama antar daerah berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif	Kabupaten/kota yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif
	Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Baik dan Profesional	Keberlanjutan peningkatan kompetensi para penyelenggara pemerintahan dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan akses dan mutu pelayanan publik	Pemerintah provinsi, kabupaten/kota
	Meningkatkan Peranan Komunikasi dan Informasi	Keberlanjutan optimalisasi pengembangan jaringan teknologi informasi dan pengembangan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat untuk berpendapat dan berkontribusi dalam setiap kegiatan pembangunan dan pengambilan keputusan	Pemerintah provinsi, kabupaten/kota
	Mengembangkan Proses dan Budaya Politik	Keberlanjutan peningkatan kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka dan	Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa,

Misi	Arah Kebijakan	Agenda	Prioritas Lokasi
		pelebagaan fasilitasi dialog dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik	pihak swasta, dan kalangan lembaga swadaya masyarakat
Misi 4 Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah	Meningkatkan Kuaitas Sumber Daya Manusia	Pengembangan perluasan dan pemerataan akses pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal, non formal dan informal Penigkatan mutu dan relevansi pendidikan pada semua jenjang pendidikan dengan menyertakan muatan kurikulum agrobisnis Peningkatan kualitas sekolah kejuruan berbasis keunggulan lokal dan teknologi dengan mengedepankan <i>link and match</i> khususnya agrobisnis Peningkatan kualitas pendidikan tinggi Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Memperbaiki indeks pembangunan manusia (IPM)	
	Meningkatkan Perekonomian Daerah	Perekonomian yang berdaya saing berbasis agrobisnis Pembinaan usaha sektor primer, sekunder, dan tersier Penjaminan ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya di daerah dalam harga yang terjangkau Pengembangan kepariwisataan agar mampu meningkatkan citra daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, dan perluasan kesempatan kerja Peningkatan pengelolaan keuangan negara melalui pengelolaan APBD yang bertumpu pada sistem penganggaran yang transparan, akuntabel dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan	Kawasan strategis perkotaan, kawasan agribisnis pedesaan, kawasan ekonomi khusus

Misi	Arah Kebijakan	Agenda	Prioritas Lokasi
		Peningkatan efektivitas penerimaan asli daerah	
	Membangun Jaringan Infrastruktur Perhubungan yang Handal dan Terintegrasi	Keberlanjutan pengembangan infrastruktur perhubungan untuk kegiatan transaksi perdagangan, dan pengembangan jaringan pelayanan inter dan antarmoda angkutan sehingga tidak ada lagi bentuk monopoli transportasi	Kawasan strategis, kawasan ekonomi khusus, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta
	Memenuhi Pasokan Tenaga Listrik di Seluruh Wilayah Nusa Tenggara Barat	Keberlanjutan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan optimalisasi peluang investasi bagi BUMN, pemerintah daerah dan swasta secara transparan, profesional	Provinsi, kabupaten, kota
Misi 5 Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam yang Terbaharukan, seperti Hutan, Pertanian, Perikanan, dan Perairan	Keberlanjutan pemanfaatan dan pemulihan sumber daya alam Pengelolaan secara berkelanjutan oleh tenaga dan lembaga konservasi yang kompeten dan profesional Peningkatan pemulihan daya dukung terhadap SDA terbarukan	Kawasan sentra produksi pertanian, perikanan, kehutanan dan kelautan
	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Alam yang Tidak Terbaharukan, seperti Bahan Tambang, Mineral, dan Sumber Daya Energi	Keberlanjutan pengendalian dan pengembangan reklamasi dan konservasi, serta pengembangan dan pemanfaatan nilai tambah yang optimal, dan outputnya diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi	Kawasan pertambangan di kabupaten, termasuk pertambangan liar
	Mengembangkan Potensi Sumber Daya Kelautan	Keberlanjutan pemanfaatan sumber kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pengelolaan yang terpadu antara sektor lautan dan daratan	Kawasan laut dan pantai di kabupaten/kota
	Mewujudkan Konservasi Sumberdaya Air	Penguatan kelembagaan pengelola sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat Pemantapan kegiatan perlindungan mata air dan air tanah	
	Memperhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis dan Kekhasan Sumber Daya Alam Hayati	Pengembangan model hutan keanekaragaman hayati dengan mengembangkan dan memberdayakan institusi	

Misi	Arah Kebijakan	Agenda	Prioritas Lokasi
		tingkat lokal	
	Mengembangkan Model Pembangunan Berbasis Resiko bencana	Optimalisasi sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat Pembinaan kelembagaan kelompok sadar rawan bencana di masyarakat	Kawasan perkotaan, pedesaan dan rawan bencana
	Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Mengoptimalkan pemulihan dan merehabilitasi kondisi lingkungan hidup di kawasan yang berpotensi mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan Optimalisasi kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Kawasan perkotaan, pedesaan dan rawan bencana
	Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		
	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup	Optimalisasi pembinaan pada kelompok pecinta Lingkungan Hidup Optimalisasi penerapan kurikulum sekolah yang pro lingkungan hidup ke semua sekolah	

Sumber : RPJPD Provinsi NTB 2005-2025

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019

Penentuan prioritas pembangunan daerah tahun 2019 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2017 dan tahun berjalan;
2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda pembangunan (Nawa Cita) sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019;
3. Sasaran pokok arah kebijakan periode keempat pembangunan tahun 2018-2023 yang tertuang dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025.

Melanjutkan pendekatan yang telah dilaksanakan sejak RKPD 2017, politik perencanaan dan penganggaran dalam RKPD 2019 tetap dikendalikan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dicapai, dan bukan oleh ketersediaan anggaran atau tugas dan fungsi organisasi. Pendekatan perencanaan dan penganggaran yang bersifat *money follows program* tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien dan berkeadilan. Sebagai tahun transisi pasca berakhirnya RPJMD 2013-2018 dan untuk mempertahankan kinerja pembangunan yang ada dan melakukan percepatan pencapaian indikator strategis yang mencerminkan sinergi antara target nasional dan daerah, serta untuk

meletakkan pondasi yang kuat bagi RPJMD 2018-2023, sasaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam RKPD tahun 2019 adalah sebagaimana dalam tabel 4.2 berikut

Tabel 4.3 Target Pembangunan Daerah Tahun 2019

No	Indikator Pembangunan	Target Nasional 2019	Target Daerah 2019
1.	Pertumbuhan Ekonomi Non Tambang (%)	5,4 – 5,8	6,5 – 7,5
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,8 – 5,2	3,0 – 2,5
3.	Angka Kemiskinan (%)	8,5 – 9,5	14 - 13
4.	Rasio Gini (Indeks)	0,38 – 0,39	0,34 – 0,33
5.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,98	68,00

Sumber : Proyeksi RKP dan RKPD 2019

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Agenda pembangunan nasional tahun 2018 sebagai tahun keempat dalam pembangunan jangka menengah 2015-2019 dimaksudkan sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang memprioritaskan belanja pemerintah untuk pencapaian sasaran prioritas nasional. Kemudian agar tetap terciptanya keberlanjutan, maka pada Pembangunan Nasional tahun 2019 Tema RKP 2019 adalah sebagai berikut : **"Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas"**

Prioritas nasional Tahun 2019 terbagi menjadi 5 (lima) prioritas nasional dan 24 (dua puluh empat) program prioritas yaitu :

- I. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempercepat penurunan tingkat kemiskinan
 1. Percepatan pengurangan kemiskinan
 2. Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat
 3. Pemerataan layanan pendidikan berkualitas
 4. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman yang layak
 5. Peningkatan tata kelola pelayanan dasar
- II. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman
 6. Peningkatan konektivitas dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
 7. Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat

8. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan desa
9. Penanggulangan bencana
10. Peningkatan sistem logistik
- III. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif
 11. Peningkatan ekspor dan nilai tambah produk pertanian
 12. Percepatan peningkatan ekspor dan nilai tambah industri pengolahan
 13. Peningkatan nilai tambah/efisiensi jasa produktif
 14. Percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja
 15. Pengembangan Iptek dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas
- IV. Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumber daya air
 16. Peningkatan produksi dan pemenuhan kebutuhan energi
 17. Peningkatan produksi, akses dan kualitas konsumsi pangan
 18. Peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air
 19. Peningkatan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan
- V. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu
 20. Kamtibmas dan keamanan siber
 21. Kesuksesan pemilu
 22. Pertahanan wilayah nasional
 23. Kepastian hukum dan reformasi birokrasi
 24. Efektivitas diplomasi

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2019

Selanjutnya dalam rangka memastikan perubahan dan sebagai representasi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan jangka panjang daerah, tentunya perlu memperhatikan aspek sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu pada penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019 mengambil tema : **"Pertumbuhan Dan Pemerataan Ekonomi Untuk Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan"**

Dalam RKPD Tahun 2019 terbagi menjadi 5 (lima) prioritas daerah dan 21 (dua puluh satu) program prioritas yaitu :

- I. Percepatan penurunan angka kemiskinan
 1. Percepatan penurunan kemiskinan berbasis desa
 2. Peningkatan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak
 3. Peningkatan daya beli masyarakat miskin
 4. Integrasi sistem perencanaan dan sistem penganggaran
 5. Peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja
 6. Revitalisasi pendidikan kejuruan
 7. Perencanaan berbasis data terpadu dan spasial
- II. Peningkatan pelayanan dasar
 8. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan
 9. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan
 10. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat
- III. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif
 11. Hilirisasi produk pijari (Sapi, Jagung, Rumput Laut, Ikan)

12. Peningkatan nilai tambah sektor pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif
13. Peningkatan produksi dan keamanan pangan
- IV. Pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata
14. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan
15. Pembangunan sarana prasarana sumber daya air
16. Pembangunan sarana prasarana perhubungan
17. Pembangunan sarana dan prasarana dasar di destinasi wisata
18. Modernisasi sarana prasarana produksi pertanian dan perikanan
- V. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
19. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan
20. Peningkatan sarana dan prasarana kebencanaan
21. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan provinsi.

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2005-2025, maka perlu disusun penjelasan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. Perumusan program prioritas tahun 2019 ini dilandaskan pada permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat guna memastikan perubahan pencapaian sasaran pembangunan. Upaya ini sesuai dengan tahapan pembangunan pada tahun 2019 yang diharapkan memiliki dampak nyata dan langsung bagi keberlanjutan pembangunan.

Untuk selanjutnya masing-masing prioritas pembangunan daerah dijabarkan dalam program prioritas dan indikator kinerja terkait, sebagaimana tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Prioritas Pembangunan Daerah

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM INDIKATIF OPD	PERANGKAT DAERAH
2	Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya	1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik; 2. Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan Pembangunan; 3. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan; 4. Menyempurnakan dan Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN); dan 5. Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik	2	Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang makin meningkat termasuk peran perempuan dalam pembangunan	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan (13,0%) Tingkat Pengangguran Terbuka (2,8%)	Percepatan Penurunan Kemiskinan Berbasis Desa	Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/ perkebunan)	Dinas Ketahanan Pangan
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	1. Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris; 2. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia; 3. Penanggulangan Kemiskinan	5	Tingkat pembangunan yang semakin merata ke seluruh wilayah dan semua lapisan masyarakat				Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Dinas Sosial
								Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
								Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM INDIKATIF OPD	PERANGKAT DAERAH
								Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
								Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
								Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata
								Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
								Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
								Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
							Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Permukiman
							Peningkatan Daya Beli Masyarakat Miskin	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
								Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
								Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	Dinas Perdagangan
								Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Dinas Perdagangan
								Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Dinas Pertanian dan Perkebunan

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM INDIKATIF OPD	PERANGKAT DAERAH
								Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
								Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian
							Integrasi Sistem Perencanaan dan Sistem Penganggaran	Program pengembangan data/informasi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
								Program perencanaan pembangunan daerah	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
								Program perencanaan pembangunan ekonomi	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
								Program perencanaan sosial dan budaya	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
								Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
								Program Perencanaan Tata Ruang	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
							Peningkatan Kualitas Keterampilan	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM INDIKATIF OPD	PERANGKAT DAERAH
							Tenaga Kerja		
							Revitalisasi Pendidikan Kejuruan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Perencanaan Berbasis Data Terpadu dan Spasial	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia	(1) pembangunan kependudukan dan keluarga berencana; (2) pembangunan pendidikan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Pintar; (3) pembangunan kesehatan khususnya pelaksanaan Program Indonesia Sehat; dan (4) peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal melalui pelaksanaan Program Indonesia Kerja	8	Meningkatnya kualitas kesehatan	Peningkatan Pelayanan Dasar	Usia Harapan Hidup (66,50)Indeks Pembangunan Manusia (68,00)Angka Melek Huruf (88,14)Penanganan RTLH (2.500 unit)Peningkatan Akses Sanitasi Layak (70%)Cakupan Air Bersih (Perkotaan 95,86%, Perdesaan 84,60%)Rata-Rata Lama Sekolah (7,32 Tahun)Harapan Lama Sekolah (13,78 Tahun)	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Kesehatan	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			9	Meningkatnya kualitas pendidikan penduduk				Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			10	Terpenuhinya kebutuhan hunian dan lingkungan permukiman yang layak bagi seluruh masyarakat				Program Keluarga Berencana	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM INDIKATIF OPD	PERANGKAT DAERAH
			11	Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat				Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Melakukan revolusi karakter bangsa		20	Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi				Program Upaya Kesehatan Masyarakat	- Dinas Kesehatan
									- Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi,
									- Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
								Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM INDIKATIF OPD	PERANGKAT DAERAH
								Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Dinas Kesehatan
								Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Dinas Kesehatan
								Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	- Dinas Kesehatan
									- Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
									- Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir
								Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	- Dinas Kesehatan
									- Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
									- Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir
									- Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
								Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	- Dinas Kesehatan

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM INDIKATIF OPD	PERANGKAT DAERAH
									- Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
									- Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir
									- Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi
								Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Dinas Kesehatan
								Program Obat dan Pebekalan Kesehatan	- Dinas Kesehatan
									- Rumah Sakit H.L. Manambai Abdul Kadir
							Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Pendidikan	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
								Program Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
								Program Bantuan Oprasional Sekolah (BOS)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat	Program perbaikan Gizi masyarakat	Dinas Kesehatan
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-	(1) Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan; (2) Membangun Transportasi Massal Perko-taan; (3)	12	Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif	Pertumbuhan Ekonomi (6,5% - 7,5%)Pertumbuhan IKM (1,6%)Realisasi Investasi (13,83 Triliun)50 Desa Wisata dan Komunitas Pasar Kampung	Hilirisasi Produk Pijari (Sapi, Jagung, Rumput Laut, Ikan)	Program Pengembangan Dan Penguatan Klaster Berbasis Ovop (One Village One Product)	Dinas Perindustrian

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM INDIKATIF OPD	PERANGKAT DAERAH
	bangsa Asia lainnya	Membangun Infrastruktur/Prasarana Dasar; (4) Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur; (5) Memperkuat Peran Investasi; (6) Mendorong BUMN menjadi Agen Pembangunan; (7) Meningkatkan Kapasitas Inovasi dan Teknologi; (8) Meningkatkan Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional; (9) Mengembangkan Kapasitas Perdagangan Nasional; (10) Meningkatkan Daya Saing Tenaga Kerja; dan (11) Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi Statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016				OnlineMeningkatnya Kunjungan Wisatawan (5.000.000 orang)Peningkatan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Perikanan			
			13	Terbangunnya struktur perekonomian yang variatif dan kokoh berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif				Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	Dinas Perindustrian

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM INDIKATIF OPD	PERANGKAT DAERAH
			14	Pengembangan wilayah dalam kerangka membangun geopark, lombok as Eco City (LECI) dan Sumbawa as Ecozone (SuEZ)				Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Dinas Perindustrian
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	(i) Peningkatan Kedaulatan Pangan; (ii) Peningkatan Ketahanan Air; (iii) Peningkatan Kedaulatan Energi; (iv) Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (v) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan; (vi) Penguatan Sektor Keuangan; dan (vii) Penguatan Kapasitas Fiskal Negara	18	Terkendalikannya pencemaran dan kerusakan lingkungan				Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Dinas Perindustrian
								Program Peningkatan Mutu Dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Dinas Perindustrian
								Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan	Dinas Perindustrian
								Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
							Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM INDIKATIF OPD	PERANGKAT DAERAH
								Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Dinas Pariwisata
								Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
								Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							Peningkatan Produksi dan Keamanan Pangan	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan
								Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
								Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	1. Peletakan Dasar-Dasar Dimulainya Desentralisasi Asimetris; 2. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia; 3. Penanggulangan Kemiskinan	7	Terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang terintegrasi	Pemantapan Infrastruktur Strategis Untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Ketahanan Pangan dan Pariwisata	Proporsi Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (85%)Menurunkan Indeks FatalitasRasio Elektrifikasi (90%)Indeks Keselamatan Lalu Lintas	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan (1)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM INDIKATIF OPD	PERANGKAT DAERAH
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	(i) Peningkatan Kedaulatan Pangan; (ii) Peningkatan Ketahanan Air; (iii) Peningkatan Kedaulatan Energi; (iv) Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (v) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan; (vi) Penguatan Sektor Keuangan; dan (vii) Penguatan Kapasitas Fiskal Negara	17	Terpenuhinya pasokan tenaga listrik di seluruh wilayah NTB				Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (2)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air	Program Pengendalian Banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
								Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dinas Perhubungan
								Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dinas Perhubungan
								Program Pengembangan Transportasi Laut dan Udara, darat/terminal	Dinas Perhubungan

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM INDIKATIF OPD	PERANGKAT DAERAH
							Pembangunan Sarana Prasarana Dasar di Destinasi Wisata	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata
								Program Pencegahan kerusakan lingkungan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
							Modernisasi Sarana Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
								Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Dinas Pertanian dan Perkebunan
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	(i) Peningkatan Kedaulatan Pangan; (ii) Peningkatan Ketahanan Air; (iii) Peningkatan Kedaulatan Energi; (iv) Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (v) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan; (vi) Penguatan Sektor Keuangan; dan (vii) Penguatan Kapasitas Fiskal Negara	15	Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya hayati	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Luas Lahan Kritis yang Tertangani (3.000 Ha)Terpeliharanya Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Konservasi (15.000 Ha)Konservasi Perairan (241.052,13 Ha)Situs Geologi yang Terlindungi (6 Situs)Desa Tangguh Bencana (70 Desa)Indeks Resiko Bencana	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Program Pencegahan kerusakan lingkungan	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
			16	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayaagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup				Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

No	Nawacita Presiden RI dalam RPJMN 2015-2019	Sub Prioritas Nasional RPJMN 2015-2019	No Sasaran	Sasaran Pokok Tahap 4 RPJPD NTB 2005-2025	PRIORITAS DAERAH	SASARAN	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	PROGRAM INDIKATIF OPD	PERANGKAT DAERAH
								Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
								Program Analisis dan Pengendalian Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
								Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
								Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, pesisir dan Pulau - pulau Kecil	Dinas Kelautan dan Perikanan
							Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Program Siaga Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
								Program Tanggap Darurat Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
								Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
								Pengembangan komunikasi, informasi dan Media massa kebencanaan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tabel 4.5 Keselarasan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Nasional Dengan Daerah

NO	NASIONAL				NTB			
	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran
I	Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Mempercepat penurunan tingkat kemiskinan	Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan	Mempercepat penurunan tingkat kemiskinan	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan Berbasis Desa	Meningkatnya ketepatan sasaran masyarakat miskin dan rentan penerima program-program pemerintah
							Integrasi Sistem Perencanaan dan Sistem Penganggaran	Mengintegrasikan Sistem Perencanaan dan Sistem Penganggaran
						Mempercepat penurunan tingkat Pengangguran Terbuka	Revitalisasi Pendidikan Kejuruan	
							Penerapan Perencanaan Berbasis Data Terpadu dan Spasial	Diterapkannya Perencanaan Berbasis Data Terpadu dan Spasial
		Menurunnya ketimpangan antarkelompok pendapatan					Peningkatan Daya Beli Masyarakat Miskin	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat Miskin

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran
		Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat	Peningkatan Layanan Dasar	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Kesehatan	Meningkatnya status kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, dan gizi masyarakat
						Meningkatnya Usia Harapan Hidup	Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat	
						Meningkatnya Angka Melek Huruf		
						Meningkatnya RTLH yang tertangani		
						Meningkatnya Akses Sanitasi Layak		
						Meningkatnya Cakupan Air Bersih		
						Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah		
						Meningkatnya Rata-rata Lama Sekolah		Menurunnya prevalensi penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran
				Menurunnya prevalensi penyakit menular dan faktor resiko penyakit tidak menular				
			Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) Pendidikan	Peningkatan Layanan Dasar		Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Layanan Pendidikan	Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) Pendidikan
				Meningkatnya Sekolah/Madrasah, PAUD, dan PT yang berakreditasi				Meningkatnya Sekolah/Madrasah, PAUD, dan PT yang berakreditasi
			Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan		Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	Menigkatkan Perumahan Layak Huni, kampung kumuh serta revitalisasi lingkungan permukiman
			Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	Meningkatnya pemanfaatan Basis Data Terpadu di daerah				

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran
				Meningkatnya pencapaian target SPM (pendidikan, kesehatan, sosial, dan pekerjaan umum) di daerah				
II	Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman	Meningkatnya kesejahteraan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peningkatan Konektivitas dan TIK	Meningkatnya Pembangunan Konektivitas dan TIK	Pemantapan Infrastruktur Strategis untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Ketahanan Pangan dan Pariwisata			
		Meningkatnya perekonomian di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal						
		Meningkatnya perdagangan antar daerah			Pemantapan Infrastruktur Strategis untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Ketahanan Pangan dan Pariwisata	Meningkatnya Proporsi Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan	Meningkatnya Pembangunan Konektivitas
		Meningkatnya indeks						

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran
		pembangunan TIK						
				Tersedianya Layanan Transportasi serta Komunikasi dan Informatika di Perdesaan, Perbatasan Negara, Pulau Terluar, dan Wilayah Non Komersial Lainnya		Menurunnya Indeks Fatalitas		
						Meningkatnya Indeks Keselamatan Lalu Lintas		
					Pemantapan Infrastruktur Strategis untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Ketahanan Pangan dan Pariwisata		Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan	Terbangunnya Sarana Prasarana Perhubungan
			Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat	Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran
				Persentase buta aksara (15 s.d 59 tahun)				
				Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan				
				Pertumbuhan Ekonomi				
			Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Perdesaan				
				Meningkatnya Pengeluaran Per Kapita di Daerah Tertinggal	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan		Mempercepat Penurunan Kemiskinan Berbasis Desa	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat di Perdesaan
			Penanggulangan Bencana	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Nasional	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana		Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Menurunnya Indeks Risiko Bencana

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran
				Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kab/Kota Prioritas Nasional			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kab/Kota Rawan Bencana
			Peningkatan Sistem Logistik	Menurunnya Biaya Logistik, Memperlancar Arus Barang, dan Meningkatkan Pelayanan Logistik				
III	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya	Meningkatnya nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja melalui pertanian, industri, pariwisata dan jasa produktif lainnya	Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Meningkatnya ekspor dan nilai tambah produk pertanian	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Produksi dan Keamanan Pangan	Meningkatnya Produksi dan Keamanan Pangan
			Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri	Meningkatnya ekspor dan nilai tambah industri pengolahan	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif		Hilirisasi Produk Pijari (Sapi, Jagung, Rumput Laut, Ikan)	Meningkatnya Nilai Tambah Produk Pijari

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran
					Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif	Meningkatnya Pertumbuhan IKM		
				Berkembangnya Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus Industri/ Logistik (KEK)		Meningkatnya Realisasi Investasi		
				Meningkatnya investasi		Meningkatnya Desa Wisata dan Komunitas Pasar Kampung Online		
						Meningkatnya Kunjungan Wisatawan		
						Meningkatnya Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Perikanan		
			Peningkatan Nilai Tambah Pariwisata dan Jasa Produktif Lainnya	Meningkatnya nilai tambah pariwisata	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif		Peningkatan Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran
					Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Pariwisata, dan Industri Kreatif		Pembangunan Sarana Prasarana Dasar di Destinasi Wisata	Terbangunnya Sarana prasarana Dasar di Destinasi Wisata
				Meningkatnya nilai tambah jasa produktif lainnya				
				Meningkatnya pertumbuhan ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa				
				Meningkatnya kontribusi UMKM dan Koperasi terhadap PDB				
			Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	Meningkatnya proporsi tenaga kerja berkeahlian menengah	Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan		Peningkatan Kualitas Keterampilan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Keterampilan Tenaga Kerja
				Meningkatnya wirausaha baru				

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran
			Pengembangan IPTEK dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas	Meningkatnya produktivitas peneliti				
				Meningkatnya SDM peneliti				
IV	Prioritas Nasional Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air	Tercapainya produksi sumber daya energi	Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi	Terpenuhinya kebutuhan energi di dalam negeri melalui diversifikasi sumber daya energi	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana			
		Meningkatnya Rasio Elektrifikasi (RE)			Pemantapan Infrastruktur Strategis untuk Mendukung Peningkatan Investasi, Ketahanan Pangan dan Pariwisata	Meningkatnya Rasio Elektrifikasi		
		Meningkatnya pertumbuhan produksi pangan			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana		Modernisasi Sarana Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan	Sarana Prasarana Produksi Pertanian dan Perikanan yang Modern

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran
				Tercapainya produksi minyak bumi dan gas bumi, serta terkendalinya produksi batubara				
			Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Meningkatnya produksi pangan (juta ton)				
		Meningkatnya kualitas konsumsi pangan						
		Meningkatnya ketersediaan air						
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup						
					Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya Luas Lahan Kritis yang Tertangani		
						Meningkatnya Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Konservasi yang Terpelihara		

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran
						Meningkatnya Konservasi Perairan		
				Meningkatnya akses pangan		Meningkatnya Situs Geologi yang Terlindungi		
				Meningkatnya kualitas konsumsi pangan		Meningkatnya Desa Tangguh Bencana		
			Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Aksesibilitas Sumberdaya Air	Menurunnya luasan lahan kritis			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Menurunnya luasan lahan kritis
				Pulihnya kesehatan DAS			Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	Pulihnya kesehatan DAS
				Meningkatnya kapasitas tampungan air permukaan			Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Meningkatnya kapasitas tampungan air permukaan
				Terbangunnya data dan informasi sumber daya air				Terbangunnya data dan informasi sumber daya air
				Terbangunnya kawasan pesisir				Terbangunnya kawasan pesisir

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran
			Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Air, Kualitas Udara, dan Kualitas Tutupan Lahan				
V	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu	Terjaganya stabilitas keamanan nasional	Kamtibmas dan Keamanan Siber	Terciptanya Kamtibmas dan keamanan siber				
		Terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis						
			Kesuksesan Pemilu	Terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis				
			Pertahanan Wilayah Nasional	Terwujudnya wilayah nasional yang aman dan berdaulat				

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran
			Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya penegakan hukum yang berkualitas dan meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi				
				Meningkatnya kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi				
			Efektivitas Diplomasi	Menguatnya perlindungan dan pelayanan hak-hak WNI di luar negeri				

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

	NASIONAL				NTB			
NO	Prioritas Nasional	Sasaran Pembangunan Nasional	Program Prioritas	Sasaran	Prioritas Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Program Prioritas	Sasaran
				Menguatnya dukungan terhadap integritas wilayah nasional dan stabilitas kawasan				
				Meningkatnya dukungan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional terhadap pencapaian investasi dan perdagangan				
				Peningkatan peran Indonesia di Asia Pasifik dan Afrika				

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Keberhasilan pembangunan nasional tidak lepas dari keberhasilan pembangunan di setiap provinsinya, begitu juga halnya dengan keberhasilan pembangunan di Provinsi tidak lepas dari keberhasilan pembangunan di Kabupaten/Kota. Untuk itu, untuk mencapai target-target pembangunan nasional dan provinsi maka perlu didukung oleh Kabupaten/Kota.

Dalam kerangka penguatan perencanaan pembangunan seperti diamanatkan pada PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Penyusunan RKPD Provinsi NTB tahun 2019 berpedoman pada penyusunan RKP tahun 2019 yang disusun dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*) dan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)

Penjabaran RKP 2019 ke dalam lima Prioritas Nasional meliputi: (1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar; (2) Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman; (3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya; (4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air; serta (5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Sedangkan Dalam RKPD Provinsi NTB Tahun 2019 terbagi menjadi 5 (lima) prioritas daerah dan 24 (dua puluh empat) program prioritas yaitu: (1) Percepatan penurunan angka kemiskinan; (2) Peningkatan pelayanan dasar; (3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif; (4) Pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata; dan (5) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana. Hal ini mendorong percepatan integrasi pembangunan antara pusat dengan daerah.

Sesuai dengan tema RKPD Tahun 2019, maka pengembangan wilayah akan ditujukan pada pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk percepatan penurunan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB selama 5 tahun terakhir rata-rata diatas 6 persen per tahun namun belum diikuti dengan penurunan yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di NTB. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 akan didorong pada peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif, pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata. Dari sisi pemerataan pembangunan, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk pengurangan kesenjangan antarwilayah terutama untuk pembangunan di pulau Lombok dan pulau Sumbawa.

Untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk percepatan penurunan angka kemiskinan sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2019, maka arah kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2019 dapat dijabarkan sebagai berikut:

I. Percepatan penurunan angka kemiskinan berbasis desa

Arah kebijakan dan strategi dalam upaya percepatan penurunan angka kemiskinan pada tahun 2019 dilakukan sebagai berikut:

- Mengawasi secara ketat terhadap pelaksanaan bantuan sosial melalui bantuan pangan non tunai (BPNT), penyaluran bantuan PKH secara non tunai dan bantuan pendidikan bagi siswa miskin (KIP) dari pemerintah pusat melalui koordinasi yang intensif secara berjenjang mulai tingkat provinsi sampai ketingkat desa agar penerima bantuan tepat sasaran.
- Menyediakan dan memperluas sistem jaminan sosial untuk melindungi berbagai bentuk kerentanan terutama bagi masyarakat miskin dan rentan yang tidak tercover dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) kesehatan dan ketenagakerjaan melalui sistem jaminan sosial daerah (SJSD)
- Memberikan akses kelola sumber daya alam melalui perhutanan sosial bagi 40 persen penduduk berpendapatan terendah di sekitar hutan melalui lima skema pengelolaan, yaitu Skema Hutan Desa (HD) hutan negara yang hak pengelolaannya diberikan kepada lembaga desa untuk kesejahteraan desa. Hutan Kemasyarakatan (HKm), yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Hutan Adat (HA), dimana hutan ini adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hutan adat. Skema terakhir adalah Kemitraan Kehutanan, dimana adanya kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang Izin Usaha Pemanfaatan hutan, jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan
- Meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau, khususnya untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan strategi antara lain: (a) Fasilitasi penyediaan hunian layak dan terjangkau, (b) Fasilitasi peningkatan kualitas hunian, (c) Fasilitasi pembiayaan perumahan MBR (masyarakat berpendapatan rendah), serta (d) Fasilitasi peningkatan kualitas permukiman dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh;
- Meningkatkan akses air minum dan sanitasi yang layak dengan strategi antara lain: (a) Sinergi pembangunan infrastruktur, (b) Penerapan manajemen layanan terpadu, serta (c) Peningkatan keterlibatan dan perubahan perilaku masyarakat;
- Meningkatkan daya beli masyarakat miskin melalui pembentukan dan pengembangan wirausaha terutama pada komoditi unggulan daerah, pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah, pembinaan pedagang kakilima dan asongan, peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan, pemantauan barang strategis dan BBM, dan operasi pasar, peningkatan kesejahteraan petani, dengan intensifikasi lahan dan produk SDA berkualitas, meningkatkan nilai tambah dari hasil produksi sektor pertanian dalam arti luas, pengembangan kawasan rumah pangan lestari, serta penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Meningkatkan kualitas keterampilan tenaga kerja melalui (1) peningkatan kerja sama dengan dunia usaha; (2) penguatan penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan vokasi; (3) pemantapan sistem sertifikasi kompetensi; dan (4) peningkatan keterampilan wirausaha.

Untuk mendorong percepatan penurunan angka kemiskinan, maka perlu didukung oleh ketersediaan anggaran yang cukup. Untuk itu, penganggaran penanggulangan kemiskinan perlu memanfaatkan potensi anggaran yang tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi dapat dikolaborasikan dengan penganggaraan dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, dan bahkan *stakeholders* lainnya.

Pola penanggulangan kemiskinan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan serta memanfaatkan Basis Data Terpadu (BDT) dengan pendekatan spasial. Terdapat 14 program kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis desa di 500 desa/kelurahan terbanyak penduduk miskinnya dan 100 desa prioritas penanggulangan kemiskinan oleh APBD provinsi (data desa sesuai hasil musrenbang). Sisanya 400 desa kategori miskin tersebut diharapkan dukungan kabupaten dan dana desa untuk mengintervensi dengan 14 program kegiatan tsb. Disamping itu, terdapat 10 desa/kelurahan pilot project (dari 100 desa prioritas provinsi) yang diharapkan kenuntasan penanganannya melalui integrasi dana APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/kota dan APBDesa serta NGO serta ada 50 desa wisata juga yg diharapkan dukungan Kab/kota serta Pemerintah Desa sesuai kewenangannya masing-masing.

Berikut ini sebaran desa miskin yang akan diintervensi di 10 Kabupaten/kota Provinsi NTB sebagai berikut:

Tabel 5.1 Sebaran Desa Miskin Yang Akan Diintervensi Di 10 Kabupaten/Kota
Provinsi Ntb

No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)	No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)
Kabupaten Lombok Timur			Kota Mataram		
1	Semalun	Semalun Bumbung	1	Ampenan	Bintaro
2		Semalun Lawang	2		Ampenan Tengah
3		Sajang	3		Ampenan Selatan
4		Bilok Petung	4		Pejeruk
5	Aikmel	Lenek	5		Banjar
6		Lenek Lauq	6	Cakranegara	Sayang-Sayang
7		Kalijaga	7		Karang Taliwang
8		Kembang Kerang	8	Mataram	Pagutan
9		Aikmel	9		Pagesangan Barat
10		Lenek Baru	10		Pagesangan Timur
11		Kembang Kerang Daya	11		Pagutan Timur
12		Lenek Pesiraman	12	Sandubaya	Selagalas
13		Toya	13		Babakan
14	Jerowaru	Jerowaru	14		Bertais
15		Pandan Wangi	15		Mandalika

No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)		No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)
16		Sekaroh		16	Sekarbela	Jempong Baru
17		Wakan		17		Karang Pule
18	Keruak	Tanjung Luar		18		Tanjung Karang
19		Pijot		19		Kekalek Jaya
20		Selebung Ketangga				
21		Sepit		Kabupaten Dompu		
22		Batu Putik		1	Dompu	Oo
23		Ketapang Raya		2		Mangge Asi
24	Labuhan Haji	Penedagandor		3		Kandai Satu
25		Labuhan Haji		4		Mbawi
26		Surya Wangi		5		Dorebara
27		Korleko		6	Hu'u	Hu'u
28		Banjar Sari		7		Daha
29		Tirtanadi		8		Cempi Jaya
30	Masbagik	Paok Motong		9		Persiapan Jala
31		Masbagik Selatan		10	Kempo	Soro
32		Danger		11		Kempo
33	Montong Gading	Kilang		12		Ta'a
34		Montong Betok		13		Persiapan Soro Barat
35		Perian		14	Kilo	Mbuju
36		Jenggik Utara		15		Lasi
37		Pesanggrahan		16	Manggalewa	Suka Damai
38		Pringgajurang Utara		17		Lanci Jaya
39	Pringgabaya	Apitaik		18		Soriutu
40		Pohgading		19		Doromelo
41		Batuyang		20		Kwangko
42		Pringgabaya		21	Pajo	Temba Lae
43		Labuhan Lombok		22		Jambu
44	Pringgasela	Jurit		23		Ranggo
45		Pengadangan		24		Lepadi
46		Jurit Baru		25	Pekat	Pekat
47		Pringgasela Selatan		26		Kadindi
48	Sakra	Suangi		27		Doropeti
49		Sakra		28		Kadindi Barat
50		Rumbuk		29		Tambora
51		Sakra Selatan		30	Woja	Bakajaya
52		Suangi Timur		31		Montabaru
53		Songak		32		Mumbu

No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)		No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)
54	Sakra Barat	Sukarara		33		Wawonduru
55		Gunung Rajak		34		Kandaidua
56		Rensing		35		Saneo
57		Bungtiang		36		Matua
58		Pengkelakmas		37		Bara
59		Borok Toyang				
60		Montong Beter		Kabupaten Bima		
61	Sakra Timur	Gelanggang		1	Ambalawi	Kole
62		Gereneng		2		Mawu
63		Menceh		3		Nipa
64	Sambelia	Sambelia		4		Tolowata
65		Belanting		5	Belo	Ncera
66		Sugian		6		Renda
67		Labuhan Pandan		7	Bolo	Leu
68	Selong	Kelayu Jorong		8		Nggembe
69		Kembang Sari		9		Rato
70		Pancor		10		Sanolo
71		Sekarteja		11		Tambe
72	Sikur	Semaya		12		Timu
73		Montongbaan		13	Donggo	Bumi Pajo
74		Kotaraja		14		Doridungga
75		Tetebatu		15		Mbawa
76		Montongbaan Selatan		16		O'o
77		Darma Sari		17	Lambitu	Kuta
78	Suela	Suela		18		Sambori
79		Ketangga		19	Lambu	Lanta
80		Suntalangu		20		Melayu
81		Perigi		21		Nggelu
82		Mekar Sari		22		Rato
83	Sukamulia	Padamara		23		Simpasai
84		Dasan Lekong		24		Soro
85		Sukamulia		25		Sumi
86		Sukamulia Timur		26	Langgudu	Karampi
87	Suralaga	Anjani		27		Laju
88		Bagik Payung		28		Karumbu
89		Suralaga		29		Dumu
90		Bagikpayung Timur		30		Doro O'o
91	Terara	Jenggik		31		Rupe
92		Rarang		32	Madapangga	Rade
93		Suradadi		33		Bolo

No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)		No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)
94		Sukadana		34		Monggo
95		Lando		35		Woro
96		Rarang Tengah		36		Campa
97		Embung Raja		37		Dena
98		Pandan Duri		38	Monta	Tolouwi
99	Wanasaba	Mamben Lauq		39		Sie
100		Mamben Daya		40		Tolotangga
101		Wanasaba		41		Tanggabaru
102		Karang Baru		42		Sekuru
103		Bebidas		43	Palibelo	Nata
104		Tembeng Putik		44		Ntonggu
105		Wanasaba Lauk		45		Panda
				46		Roi
Kabupaten Lombok Barat				47		Teke
1	Sekotong	Pelangan		48	Parado	Kuta
2		Buwun Mas		49		Lere
3		Sekotong Barat		50		Paradorato
4		Sekotong Tengah		51		Paradowane
5		Kedaro		52	Sanggar	Kore
6	Lembar	Lembar Selatan		53		Taloko
7		Jembatan Gantung		54		Boro
8		Lembar		55	Sape	Buncu
9		Labuan Tereng		56		Kowo
10	Gerung	Kebun Ayu		57		Naru Barat
11		Babussalam		58		Parangina
12		Beleke		59		Poja
13		Tempos		60		Raioi
14		Banyu Urip		61		Sangia
15		Gerung Selatan		62		Sari
16		Dasan Geres		63	Soromandi	Kananta
17	Labuapi	Bajur		64		Punti
18		Bengkel		65		Sai
19		Telagawaru		66		Sampungu
20		Merembu		67	Tambora	Kawinda Nae
21		Terong Tawah		68		Kawinda Toi
22	Kediri	Banyumulek		69		Labuhan Kananga
23		Dasan Baru		70	Wawo	Kombo
24		Kediri		71		Raba
25	Kuripan	Kuripan Utara		72		Ntori
26		Jagaraga		73		Kambilo

No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)	No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)
27		Kuripan	74		Maria
28	Narmada	Sesaot	75	Wera	Sangiang
29		Suranadi	76		Tawali
30		Keru	77		Wora
31		Mekarsari	78		Pai
32		Krama Jaya	79		Ntoke
33		Selat	80		Bala
34		Badrain	81	Woha	Risa
35		Dasan Tereng	82		Keli
36		Golong	83		Samili
37	Lingsar	Batu Mekar	84		Talabiu
38		Langko			
39		Batu Kumbung	Kabupaten Lombok Tengah		
40		Sigerongan	1	Batukliang	Barabali
41		Lingsar	2		Bujak
42	Gunungsari	Mekarsari	3		Selebung
43		Jatisela	4	Batukliang Utara	Aik Berik
44		Gunungsari	5		Lantan
45		Sesela	6		Setiling
46		Kekait	7		Teratak
47		Penimbung	8	Janapria	Janapria
48	Batulayar	Sandik	9		Kerembong
49		Batulayar	10		Lekor
50		Meninting	11		Loang Maka
			12		Saba
Kabupaten Sumbawa			13	Jonggat	Barejulat
1	Alas	Baru	14		Bonjeruk
2		Juranalas	15		Jelantik
3		Marenteh	16		Labulia
4		Pulau Bungin	17		Pengenjek
5	Alas Barat	Gontar Baru	18		Puyung
6		Lekong	19		Ubung
7		Mapin	20	Kopang	Darmaji
8		Mapin Rea	21		Dasan Baru
9		Usar	22		Kopang Rembiga
10	Batulanteh	Baturotok	23		Montong Gamang
11		Tangkan Pulit	24	Praya	Bunut Baik
12		Tepal	25		Jago
13	Buer	Buin Baru	26		Montong Terep
14		Juru Mapin	27		Prapen

No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)	No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)
15		Labuhan Burung	28	Praya Barat	Batujai
16		Tarusa	29		Kateng
17	Empang	Empang Atas	30		Mangkung
18		Empang Bawah	31		Mekar Sari
19		Gapit	32		Penujak
20		Jotang Beru	33	Praya Barat Daya	Batu Jangkih
21		Lamenta	34		Kabul
22		Ongko	35		Pandan Indah
23	Labangka	Labangka	36		Pelambik
24		Sekokat	37		Ungga
25		Suka Damai	38	Praya Tengah	Batunyala
26		Suka Mulya	39		Beraim
27	Labuhan Badas	Karang Dima	40		Kelebu
28		Labuan Sumbawa	41		Lajut
29		Labuhan Badas	42		Pengadang
30	Lantung	Sepukur	43	Praya Timur	Beleka
31		Lantung	44		Ganti
32	Lape	Lape	45		Marong
33		Labuan Kuris	46		Mujur
34		Dete	47		Semoyang
35	Lenangguar	Lenangguar	48		Sengkerang
36		Ledang	49	Pringgarata	Menemeng
37		Telaga	50		Pemepek
38	Lopok	Pungkit	51		Pringgarata
39		Langam	52		Sepakek
40		Berora	53		Sintung
41		Mama	54	Pujut	Kawo
42	Lunyuk	Pada Suka	55		Mertak
43		Emang Lestari	56		Pengembur
44		Perung	57		Pengengat
45		Lunyuk Rea	58		Sengkol
46	Maronge	Maronge	59		Sukadana
47		Pemasar	60		Tumpak
48	Moyo Utara	Kukin			
49		Penyaring	Kabupaten Sumbawa Barat		
50		Pungkit	No	Kecamatan	Lokasi Program
51	Moyohilir	Batu Bangka			
52		Kakiang			
53		Olat Rawa	1	Brang Ene	Kalimantong

No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)	No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)
54		Serading	2		Mura
55	Moyohulu	Berang Rea	3		Manemeng
56		Leseng	4	Brang Rea	Sapugara Bree
57		Mokong	5		Bangkat Monteh
58		Sampe	6		Seminar Salit
59	Orong Telu	Mungkin	7		Tepas
60		Sebeok	8	Jereweh	Beru
61		Senawang	9		Belo
62	Plampang	Muer	10	Maluk	Benete
63		Sepayung	11		Maluk
64		Sp Iii Prode	12		Bukit Damai
65		Teluk Santong	13		Pasir Putih
66		Usar	14	Pototano	Tua Nanga
67	Rhee	Rhee	15		Kokar Lian
68		Rhee Loka	16		Mantar
69	Ropang	Lawin	17		Senayan
70		Lebangkar	18	Sekongkang	Ai Kangkung
71		Lebin	19		Talonang Baru
72		Ropang	20		Sekongkang Atas
73	Sumbawa	Pekat	21		Tongo
74		Brang Biji	22		Tatar
75		Bugis	23	Senteluk	Seteluk Tengah
76		Seketeng	24		Seteluk Atas
77	Tarano	Mata	25		Kelanir
78		Batulanteh,	26		Seteluk Atas
79		Labuan Jambu	27		Air Suning
80		Labuan Aji	28	Taliwang	Banjar
81		Labuan Bontong	29		Batu Putih
82	Unter Iwes	Pelat	30		Telaga Bertong
83		Kerekeh			
84		Boak	Kabupaten Lombok Utara		
85	Utan	Pukat	1	Bayan	Sukadana
86		Stowe Brang	2		Senaru
87		Labuan Bajo	3		Akar-Akar
88		Motong	4		Anyar
89		Sabedo	5	Gangga	Bentek
			6		Genggelang
Kota Bima			7		Sambik Bangkol
1	Asakota	Jatibaru	8		Rempek
2	Mpunda	Sambinae	9	Kayangan	Sesait

No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)		No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)
3		Matakando		10		Selengan
4	Raba	Ntobo		11		Gumantar
5		Rabadompu Barat		12		Kayangan
6		Penanae		13	Tanjung	Sigar Penjalin
7		Penaraga		14		Sokong
8	Rasanae Barat	Tanjung		15		Jenggala
9		Dara		16		Tegal Maja
10	Rasanaetimur	Kumbe		17	Pemenang	Pemenang Barat
11		Dodu		18		Malaka

Berikut ini sebaran desa miskin yang akan diintervensi oleh Provinsi NTB sebagai berikut:

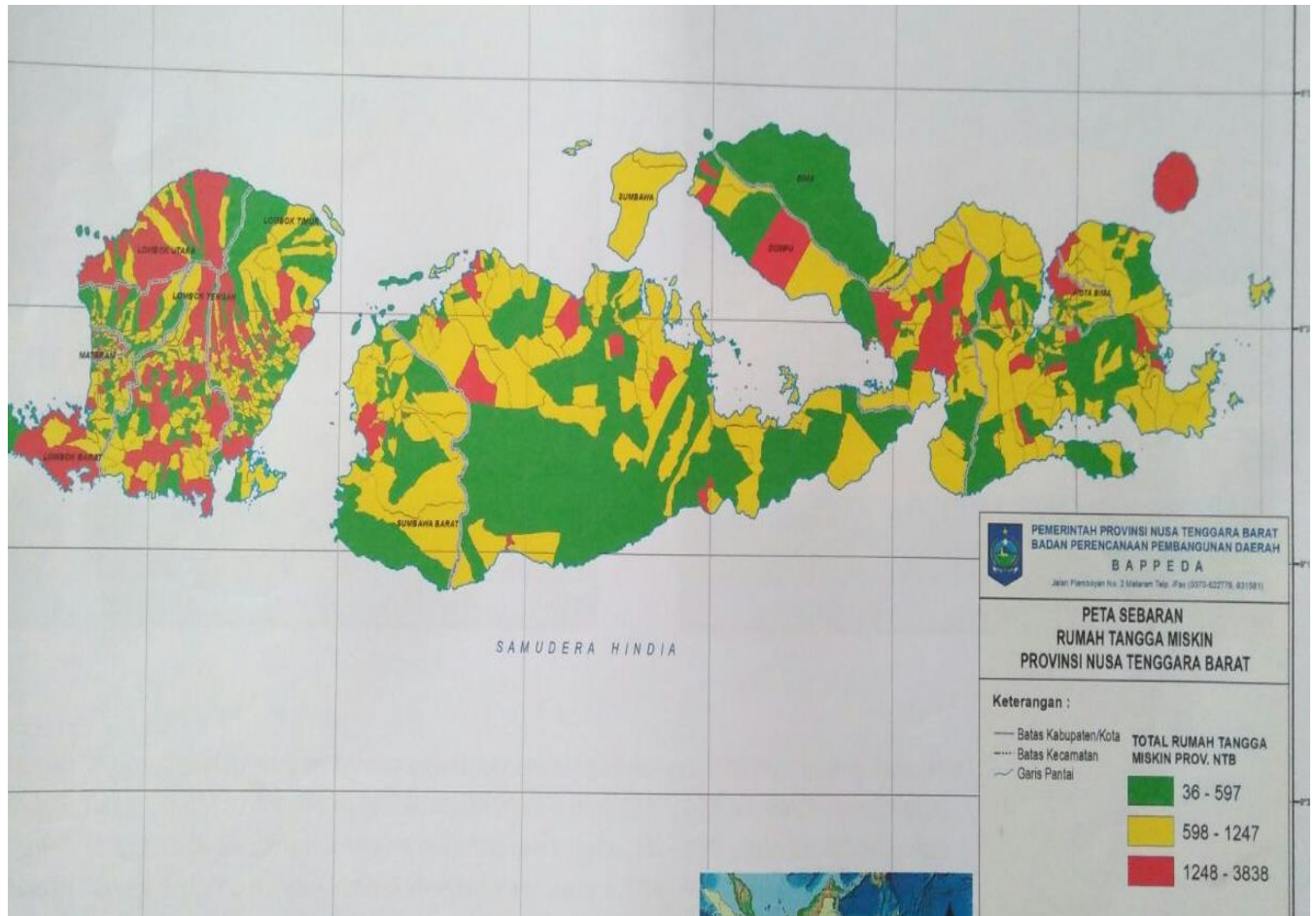
Tabel 5.2 Sebaran Desa Miskin Yang Akan Diintervensi Oleh Provinsi NTB

No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)
KAB. LOMBOK TIMUR		
1	Sembalun	Sembalun Bumbung
2	Aikmel	Kembang Kerang Daye (Pilot Project)
3	Aikmel	Lenek Pesiraman
4	Jerowaru	Sekaroh
5	Jerowaru	Wakan
6	Keruak	Pijot
7	Labuhan Haji	Labuhan Haji
8	Labuhan Haji	Korleko
9	Motong Gading	Jenggik Utara
10	Pringgabaya	Labuhan Lombok
11	Sakra Barat	Rensing
12	Cakra Timur	Greneng
13	Sembelia	Belanting
14	Sembelia	Sugian
15	Selong	Kelayu Jorong
16	Sikur	Kotaraja
17	Sikur	Tetebatu
18	Swele	Perigi
19	sukamulia	Dasan Lekong
KAB. LOMBOK BARAT		
1	Sekotong	Pelangan
2	Sekotong	Buwun Mas
3	Sekotong	Sekotong Barat (Pilot Project)
4	Sekotong	Sekotong Tengah
5	Sekotong	Kedaro
6	Lembar	Lembar Selatan
7	Lembar	Lembar
8	Lembar	Labuan Tereng
9	Gerung	Kebun Ayu
10	Gerung	Babussalam
11	Kediri	Kediri
12	Lingsar	Batu Mekar
13	Lingsar	Langko
14	Lingsar	Batu Kumbung
15	Lingsar	Sigerongan

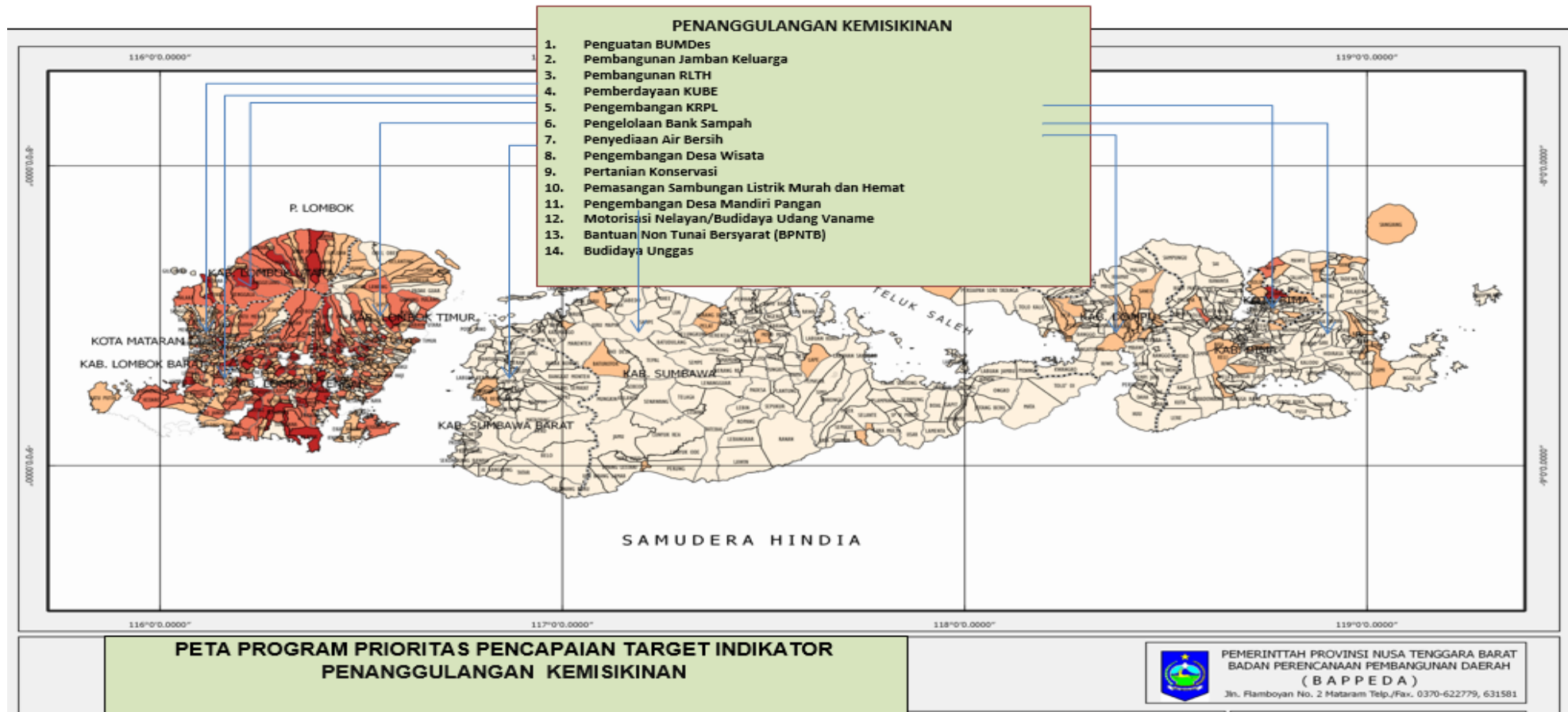
No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)
16	Lingsar	Lingsar
17	Batu Layar	Batu Layar
18	Batu Layar	Pusuk Lestari
KAB. LOMBOK UTARA		
1	Bayan	Sukadana (Pilot Project)
2	Gangga	Genggeling
3	Gangga	Sambik Bangkol
4	Kayangan	Sesait
5	Kayangan	Selengan
6	Tanjung	Sengar Penjalin
7	Pemenang	Pemenang Barat
8	Pemenang	Malaka
9	Bayan	Senaru
KAB. DOMPU		
1	Dompu	Oo
2	Hu'u	Campi Jaya
3	Kempo	Persiapan Soro Barat
4	Kilo	Mbuju
5	Kilo	Melaju (Pilot Project)
6	Pekat	Kedindi
7	Woja	Mumbu
8	Woja	Saneo
KAB. SUMBAWA		
1	Plampang	Usar
2	Utan	Pukat
3	Utan	Stowe
4	Sumbawa	Pekat
5	Orong telu	Mungkin
6	Alas	Bungin
7	Lape	Lape
KAB. BIMA		
1	Ambalawi	Nipa
2	Belo	Renda
3	Bolo	Tambe
4	Sape	Sangia
5	Langgudu	Laju
6	Monta	Tolouwi
7	Palebelo	Ntonggu (Pilot Project)

No	Kecamatan	Lokasi Program (Desa)
SUMBAWA BARAT		
1	Brang Rea	Sapugara Bree
2	Taliwang	Batu Putih (Pilot Project)
3	Taliwang	Telaga Bertong
4	Pototano	Tua Nanga
5	Pototano	Mantar
6	Seteluk	Seteluk Atas
KAB. LOMBOK TENGAH		
1	Batu Keliang	Bujak
2	Batu Keliang Utara	Setiling
3	Janapria	Lekor
4	Jonggat	Pengenjek
5	Kopang	Montong Gamang
6	Praya	Bunut Baok
7	Praya Barat	Kateng
8	Praya Barat	Penujak
9	Praya Barat Daya	Pandan Indah
7	Praya Tengah	Kelebu
8	Praya Tengah	Lajut
9	Praya Timur	Semoyang
10	Pringgarata	Pemepek
11	Pujut	Mertak (Pilot Project)
12	Pujut	Tumpak
13	Btu Keliang Utara	Aik Beriq
14		Aik Bual
15		Sukarara
KOTA BIMA		
1	Asakota	Jati Baru
2	Raba	Ntobo
3	Rasanae Timur	Kumbe
4	Rasane Timur	Tanjung
5	Raba	Raba Dompur Barat
6	Raba	Panaraga
KOTA MATARAM		
1	Ampenan	Bintaro (Pilot Project)
2	Cakranegara	Sayang saying
3	Mataram	Pagesangan Barat
4	Sandubaya	Mandalika
5	Sekarbela	Jempong Baru

Gambar 5.1 Peta sebaran desa miskin yang akan diintervensi pada tahun 2019 di 10 Kabupaten/kota Provinsi NTB



INTEGRASI 14 PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PROVINSI NTB DAN KABUPATEN/KOTA



Gambar 5.2 Kerangka Percepatan Penurunan Kemiskinan di NTB



Tabel 5.3 Target Tingkat Kemiskinan (%)

Kabupaten/Kota	Target 2019
Kabupaten Lombok Barat	15,90
Kabupaten Lombok Tengah	15,09
Kabupaten Lombok Timur	
Kabupaten Sumbawa	8,87
Kabupaten Dompu	10-11
Kabupaten Bima	11,62
Kabupaten Sumbawa Barat	7,70
Kabupaten Lombok Utara	24,13
Kota Mataram	7,06
Kota Bima	9,00
Nusa Tenggara Barat	13,00

II. Peningkatan Pelayanan Dasar

Arah kebijakan dan strategi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan dasar pada tahun 2019 dilakukan sebagai berikut:

- Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan terjangkau melalui pembangunan ruang kelas baru, pembangunan sekolah baru pada daerah-daerah terpencil dan tidak terjangkau, penyediaan tenaga pendidik yang berkualitas dan terdistribusikannya guru ke seluruh satuan pendidikan secara merata;
- Memperkuat Kelembagaan Satuan Pendidikan dengan meningkatkan status akreditasi sekolah mulai jenjang PAUD, Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat, dan Sekolah Menengah Atas/ Sederajat
- Meningkatkan kualitas pembelajaran dan akademik melalui penerapan Kurikulum 2013 pada semua jenjang pendidikan dan meningkatnya rata-rata nilai sikap siswa
- Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui peningkatan proses persalinan di fasilitas kesehatan, peningkatan kunjungan neonatal pertama (KN1) serta peningkatan kunjungan antenatal (K4)
- Mempercepat Penurunan *Stunting* melalui ekstensifikasi Aksi Seribu Hari Pertama Kehidupan (ASHAR) sehingga dapat meningkatkan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari 6 bulan, pemberian tablet tambah darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan
- Memperkuat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dan Pengendalian Penyakit melalui pembentukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di sekolah pada seluruh kabupaten/kota, pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) terpadu pada 50 Puskesmas, pengobatan Tuberkulosis paru BTA positif, peningkatan penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, serta mendorong peningkatan Kabupaten/Kota bebas ODF.
- Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan pada puskesmas dan rumah sakit, penyediaan obat dan vaksin di seluruh puskesmas
- Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui pemenuhan obat dan makanan yang memenuhi syarat

Tabel 5.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten/Kota	Target 2019				
	IPM	Usia Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Rp.000)
Kabupaten Lombok Barat	67,50	65,40	12,80	6,45	11.200
Kabupaten Lombok Tengah	65,42	65,09	14,25	6,06	9.178
Kabupaten Lombok Timur	66,12				
Kabupaten Sumbawa	66,87	67	> 13,10	8,5	
Kabupaten Dompu	67,50	67,4	15	8,75	8.829
Kabupaten Bima	72,10				
Kabupaten Sumbawa Barat	70,80				
Kabupaten Lombok Utara	65,30				
Kota Mataram	80,25		16,36	9,14	
Kota Bima	74,66	70	14	10,5	
Nusa Tenggara Barat	68,00	66,50	13,78	7,32	10.160

III. Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif:

Arah kebijakan dan strategi dalam upaya peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif pada tahun 2019 dilakukan sebagai berikut:

- Meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui (1) peningkatan hasil pertanian, perikanan dan kehutanan; (2) pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan; (3) peningkatan mutu, sertifikasi, dan standarisasi hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan; (4) penguatan kelembagaan dan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan; (5) peningkatan sarana dan prasarana pendukung nilai tambah pertanian, perikanan, dan kehutanan; (6) Hilirisasi produk pijari (Sapi, Jagung, Rumput Laut, Ikan); serta (7) Pengembangan peternakan rakyat nonsapi untuk meningkatkan penyediaan protein hewani sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor
- Meningkatkan nilai tambah industri pengolahan melalui (1) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi; (2) pengembangan dan peningkatan investasi industri hulu nonagro dan pendukung; (3) peningkatan daya saing industri andalan nonpangan; (4) pengembangan sentra-serta industri dan penciptaan wirausaha baru; dan (5) Pengembangan industri hasil pengolahan dengan memberi kemudahan

berinvestasi dalam negeri, peningkatan dukungan infrastruktur, ketersediaan bahan baku berkualitas, dan pengembangan pasar dalam negeri

- Meningkatkan nilai tambah sektor yang terkait kepariwisataan dan jasa produktif lainnya melalui (1) percepatan pengembangan kawasan pariwisata dan penguatan destinasi unggulan seperti Kawasan SAMOTA, KEK Mandalika, Geopark Rinjani, Geopark Tambora, LA SAKOSA serta destinasi pariwisata lainnya; (2) penguatan struktur ekonomi kreatif; dan (3) pengembangan kemitraan usaha mikro dan kecil (UMK) dengan usaha menengah dan besar (UMB).
- Meningkatkan daya saing produk olahan perikanan untuk memenuhi pasar dalam negeri dan perluasan pasar ekspor, melalui: (i) Penetapan standar mutu olahan; dan (ii) Peningkatan kemampuan penetrasi pasar regional dan global;
- Meningkatkan produksi rumput laut, melalui: (i) Pengembangan kawasan kebun bibit rumput laut dan sarana dan prasarana usaha budidaya rumput laut; dan (ii) Peningkatan penanganan pascapanen dalam rangka menjaga kualitas dan harga rumput laut; serta
- Meningkatkan konsumsi ikan masyarakat, melalui: (i) Promosi gerakan makan ikan masyarakat; dan (ii) Peningkatan ketersediaan pasokan ikan yang berkualitas.

Tabel 5.5 Target Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Kabupaten Lombok Barat	6,01	3,20
Kabupaten Lombok Tengah	6,00	5,57
Kabupaten Lombok Timur		
Kabupaten Sumbawa	7,04	3,7-3,9
Kabupaten Dompu	7,00	4,50
Kabupaten Bima	7,02	2,84
Kabupaten Sumbawa Barat	7,58	5,19
Kabupaten Lombok Utara	5,50	
Kota Mataram	8,20	1,61
Kota Bima	5,50	6,00
Nusa Tenggara Barat	6,5 - 7,5	2,80

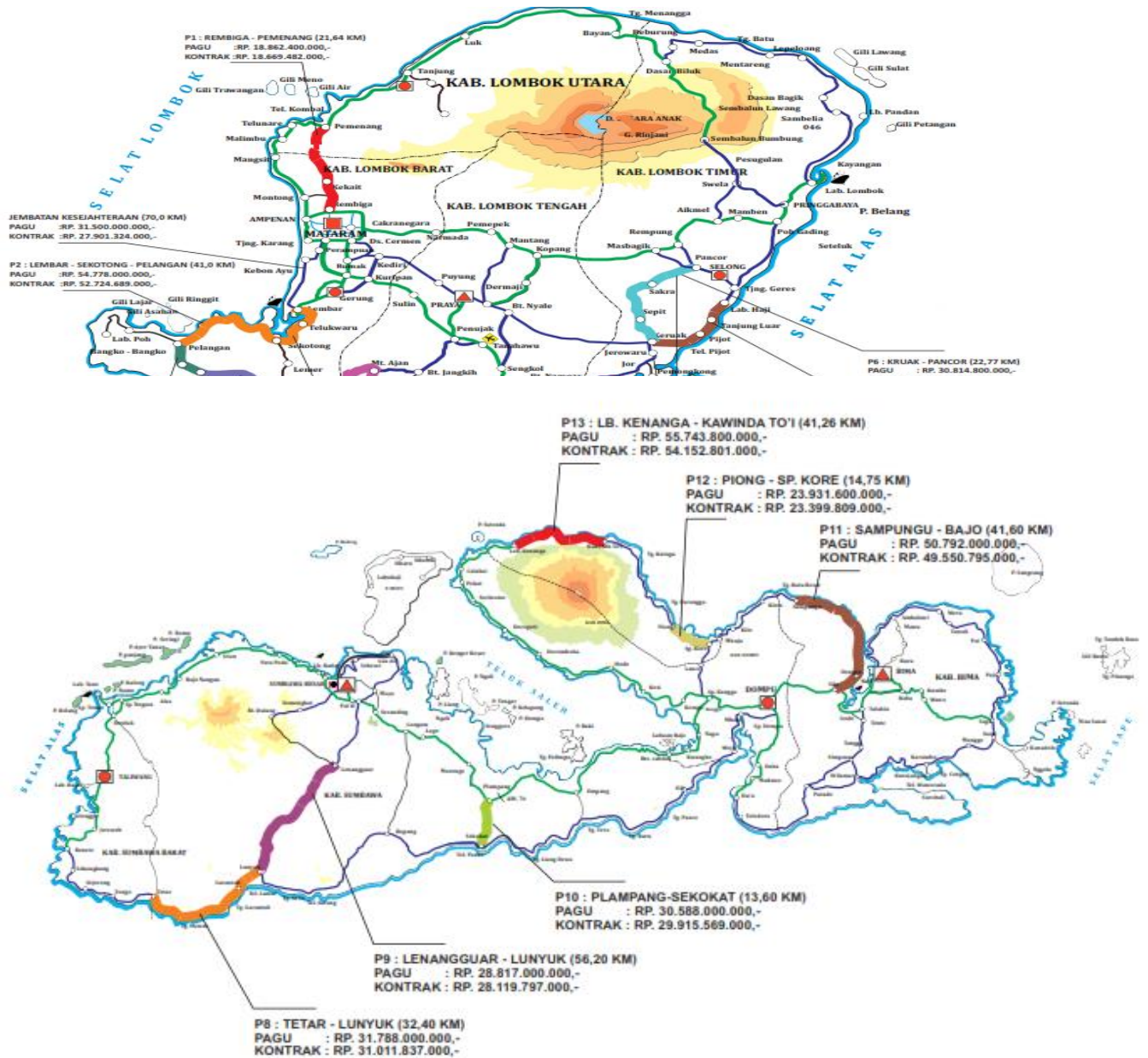
IV. Pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata

Arah kebijakan dan strategi dalam upaya pemantapan infrastruktur strategis untuk mendukung peningkatan investasi, ketahanan pangan dan pariwisata pada tahun 2019 dilakukan sebagai berikut:

- Meningkatkan konektivitas dengan strategi antara lain: (a) Pengembangan pelabuhan; (b) Pengembangan jaringan dan preservasi infrastruktur jalan sebagai pelayanan jalur intrapulau; (c) Pembangunan dan pengembangan transportasi multimoda dan angkutan umum

- perkotaan; (d) Peningkatan dan penyediaan fasilitas keselamatan transportasi.
- Mempercepat pembangunan transportasi yang terintegrasi antarmoda dan meningkatkan aksesibilitas di daerah tertinggal, rawan bencana, wilayah perbatasan, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi (kawasan pertanian produktif, KEK, Kawasan Industri, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional);
 - Meningkatkan kinerja kemantapan jalan daerah (jalan provinsi, jalan kabupaten/kota) dengan strategi antara lain: (a) Dukungan pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan baik melalui skema DAK Penugasan maupun DAK Reguler; dan (b) Mendorong pelaksanaan skema pendanaan hibah dari pemerintah pusat ke beberapa propinsi dan kabupaten/kota terpilih yang difokuskan pada perbaikan tata kelola dan manajemen pemeliharaan jalan daerah;
 - Mengembangkan infrastruktur TIK melalui (a) Adopsi dan pemanfaatan TIK pada sektor prioritas; dan (b) Peningkatan literasi masyarakat dan kapasitas SDM TIK.
 - Mempercepat pembangunan infrastruktur dan memperluas jangkauan pelayanan energi dan ketenagalistrikan dengan strategi antara lain Penyediaan sambungan listrik murah dan hemat serta Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT).
 - Menyediakan sarana dan prasarana dasar serta infrastruktur penunjang lainnya untuk kelancaran investasi dan pengembangan sektor kepariwisataan terutama pada kawasan-kawasan strategis seperti kawasan KEK Mandalika, Kawasan SAMOTA, kawasan LA SAKOSA, kawasan Geopark Rinjani, Kawasan Geopark Tambora serta kawasan potensial destinasi pariwisata lainnya
 - Membangun dan memelihara sarana dan prasarana sumber daya air dalam rangka meningkat ketahanan pangan daerah melalui Pembangunan Bendungan/embuang
 - Membangun konektivitas antar wilayah melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana perhubungan antara lain pelabuhan telong elong dan penambahan dermaga kayangan serta pembangunan terminal KEK Mandalika
 - Modernisasi sarana prasarana produksi pertanian dan perikanan

Gambar 5.3 Tingkat Kemantapan Jalan Pulau Lombok



Pengembangan Pelabuhan Laut

1. Pembangunan pelabuhan peti kemas dan kapal pesiar di kawasan Gilimas Lembar Lombok Barat, 1,3 triliun dengan target beroperasi pertengahan 2019

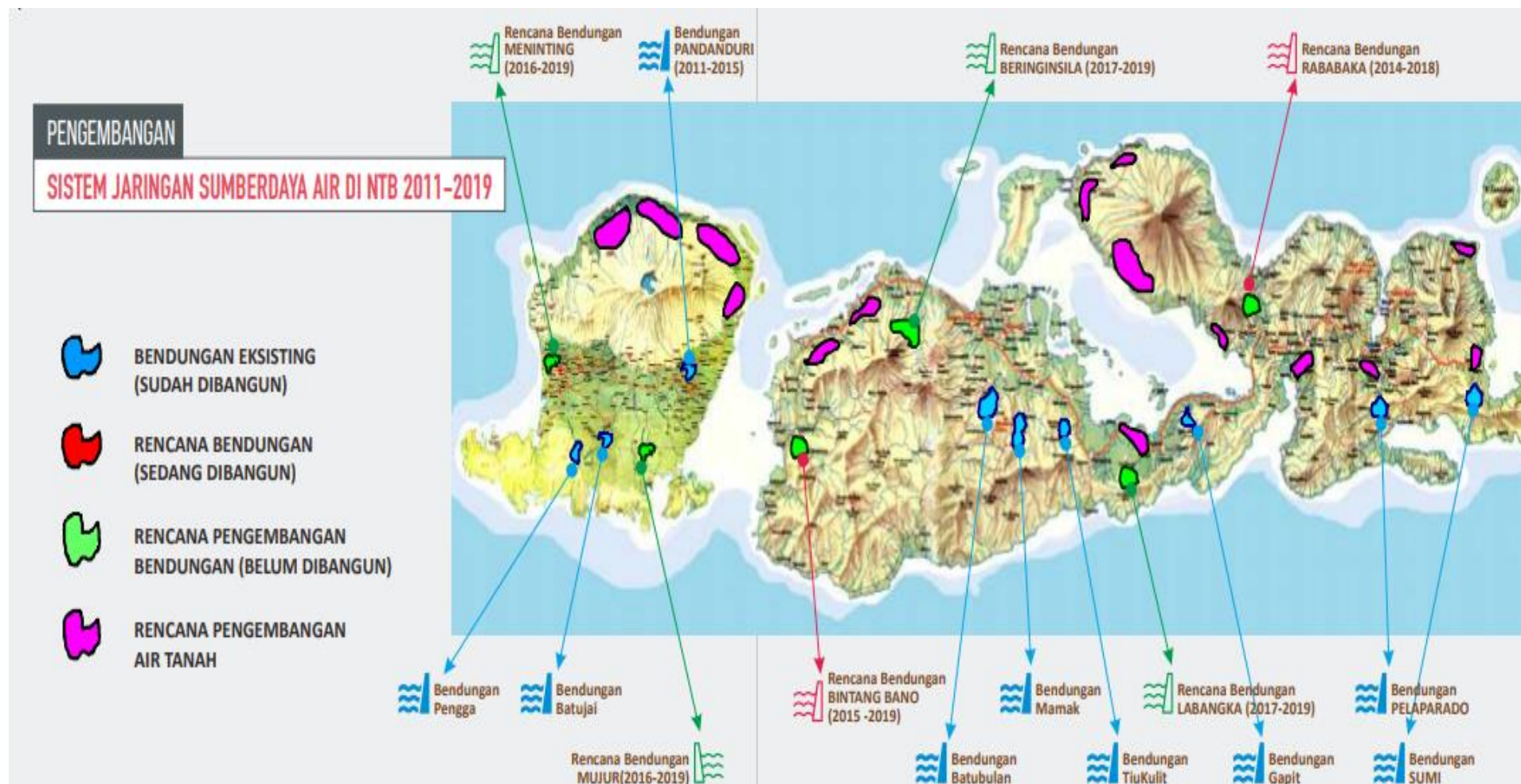


2. Pembangunan pelabuhan laut di Kilo Dompu untuk menopang ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing komoditas unggulan PIJAR

Tabel 5.6 Target Tingkat Kemantapan Jalan (%)

Kabupaten/Kota	Target 2019
Kabupaten Lombok Barat	
Kabupaten Lombok Tengah	71,09
Kabupaten Lombok Timur	
Kabupaten Sumbawa	89,58
Kabupaten Dompu	54,74
Kabupaten Bima	
Kabupaten Sumbawa Barat	79,83
Kabupaten Lombok Utara	55,76
Kota Mataram	93,00
Kota Bima	80,00
Nusa Tenggara Barat	85,00

Gambar 5.4 Pengembangan Bendungan



V. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

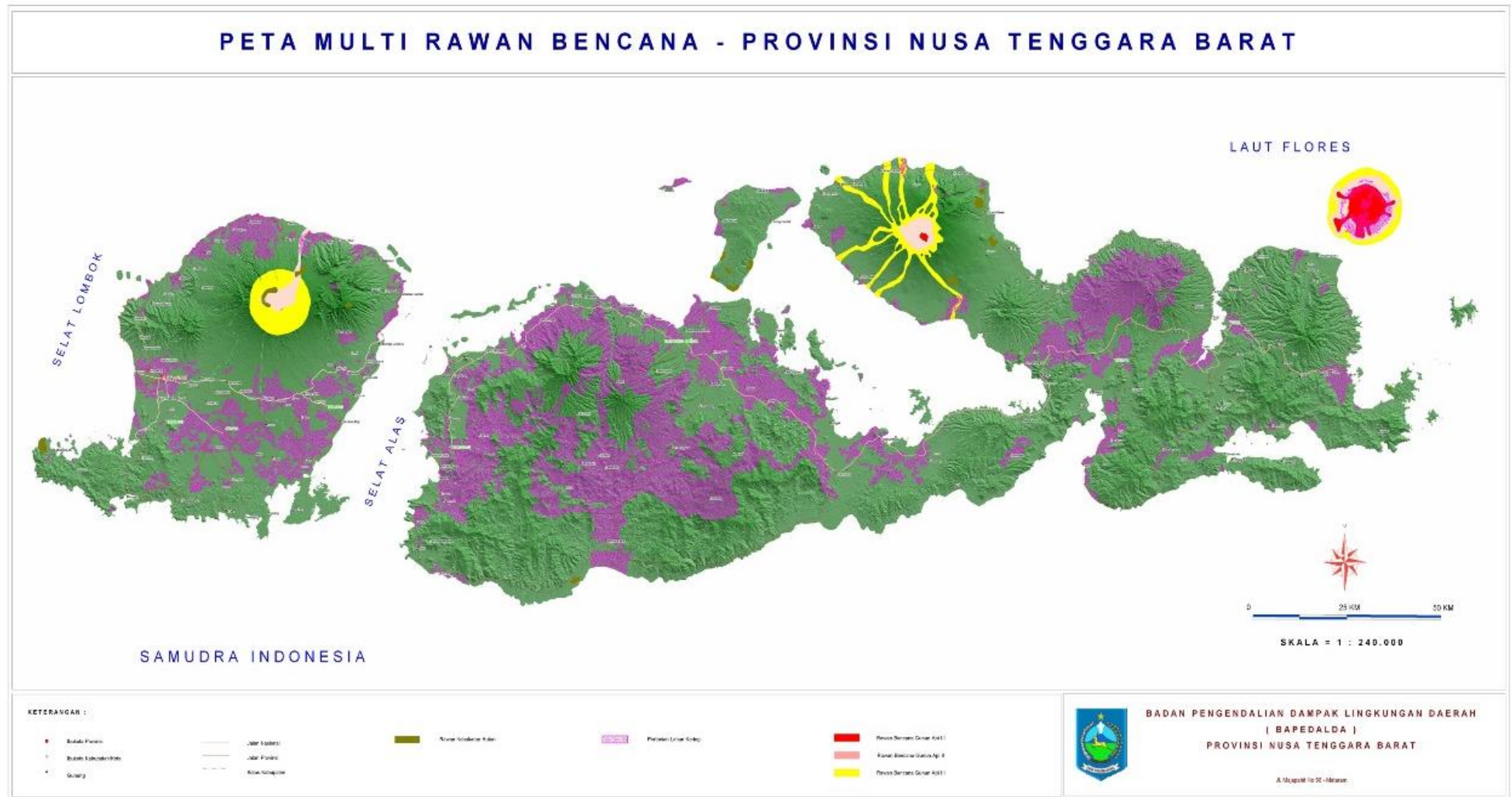
Arah kebijakan dan strategi dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana pada tahun 2019 dilakukan sebagai berikut:

- Memperbaiki kualitas lingkungan hidup ditujukan untuk meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan/hutan melalui peningkatan kualitas lingkungan hidup di seluruh sektor pembangunan dan daerah yang didukung oleh kapasitas pengelolaan lingkungan yang kuat, antara lain: (i) Kelembagaan; (ii) Sumber daya manusia; (iii) Penegakan hukum lingkungan; dan (iv) Kesadaran masyarakat;
- Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, melalui: (i) Penurunan beban pencemaran air, udara, dan lahan; (ii) Pengendalian pencemaran pesisir dan laut, termasuk penanganan sampah di laut; (iii) Pengelolaan sampah spesifik, serta pengolahan sampah melalui bank sampah; dan (v) Pemanfaatan sampah untuk sumber energi.
- Merehabilitasi hutan lahan terutama untuk menjaga semakin meluasnya lahan kritis
- Meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana di pesisir dan laut serta kerja sama antarregional dalam konservasi laut, melalui: (a) Pengelolaan jasa kelautan dalam rangka pengembangan ekonomi, (b) Revitalisasi masyarakat adat tradisional dan lokal di pulau-pulau kecil, (c) Perluasan lingkup kerja sama kelautan di tingkat regional dan global, dan (d) Penguatan kerja sama pengelolaan laut antardaerah.
- Meningkatkan konservasi, serta pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, yang dilakukan melalui: (a) Peningkatan konservasi sumber daya hutan dan tata kelola hutan; (b) Pelestarian dan mengembangkan pemanfaatan ekonomi keanekaragaman hayati; (c) Peningkatan perlindungan dan pengamanan ekosistem hutan.
- Menanggulangi bencana melalui (1) Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana; (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan; (3) Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana; (4) Penguatan Manajemen Kebencanaan dan (5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana

Tabel 5.7 Sebaran Lahan Kritis pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

Kab/Kota	Dalam Kawasan	Luar Kawasan	Total LAHAN KRITIS	Persentase
Mataram	-	963,17	963,17	0,17
Lobar	6.740,37	26.125,08	32.871,45	5,68
Loteng	1.262,34	64.357,66	65.628,00	11,34
Klu	8.219,71	36.144,31	44.369,02	7,67
Lotim	9.460,20	37.963,13	47.427,33	8,20
Ksb	12.393,64	21.667,97	34.064,61	5,89
Smbw	37.848,71	110.806,38	148.657,09	25,69
Dompu	6.822,19	29.970,87	36.800,06	6,36
Bima	57.599,56	103.656,97	161.257,53	27,87
Kota Bima	1.028,82	5.614,89	6.652,71	1,15
NTB	141.375,54	437.270,43	578.690,97	100,00

Gambar 5.5 Peta Sebaran Daerah Rawan Bencana Pada 10 Kabupaten/Kota Di Provinsi Ntb



BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Program prioritas, rencana kerja dan pendanaan tahun 2019 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 disusun dalam rangka memenuhi sasaran pokok dan arah kebijakan periode ke empat pembangunan tahun 2018-2023 yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional sekaligus mempedomani tema pembangunan Nusa Tenggara Barat 2019 yaitu **"Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi untuk Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan"**.

Rencana Kerja selanjutnya disusun melalui sistem *entebePlan* (<http://e-planning.ntbprov.go.id/>) sesuai tahapan proses perencanaan. Dalam penyusunan rencana kerja, selain memperhatikan RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional, Renja disusun dengan mempertimbangkan pula aspirasi masyarakat yang diperoleh proses Musrenbang sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (*bottom-up*).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 2 Tahun 2018 Tentang Program Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019, ditetapkan 35 Indikator Pembangunan NTB tahun 2019. Berikut ini dijabarkan Indikator Dampak yang termuat dalam Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tersebut, disertai dengan target pencapaian untuk tahun 2019.

Tabel 7.1 Capaian Dan Target Indikator Pembangunan NTB

NO	INDIKATOR	2017 (Kondisi Awal)	Target 2018	Target 2019
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat			
1	Tingkat Pengangguran terbuka	3,32	2,98	2,68
2	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi			
	- Non tambang (%)	7,10	7,56	8,06
	- Dengan tambang (%)	0,11	0,15	0,21
3	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82,00	82,85	83,70
4	Angka Kemiskinan	15,05	14,55	14,06
5	Pertumbuhan PAD	23,87	(135,73)	771,75
6	Peningkatan Kapasitas PAD	102,61	104,76	106,95
7	Meningkatnya Kunjungan wisatawan	3.508.903	4.465.680	5.683.343
8	Meningkatnya lama tinggal wisatawan			
	- Lama Menginap Hotel Bintang (Hari)	2,05	1,79	1,56
	- Lama Menginap Hotel Non-Bintang (Hari)	1,72	1,54	1,38
9	Angka kriminalitas	8.946	8.653	8.371
10	Kontribusi pendapatan sektor kebudayaan terhadap PAD	0,0041	0,0060	0,0089
11	Laju inflasi	3,70	3,16	2,70
12	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap Pendapatan Daerah	0,0076	0,0090	0,0107
13	Meningkatnya PDRB			
	- PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)	94.644.993,20	102.420.435,51	110.834.659,66
	- PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Non Tambang (Juta Rupiah)	77.888.661,24	82.919.301,48	88.274.858,60
14	Nilai Tukar Perikanan	104,06	105,48	106,91
15	Nilai Tukar Petani	116,81	123,32	130,18
16	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP
B	Aspek Pelayanan Umum			
17	Indeks Kepuasan Masyarakat			
18	Indeks Fatalitas	3,26	3,01	2,77

NO	INDIKATOR	2017 (Kondisi Awal)	Target 2018	Target 2019
19	Indeks Demokrasi			
20	Akses Air Minum Layak			
	- Perkotaan	90,65	93,50	96,43
	- Perdesaan	80,45	82,68	84,96
21	Akses Sanitasi Layak	82,67	85,00	87,00
22	Proporsi Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	77,16	79,80	82,52
23	Rasio Elektrifikasi	85,1	91,25	97,84
24	Meningkatnya proporsi Rumah Layak Huni (RLH)	1.081	1.117	1.154
25	Menurunnya kekurangan tempat tinggal (backlog) berdasarkan perspektif menghuni			
C	Aspek Daya Saing			
26	Angka melek huruf	12,86	12,39	11,93
27	Angka usia harapan hidup	65,55	66,28	67,02
28	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66,58	67,30	68,04
29	Luas kawasan hutan yang terlindungi	15.032		
30	Mempertahankan kualitas lingkungan hidup	53,37	50,38	47,57
31	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	61,5	70	
32	Penerapan hasil penelitian dan pengembangan			20
33	Persentase balita gizi buruk	22,60	24,07	25,63
34	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	98		
35	Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	1.054	1.032	1.011

BAB VIII PENUTUP

Tema RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 yaitu **"Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi untuk Percepatan Penurunan Angka Kemiskinan"**. Tema ini mewarnai fokus RKPD 2019 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Periode 2005-2025.

Perencanaan Tahun 2019 merupakan tahapan yang sangat strategis dimana merupakan perencanaan pembangunan tahun pertama dari pelaksanaan Visi Misi Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 5 (lima) tahun periode 2018-2023. Untuk mewujudkan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan kegiatan dan penjangkauan aspirasi masyarakat, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 ini dilaksanakan melalui proses teknokratik, politik dan partisipatif melalui musyawarah antar pelaku pembangunan dalam bentuk forum musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang secara berjenjang.

RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 mengamanatkan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2019 dilaksanakan secara profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Sehingga diharapkan hasil pembangunan yang dapat dirasakan secara lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat termasuk dunia usaha, akademisi.

Dalam pelaksanaannya, RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kaidah dan prinsip tersebut adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
3. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
4. Dokumen RKPD digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD. Untuk itu, RKPD dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD/APBN dan sumber lainnya, setiap Perangkat Daerah harus memuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
6. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

7. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
8. Pada akhir tahun anggaran 2019, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan Evaluasi Kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan Tahun 2019.
9. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi ini menjadi bahan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
10. Seluruh Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, akuntabel dan tepat sasaran.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Selanjutnya, tujuan inti pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan/merata dapat terwujud secara efisien dan efektif.

**MATRIK RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2019**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1	2	6	5	7	8	9
1	URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR				2.279.099.042.828	2.552.590.927.968
1,01	PENDIDIKAN				431.822.971.475	483.641.728.052
1.01.01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan				431.822.971.475	483.641.728.052
1.01.01.01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Induk)				420.320.281.700	470.758.715.504
1.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi		-	2.140.984.475	2.397.902.612
1.01.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya surat menyurat	Kota Mataram	1 Tahun	8.811.000	9.868.320
1.01.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi	Kota Mataram	1 Tahun	547.800.000	613.536.000
1.01.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya administrasi	Kota Mataram	1 Tahun	285.530.400	319.794.048
1.01.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan	Kota Mataram	1 Tahun	333.500.000	373.520.000
1.01.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Kebutuhan ATK	Kota Mataram	1 Tahun	57.987.675	64.946.196
1.01.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	Kota Mataram	1 Tahun	24.749.000	27.718.880
1.01.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Tersedianya bahan bdan	Kota Mataram	1 Tahun	38.500.000	43.120.000
1.01.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan	Kota Mataram	1 Tahun	30.000.000	33.600.000
1.01.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tersinerginya program pusat	Luar Provinsi	1 Tahun	80.000.000	89.600.000
1.01.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa administrasi	Kota Mataram	1 Tahun	411.510.000	460.891.200
1.01.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan	Bersinerginya program	se-NTB	1 Tahun	45.000.000	50.400.000
1.01.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan	Kota Mataram	12 orang	197.100.000	220.752.000
1.01.01.01.01.25	Pengelolaan Kearsipan	Terlaks nya pengelolaan arsip	Kota Mataram	1 Tahun	80.496.400	90.155.968
1.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana yang siap			1.085.000.000	1.215.200.000
1.01.01.01.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat	Tersedianya komputer dan alat	Kota Mataram	10 unit	150.000.000	168.000.000
1.01.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	se-NTB	1 tahun	100.000.000	112.000.000
1.01.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Terpeliharanya kendaraan	Kota Mataram	13 unit	660.000.000	739.200.000
1.01.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya kantor	Kota Mataram	1 Tahun	15.000.000	16.800.000
1.01.01.01.02.32	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan	Terpeliharanya taman dan	Kota Mataram	1 Tahun	10.000.000	11.200.000
1.01.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terpeliharanya rumah dinas	Kota Mataram	1 paket	150.000.000	168.000.000
1.01.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas			397.800.000	445.536.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya peningkatan	Kota Mataram	2 keg	334.800.000	374.976.000
1.01.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Meningkatnya kesehatan	Kota Mataram	1 Tahun	63.000.000	70.560.000
1.01.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Terlaksananya Sistem			246.991.000	276.629.920
1.01.01.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja	Kota Mataram	7 dokumen	246.991.000	276.629.920
1.01.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan	Terlaksananya Pengelolaan			115.147.150	128.964.808
1.01.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Terkelolanya aset sesuai	Kota Mataram	1 Tahun	115.147.150	128.964.808
1.01.01.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka melanjutkan dari SD/MI	Provinsi NTB	APK SD/MI=106%;	12.472.637.750	13.969.354.280
1.01.01.01.22.04	Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan	Terlaksananya sosialisasi	se-NTB	1 dokumen	390.250.000	437.080.000
1.01.01.01.22.10	Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	Terlaksananya seleksi guru,	Kota Mataram	200 peserta	775.750.000	868.840.000
1.01.01.01.22.11	Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya seleksi siswa	Kota Mataram	210 siswa	1.560.402.000	1.747.650.240
1.01.01.01.22.12	Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi	Terlaksananya Kegiatan	Kota Mataram	200 peserta	256.570.000	287.358.400
1.01.01.01.22.13	Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah, dan Ujian Semester	Terlaksananya evaluasi akhir	se-NTB	1 keg	1.823.272.100	2.042.064.752
1.01.01.01.22.14	Penyediaan Beasiswa S1, S2, dan S3	Tersalurnya dana beasiswa	se-NTB	22 orang	600.000.000	672.000.000
1.01.01.01.22.15	Pengembangan Mutu Pendidikan	Meningkatnya mutu	se-NTB	1 Tahun	6.593.800.000	7.385.056.000
1.01.01.01.22.16	Peningkatan Layanan Operasional Manajemen BOS	Meningkatnya mutu layanan	se-NTB	1 Tahun	222.593.650	249.304.888
1.01.01.01.22.17	Pengembangan Sistem Pelaporan Hasil Belajar Siswa	Tersedianya aplikasi e-raport	Kota Mataram	1 thn	250.000.000	280.000.000
1.01.01.01.23	Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Persen Angka Partisipasi Kasar	Provinsi NTB	APK= 40%; APM=	83.294.920.000	93.290.310.400
1.01.01.01.23.01	Pembangunan Gedung Sekolah	Terbangunnya Gedung Baru	se-NTB	2 paket	15.988.000.000	17.906.560.000
1.01.01.01.23.03	Penambahan ruang kelas sekolah	Terbangunnya Ruang Kelas Sekolah	se-NTB	58 ruang/paket	13.781.205.000	15.434.949.600
1.01.01.01.23.04	Penambahan Ruang Guru Sekolah	Terbangunnya Ruang Guru Sekolah	se-NTB	1 paket	319.000.000	357.280.000
1.01.01.01.23.05	Pembangunan laboratorium dan ruang pratikum sekolah	Terbangunnya Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah	se-NTB	27 ruang/paket	370.000.000	414.400.000
1.01.01.01.23.12	Pembangunan perpustakaan sekolah	Terbangunnya Ruang Perpustakaan Sekolah	se-NTB	4 paket	700.000.000	784.000.000
1.01.01.01.23.14	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	Tersedianya Sarana Air Bersih dan Sanitary	se-NTB	20 paket	2.000.000.000	2.240.000.000
1.01.01.01.23.18	Pengadaan alat praktek dan peraga siswa	Tersedianya Alat Praktek dan Peraga Siswa	se-NTB	4 paket	46.458.560.000	52.033.587.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.01.23.19	Pengadaan mebeleur sekolah	Tersedianya Meubelair Sekolah	se-NTB	2 paket	500.000.000	560.000.000
1.01.01.01.23.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi Ruang Kelas	se-NTB	8 paket	1.000.000.000	1.120.000.000
1.01.01.01.23.57	Worshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum	Terlaksananya Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum	se-NTB	200 org	503.980.000	564.457.600
1.01.01.01.23.69	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan sekolah menengah atas	se-NTB	1 thn	51.034.500	57.158.640
1.01.01.01.23.70	Peningkatan minat, bakat, dan kreativitas siswa	Terlaksananya Pengembangan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa	se-NTB	270 org	1.171.535.000	1.312.119.200
1.01.01.01.23.75	Sinkronisasi Data Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)	Tersinkronisasinya data pendidikan SMA	Kota Mataram	130 orang	251.605.500	281.798.160
1.01.01.01.23.77	Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Atas (SMA)	Terbinanya sekolah yang sehat	se-NTB	1 keg	200.000.000	224.000.000
1.01.01.01.24	Program Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK), Persentase Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persentase Penurunan Angka Drop Out (DO), Angka Kelulusan, Nilai Ujian Nasional, Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	Provinsi NTB	APK=27%; APM=25%; APS=28%; DO=1,20%; Angka Kelulusan=100%; Rasio Ketersediaan Sekolah=1:906	107.113.015.600	119.966.577.472
1.01.01.01.24.03	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Terbangunnya ruang kelas baru SMK	se-NTB	61 ruang/paket	17.205.424.400	19.270.075.328

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.01.24.04	Penambahan ruang guru, ruang kepala sekolah	Terbangunnya ruang guru, ruang kepala sekolah	se-NTB	10 paket	2.500.000.000	2.800.000.000
1.01.01.01.24.05	Pembangunan Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah (Laboratorium Bahasa, Komputer, IPA, IPS dan Lain-lain)	Terbangunnya laboratorium dan ruang praktikum sekolah	se-NTB	133 ruang	44.189.151.200	49.491.849.344
1.01.01.01.24.09	Pembangunan Taman, Lapangan Upacara, Pagar/Tembok, dan Fasilitas Parkir	Terbangunnya taman, lapangan upacara, pagar/tembok dan fasilitas parkir untuk SMK	se-NTB	10 paket	2.000.000.000	2.240.000.000
1.01.01.01.24.11	Pembangunan ruang ibadah	Terbangunnya musalla sekolah	se-NTB	6 paket	1.500.000.000	1.680.000.000
1.01.01.01.24.14	Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary	Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary	se-NTB	7 paket	2.000.000.000	2.240.000.000
1.01.01.01.24.18	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya alat Praktik dan Peraga siswa	se-NTB	10 paket	30.672.760.000	34.353.491.200
1.01.01.01.24.19	Pengadaan Meubelair Sekolah	Tersedianya Meubelair Sekolah	se-NTB	1 paket	1.000.000.000	1.120.000.000
1.01.01.01.24.20	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Tersedianya perlengkapan sekolah	se-NTB	1 paket	100.000.000	112.000.000
1.01.01.01.24.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas sekolah	se-NTB	5 paket	1.200.000.000	1.344.000.000
1.01.01.01.24.57	Workshop Penyusunan/Pengembangan Kurikulum	Terlaksananya Workshop penyusunan pengembangan kurikulum	se-NTB	200 orang	519.580.000	581.929.600
1.01.01.01.24.66	Peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri	Meningkatnya kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri	se-NTB	1 keg	1.166.300.000	1.306.256.000
1.01.01.01.24.70	Peningkatan minat; bakat; dan kreativitas siswa	Meningkatnya minat bakat dan kreatifitas siswa SMK	se-NTB	310 siswa	1.400.000.000	1.568.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.01.24.75	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	Terlaksananya manajemen sekolah yang akuntable	se-NTB	80 orang	120.000.000	134.400.000
1.01.01.01.24.76	Sinkronisasi Data Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Tersinkronisasinya data pendidikan SMK	se-NTB	130 orang	300.000.000	336.000.000
1.01.01.01.24.77	Manajemen Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK	Terlaksananya manajemen pengelolaan dana DAK SMA	Kota Mataram	1 thn	1.039.800.000	1.164.576.000
1.01.01.01.24.78	Pembinaan Sekolah Sehat Tingkat Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)	Terbinanya sekolah yang sehat	se-NTB	1 keg	200.000.000	224.000.000
1.01.01.01.25	Program Pembinaan Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK), Persen Penurunan Angka Drop Out (DO), Angka Kelulusan, Ratio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Menengah dan SLB	Provinsi NTB	APK=68,02%; DO=0%; Angka Kelulusan=100%; Rasio Ketersediaan Sekolah=1:281	8.521.173.025	9.543.713.788
1.01.01.01.25.01	Pembangunan Gedung Sekolah	Terpenuhinya gedung Sekolah Luar Biasa (SLB)	Kab. Lombok Timur, se-NTB	4 paket	3.020.740.000	3.383.228.800
1.01.01.01.25.03	Penambahan ruang kelas sekolah	Terpenuhinya ruang kelas Sekolah Luar Biasa (SLB)	se-NTB	5 paket	2.540.000.000	2.844.800.000
1.01.01.01.25.09	Pembangunan taman, lapangan upacara, pagar/tembok, dan fasilitas parkir	Tertatanya halaman, taman, pagar dan tempat parkir Sekolah Luar Biasa (SLB)	se-NTB	4 paket	800.000.000	896.000.000
1.01.01.01.25.19	Pengadaan mebeleur sekolah	Terpenuhinya meubelair Sekolah Luar Biasa (SLB)	se-NTB	1 paket	200.000.000	224.000.000
1.01.01.01.25.20	Pengadaan perlengkapan sekolah	Terpenuhi perlengkapan Sekolah Luar Biasa (SLB)	se-NTB	1 paket	20.000.000	22.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.01.25.44	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Terlaksananya Rehab Ruang Kelas Sekolah Luar Biasa (SLB)	se-NTB	2 paket	200.000.000	224.000.000
1.01.01.01.25.57	Workshop Penyusunan/Pengembangan kurikulum	Terlaksananya Pengembangan Kurikulum Sekolah Luar Biasa (SLB)	Kota Mataram	30 orang	132.500.000	148.400.000
1.01.01.01.25.59	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa	se-NTB	1 Tahun	50.149.850	56.167.832
1.01.01.01.25.60	Peningkatan Minat, Bakat, Kreativitas Siswa PK-PLK	Terlaksananya pengembangan minat/bakat siswa SLB dan Inklusi	Kota Mataram	200 orang	1.213.870.000	1.359.534.400
1.01.01.01.25.61	Penyusunan bahan pembelajaran siswa SLB	Tersusunnya bahan pembelajaran SLB	Kota Mataram	1 keg	99.113.175	111.006.756
1.01.01.01.25.62	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik SLB	Terlaksananya kekompetensi PTK giatan peningkatan Sekolah Luar Biasa	Kota Mataram	1 keg	62.100.000	69.552.000
1.01.01.01.25.75	Sinkronisasi Data Pendidikan Khusus Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK)	Tersinkronisasikannya data Pendidikan Khusus dan pendidikan Layanan Khusus	se-NTB	1 Tahun	182.700.000	204.624.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.01.26	Program Pembinaan Ketenagaan	Ratio Guru terhadap Murid Pendidikan Menengah, Rasio Guru terhadap Murid per kelas rata-rata untuk SLB, Guru yang memenuhi Kualifikasi S1/DIV, Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)	Provinsi NTB	RSM=1:12; RSLB=1:1; Kual=100%; NUKG=7	1.186.185.700	1.328.527.984
1.01.01.01.26.09	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Terlaksananya kegiatan workshop pemetaan Kompetensi Keahlian dan Pemetaan ratio Guru	Kota Mataram	24 orang	94.451.800	105.786.016
1.01.01.01.26.10	Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik	Terlaksananya sistem penghargaan dan perlindungan PTK	se-NTB	1 Tahun	99.857.900	111.840.848
1.01.01.01.26.12	Pemilihan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jenjang SMA, SMK, dan PKLK Tk. Provinsi	Terpilihnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi	Kota Mataram	200 peserta	130.643.050	146.320.216
1.01.01.01.26.13	Standarisasi mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kebudayaan	Terlaksananya standar mutu penegelolaan sekolah	Kota Mataram	140 orang	155.232.950	173.860.904
1.01.01.01.26.15	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah	Terpilihnya calon kepala sekolah dan calon pengawas	se-NTB	650 orang	5.000.000	5.600.000
1.01.01.01.26.16	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terbitnya Dokumen Angka Kredit Guru dan Pengawas	Kota Mataram	1 Tahun	83.500.000	93.520.000
1.01.01.01.26.17	Bimtek Calon Kepala Sekolah SMA, SMK, dan PK-PLK	Terlaksananya Bimbingan Teknis Calon Kepala Sekolah dan Pengawas	Kota Mataram	300 orang	2.500.000	2.800.000
1.01.01.01.26.21	Seleksi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tata Usaha Tidak Tetap	Terselesainya Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tata Usaha Tidak Tetap	Kota Mataram	1 keg	213.000.000	238.560.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.01.26.22	Peningkatan Sistem Kendali Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Sistem Kendali Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kota Mataram	1 keg	135.000.000	151.200.000
1.01.01.01.26.23	Olimpiade Sains Guru	Teselenggaranya Olimpiade Sains Guru	Kota Mataram	1 keg	267.000.000	299.040.000
1.01.01.01.27	Program Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan Pendidikan Nasional	Data Pokok Pendidikan dan kebudayaan	Provinsi NTB	100%	670.350.000	750.792.000
1.01.01.01.27.01	Pengumpulan dan pengolahan data pendidikan	Tersedianya data pendidikan	se-NTB	1 Tahun	270.000.000	302.400.000
1.01.01.01.27.02	Sinkronisasi Program Pendidikan	Tersinkronisasikannya program pesat, provinsi dan kabupaten/kota	Kota Mataram	1 keg	95.000.000	106.400.000
1.01.01.01.27.04	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terantau dan terevaluasinya pelaksanaan program	se-NTB	1 Tahun	305.350.000	341.992.000
1.01.01.01.30	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs, dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, Angka DO	Provinsi NTB	Angka Melanjutkan =100%; DO=0,7%	203.076.077.000	227.445.206.240
1.01.01.01.30.01	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Tersalurnya dana Bantuan Operasional sekolah (BOS)	se-NTB	1 Tahun	203.076.077.000	227.445.206.240
1.01.01.02	Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan				2.570.644.850	2.879.122.232
1.01.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Kantor			357.894.850	400.842.232
1.01.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kota Mataram	1 thn	70.000.000	78.400.000
1.01.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	1 thn	14.975.000	16.772.000
1.01.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Mataram	1 thn	6.419.850	7.190.232

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	1 thn	27.500.000	30.800.000
1.01.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kota Mataram	1 thn	4.000.000	4.480.000
1.01.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Mataram	1 thn	35.000.000	39.200.000
1.01.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terkoordinasi dan sinkronisainya program pusat dan daerah bidang informasi teknologi pendidikan	Luar Provinsi	1 thn	75.000.000	84.000.000
1.01.01.02.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa administrasi perkantoran	Kota Mataram	1 keg	75.000.000	84.000.000
1.01.01.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terkoordinasi dan sinkronisainya program provinsi dengan kabupatendan bidang informasi teknologi pendidikan	se-NTB	1 thn	50.000.000	56.000.000
1.01.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana yang siap pakai			25.000.000	28.000.000
1.01.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai	Kota Mataram	1 thn	25.000.000	28.000.000
1.01.01.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Terlaksananya Sistem pelaporan Kinerja dan Keuangan			14.250.000	15.960.000
1.01.01.02.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya dokumen program perencanaan pendidikan	Kota Mataram	5 dokumen	14.250.000	15.960.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			17.500.000	19.600.000
1.01.01.02.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersedianya manajemen asset/barang milik daerah	se-NTB	1 thn	17.500.000	19.600.000
1.01.01.02.28	Program Peningkatan Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	Persentase pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pembelajaran	Provinsi NTB	86,6%	2.156.000.000	2.414.720.000
1.01.01.02.28.01	Penyediaan sarana dan prasarana teknologi komunikasi pendidikan	Jumlah sarana pembelajaran berbasis teknologi informasi komunikasi yang diadakan	Provinsi NTB	16 unit	150.000.000	168.000.000
1.01.01.02.28.03	Peningkatan SDM pengelolaan balai teknologi komunikasi pendidikan	Jumlah SDM pengelola balai TIK yang ditingkatkan	Provinsi NTB	1460 orang	1.750.000.000	1.960.000.000
1.01.01.02.28.04	Penyelenggaraan pemantauan dan pembinaan kegiatan balai teknologi komunikasi pendidikan	Telaksananya pemantauan dan pembinaan kegiatan balai teknologi komunikasi pendidikan	Provinsi NTB	4 Dokumen	156.000.000	174.720.000
1.01.01.02.28.06	Penyediaan sarana media program pembelajaran interaktif teknologi komunikasi pendidikan	Jumlah media pembelajaran (master) berbasis TIK yang digandakan	Provinsi NTB	600 keping	100.000.000	112.000.000
1.01.01.05	Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Barat dan Mataram				1.587.472.975	1.777.969.732
1.01.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Kantor			249.002.975	278.883.332

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kota Mataram	1 Tahun	2.130.000	2.385.600
1.01.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa listrik, air, internet, faks dan telepon	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat	1 Tahun	47.500.000	53.200.000
1.01.01.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	1 Tahun	5.636.375	6.312.740
1.01.01.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	24.625.600	27.580.672
1.01.01.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	8.311.000	9.308.320
1.01.01.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Pengandaan	Kota Mataram	1 Tahun	10.000.000	11.200.000
1.01.01.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	Kota Mataram	1 Tahun	3.400.000	3.808.000
1.01.01.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kota Mataram	1 Tahun	1.500.000	1.680.000
1.01.01.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Mataram	1 Tahun	49.000.000	54.880.000
1.01.01.05.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelarasan program	Kota Mataram	1 Tahun	75.000.000	84.000.000
1.01.01.05.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	21.900.000	24.528.000
1.01.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana yang siap pakai			162.000.000	181.440.000
1.01.01.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	129.500.000	145.040.000
1.01.01.05.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terseainya komputer dan alat elektronik	Kota Mataram	1 thn	7.500.000	8.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terawatnya kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	1 Tahun	25.000.000	28.000.000
1.01.01.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Terlaksananya Sistem pelaporan Kinerja dan Keuangan			13.500.000	15.120.000
1.01.01.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja OPD	Kota Mataram	5 dokumen	13.500.000	15.120.000
1.01.01.05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			12.600.000	14.112.000
1.01.01.05.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersedia administrasi dan sistem penyimpanan aset	Kota Mataram	1 Tahun	12.600.000	14.112.000
1.01.01.05.29	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK), Persen Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persen Penurunan Angka Drop Out (DO), Angka Kelulusan, Nilai Ujian Nasional, Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah pendidikan menengah			1.150.370.000	1.288.414.400
1.01.01.05.29.01	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Terseleksinya Guru, kepala sekolah, pengawas jenjang SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kota Mataram dan Lombok Barat	Kota Mataram	1 keg	101.300.000	113.456.000
1.01.01.05.29.02	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	Terseleksinya siswa SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kota Mataram dan Lombok Barat	Kota Mataram	1 keg	170.070.000	190.478.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.05.29.06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Tersedianya Nilai Angka Kredit Guru dan pengawas Kota Mataram dan Lombok Barat	Kota Mataram	2 keg	47.100.000	52.752.000
1.01.01.05.29.08	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	Terbinya karakter siswa SMA/SMK/SLB	Kota Mataram	1 keg	189.400.000	212.128.000
1.01.01.05.29.10	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Terlaksananya Pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah	Kota Mataram	1 Tahun	431.500.000	483.280.000
1.01.01.05.29.11	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi program	Kota Mataram	1 Tahun	25.000.000	28.000.000
1.01.01.05.29.12	Olimpiade Sains Guru	Teselenggaranya Olimpiade Sains Guru	Kab. Lombok Timur	1 keg	186.000.000	208.320.000
1.01.01.06	Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Tengah				1.443.493.950	1.616.713.224
1.01.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Kantor			247.259.900	276.931.088
1.01.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	4.000.000	4.480.000
1.01.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	32.000.000	35.840.000
1.01.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	52.726.100	59.053.232
1.01.01.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	47.671.700	53.392.304
1.01.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	13.812.100	15.469.552
1.01.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	4.000.000	4.480.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi Ustrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	2.000.000	2.240.000
1.01.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	1.650.000	1.848.000
1.01.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	9.000.000	10.080.000
1.01.01.06.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelarasan program	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	31.000.000	34.720.000
1.01.01.06.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	49.400.000	55.328.000
1.01.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana yang siap pakai			228.100.000	255.472.000
1.01.01.06.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Kamar Mandi/Toilet Kantor	Kab. Lombok Tengah	1 paket	12.100.000	13.552.000
1.01.01.06.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	27.000.000	30.240.000
1.01.01.06.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebelair kantor	Kab. Lombok Tengah	50 unit	100.000.000	112.000.000
1.01.01.06.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya komputer dan alat elektronik	Kab. Lombok Tengah	4 unit	60.000.000	67.200.000
1.01.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	25.000.000	28.000.000
1.01.01.06.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	4.000.000	4.480.000
1.01.01.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Aparatur yang Sehat Jasmani dan Rohani			10.600.000	11.872.000
1.01.01.06.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terwujudnya mental fisik aparatur	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	10.600.000	11.872.000
1.01.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Terlaksananya Sistem pelaporan Kinerja dan Keuangan			15.422.000	17.272.640

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.06.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja	Kab. Lombok Tengah	5 dokumen	15.422.000	17.272.640
1.01.01.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			21.916.500	24.546.480
1.01.01.06.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	terwujudnya manajemen aset	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	21.916.500	24.546.480
1.01.01.06.29	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK), Persen Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persen Penurunan Angka Drop Out (DO), Angka Kelulusan, Nilai Ujian Nasional, Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah pendidikan menengah			920.195.550	1.030.619.016
1.01.01.06.29.01	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan tingkat kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Tengah	1 keg	128.406.000	143.814.720
1.01.01.06.29.02	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	Terseleksinya siswa SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kab. Lombok Tengah	Kab. Lombok Tengah	400 orang	209.947.300	235.140.976
1.01.01.06.29.06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Ditetapkannya Angka Kredit Guru dan Pengawas	Kab. Lombok Tengah	2 keg	43.482.850	48.700.792
1.01.01.06.29.08	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	Terbinanya karakter siswa	Kab. Lombok Tengah	1 keg	137.859.400	154.402.528

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.06.29.10	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Terlaksananya Pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	375.500.000	420.560.000
1.01.01.06.29.11	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	25.000.000	28.000.000
1.01.01.07	Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Timur				1.215.319.400	1.361.157.728
1.01.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Kantor			322.427.000	361.118.240
1.01.01.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	50.000.000	56.000.000
1.01.01.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	58.920.000	65.990.400
1.01.01.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	46.917.000	52.547.040
1.01.01.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	24.200.000	27.104.000
1.01.01.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	21.000.000	23.520.000
1.01.01.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	4.590.000	5.140.800
1.01.01.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	2.500.000	2.800.000
1.01.01.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	13.500.000	15.120.000
1.01.01.07.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselarasnya program	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	55.000.000	61.600.000
1.01.01.07.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	45.800.000	51.296.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana yang siap pakai			160.900.000	180.208.000
1.01.01.07.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	65.000.000	72.800.000
1.01.01.07.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya komputer dan alat elektronik	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur	4 unit	35.500.000	39.760.000
1.01.01.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	32.400.000	36.288.000
1.01.01.07.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan kantor	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	28.000.000	31.360.000
1.01.01.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Aparatur yang Sehat Jasmani dan Rohani			12.100.000	13.552.000
1.01.01.07.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	meningkatnya mental fisik aparatur	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	12.100.000	13.552.000
1.01.01.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Terlaksananya Sistem pelaporan Kinerja dan Keuangan			12.350.000	13.832.000
1.01.01.07.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja	Kab. Lombok Timur	5 dokumen	12.350.000	13.832.000
1.01.01.07.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			14.984.000	16.782.080
1.01.01.07.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Meningkatnya manajemen aset	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	14.984.000	16.782.080

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.07.29	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK), Persen Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persen Penurunan Angka Drop Out (DO), Angka Kelulusan, Nilai Ujian Nasional, Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah pendidikan menengah			692.558.400	775.665.408
1.01.01.07.29.01	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan berprestasi SMA/SMK/SLB tingkat kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Timur	1 keg	137.827.500	154.366.800
1.01.01.07.29.02	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	Terseleksinya siswa SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kab. Lombok Timur	Kab. Lombok Timur	150 orang	210.017.500	235.219.600
1.01.01.07.29.06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Tersedianya nilai Angka Kredit Guru dan Pengawas	Kab. Lombok Timur	2 keg	106.806.700	119.623.504
1.01.01.07.29.08	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	Terbinanyater siswa /SMK/SLB	Kab. Lombok Timur	1 keg	140.740.600	157.629.472
1.01.01.07.29.10	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	63.221.100	70.807.632
1.01.01.07.29.11	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	24.817.500	27.795.600
1.01.01.07.29.12	Olimpiade Sains Guru	Teselenggaranya Olimpiade Sains Guru	Kab. Lombok Timur	1 keg	9.127.500	10.222.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.08	Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Lombok Utara				751.046.100	841.171.632
1.01.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Kantor			304.519.200	341.061.504
1.01.01.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya administrasi surat menyurat	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	3.000.000	3.360.000
1.01.01.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	58.500.000	65.520.000
1.01.01.08.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya administrasi keuangan	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	36.989.200	41.427.904
1.01.01.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terwujudnya lingkungan kerja yang nyaman	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	48.080.000	53.849.600
1.01.01.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	16.500.000	18.480.000
1.01.01.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	13.000.000	14.560.000
1.01.01.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi Ustrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	4.000.000	4.480.000
1.01.01.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	1.650.000	1.848.000
1.01.01.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	24.000.000	26.880.000
1.01.01.08.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelarasan program	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	55.000.000	61.600.000
1.01.01.08.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terciptanya keamanan kantor	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	43.800.000	49.056.000
1.01.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana yang siap pakai			200.500.000	224.560.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.08.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	25.000.000	28.000.000
1.01.01.08.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meubelair kantor	Kab. Lombok Utara	40 unit	78.000.000	87.360.000
1.01.01.08.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya komputer dan alat elektronik	Kab. Lombok Utara	3 unit	55.000.000	61.600.000
1.01.01.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	42.500.000	47.600.000
1.01.01.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Aparatur yang Sehat Jasmani dan Rohani			12.000.000	13.440.000
1.01.01.08.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	terlaksananya pembinaan mental fisik aparatur	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	12.000.000	13.440.000
1.01.01.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Terlaksananya Sistem pelaporan Kinerja dan Keuangan			14.625.000	16.380.000
1.01.01.08.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja opd	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	14.625.000	16.380.000
1.01.01.08.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			20.780.000	23.273.600
1.01.01.08.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersedianya administrasi aset	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	20.780.000	23.273.600
1.01.01.08.29	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK), Persen Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persen Penurunan Angka Drop Out (DO), Angka Kelulusan, Nilai Ujian Nasional, Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah pendidikan menengah			198.621.900	222.456.528

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.08.29.01	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Terseleksinya guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat kab. Lombok Utara	Kab. Lombok Utara	1 keg	7.223.100	8.089.872
1.01.01.08.29.02	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	Terseleksinya siswa SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kab. Lombok Utara	Kab. Lombok Utara	1 keg	70.626.200	79.101.344
1.01.01.08.29.06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Tersedianya nilai Angka Kridit Guru dan Pengawas	Kab. Lombok Utara	2 keg	31.972.600	35.809.312
1.01.01.08.29.08	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	Terlaksananya pembinaan karakter siswa	Kab. Lombok Utara	1 keg	42.220.000	47.286.400
1.01.01.08.29.10	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	46.580.000	52.169.600
1.01.01.09	Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Sumbawa Barat				968.300.000	1.084.496.000
1.01.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Kantor			163.100.000	182.672.000
1.01.01.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	4.600.000	5.152.000
1.01.01.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa admnistrasi keuangan	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	27.000.000	30.240.000
1.01.01.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	53.000.000	59.360.000
1.01.01.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	20.000.000	22.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pencetakan dan penggandaan administrasi kantor	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	5.500.000	6.160.000
1.01.01.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	5.500.000	6.160.000
1.01.01.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	3.500.000	3.920.000
1.01.01.09.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minuman	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	24.000.000	26.880.000
1.01.01.09.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terlaksananya keamanan kantor	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	20.000.000	22.400.000
1.01.01.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana yang siap pakai			55.000.000	61.600.000
1.01.01.09.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	15.000.000	16.800.000
1.01.01.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	40.000.000	44.800.000
1.01.01.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Aparatur yang Sehat Jasmani dan Rohani			9.200.000	10.304.000
1.01.01.09.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	terlaksananya pembinaan mental fisik aparatur	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	9.200.000	10.304.000
1.01.01.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Terlaksananya Sistem pelaporan Kinerja dan Keuangan			23.000.000	25.760.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.09.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan	Kab. Sumbawa Barat	5 dokumen	23.000.000	25.760.000
1.01.01.09.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			24.000.000	26.880.000
1.01.01.09.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	terlaksananya administrasi aset	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	24.000.000	26.880.000
1.01.01.09.29	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK), Persen Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persen Penurunan Angka Drop Out (DO), Angka Kelulusan, Nilai Ujian Nasional, Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah pendidikan menengah			694.000.000	777.280.000
1.01.01.09.29.01	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB berprestasi tingkat Kab. Sumbawa Barat	Kab. Sumbawa Barat	1 keg	190.000.000	212.800.000
1.01.01.09.29.02	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	Terlaksananya seleksi siswa berprestasi tingkat Kab. sumbawa barat	Kab. Sumbawa Barat	1 keg	95.000.000	106.400.000
1.01.01.09.29.06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya penilaian Angka Kridit Guru dan Pengawas	Kab. Sumbawa Barat	2 keg	33.000.000	36.960.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.09.29.08	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	Terlaksananya pembinaan karakter siswa	Kab. Sumbawa Barat	1 keg	155.000.000	173.600.000
1.01.01.09.29.10	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	171.000.000	191.520.000
1.01.01.09.29.11	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	50.000.000	56.000.000
1.01.01.10	Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Sumbawa				784.850.000	879.032.000
1.01.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Kantor			273.850.000	306.712.000
1.01.01.10.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya administrasi surat menyurat	Kab. Sumbawa	1 Tahun	4.000.000	4.480.000
1.01.01.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Sumbawa	1 Tahun	61.000.000	68.320.000
1.01.01.10.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	39.000.000	43.680.000
1.01.01.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	28.000.000	31.360.000
1.01.01.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	Kab. Sumbawa	1 Tahun	8.500.000	9.520.000
1.01.01.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	1.200.000	1.344.000
1.01.01.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	Kab. Sumbawa	1 Tahun	4.000.000	4.480.000
1.01.01.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	1.650.000	1.848.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan/minum	Kab. Sumbawa	1 Tahun	16.500.000	18.480.000
1.01.01.10.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelarasan program	Kab. Sumbawa	1 Tahun	55.000.000	61.600.000
1.01.01.10.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terlaksananya keamanan kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	55.000.000	61.600.000
1.01.01.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana yang siap pakai			22.000.000	24.640.000
1.01.01.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kab. Sumbawa	1 Tahun	22.000.000	24.640.000
1.01.01.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Aparatur yang Sehat Jasmani dan Rohani			11.000.000	12.320.000
1.01.01.10.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	terlaksananya pembinaan mental dan fisik aparatur	Kab. Sumbawa	1 Tahun	11.000.000	12.320.000
1.01.01.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Terlaksananya Sistem pelaporan Kinerja dan Keuangan			21.000.000	23.520.000
1.01.01.10.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja opd	Kab. Sumbawa	1 Tahun	21.000.000	23.520.000
1.01.01.10.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			25.000.000	28.000.000
1.01.01.10.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Terlaksananya manajemen aset	Kab. Sumbawa	1 Tahun	25.000.000	28.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.10.29	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK), Persen Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persen Penurunan Angka Drop Out (DO), Angka Kelulusan, Nilai Ujian Nasional, Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah pendidikan menengah			432.000.000	483.840.000
1.01.01.10.29.01	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah, pengawas, tenaga kependidikan berprestasi tingkat Kab. Sumbawa	Kab. Sumbawa	1 keg	59.000.000	66.080.000
1.01.01.10.29.02	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	Terlaksananya seleksi Siswa berprestasi tingkat Kab. Sumbawa	Kab. Sumbawa	1 keg	130.000.000	145.600.000
1.01.01.10.29.06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas	Kab. Sumbawa	2 keg	83.000.000	92.960.000
1.01.01.10.29.08	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	Terlaksananya pembinaan karakter siswa	Kab. Sumbawa	1 keg	95.000.000	106.400.000
1.01.01.10.29.10	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah	Kab. Sumbawa	1 Tahun	15.000.000	16.800.000
1.01.01.10.29.11	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program	Kab. Sumbawa	1 Tahun	50.000.000	56.000.000
1.01.01.11	Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Dompu				1.323.700.000	1.482.544.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Kantor			334.500.000	374.640.000
1.01.01.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa administrasi kantor	Kab. Dompu	1 Tahun	4.000.000	4.480.000
1.01.01.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Dompu	1 Tahun	52.000.000	58.240.000
1.01.01.11.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya sistem administrasi keuangan	Kab. Dompu	1 Tahun	40.000.000	44.800.000
1.01.01.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Kab. Dompu	1 Tahun	30.000.000	33.600.000
1.01.01.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK Kantor	Kab. Dompu	1 Tahun	30.000.000	33.600.000
1.01.01.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya bahan cetak dan penggandaan	Kab. Dompu	1 Tahun	11.000.000	12.320.000
1.01.01.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	Kab. Dompu	1 Tahun	4.000.000	4.480.000
1.01.01.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kab. Dompu	1 Tahun	3.500.000	3.920.000
1.01.01.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan minum	Kab. Dompu	1 Tahun	17.000.000	19.040.000
1.01.01.11.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelarasan program	Kab. Dompu	1 Tahun	88.000.000	98.560.000
1.01.01.11.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terlaksananya keamanan kantor	Kab. Dompu	1 Tahun	55.000.000	61.600.000
1.01.01.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana yang siap pakai			282.200.000	316.064.000
1.01.01.11.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meubelair kantor	Kab. Dompu	50 unit	236.200.000	264.544.000
1.01.01.11.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terpenuhinya koputer dan alat elektronik	Kab. Dompu	3 unit	10.000.000	11.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terlaksananya perawatan kendaraan dinas/operasional	Kab. Dompu	1 Tahun	36.000.000	40.320.000
1.01.01.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Terlaksananya Sistem pelaporan Kinerja dan Keuangan			19.000.000	21.280.000
1.01.01.11.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja opd	Kab. Dompu	5 dokumen	19.000.000	21.280.000
1.01.01.11.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			31.000.000	34.720.000
1.01.01.11.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersusunnya administrasi aset	Kab. Dompu	1 Tahun	31.000.000	34.720.000
1.01.01.11.29	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK), Persen Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persen Penurunan Angka Drop Out (DO), Angka Kelulusan, Nilai Ujian Nasional, Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah pendidikan menengah			657.000.000	735.840.000
1.01.01.11.29.01	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat kab. Dompu	Kab. Dompu	1 keg	110.000.000	123.200.000
1.01.01.11.29.02	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	Terlaksananya seleksi siswa berprestasi tingkat Kab. Dompu	Kab. Dompu	1 keg	220.000.000	246.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.11.29.06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru	Kab. Dompu	2 keg	75.000.000	84.000.000
1.01.01.11.29.08	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	Terlaksananya pembinaan karakter siswa	Kab. Dompu	1 keg	92.000.000	103.040.000
1.01.01.11.29.10	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan tingkat sekolah	Kab. Dompu	1 Tahun	110.000.000	123.200.000
1.01.01.11.29.11	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi program	Kab. Dompu	1 Tahun	50.000.000	56.000.000
1.01.01.12	Layanan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus Bima				857.862.500	960.806.000
1.01.01.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Kantor			285.202.500	319.426.800
1.01.01.12.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa urut menyurat	Kab. Bima, Kota Bima	1 Tahun	4.000.000	4.480.000
1.01.01.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Bima	1 Tahun	47.000.000	52.640.000
1.01.01.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya sistem administrasi keuangan	Kab. Bima	1 Tahun	40.050.000	44.856.000
1.01.01.12.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Kab. Bima	1 Tahun	43.800.000	49.056.000
1.01.01.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK kantor	Kab. Bima	1 Tahun	6.572.500	7.361.200
1.01.01.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya pencetakan dan penggandaan administrasi kantor	Kab. Bima	1 Tahun	2.200.000	2.464.000
1.01.01.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	Kab. Bima	1 Tahun	1.200.000	1.344.000
1.01.01.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kab. Bima	1 Tahun	3.000.000	3.360.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan dan minuman	Kab. Bima	1 Tahun	16.500.000	18.480.000
1.01.01.12.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelarasan program	Kab. Bima	1 Tahun	65.880.000	73.785.600
1.01.01.12.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terlaksananya keamanan kantor	Kab. Bima	1 Tahun	55.000.000	61.600.000
1.01.01.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana yang siap pakai			104.890.000	117.476.800
1.01.01.12.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan kantor	Kab. Bima	1 paket	50.000.000	56.000.000
1.01.01.12.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya komputer dan alat elektronik	Kab. Bima	3 unit	40.000.000	44.800.000
1.01.01.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan/perawatan kendaraan dinas/operasional	Kab. Bima	1 Tahun	14.890.000	16.676.800
1.01.01.12.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terciptanya Disiplin Aparatur			7.000.000	7.840.000
1.01.01.12.03.01	Pengadaan mesin/kartu absensi	tersedianya alat absen elektronik	Kab. Bima	1 unit	7.000.000	7.840.000
1.01.01.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Aparatur yang Sehat Jasmani dan Rohani			12.000.000	13.440.000
1.01.01.12.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya pembinaan mental fisik aparatur	Kab. Bima	1 Tahun	12.000.000	13.440.000
1.01.01.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Terlaksananya Sistem pelaporan Kinerja dan Keuangan			10.000.000	11.200.000
1.01.01.12.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja opd	Kab. Bima	1 Tahun	10.000.000	11.200.000
1.01.01.12.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			17.000.000	19.040.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.01.01.12.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersedianya sistem administrasi aset	Kab. Bima	1 Tahun	17.000.000	19.040.000
1.01.01.12.29	Program Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan	Persen Angka Partisipasi Kasar (APK), Persen Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Persen Penurunan Angka Drop Out (DO), Angka Kelulusan, Nilai Ujian Nasional, Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah pendidikan menengah			421.770.000	472.382.400
1.01.01.12.29.01	Seleksi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan Jenjang SMA, SMK, PKPLK Berprestasi Tk. Kab/kota	Terlaksananya seleksi guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat Kab. Bima/Kota Bima	Kab. Bima	1 keg	95.770.000	107.262.400
1.01.01.12.29.02	Seleksi Bakat, Minat dan Kreatifitas Siswa SMA, SMK, PKPLK Tk. Kab/kota	Terlaksananya seleksi siswa berprestasi tingkat Kab. Bima/Kota Bima	Kab. Bima	1 keg	96.000.000	107.520.000
1.01.01.12.29.06	Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional	Terlaksananya penilaian Angka Kredit Guru dan pengawas	Kab. Bima	2 keg	85.000.000	95.200.000
1.01.01.12.29.08	Pembinaan dan pengembangan Karakter Siswa SMA, SMK, dan PK-PLK	Terlaksananya kegiatan pembinaan karakter siswa	Kab. Bima	1 keg	65.000.000	72.800.000
1.01.01.12.29.10	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan penerima bantuan	Terlaksananya pengawasan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah	Kab. Bima	1 Tahun	30.000.000	33.600.000
1.01.01.12.29.11	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	terlaksananya monitoring dan evaluasi program	Kab. Bima	1 Tahun	50.000.000	56.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1,02	KESEHATAN				179.435.025.422	200.967.228.473
1.02.01	Dinas Kesehatan				58.073.765.420	65.042.617.270
1.02.01.01	Dinas Kesehatan (Induk)				37.347.350.100	41.829.032.112
1.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.	Persentase kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran			1.370.817.590	1.535.315.701
1.02.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Frekuensi pengiriman surat	se-NTB	12 bulan	675	756
1.02.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	se-NTB	12 bulan	397.000.000	444.640.000
1.02.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga pengelola keuangan	se-NTB	8 orang	71.040.000	79.564.800
1.02.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Tersedianya tenaga jasa kebersihan kantor (cleaning service)	se-NTB	12 orang	252.310.190	282.587.413
1.02.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	se-NTB	55 jenis	34.477.700	38.615.024
1.02.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan	se-NTB	100 persen	30.868.700	34.572.944
1.02.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	se-NTB	100 persen	8.146.000	9.123.520
1.02.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	se-NTB	100 persen	181.500.000	203.280.000
1.02.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan minuman Rapat dan tamu Dinas Kesehatan	Kota Mataram	1 Tahun	40.000.000	44.800.000
1.02.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Meningkatnya keselarasan kegiatan Pemerintah Pusat dan Daerah	Luar Provinsi	1 Tahun	60.000.000	67.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya tenaga admintrasi dan teknis perkantoran	Kota Mataram	11 orang	264.800.000	296.576.000
1.02.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Program dan kegiatan Pemerintah Provisi dan Kabupaten/Kota	se-NTB	1 Tahun	30.000.000	33.600.000
1.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur			531.003.226	594.723.613
1.02.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	Kota Mataram	100 persen	249.453.226	279.387.613
1.02.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Persentase pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur	Kota Mataram	100 persen	281.550.000	315.336.000
1.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			124.000.000	138.880.000
1.02.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya anggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Kota Mataram	1 Tahun	117.000.000	131.040.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Tersedianya tenaga instruktur senam dan penceramah agama	Kota Mataram	1 Tahun	7.000.000	7.840.000
1.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase laporan keuangan yang tepat waktu			60.750.000	68.040.000
1.02.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	Kota Mataram	3 dokumen	51.000.000	57.120.000
1.02.01.01.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen Laporan Kinerja dan Keuangan	Kota Mataram	1 dokumen	9.750.000	10.920.000
1.02.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan laporan pengelolaan asset barang milik daerah			29.438.500	32.971.120
1.02.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Dokumen laporan BMD Dinas Kesehatan	Kota Mataram	1 dokumen	29.438.500	32.971.120
1.02.01.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	Provinsi NTB	95%	467.680.000	523.801.600
1.02.01.01.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah item obat buffer stock yang diadakan di provinsi	se-NTB	15 item	301.830.000	338.049.600
1.02.01.01.15.02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan	Frekuensi distribusi obat dan perbekalan kesehatan ke Kab/Kota	se-NTB	10 kali	125.850.000	140.952.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.01.01.15.05	Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan	Jumlah puskesmas dengan penggunaan obat rasional	se-NTB	83 Puskesmas	40.000.000	44.800.000
1.02.01.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Provinsi NTB	75%	744.474.000	833.810.880
1.02.01.01.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah puskesmas yang sesuai standar	se-NTB	42 puskesmas	124.974.000	139.970.880
1.02.01.01.16.18	Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Jumlah rumah sakit sesuai standar	se-NTB	6 rumah sakit	217.310.000	243.387.200
1.02.01.01.16.19	Peningkatan mutu, akreditasi dan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah Fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi (puskesmas & rumah sakit)	se-NTB	190 fasilitas	402.190.000	450.452.800
1.02.01.01.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Desa Siaga Aktif	Provinsi NTB	43%	1.155.720.000	1.294.406.400
1.02.01.01.19.01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Jumlah kabupaten/kota yang melakukan promosi kesehatan melalui 3 jenis media	se-NTB	3 Kab/Kota	164.900.000	184.688.000
1.02.01.01.19.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah Kab/Kota yang di Monitoring	se-NTB	10 Kab/Kota	66.000.000	73.920.000
1.02.01.01.19.06	Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi muda	Jumlah posyandu aktif	Kota Mataram	55 persen	585.170.000	655.390.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.01.01.19.09	Peningkatan dan pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat	Persentase puskesmas yang melaksanakan program kesehatan kerja dan olah raga	se-NTB	140 puskesmas	149.550.000	167.496.000
1.02.01.01.19.11	Penguatan kapasitas desa siaga	Jumlah desa siaga model yang dibentuk	Provinsi NTB	5 desa siaga	190.100.000	212.912.000
1.02.01.01.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Provinsi NTB	100%	26.023.622.184	29.146.456.846
1.02.01.01.20.03	Penanggulangan masalah gizi masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk yang ditangani	se-NTB	100 persen	24.985.972.184	27.984.288.846
1.02.01.01.20.04	Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	Jumlah desa pelaksana GEN	se-NTB	100 desa	1.037.650.000	1.162.168.000
1.02.01.01.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase akses sanitasi dasar	Provinsi NTB	85%	4.220.400.000	4.726.848.000
1.02.01.01.21.05	Peningkatan Penggunaan Air Bersih	Jumlah Kab/Kota yang memiliki akses air bersih berkelanjutan >90%	Provinsi NTB	10 Kab/Kota	33.000.000	36.960.000
1.02.01.01.21.06	Peningkatan penggunaan jamban keluarga	Jumlah Kab/Kota yang memiliki cakupan jamban keluarga > 80%	Provinsi NTB	10 Kab/Kota	4.165.400.000	4.665.248.000
1.02.01.01.21.08	Sarana tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	Jumlah Kab/Kota yang memiliki cakupan TTU memenuhi syarat kesehatan > 80%	Provinsi NTB	10 Kab/Kota	22.000.000	24.640.000
1.02.01.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Provinsi NTB	100%	948.469.500	1.062.285.840

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.01.01.22.04	Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	Jumlah Kab/Kota dengan cakupan imunisasi dasar lengkap > 90%	se-NTB	10 Kab/Kota	506.314.500	567.072.240
1.02.01.01.22.06	Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik	Jumlah Kab/Kota yang melaporkan kasus penyakit endemik/epidemik rutin dan tepat waktu	se-NTB	10 Kab/Kota	328.905.000	368.373.600
1.02.01.01.22.09	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Penurunan Angka Kejadian Kasus Penyakit dan Wabah	se-NTB	50 %	38.750.000	43.400.000
1.02.01.01.22.12	Peningkatan dan penanggulangan KLB-Bencana	Persentase KLB/Bencana Yang Ditangani	se-NTB	100 Persen	74.500.000	83.440.000
1.02.01.01.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan	Provinsi NTB	95%	458.849.000	513.910.880
1.02.01.01.32.04	Pelayanan kesehatan ibu dan anak	Jumlah Kab/Kota dengan cakupan K4> 98%	se-NTB	10 Kab/Kota	68.720.000	76.966.400
1.02.01.01.32.05	Peningkatan Pelayanan Kesehatan anak usia sekolah dan remaja	Jumlah Puskesmas yang melakukan skrining kesehatan anak usia sekolah	se-NTB	126 Puskesmas	204.129.000	228.624.480
1.02.01.01.32.06	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Jumlah puskesmas yang melakukan pemeriksaan lansia minimal 1x setahun	se-NTB	109 puskesmas	186.000.000	208.320.000
1.02.01.01.33	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan penganggaran	Provinsi NTB	100%	539.808.100	604.585.072
1.02.01.01.33.01	Pengembangan sistem perencanaan penganggaran, dan Monev Program Kesehatan	Tersediaanya dokumen perencanaan dan penganggaran kesehatan	se-NTB	2 dokumen	242.506.800	271.607.616

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.01.01.33.03	Pengembangan sistem informasi kesehatan daerah	Tersedianya Dokumen Profil Kesehatan	se-NTB	1 dokumen	297.301.300	332.977.456
1.02.01.01.34	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	se-NTB	35%	672.318.000	752.996.160
1.02.01.01.34.01	Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang terpenuhi 9 jenis tenaga	se-NTB	10 Puskesmas	85.138.000	95.354.560
1.02.01.01.34.02	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan Yang ditingkatkan Kapasitasnya	se-NTB	300 tenaga kesehatan	587.180.000	657.641.600
1.02.01.02	Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi				10.231.671.500	11.459.472.080
1.02.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran			874.324.500	979.243.440
1.02.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat atau dokumen yang terkirim 1 tahun	Kota Mataram	1 Tahun	8.040.000	9.004.800
1.02.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya komunikasi,sumber daya air dan listrik	Kota Mataram	1 Tahun	206.900.000	231.728.000
1.02.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	1 tahun	58.080.000	65.049.600
1.02.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Optimalnya kebersihan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	227.000.000	254.240.000
1.02.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedia alat kantor	Kota Mataram	1 Tahun	45.000.000	50.400.000
1.02.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedia barang cetakan dan penggandaan dokumen kantor	Kota Mataram	1 Tahun	56.386.000	63.152.320

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedia komponen Listrik/penerangan	Kota Mataram	1 tahun	5.138.500	5.755.120
1.02.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Mataram	1 Tahun	60.880.000	68.185.600
1.02.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedia makanan dan minuman rapat	Kota Mataram	1 Tahun	19.000.000	21.280.000
1.02.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tersedia belanja konsultasi dan koordinasi	Kota Mataram	1 Tahun	52.000.000	58.240.000
1.02.01.02.01.23	Penyediaan jasa pengisian tabung gas	Tersedia gas di tabung elpiji dan pemadam kebakaran	Kota Mataram	1 Tahun	3.300.000	3.696.000
1.02.01.02.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedia keamanan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	132.600.000	148.512.000
1.02.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur			5.376.797.000	6.022.012.640
1.02.01.02.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedia pembangunan gedung kantor Lab TB Tahp II dan kalibrasi serta gudang kantor	Kota Mataram	3 Unit	1.668.552.000	1.868.778.240
1.02.01.02.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan penunjang gedung kantor	Kota Mataram	3 Paket	3.167.945.000	3.548.098.400
1.02.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Mataram	1 Tahun	70.000.000	78.400.000
1.02.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kota Mataram	1 tahun	66.300.000	74.256.000
1.02.01.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kota Mataram	1 Tahun	404.000.000	452.480.000
1.02.01.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			373.450.000	418.264.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.01.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	meningkatnya kompetensi petugas laboratorium	Kota Mataram	1 Tahun	262.200.000	293.664.000
1.02.01.02.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terbentuknya fisik dan mental aparatur yang prima	Kota Mataram	1 Tahun	111.250.000	124.600.000
1.02.01.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase laporan keuangan yang tepat waktu			15.000.000	16.800.000
1.02.01.02.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya dan tersedianya rencana kerja SKPD	Kota Mataram	1 Tahun	15.000.000	16.800.000
1.02.01.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan laporan pengelolaan aset barang milik daerah			18.000.000	20.160.000
1.02.01.02.07.01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Tertatanya aset/barang milik daerah yang akuntabel	Kota Mataram	1 Tahun	18.000.000	20.160.000
1.02.01.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	Provinsi NTB	95%	802.800.000	899.136.000
1.02.01.02.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya bahan/reagen untuk pasien/pelanggan	Kota Mataram	1 Tahun	802.800.000	899.136.000
1.02.01.02.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Provinsi NTB	75%	2.276.000.000	2.549.120.000
1.02.01.02.16.08	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	Tersedianya peralatan dan Perbekalan Kesehatan	Kota Mataram	1 Paket	2.276.000.000	2.549.120.000
1.02.01.02.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar			495.300.000	554.736.000
1.02.01.02.23.01	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Terpenuhinya standar pelayanan kesehatan	Kota Mataram	1 Tahun	449.300.000	503.216.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.01.02.23.02	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Terevaluasinya dan pengembangan standar pelayanan kesehatan	Kota Mataram	1 Tahun	46.000.000	51.520.000
1.02.01.03	Balai Pelatihan Kesehatan				2.054.210.420	2.300.715.670
1.02.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran			1.177.993.000	1.319.352.160
1.02.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat	Kota Mataram	1 Tahun	4.800.000	5.376.000
1.02.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Kota Mataram	1 Tahun	129.500.000	145.040.000
1.02.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Tenaga Pengelola Keuangan	Kota Mataram	1 Tahun	39.956.000	44.750.720
1.02.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Tersedianya alat kebersihan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	415.355.000	465.197.600
1.02.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor (ATK)	Kota Mataram	1 Tahun	57.598.000	64.509.760
1.02.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Mataram	1 Tahun	17.479.000	19.576.480
1.02.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	25.330.000	28.369.600
1.02.01.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	313.600.000	351.232.000
1.02.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Mataram	1 Tahun	3.000.000	3.360.000
1.02.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat	Kota Mataram	1 Tahun	11.680.000	13.081.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.01.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Kota Mataram	1 Tahun	76.795.000	86.010.400
1.02.01.03.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Terselenggaranya administrasi Perkantoran	Kota Mataram	1 Tahun	32.900.000	36.848.000
1.02.01.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya program pemerintah provinsi dengan kab/kota	Kota Mataram	1 Tahun	50.000.000	56.000.000
1.02.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur			539.478.420	604.215.830
1.02.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	Kota Mataram	1 tahun	449.000.000	502.880.000
1.02.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas	Kota Mataram	1 tahun	40.478.420	45.335.830
1.02.01.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terpeliharanya peralatan gedung kantor	Kota Mataram	1 Tahun	50.000.000	56.000.000
1.02.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase laporan keuangan yang tepat waktu			14.324.000	16.042.880
1.02.01.03.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan RKAP TA. 2019 dan RKA TA. 2020	Kota Mataram	1 Kegiatan	14.324.000	16.042.880
1.02.01.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan laporan pengelolaan asset barang milik daerah			7.855.000	8.797.600
1.02.01.03.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Terlaksananya Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Kota Mataram	1 Tahun	7.855.000	8.797.600
1.02.01.03.34	Program Sumber Daya Kesehatan	Persentase puskesmas yang mempunyai minimal 5 tenaga kesehatan	Provinsi NTB	35%	314.560.000	352.307.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.01.03.34.02	Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan termasuk pengembangan karir tenaga kesehatan	terlaksananya proses pendidikan dan pelatihan formal dalam rangka meningkatkan SDM Kesehatan	Kota Mataram	1 Tahun	314.560.000	352.307.200
1.02.01.04	Rumah Sakit Mata Mataram				6.982.215.400	7.820.081.248
1.02.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran			1.731.728.800	1.939.536.256
1.02.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	se-NTB	1 Tahun	4.000.000	4.480.000
1.02.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Mataram	1 Tahun	138.000.000	154.560.000
1.02.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Honorarium Pengelola Administrasi Keuangan	Kota Mataram	1 Tahun	91.740.000	102.748.800
1.02.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor.	Tersedianya alat/bahan kebersihan yang dibutuhkan dan jasa Cleaning Service yang dibayarkan	Kota Mataram	1 Tahun	811.510.000	908.891.200
1.02.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	77.402.800	86.691.136
1.02.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Mataram	1 Tahun	298.550.000	334.376.000
1.02.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Kota Mataram	1 Tahun	29.726.000	33.293.120
1.02.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Media Informasi/Surat Kabar	Kota Mataram	1 Tahun	1.800.000	2.016.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.01.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya Koordinasi/Konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah	Luar Provinsi	1 Tahun	60.000.000	67.200.000
1.02.01.04.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terbayarnya Honorarium Satpam/Keamanan	Kota Mataram	1 Tahun	219.000.000	245.280.000
1.02.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur			333.550.000	373.576.000
1.02.01.04.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Mebeleur Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	95.800.000	107.296.000
1.02.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Kendaraan Operasional	Kota Mataram	1 Tahun	130.000.000	145.600.000
1.02.01.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	82.750.000	92.680.000
1.02.01.04.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	25.000.000	28.000.000
1.02.01.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			85.000.000	95.200.000
1.02.01.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya Kontribusi Untuk Mengikuti Kursus/Pelatihan	Kota Mataram	1 Tahun	85.000.000	95.200.000
1.02.01.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase laporan keuangan yang tepat waktu			49.000.000	54.880.000
1.02.01.04.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya RKA/DPA SKPD/UPTD, RKAP/DPAP, Laporan BinteK dan Monev	Kota Mataram	1 Tahun	49.000.000	54.880.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.01.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan laporan pengelolaan asset barang milik daerah			19.400.000	21.728.000
1.02.01.04.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersusunnya Laporan Aset/Barang Milik Daerah	Kota Mataram	1 Tahun	19.400.000	21.728.000
1.02.01.04.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	Provinsi NTB	75%	2.000.000.000	2.240.000.000
1.02.01.04.16.08	Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	Terlaksananya Pengadaan Obat dan BHP Mata serta Pengadaan Bahan Kimia	Kota Mataram	1 Tahun	2.000.000.000	2.240.000.000
1.02.01.04.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kesehatan yang Memenuhi Standar			217.961.600	244.116.992
1.02.01.04.23.01	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan	Luar Provinsi	1 Tahun	217.961.600	244.116.992
1.02.01.04.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin			765.575.000	857.444.000
1.02.01.04.24.01	Pelayanan operasi katarak	Terlaksananya Pengadaan Bahan Kimia dan BHP Mata Untuk Operasi dan Evaluasi Hasil Refraksi Luar Gedung	se-NTB	1 Tahun	765.575.000	857.444.000
1.02.01.04.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan, Obat dan Bahan Habis Pakai			1.753.000.000	1.963.360.000
1.02.01.04.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Kota Mataram	1 Paket	3.000.000	3.360.000
1.02.01.04.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Tersedianya Obat-obatan dan BHP Penyakit Mata	Kota Mataram	1 Tahun	1.750.000.000	1.960.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.01.04.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang terpelihara			27.000.000	30.240.000
1.02.01.04.27.07	Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi	Terlaksananya Kultur Ruang Operasi	Kota Mataram	1 Tahun	17.000.000	19.040.000
1.02.01.04.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terpeliharanya secara rutin dan berkala alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	Kota Mataram	1 Tahun	10.000.000	11.200.000
1.02.01.05	Akademi Perawat Kesehatan				1.458.318.000	1.633.316.160
1.02.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kelancaran pelaksanaan kegiatan perkantoran			709.398.000	794.525.760
1.02.01.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Kebutuhan Materai dan perangko	Kab. Lombok Timur	12 Bulan	3.600.000	4.032.000
1.02.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Pembayaran Rekening Telpn,Air dan Listrik	Kab. Lombok Timur	12 Bulan	110.000.000	123.200.000
1.02.01.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi keuangan	Kab. Lombok Timur	12 Bulan	64.248.000	71.957.760
1.02.01.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	45.000.000	50.400.000
1.02.01.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Bahan Cetak dan Penggandaan	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	40.500.000	45.360.000
1.02.01.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Alat Instalasi listrik dan Penerangan kantor	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	15.000.000	16.800.000
1.02.01.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Kebutuhan dan peralatan Perkantoran	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	10.000.000	11.200.000
1.02.01.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	Kab. Lombok Timur	12 Bulan	12.000.000	13.440.000
1.02.01.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Kegiatan Rapat	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	38.000.000	42.560.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.01.05.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terwujudnya Keselarasan antara Pemerintah Pusat dengan daerah	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	25.000.000	28.000.000
1.02.01.05.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran	Kab. Lombok Timur	14 Bulan	170.850.000	191.352.000
1.02.01.05.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terwujudnya Keselarasan antara pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	42.000.000	47.040.000
1.02.01.05.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terwujudnya Keamanan dan Kenyamanan Kantor	Kab. Lombok Timur	12 Bulan	133.200.000	149.184.000
1.02.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur			698.420.000	782.230.400
1.02.01.05.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tercukupinya Sarana dan Prasarana perkantoran	Kab. Lombok Timur	100 Persen	200.000.000	224.000.000
1.02.01.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tercukupinya Peralatan gedung Kantor	Kab. Lombok Timur	100 Persen	423.420.000	474.230.400
1.02.01.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Lombok Timur	100 Persen	50.000.000	56.000.000
1.02.01.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Oprasional	Kab. Lombok Timur	4 Unit	25.000.000	28.000.000
1.02.01.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase laporan keuangan yang tepat waktu			15.300.000	17.136.000
1.02.01.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tercapainya Laporan Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	15.300.000	17.136.000
1.02.01.05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase ketersediaan laporan pengelolaan asset barang milik daerah			10.200.000	11.424.000
1.02.01.05.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Terkelolanya Asset dan Barang Milik Daerah	Kab. Lombok Timur	12 Bulan	10.200.000	11.424.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.01.05.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	Provinsi NTB	95%	25.000.000	28.000.000
1.02.01.05.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tercukupinya Bahan Laboratorium dan Alat Praktik Pendidikan Calon Tenaga Kesehatan	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	25.000.000	28.000.000
1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi				24.361.997.393	27.285.437.080
1.02.02.01	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi				24.361.997.393	27.285.437.080
1.02.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Kuntinuitas Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.775.851.919	6.468.954.149
1.02.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi (puls), sumber daya air (m3) dan listrik (Kwh)	Kota Mataram	1 Tahun	5.405.000.000	6.053.600.000
1.02.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa administrasi keuangan yang tersedia	Kota Mataram	19 Orang	189.045.000	211.730.400
1.02.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Kota Mataram	100 Jenis	1.700.000	1.904.000
1.02.02.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jasa administrasi perkantoran yang tersedia	Kota Mataram	5 Orang	180.106.919	201.719.749
1.02.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Aparatur			10.370.000	11.614.400
1.02.02.01.02.02	Pembangunan rumah dinas	Rumah Dinas Yang Dibangun	Kota Mataram	4 Unit	10.370.000	11.614.400
1.02.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			2.030.000.000	2.273.600.000
1.02.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah SDM Aparatur Yang Terdidik dan Terlatih	Kota Mataram	500 Orang	2.030.000.000	2.273.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Miskin Yang Terlayani	Provinsi NTB	70 %	3.800.000.000	4.256.000.000
1.02.02.01.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Yang Terlayani	Kota Mataram	500 Orang	3.800.000.000	4.256.000.000
1.02.02.01.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase penanganan penyakit menular dan penyakit tidak menular	Provinsi NTB	100%	200.000.000	224.000.000
1.02.02.01.22.10	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (kie) pencegahan dan pemberantasan penyakit	Frewkensi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Penanggulangan HIV-AIDS	Provinsi NTB	100 Orang	200.000.000	224.000.000
1.02.02.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Terakreditasi	Kota Mataram	1 Rumah Sakit	1.085.000.000	1.215.200.000
1.02.02.01.23.01	Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	Tersusunnya dokumen sesuai standar	Kota Mataram	1200 Dokumen	1.085.000.000	1.215.200.000
1.02.02.01.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin yang terlayani	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	100%	920.000.000	1.030.400.000
1.02.02.01.24.03	Pelayanan operasi bibir sumbing	Jumlah Orang Yang Di Operasi	Kota Mataram	20 Orang	320.000.000	358.400.000
1.02.02.01.24.04	Pelayanan sunatan masal	Jumlah Orang Yang disunat	Kota Mataram	600 Orang	600.000.000	672.000.000
1.02.02.01.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Obat-obatan Rumah Sakit	Kota Mataram	100%	6.105.775.474	6.838.468.531
1.02.02.01.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Obat-obatan Rumah Sakit Yang Dibeli	Kota Mataram	11 Jenis	5.000.000.000	5.600.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.02.01.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit Yang Dibeli	Kota Mataram	1 Paket	1.105.775.474	1.238.468.531
1.02.02.01.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang terpelihara	Kota Mataram	100%	4.435.000.000	4.967.200.000
1.02.02.01.27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Terpeliharanya Rumah Sakit Secara Rutin Berkala	Kota Mataram	16 Gedung	1.435.000.000	1.607.200.000
1.02.02.01.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terpeliharanya Secara Rutin dan Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	Kota Mataram	5000 Unit	3.000.000.000	3.360.000.000
1.02.03	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi				30.599.026.720	34.270.909.926
1.02.03.01	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi				13.599.026.720	15.230.909.926
1.02.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran			674.452.000	755.386.240
1.02.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi ,sumberdaya air dan listrik	Kota Mataram	12 bulan	396.000.000	443.520.000
1.02.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	12 bulan	104.212.000	116.717.440
1.02.03.01.01.21	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Kota Mataram	1 tahun	174.240.000	195.148.800
1.02.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur			1.473.000.000	1.649.760.000
1.02.03.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya sarana gedung kantor	Kota Mataram	1 paket	1.106.500.000	1.239.280.000
1.02.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kota Mataram	5 unit	366.500.000	410.480.000
1.02.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kinerja pegawai			590.500.000	661.360.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.03.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Persentase pegawai yang mengikuti dan terpapar pelatihan	Kota Mataram	85 Persen	556.000.000	622.720.000
1.02.03.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah pemeriksaan pegawai yang beresiko	Kota Mataram	60 orang	34.500.000	38.640.000
1.02.03.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi			2.855.260.000	3.197.891.200
1.02.03.01.16.09	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat terlaksana	Kota Mataram	6 kegiatan	2.300.220.000	2.576.246.400
1.02.03.01.16.12	Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan	Jumlah kegiatan penanggulangan masalah kesehatan terlaksana	Kota Mataram	5 kegiatan	555.040.000	621.644.800
1.02.03.01.23	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit Terakreditasi	Provinsi NTB	1 Rumah Sakit	191.000.000	213.920.000
1.02.03.01.23.01	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Tersusunnya dokumen sesuai standar	Kota Mataram	80 Persen	191.000.000	213.920.000
1.02.03.01.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	Kota Mataram	100%	5.649.500.000	6.327.440.000
1.02.03.01.26.01	Pembangunan rumah sakit	Jumlah gedung yang dibangun	Kota Mataram	1 unit	2.873.500.000	3.218.320.000
1.02.03.01.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah alat-alat kesehatan yang tersedia	Kota Mataram	81 unit	512.500.000	574.000.000
1.02.03.01.26.19	Pengadaan obat-obatan rumah sakit	Tersedianya obat-obat jiwa dan BAHF	Kota Mataram	11 jenis	2.000.000.000	2.240.000.000
1.02.03.01.26.21	Pengadaan mebeleur rumah sakit	Jumlah meubel yang tersedia	Kota Mataram	139 unit	123.500.000	138.320.000
1.02.03.01.26.22	Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)	Tersedianya perlengkapan rumah tangga	Kota Mataram	1 thn	140.000.000	156.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.03.01.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang terpelihara	Kota Mataram	100%	2.165.314.720	2.425.152.486
1.02.03.01.27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Jumlah pemeliharaan gedung rumah sakit	Kota Mataram	1 unit	2.165.314.720	2.425.152.486
1.02.03.02	Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi sebagai BLUD				17.000.000.000	19.040.000.000
1.02.03.02.39	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Persentase target pendapatan	Kota Mataram	100%	17.000.000.000	19.040.000.000
1.02.03.02.39.01	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	Target Pendapatan Rumah Sakit	Kota Mataram	100 Persen	17.000.000.000	19.040.000.000
1.02.04	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir				66.400.235.889	74.368.264.196
1.02.04.01	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir				66.400.235.889	74.368.264.196
1.02.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan Kelancaran administrasi kantor			16.992.238.860	19.031.307.523
1.02.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	tingkat kelancaran administrasi perkantoran	Kab. Sumbawa	12 Bulan	13.500.000	15.120.000
1.02.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi Air, Listrik, Telepon, internet di adakan	Kab. Sumbawa	12 Bulan	1.040.400.000	1.165.248.000
1.02.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa Administrasi Keuangan	Kab. Sumbawa	15 Org/thn	149.412.000	167.341.440
1.02.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	Kab. Sumbawa	36 OB	39.802.860	44.579.203
1.02.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Sumbawa	1 Paket	76.674.000	85.874.880
1.02.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	125.000.000	140.000.000
1.02.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan Minuman Rapat, kegiatan dan Tamu	Kab. Sumbawa	1 Tahun	82.500.000	92.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.04.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Penyelarasan Pemerintah Daerah ke Pusat	Kab. Sumbawa	1 Tahun	165.000.000	184.800.000
1.02.04.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Kab. Sumbawa	265 OB	14.919.950.000	16.710.344.000
1.02.04.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi program kegiatan RS dengan pemprov. di mataram	Kab. Sumbawa	1 Tahun	150.000.000	168.000.000
1.02.04.01.01.21	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Pembelian Alat Listrik dan Elektronik	Kab. Sumbawa	1 Tahun	10.000.000	11.200.000
1.02.04.01.01.23	Penyediaan jasa pengisian tabung gas	Tersedianya Kebutuhan Gas di RS	Kab. Sumbawa	1 Tahun	220.000.000	246.400.000
1.02.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur			159.750.000	178.920.000
1.02.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional yang di Pelihara	Kab. Sumbawa	1 Tahun	159.750.000	178.920.000
1.02.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kompetensi pegawai			510.000.000	571.200.000
1.02.04.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tingkat kompetensi pegawai	Kab. Sumbawa	1 Tahun	510.000.000	571.200.000
1.02.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Rencana program			45.000.000	50.400.000
1.02.04.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunya laporan capaian kerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang valid	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	18.000.000	20.160.000
1.02.04.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan Laporan Akhir Tahun	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	9.000.000	10.080.000
1.02.04.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunya Rencana Kerja/RENJA dan RKA RS	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	18.000.000	20.160.000
1.02.04.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			31.100.000	34.832.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.04.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Manajemen Aset	Kab. Sumbawa	1 Tahun	31.100.000	34.832.000
1.02.04.01.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Ketersediaan Obat dan perbekalan kesehatan	Kab. Sumbawa	100%	3.000.000.000	3.360.000.000
1.02.04.01.15.01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan	Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan di RS yang memadai	Kab. Sumbawa	1 Tahun	3.000.000.000	3.360.000.000
1.02.04.01.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin yang Terlayani	Kab. Sumbawa	100%	100.000.000	112.000.000
1.02.04.01.24.03	Pelayanan operasi bibir sumbing	Terlaksananya Operasi Bibir Sumbing	Kab. Sumbawa	100 Org	100.000.000	112.000.000
1.02.04.01.26	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase Ketersediaan Alat Kesehatan dan Obat-obatan Rumah Sakit	Kab. Sumbawa	100%	44.080.997.029	49.370.716.672
1.02.04.01.26.18	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Tersedianya alat-alat kesehatan yang memadai di RS	Kab. Sumbawa	1 Tahun	42.130.997.029	47.186.716.672
1.02.04.01.26.21	Pengadaan mebleur rumah sakit	Tersedianya mebleur di RS	Kab. Sumbawa	1 Paket	250.000.000	280.000.000
1.02.04.01.26.23	Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit	Tersedianya bahan bahan Logistik di RS	Kab. Sumbawa	1 Tahun	1.500.000.000	1.680.000.000
1.02.04.01.26.24	Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit	Tersedianya Bahan Percetakan Administrasi medis di RS	Kab. Sumbawa	1 Paket	200.000.000	224.000.000
1.02.04.01.27	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase sarana dan prasarana kesehatan yang terpelihara	Kab. Sumbawa	100%	1.481.150.000	1.658.888.000
1.02.04.01.27.01	Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	Terpeliharanya rumah sakit secara rutin berkala	Kab. Sumbawa	1 Tahun	1.100.000.000	1.232.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.02.04.01.27.16	Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah rumah sakit	Terpeliharanya IPAL RS	Kab. Sumbawa	1 Tahun	66.550.000	74.536.000
1.02.04.01.27.17	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit	Terpeliharanya alat-alat Kesehatan di RS Secara Rutin Berkala	Kab. Sumbawa	1 Tahun	242.000.000	271.040.000
1.02.04.01.27.18	Pemeliharaan rutin/berkala ambulance/mobil jenazah	Pemeliharaan secara rutin berkala mobil ambulance/jenazah	Kab. Sumbawa	1 Tahun	72.600.000	81.312.000
1,03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				1.047.990.087.941	1.173.748.898.494
1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				1.047.990.087.941	1.173.748.898.494
1.03.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Induk)				880.962.116.014	986.677.569.936
1.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi OPD	Kota Mataram	12 Bulan	2.774.838.750	3.107.819.400
1.03.01.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	Kota Mataram	12 Bulan	612.665.000	686.184.800
1.03.01.01.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	12 Bulan	158.246.850	177.236.472
1.03.01.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Mataram	14 Orang	312.987.500	350.546.000
1.03.01.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kota Mataram	12 Bulan	106.151.900	118.890.128
1.03.01.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	12 Bulan	39.300.000	44.016.000
1.03.01.01.01.12	Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	Kota Mataram	12 Bulan	13.153.000	14.731.360

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.01.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Kota Mataram	12 Buah	198.705.000	222.549.600
1.03.01.01.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan peralatan rumah tangga	Kota Mataram	4 Buah	3.451.500	3.865.680
1.03.01.01.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan (surat kabar / majalah) untuk perpustakaan	Kota Mataram	12 Bulan	19.080.000	21.369.600
1.03.01.01.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makanan & minuman	Kota Mataram	12 Bulan	33.800.000	37.856.000
1.03.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Provinsi	Luar Provinsi	12 Bulan	231.000.000	258.720.000
1.03.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Terlaksananya pembayaran tenaga Pegawai Tidak Tetap	Kota Mataram	23 Orang	667.618.000	747.732.160
1.03.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	se-NTB	12 Bulan	181.000.000	202.720.000
1.03.01.01.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor	Kota Mataram	9 Orang	197.680.000	221.401.600
1.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana & prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas & fungsi OPD	Kota Mataram	12 Bulan	958.200.000	1.073.184.000
1.03.01.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas / operasional	Kota Mataram	1 Unit	30.000.000	33.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung/kantor	Kota Mataram	6 Buah	4.200.000	4.704.000
1.03.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan meubelair	Kota Mataram	1 Set	62.000.000	69.440.000
1.03.01.01.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung/kantor	Kota Mataram	12 Bulan	95.000.000	106.400.000
1.03.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	64 Unit	394.650.000	442.008.000
1.03.01.01.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Mataram	12 Bulan	137.600.000	154.112.000
1.03.01.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala meubelair	Kota Mataram	12 Bulan	9.000.000	10.080.000
1.03.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Kota Mataram	2 Unit	225.750.000	252.840.000
1.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yg mendukung kelancaran tupoksi SKPD	Kota Mataram	12 Bulan	73.353.000	82.155.360
1.03.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terwujudnya pembinaan pegawai	Kota Mataram	1 Kegiatan	17.228.000	19.295.360
1.03.01.01.05.04	Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Terwujudnya pendidikan dan pelatihan formal	Kota Mataram	12 Bulan	36.000.000	40.320.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.01.05.06	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Terbinanya mental dan fisik aparatur	Kota Mataram	12 Bulan	20.125.000	22.540.000
1.03.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya perencanaan program dan sistem pelaporan yang akurat	Kota Mataram	12 Bulan	657.655.864	736.574.568
1.03.01.01.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksannya penyusunan LKPJ dan LKjIP	Kota Mataram	2 Dokumen	70.784.064	79.278.152
1.03.01.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan setiap Triwulan	Kota Mataram	4 Dokumen	37.882.400	42.428.288
1.03.01.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kota Mataram	1 Dokumen	47.500.000	53.200.000
1.03.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA	Kota Mataram	3 Dokumen	165.772.200	185.664.864
1.03.01.01.06.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, Triwulan dan Tahunan	se-NTB	12 Bulan	315.889.600	353.796.352
1.03.01.01.06.10	Pengendalian Penyelesaian Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	Tersusunnya laporan T3 LHP	Kota Mataram	1 Dokumen	19.827.600	22.206.912
1.03.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhihinya pelaksanaan peraturan administrasi keuangan	Kota Mataram	12 Bulan	85.928.500	96.239.920
1.03.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Mataram	1 Dokumen	85.928.500	96.239.920
1.03.01.01.15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	se-NTB	3,27%	199.970.003.200	223.966.403.584
1.03.01.01.15.01	Perencanaan Pembangunan Jalan	Tersusunnya rencana pembangunan jalan provinsi	Kota Mataram	3 Dokumen	2.366.415.200	2.650.385.024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.01.15.03	Pembangunan Jalan	Terlaksananya pembangunan jalan provinsi	Provinsi NTB	48,52 km	179.973.466.000	201.570.281.920
1.03.01.01.15.04	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Tersusunnya rencana pembangunan jembatan	se-NTB	5 Dokumen	292.219.500	327.285.840
1.03.01.01.15.05	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya pembangunan jembatan	Provinsi NTB	15 unit	17.104.556.000	19.157.102.720
1.03.01.01.15.06	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya monitoring peningkatan jalan & penggantian jembatan	se-NTB	2 Dokumen	78.107.500	87.480.400
1.03.01.01.15.09	Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan	Terlaksananya pembinaan teknis jalan dan jembatan	Provinsi NTB	2 Dokumen	155.239.000	173.867.680
1.03.01.01.18	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	se-NTB	86,90 %	472.739.039.200	529.467.723.904
1.03.01.01.18.07	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya pemeliharaan berkala / peningkatan jalan provinsi	Provinsi NTB	530 Km	472.739.039.200	529.467.723.904
1.03.01.01.22	Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Terbangunnya Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	se-NTB	86,90%	277.379.700	310.665.264
1.03.01.01.22.01	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan	Tersusunnya laporan data hasil survey kondisi jalan	se-NTB	1 Dokumen	171.365.100	191.928.912
1.03.01.01.22.02	Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jembatan	Tersusunnya laporan Data Hasil survey kondisi jembatan	se-NTB	1 Dokumen	106.014.600	118.736.352
1.03.01.01.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Terwujudnya Rasio Jaringan Irigasi dalam keadaan baik	Kota Mataram	140 Ha	70.265.868.400	78.697.772.608

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.01.24.01	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Tersusunnya laporan perencanaan pembangunan jaringan irigasi	se-NTB	6 Dokumen	4.127.975.100	4.623.332.112
1.03.01.01.24.18	Pembangunan jaringan irigasi	Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi lahan kering & Peningkatan DI Kewenangan Provinsi	se-NTB	15 DI	64.912.517.400	72.702.019.488
1.03.01.01.24.19	Peningkatan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Terlaksananya kegiatan KOMIR, Dewan SDA, PAI, Diklat dan Lomba Juru Pintu/Pengamat Air	Kota Mataram	2 Dokumen	1.225.375.900	1.372.421.008
1.03.01.01.26	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Luas Lahan Sawah yang beririgasi	se-NTB	290 Ha	24.599.109.700	27.551.002.864
1.03.01.01.26.01	Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya	Terlaksananya pembangunan embung	Provinsi NTB	4 unit	22.516.019.200	25.217.941.504
1.03.01.01.26.12	Perencanaan Embung, Cek Dam dan Bangunan Penampung Lainnya	Tersusunnya lap perencanaan / DED Embung, Cek Dam, dan Bangunan Penampung lainnya	se-NTB	4 Dokumen	2.083.090.500	2.333.061.360
1.03.01.01.27	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Tersedianya cakupan Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum	se-NTB	89,52 %	42.607.469.600	47.720.365.952
1.03.01.01.27.01	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat	Provinsi NTB	15000 KK	24.866.358.000	27.850.320.960
1.03.01.01.27.02	Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Terlaksananya pembangunan sarana & prasarana air limbah	Provinsi NTB	11 Lokasi	2.274.383.000	2.547.308.960

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.01.27.10	Perencanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat	Tersusunnya lap perenc. Sarana dan prasarana / DED air minum	se-NTB	22 Dokumen	13.473.227.100	15.090.014.352
1.03.01.01.27.11	Perencanaan prasarana dan sarana air limbah	Tersusunnya lap perenc. Sarana dan prasarana / DED air limbah	se-NTB	5 Dokumen	1.993.501.500	2.232.721.680
1.03.01.01.28	Program pengendalian banjir	Terwujudnya penanganan jumlah titik rawan banjir	se-NTB	19,07 %	17.068.550.500	19.116.776.560
1.03.01.01.28.06	Pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai	Terlaksananya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai	Provinsi NTB	4 Lokasi	17.068.550.500	19.116.776.560
1.03.01.01.29	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	Provinsi NTB	60%	4.696.319.800	5.259.878.176
1.03.01.01.29.02	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	Terlaksananya pembangunan infrastruktur pendukung wisata potensial, infrastruktur kawasan permukiman nelayan dan penataan kawasan pantai	Provinsi NTB	4 lokasi	72.017.500	80.659.600
1.03.01.01.29.05	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	Tersusunnya laporan perencanaan / RTBL kawasan strategis dan cepat tumbuh dan Terbangunnya amenitas objek wisata	Provinsi NTB	5 Dokumen	4.074.362.300	4.563.285.776
1.03.01.01.29.06	Pendataan, Pengolahan dan Pelaporan Bangunan Non Perumahan dan Bangunan Gedung Negara	Tersedianya data dan informasi bangunan non perumahan	Provinsi NTB	5 Dokumen	549.940.000	615.932.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.01.34	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	persentase jasa pertukangan yang tersertifikasi	se-NTB	12,65%	1.055.052.900	1.181.659.248
1.03.01.01.34.05	Fasilitasi Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)	Terlaksananya Fasilitas Forum Jasa Konstruksi Daerah (FJKD)	Provinsi NTB	90 Orang	129.571.000	145.119.520
1.03.01.01.34.06	Pelatihan Uji Kompetensi dan Keberhasilan Konstruksi	Terlaksananya pelatihan uji kompetensi dan keberhasilan konstruksi	Kota Mataram	120 Orang	11.750.000	13.160.000
1.03.01.01.34.07	Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Jasa Konstruksi	Terlaksananya sosialisasi dan diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi	Provinsi NTB	3 kali	38.500.200	43.120.224
1.03.01.01.34.08	Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi	Terlaksananya tertib penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	Provinsi NTB	2 kali	100.000.000	112.000.000
1.03.01.01.34.09	Pemberdayaan Kelembagaan Sumberdaya Konstruksi	Terselenggaranya Pembinaan Unit P2JK (Pemberdayaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi) di Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat	Kota Mataram	10 Kab/Kota	116.726.100	130.733.232
1.03.01.01.34.10	Pemberdayaan Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Meningkatnya Kompetensi Sumberdaya Tenaga Kerja Konstruksi	Provinsi NTB	3 Kali	362.626.100	406.141.232
1.03.01.01.34.11	Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Terpenuhinya tertib administrasi penyelenggaraan jasa konstruksi	se-NTB	10 Kab/Kota	144.686.000	162.048.320

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.01.34.12	Pengawasan Investasi Infrastruktur dan Pasar Konstruksi	Terpenuhinya sistem investasi infrastruktur jasa konstruksi	se-NTB	10 Kab/Kota	151.193.500	169.336.720
1.03.01.01.35	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Tersedianya fasilitas peribadatan Islamic Center	Kota Mataram	92,67 %	37.120.325.100	41.574.764.112
1.03.01.01.35.01	Pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial	Terlaksananya pembangunan blok Pendidikan & Renovasi Masjid At-Taqwa (Islamic Center)	Kota Mataram	2 Unit	37.120.325.100	41.574.764.112
1.03.01.01.36	Program Perencanaan Tata Ruang	tersusunnya dokumen rinci tata ruang yang sudah diperdakan	Provinsi NTB	3 KSP	1.704.875.000	1.909.460.000
1.03.01.01.36.05	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersedianya arahan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang	Provinsi NTB	3 Dokumen	1.450.625.000	1.624.700.000
1.03.01.01.36.11	Pembinaan Penyusunan RTR Kab/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pembinaan Penyusunan RTR Kab/Kota	Provinsi NTB	10 Kab/Kota	254.250.000	284.760.000
1.03.01.01.37	Program Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya Pemanfaatan Ruang yang aman, nyaman, dan produktif	Provinsi NTB	25%	955.290.000	1.069.924.800
1.03.01.01.37.05	Survey dan Pemetaan	Tersedianya sistem informasi/ database pemanfaatan ruang	se-NTB	2 Dokumen	250.000.000	280.000.000
1.03.01.01.37.07	Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya pemahaman masyarakat dalam hal Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang	Provinsi NTB	10 Kab/Kota	210.290.000	235.524.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.01.37.10	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang	Provinsi NTB	10 Kab/Kota	495.000.000	554.400.000
1.03.01.01.38	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terwujudnya pengendalian tata ruang yang sesuai dengan RTRW	Provinsi NTB	20%	1.630.806.600	1.826.503.392
1.03.01.01.38.05	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	Tersedianya bahan pengendalian pemanfaatan ruang dan Operasional Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah	Provinsi NTB	1 KSP	184.230.000	206.337.600
1.03.01.01.38.09	Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang	Terwujudnya Pemberdayaan PPNS Penataan Ruang	Provinsi NTB	2 Dokumen	345.120.000	386.534.400
1.03.01.01.38.10	Peningkatan Peran Serta TKPRD Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang	Laporan Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Provinsi NTB	1 Dokumen	1.101.456.600	1.233.631.392
1.03.01.01.39	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Kawasan	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kawasan	Provinsi NTB	2%	450.423.400	504.474.208
1.03.01.01.39.01	Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Kawasan	Terselenggaranya kegiatan kebijakan pengembangan prasarana dan sarana antar kawasan	Provinsi NTB	1 Dokumen	112.115.900	125.569.808
1.03.01.01.39.02	Penataan Infrastruktur Kawasan	Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur di kawasan sekitar	Provinsi NTB	1 Dokumen	108.926.200	121.997.344

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.01.39.03	Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Kawasan	Terlaksananya norma standar pedoman dan manual pengembangan kawasan	se-NTB	1 Dokumen	31.394.000	35.161.280
1.03.01.01.39.04	Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Kawasan	Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas tata kelola pembangunan di kawasan sekitar	Provinsi NTB	1 Dokumen	97.073.800	108.722.656
1.03.01.01.39.05	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi	Provinsi NTB	1 Dokumen	100.913.500	113.023.120
1.03.01.01.40	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar sektor	Provinsi NTB	2%	374.558.900	419.505.968
1.03.01.01.40.01	Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Sektor	Terlaksananya kegiatan keterpaduan kebijakan pengembangan antar sektor	se-NTB	1 Dokumen	98.868.900	110.733.168
1.03.01.01.40.02	Penataan Infrastruktur Sektor	Terlaksananya penataan keterpaduan infrastruktur antar sektor	se-NTB	1 Dokumen	99.580.900	111.530.608
1.03.01.01.40.03	Sosialisasi Norma Standar Pedoman dan Manual Pengembangan Sektor	Terlaksananya sosialisasi norma standar, pedoman dan manual pengembangan antar sektor	se-NTB	1 Dokumen	78.525.800	87.948.896

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.01.40.04	Pengawasan dan Pengendalian Pengembangan Sektor	Terselenggaranya kegiatan koordinasi pengelolaan, pengendalian serta akuntabilitas tata kelola pembangunan antar sektor	se-NTB	1 Dokumen	97.583.300	109.293.296
1.03.01.01.41	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan prioritas pembangunan berbasis wilayah	Provinsi NTB	2%	897.067.900	1.004.716.048
1.03.01.01.41.01	Perencanaan Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Terselenggaranya perencanaan pengembangan keterpaduan prasarana dan sarana infrastruktur wilayah	Provinsi NTB	1 Dokumen	801.421.900	897.592.528
1.03.01.01.41.02	Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Tersedianya Dokumen Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	se-NTB	1 Dokumen	95.646.000	107.123.520
1.03.01.02	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok				33.011.490.000	36.972.868.800
1.03.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi OPD			387.199.000	433.662.880

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.02.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Internet Kantor, Jasa Listrik, Jasa Telepon dan Jasa Air Tersedianya Jasa Internet Kantor, Jasa Listrik, Jasa Telepon dan Jasa Air Terpenuhinya Kebutuhan Internet Kantor, Listrik, Air dan Komunikasi Kantor Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi kerja	Kota Mataram	1 Tahun	60.000.000	67.200.000
1.03.01.02.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan Tersusunnya laporan keuangan Tersedianya pertanggungjawaban keuangan Meningkatnya efektifitas kerja	Kota Mataram	1 Tahun	54.336.000	60.856.320

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan/bahan pembersih dan tenaga/petugas kebersihan kantor Terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan nyaman Terwujudnya lingkungan kerja yang bersih dan nyaman Meningkatnya efektifitas dan efisien kerja	Kota Mataram	1 Tahun	29.260.000	32.771.200
1.03.01.02.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor Meningkatnya efektifitas pembangunan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok	Kota Mataram	1 Tahun	22.000.000	24.640.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.02.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetak dan penggandaan Tersedianya barang cetakkan dan penggandaan Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan Meningkatnya efektifitas pembangunan Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok	Kota Mataram	1 Tahun	8.754.000	9.804.480
1.03.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan, Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan, Terwujudnya suasana kerja yang nyamann Meningkatnya efektifitas dan kualitas kerja	Kota Mataram	1 Tahun	5.529.000	6.192.480

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.02.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor Meningkatnya efektifitas kerja Balai pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah P. Lombok	Kota Mataram	1 Tahun	151.550.000	169.736.000
1.03.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya koordinasi ke luar daerah Tersusunya laporan koordinasi Terpenuhinya laporan hasil koordinasi Meningkatnya efektifitas Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah P. Lombok	Kota Mataram	1 Tahun	32.000.000	35.840.000
1.03.01.02.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terlaksananya keamanan kantor Meningkatnya keamanan kantor Terpenuhinya keamanan kantor Terciptanya suasana kerja yang nyaman	Kota Mataram	1 Tahun	23.770.000	26.622.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana & prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas & fungsi OPD			293.400.000	328.608.000
1.03.01.02.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya kebutuhan suku cadang, bahan bakar, STNK dan service Meningkatnya efektifitas kerja aparatur	Kota Mataram	1 Tahun	278.400.000	311.808.000
1.03.01.02.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Meningkatnya efektifitas kerja	Kota Mataram	1 Tahun	15.000.000	16.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya perencanaan program dan sistem pelaporan yang akurat			23.043.000	25.808.160
1.03.01.02.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya RKA/DPA UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah P. Lombok, Tersedianya RKA/DPA UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah P. Lombok, Meningkatnya efektifitas dan efisiensi kerja	Kota Mataram	1 Tahun	23.043.000	25.808.160
1.03.01.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhiannya pelaksanaan peraturan administrasi keuangan			35.522.000	39.784.640
1.03.01.02.07.01	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah	Terlaksananya akuntansi barang milik daerah, Tersusunnya laporan keuangan dan laporan barang milik daerah, Tersedianya pertanggungjawaban keuangan dan barang milik daerah, Meningkatnya efektifitas kerja	Kota Mataram	1 Tahun	35.522.000	39.784.640

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.02.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	86,90 %	32.272.326.000	36.145.005.120
1.03.01.02.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Terlaksananya pemeliharaan jembatan, Berfungsinya jembatan dengan baik, Dipertahankanya kondisi jembatan tetap baik, Meningkatnya fungsi Jembatan	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur	3.567,2 Meter	1.366.488.000	1.530.466.560
1.03.01.02.18.08	Pemeliharaan rutin jalan	Terlaksananya pemeliharaan rutin jalan, Berfungsinya jalan provinsi secara optimal, Dipertahankanya kemantapan jalan provinsi, Meningkatnya efektifitas dan efisien UPTD Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah P. Lombok	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur	416,55 Km	30.905.838.000	34.614.538.560
1.03.01.03	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa				22.590.908.178	25.301.817.159

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi OPD			361.963.128	405.398.703
1.03.01.03.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	50.751.000	56.841.120
1.03.01.03.01.03	Penyediaan Jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	18.786.000	21.040.320
1.03.01.03.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	43.625.348	48.860.389
1.03.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	800	896
1.03.01.03.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	13.047.100	14.612.752
1.03.01.03.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	3.125.000	3.500.000
1.03.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	2.000.000	2.240.000
1.03.01.03.01.13	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	79.665.400	89.225.248
1.03.01.03.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	5.000.000	5.600.000
1.03.01.03.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	2.500.000	2.800.000
1.03.01.03.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	2.500.000	2.800.000
1.03.01.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	20.911.800	23.421.216
1.03.01.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	77.255.200	86.525.824
1.03.01.03.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	2 Orang	41.996.280	47.035.834

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana & prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas & fungsi OPD			269.039.200	301.323.904
1.03.01.03.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	10 Unit	69.950.000	78.344.000
1.03.01.03.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	5.650.000	6.328.000
1.03.01.03.02.42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	193.439.200	216.651.904
1.03.01.03.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya perencanaan program dan sistem pelaporan yang akurat			20.704.600	23.189.152
1.03.01.03.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	20.704.600	23.189.152
1.03.01.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya pelaksanaan peraturan administrasi keuangan			91.200.300	102.144.336
1.03.01.03.07.01	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	91.200.300	102.144.336
1.03.01.03.18	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap	Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	86,90 %	21.848.000.950	24.469.761.064
1.03.01.03.18.04	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	679.921.950	761.512.584
1.03.01.03.18.08	Pemeliharaan rutin jalan	TOLAK UKUR KINERJA	Kab. Sumbawa	1 Tahun	21.168.079.000	23.708.248.480

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.04	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Lombok				40.340.652.100	45.181.530.352
1.03.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi OPD			120.064.000	134.471.680
1.03.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	Kota Mataram	12 bulan	13.749.000	15.398.880
1.03.01.04.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	12 bulan	39.192.000	43.895.040
1.03.01.04.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kota Mataram	1 tahun	12.150.000	13.608.000
1.03.01.04.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	1 tahun	2.173.000	2.433.760
1.03.01.04.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan & perlengkapan kantor	Kota Mataram	3 bh	7.800.000	8.736.000
1.03.01.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Provinsi	Kota Mataram	1 tahun	45.000.000	50.400.000
1.03.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana & prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas & fungsi OPD			63.000.000	70.560.000
1.03.01.04.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	1 tahun	39.000.000	43.680.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.04.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Mataram	1 tahun	24.000.000	26.880.000
1.03.01.04.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya perencanaan program dan sistem pelaporan yang akurat			13.100.000	14.672.000
1.03.01.04.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya Renja OPD, RKA dan DPA	Kota Mataram	1 dokumen	13.100.000	14.672.000
1.03.01.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhihinya pelaksanaan peraturan administrasi keuangan			14.300.000	16.016.000
1.03.01.04.07.01	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Mataram	1 tahun	14.300.000	16.016.000
1.03.01.04.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Terwujudnya Rasio Jaringan Irigasi dalam keadaan baik	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	27.944 Ha	13.753.675.000	15.404.116.000
1.03.01.04.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Terlaksananya Rehabilitasi jaringan irigasi pada DI Kewenangan Provinsi	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	1 tahun	13.753.675.000	15.404.116.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.04.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Luas Lahan Sawah yang beririgasi	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	290 ha	20.512.417.300	22.973.907.376
1.03.01.04.26.02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Bendungan dan Embung dan Terlaksananya Rehabilitasi Embung Rakyat	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	1 tahun	19.512.417.300	21.853.907.376
1.03.01.04.26.08	Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya Air	Terlaksananya Neraca Sumber Daya Air Daerah Di Pulau Lombok dan Pemutakhiran Database Mata Air Pulau Lombok	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	1 tahun	500.000.000	560.000.000
1.03.01.04.26.09	Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana jaringan Hidrologi	Terlaksananya Cetak Kertas Grafik/Bahan Op. Pos Hidrologi, Monitoring, Evaluasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi dan Pemantauan Sedimentasi Pada Sungai	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	1 tahun	500.000.000	560.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.04.28	Program pengendalian banjir	Terwujudnya penanganan jumlah titik rawan banjir	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	19,07%	5.864.095.800	6.567.787.296
1.03.01.04.28.03	Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Terlaksananya pengendalian banjir pada daerah tangkapan air dan badan - badan sungai	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	1 tahun	5.614.095.800	6.287.787.296
1.03.01.04.28.12	Operasi dan pemeliharaan sungai	Terlaksananya Pengadaan Bahan Banjiran	Kota Mataram	1 tahun	250.000.000	280.000.000
1.03.01.05	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air dan Hidrologi Wilayah Sungai Pulau Sumbawa				66.216.728.200	74.162.735.584
1.03.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi OPD			1.069.158.450	1.197.457.464
1.03.01.05.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya listrik dan air	Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	85.000.000	95.200.000
1.03.01.05.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	59.961.450	67.156.824

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.05.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Bima	1 Tahun	42.305.200	47.381.824
1.03.01.05.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Dompu	1 Tahun	32.942.000	36.895.040
1.03.01.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan	Kab. Bima, Kab. Sumbawa	1 Tahun	8.000.000	8.960.000
1.03.01.05.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bima, Kab. Sumbawa	1 Tahun	702.200.000	786.464.000
1.03.01.05.01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sumbawa	1 Tahun	3.266.400	3.658.368
1.03.01.05.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Terlaksananya Penyedia Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	4.140.000	4.636.800
1.03.01.05.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyedia Makan dan Minum	Kab. Sumbawa	1 Tahun	15.169.500	16.989.840
1.03.01.05.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terselenggaranya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Kab. Sumbawa	1 Tahun	35.593.600	39.864.832
1.03.01.05.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	80.580.300	90.249.936

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana & prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas & fungsi OPD			377.100.400	422.352.448
1.03.01.05.02.22	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terwujudnya Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	179.200.000	200.704.000
1.03.01.05.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	166.100.000	186.032.000
1.03.01.05.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	31.800.400	35.616.448
1.03.01.05.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya perencanaan program dan sistem pelaporan yang akurat			38.500.000	43.120.000
1.03.01.05.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya RKA 2019 UPTD Balai PSDA.WS.Sumbawa Dinas PU Prov. NTB	Kab. Sumbawa	1 Tahun	38.500.000	43.120.000
1.03.01.05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhihinya pelaksanaan peraturan administrasi keuangan			70.529.600	78.993.152

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.05.07.01	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah	Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Terlaksananya Akuntansi Milik Daerah Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah Tersedianya Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah Meningkatnya Efektifitas Pembangunan Balai PSDA. Wilayah Sungai Sumbawa Dinas PU. Prov. NTB	Kab. Sumbawa	1 Tahun	70.529.600	78.993.152
1.03.01.05.24	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Terwujudnya Rasio Jaringan Irigasi dalam keadaan baik	Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	6.334 Ha	34.191.150.000	38.294.088.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.05.24.10	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Terlaksananya OP Saluran Suplesi, Jaringan Irigasi, Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Kegiatan Konstruksi Irigasi Partisipatif, Pembangunan dan Pengembangan Daerah Irigasi	Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	34.191.150.000	38.294.088.000
1.03.01.05.26	Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya	Luas Lahan Sawah yang beririgasi	Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	290 ha	3.210.334.750	3.595.574.920
1.03.01.05.26.02	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung air lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin dan Rehabilitasi Embung, Bendung dan Bendungan.	Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	2.622.600.000	2.937.312.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.05.26.08	Pengembangan Pelayanan Hidrologi Mendukung Konservasi Sumber Daya Air	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Sumber Daya Air Guna Memenuhi Kebutuhn Air Untuk Areal Lahan Pertanian Terlaksananya Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Daerah P.Sumbawa Terlaksananya Pemutakhiran Database Mata Air P.Sumbawa Tersedianya Penyusunan Neraca Sumber Daya Air Daerah P.Sumbawa Tersedianya Pemutakhiran Database Mata Air P.Sumbawa	Kab. Sumbawa	1 Tahun	59.434.750	66.566.920

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.05.26.09	Pengelolaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana jaringan Hidrologi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Sumber Daya Air Guna Memenuhi Kebutuhn Air Untuk Areal Lahan Pertanian Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Hidroklimatologi P.Sumbawa Terlaksananya Pemeliharaan Pos AWLR P.Sumbawa Terlaksananya Pemeliharaan Pos Curah Hujan (ARR) P.Sumbawa Tersedianya Data Informasi Cuaca dan Iklim	Kab. Sumbawa	1 Tahun	528.300.000	591.696.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.05.28	Program pengendalian banjir	Terwujudnya penanganan jumlah titik rawan banjir	Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	19,07%	27.259.955.000	30.531.149.600
1.03.01.05.28.03	Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Terlaksananya Normalisasi Sungai, Perkuatan tebing Sungai	Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	26.822.500.000	30.041.200.000
1.03.01.05.28.12	Operasi dan pemeliharaan sungai	Terlaksananya Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	437.455.000	489.949.600
1.03.01.06	Balai Pengujian Material Konstruksi				1.514.339.550	1.696.060.296
1.03.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya administrasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi OPD			422.893.850	473.641.112
1.03.01.06.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	erwujudnya administrasi perkantoran yg mendukung kelancaran tupoksi OPD	Kota Mataram	1 Tahun	163.000.000	182.560.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.06.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Peembayaran jasa Administrasi Keuangan	Kota Mataram	1 Tahun	33.176.000	37.157.120
1.03.01.06.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	25.058.000	28.064.960
1.03.01.06.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kota Mataram	1 Tahun	16.214.850	18.160.632
1.03.01.06.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Balai Pengujian DPUP NTB	Kota Mataram	1 Tahun	10.080.000	11.289.600
1.03.01.06.01.12	Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	4.709.250	5.274.360
1.03.01.06.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	18.000.000	20.160.000
1.03.01.06.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Provinsi	Kota Mataram	1 Tahun	102.000.000	114.240.000
1.03.01.06.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelarasan Program Program Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kota Mataram	1 Tahun	50.655.750	56.734.440
1.03.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana & prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas & fungsi OPD			99.500.000	111.440.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.06.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	1 Tahun	81.700.000	91.504.000
1.03.01.06.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Mataram	1 Tahun	17.800.000	19.936.000
1.03.01.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya penatausahaan keuangan dan manajemen pencapaian kinerja program yg mendukung kelancaran tupoksi SKPD			9.000.000	10.080.000
1.03.01.06.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya kursus-kursus singkat/pelatihan	Kota Mataram	1 Tahun	9.000.000	10.080.000
1.03.01.06.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya perencanaan program dan sistem pelaporan yang akurat			13.135.900	14.712.208
1.03.01.06.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya RKA 2020 Balai Pengujian DPUP NTB Tersusunnya RKAP 2019 Balai Pengujian DPUP NTB	Kota Mataram	1 Tahun	13.135.900	14.712.208
1.03.01.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhinya pelaksanaan peraturan administrasi keuangan			10.109.800	11.322.976
1.03.01.06.07.01	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah	Terlaksananya Akuntansi Milik Daerah	Kota Mataram	1 Tahun	10.109.800	11.322.976

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.06.31	Program Pengembangan Pelayanan Jasa Pengujian	Terwujudnya pelayanan dan hasil uji material bangunan sesuai standar			959.700.000	1.074.864.000
1.03.01.06.31.01	Pengujian Bahan Bangunan	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Tanah dan Bahan Bangunan	Kota Mataram	1 Tahun	224.500.000	251.440.000
1.03.01.06.31.03	Pengujian kualitas air	Tersusunnya Laporan Kegiatan Pengujian Kualitas Air	Kota Mataram	1 Tahun	735.200.000	823.424.000
1.03.01.07	Balai Informasi Infrastruktur Wilayah (BIIW)				3.353.853.900	3.756.316.368
1.03.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Administrasi Perkantoran Yang Mendukung Kelancaran Tupoksi OPD			431.936.500	483.768.880
1.03.01.07.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Mataram	12 Bulan	70.000.000	78.400.000
1.03.01.07.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan	Kota Mataram	12 Bulan	60.000.000	67.200.000
1.03.01.07.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan, Peralatan dan Pembersih Kantor	Kota Mataram	12 Bulan	30.000.000	33.600.000
1.03.01.07.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Mataram	12 Bulan	17.606.000	19.718.720
1.03.01.07.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Mataram	12 Bulan	12.000.000	13.440.000
1.03.01.07.01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	5 Unit	190.000.000	212.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.07.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	Kota Mataram	12 Bulan	4.000.000	4.480.000
1.03.01.07.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Mataram	200 OK	5.000.000	5.600.000
1.03.01.07.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah	Luar Provinsi	1 Set Laporan	21.000.000	23.520.000
1.03.01.07.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Kota Mataram	12 Bulan	22.330.500	25.010.160
1.03.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Mendukung Kelancaran Tugas & Fungsi OPD			521.850.000	584.472.000
1.03.01.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Gedung Kantor dan Tersedianya Ruang dan Galeri Infrastruktur	Kota Mataram	2 Paket	401.550.000	449.736.000
1.03.01.07.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kantor BIIW	Kota Mataram	12 Bulan	48.300.000	54.096.000
1.03.01.07.02.26	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor BIIW	Kota Mataram	12 Bulan	72.000.000	80.640.000
1.03.01.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terpenuhinya Perencanaan Program dan Sistem Pelaporan yang Akurat			13.025.000	14.588.000
1.03.01.07.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya RKAP 2019 dan RKA 2020 BIIW	Kota Mataram	4 Set Laporan	13.025.000	14.588.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.03.01.07.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhihinya Pelaksanaan Peraturan Administrasi Keuangan			19.370.000	21.694.400
1.03.01.07.07.01	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah	Terlaksananya Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kota Mataram	1 Set Laporan	19.370.000	21.694.400
1.03.01.07.41	Program Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur Wilayah	Terwujudnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan prioritas pembangunan berbasis wilayah			2.367.672.400	2.651.793.088
1.03.01.07.41.03	Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Bina Marga dan Tata Ruang	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Infrastruktur Bina Marga dan Tata Ruang Antar Wilayah	se-NTB	10 Kab/Kota	352.451.400	394.745.568
1.03.01.07.41.04	Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Cipta Karya	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Infrastruktur Cipta Karya Antar Wilayah	se-NTB	10 Kab/Kota	85.078.500	95.287.920
1.03.01.07.41.05	Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Air	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan dan Penyediaan Data dan Informasi Infrastruktur Sumber Daya Air Antar Wilayah	se-NTB	10 Kab/Kota	1.930.142.500	2.161.759.600
1,04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN				435.689.502.180	487.972.242.442
1.04.01	Dinas Perumahan dan Permukiman				435.689.502.180	487.972.242.442

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.04.01.01	Dinas Perumahan dan Permukiman				435.689.502.180	487.972.242.442
1.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran			1.310.961.100	1.468.276.432
1.04.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	Kota Mataram	1 Tahun	2.850.000	3.192.000
1.04.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Mataram	1 Tahun	122.000.000	136.640.000
1.04.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	1 Tahun	99.518.800	111.461.056
1.04.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	291.442.000	326.415.040
1.04.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kota Mataram	1 Tahun	19.469.100	21.805.392
1.04.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	1 Tahun	15.811.000	17.708.320
1.04.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	5.506.700	6.167.504
1.04.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	152.500.000	170.800.000
1.04.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Mataram	96 exp	14.000.000	15.680.000
1.04.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman	Kota Mataram	1 Tahun	34.000.000	38.080.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.04.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah	Kota Mataram	1 Tahun	169.123.500	189.418.320
1.04.01.01.01.20	Penyelarasan program pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kota Mataram	1 Tahun	230.283.000	257.916.960
1.04.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	154.457.000	172.991.840
1.04.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur			1.106.356.000	1.239.118.720
1.04.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	1 Tahun	150.700.000	168.784.000
1.04.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung/kantor	Kota Mataram	1 Tahun	50.277.000	56.310.240
1.04.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan meublair	Kota Mataram	1 Tahun	31.538.000	35.322.560
1.04.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Mataram	1 Tahun	250.000.000	280.000.000
1.04.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Kota Mataram	13 Unit	172.341.000	193.021.920
1.04.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Mataram	1 Tahun	25.000.000	28.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.04.01.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala meublair	Kota Mataram	1 Tahun	26.500.000	29.680.000
1.04.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Kota Mataram	1 Tahun	400.000.000	448.000.000
1.04.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya sumber manusia memadai			61.292.000	68.647.040
1.04.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya kursus-kursus singkat/pelatihan	Kota Mataram	1 Tahun	30.000.000	33.600.000
1.04.01.01.05.04	Peningkatan metal dan fisik aparatur	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepegawaian	Kota Mataram	1 Tahun	30.400.000	34.048.000
1.04.01.01.05.06	Pembinaan pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kepegawaian	Kota Mataram	1 Tahun	892	999,04
1.04.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya perencanaan program dan sistem pelaporan			347.540.860	389.245.763
1.04.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan LAKIP dan LKPJ	Kota Mataram	1 Dokumen	28.000.000	31.360.000
1.04.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Kota Mataram	2 Dokumen	31.700.000	35.504.000
1.04.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya Renja SKPD/RKA dan DPA	Kota Mataram	3 Dokumen	109.740.940	122.909.853
1.04.01.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan	se-NTB	4 Dokumen	166.100.000	186.032.000
1.04.01.01.06.10	Pengendalian, penyelesaian hasil pemeriksaan dan tindak lanjut	Tersusunnya laporan T3 LHP	Kota Mataram	1 Laporan	11.999.920	13.439.910
1.04.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah			34.641.800	38.798.816

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.04.01.01.07.01	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya peningkatan manajemen aset daerah	Kota Mataram	1 Tahun	34.641.800	38.798.816
1.04.01.01.15	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Rumah Layak Huni (RLH) yang tertangani	se-NTB	2%	95.426.771.600	106.877.984.192
1.04.01.01.15.06	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Rumah Layak Huni	se-NTB	5000 Unit	93.632.640.000	104.868.556.800
1.04.01.01.15.09	Penyediaan dan pembangunan perumahan	Pembangunan baru Rumah Layak Huni di Provinsi NTB	se-NTB	3 Dokumen	819.652.500	918.010.800
1.04.01.01.15.10	Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	Tersedianya Program Informasi Perumahan dan Permukiman	Kota Mataram	1 Aplikasi	401.577.800	449.767.136
1.04.01.01.15.11	Perencanaan Pembangunan Perumahan	Dokumen Perencanaan Teknis dan Evaluasi Pengembangan Perumahan Prov. NTB	Kota Mataram	5 Dokumen	572.901.300	641.649.456
1.04.01.01.22	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Permukiman yang tertata			337.401.938.820	377.890.171.478
1.04.01.01.22.01	Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi NTB	Tersedianya dokumen RP3KP Provinsi NTB	se-NTB	1 Dokumen	1.654.678.600	1.853.240.032
1.04.01.01.22.04	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang ditingkatkan Kualitasnya	Provinsi NTB	30 Ha	335.747.260.220	376.036.931.446
1,05	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				82.875.405.960	92.820.454.675
1.05.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				16.341.130.520	18.302.066.182
1.05.01.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri				16.341.130.520	18.302.066.182
1.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas dan kapasitas layanan administrasi perkantoran			1.266.993.300	1.419.032.496

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kota Mataram	100 Buah	2.040.000	2.284.800
1.05.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Mataram	3 Jenis	150.000.000	168.000.000
1.05.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	84 org/bln	65.352.000	73.194.240
1.05.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kota Mataram	168 org/bln	357.776.600	400.709.792
1.05.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Mataram	78 jenis	36.619.500	41.013.840
1.05.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan & penggandaan	Kota Mataram	10 jenis	10.245.200	11.474.624
1.05.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Mataram	4 jenis	94.960.000	106.355.200
1.05.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Mataram	1 Paket	100.000.000	112.000.000
1.05.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terwujudnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Mataram	10 Laporan	250.000.000	280.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terwujudnya pembinaan dan sinergitas program ke kabupaten/kota dalam daerah	Kota Mataram	10 laporan	200.000.000	224.000.000
1.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan kapasitas dan efektifitas layanan			341.990.500	383.029.360
1.05.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya mobil dinas/operasional	Kota Mataram	12 unit	5.100.000	5.712.000
1.05.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	Kota Mataram	10 jenis	114.490.500	128.229.360
1.05.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas bangunan gedung kantor yang dipelihara	Kota Mataram	1 unit	1.700.000	1.904.000
1.05.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki	Kota Mataram	38 buah	183.700.000	205.744.000
1.05.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diperbaiki	Kota Mataram	50 buah	37.000.000	41.440.000
1.05.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya pegawai yang terampil dan sehat (orang)			85.600.000	95.872.000
1.05.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat	Kota Mataram	5 orang	70.000.000	78.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan mental dan fisik	Kota Mataram	58 barang	15.600.000	17.472.000
1.05.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusun nya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan (jumlah dokumen Perenc & Pelaporan			316.340.380	354.301.226
1.05.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Lap Kinerja	Kota Mataram	6 dokumen	94.414.880	105.744.666
1.05.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersedianya Renja Tahunan	Kota Mataram	5 dokumen	221.925.500	248.556.560
1.05.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Aset (laporan)			19.400.000	21.728.000
1.05.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Laporan Aset	Kota Mataram	2 laporan	19.400.000	21.728.000
1.05.01.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat	Provinsi NTB	100%	6.351.358.840	7.113.521.901
1.05.01.01.15.03	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	Terlatihnya masyarakat dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	se-NTB	100 barang	420.328.840	470.768.301
1.05.01.01.15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pengendalian keamanan lingkungan	se-NTB	150 barang	849.820.000	951.798.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.01.01.15.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya dokumentasi kegiatan	se-NTB	1 dokumen	253.000.000	283.360.000
1.05.01.01.15.07	Fasilitasi Forum Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Terfasilitasinya forum pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan	se-NTB	120 orang	4.828.210.000	5.407.595.200
1.05.01.01.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penegakan PERDA	Provinsi NTB	100%	145.790.000	163.284.800
1.05.01.01.16.02	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Terselenggaranya pertemuan dalam rangka pembahasan teknik pencegahan tindak kejahatan	se-NTB	100 orang	50.340.000	56.380.800
1.05.01.01.16.05	Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Tersedianya dokumentasi kegiatan	se-NTB	1 dokumen	80.000.000	89.600.000
1.05.01.01.16.06	Pencegahan, penanggulungan dan penanganan potensi konflik dan gangguan keamanan dan ketentraman di masyarakat	Tersedianya personil aparat keamanan dalam rangka pengamanan kunjungan kepala Negara, wakil Kepala Negara dan perwakilan negara lain	se-NTB	300 orang	15.450.000	17.304.000
1.05.01.01.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Presentase masyarakat yang mengikuti pembekalan wawasan kebangsaan	Provinsi NTB	100%	3.487.513.200	3.906.014.784

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.01.01.17.01	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya koordinasi antara forum-forum keagamaan dan tokoh masyarakat	se-NTB	500 orang	759.038.000	850.122.560
1.05.01.01.17.02	Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan rasa sosial yang tinggi	se-NTB	750/4 orang/lokasi	2.154.942.000	2.413.535.040
1.05.01.01.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah aparat dan masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa	se-NTB	600 orang	573.533.200	642.357.184
1.05.01.01.18	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya kapasitas pembinaan wawasan kebangsaan	Provinsi NTB	100%	115.802.600	129.698.912
1.05.01.01.18.01	Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terlaksananya fasilitasi halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	se-NTB	150 orang	69.563.800	77.911.456
1.05.01.01.18.02	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang mengikuti seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	se-NTB	100 orang	46.238.800	51.787.456

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.01.01.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	"Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Provinsi NTB	100%	1.278.982.000	1.432.459.840
1.05.01.01.20.01	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan penyuluhan pencegahan/ peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	se-NTB	300orang	931.708.000	1.043.512.960
1.05.01.01.20.05	Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan	se-NTB	200orang	197.580.800	221.290.496
1.05.01.01.20.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya dokumentasi kegiatan	se-NTB	1dokumen	149.693.200	167.656.384
1.05.01.01.21	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik	Provinsi NTB	73%	2.931.359.700	3.283.122.864
1.05.01.01.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti penyuluhan pemilihan umum (pileg/pilpres/pilkada)	se-NTB	500orang	2.053.109.700	2.299.482.864
1.05.01.01.21.04	Penyusunan Data Base Politik	Tersusunnya database partai politik	se-NTB	1dokumen	50.000.000	56.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.01.01.21.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya dokumentasi kegiatan	se-NTB	1 dokumen	828.250.000	927.640.000
1.05.02	Satuan Polisi Pamong Praja				21.421.110.500	23.991.643.760
1.05.02.01	Satuan Polisi Pamong Praja				21.421.110.500	23.991.643.760
1.05.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kecepatan penyelesaian tugas			1.179.723.300	1.321.290.096
1.05.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang tersedia	Kota Mataram	12 bulan	16.500.000	18.480.000
1.05.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi yang tersedia	Kota Mataram	12 bulan	25.600.000	28.672.000
1.05.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa administrasi keuangan yang tersedia	Kota Mataram	12 bulan	94.244.000	105.553.280
1.05.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang tersedia	Kota Mataram	12 bulan	94.394.000	105.721.280
1.05.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kota Mataram	12 bulan	58.792.500	65.847.600
1.05.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Mataram	12 bulan	65.000.000	72.800.000
1.05.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah sarana instalasi listrik yang tersedia	Kota Mataram	12 bulan	15.037.300	16.841.776
1.05.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	Kota Mataram	12 bulan	20.000.000	22.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Kota Mataram	12 bulan	50.000.000	56.000.000
1.05.02.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang tersusun	Kota Mataram	12 bulan	300.000.000	336.000.000
1.05.02.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah jasa administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia	Kota Mataram	12 bulan	90.000.000	100.800.000
1.05.02.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Hasil koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah yang tersusun	Kota Mataram	12 bulan	250.000.000	280.000.000
1.05.02.01.01.25	Pengelolaan Kearsipan	Jumlah Arsip/Surat yang terakuisi	Kota Mataram	36000 lembar	100.155.500	112.174.160
1.05.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan sarana dan prasarana yang tersedia			3.614.394.800	4.048.122.176
1.05.02.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia	Kota Mataram	4 Unit	1.601.750.000	1.793.960.000
1.05.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeuler yang diadakan	Kota Mataram	16 Paket	100.000.000	112.000.000
1.05.02.01.02.11	Pengadaan UPS/stabiizer, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah alat elektronik yang tersedia	Kota Mataram	65 Unit	917.300.000	1.027.376.000
1.05.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor yang terpelihara	Kota Mataram	1 Paket	150.000.000	168.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Kota Mataram	40 Unit	799.344.800	895.266.176
1.05.02.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkaia peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Kota Mataram	62 Unit	46.000.000	51.520.000
1.05.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat kinerja			349.120.000	391.014.400
1.05.02.01.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang tersedia	Kota Mataram	1 Paket	349.120.000	391.014.400
1.05.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rencana kerja penegakan perda			958.914.000	1.073.983.680
1.05.02.01.05.07	Pembinaan Kesamaptaan. PBB dan Pengembangan Karakter Personil Sat Pol PP	Jumlah Rapat Koordinasi PPNS	Kota Mataram	1 Kali	46.700.000	52.304.000
1.05.02.01.05.08	Bimbingan Teknis Sat Pol PP	Jumlah PPNS yang terlatih	Kota Mataram	30 Orang	89.131.800	99.827.616
1.05.02.01.05.09	Bimbingan Teknis Satpol PP Wisata Halal	Jumlah Petugas Wisata yang terlatih	Kota Mataram	80 Orang	295.582.200	331.052.064
1.05.02.01.05.10	Bimbingan Teknis Satpol PP Menuju Indonesia Ramah	Jumlah Anggota Satpol PP yang terlatih	Kota Mataram	50 Orang	227.500.000	254.800.000
1.05.02.01.05.13	Peningkatan pembinaan personil aparat praja wibawa	Jumlah Personil yang mengikuti pembinaan	Kab. Sumbawa Barat	750 org	300.000.000	336.000.000
1.05.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan akuntabilitas			396.900.000	444.528.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Rencana Kerja yang Tersusun	Kota Mataram	4 Dokumen	96.900.000	108.528.000
1.05.02.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Laporan Kinerja yang tersusun	Kota Mataram	4 Dokumen	300.000.000	336.000.000
1.05.02.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Ketepatan dan kecepatan penyusunan laporan pengelolaan aset/barang milik daerah			49.741.000	55.709.920
1.05.02.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah dokumen laporan aset/barang milik daerah	Kota Mataram	2 Dokumen	49.741.000	55.709.920
1.05.02.01.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)	Provinsi NTB	100%	6.845.439.500	7.666.892.240
1.05.02.01.15.01	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah masyarakat yang dibina	Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumbawa Barat	200 org	245.500.000	274.960.000
1.05.02.01.15.05	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah Personil yang mengikuti gelar pasukan	Kota Mataram	3250 Orang	6.489.152.500	7.267.850.800
1.05.02.01.15.07	Rakor Perlindungan Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi Linmas	Kota Mataram	1 Kali	110.787.000	124.081.440
1.05.02.01.16	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penegakan PERDA	Provinsi NTB	100%	4.969.119.300	5.565.413.616
1.05.02.01.16.07	Pencegahan dan Penanggulangan Potensi Konflik dan Gangguan Kemanan dan Ketentraman Kemasyarakat	Jumlah Kegiatan Terpadu	Kota Mataram	4 Kali	239.366.400	268.090.368

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.02.01.16.08	Peningkatan Kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (TURJAWALI)	Jumlah Kegiatan Turjawali	Kota Mataram	12 bulan	3.182.600.000	3.564.512.000
1.05.02.01.16.09	Rapat Pengawasan Dan Penegakan Perda Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB	Jumlah rapat koordinasi pengawasan dan penegakan Perda	Kota Mataram	2 Kali	150.556.000	168.622.720
1.05.02.01.16.10	Pengawasan Pengamanan Dan Penanganan Aset Vital Pemda di Luar dan Dalam Daerah (Kabupaten/Kota Se-NTB)	Jumlah Laporan Penanganan dan Penanganan Asset	Kota Mataram	2 Kali	247.000.000	276.640.000
1.05.02.01.16.11	Bimbingan Teknis Kepolisipamongprajaan, Komunikasi, Negosiasi Massa	Jumlah Personil Satpol PP yang Terampil	Kota Mataram	40 Orang	130.782.200	146.476.064
1.05.02.01.16.12	Bimbingan Teknis Pengamanan, Penjagaan Obyek Vital dan Kemampuan Dasar Intelejen	Jumlah Personil Satpol PP yang Terampil	Kota Mataram	40 Orang	132.780.700	148.714.384
1.05.02.01.16.13	Operasi Yustisi Penegakan Produk Hukum Daerah	Frekuensi Operasi Yustisi	Kota Mataram	4 Kali	263.800.000	295.456.000
1.05.02.01.16.14	Penyuluhan Perda/Pergub dan Kebijakan terkait Pelaksanaan Program Unggulan dan Starategis Daerah Lainnya	Masyarakat yang Paham Perundang-undangan Daerah terkait Program Unggulan dan Stategis	Kota Mataram	100 Orang	142.311.200	159.388.544
1.05.02.01.16.15	Kerjasama Pengamanan/Pengawasan Pejabat (Gub/Wagub), tamu VIP/Tamu Pemda ke Kab/Kota se NTB	Jumlah Lokasi Pengamanan, Pengawasan Pejabat dan Tamu Serta Kegiatan Pemda di Kab/kota	Kota Mataram	10 Kab/kota	180.000.000	201.600.000
1.05.02.01.16.16	Rakor Stabilitas Keamanan	Jumlah Rapat Koordinasi Stabilitas Keamanan	Kota Mataram	2 Kali	299.922.800	335.913.536

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.02.01.19	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan	Persentase Masyarakat yang diberdayakan untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan	Provinsi NTB	100%	1.553.165.500	1.739.545.360
1.05.02.01.19.02	Pembekalan masyarakat dalam kemampuan pendeteksian dini dan pencegahan konflik di masyarakat	Masyarakat yang Mampu dan Mandiri dalam Mendeteksi Dini dan Mencegah Konflik	Kota Mataram	200 Orang	449.946.800	503.940.416
1.05.02.01.19.03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Masyarakat yang Memahami Potensi Gangguan yang ada di Masyarakat	Kota Mataram	100 Orang	448.399.200	502.207.104
1.05.02.01.19.04	Pembinaan & pembentukan kelompok masyarakat patuh perda perkada melalui pendekatan kearifan lokal	Masyarakat yang Memahami Potensi Gangguan yang ada di Masyarakat	Kota Mataram	100 Orang	154.862.900	173.446.448
1.05.02.01.19.05	Workshop Deteksi Dini Potensi Gangguan Trantibum	Aparat dan Masyarakat yang Mampu Melakukan Pendeteksian Dini	Kota Mataram	100 Orang	199.992.000	223.991.040
1.05.02.01.19.06	Focus Group Discussion Pencegahan dan Penanggulangan Potensi Konflik di Masyarakat	Jumlah FGD Pencegahan dan Penanggulangan Potensi Konflik	Kota Mataram	2 Kali	299.964.600	335.960.352
1.05.02.01.20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Provinsi NTB	100%	828.614.000	928.047.680

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.02.01.20.09	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dan Instansi/Mitra terkait dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Rapat Koordinasi Tibum dan Tranmas	Kota Mataram	1 kali	119.900.000	134.288.000
1.05.02.01.20.10	Operasi Wibawa untuk Pemberantasan Pekat (Prostitusi, Gepeng, Anjal, Miras, Perjudian, Premanisme dan Narkoba)	Frekuensi Operasi PEKAT	Kota Mataram	12 kali	458.956.000	514.030.720
1.05.02.01.20.11	Pemetaan Kawasan Rawan Pekat di Masyarakat	Jumlah Kawasan Rawan Penyakit Masyarakat	se-NTB	1 Dok	249.758.000	279.728.960
1.05.02.01.21	Program Reformasi Birokrasi	Persentase pelanggaran pegawai (Tingkat Penanganan Disiplin Aparatur)	Provinsi NTB	100%	259.798.400	290.974.208
1.05.02.01.21.01	Pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap aparatur lingkup Pemerintah Provinsi NTB	Frekuensi Pengawasan Aparatur	Kota Mataram	12 Kali	259.798.400	290.974.208
1.05.02.01.22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan Personil Linmas dalam Penanganan Bencana Alam	Provinsi NTB	100%	416.180.700	466.122.384
1.05.02.01.22.05	Perbantuan pengurangan resiko korban bencana alam	Jumlah Personil Satlinmas yang Terlatih	Kota Mataram	250 Orang	296.200.000	331.744.000
1.05.02.01.22.06	Pelatihan Tim Reaksi Cepat (Rescue Linmas)	Jumlah Anggota Satpol.PP yang Terlatih	Kota Mataram	40 Orang	119.980.700	134.378.384
1.05.03	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB				45.113.164.940	50.526.744.733
1.05.03.01	Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB				45.113.164.940	50.526.744.733

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya jumlah surat, peraturan uu, map kantor dll yang dicetak dan digandakan, serta tersedianya perlatan dan perlengkapan kantor	Provinsi NTB	100 %	2.672.099.500	2.992.751.440
1.05.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat masuk/surat keluar	Kota Mataram	1 Tahun	18.800.000	21.056.000
1.05.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Telepon, Air dan Listrik	Kota Mataram	1 Tahun	305.000.000	341.600.000
1.05.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Dokumen Laporan Keuangan	Kota Mataram	1 Tahun	98.375.000	110.180.000
1.05.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tenaga Kontrak Cleanning Service yang di pekerjaan	Kota Mataram	1 Tahun	110.000.000	123.200.000
1.05.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	Kota Mataram	1 Tahun	23.106.500	25.879.280
1.05.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang etakan dan penggandaan	Kota Mataram	1 Tahun	41.640.000	46.636.800
1.05.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat-alat Listrik	Kota Mataram	1 Tahun	20.000.000	22.400.000
1.05.03.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	342.500.000	383.600.000
1.05.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah koran, Majalah	Kota Mataram	1 Tahun	12.500.000	14.000.000
1.05.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat/ Tamu	Kota Mataram	1 Tahun	185.000.000	207.200.000
1.05.03.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas Luar Daerah	Luar Provinsi	1 Tahun	400.000.000	448.000.000
1.05.03.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Kota Mataram	1 Tahun	500.000.000	560.000.000
1.05.03.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tenaga Kontrak Satpam yang dipekerjakan	Kota Mataram	7 Orang	238.800.000	267.456.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.03.01.01.30	Rapat Koordinasi Daerah Tk. Provinsi	Terlaksananya Rakor Tingkat Provinsi	se-NTB	1 Kegiatan	223.014.000	249.775.680
1.05.03.01.01.31	Rapat Pengendalian Teknis	Terlaksananya Rapat Pengendalian Teknis	se-NTB	2 Kegiatan	153.364.000	171.767.680
1.05.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya peningkatan kinerja aparatur	Provinsi NTB	100 %	2.804.359.640	3.140.882.797
1.05.03.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Kota Mataram	2 Unit	1.217.250.000	1.363.320.000
1.05.03.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/ Operasional	Kota Mataram	3 Unit	700.900.000	785.008.000
1.05.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	100.000.000	112.000.000
1.05.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional pertahun	Kota Mataram	1 Tahun	634.713.640	710.879.277
1.05.03.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Rutin/ berkala Peralatan Kantor Pertahun	Kota Mataram	1 Tahun	92.896.000	104.043.520
1.05.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Sarana Kantor secara Rutin	Kota Mataram	1 Tahun	58.600.000	65.632.000
1.05.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sehat jasmani dan rohani	Provinsi NTB	100 %	20.400.000	22.848.000
1.05.03.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Luar Provinsi	1 Tahun	400	448
1.05.03.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Tersedianya Kegiatan Rutin Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Kota Mataram	1 Tahun	20.000.000	22.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Provinsi NTB	100 %	363.800.000	407.456.000
1.05.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksannya Monev Pelaksanaan Program/ Kegiatan BPBD di Kabupaten/ kota	se-NTB	1 Tahun	37.200.000	41.664.000
1.05.03.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya Laporan Tahunan, Lakip, Renja, serta RKAP 2018, RKA 2019 dan Buku Kebencanaan	Kota Mataram	1 Tahun	128.600.000	144.032.000
1.05.03.01.06.18	monitoring dan evaluasi kegiatan peanggulangan bencana BPBD kab/kota	Terlaksannya Monev Pelaksanaan Program/ Kegiatan BPBD di Kab/kota	se-NTB	1 Tahun	198.000.000	221.760.000
1.05.03.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Manajemen Asset/ Barang milik Daerah serta Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana bagi BPBD	Provinsi NTB	100 %	49.855.000	55.837.600
1.05.03.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersesunnya Dokumen Asset/ Barang	Kota Mataram	1 Dokumen	49.855.000	55.837.600
1.05.03.01.15	Program Siaga Darurat Bencana	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Terhadap Siaga Bencana	se-NTB	10 %	14.851.692.000	16.633.895.040
1.05.03.01.15.02	Penyediaan dan Penyiapan Bahan, Barang dan Peralatan serta Personil untuk Pemenuhan Kebutuhan Penanggulangan Bencana	Tersedianya Sarana dan Prasarana Siaga Bencana	se-NTB	1 Kegiatan	1.958.950.000	2.194.024.000
1.05.03.01.15.03	Penanganan Siaga Darurat Bencana	Tertanganinya Penanggulangan Bencana pada Tahap Siaga Darurat	se-NTB	10 Lokasi	12.522.055.000	14.024.701.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.03.01.15.09	Gladi Posko dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana	Jumlah Aparatur dan peserta gladi penanggulangan bencana	Provinsi NTB	2 Kegiatan	370.687.000	415.169.440
1.05.03.01.16	Program Tanggap Darurat Bencana	Persentase penanganan darurat bencana domain (kekeringan, banjir dan tanah longsor)	se-NTB	20 %	18.634.850.000	20.871.032.000
1.05.03.01.16.01	Penanganan korban Masa Tanggap Darurat	Tertanganinya Korban Bencana	se-NTB	2500 Orang	2.500.000.000	2.800.000.000
1.05.03.01.16.02	Penanganan transisi ke pemulihan darurat	tertanganinya Prasarana dan Sarana Layanan Masyarakat	se-NTB	10 Lokasi	15.000.000.000	16.800.000.000
1.05.03.01.16.03	Pendampingan psiko sosial korban bencana	Tertanganinya Psiko Sosial Korban Bencana	se-NTB	2500 Orang	495.000.000	554.400.000
1.05.03.01.16.04	Pembentukan dan Pelatihan TRC	Jumlah TRC yang terbentuk dan Terlatih	Provinsi NTB	125 Orang	639.850.000	716.632.000
1.05.03.01.17	Program Penanganan Tanggap Darurat Dan Evakuasi/Penyelamatan Korban Bencana	Persentase masyarakat yang tanggap darurat dalam menghadapi bencana	se-NTB	100 %	780.468.800	874.125.056
1.05.03.01.17.01	Pelatihan Tanggap Darurat dan Evakuasi Pemuda Pelajar	Terlatihnya Pemuda dan Pelajar Tanggap Darurat Bencana	se-NTB	400 Pelajar	110.700.000	123.984.000
1.05.03.01.17.02	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Dokumen Hasil Pemantauan	se-NTB	1 Dokumen	495.898.000	555.405.760
1.05.03.01.17.03	Pelatihan Kaji Cepat Darurat Bencana	Tersedianya Pelatihan Bagi aparat	Kota Mataram	55 Orang	173.870.800	194.735.296

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.03.01.18	Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanganan Penanggulangan Bencana	Meningkatnya persentase kerusakan yang terehabilitasi (struktural dan non struktural) dan terekonstruksi (struktural)	se-NTB	50 %	1.071.700.000	1.200.304.000
1.05.03.01.18.01	Penyusunan Dokumen DED	Teridentifikasi Lokasi pasca Bencana	se-NTB	10 Lokasi	500.000.000	560.000.000
1.05.03.01.18.02	Verifikasi Tingkat Kerusakan Pascabencana	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi	Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa	5 Laporan	350.000.000	392.000.000
1.05.03.01.18.03	Pelatihan Terapi dan Konseling Psikis/Trauma	Terlaksannya Pelatihan Bagi Relawan	Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa	500 Orang	221.700.000	248.304.000
1.05.03.01.20	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana	Persentase Relawan dalam mengantisipasi terjadinya bencana melalui pengorganisasian dengan langkah yang tepatguna dan berdaya guna	se-NTB	100 %	1.127.111.000	1.262.364.320
1.05.03.01.20.05	Jambore Desa Tangguh Bencana (Destana)	Jambore Desa Tangguh Bencana Provinsi NTB	se-NTB	300 Orang	487.654.500	546.173.040

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.03.01.20.06	Pendampingan bagi masyarakat dalam upaya PRB di Provinsi NTB	Berkurangnya Desa Rawan Kekeringan	se-NTB	70 Desa	250.000.000	280.000.000
1.05.03.01.20.07	Penilaian Kinerja Desa tangguh Bencana	Terlaksananya Penilaian Indikator Desa Tangguh Bencana	se-NTB	10 Desa	230.000.000	257.600.000
1.05.03.01.20.09	Gladi posko dan gladi lapangan penanggulangan bencana	Jumlah Aparatur dan Peserta Gladi PB	se-NTB	2 Kegiatan	159.456.500	178.591.280
1.05.03.01.21	Program Pengembangan Komunikasi, informasi dan Media Massa Kebencanaan	Pemahaman Masyarakat Terhadap Kebencanaan Semakin Mantab	se-NTB	70 %	591.060.000	661.987.200
1.05.03.01.21.01	Peningkatan dan Pengembangan Komunikasi dan Informasi Bencana	Terselenggaranya Penyebarluasan Informasi Kebencanaan	se-NTB	1 Tahun	200.000.000	224.000.000
1.05.03.01.21.02	Pengembangan Aplikasi Sisten informasi Aman gangguan Bencana	Terdektasinya kejadian bencana lebih cepat dan akurat	se-NTB	10 Kab/ Kota	203.560.000	227.987.200
1.05.03.01.21.04	Penyusunan Profil Kebencanaan Daerah Provinsi NTB	Terbentuknya tentang penyusunan Profil Kebencanaan Daerah Provinsi NTB	Provinsi NTB	1 Paket	187.500.000	210.000.000
1.05.03.01.22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Persentase mitigasi struktural dan non struktural	se-NTB	70 %	2.145.769.000	2.403.261.280
1.05.03.01.22.05	Sosialisasi pengurangan risiko bencana (hari Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Nasional dan Daerah)	terlaksannya Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana	Luar Provinsi, se-NTB	2 Kegiatan	400.000.000	448.000.000
1.05.03.01.22.06	Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana bagi Masyarakat	Jumlah Masyarakat Desa/Kelurahan yang Terlatih	se-NTB	300 Orang	285.000.000	319.200.000
1.05.03.01.22.07	Penyusunan Rencana Kontijensi di KEK Mandalika, Global Hub, Samota	Tersedianya Dokumen Rencana Kontijensi	se-NTB	3 Dokumen	443.900.000	497.168.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.05.03.01.22.08	Penerapan Pengurangan Risiko Bencana Menuju Kawasan Aman Bencana Banjir dan Tanah Longsor	jumlah lokasi Aman Bencana Banjir dan Longsor	se-NTB	10 Lokasi	410.900.000	460.208.000
1.05.03.01.22.10	Jambore Desa Tangguh Bencana (Destana)	Terlaksananya Jambore Destana	Provinsi NTB	300 Orang	455.969.000	510.685.280
1,06	SOSIAL				101.286.049.850	113.440.375.832
1.06.01	Dinas Sosial				101.286.049.850	113.440.375.832
1.06.01.01	Dinas Sosial (Induk)				69.510.116.900	77.851.330.928
1.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Manajemen pengelolaan administrasi perkantoran			1.049.811.500	1.175.788.880
1.06.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	100 %	8.450.000	9.464.000
1.06.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/ faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	1 Tahun	203.000.000	227.360.000
1.06.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan tenaga pengelola administrasi keuangan dinas	Kota Mataram	1 Tahun	92.840.000	103.980.800
1.06.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas	Kota Mataram	1 Tahun	77.355.000	86.637.600
1.06.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Umur fungsional peralatan kerja kantor meningkat	Kota Mataram	1 Tahun	40.000.000	44.800.000
1.06.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk kebutuhan kantor	Kota Mataram	100 %	45.671.500	51.152.080

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya barang cetakan dan pengadaan untuk kebutuhan kantor	Kota Mataram	100 %	37.800.000	42.336.000
1.06.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersediannya komponen alat listrik dan penerangan bangunan untuk kebutuhan kantor	Kota Mataram	100 %	16.435.000	18.407.200
1.06.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk kebutuhan kantor	Kota Mataram	100 %	36.360.000	40.723.200
1.06.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya Kebutuhan makan minum rapat, tamu dan kegiatan lembur dinas	Kota Mataram	100 %	38.500.000	43.120.000
1.06.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	100 %	150.500.000	168.560.000
1.06.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	100 %	101.900.000	114.128.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Bima, Kota Bima, Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	100 %	201.000.000	225.120.000
1.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur			888.790.400	995.445.248
1.06.01.01.02.04	Pengadaan mobil jabatan	Terlaksananya pengadaan mobil jabatan untuk menunjang pelaksanaan tugas	Kota Mataram	1 Unit	251.250.000	281.400.000
1.06.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya penyediaan perlengkapan gedung kantor untuk menambah kenyamanan kerja	Kota Mataram	5 Unit	93.900.000	105.168.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.01.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terlaksananya pengadaan UPS/stabilizer, laptop,PC/komputer, printer dan alat elektronik lainnya untuk kebutuhan kantor	Kota Mataram	1 Paket	136.250.000	152.600.000
1.06.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Umur fungsional gedung/ bangunan kantor bertambah	Kota Mataram	100 %	110.000.000	123.200.000
1.06.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Umur fungsional kendaraan dinas/operasional kantor bertambah	Kota Mataram	100 %	297.390.400	333.077.248
1.06.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumberdaya aparatur			243.875.000	273.140.000
1.06.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya pembinaan mental dan fisik aparatur melalui senam kesegaran jasmani	Kota Mataram	24 Kali/Tahun	6.150.000	6.888.000
1.06.01.01.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur kesos (RAKOR BIDANG SOSIAL)	Kota Mataram	1 Kegiatan	231.575.000	259.364.000
1.06.01.01.05.18	Peningkatan iman dan taqwa aparatur	Terlaksananya peningkatan iman dan taqwa aparatur melalui pengajian/ siraman rohani	Kota Mataram	24 Kali/Tahun	6.150.000	6.888.000
1.06.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			212.900.000	238.448.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (LAKIP/LKjIP-OPD)	Kota Mataram	1 Dokumen	24.975.000	27.972.000
1.06.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD dapat disajikan secara sistematis dan akuntabel serta transparansi (CALK-OPD)	Kota Mataram	1 Dokumen	20.550.000	23.016.000
1.06.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya rencana kerja tahunan organisasi perangkat daerah (RENJA-OPD) dan rencana strategis organisasi perangkat daerah (RENSTRA-OPD)	Kota Mataram	2 Dokumen	50.850.000	56.952.000
1.06.01.01.06.06	Penyusunan laporan bulanan triwulan dan akhir tahunan	Dokumen pelaporan kegiatan OPD selama satu tahunana dapat disajikan secara sistematis dan akuntabel	Kota Mataram	1 Dokumen	20.750.000	23.240.000
1.06.01.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja program dan kegiatan	se-NTB	10 Lokasi	41.000.000	45.920.000
1.06.01.01.06.11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran dapat disajikan secara akuntabel, transparan dan proporsional	Kota Mataram	2 Dokumen	54.775.000	61.348.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan aset/ barang milik daerah			21.015.000	23.536.800
1.06.01.01.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah	Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah yang ditingkatkan		100 %	21.015.000	23.536.800
1.06.01.01.15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase KK Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil yang diberdayakan	Provinsi NTB	1,02%	10.612.100.000	11.885.552.000
1.06.01.01.15.01	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Terlaksananya peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan PMKS Lainnya		200 Jiwa	620.750.000	695.240.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.01.15.02	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Terlatihnya warga miskin melalui bimbingan keterampilan dan pendampingan berusaha dalam upaya meningkatkan taraf hidup	Kab. Bima, Kota Bima, Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	250 KK	1.055.650.000	1.182.328.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.01.15.04	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	Terlaksananya pemberdayaan warga miskin melalui bantuan peralatan usaha untuk menunjang keterampilan yang dimiliki (KK)	Kab. Bima, Kota Bima, Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	250 KK	1.430.500.000	1.602.160.000
1.06.01.01.15.06	Pemberdayaan fakir miskin	Terlaksananya pemberdayaan fakir miskin melalui penguatan ekonomi mikro dengan bantuan peralatan usaha bagi kelompok usaha bersama (KUBe)		250 Kelompok	6.596.500.000	7.388.080.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.01.15.07	Pemberdayaan KAT	Terlaksananya pemberdayaan warga miskin KAT dengan penguatan ekonomi keluarga yang berbasis usaha melalui pelatihan, pendampingan dan bantuan sarana/prasarana usaha	Kab. Bima, Kab. Sumbawa	2 (100) Lokasi (Jiwa)	818.450.000	916.664.000
1.06.01.01.15.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan dan pemberdayaan FM, KAT dan PMKS Lainnya di Kabupaten/Kota se-NTB	Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	4 Kali/Tahun	90.250.000	101.080.000
1.06.01.01.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani	Provinsi NTB	1,09%	2.455.100.000	2.749.712.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.01.16.02	Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak	Tertanganinya permasalahan sosial dan hukum bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH), korban eksploitasi, perdagangan perempuan/trafficking dan permasalahan sosial lainnya	se-NTB	200 Kasus	175.250.000	196.280.000
1.06.01.01.16.03	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Terlaksananya penyampaian kepada masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi terhadap pentingnya penanganan permasalahan sosial	se-NTB	500 Orang	159.800.000	178.976.000
1.06.01.01.16.05	Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana	Terselenggaranya pelayanan psikososial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kelompok maginal lainnya dalam mengembalikan keberfungsian sosialnya di shelter home	se-NTB	500 Jiwa	457.700.000	512.624.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.01.16.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kelompok marginal lainnya di kabupaten/kota	Kab. Bima, Kota Bima, Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	10 Kali/Tahun	50.150.000	56.168.000
1.06.01.01.16.12	Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak (AT, Anjal dan Ancat)	Terselenggaranya pembinaan kesos bagi anak melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan penyelenggaraan event nasional bagi anak	Kota Mataram	250 Orang	73.700.000	82.544.000
1.06.01.01.16.13	Pembinaan Lanjut Usia (LU)	Terselenggaranya pembinaan terhadap lanjut usia terlantar baik melalui LKS maupun luar LKS dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar	Kota Mataram	100 Orang	53.400.000	59.808.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.01.16.14	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Paca	Terselenggaranya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas melalui bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	se-NTB	200 Orang	579.200.000	648.704.000
1.06.01.01.16.15	Pelayanan dan Rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan zat adektif lainnya	Kab. Bima, Kota Bima, Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	150 Orang	214.250.000	239.960.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.01.16.16	Peningkatan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	Meningkatnya keberfungsian sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan kelompok marginal lainnya melalui pelatihan keterampilan dan bantuan sarana usaha mikro dalam memenuhi kebutuhan dasar	se-NTB	200 Orang	691.650.000	774.648.000
1.06.01.01.18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta korban trauma yang dibina	Provinsi NTB	1,16%	1.078.700.000	1.208.144.000
1.06.01.01.18.04	Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	Terselenggaranya pendayagunaan penyandang disabilitas melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pelatihan keterampilan inklusif	Kab. Bima, Kota Bima, Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	200 Orang	1.078.700.000	1.208.144.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.01.21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga sosial yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Provinsi NTB	5,41%	1.048.850.000	1.174.712.000
1.06.01.01.21.01	Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Meningkatnya peran serta masyarakat,dunia usaha serta stakeholder dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif	Kota Mataram	100 %	93.500.000	104.720.000
1.06.01.01.21.02	Peningkatan jejaring kerja sama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Terlaksananya peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesos masyarakat melalui peningkatan kemampuan pengelolaan LKS	Kota Mataram	50/110 Lembaga/Jiwa	191.850.000	214.872.000
1.06.01.01.21.03	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM petugas pelayanan kesos masyarakat melalui pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Kota Mataram	150 Orang	191.600.000	214.592.000
1.06.01.01.21.04	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Meningkatnya lembaga kesos yang di berdayakan melalui pengembangan model dalam memberikan pelayanan sosial dasar lebih baik	Provinsi NTB	10 Lembaga	247.000.000	276.640.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.01.21.05	Pemberdayaan Karang Taruna	Meningkatnya penyelenggaraan kesos melalui pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS)	Kota Mataram	20 Lembaga	267.900.000	300.048.000
1.06.01.01.21.06	Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	Terlaksananya pemberdayaan kelambagaan sosial masyarakat melalui penyuluhan sosial	Kab. Bima, Kota Bima, Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	10 Lokasi	57.000.000	63.840.000
1.06.01.01.22	Program Jaminan Sosial	Persentase pemberian jaminan sosial bagi korban bencana sosial dan bencana alam	Provinsi NTB	2,61%	51.898.975.000	58.126.852.000
1.06.01.01.22.01	Jaminan sosial korban bencana alam	Terlaksananya kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bencana alam	Kota Mataram	10 Kab/Kota	1.204.100.000	1.348.592.000
1.06.01.01.22.02	Jaminan sosial korban bencana sosial	Terlaksananya kegiatan perlindungan dan jaminan sosial bencana sosial	Kota Mataram	10 Kab/Kota	743.875.000	833.140.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.01.22.03	Jaminan sosial keluarga	Terlaksananya perlindungan dan jaminan sosial keluarga penerima manfaat dengan baik	Kota Mataram	1000 Jiwa	49.951.000.000	55.945.120.000
1.06.01.02	Balai Sosial Bina Remaja Karya Mandiri				5.106.889.000	5.719.715.680
1.06.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran			331.724.000	371.530.880
1.06.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	2.098.000	2.349.760
1.06.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi , sumber daya air, listrik dan internet / faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas.	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	61.200.000	68.544.000
1.06.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	37.260.000	41.731.200
1.06.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan dan jasa tenaga kontrak/ cleaning service/ petugas kebersihan untuk mendukung pelaksanaan tugas.	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	68.723.200	76.969.984
1.06.01.02.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	6.500.000	7.280.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis untuk kebutuhan kantor	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	10.282.000	11.515.840
1.06.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan kantor/ dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	5.750.000	6.440.000
1.06.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	1.656.000	1.854.720
1.06.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas.	Luar Provinsi	1 Tahun	14.308.400	16.025.408
1.06.01.02.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	117.446.400	131.539.968
1.06.01.02.01.21	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Terlaksananya penyediaan alat listrik dan elektronik kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	6.500.000	7.280.000
1.06.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur			3.240.450.000	3.629.304.000
1.06.01.02.02.04	Pengadaan mobil jabatan	Terlaksananya pengadaan mobil jabatan pada UPTD/ Balai	Kab. Lombok Barat	1 Unit	250.650.000	280.728.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan meubelair pada balai	Kab. Lombok Barat	1 Paket	400.000.000	448.000.000
1.06.01.02.02.11	Pengadaan UPS/Stabiiizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terlaksananya pengadaan UPS/ Stabilizer , komputer, sound system dan alat elektronik lainnya untuk keperluan balai	Kab. Lombok Barat	1 Paket	51.800.000	58.016.000
1.06.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkaia kendaraan dinas/operasionai	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional kantor	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	38.000.000	42.560.000
1.06.01.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor pada Balai Sosial Bina Remaja "Karya Mandiri"	Kab. Lombok Barat	1 Paket	2.500.000.000	2.800.000.000
1.06.01.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			12.550.000	14.056.000
1.06.01.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Capaian atas laporan keuangan akhir tahun UPTD/ Balai	Kab. Lombok Barat	1 Dok	5.850.000	6.552.000
1.06.01.02.06.11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-UPTD/ Balai dan DPA-UPTD/ Balai	Kab. Lombok Barat	2 Dok	6.700.000	7.504.000
1.06.01.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan aset / barang milik daerah			10.400.000	11.648.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.02.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah	Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah yang ditingkatkan	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	10.400.000	11.648.000
1.06.01.02.17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang terbina.	Provinsi NTB	0,14%	1.511.765.000	1.693.176.800
1.06.01.02.17.02	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan keterampilan anak terlantar dalam balai	se-NTB	140 Orang	1.481.765.000	1.659.576.800
1.06.01.02.17.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap eks penerimaan pelayanan dan bimbingan keterampilan bagi anak terlantar	se-NTB	1 Tahun	30.000.000	33.600.000
1.06.01.03	Balai Sosial Karya Wanita Mirah Adi Mataram				4.019.614.000	4.501.967.680
1.06.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran			404.710.900	453.276.208
1.06.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 Bln	2.700.000	3.024.000
1.06.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet / faksimili untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 Bln	60.000.000	67.200.000
1.06.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 Bln	37.920.000	42.470.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa / tenaga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 Bln	99.930.000	111.921.600
1.06.01.03.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 Bln	15.000.000	16.800.000
1.06.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis untuk kebutuhan kantor/ dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 Bln	13.564.900	15.192.688
1.06.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan, Pengandaan dan Penjilidan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 Bln	7.000.000	7.840.000
1.06.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya instalasi listrik / penerangan bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 Bln	6.596.000	7.387.520
1.06.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 Bln	1.500.000	1.680.000
1.06.01.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 Bln	20.500.000	22.960.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.03.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 Bln	109.500.000	122.640.000
1.06.01.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten / kota untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	1 Thn	30.500.000	34.160.000
1.06.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur			2.289.134.000	2.563.830.080
1.06.01.03.02.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan meubelair untuk kebutuhan UPTD / Balai	Kota Mataram	11/1 Buah/Paket	227.544.000	254.849.280
1.06.01.03.02.11	Pengadaan UPS/Stabiizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terlaksananya pengadaan Laptop dan printer dan elektronik lainnya	Kota Mataram	2 unit / 1 Paket	20.000.000	22.400.000
1.06.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / operasional kantor	Kota Mataram	1 Thn	41.590.000	46.580.800
1.06.01.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor Balai Sosial Karya Wanita " Mirah Adi"	Kota Mataram	1 Paket	2.000.000.000	2.240.000.000
1.06.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			19.200.000	21.504.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya capaian atas laporan kinerja dan keuangan instansi pemerintah pada Balai Sosial karya Wanita "Mirah Adi"	Kota Mataram	1 Dokumen	6.450.000	7.224.000
1.06.01.03.06.11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA - UPTD / Balai dan DPA UPTD / Balai	Kota Mataram	2 Dokumen	12.750.000	14.280.000
1.06.01.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan aset / barang milik daerah			11.050.000	12.376.000
1.06.01.03.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah	Manajemen Asset / Barang Milik Daerah yang ditingkatkan	Kota Mataram	12 Bln	11.050.000	12.376.000
1.06.01.03.20	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase panti sosial yang menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Provinsi NTB	0,10%	1.295.519.100	1.450.981.392
1.06.01.03.20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Penyandang penyakit sosial yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pelayanan dalam Panti	Kota Mataram	100 Org	1.295.519.100	1.450.981.392
1.06.01.04	Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika				3.253.451.500	3.643.865.680

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Manajemen pengelolaan administrasi perkantoran			541.232.500	606.180.400
1.06.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 bulan	1.500.000	1.680.000
1.06.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 bulan	116.000.000	129.920.000
1.06.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 bulan	43.000.000	48.160.000
1.06.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa/tenaga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 bulan	95.504.000	106.964.480
1.06.01.04.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersediannya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 bulan	5.260.000	5.891.200
1.06.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya alat tulis untuk kebutuhan kantor / dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 bulan	11.470.000	12.846.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjiilidan kantor / dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 bulan	4.125.000	4.620.000
1.06.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 bulan	8.423.500	9.434.320
1.06.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 bulan	1.800.000	2.016.000
1.06.01.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 bulan	21.250.000	23.800.000
1.06.01.04.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 bulan	197.650.000	221.368.000
1.06.01.04.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersediannya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten / kota untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	1 Tahun	35.250.000	39.480.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur			1.231.374.000	1.379.138.880
1.06.01.04.02.04	Pengadaan Mobil Jabatan	Terlaksananya pengadaan mobil jabatan kepala balai	Kota Mataram	1 Tahun	260.000.000	291.200.000
1.06.01.04.02.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan meubelair pada Balai / UPTD (tempat tidur,kasur,bantal,guling,selimut,lemari pakaian dan jemuran) bertambah	Kota Mataram	1 Paket	200.000.000	224.000.000
1.06.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas / oprasional kantor	Kota Mataram	1 Tahun	36.424.000	40.794.880
1.06.01.04.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan / rehabilitasi gedung / bangunan kantor pada UPTD BSLU " Mandalika "	Kota Mataram	1 Paket	734.950.000	823.144.000
1.06.01.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya catatan atas laporan keuangan akhir tahun UPTD / Balai			14.700.000	16.464.000
1.06.01.04.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya catatan atas laporan keuangan akhir tahun UPTD/Balai	Kota Mataram	1 Dokumen	7.400.000	8.288.000
1.06.01.04.06.11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA - UPTD dan DPA - UPTD / Balai	Kota Mataram	2 Dokumen	7.300.000	8.176.000
1.06.01.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan aset / barang miilk daerah			9.600.000	10.752.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.04.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah	Terpenuhinya pengelolaan aset/barang milik daerah pada Balai	Kota Mataram	12 bulan	9.600.000	10.752.000
1.06.01.04.19	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Presentase lanjut usia yang tidak potensial yang diberikan pelayanan sosial dasar dalam balai	Provinsi NTB	0,20%	1.456.545.000	1.631.330.400
1.06.01.04.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Terlaksananya bimbingan dan pelayanan bagi para penghuni panti asuhan / jompo terlantar dalam panti	se-NTB	100 orang	1.456.545.000	1.631.330.400
1.06.01.05	Balai Sosial Perlindungan dan Petirahan Anak Sasambo Matupa				4.561.370.000	5.108.734.400
1.06.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Manajemen pengelolaan administrasi perkantoran			368.951.000	413.225.120
1.06.01.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	12 bln	3.900.000	4.368.000
1.06.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet/faksimili untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	12 bln	73.200.000	81.984.000
1.06.01.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	12 bln	36.660.000	41.059.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa/tenga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	12 bln	114.071.000	127.759.520
1.06.01.05.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	12 bln	5.000.000	5.600.000
1.06.01.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis untuk kebutuhan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	12 bln	8.569.000	9.597.280
1.06.01.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	12 bln	5.830.000	6.529.600
1.06.01.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listrik/perangan bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	12 bln	8.639.000	9.675.680
1.06.01.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	12 bln	2.000.000	2.240.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.05.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksanannya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	1 tahun	20.066.000	22.473.920
1.06.01.05.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksana tugas	Kab. Lombok Barat	12 bulan	65.950.000	73.864.000
1.06.01.05.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Barat	1 tahun	25.066.000	28.073.920
1.06.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur			2.816.740.000	3.154.748.800
1.06.01.05.02.02	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 (dua)	Kab. Lombok Barat	3 unit	36.350.000	40.712.000
1.06.01.05.02.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksanannya pengadaan meubelair untuk kebutuhan UPTD/Balai	Kab. Lombok Barat	1 paket	210.700.000	235.984.000
1.06.01.05.02.11	Pengadaan UPS/Stabiiizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terlaksanannya pengadaan komputer/pc unit, laptop dan printer untuk kebutuhan UPTD/balai	Kab. Lombok Barat	2 unit	21.350.000	23.912.000
1.06.01.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksanannya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor	Kab. Lombok Barat	5 unit	47.990.000	53.748.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.05.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Umur fungsional gedung/bangunan kantor BSPPSA "Sasambo Matupa" bertambah	Kab. Lombok Barat	1 paket	2.500.350.000	2.800.392.000
1.06.01.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya catatan atas laporan keuangan akhir tahun UPTD / Balai			11.320.000	12.678.400
1.06.01.05.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan akhir tahun (CALK) UPTD/Balai	Kab. Lombok Barat	1 Dokumen	4.300.000	4.816.000
1.06.01.05.06.11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Tersusunnya dokumen RKA dan DPA UPTD/Balai	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	7.020.000	7.862.400
1.06.01.05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan aset / barang milik daerah			11.200.000	12.544.000
1.06.01.05.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah	Manajemen Aset/Barang milik daerah yang ditingkatkan	Kab. Lombok Barat	12 bln	11.200.000	12.544.000
1.06.01.05.17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Presentase anak terlantar yang terbina	Provinsi NTB	0,56%	1.290.459.000	1.445.314.080
1.06.01.05.17.02	Peningkatan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar, bimbingan dan pelayanan kesos anak terlantar dalam balai	Kab. Lombok Barat	540 org	1.260.459.000	1.411.714.080
1.06.01.05.17.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap eks penerimaan pelayanan dan bimbingan ketrampilan bagi anak terlantar.	Kab. Lombok Barat	1 tahun	30.000.000	33.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.05.18	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Presentase penyandang cacat fisik dan mental serta korban trauma yang dibina	Provinsi NTB	100%	62.700.000	70.224.000
1.06.01.05.18.06	Perlindungan dan rehabilitasi dalam shelter home	Korban trauma yang diberikan perlindungan dan rehabilitasi	Kab. Lombok Barat	10 org	62.700.000	70.224.000
1.06.01.06	Balai Sosial Asuhan Anak Generasi Harapan				5.308.225.000	5.945.212.000
1.06.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Manajemen Pengelolaan Administrasi Perkantoran			394.685.000	442.047.200
1.06.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 Bulan	1.350.000	1.512.000
1.06.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	12 Bulan	71.000.000	79.520.000
1.06.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan	Kota Mataram	12 Bulan	37.110.000	41.563.200
1.06.01.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor dan bahan/peralatan kebersihan kantor yang terpenuhi	Kota Mataram	100 %	77.720.000	87.046.400
1.06.01.06.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja aparatur balai sosial yang diperbaiki	Kota Mataram	100 %	18.000.000	20.160.000
1.06.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan dinas/kantor	Kota Mataram	100 %	11.395.000	12.762.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan untuk kebutuhan kantor/dinas yang terpenuhi	Kota Mataram	100 %	6.500.000	7.280.000
1.06.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik dan elektronik lainnya yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan balai	Kota Mataram	100 %	7.420.000	8.310.400
1.06.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/media cetak dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang diadakan	Kota Mataram	100 %	2.040.000	2.284.800
1.06.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan/minum kantor untuk menunjang pelaksanaan tugas	Kota Mataram	100 %	4.000.000	4.480.000
1.06.01.06.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya penyelarasan program pemerintah daerah dengan pusat terhadap pelayanan bagi anak terlantar dalam balai	Kota Mataram	100 %	21.150.000	23.688.000
1.06.01.06.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	100 %	76.850.000	86.072.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.06.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	100 %	60.150.000	67.368.000
1.06.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur			2.946.200.000	3.299.744.000
1.06.01.06.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional pada UPTD untuk mendukung pelaksanaan tugas bertambah	Kota Mataram	3 Unit	41.450.000	46.424.000
1.06.01.06.02.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan akan meubelair [dipan/tempat tidur, kasur, lemari pakaian, meja belajar, kursi belajar besi]	Kota Mataram	1 Paket	200.150.000	224.168.000
1.06.01.06.02.11	Pengadaan UPS/Stabiiizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terpenuhinya kebutuhan akan Komputer, Printer dan Lap top untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	4/1 Unit/Paket	52.850.000	59.192.000
1.06.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Umur fungsional kendaraan dinas/operasional pada balai/UPTD bertambah	Kota Mataram	100 %	38.000.000	42.560.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.06.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Persentase umur fungsional gedung dan bangunan asrama/wisma dan lainnya bertambah dalam memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap penerima manfaat	Kota Mataram	1 Paket	2.613.750.000	2.927.400.000
1.06.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas sistimpelaporan capaian kinerja dan keuangan			17.000.000	19.040.000
1.06.01.06.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Dokumen laporan keuangan akhir tahun UPTD dapat disajikan secara sistematis dan akuntabel	Kota Mataram	1 Dokumen	5.200.000	5.824.000
1.06.01.06.06.11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen perencanaan dan penganggaran dapat disajikan secara akuntabel, transparan dan proporsional	Kota Mataram	2 Dokumen	11.800.000	13.216.000
1.06.01.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan asset/barang milik daerah			16.000.000	17.920.000
1.06.01.06.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah	Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah [BMD] yang ditingkatkan	Kota Mataram	100 %	16.000.000	17.920.000
1.06.01.06.17	Program Pembinaan Anak Terlantar	Prosentase anak terlantar yang terbina	Provinsi NTB	0,10%	1.934.340.000	2.166.460.800
1.06.01.06.17.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monev	se-NTB	10 Kali/Tahun	30.000.000	33.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.06.17.07	Peningkatan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar dan akses pendidikan formal 12 tahun dan informal bagi anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak terlantar dalam balai	Kota Mataram	100 Orang/Jiwa	1.904.340.000	2.132.860.800
1.06.01.07	Balai Sosial Bina Laras Mutmainnah				2.314.630.450	2.592.386.104
1.06.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Manajemen Pengelolaan Administrasi Perkantoran			246.993.950	276.633.224
1.06.01.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Tengah	12 bulan	2.600.000	2.912.000
1.06.01.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komonikasi,Sumber daya air,listrik dan internet/faksimil untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Tengah	12 bulan	90.000.000	100.800.000
1.06.01.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Tengah	12 bulan	37.920.000	42.470.400
1.06.01.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa/tenaga kontrak dan peralatan kebersihan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Tengah	12 bulan	32.674.500	36.595.440

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.07.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	6.000.000	6.720.000
1.06.01.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor untuk kebutuhan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Tengah	12 bulan	10.554.450	11.820.984
1.06.01.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan, penggandaan dan penjilidan kantor/dinas untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Tengah	12 bulan	1.845.000	2.066.400
1.06.01.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Tengah	12 bulan	2.760.000	3.091.200
1.06.01.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Tengah	12 bulan	2.640.000	2.956.800
1.06.01.07.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	16.000.000	17.920.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.07.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Tengah	12 OB	28.000.000	31.360.000
1.06.01.07.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Bima	1 tahun	16.000.000	17.920.000
1.06.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur			279.490.900	313.029.808
1.06.01.07.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 (dua)	Kab. Lombok Tengah	2 unit	40.000.000	44.800.000
1.06.01.07.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	Kab. Lombok Tengah	1 paket	32.000.000	35.840.000
1.06.01.07.02.11	Pengadaan UPS/Stabiiizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terlaksananya pengadaan UPS/stabilizer, komputer, sound system, LCD dan alat elektronik lainnya	Kab. Lombok Tengah	11 paket	30.000.000	33.600.000
1.06.01.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung/bangunan kantor Balai Bina Laras "Muthmainnah"	Kab. Lombok Tengah	1 paket	150.000.000	168.000.000
1.06.01.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional kantor	Kab. Lombok Tengah	4 unit	27.490.900	30.789.808

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumberdaya aparatur			19.520.000	21.862.400
1.06.01.07.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya catatan atas laporancapaian kinerja dan keuangan akhir tahun UPTD/Balai	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	8.000.000	8.960.000
1.06.01.07.06.11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA-UPTD/Balai dan DPA-UOTD/Balai tersusun	Kab. Lombok Tengah	2 Dokumen	11.520.000	12.902.400
1.06.01.07.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			11.436.000	12.808.320
1.06.01.07.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah	Manajemen Asset / Barang Milik Daerah	Kab. Lombok Tengah	12 OB	11.436.000	12.808.320
1.06.01.07.20	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase balai yang menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial (eks PSK, Gepeng, dan penyakit sosial lainnya)	Provinsi NTB	25%	1.757.189.600	1.968.052.352
1.06.01.07.20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Penyandang Penyakit Sosial ODGJ(Orang Dengan Gangguan Jiwa) yang diberikan rehabilitasi/pemulihan dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pelayanan dalam Balai	Kab. Lombok Tengah	100 orang	1.757.189.600	1.968.052.352
1.06.01.08	Balai Sosial Bina Karya Madani				4.904.243.000	5.492.752.160

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Manajemen pengelolaan administrasi perkantoran			349.793.000	391.768.160
1.06.01.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat untuk kebutuhan kantor yang terselesaikan	Kab. Lombok Timur	100 %	1.390.000	1.556.800
1.06.01.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah beban komunikasi/telepon,sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan kantor yang terpenuhi	Kab. Lombok Timur	100 %	30.000.000	33.600.000
1.06.01.08.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan OPD/UPTD yang dibayarkan	Kab. Lombok Timur	100 %	37.800.000	42.336.000
1.06.01.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor dan bahan/peralatan kebersihan kantor yang terpenuhi	Kab. Lombok Timur	100 %	71.765.000	80.376.800
1.06.01.08.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja aparatur balai sosial yang diperbaiki	Kab. Lombok Timur	100 %	5.000.000	5.600.000
1.06.01.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan dinas/kantor	Kab. Lombok Timur	100 %	12.020.000	13.462.400
1.06.01.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan untuk kebutuhan kantor/dinas yang terpenuhi	Kab. Lombok Timur	100 %	8.283.000	9.276.960

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik, instalasi listrik dan komponen penerangan lainnya untuk kebutuhan Balai Sosial terpenuhi	Kab. Lombok Timur	100 %	10.075.000	11.284.000
1.06.01.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/media cetak dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang diadakan	Kab. Lombok Timur	100 %	960	1.075.200
1.06.01.08.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas	Luar Provinsi	100 %	16.100.000	18.032.000
1.06.01.08.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kab. Lombok Timur	100 %	131.400.000	147.168.000
1.06.01.08.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas	se-NTB	100 %	25.000.000	28.000.000
1.06.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur			2.884.900.000	3.231.088.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.08.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan asrama klayon Balai Sosial Bina Karya " Madani ", pembangunan talud halaman, urugan tanah, perluasan jalan dan talud pagar dan sejenisnya	Kab. Lombok Timur	4 Paket	2.642.000.000	2.959.040.000
1.06.01.08.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair pada balai sosial bertambah	Kab. Lombok Timur	3 Paket	177.650.000	198.968.000
1.06.01.08.02.11	Pengadaan UPS/Stabiliizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terlaksananya pengadaan UPS/stabilizer, laptop,PC/komputer, printer dan alat eletronik lainnya untuk kebutuhan kantor	Kab. Lombok Timur	2 Paket	27.250.000	30.520.000
1.06.01.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Umur fungsional kendaraan dinas/operasional kantor bertambah	Kab. Lombok Timur	100 %	38.000.000	42.560.000
1.06.01.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			15.600.000	17.472.000
1.06.01.08.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD (CALK-UPTD)	Kab. Lombok Timur	1 Dokumen	5.400.000	6.048.000
1.06.01.08.06.11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Dokumen RKA/RKAP-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD tersusun	Kab. Lombok Timur	1 Dokumen	10.200.000	11.424.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.08.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan aset/ barang milik daerah			11.200.000	12.544.000
1.06.01.08.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah	Manajemen Asset / Barang Milik Daerah	Kab. Lombok Timur	100 %	11.200.000	12.544.000
1.06.01.08.20	Program Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Persentase balai sosial yang menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Provinsi NTB	0,41%	1.642.750.000	1.839.880.000
1.06.01.08.20.04	Pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial	Jumlah penyandang penyakit sosial yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar melalui pelayanan dalam Balai	Kab. Lombok Timur	100 Orang	1.617.750.000	1.811.880.000
1.06.01.08.20.05	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial	se-NTB	100 %	25.000.000	28.000.000
1.06.01.09	Balai Sosial Lanjut Usia "Meci Angi " Bima				2.307.510.000	2.584.411.200
1.06.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Manajemen Administrasi Perkantoran			490.510.000	549.371.200
1.06.01.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah jasa surat menyurat untuk kebutuhan kantor yang terselesaikan	Kota Bima	100 %	2.000.000	2.240.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah beban komunikasi/telepon,sumber daya air dan listrik untuk kebutuhan kantor yang terpenuhi	Kota Bima	100 %	59.000.000	66.080.000
1.06.01.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah tenaga pengelola keuangan OPD yang dibayarkan	Kota Bima	100 %	37.880.000	42.425.600
1.06.01.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor dan bahan/peralatan kebersihan kantor yang terpenuhi	Kota Bima	100 %	53.425.000	59.836.000
1.06.01.09.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja aparatur balai sosial yang diperbaiki	Kota Bima	100 %	18.000.000	20.160.000
1.06.01.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan dinas	Kota Bima	100 %	48.070.000	53.838.400
1.06.01.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan untuk kebutuhan kantor/dinas yang terpenuhi	Kota Bima	100 %	7.865.000	8.808.800
1.06.01.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/media cetak dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang diadakan	Kota Bima	100 %	1.920.000	2.150.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.09.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya penyelarasan program pusat dengan daerah untuk mendukung pelaksanaan tugas	Luar Provinsi	100 %	21.000.000	23.520.000
1.06.01.09.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersediannya tenaga administrasi dan teknis perkantoran untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Bima	100 %	153.300.000	171.696.000
1.06.01.09.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelarasan program provinsi dengan kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan tugas	se-NTB	100 %	80.150.000	89.768.000
1.06.01.09.01.21	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Jumlah alat listrik dan elektronik lainnya yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan balai	Kota Bima	100 %	7.900.000	8.848.000
1.06.01.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur			821.950.000	920.584.000
1.06.01.09.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional balai yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Bima	3 Unit	40.000.000	44.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.09.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang diadakan untuk mendukung pelaksanaan tugas	Kota Mataram	1 Paket	42.650.000	47.768.000
1.06.01.09.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Jumlah komputer, laptop dan alat elektronik bertambah untuk menunjang pelaksanaan tugas aparatur	Kota Bima	1/2 Paket/Unit	20.300.000	22.736.000
1.06.01.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Umur fungsional gedung/bangunan kantor bertambah	Kota Bima	100 %	50.000.000	56.000.000
1.06.01.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Umur fungsional kendaraan dinas/operasional balai bertambah	Kota Bima	100 %	56.500.000	63.280.000
1.06.01.09.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Umur fungsional gedung/bangunan kantor lainnya bertambah	Kota Bima	100 %	612.500.000	686.000.000
1.06.01.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			17.400.000	19.488.000
1.06.01.09.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun/CALK yang tersusun	Kota Bima	1 Dokumen	5.600.000	6.272.000
1.06.01.09.06.11	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang disusun	Kota Bima	2 Dokumen	11.800.000	13.216.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
1.06.01.09.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan aset/ barang milik daerah			26.250.000	29.400.000
1.06.01.09.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/ Barang Milik Daerah	Persentase Nilai asset/barang milik daerah yang ditata dan dikelola	Kota Bima	100 %	26.250.000	29.400.000
1.06.01.09.19	Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	Persentase lanjut usia yang tidak potensial yang diberikan pelayanan sosial dasar dalam balai	Provinsi NTB	0,10%	951.400.000	1.065.568.000
1.06.01.09.19.04	Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	Persentase lanjut usia yang tidak potensial yang diberikan pelayanan sosial dasar dalam balai	Kota Bima	50 Orang	951.400.000	1.065.568.000
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				339.761.873.119	380.533.297.893
2,01	TENAGA KERJA				27.116.776.031	30.370.789.155
2.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				27.116.776.031	30.370.789.155
2.01.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (induk)				13.181.645.195	14.763.442.618
2.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.168.467.250	1.308.683.320
2.01.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Mataram	12 Bulan	1.200.000	1.344.000
2.01.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunokasi sumberdaya Air dan Listrik	Kota Mataram	12 bulan	238.900.000	267.568.000
2.01.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kota Mataram	12 bulan	87.500.000	98.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Provinsi NTB	12 bulan	90.873.000	101.777.760
2.01.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Provinsi NTB	1 Tahun	399.912.800	447.902.336
2.01.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Mataram	12 bulan	24.433.200	27.365.184
2.01.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Provinsi NTB	12 Bulan	42.253.750	47.324.200
2.01.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Provinsi NTB	12 Bulan	19.221.500	21.528.080
2.01.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Mataram	12 Bulan	24.640.000	27.596.800
2.01.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya Penyediaan makan dan minuman	Kota Mataram	12 Bulan	18.000.000	20.160.000
2.01.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Luar Provinsi	12 Bulan	50.434.000	56.486.080
2.01.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantora	Kota Mataram	12 Bulan	105.700.000	118.384.000
2.01.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	se-NTB	12 Bulan	50.399.000	56.446.880

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.01.01.22	Penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakaran	Terlaksananya Penyediaan jasa pengisian tabung pemadam kebakarn	Kota Mataram	12 Bulan	15.000.000	16.800.000
2.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3.630.178.000	4.065.799.360
2.01.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor	Kota Mataram	4 Paket	2.929.000.000	3.280.480.000
2.01.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	25 Unit	387.400.000	433.888.000
2.01.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya Pengadaan mebeleur	Kota Mataram	4 Paket	50.650.000	56.728.000
2.01.01.01.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	2 Paket	48.485.000	54.303.200
2.01.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Mataram	12 Bulan	18.250.000	20.440.000
2.01.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	12 Bulan	134.693.000	150.856.160
2.01.01.01.02.30	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	12 Bulan	54.700.000	61.264.000
2.01.01.01.02.38	Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Terlaksananya Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Kota Mataram	12 Bulan	7.000.000	7.840.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			15.200.000	17.024.000
2.01.01.01.03.01	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya Pembinaan mental dan fisik aparatur	Provinsi NTB	12 Bulan	15.200.000	17.024.000
2.01.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			30.289.000	33.923.680
2.01.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	Kota Mataram	12 Bulan	30.289.000	33.923.680
2.01.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Prgoram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			352.171.700	394.432.304
2.01.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Mataram	142 Buku	68.624.000	76.858.880
2.01.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Mataram	37 Buku	39.087.800	43.778.336
2.01.01.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Renca Kerja SKPD	Kota Mataram	40 Buku	44.141.500	49.438.480
2.01.01.01.06.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	se-NTB	1 Kegiatan	26.731.000	29.938.720
2.01.01.01.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Kota Mataram	12 Bulan	173.587.400	194.417.888

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			45.033.200	50.437.184
2.01.01.01.07.01	Peningkatan Manajemen Aset /Milik Daerah	Terlaksananya Peningkatan Manajemen Aset/Milik Daerah	Kota Mataram	1 Kegiatan	45.033.200	50.437.184
2.01.01.01.08	Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan	Terlaksananya Program Peningkatan Perencanaan dan Pelaporan			679.907.000	761.495.840
2.01.01.01.08.11	Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan	Kota Mataram	70 Orang	137.358.600	153.841.632
2.01.01.01.08.12	Pengendalian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Terlaksananya Pengendalian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Kota Mataram	70 Orang	94.920.300	106.310.736
2.01.01.01.08.13	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	Kota Mataram	25 Buku	89.589.700	100.340.464
2.01.01.01.08.14	Penyusunan Buku Data Ketenagakerjaan	Terlaksananya Penyusunan Profil Ketenagakerjaan	Kota Mataram	25 Buku	17.695.500	19.818.960
2.01.01.01.08.15	Penyusunan buku data perkembangan dan kesejahteraan transmigran di UPT Bina	Terlaksananya Penyusunan profil UPT Bina	Kota Mataram	3 UPT	25.877.000	28.982.240
2.01.01.01.08.16	Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KOPTRANS)	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi (KOPTRANS)	Kota Mataram	2 Laporan	112.457.400	125.952.288
2.01.01.01.08.17	Musyawarah Rencana Pembangunan Ketenagakerjaan di NTB (Rembug Ketenagakerjaan)	Terlaksananya Musyawarah Rencana Pembangunan Ketenagakerjaan di NTB (Rembug Ketenagakerjaan)	Kota Mataram	2 Laporan	142.658.000	159.776.960

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.01.08.18	Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)	Terlaksananya Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)	Kota Mataram	1 Kegiatan	59.350.500	66.472.560
2.01.01.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Komptensi Tenaga Kerja	Provinsi NTB	85%	1.398.316.101	1.566.114.033
2.01.01.01.15.02	Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK)	Terlaksananya Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja (KA-LPK)	se-NTB	45 Lembaga	155.228.100	173.855.472
2.01.01.01.15.05	Expo Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Expo Pemagangan Dalam dan Luar Negeri	Provinsi NTB	350 Orang	44.524.000	49.866.880
2.01.01.01.15.07	Pemberdayaan Lembaga Pelatihan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Pelatihan	Provinsi NTB	100 Lembaga	54.553.601	61.100.033
2.01.01.01.15.08	Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri	Terlaksananya Pelatihan Dasar Pemagangan Luar Negeri	Provinsi NTB	65 Orang	432.213.700	484.079.344
2.01.01.01.15.13	Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri	Terlaksananya Rekrutmen dan Seleksi Pemagangan Luar Negeri	Provinsi NTB	200 Orang	89.297.600	100.013.312
2.01.01.01.15.15	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kepelatihan	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Kepelatihan	Provinsi NTB	20 Orang	82.434.400	92.326.528
2.01.01.01.15.21	Pelatihan Kewirausahaan Produktif	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Produktivitas	Kab. Lombok Barat, Kab. Dompu	50 Orang	157.199.700	176.063.664
2.01.01.01.15.23	Penyuluhan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Penyuluhan Produktivitas Tenaga Kerja	se-NTB	200 Orang	108.549.700	121.575.664
2.01.01.01.15.24	Penerapan 5 S	Terlaksananya Penerapan 5S	Kota Mataram, Kab. Lombok Timur	4 Perusahaan	156.121.300	174.855.856

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.01.15.25	Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	Terlaksananya Identifikasi Kebutuhan Pelatihan	se-NTB	10 Instansi	33.213.000	37.198.560
2.01.01.01.15.26	Sosialisasi Asean Skill Competition (ASC) 2019	Terlaksananya Sosialisasi Asean Skill Competition (ASC) 2019	se-NTB	100 Orang	84.981.000	95.178.720
2.01.01.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Terbentuknya Sarana HI, PJS, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI	Provinsi NTB	90%	333.906.444	373.975.217
2.01.01.01.17.10	Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Peningkatan Efektivitas Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit	se-NTB	10 Kab/Kota	89.616.300	100.370.256
2.01.01.01.17.11	Pemberdayaan Ketenagakerjaan Pada Peringatan Hari Buruh Internasional	Terlaksananya Pemberdayaan Ketenagakerjaan Pada Peringatan Hari Buruh Internasional	Provinsi NTB	250 Orang	99.440.000	111.372.800
2.01.01.01.17.12	Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pengupahan Daerah	Provinsi NTB	14 Naskah	50.135.700	56.151.984
2.01.01.01.17.13	Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Perusahaan	Provinsi NTB	60 Perusahaan	50.580.444	56.650.097
2.01.01.01.17.14	Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan Yang sama dalam Pekerjaan Tahun 2018	Terlaksananya Gugus Tugas Kesempatan dan Perlakuan Yang sama dalam Pekerjaan Tahun 2018	Provinsi NTB	50 Perusahaan	44.134.000	49.430.080

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.01.18	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Penerapan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	Provinsi NTB	70 %	301.789.400	338.004.128
2.01.01.01.18.01	Peningkatan Pemahaman Sumberdaya Manusia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SDM K3) Dalam rangka bulan K3	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman Sumberdaya Manusia Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SDM K3) Dalam Rangka Bulan K3	se-NTB	200 Perusahaan	47.443.500	53.136.720
2.01.01.01.18.02	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	se-NTB	50 Perusahaan	71.690.500	80.293.360
2.01.01.01.18.03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	se-NTB	50 Perusahaan	67.152.000	75.210.240
2.01.01.01.18.04	Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Tempat Penampungan CTKI	Terlaksananya Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Tempat Penampungan CTKI	Luar Provinsi	4 Provinsi	40.872.300	45.776.976
2.01.01.01.18.05	Pembinaan dan Pengawasan sarana keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Perusahaan / Gudang Tembakau di NTB	Terlaksananya Pengawasan dan Pengujian Sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja K3 di Perusahaan Rokok dan Tembakau	se-NTB	25 Perusahaan	29.201.000	32.705.120
2.01.01.01.18.08	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan / Gudang Tembakau di NTB	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan Rokok dan Tembakau	se-NTB	25 Perusahaan	45.430.100	50.881.712

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.01.19	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Persentase daya serap tenaga kerja	Provinsi NTB	95%	5.226.387.100	5.853.553.552
2.01.01.01.19.04	Penanganan TKI Bermasalah	Jumlah Penanganan TKI Bermasalah	Provinsi NTB	2700 Orang	413.865.400	463.529.248
2.01.01.01.19.06	Layanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang terlayani melalui Layanan Terpadu Satu Pintu	Provinsi NTB	2400 Orang	397.414.000	445.103.680
2.01.01.01.19.07	Terapan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Alat TTG yang dibuat	Provinsi NTB	4 Kegiatan	352.253.200	394.523.584
2.01.01.01.19.10	Pelayanan Perizinan Tenaga Kerja Asing	Terlaksananya Perizinan Tenaga Kerja Asing	Kab. Lombok Tengah, Provinsi NTB	300 Orang	135.014.000	151.215.680
2.01.01.01.19.17	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Eks TKI/Migran	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Eks TKI/Migran	Kab. Lombok Tengah, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	200 Orang	358.306.400	401.303.168
2.01.01.01.19.18	Padat Karya Produktif	Terlaksananya Padat Karya Produktif	se-NTB	10 Lokasi	1.579.235.600	1.768.743.872
2.01.01.01.19.20	Informasi Pasar Kerja (Job Fair)	Terlaksananya Informasi Pasar Kerja (Job fair)	se-NTB	5 Kegiatan	795.231.000	890.658.720
2.01.01.01.19.22	Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	Terlaksananya Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri	se-NTB	200 Orang	742.060.000	831.107.200
2.01.01.01.19.23	Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara	Terlaksananya Peluang Kerja Melalui Antar Kerja Antar Daerah dan Antar Kerja Antar Negara	Kab. Lombok Tengah, Provinsi NTB	750 Orang	453.007.500	507.368.400
2.01.01.02	Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi				2.191.221.400	2.454.167.968

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			305.438.600	342.091.232
2.01.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat Menyurat Tersedia	Kota Mataram	1 Tahun	1.500.000	1.680.000
2.01.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tersedia	Kota Mataram	1 Tahun	37.375.000	41.860.000
2.01.01.02.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Tersedia	Kota Mataram	1 Tahun	18.010.500	20.171.760
2.01.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Administrasi Keuangan Yang Tersedia	Kota Mataram	1 Tahun	37.056.000	41.502.720
2.01.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Penyedia Kebersihan Kantor Tersedia	Kota Mataram	100 %	93.398.800	104.606.656
2.01.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	10.237.800	11.466.336
2.01.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Kegiatan Penggandaan	Kota Mataram	1 Tahun	4.950.000	5.544.000
2.01.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sarana Instalasi Listrik Yang Terpasang	Kota Mataram	1 Tahun	5.165.500	5.785.360
2.01.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia	Kota Mataram	1 Tahun	4.360.000	4.883.200
2.01.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan dan Minum Yang Disediakan	Kota Mataram	1 Tahun	5.385.000	6.031.200
2.01.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Hasil Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Mataram	1 Tahun	70.000.000	78.400.000
2.01.01.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Hasil Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	Kota Mataram	1 Tahun	18.000.000	20.160.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.853.438.100	2.075.850.672
2.01.01.02.02.03	Pembangunan gedung kantor	Gedung Kantor Yang Dibangun	Kota Mataram	1 Unit	1.423.638.100	1.594.474.672
2.01.01.02.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	1 Paket	372.700.000	417.424.000
2.01.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor Yang Dipelihara	Kota Mataram	1 Tahun	50.700.000	56.784.000
2.01.01.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Kantor Yang Dipelihara	Kota Mataram	1 Tahun	6.400.000	7.168.000
2.01.01.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur			6.000.000	6.720.000
2.01.01.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terbinanya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Luar Provinsi	1 Tahun	6.000.000	6.720.000
2.01.01.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			17.148.700	19.206.544
2.01.01.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Tahunan Keuangan SKPD	Kota Mataram	30 Buku	5.938.000	6.650.560
2.01.01.02.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD terlaksana	Kota Mataram	30 Buku	11.210.700	12.555.984
2.01.01.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			9.196.000	10.299.520
2.01.01.02.07.01	Peningkatan Manajemen Aset /Milik Daerah	Peningkatan Asset/Barang Milik Daerah terlaksana	Kota Mataram	1 Tahun	9.196.000	10.299.520
2.01.01.03	Balai Latihan Kerja NTB				5.757.733.197	6.448.661.181

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			603.870.200	676.334.624
2.01.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat Menyurat Tersedia	Luar Provinsi	12 Bulan	1.900.000	2.128.000
2.01.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Layanan Jasa Komunikasi dan Listrik	Kota Mataram	12 Bulan	103.000.000	115.360.000
2.01.01.03.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Secara Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kota Mataram	12 Bula	75.050.000	84.056.000
2.01.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya Jasa Pengelola Administrasi Keuangan	Kota Mataram	12 Bulan	57.260.000	64.131.200
2.01.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan dan Bahan Kebersihan Kantor dan Jasa Petugas Kebersihan	Kota Mataram	12 Bulan	268.582.700	300.812.624
2.01.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Mataram	12 Bulan	8.753.700	9.804.144
2.01.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Mataram	12 Bulan	9.190.400	10.293.248
2.01.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Penerangan Kantor	Kota Mataram	12 Bulan	9.701.000	10.865.120
2.01.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan	Kota Mataram	12 Bulan	4.880.000	5.465.600
2.01.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Kota Mataram	12 Bulan	15.000.000	16.800.000
2.01.01.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Luar Provinsi	12 Bulan	35.276.200	39.509.344

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota	se-NTB	12 Bulan	15.276.200	17.109.344
2.01.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.288.790.000	2.563.444.800
2.01.01.03.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya Gedung Kantor	Kota Mataram	1 unit	1.672.990.000	1.873.748.800
2.01.01.03.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	29 buah	166.000.000	185.920.000
2.01.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor/Workshop Secara Rutin dan Berkala	Kota Mataram	1 Tahun	50.000.000	56.000.000
2.01.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	49.800.000	55.776.000
2.01.01.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Tersedianya Sarana Gedung Kantor dan Workshop Dengan Baik	Kota Mataram	2 Paket	350.000.000	392.000.000
2.01.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			35.000.000	39.200.000
2.01.01.03.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terbinanya Pendidikan dan Pelatihan Formal	Kota Mataram	12 Bulan	35.000.000	39.200.000
2.01.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			28.670.900	32.111.408
2.01.01.03.06.04	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Akhir Tahun Dengan Baik	Kota Mataram	12 Bulan	7.277.100	8.150.352

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.03.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD dengan Baik dan Akurat	Kota Mataram	12 Bulan	21.393.800	23.961.056
2.01.01.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			21.666.600	24.266.592
2.01.01.03.07.01	Peningkatan Manajemen Aset /Milik Daerah	Tersusunnya Laporan aset BMD dengan Baik dan Benar	Kota Mataram	12 Bulan	21.666.600	24.266.592
2.01.01.03.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Komptensi Tenaga Kerja	Provinsi NTB	85%	2.779.735.497	3.113.303.757
2.01.01.03.15.03	Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Tersedianya Peralatan Pendidikan dan Keterampilan Untuk Menunjang Pelatihan	Kota Mataram	12 Bulan	1.353.759.800	1.516.210.976
2.01.01.03.15.12	Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi Bagi Pencari Kerja	Kota Mataram	272 orang	1.407.011.397	1.575.852.765
2.01.01.03.15.18	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Peserta Pelatihan	Kota Mataram	12 Bulan	18.964.300	21.240.016
2.01.01.04	Balai Hygene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja				746.866.619	836.490.613
2.01.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			235.101.744	263.313.953
2.01.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Surat Menyurat Tersedia	Kota Mataram	12 Bulan	1.850.000	2.072.000
2.01.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa Fasilitas Kantor Terbayar	Kota Mataram	36 Rek/ Bulan	18.500.000	20.720.000
2.01.01.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kota Mataram	2 unit	26.750.000	29.960.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa Administrasi Keuangan Tersedia	Kota Mataram	60 OB	47.161.500	52.820.880
2.01.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Perlengkapan dan Jasa Kebersihan Kantor Tersedia	Kota Mataram	36 OB	68.664.700	76.904.464
2.01.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor Tersedia	Kota Mataram	3 Kali	5.804.600	6.501.152
2.01.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan Kantor Tersedia	Kota Mataram	12 Bulan	14.830.000	16.609.600
2.01.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedia	Kota Mataram	12 Paket	1.440.000	1.612.800
2.01.01.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan Makan Minum Kantor Tersedia	Kota Mataram	80 OH	7.500.000	8.400.000
2.01.01.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Terlaksana	Kota Mataram	6 Kali	19.642.000	21.999.040
2.01.01.04.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Konsultasi Terlaksana	Kota Mataram	10 Kab/Kota	22.958.944	25.714.017
2.01.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			310.178.400	347.399.808
2.01.01.04.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Tersedia	Kota Mataram	1 Paket	215.402.400	241.250.688
2.01.01.04.02.30	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Terlaksana	Kota Mataram	2 Keg	94.776.000	106.149.120
2.01.01.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			18.271.000	20.463.520
2.01.01.04.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pengembangan dan Kompetensi SDM Terlaksana	Kota Mataram	20 Orang	18.271.000	20.463.520

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Prgram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			14.492.975	16.232.132
2.01.01.04.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Terlaksana	Kota Mataram	25 Buku/Tahun	4.816.825	5.394.844
2.01.01.04.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Terlaksana	Kota Mataram	48 Buku/Tahun	9.676.150	10.837.288
2.01.01.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			22.772.000	25.504.640
2.01.01.04.07.01	Peningkatan Manajemen Aset /Milik Daerah	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah Terlaksana	Kota Mataram	12 OB	22.772.000	25.504.640
2.01.01.04.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Terbentuknya Sarana HI, PJS, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan HI	Provinsi NTB	90%	146.050.500	163.576.560
2.01.01.04.17.09	Pembinaan Lingkungan Sosial dan Pengujian Kesehatan Kerja	Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Terlaksana	Kota Mataram	300 Org/4 Kab/Kota	146.050.500	163.576.560
2.01.01.06	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Lombok				1.317.190.900	1.475.253.808
2.01.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			300.509.900	336.571.088
2.01.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa surat menyurat	Kota Mataram	12 Bulan	900	1.008.000
2.01.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	Kota Mataram	12 bulan	18.000.000	20.160.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.06.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional tersedia	Kota Mataram	12 Bulan	25.580.000	28.649.600
2.01.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Administrasi Keuangan Yang Tersedia	Kota Mataram	12 Bulan	47.192.000	52.855.040
2.01.01.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Jasa Kebersihaan Kantor Tersedia	Kota Mataram	12 Bulan	93.361.000	104.564.320
2.01.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Mataram	12 Bulan	7.465.900	8.361.808
2.01.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Mataram	12 Bulan	4.500.000	5.040.000
2.01.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersarananya instalasi listrik yang terpasang	Kota Mataram	12 Bulan	4.555.000	5.101.600
2.01.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kota Mataram	12 Bulan	1.440.000	1.612.800
2.01.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Mataram	12 Bulan	12.000.000	13.440.000
2.01.01.06.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Mataram	12 Bulan	50.258.000	56.288.960
2.01.01.06.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Hasil Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	Kota Mataram	12 Bulan	35.258.000	39.488.960
2.01.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			253.950.000	284.424.000
2.01.01.06.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	195.500.000	218.960.000
2.01.01.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor	Kota Mataram	12 bulan	50.000.000	56.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.06.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	12 bulan	8.450.000	9.464.000
2.01.01.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			30.000.000	33.600.000
2.01.01.06.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	Kota Mataram	12 Bulan	30.000.000	33.600.000
2.01.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Prgoram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			19.188.500	21.491.120
2.01.01.06.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksananya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Mataram	40 Buku	8.048.000	9.013.760
2.01.01.06.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya laporan penyusunan rencana kerja	Kota Mataram	45 Buku	11.140.500	12.477.360
2.01.01.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			20.559.500	23.026.640
2.01.01.06.07.01	Peningkatan Manajemen Aset /Milik Daerah	Terlaksananya Peningkatan Manajemen Aset / Milik Daerah	Kota Mataram	35 Buku	20.559.500	23.026.640
2.01.01.06.18	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Penerapan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	Provinsi NTB	70 %	692.983.000	776.140.960
2.01.01.06.18.06	Pendataan Obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pendataan Obyek Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Kota Mataram	100 Perusahaan	57.238.100	64.106.672

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.06.18.07	Pengawasan dan Pemeriksaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya pengawasan dan pemeriksaan norma kerja di perusahaan	Kota Mataram	80 Perusahaan	57.653.500	64.571.920
2.01.01.06.18.09	Pemeriksaan dan Pengujian K3	Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengujian	Kota Mataram	35 Perusahaan	66.079.000	74.008.480
2.01.01.06.18.10	Penanganan Kasus Ketenagakerjaan	Terlaksananya penanganan kasus ketenagakerjaan	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	55 Kasus	43.466.500	48.682.480
2.01.01.06.18.11	Pemeriksaan CTKI Ke Tempat Penampungan	Terlaksananya Pemeriksaan CTKI ke Penampungan	Luar Provinsi	3 Lokasi	46.144.500	51.681.840
2.01.01.06.18.12	Pengurangan Pekerja Anak	Terlaksananya Pengurangan Pekerja Anak	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	520 Anak	322.198.400	360.862.208

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.06.18.13	Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan	Terlaksananya Sosialisasi Norma Ketenagakerjaan	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	30 Tenaga Kerja	53.889.000	60.355.680
2.01.01.06.18.18	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengawasan ketenagakerjaan	Kota Mataram	150 Perusahaan	46.314.000	51.871.680
2.01.01.07	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Pulau Sumbawa				3.922.118.720	4.392.772.966
2.01.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran			319.336.720	357.657.126
2.01.01.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Sumbawa	12 Bulan	1.650.000	1.848.000
2.01.01.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Dana Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sumbawa	12 bulan	30.000.000	33.600.000
2.01.01.07.01.03	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Tersedianya alat listrik dan elektronik	Kab. Sumbawa	12 bulan	4.859.200	5.442.304
2.01.01.07.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kab. Sumbawa	1 tahun	29.500.000	33.040.000
2.01.01.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kab. Sumbawa	1 tahun	52.122.300	58.376.976
2.01.01.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Sumbawa	12 bulan	91.399.120	102.367.014

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Sumbawa	12 bulan	6.721.600	7.528.192
2.01.01.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Sumbawa	12 bulan	9.204.500	10.309.040
2.01.01.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan	Kab. Sumbawa	12 bulan	2.880.000	3.225.600
2.01.01.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kegiatan rapat dan kegiatan imtaq	Kab. Sumbawa	12 bulan	11.000.000	12.320.000
2.01.01.07.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tersedianya dana penyelarasan program Pusat dan Daerah	Kab. Sumbawa	12 bulan	40.000.000	44.800.000
2.01.01.07.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya Dana Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kab. Sumbawa	12 bulan	40.000.000	44.800.000
2.01.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			3.418.955.000	3.829.229.600
2.01.01.07.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya bangunan gedung	Kab. Sumbawa	1 paket	2.501.890.000	2.802.116.800
2.01.01.07.02.10	Pengadaan mebeleur	Sersedianya mebeleur	Kab. Sumbawa	2 paket	77.000.000	86.240.000
2.01.01.07.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumbawa	1 Paket	659.065.000	738.152.800
2.01.01.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tepeliharanya gedung kantor	Kab. Sumbawa	1 paket	175.000.000	196.000.000
2.01.01.07.02.30	Pemeliharaan rutin/berkaia peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Sumbawa	1 paket	6.000.000	6.720.000
2.01.01.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			20.000.000	22.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.07.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Tersedianya SDM yang handal	Kab. Sumbawa	12 bulan	20.000.000	22.400.000
2.01.01.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Prgoram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			11.319.300	12.677.616
2.01.01.07.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Kab. Sumbawa	12 bulan	3.391.300	3.798.256
2.01.01.07.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan	Kab. Sumbawa	12 bulan	3.936.700	4.409.104
2.01.01.07.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Rencana Kerja	Kab. Sumbawa	12 bulan	3.991.300	4.470.256
2.01.01.07.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah			16.916.300	18.946.256
2.01.01.07.07.01	Peningkatan Manajemen Aset /Milik Daerah	Tersedianya Manajemen Aset/Milik Daerah	Kab. Sumbawa	12 bulan	16.916.300	18.946.256
2.01.01.07.18	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase Penerapan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan	Provinsi NTB	70 %	135.591.400	151.862.368
2.01.01.07.18.02	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	Terlaksananya Pembinaan Pengawasan Norma Ketenagakerjaan di Tempat Kerja	Kab. Sumbawa	60 perusahaan	20.144.200	22.561.504
2.01.01.07.18.03	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Norma K3	Kab. Sumbawa	50 perusahaan	20.144.200	22.561.504

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.01.01.07.18.05	Pengawasan dan pengujian sarana keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahaan pulau sumbawa	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan dan pengujian K3 pada perusahaan di Pulau Sumbawa	Kab. Sumbawa	25 perusahaan	15.544.200	17.409.504
2.01.01.07.18.08	Pengawasan pelaksanaan norma kerja di perusahaan pulau sumbawa	Terlaksananya Pengawasan norma kerja pada perusahaan di Pulau Sumbawa	Kab. Sumbawa	12 bulan	15.144.200	16.961.504
2.01.01.07.18.10	Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan	Tersedianya dana untuk penanganan kasus Tipiring	Kab. Sumbawa	10 kasus	19.216.300	21.522.256
2.01.01.07.18.18	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Tersedianya data hasil monitoring dan evaluasi	Kab. Sumbawa	100 perusahaan	45.398.300	50.846.096
2,02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				4.054.389.000	4.540.915.680
2.02.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				5.614.997.000	6.288.796.640
2.02.01.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				5.614.997.000	6.288.796.640
2.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya sarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran			610.166.500	683.386.480
2.02.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kota Mataram	1 Tahun	10.000.000	11.200.000
2.02.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Listrik dan Telpn	Kota Mataram	1 tahun	112.350.000	125.832.000
2.02.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kota Mataram	8 orang	39.168.000	43.868.160
2.02.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kota Mataram	10 orang	227.711.500	255.036.880

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.02.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Mataram	1 tahun	12.127.000	13.582.240
2.02.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tercetaknya Bahan-bahan Administrasi Perkantoran	Kota Mataram	1 tahun	21.720.000	24.326.400
2.02.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	1 tahun	26.600.000	29.792.000
2.02.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Kebutuhan akan Bahan Bacaan (Surat Kabar Harian)	Kota Mataram	1 tahun	16.520.000	18.502.400
2.02.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum Rapat Tamu	Kota Mataram	1 tahun	45.000.000	50.400.000
2.02.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tersedianya Biaya Untuk Kegiatan Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Kota Mataram	1 tahun	35.000.000	39.200.000
2.02.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi Teknik Perkantoran	Kota Mataram	1 orang	28.200.000	31.584.000
2.02.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya Anggaran Untuk Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Kota Mataram	1 tahun	30.000.000	33.600.000
2.02.01.01.01.21	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Tersedianya Peralatan Listrik dan Elektronik	Kota Mataram	1 tahun	5.770.000	6.462.400
2.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur			329.740.000	369.308.800
2.02.01.01.02.13	Pengadaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	100 %	31.700.000	35.504.000
2.02.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Jasa kebutuhan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kota Mataram	28 unit	256.040.000	286.764.800
2.02.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor	Kota Mataram	1 tahun	42.000.000	47.040.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Memingkatkan kualitas sumber daya aparatur			103.000.000	115.360.000
2.02.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Meningkatnya Kinerja SKPD	Kota Mataram	1 tahun	3.000.000	3.360.000
2.02.01.01.05.18	Peningkatan iman dan taqwa aparatur	Meningkatnya Imam dan Taqwa Aparatur	Kota Mataram	1 tahun	100.000.000	112.000.000
2.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan sistem pelaporan capain kinerja			83.780.000	93.833.600
2.02.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ihktisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Mataram	1 dokumen	9.560.000	10.707.200
2.02.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Mataram	1 dokumen	12.495.000	13.994.400
2.02.01.01.06.05	Penyusunan Rencana Kera SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD	Kota Mataram	4 dokumen	51.650.000	57.848.000
2.02.01.01.06.06	Penyusunan laporan bulanan triwulan dan akhir tahunan	Kebutuhan Dana untuk Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Akhir Tahun Terpenuhi	Kota Mataram	1 dokumen	10.075.000	11.284.000
2.02.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kapasitas Pengelola Keuangan Daerah			30.420.000	34.070.400
2.02.01.01.07.01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Tersusunnya Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah	Kota Mataram	1 dokumen	30.420.000	34.070.400
2.02.01.01.15	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan pekerja perempuan	se-NTB	50%	223.000.000	249.760.000
2.02.01.01.15.19	Pertemuan Berkala Tim UPG	Terlaksannya Pertemuan Pokja PUG dan Pendampingan Tekhnis PPRG	se-NTB	530 orang	223.000.000	249.760.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.02.01.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan	se-NTB	50%	1.448.715.000	1.622.560.800
2.02.01.01.16.05	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Terlaksananya Fasilitas Kota Layak Anak (KLA)	Provinsi NTB	2 kabupaten/kota	75.070.000	84.078.400
2.02.01.01.16.08	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Tersusunnya Dokumen Data KTP/KTA dan Data Gender	Provinsi NTB	2 dokumen	111.377.500	124.742.800
2.02.01.01.16.17	Kegiatan Temu Anak/Forum Anak	Terkumpulnya 30 Forum Anak	Provinsi NTB	30 orang	8.000.000	8.960.000
2.02.01.01.16.24	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (BKOW)	Tersedianya Anggaran untuk Sosialisasi, Seminar, Pengajian dan HUT BKOW dan Khitanan Massal	Provinsi NTB	1 tahun	20.400.000	22.848.000
2.02.01.01.16.25	Penguatan Kelembagaan Organisasi Dharma Wanita	Tersedianya Anggaran untuk Sosialisasi, Seminar, Musda, Zikir, Rapat Rutin dan HUT Dharma Wanita	Provinsi NTB	1 tahun	125.920.000	141.030.400
2.02.01.01.16.53	Sosialisasi terkait keberadaan dan fungsi P2TP2A, GTTPPO Provinsi	Terlaksananya Kegiatan P2TP2A	se-NTB	1 tahun	88.100.000	98.672.000
2.02.01.01.16.55	Pendampingan dan Penangan Kasus	Terlaksananya Kegiatan Bedah Kasus	se-NTB	180 orang	75.460.000	84.515.200
2.02.01.01.16.56	Pelatihan Pendampingan Korban Kekerasan	Terlaksananya Pelatihan Tenaga Pendamping Korban Kekerasan	Provinsi NTB	60 orang	424.500.000	475.440.000
2.02.01.01.16.58	Kegiatan P2TP2A	Terlaksananya Rapat Koordinasi P2TP2A	se-NTB	70 orang	152.450.000	170.744.000
2.02.01.01.16.59	Sosialisasi Upaya Perlindungan Anak di Sekolah	Terlaksananya Sosialisasi Upaya Perlindungan Anak di Sekolah	se-NTB	1875 orang	173.387.500	194.194.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.02.01.01.16.60	Penguatan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Provinsi NTB	Tersedianya Anggaran Untuk Penguatan LPA Provinsi NTB	se-NTB	250 orang	194.050.000	217.336.000
2.02.01.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan	se-NTB	50%	671.907.500	752.536.400
2.02.01.01.17.08	Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Terlaksannya Sosialisasi bagi Camat dan Dialog dengan TOGA, TOMA dan TODAT	se-NTB	665 orang	210.790.000	236.084.800
2.02.01.01.17.18	Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Terlaksannya Kegiatan PATBM di Masyarakat di kabupaten/Kota	se-NTB	6 desa	461.117.500	516.451.600
2.02.01.01.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	Cakupan Perempuan yang Memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang Aspek Urusan Pemerintah	se-NTB	50%	553.660.000	620.099.200
2.02.01.01.18.02	Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Terlaksannya Pendidikan Politik bagi Perempuan	Provinsi NTB	60 orang	141.000.000	157.920.000
2.02.01.01.18.04	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Terlaksannya Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan	Provinsi NTB	400 orang	306.500.000	343.280.000
2.02.01.01.18.07	Temu PUSPA Daerah	Terlaksananya Kegiatan Temu PUSPA Daerah	Provinsi NTB	60 orang	106.160.000	118.899.200
2,03	PANGAN				36.784.637.000	41.198.793.440
2.03.01	Dinas Ketahanan Pangan				36.784.637.000	41.198.793.440
2.03.01.01	Dinas Ketahanan Pangan (Induk)				31.210.536.000	34.955.800.320
2.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran	Kota Mataram	100 persen	1.265.353.000	1.417.195.360
2.03.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat kantor	Kota Mataram	12 BULAN	25.000.000	28.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.03.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sarana dan jasa komunikasi, air dan listrik	Kota Mataram	12 BULAN	152.100.000	170.352.000
2.03.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	4 JENIS	35.000.000	39.200.000
2.03.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	12 BULAN	58.452.000	65.466.240
2.03.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kota Mataram	12 BULAN	88.100.000	98.672.000
2.03.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat tulis kantor	Kota Mataram	12 BULAN	35.750.000	40.040.000
2.03.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	6 JENIS	10.000.000	11.200.000
2.03.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan listrik dan penerangan	Kota Mataram	12 BULAN	14.700.000	16.464.000
2.03.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	21 UNIT	505.801.000	566.497.120
2.03.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan	Kota Mataram	12 BULAN	32.000.000	35.840.000
2.03.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu	Kota Mataram	12 BULAN	15.000.000	16.800.000
2.03.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya penyelarasan program pusat dan daerah	Kota Mataram	12 BULAN	200.000.000	224.000.000
2.03.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	Kota Mataram	12 BULAN	66.450.000	74.424.000
2.03.01.01.01.25	Pengelolaan Kearsipan	Terlaksananya akusisi arsip	Kota Mataram	12 BULAN	27.000.000	30.240.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur			3.206.534.000	3.591.318.080
2.03.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Rehab bangunan gedung kantor	Kota Mataram	1 KEGIATAN	1.062.213.000	1.189.678.560
2.03.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan 2	Kota Mataram	14 UNIT	1.484.050.000	1.662.136.000
2.03.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan bangunan gedung kantor	Kota Mataram	1 KEGIATAN	50.000.000	56.000.000
2.03.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Kota Mataram	52 uni	147.721.000	165.447.520
2.03.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya jasa pemeliharaan peralatan kerja	Kota Mataram	26 UNIT	49.000.000	54.880.000
2.03.01.01.02.32	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	Terlaksananya pemeliharaan taman dan halaman kantor	Kota Mataram	1 KEGIATAN	413.550.000	463.176.000
2.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Apratur			155.630.000	174.305.600
2.03.01.01.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya kegiatan imtaq dan Outbound	Kota Mataram	12 KALI	104.580.000	117.129.600
2.03.01.01.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Kota Mataram	1 TAHUN	51.050.000	57.176.000
2.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program			560.650.000	627.928.000
2.03.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP dan laporan Tahunan SKPD	Kota Mataram	2 DOKUMEN	84.000.000	94.080.000
2.03.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kota Mataram	3 DOKUMEN	54.500.000	61.040.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.03.01.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD	Kota Mataram	7 DOKUMEN	203.515.000	227.936.800
2.03.01.01.06.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Ketahanan Pangan	Kota Mataram	12 LAPORAN	118.635.000	132.871.200
2.03.01.01.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Sarana dan operasional PPID	Kota Mataram	12 BULAN	100.000.000	112.000.000
2.03.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			56.675.000	63.476.000
2.03.01.01.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Terinventarisasinya aset/barang kantor Badan Ketahanan Pangan	Kota Mataram	80 PERSEN	56.675.000	63.476.000
2.03.01.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	se-NTB	88,9 point	25.914.294.000	29.024.009.280
2.03.01.01.16.09	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	Termanfaatkannya pekarangan untuk pengembangan pangan	se-NTB	100 KRPL	3.412.965.000	3.822.520.800
2.03.01.01.16.10	Neraca Bahan Makanan (NBM)	tersusunnya buku Neraca Bahan Makanan (NBM)/Laporan Ketersediaan Energi dan Protein	Kota Mataram	1 BUKU	78.640.000	88.076.800
2.03.01.01.16.13	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	se-NTB	10 TON	219.745.000	246.114.400
2.03.01.01.16.14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Peningkatan kapasitas Kelembagaan Kelompok	se-NTB	100/300 DESA/kelompok	12.016.865.000	13.458.888.800
2.03.01.01.16.18	Pengembangan Lumbung Pangan	Terbangun dan terisinya lumbung pangan masyarakat	Kota Mataram, Kab. Lombok Timur	10 LUMBUNG	1.620.155.000	1.814.573.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.03.01.01.16.49	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	Kebijakan Ketahanan Pangan	se-NTB	2 Rekomendasi	105.000.000	117.600.000
2.03.01.01.16.50	Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Penanganan kasus gizi kurang	se-NTB	200 BALITA	364.415.000	408.144.800
2.03.01.01.16.56	Pelatihan Pengolahan Pangan Lokal	Terlatih dan terfasilitasinya pelaku usaha dalam pengolahan pangan lokal	se-NTB	35 ORANG	266.765.000	298.776.800
2.03.01.01.16.61	Pertemuan Evaluasi Ketahanan Pangan	Tersusunnya dokumen capaian program dan kegiatan ketahanan pangan	Kota Mataram	1 LAPORAN	318.727.000	356.974.240
2.03.01.01.16.63	Pemantauan Arus Distribusi Komoditas Pangan	Terlaksananya pemantauan arus distribusi komoditas pangan	se-NTB	18 KOMODITAS	60.000.000	67.200.000
2.03.01.01.16.64	Pengembangan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)	Terlaksananya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dalam mendukung capaian skor PPH	se-NTB	8350 ORANG	747.950.000	837.704.000
2.03.01.01.16.65	Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	Terlaksananya pemantauan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	se-NTB	52 LDPM	50.000.000	56.000.000
2.03.01.01.16.69	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Terlaksananya inspeksi keamanan pangan segar	Kota Mataram	15 KOMODITI	615.722.000	689.608.640
2.03.01.01.16.72	Pemantauan Harga Pangan dan Pengembangan Sistem Informasi Pasar	Terlaksananya pemantauan harga komoditas pangan dan pengembangan sistem informasi pasar	se-NTB	14 KOMODITAS	90.000.000	100.800.000
2.03.01.01.16.77	Pertemuan Sinkronisasi Program dan Kegiatan Ketahanan Pangan	Terlaksananya pertemuan sinkronisasi Ketahanan Pangan	se-NTB	66 ORANG	165.152.000	184.970.240

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.03.01.01.16.82	Prognosa Ketersediaan Pangan	Data dan laporan situasi Ketersediaan Pangan di NTB	se-NTB	13 LAPORAN	105.987.000	118.705.440
2.03.01.01.16.96	Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Mendukung Diversifikasi Pangan	Pembinaan dan Pengembangan usaha Kelompok Hilirisasi beras sasambo	se-NTB	2 Kelompok	177.800.000	199.136.000
2.03.01.01.16.97	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)/Toko Tani Indonesia	Peningkatan kapasitas PUPM/TTI	se-NTB	33 PUPM/TTI	440.000.000	492.800.000
2.03.01.01.16.99	Monitoring dan Evaluasi Rice Milling Unit (RMU)	informasi ketersediaan pangan dan akses pangan masyarakat di RMU	se-NTB	116 RMU	80.000.000	89.600.000
2.03.01.01.16.100	Kawasan Mandiri Pangan (KMP)	Peningkatan SDM dan Kelembagaan	se-NTB	8 KAWASAN	1.603.856.000	1.796.318.720
2.03.01.01.16.102	Survey Ketahanan Pangan Rumah Tangga	laporan hasil kajian tentang Ketahanan Pangan Rumah Tangga	se-NTB	1 Buku	500.000.000	560.000.000
2.03.01.01.16.103	Penyusunan Pola Pangan Harapan (PPH)	Tersedianya data dan laporan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat NTB	se-NTB	1 buku	97.575.000	109.284.000
2.03.01.01.16.106	Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan	Terbentuknya desa model pengembangan keamanan pangan	se-NTB	10 desa	1.080.000.000	1.209.600.000
2.03.01.01.16.109	Roadmap Ketahanan Pangan	Tersedianya Roadmap Ketahanan Pangan	se-NTB	1 buku	290.000.000	324.800.000
2.03.01.01.16.110	Visualisasi Pembangunan Ketahanan Pangan	Tersedianya Visualisasi Ketahanan Pangan	se-NTB	1 Dokumen Audiovisual	151.975.000	170.212.000
2.03.01.01.16.111	Kajian Pola Konsumsi Pangan	Hasil analisis pola konsumsi pangan anak remaja	Kota Mataram	1 KAJIAN	300.000.000	336.000.000
2.03.01.01.16.112	Penyusunan Data Base Ketahanan Pangan	Tersedianya Data Base Ketahanan Pangan	se-NTB	1 BUKU	50.000.000	56.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.03.01.01.16.113	Pengembangan Ketersediaan Pangan Lokal	Tersedianya pangan lokal dari umbi-umbian dan aneka kacang	se-NTB	2 Kabupaten	275.000.000	308.000.000
2.03.01.01.16.118	Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP)	Serapan Gabah Petani oleh Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (LUEP)	se-NTB	4 LUEP	630.000.000	705.600.000
2.03.01.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan Pemasaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Produk Olahan	Luar Provinsi, se-NTB	50 persen	51.400.000	57.568.000
2.03.01.01.17.06	Pemeliharaan Rutin/Berkala Pusat-Pusat Etalase/Eksibi/Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya pengembangan dan pemeliharaan Outlet pangan lokal	Kota Mataram	1 Unit	51.400.000	57.568.000
2.03.01.02	Balai Sertifikasi Mutu Pangan				5.574.101.000	6.242.993.120
2.03.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			490.001.000	548.801.120
2.03.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat kantor	Kota Mataram	12 BULAN	3.502.000	3.922.240
2.03.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kota Mataram	12 BULAN	70.400.000	78.848.000
2.03.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	12 BULAN	33.512.500	37.534.000
2.03.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa administrasi kebersihan kantor	Kota Mataram	12 BULAN	45.859.000	51.362.080
2.03.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kota Mataram	12 BULAN	3.177.000	3.558.240
2.03.01.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	9 JENIS	267.413.000	299.502.560

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.03.01.02.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanankantor	Kota Mataram	12 BULAN	66.137.500	74.074.000
2.03.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur			4.182.932.000	4.684.883.840
2.03.01.02.02.03	Pembangunan gedung kantor	Lanjutan pembangunan IPAL	Kota Mataram	1 PAKET	630.278.000	705.911.360
2.03.01.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan Dinas Operasional Roda 4 dan Roda 2	Kota Mataram	4 UNIT	515.437.500	577.290.000
2.03.01.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan laboratorium OKKPD	Kota Mataram	1 PAKET	3.008.825.000	3.369.884.000
2.03.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas	Kota Mataram	4 UNIT	20.234.000	22.662.080
2.03.01.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan perlatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	10 UNIT	8.157.500	9.136.400
2.03.01.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			9.383.500	10.509.520
2.03.01.02.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Terlaksananya inventarisasi barang aset kantor	Kota Mataram	80 PERSEN	9.383.500	10.509.520
2.03.01.02.16	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	se-NTB	88,9 point	836.549.500	936.935.440
2.03.01.02.16.55	Sertifikasi Produk Pangan Buah dan Sayur Segar	Terlaksananya Sertifikasi prima komoditas sayur dan buah segar	se-NTB	20 KOMODITI	321.636.000	360.232.320
2.03.01.02.16.68	Pelatihan Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP)	Terlaksananya Sertifikasi prima komoditas sayur dan buah segar	Kota Mataram	30 ORANG	64.176.000	71.877.120

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.03.01.02.16.86	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Buah dan Sayur Segar	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan buah dan sayur segar	Kota Mataram	30 KOMODITAS	150.665.000	168.744.800
2.03.01.02.16.114	Temu Teknis Keamanan Pangan	Meningkatny daya saing produk	Kota Mataram	100 ORANG	110.376.000	123.621.120
2.03.01.02.16.115	Pelatihan GHP/GMP	Pengetahuan Petani pelaku	Kota Mataram	30 ORANG	64.676.000	72.437.120
2.03.01.02.16.116	Pelatihan Good Agriculture Practices (GAP)	Pengetahuan Petani pelaku	Kota Mataram	30 ORANG	61.263.500	68.615.120
2.03.01.02.16.117	Penyusunan Peta Potensi Lahan PSAT	Tersedianaya peta potensi lahan PSAT	Kota Mataram	1 DOKUMEN	63.757.000	71.407.840
2.03.01.02.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Cakupan Pemasaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Produk Olahan	Luar Provinsi, se-NTB	50 persen	55.235.000	61.863.200
2.03.01.02.17.18	Promosi Produk Buah dan Sayuran Segar yang Aman Pangan	Terlaksananya promosi produk buah dan sayur segar yang aman dikonsumsi	Kota Mataram	1 EVENT PAMERAN	55.235.000	61.863.200
2,04	PERTANAHAN				456.650.000	511.448.000
2.04.03	Sekretariat Daerah				456.650.000	511.448.000
2.04.03.04	Biro Pemerintahan				456.650.000	511.448.000
2.04.03.04.35	Program Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan	Persentase Pelaksanaan Tertib Administrasi di bidang Pemerintahan dan Pertanahan	Provinsi NTB	100%	456.650.000	511.448.000
2.04.03.04.35.01	Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pertanahan	Jumlah monev pertanahan yang dilaksanakan	Provinsi NTB	4 kali	90.500.000	101.360.000
2.04.03.04.35.02	Penyelesaian konflik pertanahan dan tanah bermasalah	Jumlah penyelesaian konflik pertanahan yang terselesaikan	Provinsi NTB	3 kasus	205.000.000	229.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.04.03.04.35.18	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Tanah Terlantar	Jumlah dokumen tanah terlantar	Provinsi NTB	1 dokumen	161.150.000	180.488.000
2,05	LINGKUNGAN HIDUP				31.640.461.100	35.437.316.432
2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				31.640.461.100	35.437.316.432
2.05.01.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Induk)				24.741.890.900	27.710.917.808
2.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan			1.433.637.200	1.605.673.664
2.05.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya pengiriman surat-menyurat kantor	Kota Mataram	1 Tahun	26.750.000	29.960.000
2.05.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan internet	Kota Mataram	12 Bulan	195.000.000	218.400.000
2.05.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan	Kota Mataram	12 Bulan	211.291.300	236.646.256
2.05.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	Kota Mataram	12 Bulan	190.591.200	213.462.144
2.05.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhnya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Kota Mataram	12 bulan	21.109.700	23.642.864
2.05.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan identitas kantor	Kota Mataram	1 Tahun	14.850.000	16.632.000
2.05.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor	Kota Mataram	1 Tahun	11.595.000	12.986.400
2.05.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhnya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	28.200.000	31.584.000
2.05.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar Harian Lokaldan Nasional serta Bahan Bacaan Lainnya	Kota Mataram	1 Tahun	7.000.000	7.840.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.05.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu	Kota Mataram	1 Tahun	86.250.000	96.600.000
2.05.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kota Mataram	1 Tahun	200.000.000	224.000.000
2.05.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Kota Mataram	1 Tahun	200.000.000	224.000.000
2.05.01.01.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya jasa pengamanan kantor	Kota Mataram	12 Bulan	175.200.000	196.224.000
2.05.01.01.01.27	Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT, dan Honorer Daerah	Tersedianya tenaga PTT	Kota Mataram	1 Tahun	65.800.000	73.696.000
2.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas operasional			1.107.650.000	1.240.568.000
2.05.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas	Kota Mataram	15 Unit	300.700.000	336.784.000
2.05.01.01.02.10	Pengadaan meubelair kantor	terpenuhinya meubelair kantor	Kota Mataram	150 Buah	181.400.000	203.168.000
2.05.01.01.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	terpenuhinya alat-alat elektronik kantor	Kota Mataram	1 paket	170.700.000	191.184.000
2.05.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung kantor Dinas LHK	Kota Mataram	1 Tahun	132.100.000	147.952.000
2.05.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kebutuhan kendaraan dinas	Kota Mataram	1 Tahun	291.750.000	326.760.000
2.05.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	31.000.000	34.720.000
2.05.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan kualitas SDM			458.414.700	513.424.464
2.05.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya imtaq, senam dan penyewaan gedung olahraga	Kota Mataram	1 Tahun	28.568.700	31.996.944
2.05.01.01.05.05	Peningkatan SDM aparatur	Terlaksananya Diklat Teknis dan Fungsional LHK	Kota Mataram	1 Tahun	305.696.000	342.379.520

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.05.01.01.05.06	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	terpantaunya kondisi kepegawaian	Kota Mataram	1 tahun	85.200.000	95.424.000
2.05.01.01.05.12	Peningkatan kapasitas fungsional	terlaksananya penilaian pejabat fungsional	Kota Mataram	1 tahun	38.950.000	43.624.000
2.05.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan kualitas pelaporan dan perencanaan			408.119.000	457.093.280
2.05.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	Kota Mataram	1 Dokumen	26.680.600	29.882.272
2.05.01.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif (DPA, DPPA, Renja, Renstra)	Kota Mataram	4 Dokumen	226.351.400	253.513.568
2.05.01.01.06.12	Penyusunan Dokumen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan kinerja SKPD yang akuntabel	Kota Mataram	1 Dokumen	26.251.300	29.401.456
2.05.01.01.06.14	Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya data dan informasi lingkungan hidup dan kehutanan yang valid dan lengkap	Kota Mataram	1 Dokumen	128.835.700	144.295.984
2.05.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas SDM			120.609.200	135.082.304
2.05.01.01.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan asset dinas	Kota Mataram	1 Dokumen	73.029.200	81.792.704
2.05.01.01.07.02	Pengelolaan PAD sektor lingkungan hidup dan kehutanan	Terantau dan terevaluasinya potensi PAD sektor LHK	Kota Mataram	1 Tahun	47.580.000	53.289.600
2.05.01.01.25	Program Analisis dan Pengendalian Lingkungan	Indeks kualitas air dan udara dan ratio ketaatan terhadap dokumen lingkungan hidup	se-NTB	31 (Air), 88 (Udara), dan 10 % (Peningkatan Ratio Ketaatan)	2.453.995.000	2.748.474.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.05.01.01.25.01	Pengkajian Dampak Lingkungan	- Jumlah Dokumen Amdal dan UKL-UPL yang dinilai - Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Amdal dan UKL-UPL	se-NTB	10 dan 10 Dokumen/Usaha kegiatan	514.533.500	576.277.520
2.05.01.01.25.02	Pengendalian Kerusakan Lingkungan	Jumlah dokumen dan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan	se-NTB	1 dokumen 2 kegiatan	1.565.261.000	1.753.092.320
2.05.01.01.25.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah dokumen dan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan	se-NTB	3 Dokumen, 3 kegiatan	374.200.500	419.104.560
2.05.01.01.26	Program Penataan dan Pengelolaan Lingkungan	Terselenggaranya penataan dan pengelolaan lingkungan hidup	Provinsi NTB	100 %	18.759.465.800	21.010.601.696
2.05.01.01.26.01	Pengelolaan Kebijakan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen data, informasi dan perencanaan lingkungan hidup daerah (RPPLH, KLHS, IKPLHD, NSDA)	Provinsi NTB	5 Dokumen	1.462.156.000	1.637.614.720
2.05.01.01.26.02	Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen dan kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup	Provinsi NTB	4 Dokumen, 4 Kegiatan	281.960.000	315.795.200
2.05.01.01.26.03	Pengelolaan persampahan dan limbah b3	Jumlah kelompok bank sampah yang terbina, Jumlah dokumen regulasi, Jumlah unit TPA regional	Provinsi NTB	50 Kelompok Bank Sampah, 3 Dokumen, 1 Unit TPA regional	17.015.349.800	19.057.191.776
2.05.01.02	Balai Laboratorium Lingkungan				6.898.570.200	7.726.398.624
2.05.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	se-NTB	.	3.462.068.000	3.877.516.160

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.05.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya pengiriman surat-menyurat kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	1 Tahun	4.110.000	4.603.200
2.05.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan internet pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	12 Bulan	99.600.000	111.552.000
2.05.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan pada UPTD Laboratorium	Kota Mataram	12 Bulan	57.240.000	64.108.800
2.05.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	12 Bulan	69.524.200	77.867.104
2.05.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada UPTD Balai Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	1 Tahun	17.129.700	19.185.264
2.05.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan identitas kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	1 Tahun	11.389.000	12.755.680
2.05.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	1 Tahun	5.150.000	5.768.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.05.01.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	1 Tahun	2.968.325.100	3.324.524.112
2.05.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar harian lokal dan nasional pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	1 Tahun	13.000.000	14.560.000
2.05.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu dan ekstra fooding untuk analis Laboratorium pada UPTD Laboratorium	Kota Mataram	1 Tahun	40.900.000	45.808.000
2.05.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	1 Tahun	50.000.000	56.000.000
2.05.01.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Kota Mataram	1 Tahun	60.000.000	67.200.000
2.05.01.02.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya tenaga pengamanan kantor pada UPTD	Kota Mataram	12 Bulan	65.700.000	73.584.000
2.05.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas operasional			814.908.300	912.697.296
2.05.01.02.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya bangunan tempat Parkir UPTD Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	1 unit	50.000.000	56.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.05.01.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 4 pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	1 unit	401.620.000	449.814.400
2.05.01.02.02.10	Pengadaan meubelair kantor	Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	1 paket	120.488.300	134.946.896
2.05.01.02.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektornik kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	1 paket	61.900.000	69.328.000
2.05.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	1 Tahun	100.000.000	112.000.000
2.05.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	1 Tahun	39.600.000	44.352.000
2.05.01.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	1 Tahun	41.300.000	46.256.000
2.05.01.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM			121.570.000	136.158.400
2.05.01.02.05.05	Peningkatan SDM aparatur	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium	Kota Mataram	1 Tahun	121.570.000	136.158.400
2.05.01.02.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan			56.073.200	62.801.984

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.05.01.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	1 Dokumen	8.922.900	9.993.648
2.05.01.02.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif pada UPTD (DPA dan DPPA)	Kota Mataram	4 Dokumen	47.150.300	52.808.336
2.05.01.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya laporan aset dinas pada UPTD Laboratorium Lingkungan			51.875.300	58.100.336
2.05.01.02.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersusunnya laporan aset dinas pada UPTD Laboratorium Lingkungan	Kota Mataram	2 Laporan	51.875.300	58.100.336
2.05.01.02.25	Program Analisis dan Pengendalian Lingkungan	Rasio ketataatan terhadap dokumen lingkungan			2.392.075.400	2.679.124.448
2.05.01.02.25.03	Pemantauan Kualitas Lingkungan	Terlaksananya indek kualitas Udara,IKU dan Rasio ketaatan terhadap dokumen Lingkungan	se-NTB	31,88 % Kab/Kota	2.392.075.400	2.679.124.448
2,06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				1.792.374.000	2.007.458.880
2.06.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				31.252.516.300	35.002.818.256
2.06.01.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil				31.252.516.300	35.002.818.256
2.06.01.01.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Ketersediaan Data Base Kependudukan Skala Provinsi	Provinsi NTB	Tersedia	1.792.374.000	2.007.458.880
2.06.01.01.15.02	Pelatihan tenaga pengelola SIAK	Terlatihnya SDM Dalam Pengintegrasian data Non SIAK ke SIAK	se-NTB	112 Orang	210.800.000	236.096.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.06.01.01.15.05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Terwujudnya sinergitas penyelenggaraan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil	se-NTB	100 orang	305.520.000	342.182.400
2.06.01.01.15.06	Pengelolaan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan	Tersedianya Data Kependudukan	se-NTB	200 Buku	62.000.000	69.440.000
2.06.01.01.15.11	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Terlatihnya Aparatur Pelaksana Pelayanan Administrasi Kependudukan	se-NTB	170 Orang	492.950.000	552.104.000
2.06.01.01.15.12	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tertransformasinya Informasi Tentang Kebijakan Kependudukan	se-NTB	84 Orang	671.104.000	751.636.480
2.06.01.01.15.15	Monitoring dan Evaluasi kependudukan dan pencatatan sipil	Terpantaunya Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Masyarakat	se-NTB	10 Kab./Kota	50.000.000	56.000.000
2,07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA				29.460.142.300	32.995.359.376
2.07.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedia			1.011.315.800	1.132.673.696
2.07.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	se-NTB	1 Tahun	1.850.000	2.072.000
2.07.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	se-NTB	10 Rekening	76.066.000	85.193.920
2.07.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	se-NTB	38 Unit	149.280.000	167.193.600
2.07.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	se-NTB	11 Orang	107.400.000	120.288.000
2.07.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan tenaga kebersihan kantor	se-NTB	13 Orang	307.220.000	344.086.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.07.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	se-NTB	1 Tahun	20.449.800	22.903.776
2.07.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	se-NTB	1 Tahun	17.035.000	19.079.200
2.07.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	se-NTB	1 Tahun	6.535.000	7.319.200
2.07.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	se-NTB	1 Tahun	10.080.000	11.289.600
2.07.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	se-NTB	1 Tahun	43.800.000	49.056.000
2.07.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terwujudnya sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan	se-NTB	1 Tahun	35.000.000	39.200.000
2.07.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran	se-NTB	4 Orang	145.000.000	162.400.000
2.07.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya tenaga keamanan kantor	se-NTB	4 Orang	91.600.000	102.592.000
2.07.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedia			691.336.000	774.296.320
2.07.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya tugas-tugas	se-NTB	2 Unit	440.000.000	492.800.000
2.07.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	se-NTB	9 Alat	72.100.000	80.752.000
2.07.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	se-NTB	1 Paket	131.500.000	147.280.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.07.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	se-NTB	1 Paket	13.500.000	15.120.000
2.07.01.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Tersedianya meublier yang memadai	se-NTB	9 Unit	4.500.000	5.040.000
2.07.01.01.02.32	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	Tersedianya taman, tempat parkir dan halaman kantor yang memadai	se-NTB	1 Paket	4.000.000	4.480.000
2.07.01.01.02.38	Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Tersedianya perlengkapan arsip kantor	se-NTB	1 Tahun	25.736.000	28.824.320
2.07.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Tersedia			58.000.000	64.960.000
2.07.01.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Tersuluhnya berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku	se-NTB	1 Tahun	40.000.000	44.800.000
2.07.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terbinanya mental dan fisik aparatur	se-NTB	83 Orang	18.000.000	20.160.000
2.07.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja tersedia			58.200.000	65.184.000
2.07.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya rencana dan laporan kinerja SKPD	Kota Mataram, se-NTB	4 Dokumen	37.200.000	41.664.000
2.07.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Kota Mataram, se-NTB	1 Dokumen	12.000.000	13.440.000
2.07.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersedianya rencana kerja SKPD secara berkala	Kota Mataram, se-NTB	1 Dokumen	9.000.000	10.080.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.07.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah tersedia			22.850.000	25.592.000
2.07.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersedianya tenaga pengelola asset yang memadai	se-NTB	2 Orang	22.850.000	25.592.000
2.07.01.01.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Persentase Pemanfaatan TTG	Provinsi NTB	100%	414.484.000	464.222.080
2.07.01.01.15.04	Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Adanya Pemanfaatan TTG Oleh Masyarakat	se-NTB	30 Orang	194.657.500	218.016.400
2.07.01.01.15.05	Gelar TTG Nasional	Temuan TTG	se-NTB	10 Jenis Alat TTG	98.867.500	110.731.600
2.07.01.01.15.06	Koordinasi Pengembangan Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya alam dalam Pemanfaatan TTG	Kelompok Masyarakat yang Mampu Mengembangkan dan Merehabilitasi SDA di Daerah Pesisir	se-NTB	80 Orang	75.905.000	85.013.600
2.07.01.01.15.07	Pengembangan Wilayah Pesisir	Terbinanya Kelompok Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya	se-NTB	25 Orang	11.825.000	13.244.000
2.07.01.01.15.09	Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat pengelola sumber daya alam	Terbinanya Kelompok Masyarakat	se-NTB	10 Kelompok	33.229.000	37.216.480
2.07.01.01.16	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat	Provinsi NTB	10% dari Jumlah Desa se-NTB	21.414.344.000	23.984.065.280
2.07.01.01.16.02	Pelatihan ketrampilan manajemen badan usaha milik desa	Terlaksananya pelatihan keterampilan manajemen bumdes	se-NTB	200 Orang	252.600.000	282.912.000
2.07.01.01.16.07	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan	se-NTB	10 Kab./Kota	57.010.000	63.851.200
2.07.01.01.16.08	Pengembangan Kawasan Ekonomi Perdesaan	Tersedianya dukungan kegiatan PNPM-MPd yang berkesinambungan	se-NTB	200 Orang	386.581.000	432.970.720

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.07.01.01.16.09	Pelatihan Pendamping Desa	Terlatihnya Pendamping Desa yang Profesional dalam Mengembangkan Ekonomi Desa	se-NTB	192 Orang	410.436.000	459.688.320
2.07.01.01.16.10	Rapat Koordinasi pendamping Desa	Tercapainya Sinergitas antara pemerintah dengan pendamping desa	se-NTB	1152 Orang	318.955.000	357.229.600
2.07.01.01.16.11	Penunjang program peningkatan pemberdayaan masyarakat desa (P3MD)	Tersedianya dukungan kegiatan P3MD yang berkesinambungan	se-NTB	16 Orang	162.647.000	182.164.640
2.07.01.01.16.12	Pelatihan Pengurus BUMDes	Terlatihnya pengurus BUMDes yang berkesinambungan	Provinsi NTB	116 Orang	220.952.000	247.466.240
2.07.01.01.16.14	Kajian Peningkatan Kapasitas Bumdes untuk Pertanian	Tersedianya Dokumen Kajian BUMdes dibidang usaha pertanian	se-NTB	1 Dokumen	65.540.000	73.404.800
2.07.01.01.16.15	Pelatihan pengelola pasar desa	Terlatihnya pengelola pasar desa yang berkesinambungan	se-NTB	50 Orang	88.882.000	99.547.840
2.07.01.01.16.16	Rakor Pengelolaan Pasar Desa	Tercapainya Sinergitas antara pemerintah Provinsi kabupaten dan Desa dalam Pengelolaan Pasar Desa	se-NTB	50 Orang	103.625.000	116.060.000
2.07.01.01.16.17	Penyusunan profil usaha ekonomi masyarakat perdesaan	Tersedianya data profil usaha ekonomi masyarakat yang up to date	se-NTB	1 Dokumen	52.050.000	58.296.000
2.07.01.01.16.18	Ekspo hasil-hasil produksi kelompok usaha ekonomi masyarakat	Tersebarluaskannya hasil usaha kelompok usaha ekonomi masyarakat	se-NTB	1 Paket	97.155.000	108.813.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.07.01.01.16.19	Pemberian bantuan permodalan bagi BUMDes	Tersedianya dukungan permodalan bagi BUMDes yang memadai	Kab. Bima, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	100 Unit	19.000.000.000	21.280.000.000
2.07.01.01.16.21	Pelatihan kelompok usaha ekonomi masyarakat	Terlatihnya kelompok usaha ekonomi masyarakat yang berkelanjutan	se-NTB	50 Orang	80.645.000	90.322.400
2.07.01.01.16.22	Monev usaha ekonomi masyarakat	Tersedianya dokumen hasil monev kegiatan usaha ekonomi masyarakat	se-NTB	10 Kab./Kota	30.000.000	33.600.000
2.07.01.01.16.23	Penguatan pengelola lembaga ekonomi desa	Tersedianya tenaga pengelola lembaga ekonomi desa yang memadai	se-NTB	50 Orang	87.266.000	97.737.920
2.07.01.01.17	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Tingkat Perkembangan Desa Swadaya Lanjut	Provinsi NTB	10% dari Jumlah Desa se-NTB	1.348.957.500	1.510.832.400
2.07.01.01.17.06	Perlombaan desa dan kelurahan	Tersedianya data dan informasi keberhasilan pembangunan di Desa/Kel.	se-NTB	6 Desa dan Kelurahan Juara	579.344.000	648.865.280

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.07.01.01.17.08	Penguatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Terlaksananya Penguatan LPM dan Terdokumentasinya data LPM	se-NTB	10 Kab./Kota	100.760.000	112.851.200
2.07.01.01.17.10	Penunjang PNPM - GSC	Tersedianya dukungan kegiatan PNPM–GSC yang berke sinambungan	se-NTB	1 Paket	406.810.000	455.627.200
2.07.01.01.17.11	Monitoring dan evaluasi lumbung bersaing	Tercapainya peningkatan ekonomi masyarakat	se-NTB	4 Kabupaten	29.771.000	33.343.520
2.07.01.01.17.13	Penguatan kapasitas Lembaga Adat	Terlaksannya Penguatan Lembaga Adat Desa dan Terbentuknya Lembaga Adat Desa yang tertuang dlm Peraturan Desa	se-NTB	10 Kab./Kota	121.940.000	136.572.800
2.07.01.01.17.14	Pengembangan Ketahanan Masyarakat Desa	Tersosialisinya Kaidah Pengembangan Ketahanan Masyarakat Desa , Teridentifikasinya Potensi Desa dan Tearwujudnya Fungsi Paralegal	se-NTB	10 Kab./Kota	86.500.000	96.880.000
2.07.01.01.17.15	Jamban Keluarga	Terpenuhiya jamban keluarga untuk masyarakat	se-NTB	10 Kab./Kota	23.832.500	26.692.400
2.07.01.01.18	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Aparatur pemdes yang terlatih	Provinsi NTB	20%	2.922.060.000	3.272.707.200
2.07.01.01.18.06	Peningkatan Koordinasi Perencanaan dan Pengendalian	Terwujudnya keterpaduan program dan kegiatan	se-NTB	100 Orang	139.994.000	156.793.280
2.07.01.01.18.07	Assistensi Peraturan Desa Bagi Aparatur Pemerintahan Desa	Tersedianya aparatur Pemdes dan BPD yang terampil dan profesioanl dalam penyusunan peraturan di desa	se-NTB	8 Kabupaten	173.464.000	194.279.680

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.07.01.01.18.08	Profil Desa	Profil Desa / Kelurahan yang up to date	se-NTB	116 Aparatur	179.532.000	201.075.840
2.07.01.01.18.10	Pembinaan rutin pemerintahan desa	Terlaksananya Pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa	se-NTB	1 Tahun	142.850.000	159.992.000
2.07.01.01.18.15	Pekan inovasi perkembangan Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pekan Inovasi perkembangan desa dan kelurahan	se-NTB	50 Desa/Kel.	931.780.000	1.043.593.600
2.07.01.01.18.17	Bimbingan teknis Pembina teknis pemrintah Desa (PTPD)	Terlatihnya pembina teknis Pemerintah Desa (PTPD) dalam bidang manajemen pemdes	se-NTB	208 Orang	255.020.000	285.622.400
2.07.01.01.18.18	Bimbingan teknis Tugas Pokok dan Fungsi BPD	Tersedianya Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memahami tupoksinya	se-NTB	50 Orang	139.450.000	156.184.000
2.07.01.01.18.19	Bimbingan teknis aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	Tersedianya Aparatur Pemerintahan Desa yang terampil dalam pengelolaan keuangan desa	se-NTB	200 Orang	460.360.000	515.603.200
2.07.01.01.18.20	Bimbingan Teknis pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa	Tersedianya Aparatur Pemerintah Desa yang memiliki kemampuan dalam manajemen pemerintahan desa berdasarkan tugas pokok dan fungsi	se-NTB	100 Orang	257.450.000	288.344.000
2.07.01.01.18.21	Bimbingan Teknis perangkat Desa/Pelaksana Teknis Kewilayahan	Terlatihnya Perangkat Desa yang terampil dalam Pelaksanaan Teknis Kewilayahan	se-NTB	100 Orang	242.160.000	271.219.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.07.01.01.19	Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Persentase PKK Aktif	Provinsi NTB	100%	1.518.595.000	1.700.826.400
2.07.01.01.19.06	Revitalisasi Posyandu	Tersedianya pokjanal posyandu kecamatan/kabupaten/kota yang kuat	se-NTB	575 Orang	400.185.000	448.207.200
2.07.01.01.19.13	Pembinaan kesejahteraan keluarga PKK	Gerakan PKK yang semakin profesional	se-NTB	4 Pokja	1.118.410.000	1.252.619.200
2,08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				1.560.608.000	1.747.880.960
2.08.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				5.614.997.000	6.288.796.640
2.08.01.01	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				5.614.997.000	6.288.796.640
2.08.01.01.15	Program Keluarga Berencana	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Provinsi NTB	2 orang per KK	137.750.000	154.280.000
2.08.01.01.15.02	Pelayanan KIE	Tersusunnya Media KIE	Kota Bima, Kota Mataram, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	1 dokumen	137.750.000	154.280.000
2.08.01.01.16	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase usia kawin pertama yang paling baik bagi perempuan (Usia 21-30) Tahun	se-NTB	52 %	580.468.000	650.124.160

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.08.01.01.16.01	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Terlaksannya Rakor PUP, GEN & KESPRO dan Saresehan Duta Remaja/PIK-R / FOR	se-NTB	370 orang	206.033.000	230.756.960
2.08.01.01.16.02	Sosialisasi PUP ke Masyarakat	Terlaksannya Sosialisasi PUP di Sekolah	se-NTB	7500 orang	150.085.000	168.095.200
2.08.01.01.16.03	Pengembangan Metode DW pada beberapa Kelompok Masyarakat	Terlaksannya Rakor Pencapaian Indikator Kinerja PUP	se-NTB	100 orang	224.350.000	251.272.000
2.08.01.01.19	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Cakupan PUS (istrinya dibawah 20 tahun)	se-NTB	50%	205.685.000	230.367.200
2.08.01.01.19.01	Penyuluhan kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat	Terlaksananya Penyuluhan KHIBA di Kelompok Masyarakat	se-NTB	100 orang	162.985.000	182.543.200
2.08.01.01.19.02	Kegiatan Hari Ibu, Hari Kartini, HUT Dharma Wanita, HKG PKK	Terlaksananya Peringatan Hari Ibu	Kota Mataram	1 kegiatan	42.700.000	47.824.000
2.08.01.01.20	Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	se-NTB	200 Or	297.500.000	333.200.000
2.08.01.01.20.10	Membuat Percontohan metode DW pada beberapa kelompok remaja terkait	Terbentuknya Kelompok Dialog Warga	se-NTB	20 desa	148.450.000	166.264.000
2.08.01.01.20.11	Penguatan Pusat Informasi Konseling Remaja (KRR)	Terlaksananya Kegiatan Pusat Informasi Konseling Remaja	se-NTB	10 kabupaten/kota	149.050.000	166.936.000
2.08.01.01.21	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS	Persentase siswa yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS, PMS dan Narkoba	se-NTB	300 Or	218.235.000	244.423.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.08.01.01.21.01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS di Sekolah	Terlaksananya Penyuluhan Narkoba dan PMS di Sekolah	se-NTB	400 orang	218.235.000	244.423.200
2.08.01.01.24	Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD	Cakupan bina keluarga balita (BKB) ber-KB	se-NTB	30 Or	120.970.000	135.486.400
2.08.01.01.24.02	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Tenaga Pendamping bagi Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	se-NTB	40 orang	120.970.000	135.486.400
2,09	PERHUBUNGAN				43.681.297.850	48.923.053.592
2.09.01	Dinas Perhubungan				43.681.297.850	48.923.053.592
2.09.01.01	Dinas Perhubungan				43.681.297.850	48.923.053.592
2.09.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran administrasi perkantoran			2.533.611.350	2.837.644.712
2.09.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya kegiatan administrasi perkantoran	Kota Mataram	1 Tahun	81.000.000	90.720.000
2.09.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Mataram	1 Tahun	463.500.000	519.120.000
2.09.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa perlengkapan dan peralatan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	54.700.000	61.264.000
2.09.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Mataram	1 Tahun	33.650.000	37.688.000
2.09.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya administrasi keuangan yang tertib	Kota Mataram	12 orang	110.832.300	124.132.176
2.09.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	856.322.400	959.081.088

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.09.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Mataram	1 Tahun	20.600.000	23.072.000
2.09.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Mataram	1 Tahun	73.205.100	81.989.712
2.09.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	1 tahun	40.000.000	44.800.000
2.09.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	20.518.000	22.980.160
2.09.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	50.277.800	56.311.136
2.09.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan (surat kabar) dan Tersedianya Buku Profil Dinas Perhubungan	Kota Mataram	3/1 Media surat khabar/dokumen	44.750.000	50.120.000
2.09.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Kedinasan	Kota Mataram	1 Tahun	68.900.000	77.168.000
2.09.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Selarasnya program pemerintah daerah dengan pemerintah pusat	Luar Provinsi	1 Tahun	182.232.000	204.099.840
2.09.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran yang baik	Kota Mataram	14 bulan	104.110.000	116.603.200
2.09.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya hasil penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	se-NTB	1 Tahun	120.200.000	134.624.000
2.09.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Meningkatnya keamanan kantor	Kota Mataram	7 orang	208.813.750	233.871.400
2.09.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur			3.796.523.500	4.252.106.320

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.09.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas / Operasional	Kota Mataram	2 paket	2.500.210.000	2.800.235.200
2.09.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya meubelair kantor yang memadai	Kota Mataram	1 paket	105.440.000	118.092.800
2.09.01.01.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	103 unit	875.426.000	980.477.120
2.09.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Kota Mataram	1 paket	83.750.000	93.800.000
2.09.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan yang baik dan operasional	Kota Mataram	29 unit	174.697.500	195.661.200
2.09.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan kerja yang baik	Kota Mataram	1 paket	57.000.000	63.840.000
2.09.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kompetensi Aparatur			133.140.000	149.116.800
2.09.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Tersedianya honor penceramah (Dai) dan pemandu senam	Kota Mataram	1 paket	27.640.000	30.956.800
2.09.01.01.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Terselenggaranya peningkatan SDM	Kota Mataram	3 orang	105.500.000	118.160.000
2.09.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana program			141.859.300	158.882.416
2.09.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Mataram	3 dokumen	45.973.800	51.490.656
2.09.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun yang valid	Kota Mataram	3 dokumen	21.973.000	24.609.760

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.09.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersedianya dokumen rencana kerja tahunan SKPD (RKA/DPA , RKAP/DPPA dan Rencana Kerja)	Kota Mataram	4 dokumen	73.912.500	82.782.000
2.09.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			35.831.000	40.130.720
2.09.01.01.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Terkelolanya aset / barang daerah secara efektif	Kota Mataram	1 dokumen	35.831.000	40.130.720
2.09.01.01.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan yang terpelihara	se-NTB	100%	6.265.459.000	7.017.314.080
2.09.01.01.16.04	Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	Terpeliharanya fasilitas terminal type B	se-NTB	4 Terminal	5.690.745.000	6.373.634.400
2.09.01.01.16.05	Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan LLAJ	Terpeliharanya fasilitas keselamatan LLAJ	se-NTB	6 Jenis	574.714.000	643.679.680
2.09.01.01.17	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	Persentase Angkutan yang Layak	se-NTB	75%	3.292.182.700	3.687.244.624
2.09.01.01.17.14	Pembinaan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	Tersosialisasinya peserta pembinaan/sosialisasi pengusaha angkutan barang dan Terpilihnya Abdi Yasa Teladan Tingkat Provinsi NTB untuk mewakili NTB di tingkat nasional	Kota Mataram	120 orang	232.295.000	260.170.400
2.09.01.01.17.18	Pengamanan dan Pengendalian Arus Lalu Lintas	Terlaksananya pengendalian dan pengamanan arus lalu lintas angkutan pada hari hari besar tertentu	Kota Mataram	3 Kali	105.927.000	118.638.240

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.09.01.01.17.35	Pengembangan lalu lintas Angkutan Jalan	Jumlah Peserta Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sosialisasi Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi NTB	se-NTB	1680 orang	1.697.810.200	1.901.547.424
2.09.01.01.17.41	Pengawasan dan Penertiban Perizinan Angkutan	Jumlah kendaraan angkutan umum, angkutan taxi yang memiliki legalitas (surat kelengkapan kelaikan jalan)	Kota Mataram	1245 Unit	156.150.500	174.888.560
2.09.01.01.17.42	Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan	Tersedianya biaya operasional BRT dan Subsidi Angkutan Perintis	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat	4 Koridor	1.100.000.000	1.232.000.000
2.09.01.01.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Proporsi ketersediaan sarana prasarana perhubungan	se-NTB	50%	13.443.874.700	15.057.139.664
2.09.01.01.18.04	Pembangunan Prasarana Perhubungan Laut	Tersedianya Fasilitas Pelabuhan	Kab. Lombok Timur	1 Pelabuhan	6.517.163.000	7.299.222.560
2.09.01.01.18.06	Pembangunan prasarana perhubungan darat	Halte BRT yang dibangun	Kota Mataram	5 Halte	511.028.400	572.351.808
2.09.01.01.18.07	Pembangunan Prasarana Terminal Penumpang Angkutan Umum	Tersedianya Dokumen FS dan DED Terminal KEK Mandalika	Kab. Lombok Tengah	2 Dokumen	595.299.000	666.734.880
2.09.01.01.18.09	Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perhubungan	se-NTB	6 dokumen	4.801.406.800	5.377.575.616
2.09.01.01.18.10	Penyusunan Kebijakan, Norma, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Tersusunnya Revisi Perda Ttg Penyelenggaraan Perhubungan, Raperda Pengelolaan Terminal Tipe B dan Rapergub Fasilitas Keselamatan Transportasi	Kota Mataram	3 dokumen	82.200.000	92.064.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.09.01.01.18.11	Perencanaan Peningkatan/Pengembangan Terminal	Tersedianya Fasilitas Terminal	Kota Mataram	3 dokumen	906.152.500	1.014.890.800
2.09.01.01.18.12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Tersedianya dokumen data monitoring dan evaluasi	se-NTB	1 dokumen	30.625.000	34.300.000
2.09.01.01.19	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase Fasilitas Keselamatan yang Terpasang dibandingkan dengan Kebutuhan	se-NTB	20%	9.808.859.200	10.985.922.304
2.09.01.01.19.10	Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	Terpasangnya fasilitas keselamatan	se-NTB	10 Jenis	9.645.354.000	10.802.796.480
2.09.01.01.19.11	Penyusunan informasi/database fasilitas keselamatan jalan	Tersedianya dokumen fasilitas jalan di NTB	Kota Mataram	1 dokumen	87.655.200	98.173.824
2.09.01.01.19.12	Pembinaan Keselamatan Lalu Lintas	Terpilihnya Pelajar Pelopor Keselamatan Transportasi darat	Kota Mataram	2 orang	75.850.000	84.952.000
2.09.01.01.21	Program Peningkatan Manajemen Transportasi	kab/kota tertib lalu lintas	se-NTB	80%	3.366.812.200	3.770.829.664
2.09.01.01.21.01	Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas	Terlaksanannya Evaluasi & Rekomendasi andalalin	se-NTB	10 dokumen	35.900.000	40.208.000
2.09.01.01.21.02	Evaluasi Sistem Transportasi Perkotaan	Terpilihnya kab/Kota Tertib Lalu lintas	se-NTB	10 kab/kota	37.183.200	41.645.184
2.09.01.01.21.03	Evaluasi Sistem Transportasi ASDP	Terlaksanannya Operasional Transportasi ASDP	Provinsi NTB	1 dokumen	3.195.580.000	3.579.049.600
2.09.01.01.21.04	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca	Tersedianya Dokumen Pelaporan Penurunan Gas rumah kaca	Kota Mataram	1 dokumen	35.900.000	40.208.000
2.09.01.01.21.05	Peningkatan SDM Transportasi	Jumlah SDM Perhubungan yang mengikuti Pendidikan	Provinsi NTB	40 orang	62.249.000	69.718.880
2.09.01.01.22	Program Pengembangan Transportasi Laut dan Udara, Darat/Terminal	Jumlah Penumpang/Barang/Kendaraan melalui Dermaga/bandara/terminal	se-NTB	5,5 juta penumpang	863.144.900	966.722.288

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.09.01.01.22.01	Peningkatan/pengembangan keselamatan pelayaran	Terlaksananya Pemantauan Keselamatan	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara	2 rute	224.259.800	251.170.976
2.09.01.01.22.02	Peningkatan/pengembangan Kepelabuhan di NTB	Tersusunnya Database Kepelabuhanan	Kota Mataram	1 dokumen	28.091.400	31.462.368
2.09.01.01.22.03	Peningkatan/pengembangan Angkutan Udara se NTB	Jumlah Penumpang Angkutan Udara di 3 bandara	Kab. Bima, Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumbawa	4,2 juta orang	1.363.200	1.526.784
2.09.01.01.22.04	Peningkatan/pengembangan Angkutan Laut di NTB	Jumlah pengusaha pelabuhan laut yang terbina di 6 pelabuhan	Kota Bima, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	180 orang	84.622.000	94.776.640
2.09.01.01.22.05	Pengendalian, Pengelolaan dan Pengawasan Terminal	Terciptanya ketertiban dan Kenyamanan Terminal Tipe B	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa Barat	4 terminal	524.808.500	587.785.520
2,1	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				38.205.570.624	42.790.239.099
2.10.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				42.919.990.424	48.070.389.275
2.10.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				42.919.990.424	48.070.389.275
2.10.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kelancaraan Administrasi Perkantoran			1.823.139.220	2.041.915.926

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.10.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Mataram	300 Surat	6.940.000	7.772.800
2.10.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Kota Mataram	1 Tahun	582.000.000	651.840.000
2.10.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Pegawai Pengelola Administrasi Keuangan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Kota Mataram	1 Tahun	81.396.000	91.163.520
2.10.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Peralatan Kebersihan	Kota Mataram	1 Tahun	150.940.220	169.053.046
2.10.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	91.561.000	102.548.320
2.10.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Mataram	1 Tahun	53.039.300	59.404.016
2.10.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	28.830.100	32.289.712
2.10.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya Penyediaan Bahan Bacaan (Koran) dan Terlaksananya Penyusunan Buku Profil Diskominfo Prov NTB	Kota Mataram	1 Tahun	65.070.000	72.878.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.10.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya Penyediaan Makanan dan Minuman Untuk Rapat dan Tamu	Kota Mataram	1 Tahun	150.000.000	168.000.000
2.10.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Luar Provinsi	1 Tahun	100.413.200	112.462.784
2.10.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya Tenaga PTT/Kontrak	Kota Mataram	1 Tahun	350.926.200	393.037.344
2.10.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	se-NTB	1 Tahun	162.023.200	181.465.984
2.10.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur			26.563.653.703	29.751.292.147
2.10.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Mataram	3 Unit	339.650.000	380.408.000
2.10.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terselenggaranya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Mataram	10 Unit	361.959.703	405.394.867
2.10.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Terselenggaranya Pengadaan Mebeleur	Kota Mataram	2 Unit	75.000.000	84.000.000
2.10.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	47.610.000	53.323.200
2.10.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Mataram	1 Tahun	369.717.000	414.083.040

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.10.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	10 Unit	349.717.000	391.683.040
2.10.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terselenggaranya Rehab Sengah/Berat Gedung Kantor	Kota Mataram	1 Unit	25.000.000.000	28.000.000.000
2.10.01.01.02.44	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terselenggaranya Rehab Sengah/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Mataram	1 Unit	20.000.000	22.400.000
2.10.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			192.040.200	215.085.024
2.10.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Luar Provinsi	6 orang	100.000.000	112.000.000
2.10.01.01.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Jasmani dan Rohani Aparatur	Kota Mataram	1 Tahun	92.040.200	103.085.024
2.10.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Penyusunan dan Pelaporan Kinerja OPD			296.021.000	331.543.520
2.10.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terselenggaranya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Kota Mataram	2 Dokumen	65.000.000	72.800.000
2.10.01.01.06.03	Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah	Terselenggaranya penyusunan RENSTRA OPD	Kota Mataram	1 Dokumen	63.099.200	70.671.104
2.10.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Terselenggaranya penyusunan Rencana Kerja Tahunan OPD	Kota Mataram	5 Dokumen	100.928.000	113.039.360

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.10.01.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Kerja Tahunan OPD	se-NTB	1 Dokumen	66.993.800	75.033.056
2.10.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Manajemen Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah			47.587.300	53.297.776
2.10.01.01.07.1	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Terselenggaranya Manajemen Aset/Barang milik Daerah	se-NTB	1 Dokumen	47.587.300	53.297.776
2.10.01.01.17	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Bidang Komunikasi Informatika dan Statistik	Provinsi NTB	20 %	514.040.400	575.725.248
2.10.01.01.17.01	Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan bidang kominfotik	Luar Provinsi	8 orang	284.400.000	318.528.000
2.10.01.01.17.02	Kegiatan Bimtek Bidang Kominfotik	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek Bidang Kominfotik	Kota Mataram	100 orang	202.790.000	227.124.800
2.10.01.01.17.04	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jafung Bidang Kominfo	Jumlah pejabat fungsional bidang kominfo yang telah dinilai	Kota Mataram	8 orang	26.850.400	30.072.448
2.10.01.01.18	Program Kerjasama Informasi dengan Media Publik	Persentase Penyebaran Informasi yang Berkualitas	Provinsi NTB	100 %	1.496.525.000	1.676.108.000
2.10.01.01.18.01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah penyebaran informasi kepada publik melalui media publik	se-NTB	4500 informasi	853.500.000	955.920.000
2.10.01.01.18.04	Penguatan Kemitraan dengan Lembaga dan Pers	Jumlah Lembaga dan Pers yang bermitra dalam penyebarluasan dan kualitas informasi	Kota Mataram	10 lembaga/pers	49.900.000	55.888.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.10.01.01.18.05	Publikasi Media Kreatif	Jumlah kegiatan Inspiratif Ekspo	Provinsi NTB	40 kegiatan	593.125.000	664.300.000
2.10.01.01.19	Program Penguatan Keterbukaan Informasi Publik	Tercapainya Peringkat Nasional Keterbukaan Informasi Publik	Provinsi NTB	Peringkat 2 Nasional	1.369.741.700	1.534.110.704
2.10.01.01.19.01	Penguatan Kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Jumlah masyarakat yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan PPID utama	Provinsi NTB	25000 orang	340.783.700	381.677.744
2.10.01.01.19.02	Penguatan Kelembagaan Komisi Informasi	Terselesaikannya Sengketa Informasi Melalui Jalan Mediasi dan Ajudikasi	se-NTB	10 kasus	1.028.958.000	1.152.432.960
2.10.01.01.21	Program Optimalisasi Pelayanan e-Procurement	Persentase Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Akuntabel	Provinsi NTB	100 %	553.558.100	619.985.072
2.10.01.01.21.01	Penguatan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terselenggaranya Penguatan Layanan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Provinsi NTB	2 Dokumen	94.140.000	105.436.800
2.10.01.01.21.02	Penguatan Standarisasi LPSE Provinsi NTB	Terselenggaranya Penguatan Standarisasi LPSE Provinsi NTB	Kota Mataram	3 Dokumen	459.418.100	514.548.272
2.10.01.01.22	Program Pengembangan e-Government	Level Kematangan (Maturity Level) Tata Kelola TIK	Provinsi NTB	Level 3 Terkelola (Managed)	4.433.209.001	4.965.194.081
2.10.01.01.22.01	Pengembangan Data Center dan Data Recovery Center	Persentase Pemenuhan Standar Teknis Data Center dan Data Recovery Center	Kota Mataram	70 %	1.166.455.000	1.306.429.600
2.10.01.01.22.02	Pengembangan infrastruktur jaringan intra pemerintah	Jumlah simpul jaringan Perangkat Daerah yang terkoneksi	Kota Mataram	20 OPD	2.156.176.001	2.414.917.121

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.10.01.01.22.03	Penguatan Kelembagaan Tata Kelola TIK	Jumlah Dokumen Hasil Pertemuan Koordinasi Komite E-Gov	Provinsi NTB	2 Dokumen	417.600.000	467.712.000
2.10.01.01.22.04	Pembinaan dan Pengendalian Tata kelola TIK	Jumlah OPD yang terbina	Kota Mataram	10 OPD	323.410.000	362.219.200
2.10.01.01.22.05	Pengembangan dan Pemanfaatan Aplikasi TIK	Jumlah Aplikasi TIK yang dikembangkan dan dimanfaatkan	Kota Mataram	3 Aplikasi	136.880.000	153.305.600
2.10.01.01.22.06	Pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintahan dan Publik	Jumlah Aplikasi yang terhubung ke Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Kota Mataram	10 Aplikasi	232.688.000	260.610.560
2.10.01.01.24	Program Pengelolaan Pelayanan Telekomunikasi	Tercapainya Presentase Cakupan Layanan Telekomunikasi	Provinsi NTB	60 %	489.280.000	547.993.600
2.10.01.01.24.01	Pengendalian Telekomunikasi	Jumlah Laporan hasil Pengendalian Layanan Telekomunikasi	Provinsi NTB	1 dokumen	362.140.000	405.596.800
2.10.01.01.24.02	Penguatan Kemitraan Telekomunikasi	Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kemitraan Telekomunikasi	Provinsi NTB	1 dokumen	127.140.000	142.396.800
2.10.01.01.26	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Sebaran Komunitas Informasi	Provinsi NTB	50 %	426.775.000	477.988.000
2.10.01.01.26.01	Temu Pelajar Kreatif	Jumlah Pelajar Kreatif sebagai Objek Informasi	Provinsi NTB	500 Pelajar	177.150.000	198.408.000
2.10.01.01.26.02	Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah SDM anggota KIM yang terlatih	Provinsi NTB	200 orang	249.625.000	279.580.000
2,11	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH				14.463.047.400	16.198.613.088
2.11.01	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				14.463.047.400	16.198.613.088
2.11.01.01	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Induk)				10.195.174.500	11.418.595.440

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.11.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.146.535.500	1.284.119.760
2.11.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Ketersediaan Administrasi Perkantoran	Kota Mataram	1 Tahun	12.600.000	14.112.000
2.11.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi (telp/fax,koran, majalah) sumber daya air dan listrik	Kota Mataram	16 Unit	257.700.000	288.624.000
2.11.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Efektivits Pengelolaan Admisitrasi Keuangan Diskop UKM	Kota Mataram	10 org	106.608.000	119.400.960
2.11.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya Kebersihan Kantor	Kota Mataram	1 tahun	163.352.500	182.954.800
2.11.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK dalam menunjang kegiatan adminstrasi perkantoran	Kota Mataram	1 tahun	16.107.500	18.040.400
2.11.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Meningkatnya Ketertiban Administrasi Perkantoran	Kota Mataram	1 tahun	15.266.500	17.098.480
2.11.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terfasilitasinya sumber penerangan berenergi listrik dan peralatan yang memerlukan instalasi listrik	Kota Mataram	1 tahun	11.259.000	12.610.080
2.11.01.01.01.13	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya dukungan sarana kantor	Kota Mataram	200 unit	9.700.000	10.864.000
2.11.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur melalui bacaan	Kota Mataram	132 exp	14.520.000	16.262.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.11.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum tamu	Kota Mataram	1 tahun	20.727.000	23.214.240
2.11.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tersedianya dana perjalanan dinas dalam rangka penyelarasan program pusat dan daerah	Kota Mataram	30 ORG	328.363.000	367.766.560
2.11.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Meningkatnya pelayanan dan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Kota Mataram	6 org	190.332.000	213.171.840
2.11.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Paratur			803.288.500	899.683.120
2.11.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Meningkatnya kenyamanan kantor	Kota Mataram	1 Paket	550.000.000	616.000.000
2.11.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Meningkatnya pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas	Kota Mataram	36 Unit	233.500.000	261.520.000
2.11.01.01.02.38	Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Meningkatnya pemeliharaan arsip kantor	Kota Mataram	1 tahun	19.788.500	22.163.120
2.11.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			14.800.000	16.576.000
2.11.01.01.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Tersedianya jasa honorarium kegiatan imtaq dan senam	Kota Mataram	26 org	14.800.000	16.576.000
2.11.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan keuangan			192.795.500	215.930.960

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.11.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian knej dan ikhtisar realisasi kinej SKPD	Meningkatnya sistem pelaporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)Laporan semesteran I dan Laporan Tahunan SKPD	Kota Mataram	3 Laporan	57.239.500	64.108.240
2.11.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Meningkatnya informasi Pengelolaan Keuangan SKPD	Kota Mataram	1 Dok	28.555.500	31.982.160
2.11.01.01.06.05	Penyusunan Rencana Kera SKPD	Tersusunya Rencana Kerja Tahunan SKPD	Kota Mataram	3 Laporan	106.439.500	119.212.240
2.11.01.01.06.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Termonitoring dan terevaluasinya program/kegiatan	Kota Mataram	9 program	561	628,32
2.11.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan SKPD			17.005.000	19.045.600
2.11.01.01.07.01	Peningkatan Manajemen Asset / Barang Milik Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Aset/Barang daerah	Kota Mataram	1 Laporan	17.005.000	19.045.600
2.11.01.01.15	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Konduksif	Persentase Peningkatan Skala Usaha Kecil menjadi Menengah	se-NTB	80%	26.703.000	29.907.360
2.11.01.01.15.06	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terselenggaranya koordinasi teknis program pemberdayaan dan pengembangan UMKM	se-NTB	125 UMKM	26.703.000	29.907.360
2.11.01.01.16	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan Wira Usaha Baru	se-NTB	10%	6.574.250.000	7.363.160.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.11.01.01.16.01	Fasilitasi Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis	Jumlah wirausaha baru dan UKM yang dilatih/diinkubator dan mendapat fasilitasi sarana usaha/peralatan	se-NTB	1000 WUB	6.574.250.000	7.363.160.000
2.11.01.01.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif dan RAT	se-NTB	60%	1.419.797.000	1.590.172.640
2.11.01.01.18.06	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SHAT) dengan Kabupaten/Kota se Proinsi NTB	Kota Mataram	30 Orang	196.787.000	220.401.440
2.11.01.01.18.08	Rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi	Meningkatnya jumlah koperasi syariah dan unit simpan pinjam	se-NTB	100 koperasi/KSP/USP-PS	511.455.000	572.829.600
2.11.01.01.18.10	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi	Jumlah pengelola koperasi yang terlatih	Kota Mataram	200 koperasi/KSP	711.555.000	796.941.600
2.11.01.02	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah				4.267.872.900	4.780.017.648
2.11.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya barang-barang penunjang/administrasi/surat menyurat perkantoran			377.181.900	422.443.728
2.11.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi (telp/fax,koran/majalah), sumber daya air dan listrik	Provinsi NTB	1 Tahun	38.266.000	42.857.920
2.11.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Administrasi Keuangan	Provinsi NTB	9 Org	64.048.000	71.733.760

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.11.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Provinsi NTB	1 Tahun	134.333.000	150.452.960
2.11.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan ATK dalam menunjang kegiatan administrasi kantor	Provinsi NTB	1 Tahun	16.358.000	18.320.960
2.11.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan surat-surat dinas	Provinsi NTB	1 Tahun	10.956.000	12.270.720
2.11.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terfasilitasinya sumber penerangan listrik dan peralatan yang memerlukan instalasi listrik	Provinsi NTB	1 Tahun	4.081.500	4.571.280
2.11.01.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya Dukungan Sarana Kantor	Provinsi NTB	394 Unit/Buah	14.450.000	16.184.000
2.11.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya wawasan dan pengetahuan aparatur melalui media bacaan	Provinsi NTB	100 Exp	1.800.000	2.016.000
2.11.01.02.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Provinsi NTB	1 Tahun	92.889.400	104.036.128

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.11.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sarana Dan Prasarana Aparatur			408.996.000	458.075.520
2.11.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Provinsi NTB	1 Paket	373.255.000	418.045.600
2.11.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional	Terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas oprasional	Provinsi NTB	5 Unit	35.741.000	40.029.920
2.11.01.02.07	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengelolaan Aset/Barang Daerah			9.393.000	10.520.160
2.11.01.02.07.01	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Meningkatnya Manajemen dan Pelaporan Pengelolaan Aset/Barang Daerah	Provinsi NTB	1 Buku	9.393.000	10.520.160
2.11.01.02.16	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Pertumbuhan Wira Usaha Baru	se-NTB	10%	2.722.302.000	3.048.978.240
2.11.01.02.16.06	Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan	Jumlah Pelaku Usaha Yang Terlatih diBidang Kewirausahaan	Provinsi NTB	300 WUB	850.000.000	952.000.000
2.11.01.02.16.07	Pelatihan Manajemen Pengelolaan KUMKM	Terlaksananya Kegiatan Diklat	Provinsi NTB	270 KUKM	1.122.302.000	1.256.978.240

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.11.01.02.16.12	Penyelenggaraan pendampingan diklat dan penunjang kegiatan diklat KUMKM	Meningkatnya Efektivitas Pelaksanaan Pendampingan Diklat KUMKM dan Penunjang Kegiatan Diklat KUMKM	Provinsi NTB	4/43 Kgt/Pendamping Diklat KUMKM	750.000.000	840.000.000
2.11.01.02.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif dan RAT	se-NTB	60%	750.000.000	840.000.000
2.11.01.02.18.11	Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi	Jumlah Pengelola Koperasi Yang Terlatih	Provinsi NTB	300 Koperasi	750.000.000	840.000.000
2,12	PENANAMAN MODAL				13.791.627.625	15.446.622.940
2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				13.791.627.625	15.446.622.940
2.12.01.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				13.791.627.625	15.446.622.940
2.12.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kelancaran Administrasi Perkantoran			3.146.788.025	3.524.402.588
2.12.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dinas	Kota Mataram	2.500 Surat	6.609.000	7.402.080
2.12.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Listrik, Air, Telepon, Internet dan Faximile	Kota Mataram	1 Tahun	225.935.000	253.047.200
2.12.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kondisi Kendaraan Dinas	Kota Mataram	26 Unit	50.410.000	56.459.200
2.12.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	SDM Pengelola Administrasi Keuangan		6 Pegawai	55.000.000	61.600.000
2.12.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Bahan dan Jasa Kebersihan kantor		1 Tahun	135.170.750	151.391.240
2.12.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya Kondisi Peralatan Kerja		80 Unit	56.000.000	62.720.000
2.12.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor		1 Tahun	52.008.925	58.249.996
2.12.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan		1 Tahun	42.141.900	47.198.928

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.12.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		6 Jenis/Unit	56.069.400	62.797.728
2.12.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Harian Lokal, Nasional dan Majalah sebagai bahan bacaan Aparatur		72 Eksampar	18.900.000	21.168.000
2.12.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Konsumsi untuk Rapat/Kegiatan		1 Tahun	50.000.000	56.000.000
2.12.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya Rapat, Konsultasi/Koordinasi dengan Pusat/Daerah		19 OT	150.225.000	168.252.000
2.12.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa Administrasi	Kota Mataram	1 Tahun	2.190.647.000	2.453.524.640
2.12.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat Koordinasi di Kab/Kota terkait dengan Penanaman Modal		20 OT	57.671.050	64.591.576
2.12.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kelancaran Tugas Aparatur			1.128.700.000	1.264.144.000
2.12.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Kelancaran tugas Aparatur		1 Unit	500.000.000	560.000.000
2.12.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional		1 Unit	350.000.000	392.000.000
2.12.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Meubelair		8 Unit	45.000.000	50.400.000
2.12.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan Gedung Kantor		1 Unit	50.000.000	56.000.000
2.12.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional R-4 dan R-2		26 Unit	136.200.000	152.544.000
2.12.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor		15 Unit	42.500.000	47.600.000
2.12.01.01.02.29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan Meubelair		10 Unit	5.000.000	5.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.12.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kompetensi Aparatur			86.826.000	97.245.120
2.12.01.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan PM		50 Orang	37.408.000	41.896.960
2.12.01.01.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis		80 Orang	34.238.000	38.346.560
2.12.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Aparatur yang terbina mental dan fisiknya		67 Pegawai	15.180.000	17.001.600
2.12.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kelancaran Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			165.031.000	184.834.720
2.12.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Kinerja SKPD	Kota Mataram	4 Dokumen	58.353.500	65.355.920
2.12.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan SKPD	Kota Mataram	1 Dokumen	21.640.000	24.236.800
2.12.01.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Rencana Kerja (RENJA) SKPD	Kota Mataram	2 Dokumen	36.437.500	40.810.000
2.12.01.01.06.06	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	Kota Mataram	2 Dokumen	48.600.000	54.432.000
2.12.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Aset			31.764.600	35.576.352
2.12.01.01.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Laporan Asset/Barang		2 Dokumen	31.764.600	35.576.352
2.12.01.01.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan Kerjasama UMKM dengan Pengusaha Besar	Provinsi NTB	20 %	5.373.998.000	6.018.877.760
2.12.01.01.15.01	Peningkatan kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Perjanjian Kerjasama UMKM dengan Pengusaha Besar	Provinsi NTB	30 Perjanjian Kerjasama	334.989.000	375.187.680
2.12.01.01.15.02	Pengembangan potensi unggulan daerah	Pengembangan Website Potensi Investasi Daerah	Provinsi NTB	1 aplikasi	875.000.000	980.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.12.01.01.15.04	Peningkatan Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA	Jumlah Perusahaan yang difasilitasi dalam penyelesaian masalah		5 Perusahaan	450.000.000	504.000.000
2.12.01.01.15.05	Penyelarasan Program Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Kebijakan Penanaman Modal		2 Dokumen	485.794.000	544.089.280
2.12.01.01.15.06	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah MOU yang dihasilkan	Provinsi NTB	30 Dokumen MOU	650.000.000	728.000.000
2.12.01.01.15.08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	- Perusahaan yang menyampaikan LKPM - Jumlah Perusahaan yang di pantau (PMDN) - Bintek LKPM		450, 20, 50 Perusahaan, Perusahaan, Orang	350.000.000	392.000.000
2.12.01.01.15.09	Peningkatan Kualitas SDM guna Peningkatan Pelayanan Investasi	Jumlah SDM yang terlatih		60 Orang	74.215.000	83.120.800
2.12.01.01.15.10	Penyelenggaraan pameran investasi	pameran investasi yang diikuti		6 Event	1.494.000.000	1.673.280.000
2.12.01.01.15.11	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Investasi	Laporan hasil evaluasi		1 Dokumen	100.000.000	112.000.000
2.12.01.01.15.12	Peningkatan Promosi Dalam Daerah	Jumlah Calon Investor yang berminat untuk berinvestasi		5 Perusahaan	560.000.000	627.200.000
2.12.01.01.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Nilai Investasi	Provinsi NTB	15,4 T	3.858.520.000	4.321.542.400
2.12.01.01.16.02	Peningkatan kerjasama antara dunia usaha	Jumlah Perusahaan yang difasilitasi untuk melakukan Kerjasama PMA/PMDN	Provinsi NTB	30 Perusahaan	307.020.000	343.862.400
2.12.01.01.16.04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Jumlah Menu Aplikasi Perizinan	Provinsi NTB	1 Menu	350.000.000	392.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.12.01.01.16.05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	1. database perkembangan realisasi investasi informasi penanaman modal 2. database jumlah investor dan rencana nilai investasi (PMDN/PMA)		4, 4 Dokumen, Dokumen	300.000.000	336.000.000
2.12.01.01.16.06	Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal	Jumlah Ijin dan Non Ijin yang diterbitkan/dikeluarkan		3.000 Ijin	2.456.000.000	2.750.720.000
2.12.01.01.16.09	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		75 Baik	95.500.000	106.960.000
2.12.01.01.16.10	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana dan Realisasi Penanaman Modal	Laporan Hasil Evaluasi Penanaman Modal		2 Laporan	350.000.000	392.000.000
2,13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA				56.835.136.900	63.655.353.328
2.13.01	Dinas Pemuda dan Olahraga				56.835.136.900	63.655.353.328
2.13.01.01	Dinas Pemuda dan Olahraga				56.835.136.900	63.655.353.328
2.13.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Kota Mataram	13 Kegiatan	1.852.046.500	2.074.292.080
2.13.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Kota Mataram	12 Bulan	28.600.000	32.032.000
2.13.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Mataram	12 Bulan	277.000.000	310.240.000
2.13.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	12 Bulan	15.000.000	16.800.000
2.13.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	12 Bulan	211.332.500	236.692.400
2.13.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Kota Mataram	12 Bulan	352.824.600	395.163.552

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.13.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor	Kota Mataram	12 Bulan	22.916.700	25.666.704
2.13.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	12 Bulan	301.036.200	337.160.544
2.13.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	12 Bulan	227.394.500	254.681.840
2.13.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makan minum rapat, tamu, dan kegiatan	Kota Mataram	12 Bulan	24.000.000	26.880.000
2.13.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya penyelarasan program Pemerintah Pusat dan Daerah	Luar Provinsi	12 Bulan	75.000.000	84.000.000
2.13.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya tenaga administrasi dan teknis perkantoran	Kota Mataram	2 Orang	81.600.000	91.392.000
2.13.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelarasan program Pemerintah Provinsi dan Kab./Kota	se-NTB	12 Bulan	100.000.000	112.000.000
2.13.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor	Kota Mataram	12 Bulan	135.342.000	151.583.040
2.13.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur DISPORA NTB	Kota Mataram	6 Kegiatan	2.048.700.000	2.294.544.000
2.13.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan fasilitas gedung kantor	Kota Mataram	3 Paket	150.700.000	168.784.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.13.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	5 Unit	1.342.450.000	1.503.544.000
2.13.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kota Mataram	12 Bulan	100.000.000	112.000.000
2.13.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	12 Bulan	283.450.000	317.464.000
2.13.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Mataram	12 Bulan	20.000.000	22.400.000
2.13.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota Mataram	5 Paket	152.100.000	170.352.000
2.13.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terciptanya apratur DISPORA NTB yang handal dan profesional	Kota Mataram	3 Kegiatan	24.000.000	26.880.000
2.13.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya kegiatan peningkatan mental dan fisik aparatur	Kota Mataram	12 Bulan	24.000.000	26.880.000
2.13.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Meningkatnya kualitas dokumen rencana kerja DISPORA NTB	Kota Mataram	6 Dokumen	162.764.300	182.296.016
2.13.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Kota Mataram	1 Dokumen	23.500.000	26.320.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.13.01.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Terlaksananya penyusunan rencana kerja DISPORA NTB	Kota Mataram	5 Dokumen	139.264.300	155.976.016
2.13.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya data Asset/BMD DISPORA NTB yang Valid	Kota Mataram	1 Dokumen	47.686.000	53.408.320
2.13.01.01.07.01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	Terlaksananya peningkatan manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Kota Mataram	1 Dokumen	47.686.000	53.408.320
2.13.01.01.15	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase organisasi pemuda yang aktif	se-NTB	80 %	1.499.768.400	1.679.740.608
2.13.01.01.15.01	Pendataan potensi kepemudaan	Terlaksananya pendataan potensi Kepemudaan Provinsi NTB	Kota Mataram	1 Dokumen	57.551.000	64.457.120
2.13.01.01.15.11	Pengembangan kelompok pemuda dan keterampilan	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelompok pemuda	se-NTB	2000 Orang	358.000.000	400.960.000
2.13.01.01.15.12	Pengembangan kelompok pemuda pelopor	Terlaksananya kegiatan seleksi Pemuda Pelopor	se-NTB	5 Bidang	203.552.600	227.978.912
2.13.01.01.15.13	Peringatan hari-hari besar nasional	Terlaksananya peringatan Hari-Hari Besar Nasional	Kota Mataram	2 Kegiatan	880.664.800	986.344.576
2.13.01.01.17	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Presentase wirausahawan muda	Kota Mataram	80 %	510.532.000	571.795.840
2.13.01.01.17.01	Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda	Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi kelompok pemuda	Kota Mataram	100 Orang	510.532.000	571.795.840
2.13.01.01.19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Persentase pelatih yang bersertifikasi	Kota Mataram	500 Orang	2.940.990.000	3.293.908.800
2.13.01.01.19.01	Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	Terlaksananya pelatihan pelatih dan wasit/juri cabang olahraga	Kota Mataram	1500 Orang	2.857.180.000	3.200.041.600
2.13.01.01.19.04	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Olahraga	Terlaksananya Rakor Keolahragaan	Kota Mataram	100 Orang	83.810.000	93.867.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.13.01.01.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah Prestasi Olahraga	Luar Provinsi	10 Medali	8.764.060.000	9.815.747.200
2.13.01.01.20.06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terselenggaranya kegiatan kompetisi olahraga	Luar Provinsi	6 Kompetisi	8.757.460.000	9.808.355.200
2.13.01.01.20.07	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Terlaksananya gerak jalan santai dan senam massal	Kota Mataram	1000 Orang	6.600.000	7.392.000
2.13.01.01.21	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terstandarnya sarana dan prasarana olahraga	Kota Mataram	2 Stadion Standar Nasional (GOR Turide dan Stadion Lawata)	38.984.589.700	43.662.740.464
2.13.01.01.21.02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Kota Mataram	5 Paket	37.523.917.200	42.026.787.264
2.13.01.01.21.07	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya pemeliharaan sarana pemuda dan prasarana olahraga	Kota Mataram	7 Paket	1.248.100.000	1.397.872.000
2.13.01.01.21.08	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pemuda	Tersedianya sarana dan prasarana pemuda	Kota Mataram	3 Paket	212.572.500	238.081.200
2,14	STATISTIK				3.051.895.400	3.418.122.848
2.14.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				42.919.990.424	48.070.389.275
2.14.01.01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				42.919.990.424	48.070.389.275
2.14.01.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Sektoral	Tersedianya NTB 1 (satu) Data	Provinsi NTB	15 Dokumen Lengkap	3.051.895.400	3.418.122.848
2.14.01.01.15.02	Pelayanan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah Masyarakat yang Terlayani	se-NTB	12000 orang	395.500.000	442.960.000
2.14.01.01.15.03	Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya data dan informasi pembangunan yang terintegrasi	se-NTB	2 dokumen	434.828.000	487.007.360

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.14.01.01.15.06	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Sosial	Meningkatnya ketersediaan data statistik yang aktual, akurat dan relevan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Sosial	Provinsi NTB	5 Dokumen	681.236.400	762.984.768
2.14.01.01.15.07	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Ekonomi	Meningkatnya ketersediaan data statistik yang aktual, akurat dan relevan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang Ekonomi	Provinsi NTB	5 Dokumen	925.010.300	1.036.011.536
2.14.01.01.15.08	Penyusunan, Pengumpulan, Pengolahan, Updating, Analisis dan Diseminasi Statistik Sumber Daya Alam dan Infrastruktur	Meningkatnya ketersediaan data statistik yang aktual, akurat dan relevan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Bidang SDA dan Infrastruktur	Provinsi NTB	4 Dokumen	615.320.700	689.159.184
2,15	PERSANDIAN				1.662.524.400	1.862.027.328
2.15.01.01.15	Program Optimalisasi Tata Kelola Persandian	Persentase Peningkatan Sistem Keamanan Informasi	Provinsi NTB	60 %	1.662.524.400	1.862.027.328
2.15.01.01.15.01	Kegiatan Peningkatan SDM Persandian	Meningkatnya Kapasitas SDM Persandian	Kota Mataram	100 orang	1.196.693.600	1.340.296.832

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.15.01.01.15.02	Kegiatan Operasional dan Tata Kelola Persandian	Terlaksananya Pengamanan Perangkat Daerah	se-NTB	1 Dokumen	22.643.600	25.360.832
2.15.01.01.15.03	Kegiatan Penguatan Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi	Tersusunnya Peraturan tentang Persandian dan Keamanan Informasi	se-NTB	4 Dokumen	142.393.600	159.480.832
2.15.01.01.15.04	Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Keamanan Informasi	Terlaksananya Pengawasan, dan Evaluasi Pelaksanaan Keamanan Informasi di Provinsi NTB	se-NTB	10 Dokumen	300.793.600	336.888.832
2,16	KEBUDAYAAN				8.660.646.350	9.699.923.912
2.16.01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan				8.660.646.350	9.699.923.912
2.16.01.01	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Induk)				4.302.055.000	4.818.301.600
2.16.01.01.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Kelompok adat budaya daerah yang dikembangkan	Provinsi NTB	100%	159.055.000	178.141.600
2.16.01.01.15.01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Jumlah adat budaya daerah yang dilestarikan	Provinsi NTB	10 klp	159.055.000	178.141.600
2.16.01.01.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Provinsi NTB	100%	2.851.000.000	3.193.120.000
2.16.01.01.16.04	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal	Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	se-NTB	400 Orang	330.000.000	369.600.000
2.16.01.01.16.05	Pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air	Terlaksananya pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah purbakala dan peninggalan bawah air	se-NTB	1 Paket	95.000.000	106.400.000
2.16.01.01.16.06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata	se-NTB	1 Kegiatan	560.000.000	627.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.16.01.01.16.22	Rehabilitas/Renovasi/Rekonstruksi Benda Cagar Budaya (BCB)	Terlaksananya Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	se-NTB	10 Paket	1.866.000.000	2.089.920.000
2.16.01.01.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Provinsi NTB	100%	1.292.000.000	1.447.040.000
2.16.01.01.17.05	Penyelenggaraan festival budaya daerah	Terlaksananya Festifal Budaya daerah	se-NTB	1 Festival	1.200.000.000	1.344.000.000
2.16.01.01.17.11	Peningkatan teknis sanggar seni	terlaksananya teknik sanggar seni	Provinsi NTB	7 event	92.000.000	103.040.000
2.16.01.03	Taman Budaya				2.017.112.350	2.259.165.832
2.16.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Kantor			1.227.112.350	1.374.365.832
2.16.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat menyurat Dinas	Kota Mataram	1 thn	2.400.000	2.688.000
2.16.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa air, listrik, dan Komunikasi Internet	se-NTB	1 Tahun	310.000.000	347.200.000
2.16.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	se-NTB	1 Tahun	45.156.000	50.574.720
2.16.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terkirimnya Surat-surat Dinas	se-NTB	1 Tahun	414.492.600	464.231.712
2.16.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	se-NTB	1 Tahun	14.711.250	16.476.600
2.16.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggadaan	se-NTB	1 Tahun	9.600.000	10.752.000
2.16.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Terwujudnya kecepatan dan ketepatan penyelesaian	se-NTB	1 Tahun	13.462.500	15.078.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.16.01.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya saran dan prasarana kantor yang memadai	se-NTB	1 Tahun	50.000.000	56.000.000
2.16.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan buku, publikasi, surat kabar/majalah	se-NTB	1 Tahun	3.500.000	3.920.000
2.16.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Kebutuhan makanan dan Minuman	se-NTB	1 Tahun	30.000.000	33.600.000
2.16.01.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terjadainya keselarasan Program/Kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah	se-NTB	1 tahun	88.570.000	99.198.400
2.16.01.03.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	se-NTB	1 Tahun	67.820.000	75.958.400
2.16.01.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	terjadinya Keselarasan Program/Kegiatan antara Pemerintah Provinsi dengan Kab/Kota	se-NTB	1 Tahun	40.000.000	44.800.000
2.16.01.03.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan Kantor	se-NTB	1 Tahun	137.400.000	153.888.000
2.16.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana yang siap pakai			151.500.000	169.680.000
2.16.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Mataram	1 Tahun	50.000.000	56.000.000
2.16.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang memadai	Kota Mataram	1 Tahun	29.000.000	32.480.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.16.01.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya Perlengkapan gedung Kantor	Kota Mataram	1 tahun	30.000.000	33.600.000
2.16.01.03.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor yang memadai	Kota Mataram	1 tahun	20.000.000	22.400.000
2.16.01.03.02.32	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	Tersedianya Fasilitas Taman, Tempat Parkir dan halaman kantor	Kota Mataram	1 tahun	22.500.000	25.200.000
2.16.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Sistem pelaporan Kinerja dan Keuangan			13.650.000	15.288.000
2.16.01.03.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	tersusunnya dokumen Perencanaan SKPD	Kota Mataram	1 tahun	13.650.000	15.288.000
2.16.01.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			12.750.000	14.280.000
2.16.01.03.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersedianya laporan keuangan daerah	Kota Mataram	1 Tahun	12.750.000	14.280.000
2.16.01.03.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu			403.600.000	452.032.000
2.16.01.03.15.07	Pergelaran Tetap	Terlaksananya Pergelaran Tetap	Kota Mataram	1 Tahun	255.000.000	285.600.000
2.16.01.03.15.09	Olah Seni	Terselenggaranya Olah Seni	Kota Mataram	1 Tahun	148.600.000	166.432.000
2.16.01.03.17	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya			118.500.000	132.720.000
2.16.01.03.17.08	Temu Budaya se Indonesia	Terlaksananya Temu Budaya se Indonesia	Luar Provinsi	1 keg	118.500.000	132.720.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.16.01.03.18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan			90.000.000	100.800.000
2.16.01.03.18.03	Pengembangan kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah	terbinanya kemitraan pengelolaan kekayaan budaya	Luar Provinsi	2 keg	90.000.000	100.800.000
2.16.01.04	Museum Negeri				2.341.479.000	2.622.456.480
2.16.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Kantor			1.091.851.200	1.222.873.344
2.16.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	terkirimnya surat - surat dinas	se-NTB	1324 buah	9.000.000	10.080.000
2.16.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya air, listrik, internet	se-NTB	1 tahun	213.000.000	238.560.000
2.16.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	se-NTB	1 paket	46.290.200	51.845.024
2.16.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	terciptanya kantor yang nyaman	se-NTB	1 tahun	421.000.000	471.520.000
2.16.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	se-NTB	1 paket	6.161.000	6.900.320
2.16.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya cetak dan penggandaan	se-NTB	1 tahun	37.000.000	41.440.000
2.16.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya penerangan kantor yang baik	se-NTB	1 tahun	15.000.000	16.800.000
2.16.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	se-NTB	1 tahun	8.400.000	9.408.000
2.16.01.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	se-NTB	1 tahun	44.000.000	49.280.000
2.16.01.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	terselaraskan program pemerintah pusat dan daerah	se-NTB	1 tahun	39.000.000	43.680.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.16.01.04.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	terselaraskannya program pemerintah provinsi dan kabupaten kota	se-NTB	1 tahun	33.000.000	36.960.000
2.16.01.04.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	tersedianya jasa keamanan kantor	se-NTB	10 org	220.000.000	246.400.000
2.16.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana yang siap pakai			145.650.000	163.128.000
2.16.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	tersedianya gedung kantor yang memadai	se-NTB	1 tahun	28.000.000	31.360.000
2.16.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas/operasional yang memadai	se-NTB	1 tahun	31.650.000	35.448.000
2.16.01.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	tersedianya rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	se-NTB	1 tahun	25.000.000	28.000.000
2.16.01.04.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	se-NTB	1 tahun	15.000.000	16.800.000
2.16.01.04.02.32	Pemeliharaan rutin/berkala taman; tempat parkir dan halaman kantor	tersedianya taman, tempat parkir dan halaman kantor	se-NTB	1 tahun	16.000.000	17.920.000
2.16.01.04.02.36	Pemeliharaan Buku Perpustakaan	tersedianya buku perpustakaan	se-NTB	1 paket	30.000.000	33.600.000
2.16.01.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Aparatur yang Sehat Jasmani dan Rohani			6.600.000	7.392.000
2.16.01.04.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	meningkatnya mental dan fisik aparatur	se-NTB	1 tahun	6.600.000	7.392.000
2.16.01.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya Sistem pelaporan Kinerja dan Keuangan			16.517.800	18.499.936
2.16.01.04.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	tersusunnya dokumen perencanaan	se-NTB	5 dokumen	16.517.800	18.499.936
2.16.01.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel			18.360.000	20.563.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.16.01.04.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	tersedianya manajemen asset/barang milik daerah	se-NTB	1 tahun	18.360.000	20.563.200
2.16.01.04.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu			455.000.000	509.600.000
2.16.01.04.15.01	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	terlaksananya pelestarian dan akulturasi adat budaya daerah	se-NTB	1 tahun	455.000.000	509.600.000
2.16.01.04.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi			457.500.000	512.400.000
2.16.01.04.16.13	Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala	terlaksananya kajian koleksi museum	se-NTB	1 tahun	25.000.000	28.000.000
2.16.01.04.16.15	Perawatan/pemeliharaan preventif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak	Terlaksananya kegiatan perawatan/pemeliharaan BCB bergerak	se-NTB	1 tahun	140.000.000	156.800.000
2.16.01.04.16.16	Konservasi Kuratif Benda Cagar Budaya (BCB) Bergerak	Terawatnya koleksi museum	se-NTB	1 tahun	31.500.000	35.280.000
2.16.01.04.16.17	Pameran keliling museum	Terlaksananya pameran keliling museum	se-NTB	1 tahun	95.000.000	106.400.000
2.16.01.04.16.18	Pameran Temporer Museum	Terlaksananya pameran temporer	se-NTB	1 tahun	37.000.000	41.440.000
2.16.01.04.16.19	Penyuluhan Koleksi Museum	Terlaksananya penyuluhan koleksi museum	se-NTB	1 tahun	129.000.000	144.480.000
2.16.01.04.18	Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan			150.000.000	168.000.000
2.16.01.04.18.03	Pengembangan Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antardaerah	Tersedianya informasi tentang Museum Negeri NTB	Luar Provinsi	1 tahun	150.000.000	168.000.000
2,17	PERPUSTAKAAN				5.994.813.639	6.714.191.276
2.17.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				26.544.089.139	29.729.379.836

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.17.01.01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				26.544.089.139	29.729.379.836
2.17.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan Administrasi yang Terselenggara			1.172.317.039	1.312.995.084
2.17.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Pelayanan Administrasi yang Terselenggara	Kota Mataram	8500,00 Surat	1.770.000	1.982.400
2.17.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pelayanan Administrasi yang Terselenggara	Kota Mataram	12 Bulan	344.400.000	385.728.000
2.17.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Pelayanan Administrasi yang Terselenggara	Kota Mataram	12 Bulan	15.375.000	17.220.000
2.17.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Pelayanan Administrasi yang Terselenggara	Kota Mataram	12 Bulan	62.472.000	69.968.640
2.17.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Pelayanan Administrasi yang Terselenggara	Kota Mataram	12 Bulan	273.052.105	305.818.358
2.17.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Pelayanan Administrasi yang Terselenggara	Kota Mataram	12 Bulan	11.230.764	12.578.456
2.17.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Administrasi yang Terselenggara	Kota Mataram	12 Bulan	8.234.410	9.222.539
2.17.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Pelayanan Administrasi yang Terselenggara	Kota Mataram	12 Bulan	3.040.760	3.405.651
2.17.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Pelayanan Administrasi yang Terselenggara	Kota Mataram	12 Bulan	7.200.000	8.064.000
2.17.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Pelayanan Administrasi yang Terselenggara	Kota Mataram	12 Bulan	19.980.000	22.377.600
2.17.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Pelayanan Administrasi yang Terselenggara	Kota Mataram	12 Bulan	70.098.000	78.509.760
2.17.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Pelayanan Administrasi yang Terselenggara	Kota Mataram	5 Orang	325.280.000	364.313.600
2.17.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Pelayanan Administrasi yang Terselenggara	Kota Mataram	12 Bulan	30.184.000	33.806.080
2.17.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur			2.965.904.300	3.321.812.816

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.17.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Mebeleur	Kota Mataram	1 Tahun	452.500.000	506.800.000
2.17.01.01.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	701.000.000	785.120.000
2.17.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Terawat dengan Baik	Kota Mataram	1 Tahun	275.796.900	308.892.528
2.17.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur	Kota Mataram	1 Tahun	13.000.000	14.560.000
2.17.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor dengan Baik	Kota Mataram	1 Tahun	33.000.000	36.960.000
2.17.01.01.02.32	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur	Kota Mataram	1 Tahun	50.000.000	56.000.000
2.17.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tercapainya Rehabilitasi Sengah/Berat Gedung Kantor	Kota Mataram	5 Paket	1.440.607.400	1.613.480.288
2.17.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur			92.600.000	103.712.000
2.17.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Kota Mataram	1 Tahun	12.000.000	13.440.000
2.17.01.01.05.15	Penetapan angka kredit fungsional	Terlaksananya penilaian dan angka kredit fungsional pustakawan dan arsiparis	Kota Mataram	1 Tahun	80.600.000	90.272.000
2.17.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Rencana Kerja SKPD			113.200.000	126.784.000
2.17.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Kota Mataram	6 Dokumen	113.200.000	126.784.000
2.17.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah			44.919.800	50.310.176

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.17.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Manajemen Asset/Barang Milik Daerah Terjaga Dengan Baik	Kota Mataram	1 Tahun	44.919.800	50.310.176
2.17.01.01.21	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Provinsi NTB	100%	1.605.872.500	1.798.577.200
2.17.01.01.21.01	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Program Pengembangan Budaa Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kota Mataram	1 Kegiatan	60.876.000	68.181.120
2.17.01.01.21.02	Pengembangan minat dan budaya baca	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kota Mataram	1 Tahun	52.459.500	58.754.640
2.17.01.01.21.05	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Program Pengembangan Budaya dan Pembinaan Perpustakaan	Kota Mataram	3 Paket	600.000.000	672.000.000
2.17.01.01.21.07	Perencanaan dan penyusunan program budaya baca	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kota Mataram	1 Kegiatan	70.293.500	78.728.720
2.17.01.01.21.09	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kota Mataram	3 Paket	309.350.000	346.472.000
2.17.01.01.21.10	Monitoring; evaluasi dan pelaporan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kota Mataram	10 Kab./Kota	25.318.500	28.356.720
2.17.01.01.21.12	Peningkatan SDM Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kota Mataram	150 Orang	249.705.000	279.669.600
2.17.01.01.21.13	Pelestarian bahan pustaka (penjilidan buku rusak)	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kota Mataram	3175 Eksemplar	24.500.000	27.440.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.17.01.01.21.14	Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka/Karya Cetak dan Karya Rekam	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kota Mataram	5000 Eksemplar	33.730.000	37.777.600
2.17.01.01.21.15	Digitalisasi Bahan Pustaka/Alih Media Koleksi Perpustakaan	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kota Mataram	5000 Access	141.800.000	158.816.000
2.17.01.01.21.16	Penyelenggaraan Lomba Sayembara dan Festival	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Kota Mataram	4 Lomba	37.840.000	42.380.800
2,18	KEARSIPAN				20.549.275.500	23.015.188.560
2.18.01.01.16	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase dokumen / arsip yang terselamatkan	Provinsi NTB	20%	127.363.000	142.646.560
2.18.01.01.16.02	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Terlaksananya Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip	Kota Mataram	10 OPD	18.918.000	21.188.160
2.18.01.01.16.06	Pelaksanaan akuisisi arsip	Akuisisi Arsip Berjalan Dengan Baik	Kota Mataram	10 OPD	48.040.000	53.804.800
2.18.01.01.16.07	Pengolahan arsip inaktif dan statistis hasil akuisisi	Jumlah Arsip Dinamis dan Statis Hasil Akuisisi yang Diolah	Provinsi NTB	14400,00 Berkas	40.475.000	45.332.000
2.18.01.01.16.08	Penilaian arsip inaktif dan statistis hasil akuisisi	Tersusunnya Dokumen Pertelahan Arsip (DPA Hasil Akuisisi)	Provinsi NTB	100 Berkas	19.930.000	22.321.600
2.18.01.01.17	Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Persentase sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara	Provinsi NTB	60%	20.167.550.000	22.587.656.000
2.18.01.01.17.01	Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan arsip	Terpeliharanya Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Kota Mataram	1 Tahun	20.167.550.000	22.587.656.000
2.18.01.01.18	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Cakupan layanan informasi kearsipan			217.040.000	243.084.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
2.18.01.01.18.02	Penyediaan sarana layanan informasi arsip	Jumlah Sarana Layanan Informasi Arsip	Provinsi NTB	1 Paket	164.980.000	184.777.600
2.18.01.01.18.03	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi pemerintah/swasta	Meningkatnya Jumlah Aparatur Pengelola Kearsipan	Kota Mataram	135 Orang	32.180.000	36.041.600
2.18.01.01.18.05	Pembinaan dan pengawasan kearsipan	Tersusunnya Dokumen Regulasi Tata Kearsipan	Kota Mataram	1 Dokumen	19.880.000	22.265.600
2.18.01.01.20	Program Peningkatan dan Pengendalian Kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki Record Centre			37.322.500	41.801.200
2.18.01.01.20.01	Pembinaan dan Pengembangan model instansi/Record Center-Model	Terbentuknya Record Center Model Pengelola Kearsipan	Kota Mataram	5 OPD	22.322.500	25.001.200
2.18.01.01.20.04	Monitoring dan Pengendalian Kearsipan	Kegiatan Kearsipan Terlaksana Dengan Baik	Kota Mataram	1 Tahun	15.000.000	16.800.000
3	URUSAN PILIHAN				390.844.572.465	437.745.921.161
3,01	KELAUTAN DAN PERIKANAN				56.275.065.400	63.028.073.248
3.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan				56.275.065.400	63.028.073.248
3.01.01.01	Dinas Kelautan dan Perikanan (Induk)				35.334.468.500	39.574.604.720
3.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tata kelola	Kota Mataram	100 %	1.380.382.000	1.546.027.840
3.01.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya layanan Surat	Kota Mataram	1000 surat	2.500.000	2.800.000
3.01.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas telepon,	Kota Mataram	4 jenis	180.000.000	201.600.000
3.01.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi	Kota Mataram	120 OB	115.856.000	129.758.720
3.01.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan	Kota Mataram	120 OB	224.000.000	250.880.000
3.01.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis	Kota Mataram	44 jenis	35.001.000	39.201.120
3.01.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan	Kota Mataram	2 jenis	12.000.000	13.440.000
3.01.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan	Kota Mataram	6 Jenis	159.125.000	178.220.000
3.01.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	tersedianya bahan bacaan dan	Kota Mataram	2 Jenis	8.000.000	8.960.000
3.01.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya penyediaan	Kota Mataram	21 Kegiatan	21.000.000	23.520.000
3.01.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terselenggaranya rapat rapat	Kota Mataram	20 OK	75.000.000	84.000.000
3.01.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa Tenaga	Kota Mataram	98 OB	242.900.000	272.048.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan	Terselenggaranya rapat rapat	Kota Mataram	25 OK	50.000.000	56.000.000
3.01.01.01.01.21	Penyediaan alat listrik dan elektronik	Tersedianya alat listrik dan	Kota Mataram	3 Peralatan	30.000.000	33.600.000
3.01.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya Jasa Keamanan	Kota Mataram	120 OB	225.000.000	252.000.000
3.01.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan	Kota Mataram	11 sarana dan	1.305.000.000	1.461.600.000
3.01.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya fasilitas kendaraan	Kota Mataram	2 UNit	700.000.000	784.000.000
3.01.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Terpeliharanya secara	Kota Mataram	1 Tahun	250.000.000	280.000.000
3.01.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Mataram	2 BAngunan	300.000.000	336.000.000
3.01.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan	Terpeliharanya secara	Kota Mataram	5 jenis	40.000.000	44.800.000
3.01.01.01.02.38	Pemeliharaan arsip kantor (pengelolaan arsip)	Terpeliharanya secara rutin	Kota Mataram	1 keg	15.000.000	16.800.000
3.01.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas	Kota Mataram	200 Orang	394.000.000	441.280.000
3.01.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan	Kota Mataram	1 Tahun	200.000.000	224.000.000
3.01.01.01.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Meningkatnya Jumlah ASN	Kota Mataram	1 Tahun	100.000.000	112.000.000
3.01.01.01.05.06	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan	Meningkatnya kinerja dan	Kota Mataram	1 Tahun	66.000.000	73.920.000
3.01.01.01.05.18	Peningkatan iman dan taqwa aparatur	Meningkatnya Keimanan dan	Kota Mataram	1 Tahun	18.000.000	20.160.000
3.01.01.01.05.20	Bimbingan dan pelatihan olah raga aparatur	Meningkatnya Kesehatan	Kota Mataram	1 Tahun	10.000.000	11.200.000
3.01.01.01.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan	Peningkatan Kapasitas	Provinsi NTB	10 Dokumen	582.290.000	652.164.800
3.01.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar	1) Dokumen Lakip, 2) Dokumen	Kota Mataram	2 Dokumen	35.000.000	39.200.000
3.01.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Dokumen Laporan	Kota Mataram	1 Dokumen	17.000.000	19.040.000
3.01.01.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Dokumen	Kota Mataram	3 Dokumen	167.725.000	187.852.000
3.01.01.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersedianya Laporan Tahunan	Kota Mataram	1 laporan	51.155.000	57.293.600
3.01.01.01.06.16	Pengembangan Sistem data statistik dan informasi	Terlaksananya Publikasi Data	Kota Mataram	3 Dokumen	311.410.000	348.779.200
3.01.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan	Peningkatan Kapasitas	Provinsi NTB	1 Laporan BMD	70.300.000	78.736.000
3.01.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah	Laporan Barang Milik Daerah	Kota Mataram	1 Tahun	70.300.000	78.736.000
3.01.01.01.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan	se-NTB	10%	7.773.590.000	8.706.420.800
3.01.01.01.20.04	Pengelolaan dan Pengembangan Produksi Perikanan	Jumlah Pembudidaya Ikan yang	se-NTB	50 unit	4.843.030.000	5.424.193.600
3.01.01.01.20.05	Pengelolaan dan Pemberdayaan Usaha Pembudidaya	Jumlah Pembudidaya Ikan yang	se-NTB	60 org	2.133.670.000	2.389.710.400
3.01.01.01.20.06	Pengelolaan Sistem Pembenihan Ikan	Jumlah Produksi Benih	se-NTB	15 unit	796.890.000	892.516.800
3.01.01.01.21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan	Persentase Peningkatan	Provinsi NTB	10%	8.082.810.000	9.052.747.200
3.01.01.01.21.07	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan yang Terkelola	se-NTB	4 Lokasi	277.610.000	310.923.200
3.01.01.01.21.10	Pengelolaan dan Pengembangan Unit Penangkapan Ikan dan Kenelayanan	Jumlah Kelompok Nelayan yang dibina dan difasilitasi	se-NTB	50 Kelompok	2.828.300.000	3.167.696.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.01.21.18	Pengelolaan Sumberdaya Ikan dan Pengendalian Penangkapan Ikan	Jumlah Lokasi Penangkapan Ikan yang dikelola dan dikendalikan	se-NTB	6 Lokasi	4.976.900.000	5.574.128.000
3.01.01.01.23	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Provinsi NTB	33 kg/kapita/thn	1.768.104.000	1.980.276.480
3.01.01.01.23.05	Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan	Jumlah SKP yang diterbitkan	se-NTB	4 SKP	435.800.000	488.096.000
3.01.01.01.23.06	Pengembangan Usaha dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan	Volume Olahan Hasil Kelautan dan Perikanan	se-NTB	203.893,21 Ton	799.060.000	894.947.200
3.01.01.01.23.07	Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	Eksposisi Hasil Kelautan dan Perikanan	se-NTB	4 Eksposisi	533.244.000	597.233.280
3.01.01.01.27	Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Persentase Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan territorial	Provinsi NTB	7,87 %	13.977.992.500	15.655.351.600
3.01.01.01.27.01	Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jumlah POKMASWAS yang aktif	se-NTB	75 Kelompok	673.805.000	754.661.600
3.01.01.01.27.02	Pengelolaan Konservasi laut dan Perairan	Luas Kawasan Konservasi Perikanan	Provinsi NTB	229555 Ha	2.352.150.000	2.634.408.000
3.01.01.01.27.03	Penataan Ruang Laut dan Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau2 kecil	Dokumen Penataan Ruang Laut	se-NTB	5 Dokumen	5.776.427.500	6.469.598.800
3.01.01.01.27.04	Pemberdayaan Usaha Masyarakat Pesisir	Peningkatan Produksi Garam Rakyat	se-NTB	180000 Ton	5.175.610.000	5.796.683.200
3.01.01.02	Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Aikmel				1.730.544.400	1.938.209.728
3.01.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya Tata Kelola Adminstrasi Perkantoran Yang Efektif Dan Efisien	Kab. Lombok Timur	100 %	682.275.000	764.148.000
3.01.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya biaya langganan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kab. Lombok Timur	12 bulan	49.500.000	55.440.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honor pengelola administrasi keuangan	Kab. Lombok Timur	5 orang	40.248.000	45.077.760
3.01.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kab. Lombok Timur	8 orang	197.365.000	221.048.800
3.01.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	7.767.000	8.699.040
3.01.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	3.110.000	3.483.200
3.01.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Provinsi	4 OT	30.000.000	33.600.000
3.01.01.02.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya honorarium pegawai tidak tetap	se-NTB	4 orang	175.700.000	196.784.000
3.01.01.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi	se-NTB	9 OT	25.100.000	28.112.000
3.01.01.02.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	se-NTB	7 Orang	153.485.000	171.903.200
3.01.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana Prasarana Aparatur	Kab. Lombok Timur	11 sarana dan prasarana	211.900.000	237.328.000
3.01.01.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana dan perlengkapan gedung kantor	se-NTB	7 Paket	63.900.000	71.568.000
3.01.01.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kab. Lombok Timur	6 Paket	80.000.000	89.600.000
3.01.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	se-NTB	10 Unit	48.000.000	53.760.000
3.01.01.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	se-NTB	4 Jenis	20.000.000	22.400.000
3.01.01.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan	Kab. Lombok Timur	1 Laporan BMD	8.900.000	9.968.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.02.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tersusunnya lapiran asset milik daerah	Kab. Lombok Timur	1 Laporan	8.900.000	9.968.000
3.01.01.02.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi perikanan Budidaya	Kab. Lombok Timur	10%	827.469.400	926.765.728
3.01.01.02.20.12	Peningkatan mutu benih dan induk ikan unggul	Terlaksananya pemuliaan Induk Nila dengan metode seleksi	Kab. Lombok Timur	30000 ekor	198.054.400	221.820.928
3.01.01.02.20.13	Peningkatan produksi benih ikan air tawar	Tersedianya benih ikan air tawar	Kab. Lombok Timur	27000000 ekor	629.415.000	704.944.800
3.01.01.03	Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong				2.016.570.000	2.258.558.400
3.01.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Kab. Lombok Timur	100 %	549.170.000	615.070.400
3.01.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sumberdaya air dan listrik	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	206.800.000	231.616.000
3.01.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya administrasi keuangan	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	57.490.000	64.388.800
3.01.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis kantor	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	6.280.000	7.033.600
3.01.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	500	560
3.01.01.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Perjalanan dinas luar daerah		1 Tahun	30.000.000	33.600.000
3.01.01.03.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Terlaksananya administrasi dan teknis perkantoran	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	32.900.000	36.848.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan monitoring dalam daerah		1 Tahun	40.000.000	44.800.000
3.01.01.03.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya keamanan kantor	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	175.200.000	196.224.000
3.01.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Lombok Barat	11 sarana dan prasarana	991.200.000	1.110.144.000
3.01.01.03.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Kab. Lombok Barat, Kab. Sumbawa Barat	7 paket	295.000.000	330.400.000
3.01.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat	4 paket	81.200.000	90.944.000
3.01.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung kantor	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	44.000.000	49.280.000
3.01.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur	1 Tahun	3.500.000	3.920.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	67.500.000	75.600.000
3.01.01.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Rehab kantor dan pagar pengaman	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur	1 Tahun	500.000.000	560.000.000
3.01.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Sumber Daya Aparatur	Kota Mataram	5 Orang	60.000.000	67.200.000
3.01.01.03.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Tersedianya SDM Aparatur		4 Orang	60.000.000	67.200.000
3.01.01.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Asset Barang Milik Daerah	Kab. Lombok Barat	1 Laporan BMD	8.400.000	9.408.000
3.01.01.03.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah	Terlaksananya Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	8.400.000	9.408.000
3.01.01.03.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi perikanan Budidaya	Kab. Lombok Barat	10%	407.800.000	456.736.000
3.01.01.03.20.10	Peningkatan produksi benih ikan budidaya perikanan laut	Terlaksananya Produksi Benih Ikan Air Laut	Kab. Lombok Barat, Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	244.875.000	274.260.000
3.01.01.03.20.11	Peningkatan produksi benih ikan budidaya perikanan air payau	Terlaksananya Produksi Benih Ikan Air Payau	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur	1 Tahun	162.925.000	182.476.000
3.01.01.04	Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan dan Kelautan Tanjung Luar				911.800.000	1.021.216.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Kab. Lombok Timur	100 %	192.300.000	215.376.000
3.01.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya fasilitas telepon, air, listrik dan internet	Kab. Lombok Timur	1 THN	21.000.000	23.520.000
3.01.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Lombok Timur	1 THN	43.200.000	48.384.000
3.01.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Lombok Timur	1 THN	15.000.000	16.800.000
3.01.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Lombok Timur	1 THN	14.300.000	16.016.000
3.01.01.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Luar Provinsi	1 THN	40.000.000	44.800.000
3.01.01.04.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	se-NTB	1 THN	15.000.000	16.800.000
3.01.01.04.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Kab. Lombok Timur	1 THN	43.800.000	49.056.000
3.01.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Kab. Lombok Timur	11 sarana dan prasarana	700.000.000	784.000.000
3.01.01.04.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gedung kantor	Kab. Lombok Timur	1 THN	200.000.000	224.000.000
3.01.01.04.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung kantor	Kab. Lombok Timur	1 THN	200.000.000	224.000.000
3.01.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kab. Lombok Timur	1 THN	300.000.000	336.000.000
3.01.01.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya laporan asset milik daerah pada BP3K Dislutkan Prov NTB	Kab. Lombok Timur	1 Laporan BMD	19.500.000	21.840.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.04.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah	Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Lombok Timur	1 THN	19.500.000	21.840.000
3.01.01.05	Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Mataram				1.583.486.000	1.773.504.320
3.01.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Kota Mataram	100 %	273.546.000	306.371.520
3.01.01.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersediannya biaya pengiriman surat atau terdistribusikanya surat-surat dinas	Kota Mataram	1 Thn	2.500.000	2.800.000
3.01.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersediannya fasilitas telepon, sumberdaya air dan listrik	Kota Mataram	1 Thn	51.900.000	58.128.000
3.01.01.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksannya pelayanan administrasi keuangan	Kota Mataram	1 Thn	39.956.000	44.750.720
3.01.01.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersediannya Jasa Kebersihan Kantor dan Meningkatnya Kebersihan Kantor	Kota Mataram	12 Bulan	23.400.000	26.208.000
3.01.01.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersediannya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Kota Mataram	1 Thn	6.340.000	7.100.800
3.01.01.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersediannya barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	1 Thn	16.000.000	17.920.000
3.01.01.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman tamu	Kota Mataram	1 Thn	10.000.000	11.200.000
3.01.01.05.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksanannya koordinasi kegiatan keluar daerah dalam rangka pembangunan kelautan dan perikanan	Kota Mataram	1 Thn	50.350.000	56.392.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.05.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya data dan laporan kegiatan movev	Kota Mataram	1 Thn	50.000.000	56.000.000
3.01.01.05.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersediannya Jasa Keamanan Kantor dan Meningkatnya Keamanan Kantor	Kota Mataram	12 Bulan	23.100.000	25.872.000
3.01.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Kota Mataram	11 sarana dan prasarana	30.700.000	34.384.000
3.01.01.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksana dan terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	1 Thn	25.500.000	28.560.000
3.01.01.05.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharannya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	1 Thn	5.200.000	5.824.000
3.01.01.05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya data dan laporan aset milik daerah pada BLPPMHKP Mataram	Kota Mataram	1 Laporan BMD	9.300.000	10.416.000
3.01.01.05.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah	Tersusunnya laporan aset/barang milik daerah pada BLPPMHKP Mataram	Kota Mataram	12 OB	9.300.000	10.416.000
3.01.01.05.23	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kab. Lombok Timur	33 kg/kapita/thn	1.269.940.000	1.422.332.800
3.01.01.05.23.09	Pengawasan dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya pengawasan dan keamanan mutu hasil kelautan dan perikanan	Kota Mataram	1 Thn	185.840.000	208.140.800
3.01.01.05.23.10	Peningkatan Fungsi Laboratrium Penguji	Terwujudnya peningkatan fungsi laboratorium penguji	Kota Mataram	1 Thn	1.084.100.000	1.214.192.000
3.01.01.06	Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok				6.592.865.100	7.384.008.912
3.01.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Kab. Lombok Timur	100 %	827.185.100	926.447.312

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,Sumber daya air dan listrik	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	328.600.000	368.032.000
3.01.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	penyediaan jasa admistrasi keuangan	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	42.446.000	47.539.520
3.01.01.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	139.955.000	156.749.600
3.01.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis Kantor	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	21.081.600	23.611.392
3.01.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggadaan	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	3.600.000	4.032.000
3.01.01.06.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	50.020.000	56.022.400
3.01.01.06.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya Honorarium Non PNS	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	70.000.000	78.400.000
3.01.01.06.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Monitoring,dan Koordinasi Ke Provinsi	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	40.062.500	44.870.000
3.01.01.06.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	131.420.000	147.190.400
3.01.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Kab. Lombok Timur	11 sarana dan prasarana	1.246.215.000	1.395.760.800
3.01.01.06.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya sarana dan perlengkapan Kantor	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	963.780.000	1.079.433.600
3.01.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 dan 4	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	29.000.000	32.480.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.06.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	253.435.000	283.847.200
3.01.01.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Asset Barang Milik Daerah	Kab. Lombok Timur	1 Laporan BMD	8.345.000	9.346.400
3.01.01.06.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah	Tersusunnya laporan aset milik daerah pada dislutkan prov.NTB	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	8.345.000	9.346.400
3.01.01.06.21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi perikanan Tangkap	Kab. Lombok Timur	10%	4.511.120.000	5.052.454.400
3.01.01.06.21.14	Pengelolaan Operasional Pelabuhan dan kesyahbandaran	Tersedianya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	4.458.200.000	4.993.184.000
3.01.01.06.21.16	Tata Kelola Pelabuhan dan pelayanan Usaha	Terlaksananya tata kelola pelabuhan dan pelayanan usaha	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	52.920.000	59.270.400
3.01.01.07	Balai Kesehatan Ikan dan Lingkungan Perikanan Budidaya				788.900.000	883.568.000
3.01.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Kota Mataram	100 %	460.200.000	515.424.000
3.01.01.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kota Mataram	1 Thn	3.000.000	3.360.000
3.01.01.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Mataram	1 Thn	40.000.000	44.800.000
3.01.01.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	1 Thn	35.000.000	39.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kota Mataram	12 Bln	22.100.000	24.752.000
3.01.01.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Mataram	1 Thn	10.000.000	11.200.000
3.01.01.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	1 Thn	3.500.000	3.920.000
3.01.01.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	1 Thn	200.000.000	224.000.000
3.01.01.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Mataram	1 Thn	2.500.000	2.800.000
3.01.01.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Kota Mataram	1 Thn	11.500.000	12.880.000
3.01.01.07.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Mataram	1 Thn	45.000.000	50.400.000
3.01.01.07.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran	Kota Mataram	14 OB	35.700.000	39.984.000
3.01.01.07.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kota Mataram	1 Thn	30.000.000	33.600.000
3.01.01.07.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	Kota Mataram	1 org	21.900.000	24.528.000
3.01.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	Kota Mataram	11 sarana dan prasarana	128.000.000	143.360.000
3.01.01.07.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kota Mataram	1 Thn	52.000.000	58.240.000
3.01.01.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Mataram	1 Thn	12.000.000	13.440.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	4 Unit	29.000.000	32.480.000
3.01.01.07.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	1 Thn	35.000.000	39.200.000
3.01.01.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	Kab. Lombok Barat	3 Orang	50.000.000	56.000.000
3.01.01.07.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan formal	Kota Mataram	1 Thn	50.000.000	56.000.000
3.01.01.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Provinsi NTB	1 Dokumen Lakip	28.800.000	32.256.000
3.01.01.07.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya Perencanaan	Kota Mataram	1 Thn	28.800.000	32.256.000
3.01.01.07.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Kota Mataram	1 Laporan BMD	8.400.000	9.408.000
3.01.01.07.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah	Terlaksananya Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Kota Mataram	1 Thn	8.400.000	9.408.000
3.01.01.07.20	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi perikanan Budidaya	Provinsi NTB	10%	113.500.000	127.120.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.07.20.15	Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Terlaksananya Pengendalian dan pencegahan penyebaran penyakit ikan	Kab. Bima, Kota Mataram, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa	1 Keg	113.500.000	127.120.000
3.01.01.08	Pelabuhan Perikanan Teluk Santong				2.390.994.000	2.677.913.280
3.01.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	.Terwujutnya tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Kab. Sumbawa	100 %	572.300.000	640.976.000
3.01.01.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	terbayarnya biaaya listrik	Kab. Sumbawa	1 tahun	115.000.000	128.800.000
3.01.01.08.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor belanja modal	Kab. Sumbawa	1 thn	174.000.000	194.880.000
3.01.01.08.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terwujutnya jasah administrasi perkantoran	Kab. Sumbawa	12 OB	36.456.000	40.830.720
3.01.01.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	Kab. Sumbawa	48 OB	76.800.000	86.016.000
3.01.01.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	penyedian alat tulis kantor	Kab. Sumbawa	1 thn	5.944.000	6.657.280
3.01.01.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penyediaan barang cetak dan pengadaan barang dan jasa	Kab. Sumbawa	1 thn	5.000.000	5.600.000
3.01.01.08.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Sumbawa	1 thn	15.000.000	16.800.000
3.01.01.08.01.19	Penyediaan administrasi dan teknis perkantoran	terselenggaranya administrasi dan teknis perkantoran	Kab. Sumbawa	13 OB	27.300.000	30.576.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.08.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	belanja perjalanan dinas dalam daerah	Kab. Sumbawa	1 thn	40.000.000	44.800.000
3.01.01.08.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	honor tenaga keamanan	Kab. Sumbawa	1 thn	76.800.000	86.016.000
3.01.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	.Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Kab. Sumbawa	11 sarana dan prasarana	1.574.500.000	1.763.440.000
3.01.01.08.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	penyediaan kendaran dinas roda 2	Kab. Sumbawa	1 thn	560.000.000	627.200.000
3.01.01.08.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	belanja perlengkapan gedung kantor	Kab. Sumbawa	1 thn	404.500.000	453.040.000
3.01.01.08.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	pemeliharaan rutin gedung kantor	Kab. Sumbawa	1 thn	560.000.000	627.200.000
3.01.01.08.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	belanja pemeliharaan	Kab. Sumbawa	1 thn	50.000.000	56.000.000
3.01.01.08.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	terlaksananya aset barang milik daerah	Kab. Bima	1 Laporan BMD	6.194.000	6.937.280
3.01.01.08.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah	peningkatan menejemen aset	Kab. Sumbawa	1 thn	6.194.000	6.937.280
3.01.01.08.21	Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi perikanan Tangkap	Kab. Sumbawa	10%	238.000.000	266.560.000
3.01.01.08.21.16	Tata Kelola Pelabuhan dan pelayanan Usaha	pengadan peralatan penanganan penangkapan ikan	Kab. Sumbawa	1 thn	238.000.000	266.560.000
3.01.01.09	Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Bima dan Dompu				1.993.772.000	2.233.024.640
3.01.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Kota Bima	100 %	133.032.000	148.995.840

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Biaya Langganan Jasa Komunikasi,sumbedaya Air dan Listrik	Kota Bima	1 tahun	10.700.000	11.984.000
3.01.01.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya honor Administrai Pengelola Keuangan	Kota Bima	12 bulan	42.564.000	47.671.680
3.01.01.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Honorarium Petugas Kebersihan Kantor	Kota Bima	12 bulan	23.900.000	26.768.000
3.01.01.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Bima	1 tahun	7.718.000	8.644.160
3.01.01.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Bima	1 tahun	3.250.000	3.640.000
3.01.01.09.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan jaga malam	Kota Bima	1 tahun	2.000.000	2.240.000
3.01.01.09.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Kota Bima	1 tahun	21.000.000	23.520.000
3.01.01.09.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	tersedianya honorarium jasa keamanan kantor	Kota Bima	1 tahun	21.900.000	24.528.000
3.01.01.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pejabat Sipil Negara	Kab. Bima	11 sarana dan prasarana	537.940.000	602.492.800
3.01.01.09.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Mobil Operasional untuk kegiatan BKPSDKP Kawasan Bima-Dompu	Kota Bima	1 tahun	425.000.000	476.000.000
3.01.01.09.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan untuk kelancaran kegiatan kantor	Kota Bima	1 tahun	86.200.000	96.544.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Biaya Operasional Kendaraan Dinas	Kota Bima	1 tahun	26.740.000	29.948.800
3.01.01.09.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya Tata Kelola Keuangan yang baik dan benar	Kab. Bima	1 Laporan BMD	8.500.000	9.520.000
3.01.01.09.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah	Peningkatan managemen asset	Kota Bima	1 tahun	8.500.000	9.520.000
3.01.01.09.27	Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Persentase Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan territorial	Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Dompu	7,87 %	1.314.300.000	1.472.016.000
3.01.01.09.27.06	Pengawasan dan penertiban Illegal Fishing	Tersosialisasinya peraturan UU perikanan kepada kelompok masyarakat pengawas kawasan Bima-Dompu	Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Dompu	1 tahun	789.300.000	884.016.000
3.01.01.09.27.07	Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan	terlaksanya sosialisasi dan desiminasi kepada masyarakat pengelola kawasan konservasi	Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Dompu	1 tahun	525.000.000	588.000.000
3.01.01.10	Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Sumbawa				1.932.545.400	2.164.450.848
3.01.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efesien	Kab. Sumbawa	100 %	213.895.400	239.562.848
3.01.01.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Biaya Langganan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Kab. Sumbawa	1 Tahun	19.200.000	21.504.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.10.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya Honor Administrasi Pengelola Keuangan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	35.000.000	39.200.000
3.01.01.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Honorarium Jasa Petugas Kebersihan Kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	48.170.400	53.950.848
3.01.01.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	13.525.000	15.148.000
3.01.01.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	10.000.000	11.200.000
3.01.01.10.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab. Sumbawa	1 Tahun	40.000.000	44.800.000
3.01.01.10.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya Kegiatan Monev ke Kab/Kota	se-NTB	1 Tahun	48.000.000	53.760.000
3.01.01.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur	Kab. Sumbawa	11 sarana dan prasarana	1.015.000.000	1.136.800.000
3.01.01.10.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Teredianya Kendaraan Operasional	Kab. Sumbawa	1 Tahun	650.000.000	728.000.000
3.01.01.10.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	pengadaan perlengkapan kantor	Kab. Sumbawa	1 pkt	296.000.000	331.520.000
3.01.01.10.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Kondisi Gedung/kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	50.000.000	56.000.000
3.01.01.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Operasional Kendaraan Dinas	Kab. Sumbawa	1 Tahun	19.000.000	21.280.000
3.01.01.10.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan tersosialisasinta Peraturan UU Perikanan	Kab. Sumbawa Barat	1 Laporan BMD	1.400.000	1.568.000
3.01.01.10.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah	honorarium pengelola administrasi keuangan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	1.400.000	1.568.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.10.27	Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Persentase Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan territorial	Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	7,87 %	702.250.000	786.520.000
3.01.01.10.27.06	Pengawasan dan penertiban Illegal Fishing	Terlasknanya Pengawasan dan Penertiban Illegal Fishing	Kab. Sumbawa	1 Tahun	401.750.000	449.960.000
3.01.01.10.27.07	Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan	Terpeliharanya Sumberdaya lakan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	300.500.000	336.560.000
3.01.01.11	Balai Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Kawasan Lombok				999.120.000	1.119.014.400
3.01.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Kota Mataram	100 %	166.150.000	186.088.000
3.01.01.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik	Kota Mataram	12 Bulan	20.400.000	22.848.000
3.01.01.11.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Honor administrasi pengelola keuangan	Kota Mataram	12 Bulan	42.600.000	47.712.000
3.01.01.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Honororium Petuagas Kebersihan Kantor	Kota Mataram	12 bulan	23.400.000	26.208.000
3.01.01.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kota Mataram	1 tahun	9.350.000	10.472.000
3.01.01.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	Kota Mataram	1 tahun	3.500.000	3.920.000
3.01.01.11.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Mataram	1 tahun	30.000.000	33.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.11.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan ke Kab/Kota	Kota Mataram	1 tahun	15.000.000	16.800.000
3.01.01.11.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya honororium Jasa Keamanan Kantor	Kota Mataram	12 bulan	21.900.000	24.528.000
3.01.01.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur dengan baik	Kota Mataram	11 sarana	507.000.000	567.840.000
3.01.01.11.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Mobil Operasional untuk mendukung kelancaran Kegiatan Balai	Kota Mataram	1 unit	400.000.000	448.000.000
3.01.01.11.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Kota Mataram	8 jenis	39.000.000	43.680.000
3.01.01.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Kondisi Gedung Kantor dengan Baik	Kota Mataram	1 tahun	25.000.000	28.000.000
3.01.01.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Biaya Operasioanal Kendaraan Dinas	Kota Mataram	1 tahun	43.000.000	48.160.000
3.01.01.11.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Asset Barang Milik Daerah	Kota Mataram	1 Laporan BMD	8.100.000	9.072.000
3.01.01.11.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang miiik daerah	Honororium Pengurus Barang/Asset Milik Daerah	Kota Mataram	12 bulan	8.100.000	9.072.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.01.01.11.27	Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Persentase Kawasan Konservasi perairan terhadap total luas perairan territorial	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	7,87 %	317.870.000	356.014.400
3.01.01.11.27.06	Pengawasan dan penertiban Illegal Fishing	Terlaksananya Pengawasan dan Penertiban Illegal Fishing	Kota Mataram	1 Tahun	151.780.000	169.993.600
3.01.01.11.27.07	Pengembangan pengelolaan konservasi laut dan perairan	Terkelolanya Kawasan Konservasi Perairan	Kota Mataram	1 tahun	166.090.000	186.020.800
3,02	PARIWISATA				9.694.500.000	10.857.840.000
3.02.01	Dinas Pariwisata				9.694.500.000	10.857.840.000
3.02.01.01	Dinas Pariwisata				9.694.500.000	10.857.840.000
3.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase capaian kinerja pelayanan administrasi perkantoran	Kota Mataram	100%	2.414.400.000	2.704.128.000
3.02.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumah materai dan perangko serta paker barang penunjang surat menyurat	Kota Mataram	1750 lembar	12.500.000	14.000.000
3.02.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Gedung yang difasilitasi untuk telepon, listrik, internet dan air	Kota Mataram	1 gedung	200.000.000	224.000.000
3.02.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disewa	Kota Mataram	3 jenis	100.000.000	112.000.000
3.02.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah SPJ Keuangan yang di Adminstrasikan	Kota Mataram	500 SPJ	287.900.000	322.448.000
3.02.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor	Kota Mataram	6 orang	150.000.000	168.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.02.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jenis ATK yang Tersedia	Kota Mataram	35 jenis	40.000.000	44.800.000
3.02.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Lembar Cetak dan Foto Copy	Kota Mataram	80000 lbr	24.000.000	26.880.000
3.02.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Alat dukung Kelistrikan	Kota Mataram	10 jenis	15.000.000	16.800.000
3.02.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Kota Mataram	7 jenis	250.000.000	280.000.000
3.02.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Langganan Koran	Kota Mataram	5 judul	35.000.000	39.200.000
3.02.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang dibeli (rapat dan Tamu)	Kota Mataram	100 kali	200.000.000	224.000.000
3.02.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah	Luar Provinsi	60 laporan	400.000.000	448.000.000
3.02.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah tenaga administrasi dan perkantoran	Kota Mataram	7 orang	250.000.000	280.000.000
3.02.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas Dalam Daerah	se-NTB	60 laporan	300.000.000	336.000.000
3.02.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah Tenaga Satpam	Kota Mataram	6 orang	150.000.000	168.000.000
3.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase capaian ketersediaan sarpras yang ber kondisi baik	Kota Mataram	70%	1.104.000.000	1.236.480.000
3.02.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dibangun	Kota Mataram	1 unit	500.000.000	560.000.000
3.02.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dibeli	Kota Mataram	5 unit	64.000.000	71.680.000
3.02.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara	Kota Mataram	1 gedung	150.000.000	168.000.000
3.02.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	Kota Mataram	26 unit	290.000.000	324.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.02.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Kota Mataram	116 unit	100.000.000	112.000.000
3.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase capaian peningkatan kapasitas ASN	Kota Mataram	100%	160.000.000	179.200.000
3.02.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah ASN yang diberikan dukungan pendidikan dan bimtek	Kota Mataram, Luar Provinsi	6 orang	145.000.000	162.400.000
3.02.01.01.05.04	Peningkatan mental fisik aparatur	terciptanya ASN yang sehat jasmani dan rohani	Kota Mataram	100 orang	15.000.000	16.800.000
3.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase capaian kinerja sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang baik	Provinsi NTB	80%	566.250.000	634.200.000
3.02.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan kinerja	Kota Mataram	2 dokumen	50.000.000	56.000.000
3.02.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	jumlah dokumen RKA, RKA Perubahan, dan Rencana Kerja Tahunan	Kota Mataram	3 dokumen	333.750.000	373.800.000
3.02.01.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	jumlah laporan monitoring dan evaluasi kegiatan prioritas kedinasan	Luar Provinsi, se-NTB	68 kali	182.500.000	204.400.000
3.02.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian kapasitas pengelolaan keuangan daerah yang baik	Kota Mataram	80%	31.600.000	35.392.000
3.02.01.01.07.01	Peningkatan manajemen aset/barang milik daerah	jumlah laporan penatausahaan aset daerah	Kota Mataram	12 laporan	31.600.000	35.392.000
3.02.01.01.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase penguatan potensi pasar domestik dan mancanegara	se-NTB	16,66% dari target rencana 7 juta wisatawan	714.000.000	799.680.000
3.02.01.01.15.03	Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata	jumlah event jaringan kerjasama serta media informasi	Luar Provinsi, se-NTB	10 media	513.500.000	575.120.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.02.01.01.15.05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	jumlah event promosi yang dilaksanakan	Luar Provinsi, se-NTB	10 event	159.500.000	178.640.000
3.02.01.01.15.07	Pengembangan statistik wisata terpadu	jumlah buku analisa pasar dan statistik pariwisata	Provinsi NTB	2 buku	41.000.000	45.920.000
3.02.01.01.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya sarana dan prasarana destinasi wisata yang memenuhi standar	se-NTB	20%	420.250.000	470.680.000
3.02.01.01.16.03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan	jumlah produk pariwisata	se-NTB	10 jenis	52.000.000	58.240.000
3.02.01.01.16.12	Penataan Destinasi Pariwisata di 10 kab/kota	jumlah destinasi pariwisata di 10 kab/kota	se-NTB	50 desa wisata	10.000.000	11.200.000
3.02.01.01.16.13	Pembinaan dan Pemantapan Kawasan Pariwisata	jumlah kawasan strategis pariwisata	se-NTB	11 kspdp	203.000.000	227.360.000
3.02.01.01.16.14	Pengawasan, Standarisasi, dan Sosialisasi Usaha pariwisata	jumlah buku pedoman standarisasi	se-NTB	4 buku	155.250.000	173.880.000
3.02.01.01.17	Program Pengembangan Kemitraan	Standarisasi kompetensi SDM penunjang layanan kepariwisataan	se-NTB	100% dari target output	1.204.000.000	1.348.480.000
3.02.01.01.17.07	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	jumlah pelaku wisata yang dilatih	se-NTB	200 orang	900.000.000	1.008.000.000
3.02.01.01.17.10	Penyuluhan kelompok sadar wisata dan sadar budaya	jumlah pokdarwis/kelembagaan pariwisata yang diberikan penyuluhan dan pendampingan	se-NTB	12 pokdarwis	304.000.000	340.480.000
3.02.01.01.18	Program Pengembangan Atraksi dan Daya Tarik Wisata	Penguatan kualitas atraksi dan event pariwisata	se-NTB	20% dari total renstra 25 jenis atraksi	3.080.000.000	3.449.600.000
3.02.01.01.18.01	Peningkatan Strategi Tata Kelola Atraksi dan Daya Tarik Wisata	jumlah standar atraksi dan daya tarik wisata	se-NTB	5 standar	120.000.000	134.400.000
3.02.01.01.18.03	Fasilitasi Keragaman Atraksi dan Daya Tarik Wisata	jumlah event atraksi wisata yang tersedia	se-NTB	240 event	2.660.000.000	2.979.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.02.01.01.18.04	Pengembangan Kerjasama Industri Kreatif	jumlah fasilitas ukm yang tersedia serta dukungan industri kreatif dalam event pariwisata	se-NTB	10 lokasi	300.000.000	336.000.000
3,03	PERTANIAN				156.498.961.330	175.278.836.690
3.03.01	Dinas Pertanian dan Perkebunan				71.900.392.800	80.528.439.936
3.03.01.01	Dinas Pertanian dan Perkebunan				31.950.181.800	35.784.203.616
3.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran	Provinsi NTB	100 %	1.160.930.000	1.300.241.600
3.03.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Provinsi NTB	4200 surat	2.500.000	2.800.000
3.03.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Mataram	12 bulan	172.800.000	193.536.000
3.03.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	12 bulan	91.000.000	101.920.000
3.03.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya petugas kebersihan kantor	Kota Mataram	12 bulan	204.100.000	228.592.000
3.03.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kota Mataram	12 bulan	33.000.000	36.960.000
3.03.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya peneydiaan barang cetak dan penggandaan	Kota Mataram	12 bulan	27.350.000	30.632.000
3.03.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor	Kota Mataram	12 bulan	5.300.000	5.936.000
3.03.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya rak arsip dan mesin penghancur kertas	Kota Mataram	11 unit	181.060.000	202.787.200
3.03.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya langganan surat kabar	Kota Mataram	12 bulan	6.050.000	6.776.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu	Kota Mataram	12 bulan	39.930.000	44.721.600
3.03.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi/konsultasi	Kota Mataram	12 bulan	100.040.000	112.044.800
3.03.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Pembinaan ke Kabupaten/Kota	Kota Mataram	12 bulan	100.060.000	112.067.200
3.03.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	Kota Mataram	8 orang	175.440.000	196.492.800
3.03.01.01.01.25	Pengelolaan Kearsipan	Terlaksananya Akusisi Arsip	Kota Mataram	12 bulan	22.300.000	24.976.000
3.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur			368.120.000	412.294.400
3.03.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kota Mataram	1 paket	20.000.000	22.400.000
3.03.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional;	Kota Mataram	56 unit	317.120.000	355.174.400
3.03.01.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan AC, Komputer dan Laptop	Kota Mataram	31 unit	31.000.000	34.720.000
3.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Aparatur	Provinsi NTB	2 orang	151.500.000	169.680.000
3.03.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terlaksananya Pelatihan Arsiparis	Kota Mataram	2 org	15.000.000	16.800.000
3.03.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya Kegiatan Imtaq dan Kesehatan Jasmani	Kota Mataram	36 Kali	22.300.000	24.976.000
3.03.01.01.05.06	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Tersedianya Laporan Absensi Kepegawaian	Kota Mataram	461 orang	114.200.000	127.904.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tertib dan terukurnya kinerja SKPD			392.395.000	439.482.400
3.03.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya LAKIP, Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan	Kota Mataram	3 Laporan	144.020.000	161.302.400
3.03.01.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA, RKAP, DPA dan DPPA	Kota Mataram	6 Dok	135.925.000	152.236.000
3.03.01.01.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tersosialisasinya Informasi Pembangunan Pertanian Daerah	Kota Mataram	62 kali	112.450.000	125.944.000
3.03.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya ketertiban pengelolaan aset			76.839.000	86.059.680
3.03.01.01.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah	Tersusunnya Laporan Aset Barang Milik Daerah	Kota Mataram	1 laporan	76.839.000	86.059.680
3.03.01.01.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pendapatan petani	se-NTB	10 persen dari tahun sebelumnya	7.628.456.000	8.543.870.720
3.03.01.01.15.03	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Terbinanya kelembagaan petani	se-NTB	100 kelompok	5.693.380.500	6.376.586.160
3.03.01.01.15.12	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	Terlaksananya bantuan pengolahan hasil pertanian/perkebunan	se-NTB	20 unit	1.935.075.500	2.167.284.560
3.03.01.01.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Produksi tanaman pertanian / perkebunan	se-NTB	3,2 persen per tahun	22.171.941.800	24.832.574.816
3.03.01.01.19.02	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	Terfasilitasinya penyediaan sarana prasarana produksi pertanian	se-NTB	184/208 unit/paket	200.000.000	224.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.01.19.07	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan	Pengendalian OPT Tanaman perkebunan	Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur	100 Ha	353.880.000	396.345.600
3.03.01.01.19.08	Pengembangan komoditas unggulan daerah	Terlaksananya kegiatan pengembangan unggulan daerah hortikultura	se-NTB	4 Komoditas	3.398.780.300	3.806.633.936
3.03.01.01.19.10	Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk pertanian dan perkebunan	Terlaksananya pengembangan komoditas padi, kedelai, Kakao dan tembakau	se-NTB	4 komoditas	11.738.714.000	13.147.359.680
3.03.01.01.19.11	Pengumpulan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian	Tersusunnya Data Statistik Pertanian dan Perkebunan	Kota Mataram	3 dokumen	487.557.500	546.064.400
3.03.01.01.19.16	Pengembangan diversifikasi tanaman	Terlaksananya pengembangan diversifikasi tanaman kopi dan kakao	Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	100 Ha	394.165.000	441.464.800
3.03.01.01.19.17	Pengelolaan Lahan dan Air	Terlaksananya Pengadaan sarana prasarana pertanian	se-NTB	26 unit	2.504.930.000	2.805.521.600
3.03.01.01.19.18	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terlaksananya bantuan sarana prasarana teknologi tepat guna	se-NTB	9 paket	3.093.915.000	3.465.184.800
3.03.01.02	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)				1.403.696.000	1.572.139.520
3.03.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertibnya Pelayanan Administrasi perkantoran			205.335.000	229.975.200
3.03.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya penyediaan surat menyurat	Kab. Lombok Barat	12 bulan	5.950.000	6.664.000
3.03.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Lombok Barat	12 bulan	31.900.000	35.728.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kab. Lombok Barat	12 bulan	19.056.000	21.342.720
3.03.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kab. Lombok Barat	12 bulan	72.600.000	81.312.000
3.03.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kab. Lombok Barat	1 tahun	6.500.000	7.280.000
3.03.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Belanja Cetak dan Penggandaan	Kab. Lombok Barat	1 tahun	4.000.000	4.480.000
3.03.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya peralatan listrik dan elektronik	Kab. Lombok Barat	1 tahun	5.500.000	6.160.000
3.03.01.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Belanja Surat Kabar/Majalah	Kab. Lombok Barat	1 tahun	2.500.000	2.800.000
3.03.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi	Kab. Lombok Barat	1 tahun	35.000.000	39.200.000
3.03.01.02.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Kab. Lombok Barat	12 bulan	22.329.000	25.008.480
3.03.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana			880.900.000	986.608.000
3.03.01.02.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor (DAK)	Kab. Lombok Barat	1 tahun	550.000.000	616.000.000
3.03.01.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya Pengadaan Meubeleur	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	210.800.000	236.096.000
3.03.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kab. Lombok Barat	1 tahun	104.100.000	116.592.000
3.03.01.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan peralatan Kantor	Kab. Lombok Barat	8 unit	16.000.000	17.920.000
3.03.01.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Tersedianya Laporan Keuangan			1.000.000	1.120.000
3.03.01.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Terlaksanya Penyusunan Laporan Keuangan	Kab. Lombok Barat	1 laporan	1.000.000	1.120.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pendataan Barang Milik Daerah			17.750.000	19.880.000
3.03.01.02.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah	Terlaksananya Pendataan Barang Milik Daerah	Kab. Lombok Barat	12 OB	17.750.000	19.880.000
3.03.01.02.18	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Persentase target teknologi pertanian / perkebunan yang diterapkan	se-NTB	0 persen per tahun	298.711.000	334.556.320
3.03.01.02.18.18	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Meningkatnya kemampuan kelompok dalam penerapan pengendalian hama terpadu tanaman pangan	se-NTB	9 kelompok	298.711.000	334.556.320
3.03.01.03	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)				2.855.066.000	3.197.673.920
3.03.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertibnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			785.317.000	879.555.040
3.03.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Lombok Barat	12 bulan	6.041.000	6.765.920
3.03.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Bima, Kab. Lombok Barat, Kab. Sumbawa	12 bulan	68.250.000	76.440.000
3.03.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertibnya pelaksanaan administrasi keuangan	Kab. Lombok Barat	12 bulan	57.526.000	64.429.120
3.03.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Kab. Lombok Barat	1 tahun	48.800.000	54.656.000
3.03.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Lombok Barat	12 bulan	15.000.000	16.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan laporan dll	Kab. Lombok Barat	12 bulan	7.800.000	8.736.000
3.03.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik	Kab. Lombok Barat	12 bulan	7.500.000	8.400.000
3.03.01.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Lombok Barat	13 unit	487.600.000	546.112.000
3.03.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya informasi baik lokal maupun nasional	Kab. Lombok Barat	12 bulan	3.600.000	4.032.000
3.03.01.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya rapat-rapat kordinasi/konsultasi agenda nasional	Kab. Lombok Barat	5 kali	35.800.000	40.096.000
3.03.01.03.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Keamanan kantor terjamin	Kab. Lombok Barat	12 bulan	47.400.000	53.088.000
3.03.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasana Aparatur			1.790.455.000	2.005.309.600
3.03.01.03.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan/rehabilitasi gedung kantor	Kab. Lombok Barat	6 paket	778.000.000	871.360.000
3.03.01.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas	Kab. Lombok Barat	1 Unit	400.000.000	448.000.000
3.03.01.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan laboratorium	Kab. Lombok Barat	2 unit	434.000.000	486.080.000
3.03.01.03.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya sarana kerja yang memadai	Kab. Lombok Barat	21 unit	33.675.000	37.716.000
3.03.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkaia kendaraan dinas/operasionai	Terpeliharanya kendaraan dinas	Kab. Lombok Barat	53 unit	136.980.000	153.417.600
3.03.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Optimalnya fungsi komputer/laptop dan AC	Kab. Lombok Barat	6 unit	7.800.000	8.736.000
3.03.01.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah			15.460.000	17.315.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.03.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah	Tersedianya data aset/barang milik daerah	Kab. Lombok Barat	12 OB	15.460.000	17.315.200
3.03.01.03.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Produksi pertanian / perkebunan	se-NTB	3,2 persen per tahun	263.834.000	295.494.080
3.03.01.03.19.04	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	Dihasilkannya benih bermutu varietas unggul bersertifikat	Kab. Lombok Barat	156 unit	263.834.000	295.494.080
3.03.01.04	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)				4.199.732.000	4.703.699.840
3.03.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertibnya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran			2.133.994.000	2.390.073.280
3.03.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	1.250.000	1.400.000
3.03.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, sumber da air dan listrik	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	66.500.000	74.480.000
3.03.01.04.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa	1 Tahun	1.622.500.000	1.817.200.000
3.03.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	41.644.000	46.641.280
3.03.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	163.300.000	182.896.000
3.03.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	15.000.000	16.800.000
3.03.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	20.500.000	22.960.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi/penerangan bangunan kantor	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa	1 Tahun	10.000.000	11.200.000
3.03.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	6.000.000	6.720.000
3.03.01.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya kegiatan penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	30.000.000	33.600.000
3.03.01.04.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	157.300.000	176.176.000
3.03.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur			854.140.000	956.636.800
3.03.01.04.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya pembangunan/rehab bangunan gudang benih dan alsintan	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa	5 Unit	746.100.000	835.632.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab. Lombok Barat	21 Unit	64.040.000	71.724.800
3.03.01.04.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	44.000.000	49.280.000
3.03.01.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya pendataan aset/barang milik daerah			25.300.000	28.336.000
3.03.01.04.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah	Tersedianya laporan aset/barang milik daerah	Kab. Lombok Barat	2 Laporan	25.300.000	28.336.000
3.03.01.04.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian / perkebunan	se-NTB	3,2 persen per tahun	1.186.298.000	1.328.653.760
3.03.01.04.19.20	Pengembangan perbenihan/perbibitan	Terlaksananya perbanyakan benih sumber tanaman pangan dan hortikultura	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa	32 Ha	1.186.298.000	1.328.653.760
3.03.01.05	Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan (BPTPBun)				3.957.055.000	4.431.901.600
3.03.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tertibnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			319.560.000	357.907.200
3.03.01.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	1.460.000	1.635.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor dan asrama	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	70.200.000	78.624.000
3.03.01.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor dan asrama	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	81.288.000	91.042.560
3.03.01.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	6.000.000	6.720.000
3.03.01.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan untuk keperluan kantor	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	9.200.000	10.304.000
3.03.01.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dan asrama	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	5.000.000	5.600.000
3.03.01.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	30.000.000	33.600.000
3.03.01.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	3.500.000	3.920.000
3.03.01.05.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Selarasnya Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	34.000.000	38.080.000
3.03.01.05.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Selarasnya Program Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	35.000.000	39.200.000
3.03.01.05.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya petugas keamanan kantor	Kab. Lombok Barat	2 Orang	43.912.000	49.181.440
3.03.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur			3.435.405.000	3.847.653.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.05.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Kab. Lombok Barat	1 Unit	1.350.000	1.512.000
3.03.01.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	130.700.000	146.384.000
3.03.01.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor penunjang kegiatan	Kab. Lombok Barat	9 Paket	2.576.105.000	2.885.237.600
3.03.01.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional kantor	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	64.000.000	71.680.000
3.03.01.05.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan asrama	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	11.500.000	12.880.000
3.03.01.05.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor	Kab. Lombok Barat	5 Paket	651.750.000	729.960.000
3.03.01.05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah			14.350.000	16.072.000
3.03.01.05.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah	Tertib administrasi pengelolaan aset dan keuangan daerah	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	14.350.000	16.072.000
3.03.01.05.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian / perkebunan	se-NTB	3,2 persen per tahun	187.740.000	210.268.800
3.03.01.05.19.07	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan	Bimtek Petugas UPPT, BPT dan Dinas se-Kab/Kota se NTB	Kab. Lombok Barat	2 Paket	187.740.000	210.268.800
3.03.01.06	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan (BPSB-Bun)				996.796.000	1.116.411.520
3.03.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor			485.696.000	543.979.520
3.03.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terdokumentasikannya surat menyurat UPTD	Kab. Lombok Barat	200 surat	900	1.008.000
3.03.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi,sumber daya listrik, dan air	Kab. Lombok Barat	12 bln	30.600.000	34.272.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola keuangan	Kab. Lombok Barat	4 org	34.296.000	38.411.520
3.03.01.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya tenaga kebersihan kantor	Kab. Lombok Barat	1 thn	67.700.000	75.824.000
3.03.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Kab. Lombok Barat	12 bln	6.000.000	6.720.000
3.03.01.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya biaya pencetakan dan penggandaan	Kab. Lombok Barat	12 bln	600	672
3.03.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya peralatan listrik	Kab. Lombok Barat	12 bln	3.500.000	3.920.000
3.03.01.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	terselenggaranya pelayanan kantor yang optimal	Kab. Lombok Barat	12 bln	93.000.000	104.160.000
3.03.01.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan	Kab. Lombok Barat	12 bln	3.600.000	4.032.000
3.03.01.06.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	terselenggaranya penyelarasan program dan kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota	Kab. Lombok Barat	12 bln	245.500.000	274.960.000
3.03.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasana Aparatur			84.250.000	94.360.000
3.03.01.06.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas	Kab. Lombok Barat	5 unit	30.000.000	33.600.000
3.03.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas oprasional uptd	Kab. Lombok Barat	12 bln	19.250.000	21.560.000
3.03.01.06.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab. Lombok Barat	12 th	35.000.000	39.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	meningkatnya pengembangan system pelaporan capaian kinerja			20.000.000	22.400.000
3.03.01.06.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	terlaksananya penyebaran informasi pembangunan daerah	Kab. Lombok Barat	1 th	20.000.000	22.400.000
3.03.01.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah			23.200.000	25.984.000
3.03.01.06.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah	Tersedianya laporan keuangan dan aset yang akuntabel	Kab. Lombok Barat	1 thn	23.200.000	25.984.000
3.03.01.06.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian / perkebunan	se-NTB	3,2 persen per tahun	383.650.000	429.688.000
3.03.01.06.19.20	Pengembangan perbenihan/perbibitan	terlaksananya pengembangan perbenihan/perbibitan	Kab. Lombok Barat	4 komoditas	383.650.000	429.688.000
3.03.01.07	Balai Benih Tanaman Perkebunan (BBTP-Bun)				2.092.099.400	2.343.151.328
3.03.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor			403.689.400	452.132.128
3.03.01.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya kebutuhan surat menyurat	Kab. Lombok Tengah	12 Bulan	930	1.041.600
3.03.01.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk keperluan operasional	Kab. Lombok Tengah	12 Bulan	12.100.000	13.552.000
3.03.01.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tertib dan lancarnya keuangan UPTD	Kab. Lombok Tengah	12 Bulan	56.566.000	63.353.920
3.03.01.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaminnya lingkungan bersih dan nyaman	Kab. Lombok Tengah	12 Bulan	91.245.500	102.194.960

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya pelayanan kantor yang optimal	Kab. Lombok Tengah	12 Bulan	3.357.900	3.760.848
3.03.01.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya pelayanan yang optimal	Kab. Lombok Tengah	12 Bulan	650	728
3.03.01.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya pelayanan yang optimal	Kab. Lombok Tengah	12 Bulan	1.724.000	1.930.880
3.03.01.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terjaminnya kelancaran pelayanan kantor	Kab. Lombok Tengah	12 Bulan	166.816.000	186.833.920
3.03.01.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Perkembangan informasi dapat diakses secara cepat	Kab. Lombok Tengah	12 Bulan	3.300.000	3.696.000
3.03.01.07.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah	Kab. Lombok Tengah	12 Bulan	32.000.000	35.840.000
3.03.01.07.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Sinkronisasi program dan kegiatan provinsi dan kabupaten/kota	Kab. Lombok Tengah	12 Bulan	35.000.000	39.200.000
3.03.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.122.800.000	1.257.536.000
3.03.01.07.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya Pagar Keliling, Jembatan dan Pintu Kebun Dinas	Provinsi NTB	6 Paket	1.028.000.000	1.151.360.000
3.03.01.07.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional	Kab. Lombok Tengah	5 Unit	94.800.000	106.176.000
3.03.01.07.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan dan Aset yang Akuntabel			20.040.000	22.444.800
3.03.01.07.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah	Terlaksananya Pendataan Aset/Barang Milik Daerah	Kab. Lombok Tengah	1 Tahun	20.040.000	22.444.800
3.03.01.07.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Produksi pertanian / perkebunan	se-NTB	3,2 persen per tahun	545.570.000	611.038.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.07.19.18	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	Terpeliharanya demplot teknologi sambung pucuk kopi seluas10 Ha di Kabupaten Lombok Utara dan Terlaksananya demplot teknologi sambung pucuk kopi seluas10 Ha di Kabupaten Lombok Timur dan Terlaksananya demplot tembakau virginia rendah nikotin seluas 2 Ha di Kabupaten Lombok Timur	Kab. Lombok Tengah	22 Ha	545.570.000	611.038.400
3.03.01.08	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Mataram (SMKPP Mataram)				6.367.701.200	7.131.825.344
3.03.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.237.724.600	2.506.251.552
3.03.01.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa suratmenyurat	Kab. Lombok Barat	200 Surat	3.210.000	3.595.200
3.03.01.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya langganan listrik, air dan telpon	Kab. Lombok Barat	7 rekening	113.800.000	127.456.000
3.03.01.08.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola keuangan	Kab. Lombok Barat	5 orang	54.647.000	61.204.640
3.03.01.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga cleaning service	Kab. Lombok Barat	12 Orang	282.800.000	316.736.000
3.03.01.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis untuk kebutuhan operasional sekolah	Kab. Lombok Barat	12 bulan	30.047.600	33.653.312
3.03.01.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kab. Lombok Barat	12 bulan	17.800.000	19.936.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Lombok Barat	12 bulan	35.160.000	39.379.200
3.03.01.08.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan AC dan Laptop	Kab. Lombok Barat	74 unit	890.000.000	996.800.000
3.03.01.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya langganan surat kabar/majalah	Kab. Lombok Barat	5 exp	107.200.000	120.064.000
3.03.01.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum rapat dan siswa	Kab. Lombok Barat	12 bulan	467.000.000	523.040.000
3.03.01.08.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya penyelarasan program pemerintah pusat dan provinsi	Kab. Lombok Barat	1 tahun	100.160.000	112.179.200
3.03.01.08.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya petugas keamanan sekolah	Kab. Lombok Barat	6 orang	135.900.000	152.208.000
3.03.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			777.230.000	870.497.600
3.03.01.08.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas angkut (Pick Up)	Kab. Lombok Barat	1 unit	320	358,4
3.03.01.08.02.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan mebeulair Sekolah	Kab. Lombok Barat	2 paket	485.100.000	543.312.000
3.03.01.08.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	Kab. Lombok Barat	1 tahun	100.160.000	112.179.200
3.03.01.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional	Kab. Lombok Barat	8 Unit	131.400.000	147.168.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.08.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor	Kab. Lombok Barat	91 unit	60.250.000	67.480.000
3.03.01.08.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya tertib pengelolaan aset			12.331.600	13.811.392
3.03.01.08.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah	Tersedianya laporan aset	Kab. Lombok Barat	1 laporan	12.331.600	13.811.392
3.03.01.08.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya kapasitas generasi muda pertanian	Kab. Lombok Barat	20 persen	3.340.415.000	3.741.264.800
3.03.01.08.19.25	Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian	Terfasilitasinya generasi muda pertanian	Kab. Lombok Barat	270 siswa	3.340.415.000	3.741.264.800
3.03.01.09	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Bima (SMKPP Bima)				13.087.265.500	14.657.737.360
3.03.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.112.962.500	1.246.518.000
3.03.01.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat di SMKPP N BIMA	Kota Bima	12 Bulan	3.450.000	3.864.000
3.03.01.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	12 Bulan	51.750.000	57.960.000
3.03.01.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Bima	12 Bulan	50.981.000	57.098.720
3.03.01.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya kantor yang bersih dan nyaman	Kota Bima	12 Bulan	167.915.000	188.064.800
3.03.01.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Kota Bima	12 Bulan	19.399.000	21.726.880
3.03.01.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	Kota Bima	12 Bulan	19.687.500	22.050.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik / penerangan kantor	Kota Bima	12 Bulan	5.065.000	5.672.800
3.03.01.09.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	1 tahun	100.000.000	112.000.000
3.03.01.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	12 Bulan	4.305.000	4.821.600
3.03.01.09.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan minum penunjang kegiatan	Kota Bima	12 Bulan	464.500.000	520.240.000
3.03.01.09.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terjadinya koordinasi kerja yang selaras antara Pemerintah pusat dan daerah	Kota Bima	1 Tahun	50.620.000	56.694.400
3.03.01.09.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terjadinya keselarasan antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota	Kota Bima	1 Tahun	80.290.000	89.924.800
3.03.01.09.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya keamanan kantor	Kota Bima	12 Bulan	95.000.000	106.400.000
3.03.01.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			11.037.955.000	12.362.509.600
3.03.01.09.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya bangunan kantor lainnya penunjang kegiatan	Kota Bima	1 Tahun	6.600.000.000	7.392.000.000
3.03.01.09.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pengadaan minibus siswa	Kota Bima	2 unit	1.300.000.000	1.456.000.000
3.03.01.09.02.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya pengadaan Meja dan kursi belajar siswa	Kota Bima	600 buah	270.000.000	302.400.000
3.03.01.09.02.11	Pengadaan UPS/Stabiiizer, komputer dan aiat-aiat elektronik	tersedianya peralatan kantor	Kota Bima	1 Tahun	100.000.000	112.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terawatnya gedung kantor	Kota Bima	1 Tahun	2.700.000.000	3.024.000.000
3.03.01.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	12 Bulan	21.250.000	23.800.000
3.03.01.09.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	12 Bulan	46.705.000	52.309.600
3.03.01.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Mental dan Fisik Aparatur			83.185.000	93.167.200
3.03.01.09.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Terpenuhinya sumber daya aparatur	Kota Bima	12 Bulan	43.340.000	48.540.800
3.03.01.09.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	terpenuhinya mental fisik aparatur	Kota Bima	12 Bulan	32.360.000	36.243.200
3.03.01.09.05.06	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Tersedianya laporan bulanan dan evaluasi	Kota Bima	12 Bulan	7.485.000	8.383.200
3.03.01.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Tersedianya Laporan Kinerja SKPD			9.500.000	10.640.000
3.03.01.09.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersedianya laporan tahunan	Kota Bima	12 Bulan	9.500.000	10.640.000
3.03.01.09.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah			16.578.000	18.567.360
3.03.01.09.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah	Tersedianya laporan aset	Kota Bima	1 laporan	16.578.000	18.567.360
3.03.01.09.19	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Tersedianya generasi pertanian yang handal	Kota Bima	3 persen per tahun	827.085.000	926.335.200
3.03.01.09.19.25	Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian	Tersedianya sumber daya pertanian dalam pembangunan	Kota Bima	175 siswa	827.085.000	926.335.200
3.03.01.10	Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Perkebunan (BPPSDMPP)				4.990.799.900	5.589.695.888
3.03.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran			662.217.500	741.683.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.10.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya administrasi surat menyurat di BPPSDMPP	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	5.200.000	5.824.000
3.03.01.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya pelayanan dan administrasi di BPPSDMPP	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	139.400.000	156.128.000
3.03.01.10.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya administrasi keuangan di BPPSDMPP	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	62.664.000	70.183.680
3.03.01.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaminnya kebersihan kantor dan asrama di BPPSDMPP	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	243.000.000	272.160.000
3.03.01.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	20.183.500	22.605.520
3.03.01.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpublikasinya kegiatan di BPPSDMPP	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	17.000.000	19.040.000
3.03.01.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Listrik/Penerangan Jalan kantor	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	10.270.000	11.502.400
3.03.01.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan bacaan dan informasi di BPPSDMPP	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	4.800.000	5.376.000
3.03.01.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terfasilitasinya kebutuhan rapat dan tamu BPPSDMPP	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	4.000.000	4.480.000
3.03.01.10.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Sinkronisasi kegiatan dengan pusat/provinsi lainnya di BPPSDMPP	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	60.000.000	67.200.000
3.03.01.10.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terwujudnya keselarasan program dengan kabupaten/kota di BPPSDMPP	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	30.000.000	33.600.000
3.03.01.10.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Meningkatnya Keamanan Kantor	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	65.700.000	73.584.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			841.400.000	942.368.000
3.03.01.10.02.03	Pembangunan gedung kantor	Meningkatnya Pelayanan UPTD	Kab. Lombok Barat	1 Paket	550.000.000	616.000.000
3.03.01.10.02.10	Pengadaan mebeleur	Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur	Kab. Lombok Barat	300 unit	60.500.000	67.760.000
3.03.01.10.02.11	Pengadaan UPS/Stabiizer, komputer dan aiat-aiat elektronik	Tersedianya alat-alat kantor	Kab. Lombok Barat	20 unit	96.000.000	107.520.000
3.03.01.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan Dinas siap pakai	Kab. Lombok Barat	35 unit	75.900.000	85.008.000
3.03.01.10.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor siap operasi	Kab. Lombok Barat	70 unit	59.000.000	66.080.000
3.03.01.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Mental dan Fisik Aparatur			10.800.000	12.096.000
3.03.01.10.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Tersedianya mental dan fisik aparatur	Kab. Lombok Barat	40 orang	10.800.000	12.096.000
3.03.01.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Tersedianya Laporan Kinerja SKPD			26.000.000	29.120.000
3.03.01.10.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpeliharannya akuntabilitas kinerja UPTD	Kab. Lombok Barat	40 OH	8.000.000	8.960.000
3.03.01.10.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya DokumenPerencanaan UPTD	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	8.000.000	8.960.000
3.03.01.10.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tersebar nya informasi pembangunan daerah1	Kab. Lombok Barat	1 Paket	10.000.000	11.200.000
3.03.01.10.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terselenggaranya kegiatan penyebaran informasi daerah			9.600.000	10.752.000
3.03.01.10.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah	Tertibnya Penatausahaan Aset	Kab. Lombok Barat	12 OB	9.600.000	10.752.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.01.10.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani (NTP)	se-NTB	10 persen dari tahun sebelumnya	2.903.973.400	3.252.450.208
3.03.01.10.15.02	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Terlaksananya kegiatan rembug/pertemuan kontak tani nelayan andalan	Kab. Lombok Barat	50 orang	79.607.800	89.160.736
3.03.01.10.15.03	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	Terlaksananya kegiatan pendampingan pertanian konservasi	Kab. Lombok Barat	160 orang	89.582.800	100.332.736
3.03.01.10.15.04	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Terlaksananya kegiatan penilaian petani, penyuluh dan kelembagaan petani	Kab. Lombok Barat	11 Kategori	306.482.800	343.260.736
3.03.01.10.15.25	Pelatihan Penerapan PHT pada Pengendalian OPT	Meningkatnya SDM Petugas dan petani	Kab. Lombok Barat	690 Orang	2.428.300.000	2.719.696.000
3.03.01.10.20	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Persentase Penyuluh Pertanian / Perkebunan yang diberdayakan	se-NTB	20 persen	536.809.000	601.226.080
3.03.01.10.20.05	Penyusunan Programa Penyuluhan	Tersusunnya programa penyuluhan	Kab. Lombok Barat	1 buku	45.547.800	51.013.536
3.03.01.10.20.18	Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan kegiatan Monitoring, Supervisi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Penyuluhan	Kab. Lombok Barat	3 kali	80.512.800	90.174.336
3.03.01.10.20.34	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas penyuluh dan aparatur melalui workshop dan bimbingan teknis	Kab. Lombok Barat	340 orang	410.748.400	460.038.208
3.03.02	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				84.598.568.530	94.750.396.754

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.02.01	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan				71.312.480.280	79.869.977.914
3.03.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi			1.398.962.100	1.566.837.552
3.03.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terselenggaranya pelayanan surat menyurat	se-NTB	5000 surat	56.850.000	63.672.000
3.03.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan jasa komunikasi, tersedianya sumber daya air dan listrik	Kota Mataram	1 Tahun	107.760.000	120.691.200
3.03.02.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	8 Unit	20.600.000	23.072.000
3.03.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersusunnya laporan keuangan dinas yang akuntabel	Kota Mataram	190 Orang	383.055.000	429.021.600
3.03.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan jasa kebersihan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	219.415.300	245.745.136
3.03.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK untuk kebutuhan aktivitas kantor	Kota Mataram	1 Tahun	28.202.200	31.586.464
3.03.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya dokumen dan arsip kegiatan dinas	Kota Mataram	1 Tahun	22.000.000	24.640.000
3.03.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat	1 Tahun	8.801.600	9.857.792
3.03.02.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya perlengkapan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	67 Unit	136.150.000	152.488.000
3.03.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan untuk ASN dan Mitra Kerja	Kota Mataram	1 Tahun	34.328.000	38.447.360

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum kegiatan	Kota Mataram	1 Tahun	15.000.000	16.800.000
3.03.02.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	selarasnya Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Kota Mataram, Luar Provinsi	1 Tahun	105.315.000	117.952.800
3.03.02.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Selarasnya Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	se-NTB	1 Tahun	71.343.500	79.904.720
3.03.02.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya Petugas Keamanan Kantor	Kota Mataram	7 Orang	190.141.500	212.958.480
3.03.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana ASN			20.633.191.500	23.109.174.480
3.03.02.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Gedung Kantor Yang Representatif	Kota Mataram	12 Unit	17.776.100.000	19.909.232.000
3.03.02.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan operasional dinas	Kota Mataram	6 unit	1.140.000.000	1.276.800.000
3.03.02.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor yang Memadai	Kota Mataram	8 Unit	55.000.000	61.600.000
3.03.02.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	Kota Mataram	7 Unit	855.000.000	957.600.000
3.03.02.01.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik kantor	Kota Mataram	9 Unit	84.000.000	94.080.000
3.03.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Kota Mataram	6 unit	20.204.900	22.629.488
3.03.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Kota Mataram	25 Unit	603.386.600	675.792.992
3.03.02.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Kota Mataram	20 Unit	99.500.000	111.440.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya Pembinaan Mental dan Fisik ASN			250.495.000	280.554.400
3.03.02.01.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terbinanya Mental dan Fisik Aparatur Dinas	Kota Mataram	190 Orang	25.995.000	29.114.400
3.03.02.01.05.05	Peningkatan SDM aparatur	Meningkatnya Kompetensi ASN Dinas	Kota Mataram	190 Orang	160.620.000	179.894.400
3.03.02.01.05.06	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Meningkatnya Disiplin ASN Dinas	Kota Mataram	190 Orang	63.880.000	71.545.600
3.03.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kegiatan Akuntabel			1.444.847.900	1.618.229.648
3.03.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang Akuntabel	Kota Mataram	4 Dokumen	274.350.000	307.272.000
3.03.02.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana Kerja SKPD yang efektif dan efisien	Kota Mataram	3 Dokumen	230.335.900	257.976.208
3.03.02.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tersusunnya Data Statistik Sektoral Bidang Peternakan	Kota Mataram	1 Dokumen	771.105.000	863.637.600
3.03.02.01.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tersiarinya informasi pembangunan daerah	Kota Mataram, se-NTB	1 Tahun	169.057.000	189.343.840
3.03.02.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Akuntabel			77.748.000	87.077.760
3.03.02.01.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah	Tersusunnya Laporan Asset yang Akuntabel	Kota Mataram, se-NTB	1 Dokumen	77.748.000	87.077.760

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.02.01.21	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Terkendalinya kasus PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	se-NTB	50000 dosis	2.147.715.080	2.405.440.890
3.03.02.01.21.02	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	Pencegahan dan pengendalian 3 Jenis PHMS (Antrax, SE, AI) 26.000 dosis dan Surveilans penyakit brucellosis 1000 ekor, penyakit rabies 3000 ekor	se-NTB	5 Jenis	600.757.680	672.848.602
3.03.02.01.21.11	Pelayanan kesehatan hewan dan pengawasan obat	Peningkatan reproduksi ternak dan penurunan kematian pedet	se-NTB	3000 ekor	798.106.100	893.878.832
3.03.02.01.21.13	Pengamatan Penyakit Hewan	Terdeteksinya perkembangan PHMS di NTB	se-NTB	12 kali	748.851.300	838.713.456
3.03.02.01.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan populasi ternak sapi	Provinsi NTB	5%	43.220.941.100	48.407.454.032
3.03.02.01.22.01	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	Terlaksananya pengembangan sarana dan prasarana produksi peternakan	se-NTB	40 Kelompok	6.459.342.400	7.234.463.488
3.03.02.01.22.33	Pengawasan Lalu Lintas Produk Pangan Asal Hewan	Jumlah Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan	se-NTB	61 kali	259.173.200	290.273.984
3.03.02.01.22.34	Peningkatan Pengelolaan RPH	Terlaksananya Pengelolaan RPH yang ASUH	se-NTB	61 TPH/RPH	290.169.100	324.989.392
3.03.02.01.22.35	Penguatan Kelembagaan Kelompok tani Ternak	Meningkatnya SDM Peternak	se-NTB	135 Kelompok	14.630.970.000	16.386.686.400
3.03.02.01.22.36	Pengawasan dan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif	Menurunnya Angka Pemotongan Betina Produktif	se-NTB	< 1 Persen	170.336.400	190.776.768

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.02.01.22.38	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak	Meningkatnya populasi ternak	se-NTB	121 Kelompok	21.410.950.000	23.980.264.000
3.03.02.01.23	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Cakupan Pemasaran Produk Olahan Peternakan	Luar Provinsi, Provinsi NTB	80 %	2.138.579.600	2.395.209.152
3.03.02.01.23.17	Pembinaan dan pengolahan pemasaran hasil peternakan	Terbinanya pelaku usaha pengolahan produk peternakan	se-NTB	15 Kelompok	1.770.900.000	1.983.408.000
3.03.02.01.23.18	Investasi dan Pengembangan Usaha Peternakan	Meningkatnya Investasi dan Pengembangan Usaha Peternakan	Provinsi NTB	3 kali	367.679.600	411.801.152
3.03.02.02	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPTHMT)				2.051.560.000	2.297.747.200
3.03.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pengiriman surat menyurat			346.974.000	388.610.880
3.03.02.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Pengiriman surat menyurat	se-NTB	1000 surat	4.560.000	5.107.200
3.03.02.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya pelayanan jasa komunikasi dan listrik	Kab. Sumbawa	1 Tahun	60.000.000	67.200.000
3.03.02.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Lancarnya pelaksanaan pelayanan perkantoran	Kab. Sumbawa	1 Tahun	3.500.000	3.920.000
3.03.02.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pelayanan administrasi keuangan UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	56.606.000	63.398.720
3.03.02.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	70.600.000	79.072.000
3.03.02.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terselenggaranya Penyediaan ATK UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	5.978.000	6.695.360
3.03.02.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terselenggaranya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	5.500.000	6.160.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.02.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terselenggaranya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	3.060.000	3.427.200
3.03.02.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terselenggaranya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	9.350.000	10.472.000
3.03.02.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan meningkatnya pengetahuan ASN	Kab. Sumbawa	1 Tahun	3.720.000	4.166.400
3.03.02.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terselenggaranya penyediaan makan minum kegiatan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	28.125.000	31.500.000
3.03.02.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan dan tersedianya dokumen penyelarasan program/kegiatan provinsi	Kab. Sumbawa	1 Tahun	30.000.000	33.600.000
3.03.02.02.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya fasilitas dan keamanan kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	65.975.000	73.892.000
3.03.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor			104.265.000	116.776.800
3.03.02.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin gedung kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	30.165.000	33.784.800
3.03.02.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan bermotor	Kab. Sumbawa	4 Unit	44.000.000	49.280.000
3.03.02.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	30.100.000	33.712.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya pembinaan mental dan fisik ASN yang menghasilkan ASN yang berkualitas			114.600.000	128.352.000
3.03.02.02.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terselenggaranya pembinaan mental dan fisik ASN	Kab. Sumbawa	1 Tahun	34.600.000	38.752.000
3.03.02.02.05.05	Peningkatan SDM aparatur	Terselenggaranya peningkatan SDM dan tersedianya ASN yang berkualitas	Kab. Sumbawa	1 Tahun	80.000.000	89.600.000
3.03.02.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Laporan Kegiatan Akuntabel			113.655.000	127.293.600
3.03.02.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya dokumen RKAP/DPAP 2019 dan RKA/DPA 2020	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	100.080.000	112.089.600
3.03.02.02.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Terlaksananya penyebaran informasi pembangunan UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	13.575.000	15.204.000
3.03.02.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya penatausahaan keuangan dan asset UPTD			38.615.000	43.248.800
3.03.02.02.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah	Tersediannya dokumen asset UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	38.615.000	43.248.800
3.03.02.02.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan populasi ternak sapi	Provinsi NTB	5%	1.333.451.000	1.493.465.120
3.03.02.02.22.26	Pembibitan hijauan makanan ternak Serading	Terlaksananya pengembangan hijauan makanan ternak	Kab. Sumbawa	20 ha	132.600.000	148.512.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.02.02.22.27	Pembibitan ternak sapi bali Serading	Terlaksananya pengembangan ternak bibit dan tersedianya ternak bibit yang berkualitas	Kab. Sumbawa	75 ekor	465.900.000	521.808.000
3.03.02.02.22.39	Pengembangan Pakan Lokal	Tersedianya pakan lokal yang berkualitas	Kab. Sumbawa	20 ha	305.000.000	341.600.000
3.03.02.02.22.40	Peningkatan peran dan fungsi Balai Pembibitan Ternak dan HMT Serading	Terlaksananya peran dan fungsi UPTD	Kab. Sumbawa	5 kali	45.000.000	50.400.000
3.03.02.02.22.41	Pengembangan instalasi perbibitan ternak pekat Dompu	Terlaksananya Pengembangan Perbibitan Ternak di Instalasi Dompu	Kab. Dompu	40 ha	195.275.000	218.708.000
3.03.02.02.22.42	Pengembangan instalasi perbibitan hijauan makanan ternak Pandai-Bima	Terlaksananya Pengembangan HPT di Instalasi Pandai-Bima	Kab. Bima	20 ha	189.676.000	212.437.120
3.03.02.03	Balai Inseminasi Buatan (BIB)				5.706.177.850	6.390.919.192
3.03.02.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi kantor			720.790.156	807.284.975
3.03.02.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Kebutuhan Pelayanan Surat Menyurat	Kab. Lombok Barat	1000 Surat	2.400.000	2.688.000
3.03.02.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Kebutuhan Jasa Listrik, Air dan Telepon	Kab. Lombok Barat	8 rekening	48.500.000	54.320.000
3.03.02.03.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Kebutuhan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lombok Barat	10 Unit	15.000.000	16.800.000
3.03.02.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan UPTD	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	73.427.500	82.238.800
3.03.02.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan dan Petugas Jasa Kebersihan UPTD	Kab. Lombok Barat	5 Orang	90.800.000	101.696.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.02.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Kab. Lombok Barat	25 Jenis	22.686.656	25.409.055
3.03.02.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Bahan Informasi Pelayanan UPTD	Kab. Lombok Barat	2 Media	10.000.000	11.200.000
3.03.02.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik Bagi Kebutuhan Kantor	Kab. Lombok Barat	10 Jenis	19.476.000	21.813.120
3.03.02.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lombok Barat	10 Unit	25.000.000	28.000.000
3.03.02.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Aparatur	Kab. Lombok Barat	2 Media	3.000.000	3.360.000
3.03.02.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersediannya makan dan minum apratur dan tamu	Kab. Lombok Barat	250 Orang	7.500.000	8.400.000
3.03.02.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terkoordinasinya kegiatan daerah dengan pusat	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	120.000.000	134.400.000
3.03.02.03.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya petugas keamanan kantor UPTD	Kab. Lombok Barat	6 Orang	283.000.000	316.960.000
3.03.02.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur yang memadai			1.055.000.000	1.181.600.000
3.03.02.03.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor yang memadai	Kab. Lombok Barat	3 Unit	753.300.000	843.696.000
3.03.02.03.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kelengkapan kantor yang cukup	Kab. Lombok Barat	2 Unit	45.000.000	50.400.000
3.03.02.03.02.11	Pengadaan UPS/Stabiizer, komputer dan aiat-aiat elektronik	Tersedianya peralatan komputer dan elektronik	Kab. Lombok Barat	5 Unit	48.000.000	53.760.000
3.03.02.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan gedung kantor	Kab. Lombok Barat	2 Unit	77.000.000	86.240.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.02.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkaia kendaraan dinas/operasionai	Tersedianya kebutuhan dan operasional pemeliharaan kendaraan dinas	Kab. Lombok Barat	6 Unit	53.200.000	59.584.000
3.03.02.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkaia Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya kebutuhan pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Lombok Barat	10 Unit	78.500.000	87.920.000
3.03.02.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya SDM yang profesional			125.050.000	140.056.000
3.03.02.03.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terbinanya mental fisik aparatur terutama nilai - nilai keagamaan	Kab. Lombok Barat	60 Orang	13.050.000	14.616.000
3.03.02.03.05.05	Peningkatan SDM aparatur	Terlaksananya peningkatan SDM Aparatur bidang peternakan	Kab. Lombok Barat	5 Orang	70.000.000	78.400.000
3.03.02.03.05.06	Pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Terlaksananya pembinaan, pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Kab. Lombok Barat	60 Orang	42.000.000	47.040.000
3.03.02.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Laporan Kegiatan akuntabel			166.275.000	186.228.000
3.03.02.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan tahunan dan DPA UPTD	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	123.300.000	138.096.000
3.03.02.03.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya bahan penyebarluasan informasi fungsi UPTD	Kab. Lombok Barat	500 Orang	42.975.000	48.132.000
3.03.02.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksanan penatausahaan keuangan dan asset UPTD			47.171.600	52.832.192

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.02.03.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah	Tersedianya Dokumen Asset UPTD	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	47.171.600	52.832.192
3.03.02.03.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan populasi ternak sapi	Provinsi NTB	5%	3.591.891.094	4.022.918.025
3.03.02.03.22.10	Pembuatan mani beku	Terlaksananya pembuatan straw/ mani beku inseminasi buatan	Kab. Lombok Barat	120000 Straw	646.088.594	723.619.225
3.03.02.03.22.11	Pengembangan instalasi pembibitan sapi Amor-Amor	Terlaksananya pengembangan perbibitan sapi di instalasi amor - amor	Kab. Lombok Utara	1 Unit	164.675.000	184.436.000
3.03.02.03.22.12	Pembibitan & perawatan ternak sapi Brangus di Instalasi Amor-Amo	Terpeliharanya ternak sapi berangus amor - amor	Kab. Lombok Barat	32 Ekor	109.000.000	122.080.000
3.03.02.03.22.13	Peningkatan peran dan fungsi Balai Inseminasi Buatan (BIB)	Tersedianya Lab IB yang sesuai standar ISO/SNI	Kab. Lombok Barat	500 Orang	1.934.937.500	2.167.130.000
3.03.02.03.22.25	Pengujian dan Pengawasan Mutu Semen Beku	Terlaksananya pengujian straw / mani beku pejantan BULL	Kab. Lombok Barat	200 Sampel	519.990.000	582.388.800
3.03.02.03.22.39	Pengembangan Pakan Lokal	Tersedianya HMT pakan ternak yang berkualitas	Kab. Lombok Barat	4 Ha	217.200.000	243.264.000
3.03.02.04	Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)				3.491.378.900	3.910.344.368
3.03.02.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi			268.797.400	301.053.088
3.03.02.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya kegiatan surat menyurat	Kab. Lombok Barat	1000 surat	4.310.000	4.827.200
3.03.02.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pelayanan komunikasi, listrik dan air	Kab. Lombok Barat	1 tahun	88.800.000	99.456.000
3.03.02.04.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Lombok Barat	1 tahun	23.000.000	25.760.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.02.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya pembayaran pelaksanaan kegiatan	Kab. Lombok Barat	1 tahun	29.540.500	33.085.360
3.03.02.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya jasa kebersihan kantor	Kab. Lombok Barat	1 tahun	59.635.000	66.791.200
3.03.02.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis menulis	Kab. Lombok Barat	1 tahun	3.611.900	4.045.328
3.03.02.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	Kab. Lombok Barat	1 tahun	12.500.000	14.000.000
3.03.02.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik dan penerangan yang memadai	Kab. Lombok Barat	1 tahun	1.500.000	1.680.000
3.03.02.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Kab. Lombok Barat	1 tahun	1.200.000	1.344.000
3.03.02.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan kegiatan kantor	Kab. Lombok Barat	1 tahun	7.500.000	8.400.000
3.03.02.04.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya dana perjalanan ASN	Kab. Lombok Barat	1 tahun	18.000.000	20.160.000
3.03.02.04.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya jasa keamanan kantor	Kab. Lombok Barat	1 tahun	19.200.000	21.504.000
3.03.02.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor			939.692.500	1.052.455.600
3.03.02.04.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya penyediaan fasilitas pelayanan pada UPTD	Kab. Lombok Barat	1 Unit	890.892.500	997.799.600
3.03.02.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	5.100.000	5.712.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.02.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	32.700.000	36.624.000
3.03.02.04.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	11.000.000	12.320.000
3.03.02.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya peningkatan mental dan fisik ASN			34.200.000	38.304.000
3.03.02.04.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya peningkatan mental dan fisik ASN	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	4.200.000	4.704.000
3.03.02.04.05.05	Peningkatan SDM aparatur	Tersedianya kegiatan peningkatan SDM aparatur	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	30.000.000	33.600.000
3.03.02.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terlaksananya penyusunan RKAP/ DPPA 2019 dan RKA/ DPA 2020			46.375.000	51.940.000
3.03.02.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan RKAP/ DPPA 2019 dan RKA/ DPA 2020	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	43.375.000	48.580.000
3.03.02.04.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya informasi pembangunan UPTD	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	3.000.000	3.360.000
3.03.02.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Teridentifikasi dan terverifikasinya asset UPTD			33.543.100	37.568.272
3.03.02.04.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah	Teridentifikasi dan terverifikasinya asset UPTD	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	33.543.100	37.568.272
3.03.02.04.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan populasi ternak sapi	Provinsi NTB	5%	2.168.770.900	2.429.023.408

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.02.04.22.14	Peningkatan peran dan fungsi Balai Laboratorium Veteriner dan RSH	Terlaksananya pengembangan dan penguatan kelembagaan UPTD	Kab. Lombok Barat	4 kali pengujian terakreditasi	1.260.250.000	1.411.480.000
3.03.02.04.22.16	Peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan hewan type B	Terlaksananya pelayanan laboratorium veteriner	Kab. Lombok Barat	2700 Sampel	525.165.000	588.184.800
3.03.02.04.22.17	Peningkatan pelayanan Rumah Sakit Hewan	Terlaksananya pelayanan Rumah sakit Hewan	Kab. Lombok Barat	10000 sampel	383.355.900	429.358.608
3.03.02.05	Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia				2.036.971.500	2.281.408.080
3.03.02.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pelayanan administrasi yang terselenggara UPTD			302.205.000	338.469.600
3.03.02.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	terselenggaranya pelayanan surat menyurat	Kab. Lombok Barat	10000 surat	6.220.000	6.966.400
3.03.02.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya Pelayanan komunikasi, Listrik dan Air	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	24.000.000	26.880.000
3.03.02.05.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Belanja Pemeliharaan	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	11.300.000	12.656.000
3.03.02.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	terlaksananya pembayaran pelaksanaan kegiatan	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	37.000.000	41.440.000
3.03.02.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	133.422.500	149.433.200
3.03.02.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksananya Pelayanan UPTD	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	2.887.500	3.234.000
3.03.02.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	3.000.000	3.360.000
3.03.02.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik bagi kebutuhan kantor BP3TR	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	2.475.000	2.772.000
3.03.02.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya kegiatan perlengkapan gedung kantor	Kab. Lombok Barat	5 Buah	38.000.000	42.560.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.02.05.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya petugas keamanan kantor UPTD	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	43.900.000	49.168.000
3.03.02.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan sarana dan prasarana UPTD			372.060.000	416.707.200
3.03.02.05.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Kegiatan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Lombok Barat	1 Paket1	200.000.000	224.000.000
3.03.02.05.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Kegiatan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Lombok Barat	1 Paket	22.000.000	24.640.000
3.03.02.05.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersediannya Fasilitas Gedung Kantor	Kab. Lombok Barat	1 Paket	41.750.000	46.760.000
3.03.02.05.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Pengadaan Laptop (SIMDA Barang)	Kab. Lombok Barat	1 unit	10.000.000	11.200.000
3.03.02.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	42.070.000	47.118.400
3.03.02.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	22.760.000	25.491.200
3.03.02.05.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	33.480.000	37.497.600
3.03.02.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kompetensi aparatur teknis			89.780.000	100.553.600
3.03.02.05.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terselenggaranya Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	6.000.000	6.720.000
3.03.02.05.05.06	Pengendalian dan pengawasan kepegawaian	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	41.500.000	46.480.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.02.05.05.07	Bimtek Pengelolaan Barang Daerah	Terselenggaranya Bimtek Pengelola Barang/Asset Daerah	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	42.280.000	47.353.600
3.03.02.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya rencana kerja dan Laporan keuangan			93.342.500	104.543.600
3.03.02.05.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan RKA/DPA dan RKAP/DPPA 2019	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	80.365.000	90.008.800
3.03.02.05.06.09	Penyebaran Informasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Informasi Pembangunan di UPTD	Kab. Lombok Barat	12 Bulan	12.977.500	14.534.800
3.03.02.05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya laporan aset daerah yang akuntabel			42.640.000	47.756.800
3.03.02.05.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Mlik Daerah	Teridentifikasinya dan terverifikasinya Asset UPTD	Kab. Lombok Barat	12 bulan	42.640.000	47.756.800
3.03.02.05.22	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Pertumbuhan populasi ternak sapi	Provinsi NTB	5%	446.692.000	500.295.040
3.03.02.05.22.39	Pengembangan Pakan Lokal	terlaksananya kegiatan pengembangan pakan olahan	Kab. Lombok Barat	10 ton	446.692.000	500.295.040
3.03.02.05.24	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Meningkatnya pemanfaatan hasil samping pertanian dan perkebunan sebagai pakan ternak berkualitas	Kab. Lombok Barat	5 persen	690.252.000	773.082.240
3.03.02.05.24.25	Pengembangan Pakan Hijauan Ternak dan Limbah Pertanian	Terlaksananya pengembangan pakan ternak dan limbah pertanian	Kab. Lombok Barat	30 ton	154.625.000	173.180.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.03.02.05.24.26	Pengembangan Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian	Terlaksananya Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian	se-NTB	10 kali	535.627.000	599.902.240
3,04	KEHUTANAN				86.092.260.949	96.423.332.263
3.04.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan				86.092.260.949	96.423.332.263
3.04.01.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Induk)				9.650.343.900	10.808.385.168
3.04.01.01.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Menurunnya presentase kerawanan gangguan hutan dan ekosistem	se-NTB	10 % (15.000 Ha dari 141.376 Ha lahan kritis dalam kawasan)	3.869.009.900	4.333.291.088
3.04.01.01.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Jumlah kegiatan pengendalian pencegahan dan pengamanan hutan	se-NTB	11 kegiatan	2.038.017.200	2.282.579.264
3.04.01.01.21.02	Penegakan Hukum Kehutanan	Jumlah berkas perkara penyidikan tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	se-NTB	12 berkas	434.798.100	486.973.872
3.04.01.01.21.03	Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati	Jumlah dokumen dan kegiatan konservasi dan sumber daya alam hayati	se-NTB	2 Dokumen dan 6 Kegiatan	832.852.500	932.794.800
3.04.01.01.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah dokumen dan kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan	Provinsi NTB	2 Dokumen, dan 3 kegiatan	563.342.100	630.943.152
3.04.01.01.22	Program Pengelolaan Hutan	Jumlah peningkatan presentase kontribusi komoditi kehutanan	se-NTB	10 % (baseline 600.000.000)	3.438.189.400	3.850.772.128
3.04.01.01.22.01	Perencanaan dan Tata Hutan	Jumlah dokumen dan kegiatan perencanaan dan tata hutan	se-NTB	3 Dokumen, dan 2 kegiatan	1.618.245.200	1.812.434.624

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.01.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Jumlah kelompok usaha masyarakat dan industri kehutanan yang terbina	se-NTB	12 kelompok Masyarakat, 18 Industri kehutanan, dan 5 HTI	1.383.975.000	1.550.052.000
3.04.01.01.22.03	Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	Jumlah dokumen kegiatan penatausahaan hasil hutan (dokumen industri, PNPB dan peredaran hasil hutan)	se-NTB	3 dokumen	435.969.200	488.285.504
3.04.01.01.23	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas Hutan dan Lahan Kritis Yang Tertangani	se-NTB	1200 hektar	2.343.144.600	2.624.321.952
3.04.01.01.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Jumlah luasan rehabilitasi hutan dan lahan kritis	se-NTB	1200 Hektar	417.768.000	467.900.160
3.04.01.01.23.02	Pengelolaan DAS	Jumlah DAS yang terkelola	se-NTB	2 DAS	234.655.500	262.814.160
3.04.01.01.23.03	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kegiatan, dokumen dan kelompok masyarakat yang terbina	se-NTB	12 kegiatan, 2 dokumen 72 kelompok masyarakat	1.690.721.100	1.893.607.632
3.04.01.03	Balai Taman Hutan Raya Nuraksa				7.632.758.400	8.548.689.408
3.04.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan			1.282.118.600	1.435.972.832
3.04.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya pengiriman surat menyurat kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	2.400.000	2.688.000
3.04.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan internet pada Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	12 bulan	334.000.000	374.080.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	12 bulan	44.184.000	49.486.080
3.04.01.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	12 bulan	164.585.600	184.335.872
3.04.01.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	20.726.000	23.213.120
3.04.01.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan identitas kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	77.365.000	86.648.800
3.04.01.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	20.108.000	22.520.960
3.04.01.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	320.750.000	359.240.000
3.04.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar harian lokal dan nasional pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	3.000.000	3.360.000
3.04.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	45.000.000	50.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	150.000.000	168.000.000
3.04.01.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	100.000.000	112.000.000
3.04.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Operasional			1.950.069.000	2.184.077.280
3.04.01.03.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya bangunan gedung resort/pos jaga KPH dan Tahura	Kab. Lombok Barat	33 unit	699.050.000	782.936.000
3.04.01.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas operasional pada Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	8 unit	572.050.000	640.696.000
3.04.01.03.02.10	Pengadaan mebeleur	Terpenuhinya kebutuhan meubeulair pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	3 paket	79.495.000	89.034.400
3.04.01.03.02.11	Pengadaan UPS/Stabiiizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronik kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	12 paket	263.350.000	294.952.000
3.04.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	175.350.000	196.392.000
3.04.01.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	60.474.000	67.730.880
3.04.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	100.300.000	112.336.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM			75.870.000	84.974.400
3.04.01.03.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya imtaq dan senam pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	1 Tahun	75.870.000	84.974.400
3.04.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan Perencanaan			81.920.000	91.750.400
3.04.01.03.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	13 dokumen	15.120.000	16.934.400
3.04.01.03.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif pada UPTD Balai Tahura Nuraksa (DPA dan DPPA)	Kab. Lombok Barat	26 dokumen	66.800.000	74.816.000
3.04.01.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pemantauan Aset			23.700.000	26.544.000
3.04.01.03.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan aset dinas pada UPTD Balai Tahura Nuraksa	Kab. Lombok Barat	13 dokumen	23.700.000	26.544.000
3.04.01.03.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Menurunnya eresentase kerawanan gangguan hutan dan ekosistem	Kab. Lombok Barat	10 % (15.000) ha dari 141.000 lahan kritis	742.195.800	831.259.296
3.04.01.03.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Menurunnya persentase kerawanan gannguan hutan dan ekosistem	Kab. Lombok Barat	10 % (15.000) ha dari 141 000 lahan kritis Tahun 2019	513.745.800	575.395.296
3.04.01.03.21.03	Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati	Perlindungan keanekaragaman hayati pada balai tahura nuraksa	Kab. Lombok Utara	11 KPH dan Tahura	228.450.000	255.864.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.03.22	Program Pengelolaan Hutan	Peningkatan Peresentase pendapatan di sektor kehutanan	Kab. Lombok Barat	10 %	2.724.435.000	3.051.367.200
3.04.01.03.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Tersedianya Peningkatan Persentase Pendapatan disektor Kehutanan	Kab. Lombok Barat	14 lokasi	2.724.435.000	3.051.367.200
3.04.01.03.23	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas lahan kritis yang tertangani	Kab. Lombok Barat	1,200 Ha	752.450.000	842.744.000
3.04.01.03.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Tertanamnya lahan kritis, Tersedianya benih/bibit tanaman endemik NTB	Kab. Lombok Barat	1410 Ha	666.600.000	746.592.000
3.04.01.03.23.03	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pelaksanaan penyuluhan	Kab. Lombok Barat	se NTB	85.850.000	96.152.000
3.04.01.04	Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura				16.698.402.100	18.702.210.352
3.04.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan			938.060.200	1.050.627.424
3.04.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya Pengiriman Surat Menyurat Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	3.200.000	3.584.000
3.04.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan internet	Kota Mataram	1 Tahun	194.200.000	217.504.000
3.04.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan	Kota Mataram	12 Bulan	61.768.000	69.180.160
3.04.01.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor	Kota Mataram	12 Bulan	369.400.000	413.728.000
3.04.01.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhnya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	12 Bulan	65.000.000	72.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan identitas kantor	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	1 Tahun	17.250.000	19.320.000
3.04.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	1 Tahun	5.000.000	5.600.000
3.04.01.04.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	1 Tahun	115.242.200	129.071.264
3.04.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar Harian Lokaldan Nasional serta Bahan Bacaan Lainnya	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	1 Tahun	7.000.000	7.840.000
3.04.01.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu	Kota Mataram	1 Tahun	40.000.000	44.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	Kota Mataram	1 Tahun	30.000.000	33.600.000
3.04.01.04.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	Kota Mataram	1 Tahun	30.000.000	33.600.000
3.04.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Operasional			4.008.915.000	4.489.984.800
3.04.01.04.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Bangunan Gedung Resort/ Pos Jaga Serta Tempat Ibadah Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	12 Unit	3.571.900.000	4.000.528.000
3.04.01.04.02.10	Pengadaan meubelair kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Meubelair Kantor Resort Pada KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	3 Paket	102.615.000	114.928.800
3.04.01.04.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terpenuhinya Kebutuhan Alat-alat Elektronik Kantor Resort	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	12 Unit	94.600.000	105.952.000
3.04.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura	Kota Mataram	1 Tahun	90.300.000	101.136.000
3.04.01.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Pada Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura	Kota Mataram	1 Tahun	113.500.000	127.120.000
3.04.01.04.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	36.000.000	40.320.000
3.04.01.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM			13.500.000	15.120.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.04.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya lmtaq, Senam dan Penyewaan Gedung Olahraga.	Kota Mataram	1 Tahun	13.500.000	15.120.000
3.04.01.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan Perencanaan			52.343.300	58.624.496
3.04.01.04.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan yang Akuntabel Pada Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura	Kota Mataram	1 Tahun	24.011.300	26.892.656
3.04.01.04.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Pembangunan yang Komprehensif pada Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura (DPA dan DPPA)	Kota Mataram	1 Dokumen	28.332.000	31.731.840
3.04.01.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pemantauan Aset			35.931.400	40.243.168
3.04.01.04.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Aset pada Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura	Kota Mataram	1 Dokumen	35.931.400	40.243.168
3.04.01.04.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Menurunnya presentase kerawanan hutan dan ekosistem	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	10 % (15.000 Ha dari 141.376 Ha lahan kritis dalam kawasan)	3.987.264.300	4.465.736.016
3.04.01.04.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Operasi Pengamanan Hutan Pada Wilayah Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	1 Tahun	665.930.000	745.841.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.04.21.02	Penegakan Hukum Kehutanan	Penanganan Barang Bukti	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	1 Tahun	877.135.200	982.391.424
3.04.01.04.21.03	Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati	Perlindungan Keanekaragaman Hayati Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	1 Tahun	2.444.199.100	2.737.502.992
3.04.01.04.22	Program Pengelolaan Hutan	Peningkatan persentase pendapatan di sektor kehutanan	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	10 %	3.901.032.500	4.369.156.400
3.04.01.04.22.01	Perencanaan dan Tata Hutan	Tertatanya Wilayah Pengelolaan pada wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	1 Tahun	575.000.000	644.000.000
3.04.01.04.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Pengembangan HHBK pada Wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	1 Tahun	1.864.832.500	2.088.612.400
3.04.01.04.22.03	Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	Tertibnya Pengolahan Hasil Hutan (Bahan Baku Pemasaran)	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Utara	1 Tahun	1.461.200.000	1.636.544.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.04.23	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas lahan kritis yang tertangani	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	1.200 ha	3.761.355.400	4.212.718.048
3.04.01.04.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Tertanamnya Lahan Kritis Pada Wilayah Kerja Balai KPH Rinjani Barat Pelangan Tastura	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	250 Ha	3.546.051.300	3.971.577.456
3.04.01.04.23.03	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Permasalahan Tenurial	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Utara	1 Tahun	215.304.100	241.140.592
3.04.01.05	Balai KPH Ampang Riwo Soromandi				7.502.042.800	8.402.287.936
3.04.01.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan			585.892.100	656.199.152
3.04.01.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan akan surat menyurat perkantoran	Kab. Dompu	1 tahun	3.940.000	4.412.800
3.04.01.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya operasional kantor untuk mendukung kinerja	Kab. Dompu	1 tahun	187.000.000	209.440.000
3.04.01.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kelancaran proses adminitrasi keuangan	Kab. Dompu	1 tahun	47.620.000	53.334.400
3.04.01.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terjaganya kebersihan lingkungan kantor	Kab. Dompu	1 tahun	46.326.500	51.885.680
3.04.01.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Kab. Dompu	1 tahun	47.503.600	53.204.032
3.04.01.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	kelancaran proses administrasi keuangan	Kab. Dompu	1 tahun	17.000.000	19.040.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya kebutuhan operasional perkantoran	Kab. Dompu	1 tahun	1.252.000	1.402.240
3.04.01.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang operasional	Kab. Dompu	1 tahun	85.500.000	95.760.000
3.04.01.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya operasional konsumsi perkantoran	Kab. Dompu	1 tahun	24.750.000	27.720.000
3.04.01.05.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	meningkatnya kelancaran koordinasi antara balai KPH dengan kementerian LHK	Kab. Dompu	1 tahun	75.000.000	84.000.000
3.04.01.05.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya kelancaran koordinasi antara KPH dan instansi terkait lingkup pemprov NTB	Kab. Dompu	1 tahun	50.000.000	56.000.000
3.04.01.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Operasional			198.000.000	221.760.000
3.04.01.05.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang memadai	Kab. Dompu	2 unit	105.000.000	117.600.000
3.04.01.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang operasional	Kab. Dompu	1 tahun	93.000.000	104.160.000
3.04.01.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM			17.500.000	19.600.000
3.04.01.05.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	tercapainya kesehatan mental dan fisik aparatur	Kab. Dompu	1 tahun	2.500.000	2.800.000
3.04.01.05.05.06	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	tercapainya aparatur yang lebih baik	Kab. Dompu	1 tahun	15.000.000	16.800.000
3.04.01.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan Perencanaan			45.775.000	51.268.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.05.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel pada Balai KPH ARS	Kab. Dompu	1 tahun	12.970.000	14.526.400
3.04.01.05.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	tersedianya pembangunan yang komprehensif pada Balai KPH ARS	Kab. Dompu	1 dokumen	32.805.000	36.741.600
3.04.01.05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pemantauan Aset			36.494.500	40.873.840
3.04.01.05.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	meningkatnya pengelolaan aset	Kab. Dompu	1 tahun	36.494.500	40.873.840
3.04.01.05.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	tercegahnya praktek illegal dalam kawasan hutan	Kab. Dompu	terlaksananya operasi rutin pada wilayah KPH	3.518.573.000	3.940.801.760
3.04.01.05.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya operasi pengamanan hutan pada lokasi rawan gangguan keamanan hutan di 9 resort	Kab. Dompu	1 tahun	1.563.500.000	1.751.120.000
3.04.01.05.21.02	Penegakan Hukum Kehutanan	Pengamanan barang bukti	Kab. Dompu	1 tahun	223.384.000	250.190.080
3.04.01.05.21.03	Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati	perlindungan keanekaragaman hayati Balai KPH ARS	Kab. Dompu	1 tahun	1.731.689.000	1.939.491.680
3.04.01.05.22	Program Pengelolaan Hutan	Peningkatan persentase pendapatan di sektor kehutanan	Kab. Dompu	10 %	1.369.129.200	1.533.424.704
3.04.01.05.22.01	Perencanaan dan Tata Hutan	Meningkatnya pengakuan masyarakat terhadap legitimasi batas kawasan hutan pada wilayah kerja Balai KPH ARS	Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa	1 Tahun	317.090.200	355.141.024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.05.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Pengembangan Kelompok HHBK dan Wisata Alam Pada Wilayah Kerja Balai KPH ARS	Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa	1 Tahun	1.052.039.000	1.178.283.680
3.04.01.05.23	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas lahan kritis yang tertangani	Kab. Dompu	100 Ha	1.730.679.000	1.938.360.480
3.04.01.05.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Tertanamnya Lahan kritis,- Tersedianya bibit tanaman produktif - Pelaksanaan Berbagai Kegiatan Seremonial RHL - Meningkatnya produktivitas lahan kritis - Monev Binwasdal RHL - Tersedianya bibit tanaman produktif insentif RHL	Kab. Dompu	100000 batang	1.573.229.000	1.762.016.480
3.04.01.05.23.03	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersosialisasinya kegiatan RHL pada kelompok tani hutan	Kab. Dompu	1 Paket	157.450.000	176.344.000
3.04.01.06	Balai KPH Tambora				4.417.124.000	4.947.178.880
3.04.01.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan			571.794.000	640.409.280
3.04.01.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Lancarnya pengiriman surat menyurat	Kab. Dompu	1 Tahun	2.160.000	2.419.200
3.04.01.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Lancarnya arus komunikasi dan informasi	Kab. Bima, Kab. Dompu	1 Tahun	21.000.000	23.520.000
3.04.01.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Lancarnya mekanisme keuangan yang tertib	Kab. Dompu	5 Orang	69.256.000	77.566.720
3.04.01.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Kebersihan Kantor Terpelihara dan Terjaga	Kab. Bima, Kab. Dompu	1 Tahun	54.510.000	61.051.200
3.04.01.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhi Kebutuhan Surat Menyurat	Kab. Bima, Kab. Dompu	1 Tahun	11.737.000	13.145.440

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Lancarnya operasional perkantoran	Kab. Bima, Kab. Dompu	1 Tahun	2.325.000	2.604.000
3.04.01.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bima, Kab. Dompu	1 Tahun	67.700.000	75.824.000
3.04.01.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya rapat antara pimpinan dan staf	Kab. Bima, Kab. Dompu	1 Tahun	22.806.000	25.542.720
3.04.01.06.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Konsultasi dan Koordinasi masalah pembangunan kehutanan	Luar Provinsi	1 Tahun	75.400.000	84.448.000
3.04.01.06.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi masalah pembanguna kehutanan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	se-NTB	1 Tahun	100.400.000	112.448.000
3.04.01.06.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	Kab. Bima, Kab. Dompu	6 Orang	144.500.000	161.840.000
3.04.01.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas operasional			1.515.150.000	1.696.968.000
3.04.01.06.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terbangunnya gedung kantor dan musola	Kab. Dompu	2 Unit	876.550.000	981.736.000
3.04.01.06.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedia kendaraan operasional kantor	Kab. Dompu	3 Unit	401.400.000	449.568.000
3.04.01.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kab. Bima, Kab. Dompu	2 Unit	200.200.000	224.224.000
3.04.01.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kab. Bima, Kab. Dompu	10 Unit	30.000.000	33.600.000
3.04.01.06.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Bima, Kab. Dompu	11 Unit	7.000.000	7.840.000
3.04.01.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM			25.400.000	28.448.000
3.04.01.06.05.06	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Meningkatnya kinerja pegawai	Kab. Bima, Kab. Dompu	1 Tahun	25.400.000	28.448.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan			91.875.000	102.900.000
3.04.01.06.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	Kab. Dompu	1 Dokumen	28.750.000	32.200.000
3.04.01.06.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan	Kab. Bima, Kab. Dompu	2 Dokumen	46.250.000	51.800.000
3.04.01.06.06.14	Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersusunnya statistik KPH Tambora	Kab. Bima, Kab. Dompu	1 Dokumen	16.875.000	18.900.000
3.04.01.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset			35.500.000	39.760.000
3.04.01.06.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersediannya dokumen laporan barang daerah	Kab. Bima, Kab. Dompu	1 Dokumen	35.500.000	39.760.000
3.04.01.06.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Menurunnya persentase kerawanan gangguan hutan dan ekosistem	Kab. Bima, Kab. Dompu	10 % (15.000) ha dari 141.000 lahan kritis	1.464.485.000	1.640.223.200
3.04.01.06.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Menurunnya gangguan keamanan hutan	Kab. Bima, Kab. Dompu	62602 Ha	1.367.355.000	1.531.437.600
3.04.01.06.21.02	Penegakan Hukum Kehutanan	Terselesaikannya kasus-kasus tindak pidana kehutanan	Kab. Bima, Kab. Dompu	1 Tahun	97.130.000	108.785.600
3.04.01.06.22	Program Pengelolaan Hutan	Peningkatan persentase pendapatan di sektor kehutanan	Kab. Bima, Kab. Dompu	10 %	303.775.000	340.228.000
3.04.01.06.22.01	Perencanaan dan Tata Hutan	Terlaksananya sosialisasi batas kawasan hutan rencana tata kelola hutan yang komprehensif	Kab. Bima, Kab. Dompu	5 Resort	93.050.000	104.216.000
3.04.01.06.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Terlaksananya pengembangan usaha kehutanan	Kab. Bima, Kab. Dompu	5 Resort	151.325.000	169.484.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.06.22.03	Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	Terkendalinya pengolahan dan peredaran hasil hutan	Kab. Bima, Kab. Dompu	5 Resort	59.400.000	66.528.000
3.04.01.06.23	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas lahan kritis yang tertangani	Kab. Bima, Kab. Dompu	100	409.145.000	458.242.400
3.04.01.06.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Menurungnya luas lahan kritis	Kab. Bima, Kab. Dompu	100 Ha	382.595.000	428.506.400
3.04.01.06.23.03	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian hutan	Kab. Bima, Kab. Dompu	5 Resort	26.550.000	29.736.000
3.04.01.07	Balai KPH Maria Donggomasa				7.114.686.909	7.968.449.338
3.04.01.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan			875.731.000	980.818.720
3.04.01.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	lancarnya pelayanan surat menyurat SKPD	Kota Bima	1 Tahun	4.450.000	4.984.000
3.04.01.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedia listrik kantor	Kota Bima	1 Tahun	52.320.000	58.598.400
3.04.01.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya laporan keuangan dan barang daerah	Kab. Bima	1 Tahun	45.600.000	51.072.000
3.04.01.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpeliharanya kebersihan kantor	Kota Bima	1 Tahun	30.033.000	33.636.960
3.04.01.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK untuk kelancaran operasional kantor	Kota Bima	1 Tahun	15.757.500	17.648.400
3.04.01.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	penggandaan dokumen dan blanko-blanku kedinasan	Kota Bima	1 Tahun	18.050.000	20.216.000
3.04.01.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Penambahan Daya Listrik Balai dan Resort	Kab. Bima, Kota Bima	9 unit	6.750.000	7.560.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kelancaran kegiatan kantor, peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Bima, Kota Bima	115 unit	246.408.000	275.976.960
3.04.01.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersebar nya peraturan peraturan kepada aparatur	Kab. Bima, Kota Bima	1 Tahun	9.000.000	10.080.000
3.04.01.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya kelancaran rapat dan tamu kedinasan	Kota Bima	1 Tahun	24.262.500	27.174.000
3.04.01.07.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan	Kota Bima	1 Tahun	100.800.000	112.896.000
3.04.01.07.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselarasnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pembangunan	Kota Bima	1 Tahun	100.800.000	112.896.000
3.04.01.07.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	keamanan kantor terjaga	Kota Bima	1 tahun	221.500.000	248.080.000
3.04.01.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Operasional			1.708.727.909	1.913.775.258
3.04.01.07.02.03	Pembangunan gedung kantor	Meningkatnya fungsi pelayanan BKPH	Kab. Bima, Kota Bima	12 paket	1.361.477.909	1.524.855.258
3.04.01.07.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Kota Bima	8 unit	281.400.000	315.168.000
3.04.01.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas	Kota Bima	17 unit	56.550.000	63.336.000
3.04.01.07.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan perlengkapan kantor siap pakai	Kota Bima	24 unit	9.300.000	10.416.000
3.04.01.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM			243.913.000	273.182.560
3.04.01.07.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Meningkatnya mental dan fisik aparatur	Kota Bima	1 tahun	43.100.000	48.272.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.07.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Meningkatnya kompetensi dan keahlian aparatur	Kota Bima	1 tahun	82.000.000	91.840.000
3.04.01.07.05.06	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Meningkatnya kedisiplinan aparatur	Kab. Bima, Kota Bima	1 tahun	70.813.000	79.310.560
3.04.01.07.05.12	Peningkatan kapasitas fungsional	Meningkatnya kapasitas dan keahlian pejabat fungsional	Kota Bima	1 tahun	48.000.000	53.760.000
3.04.01.07.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan Perencanaan			92.783.000	103.916.960
3.04.01.07.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Kota Bima	1 tahun	9.583.000	10.732.960
3.04.01.07.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Kegiatan penyusunan rencana kerja SKPD	Kota Bima	1 tahun	31.700.000	35.504.000
3.04.01.07.06.14	Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersusunnya buku Statistik	Kota Bima	1 dokumen	51.500.000	57.680.000
3.04.01.07.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan kehutanan			33.840.000	37.900.800
3.04.01.07.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersedianya pengurus barang pembantu pada SKPD BKPH	Kota Bima	1 Orang	33.840.000	37.900.800
3.04.01.07.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Menurunnya persentase kerawanan gangguan hutan dan ekosistem	Kab. Bima, Kota Bima	10 % (15.000) ha dari 141.000 lahan kritis	2.301.920.000	2.578.150.400
3.04.01.07.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terjaganya keamanan kawasan hutan	Kab. Bima, Kota Bima	72.217,19 Ha	2.157.120.000	2.415.974.400
3.04.01.07.21.02	Penegakan Hukum Kehutanan	Terlaksananya penegakan hukum kehutanan di wilayah KPH	Kab. Bima, Kota Bima	1 tahun	61.800.000	69.216.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.07.21.03	Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati	Terdatanya dan terjaganya sumber daya alam hayati	Kab. Bima, Kota Bima	72.217,19 Ha	41.500.000	46.480.000
3.04.01.07.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Terjaganya hutan dan terkendalinya kebakaran hutan dan lahan	Kab. Bima, Kota Bima	72.217,19 Ha	41.500.000	46.480.000
3.04.01.07.22	Program Pengelolaan Hutan	Menurunnya persentase kerawanan gangguan hutan dan ekosistem	Kab. Bima, Kota Bima	1.250.ha/KPH	924.493.000	1.035.432.160
3.04.01.07.22.01	Perencanaan dan Tata Hutan	Terlaksananya perencanaan dan tata hutan	Kab. Bima, Kota Bima	1 tahun	115.650.000	129.528.000
3.04.01.07.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Tersosialisasinya kemitraan KPH dan penguatan kelembagaan kelompok HHBK dan Jasling	Kab. Bima, Kota Bima	2 lokasi	616.443.000	690.416.160
3.04.01.07.22.03	Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	Terkedainya pengelolaan dan peredaran hasil hutan	Kota Bima	1 tahun	192.400.000	215.488.000
3.04.01.07.23	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas lahan kritis yang tertangani	Kab. Bima, Kota Bima	100 Ha	933.279.000	1.045.272.480
3.04.01.07.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Kawasan hutan direhabilitasi	Kab. Bima, Kota Bima	6050 Ha	381.215.000	426.960.800
3.04.01.07.23.02	Pengelolaan DAS	Terkelolanya DAS di wilayah KPH	Kab. Bima, Kota Bima	5 unit	264.864.000	296.647.680
3.04.01.07.23.03	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kehutanan serta pembuatan tanaman demplot	Kab. Bima, Kota Bima	9 lokasi	287.200.000	321.664.000
3.04.01.08	Balai KPH Rinjani Timur				5.102.893.195	5.715.240.378
3.04.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan			452.136.370	506.392.734

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat	Kab. Lombok Timur	12 Bulan	4.800.000	5.376.000
3.04.01.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terselesaikannya pembayaran rekening telepon, listrik dan jasa internet BKPH Rinjani Timur	Kab. Lombok Timur	12 Bulan	37.800.000	42.336.000
3.04.01.08.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya penyediaan pelayanan administrasi keuangan dan barang daerah untuk BKPH Rinjani Timur	Kab. Lombok Timur	4 orang	44.741.000	50.109.920
3.04.01.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya Penyediaan Kebersihan Kantor selama 1 Tahun untuk BKPH Rinjani Timur	Kab. Lombok Timur	2 orang	69.892.680	78.279.802
3.04.01.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	54.009.200	60.490.304
3.04.01.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya surat dinas dan kelengkapan administrasi perkantoran	Kab. Lombok Timur	12 Bulan	3.000.000	3.360.000
3.04.01.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	5.225.000	5.852.000
3.04.01.08.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	112.756.500	126.287.280
3.04.01.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Konsumsi untuk Tamu Kedinasan	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	25.800.000	28.896.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.08.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Tersedianya dukungan anggaran untuk konsultasi dan sinkronisasi dan koordinasi ke Jakarta/Provinsi lain	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	25.100.000	28.112.000
3.04.01.08.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terciptanya Koordinasi Sosialisasi dan Sinkronisasi Pembangunan Kehutanan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	25.100.000	28.112.000
3.04.01.08.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	-	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	43.911.990	49.181.429
3.04.01.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas operasional			536.500.000	600.880.000
3.04.01.08.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor RPH dan Pos Jaga	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	450.700.000	504.784.000
3.04.01.08.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya Peralatan Elektronik untuk Balai KPH Rinjani Timur dan Resort	Kab. Lombok Timur	18 unit	34.500.000	38.640.000
3.04.01.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan Balai KPH Rinjani Timur	Kab. Lombok Timur	10 unit	35.750.000	40.040.000
3.04.01.08.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan Operasional dan Komputer	Kab. Lombok Timur	13 unit	15.550.000	17.416.000
3.04.01.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan			55.650.300	62.328.336

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.08.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya dokumen RKA Tahun 2020 Tersedianya dokumen DPPA Tahun 2019 Tersedianya dokumen RPHJPd KPH	Kab. Lombok Timur	3 dokumen	55.650.300	62.328.336
3.04.01.08.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pemantauan Aset			19.752.700	22.123.024
3.04.01.08.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan pengelola aset daerah	Kab. Lombok Timur	1 dokumen	19.752.700	22.123.024
3.04.01.08.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Menurunnya persentase kerawanan gangguan hutan dan ekosistem	Kab. Lombok Timur	1.250.ha/KPH	1.961.231.400	2.196.579.168
3.04.01.08.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	-Terlaksananya proses berkas tindak kehutanan -Terlaksananya kegiatan satgas pengendali operasi perusakan hutan	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	1.961.231.400	2.196.579.168
3.04.01.08.22	Program Pengelolaan Hutan	Peningkatan Persentase pendapatan di sektor kehutanan	Kab. Lombok Timur	10 %	507.130.175	567.985.796
3.04.01.08.22.01	Perencanaan dan Tata Hutan	- Tersusunnya dokumen desain tapak - Terbangunnya sarana dan prasarana pengembangan jasa lingkungan	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	230.323.300	257.962.096

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.08.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	- Terlaksananya sosialisasi perijinan HHBK dan Jasa Lingkungan - Terlaksananya fasilitasi peningkatan produksi HHBK - Terlaksananya peningkatan kelas KTH - Terlaksananya Lomba Wana Lestari - Terlaksananya Forest Trecking	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	167.646.075	187.763.604
3.04.01.08.22.03	Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	Tersedianya Laporan Potensi Hasil Hutan	Kab. Lombok Timur	1 dokumen	109.160.800	122.260.096
3.04.01.08.23	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas lahan kritis yang tertangani	Kab. Lombok Timur	100 Ha	1.570.492.250	1.758.951.320
3.04.01.08.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	- Tersedianya bibit untuk bakti sosial - Terlaksananya kegiatan penanaman kayu putih - Terlaksana kegiatan KTA berupa pembangunan DAM penahan	Kab. Lombok Timur	1 Tahun	1.570.492.250	1.758.951.320
3.04.01.09	Balai KPH Sejong Matakayang Brangrea				2.289.906.700	2.564.695.504
3.04.01.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan			245.701.600	275.185.792
3.04.01.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya pengiriman surat menyurat kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	6.800.000	7.616.000
3.04.01.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, dan internet pada UPTD	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	38.000.000	42.560.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan pada UPTD	Kab. Sumbawa Barat	12 Bulan	75.565.000	84.632.800
3.04.01.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa Barat	12 Bulan	24.595.600	27.547.072
3.04.01.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	9.672.000	10.832.640
3.04.01.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan identitas kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	4.125.000	4.620.000
3.04.01.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	5.394.000	6.041.280
3.04.01.09.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa Barat	1 tahun	6.425.000	7.196.000
3.04.01.09.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu pada UPTD	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	20.125.000	22.540.000
3.04.01.09.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah pada UPTD	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	30.000.000	33.600.000
3.04.01.09.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah pada UPTD	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	25.000.000	28.000.000
3.04.01.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas operasional			317.349.000	355.430.880

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.09.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	248.050.000	277.816.000
3.04.01.09.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronikkantor pada UPTD	Kab. Sumbawa Barat	3 unit	22.499.000	25.198.880
3.04.01.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada UPTD	Kab. Sumbawa Barat	9 unit	39.300.000	44.016.000
3.04.01.09.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa Barat	14 unit	7.500.000	8.400.000
3.04.01.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan			34.595.500	38.746.960
3.04.01.09.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif pada UPTD (DPA dan DPPA)	Kab. Sumbawa Barat	2 Dokumen	34.595.500	38.746.960
3.04.01.09.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Menurunnya peresentase kerawanan gangguan hutan dan ekosistem	Kab. Sumbawa Barat	10 % (15.000) ha dari 141.000 lahan kritis	1.178.004.000	1.319.364.480
3.04.01.09.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Operasi pengamanan hutan pada wilayah KPH dan Tahura	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	1.178.004.000	1.319.364.480
3.04.01.09.22	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya peresentase pendapatan di sektor kehutanan	Kab. Sumbawa Barat	10 %	308.621.100	345.655.632
3.04.01.09.22.01	Perencanaan dan Tata Hutan	Tersosialisasikannya batas kawasan hutan	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	37.907.700	42.456.624

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.09.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	231.742.900	259.552.048
3.04.01.09.22.03	Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	Tertibnya penatausahaan hasil hutan	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	38.970.500	43.646.960
3.04.01.09.23	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas lahan kritis yang tertangani	Kab. Sumbawa Barat	100 Ha	205.635.500	230.311.760
3.04.01.09.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Tersedianya bibit tanaman produktif	Kab. Sumbawa Barat	1 Kegiatan	79.870.000	89.454.400
3.04.01.09.23.02	Pengelolaan DAS	Terjaganya kualitas DAS	Kab. Sumbawa Barat	1 Kegiatan	79.870.000	89.454.400
3.04.01.09.23.03	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Fasilitasi Perhutanan Sosial	Kab. Sumbawa Barat	1 Kegiatan	45.895.500	51.402.960
3.04.01.10	Balai KPH Pucak Ngengas Batu Lanteh				3.943.157.632	4.416.336.548
3.04.01.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Menngkatkan kualitas pelayanan			451.664.800	505.864.576
3.04.01.10.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayani Surat Menyurat	Kab. Sumbawa	1 Tahun	3.708.000	4.152.960
3.04.01.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik dan internet pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	26.700.000	29.904.000
3.04.01.10.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	83.374.500	93.379.440
3.04.01.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	12 Bulan	31.447.300	35.220.976

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	17.783.100	19.917.072
3.04.01.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan identitas kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	4.189.500	4.692.240
3.04.01.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	15.212.400	17.037.888
3.04.01.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar harian lokal dan nasional pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	5.000.000	5.600.000
3.04.01.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan Konsumsi tamu pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	49.950.000	55.944.000
3.04.01.10.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	35.000.000	39.200.000
3.04.01.10.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksana perjalanan dinas dalam daerah pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	25.000.000	28.000.000
3.04.01.10.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya tenaga pengaman kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	7 Resort Pengelolaan Hutan	131.800.000	147.616.000
3.04.01.10.01.27	Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT, dan Honorer Daerah	Tersedianya tenaga Teknis Operasional di lapangan pada UPTD	Kab. Sumbawa	12 Bulan	22.500.000	25.200.000
3.04.01.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas operasional			991.376.257	1.110.341.408
3.04.01.10.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya bangunan gedung resort/ pos jaga KPH	Kab. Sumbawa	1 Tahun	308.416.317	345.426.275

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.10.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 pada UPTD	Kab. Sumbawa	6 unit	165.700.000	185.584.000
3.04.01.10.02.10	Pengadaan meubelair kantor	Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	4 Paket	66.181.300	74.123.056
3.04.01.10.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektroik kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	4 Paket	215.100.000	240.912.000
3.04.01.10.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kab. Sumbawa	7 Lokasi	91.128.640	102.064.077
3.04.01.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada UPTD	Kab. Sumbawa	27 unit	117.400.000	131.488.000
3.04.01.10.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	14 unit	27.450.000	30.744.000
3.04.01.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan			100.029.200	112.032.704
3.04.01.10.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunya laporan keuangan yang akuntabel pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 dokumen	35.326.500	39.565.680

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.10.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Rencana Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang komprehensif (DPA, DPPA, Renja, Renstra) Tersedianya Rencana Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPTD Terlaksananya koordinasi Rencana Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kab. Sumbawa	2 dokumen	47.000.000	52.640.000
3.04.01.10.06.14	Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya data dan informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang valid dan lengkap pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 dokumen	17.702.700	19.827.024
3.04.01.10.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pemantauan aset			50.425.000	56.476.000
3.04.01.10.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan aset dinas pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 dokumen	50.425.000	56.476.000
3.04.01.10.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Menurunnya persentase kerawanan gangguan hutan dan ekosistem	Kab. Sumbawa	1.250.ha/KPH	1.170.694.500	1.311.177.840

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.10.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya pelatihan perlindungan dan pengamanan hutan Terlaksananya operasi rutin pada wilayah kph Operasionalisasi forum kolaboratif perlindungan hutan Tertanganinya kasus kebakaran hutan dan tindak pidana kehutanan Terlaksananya pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan	Kab. Sumbawa	7 Resort Pengelolaan Hutan	985.505.000	1.103.765.600
3.04.01.10.21.02	Penegakan Hukum Kehutanan	Tertanganinya kasus pidana kehutanan Penanganan barang bukti, penyelidikan, saksi ahli konsultasi dan bantuan hukum kehutanan	Kab. Sumbawa	10 Kasus	139.644.000	156.401.280

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.10.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan Pembuatan dan atau pengelolaan sekat kebakaran Pengembangan sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rakor Pendampingan masyarakat peduli api Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan Peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Kab. Sumbawa	7 Resort Pengelolaan Hutan	45.545.500	51.010.960
3.04.01.10.22	Program Pengelolaan Hutan	Peningkatan persentase pendapatan disektor kehuatanan	Kab. Sumbawa	10 %	824.559.200	923.506.304

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.10.22.01	Perencanaan dan Tata Hutan	Meningkatnya kapasitas perencanaan kehutanan dan penataan hutan tingkat tapak Menyusun Rencana Pengelolaan Hutan KPH Tersusunnya rencana investasi, kerjasama dan kemitraan. Tersedianya sistem informasi spasial kehutanan Terfasilitasinya perubahan status dan fungsi kawasan hutan Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap penatagunaan hutan	Kab. Sumbawa	7 Resort Pengelolaan Hutan	170.314.000	190.751.680
3.04.01.10.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Terfasilitasinya pengembangan HHBK dan Jasa Lingkungan Tersedianya fasilitas pengunduhan benih pada sumber benih Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan wisata alam Optimalisasi PAD dan PNBP	Kab. Sumbawa	6 Lokasi	654.245.200	732.754.624
3.04.01.10.23	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas lahan kritis yang tertangani	Kab. Sumbawa	100 Ha	354.408.675	396.937.716

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.10.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Tersedianya Bibit Tanaman Kehutanan Terlaksananya penanaman rehabilitasi lahan kritis Terlaksananya penanaman tangkapan air	Kab. Sumbawa	3 lokasi	354.408.675	396.937.716
3.04.01.11	Balai KPH Ampang Plampang				3.254.836.090	3.645.416.421
3.04.01.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan			288.874.100	323.538.992
3.04.01.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya pengiriman surat-menyurat kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	7.650.000	8.568.000
3.04.01.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, dan internet UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	19.400.000	21.728.000
3.04.01.11.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan UPTD	Kab. Sumbawa	12 Bulan	71.668.800	80.269.056
3.04.01.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor UPTD	Kab. Sumbawa	12 Bulan	23.613.500	26.447.120
3.04.01.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	19.481.800	21.819.616
3.04.01.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan identitas kantor UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	6.770.000	7.582.400
3.04.01.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	2.540.000	2.844.800
3.04.01.11.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	20.000.000	22.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar harian lokal dan nasional serta bahan bacaan lainnya UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	5.200.000	5.824.000
3.04.01.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	47.150.000	52.808.000
3.04.01.11.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	50.200.000	56.224.000
3.04.01.11.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	15.200.000	17.024.000
3.04.01.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Operasional			549.319.040	615.237.325
3.04.01.11.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya bangunan gedung resort/ pos jaga KPH dan Tahura	Kab. Sumbawa	1 Tahun	502.119.040	562.373.325
3.04.01.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	40.000.000	44.800.000
3.04.01.11.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	7.200.000	8.064.000
3.04.01.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan Perencanaan			25.000.000	28.000.000
3.04.01.11.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif pada UPTD (DPA dan DPPA)	Kab. Sumbawa	1 Tahun	25.000.000	28.000.000
3.04.01.11.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pemantauan Aset			50.350.000	56.392.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.11.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan pengelola aset dinas pada UPTD	Kab. Sumbawa	12 Bulan	50.350.000	56.392.000
3.04.01.11.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Menurunnya peresentase kerawanan gangguan hutan dan ekosistem	Kab. Sumbawa	1.250.ha/KPH	1.213.875.000	1.359.540.000
3.04.01.11.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya pelatihan perlindungan dan pengamanan hutan Terlaksananya operasi rutin pada wilayah KPH dan Tahura Operasionalisasi forum kolaboratif perlindungan hutan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	1.213.875.000	1.359.540.000
3.04.01.11.22	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya peresentase pendapatan di sektor kehutanan	Kab. Sumbawa	10 %	436.095.500	488.426.960
3.04.01.11.22.01	Perencanaan dan Tata Hutan	Tersosialisasikannya batas kawasan hutan, Tertatanya wilayah kelola KPH dan Tahura,	Kab. Sumbawa	1 Tahun	203.512.900	227.934.448

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.11.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Pengembangan HHBK Kayu unggulan, Terlaksananya sosialisasi perijinan HHBK, Terfasilitasinya perijinan HHBK, Terbinanya kelompok HHBK, Tersedianya sarana dan prasarana pengolahan HHBK.	Kab. Sumbawa	1 Tahun	147.150.600	164.808.672
3.04.01.11.22.03	Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	Tertibnya penatausahaan hasil hutan, Tertib penatausahaan iuran hasil hutan, Tertib pengolahan hasil hutan (bahan baku,pemasaran)	Kab. Sumbawa	1 Tahun	85.432.000	95.683.840
3.04.01.11.23	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Produktifitas Lahan kritis	Kab. Sumbawa	100 Ha	691.322.450	774.281.144
3.04.01.11.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Tersedianya bibit tanaman produktif,	Kab. Sumbawa	1 Tahun	196.229.600	219.777.152
3.04.01.11.23.02	Pengelolaan DAS	Terjaganya kualitas DAS, Penerapan teknis konservasi tanah dan air.	Kab. Sumbawa	1 Tahun	400.310.850	448.348.152
3.04.01.11.23.03	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penyiapan bahan dan program penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan, fasilitasi perhutanan sosial.	Kab. Sumbawa	1 Tahun	94.782.000	106.155.840
3.04.01.12	Balai KPH Orong Telu Brang Beh				8.397.387.808	9.405.074.345

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.12.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan			1.203.800.500	1.348.256.560
3.04.01.12.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terpenuhinya kebutuhan untuk surat menyurat perkantoran	Kab. Sumbawa	1 Tahun	7.400.000	8.288.000
3.04.01.12.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, listrik, dan internet pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	67.800.000	75.936.000
3.04.01.12.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga administrasi keuangan pada UPTD	Kab. Sumbawa	12 Bulan	87.225.000	97.692.000
3.04.01.12.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	12 Bulan	179.681.300	201.243.056
3.04.01.12.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	34.476.200	38.613.344
3.04.01.12.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan identitas kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	4.125.000	4.620.000
3.04.01.12.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	40.593.000	45.464.160
3.04.01.12.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	334.300.000	374.416.000
3.04.01.12.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar harian lokal dan nasional pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 tahun	6.600.000	7.392.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.12.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	89.700.000	100.464.000
3.04.01.12.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	63.100.000	70.672.000
3.04.01.12.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersediannya jasa administrasi dan teknis perkantoran	Kab. Sumbawa	1 Tahun	241.500.000	270.480.000
3.04.01.12.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	25.200.000	28.224.000
3.04.01.12.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya tenaga pengamanan kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 tahun	22.100.000	24.752.000
3.04.01.12.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas oprasional			2.456.499.808	2.751.279.785
3.04.01.12.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya bangunan gedung resort/ pos jaga KPH	Kab. Sumbawa	3 Unit	464.455.808	520.190.505
3.04.01.12.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 pada UPTD	Kab. Sumbawa	8 Unit	696.400.000	779.968.000
3.04.01.12.02.10	Pengadaan meubelair kantor	Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	290.890.000	325.796.800
3.04.01.12.02.11	Pengadaan UPS/Stabiizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektornik kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	15 Paket	137.900.000	154.448.000
3.04.01.12.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	3 Unit	748.584.000	838.414.080

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.12.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	78.270.000	87.662.400
3.04.01.12.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	40.000.000	44.800.000
3.04.01.12.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kualitas SDM			9.000.000	10.080.000
3.04.01.12.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya intaq dan senam pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	9.000.000	10.080.000
3.04.01.12.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan Kualitas Pelaporan Dan Perencanaan			77.492.700	86.791.824
3.04.01.12.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	8.372.900	9.377.648
3.04.01.12.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif pada UPTD(DPA, DPPA)	Kab. Sumbawa	2 dokumen	19.450.000	21.784.000
3.04.01.12.06.13	Penyusunan rencana pembangunan kehutanan	Terlaksananya rapat pembangunan kehutanan dan evaluasi pembangunan kehutanan	Kab. Sumbawa	2 kegiatan	19.600.000	21.952.000
3.04.01.12.06.14	Penyusunan statistik Dinas Kehutanan Provinsi NTB	Tersedianya data dan Informasi UPTD yang paling dan lengkap	Kab. Sumbawa	1 dokumen	30.069.800	33.678.176
3.04.01.12.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pemantauan Aset			25.050.000	28.056.000
3.04.01.12.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan aset dinas	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	25.050.000	28.056.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.12.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	tercegahnya praktek illegal dalam kawasan hutan	Kab. Sumbawa	terlaksananya operasi rutin pada wilayah KPH	1.512.660.200	1.694.179.424
3.04.01.12.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Terlaksananya pelatihan perlindungan dan pengamanan hutan Terlaksananya operasi rutin pada wilayah kph Operasinalisasi forum kolaboratif perlindungan hutan Tertanganinya kasus kebakaran hutan dan tindak pidana kehutanan Terlaksananya pelatihan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	1.308.672.700	1.465.713.424
3.04.01.12.21.02	Penegakan Hukum Kehutanan	Tertanganinya kasus pidana kehutanan penanganan barang bukti, penyelidikan, saksi ahli konsultasi dan bantuan hukum kehutanan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	129.874.500	145.459.440

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.12.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	- Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan - Pembuatan dan atau pengelolaan sekat kebakaran - Pengembangan sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan - Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rakor - Pendampingan masyarakat peduli api - Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan - Peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	74.113.000	83.006.560
3.04.01.12.22	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya peresentase pendapatan di sektor kehutanan101	Kab. Sumbawa	10 %	2.137.777.000	2.394.310.240
3.04.01.12.22.01	Perencanaan dan Tata Hutan	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan memahami tata kelola hutan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	457.097.000	511.948.640
3.04.01.12.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	- Terlaksananya sosialisasi perijinan HHBK dan Jasa lingkungan - Terlaksananya fasilitasi peningkatan produksi HHBK dan Jasa Lingkungan - Terlaksananya bantuan peralatan HHBK	Kab. Sumbawa	1 tahun	1.506.438.500	1.687.211.120

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.12.22.03	Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	Tersedianya data peredaran hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Terkendalinya peredaran hasil hutan. Tersedianya data produksi hasil hutan.	Kab. Sumbawa	1 Tahun	174.241.500	195.150.480
3.04.01.12.23	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas lahan kritis yang tertangani	Kab. Sumbawa	100 Ha	975.107.600	1.092.120.512
3.04.01.12.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	-Tersedianya dokumen RTnRHL -Monev binwasdal RHL -Tercegah semakin menurunnya tutupan lahan -Tertanamnya lahan kritis -Tersedianya bibit tanaman produktif -Insentif RHL	Kab. Sumbawa	100000 Batang	194.434.400	217.766.528
3.04.01.12.23.02	Pengelolaan DAS	- Terjaganya kualitas DAS - Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan DAS - Operasionalisasi Forum DAS	Kab. Sumbawa	1 Tahun	736.953.400	825.387.808

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.12.23.03	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	-Penyiapan bahan dan program penyuluhan -Pelaksanaan penyuluhan -Terbentuknya pusat penyuluhan kehutanan -Fasilitasi perhutanan sosial -Fasilitasi permasalahan tenurial -Fasilitasi pengelolaan KHDTK -Pelaksanaan berbagai kegiatan seremonial RHL	Kab. Sumbawa	1 Tahun	43.719.800	48.966.176
3.04.01.13	Balai KPH Ropang				5.171.426.240	5.791.997.389
3.04.01.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan			525.240.200	588.269.024
3.04.01.13.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlayannya pengiriman surat menyurat pada UPTD KPH Ropang	Kab. Sumbawa	1 Tahun	3.720.000	4.166.400
3.04.01.13.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Tersedianya jasa komunikasi listrik dan internet UPTD - terpublikasinya informasi UPD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	60.000.000	67.200.000
3.04.01.13.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya tenaga PTT pada UPTD Balai KPH Ropang	Kab. Sumbawa	1 Tahun	68.218.000	76.404.160
3.04.01.13.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya tenaga kebersihan pada UPTD Balai KPH Ropang	Kab. Sumbawa	1 Tahun	29.312.700	32.830.224

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.13.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	40.105.500	44.918.160
3.04.01.13.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan identitas kantor pada UPTD Balai KPH Ropang	Kab. Sumbawa	1 Tahun	9.700.000	10.864.000
3.04.01.13.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen elektronik dan kelistrikan serta instalasi listrik kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	94.729.000	106.096.480
3.04.01.13.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	18.180.000	20.361.600
3.04.01.13.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya surat kabar harian lokal dan nasional serta bahan bacaan lainnya pada UPTD KPH Ropang	Kab. Sumbawa	1 Tahun	7.000.000	7.840.000
3.04.01.13.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya konsumsi untuk rapat kedinasan dan konsumsi tamu pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	41.800.000	46.816.000
3.04.01.13.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah pada UPTD Balai KPH Ropang	Kab. Sumbawa	1 Tahun	35.375.000	39.620.000
3.04.01.13.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya Tenaga Administrasi dan Teknis Perkantoran	Kab. Sumbawa	36 OB	69.450.000	77.784.000
3.04.01.13.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya perjalanan Dinas dalam daerah pada UPTD Balai KPH Ropang	Kab. Sumbawa	1 Tahun	25.375.000	28.420.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.13.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya tenaga pengamanan kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	22.275.000	24.948.000
3.04.01.13.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas Operasional			1.722.201.540	1.928.865.725
3.04.01.13.02.03	Pembangunan gedung kantor	tersedianya bangunan gedung resort/pos jaga KPH dan Tahura	Kab. Sumbawa	4 Unit	1.325.694.640	1.484.777.997
3.04.01.13.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 pada UPTD	Kab. Sumbawa	6 Unit	105.700.000	118.384.000
3.04.01.13.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	terpenuhinya kebutuhan Meubelair kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	6 Paket	53.496.500	59.916.080
3.04.01.13.02.10	Pengadaan meubelair kantor	Terpenuhnya Kebutuhan Meubelair Kantor dan Kantor Pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	63.986.400	71.664.768
3.04.01.13.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	terpenuhinya kebutuhan alat-alat elektronik kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	2 Paket	77.549.000	86.854.880
3.04.01.13.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	80.400.000	90.048.000
3.04.01.13.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor pada UPTD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	15.375.000	17.220.000
3.04.01.13.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	- Terlaksananya Pembinaan Iman dan Taqwa pada Balai KPH Ropang - Terlaksananya Senam pada Balai KPH Ropang			12.501.800	14.002.016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.13.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	- Terlaksananya Pembinaan Iman dan Taqwa pada Balai KPH Ropang - Terlaksananya Senam pada Balai KPH Ropang	Kab. Sumbawa	1 Tahun	12.501.800	14.002.016
3.04.01.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya kualitas pelaporan dan perencanaan			61.150.000	68.488.000
3.04.01.13.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif (DPA, DPPA, Renja, Renstra), Tersedianya rencana pembangunan LHK yang komprehensif pada UPTD (DPA dan DPPA) dan Terlaksananya koordinasi rencana pembangunan LHK	Kab. Sumbawa	2 Dokumen	61.150.000	68.488.000
3.04.01.13.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pemantauan aset			30.750.000	34.440.000
3.04.01.13.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersusunnya laporan aset dinas	Kab. Sumbawa	1 Tahun	30.750.000	34.440.000
3.04.01.13.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Menurunnya persentase kerawanan gangguan hutan dan ekosistem	Kab. Sumbawa	10 %	1.019.659.300	1.142.018.416

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.13.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Tercegahnya praktik ilegal dalam kawasan hutan, operasi pengaman hutan pada wilayah KPH dan tahura, SMART PATROL, Tenaga pengamanan hutan, Tertanganinya kasus pidana kehutanan, Penanganan barang bukti, penyelidikan, saksi ahli, konsultasi dan bantuan hukum kehutanan.	Kab. Sumbawa	1 Tahun	868.768.100	973.020.272
3.04.01.13.21.02	Penegakan Hukum Kehutanan	Tertanganinya kasus pidana kehutanan Penanganan barang bukti, penyelidikan, saksi ahli konsultasi dan bantuan hukum kehutanan	Kab. Sumbawa	5 Berkas	52.116.100	58.370.032

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.13.21.04	Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan Pembuatan dan atau pengelolaan sekat kebakaran Pengembangan sarpras pengendalian kebakaran hutan dan lahan Peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rakor Pendampingan masyarakat peduli api Pembuatan, pemasangan dan sosialisasi rambu-rambu dan papan Peringatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	98.775.100	110.628.112
3.04.01.13.22	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya peresentase pendapatan di sektor kehutanan	Kab. Sumbawa	10 %	1.070.555.400	1.199.022.048
3.04.01.13.22.01	Perencanaan dan Tata Hutan	- Tersosialisasikannya batas kawasan hutan - tertatanya wilayah kelola KPH dan Tahura - tersedianya rencana pengelolaan pembangunan kehutan - Monev penggunaan kawasan hutan - promosi, investasi, kerjasama/kemitraan - NSDH	Kab. Sumbawa	300 Km	268.327.000	300.526.240

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.13.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	- pengembangan hasil hutan bukan kayu unggulan - terfasilitasinya perizinan HHBK - terbinanya kelompok HHBK - tersedianya sarana dan prasarana pengolahan HHBK - Terlaksananya pengembangan budidaya tanaman HHBK - pengembangan jasa lingkungan - terfasilitasinya kemitraan pengelolaan jasa lingkungan - tersedianya dukungan pengembangan Geopark - tersedianya sarpras pengembangan wisata alam - fasilitasi perizinan pemanfaatan dan atau pemungutan hasil hutan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	747.015.200	836.657.024
3.04.01.13.22.03	Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	- tertibnya penatausahaan hasil hutan - tertib penatausahaan iuran hasil hutan - tertib pengolahan hasil hutan (bahan baku, pemasaran)	Kab. Sumbawa	1 Tahun	55.213.200	61.838.784

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.13.23	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas lahan kritis yang tertangani	Kab. Sumbawa	10 %	729.368.000	816.892.160
3.04.01.13.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	- Tertanamnya Lahan Kritis - Tersedianya Bibit Tanaman Produktif - Pelaksanaan Berbagai Kegiatan Seremonial RHL - Meningkatkan produktivitas lahan kritis - Monev binwasdal RHL - Tercegah semakin menurunnya tutupan lahan - Tertanamnya lahan kritis - Tersedianya bibit tanaman produktif Insentif RHL	Kab. Sumbawa	100000 batang	220.344.600	246.785.952
3.04.01.13.23.02	Pengelolaan DAS	- Terjaganya kualitas DAS - Penerapan teknik konservasi tanah dan air - Penyusunan kebijakan pengelolaan DAS	Kab. Sumbawa	1 Tahun	274.356.000	307.278.720

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.13.23.03	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Penyiapan bahan dan program penyuluhan Pelaksanaan penyuluhan Terbentuknya pusat penyuluhan kehutanan Fasilitasi perhutanan sosial Fasilitasi permasalahan tenurial Fasilitasi pengelolaan KHDTK Pelaksanaan berbagai kegiatan seremonial RHL	Kab. Sumbawa	1 Tahun	234.667.400	262.827.488
3.04.01.14	Balai KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada				4.917.295.175	5.507.370.596
3.04.01.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan			373.608.600	418.441.632
3.04.01.14.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Kebutuhan Surat Menyurat	Kab. Bima	1 Tahun	7.300.000	8.176.000
3.04.01.14.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Komunikasi Listrik dan Internetan pada UPTD	Kab. Bima	1 Tahun	81.100.000	90.832.000
3.04.01.14.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Tenaga Administrasi Keuangan pada UPTD	Kab. Bima	1 Tahun	57.216.000	64.081.920
3.04.01.14.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor pada UPTD	Kab. Bima	1 Tahun	36.900.000	41.328.000
3.04.01.14.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor	Kab. Bima	1 Tahun	23.797.600	26.653.312
3.04.01.14.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang dan Penggandaan Identitas Kantor pada UPTD	Kab. Bima	1 Tahun	11.250.000	12.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.14.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Elektroni dan Kelistrikan Serta Instalasi Listrik Kantor UPTD	Kab. Bima	1 Tahun	23.770.000	26.622.400
3.04.01.14.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Konsumsi untuk Rapat Kedinasan dan Konsumsi Tamu pada Kantor UPTD	Kab. Bima	1 Tahun	14.375.000	16.100.000
3.04.01.14.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya Perjalanan Dinas Luar Daerah pada UPTD		1 Tahun	25.300.000	28.336.000
3.04.01.14.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya Tenaga Pengamanan Kantor	Kab. Bima	1 Tahun	22.900.000	25.648.000
3.04.01.14.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perjalanan Dinas Dalam Daerah pada Kantor UPTD	Kab. Bima	1 Tahun	25.400.000	28.448.000
3.04.01.14.01.27	Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT, dan Honorer Daerah	Tersedianya Tenaga PTT	Kab. Bima	1 Tahun	44.300.000	49.616.000
3.04.01.14.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas SDM			2.129.950.000	2.385.544.000
3.04.01.14.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terlaksanya pembangunan Gedung kantor Balai KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada	Kab. Bima	1 Unit	1.113.500.000	1.247.120.000
3.04.01.14.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas Roda 2 Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas Roda 4	Kab. Bima	6 Unit	508.500.000	569.520.000
3.04.01.14.02.10	Pengadaan meubelair kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Meubeler Kantor pada UPTD	Kab. Bima	50 Unit	96.950.000	108.584.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.14.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Terpenuhinya Kebutuhan Alat-alat Elektronik Kantor UPTD	Kab. Bima	15 Unit	153.750.000	172.200.000
3.04.01.14.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor pada UPTD	Kab. Bima	3 Unit	171.750.000	192.360.000
3.04.01.14.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional pada UPTD	Kab. Bima	25 Unit	85.500.000	95.760.000
3.04.01.14.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya senam pada Balai KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Waworada			12.800.000	14.336.000
3.04.01.14.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya Senam pada Balai KPH Toffo Pajo Madapangga Rompu Wawrada	Kab. Bima	12 Bulan	12.800.000	14.336.000
3.04.01.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Pelaporan dan Perencanaan			140.314.000	157.151.680
3.04.01.14.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan yang akuntabel pada UPTD	Kab. Bima	1 Dokumen	41.275.000	46.228.000
3.04.01.14.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Komprehensif (DPA, DPPA, RPHJPd KPHL Toffo Pajo dan RPHJPd KPHP Madapangga Rompu pada UPTD	Kab. Bima	4 Dokumen	48.800.000	54.656.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.14.06.12	Penyusunan Dokumen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Tersusunya Laporan Kinerja SKPD yang Akutabel	Kab. Bima	1 Dokumen	16.375.000	18.340.000
3.04.01.14.06.14	Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tersedianya Data dan Informasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kab. Bima	1 Dokumen	33.864.000	37.927.680
3.04.01.14.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas Pemantauan Aset			45.425.000	50.876.000
3.04.01.14.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Aset Dinas pada UPTD	Kab. Bima	1 Dokumen	45.425.000	50.876.000
3.04.01.14.21	Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	Menurunnya persentase kerawanan gangguan hutan dan ekosistem	Kab. Bima, Kab. Dompu	1.250.ha/KPH	759.171.000	850.271.520
3.04.01.14.21.01	Pencegahan dan Pengamanan Hutan	Operasi Pengamanan Hutan pada KPH	Kab. Bima	1 Tahun	684.982.500	767.180.400
3.04.01.14.21.02	Penegakan Hukum Kehutanan	Tertanganinya Kasus Pidana Kehutanan, Penanganan Barang Bukti, Penyidikan Saksi Ahli dan Bantuan Hukum Kehutanan	Kab. Bima	1 Tahun	74.188.500	83.091.120
3.04.01.14.22	Program Pengelolaan Hutan	Meningkatnya persentase pendapatan di sektor kehutanan	Kab. Bima, Kab. Dompu	10 %	975.336.000	1.092.376.320
3.04.01.14.22.01	Perencanaan dan Tata Hutan	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pembangunan Kehutanan	Kab. Bima	1 Tahun	173.935.000	194.807.200
3.04.01.14.22.02	Pengembangan Usaha Kehutanan	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan	Kab. Bima	1 tahun	454.508.000	509.048.960

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.04.01.14.22.03	Pengendalian Pengelolaan dan Peredaran Hasil Hutan	Tersedianya Data Peredaran Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Non Kayu. Terkendalainya Peredaran Hasil Hutan. Tersedianya Data Produksi Hasil Hutan	Kab. Bima	1 Tahun	346.893.000	388.520.160
3.04.01.14.23	Program Rehabilitasi dan Pemberdayaan Masyarakat	Luas lahan kritis yang tertangani	Kab. Bima, Kab. Dompu	100 Ha	480.690.575	538.373.444
3.04.01.14.23.01	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis	Tertanamnya Lahan Kritis - Tersedianya Bibit Tanaman Produktif - Pelaksanaan Berbagai Kegiatan Seremonial RHL - Meningkatnya produktivitas lahan kritis - Monev binwasdal RHL - Tercegah semakin menurunnya tutupan lahan Tertanamnya lahan kritis - Tersedianya bibit tanaman produktif Insentif RHL	Kab. Bima	4 Lokasi	194.340.675	217.661.556
3.04.01.14.23.02	Pengelolaan DAS	Terjaganya kualitas DAS, penerapan teknik konservasi tanah dan air	Kab. Bima	4 Paket	243.750.000	273.000.000
3.04.01.14.23.03	Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya alat dan bahan dalam rangka sosialisasi terhadap pembentukan Kelompok Tani hutan dan kelembagaan kelompok	Kab. Bima	1 Tahun	42.599.900	47.711.888
3,05	ENARGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				54.259.507.561	60.770.648.468

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.05.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral				54.259.507.561	60.770.648.468
3.05.01.01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Induk)				53.753.832.461	60.204.292.356
3.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Provinsi NTB	100 %	903.906.000	1.012.374.720
3.05.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya jasa pengiriman surat menyurat	Kota Mataram	2700 Surat	7.705.000	8.629.600
3.05.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	Kota Mataram	1 Tahun	251.776.800	281.990.016
3.05.01.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	22.000.000	24.640.000
3.05.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	1 Tahun	141.735.000	158.743.200
3.05.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa penyediaan kebersihan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	95.680.000	107.161.600
3.05.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis yang disediakan	Kota Mataram	1 Tahun	23.831.400	26.691.168
3.05.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penggandaan jumlah barang cetakan yang disediakan	Kota Mataram	1 Tahun	28.759.400	32.210.528
3.05.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang disediakan	Kota Mataram	1 Tahun	4.005.900	4.486.608

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.05.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman tamu dan makanan dan minuman rapat	Kota Mataram	1 Tahun	27.500.000	30.800.000
3.05.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Luar Provinsi	1 Tahun	153.187.500	171.570.000
3.05.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Kota Mataram	1 Tahun	147.725.000	165.452.000
3.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur penunjang kinerja aparatur yang memadai	Provinsi NTB	100 %	1.775.165.400	1.988.185.248
3.05.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional	Kota Mataram	16 Unit	1.077.050.000	1.206.296.000
3.05.01.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	Kota Mataram	60 buah	65.795.400	73.690.848
3.05.01.01.02.11	Pengadaan UPS/stabiizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya peralatan penunjang dalam pelaksanaan tugas	Kota Mataram	9 Unit	127.950.000	143.304.000
3.05.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya rencana pemeliharaan gedung kantor dan perbaikan jaringan listrik	Kota Mataram	1 Paket	281.750.000	315.560.000
3.05.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas SKPD	Kota Mataram	20 Unit	179.270.000	200.782.400
3.05.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya kondisi peralatan kantor	Kota Mataram	20 Unit	43.350.000	48.552.000
3.05.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya aparatur yang terampil dan profesional	Provinsi NTB	100 %	169.592.000	189.943.040

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.05.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terbinanya mental dan fisik aparatur	Kota Mataram	1 Tahun	18.000.000	20.160.000
3.05.01.01.05.05	Peningkatan SDM aparatur	Terlaksanannya peningkatan profesionalisme sumberdaya aparatur	Luar Provinsi	20 Orang	151.592.000	169.783.040
3.05.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya pelaporan kinerja yang akuntabel	Provinsi NTB	100 %	194.354.400	217.676.928
3.05.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Mataram	1 Dokumen	33.641.100	37.678.032
3.05.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	Kota Mataram	1 Dokumen	26.671.700	29.872.304
3.05.01.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan	Kota Mataram	6 Dokumen	134.041.600	150.126.592
3.05.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel	Provinsi NTB	100 %	22.146.000	24.803.520
3.05.01.01.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Terlaksanannya manajemen penataan aset yang akuntabel	Kota Mataram	1 Dokumen	22.146.000	24.803.520
3.05.01.01.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Persentase jumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melaksanakan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar	Provinsi NTB	15 %	827.829.500	927.169.040
3.05.01.01.15.04	Koordinasi dan Pendataan tentang Hasil Produksi dibidang Pertambangan	Tersedianya data produksi pertambangan	se-NTB	110 IUP	141.829.500	158.849.040

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.05.01.01.15.10	Pengawasan usaha pertambangan	Tersedianya dokumen pengawasan pertambangan	se-NTB	110 IUP	328.000.000	367.360.000
3.05.01.01.15.12	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Logam	Terkendalinya kegiatan usaha pertambangan mineral logam	se-NTB	20 IUP	179.000.000	200.480.000
3.05.01.01.15.13	Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terkendalinya kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan	se-NTB	90 IUP	179.000.000	200.480.000
3.05.01.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Terwujudnya peningkatan rumah tangga yang menggunakan listrik	Provinsi NTB	87 %	8.038.337.900	9.002.938.448
3.05.01.01.17.02	Pengendalian dan Evaluasi Bidang Ketenagalistrikan	Tersedianya data rasio elektrifikasi dan database instalasi ketenagalistrikan	se-NTB	1 Dokumen	172.599.000	193.310.880
3.05.01.01.17.03	Pengembangan Pemanfaatan Bidang Ketenagalistrikan	Tersedianya sambungan listrik murah untuk masyarakat miskin	se-NTB	2500 RTS	7.779.010.000	8.712.491.200
3.05.01.01.17.04	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Tersedianya database perusahaan ketenagalistrikan	se-NTB	1 Dokumen	86.728.900	97.136.368
3.05.01.01.18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan Air Bersih Perdesaan	Provinsi NTB	20 %	10.742.145.000	12.031.202.400
3.05.01.01.18.01	Perencanaan teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Tersedianya rencana teknis sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	se-NTB	1 Dokumen	46.172.500	51.713.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.05.01.01.18.02	Pengembangan sarana dan prasarana pemanfaatan air tanah	Terbangunnya sumur bor produksi	Kota Bima, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa	15 Unit	10.111.722.500	11.325.129.200
3.05.01.01.18.03	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Tersedianya dokumen pengawasan pemanfaatan air tanah	se-NTB	1 Dokumen	90.750.000	101.640.000
3.05.01.01.18.04	Konservasi Air Tanah	Terkendalinya pengambilan dan pemanfaatan air tanah	se-NTB	1 Dokumen	493.500.000	552.720.000
3.05.01.01.19	Program Pengembangan dan pengelolaan energi dan sumberdaya mineral	Terwujudnya perencanaan pembangunan ESDM yang efektif dan efisien	Provinsi NTB	100 %	411.159.700	460.498.864
3.05.01.01.19.01	Sinkronisasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Tersedianya data awal perencanaan Program/Kegiatan	Luar Provinsi, se-NTB	1 Dokumen	141.186.100	158.128.432
3.05.01.01.19.02	Pendataan kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Terkelolanya data dan informasi sektor ESDM	Kota Mataram	1 Dokumen	60.000.000	67.200.000
3.05.01.01.19.03	Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang energi dan sumberdaya mineral	Tersedianya dokumen acuan dalam perencanaan pengembangan bidang ESDM	Kota Mataram	3 Dokumen	209.973.600	235.170.432
3.05.01.01.22	Program Pencegahan Kerusakan Lingkungan	Persentase situs geologi yang terlindungi	se-NTB	10 %	5.270.517.956	5.902.980.111

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.05.01.01.22.01	Mitigasi rawan bencana alam geologi	Tersosialisasikannya sosialisasi mitigasi bencana alam geologi		1000 Orang	445.567.956	499.036.111
3.05.01.01.22.02	Pengelolaan kawasan lindung geologi	tersedianya data dan tersebarnya informasi potensi kawasan lindung geologi		700 Orang	4.824.950.000	5.403.944.000
3.05.01.01.24	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Terwujudnya pengelolaan energi daerah sesuai target bauran energi	Provinsi NTB	30 %	25.398.678.605	28.446.520.038
3.05.01.01.24.01	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya database perusahaan energi baru terbarukan	se-NTB	1 Dokumen	255.568.000	286.236.160
3.05.01.01.24.02	Penyediaan Sarana Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Tersedianya sarana dan prasarana pemanfaatan energi baru terbarukan	se-NTB	807 Unit	25.023.498.605	28.026.318.438
3.05.01.01.24.03	Penyuluhan Kegiatan Bidang Energi	Terlaksananya sosialisasi dan penyuluhan bidang energi	se-NTB	1 Dokumen	119.612.000	133.965.440
3.05.01.02	Balai ESDM Wilayah Sumbawa				505.675.100	566.356.112
3.05.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya tata kelola administrasi perkantoran yang efektif dan efisien	Provinsi NTB	100 %	248.925.100	278.796.112
3.05.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terlaksananya Kegiatan Surat Menyurat OPD	Kab. Sumbawa	500 surat	2.353.000	2.635.360
3.05.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik OPD	Kab. Sumbawa	1 Tahun	29.800.000	33.376.000
3.05.01.02.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	2.000.000	2.240.000
3.05.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Administrasi Kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	11.880.000	13.305.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.05.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Kebersihan Kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	72.860.000	81.603.200
3.05.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya Kebutuhan ATK	Kab. Sumbawa	1 tahun	7.697.700	8.621.424
3.05.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	5.550.000	6.216.000
3.05.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik	Kab. Sumbawa	1 tahun	1.284.400	1.438.528
3.05.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	Kab. Sumbawa	1 Tahun	5.500.000	6.160.000
3.05.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Keselarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Luar Provinsi	1 Tahun	55.000.000	61.600.000
3.05.01.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Keselarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten	Kab. Sumbawa	1 Tahun	55.000.000	61.600.000
3.05.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terwujudnya sarana dan prasarana aparatur penunjang kinerja aparatur yang memadai	Provinsi NTB	100 %	52.150.000	58.408.000
3.05.01.02.02.11	Pengadaan UPS/Stabilizer, komputer dan alat-alat elektronik	Tersedianya Peralatan Komputer dan elektronik	Kab. Sumbawa	1 Tahun	30.000.000	33.600.000
3.05.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kab. Sumbawa	1 Tahun	16.900.000	18.928.000
3.05.01.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Sumbawa	1 Tahun	5.250.000	5.880.000
3.05.01.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terwujudnya aparatur yang terampil dan profesional	Provinsi NTB	100 %	23.100.000	25.872.000
3.05.01.02.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Meningkatnya Kapasitas ASN	Luar Provinsi	90 %	23.100.000	25.872.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.05.01.02.15	Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Porsentase jumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang melaksanakan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar	Kab. Bima, Kota Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	15 %	55.000.000	61.600.000
3.05.01.02.15.10	Pengawasan usaha pertambangan	Terkendalnya kegiatan pertambangan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	55.000.000	61.600.000
3.05.01.02.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	Terwujudnya peningkatan rumah tangga yang menggunakan listrik	Provinsi NTB	87 %	44.000.000	49.280.000
3.05.01.02.17.03	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Bidang Ketenagalistrikan	Terkendalnya kegiatan ketenagalistrikan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	44.000.000	49.280.000
3.05.01.02.18	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Air Tanah	Cakupan Air Bersih Perdesaan	Provinsi NTB	18 %	44.000.000	49.280.000
3.05.01.02.18.03	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pemanfaatan air tanah	Terkendalnya perizinan pemanfaatan air tanah	Kab. Sumbawa	1 Tahun	44.000.000	49.280.000
3.05.01.02.24	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Energi	Terwujudnya pengelolaan energi daerah sesuai target bauran energi	Provinsi NTB	30 %	38.500.000	43.120.000
3.05.01.02.24.01	Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Optimalnya pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Kab. Sumbawa	1 Tahun	38.500.000	43.120.000
3,06	PERDAGANGAN				3.099.513.375	3.471.454.980
3.06.01	Dinas Perdagangan				3.099.513.375	3.471.454.980
3.06.01.01	Dinas Perdagangan (Induk)				2.680.196.475	3.001.820.052
3.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran			1.110.993.000	1.244.312.160
3.06.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Semakin lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan	Kota Mataram	1 Tahun	5.500.000	6.160.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.06.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Semakin lancarnya tugas kedinasan	Kota Mataram	12 Bulan	119.200.000	133.504.000
3.06.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Semakin lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan	Kota Mataram	12 bulan	103.360.000	115.763.200
3.06.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Meningkatnya kebersihan sarana dan prasarana kantor	Kota Mataram	1 Tahun	380.955.000	426.669.600
3.06.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan barang alat tulis kantor	Kota Mataram	1 Tahun	28.269.000	31.661.280
3.06.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggadaan	Kota Mataram	1 Tahun	12.650.000	14.168.000
3.06.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat listrik	Kota Mataram	1 Tahun	12.604.000	14.116.480
3.06.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan kantor	Kota Mataram	71 buah	120.200.000	134.624.000
3.06.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggadaan	Kota Mataram	1 Tahun	33.000.000	36.960.000
3.06.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan rapat pegawai	Kota Mataram	1 Tahun	35.000.000	39.200.000
3.06.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terkoordinasinya tugas/program kedinasan	Luar Provinsi	1 Tahun	150.000.000	168.000.000
3.06.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	terkoordinasinya tugas/program kedinasan	Kota Mataram	1 Tahun	95.000.000	106.400.000
3.06.01.01.01.25	Pengelolaan kersipan	Tertatanya Dokumen Kearsipan	Provinsi NTB	1500 Berkas	15.255.000	17.085.600
3.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur			306.852.000	343.674.240

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.06.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas untuk operasional kedinasan	Kota Mataram	7 Unit	600	672
3.06.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pengadaan perlengkapan kantor	Kota Mataram	42 paket	51.800.000	58.016.000
3.06.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Kota Mataram	3 paket	2.000.000	2.240.000
3.06.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Kota Mataram	21 Unit	209.152.000	234.250.240
3.06.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	Kota Mataram	52 Unit	43.300.000	48.496.000
3.06.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kelancaran tugas aparatur			54.350.000	60.872.000
3.06.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Meningkatnya mental dan fisik aparatur yang sehat, beriman dan bertaqwa	Kota Mataram	1 Tahun	16.350.000	18.312.000
3.06.01.01.05.05	Peningkatan SDM aparatur	Meningkatnya pengetahuan SDM aparatur	Kota Mataram	1 Tahun	38.000.000	42.560.000
3.06.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rencana Program			473.415.560	530.225.427
3.06.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Informasi Kinerja SKPD	Kota Mataram	7 jenis	165.000.000	184.800.000
3.06.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya Laporan Dokumen Keuangan Akhir Tahun	Kota Mataram	1 Laporan	15.735.000	17.623.200
3.06.01.01.06.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya Pengawasan Terhadap Laporan Capaian Kinerja	Kota Mataram	2 Laporan	165.848.900	185.750.768

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.06.01.01.06.11	Verifikasi/survey calon penerima bantuan mesin dan peralatan	Terdatanya Calon Penerima Bantuan Mesin Peralatan		1 Laporan	126.831.660	142.051.459
3.06.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Manajemen Asset			27.800.000	31.136.000
3.06.01.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Meningkatnya dan tersedianya laporan asset/ inventaris milik daerah	Kota Mataram	1 Laporan	27.800.000	31.136.000
3.06.01.01.15	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	Provinsi NTB	85%	440.895.000	493.802.400
3.06.01.01.15.01	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Terwujudnya koordinasi dan sinergi antar lembaga	Provinsi NTB	7 lembaga	22.520.000	25.222.400
3.06.01.01.15.02	Penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	Terfasilitasinya penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen		30 kasus	16.350.000	18.312.000
3.06.01.01.15.03	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa (SNI - Kadaluarsa)	Terwujudnya peredaran barang dan jasa yang memenuhi ketentuan hukum		300 produk barang dan jasa	138.500.000	155.120.000
3.06.01.01.15.12	Penguatan Perlindungan Konsumen terhadap Bahan Berbahaya	Teredukasinya komunitas konsumen	Provinsi NTB	40 komunitas	129.900.000	145.488.000
3.06.01.01.15.14	Partisipasi Peringatan Hari Konsumen Nasional	Terlaksananya peringatan hari konsumen nasional	Kota Mataram	1 event	83.625.000	93.660.000
3.06.01.01.15.15	Publikasi Perlindungan Konsumen Melalui Media Cetak dan Elektronik	Terlaksananya publikasi perlindungan konsumen melalui media cetak dan elektronik	Kota Mataram	4 media	50.000.000	56.000.000
3.06.01.01.16	Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Pertumbuhan nilai ekspor non tambang	Provinsi NTB	10% dari tahun sebelumnya	55.154.000	61.772.480

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.06.01.01.16.02	Penyebarluasan informasi data base kuota setiap jenis barang dan jasa	Tersebar nya informasi kuota setiap jenis barang dan jasa ekspor impor		200 buku	16.589.500	18.580.240
3.06.01.01.16.05	Isu-Isu Perdagangan Internasional	Tersosialisasinya Isu-isu Terkini Mengenai Perdagangan Internasional Kepada Pelaku ekspor Impor	Provinsi NTB	50 Perusahaan	18.939.500	21.212.240
3.06.01.01.16.06	Pengawasan peredaran barang ekspor dan impor	Terawasinya Perdagangan Produk Ekspor Impor	Provinsi NTB	50 Produk	19.625.000	21.980.000
3.06.01.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor non tambang	Provinsi NTB	10 % dari tahun sebelumnya	102.913.700	115.263.344
3.06.01.01.17.02	Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri	Tersosialisasinya Peluang Pasar perdagangan Luar Negeri	Kota Mataram	50 Org	18.775.000	21.028.000
3.06.01.01.17.03	Penguatan kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor dan impor	Terlatihnya Pengusaha/eksportir Mengenai Ekspor Impor	Kota Mataram	30 Org	14.060.000	15.747.200
3.06.01.01.17.08	Membangun jejaring dengan eksportir	Terjalannya Jejaring Ekspor Pelaku Usaha Antar Daerah		1 Tahun	5.290.000	5.924.800
3.06.01.01.17.13	Partisipasi pada pameran dan promosi luar negeri	Terselenggaranya Kegiatan Partisipasi Pada Pameran Luar Negeri		1 Tahun	3.350.000	3.752.000
3.06.01.01.17.14	Evaluasi dan monitoring importir dan eksportir yang sudah memiliki API dan SKA	Terdatanya Pelaku Data Ekspor Dan Impor Yang Telah Memiliki API Dan SKA		1 Tahun	3.393.700	3.800.944
3.06.01.01.17.15	INATRADE	Tersosialisasinya Sistem INATRADE Kepada Pelaku Ekspor Dan Impor	Kota Mataram	50 Org	36.100.000	40.432.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.06.01.01.17.16	Penguatan Regulasi Perdagangan Luar Negeri	Terlaksanannya Sosialisasi Mengenai Regulasi Perdagangan Luar Negeri	Kota Mataram	60 Org	16.270.000	18.222.400
3.06.01.01.17.18	Penguatan bagi UKM/ Calon UKM yang berorientasi/ berpotensi ekspor / eksportir Se-NTB	Terlaksanannya Pembinaan UKM/Calon UKM yang Berorientasi Ekspor	Kota Mataram	50 Org	5.675.000	6.356.000
3.06.01.01.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Indeks Harga Gabungan Bahan Pokok	se-NTB	3,75	65.805.000	73.701.600
3.06.01.01.18.07	Peningkatan Pemahaman Penggunaan Produk Dalam Negeri (Aku Cinta Indonesia)	Terlaksanannya sosialisasi pemahaman Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kab. Bima, Kota Bima, Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	625 orang	38.400.000	43.008.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.06.01.01.18.08	Operasi pasar rakyat	Terlaksananya Operasi Pasar Rakyat dan Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat Miskin	Kab. Bima, Kota Bima, Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa, Kab. Sumbawa Barat	20000 orang	2.700.000	3.024.000
3.06.01.01.18.09	Pemantauan ketersediaan sembako menjelang hari besar keagamaan	Tersedianya data harga Bahan Pokok dan Penting se-NTB	se-NTB	20 pasar	775	868
3.06.01.01.18.10	Misi dagang	Terwujudnya kerjasama pelaku Usaha Antar Daerah/Wilayah	se-NTB	18 Kontrak Dagang	8.405.000	9.413.600
3.06.01.01.18.12	Pemantauan perdagangan antar pulau	Terupdatenya data keluar masuk barang kebutuhan Bahan Pokok dan penting antar pulau	Provinsi NTB	19 jenis	750	840
3.06.01.01.18.13	Pemantauan barang-barang strategis dan BBM	Terupdatenya data Barang-barang Strategis dan BBM	Provinsi NTB	7 jenis barang strategis dan 45 SPBE/Pangkalan	825	924

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.06.01.01.18.15	Fasilitasi Pasar Sembako Murah	Terpenuhinya Kebutuhan Sembako Masyarakat Ekonomi Bawah		30 Lokasi	13.950.000	15.624.000
3.06.01.01.19	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pertumbuhan Kelompok Pedagang / Usaha Informal	se-NTB	10% dari tahun sebelumnya	7.287.500	8.162.000
3.06.01.01.19.01	Penguatan organisasi pedagang kaki Lima dan asongan	Pertumbuhan Kelompok Pedagang/Usaha Formal	se-NTB	100 orang	687,5	770
3.06.01.01.19.03	Penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki Lima dan asongan	Terwujudnya Masyarakat yang Mandiri dan Berdaya Saing	se-NTB	200 kelompok	6.600.000	7.392.000
3.06.01.01.20	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah	Peningkatan Kerjasama, Jejaring Usaha dan Mitra	Luar Provinsi, Provinsi NTB	50%	34.730.715	38.898.401
3.06.01.01.20.06	Penyebarluasan Informasi Perdagangan	Tersedianya Visualisasi Data Statistik Perdagangan	Kota Mataram, se-NTB	2 paket	1.500.000	1.680.000
3.06.01.01.20.10	Peningkatan kerjasama mitra praja utama (MPU)	Terjalannya Koordinasi Sesama Anggota MPU	Luar Provinsi	10 Prov. anggota MPU	13.610.715	15.244.001
3.06.01.01.20.16	Penyediaan informasi strategis pembangunan sektor Perdagangan	Terpantaunya Informasi Strategis Pembangunan Daerah	Luar Provinsi	7 event	19.620.000	21.974.400
3.06.01.02	Balai Pengembangan, Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah				419.316.900	469.634.928
3.06.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kelancaran Administrasi Perkantoran			97.177.000	108.838.240
3.06.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Semakin lancarnya pelaksanaan tugas kedinasan	Kota Mataram	12 bulan	2.000.000	2.240.000
3.06.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Semakin lancarnya kegiatan kedinasan	Kota Mataram	12 bulan	32.016.000	35.857.920
3.06.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	1 Tahun	9.848.500	11.030.320

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.06.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	12 bulan	2.512.500	2.814.000
3.06.01.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	8 unit	34.000.000	38.080.000
3.06.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman	Kota Mataram	1 Tahun	6.000.000	6.720.000
3.06.01.02.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terselarasnya tugas/program kedinasan		1 Tahun	400	448
3.06.01.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselarasnya tugas/program kedinasan		1 Tahun	10.400.000	11.648.000
3.06.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur			19.894.400	22.281.728
3.06.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Kota Mataram	3 Unit	11.594.400	12.985.728
3.06.01.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	15 Unit	8.300.000	9.296.000
3.06.01.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program pelaporan dan keuangan			34.600.000	38.752.000
3.06.01.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Informasi Kinerja SKPD	Kota Mataram	7 Jenis	24.400.000	27.328.000
3.06.01.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersedianya laporan dokumen keuangan akhir tahun	Kota Mataram	1 Laporan	10.200.000	11.424.000
3.06.01.02.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan nilai ekspor non tambang	Provinsi NTB	10 % dari tahun sebelumnya	56.070.000	62.798.400
3.06.01.02.17.10	Pengembangan kluster produk ekspor	Berkembangnya kluster produk ekspor	Kota Mataram	90 orang	38.385.000	42.991.200
3.06.01.02.17.18	Penguatan bagi UKM/ Calon UKM yang berorientasi/ berpotensi ekspor / eksportir Se-NTB	Semakin meningkatnya kualitas produk ekspor	Kota Mataram	60 orang	1.240.000	1.388.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.06.01.02.17.19	Penyediaan sarana promosi ekspor daerah	Semakin dikenalnya barang-barang promosi ekspor daerah	Kota Mataram	4 paket	1.500.000	1.680.000
3.06.01.02.17.20	Pendampingan Desainer (Design Dispace Services)	Semakin meningkatnya kualitas produk-produk kerajinan NTB	Kota Mataram	2 produk	14.945.000	16.738.400
3.06.01.02.20	Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Daerah	Peningkatan Kerjasama, Jejaring Usaha dan Mitra			211.575.500	236.964.560
3.06.01.02.20.03	Penyebarluasan Informasi Produk Unggulan melalui E-Commerce	Semakin dikenalnya produk-produk kerajinan NTB	Kota Mataram	12 bulan	158.088.000	177.058.560
3.06.01.02.20.07	Partisipasi pada pameran dan promosi dalam negeri	Semakin dikenalnya produk-produk unggulan NTB	Luar Provinsi, se-NTB	6 Kegiatan	53.487.500	59.906.000
3,07	PERINDUSTRIAN				23.625.973.300	26.461.090.096
3.07.01	Dinas Perindustrian				23.625.973.300	26.461.090.096
3.07.01.01	Dinas Perindustrian (Induk)				19.838.129.800	22.218.705.376
3.07.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelayanan administrasi perkantoran			794.597.300	889.948.976
3.07.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	terkirimnya surat menyurat	Kota Mataram	12 bln	2.555.000	2.861.600
3.07.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Kota Mataram	12 bln	115.800.000	129.696.000
3.07.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	12 bln	82.856.000	92.798.720
3.07.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	Kota Mataram	12 bln	252.565.000	282.872.800
3.07.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Kota Mataram	12 bln	35.002.500	39.202.800
3.07.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	12 bln	17.025.000	19.068.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.07.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen penerangan bangunan kantor	Kota Mataram	12 bln	13.143.800	14.721.056
3.07.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	12 unit	66.000.000	73.920.000
3.07.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kota Mataram	12 bln	12.000.000	13.440.000
3.07.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai	Kota Mataram	12 bln	12.500.000	14.000.000
3.07.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	perjalanan dinas luar daerah	Kota Mataram, Luar Provinsi	12 bln	102.500.000	114.800.000
3.07.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	tersedianya jasa administrasi dan teknis perkantoran	Kota Mataram	12 bln	35.800.000	40.096.000
3.07.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	perjalanan dinas dalam daerah		12 bln	46.850.000	52.472.000
3.07.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan sarana dan prasarana perkantoran			6.024.440.000	6.747.372.800
3.07.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	terlaksananya pembangunan gedung kantor	Kota Mataram	1 unit	5.052.240.000	5.658.508.800
3.07.01.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	Kota Mataram	10 pkt	185.000.000	207.200.000
3.07.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terlaksananya renovasi gedung dinas perindustrian provinsi ntb	Kota Mataram	1 pkt	550.000.000	616.000.000
3.07.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas / operasional secara rutin	Kota Mataram	20 unit	197.200.000	220.864.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.07.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan perlengkapan Kantor	terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Kota Mataram	45 unit	40.000.000	44.800.000
3.07.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			66.000.000	73.920.000
3.07.01.01.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	terbinanya mental dan fisik aparatur yang sehat, beriman dan bertaqwa	Kota Mataram	65 org	21.000.000	23.520.000
3.07.01.01.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	terlatihnya SDM aparatur	Kota Mataram	10 org	45.000.000	50.400.000
3.07.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			751.992.500	842.231.600
3.07.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	tersusunnya laporan kinerja SKPD	Kota Mataram	4 dok	144.342.500	161.663.600
3.07.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya dokumen laporan keuangan akhir tahun	Kota Mataram	1 dok	28.550.000	31.976.000
3.07.01.01.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	tersusunnya rencana kerja skpd		5 dokumen	214.250.000	239.960.000
3.07.01.01.06.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	tersusunnya laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan		1 dokumen	230.350.000	257.992.000
3.07.01.01.06.15	Verifikasi/survey Calon Penerima Bantuan Mesin dan Peralatan (DBHCHT)	tersusunnya laporan calon penerima bantuan mesin dan peralatan		1 dokumen	134.500.000	150.640.000
3.07.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	tertib manajemen aset / inventaris barang milik daerah			29.750.000	33.320.000
3.07.01.01.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang MiUk Daerah	tersusunnya laporan aset / inventaris barang milik daerah	Kota Mataram	2 dokumen	29.750.000	33.320.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.07.01.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	Persentase cakupan IKM yang Terbina dalam Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	se-NTB	15%	1.184.450.000	1.326.584.000
3.07.01.01.15.05	Pengembangan sistem inovasi teknologi industri	terlatihnya ikm industri telematika dan elektronika	Luar Provinsi, se-NTB	70 ikm	608.975.000	682.052.000
3.07.01.01.15.06	Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi	terlatihnya ikm industri elektronika dan telematika dalam kemampuan industri berbasis teknologi	Luar Provinsi, se-NTB	140 ikm	575.475.000	644.532.000
3.07.01.01.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Cakupan IKM yang terbina	se-NTB	10%	4.139.600.000	4.636.352.000
3.07.01.01.16.01	Penguatan Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	terlaksananya kegiatan penguatan ikm terhadap pemanfaatan sumber daya	se-NTB	60 ikm	268.025.000	300.188.000
3.07.01.01.16.02	Penguatan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Kiaster Industri	terlaksananya penguatan ikm dala memperkuat jaringan klaster industri	Kab. Bima, Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa	140 ikm	940.700.000	1.053.584.000
3.07.01.01.16.08	Sertifikasi Halal dan Pengujian Mutu Produk Unggulan	terlaksananya sertifikasi halal dan pengujian mutu produk unggulan	se-NTB	130 ikm	360.250.000	403.480.000
3.07.01.01.16.10	Pendaftaran dan Perlindungan HKI, Sertifikasi SNI	terlaksananya pendaftaran dan perlindungan hki, sertifikasi sni	se-NTB	248 ikm	409.250.000	458.360.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.07.01.01.16.11	Pembinaan Legalitas Usaha IKM (HKI,SNI,HKI,PIRT,dan Halal)	terlaksananya pembinaan legalitas usaha IKM (HKI, SNI, PIRT dan Halal)	se-NTB	400 ikm	457.500.000	512.400.000
3.07.01.01.16.12	Pelatihan IKM berbahan Baku Produk Unggulan	terlaksananya pelatihan berbahan baku produk unggulan	Kab. Dompu, Kab. Sumbawa Barat	40 ikm	237.050.000	265.496.000
3.07.01.01.16.16	Pelatihan Pengolahan Hasil Perkebunan	terlaksananya pelatihan pengolahan hasil perkebunan	Kab. Bima, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara, Kab. Sumbawa Barat, Luar Provinsi	130 ikm	954.375.000	1.068.900.000
3.07.01.01.16.18	Fasilitasi Alat Perbengkelan Bagi IKM ILMEA	terfasilitasinya ikm perbengkelan	se-NTB	20 ikm	342.850.000	383.992.000
3.07.01.01.16.19	Fasilitasi Peralatan Tenun ATBM	terdistribusinya peralatan tenun atbm	Kab. Lombok Timur	5 ikm	169.600.000	189.952.000
3.07.01.01.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan IKM yang Menerapkan Teknologi dalam Proses Produksi	se-NTB	10%	4.115.500.000	4.609.360.000
3.07.01.01.17.01	Kemampuan Teknologi Industri	terdistribusikannya bantuan peralatan dan mesin	se-NTB	211 ikm	4.115.500.000	4.609.360.000
3.07.01.01.19	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Cakupan Sentra Industri Potensial Yang Dikembangkan	Kota Mataram, Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumbawa	1%	517.150.000	579.208.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.07.01.01.19.04	Penguatan Desain dan diversifikasi produk unggulan Industri Kreatif	terlaksananya desain dan diversifikasi produk unggulan industri kreatif	Kota Mataram, Kab. Lombok Tengah, Kab. Sumbawa	60 ikm	254.825.000	285.404.000
3.07.01.01.19.05	Penguatan Desain dan diversifikasi produk unggulan Industri Kerajinan	terlaksananya desain dan diversifikasi produk unggulan industri kerajinan	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	60 ikm	262.325.000	293.804.000
3.07.01.01.20	Program Kerjasama Pembangunan Sektor Perindustrian	Persentase Cakupan Kerjasama antar daerah dan Kab/Kota	Provinsi NTB	10%	945.475.000	1.058.932.000
3.07.01.01.20.02	Penyelarasan Dokumen Program Perindustrian	terlaksananya kegiatan penyelarasan dokumen program perindustrian	se-NTB	1 dokumen	610.350.000	683.592.000
3.07.01.01.20.03	Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah	terjalinnnya kerjasama pembangunan antar daerah	Luar Provinsi	4 event	139.125.000	155.820.000
3.07.01.01.20.04	Penyediaan Informasi Strategis Pembangunan Sektor Perindustrian	tersedianya informasi strategis pembangunan daerah	Luar Provinsi, se-NTB	1 dokumen	196.000.000	219.520.000
3.07.01.01.21	Program Pengembangan Dan Penguatan Klaster Berbasis OVOP (One Village One Product)	Persentase Cakupan IKM Berbasis OVOP (One Village One Product)	Provinsi NTB	10%	347.100.000	388.752.000
3.07.01.01.21.01	Peningkatan pengembangan mutu produk berbasis OVOP	terlaksananya pengembangan mutu berbasis OVOP	Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah	40 ikm	171.550.000	192.136.000
3.07.01.01.21.02	Peningkatan Desain Produk Berbasis OVOP	terlaksananya peningkatan desain berbasis OVOP	Kab. Bima, Kota Mataram	40 ikm	175.550.000	196.616.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.07.01.01.23	Program Peningkatan Mutu Dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Persentase Cakupan IKM dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Provinsi NTB	10%	922.075.000	1.032.724.000
3.07.01.01.23.01	Penguatan Mutu Produk Unggulan Olahan Pangan	terlaksananya penguatan mutu produk melalui kegiatan pelatihan	Kab. Bima, Kab. Sumbawa	80 ikm	922.075.000	1.032.724.000
3.07.01.02	Balai Kemasan Produk Daerah				3.787.843.500	4.242.384.720
3.07.01.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	pelayanan administrasi perkantoran			357.793.500	400.728.720
3.07.01.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	terkirimnya surat menyurat	Kota Mataram	12 bln	2.500.000	2.800.000
3.07.01.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan internet	Kota Mataram	12 bln	70.800.000	79.296.000
3.07.01.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	12 bln	57.084.000	63.934.080
3.07.01.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	Kota Mataram	12 bln	70.700.000	79.184.000
3.07.01.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Kota Mataram	12 bln	5.909.500	6.618.640
3.07.01.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	12 bln	3.500.000	3.920.000
3.07.01.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen penerangan bangunan kantor	Kota Mataram	12 bln	4.300.000	4.816.000
3.07.01.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	4 unit	49.000.000	54.880.000
3.07.01.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman rapat pegawai	Kota Mataram	12 bln	9.000.000	10.080.000
3.07.01.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	perjalan dinas luar daerah	Luar Provinsi	12 bln	45.000.000	50.400.000
3.07.01.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	perjalanan dinas dalam daerah	se-NTB	12 bln	40.000.000	44.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.07.01.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	cakupan sarana dan prasarana kantor			585.500.000	655.760.000
3.07.01.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	tersedianya kendaraan dinas operasional rumah kemasan	Kota Mataram	1 unit	251.700.000	281.904.000
3.07.01.02.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	Kota Mataram	8 pkt	205.000.000	229.600.000
3.07.01.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kendaraan dinas / operasional secara rutin	Kota Mataram	4 unit	31.300.000	35.056.000
3.07.01.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor	terpeliharanya peralatan kantor secara rutin	Kota Mataram	10 unit	97.500.000	109.200.000
3.07.01.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			40.000.000	44.800.000
3.07.01.02.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	terbinanya mental dan fisik aparatur yang sehat, beriman dan bertaqwa	Luar Provinsi	3 org	20.000.000	22.400.000
3.07.01.02.05.14	Peningkatan SDM Operator Mesin Kemasan	terlatihnya sdm aparatur	Luar Provinsi	3 org	20.000.000	22.400.000
3.07.01.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	tersusunnya laporan kinerja skpd			35.800.000	40.096.000
3.07.01.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	tersusunnya laporan skpd	Kota Mataram	1 dokumen	10.800.000	12.096.000
3.07.01.02.06.08	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi balai	se-NTB	1 dokumen	25.000.000	28.000.000
3.07.01.02.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Cakupan IKM yang Menerapkan Teknologi dalam Proses Produksi	se-NTB	10%	150.000.000	168.000.000
3.07.01.02.17.05	Peningkatan Kemasan (packing) produk IKM Olahan	tersedianya kemasan (packaging) produk ikm olahan	se-NTB	20 ikm	150.000.000	168.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.07.01.02.22	Program Peningkatan Pengelolaan Rumah Kemasan	Persentase Meningkatnya Kualitas Kemasan Produk IKM	Provinsi NTB	10%	1.320.625.000	1.479.100.000
3.07.01.02.22.01	Operasional Rumah Kemasan	terlaksananya operasional rumah kemasan	Kota Mataram	12 bln	619.800.000	694.176.000
3.07.01.02.22.02	Bantuan Kemasan bagi olah pangan	terdistribusinya bantuan kemasan bagi ikm olahan pangan	se-NTB	300 ikm	700.825.000	784.924.000
3.07.01.02.23	Program Peningkatan Mutu dan Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Persentase Cakupan IKM dalam Pengembangan Komoditi Unggulan Daerah	Provinsi NTB	10%	1.298.125.000	1.453.900.000
3.07.01.02.23.02	Penguatan Mutu Kemasan Produk Olahan Pangan	terlaksananya penguatan mutu produk melalui kegiatan pelatihan	se-NTB	100 ikm	379.800.000	425.376.000
3.07.01.02.23.03	Pendampingan Peningkatan mutu desain kemasan produk unggulan daerah	terlaksananya pendampingan peningkatan mutu kemasan produk unggulan daerah	se-NTB	30 ikm	128.775.000	144.228.000
3.07.01.02.23.06	Magang IKM dan Aparatur ke Bandung/Provinsi Lainnya	terlaksananya magang ikm dan aparatur ke bandung / provinsi lainnya	Luar Provinsi	30 ikm	88.725.000	99.372.000
3,08	TRANSMIGRASI				1.298.790.550	1.454.645.416
3.08.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi				1.298.790.550	1.454.645.416
3.08.01.01	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (induk)				634.879.900	711.065.488
3.08.01.01.15	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi	se-NTB	100%	634.879.900	711.065.488
3.08.01.01.15.06	Optimalisasi Pertanahan Transmigrasi, Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPPKH)	Jumlah Luas Tanah transmigrasi dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPPKH)	Provinsi NTB	4 Paket	145.110.000	162.523.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.08.01.01.15.07	Penyuluhan dan Seleksi Calon Transmigrasi (Catrans)	Terlaksananya Penyuluhan dan Seleksi Calon Transmigrasi (Catrans)	se-NTB	150 Orang	59.640.400	66.797.248
3.08.01.01.15.08	Naskah Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	Terlaksananya Naskah Kerjasama Antar Daerah (KSAD)	Kota Mataram	1 Kegiatan	77.756.200	87.086.944
3.08.01.01.15.09	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di UPT Bina	Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi di UPT Bina	se-NTB	750 KK	107.612.100	120.525.552
3.08.01.01.15.10	Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Terlaksananya Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM)	Kab. Bima, Kab. Sumbawa	2 KTM	106.654.600	119.453.152
3.08.01.01.15.11	Pengembangan Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	Terlaksananya Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Pengelolaan/Pelayanan Pertanahan Transmigrasi	se-NTB	1 Kegiatan	43.106.600	48.279.392
3.08.01.01.15.12	Pengukuran dan Pemasangan tanda calon areal HPL	Terlaksananya Pengukuran dan Pemasangan tanda calon areal HPL	Provinsi NTB	2 Paket	40.000.000	44.800.000
3.08.01.01.15.13	Inventarisasi Pemilikan Lahan di Provinsi NTB	Terlaksananya Inventarisasi Pemilikan Lahan di Provinsi NTB	se-NTB	2 Lokasi	25.000.000	28.000.000
3.08.01.01.15.14	Inventarisasi Pertanahan Transmigrasi di Provinsi NTB	Terlaksananya Inventarisasi Pertanahan Transmigrasi di Provinsi NTB	se-NTB	6 Lokasi	30.000.000	33.600.000
3.08.01.02	Balai Latihan Masyarakat dan Transmigrasi				663.910.650	743.579.928

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
3.08.01.02.15	Program Penempatan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Persentase Kawasan Transmigrasi	se-NTB	100%	663.910.650	743.579.928
3.08.01.02.15.15	Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan	Kota Mataram	30 Org	89.671.850	100.432.472
3.08.01.02.15.16	Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian (PHP)	Kota Mataram	60 Org	156.832.950	175.652.904
3.08.01.02.15.18	Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	Terlaksananya Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	Kota Mataram	160 Org	233.335.800	261.336.096
3.08.01.02.15.23	Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Pelatihan Budidaya Tanaman Hortikultura	Kota Mataram	30 Org	98.606.550	110.439.336
3.08.01.02.15.24	Pelatihan Ternak Unggas	Terlaksananya Pelatihan Ternak Unggas	Kota Mataram	30 Org	85.463.500	95.719.120
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG				658.472.651.028	737.489.369.151
4,01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				397.295.222.309	444.970.648.986
4.01.03	Sekretariat Daerah				330.713.299.829	370.398.895.808
4.01.03.01	Biro Umum				30.992.939.329	34.712.092.048
4.01.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terkelolanya Administrasi			14.675.488.492	16.436.547.111
4.01.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola		40000 surat	66.356.500	74.319.280
4.01.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar		49 Rekening	2.081.980.000	2.331.817.600
4.01.03.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan		23 Jenis	892.200.000	999.264.000
4.01.03.01.01.04	Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS	Terselenggaranya pemeriksaan		2504 orang	156.134.400	174.870.528
4.01.03.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan	Jasa pemeliharaan dan		89 kendaraan	174.300.000	195.216.000
4.01.03.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa tenaga administrasi		15 orang	181.586.500	203.376.880
4.01.03.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor yang		117 orang	2.825.869.000	3.164.973.280
4.01.03.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang	Kota Mataram	68 unit	27.000.000	30.240.000
4.01.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang	Kota Mataram	64 Jenis	100.160.000	112.179.200
4.01.03.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan	Kota Mataram	15 Jenis	60.200.000	67.424.000
4.01.03.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan	Jumlah komponen	Kota Mataram	38 jenis	313.535.000	351.159.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan	Kota Mataram	59 jenis	146.452.500	164.026.800
4.01.03.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Perlengkapan rumah tangga	Kota Mataram	54 jenis	166.650.000	186.648.000
4.01.03.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-	Jumlah bahan bacaan yang	Kota Mataram	5800 eksemplar	35.200.000	39.424.000
4.01.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pelayanan makanan	Kota Mataram	53794 OK	3.704.792.000	4.149.367.040
4.01.03.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah rapat koordinasi luar	Kota Mataram	65 OT	739.625.000	828.380.000
4.01.03.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jasa administrasi dan teknis	Kota Mataram	34 orang	884.377.000	990.502.240
4.01.03.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan	Jumlah rapat koordinasi dalam	Kota Mataram	462 OT	814.435.592	912.167.863
4.01.03.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan	Kota Mataram	38 orang	1.033.866.000	1.157.929.920
4.01.03.01.01.25	Pengelolaan kearsipan	Jumlah arsip / surat yang	Kota Mataram	50000 berkas	270.769.000	303.261.280
4.01.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan			12.328.769.000	13.808.221.280
4.01.03.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Gedung kantor yang dibangun	Kota Mataram	3 paket	624.690.000	699.652.800
4.01.03.01.02.04	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas	Kota Mataram	2 unit	2.905.400.000	3.254.048.000
4.01.03.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas	Kota Mataram	6 unit	2.275.710.000	2.548.795.200
4.01.03.01.02.06	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas	Jumlah perlengkapan rumah	Kota Mataram	123 jenis	568.217.000	636.403.040
4.01.03.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah meubelair kantor yang	Kota Mataram	4 buah / unit	16.000.000	17.920.000
4.01.03.01.02.11	Pengadaan UPS/ StabHizer, Komputer dan Alat-alat	Jumlah peralatan komputer	Kota Mataram	3 unit	13.000.000	14.560.000
4.01.03.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Jumlah rumah jabatan yang	Kota Mataram	3 Rumah Jabatan	1.122.996.000	1.257.755.520
4.01.03.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang	Kota Mataram	7 gedung	455.000.000	509.600.000
4.01.03.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	Jumlah kendaraan dinas yang	Kota Mataram	89 unit	1.424.485.000	1.595.423.200
4.01.03.01.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung	Kota Mataram	408 unit	115.800.000	129.696.000
4.01.03.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang	Kota Mataram	100 unit	38.600.000	43.232.000
4.01.03.01.02.32	Pemeliharaan rutin/berkala Taman; Tempat Parkir dan	Jumlah taman, tempat parkir	Kota Mataram	3 paket	616.530.000	690.513.600
4.01.03.01.02.40	Rehabilitasi sedang/berat rumah jabatan	Gedung rumah jabatan yang	Kota Mataram	6 paket	1.186.911.000	1.329.340.320
4.01.03.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Gedung kantor yang	Kota Mataram	3 paket	965.430.000	1.081.281.600
4.01.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Sumber Daya			468.615.000	524.848.800
4.01.03.01.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah sarana olahraga	Kota Mataram	336 jam	18.955.000	21.229.600
4.01.03.01.05.05	Peningkatan SDM aparatur	Jumlah aparatur yang	Kota Mataram	4 orang	25.200.000	28.224.000
4.01.03.01.05.06	Pembinaan dan Pelatihan Marching Band	Jumlah latihan dan pentas	Kota Mataram	74 kali	424.460.000	475.395.200
4.01.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Valid			407.093.200	455.944.384

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Akuntabilitas Capaian Kinerja yang terselesaikan	Kota Mataram	2 dokumen	85.600.000	95.872.000
4.01.03.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan yang terselesaikan	Kota Mataram	2 dokumen	91.000.000	101.920.000
4.01.03.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kota Mataram	6 dokumen	230.493.200	258.152.384
4.01.03.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya tata kelola barang daerah yang tertib			299.200.000	335.104.000
4.01.03.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah buku DKBMD / DKPBMD	Kota Mataram	2 dokumen	299.200.000	335.104.000
4.01.03.01.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Provinsi NTB	100%	2.813.773.637	3.151.426.473
4.01.03.01.16.06	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	Rakor staf ahli Gubernur, Bupati dan Walikota	Kota Mataram	22 kali	492.675.237	551.796.265
4.01.03.01.16.07	Pelayanan rumah tangga kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah pelayanan Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang terlaksana	Kota Mataram	12 kali	2.321.098.400	2.599.630.208
4.01.03.02	Biro Organisasi				3.799.379.450	4.255.304.984
4.01.03.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang efisien dan efektif			427.240.000	478.508.800
4.01.03.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kota Mataram	12 bulan	9.700.000	10.864.000
4.01.03.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan	Kota Mataram	5 orang	43.582.000	48.811.840
4.01.03.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Kota Mataram	12 bulan	38.818.000	43.476.160

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	12 bulan	12.500.000	14.000.000
4.01.03.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Mataram	2 jenis	18.000.000	20.160.000
4.01.03.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman kegiatan dan tamu	Kota Mataram	2 jenis	30.000.000	33.600.000
4.01.03.02.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	jumlah rapat koordinasi ke luar daerah	Kota Mataram	12 bulan	136.840.000	153.260.800
4.01.03.02.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	jumlah rapat koordinasi ke dalam daerah	Kota Mataram	10 kab/kota	137.800.000	154.336.000
4.01.03.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur yang memadai			295.227.150	330.654.408
4.01.03.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Kota Mataram	24 unit	203.227.150	227.614.408
4.01.03.02.02.28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Kota Mataram	39 unit	92.000.000	103.040.000
4.01.03.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terlaksananya pembinaan kualitas dan kapasitas aparatur			35.000.000	39.200.000
4.01.03.02.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan	Kota Mataram	5 orang	35.000.000	39.200.000
4.01.03.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan			109.700.000	122.864.000
4.01.03.02.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan	Kota Mataram	8 dokumen	38.170.000	42.750.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.02.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja dan pelaporan	Kota Mataram	2 dokumen	71.530.000	80.113.600
4.01.03.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Asset / Barang Milik Daerah			22.655.000	25.373.600
4.01.03.02.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah Asset yang dikelola	Kota Mataram	21 unit	22.655.000	25.373.600
4.01.03.02.19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Inovasi Pelayanan Publik Terimplementasi	Provinsi NTB	100%	175.055.000	196.061.600
4.01.03.02.19.01	Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Publik	1. jumlah inovasi pelayanan publik terinventarisir 2. jumlah refleksi inovasi pelayanan publik 3. jumlah penerimaan penghargaan pelayanan publik berprestasi	Kota Mataram	21 buah	175.055.000	196.061.600
4.01.03.02.21	Program Evaluasi Kinerja SKPD	Persentase Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi NTB	100%	93.500.000	104.720.000
4.01.03.02.21.01	Penilaian Kinerja SKPD	Jumlah OPD yang dinilai	Kota Mataram	45 perangkat daerah	93.500.000	104.720.000
4.01.03.02.22	Program Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Persentase Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Provinsi NTB	100%	271.550.800	304.136.896
4.01.03.02.22.01	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Tersusunnya dokumen LAKIP, Perjanjian Kinerja Rencana Kinerja Tahunan	Kota Mataram	4 dokumen	271.550.800	304.136.896
4.01.03.02.23	Program Pengembangan Sistem Analisis Formasi Jabatan dan Pendayagunaan Aparatur	Persentase Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja yang dimanfaatkan	Provinsi NTB	100%	1.575.336.500	1.764.376.880

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.02.23.01	Penyusunan Analisis Jabatan dan Formasi Jabatan	1. Jumlah Dokumen Hasil Anjab dan ABK 2. Jumlah Dokumen Pedoman Syarat Jabatan 3. Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	Kota Mataram	56 dokumen	1.495.630.000	1.675.105.600
4.01.03.02.23.03	Pengembangan Sumber Daya Aparatur	1. Jumlah Dokumen Hubungan Kerja Jabatan Struktural 2. Jumlah dokumen Hubungan Jabatan Fungsional	Kota Mataram	2 dokumen	79.706.500	89.271.280
4.01.03.02.24	Program Peningkatan Budaya Kerja	Persentase Tingkat Disiplin ASN	Provinsi NTB	100%	165.125.000	184.940.000
4.01.03.02.24.01	Peningkatan dan Pengembangan Budaya Kerja	Jumlah laporan hasil evaluasi penerapan budaya kerja ASN	Kota Mataram	2 dokumen	165.125.000	184.940.000
4.01.03.02.25	Program Reformasi Ketatalaksanaan	Persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) Perangkat Daerah yang tersedia	Provinsi NTB	100%	251.775.000	281.988.000
4.01.03.02.25.01	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) OPD	Jumlah SOP Perangkat Daerah yang terevaluasi	Kota Mataram	45 SOP	251.775.000	281.988.000
4.01.03.02.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Perangkat Daerah dan UPTD/UPTB Daerah yang tertata	Provinsi NTB	100%	377.215.000	422.480.800
4.01.03.02.27.05	Penataan Kelembagaan Daerah	Jumlah Lembaga Daerah yang ditata	Kota Mataram	88 UPTD/UPTB	292.715.000	327.840.800
4.01.03.02.27.07	Evaluasi Kelembagaan UPTD/UPTB	Jumlah UPTD/UPTB yang dievaluasi	Kota Mataram	88 UPTD/UPTB	84.500.000	94.640.000
4.01.03.03	Biro Hukum.				10.863.134.500	12.166.710.640

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Jasa Surat Menyurat			1.041.900.000	1.166.928.000
4.01.03.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Kota Mataram	15000000 thn	15.000.000	16.800.000
4.01.03.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Mataram	1 thn	16.000.000	17.920.000
4.01.03.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya jasa administrasi pengelola keuangan	Kota Mataram	12 bln	49.000.000	54.880.000
4.01.03.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	Kota Mataram	1 thn	35.000.000	39.200.000
4.01.03.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan	Kota Mataram	1 thn	74.100.000	82.992.000
4.01.03.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Mataram	12 bln	11.100.000	12.432.000
4.01.03.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makan dan Minum	Kota Mataram	1 thn	100.000.000	112.000.000
4.01.03.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terwujudnya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Mataram	1 thm	400.000.000	448.000.000
4.01.03.03.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Penyediaan Jasa Administrasi dan teknis Perkantoran	Kota Mataram	12 bln	41.700.000	46.704.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring ke Dalam Daerah	Kota Mataram	1 thn	300.000.000	336.000.000
4.01.03.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terpeliharanya sarana dan prasarana kantor			670.012.000	750.413.440
4.01.03.03.02.13	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	1 bh	472.500.000	529.200.000
4.01.03.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	1 thn	132.512.000	148.413.440
4.01.03.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya Peralatan Kantor secara Rutin/Berkala	Kota Mataram	1 thn	65.000.000	72.800.000
4.01.03.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen dan laporan SKPD			100.000.000	112.000.000
4.01.03.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Valid	Kota Mataram	1 bln	20.000.000	22.400.000
4.01.03.03.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Valid	Kota Mataram	1 bln	20.000.000	22.400.000
4.01.03.03.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Renja Rka-P 2018 dan RKA 2019	Kota Mataram	1 bln	60.000.000	67.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	tertatanya asset/barang milik daerah			12.900.000	14.448.000
4.01.03.03.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Tertibnya Penatausahaan BMD	Kota Mataram	12 bln	12.900.000	14.448.000
4.01.03.03.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah yang tertata	Provinsi NTB	100%	3.637.250.000	4.073.720.000
4.01.03.03.26.01	Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum yang terbentuk	se-NTB	10/40/900 Perda/pergub/keputusan	1.274.350.000	1.427.272.000
4.01.03.03.26.02	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Kab/Kota yang terbentuk dan monev Kab/Kota	se-NTB	50/70 Perda/perbub/perwal	1.399.500.000	1.567.440.000
4.01.03.03.26.04	Dokumentasi / Publikasi Produk Hukum Daerah	- Terdokumentasi dan terpublikasinya produk hukum kab/kota	se-NTB	10/40 perda/perbub	437.300.000	489.776.000
4.01.03.03.26.05	Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersosialisasi	se-NTB	10 perda/40 pergub bh	526.100.000	589.232.000
4.01.03.03.28	Program Bantuan Hukum	Persentase Penegakan Supremasi Hukum dan HAM	se-NTB	100%	5.401.072.500	6.049.201.200
4.01.03.03.28.01	Kerjasama Permasalahan Hukum	Jumlah Kerjasama di Pengadilan	se-NTB	13 perkara	495.537.500	555.002.000
4.01.03.03.28.02	Rencana Aksi Ham & HAKI	Terlaksananya Aksi HAM dan HAKI	se-NTB	10 kab/kota	1.240.200.000	1.389.024.000
4.01.03.03.28.03	Penyelesaian Sengketa Hukum di Pengadilan	Jumlah Sengketa Hukum Perdata/ TUN yang terselesaikan	se-NTB	17 Perkara	1.858.510.000	2.081.531.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.03.28.04	Penyelesaian Permasalahan-permasalahan Pemda	Jumlah Permasalahan Hukum Pemda yang terselesaikan	se-NTB	20 Kasus	1.406.825.000	1.575.644.000
4.01.03.03.28.05	Pengkajian Naskah MoU & Perjanjian Kerjasama	Jumlah Naskah MoU dan Perjanjian Kerjasama yang terbentuk	Provinsi NTB	80 Naskah	400.000.000	448.000.000
4.01.03.04	Biro Pemerintahan				5.446.021.000	6.099.543.520
4.01.03.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang efisien dan efektif			935.930.000	1.048.241.600
4.01.03.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	meningkatnya adm. perkantoran	Kota Mataram	250 bh/thn	7.050.000	7.896.000
4.01.03.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Meningkatnya informasi dan komunikasi kantor	Kota Mataram	1 tahun	30.000.000	33.600.000
4.01.03.04.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Lancarnya penyelenggaraan pemerintahan	Kota Mataram	17 unit	125.000.000	140.000.000
4.01.03.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Lancarnya Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Mataram	1 tahun	30.000.000	33.600.000
4.01.03.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan aparatur	Kota Mataram	1 tahun	30.000.000	33.600.000
4.01.03.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu biro	Kota Mataram	1 tahun	50.000.000	56.000.000
4.01.03.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Adanya arahan dan rekomendasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Kota Mataram	1 tahun	400.000.000	448.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.04.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi dalam penyeleng. Pemerintahan	Kota Mataram	1 tahun	250.000.000	280.000.000
4.01.03.04.01.25	Pengelola Kearsipan	terkelolanya data arsip perkantoran yang baik	Kota Mataram	1 thn	13.880.000	15.545.600
4.01.03.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya sarana dan prasarana Aparatur yang memadai			265.000.000	296.800.000
4.01.03.04.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kendaraan dinas	Kota Mataram	2 unit	40.000.000	44.800.000
4.01.03.04.02.10	Pengadaan mebeleur	Peningkatan Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana meubelair SKPD	Kota Mataram	1 paket	125.000.000	140.000.000
4.01.03.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terpeliharanya gedung perkantoran	Kota Mataram	1 thn	100.000.000	112.000.000
4.01.03.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan			183.000.000	204.960.000
4.01.03.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Peningkatan tertib administrasi pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Mataram	1 tahun	98.000.000	109.760.000
4.01.03.04.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Sebagai pedoman /acuan dalam penyusunan perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun	Kota Mataram	1 tahun	85.000.000	95.200.000
4.01.03.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Asset / Barang Milik Daerah			30.000.000	33.600.000
4.01.03.04.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Meningkatnya managemen aset dan BMD	Kota Mataram	1 tahun	30.000.000	33.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.04.16	Program Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Persentase Kecamatan dan Kelurahan yang ditingkatkan kualitasnya	Provinsi NTB	20%	708.766.000	793.817.920
4.01.03.04.16.01	Pembinaan Kinerja Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang dibina	Provinsi NTB	24 kecamatan	80.000.000	89.600.000
4.01.03.04.16.02	Pembinaan Penataan Daerah	Jumlah Kecamatan tertata yang dibina	Provinsi NTB	24 kecamatan	128.766.000	144.217.920
4.01.03.04.16.03	Lomba Kinerja dan Inovasi Kecamatan	Jumlah kecamatan yang mengikuti lomba	Provinsi NTB	10 kab/kota	500.000.000	560.000.000
4.01.03.04.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Cakupan kerjasama antar daerah	Provinsi NTB	100%	234.950.000	263.144.000
4.01.03.04.25.01	Pembentukan Kerjasama Antar Daerah dalam Penyediaan Pelayanan publik	meningkatnya kerjasama antar daerah yang mantap	Provinsi NTB	2 iuran	234.950.000	263.144.000
4.01.03.04.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase Daerah yang tertata	Provinsi NTB	18%	2.515.800.000	2.817.696.000
4.01.03.04.27.06	Pembentukan daerah otonomi baru Provinsi NTB	Jumlah DOB yang dibentuk	Provinsi NTB	3 desa	90.200.000	101.024.000
4.01.03.04.27.07	Penyelesaian administrasi kepala daerah dan DPRD Provinsi NTB dan Kab./Kota se-NTB	Jumlah administrasi yang diselesaikan	Provinsi NTB	20 SK	1.700.000.000	1.904.000.000
4.01.03.04.27.08	Penyelenggaraan administrasi pemerintahan	tersedianya rekomendasi hasil penyalarsan penyelenggaraan administrasi pemerintahan	Provinsi NTB	2 kl	82.350.000	92.232.000
4.01.03.04.27.09	Monitoring pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan	Jumlah monitoring dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dilakukan	Provinsi NTB	4 dok	120.200.000	134.624.000
4.01.03.04.27.10	Monev pelaksanaan trantib, Linmas dan Kebencanaan	Jumlah monev trantib, linmas dan kebencanaan yang dilakukan	Provinsi NTB	2 keg	195.050.000	218.456.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.04.27.11	Monev pelaksanaan penegasan batas daerah, Dt. Wilayah	Peningkatan kualitas penegasan batas daerah, data wilayah dan pulau-pulau kecil	Provinsi NTB	1 segmen batas	328.000.000	367.360.000
4.01.03.04.30	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan	Persentase Dokumen yang dihasilkan	Provinsi NTB	100%	572.575.000	641.284.000
4.01.03.04.30.01	Penyusunan LPPD Gubernur	Jumlah dokumen yang disusun	Provinsi NTB	1 dok	306.650.000	343.448.000
4.01.03.04.30.03	Peningkatan Pengembangan Kapasitas Daerah	Jumlah peserta dan unsur yang terlibat	Provinsi NTB	75 orang	107.225.000	120.092.000
4.01.03.04.30.04	Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Prov. NTB	Jumlah dokumen informasi yang diinformasikan kepada masyarakat	Provinsi NTB	1 dokumen	158.700.000	177.744.000
4.01.03.05	Biro Perekonomian				5.977.603.000	6.694.915.360
4.01.03.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kerjasama dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan bidang perekonomian baik pusat, OPD, Provinsi maupun Kabupaten	Provinsi NTB	10 Jenis	428.820.000	480.278.400
4.01.03.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jasa surat menyurat yang tersedia	Provinsi NTB	3000 Surat	5.000.000	5.600.000
4.01.03.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Provinsi NTB	- -	15.000.000	16.800.000
4.01.03.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianyaa jasa administrasi keuangan	Provinsi NTB	6 orang	69.220.000	77.526.400
4.01.03.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Provinsi NTB	10 jenis	16.200.000	18.144.000
4.01.03.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Provinsi NTB	2 Jenis	7.000.000	7.840.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bacaan dan peraturan perundang undangan	Provinsi NTB	1 jenis	15.000.000	16.800.000
4.01.03.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum biro	Provinsi NTB	200 orang	15.000.000	16.800.000
4.01.03.05.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pemerintah Pusat dengan Daerah	Provinsi NTB	10 orang	100.000.000	112.000.000
4.01.03.05.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa adminstrsi dan teknis perkantoran	Provinsi NTB	1 orang	36.400.000	40.768.000
4.01.03.05.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Selarasnya Program Pemerintah Provinsi dan daerah	Provinsi NTB	12 kali	150.000.000	168.000.000
4.01.03.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Menigkatnya fungsi kelembagaan dan capian kinerja Aparatur Pemerintah Daerah	Provinsi NTB	6 Jenis	244.000.000	273.280.000
4.01.03.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendraan dinas/ operasional	Provinsi NTB	19 unit	244.000.000	273.280.000
4.01.03.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistim pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan	Provinsi NTB	7 Laporan	136.500.000	152.880.000
4.01.03.05.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Rencana kerja SKPD	Provinsi NTB	7 Laporan	136.500.000	152.880.000
4.01.03.05.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kontribusi BUMD terhadap PAD	se-NTB	4 - 5%	1.215.272.000	1.361.104.640
4.01.03.05.17.3	Monitoring dan evaluasi Perusahaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah BUMD yang terbina	se-NTB	12 perusahaan	1.000.000.000	1.120.000.000
4.01.03.05.17.4	Monitoring dan evaluasi Lembaga Keuangan, Koperasi dan UKM	Jumlah UKM yang terbina	se-NTB	1 Dokumen	215.272.000	241.104.640

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.05.27	Program Peningkatan dan Pengembangan Produksi Daerah	Tersusunnya rumusan kebijakan (telaah staf) dalam peningkatan produksi dan nilai tambah	Provinsi NTB	6 Rumusan	1.398.018.000	1.565.780.160
4.01.03.05.27.1	Monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	Tersedianya bahan rumusan kebijakan (telaah staf) tentang perdagangan dan perindustrian	Provinsi NTB	3 Dokumen	289.468.000	324.204.160
4.01.03.05.27.2	Monitoring dan evaluasi produksi pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Tersedianya bahan rumusan kebijakan (telaah staf) tentang produksi hasil Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan (PKKP)	se-NTB	4 Dokumen	786.700.000	881.104.000
4.01.03.05.27.3	Monitoring dan evaluasi bahan galian dan energi	Laopran Koordinasi	se-NTB	5 Dokumen	321.850.000	360.472.000
4.01.03.05.28	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan, Sistem dan Prosedur dan Pengawasan	Meningkatnya kinerja PERUSDA dan BUMD sebagai sektor penyumbang PAD	se-NTB	4 Dokumen	1.000.000.000	1.120.000.000
4.01.03.05.28.1	Penataan kebijakan Perusahaan Daerah dan BUMD	Jumlah kebijakan yang tertata	se-NTB	2 Dokumen	1.000.000.000	1.120.000.000
4.01.03.05.29	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Cakupan pelaksanaan kajian investasi	se-NTB	100%	348.120.000	389.894.400
4.01.03.05.29.1	Pengembangan Investasi	Jumlah Kajian Investasi	se-NTB	4 kajian	348.120.000	389.894.400
4.01.03.05.30	Program Pengembangan Data dan Informasi Perekonomian	Tersedianya jenis data dan informasi perekonomian untuk pengambilan kebijakan	se-NTB	100%	1.206.873.000	1.351.697.760
4.01.03.05.30.1	Pendataan statistik perekonomian	Jumlah data statistik perekonomian yang tersedia	se-NTB	100 buku	399.292.000	447.207.040

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.05.30.2	Pengendalian inflasi daerah	Jumlah data inflasi yang tersedia	se-NTB	3 Dokumen	423.363.000	474.166.560
4.01.03.05.30.3	Monitoring dan evaluasi pariwisata dan perhubungan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi	se-NTB	2 Dokumen	384.218.000	430.324.160
4.01.03.06	Biro Bina Administrasi Pengendalian Pembangunan dan LPBJP				7.771.873.700	8.704.498.544
4.01.03.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kelancaran administrasi perkantoran	Kota Mataram	90 %	1.344.585.100	1.505.935.312
4.01.03.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	surat-surat dinas, undangan, dll	se-NTB	1 tahun	12.000.000	13.440.000
4.01.03.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa komunikasi, air dan listrik	Kota Mataram	1 Tahun	152.997.000	171.356.640
4.01.03.06.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	26 unit	71.500.000	80.080.000
4.01.03.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jasa pengelola administrasi keuangan	Kota Mataram	13 orang	103.807.000	116.263.840
4.01.03.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	alat tulis kantor	Kota Mataram	1 tahun	122.314.100	136.991.792
4.01.03.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya penyediaan peralatan kantor	se-NTB	10 unit	113.800.000	127.456.000
4.01.03.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan	Kota Mataram	11 exp/h	2.280.000	2.553.600
4.01.03.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	makanan dan minuman rapat	Kota Mataram	1 tahun	50.000.000	56.000.000
4.01.03.06.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	perjalanan dinas luar daerah	Luar Provinsi	1 Tahun	525.000.000	588.000.000
4.01.03.06.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	jasa adminjistrasi dan teknis perkantoran	Kota Mataram	1 orang	37.632.000	42.147.840
4.01.03.06.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	perjalanan dinas dalam daerah	se-NTB	1 Tahun	123.255.000	138.045.600
4.01.03.06.01.25	Pengelolaan kearsipan	pengelolaan arsip	Kota Mataram	3000 berkas	30.000.000	33.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat kelancaran tugas aparatur	Kota Mataram	85 %	183.595.600	205.627.072
4.01.03.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	pemeliharaan kendaraan dinas	Kota Mataram	30 unit	183.595.600	205.627.072
4.01.03.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya sumber daya manusia yang berkualitas	Luar Provinsi	20 %	50.000.000	56.000.000
4.01.03.06.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Aparatur sipil negara yang berkualitas	Kota Mataram, Luar Provinsi	10 org	50.000.000	56.000.000
4.01.03.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Laporan Kinerja Perangkat Daerah dan Rencana program/kegiatan	Kota Mataram	Nilai B	81.000.000	90.720.000
4.01.03.06.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	LKJIP	Kota Mataram	1 dok	21.000.000	23.520.000
4.01.03.06.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Renja, RKA, DPA, RKAP, DPPA	Kota Mataram	5 dok	60.000.000	67.200.000
4.01.03.06.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersedianya Dokumen Standar Harga	Provinsi NTB	Ada	129.332.000	144.851.840
4.01.03.06.17.02	Penyusunan standar satuan harga	Dokumen standar satuan harga	Kota Mataram	3 dok	116.582.000	130.571.840
4.01.03.06.17.16	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	pencatatan manajemen aset/barang daerah	Kota Mataram	1 dok	12.750.000	14.280.000
4.01.03.06.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Tersusun dan Terintegrasinya program-program Pemerintah Daerah dalam rangka pengawasan pembangunan	Provinsi NTB	Ada	530.940.000	594.652.800
4.01.03.06.25.11	Pembinaan administrasi pembangunan ekonomi kabupaten/kota	Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan	se-NTB	1 Dok	88.490.000	99.108.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.06.25.12	Pembinaan administrasi pembangunan sosial budaya kabupaten/kota	Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan	se-NTB	1 Dok	88.490.000	99.108.800
4.01.03.06.25.13	Pembinaan administrasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten/kota	Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan	se-NTB	1 Dok	88.490.000	99.108.800
4.01.03.06.25.14	Pembinaan administrasi pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup kabupaten/kota	Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan	se-NTB	1 Dok	88.490.000	99.108.800
4.01.03.06.25.15	Pembinaan administrasi pembangunan perhubungan dan tata ruang kabupaten/kota	Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan	se-NTB	1 Dok	88.490.000	99.108.800
4.01.03.06.25.18	Pembinaan administrasi pembangunan kesejahteraan rakyat kabupaten/kota	Dokumen/laporan hasil pembinaan sebagai bahan rekomendasi pimpinan	se-NTB	1 Dok	88.490.000	99.108.800
4.01.03.06.38	Program Percepatan Pembangunan	Rekomendasi untuk peningkatan kualitas pembangunan provinsi NTB	Provinsi NTB	Ada	882.971.000	988.927.520
4.01.03.06.38.1	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik	Laporan Monev pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik	Provinsi NTB	1 Dokumen	882.971.000	988.927.520
4.01.03.06.39	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase program/kegiatan yang terlaksana	se-NTB	85 %	4.569.450.000	5.117.784.000
4.01.03.06.39.13	Pengendalian pelaksanaan pembangunan provinsi NTB	laporan bulanan, triwulanan dan tahunan	Kota Mataram	3 dok	535.765.000	600.056.800
4.01.03.06.39.24	Pengendalian administrasi Pembangunan perumahan dan kawasan Permukiman	rekomendasi hasil monev pembangunan perumahan dan kawasan permukiman	se-NTB	1 dok	240.000.000	268.800.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.06.39.27	Pengendalian administrasi Pembangunan sumber daya air dan lingkungan hidup	rekomendasi hasil monev pembangunan Sumber daya air dan Lingkungan hidup	se-NTB	1 dok	180.000.000	201.600.000
4.01.03.06.39.28	Pengendalian administrasi Pembangunan perhubungan dan tata ruang	rekomendasi hasil monev pembangunan perhubungan dan tata ruang	se-NTB	1 dok	180.000.000	201.600.000
4.01.03.06.39.29	Pengendalian administrasi pembangunan ekonomi	rekomendasi hasil monev pembangunan ekonomi	se-NTB	1 dok	190.000.000	212.800.000
4.01.03.06.39.30	Pengendalian administrasi pembangunan sosial budaya	rekomendasi hasil monev pembangunan sosial budaya	se-NTB	1 dok	190.000.000	212.800.000
4.01.03.06.39.31	Pengendalian dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	kualitas layanan pengadaan barang/jasa pemerintah	Kota Mataram	85 %	2.531.330.000	2.835.089.600
4.01.03.06.39.32	Pemantauan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Prov. NTB	Terlaksanya pengendalian kegiatan pembangunan yang didanai DAK	se-NTB	4 Dok	131.670.000	147.470.400
4.01.03.06.39.33	Pengendalian administrasi pembangunan kesejahteraan rakyat	rekomendasi hasil monev pembangunan kesejahteraan rakyat	se-NTB	1 dok	190.000.000	212.800.000
4.01.03.06.39.34	Pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah	jumlah pembinaan pengadaan barang/jasa pemerintah	Provinsi NTB	3 kali	102.330.000	114.609.600
4.01.03.06.39.35	Pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	jumlah sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Provinsi NTB	2 Sistem	98.355.000	110.157.600
4.01.03.07	Biro Kesejahteraan Rakyat				22.005.528.500	24.646.191.920

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kelancaran administrasi Perkantoran urusan rumah tangga Biro Kesra serta tercapainya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat..			760.240.000	851.468.800
4.01.03.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Terwujudnya kelancaran administrasi surat menyurat Biro Kesra..	Kota Mataram	1/2000 Tahun/Surat	5.750.000	6.440.000
4.01.03.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya pelayanan maksimal kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait	Kota Mataram	2 Jaringan	12.000.000	13.440.000
4.01.03.07.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya Peralatan dan perlengkapan kantor yang baik dan siap pakai..	Kota Mataram	30 UNIT	55.000.000	61.600.000
4.01.03.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terwujudnya pengelolaan keuangan OPD yang akuntabel, bebas dari salah saji yang material.	Kota Mataram	12 Laporan	61.464.000	68.839.680
4.01.03.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terwujudnya kelancaran administrasi Perkantoran yang baik..	Kota Mataram	1 TAHUN	34.133.000	38.228.960
4.01.03.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang baik dan sempurna.	Kota Mataram	1 Tahun	41.425.000	46.396.000
4.01.03.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terwujudnya ketepatan dan kecepatan penyelesaian tugas kegiatan OPD.	Kota Mataram	10 UNIT	101.250.000	113.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ASN	Kota Mataram	60 Expl	15.000.000	16.800.000
4.01.03.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Peningkatan pelayanan ASN dan Tamu Biro / OPD	se-NTB	12 Bulan	33.200.000	37.184.000
4.01.03.07.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terselenggaranya konsultasi program kegiatan ke Pusat / Provinsi lainnya dengan baik	Luar Provinsi	18 Kali	114.666.000	128.425.920
4.01.03.07.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Terwujudnya peningkatan kinerja, disiplin PTT, Tenaga Kontrak Biro yang Profesional	Kota Mataram	1 Tahun	102.900.000	115.248.000
4.01.03.07.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pembinaan, kemitraan, sinergitas Provinsi dan Kabupaten/Kota se NTB.	se-NTB	12 Bulan	183.452.000	205.466.240
4.01.03.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai..			107.424.000	120.314.880
4.01.03.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Peningkatan kelancaran mobilitas dan terpeliharanya kendaraan dinas / Operasional Biro Kesra	se-NTB	12 Bulan	107.424.000	120.314.880
4.01.03.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Sumber Daya Aparatur Profesional			60.000.000	67.200.000
4.01.03.07.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis formal dan informal.	Luar Provinsi	5 Orang	60.000.000	67.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Valid..			107.378.000	120.263.360
4.01.03.07.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja OPD / LAKIP	Kota Mataram	1 Dokumen	19.975.000	22.372.000
4.01.03.07.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan Keuangan OPD	Kota Mataram	1 Dokumen	19.952.500	22.346.800
4.01.03.07.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	RKA, RKAP OPD	Kota Mataram	2 Dokumen	67.450.500	75.544.560
4.01.03.07.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertibnya Manajemen Tata kelola keuangan dan barang milik daerah (Asset) yang baik			13.978.000	15.655.360
4.01.03.07.07.01	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Tertatannya dengan baik Asset / Barang milik Daerah	Kota Mataram	1 Tahun/ Dokumen	13.978.000	15.655.360
4.01.03.07.18	Program Peningkatan Peranserta Kepemudaan	Persentase organisasi Pemuda yang aktif	se-NTB	75%	340.729.500	381.617.040
4.01.03.07.18.02	Pemuda Kreatif dan Berprestasi	Terbinanya Pemuda Kreatif dan Berprestasi yang handal dan Profesional dibidangnya.	se-NTB	1 Kegiatan	340.729.500	381.617.040
4.01.03.07.31	Program Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Persentase layanan hari besar keagamaan	se-NTB	100%	19.376.166.500	21.701.306.480
4.01.03.07.31.02	Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI)	Peningkatan wawasan, Iman dan Taqwa Masyarakat.	Kota Mataram, Provinsi NTB	8 Kegiatan	447.954.500	501.709.040
4.01.03.07.31.04	Pemberangkatan Jamaah Calon Haji dan Pemulangan Jamaah Haji	Pelayanan bagi Calon Jamaah Haji dan Jamaah Haji Daerah yang maksimal	Luar Provinsi, Provinsi NTB	2 Kegiatan	1.061.190.000	1.188.532.800
4.01.03.07.31.06	Pelaksanaan STQ / MTQ Nasional / Provinsi	Terlaksananya STQ/MTQ, Provinsi/Nasional/Internasional dengan baik	Luar Provinsi, se-NTB	2 Kegiatan	7.916.359.000	8.866.322.080
4.01.03.07.31.07	Diklat Pengelolaan Manajemen Masjid	Manajemen Pengelolaan Masjid yang baik	Provinsi NTB	5 Kegiatan	9.102.705.000	10.195.029.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.07.31.09	Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kerukunan dan keharmonisan Umat bergama.	Provinsi NTB	50 Orang	409.255.500	458.366.160
4.01.03.07.31.10	Peningkatan Iman dan Taqwa Aparatur	Peningkatan Iman dan Taqwa Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi NTB	Provinsi NTB	750 Orang	68.207.500	76.392.400
4.01.03.07.31.11	Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Keuangan/Belanja Hibah dan Bantuan Sosial di Bidang Keagamaan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Keagamaan	Provinsi NTB	2000 Proposal	370.495.000	414.954.400
4.01.03.07.36	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penanganan Penyakit Menular dan Tidak menular	se-NTB	100%	232.870.500	260.814.960
4.01.03.07.36.01	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular dan Mewabah	Terkoordinirnya program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan mewabah	se-NTB	2 Kegiatan	232.870.500	260.814.960
4.01.03.07.38	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	se-NTB	52%	54.977.500	61.574.800
4.01.03.07.38.04	Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Perlindungan Perempuan dan Anak	se-NTB	1 Kegiatan	54.977.500	61.574.800
4.01.03.07.44	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (sesuaikan dengan DISNAKER)	Provinsi NTB		48.377.500	54.182.800
4.01.03.07.44.01	Peningkatan Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Terlaksananya Rapat Koordinasi pembelaan terhadap TKI-NTB formal, informal yang bermasalah	Provinsi NTB	1 Kegiatan	48.377.500	54.182.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.07.46	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat			311.132.500	348.468.400
4.01.03.07.46.02	Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan melalui monitoring dan evaluasi partisipasi masyarakat	Termonitornya Program Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	se-NTB	1 Kegiatan	47.827.500	53.566.800
4.01.03.07.46.03	Penilaian Lomba Sekolah Sehat (LSS)	Terlaksananya Penilaian Lomba Sekolah Sehat Provinsi	se-NTB	40 Sekolah	263.305.000	294.901.600
4.01.03.07.47	Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani			47.877.500	53.622.800
4.01.03.07.47.01	Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan	Meningkatnya pelayanan yang berdayaguna dan berhasilguna terhadap Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial.	se-NTB	1 Kegiatan	47.877.500	53.622.800
4.01.03.07.48	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk HIV/AIDS	Menurunnya angka penggunaan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			544.377.000	609.702.240
4.01.03.07.48.01	Pencegahan Pemberantasan Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Terwujudnya system penanggulangan peredaran Narkoba	se-NTB	1 Kegiatan	155.474.500	174.131.440
4.01.03.07.48.02	Penguatan kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA)	Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS	se-NTB	1 Kegiatan	388.902.500	435.570.800
4.01.03.08	Biro Humas dan Protokol				243.856.820.350	273.119.638.792
4.01.03.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terkelolanya Administrasi Perkantoran yang Baik			2.740.815.550	3.069.713.416
4.01.03.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Kota Mataram	200 surat	42.400.000	47.488.000
4.01.03.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening yang terbayar	Kota Mataram	7 rekening	172.000.000	192.640.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.08.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa tenaga administrasi keuangan yang tersedia	Kota Mataram	7 orang	87.600.000	98.112.000
4.01.03.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kota Mataram	1 tahun	158.615.400	177.649.248
4.01.03.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Mataram	95 %	68.000.000	76.160.000
4.01.03.08.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Kota Mataram	8 paket	223.250.150	250.040.168
4.01.03.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Kota Mataram	3 paket	495.350.000	554.792.000
4.01.03.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah pelayanan makanan dan minuman yang disediakan	Kota Mataram	1 tahun	175.000.000	196.000.000
4.01.03.08.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang terlaksana	Luar Provinsi	20 ok	500.000.000	560.000.000
4.01.03.08.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi dan Teknis yang tersedia	Kota Mataram	2 orang	68.600.000	76.832.000
4.01.03.08.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah rapat koordinasi dalam daerah yang terlaksana	se-NTB	100 ok	750.000.000	840.000.000
4.01.03.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur yang Memadai			937.600.000	1.050.112.000
4.01.03.08.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang tersedia	Kota Mataram	5 unit	451.350.000	505.512.000
4.01.03.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	Kota Mataram	1 tahun	400.000.000	448.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.08.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Kota Mataram	50 unit	86.250.000	96.600.000
4.01.03.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya Sumber Daya Aparatur Profesional			210.425.000	235.676.000
4.01.03.08.05.05	Peningkatan SDM aparatur	Jumlah Peserta yang mengikuti	Kota Mataram	85 ok	210.425.000	235.676.000
4.01.03.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang Valid			179.800.000	201.376.000
4.01.03.08.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan yang terselesaikan	Kota Mataram	2 dok	62.400.000	69.888.000
4.01.03.08.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Kota Mataram	5 dpk	117.400.000	131.488.000
4.01.03.08.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya tata kelola barang daerah yang tertib			22.725.800	25.452.896
4.01.03.08.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Terwujudnya tata kelola barang daerah yang tertib	Kota Mataram	1 dok	22.725.800	25.452.896
4.01.03.08.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Luar Provinsi, Provinsi NTB	100 %	59.470.764.000	66.607.255.680
4.01.03.08.16.01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	Terlaksananya Dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan/anggota organisasi sosial kemasyarakatan	Kota Mataram	14 keg	54.961.714.000	61.557.119.680
4.01.03.08.16.02	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	Terlaksananya penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen luar negeri	Kota Mataram	50 kali	680.000.000	761.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.03.08.16.08	Pelayanan kedinasan kepada gubernur dan wakil gubernur	Terlaksananya layanan ekspresif kepada Gubernur/Wakil Gubernur	Kota Mataram	70 kali	3.000.000.000	3.360.000.000
4.01.03.08.16.09	Pemantapan Pelayanan Protokoler	Terkoordinasinya Acara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Mataram	10 Kali	829.050.000	928.536.000
4.01.03.08.50	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Mass Media	Meningkatnya jumlah Media untuk penyebaran informasi pembangunan NTB ke masyarakat	Provinsi NTB	10%	3.149.990.000	3.527.988.800
4.01.03.08.50.3	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Tersedianya alat studio dan komunikasi	Kota Mataram	5 paket	418.150.000	468.328.000
4.01.03.08.50.5	Pemantapan komunikasi dan informasi	Terlaksananya pemantapan komunikasi dan informasi	Kota Mataram	35 keg	2.731.840.000	3.059.660.800
4.01.03.08.51	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	Tersebarluasnya informasi publik terkait program pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Media Cetak dan Elektronik baik lokal dan nasional	Luar Provinsi, Provinsi NTB	10%	177.144.700.000	198.402.064.000
4.01.03.08.51.01	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Tercapainya Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Kota Mataram	800 kali	177.144.700.000	198.402.064.000
4.01.04	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				61.266.836.900	68.618.857.328
4.01.04.01	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah				61.266.836.900	68.618.857.328
4.01.04.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			4.681.911.100	5.243.740.432
4.01.04.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat keluar, surat masuk, undangan dan dokumen lainnya	Kota Mataram	5000 Surat	5.756.000	6.446.720

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.04.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jasa telepon/ internet,air,listrik dan internet yang tersedia	Kota Mataram, se-NTB	45 rekening	1.084.823.000	1.215.001.760
4.01.04.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jasa pengelola administrasi keuangan SKPD	Kota Mataram	10 orang	96.133.300	107.669.296
4.01.04.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa kebersihan kantor yang tersedia	Kota Mataram	56 orang	1.265.669.300	1.417.549.616
4.01.04.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	Kota Mataram	1 tahun	251.207.000	281.351.840
4.01.04.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetak dan penggandaan	Kota Mataram	1 tahun	38.600.000	43.232.000
4.01.04.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kota Mataram	1 tahun	55.000.000	61.600.000
4.01.04.01.01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (jenis)	Kota Mataram	10 jenis	30.000.000	33.600.000
4.01.04.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bahan bacaan yang tersedia (jenis)	Kota Mataram	2 jenis	220.757.500	247.248.400
4.01.04.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman (tahun)	Kota Mataram	1 tahun	460.000.000	515.200.000
4.01.04.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah perjalanan dinas luar daerah aparatur (tahun)	Luar Provinsi	1 tahun	500.000.000	560.000.000
4.01.04.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jasa tenaga administrasi dan teknis perkantoran yang tersedia (orang)	Kota Mataram	3 orang	97.965.000	109.720.800
4.01.04.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jasa keamanan kantor yang tersedia	Kota Mataram	25 orang	576.000.000	645.120.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.04.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana			1.944.050.000	2.177.336.000
4.01.04.01.02.20	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	jumlah rumah jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala	Kota Mataram	4 unit	360.000.000	403.200.000
4.01.04.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Kota Mataram	2 unit	210.000.000	235.200.000
4.01.04.01.02.23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	jumlah mobil jabatan yang dipelihara secara rutin/berkala	Kota Mataram	4 unit	210.000.000	235.200.000
4.01.04.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara secara rutin/berkala	Kota Mataram	74 unit	745.050.000	834.456.000
4.01.04.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	jumlah peralatan kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	Kota Mataram	5 jenis	419.000.000	469.280.000
4.01.04.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas aparatur			172.917.500	193.667.600
4.01.04.01.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya		136 orang	172.917.500	193.667.600
4.01.04.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen capaian kinerja dan keuangan			200.523.300	224.586.096
4.01.04.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB	Kota Mataram	1 dokumen	32.343.000	36.224.160
4.01.04.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Kota Mataram	1 dokumen	58.928.300	65.999.696

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.04.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	jumlah rencana kerja dan anggaran yang disusun	Kota Mataram	3 dokumen	109.252.000	122.362.240
4.01.04.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah laporan asset yang dikelola			23.335.000	26.135.200
4.01.04.01.07.01	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah laporan asset	Kota Mataram	1 laporan	23.335.000	26.135.200
4.01.04.01.15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat	Provinsi NTB	100%	54.244.100.000	60.753.392.000
4.01.04.01.15.01	Penyusunan Peraturan Daerah	jumlah peraturan daerah yang dihasilkan	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, se-NTB	12 Perda	428.850.000	480.312.000
4.01.04.01.15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Jumlah hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Kota Mataram	480 orang	50.000.000	56.000.000
4.01.04.01.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	jumlah rapat alat kelengkapan dewan	Kota Mataram	252 kali	3.031.000.000	3.394.720.000
4.01.04.01.15.04	Rapat-rapat paripurna	jumlah rapat paripurna	Kota Mataram	20 kali	522.000.000	584.640.000
4.01.04.01.15.05	Kegiatan reses	jumlah kegiatan reses anggota DPRD	se-NTB	3 kali	12.316.950.000	13.794.984.000
4.01.04.01.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	jumlah kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Dalam, Luar Daerah dan Luar Negeri	Luar Provinsi, se-NTB	3250 orang	31.830.300.000	35.649.936.000
4.01.04.01.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	jumlah bimtek/workshop/pelatihan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Luar Provinsi	3 bimtek/workshop	4.637.700.000	5.194.224.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.04.01.15.08	Publikasi Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	jumlah sosialisasi/publikasi kegiatan DPRD	se-NTB	32 kali	1.427.300.000	1.598.576.000
4.01.05	Badan Penghubung Daerah				5.315.085.580	5.952.895.850
4.01.05.01	Badan Penghubung Daerah				5.315.085.580	5.952.895.850
4.01.05.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran			2.981.903.580	3.339.732.010
4.01.05.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	layanan surat menyurat yang tersedia	Luar Provinsi	1 tahun	41.500.000	46.480.000
4.01.05.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jasa Komunikasi sumber daya air, listrik dan internet yang tersedia	Luar Provinsi	1 tahun	596.000.000	667.520.000
4.01.05.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya tenaga administrasi keuangan	Luar Provinsi	12 bulan	96.239.900	107.788.688
4.01.05.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya kebersihan kantor	Luar Provinsi	12 bulan	840.197.000	941.020.640
4.01.05.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	Luar Provinsi	1 tahun	86.384.400	96.750.528
4.01.05.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Luar Provinsi	1 tahun	27.672.000	30.992.640
4.01.05.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor	Luar Provinsi	1 tahun	33.036.000	37.000.320
4.01.05.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Luar Provinsi	1 tahun	7.000.000	7.840.000
4.01.05.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	Luar Provinsi	1 tahun	530.720.000	594.406.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.05.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	terselenggaranya penyelarasan program pemerintah pusat dan daerah	Luar Provinsi	1 tahun	60.729.000	68.016.480
4.01.05.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	tersedianya tenaga administrasi dan teknis kantor	Luar Provinsi	1 tahun	311.200.000	348.544.000
4.01.05.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	terselenggaranya penyelarasan program pemerintah provinsi dan kabupaten/kota	Luar Provinsi	1 tahun	351.225.280	393.372.314
4.01.05.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur			1.300.122.000	1.456.136.640
4.01.05.01.02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	tersedianya peralatan gedung kantor	Luar Provinsi	64 unit	55.430.000	62.081.600
4.01.05.01.02.15	Pengadaan Gedung Kantor	tersedianya gedung kantor	Luar Provinsi	3 unit	180.700.000	202.384.000
4.01.05.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luar Provinsi	3 unit	300.000.000	336.000.000
4.01.05.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Luar Provinsi	20 unit	644.142.000	721.439.040
4.01.05.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Luar Provinsi	100 unit	119.850.000	134.232.000
4.01.05.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	terlaksananya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			7.200.000	8.064.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.01.05.01.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Luar Provinsi	1 tahun	7.200.000	8.064.000
4.01.05.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	terlaksananya pelaporan capaian kinerja dan keuangan			111.446.000	124.819.520
4.01.05.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	terselenggaranya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Luar Provinsi	1 dokumen	18.942.000	21.215.040
4.01.05.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	terselenggaranya pelaporan keuangan akhir tahun	Luar Provinsi	1 dokumen	18.573.000	20.801.760
4.01.05.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	terlenggaranya penyusunan rencana kerja perangkat daerah	Luar Provinsi	4 dokumen	73.931.000	82.802.720
4.01.05.01.16	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan-kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Luar Provinsi	4 kegiatan	220.814.000	247.311.680
4.01.05.01.16.01	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	terselenggaranya dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ormas organisasi sosial dan kemasyarakatan	Luar Provinsi	4 kegiatan	220.814.000	247.311.680
4.01.05.01.46	Program Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara	Jumlah kegiatan penyebaran informasi dan promosi potensi daerah NTB	Luar Provinsi	13 kegiatan	693.600.000	776.832.000
4.01.05.01.46.01	Pelaksanaan Promosi dan Informasi Potensi Daerah	terselenggaranya promosi pariwisata daerah NTB	Luar Provinsi	20 kegiatan	693.600.000	776.832.000
4,02	PENGAWASAN				12.876.114.000	14.421.247.680

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.02.01	Inspektorat				12.876.114.000	14.421.247.680
4.02.01.01	Inspektorat				12.876.114.000	14.421.247.680
4.02.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Volume dan Kualitas Pelayanan			4.629.014.500	5.184.496.240
4.02.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Barang / Jasa yang diadakan	Kota Mataram	1 Tahun	79.035.000	88.519.200
4.02.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Item yang dibayarkan	Kota Mataram	1 Tahun	250.402.000	280.450.240
4.02.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Item Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	1 Tahun	183.614.000	205.647.680
4.02.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Item Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kota Mataram	1 Tahun	76.175.800	85.316.896
4.02.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Item Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	193.694.600	216.937.952
4.02.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Item Penyediaan Alat Tulis Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	191.635.900	214.632.208
4.02.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Item Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Mataram	1 Tahun	139.238.000	155.946.560
4.02.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Mataram	1 Tahun	16.583.000	18.572.960
4.02.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Item Penyediaan Makanan dan Minuman	Kota Mataram	1 Tahun	135.000.000	151.200.000
4.02.01.01.01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah Kegiatan Rapat / Konsultasi	Luar Provinsi	1 Tahun	393.000.000	440.160.000
4.02.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan	se-NTB	1 Tahun	240.636.200	269.512.544

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.02.01.01.01.27	Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT, dan Honorer Daerah	Jumlah Kegiatan	se-NTB	1 Tahun	2.730.000.000	3.057.600.000
4.02.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Ketersediaan Perlengkapan Gedung Kantor			395.381.000	442.826.720
4.02.01.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Barang/Jasa yang diadakan	Kota Mataram	1 Tahun	119.381.000	133.706.720
4.02.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Item Kegiatan	Kota Mataram	1 Tahun	215.000.000	240.800.000
4.02.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah Barang yang dilakukan pemeliharaan	Kota Mataram	1 Tahun	61.000.000	68.320.000
4.02.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Pegawai Mengikuti Kegiatan Imtaq dan Senam			102.200.000	114.464.000
4.02.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Jumlah Kegiatan	Kota Mataram	1 Tahun	3.900.000	4.368.000
4.02.01.01.05.06	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan	Kota Mataram	1 Tahun	98.300.000	110.096.000
4.02.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Kategori Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja SKPD			155.713.000	174.398.560
4.02.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Kota Mataram	1 Tahun	28.645.000	32.082.400
4.02.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan	Kota Mataram	1 Tahun	73.920.000	82.790.400
4.02.01.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan	Kota Mataram	1 Tahun	53.148.000	59.525.760
4.02.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan aset/barang milik daerah secara efektif			36.928.000	41.359.360
4.02.01.01.07.01	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	Jumlah Dokmen Laporan	Kota Mataram	1 Tahun	36.928.000	41.359.360

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.02.01.01.21	Program Peningkatan Profesionalisme APIP	Persentase Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bersertifikat auditor dan P2UPD	Provinsi NTB	60%	290.070.000	324.878.400
4.02.01.01.21.01	Pelatihan Pengembangan APIP	Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat	Luar Provinsi	1 Tahun	240.740.000	269.628.800
4.02.01.01.21.02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Bimtek	se-NTB	1 Tahun	49.330.000	55.249.600
4.02.01.01.22	Program Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah	Peringkat Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Provinsi NTB	Peringkat 6	222.251.200	248.921.344
4.02.01.01.22.01	Evaluasi LPPD Kab/Kota	Jumlah Kegiatan	Kota Mataram	1 Tahun	189.435.600	212.167.872
4.02.01.01.22.02	Pemeriksaan Kinerja SKPD	Jumlah Kegiatan	Kota Mataram	1 Tahun	32.815.600	36.753.472
4.02.01.01.23	Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemda	Provinsi NTB	BB (Sangat Baik)	360.748.900	404.038.768
4.02.01.01.23.01	Review Lakip Pemda	Jumlah Kegiatan	se-NTB	1 Tahun	25.045.300	28.050.736
4.02.01.01.23.02	Evaluasi Lakip PD	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Evaluasi SAKIP	se-NTB	1 Tahun	126.765.300	141.977.136
4.02.01.01.23.03	Fasilitasi kegiatan RB	Jumlah Kegiatan	se-NTB	1 Tahun	18.275.600	20.468.672
4.02.01.01.23.04	Pembangunan Zona Integritas pada PD	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pembangunan Zona Integritas	se-NTB	1 Tahun	18.245.300	20.434.736
4.02.01.01.23.05	Penilaian PD	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan Penilaian	se-NTB	1 Tahun	22.880.300	25.625.936
4.02.01.01.23.06	Reviu RPJMD	Jumlah Kegiatan	se-NTB	1 Tahun	24.480.300	27.417.936
4.02.01.01.23.07	Review Renstra	Jumlah Kegiatan	Kota Mataram	1 Tahun	25.045.300	28.050.736
4.02.01.01.23.08	Review Renja	Jumlah Kegiatan	Kota Mataram	1 Tahun	24.945.300	27.938.736
4.02.01.01.23.09	Review RKPD	Jumlah Kegiatan	Kota Mataram	1 Tahun	25.075.600	28.084.672
4.02.01.01.23.10	Review KUA PPAS	Jumlah Kegiatan	Kota Mataram	1 Tahun	24.945.300	27.938.736

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.02.01.01.23.11	Review RKA	Jumlah Kegiatan	Kota Mataram	1 Tahun	25.045.300	28.050.736
4.02.01.01.24	Program Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	Provinsi NTB	85%	3.107.872.600	3.480.817.312
4.02.01.01.24.01	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	se-NTB	10 Kegiatan	303.655.600	340.094.272
4.02.01.01.24.02	Pemeriksaan Tujuan Tertentu / Khusus	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pemeriksaan Tujuan tertentu/Khusus	se-NTB	10 Tahun	303.175.600	339.556.672
4.02.01.01.24.03	Fasilitasi Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan KKN	Jumlah Kegiatan	se-NTB	1 Tahun	429.789.500	481.364.240
4.02.01.01.24.04	Kegiatan SABER PUNGLI	Jumlah Kegiatan	se-NTB	1 Tahun	900.652.500	1.008.730.800
4.02.01.01.24.05	Unit Gratifikasi	Jumlah Kegiatan	se-NTB	1 Tahun	18.411.900	20.621.328
4.02.01.01.24.06	Kegiatan TP4D	Jumlah Kegiatan Pendampingan	se-NTB	1 Tahun	1.152.187.500	1.290.450.000
4.02.01.01.25	Program Penjamin Mutu Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Provinsi NTB	WTP	1.673.971.300	1.874.847.856
4.02.01.01.25.01	Asistensi Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Asestensi	se-NTB	1 Tahun	75.798.000	84.893.760
4.02.01.01.25.02	Reviu Atas Laporan Keuangan	Jumlah Kegiatan	se-NTB	1 Tahun	26.818.000	30.036.160
4.02.01.01.25.03	Pemeriksaan Reguler/ Audit Kinerja (Audit Operasional)	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan pemeriksaan reguler/audit kinerja (Audit Operasional)	se-NTB	1 Tahun	1.571.355.300	1.759.917.936
4.02.01.01.26	Program Peningkatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Provinsi NTB	70%	1.664.684.100	1.864.446.192
4.02.01.01.26.01	Kegiatan Gelas Pengawasan Daerah (LARWASDA)	Jumlah Kegiatan	se-NTB	1 Tahun	26.670.300	29.870.736
4.02.01.01.26.02	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Kegiatan Tindak Lanjut Pengawasan	Luar Provinsi, se-NTB	1 Tahun	709.100.000	794.192.000
4.02.01.01.26.03	Kegiatan TPTGR	Jumlah Kegiatan	se-NTB	1 Tahun	621.397.600	695.965.312

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.02.01.01.26.04	Kegiatan Sidang Majelis TPTGR	Jumlah Kegiatan	se-NTB	1 Tahun	307.516.200	344.418.144
4.02.01.01.27	Program Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Provinsi NTB	Level Maturitas SPIP Pemda	Provinsi NTB	Level 4	165.568.800	185.437.056
4.02.01.01.27.01	Pendampingan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan Penerapan SPIP	se-NTB	1 Tahun	58.327.600	65.326.912
4.02.01.01.27.02	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Penilaian SPIP	se-NTB	1 Tahun	58.090.600	65.061.472
4.02.01.01.27.03	Evaluasi PUG	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi PUG	se-NTB	1 Tahun	49.150.600	55.048.672
4.02.01.01.28	Program Peningkatan Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP	Provinsi NTB	Level 4	71.710.600	80.315.872
4.02.01.01.28.01	Telaahan Sejawat	Jumlah Kegiatan Telaah Sejawat	se-NTB	1 Tahun	71.710.600	80.315.872
4,03	PERENCANAAN				40.779.420.400	45.672.950.848
4.03.01	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				44.268.263.000	49.580.454.560
4.03.01.01	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				44.268.263.000	49.580.454.560
4.03.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran			7.348.760.004	8.230.611.204
4.03.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	tersedianya layanan surat menyurat	Kota Mataram	2000 surat	39.070.700	43.759.184
4.03.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Kota Mataram	1 tahun	427.500.000	478.800.000
4.03.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	1 tahun	106.972.400	119.809.088
4.03.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor	Kota Mataram	1 tahun	332.873.000	372.817.760

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.03.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Kota Mataram	1 tahun	14.592.000	16.343.040
4.03.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	90 buku	16.500.000	18.480.000
4.03.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terfasilitasinya sumber penerangan dan peralatan listrik gedung kantor	Kota Mataram	1 unit gedung kantor	19.269.000	21.581.280
4.03.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	36 unit/buah/paket	274.250.000	307.160.000
4.03.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	tersedianya makanan dan minuman	Kota Mataram	1 tahun	157.000.000	175.840.000
4.03.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kota Mataram	75 kali	926.550.904	1.037.737.012
4.03.01.01.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran	Kota Mataram	126 orang	4.767.432.000	5.339.523.840
4.03.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya rapat koordinasi dengan kabupaten/kota	Kota Mataram	68 kali	266.750.000	298.760.000
4.03.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur			2.077.172.000	2.326.432.640
4.03.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Umur fungsional gedung kantor meningkat	Kota Mataram	1 unit gedung kantor	458.000.000	512.960.000
4.03.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Umur fungsional kendaraan dinas/operasional meningkat	Kota Mataram	76 unit	548.522.000	614.344.640
4.03.01.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Umur fungsional perlengkapan gedung kantor meningkat/tahun	Kota Mataram	75 unit	48.950.000	54.824.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.03.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Umur fungsional peralatan kantor meningkat/tahun	Kota Mataram	184 unit	74.250.000	83.160.000
4.03.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	Kota Mataram	1 unit gedung kantor	947.450.000	1.061.144.000
4.03.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur			209.485.000	234.623.200
4.03.01.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya pemahaman peserta rapat koordinasi tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP)	Kota Mataram	75 orang	184.625.000	206.780.000
4.03.01.01.05.04	Peningkatan mental dan fisik aparatur	Terbinanya mental dan fisik aparatur	Kota Mataram	126 orang	24.860.000	27.843.200
4.03.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya efektifitas pelaporan kinerja dan keuangan			56.145.000	62.882.400
4.03.01.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Bappeda Provinsi NTB Tahun 2018	Kota Mataram	1 dokumen	56.145.000	62.882.400
4.03.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Terwujudnya manajemen aset yang efektif	Provinsi NTB	100%	96.050.000	107.576.000
4.03.01.01.07.01	Peningkatan Manajemen Asset/Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Aset Tahunan Bappeda Provinsi NTB Tahun 2018	Kota Mataram	1 dokumen	96.050.000	107.576.000
4.03.01.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi	Persentase ketersediaan data sektoral	Provinsi NTB	35%	931.277.300	1.043.030.576
4.03.01.01.15.01	Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Tersusunnya Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2019 dan Dokumen PPID Bappeda Provinsi NTB Tahun 2019	Kota Mataram	2 Dokumen	678.352.300	759.754.576

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.03.01.01.15.09	Penyusunan Data Spasial	Tersedianya Data Spasial Pembangunan Provinsi NTB	se-NTB	5 dokumen	252.925.000	283.276.000
4.03.01.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi perencanaan program pembangunan daerah	Provinsi NTB	100%	7.677.176.496	8.598.437.676
4.03.01.01.21.01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terselenggaranya tahapan/proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2019	Kota Mataram	6 kegiatan	1.409.990.500	1.579.189.360
4.03.01.01.21.07	Penetapan RPJMD	Dokumen Perda RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023	se-NTB	1 Dokumen	515.065.000	576.872.800
4.03.01.01.21.08	Penyusunan rancangan RKPD	Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2019 dan RKPD Tahun 2020	se-NTB	2 dokumen	394.590.000	441.940.800
4.03.01.01.21.09	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Terselenggaranya kegiatan Pra Musrenbang dan Musrenbang RKPD Provinsi NTB	Kota Mataram	1 kegiatan	1.088.596.296	1.219.227.852
4.03.01.01.21.11	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan Akuntabilitas Kinerja Perencanaan Pembangunan	Kota Mataram	1 dokumen	73.400.000	82.208.000
4.03.01.01.21.12	Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Terinformasikannya capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan daerah yang akuntabel	Kota Mataram	1 dokumen	263.683.000	295.324.960

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.03.01.01.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terevaluasinya dan terpantaunya program/kegiatan pembangunan daerah	se-NTB	8 dokumen	475.965.000	533.080.800
4.03.01.01.21.14	Penyusunan rancangan KUA dan PPAS	Dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2019 dan KUA PPAS Tahun 2020	se-NTB	4 Dokumen	228.150.000	255.528.000
4.03.01.01.21.15	Penyusunan Dokumen Perencanaan	dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas	Kota Mataram	8 dokumen	311.175.000	348.516.000
4.03.01.01.21.18	Evaluasi Dokumen Perencanaan	Tersedianya bahan Perencanaan Pembangunan Daerah	se-NTB	2 dokumen	191.060.000	213.987.200
4.03.01.01.21.21	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Aplikasi e-Planning	se-NTB	11 Aplikasi	1.341.895.000	1.502.922.400
4.03.01.01.21.22	Penyelarasan Dokumen RPJMD Provinsi NTB	RPJMD Provinsi yang selaras dengan RPJMD Kab/Kota	se-NTB	1 Dokumen	90.228.000	101.055.360
4.03.01.01.21.23	Penyusunan Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan	Tersusunnya dokumen penanggulangan kemiskinan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTB	se-NTB	2 dokumen	800.474.700	896.531.664
4.03.01.01.21.24	Penyelarasan strategi pencapaian target dan indikator SDGs	Tersusunnya Dokumen SDGs Provinsi NTB (Rencana Aksi Daerah, Data Base dan Laporan)	se-NTB	3 Dokumen	492.904.000	552.052.480
4.03.01.01.22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Persentase konsistensi perencanaan program pembangunan bidang ekonomi	Provinsi NTB	100%	2.607.897.600	2.920.845.312

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.03.01.01.22.10	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dan DBHCHT	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Data DBH CHT Provinsi NTB	se-NTB	3 dokumen	1.060.878.400	1.188.183.808
4.03.01.01.22.11	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang investasi dan keuangan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan data Investasi dan Keuangan Provinsi NTB	se-NTB	2 Dokumen	454.104.000	508.596.480
4.03.01.01.22.12	Penyusunan perencanaan pembangunan bidang perindustrian, perdagangan dan pariwisata	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Data Potensi Kegiatan Bidang Industri,Perdagangan dan Pariwisata Provinsi NTB	se-NTB	3 Dokumen	437.085.000	489.535.200
4.03.01.01.22.13	Penyusunan perencanaan bidang pangan dan pertanian	Tersusunnya dokumen perencanaan Pembangunan ekonomi bidang pangan dan pertanian	se-NTB	2 dokumen	482.314.200	540.191.904
4.03.01.01.22.14	Penyusunan Roadmap Pembangunan Ekonomi	Tersusunnya dokumen Roadmap Pembangunan Ekonomi Provinsi NTB 2014-2019	se-NTB	1 Dokumen	173.516.000	194.337.920
4.03.01.01.23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Persentase konsistensi perencanaan program pembangunan bidang sosial budaya	Provinsi NTB	100%	6.311.249.900	7.068.599.888

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.03.01.01.23.05	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	Tersedianya data dan terjalannya kordinasi dengan SKPD Mitra dan Terlaksananya Rakor Program/Kegiatan Kementerian Urusan Pemerintahan dan Politik	Kota Mataram	2 Kegiatan	222.538.600	249.243.232
4.03.01.01.23.09	Penguatan Lembaga Mediasi	Terselenggaranya Sosialisasi Perda Tentang Bale Mediasi , Tersusunnya Leaflet Tentang Bale Mediasi dan Tersusunnya Laporan Sosialisasi Perda Bale Mediasi ke Kab/Kota se-NTB	se-NTB	11, 1000, 10 Kegiatan, Eksemplar, Dokumen	604.158.000	676.656.960
4.03.01.01.23.10	Evaluasi Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi	Tersusunnya Dokumen Pelaporan AD PPK dan RAN HAM	se-NTB	2 Dokumen	236.337.500	264.698.000
4.03.01.01.23.11	Perencanaan Pembangunan Sosial Bidang Pendidikan dan Kesehatan	Tercapainya indikator RPJMD bidang pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan dan percepatan penurunan Stunting menuju Generasi Emas NTB	se-NTB	9 sub kegiatan	3.411.400.000	3.820.768.000
4.03.01.01.23.12	Perencanaan Pembangunan Sosial Sub Bidang Sosial, Ketenagakerjaan dan Kependudukan	Tercapainya indikator kinerja subbidang Sosial Ketenagakerjaan Kependudukan	se-NTB	7 sub kegiatan	1.836.815.800	2.057.233.696

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.03.01.01.24	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase konsistensi perencanaan program pembangunan bidang perencanaan wilayah dan pembangunan infrastruktur	Provinsi NTB	100%	9.987.855.600	11.186.398.272
4.03.01.01.24.07	Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	se-NTB	3 dokumen	1.274.300.000	1.427.216.000
4.03.01.01.24.10	Sinkronisasi dan Pengendalian Pengelolaan Irigasi Partisipatif	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Kota Mataram	2 dokumen	2.349.355.600	2.631.278.272
4.03.01.01.24.12	Optimalisasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam	Dokumen Optimalisasi Perencanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam yang disusun	se-NTB	3 dokumen	986.650.000	1.105.048.000
4.03.01.01.24.13	Perencanaan Pengembangan Geopark	Dokumen Perencanaan Pengembangan geopark yang disusun	Kota Mataram	2 dokumen	4.220.400.000	4.726.848.000
4.03.01.01.24.14	Perencanaan Pengelolaan Kemaritiman	Dokumen Perencanaan Pengelolaan Kemaritiman yang disusun	Kota Mataram	2 dokumen	1.157.150.000	1.296.008.000
4.03.01.01.26	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Provinsi NTB	50%	3.476.351.500	3.893.513.680
4.03.01.01.26.01	Penyusunan Rencana Wilayah	Tersusunnya dokumen perencanaan wilayah provinsi NTB	se-NTB	2 Dokumen	1.065.185.000	1.193.007.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.03.01.01.26.03	Sinkronisasi Kebijakan Penatan Ruang dan Pembangunan Wilayah	Tercapainya keselarasan, sinkronisasi dan harmonisasi antara dokumen RTRW, RPJP, RPJMD dan RKPD	se-NTB	3 Dokumen	1.004.122.000	1.124.616.640
4.03.01.01.26.04	Pemantapan Penyelenggaraan Penataan Ruang	-Tersusunnya indikator outcome dan baseline penyelenggaraan penataan ruang daerah Provinsi NTB - Meningkatnya keterpaduan Penataan Ruang Se-Provinsi NTB	se-NTB	2 Dokumen	1.407.044.500	1.575.889.840
4,04	KEUANGAN				142.865.026.655	160.008.829.854
4.04.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				70.117.874.500	78.532.019.440
4.04.01.01	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku SKPD				57.700.753.000	64.624.843.360
4.04.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran			4.194.432.000	4.697.763.840
4.04.01.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersusunnya Arsip Surat Menyurat	Kota Mataram	11300 surat	63.000.000	70.560.000
4.04.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya sumber daya telepon, listrik, air dan internet kantor	Kota Mataram	Telepon (4); Listrik (4); Air (1); Internet (6) line, rekening	728.000.000	815.360.000
4.04.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Kota Mataram	38 orang	487.532.000	546.035.840
4.04.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor	Kota Mataram	15 orang	350.000.000	392.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	25 Paket	586.600.000	656.992.000
4.04.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat Kabar dan Buku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Mataram	2 surat kabar	80.000.000	89.600.000
4.04.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Kota Mataram	104 kali	725.000.000	812.000.000
4.04.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Luar Provinsi	48 kali	465.000.000	520.800.000
4.04.01.01.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa administrasi dan tekhnis perkantoran	Kota Mataram	3 orang	154.300.000	172.816.000
4.04.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi ke Kab/ Kota	se-NTB	70 kali	320.000.000	358.400.000
4.04.01.01.01.24	Penyediaan jasa keamanan kantor	Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor	Kota Mataram	10 orang	235.000.000	263.200.000
4.04.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur			16.325.000.000	18.284.000.000
4.04.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Roda 2/ Roda 4	Kota Mataram	5 unit	820.000.000	918.400.000
4.04.01.01.02.14	Pengadaan Tanah dan Bangunan	Tersedianya Tanah dan atau Bangunan	Kota Mataram	3 unit	12.000.000.000	13.440.000.000
4.04.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Kota Mataram	3 lokasi	425.000.000	476.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terlaksananya Jasa Service, Penggantian Suku Cadang, Pengadaan BBM dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	Kota Mataram	79 unit	720.000.000	806.400.000
4.04.01.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor	Kota Mataram	270 unit	370.000.000	414.400.000
4.04.01.01.02.41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Dinas	Kota Mataram	5 unit	1.000.000.000	1.120.000.000
4.04.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor	Kota Mataram	3 gedung	990.000.000	1.108.800.000
4.04.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur			283.010.000	316.971.200
4.04.01.01.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Terlaksananya Kegiatan Olahraga dan Imtaq	Kota Mataram	156 kali	88.010.000	98.571.200
4.04.01.01.05.05	Peningkatan SDM aparatur	Terfasilitasinya Aparatur Mengikuti Pelatihan/ Kursus/ Bimtek	Kota Mataram	17 orang	195.000.000	218.400.000
4.04.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya Kesesuaian Laporan Keuangan Badan dengan Realisasi Kegiatan Bidang - Bidang			603.600.000	676.032.000
4.04.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan SKPKD/ SKPD	Kota Mataram	4 dokumen	250.000.000	280.000.000
4.04.01.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	Kota Mataram	5 dokumen	353.600.000	396.032.000
4.04.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Barang Milik Daerah			100.000.000	112.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.01.01.07.01	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Mataram	2 dokumen	100.000.000	112.000.000
4.04.01.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Provinsi NTB	Opini WTP	32.321.336.000	36.199.896.320
4.04.01.01.17.10	Penyusunan rancangan peraturan daerah dan peraturan KDH tentang	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan KDH tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Kota Mataram	2 dokumen	475.000.000	532.000.000
4.04.01.01.17.14	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Tersosialisasikannya Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Mataram	5 kali	300.250.000	336.280.000
4.04.01.01.17.16	Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang MHik Daerah	Terlaksananya Penilaian, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD	Kota Mataram	10 dokumen	895.500.000	1.002.960.000
4.04.01.01.17.20	Penyusunan peraturan daerah dan peraturan Gubernur tentang APBD dan Perubahan APBD	Terlaksananya Penetapan Perda dan Pergub APBD dan Perubahan Perda dan Pergub APBD secara tepat Waktu	Kota Mataram	4 dokumen	7.811.450.000	8.748.824.000
4.04.01.01.17.25	Peningkatan Pelayanan Kas Daerah / Kuasa BUD	Terlaksananya Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana	Kota Mataram	133 PA/KPA	2.000.000.000	2.240.000.000
4.04.01.01.17.29	Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana dari Penerima Hibah dan Bansos	Kota Mataram	90 persen	230.000.000	257.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.01.01.17.39	Implementasi Aplikasi Sisitem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Mataram	10 aplikasi	235.200.000	263.424.000
4.04.01.01.17.62	Asistensi dan Pembahasan RKA/RKAP/DPA/DPPA-SKPD	Terlaksananya Pembahasan RKA/RKAP/DPA/DPPA- SKPD oleh TAPD	Kota Mataram	268 Dokumen RKA/RKAP/DPA/DP PA	842.000.000	943.040.000
4.04.01.01.17.63	Evaluasi dan Pengendalian Bantuan Keuangan Provinsi	Tersampainya Laporan Pertanggungjawaban Pengguna Dana Bantuan Keuangan Provinsi Oleh Kab/Kota	Kota Mataram	100 persen	100.000.000	112.000.000
4.04.01.01.17.64	Pelatihan Pengelola Keuangan Daerah	Terlaksananya Pelatihan/ Kursus/Bimtek Pengelola Keuangan Daerah	Kota Mataram	4 kali	241.200.000	270.144.000
4.04.01.01.17.67	Penyusunan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Mataram	5 Regulasi	258.750.000	289.800.000
4.04.01.01.17.69	Penyusunan dokumen informasi keuangan daerah	Tersusunnya Laporan LAK, Pajak dan SPJ Bendahara Penerimaan	Kota Mataram	2 Laporan	800.000.000	896.000.000
4.04.01.01.17.70	Penataan dan pengembangan Informasi Arsip Keuangan	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Keuangan	Kota Mataram	12000 Berkas	406.500.000	455.280.000
4.04.01.01.17.71	Peningkatan Kapasitas Pengeioiaan Keuangan Daerah	Tersedianya Fasilitator dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Mataram	14 orang	1.914.600.000	2.144.352.000
4.04.01.01.17.72	Pengeioiaan Administrasi Keuangan PPKD	Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan PPKD	Provinsi NTB	1836 orang	8.470.000.000	9.486.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.01.01.17.74	Publikasi Informasi Keuangan Daerah	Terpublikasinya Informasi Keuangan Daerah	Kota Mataram	2 Media (Cetak dan Elektronik)	2.502.800.000	2.803.136.000
4.04.01.01.17.75	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Mataram	1 dokumen	657.900.000	736.848.000
4.04.01.01.17.77	Optimalisasi Pengelolaan Piutang Daerah	Terlaksananya Penagihan Piutang Daerah	Kota Mataram	60 persen	600.000.000	672.000.000
4.04.01.01.17.78	Optimalisasi Pengelolaan Dana Transfer	Tersusunnya Pengelolaan Dana Transfer (DAK Fisik, Non Fisik, Laporan Kas Bulanan, Konfirmasi Transfer dan Rekapitulasi Transfer)	Kota Mataram	7 dokumen	1.000.000.000	1.120.000.000
4.04.01.01.17.79	Verifikasi dan Evaluasi Pertanggungjawaban Penerimaan Daerah	Tersusunnya SPJ Bendahara Penerimaan	Kota Mataram	100 persen	500.000.000	560.000.000
4.04.01.01.17.81	Penyusunan Pedoman RKA/RKAP SKPD	Tersusunnya Pedoman Penyusunan RKA/RKAP SKPD	Kota Mataram	2 dokumen	454.286.000	508.800.320
4.04.01.01.17.82	Penyusunan RKBMD	Tersusunnya Dokumen RKBMD	Kota Mataram	1 dokumen	790.800.000	885.696.000
4.04.01.01.17.95	Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi NTB	Terekonsiliasinya Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Antara SKPD dan PPKD	Kota Mataram	46 OPD	223.900.000	250.768.000
4.04.01.01.17.96	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Rancangan Keputusan Tentang Penerapan Pengelola Keuangan	Kota Mataram	17 dokumen	611.200.000	684.544.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.01.01.18	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	se-NTB	Penetapan APBD Kabuoaten/kota dan Penyampaian LKPD Kab/Kota tepat waktu	3.873.375.000	4.338.180.000
4.04.01.01.18.01	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten / Kota	Tersusunnya Rancangan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada tentang APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/ Kota	Kota Mataram	20 dokumen	1.549.500.000	1.735.440.000
4.04.01.01.18.04	Evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota	Tersusunnya Rancangan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Perda dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	Kota Mataram	10 dokumen	324.625.000	363.580.000
4.04.01.01.18.05	Asistensi Pengeioiaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Asistensi Penyusunan APBD Kabupaten/ Kota	Kota Mataram	10 Kab/ Kota	718.800.000	805.056.000
4.04.01.01.18.06	Penyelarasan Program Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program Pemprov. NTB dan Pemda Kab/ Kota	Kota Mataram	2 kali	827.950.000	927.304.000
4.04.01.01.18.07	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan Kab/Kota	Tersusunnya Laporan Kinerja Keuangan Kab/ Kota	Kota Mataram	1 dokumen	120.000.000	134.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.01.01.18.08	Asistensi Penyusunan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/ Kota	Kota Mataram	10 kab/ Kota	182.500.000	204.400.000
4.04.01.01.18.09	Rekonsiliasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota	Terekonsiliasinya Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kab/ Kota	Kota Mataram	4 kali	150.000.000	168.000.000
4.04.01.03	Unit Pelayanan Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah				5.353.656.100	5.996.094.832
4.04.01.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran			842.321.100	943.399.632
4.04.01.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersusunnya Arsip Surat Menyurat	Kota Mataram	5500 surat	18.200.000	20.384.000
4.04.01.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Penunjang Pekerjaan	Kota Mataram	12 bulan	35.018.800	39.221.056
4.04.01.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya Fungsi Penatausahaan Keuangan SKPD	Kota Mataram	6 orang	144.832.800	162.212.736
4.04.01.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Untuk Mendukung Kerja	Kota Mataram	15 unit	179.100.000	200.592.000
4.04.01.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Pegawai	Kota Mataram	12 bulan	12.960.000	14.515.200
4.04.01.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terlaksananya makan minum untuk Pelayanan dan Rapat-rapat	Kota Mataram	12 bulan	180.000.000	201.600.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.01.03.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terselenggaranya Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pusat	Kota Mataram	2 fungsi	165.309.500	185.146.640
4.04.01.03.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Tersedianya tenaga teknis bidang administrasi bidang perkantoran	Kota Mataram	12 bulan	21.900.000	24.528.000
4.04.01.03.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sinkronisasi Pengelolaan KEuangan Daerah di Provinsi NTB	Kota Mataram	10 kab/Kota	85.000.000	95.200.000
4.04.01.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur			85.300.000	95.536.000
4.04.01.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor	Kota Mataram	1 lokasi	22.800.000	25.536.000
4.04.01.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Kantor	Kota Mataram	1 tahun	62.500.000	70.000.000
4.04.01.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur			164.640.000	184.396.800
4.04.01.03.05.05	Peningkatan SDM Aparatur	Terfasilitasinya Aparatur Mengikuti Pelatihan/Kursus/ Bimtek	Kota Mataram	6 orang	164.640.000	184.396.800
4.04.01.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Meningkatnya Kesesuaian Laporan Keuangan Badan dengan Realisasi Kegiatan Bidang - Bidang			210.350.000	235.592.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.01.03.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan SKPD	Kota Mataram	1 dokumen	107.750.000	120.680.000
4.04.01.03.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan SKPD	Kota Mataram	2 dokumen	102.600.000	114.912.000
4.04.01.03.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Provinsi NTB	Opini WTP	4.051.045.000	4.537.170.400
4.04.01.03.17.19	Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Teroptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Kota Mataram	90 persen	1.196.825.000	1.340.444.000
4.04.01.03.17.57	Sertifikasi tanah	Terlaksananya Sertifikasi Tanah Milik Daerah	Kota Mataram	8 persil	592.500.000	663.600.000
4.04.01.03.17.76	Pengamanan dan Penertiban Aset	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Sengketa Aset Milik Daerah	Kota Mataram	4 sengketa	2.261.720.000	2.533.126.400
4.04.01.04	Unit Pengelolaan Islamic Center NTB				7.063.465.400	7.911.081.248
4.04.01.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran			4.091.484.000	4.582.462.080
4.04.01.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya Prosentase Rata-rata Surat yang Terkirim	Kota Mataram	1400 surat	5.000.000	5.600.000
4.04.01.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Jasa Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Mataram	12 bulan	918.000.000	1.028.160.000
4.04.01.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terselenggaranya Administrasi Keuangan dengan Baik	Kota Mataram	12 bulan	209.124.000	234.218.880
4.04.01.04.01.13	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	12 Paket	2.794.600.000	3.129.952.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.01.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Mataram	96 eks/bulan	11.760.000	13.171.200
4.04.01.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya Biaya Makan Minum Rapat dan Kegiatan	Kota Mataram	12 bulan	60.000.000	67.200.000
4.04.01.04.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya Penyelarasan dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Mataram	1 tahun	61.500.000	68.880.000
4.04.01.04.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Penyelaras Program/ Kegiatan Provinsi di Dalam Daerah	Kota Mataram	1 tahun	31.500.000	35.280.000
4.04.01.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang Menunjang Kinerja Aparatur			280.700.000	314.384.000
4.04.01.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor dengan Baik	Kota Mataram	1 tahun	200.700.000	224.784.000
4.04.01.04.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Pelaksanaan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor	Kota Mataram	1 tahun	30.000.000	33.600.000
4.04.01.04.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Akan Rehabilitasi Seding/ Berat Gedung Kantor	Kota Mataram	1 Paket	50.000.000	56.000.000
4.04.01.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Meningkatnya Kesesuaian Laporan Keuangan Badan dengan Realisasi Kegiatan Bidang - Bidang			86.600.000	96.992.000
4.04.01.04.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD	Kota Mataram	1 dokumen	31.500.000	35.280.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.01.04.06.05	Penyusunan rencana kerja SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja OPD	Kota Mataram	1 dokumen	55.100.000	61.712.000
4.04.01.04.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	Provinsi NTB	Opini WTP	2.604.681.400	2.917.243.168
4.04.01.04.17.97	Pemeliharaan dan Pengamanan Kawasan Islamic Centre	Pemeliharaan dan Pengamanan Kawasan Islamic Center Berjalan Baik	Kota Mataram	12 bulan	2.445.225.000	2.738.652.000
4.04.01.04.17.98	Pemanfaatan dan Pengembangan Usaha Bisnis Islamic Centre	Terlaksananya Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Islamic Center	Kota Mataram	1 tahun	159.456.400	178.591.168
4.04.02	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah				72.747.152.155	81.476.810.414
4.04.02.01	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah				25.474.024.750	28.530.907.720
4.04.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan dan Tertib Administrasi			6.262.489.900	7.013.988.688
4.04.02.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat	Kota Mataram	12 Bulan	49.060.000	54.947.200
4.04.02.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Mataram	12 bulan	1.072.684.000	1.201.406.080
4.04.02.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan	Kota Mataram	9 org	80.112.000	89.725.440
4.04.02.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	Kota Mataram	13 org	262.910.000	294.459.200
4.04.02.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Kota Mataram	86 jenis	185.557.500	207.824.400
4.04.02.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Kota Mataram	12 jenis/paket	1.459.240.000	1.634.348.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Mataram	12 bulan	19.046.400	21.331.968
4.04.02.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	45 unit/paket	1.745.950.000	1.955.464.000
4.04.02.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Mataram	27 bulan	43.270.000	48.462.400
4.04.02.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Kota Mataram	12 bulan	250.000.000	280.000.000
4.04.02.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah unit jasa kebutuhan kooordinasi antar lembaga	Kota Mataram	1 tahun	505.240.000	565.868.800
4.04.02.01.01.19	Penyediaan Jasa Administrasi dan Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa tenaga Administrasi dan teknis perkantoran	Kota Mataram	12 bulan	457.900.000	512.848.000
4.04.02.01.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor	Kota Mataram	6 org	131.520.000	147.302.400
4.04.02.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dukungan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD			4.325.037.250	4.844.041.720
4.04.02.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kota Mataram	4 paket	540.427.500	605.278.800
4.04.02.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	10 unit/paket	2.607.420.000	2.920.310.400
4.04.02.01.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah paket mebeleur	Kota Mataram	4 Set/buah	82.050.000	91.896.000
4.04.02.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor	Kota Mataram	12 bulan	52.120.000	58.374.400
4.04.02.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas/opresional	Kota Mataram	13 unit	414.500.000	464.240.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.01.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Mataram	1 Tahun	36.300.000	40.656.000
4.04.02.01.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Kota Mataram	12 Bulan	61.500.000	68.880.000
4.04.02.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota Mataram	4 paket	530.719.750	594.406.120
4.04.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			410.300.000	459.536.000
4.04.02.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah masa penyelesaian pendidikan formal, diklat teknis substantif, diklat teknis struktural dan fungsional		13 Aparat	211.150.000	236.488.000
4.04.02.01.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur	Kota Mataram	12 Bulan	199.150.000	223.048.000
4.04.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			1.351.940.000	1.514.172.800
4.04.02.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD (LKjIP, LKPJ, LPPD, RKT & PK) yang disusun	Kota Mataram	15 Laporan	315.950.000	353.864.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.01.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Lap. keuangan akhir tahun yang disusun		2 Laporan	211.900.000	237.328.000
4.04.02.01.06.05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun		8 Dokumen	586.260.000	656.611.200
4.04.02.01.06.17	Pengumpulan Updating dan Analysis Data Informasi Penyusunan Profil Kinerja OPD (UPTB)	Jumlah dokumen profil OPD yang divalidasi data dan informasi kinerjanya		1 Laporan	237.830.000	266.369.600
4.04.02.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Mendukung semakin tertibnya Administrasi pengelolaan aset BMN/BMD			89.705.000	100.469.600
4.04.02.01.07.01	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan asset/barang milik daerah		1 Dokumen	89.705.000	100.469.600
4.04.02.01.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Provinsi NTB	33,30%	9.656.234.800	10.814.982.976
4.04.02.01.17.05	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang disusun		2 Perda/Pergub	787.481.500	881.979.280
4.04.02.01.17.30	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah		5 Laporan	2.431.823.800	2.723.642.656
4.04.02.01.17.31	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya		43 Sentra	272.972.500	305.729.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.01.17.32	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Lombok Utara	72 Hari	251.948.000	282.181.760
4.04.02.01.17.33	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		12 Event	1.078.052.500	1.207.418.800
4.04.02.01.17.34	Penyelesaian dan Tindak Lanjut Sengketa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terfasilitasinya penyelesaian sengketa pajak dan retribusi daerah		2 Kasus	75.120.000	84.134.400
4.04.02.01.17.36	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan		4 Laporan	587.000.000	657.440.000
4.04.02.01.17.37	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif		12 Laporan	170.620.000	191.094.400
4.04.02.01.17.40	Konsultasi dan Monitoring Penerimaan Dana Perimbangan	Jumlah laporan sinkronisasi data pendapatan daerah dengan pihak terkait		1 Tahun	620.040.000	694.444.800
4.04.02.01.17.43	Akurasi dan Sinkronisasi Data Pendapatan Daerah	Jumlah laporan sinkronisasi data pendapatan daerah dengan pihak terkait		2 Laporan	257.850.000	288.792.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.01.17.52	Sinkronisasi Data Penerimaan Retribusi dan PPL	Jumlah laporan sinkronisasi data, penerimaan retribusi dan pll dengan pihak terkait		2 Laporan	249.557.500	279.504.400
4.04.02.01.17.55	Verifikasi Administrasi Pemungutan Retribusi dan PPL	Jumlah laporan data hasil verifikasi administrasi pemungutan retribusi dan PPL		2 Laporan	345.450.000	386.904.000
4.04.02.01.17.56	Intensifikasi Obyek Retribusi dan Pendapatan Lainnya	Jumlah laporan evaluasi obyek retribusi dan pll dan pelaksanaan bintek		2 Laporan	1.583.399.000	1.773.406.880
4.04.02.01.17.58	Pengawasan Tunggakan Penerimaan Retribusi dan PPL	Jumlah laporan hasil pengawasan tunggakan retribusi dan pendapatan lainnya		1 Laporan	75.120.000	84.134.400
4.04.02.01.17.73	Akurasi Data Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	Jumlah dokumen data PBBKB		1 Dokumen	228.450.000	255.864.000
4.04.02.01.17.74	Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Air Permukaan	Jumlah dokumen data potensi penerimaan Pajak Air Permukaan		2 Dokumen	179.850.000	201.432.000
4.04.02.01.17.75	Akurasi Data Pajak Rokok	Jumlah dokumen data pajak rokok		1 Dokumen	461.500.000	516.880.000
4.04.02.01.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Sentra Layanan yang memperoleh penilaian IKM	Provinsi NTB	85%	907.945.300	1.016.898.736
4.04.02.01.20.01	Pengawasan Internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian aspek kelembagaan	se-NTB	1 Laporan	149.175.300	167.076.336
4.04.02.01.20.06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah laporan hasil temuan yang ditindak lanjuti	se-NTB	1 Laporan	50.740.000	56.828.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.01.20.10	Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	jumlah laporan hasil monev pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	se-NTB	12 Laporan	489.880.000	548.665.600
4.04.02.01.20.11	Fasilitasi Peningkatan Profesionalitas Aparat Pengendalian dan Pembinaan	Jumlah/paket peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparatur pengendalian dan pembinaan	se-NTB	2 paket	218.150.000	244.328.000
4.04.02.01.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat gangguan sistem jaringan dan penggunaan perangkat keras teknologi informasi pendapatan	Provinsi NTB	1,6%	1.641.147.500	1.838.085.200
4.04.02.01.23.02	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun	Kota Mataram	15 paket	572.820.000	641.558.400
4.04.02.01.23.03	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah paket perangkat keras sistem jaringan komunikasi dan informasi pendapatan daerah yang dikembangkan	se-NTB	43 simpul	435.540.000	487.804.800
4.04.02.01.23.04	Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah paket peningkatan kapabilitas sumber daya pengelola sistem informasi pendapatan	se-NTB	4 paket	632.787.500	708.722.000
4.04.02.01.82	Program Reformasi Birokrasi	Persentase Sentra Layanan yang memperoleh Sertifikasi ISO	Provinsi NTB	40%	829.225.000	928.732.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.01.82.02	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Kepegawaian	Jumlah unit/sentra layanan yang mendapat pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kinerja birokrasi dan aparatur	Provinsi NTB	11 unit	595.375.000	666.820.000
4.04.02.01.82.03	Fasilitasi Pengelolaan dan Penataan Arsip	Jumlah dokumen pengelolaan dan penataan arsip	Kota Mataram	4 Dokumen	233.850.000	261.912.000
4.04.02.02	Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram				4.404.873.380	4.933.458.186
4.04.02.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan dan Tertib Administrasi			1.131.108.380	1.266.841.386
4.04.02.02.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Masa Pembiayaan Jasa Surat menyurat	Kota Mataram	12 bulan	5.280.000	5.913.600
4.04.02.02.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Kota Mataram	12 bln	326.010.880	365.132.186
4.04.02.02.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	Kota Mataram	7 orang	63.302.000	70.898.240
4.04.02.02.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	Kota Mataram	11 orang	241.010.000	269.931.200
4.04.02.02.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis alat Tulis Kantor	Kota Mataram	54 jenis	85.908.000	96.216.960
4.04.02.02.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Mataram	12 Bulan	14.732.500	16.500.400
4.04.02.02.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kota Mataram	12 bln	10.785.000	12.079.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.02.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Mataram	12 bulan	242.450.000	271.544.000
4.04.02.02.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Mataram	12 bln	6.165.000	6.904.800
4.04.02.02.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Kota Mataram	12 bulan	25.800.000	28.896.000
4.04.02.02.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor	Kota Mataram	5 orang	109.665.000	122.824.800
4.04.02.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dukungan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD			1.431.185.000	1.602.927.200
4.04.02.02.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kota Mataram	12 bulan	631.685.000	707.487.200
4.04.02.02.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	2 unit	50.465.000	56.520.800
4.04.02.02.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah paket Mebeleur	Kota Mataram	1 paket	7.800.000	8.736.000
4.04.02.02.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor	Kota Mataram	12 bulan	241.425.000	270.396.000
4.04.02.02.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	Kota Mataram	13 unit	147.240.000	164.908.800
4.04.02.02.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Kota Mataram	12 bulan	46.920.000	52.550.400
4.04.02.02.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Kota Mataram	12 bulan	50.565.000	56.632.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.02.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kota Mataram	2 paket	255.085.000	285.695.200
4.04.02.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			16.100.000	18.032.000
4.04.02.02.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur	Kota Mataram	12 Bulan	16.100.000	18.032.000
4.04.02.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			12.200.000	13.664.000
4.04.02.02.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Lap. Keuangan akhir tahun yang disusun	Kota Mataram	1 Laporan	12.200.000	13.664.000
4.04.02.02.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Mendukung semakin tertibnya Administrasi pengelolaan aset BMN/BMD			22.400.000	25.088.000
4.04.02.02.07.01	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan asset/barang milik daerah	Kota Mataram	1 Dokumen	22.400.000	25.088.000
4.04.02.02.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Proporsi penerimaan PAD antar tahun anggaran, cakupan Obyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang divalidasi, Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah			1.791.880.000	2.006.905.600
4.04.02.02.17.30	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah	Kota Mataram	2 Laporan	759.360.000	850.483.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.02.17.31	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Mataram	1 Laporan	100.100.000	112.112.000
4.04.02.02.17.32	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	Kota Mataram	1 Laporan	499.680.000	559.641.600
4.04.02.02.17.33	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Mataram	1 even	102.450.000	114.744.000
4.04.02.02.17.36	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan	Kota Mataram	1 Laporan	24.040.000	26.924.800
4.04.02.02.17.37	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif	Kota Mataram	1 Dokumen	306.250.000	343.000.000
4.04.02.03	Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya				4.660.279.000	5.219.512.480
4.04.02.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan dan Tertib Administrasi			1.585.819.000	1.776.117.280
4.04.02.03.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Masa Pembiayaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lombok Tengah	12 bln	6.110.000	6.843.200
4.04.02.03.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Kab. Lombok Tengah	12 bln	177.600.000	198.912.000
4.04.02.03.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	Kab. Lombok Tengah	9 org	183.550.000	205.576.000
4.04.02.03.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	Kab. Lombok Tengah	12 org	263.110.000	294.683.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.03.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Kab. Lombok Tengah	55 Jenis	106.729.000	119.536.480
4.04.02.03.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Pengandaan	Kab. Lombok Tengah	20 Paket	25.300.000	28.336.000
4.04.02.03.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor	Kab. Lombok Tengah	12 bln	12.605.000	14.117.600
4.04.02.03.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kab. Lombok Tengah	15 paket	560.130.000	627.345.600
4.04.02.03.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Efektifitas kelembagaan dan tertib Administrsi	Kab. Lombok Tengah	12 bln	4.375.000	4.900.000
4.04.02.03.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Meningkatnya Efektifitas kelembagaan dan Tertib Administrasi	Kab. Lombok Tengah	12 bln	27.000.000	30.240.000
4.04.02.03.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Meningkatnya Efektifias Kelembagaan dan Tertib Administrasi	Kab. Lombok Tengah	8 org	219.310.000	245.627.200
4.04.02.03.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dukungan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD			1.348.090.000	1.509.860.800
4.04.02.03.02.03	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Dukungan penunjang pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi OPD	Kab. Lombok Tengah	1 paket	134.500.000	150.640.000
4.04.02.03.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit Kendaraan Dinas /operasional	Kab. Lombok Tengah	3 unit/paket	450.955.000	505.069.600
4.04.02.03.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Paket Mebeleur	Kab. Lombok Tengah	3 paket	18.460.000	20.675.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.03.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan Pemeliharaan Gedung/kantor	Kab. Lombok Tengah	12 bln	24.910.000	27.899.200
4.04.02.03.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit Pemeliharaan rutin kendaraan Dinas/operasional	Kab. Lombok Tengah	15 unit	189.000.000	211.680.000
4.04.02.03.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Bulan Rutin /bekala perlengkapan gedung kantor	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	40.000.000	44.800.000
4.04.02.03.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah bulan Pemeliharaan Rutin / berkala Peralatan kantor	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	46.055.000	51.581.600
4.04.02.03.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Jumlah Paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kab. Lombok Tengah	2 paket	444.210.000	497.515.200
4.04.02.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			17.110.000	19.163.200
4.04.02.03.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur	Kab. Lombok Tengah	44 kali/bln	17.110.000	19.163.200
4.04.02.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			4.610.000	5.163.200
4.04.02.03.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Penyusunan dokumen Laporan Keuangan akhir tahun yang di susun	Kab. Lombok Tengah	1 tahun	4.610.000	5.163.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.03.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Mendukung semakin tertibnya Administrasi pengelolaan aset BMN/BMD			32.220.000	36.086.400
4.04.02.03.07.01	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Asset / Baraang Milik Daerah	Kab. Lombok Tengah	12 org/bln	32.220.000	36.086.400
4.04.02.03.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Proporsi penerimaan PAD antar tahun anggaran, cakupan Obyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang divalidasi, Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah			1.672.430.000	1.873.121.600
4.04.02.03.17.30	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah	Kab. Lombok Tengah	2 Laporan	704.130.000	788.625.600
4.04.02.03.17.31	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Lombok Tengah	8 Sentra	110.000.000	123.200.000
4.04.02.03.17.32	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	Kab. Lombok Tengah	144 Kali	488.160.000	546.739.200
4.04.02.03.17.33	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Lombok Tengah	1 event	160.600.000	179.872.000
4.04.02.03.17.36	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan	Kab. Lombok Tengah	1 Laporan	33.140.000	37.116.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.03.17.37	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif	Kab. Lombok Tengah	1 Dokumen	176.400.000	197.568.000
4.04.02.04	Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong				5.070.744.500	5.679.233.840
4.04.02.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan dan Tertib Administrasi			1.481.774.500	1.659.587.440
4.04.02.04.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Masa Pembiayaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Lombok Timur	12 Bln	5.550.000	6.216.000
4.04.02.04.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Lombok Timur	12 Bulan	171.480.000	192.057.600
4.04.02.04.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	Kab. Lombok Timur	11 orang	100.893.000	113.000.160
4.04.02.04.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	Kab. Lombok Timur	13 orang	284.700.000	318.864.000
4.04.02.04.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Kab. Lombok Timur	74 Jenis	125.819.500	140.917.840
4.04.02.04.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Lombok Timur	8 Jenis	28.500.000	31.920.000
4.04.02.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Lombok Timur	12 Bulan	18.100.000	20.272.000
4.04.02.04.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lombok Timur	60 Paket	547.607.000	613.319.840
4.04.02.04.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Lombok Timur	12 Bulan	7.615.000	8.528.800
4.04.02.04.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan dan Minuman	Kab. Lombok Timur	12 Bulan	16.200.000	18.144.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.04.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pengamanan Kantor	Kab. Lombok Timur	8 Orang	175.310.000	196.347.200
4.04.02.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dukungan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD			1.875.560.000	2.100.627.200
4.04.02.04.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor Yang Dibangun	Kab. Lombok Timur	2 Paket	448.510.000	502.331.200
4.04.02.04.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Lombok Timur	3 Unit	437.700.000	490.224.000
4.04.02.04.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Paket Mebeleur	Kab. Lombok Timur	10 Unit	21.650.000	24.248.000
4.04.02.04.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Bulan pemeliharaan Gedung/Kantor	Kab. Lombok Timur	12 Bulan	285.000.000	319.200.000
4.04.02.04.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Operasional	Kab. Lombok Timur	14 Unit	221.120.000	247.654.400
4.04.02.04.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah Bulan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Lombok Timur	12 Bulan	32.510.000	36.411.200
4.04.02.04.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah Bulanan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Kab. Lombok Timur	12 Bulan	25.310.000	28.347.200
4.04.02.04.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Paket Rehabilitasi Seding/Berat Gedung Kantor	Kab. Lombok Timur	3 Paket	403.760.000	452.211.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.04.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			7.800.000	8.736.000
4.04.02.04.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah Masa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Kab. Lombok Timur	12 Bulan	7.800.000	8.736.000
4.04.02.04.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			4.720.000	5.286.400
4.04.02.04.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Lap. Keuangan Akhir Tahun Yang Disusun	Kab. Lombok Timur	5 Laporan	4.720.000	5.286.400
4.04.02.04.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Mendukung semakin tertibnya Administrasi pengelolaan aset BMN/BMD			33.180.000	37.161.600
4.04.02.04.07.01	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Kab. Lombok Timur	20 Dokumen	33.180.000	37.161.600
4.04.02.04.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Proporsi penerimaan PAD antar tahun anggaran, cakupan Obyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang divalidasi, Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah			1.667.710.000	1.867.835.200
4.04.02.04.17.30	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah	Kab. Lombok Timur	2 Laporan	748.010.000	837.771.200
4.04.02.04.17.31	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Lombok Timur	1 Laporan	95.000.000	106.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.04.17.32	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	Kab. Lombok Timur	144 hari	442.080.000	495.129.600
4.04.02.04.17.33	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Lombok Timur	1 event	148.800.000	166.656.000
4.04.02.04.17.36	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan	Kab. Lombok Timur	1 Laporan	33.710.000	37.755.200
4.04.02.04.17.37	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumla dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif	Kab. Lombok Timur	1 Dokumen	200.110.000	224.123.200
4.04.02.05	Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa				3.428.880.490	3.840.346.149
4.04.02.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan dan Tertib Administrasi			1.013.052.490	1.134.618.789
4.04.02.05.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat	Kab. Sumbawa	12 bulan	14.410.000	16.139.200
4.04.02.05.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Sumbawa	12 bulan	164.640.000	184.396.800
4.04.02.05.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah jasa tenaga administrasi keuangan	Kab. Sumbawa	9 orang	71.654.000	80.252.480
4.04.02.05.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	Kab. Sumbawa	10 orang	220.110.000	246.523.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.05.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Kab. Sumbawa	54 Jenis	80.869.590	90.573.941
4.04.02.05.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Kab. Sumbawa	1 tahun	14.885.000	16.671.200
4.04.02.05.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Sumbawa	12 bulan	6.668.900	7.469.168
4.04.02.05.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Sumbawa	32 Paket/Unit	247.650.000	277.368.000
4.04.02.05.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Sumbawa	1 tahun	3.405.000	3.813.600
4.04.02.05.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah tahun penyediaan makanan dan minuman	Kab. Sumbawa	1 tahun	35.000.000	39.200.000
4.04.02.05.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga pengaman kantor	Kab. Sumbawa	7 orang	153.760.000	172.211.200
4.04.02.05.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dukungan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD			790.798.000	885.693.760
4.04.02.05.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kab. Sumbawa	1 paket	165.923.000	185.833.760
4.04.02.05.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional	Kab. Sumbawa	3 unit	75.700.000	84.784.000
4.04.02.05.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Paket mebeleur	Kab. Sumbawa	13 buah/paket	43.105.000	48.277.600
4.04.02.05.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor	Kab. Sumbawa	1 tahun	48.110.000	53.883.200
4.04.02.05.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	Kab. Sumbawa	12 unit	198.715.000	222.560.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.05.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Sumbawa	1 tahun	24.555.000	27.501.600
4.04.02.05.02.30	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Kab. Sumbawa	1 tahun	24.110.000	27.003.200
4.04.02.05.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kab. Sumbawa	2 paket	210.580.000	235.849.600
4.04.02.05.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			18.555.000	20.781.600
4.04.02.05.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur	Kab. Sumbawa	12 bulan	18.555.000	20.781.600
4.04.02.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			4.960.000	5.555.200
4.04.02.05.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun	Kab. Sumbawa	1 Dokumen	4.960.000	5.555.200
4.04.02.05.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Mendukung semakin tertibnya Administrasi pengelolaan aset BMN/BMD			61.285.000	68.639.200
4.04.02.05.07.01	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan asset/barang milik daerah	Kab. Sumbawa	1 tahun	61.285.000	68.639.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.05.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Proporsi penerimaan PAD antar tahun anggaran, cakupan Obyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang divalidasi, Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah			1.540.230.000	1.725.057.600
4.04.02.05.17.30	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah	Kab. Sumbawa	3 Laporan	580.220.000	649.846.400
4.04.02.05.17.31	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Sumbawa	4 sentra	87.590.000	98.100.800
4.04.02.05.17.32	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	Kab. Sumbawa	144 haei	515.520.000	577.382.400
4.04.02.05.17.33	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Sumbawa	1 event	159.300.000	178.416.000
4.04.02.05.17.36	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan	Kab. Sumbawa	1 Laporan	28.350.000	31.752.000
4.04.02.05.17.37	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif	Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa	1 Dokumen	169.250.000	189.560.000
4.04.02.06	Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima				3.022.260.260	3.384.931.491

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan dan Tertib Administrasi			813.064.260	910.631.971
4.04.02.06.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat	Kota Bima	12 bulan	8.520.000	9.542.400
4.04.02.06.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kota Bima	12 bulan	136.702.560	153.106.867
4.04.02.06.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah Jasa Administrasi Keuangan	Kota Bima	7 OH	112.500.000	126.000.000
4.04.02.06.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Kota Bima	10 OH	131.400.000	147.168.000
4.04.02.06.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Kota Bima	70 Jenis	101.240.700	113.389.584
4.04.02.06.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan pengadaan	Kota Bima	5 jenis	27.225.000	30.492.000
4.04.02.06.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kota Bima	12 bulan	5.906.000	6.614.720
4.04.02.06.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Bima	4 paket	188.650.000	211.288.000
4.04.02.06.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Bima	12 bulan	4.320.000	4.838.400
4.04.02.06.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan penyediaan Makanan dan minuman	Kota Bima	12 bulan	30.900.000	34.608.000
4.04.02.06.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor	Kota Bima	3 oH	65.700.000	73.584.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.06.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dukungan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD			788.626.000	883.261.120
4.04.02.06.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Kantor Yang diBangunkan	Kota Bima	1 Paket	428.515.000	479.936.800
4.04.02.06.02.10	Pengadaan mebeleur	Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD	Kota Bima	4 paket	36.550.000	40.936.000
4.04.02.06.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD	Kota Bima	1 Tahun	25.000.000	28.000.000
4.04.02.06.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD	Kota Bima	8 unit	168.840.000	189.100.800
4.04.02.06.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD	Kota Bima	1 Tahun	23.411.000	26.220.320
4.04.02.06.02.30	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor	Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD	Kota Bima	1 Tahun	16.110.000	18.043.200
4.04.02.06.02.42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Tersedianya Dukungan Penunjang pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi OPD	Kota Bima	2 Paket	90.200.000	101.024.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.06.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			9.110.000	10.203.200
4.04.02.06.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah Masa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Kota Bima	12 Bulan	9.110.000	10.203.200
4.04.02.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			4.610.000	5.163.200
4.04.02.06.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	Kota Bima	1 Laporan	4.610.000	5.163.200
4.04.02.06.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Mendukung semakin tertibnya Administrasi pengelolaan aset BMN/BMD			47.100.000	52.752.000
4.04.02.06.07.01	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Kota Bima	1 Laporan	47.100.000	52.752.000
4.04.02.06.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Proporsi penerimaan PAD antar tahun anggaran, cakupan Obyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang divalidasi, Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah			1.359.750.000	1.522.920.000
4.04.02.06.17.30	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah	Kota Bima	2 Laporan	616.060.000	689.987.200
4.04.02.06.17.31	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Bima	4 Sentra	97.300.000	108.976.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.06.17.32	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	Kota Bima	144 hari	467.280.000	523.353.600
4.04.02.06.17.33	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kota Bima	1 event	90.000.000	100.800.000
4.04.02.06.17.36	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan	Kota Mataram	1 Laporan	22.010.000	24.651.200
4.04.02.06.17.37	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif	Kota Bima	1 Dokumen	67.100.000	75.152.000
4.04.02.07	Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung				8.781.310.375	9.835.067.620
4.04.02.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan dan Tertib Administrasi			2.147.260.375	2.404.931.620
4.04.02.07.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat	Kab. Lombok Barat	12 bulan	9.480.000	10.617.600
4.04.02.07.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Lombok Barat	12 bulan	300.104.000	336.116.480
4.04.02.07.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa tenaga administrasi keuangan	Kab. Lombok Barat	6 org	86.188.000	96.530.560
4.04.02.07.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	Kab. Lombok Barat	14 org	459.900.000	515.088.000
4.04.02.07.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor	Kab. Lombok Barat	paket Jenis	120.858.375	135.361.380

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.07.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	Kab. Lombok Barat	12 bulan	59.500.000	66.640.000
4.04.02.07.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Kab. Lombok Barat	12 bulan	20.410.000	22.859.200
4.04.02.07.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Lombok Barat	unit paket	709.900.000	795.088.000
4.04.02.07.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Lombok Barat	Exm bulan	7.420.000	8.310.400
4.04.02.07.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Kab. Lombok Barat	12 bulan	45.000.000	50.400.000
4.04.02.07.01.19	Penyediaan jasa administrasi dan teknis perkantoran	Jumlah jasa administrator dan teknis perkantoran	Kab. Lombok Barat	3 org/bln	65.700.000	73.584.000
4.04.02.07.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor	Kab. Lombok Barat	12 bulan	262.800.000	294.336.000
4.04.02.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dukungan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD			4.323.010.000	4.841.771.200
4.04.02.07.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Kab. Lombok Barat	12 tahun	2.177.470.000	2.438.766.400
4.04.02.07.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ operasional	Kab. Lombok Barat	15 unit	431.200.000	482.944.000
4.04.02.07.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah paket meubeler	Kab. Lombok Barat	1 paket	676.400.000	757.568.000
4.04.02.07.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan gedung/ kantor	Kab. Lombok Barat	12 bulan	270.220.000	302.646.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.07.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional	Kab. Lombok Barat	1 unit	165.780.000	185.673.600
4.04.02.07.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Lombok Barat	12 bulan	60.000.000	67.200.000
4.04.02.07.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Kab. Lombok Barat	12 bulan	30.220.000	33.846.400
4.04.02.07.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah paket rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Kab. Lombok Barat	1 paket	511.720.000	573.126.400
4.04.02.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			36.000.000	40.320.000
4.04.02.07.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur	Kab. Lombok Barat	12 bulan	36.000.000	40.320.000
4.04.02.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			24.110.000	27.003.200
4.04.02.07.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	Kab. Lombok Barat	12 rangkap	24.110.000	27.003.200
4.04.02.07.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Mendukung semakin tertibnya Administrasi pengelolaan aset BMN/BMD			52.205.000	58.469.600
4.04.02.07.07.01	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan asset/ barang milik daerah	Kab. Lombok Barat	12 bulan	52.205.000	58.469.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.07.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Proporsi penerimaan PAD antar tahun anggaran, cakupan Obyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang divalidasi, Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah			2.198.725.000	2.462.572.000
4.04.02.07.17.30	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah	Kab. Lombok Barat	2 Laporan	815.950.000	913.864.000
4.04.02.07.17.31	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Lombok Barat	6 Sentra	103.000.000	115.360.000
4.04.02.07.17.32	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	Kab. Lombok Barat	144 hari	525.600.000	588.672.000
4.04.02.07.17.33	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Lombok Barat	1 event	414.075.000	463.764.000
4.04.02.07.17.36	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan	Kab. Lombok Barat	1 Laporan	44.300.000	49.616.000
4.04.02.07.17.37	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif	Kab. Lombok Barat	2 Dokumen	295.800.000	331.296.000
4.04.02.08	Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang				2.460.496.000	2.755.755.520
4.04.02.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan dan Tertib Administrasi			614.143.000	687.840.160

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.08.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat	Kab. Sumbawa Barat	12 Bulan	7.700.000	8.624.000
4.04.02.08.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Sumbawa Barat	12 Bulan	156.600.000	175.392.000
4.04.02.08.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5 tenaga administrasi kantor	Kab. Sumbawa Barat	12 Bulan	42.868.000	48.012.160
4.04.02.08.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	8 jasa tenaga kebersihan kantor	Kab. Sumbawa Barat	12 Bulan	175.336.000	196.376.320
4.04.02.08.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	62 jenis alat tulis kantor	Kab. Sumbawa Barat	12 Bulan	48.988.000	54.866.560
4.04.02.08.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6 jenis barang cetakan dan penggandaan	Kab. Sumbawa Barat	12 Bulan	13.735.000	15.383.200
4.04.02.08.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Sumbawa Barat	12 Bulan	6.518.000	7.300.160
4.04.02.08.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 unit peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Sumbawa Barat	12 unit/paket	94.150.000	105.448.000
4.04.02.08.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2 bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Kab. Sumbawa Barat	12 Bulan	3.448.000	3.861.760
4.04.02.08.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	12 bulan penyediaan makanan dan minuman	Kab. Sumbawa Barat	12 Bulan	21.000.000	23.520.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.08.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	2 jasa keamanan kantor	Kab. Sumbawa Barat	12 Bulan	43.800.000	49.056.000
4.04.02.08.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dukungan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD			471.181.000	527.722.720
4.04.02.08.02.03	Pembangunan gedung kantor	1 gedung kantor yang di bangun	Kab. Sumbawa Barat	1 unit	69.459.000	77.794.080
4.04.02.08.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 unit kendaraan dinas/operasional	Kab. Sumbawa Barat	1 unit	22.350.000	25.032.000
4.04.02.08.02.10	Pengadaan mebeleur	3 paket	Kab. Sumbawa Barat	3 paket	26.700.000	29.904.000
4.04.02.08.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	12 bulan	Kab. Sumbawa Barat	12 Bulan	70.136.000	78.552.320
4.04.02.08.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	14 unit kendaraan dinas/operasional	Kab. Sumbawa Barat	1 Tahun	150.250.000	168.280.000
4.04.02.08.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12 bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Sumbawa Barat	12 Bulan	21.500.000	24.080.000
4.04.02.08.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	12 bulan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Kab. Sumbawa Barat	12 Bulan	15.136.000	16.952.320
4.04.02.08.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	1 paket rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Kab. Sumbawa Barat	1 paket	95.650.000	107.128.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.08.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			18.136.000	20.312.320
4.04.02.08.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Mendukung peningkatan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab. Sumbawa Barat	12 Bulan	18.136.000	20.312.320
4.04.02.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			4.636.000	5.192.320
4.04.02.08.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pelaporan laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data	Kab. Sumbawa Barat	1 laporan	4.636.000	5.192.320
4.04.02.08.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Mendukung semakin tertibnya Administrasi pengelolaan aset BMN/BMD			42.795.000	47.930.400
4.04.02.08.07.01	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Jumlah laporan pengelolaan Asset/barang milik daerah	Kab. Sumbawa Barat	2 dokumen	42.795.000	47.930.400
4.04.02.08.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Proporsi penerimaan PAD antar tahun anggaran, cakupan Obyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang divalidasi, Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah			1.309.605.000	1.466.757.600
4.04.02.08.17.30	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah	Kab. Sumbawa Barat	2 Laporan	476.635.000	533.831.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.08.17.31	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Sumbawa Barat	6 sentra	70.000.000	78.400.000
4.04.02.08.17.32	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	Kab. Sumbawa Barat	144 hari	446.880.000	500.505.600
4.04.02.08.17.33	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Sumbawa Barat	1 even	193.986.000	217.264.320
4.04.02.08.17.36	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan	Kab. Sumbawa Barat	2 Laporan	22.036.000	24.680.320
4.04.02.08.17.37	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif	Kab. Sumbawa Barat	2 Dokumen	100.068.000	112.076.160
4.04.02.09	Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung				5.507.375.800	6.168.260.896
4.04.02.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan dan Tertib Administrasi			803.773.300	900.226.096
4.04.02.09.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat	Kab. Lombok Utara	12 Bulan	3.950.000	4.424.000
4.04.02.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan listrik	Kab. Lombok Utara	12 Bulan	184.937.800	207.130.336
4.04.02.09.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa tenaga Administrator Keuangan	Kab. Lombok Utara	6 orang	47.246.000	52.915.520
4.04.02.09.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan kantor	Kab. Lombok Utara	6 orang	11.050.000	12.376.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.09.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor	Kab. Lombok Utara	44 Jenis	62.894.500	70.441.840
4.04.02.09.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis barang Cetakan	Kab. Lombok Utara	12 Bulan	17.150.000	19.208.000
4.04.02.09.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan kantor	Kab. Lombok Utara	353 buah	6.100.000	6.832.000
4.04.02.09.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Lombok Utara	13 Paket	361.500.000	404.880.000
4.04.02.09.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Lombok Utara	12 bulan	4.790.000	5.364.800
4.04.02.09.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan minuman	Kab. Lombok Utara	12 Bulan	16.500.000	18.480.000
4.04.02.09.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Pengamanan Kantor	Kab. Lombok Utara	4 orang	87.655.000	98.173.600
4.04.02.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dukungan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD			3.057.765.000	3.424.696.800
4.04.02.09.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	Kab. Lombok Utara	1 Paket	2.294.145.000	2.569.442.400
4.04.02.09.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Paket Meubelair	Kab. Lombok Utara	11 Buah/Paket	423.075.000	473.844.000
4.04.02.09.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin Kendaraan dinas/operasional	Kab. Lombok Utara	1 Tahun	22.100.000	24.752.000
4.04.02.09.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Unit Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas/Oprasional	Kab. Lombok Utara	12 unit	144.645.000	162.002.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.09.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan rutin berkala perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Lombok Utara	12 Bulan	7.100.000	7.952.000
4.04.02.09.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Paket rehab sedang berat gedung kantor	Kab. Lombok Utara	1 Paket	166.700.000	186.704.000
4.04.02.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			4.600.000	5.152.000
4.04.02.09.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Akhir Tahun yang disusun	Kab. Lombok Utara	30 Laporan	4.600.000	5.152.000
4.04.02.09.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Mendukung semakin tertibnya Administrasi pengelolaan aset BMN/BMD			119.200.000	133.504.000
4.04.02.09.07.01	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Asset/Barang Milik Daerah	Kab. Lombok Utara	20 Dokumen	119.200.000	133.504.000
4.04.02.09.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Proporsi penerimaan PAD antar tahun anggaran, cakupan Obyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang divalidasi, Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah			1.522.037.500	1.704.682.000
4.04.02.09.17.30	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah	Kab. Lombok Utara	2 Laporan	589.610.000	660.363.200
4.04.02.09.17.31	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Lombok Utara	5 sentra	85.000.000	95.200.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.09.17.32	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	Kab. Lombok Utara	144 hari	479.520.000	537.062.400
4.04.02.09.17.33	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Lombok Utara	1 even	132.750.000	148.680.000
4.04.02.09.17.36	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan	Kab. Lombok Utara	2 Laporan	22.000.000	24.640.000
4.04.02.09.17.37	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif	Kab. Lombok Utara	2 Dokumen	213.157.500	238.736.400
4.04.02.10	Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu				4.354.576.900	4.877.126.128
4.04.02.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan dan Tertib Administrasi			1.008.287.900	1.129.282.448
4.04.02.10.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan masa pembiayaan jasa surat menyurat	Kab. Dompu	tahun lembar	14.400.000	16.128.000
4.04.02.10.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan jasa komunikasi,sumber daya air & Listrik	Kab. Dompu	12 bln	124.800.000	139.776.000
4.04.02.10.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa tenaga ad ministrasi keuangan	Kab. Dompu	12 bln	41.616.000	46.609.920
4.04.02.10.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor	Kab. Dompu	12 bln	175.200.000	196.224.000
4.04.02.10.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat Tulis Kantor	Kab. Dompu	12 bln	88.996.000	99.675.520

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.10.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang Cetyakan & Penggandaan	Kab. Dompu	12 bln	11.784.000	13.198.080
4.04.02.10.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah bulan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Dompu	12 bln	9.360.000	10.483.200
4.04.02.10.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit Peralatan & Perlengkapan Kantor	Kab. Dompu	1 Paket	390.001.900	436.802.128
4.04.02.10.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Jenis bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Kab. Dompu	12 bln	8.160.000	9.139.200
4.04.02.10.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Bulan Penyediaan Makanan & minuman	Kab. Dompu	12 bln	34.470.000	38.606.400
4.04.02.10.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga Jasa Keamanan Kantor	Kab. Dompu	5 org	109.500.000	122.640.000
4.04.02.10.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dukungan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD			1.721.504.000	1.928.084.480
4.04.02.10.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang di bangun	Kab. Dompu	1 Paket	1.345.680.000	1.507.161.600
4.04.02.10.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional	Kab. Dompu	2 unit	50.350.000	56.392.000
4.04.02.10.02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Paket Meubeler	Kab. Dompu	1 Paket	12.350.000	13.832.000
4.04.02.10.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah bulan pemeliharaan gedung/kantor	Kab. Dompu	12 bulan	24.200.000	27.104.000
4.04.02.10.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional	Kab. Dompu	12 bln	206.724.000	231.530.880
4.04.02.10.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Dompu	12 bln	41.500.000	46.480.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.10.02.30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Jumlah bulan pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	Kab. Dompu	12 bln	18.000.000	20.160.000
4.04.02.10.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah Paket Rehab sedang/berat gedung kantor	Kab. Dompu	1 paket	22.700.000	25.424.000
4.04.02.10.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya dukungan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD			19.000.000	21.280.000
4.04.02.10.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	Jumlah masa Pembinaan fisik & mental aparatur	Kab. Dompu	48 kali	19.000.000	21.280.000
4.04.02.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			4.500.000	5.040.000
4.04.02.10.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja OPD,(LKJIP,LKPJ,LPPD,RKT & PK) yang di susun	Kab. Dompu	1 th	4.500.000	5.040.000
4.04.02.10.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Mendukung semakin tertibnya Administrasi pengelolaan aset BMN/BMD			43.960.000	49.235.200
4.04.02.10.07.01	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan pengelolaan asset / Barang Milik Daerah	Kab. Dompu	12 bln	43.960.000	49.235.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.10.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Proporsi penerimaan PAD antar tahun anggaran, cakupan Obyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang divalidasi, Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah			1.557.325.000	1.744.204.000
4.04.02.10.17.30	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah	Kab. Dompu	1 Laporan	723.940.000	810.812.800
4.04.02.10.17.31	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Dompu	4 Sentra	120.000.000	134.400.000
4.04.02.10.17.32	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	Kab. Dompu	144 hari	475.200.000	532.224.000
4.04.02.10.17.33	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Dompu	1 even	98.285.000	110.079.200
4.04.02.10.17.36	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan	Kab. Dompu	1 Laporan	21.900.000	24.528.000
4.04.02.10.17.37	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif	Kab. Dompu	2 dokumen	118.000.000	132.160.000
4.04.02.11	Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima				5.582.330.700	6.252.210.384
4.04.02.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan dan Tertib Administrasi			1.154.759.800	1.293.330.976

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.11.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Bulan Masa Pembiayaan Jasa Surat menyurat	Kab. Bima	12 bulan	5.520.000	6.182.400
4.04.02.11.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Kab. Bima	12 bulan	186.600.000	208.992.000
4.04.02.11.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Keuangan	Kab. Bima	12 bulan	56.190.000	62.932.800
4.04.02.11.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan Kantor	Kab. Bima	12 bulan	219.699.000	246.062.880
4.04.02.11.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis alat Tulis Kantor	Kab. Bima	12 bulan	129.500.700	145.040.784
4.04.02.11.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Bima	12 bulan	58.647.500	65.685.200
4.04.02.11.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Bulan komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kab. Bima	12 bulan	14.295.000	16.010.400
4.04.02.11.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kanto	Kab. Bima	12 unit	362.568.000	406.076.160
4.04.02.11.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kab. Bima	12 bulan	6.039.600	6.764.352
4.04.02.11.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	Kab. Bima	12 bulan	50.000.000	56.000.000
4.04.02.11.01.24	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah jasa tenaga pengamanan kantor	Kab. Bima	12 bulan	65.700.000	73.584.000
4.04.02.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya dukungan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD			1.970.691.700	2.207.174.704

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.11.02.03	Pembangunan gedung kantor	jumlah gedung kantor yang dibangun	Kab. Bima	7 paket	1.179.195.000	1.320.698.400
4.04.02.11.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	jumlah unit kendaraan dinas/operasional	Kab. Bima	1 tahun	81.000.000	90.720.000
4.04.02.11.02.10	Pengadaan mebeleur	jumlah paket mebeleur	Kab. Bima	2 paket	165.900.000	185.808.000
4.04.02.11.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah bulan pemeliharaan gedung / kantor	Kab. Bima	12 bulan	25.339.800	28.380.576
4.04.02.11.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah unit pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional	Kab. Bima	9 unit	248.459.000	278.274.080
4.04.02.11.02.26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	jumlah bulan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Kab. Bima	12 bulan	11.640.800	13.037.696
4.04.02.11.02.30	Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor	jumlah bulan pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor	Kab. Bima	12 bulan	34.681.100	38.842.832
4.04.02.11.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Kab. Bima	1 paket	224.476.000	251.413.120
4.04.02.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tersedianya dukungan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD			18.739.800	20.988.576
4.04.02.11.05.04	Peningkatan Mental dan Fisik Aparatur	jumlah masa pembinaan mental dan fisik aparatur	Kab. Bima	12 bulan	18.739.800	20.988.576
4.04.02.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyampaian laporan kinerja dan anggaran secara tepat waktu dan tepat data			4.779.600	5.353.152

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.11.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	jumlah dokumen Lap. Keuangan akhir tahun yang disusun	Kab. Bima	12 dokumen	4.779.600	5.353.152
4.04.02.11.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Mendukung semakin tertibnya Administrasi pengelolaan aset BMN/BMD			69.045.000	77.330.400
4.04.02.11.07.01	Peningkatan Management Asset/Barang Milik Daerah	jumlah laporan pengelolaan asset/barang milik daerah	Kab. Bima	12 dokumen	69.045.000	77.330.400
4.04.02.11.17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Proporsi penerimaan PAD antar tahun anggaran, cakupan Obyek Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang divalidasi, Proporsi PAD terhadap Pendapatan Daerah			2.364.314.800	2.648.032.576
4.04.02.11.17.30	Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi penerimaan pajak daerah	Kab. Bima	1 Laporan	1.202.725.000	1.347.052.000
4.04.02.11.17.31	Orientasi dan Peningkatan Teknis Ke Samsatan	Jumlah sentra layanan yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Bima	4 sentra	350.000.000	392.000.000
4.04.02.11.17.32	Operasi Penertiban Kendaraan Bermotor	Terfasilitasinya pelaksanaan operasi penertiban kendaraan bermotor	Kab. Bima	144 hari	482.400.000	540.288.000
4.04.02.11.17.33	Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah even penyelenggaraan Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kab. Bima	1 even	152.169.800	170.430.176

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.04.02.11.17.36	Peningkatan Kualitas Pelayanan SAMSAT Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi peningkatan kualitas sentra layanan kesamsatan	Kab. Bima	1 Laporan	22.020.000	24.662.400
4.04.02.11.17.37	Pendataan, Penyampaian Surat Teguran dan Penagihan Pajak	Jumlah dokumen validasi data potensi WP aktif dan inaktif	Kab. Bima, Kota Bima	2 Dokumen	155.000.000	173.600.000
4,05	KEPEGAWAIAN				16.616.604.950	18.610.597.544
4.05.01	Badan Kepegawaian Daerah				16.616.604.950	18.610.597.544
4.05.01.01	Badan Kepegawaian Daerah				16.616.604.950	18.610.597.544
4.05.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			6.323.425.450	7.082.236.504
4.05.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik yang terpenuhi	Kota Mataram	12 bulan	610.000.000	683.200.000
4.05.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/oprasional yang tersedia	Kota Mataram	12 bulan	16.000.000	17.920.000
4.05.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa pengadministrasian keuangan yang terlaksana	Kota Mataram	12 bulan	96.388.000	107.954.560
4.05.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang terwujud	Kota Mataram	12 bulan	357.021.000	399.863.520
4.05.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Mataram	8 jenis	69.400.000	77.728.000
4.05.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Kota Mataram	12 bulan	428.490.200	479.909.024
4.05.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Kota Mataram	12 bulan	39.456.000	44.190.720

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.05.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terpenuhi	Kota Mataram	12 bulan	25.300.000	28.336.000
4.05.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	Kota Mataram	15 paket	2.468.900.000	2.765.168.000
4.05.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Kota Mataram	12 bulan	30.000.000	33.600.000
4.05.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat yang tersedia	Kota Mataram	12 bulan	66.500.000	74.480.000
4.05.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah rapat/koordinasi ke luar daerah yang terlaksana	Luar Provinsi	12 bulan	1.305.480.700	1.462.138.384
4.05.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah rapat/koordinasi dalam daerah yang terlaksana	se-NTB	12 bulan	498.489.550	558.308.296
4.05.01.01.01.27	Pelayanan Administrasi Kepegawaian PNS, PTT, dan Honorer Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian PNS, PTT dan Honorer Daerah yang terpenuhi	Kota Mataram	12 bulan	312.000.000	349.440.000
4.05.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran			5.849.255.000	6.551.165.600
4.05.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung perkantoran yang terbangun	Kota Mataram	5 paket	5.008.000.000	5.608.960.000
4.05.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kota Mataram	12 bulan	155.000.000	173.600.000
4.05.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/oprasional yang terpelihara	Kota Mataram	35 unit	286.255.000	320.605.600

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.05.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang terehabilitasi	Kota Mataram	3 paket	400.000.000	448.000.000
4.05.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			213.178.200	238.759.584
4.05.01.01.05.05	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Jumlah kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur	se-NTB	4 kegiatan	213.178.200	238.759.584
4.05.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			186.905.000	209.333.600
4.05.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program yang tersusun	Kota Mataram	6 dokumen	155.590.000	174.260.800
4.05.01.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	Kota Mataram	1 dokumen	31.315.000	35.072.800
4.05.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah			33.000.000	36.960.000
4.05.01.01.07.07	Peningkatan manajemen asset/barang milik daerah	Jumlah aset yang terkelola	Kota Mataram	12 bulan	33.000.000	36.960.000
4.05.01.01.17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	Provinsi NTB	2	3.600.209.300	4.032.234.416
4.05.01.01.17.02	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah CPNS/P3K terseleksi	se-NTB	200 orang	485.677.000	543.958.240
4.05.01.01.17.03	Penempatan PNS/PTT	Jumlah keputusan perpindahan PNS/PTT	se-NTB	210 SK	41.525.500	46.508.560
4.05.01.01.17.04	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah keputusan kenaikan pangkat/gaji berkala	se-NTB	3000 SK	132.542.000	148.447.040
4.05.01.01.17.05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah data dan informasi kepegawaian SIMPEG/SIMADU	se-NTB	14686 Pegawai	205.750.000	230.440.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.05.01.01.17.08	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang diberikan penghargaan	se-NTB	40 orang	70.348.000	78.789.760
4.05.01.01.17.09	Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Jumlah keputusan pembinaan disiplin Aparatur	se-NTB	35 SK	256.788.500	287.603.120
4.05.01.01.17.17	Pembinaan dan Pengembangan Karir Jabatan Struktural	Jumlah keputusan penempatan dan pembebasan dalam jabatan struktural	se-NTB	300 SK	845.687.000	947.169.440
4.05.01.01.17.18	Pembinaan dan Pengembangan Karir Jabatan Fungsional	Jumlah keputusan pengangkatan, penyesuaian dan pembebasan/pemberhentian dalam jabatan fungsional	se-NTB	400 SK	84.903.200	95.091.584
4.05.01.01.17.19	Penilaian DUPAK dan Penetapan Angka Kredit	Jumlah DUPAK/PAK Jabatan Fungsional	se-NTB	40 DUPAK/PAK	25.858.600	28.961.632
4.05.01.01.17.20	Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan formal	se-NTB	150 orang	15.863.000	17.766.560
4.05.01.01.17.21	Seleksi dan Fasilitasi Sekolah Ikatan Dinas	Jumlah Praja/Taruna yang lulus sekolah ikatan dinas	se-NTB	33 orang	12.944.600	14.497.952
4.05.01.01.17.22	Cuti dan Kesra ASN	Jumlah ASN yang melakukan cuti	se-NTB	50 orang	12.474.000	13.970.880
4.05.01.01.17.23	Pengambilan Sumpah Janji PNS dan Jabatan	Jumlah ASN yang diambil sumpah PNS dan jabatan	se-NTB	700 orang	154.320.000	172.838.400
4.05.01.01.17.24	Penilaian Kinerja ASN	Jumlah ASN yang melaporkan kinerja	se-NTB	49 orang	247.715.000	277.440.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.05.01.01.17.25	Peningkatan pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur	Jumlah SDA yang kompeten dalam bidang fungsional dan penanganan kasus pelanggaran disiplin	se-NTB	100 orang	40.493.200	45.352.384
4.05.01.01.17.26	Penyusunan Data Kebutuhan Pegawai dan Formasi CPNS/P3K	Jumlah usulan formasi CPNS/P3K	se-NTB	5000 formasi	36.646.000	41.043.520
4.05.01.01.17.27	Ujian Kenaikan Pangkat PNS	Jumlah ASN yang lulus ujian kenaikan pangkat melalui ujian dinas dan penyesuaian ijasah	se-NTB	50 orang	128.351.000	143.753.120
4.05.01.01.17.28	Pemberhentian PNS/PTT	Jumlah keputusan pemberhentian PNS dan PTT	se-NTB	245 SK	70.146.000	78.563.520
4.05.01.01.17.29	Penetapan dan Pengangkatan CPNS, PNS dan P3K	Jumlah keputusan pengangkatan CPNS dan PTT	se-NTB	200 SK	15.600.000	17.472.000
4.05.01.01.17.30	Pembangunan/Pengembangan Sistem Dokumentasi Elektronik Kepegawaian	Jumlah dokumentasi elektronik kepegawaian	se-NTB	29372 Naskah	39.796.000	44.571.520
4.05.01.01.17.31	Penyusunan Peta Komposisi ASN	Jumlah dokumen peta komposisi ASN	se-NTB	1 dokumen	50.905.000	57.013.600
4.05.01.01.17.32	Penyusunan Data Informasi Kompetensi	Jumlah dokumen informasi kompetensi ASN	se-NTB	100 Jabatan	47.080.000	52.729.600
4.05.01.01.17.33	Pemetaan kompetensi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pemetaan kompetensi	se-NTB	400 orang	490.945.700	549.859.184
4.05.01.01.17.34	Pelayanan Konseling ASN	Jumlah pegawai yang konseling	se-NTB	10 orang	12.235.000	13.703.200
4.05.01.01.17.35	Kerjasama dan Promosi Pemetaan Kompetensi ASN	Jumlah dokumen kerjasama yang terwujud	se-NTB	5 dokumen	42.665.000	47.784.800

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.05.01.01.17.36	Peningkatan Pemahaman Peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang memahami peraturan perundang-undangan	se-NTB	100 orang	32.950.000	36.904.000
4.05.01.01.18	Program Peningkatan Transparansi Penyelenggara Negara	Predikat Kepatuhan LHKPN	Provinsi NTB	100% Tepat Waktu	410.632.000	459.907.840
4.05.01.01.18.01	Pengelolaan Sistem Pelaporan LHKP	Jumlah Wajib LHKPN yang Melapor	se-NTB	1552 Wajib LHKPN	359.066.000	402.153.920
4.05.01.01.18.02	Pembinaan ASN yang Wajib LHKPN	Jumlah ASN Wajib LHKPN yang Dibina	se-NTB	1552 Wajib LHKPN	51.566.000	57.753.920
4,06	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				44.551.420.114	49.897.590.528
4.06.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				44.551.420.114	49.897.590.528
4.06.01.01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				44.551.420.114	49.897.590.528
4.06.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya layanan aparatur daerah			4.604.305.050	5.156.821.656
4.06.01.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa air, listrik, telpon dan internet	Kota Mataram	4 Instalasi	843.200.000	944.384.000
4.06.01.01.01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya biaya pass bandara kendaraan dinas roda 4	Kota Mataram	2 unit	5.000.000	5.600.000
4.06.01.01.01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya pengelola administrasi keuangan	Kota Mataram	11 orang	96.279.950	107.833.544
4.06.01.01.01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa Petugas Kebersihan	Kota Mataram	40 org	986.993.000	1.105.432.160
4.06.01.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Mataram	10 unit	19.000.000	21.280.000
4.06.01.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor	Kota Mataram	3 kegiatan	35.274.750	39.507.720

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.06.01.01.01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya biaya publikasi, biaya cetak, biaya penggandaan dan biaya penjilidan	Kota Mataram	2 Paket	25.778.500	28.871.920
4.06.01.01.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	Kota Mataram	1 paket	41.029.350	45.952.872
4.06.01.01.01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Mataram	17 paket	1.228.020.000	1.375.382.400
4.06.01.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kota Mataram	2 paket	68.350.000	76.552.000
4.06.01.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersajinya makan minum kegiatan dan tamu	Kota Mataram	2 paket	60.000.000	67.200.000
4.06.01.01.01.18	Penyelarasan Program Pemerintah Pusat dan Daerah	Terlaksananya kegiatan kementerian/non kementerian yang dilaksanakan	Kota Mataram	7 keg	450.000.000	504.000.000
4.06.01.01.01.20	Penyelarasan Program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Rapat Koordinasi pengumpulan data diklat Pim dan rapat koordinasi pengumpulan data diklat teknis dan sertifikasi.	Kota Mataram	4 Keg	745.379.500	834.825.040
4.06.01.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelancaran Tugas Aparatur			10.273.668.000	11.506.508.160
4.06.01.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Terselenggaranya pembangunan Gedung Kantor	Kota Mataram	3 gedung	3.872.698.000	4.337.421.760
4.06.01.01.02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang Terpenuhi	Kota Mataram	12 unit	1.222.970.000	1.369.726.400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.06.01.01.02.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah Gedung Perkantoran yang Terpelihara	Kota Mataram	4 gedung	290.000.000	324.800.000
4.06.01.01.02.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Terpelihara	Kota Mataram	38 unit	383.000.000	428.960.000
4.06.01.01.02.42	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor	Gedung Perkantoran yang terehabilitasi/renovasi	Provinsi NTB	1 paket	4.505.000.000	5.045.600.000
4.06.01.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat kompetensi aparatur			13.200.000	14.784.000
4.06.01.01.05.04	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Terlaksananya kegiatan siraman rohani dan jasmani aparatur	Kota Mataram	2 keg	13.200.000	14.784.000
4.06.01.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyampaian pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tepat waktu			473.232.000	530.019.840
4.06.01.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan program yang tersusun	Kota Mataram	9 dok	423.600.000	474.432.000
4.06.01.01.06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Dokumen Pelaporan	Kota Mataram	1 Dok	49.632.000	55.587.840
4.06.01.01.07	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya Manajemen Aset BMD			52.400.000	58.688.000
4.06.01.01.07.06	Peningkatan Manajemen asset/barang milik daerah	Pejabat Pengelola Aset Daerah dan Pejabat Pengadaan Barang/jasa	Kota Mataram	3 org	52.400.000	58.688.000
4.06.01.01.16	Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan, Keahlian dan Sikap Aparatur Sipil Negara	Provinsi NTB	80%	29.134.615.064	32.630.768.872

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.06.01.01.16.01	Pendidikan dan pelatihan dasar bagi calon ASN Daerah	Jumlah ASN Daerah yang terlatih	Kota Mataram	680 orang	5.831.033.300	6.530.757.296
4.06.01.01.16.02	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi ASN Daerah	Jumlah pejabat struktural yang terlatih	Kota Mataram	520 orang	9.766.533.430	10.938.517.442
4.06.01.01.16.03	Pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan Tinggi Daerah	Jumlah pejabat pimpinan tinggi daerah yang terlatih	Kota Mataram	60 orang	4.713.933.970	5.279.606.046
4.06.01.01.16.04	Pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi jabatan fungsional bagi ASN Daerah	Jumlah Sumber daya aparatur yang kompeten dalam jabatan fungsional	Kota Mataram	120 orang	1.753.391.700	1.963.798.704
4.06.01.01.16.05	Pendidikan dan pelatihan teknis Umum bagi ASN daerah	Jumlah Sumber daya aparatur yang kompeten dalam bidang kompetensi umum dan pilihan jabatan administrasi	Kota Mataram	270 orng	1.188.627.500	1.331.262.800
4.06.01.01.16.06	Pendidikan dan pelatihan teknis Inti Jabatan bagi ASN Daerah	Jumlah Sumber daya aparatur yang kompeten dalam bidang kompetensi inti jabatan administrasi	Kota Mataram	240 org	1.133.467.864	1.269.484.008
4.06.01.01.16.07	Pendidikan dan pelatihan teknis Perangkat Daerah Penunjang	Jumlah Sumber daya aparatur yang kompeten dalam bidang kompetensi inti jabatan administrasi perangkat daerah penunjang	Kota Mataram	330 orng	2.126.522.900	2.381.705.648
4.06.01.01.16.08	Sertifikasi Kompetensi bagi ASN Daerah	Jumlah Kegiatan yang terlaksana	Kota Mataram	10 keg	1.224.622.400	1.371.577.088
4.06.01.01.16.09	Pengelolaan Kelembagaan dan Pengembangan Kompetensi	Jumlah lembaga yang dilisensi	Kota Mataram	2 lembaga	669.218.000	749.524.160
4.06.01.01.16.10	Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama	Jumlah sumber belajar yang dihasilkan	Kota Mataram	10 modul	503.489.000	563.907.680
4.06.01.01.16.11	Peningkatan Keterampilan dan Profesionalisme	Jumlah Widyaiswara yang Profesional	Kota Mataram	21 org	223.775.000	250.628.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4,07	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				3.488.842.600	3.907.503.712
4.07.01	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				44.268.263.000	49.580.454.560
4.07.01.01	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				44.268.263.000	49.580.454.560
4.07.01.01.27	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	Provinsi NTB	20%	3.488.842.600	3.907.503.712
4.07.01.01.27.01	Penelitian dan pengembangan ekonomi dan wilayah	Tersedianya Hasil Kajian/Penelitian Pengembangan Ekonomi Dan Wilayah Yang Dapat Dijadikan Sebagai Pedoman Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah-Daerah	Kota Mataram	16 Dokumen	1.037.698.500	1.162.222.320
4.07.01.01.27.02	Penelitian dan pengembangan sosial budaya	Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan masukan bagi perencanaan daerah	Kota Mataram	5 dokumen	535.672.000	599.952.640
4.07.01.01.27.03	Penelitian dan pengembangan informasi geospasial	Meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah	Kota Mataram	1 dokumen	398.647.500	446.485.200

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Prakiraan Maju Tahun 2020 (Rupiah)
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rupiah)	
4.07.01.01.27.04	Peningkatan peran serta dewan riset daerah dalam perencanaan pembangunan	meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah	Kota Mataram	1 kegiatan	471.961.000	528.596.320
4.07.01.01.27.05	Pelayanan Ijin Penelitian	tersedianya ijin penelitian	Kota Mataram	1 kegiatan	113.518.600	127.140.832
4.07.01.01.27.06	Publikasi Penelitian Unggulan	Tersedianya Publikasi Unggulan	Kota Mataram	6 laporan	723.500.000	810.320.000
4.07.01.01.27.07	Kerjasama Penelitian	Tersedianya Naskah Kerjasama	Kota Mataram	8 Naskah	207.845.000	232.786.400
TOTAL					3.668.178.139.440	4.108.359.516.173